RENJA
2024

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KAB.KARIMUN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa RENJA akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan yang penganggarannya telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terkait hal tersebut di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun dalam upaya memenuhi pencapaian target dan sasaran kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, sekaligus dalam rangka mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun telah menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 sesuai yang diamanatkan dengan berpedoman pada pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Tim Musrenbang–RKPD mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun Tahun 2024-2026.

Atas tersusunnya Rencana Kerja ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kepeduliannya. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun.

Karimun, Juli 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN

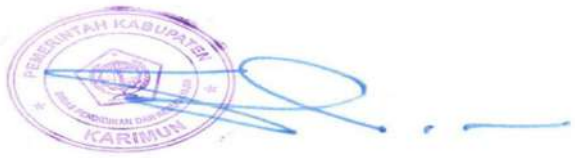

H. SUGIANTO, SS., MM
Pembina TK.I
NIP 19670718 199303 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun 27

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun 35

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 38

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 52

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 58

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun 59

3.3 Program dan Kegiatan 60

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 62

BAB V PENUTUP 134

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL / GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja 3

Tabel T-C.21 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan s.d. Tahun 2024 …… 14

Tabel TC.22 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan……33

Tabel TC.23 Reviu terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025 …….. 39

Tabel T-C.25 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Kabupaten Karimun Tahun 2025 ……..52

Tabel T-C.31 Tujuan dan sasaran rencana kerja perangkat daerah…….61

Tabel T-C.41 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 ...64

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan, suatu Organisasi Perangkat Daerah harus mempunyai Rencana Kerja (RENJA), yang merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah karena beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan tujuan, sasaran dan program prioritas Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. RENJA merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. RENJA OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja OPD pada tahun 2025 yang merupakan tahun kedua dari pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun Tahun 2024-2026.

Mengingat arti strategis dokumen RENJA OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA

OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam RENJA OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum MUSRENBANG.
3. Program dan kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) adalah sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah ini :

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA

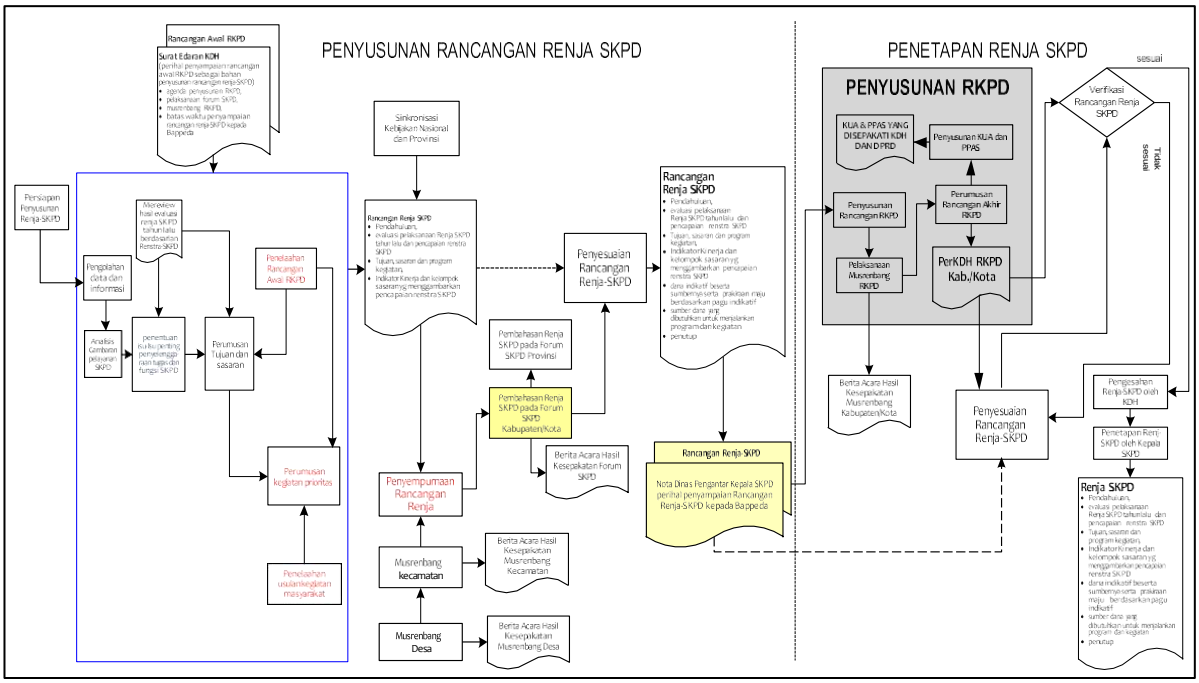

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun Tahun 2025, adalah :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau 53);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 –2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7);

20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 34.b Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penanggung Jawab Pada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38);
22. Keputusan Bupati Karimun Nomor 123_B.b Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja program/kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun Tahun 2025, meliputi :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang dan hubungan antar dokumen, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisannya.

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, analisis hasil laporan kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun tahun 2025.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Menjelaskan

rencana kerja serta pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun pada tahun 2025.

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, Baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan Kebutuhan, kaidah- Kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun Tahun 2024-2026

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun tahun 2023 dan 2024 serta evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun Tahun 2024–2026 yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini merupakan data/informasi tentang akumulasi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun selama tahun 2024-2026 dan perkiraan realisasi tahun 2025 (mengacu target pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025) yang kemudian dibandingkan dengan pencapaian akhir yang diharapkan dari penetapan target kinerja dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun Tahun 2024-2026. Berdasarkan hasil evaluasi ini dapat diketahui program/kegiatan mana yang tidak memenuhi atau memenuhi dan/atau melebihi persentase pencapaian target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar yang mempunyai Dari 2 (dua) urusan wajib pemerintahan yang difungsikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun yakni urusan Pendidikan dan urusan Kebudayaan, pada Tahun 2023 untuk urusan Pendidikan ada 3 (Tiga) program dengan 7 (Tujuh) kegiatan dan 52 sub kegiatan, sedangkan untuk urusan Kebudayaan ada 3 (Tiga) program dengan 5 (Lima) kegiatan dan 10 sub kegiatan. Sedangkan pada Tahun 2024 untuk urusan Pendidikan ada 4 (Empat) program dengan 4 (empat) kegiatan dan 62 sub kegiatan, sedangkan untuk urusan Kebudayaan ada 3 (Tiga) program dengan 5 (lima) kegiatan dan 8 (Delapan) sub kegiatan. Bila dibandingkan tahun 2023–2024 dari segi ketersediaan anggaran, Tahun 2024 jumlah pagu anggaran lebih besar bila di bandingkan dengan tahun 2023.

Pada Tahun Anggaran 2023 yang terurai dalam bentuk kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Karimun, yaitu:

1. Program Pengelolaan Pendidikan, yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan :
   a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah dasar Kabupaten/Kota Tujuan dari kegiatan ini adalah :
      1. Memastikan operasional sekolah berjalan dengan efektif dan efisien
      2. Meningkatkan kualitas pembelajaran
      3. Mendorong inovasi dalam pendidikan dasar
      4. Mengembangkan kepemimpinan yang efektif
      5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala
      6. Membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka
      7. Mempersiapkan siswa untuk masa depan yang sukses
      8. Memastikan proses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

      Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.48.893.899.346 atau 96.43% dari anggaran sebesar Rp.50.701.798.001.

   b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama tujuan dari kegiatan ini adalah:
      1. Membangun karakter dan mental siswa yang beriman, berakhlak, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
      2. Mewujudkan siswa yang aktif dan kreatif
      3. Membekali pendidik dan tenaga kependidikan dengan teori dan praktik yang sesuai dengan administrasi pendidikan

         Mengatasi masalah mutu pendidikan
      4. Memberdayakan sekolah melalui pemberian otonomi kepada sekolah
      5. Mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif
      6. Membina siswa secara berkala sehingga keamanan selalu terjaga
      7. Menjaga kebersihan sekolah setiap pagi sebelum belajar
      8. Menentegakkan ketertiban untuk semua siswa
      9. Menciptakan kekeluargaan demi terciptanya kenyamanan sekolah

      Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.24.098.070.611 atau 96.44% dari anggaran sebesar Rp.24.987.621.168.

c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari tujuan kegiatan ini adalah:

1. Membentuk anak yang berkualitas
2. Memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani
3 Mempersiapkan anak untuk transisi ke sekolah dasar
4 Menanamkan nilai-nilai pendidikan kepada peserta didik
Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.7.165.515.920 atau 115.54% dari anggaran sebesar Rp.6.202.028.179

d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dari kegiatan adalah:

1. Memperluas akses pendidikan dasar dan menengah
2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan kesetaraan
3. Menguatkan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik terhadap penyelenggaraan dan lulusan pendidikan kesetaraan.
4. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh sertifikat setara dengan ijazah formal
5. Memastikan bahwa semua peserta didik memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan mereka sampai ke jenjang yang paling tinggi

Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.117.508.800 atau 10.87% dari anggaran sebesar Rp.1.632.787.738.

2. Program Pengembangan Kurikulum, yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan:

a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

1. Melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal
2. Mengembangkan sumber daya daerah
3. Membentuk dan mengintegrasikan siswa dengan masyarakat
4. Memanfaatkan potensi daerah untuk kepentingan pembangunan daerah
5. Membantu siswa menyadari lingkungan dan masalah-masalah yang ada di masyarakat
6. Membantu siswa mencari pemecahan masalah-masalah yang ada di masyarakat

Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.10.531.000 atau 99.11% dari anggaran sebesar Rp.10.626.000.

b. Penetapan Kurikulum Mualatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

1. Membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya.

2. Melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah
3. Memperluas pengetahuan siswa sesuai dengan kondisi daerahnya
4. Mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan seni yang dimiliki oleh potensi daerah masing-masing
5. Membentuk dan mengintegrasikan pribadi peserta didik dengan masyarakat sekitarnya
6. Melestarikan bahasa dan budaya daerah tempat sekolah tersebut berkembang

Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.20.293.000 atau 99.09% dari anggaran sebesar Rp.20.480.000

3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan:

a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

1. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan mengurangi kesenjangan Pendidikan antar daerah.

Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.111.936.707 atau 93.28% dari anggaran sebesar Rp.119.999.704

4. Program Pengembangan Kebudayaan, yang dijabarkan dalam bentuk bent uk kegiatan;

a. Pengelolaan Kebudyaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota

1. Melestarikan budaya daerah, seperti cagar budaya, museum, dan peninggalan sejarah
2. Mengembangkan budaya tradisional untuk memperkuat jati diri kebudayaan daerah dan nasional
3. Memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat luas
4. Memfasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian
5. Memberikan penghargaan kepada seniman dan kelompok kesenian yang berjasa
6. Menyelenggarakan kegiatan untuk mempromosikan kebudayaan daerah

Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.49.391.113 atau 40.98% dari anggaran sebesar Rp.120.531.812

b. Pelestarian Kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota.

1. Memperkuat nilai-nilai budaya
2. Menumbuhkan rasa cinta tanah air
3. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keanekaragaman budaya

4. Membangun generasi muda yang memiliki jati diri, nilai-nilai luhur, dan rasa kebanggaan akan bangsa
5. Menumbuhkan kecintaan budaya lokal di masyarakat
6. Memanfaatkan unsur budaya secara kreatif
7. Memotivasi generasi muda untuk terlibat aktif dalam melakukan internalisasi nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari

Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.1.171.052.887 atau 87.47% dari anggaran sebesar Rp.1.338.753.406

C. Pembinaan Lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota

1. Melestarikan warisan budaya nenek moyang
2. Menjaga identitas lokal masyarakat
3. Memperkuat dan memperbaharui tradisi dan nilai-nilai adat
4. Mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
6. Menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa

Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.240.237.900 atau 61.54% dari anggaran sebesar Rp.390.370.371

5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional, yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan;

a. Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota bertujuan;

1. Melestarikan warisan budaya
2. Memperkuat nilai-nilai budaya
3. Mengembangkan rasa cinta tanah air
4. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keanekaragaman budaya
5. Membangun rasa memiliki dan kebanggaan terhadap warisan budaya
6. Menjaga warisan budaya agar tetap hidup di tengah perubahan zaman
7. Membangun identitas komunitas
8. Mendorong kreativitas dan inovasi
9. Memperkuat dan menumbuh kembangkan dinamika positif aktivitas seni budaya
10. Memperkokoh kebersamaan

Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.108.490.500 atau 13.30% dari anggaran sebesar Rp.815.896.698

6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan;

   a. Penetapan Cagar budaya peringkat kabupaten/kota bertujuan;

   1. Melestarikan warisan budaya bangsa dan umat manusia
   2. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa
   3. Memperkuat kepribadian bangsa
   4. Memajukan kebudayaan nasional
   5. Menjaga dan melestarikan nilai-nilai historis, budaya, dan artistik

   berlaku, dengan capaian realisasi kegiatan sebesar Rp 34.390.300 atau tercapai 69.84 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 50.000.000

Sedangkan Tahun 2024 baru dapat di lihat pada triwulan I Tahun 2024 yang baru tercapai 17.06%.

Tabel T-C.2.1

Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TA.2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu(2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)								Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan 2024										Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)			Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)			
								Renja		Murni		Pergeseran		Perubahan		I		II		III		IV													
2	3	4	5	7		8		9								10		11		12		13						9+11+12+13					8 + 14		%	
					Rp		Rp		RP		RP		RP		RP		Rp		Rp																
		Derajat Pendidikan Masyarakat	Lama Sekolah	9																														
			Sekolah																															
D		Akses Masyarakat Terhadap Satuan Pendidikan	udayaan berprestasi																															
		ualitas Pelayanan Publik	an Publik																															
			n sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	6																														
		Akses Masyarakat Terhadap Satuan Pendidikan	n pendidikan minimal terakreditasi B	9																														
			dikan tertinggi yang ditamatkan SD sederajat	0																														
D			dikan tertinggi yang ditamatkan SMP sederajat	0																														
		presiasi dan KreatiFitas Seni dan Budaya	i putra/putri daerah																															
			aan /Prestasi yang diperoleh putra / putri daerah																															
		kuntabilitas Kinerja OPD		5																														
		ERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANANDASAR																																
		INTAH BIDANG PENDIDIKAN																																
		ENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	n Masyarakat																															
		enganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	an																															
		umen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah																															
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																															
		Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																															
		uangan Perangkat Daerah																																
		dan Tunjangan ASN	ng Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0																														
		nistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil Penyediaan ksanaan Tugas ASN																															
		enyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan Akhir an Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																															
		pegawaian Perangkat Daerah																														1		
		an Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	akaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan																													0		
		engolahan Administrasi Kepegawaian	i Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan																													0		
		asi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	akaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan																													7		
		elatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	i Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan																													0		
		num Perangkat Daerah																														9		
		ponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ponen enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																													2		
		latan dan Perlengkapan Kantor	alatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan																													7		
		latan Rumah Tangga	alatan Rumah diakan																													6		
		n Logistik Kantor	han Logistik Kantor																													2		
		ng Cetakan dan Penggandaan	ang Cetakan dan ng Disediakan																													9		
		n Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan dang-Undangan yang Disediakan																													9		
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																													2		
		gan Tamu	Fasilitasi Kunjungan																													0		
		ang Milik Daerah Penunjang Urusan erah																														9		

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| | | |

| | | |

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		000,000	**515,920**	**9**	**5,400**	**06,333**	**34**	**00**	**06**	**0**	**78**
	ipasi warga negara usia 5- 6 tahun yang berpart isipasi dalam PAUD										
	pasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaika n pend idikan dasar dan menengah ya ng berpartisipasi da lam pendidika n kesetaraan	**500,000**	**508,800**	**7**	**5,000**	**1,000**	**30**	**00**	**8**	**0**	**87**
ndidikan Sekolah Dasar	**SD minimal en terakreditasi B**	**685,000**	**899,346**	**7**	**3,600**	**84,188**		**15**	**59**	**0**	**94**
g Guru/ Kepala Sekolah/ TU	uru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun t	0,000,000						.65	0	0	15
ustakaan Sekolah	takaan Sekolah yang Telah Dibangun t	4,575,000						.82	0	4	22
rw, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun t	9,515,560						.00	0	4	26
ah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah t Dibangun	0,000,000						.56	0	0	65
Berat Ruang guru/kepala Sekolah/TU	las yang Direhabilitasi Sedang/Berat t	0,000,000						.20	0	0	06
Berat Perpustakaan Sekolah	takaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat t	3,965,000						.20	0	7	10

| | | |

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

ersonil Peserta Didik Sekolah dasar	Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	didik	5,000,000	.10	0		0	17
		t						
ktik dan Peraga Siswa	aktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		5,000,000	.32	0		1	12
Bakat dan Kreativitas Siswa	ang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	didik	0,000,000	.60	0	0	0	80
rir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian ng		5,000,000	.69	0	0	0	74
Sekolah Dasar	Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi							
agaan dan Manajemen Sekolah	lah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan aga Kelembagaan dan manajemen sekolah		0,000,000	.90	0	9	0	26
OS Sekolah Dasar	Dasar yang Mengelola Dana BOS	aga	0,000,000	.67	0		0	62
itas Peningkatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan ng Dana BOS Sekolah Dasar		6,000,000	.23	0		0	48
ratorium Sekolah Dasar	aboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	t	6,369,440	.13	0		7	55
anaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	n Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dmen Bidang Pendidikan			.35	0		0	00
kapan Peserta Didik	kapan Peserta Didik yang Tersedia	didik	0,000,000	-	0	0	0	00

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Proses Belajar PAUD	Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	0,000,000							-		-		0	-	0.00	0	Rp	0.00	0.00
a Personil Peserta Didik PAUD	Didik PAUD yang Menerima Biaya PersonilPeserta Didik	0,000,000							-		-		0	-	0.00	0	Rp	0.00	0.00
ndidikan Nonformal/Kesetaraan	**PKBM minimal terakreditasi B**	5,500,000	**,508,800**	**00,000**	**00,000**	**700,000**	**05,000**	8	**0**	**221,000**	87	2.40	-	0	**53.60**	**0.00**	**14.8**	**Rp**	**16.44**	**6.87** d
oses Belajar Bagi Peserta Didik	idik yang Mengikuti Proses Belajar	0,000,000	0,818,000	050,000	,050,000			-	0		31	1.50		0	11.50	0.00	1202	Rp	20.00	0.99
OP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Non Formal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	5,500,000		,650,000	,650,000	78,650,000		0	2		82	4.00		2	55.35	0.00	2	Rp	20.00	14.26
apasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	0,000,000	6,690,800	000,000	,000,000	5,000,000		-	2		94	7.00		2	47.00	0.00	2	Rp	20.00	44.47
bagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Non Formal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0,000,000						-	-		-			0	-	0.00	0	Rp	0.00	47.62
ngkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	kapan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	5,000,000						-	-		-			0	-	0.00	0	Rp	0.00	0.00
a Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	idik Non Formal/ Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0,000,000						-	-		-			0	-	0.00	0	Rp	0.00	0.00
Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0,000,000						-	-		-			0	-	0.00	0	Rp	0.00	0.00
Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Ruang Kelas/ Ruang al/ Kesetaraan yang Telah it Dibangun	5,000,000						-	-		-			0	-	0.00	0	Rp	0.00	0.00
edang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Ruang Kelas/ Ruang n Non Formal/ Kesetaraan yang it Direhabilitasi Sedang/ Berat	5,000,000						-	-		-			0	-	0.00	0	Rp	0.00	0.00
ang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang it Direhabilitasi Sedang/ Berat	5,000,000						-	-		-			0	-	0.00	0	Rp	0.00	0.00
el Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	didikan Non Formal/ Kesetaraan yang it Tersedia	0,000,000						-	-		-			0	-	0.00	0	Rp	0.00	0.00
t Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	tik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	0,000,000						-	-		-			0	-	0.00	0	Rp	0.00	0.00

| | | |

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah serta target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sesuai yang tertuang dalam RENSTRA-DISDIKBUD tahun 2021 - 2026. Di dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2024–2026,. Atas perencanaan dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan tersebut untuk memenuhi ketentuan yang berlaku harus dilakukan analisis terhadap pencapaian kinerja hasil dan keluaran dari masing- masing program dan kegiatan yang didasarkan pada tolak ukur/indikator kinerja kuncinya.

Sebagai salah satu lembaga teknis pusat layanan Pendidikan serta belajar masyarakat di Kabupaten Karimun, basis layanannya lebih dititikberatkan pada layanan publik yang ditujukan untuk menyediakan layanan informasi pendidikan yang terbuka dan representatif bagi masyarakat Kabupaten Karimun karena Pendidikan merupakan wahana belajar dalam rangka mengembangkan potensi masyarakat yang berilmu, kreatif dan mandiri sementara merupakan identitas dan jati diri bangsa.

Renstra Dinas Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2024- 2026 mempunyai 3 (Tiga) Program urusan Pendidikan, 3 (Tiga) program urusan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Program Pendidikan, yang meliputi kegiatan–kegiatan sebagai berikut :
   a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan sub kegiatan adalah:
      1). Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
      2). Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
      3). Pengadaan Perlengkapan Siswa
      4). Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
      5). Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
      6). Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
      7). Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
      8). Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
      9). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

10) Penambahan Ruang Kelas Baru

11) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

12) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

13) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

14) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

15) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

16) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

17) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

18) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

19) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

20) Pengadaan Mebel Sekolah

21) Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

22) Pembangunan Perpustakaan Sekolah

23) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

24) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

25) Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar

b. Pengelolaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan sub kegiatan adalah:

1. Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
3. Pengadaan Perlengkapan Siswa
4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
5. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
6. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
7. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
8. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
9. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
10. Penambahan Ruang Kelas Baru
11. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

12. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
13. Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
14. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
15. Pembangunan Kantin Sekolah
16. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
17. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
18. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU
19. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah
20. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
21. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
22. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
23. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
24. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
25. Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
26. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
27. Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
28. Pengadaan Mebel Sekolah
29. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
30. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
31. Pembangunan Laboratorium
32. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

C. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan sub kegiatan adalah:

1. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
3. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
5. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
6. Pengelolaan Dana BOP PAUD
7. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
8. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
9. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
10. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

11. Pengadaan Mebel PAUD
12. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
13. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

D. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan, Meliputi Sub Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
3. Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
5. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
6. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
7. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan
8. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
9. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
10. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
11. Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
12. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
13. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan

2. Program Pengembangan Kurikulum, yang meliputi kegiatannya adalah :

a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dengan sub kegiatan yaitu
   1. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
   1. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang meliputi kegiatannya yaitu :
   a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yaitu:
      1). Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

1. Program Pengembangan Kebudayaan , yang meliputi kegiatannya yaitu:
   a. Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, meliputi sub kegiatan:
      1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
      2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan pranata Kebudayaan
   b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan:
      1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi budaya
      2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan pranata Tradisional
      3. Pemberian Penghargaan kepada pihak kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusi dalam pemajuan kebudayaan
   c. Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya dalam daerah Kabupaten/Kota
      1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
      2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat
      3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat

2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional,Meliputi Kegiatannya yaitu:
   a. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan yaitu :
      1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional.

2. Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan.
3. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya , meliputi sub kegiatan

a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota:

1. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
2. Penetapan Cagar Budaya

b. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

1. Pelindungan Cagar Budaya
2. Pengembangan Cagar Budaya
3. Pemanfaatan Cagar Budaya

Sedangkan kegiatan layanan prioritas nasional yang disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa :

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
2. Pengelolaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
5. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
6. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Realisasi capaian kinerja pelayanan DISDIKBUD Kabupaten Karimun tahun 2023 dan 2024, proyeksi capaian kinerja pelayanan tahun 2025 dan 2026, secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 2.2

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TABEL T-C.2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan 2024; Proyeksi Tahun 2025 dan 2026

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun

Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	SPM	IKK	Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi (Target)	
							2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah		-	-		12,90	13,10	13,30	13,50	12,61	-		
		Rata-rata Lama Sekolah		-	-		8,60	8,75	8,90	9,00	8,69	-		
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Satuan Pendidikan	-	-	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	196,65	198,06	198,06	198,06	193,97	-		
						Persentase satuan pendidikan minimal terakreditasi B	74,07%	80,61%	82,15%	86,19%	70,28%	-		
						Persentase pendidikan tertinggi yang	29,40%	29,00%	28,60%	28,20%	32,30%	-		

						ditamatkan SD sederajat								
						Persentase pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMP sederajat	18,10%	17,90%	17,70%	17,50%	18,36%	-		
	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Nilai Budaya Daerah	Rasio SDM kebudayaan berprestasi		-	-		22,50	30,00	40,00	52,50	42,50	-		
			Meningkatnya Apresiasi dan Kreatifitas Seni dan Budaya	-	-	Jumlah karya seni putra/putri daerah	13	15	17	19	10	-		
						Jumlah Penghargaan / Prestasi yang diperoleh putra / putri daerah	16	18	20	22	17	-		
	Meningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik		-	-		3,50	3,51	3,55	4,00	27,40	-		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	-	-	Nilai AKIP	75,50	75,75	76,00	76,25	50,00	-		

Dari uraian capaian indikator kinerja kemudian indikator kinerja tersebut dibuat berdasarkan pencapaian sasaran kinerja dari setiap indikator sasaran layanan bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang bisa diukur seperti persentase satuan pendidikan, indeks pelayanan publik, maupun rasio ketersediaan sekolah,rasio SDM kebudayaan dan lain sebagainya yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga teknis penyedia layanan publik bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan realisasi pencapaian indikator sasaran diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 terjadi capaian realisasi melebihi target kinerja yang ditetapkan dan ada juga dibawah target yang dicapai. Selain itu dapat dijabarkan bahwa minimnya alokasi anggaran untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2023 dan 2022 merupakan kendala yang dapat diatasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pencapaian hasil Indikator sasaran untuk urusan Pendidikan dan Kebudayaan namun tidak pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dimana keterbatasan anggaran telah berpengaruh langsung terhadap pembinaan sejumlah OPD dalam menerapkan pelayanan dan pembangunan sekolah maupun jumlah kegiatan untuk peningkatan SDM Pendidikan dan Kebudayaan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Bidang-Bidang per urusan dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Secara umum, permasalahan pendidikan di Kabupaten Karimun dapat diklasifikasikan ke dalam 3 unsur, yaitu 1) Individu Guru dan Tenaga Kependidikan; 2) Individu Siswa; dan 3) Individu Sarana dan Prasarana Pendidikan, dengan uraian sebagai berikut :

1. **Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)**
    - Belum semua Guru (pendidik) dan tenaga kependidikan memenuhi standard kualifikasi pendidikan minimal S1/D.IV (Strata 1/ Diploma IV);
    - Belum semua guru menguasai mata pelajaran tertentu dikarenakan kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diajarkan tidak linier;
    - Belum semua guru telah memiliki sertifikat pendidik;
    - Masih kurangnya tenaga guru di jenjang pendidikan dasar. Yang beradadi daerah *hinterland*;
    - Sulitnya memenuhi persyaratan jabatan fungsional guru bagi guru yang baru diangkat dan guru yang melakukan penyesuaian ijazah;
    - Belum terpenuhinya persyaratan tenaga kependidikan (laboran dan pustakawan).
2. **Siswa**
    - Masih terdapat peserta didik yang putus sekolah karena keadaan ekonomi keluarga;
    - Masih adanya siswa Sekolah Dasar (SD) yang tidak melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dikarenakan letak geografis sekolah yang dituju dan keadaan ekonomi keluarga;
    - Masih terdapatnya siswa yang terjerumus pada penggunaan narkoba dan terlibat kenakalan remaja;
    - Masih rendahnya prestasi siswa pada bidang akademik, olahraga dan seni budaya;
3. **Sarana dan Prasarana Pendidikan**
    - Masih terdapat sekolah yang kekurangan ruang kelas dikarenakan rombongan belajar melebihi jumlah ruang kelas yang ada sehingga terjadi double shift (sekolah pagi dan sore);

- Masih kurangnya ketersediaan rumah dinas bagi Guru (pendidik) dan tenaga kependidikan, terutama didaerah *hinterland*. Hal ini berakibat kurangnya jumlah Guru dan tenaga kependidikan di daerah-daerah *hinterland*;
- Kurangnya ruang penunjang lainnya seperti perpustakaan, laboratorium, ruang UKS dan jamban dalam menunjang proses pembelajaran;
- Masih kurangnya sarana pendukung pembelajaran seperti alat peraga dan peralatan TIK;
- Masih ada beberapa sekolah dengan lahan terbuka yang terbatas, sehingga sulit untuk dibangun sarana-sarana olahraga dan pendukung lainnya guna meningkatkan kualitas pembelajaran;
- Masih kurangnya sarana penunjang keamanan sekolah seperti pagar untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban serta masih adanya sekolah yang halamannya belum memiliki pavingblock demi kenyamananwarga sekolah;

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, dapat diidentifikasi beberapa tantangan penting yang akan dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Karimun, diantaranya sebagai berikut :

- Menyediakan Guru yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata;
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas yang meratadi seluruh Kecamatan;
- Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas tanpa membedakan status ekonomi, gender dan wilayah;
- Mengembangkan dan menerapkan sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan mengintegrasikan pendidikan karakter dan keagamaan serta kewirausahaan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- Mewujudkan manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional dan transparan dengan mengedepankan konsep manajemen berbasis sekolah.

- Menyediakan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran nonformal berkualitas yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Karimun;
- Menjadikan satuan pendidikan dengan akreditasi sangat baik;
- Mewujudkan manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional dan transparan dengan mengedepankan konsep manajemen berbasis sekolah.

Arah kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Karimun perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan terobosan sesuai dengan tuntutan perkembangan secara keseluruhan baik nasional, regional maupun internasional. Hal ini perlu dilakukan agar visi untuk menjadikan masyarakat Kabupaten Karimun yang memiliki daya saing dapat dicapai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa penyusunan rencana kerja harus mengacu pada Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan RENSTRA Perangkat Daerah. Hal ini penting untuk menjaga kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang harus disusun. Kemudian perlu dilakukan sinkronisasi dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten Karimun, untuk dilakukan review agar diperoleh kesesuaian atau relevansinya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel. 2.3

Review terhadap RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun

No.			RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS HASIL KEBUTUHAN		Catatan Penting
			Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1			2	3	4	5	6	10	11	12
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							**4.514.527.465**		**4.514.527.465**	
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**DISDIKBUD KAB.KARIMUN**	**Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah**	**100%**	**4.073.327.465**	**100%**	**4.073.327.465**	
	1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**DISDIKBUD KAB.KARIMUN**	**Jumlah Dokumen**	**8 Dokumen**	**149.000.000**	**8 Dokumen**	**149.000.000**	
		1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**DISDIKBUD KAB.KARIMUN**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	65.000.000	3 Dokumen	65.000.000	
		1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**DISDIKBUD KAB.KARIMUN**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	56.000.000	3 Laporan	56.000.000	

		1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**DISDIKBUD KAB.KARIMUN**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	28.000.000	2 Laporan	28.000.000	
	2.	**Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**DISDIKBUD KAB.KARIMUN**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**188.263.317.720**	**1 Laporan**	**188.263.317.720**	
		2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2122 Orang/bulan	184.634.706.090	2122 Orang/bulan	184.634.706.090	
		2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1 Dokumen	3.575.611.630	1 Dokumen	3.575.611.630	
		2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	53.000.000	1 Laporan	53.000.000	
	3.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**DISDIKBUD KAB.KARIMUN**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**289.000.000**	**1 Laporan**	**289.000.000**	
		0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	109.000.000	1 Paket	109.000.000	
		0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	76.000.000	2 Dokumen	76.000.000	
		0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	56.000.000	1 Dokumen	56.000.000	

		0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Pegawai	48.000.000	16 Pegawai	48.000.000	
	4.	**Administrasi Umum Perangkat daerah**		**DISDIKBUD KAB.KARIMUN**	**Jumlah Laporan**	**1 laporan**	**703.224.280**	**1 laporan**	**703.224.280**	
		0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.220.000	1 Paket	12.220.000	
		0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	83.053.600	1 Paket	83.053.600	
		0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19.967.680	1 Paket	19.967.680	
		0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	83.507.000	1 Paket	83.507.000	
		0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	83.476.000	2 Paket	83.476.000	
		0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	53.000.000	10 Dokumen	53.000.000	

		0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	23.000.000	1 laporan	23.000.000	
		0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	2 Laporan	345.000.000	2 Laporan	345.000.000	
	5.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**DISDIKBUD KAB.KARIMUN**	**Jumlah Laporan**	**1 laporan**	**588.856.000**	**1 laporan**	**588.856.000**	
		0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Paket	20.000.000	20 Paket	20.000.000	
		0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	10 Unit	140.000.000	10 Unit	140.000.000	
		0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	7 Unit	428.856.000	7 Unit	428.856.000	
	6.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**DISDIKBUD KAB.KARIMUN**	**Jumlah Laporan**	**1 laporan**	**45.887.210.000**	**1 laporan**	**45.887.210.000**	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.000.000	1 Laporan	8.000.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	33.000.000	2 Laporan	33.000.000	

			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	14.500.000	2 Laporan	14.500.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	45.831.710.000	12 Laporan	45.831.710.000	
	7.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**DISDIKBUD KAB.KARIMUN**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**67.000.000**	**1 Laporan**	**67.000.000**	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	33.000.000	5 Unit	33.000.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	11.000.000	10 Unit	11.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	23.000.000	1 Unit	23.000.000	
	8.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**DISDIKBUD KAB.KARIMUN**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**112.000.000**	**1 Laporan**	**112.000.000**	
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	56.000.000	1 Laporan	56.000.000	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	56.000.000	1 Laporan	56.000.000	

A.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**								
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		**DISDIKBUD KAB.KARIMUN**	**Persentase SD minimal terakreditasi B**	**92,81%**	**37.847.892.000**	**92,81%**	**37.847.892.000**	
	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	
	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4 Ruang	1.080.000.000	4 Ruang	1.080.000.000	
	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang	5 Ruang	525.000.000	5 Ruang	525.000.000	
	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah	5 Unit	1.022.620.000	5 Unit	1.022.620.000	
	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	833.820.000	5 Unit	833.820.000	
	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	895.000.000	4 Unit	895.000.000	
	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	4 Ruang	665.000.000	4 Unit	665.000.000	
	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	248.452.000	4 Ruang	248.452.000	
	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	160.000.000	1 Unit	160.000.000	
	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	680.000.000	5 Unit	680.000.000	
	0014	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel sekolah yang tersedia	20 unit	815.000.000	20 unit	815.000.000	

		0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	30.000.000	1 Unit	30.000.000	
		0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Siswa	1.030.000.000	1 Siswa	1.030.000.000	
		0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	350 Satuan Pendidikan	430.000.000	350 Satuan Pendidikan	430.000.000	
		0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi.	300 Satuan Pendidikan	930.000.000	300 Satuan Pendidikan	930.000.000	
		0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	139 Satuan Pendidikan	106.000.000	139 Satuan Pendidikan	106.000.000	
		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	139 Satuan Pendidikan	23.000.000.000	139 Satuan Pendidikan	23.000.000.000	
		0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	139 Satuan Pendidikan	158.000.000	139 Satuan Pendidikan	158.000.000	
		0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5 Ruang	1.425.000.000	5 Ruang	1.425.000.000	

		0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	60 Dokumen	600.000.000	60 Dokumen	600.000.000	
		0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang tersedia	100 Peserta Didik	80.000.000	100 Peserta Didik	80.000.000	
		0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	1.135.000.000	5 Ruang	1.135.000.000	
		0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	159.000.000	2 Unit	159.000.000	
		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	139 Satuan Pendidikan	605.000.000	139 Satuan Pendidikan	605.000.000	
		0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah Direhabilitasi sedangBerat	7 Ruang	1.205.000.000	7 Ruang	1.205.000.000	
	2.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**		**DISDIKBUD KAB.KARIMUN**						
		0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	
		0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	460.000.000	3 Ruang	460.000.000	
		0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	305.000.000	3 Ruang	305.000.000	

		0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 ruang	765.000.000	3 ruang	765.000.000	
		0006	Pembangunan Laboratorium		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	6 ruang	765.000.000	6 ruang	765.000.000	
		0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	3 ruang	915.000.000	3 ruang	915.000.000	
		0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala sekolah/guru penjaga Sekolah		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	3 ruang	512.000.000	3 ruang	512.000.000	
		0011	Pembangunan Kantin Sekolah		Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	2 unit	512.000.000	2 unit	512.000.000	
		0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	715.000.000	10 Unit	715.000.000	
		0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasisedang/berat	8 Ruang	815.000.000	8 Ruang	815.000.000	
		0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan sekolah yang telah Direhabilitasi	3 Ruang	309.000.000	3 Ruang	309.000.000	
		0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah Direhabilitasisedang/berat	2 unit	359.000.000	2 unit	359.000.000	
		0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	510.000.000	3 Unit	510.000.000	

		0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	310.000.000	2 Ruang	310.000.000	
		0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Jumlah Rumah Dinas kepala sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	510.000.000	3 Unit	510.000.000	
		0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah		Jumlah Kantin Sekolah yang direhabilitasi sedang /Berat	2 Unit	310.000.000	2 Unit	310.000.000	
		0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	715.000.000	10 Unit	715.000.000	
		0025	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Unit	515.000.000	10 Unit	515.000.000	
		0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 unit	75.000.000	1 unit	75.000.000	
		0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	14 Peserta Didik	116.000.000	14 Peserta Didik	116.000.000	
		0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Siswa	815.000.000	4 Siswa	815.000.000	
		0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Siswa	730.000.000	500 Siswa	730.000.000	

		0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 pendidik	815.000.000	200 pendidik	815.000.000	
		0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	53 Sekolah	56.000.000	53 Sekolah	56.000.000	
		0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	40 Sekolah	12.000.000.000	40 Sekolah	12.000.000.000	
		0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	40 Pendidik	115.000.000	40 Pendidik	115.000.000	
		0052	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	21 Dokumen	250.000.000	21 Dokumen	250.000.000	
		0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	10489 Peserta didik	632.000.000	10489 Peserta didik	632.000.000	

		0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	610.000.000	3 Ruang	610.000.000	
		0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	200 Peserta didik	109.000.000	200 Peserta didik	109.000.000	
		0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	921.000.000	7 Ruang	921.000.000	
	3.	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**		**DISDIKBUD KAB.KARIMUN**	Persentase PAUD minimal terakreditasi B	**57,34%**	**6.808.000.000**	**57,34%**	**6.808.000.000**	
		0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah dibangun	4 Unit	615.000.000	4 Unit	615.000.000	
		0003	Rehabilitasi sedang/berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	715.000.000	6 Ruang	715.000.000	
		0004	Rehabilitasi sedang/berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 unit	390.000.000	5 unit	390.000.000	
		0007	Pengadaan Mebel PAUD		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	8 unit	160.000.000	8 unit	160.000.000	
		0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	100 Unit	106.000.000	100 Unit	106.000.000	
		0011	Penyediaan Biaya personil Peserta Didik PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	120 Peserta Didik	180.000.000	120 Peserta Didik	180.000.000	

		0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3 Siswa	66.000.000	3 Siswa	66.000.000	
		0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	5244 Peserta didik	215.000.000	5244 Peserta didik	215.000.000	
		0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi KenaikanPangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 orang	615.000.000	150 orang	615.000.000	
		0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	153 Satuan Pendidikan	110.000.000	153 Satuan Pendidikan	110.000.000	
		0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	153 Satuan Pendidikan	2.904.000.000	153 Satuan Pendidikan	2.904.000.000	
		0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	153 Satuan Pendidikan	112.000.000	153 Satuan Pendidikan	112.000.000	
		0028	PembangunanRuang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	215.000.000	1 Ruang	215.000.000	
		0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang	1 Ruang	215.000.000	1 Ruang	215.000.000	
		0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 unit	190.000.000	1 unit	190.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang melayani kepentingan masyarakat dalam urusan Pendidikan dan kebudayaan maka para pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan langsung dengan Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Karimun adalah jumlah sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang telah dibangun dan jumlah alat praktik dan peraga siswa masih banyak kekuarangan.

Sedangkan untuk tahun 2024 usulan yang berasal dari masyarakat dan pemangku kepentingan umumnya berupa tersedianya layanan Pendidikan keliling ke sekolah-sekolah dan usulan lainnya yaitu berupa penambahan sarana prasarana yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Karimun.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Kabupaten Karimun Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	karimun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah

Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun mendukung pencapaian Visi Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2021, sehingga Dinas Pendidikan mengusung Visi "**Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa**" dengan titik berat pencapaian Visi melalui pelaksanaan Misi Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2021.

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Misi memperjelas apa saja yang harus dilakukan (*what have to be done*) dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Karimun, maka dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi. Adapun yang menjadi fokuspencapaian Misi dan berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan adalah **Misi Ke-5**. Adapun Misi Kabupaten Karimun, adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Mandiri Berbasis Sumber Dayadan Kearifan Lokal (Berkeadilan Dalam Bidang Ekonomi);
2) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan Dalam RangkaMempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (Berkeadilan Dalam Infrastruktur);
3) Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa (Berkeadilan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia);
4) Meningkatkan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup (Berkeadilan DalamMelestarikan Lingkungan Hidup);
5) Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul (Berkeadilan DalamPelayanan Publik).

Untuk mewujudkan visi, misi dan prioritas pembangunan Kabupaten Karimun juga dijunjung slogan "**BERSIH**" yaitu; "**Beriman, Sehat, Indah dan Harmonis**". Bersih dalam hal ini baik secara lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, baik bersih dalam dimensi lahir maupun bathin. Dimana untuk menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terdepan pasti memiliki dampak

lingkungan baik fisik maupun sosial, sehigga Kabupaten Karimun harus dibawa untuk mempersiapkan diri baik secara fisik, sosial maupun landasan spiritual.

Sosial, baik bersih dalam dimensi lahir maupun bathin. Dimana untuk menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terdepan tentunya memiliki dampak lingkungan baik fisik maupun sosial, sehigga Kabupaten Karimun harus dibawa untuk mempersiapkandiri baik secara fisik, sosial maupun landasan spiritual.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Karimun tertuang dalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun2021 – 2026. Terkait dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Karimun maka sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun memiliki peranan penting dalam melaksanakan Misi ke-4 yaitu Membangun Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Kompetitif Serta Menjawab Kebutuhan Daerah. "Sumber daya manusia yang sehat, cerdas"adalah sumber daya manusia yang secara fisik jasmani sehat, serta memiliki penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk itu, dua sektor utama yang paling berperan guna membangunnya adalah sektor kesehatan dan pendidikan. "Kompetitif" dimaksudkan sebagai sumber daya manusia yang dapat bersaing dengan angkatan kerja pendatang, khususnyapada posisi-posisi yang membutuhkan keterampilan sedang hingga tinggi.Dengan semakin terbukanya Kabupaten Karimun, ditambah lagi dengan pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015, maka membangun daya saing angkatan kerja lokal menjadi semakin mutlak untuk dikedepankan. "Menjawab kebutuhan daerah" dimaksudkan sebagai standar kualifikasi angkatan kerja yang dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja darisektor-sektor yang berkembang dan akan dikembangkan

di Kabupaten Karimun. Diantara sektor – sektor tersebut, penekanan khusus perlu diberikan padam kebutuhan dari sektor industri manufaktur, perikanan, perkebunan, dan pertanian tanaman pangan. Termasuk dari "menjawab kebutuhan daerah" adalah berkembangnya wirausahawan-wirausahawan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri baik pada sektor industri pengolahan, perikanan, perkebunan, maupun pertanian tanaman pangan.

Selain untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang tergambar dalam Visi Pembangunan Kabupaten Karimun, pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Karimun juga memperhatikan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang merupakan upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, khususnya Pembangunan pendidikan nasional. Untuk mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai Visi 2025 untuk menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil / Insan Paripurna), adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis.

Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Karimun Tahun 2020 jugamemperhatikan isu-isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah, diantaranya upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Karimun, Standar Pelayanan Minimum (SPM), Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah dengan Memanfaatkan Fasilitas sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas, Pengentasan Kemiskinan, serta Peningkatan kualitas Lembaga Pendidikan, Kualitas Guru (Pendidik) dan Tenaga Kependidikan serta Kualitas Peserta Didik, terutama di daerah *hinterland*. Hal ini perlu dan penting menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun mengingat Kabupaten Karimunmerupakan salah satu daerah di Indonesia yang masuk dalam Kategori 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) dan berbatasan langsung dengan Negara yang sudah maju dan tinggi kualitas pendidikannya yaitu Singapura.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Karimun dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026, maka tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun diuraikan sebagaimana Tabel 3.1.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat		Angka Harapan Lama Sekolah	13,30
			Rata-rata Lama Sekolah	8,90
		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Satuan Pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	198,06
			Persentase satuan pendidikan minimal terakreditasi B	82,15%
			Persentase pendidikan tertinggi yang ditamatkan SD sederajat	28,60%
			Persentase pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMP sederajat	17,70%
2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Nilai Budaya Daerah		Rasio SDM kebudayaan berprestasi	40,00
		Meningkatnya Apresiasi dan Kreatifitas Seni dan Budaya	Jumlah karya seni putra/putri daerah	17
			Jumlah Penghargaan / Prestasi yang diperoleh putra / putri daerah	20
3	Meningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	3,55
		Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai AKIP	76,00

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Karimun.

Adapun program dan kegiatan Urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang diorientasikan pada layanan publik dan sesuai dengan Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan , yang terdiri dari kegiatan :
   a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan sub kegiatan yaitu :
      1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
      2) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
      3) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
      4) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
      5) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
      6) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
      7) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
      8) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
      9) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
      10) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
      11) Pengadaan Mebel Sekolah
      12) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
      13) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
      14) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
      15) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
      16) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
      17) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
      18) Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
      19) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
      20) Pengembangan konten digital untuk Pendidikan
      21) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
      22) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidika
      23) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk

24) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

25) Pembangunan Ruang Kelas Baru

26) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

27) Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

28) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

29) Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus

30) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

31) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
2) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
3) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
4) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
5) Pembangunan Laboratorium
6) Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
7) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
8) Pembangunan Kantin Sekolah
9) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
10) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
11) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
12) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
13) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
14) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
15) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
16) Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekola
17) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
18) Pengadaan Mebel Sekolah
19) Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
20) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
21) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
22) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
23) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
24) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
25) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
26) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
27) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
28) Pengembangan konten digital untuk Pendidikan
29) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
30) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
31) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
32) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

33) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
34) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
35) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
36) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
37) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
38) Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
39) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

c. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraandengan sub kegiatan yaitu :

1) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
2) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
3) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
4) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
5) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
6) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
7) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
8) Pengembangan konten digital untuk pendidikan
9) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
10) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
11) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
12) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
13) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
14) Pembangunan Ruang Kelas Baru
15) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
16) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
17) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB
18) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
19) Pengadaan Mebel Sekolah
20) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
21) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan
22) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
23) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
24) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
25) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
26) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
27) Pengelolaan Dana BOP PAUD
28) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
29) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
30) Pengembangan konten digital untuk Pendidikan
31) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
32) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

33) Pembangunan Ruang Kelas Baru
34) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB
35) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
36) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
37) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
38) Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
39) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

d. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan sub kegiatan yaitu :

1) Pengadaan Mebel PAUD
2) Pengadaan Perlengkapan PAUD
3) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
4) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
5) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
6) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
7) Pengelolaan Dana BOP PAUD
8) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
9) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
10) Pengembangan konten digital untuk Pendidikan
11) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
12) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
13) Pembangunan Ruang Kelas Baru
14) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB
15) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
16) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
17) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
18) Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
19) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

2. Pogram program pengembangan kurikulum, yang terdiri dari kegiatan :

a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan sub kegiatannya yaitu:

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatannya yaitu:

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatannya yaitu:

1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi perangkat daerah yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi perangkat daerah sebagai pelaksana program, Renja Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025, diharapkan dana yang tersedia benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu perangkat daerah juga membuat rencana aksi dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan Renja Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang dalam OPD, OPD dengan perangkat daerah lainnya, maupun OPD dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi,akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Untuk jelasnya rencana kerja dan pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat kita lihat pada tabel TC 33 berikut:

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan beserta pagu indikatif tahun 2025 prakiraan maju rencana tahun 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten karimun

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						420.534.737.234,00							311.975.000.000,00	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						83.205.917.838,00							74.230.392.000,00	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						83.205.917.838,00							74.230.392.000,00	
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	*Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar*	Persen Persen Persen Persen			Persen 60,08 Persen 89,03 Persen 95,97 Persen	82.845.917.438,00						Persen Persen Persen Persen	73.806.392.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase SD Minimal Terakreditasi B*				24 Persen	38.149.443.000				Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Siswa		37.817.892.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				140 Unit		Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	Siswa		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				4 Ruang	180.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	Siswa		1.030.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	bangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				5 Ruang	70.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Tanjung balai Kota	ENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG		Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerinta	Siswa		520.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

										DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		h an Inovatif				
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				5 Ruang	150.000.000,00	Karimun, Kundur, Sei Ungar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD		Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Siswa		1.022.620.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	.02.2.01.0006	pangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	1.230.000.000,00	Karimun, Kundur Barat, Sawang	ENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK K-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD		Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Siswa		833.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	.02.2.01.0007	bangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	130.00.000,00	Karimun, Karimun, Lubuk Semut	K-BIDANG P ENDIDIKAN-REGULER-SD		Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Siswa		890.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	.02.2.01.0009	bilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	100.000.000,00	Karimun, Karimun, Tanjung balai	K-BIDANG P ENDIDIKAN-REGULER-SD		Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Siswa		665.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					4 Ruang	65.000.000,00	Karimun, Karimun, Tanjungbalai Kota	DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			248.452.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
02.2.01.0011	bilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					2 Ruang	100.000.000,00	Karimun, Karimun, Tanjungbalai Kota	ENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD		Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
02.2.01.0013	bilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
	h Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat						100.000.000,00	Karimun, Moro, Moro	ENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD		Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			680.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
02.2.01.0014	adaan Mebel Sekolah														

			h Mebel sekolah yang Tersedia				20 Paket	1.450.000.000,00	Karimun, Kundur, Tanjungb atu Barat	APATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTU KAN P ENGGUNA ANN YA BIDANG PENDIDIK AN		Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif			815.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	02.2.01.0025	inaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			h Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				40 Peserta Didik	200.000.000,00	Karimun, Karimun, Tanjungb alai Kota	APATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTU KAN P ENGGUNA ANN YA BIDANG PENDIDIK AN		Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif			45000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	02.2.01.0026	diaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				rang	70.000.000,00	Karimun, Kundur Utara, Sei Ungar Utara	YANG DITENTU KAN P ENGGUNA ANN YA BIDANG PENDIDIK AN		Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	02.2.01.0027	embangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														

KODE		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						ELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				300 Orang	150.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai Kota	ENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Siswa		935.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	02.2.01.0028	inaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				40 Satuan Pendidikan	70.000.000,00	Karimun, Karimun, Tanjungbalai Kota	NDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			101.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	02.2.01.0029	elolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				40 Satuan Pendidikan	30.457.700.000,00	Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	NON FISIK-BOS LER, DAK NON-DANA BOSP-BOS REGULER, DAK NON-DANA BOSP-BOS KINERJA		Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			23.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	02.2.01.0030	gkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				40 Orang	86.000.000,00	Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	NDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			158.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	02.2.01.0031	angunan Laboratorium Sekolah Dasar														

			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				9 Ruang	180.000.000,00	Karimun, Tebing, Tebing	NDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTU KAN P ENGGUNA ANN YA BIDANG PENDIDIK AN, DAK -BIDANG P ENDIDIKA N-RE GULER-SD		Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif			1.425.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	.02.2.01.0035	pinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan															

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KE	KIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				40 Orang	146.743.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Tanjungberlian Kota	ENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		mbangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Siswa		10.000.000	INAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	.02.2.01.0036	embangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				Konten Digital	100.000.000,00	Karimun, Meral, Sei Raya	YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		bangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Siswa		5.000.000	S PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	02.2.01.0037	han Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				40 Orang	100.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Tanjungbatu Barat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	bangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Siswa		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				3 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai Kota	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	angunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Siswa		600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	34.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	angunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Siswa		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				4815 Paket	1.000.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	bangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Siswa		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	02.2.01.0047	angunan Ruang Kelas Baru														

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	180.000.000,00	Karimun, Karimun, Tanjungbalai Kota	APATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK -BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD		bangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	02.2.01.0048	bilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	220.000.000,00	Karimun, Kundur, Tanjungbatu Kota	APATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK -BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD		bangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	02.2.01.0050	lenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				140 Satuan Pendidikan	80.000.000,00	Karimun, Karimun, Tanjungbalai Kota	YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		bangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Siswa			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	02.2.01.0051	bilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Ruang	150.000.000,00	Karimun, Karimun, Sungailakam Barat	APATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK -BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD		Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Siswa			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	02.2.01.0053	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus													
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun				1 Ruang	150.000.000,00	Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	APATAN ASLI DAERAH (PAD)		bangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Siswa			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													

	KODE		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				Peserta Didik	50.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai Kota	AU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		bangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	Siswa			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				10 Paket	1. 050.000.000	Kab. Karimun, Karimun, Lubuk Semut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKANPENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK -BIDANG PENDIDIKAN- RE GULER-SD		Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Siswa			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase SMP Minimal Terakreditasi B*				87.00 Persen	373.657.000,00				bangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Kab. Karimun, Tebing, Pongkar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				3 Ruang	1.080.000.000	. Karimun, Karimun, Tanjungbalai	ENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK K-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP		Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	SISWA			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	.02.2.02.0004	bangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	500.000.000	Karimun, Karimun, Tanjungbalai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK -BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP		Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	1.250.000.000	Karimun, Kundur, Tanjungbatu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK -BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP		Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium													
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				6 Ruang	1.250.000.000	Karimun, Karimun, Tanjungbalai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK -BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP		Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula													
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				3 Ruang	1.000.000.000	Kab. Karimun, Kundur, Tanjungbatu Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK -BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP		Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah													

NO	KODE		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	520.000.000	Karimun, Kundur Utara, Tanjungberlian Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK -BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP		embangu nan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	SISWA		512.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	02.2.02.0011	bangunan Kantin Sekolah														
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	400.000.000	Karimun, Kundur, Tanjungbatu Kota	APATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK -BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP		embangu nan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	SISWA		512.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	02.2.02.0012	angunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				12 Unit	935.000.000	Karimun, Kundur Utara, Tanjungberlian Kota	APATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK -BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP		bangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	SISWA		715.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	02.2.02.0014	bilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Ruang	2.850.000.000	Karimun, Kundur, Tanjungbatu Kota	APATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK -BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP		embangu nan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	SISWA		815.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	.02.2.02.0016	abilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN				CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	IRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		NGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			ARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			JumlahRuang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				Ruang	300.000.000,00	Karimun, Meral, Meral Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP		mbangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	SISWA			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				Ruang	300.000.000,00	Karimun, Kundur, Tanjungbatu Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),DAU YANG DITENTUKANPENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAKFISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP		mbangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	SISWA			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	.02.2.02.0018	bilitasi Sedang/Berat Laboratorium													
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				Ruang	600.000.000,00	Karimun, Karimun, Tanjungbalai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKANP ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIk BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP		mbangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	SISWA			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	.02.2.02.0019	bilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula													
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				Ruang	300.000.000,00	Karimun, Kundur, Sei Ungar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK K-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP		mbangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	SISWA			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	.02.2.02.0021	bilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah													

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	KODE		KATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					300.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Tanjungberlian Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK -BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP		Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif				PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	02.2.02.0023	litasi Sedang/Berat Kantin Sekolah														
			Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat					150.000.000,00	Kab. Karimun, Meral, Sei Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP		nbangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				Unit	270.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Tanjungbatu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP		nbangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif				PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														

			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				Paket	650.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Kundur	PATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP		ngu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif				PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah														

	KODE		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				Paket	150.000.000,00	Karimun, Kundur, Tanjungbatu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK -BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP		Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	SISWA		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				Peserta Didik	50.000.000,00	Karimun, Karimun, Tanjungbalai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	SISWA		111.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	inaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				Peserta Didik	335.000.000,00	Karimun, Kundur, Tanjungbatu Barat	APATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		730.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	02.2.02.0039	diaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama															
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				Orang	70.000.000,00	Karimun, Tebing, Kapling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		5.000.000,00	S PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	02.2.02.0040	embangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama															
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	70.000.0,00	Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	APATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		angu nan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		810.000.000,00	S PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	02.2.02.0041	inaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah															

	KODE		INDIKATORPROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGETRENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				Satuan Pendidikan	100.339.000,00	Karimun, Kundur Utara, Sei Ungar Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		56.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				Satuan Pendidikan	16.806.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	NON FISIK-BOS LER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA, DAK NON-DANA BOSP-BOS REGULER		Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		12.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				4 Orang	175.000.000,00	Karimun, Kundur, Tanjungbatu Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				4 Orang	82.157.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIK		Pembangu nan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	SISWA		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

										AN						
	.02.2.02.0049	Pembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				Konten Digital	0,00	Karimun, Kundur Utara, Teluk Radang	DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		bangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	WA		5.000.000,00	AS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				4 Orang	0,00	Karimun, Kundur, Lubuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		bangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		5.000.000,00	AS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				21 Dokumen		Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangu nan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	SISWA			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			mlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				Dokumen		. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	bangu nan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ISWA			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			mlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				Kegiatan		. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	bangu nan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ISWA			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

			ah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				Satuan Pendidikan		Karimun, Karimun, Tanjung balai Kota	NDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	bangu nan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ISWA			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			ah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang		. Karimun, Karimun, Lubuk Semut	NDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	bangu nan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ISWA			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				54 Orang		Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	SISWA			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				4300 Paket	1.397.619.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Tanjungbatu Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		104.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Ruang	150.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Lubuk Semut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		921.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

										RE GULER-SMP						
	1.01.02.2.02.0065	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus														
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun				1 Ruang	150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				5 Paket	620.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Sei Ungar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		815.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

										SMP						
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Persentase PAUD Minimal Terakreditasi B*	-			52,10 Persen	8.514.417.438,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA	-	6.808.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						ELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				4 Unit	1.226.801.038,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		610.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD														
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				8 Paket	300.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD														

			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				100 Paket	230.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		101.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD													
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				156 Peserta Didik	500.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				156 Orang	50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD													
		URUSAN /	**INDIKATOR**	**TARGET**	**REALISASI**	**PRAKIRAAN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**						**KELO**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**	**PERAN**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024							MPOK SASARAN			GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		615.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				156 Satuan Pendidikan	109.954.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														

			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				156 Satuan Pendidikan	3.749.980.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		2.904.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD													
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				156 Orang	129.750.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		112.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				156 Orang	94.234.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan													

			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				10 Konten Digital	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		215.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru													
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1.015.691.600,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		215.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)													

			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		190.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						ELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		390.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

										BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-PAUD						
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				3 Paket	100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		61.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				156 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		357.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	937.506.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		357.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

							2025				**NASIONAL**	**DAERAH**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase PKBM minimal Terakreditasi B*	-			41.70 Persen	1.808.400.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA	-	2.634.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				80 Peserta Didik	200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				160 Orang	70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				40 Orang	50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				10 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		43.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						ELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				10 Satuan Pendidikan	1.178.650.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		923.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				10 Orang	129.750.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				60 Orang	80.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan													
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				10 Konten Digital	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan													
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				160 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		7.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		KEGIATAN					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				160 Paket	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		203.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	0,00	Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	0,00	Kab. Karimun, Kundur, Tanjungbatu Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAR				PRIORITAS				

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		SUB KEGIATAN		OPD			GET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				160 Peserta Didik	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		495.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		59.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		57.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan														

			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				2 Paket	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	***Persentase SD Dan SMP Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Persentase PAUD Dan PKBM Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal***	**100 Persen 36,81 Persen**			**100 Persen 25 Persen**	**140.000.400,00**						**100 Persen 36,81 Persen**	**264.000.000,00**	

NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIAT**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**					**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
							TARGET	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**		**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		AN					**2025**				**NASIONAL**	**DAERAH**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah SD dan SMP Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal*	-			192 Sekolah	70.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA	-	129.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				192 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		129.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Jumlah PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal*	-			50 Satuan Pendidikan	70.000.400,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA	-	135.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				50 Dokumen	70.000.400,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		135.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	***Rasio Guru SMP Terhadap Siswa Rasio Guru SD Terhadap Siswa Rasio Guru PAUD Terhadap Siswa***	**9,04 Nilai 11,02 Nilai 12,09 Nilai**			**11,21 Nilai 12,51 Nilai 8,80 Nilai**	**220.000.000,00**						**9,04 Nilai 11,02 Nilai 12,09 Nilai**	**160.000.000,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase Satuan Pendidikan Yang Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikannya Terpenuhi*	-			0,57 Persen	220.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA	-	160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
		URUSAN /	**INDIKATOR**	**TARGET**	**REALISASI**	**PRAKIRAAN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**					**KELO**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**		**PERAN**	

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024							MPOK SASARAN			GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	SISWA		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.300.000.000,00**							**1.685.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**2.300.000.000,00**							**1.685.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAY**	***Persentase Budaya yang Dikembang***	**90,00 Persen**			**90,00 Persen**	**1.700.000.000,00**						**90,00 Persen**	**830.000.000,00**	

		AAN	***kan***													
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah SDM kebudayaan*	-			38 Orang	500.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-	-	230.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				9 Objek	250.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				56 Orang	250.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sanggar yang Mengikuti Festival Seni dan Budaya*	-			10 Sanggar	650.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-	-	480.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				76 Objek	300.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**						**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
							TARGET 2025	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
											NASIONAL	**DAERAH**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	250.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan														

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				12 Sertifikat	100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Lembaga Adat yang Dibina*	-			1 Lembaga Adat	550.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-	-	120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	250.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat														
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				70 Orang	100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan /Difasilitasi			2 Unit	200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	***Persentase Kesenian Tradisional Yang Dikembangkan***	**48,48 Persen**			**48,48 Persen**	**400.000.000,00**						**48,48 Persen**	**355.000.000,00**	
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**						**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
							TARGET 2025	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
											NASIONAL	**DAERAH**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Seniman yang Dibina*	-			30 Orang	400.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-	-	355.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														

			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				30 Orang	150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		185.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				30 Sertifikat	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	250.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	***Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan***	**58,93 Persen**			**58,93 Persen**	**200.000.000,00**						**58,93 Persen**	**500.000.000,00**	

	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	*Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Penghapusan)*	-			33 Cagar Budaya	100.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-	-	180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				16 Objek	100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				17 Objek	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	*Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu*	-			41 Cagar Budaya	100.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-	-	320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				22 Objek	100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				2 Objek	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				17 Objek	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X	**NON URUSAN**						**335.028.819.396,00**							**236.059.608.000,00**	

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**335.028.819.396,00**							**236.059.608.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**80 Nilai**			**80 Nilai**	**335.028.819.396,00**						**80 Nilai**	**236.059.608.000,00**	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen*	-			8 Dokumen	344.070.500,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-	-	149.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**						**ELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
							TARGET 2025	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
											NASIONAL	**DAERAH**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	92.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	66.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	98.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						ELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	88.070.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		23.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan*	-			1 Laporan	293.438.540.198,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN KAB. KARIMUN	-	188.263.317.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2122 Orang/bulan	293.077.829.198,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN KAB. KARIMUN		184.634.706.090,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	260.712.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN KAB. KARIMUN		3.575.611.630,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	99.999.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN KAB. KARIMUN		53.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan*	-			1 Laporan	50.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-	-	112.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	X.XX.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		56.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		56.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan*	-			1 Laporan	156.379.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-	-	289.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	85.377.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		109.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													

			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		76.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai															
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	21.002.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		56.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						ELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		48.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan*	-			1 Laporan	227.770.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-	-	703.224.280,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.401.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		12.220.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.997.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		83.053.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6.184.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		19.967.680,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.998.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		83.507.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						ELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		pERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		83.476.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		53.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		23.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	147.190.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		345.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan*	-			1 Laporan	0,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-	-	588.856.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						ELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		428.856.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan*	-			1 Laporan	40.782.235.698,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-	-	45.887.210.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	9.336.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		8.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	21.499.698,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		14.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	40.751.400.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		45.831.710.000,00	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan*	-			1 Laporan	29.824.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-	-	67.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	24.944.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	-		33.000.000,00	DINAS PENDIDIK AN DAN KEBUDAYA AN
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	4.880.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	-		11.000.000,00	DINAS PENDIDIK AN DAN KEBUDAYA AN
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	-		23.000.000,00	DINAS PENDIDIK AN DAN KEBUDAYA AN
	J U M L A H							**420.534.737.234,00**						**311.975.000.000,00**		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun Tahun 2025 melalui beberapa tahap mulai dari perencanaan, pengajuan usulan program dan kegiatan ke forum, perumusan, penyusunan, verifikasi sampai dengan pengesahan dan penetapannya. Dalam proses ini terdapat banyak kekurangan yang masih harus diperbaiki guna menuju kesempurnaan agar diperoleh kesesuaian dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya baik secara top down maupun bottom up.

Rumusan rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan bagi Tim Forum Musrenbang dalam menyusun RKPD Tahun 2025 dan menjadi pedoman unit kerja pelaksana lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuapten Karimun dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Belanja baik itu belanja operasi maupun belanja modal tahun anggaran 2025.

Dengan dukungan dan kerja sama semua pihak, kami harapkan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam pelaksanaan penyelenggaraan program pembangunan dan pemerintahan.

Karimun, Juli 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN

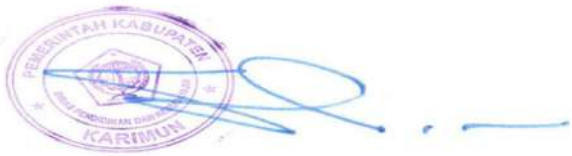

H. SUGIANTO, SS., MM
Pembina TK.I
NIP 19670718 199303 1 008

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARIMUN

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2024

BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah (PD) melakukan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025;

b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan antar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klafisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);

20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 46);

21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);

22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 99 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 99);

23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 45);

24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
RENCANA KERJA (RENJA)

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :
   a. pendahuluan;
   b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
   c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
   d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
   e. penutup.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta harus berpedoman dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
(3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya.
(4) Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 8 Juli 2024

BUPATI KARIMUN,

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024 NOMOR 34

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun tahun 2025 ini merupakan tahun keempat dari RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan tujuan nasional dan mempertimbangkan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk mewujudkan perencanaan program/kegiatan yang handal dan tepat sasaran sesuai dengan visi dan misi Bupati Karimun. Dokumen rencana Kerja tahun 2025 merupakan bagian salah satu yang diwajibkan untuk disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, program program yang dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan rincian kegiatannya secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan indikator kinerja dan pencapaian kinerja.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan menjabarkan rencana kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dan juga sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan guna menjaga konsistensi dan sinergitas program dan kegiatan sehingga dapat dengan optimal mendukung proses pembangunan Kabupaten Karimun.

Akhir kata, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi terhadap proses penyusunan Buku Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 ini hingga selesai.

Tanjung Balai Karimun, 06 Agustus 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARIMUN

Drs. RACHMADI, Apt, M.AP
NIP. 19661005 200003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GRAFIK iv

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dinkes Kab. Karimun 7

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 37

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 53

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 55

2.5.Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 91

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 94

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 96

3.3. Program dan Kegiatan 99

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 142

BAB V. PENUTUP 154

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2023	8
Tabel 2.2.	Capaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2023	9
Tabel 2.3.	Capaian Indikator Kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2023	15
Tabel 2.4.	Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2023	19
Tabel 2.5.	Capaian Indikator Kinerja Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Tahun 2023	20
Tabel 2.6.	Capaian Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tahun 2023	22
Tabel 2.7.	Capaian Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2023	24
Tabel 2.8.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2023 Kabupaten Karimun (T-C.29)	27
Tabel 2.9.	Kegiatan SPM di Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2023 & 2024	37
Tabel 2.10.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2023 (T-C.30)	39
Tabel 2.11.	Identifikasi Isu-Isu Strategis	54
Tabel 2.12.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2023 (T-C.31)	56
Tabel 2.13.	Evaluasi Realisasi Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2023	84
Tabel 2.14.	Usulan Progran dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Karimun (T-C.32)	92
Tabel 2.15.	Usulan Kegiatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan yang Dilaksanakan di Tahun 2023	93
Tabel 3.1.	Singkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran OPD	97

Hal

Tabel 3.2	Tujuan dan Indikator Tujuan Perangkat DaerahSasaran OPD	98
Tabel 3.3	Sasaran dan Indikator Sasaran Perangkat Daerah	98
Tabel 3.4	Kegiatan SPM di Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2025	103
Tabel 3.5	Usulan Progran dan Kegiatan Dari Masyarakat dan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Karimun	105
Tabel 3.6	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kab. Karimun (T-C.33)	106
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Bidang Kesehatan Tahun 2025	141

DAFTAR GRAFIK

			Hal
Grafikl 2.1.	:	Proporsi Belanja APBD Tahun 2023	14

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dokumen RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021, selanjutnya dijadikan pedoman utama dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026 di lingkungan Kabupaten Karimun yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 75 tahun 2021. Konsistensi antara RPJMD dengan Renstra perlu dijaga agar semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mendukung terwujudnya visi dan misi kepala daerah terpilih. Sebagai penjabaran dari Renstra maka perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja OPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun menyusun Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun tahun 2025 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Karimun tahun 2025. Prioritas kegiatan mengacu kepada prioritas daerah serta prioritas kesehatan yang dilihat melalui kementerian kesehatan. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan Penyusunan
b. Penyusunan rancangan awal
c. Penyusunan rancangan
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan.

Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan Renja disusun dengan mempedomani Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi

dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

I.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2025 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
20. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
23. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914)
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Provinsi Kepri Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7)

I.3. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

   Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun tahun 2025.

2. Tujuan

   Tujuan disusunnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah:

   1. Terjabarkannya Renstra perangkat daerah berdasarkan RKPD tahun 2025;
   2. Tersedianya gambaran yang jelas tentang program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2025;
   3. Tersedianya acuan dan arahan dalam pencapaian sasaran Renja perangkat daerah tahun 2025;
   4. Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2025.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Menyajikan secara ringkas tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2023 yang mengacu pada APBD tahun 2023.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun tahun 2023, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD. Disamping itu juga memuat tentang evaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta isu-isu strategis dalam penyelenggaraan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD, tujuan dan sasaran Renja, program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun pada tahun 2024 termasuk didalamnya kegiatan penunjang SPM Kesehatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat prioritas program Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun serta memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 beserta rencana pendanaannya.

BAB V. Penutup

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Kendala-kendala yang dijumpai dalam pelaksaaan di lapangan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Sebagai bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan sudah mencapai target sasaran sehingga dapat diketahui apakah perlu direncanakan kembali di tahun berikutnya atau tidak; dan
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun tahun 2023 didasarkan dan merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun 2021-2026. Tahun 2023 merupakan tahun kedua periode Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun

Hasil dari Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2023 adalah gabungan dari hasil evaluasi semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, 2 RSUD dan 14 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) selama tahun 2023, yaitu:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun;
2. UPTD Puskesmas (13 Puskesmas);
3. UPTD Balai Pengelilaan Farmasi dan Alat Kesehatan (BPFAK);
4. RSUD Tg. Batu Kundur; dan
5. RSUD Muhammad Sani

Rencana kerja tahun 2023 tingkat pencapaian program disesuaikan dengan peluang dan kekuatan, sehingga target yang disusun atau yang ingin dicapai tidak mayoritas 100%. Program dan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara dalam menentukan upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam rangka untuk mencapai tujuan perangkat daerah.

a. Kinerja Sasaran Strategis

Gambaran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun tahun 2023 secara detail dapat dilihat melalui perbandingan antara target pencapain Indikator Kinerja Utama antara target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.Hasil pengukuran kinerja berdasarkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun diperoleh hasil dua indikator tercapai dan tiga indikator belum tercapai. Hasil skala kriteria penilaian kinerja dengan kategori tinggi Capaian indikator kinerja utama tahun 2023 tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH)	132.35	61.00	129.28	-11.93	Sangat Rendah
		Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 KH)	12.40	11.60	11.96	96.93	Sangat Tinggi
		Persentase Balita Stunting	7.00	7.00	6.48	107.43	Sangat Tinggi
		Persentase Desa Stop BABS	39.40	35,20	35.21	100.03	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	77.00	78.00	77.89	99.86	Sangat Tinggi
		Rata - Rata Tingkat Capaian				**78.46**	**Tinggi**

Tabel 2.1.menunjukkan rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 78.46% dengan kategori **Tinggi**. Terdiri dari 2 Indikator yang sudah tercapai (target terpenuhi) yaitu persentase balita stunting dan persentase desa stop BABS, sedangkan 3 Indikator belum tercapai (target belum terpenuhi) yaitu Angka kematian ibu,angka kematian bayi dan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah.Target diatas adalah target dari Renja atau Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Sasaran pertama dari Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan. Kinerja sasaran strategis ini diukur dengan 4 (empat) indikator yang dalam pelaksanaanya didukung oleh program dan kegiatan di Dinas Kesehatan. Analisis Capaian Kinerja masing-masing Indikator diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Capaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	2023			Capaian 2021	Capaian 2022	Target Akhir Renstra	Target Nasional
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan									
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	61.00	129.28	-11.93	144.68	61.46	120.59	183.00
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	11.60	11.96	96.93	14.47	11.68	10.00	16.00
3	Persentase Balita Stunting)	%	7.00	6.48	107.43	7.71	7.00	6.80	14.00
4	Persentase Desa Stop BABS	%	35,20	35.21	100.03	29.58	32.39	50.70	90.00
Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD									
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	78.00	77.89	99.86	76.35	77.89	78.50	71.00

Dari tabel 2.2. diatas menunjukkan ada dua indikator kinerja yang meningkat kinerjanya dari tahun sebelumnya (tahun 2022) yaitu indikator Persentase Balita Stunting dan Persentase Desa Stop BABS dan tiga indikator lainnya menurun dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah atau akhir Renstra belum ada indikator yang mencapai target. Jika dibandingkan dengan target Nasional (Kemenkes & Menpan RB), empat indikator telah mencapai target yaitu indikator Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Persentase Balita Stunting dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan satu indiktor yang belum mencapai target nasional yaitu Persentase Desa Stop BABS. Capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target Renja/ Perjanjian Kinerja terdapat dua indikator kinerja yang telah tercapai yaitu Persentase Balita Stunting dan Persentase Desa Stop BABS serta tiga indikator yang belum belum tercapai yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternatif solusi yang akan dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Angka Kematian Ibu

   1) Analisis Penyebab Kegagalan
      a. Penyebab kematian ibu di tahun 2023 adalah kasus atau faktor yang tidak bisa dideteksi dini sewaktu Ante Natal Care (ANC) seperti perdarahan post partum

b. Ibu hamil dengan faktor risiko dan tidak layak hamil (umur, jumlah anak dan penderita hipertensi)
c. Masih ada kematian yang disebabkan karena 4 T (terlalu tua, terlalu muda, terlalu banyak, terlalu dekat)
d. Perilaku ibu yang tidak sehat seperti merokok

2) Solusi/ Tindak Lanjut
a. Melakukan ANC sesuai standar
b. Pemantauan kala IV yang adekuat sehingga rujukan cepat dan tepat
c. Setiap persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan
d. Audit kasus kematian ibu
e. Pendampingan Tim Ahli (SpA & SPOG) ke puskesmas dalam pelayanan KIA, kegawatdaruratan, dan sistem rujukan maternal dan neonatal
f. Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yang melibatkan peran serta lintas sektor
g. Penjaringan dan pemantauan ibu hamil risko tinggi
h. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) yaitu pembahasan kasus kematian oleh Tim AMP untuk mengetahui penyebab kasus kematian dan akan mengeluarkan rekomendasi upaya pencegahan kematian di masa yang akan datang baik kepada fasilitas kesehatan maupun ke masyarakat
i. Menyediakan fasilitas pelayanan ANC dan persalinan sesuai standar termasuk ketersediaan darah di PMI

2. Angka Kematian Bayi

1) Analisis Penyebab Kegagalan
a. Ibu hamil dengan resiko tinggi melahirkan anak yang prematur
b. Adanya kelainan bawaan pada bayi yang dilahirkan
c. Bayi lahir dengan kasus pneumoni

2) Solusi/ Tindak Lanjut
a. Melakukan skrining layak hamil pada pasangan usia subur (PUS) dan calon PUS
b. Tatalaksana manajemen terpadu balita sakit (MTBS)
c. Meningkatkan konsumsi asam folat pada ibu hamil TW 1 dan TW 2
d. Setiap persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan
e. Pendampingan Tim Ahli (SpA & SPOG) ke puskesmas dalam pelayanan KIA, kegawatdaruratan, dan sistem rujukan maternal dan neonatal
f. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) yaitu pembahasan kasus kematian oleh Tim AMP untuk mengetahui penyebab kasus kematian dan akan mengeluarkan rekomendasi upaya pencegahan kematian di masa yang akan datang baik kepada fasilitas kesehatan maupun ke masyarakat

3. Persentase Balita Stunting

1) Analis Penyebab keberhasilan
   a. Telah tersedianya antropometri kit yang sudah terstandar melalui hibah dari Kemenkes
   b. Adanya peningkatan jumlah balita yang ditimbang, yang mana mencapai 91% dari jumlah seluruh balita
   c. Pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil di seluruh wilayah Puskesmas
   d. Pelacakan dan perawatan kasus balita gizi buruk

2) Solusi/ Tindak Lanjut
   a. Melakukan edukasi gizi pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK)
   b. Skrining layak hamil
   c. STBM dan pengawasan sarana dan kualitas air bersih/ minum
   d. Pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil di seluruh wilayah Puskesmas
   e. Melibatkan lintas sektor untuk penanganan penurunan stunting diluar kesehatan
   f. Konseling pra nikah kepada calon pengantin dengan berkerjasama dengan KUA
   g. Setiap keluarga miskin harus memiliki jaminan kesehatan berupa KIS
   h. Pemberian suplemen taburia pada balita stunting

4. Persentase Desa Stop BABS

1) Analis Penyebab keberhasilan
   a. Pemicuan 5 pilar STBM kepada masyarakat (khususnya pemicuan pilar 1 stop BABS)
   b. Pendampingan pasca pemicuan
   c. Koordinasi dengan lintas sektor terkait
   d. Verifikasi desa/ kelurahan Stop BABS

2) Solusi/ Tindak Lanjut
   a. Kampanye 5 pilar STBM
   b. Tetap melanjutkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023

Langkah-langkah/ strategi yang diambil Dinas Kesehatan yang dirumuskan sebagai rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada tahun 2023 diantaranya:

1. - Penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan promotif preventif, peningkatan pelayanan maternal dan neonatal yang berkesinambungan dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan, surveilans kesehatan ibu dan anak, pelaksanaan kelas ibu hamil, rapat koordinasi dengan perangkat desa dan masyarakat terkait perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, penyediaan dan rehab sarana kesehatan seperti rehab Puskesmas pembantu, penyediaan prasarana, obat-obatan dan pencatatan kematian ibu dan bayi di fasilitas kesehatan
   - Peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang balita, dan gizi. Kunjungan lapangan oleh tenaga Puskesmas pada ibu hamil KEK, anemia, ibu hamil resiko tinggi, bayi dan balita dengan masalah gizi serta pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil. Upaya intervensi stunting pada masa bayi balita yaitu dengan melakukan layanan kesehatan bayi balita sesuai standar
   - Peningkatan upaya promotif dan preventif serta edukasi kepada masyarakat terkait faktor resiko penyakit tidak menular dan peningkatan skrining dan deteksi dini penyakit tidak menular. Pengembangan real time surveilans dan pengendalian vektor penyebab penyakit demam berdarah.
   - Pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di Desa/Kelurahan dan pemicuan untuk berperilaku hidup bersih sehat dan stop Buang Air Besar Sembarangan bagi Desa/ Kelurahan
   - Akreditasi pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang digunakan sebagai acuan pemenuhan standar fasilitas pelayanan kesehatan
   - Peningkatan cakupan imunisasi pada balita dengan kegiatan-kegiatan diluar gedung

   Rencana kegiatan diatas akan dianggarkan melalui Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

2. - Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP
   - Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar

     Pemenuhan SDM Kesehatan di Puskesmas dan RSUD Tg. Batu Kundur sesuai standar, khususnya untuk pemenuhan program prioritas

   Rencana kegiatan diatas akan dianggarkan melalui Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan

3. - Pengamanan sediaan farmasi, makanan dan minuman yang beredar di masyarakat dengan pengawasan terhadap Apotek, Toko Obat, Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
   - Pengendalian dan pengawasan untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga

Rencana kegiatan diatas akan dianggarkan melalui Program Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman

4. - Promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan pemberdayaan masyarakat termasuk revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat lainnya serta penggerakan masyarakat untuk hidup sehat
   - Melakukan pebinaan dan advokasi kepada kader Posyandu, Posbindu, Desa/ Kelurahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini khususnya *IVA Test* dan pemeriksaan payudara klinis (SADANIS)
   - Menggalakkan kegiatan Posyandu dan Posbindu yang melibatkan komitmen lintas sektor untuk bekerjasama
   - Memasyaratkan gerakan hidup sehat (Germas) dengan menitikberatkan pada upaya perubahan gaya hidup sehat di masyarakat untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan danperilaku masyarakat yang kurang sehat.

   Rencana kegiatan diatas akan dianggarkan melalui Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

5. Mengoptimalkan pelaksanaan administrasi dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan yang kegiatannya dianggarkan melalui Program Penunjang urusan pemerintah daerah

Pendapatan Asli Daerah dari retribusi/jasa pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas dan RSUD dari target yang ditetapkan sebesar Rp.109.043.153.000,- pada akhir tahun terealisasi sebesar Rp.82.188.675.148,09- (75,37%).

Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun dan UPTD tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.287.236.152.873,- yang digunakan untuk pelaksanaan 5 program, 21 kegiatan dan 80 sub kegiatan. Tingkat pencapaiannya bila diukur dari realisasi keuangan sebesar 92.12% serta realisasi fisik selesai sebesar 95%. Ada 4 (empat) program dengan realisasi keuangan di atas 75% hingga 100% dan 1 (satu) program realisasi keuangan di bawah 75%. Jika ditinjau dari proporsi belanja APBD tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:

Grafik 2. 1. Proporsi Belanja APBD Tahun 2023

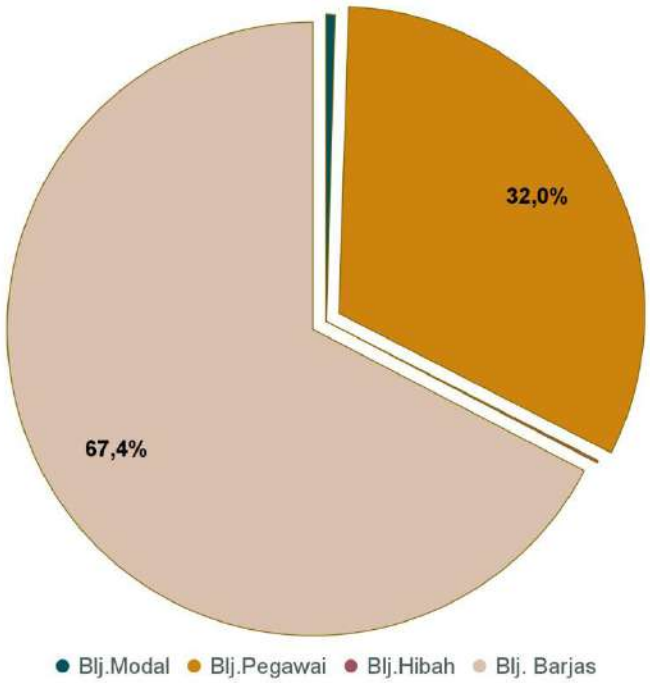

Grafik 2.1 menunjukkan bahwa proporsi anggaran belanja tahun 2023 terbesar di belanja barang dan jasa yaitu 67,4 % meningkat 3,8% dari tahun 2022 dan proporsi belanja pegawai diatas 30%.

b. Kinerja Program dan Kegiatan

Program-program kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Analisis terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Pagu anggaran program ini sebesar Rp.55.803.202.718,- Realisasi anggaran sebesar Rp.47.304.997.661,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 84,77% dan persentase

realisasi fisik sebesar 100%.

Kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut:

1.1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, pagu Rp.20.418.564.205,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.19.967.846.528,- (97,79%) realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 7 subkegiatan dengan 1 subkegiatan gagal dilaksanakan karena refocusing.

1.2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pagu Rp.35.010.450.013,- dengan realisasi keuangan Rp.27.036.619.354,- (77,22%) dan realisasi fisik sebesar 100%). Kegiatan ini terdiri dari 30 subkegiatan dengan 2 subkegiatan gagal dilaksanakan.

1.3. Penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi,Pagu Rp.70.045.500,- dengan realisasi keuangan Rp. 64.709.445,- (92,38%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 2 subkegiatan dan terlaksana.

1.4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pagu Rp.304.143.000,- dengan realisasi keuangan Rp.235.822.334,- (77,54%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 2 subkegiatan dan terlaksana.

Capaian indikator kinerja progam dan kegiatan tahun 2023 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3. Capaian Indikator Kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2023

Sasaran Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.Keluarga Sehat	0,21%	0.22%	104.76 %	Sangat Tinggi
		2.Persentase ibu hamil mendapat kan pelayanan kesehatan (K4)	92.00%	82.56%	89.74%	Tinggi
		3.Persentase per salinan di faskes	93.00%	91.59%	98.48%	Sangat Tinggi
		4.Persentase bayi baru lahir menda patkan pelayanan kesehatan (KN3)	92.00%	96.57%	104.97 %	Sangat Tinggi

Sasaran Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Kriteria
		5.Persentase balita yang mend patkan pelayanan kesehatan	87.16%	85.46%	98.05%	Sangat Tinggi
		6.Persentase anak usia pendidi kan dasar menda patkan skrining Kesehatan	89.99%	91.48%	101.66 %	Sangat Tinggi
		7.Persentase penduduk usia >60 thn mendapat kan pelayanan kesehatan lanjut usia	60.00%	42.78%	71.30%	Sedang
		8.Persentase kelurahan/ desa melaksanakan STBM	94.37%	94.37%	100%	Sangat Tinggi
		9.Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	93.00%	75.91%	81.62%	Tinggi
		10.Succes rate TB	87.38%	93.03%	106.47 %	Sangat Tinggi
		11.Insident Rate DBD	100/ 100.000 penduduk	32.37%	167.63 %	Sangat Tinggi
		12. Persentase imunisasi dasar lengkap	94.67%	86.81%	91.70%	Sangat Tinggi
		13.Persentase orang beresiko HIV/AIDs yang diberikan pelaya nan kesehatan	97.54%	100.00%	102.52 %	Sangat Tinggi
		14.Persentase ODGJ berat yang diberikan pelaya nan kesehatan	100.00%	100.41%	100.41 %	Sangat Tinggi

Sasaran Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Kriteria
		15.Persentase penderita hipertensi yang diberikan pelaya nan kesehatan	81.52%	84.64%	103.83 %	Sangat Tinggi
		16.Persentase penderita diabetes melitus diberikan pelaya nan kesehatan	97.00%	89.03%	91.78%	Sangat Tinggi
		17.Persentase orang terduga TB yang diberikan pelayanan Kesehatan	85.69%	114.38%	133.48 %	Sangat Tinggi
		18.Persentase ketersediaan sara na, prasarana dan alat Kesehatan	79,32%	79,60%	100,35	Sangat Tinggi
		19.Persentase jaringan pelaya nan kesehatan kondisi baik	35.00%	57.30%	163.71 %	Sangat Tinggi
		20.Persentase fasilitas keseha tan lainnya yang memenuhi syarat	100.00%	97.59%	97.59%	Sangat Tinggi
		21.Persentase penduduk kepesertaan JKN yng dibayarkan	100.00%	100.00%	100.00 %	Sangat Tinggi
		22.Persentase Puskesmas yang menyelenggara kan upaya kese hatan tradisional	100.00%	61.54%	61.54%	Sangat Tinggi
		23.Persentase fasilitas keseha tan terakreditasi minimal utama	53.85%	69.23%	128.56 %	Sangat Tinggi

Sasaran Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Kriteria
		24.Persentase puskesmas dengan keterse diaan obat dan vaksin essensial	100%	92.31%	92.31%	Sangat Tinggi
		25.Persentase puskesmas dengan pelay anan berbasis tek nologi informasi	100.00%	100.00%	100.00 %	Sangat Tinggi
1.Meningkatnya ketersediaan fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat	- Penyediaan Fasilitas Pelay anan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewena ngan Daerah Kabupaten	Jumlah unit pela yanan dengan kelengkapan sara na, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	15 unit	15 unit	100.00 %	Sangat Tinggi
2 Meningkatnya layanan UKM dan UKP	- Penyediaan Layanan Kese hatan untuk UKM & UKP Rujukan Tk. Daerah Kab/ Kota	Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan UKM dan UKP	15 unit	15 unit	100.00 %	Sangat Tinggi
3 Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi	Penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah publikasi data dan informasi kesehatan yang tersedia	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %	Sangat Tinggi
4.Terselenggaranya penerbitan izin RS kelas C dan D serta fasyankes tingkat daerah	- Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah rekome ndasi izin rumah sakit kelas C, D, dan fasilitas pela yanan kesehatan yang telah terbit	20.00	40.00	200.00 %	Sangat Tinggi

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pagu anggaran program ini sebesar Rp.751.515.887,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.547.188.200,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 72,81%. Kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

2.1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pagu Rp.658.171.986,- dengan realisasi Rp.485.915.850,- (73,83%) realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 1 subkegiatan dan terlaksana.

2.2. Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota,pagu Rp20.000.001,- dengan realisasi Rp. 16.922.350,- (84,61%),realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 1 subkegiatan dan terlaksana.

2.3. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, pagu Rp.73.343.900,- dengan realisasi Rp.44.350.000,- (60,47%). realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 2 subkegiatan dan terlaksana.

Capaian indikator kinerja progam dan kegiatan tahun 2023 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4. Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2023

Sasaran Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya Pemenuhan Tenaga Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase unit pelayanan dengan keter sediaan tenaga kesehatan sesuai standar	84.61%	76.92%	90.91	Sangat Tinggi
1. Terselenggara nya perlindungan praktik tenaga kesehatan wilayah Kabupaten/ Kota	- Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota	Jumlah tenaga kesehatan yang dikeluar kan surat rekomendasi izin praktek	373 nakes	530 nakes	142,09	Sangat Tinggi
2. Terselenggara nya rencana kebutuhan pemenuhan SDM kesehatan	- Perencanaan Kebutuhan & Pendayagunaan SDM Kese hatan untuk UKP & UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan bezetting yang tersedia	1 Laporan	1 Laporan	100.00	Sangat Tinggi

Sasaran Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Kriteria
3. Terwujudnya tenaga kesehatan yang bermutu	- Pengembangan Mutu & Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah tenaga kesehatan yg melakukan peningkatan kompetensi melalui pendidikan formal	10 orang	27 orang	270.00	Sangat Tinggi

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

3.1. Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, pagu Rp.156.850.000,- serta realisasi Rp117.866.800,- (75,15%) realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 1 subkegiatan dan terlaksana.

Capaian indikator kinerja progam dan kegiatan tahun 2023 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5. Capaian Indikator Kinerja Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Tahun 2023

Sasaran Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman memenuhi syarat	59,85%	65.79%	109,92	Sangat Tinggi

Sasaran Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Kriteria
1.Terselenggaranya penerbitan sertifikat produksi pangan	- Penerbitan Serti fikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga dan nomor P-IRT yang diberikan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	70 sarana	169.00 Sarana	241.43	Sangat Tinggi
2.Terselenggaranya pengawasan post market	- Pemeriksaan & Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah sarana post market produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga yang dilakukan pengawasan	80 sarana	70 Sarana	87,50	Tinggi
3.Tersedianya penyelenggaraan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan usaha mikro obat tradisional	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan usaha mikro obat tradisional yang diberikan rekomendasi izin	10 Sarana	26 Sarana	260,00	Sangat Tinggi

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pagu anggaran program ini sebesar Rp.5.016.700.428,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.3.506.020.296,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 69,89% dan persentase realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

4.1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pagu Rp. 4.208.700.000,- dengan realisasi

Rp3.338.663.600,- (79,33%) realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 1 subkegiatan dan terlaksana.

4.2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pagu Rp. 158.094.146,- dengan realisasi Rp.5.681.546,- (3,59%) realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 1 subkegiatan dan terlaksana. Rendahnya realisasi keuangan karena tunda bayar ditahun 2024.

4.3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pagu Rp. 649.906.282,- dengan realisasi Rp.161.675.150,- (24,88%) realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 1 subkegiatan dan terlaksana.

Capaian indikator kinerja progam dan kegiatan tahun 2023 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6. Capaian Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tahun 2023

Sasaran Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya peran serta masyarakat bidang kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan Germas	50.70%	71.83%	141.68	Sangat Tinggi
		Persentase Posyandu Aktif	90.43%	93.48%	103.37	Sangat Tinggi
		Persentase peserta advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor yg diberikan pelatihan	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi

Sasaran Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Kriteria
1.Terselenggaranya advokasi kemitraan peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah posyandu aktif purnama dan mandiri	210	215	102.38	Sangat Tinggi
2.Terlaksananya advokasi penerapan Germas	- Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah kelurahan/desa yang dilakukan advokasi penerapan kebijakan Germas	50 Kelurahan / Desa	51 Kelurahan / Desa	102	Sangat Tinggi
3.Terlaksananya pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	- Pengembangan dan Pelaksanan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tk. Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah tenaga lintas sektor yang diberikan sertifikat bimbingan teknis	100	84	84.00	Tinggi

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Pagu anggaran program ini sebesar Rp.225.290.235.840,-.Realisasi anggaran sebesar Rp.212.991.415.130,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 94,54% dan persentase realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

5.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pagu Rp.174.036.414,- dengan realisasi Rp132.041.725,- (75,87%). realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 4 subkegiatan dan terlaksana.

5.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pagu Rp.92.504.997.551,- dengan realisasi Rp.85.966.498.908,- (92,93%). realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 3 subkegiatan dan terlaksana.

5.3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah,pagu Rp.24.999.641,- dengan realisasi Rp22.157.000,- (88,63%). realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 1 subkegiatan dan terlaksana.

5.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, pagu Rp.2.156.297.085,- dengan realisasi Rp.1.310.580.709,- (60,78%). realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 7 subkegiatan dan terlaksana.

5.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu Rp.26.416.300,- dengan realisasi Rp.1.929.400,- (7,30%), realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 3 subkegiatan dan terlaksana. Rendahnya realisasi anggaran karena menjadi tunda bayar di tahun 2024

5.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu Rp.20.961.614.756,- dengan realisasi Rp.18.748.616.482 (89,44%), realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 4 subkegiatan dan terlaksana.

5.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu Rp.1.054.565.093,- dengan realisasi Rp.746.612.794,- (70,80%). realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 6 subkegiatan dan terlaksana.

5.8. Peningkatan Pelayanan BLUD, pagu Rp.108.387.309.000,- dengan realisasi Rp.106.063.078.112,- (97,86%). realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 1 subkegiatan dan terlaksana.

Capaian indikator kinerja progam dan kegiatan tahun 2023 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7. Capaian Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ KotaTahun 2023

Sasaran Program / Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Kriteria
1.Meningkatnya kualitas pelayanan OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	90.05%	89.29	99.16	Sangat Tinggi
		Persentase Rekomendasi Temuan Yang Diselesaikan	100%	100%	100	Sangat Tinggi
1.1.Terselenggarakannya perencana an, pengangga ran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggar, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	100	Sangat Tinggi

Sasaran Program / Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Kriteria
1.2.Terselenggaranya administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan tersedia	1	1	100	Sangat Tinggi
1.3.Terselenggaranya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	1	1	100	Sangat Tinggi
1.4.Terselenggaranya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	1	1	100	Sangat Tinggi
1.5.Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diterima	1	1	100	Sangat Tinggi
1.6.Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penun jang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan RKB/RKBU yang tersedia	1	1	100	Sangat Tinggi
1.7.Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang yang tersedia	1	1	100	Sangat Tinggi
1.8.Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Jumlah laporan inventaris barang yang tersedia	1	1	100	Sangat Tinggi
1.9. Terselenggaranya peningkatan pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah dokumen capaian kinerja BLUD yang tersedia	7	7	100	Sangat Tinggi

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pencapaian indikator kinerja program Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun diantaranya:

a. Selisih harga pengadaan dalam aplikasi SIPD (SSH) dengan harga pembelian seperti pada obat dan vaksin, alat tulis kantor dan lain-lain. Adanya kekosongan barang di produsen, gagal lelang dikarenakan harga yang terlalu rendah

b. Beberapa kegiatan rutin operasional yang pelaksanaannya tergantung pada kebutuhan yang terkadang waktu dan pelaksanaannya tidak bisa diperkirakan dan bersifat isindentil.

c. Tidak lancarnya proses pencairan keuangan sehingga ada beberapa pengadaan telah selesai dilaksanakan namun tidak bisa dibayarkan. Selain itu akibat kurang lancarnya proses pencairan memgakibatkan keraguan dalam menjalankan kegiatan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten karimun selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.7 terlampir

Tabel 2.8. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2023 Kabupaten Karimun (T-C.29)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**									
1.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**									
1.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**90**	**89,05**	**82**	**89,29**	**108,89**	**91.00**	**91.00**	**101,11**
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia	21	4	4	4	100	4	12	57,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan tersedia	5	1	1	1	100	1	3	60,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	5	1	1	1	100	1	3	60,00
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelayanan administrasi kepegawaian	5	0	0	0	0.00	1	1	20
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diterima	5	1	1	1	100.00	1	3	60,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan RKB/RKBU tersedia	5	1	1	1	100.00	1	3	60,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang yang tersedia	5	1	1	1	100.00	1	3	60,00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan inventaris barang yang tersedia	5	1	1	1	100.00	1	3	60,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	7	7	7	7	100.00	7	7	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Indeks Keluarga Sehat**	**0.50**	**0.20**	**0.20**	**0.22**	**110.00**	**0,23**	**0,23**	**46,00**
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit pelayanan dengan kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar (lebih dari 70%)	15	12	15	15	100	15	15	100
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan UKM dan UKP	15	13	15	15	100.00	15	15	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Jumlah publikasi data dan informasi kesehatan yang tersedia	5	1	1	1	100.00	1	3	60,00
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin rumah sakit kelas C, D, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah terbit	5	1	1	1	200	0	2	40,00
1.02.03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persentase unit pelayanan dengan ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar**	**61.53**	**62,00**	**38,46**	**76,92**	**200**	**92,30**	**92,30**	**150,00**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang dikeluarkan surat rekomendasi izin praktek	373 orang	0	373	530	142,09	500	500	134,04
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan bezetting yang tersedia	5	1	1	1	100	1	3	60
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang melakukan peningkatan kompetensi melalui pendidikan formal	50	12	10	27	270	10	49	98

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.04	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minumam**	**Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman memenuhi syarat**	**74.98**	**58,00**	**53,48**	**65,79**	**123,01**	**67,94**	**67,94**	**90,61**
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan usaha mikro obat tradisional yang diberikan rekomendasi izin	62	0	10	26	260	15	41	66,12

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga dan nomor P-IRT yang diberikan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	175	95	35	169.00	264	40	209	119,42
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM yang diberikan rekomendasi sertifikat laik higiene	150	0	0	0	0	30	30	20.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah sarana post market produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga yang dilakukan pengawasan	80	70	80	70	87,50	80	80	100
1.02.05	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	Persentase desa/kelurahan yang menerapkan kebijakan Germas	66.19	38.00	50.70	71.83	141.68	56,23	71,83	108.52
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah posyandu aktif purnama dan mandiri	197	205	191	215	102.38	193	215	109,13

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.05.2.01	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan/desa yang dilakukan advokasi penerapan kebijakan Germas	46	39	35	51	145,71	39	51	110,86
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga lintas sektor yang diberikan sertifikat bimbingan teknis	150	30	30	84	280	30	144	96

II.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Kesehatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKU maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan serta norma dan standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan terkait kinerja pelayanan urusan perencanaan pembangunan.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun tahun 2023 dilaksanakan berdasar indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan dengan memasukan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan).

Indikator SPM bidang kesehatan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan ditahun 2023 s.d 2024 yaitu:

Tabel 2.9
KEGIATAN SPM DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2023 & 2024

No	Indikator SPM	Sub Kegiatan	Jumlah PAGU (Rp)	
			2023	2024
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	662.453.000	462.950.000
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	39.021.000	61.212.000
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.600.0000	100.954.093
4	Pelayanan kesehatan balita	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	145.350.000	59.999.800
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	587.177.000	749.932.000
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.120.000	0
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	352.047.000	250.000.000
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	- Pengelolaan pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0	50.000.000

No	Indikator SPM	Sub Kegiatan	Jumlah PAGU (Rp)	
			2023	2024
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	- Pengelolaan pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	226.055.000	227.747.437
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	128.600.000	71.444.000
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	756.011.134	1.056.087.250
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	184.108.862	346.744.000
Jumlah			**3.222.022.996**	**3.437.070.580**

Hasil analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan tahun 2023 disajikan dalam tabel 2.10 berikut:

TABEL 2.10

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023 (T-C.30)

MISI 3 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa

NO	Indikator *)	SPM/Standar Nasional/Daerah		Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi		Catatan Analisis Terhadap Target
		Satuan Target	Sumber Target	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2024	Tahun 2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan													
1	Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan	per 100.000 Kelahiran Hidup	Renstra Kemenkes RI	144.68	138.30	132.35	126.47	123.53	120.59	129.28	126.47	123.53	Target tercapai
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 Kelahiran Hidup	Renstra Kemenkes RI	14.47	13.00	12.35	11.76	10.59	10.00	11.96	11.76	10.59	Target tercapai
3	Persentase Balita Stunting	%	Renstra Kemenkes RI I	7.00	7.00	6.95	6.90	6.85	6.80	6.48	6.36	6.31	Target tercapai
4	Persentase Desa Stop BABS	%	Renstra Kemenkes RI I	29.58	35.20	39.40	43.70	46.50	50.70	35.21	40.84	46.50	Target tercapai

NO	Indikator *)	SPM/Standar Nasional/Daerah		Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi		Catatan Analisis Terhadap Target
		Satuan Target	Sumber Target	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2024	Tahun 2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
5	Indeks Keluarga Sehat	Nilai	Renstra Dinkes 2021 - 2026	0.18	0.19	0.20	0.30	0.40	0.50	0.22	0.30	0.40	Target tercapai
6	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan (K4)	%	SPM Bidang Kesehatan 2019	87.50	88.00	88.30	88.50	88.80	89.00	82.56	85.51	88.80	Target tercapai
7	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	%	SPM Bidang Kesehatan 2019	91.50	92.00	92.50	92.80	93.00	93.50	91.59	93.13	93.50	Target tercapai
8	Perentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan (KN3)	%	SPM Bidang Kesehatan 2019	96.00	96.30	96.50	96.70	97.00	97.30	96.57	94.00	97.00	Capaian dibawah target (tidak tercapai)
9	Persentase Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	SPM Bidang Kesehatan 2019	44.00	44.50	45.00	46.00	47.00	50.00	85.46	86.00	86.50	Target tercapai

NO	Indikator *)	SPM/Standar Nasional/Daerah		Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi		Catatan Analisis Terhadap Target
		Satuan Target	Sumber Target	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2024	Tahun 2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
10	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan SkriningKesehatan	%	SPM Bidang Kesehatan 2019	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	91.48	92.00	92.25	Target tercapai
11	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	SPM Bidang Kesehatan 2019	92.00	92.50	93.00	93.50	94.00	94.50	75.91	93.50	94.00	Capaian dibawah target (tidak tercapai)
12	Persentase penduduk > 60 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan lanjut usia	%	SPM Bidang Kesehatan 2019	40.00	42.00	44.00	46.00	48.00	50.00	42.78	46.00	48.00	Target tercapai
13	Persentase Penderita Hipertensi yang Diberikan Pelayanan Kesehatan	%	SPM Bidang Kesehatan 2019	67.00	68.00	69.00	70.00	71.00	72.00	84.64	85.00	85.50	Target tercapai

NO	Indikator *)	SPM/Standar Nasional/Daerah		Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi		Catatan Analisis Terhadap Target
		Satuan Target	Sumber Target	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2024	Tahun 2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
14	Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	SPM Bidang Kesehatan 2019	96.00	96.50	97.00	97.50	98.00	98.50	89.03	85.00	98.00	Capaian dibawah target (tidak tercapai)
15	Persentase ODGJ Berat yang Diberikan Pelayanan Kesehatan	%	SPM Bidang Kesehatan 2019	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	100.41	100	100	Target tercapai
16	Persentase Orang Terduga TB yang Diberikan Pelayanan Kesehatan	%	SPM Bidang Kesehatan 2019	33.89	33.99	34.07	34.19	34.34	34.56	114.38	90.00	90.20	Target tercapai
17	Persentase Orang Beresiko HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	SPM Bidang Kesehatan 2019	97.08	97.20	97.54	97.87	98.00	98.20	102.52	100	100	Capaian dibawah target (tidak tercapai)

NO	Indikator *)	SPM/Standar Nasional/Daerah		Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi		Catatan Analisis Terhadap Target
		Satuan Target	Sumber Target	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2024	Tahun 2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
18	Persentase kelurahan/ desa melaksanakan STBM	%	Renstra Kemenkes	86	88	90	92	94	95	94.37	100	100	Target tercapai
19	Succes rate TB	%	Permendagri RI Nomor 86 tahun 2017	91.00	91.50	92.50	94.00	95.00	96.00	93.03	94.00	94.50	Target tercapai
20	Insident Rate DBD	Per 100.000 penduduk	Renstra Dinkes Provinsi Kepri	150.00	100.00	95.00	90.00	85.00	80.00	32.37	50.00	60.00	Merupakan indikator negativ. Target tidak tercapai
21	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	Renstra Kemenkes	89.00	89.34	89.72	90.00	92.10	94.50	86.81	90.00	92.10	Target tercapai
22	Persentase keterse diaan sarana, prasarana dan alat kesehatan	%	Permenkes RI Nomor 43 tahun 2019	75.00	77.09	80.00	85.00	87.00	90.00	79.60	85.70	87.00	Target tercapai

NO	Indikator *)	SPM/Standar Nasional/Daerah		Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi		Catatan Analisis Terhadap Target
		Satuan Target	Sumber Target	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2024	Tahun 2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
23	Persentase jaringan pelayanan kesehatan kondisi baik	%	Permenkes RI Nomor 43 tahun 2019	29.13	35.00	38.83	48.54	58.25	67.96	57.30	61.61	67.96	Target tercapai
24	Persentase fasilitas kesehatan lainnya yang memenuhi syarat	%	Renstra Kemenkes	100	100	100	100	100	100	97.59	98.79	100	Target tercapai
25	Persentase pendu duk kepesertaan JKN yng dibayarkan	%	Renstra Kemenkes	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Target tercapai
26	Persentase Puskes mas yang menye lenggarakan upaya kesehatan tradisional	%	Renstra Kemenkes	38.46	46.15	53.85	61.54	69.23	76.92	61.54	100	100	Target tercapai
27	Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi minimal utama	%	Renstra Kemenkes	46.15	46.15	53.83	53.83	76.92	84.61	69.23	76.72	76.92	Capaian dibawah target (tidak tercapai)

NO	Indikator *)	SPM/Standar Nasional/Daerah		Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi		Catatan Analisis Terhadap Target
		Satuan Target	Sumber Target	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2024	Tahun 2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
28	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial	%	Renstra Kemenkes	85.00	90.00	95.00	100	100	100	92.31	100	100	Target tercapai
29	Persentase puskesmas dengan pelayanan berbasis teknologi informasi	%	Renstra Kemenkes	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Target tercapai
30	Jumlah unit pelayanan dengan kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar (lebih dari 70%)	Unit	Renstra Dinkes 2021 - 2026	12.00	12.00	13.00	13.00	14.00	15.00	15.00	15.00	15.00	Target tercapai
31	Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan UKM dan UKP	Unit	Renstra Dinkes 2021 - 2026	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	Target tercapai

NO	Indikator *)	SPM/Standar Nasional/Daerah		Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi		Catatan Analisis Terhadap Target
		Satuan Target	Sumber Target	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2024	Tahun 2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
32	Jumlah publikasi data dan informasi kesehatan yang tersedia	Laporan	Renstra Dinkes 2021 - 2026	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Target tercapai
33	Jumlah rekomen dasi izin rumah sakit kelas C, D, dan fasilitas pelaya nan kesehatan yang telah terbit	Rekomendasi	Renstra Dinkes 2021 - 2026	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Capaian dibawah target (tidak tercapai)
34	Persentase unit pelayanan dengan ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar	%	Renstra Kemkes RI	23.07	30.76	38.46	46.15	53.84	61.53	76.92	92.30	100	Target tercapai
35	Jumlah nakes yang dikeluarkan surat rekomendasi izin praktek	Oang	Renstra Dinkes 2021 - 2026	373.00	373.00	373.00	373.00	373.00	373.00	373.00	373.00	373.00	Target tercapai

NO	Indikator *)	SPM/Standar Nasional/Daerah		Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi		Catatan Analisis Terhadap Target
		Satuan Target	Sumber Target	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2024	Tahun 2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
36	Jumlah laporan beze tting yang tersedia	Laporan	Renstra Dinkes 2021 - 2026	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Target tercapai
37	Jumlah tenaga kesehatan yang melakukan peni ngkatan kompetensi melalui pendidikan formal	Orang	Renstra Dinkes 2021 - 2026	2.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	27.00	10.00	10.00	Target tercapai
38	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman memenuhi syarat	%	Renstra Dinkes 2021 - 2026	43.61	62.96	69.45	67.94	71.99	74.98	65.79	67.94	71.99	Target tercapai
39	Jumlah industri rumah tangga dan nomor P-IRT yang diberikan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	IRT	Renstra Dinkes 2021 - 2026	30.00	40.00	35.00	40.00	30.00	30.00	169	120	140	Target tercapai

NO	Indikator *)	SPM/Standar Nasional/Daerah		Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi		Catatan Analisis Terhadap Target
		Satuan Target	Sumber Target	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2024	Tahun 2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
40	Jumlah sarana post market produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga yang dilakukan pengawasan	Sarana	Renstra Dinkes 2021 - 2026	35.00	70.00	80.00	80.00	80.00	80.00	70.00	80.00	80.00	Target tercapai
41	Persentase desa/kelurahan yang menerapkan kebijakan Germas	%	Renstra Kemkes RI	0.00	45.07	50.70	56.33	60.56	66.19	71.83	80.28	84.50	Target tercapai
42	Persentase peserta advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor yang diberikan pelatihan	%	Renstra Kemkes RI	0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Target tercapa

NO	Indikator *)	SPM/Standar Nasional/Daerah		Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi		Catatan Analisis Terhadap Target
		Satuan Target	Sumber Target	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2024	Tahun 2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
43	Jumlah posyandu aktif	Posyandu	Renstra Kemkes RI	186.00	188.00	191.00	193.00	195.00	197.00	215	215	220	Target tercapai
44	Jumlah kelurahan/desa yang dilakukan advokasi penerapan kebijakan Germas	Kel/ Desa	Renstra Kemkes RI	24.00	32.00	35.00	39.00	43.00	46.00	51	51	55	Target tercapai
45	Jumlah tenaga lintas sektor yang diberikan sertifikat bimbingan teknis	Orang	Renstra Dinkes 2021 - 2026	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	84	-	50	Target tercapai

MISI 5 : Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional dan Unggul

NO	Indikator *)	SPM/Standar Nasional/Daerah		Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi		Catatan Analisis Terhadap Target
		Satuan Target	Sumber Target	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Sasaran II : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD													

NO	Indikator *)	SPM/Standar Nasional/Daerah		Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi		Catatan Analisis Terhadap Target
		Satuan Target	Sumber Target	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	Renstra Dinkes 2021 - 2026	76.40	76.70	77.00	77.50	78.00	78.50	77.89	80.00	80.10	Target tercapai
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Renstra Dinkes 2021 - 2026	0.00	80.00	82.00	85.00	88.00	90.05	89.29	90.05	91.00	Target tidak tercapai
3	Persentase puskesmas dengan pelayanan berbasis teknologiinformasi	Persentase	Renstra Kemkes RI	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Target tercapai
4	Persentase rekomendasi temuan yang diselesaikan	Persentase	Renstra Dinkes 2021 - 2026	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Target tercapai
5	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Dokumen	Renstra Dinkes 2021 - 2026	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	Target tercapai

NO	Indikator *)	SPM/Standar Nasional/Daerah		Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi		Catatan Analisis Terhadap Target
		Satuan Target	Sumber Target	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
6	Jumlah laporan keuangan tersedia	Laporan	Renstra Dinkes 2021 - 2026	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Target tercapai
7	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang tersedia (CalBMD)	Dokumen	Renstra Dinkes 2021 - 2026	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Target tercapai
8	Jumlah laporan pelayanan administrasi kepegawaian	Laporan	Renstra Dinkes 2021 - 2026	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Target tercapai
9	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diterima	Laporan	Renstra Dinkes 2021 - 2026	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Target tercapai
10	Jumlah laporan RKB/RKBU tersedia	Laporan	Renstra Dinkes 2021 - 2026	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Target tercapai

NO	Indikator *)	SPM/Standar Nasional/Daerah		Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi		Catatan Analisis Terhadap Target
		Satuan Target	Sumber Target	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
11	Jumlah laporan jasa penunjang yang tersedia	Laporan	Renstra Dinkes 2021 - 2026	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Target tercapai
12	Jumlah laporan inventaris barang yang tersedia	Laporan	Renstra Dinkes 2021 - 2026	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Target tercapai
13	Jumlah dokumen capaian kinerja pelayanan BLUD yang tersedia	Laporan	Renstra Dinkes 2021 - 2026	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Target tercapai

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah dan masyarakat) di masa datang, suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, tidak dapat terlepas dari berbagai isu penting yang berkembang baik pada tatanan pemerintah pusat, tatanan daerah maupun global. Adapun isu-isu penting terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Indeks kesehatan keluarga yang masih rendah
2. Masih ditemukannya kasus kematian ibu dan bayi
3. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh serta permasalahan nasional gizi seperti kasus stunting
4. Belum optimalnya mutu dan akses pelayanan kesehatan
5. Masih tingginya masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular
6. Belum optimalnya pelaksanaan SPM bidang kesehatan
7. Belum optimalnya pengawasan Obat dan Makanan
8. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan secara menyeluruh (UHC)
9. Lambatnya pelaksanaan Operasional RS Purnama Tipe D secara menyeluruh
10. Belum optimalnya pengembangan lingkungan yang sehat
11. Belum optimalnya pelaksanaan imunisasi dasar lengkap.
12. Belum maksimalnya pemenuhan sarana serta prasarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dasar dan rujukan serta kesiapan akreditasi fasyankes.
13. Masih kurangnya jumlah dan pemerataan penempatan serta penugasan SDM Kesehatan di daerah.
14. Kurangnya kompetensi tenaga kesehatan
15. Belum optimalnya manajemen dan pengembangan sistem informasi kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
16. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal.

Setelah menemukan permasalahan dalam pelayanan yang dilakukan Dinas Kesehatan, maka akan dilihat juga permasalahan atau isu-isu strategis secara luas yaitu isu internasional, nasional, regional maupun isu lainnya yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung yang akan mendorong atau menghambat dalam pelayanan.

TABEL 2.11
IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGI

DINAMIKA INTERNASIONAL	DINAMIKA NASIONAL	DINAMIKA LOKAL/REGIONAL
1	2	3
1. SDGs **2. Universal Coverage** **3. Global Warming (Pemanasan Global)** **4. MEA (Masyarakat Economi Asia)** **5.Hak Azazi Manusia (HAM)** **6.Tobacco Control (FTCT)**	1. Regulasi Kementerian kesehatan belum semua mendukung Daerah 2. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang berkembang pesat 3. Kebijakan JKN 4. Indikator MDGs yang berakhir tahun 2015 dan ada beberapa yang masih off track 5. Kebijakan Cukai dan Pajak Rokok 6. Perubahan lingkungan menyebabkan bencana alam dan sosial 7. Pengarusutamaan Gender 8. Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK) 9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Permenkes dan Permendagri	1. Belum adanya pemerataan tenaga kesehatan 2. Sarana kesehatan (Puskesmas Pembantu) yang tidak standar 3. Perijinan, standarisasi dan akreditasi pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan 4. Persaingan fasilitas pelayanan kesehatan 5. Belum semua masyarakat menjadi peserta jaminan kesehatan 6. Kerjasama lintas sektor dalam upaya kesehatan belum optimal 7. Tingginya perilaku merokok dan pola makan tidak sehat 8. Kondisi lingkungan umum, lingkungan kesehatan kurang mendukung

Berdasarkan analisis, kajian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, maka dapat dirumuskan beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan antara lain:

1. Mengupayakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RS;
2. Melaksanakan percepatan dalam mencapai target SDG's dan SPM Kesehatan yang belum sepenuhnya tercapai;
3. Pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan cakupan desa/kelurahan siaga aktif dan cakupan rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat;
4. Mengoptimalkan sistem informasi dan manajemen penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan, pengawasan obat dan makanan serta untuk pengumpulan data pelaporan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun adalah Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). Selain itu juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja, target sasaran serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun berupa rancangan awal RKPD.

Perbandingan rancangan awal RKPD dengan program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan OPD terhadap pelayanan kesehatan terdapat perbedaan antara lain adanya kegiatan baru dan perubahan jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD karena dimasing-masing program & kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang direncanakan. Rincian perbandingan rancangan awal RKPD dengan program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan OPD terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Karimun disajikan pada Tabel.2.11.

Tabel 2.12 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2023 (T-C.31)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BIDANG KESEHATAN					**217.650.000**					**261.993.251.659**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**		**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**82 Angka**	**116.481.140.866**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**		**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**82 Angka**	198.378.499.394	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	4 Dokumen	105.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	4 Dokumen	174.036.414	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	83.973.214	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	11.633.500	
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen	-	0	

1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	3 Laporan	50.000.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	3 Laporan	48.429.700	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	1 Laporan	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Laporan	1 Laporan	30.000.000	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan tersedia	1 Laporan	65,310,785,504	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan tersedia	1 Laporan	81.659.593.587	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karimun	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	910 Orang/ bulan	64,254,345,504	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karimun	Jumlah Orang	610 Orang/ bulan	80.861.705.187	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Karimun	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	1,036,440,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Karimun	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	787.890.000	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Karimun	Jumlah laporan keuangan triwulan tersedia	4 Laporan	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	Jumlah Laporan	2 Laporan	9.998.400	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	1 Dokumen	10.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	1 Dokumen	24.999.641	
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Karimun	Jumlah berita acara hasil rekonsiliasi BMD	1 Dokumen	10.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Jumlah Laporan	1 Dokumen	24.999.641	

1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah laporan pelayanan administrasi kepegawaian	1 Laporan	355,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah laporan pelayanan administrasi kepegawaian	-	0	
1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	Jumlah unit sarana dan prasaran disiplin pegawai yang disediakan	1 Unit	200,000,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	Jumlah Unit	-	0	
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Karimun	Jumlah stel pakaian dinas yang disediakan	100 Paket	80,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	Jumlah Paket	-	0	
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Karimun	Jumlah dokumen Daftar Urut Kepangkatan yang tersedia	1 Dokumen	5,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	Jumlah Dokumen	-	0	
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Karimun	Jumlah dokumen penilaian kinerja tahunan pegawai yang tersedia	1 Dokumen	5,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	Jumlah Dokumen	-	0	
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Karimun	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	2 Orang	25,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Karimun	Jumlah Pegawai	-	0	
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Pera turan Perundang- Undangan	Kab. Karimun	Jumlah peserta sosialisasi peraturan Perundang-Undangan dilaksanakan	10 Orang	10,000,000	Sosialisasi Pera turan Perundang- Undangan	-	Jumlah Orang	-	0	

1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Karimun	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dilaksanakan	20 Orang	30,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	-	Jumlah Orang	-	0	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diterima	1 Laporan	229,500,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diterima	1 Laporan	1.594.576.711	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Karimun	Jumlah Paket	6 Paket	3,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Karimun	Jumlah Paket	6 Paket	55.702.922	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karimun	Jumlah Paket	16 Paket	25,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karimun	Jumlah Paket	16 Paket	209.910.530	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Karimun	Jumlah Paket	1 Paket	5,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Karimun	Jumlah Paket	1 Paket	42.780.923	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Karimun	Jumlah Paket	1 Paket	10,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Karimun	Jumlah Paket	1 Paket	528.833.680	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Karimun	Jumlah Paket	5 Paket	25,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Karimun	Jumlah Paket	5 Paket	151.017.654	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	125 Dokumen	16,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	125 Dokumen	5.700.000	
1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Karimun	Jumlah Paket	20 Paket	10,000,000	Penyediaan Bahan/Material	-	Jumlah Paket	-	0	

1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	1 Laporan	20,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	1 Laporan	13.298.002	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	1 Laporan	100,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	1 Laporan	587.333.000	
1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	Jumlah Dokumen	-	0	
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Jumlah Dokumen	-	0	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan RKB/RKBU yang tersedia	1 Laporan	560,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan RKB/RKBU yang tersedia	1 Lapora	1.931.500	
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Karimun	Jumlah Unit	1 Unit	400,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Unit	-	0	
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebeleur	Kab. Karimun	Jumlah Paket	5 Unit	20,000,000	Pengadaan Mebeleur	Kab. Karimun	Jumlah Paket	-	0	
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Unit	1 Unit	20,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Unit	1 Unit	993.100	
1.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Unit	2 Unit	20,000,000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	Jumlah Unit	1 Unit	938.400	

1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Unit	1 Unit	50,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Unit	-	0	
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Unit	1 Unit	50,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Unit	-	0	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan	1 Laporan	926,168,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan	1 Laporan	19.469.557.055	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	1 Laporan	2,300,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	1 Laporan	8.446.580	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	1 Laporan	50,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	1 Laporan	1.754.752.108	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	1 Laporan	5,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	1 Laporan	10.308.367	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	1 Laporan	868,868,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	1 Laporan	17.696.050.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan inventaris barang yang tersedia	1 Laporan	210,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan inventaris barang yang tersedia	1 Laporan	1.021.367.125	

1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeli haraan, Biaya Pemeliha raan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Karimun	Jumlah Kendaraan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	30,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Karimun	Jumlah Kendaraan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	42.531.900	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Karimun	Jumlah Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	100,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Karimun	Jumlah Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	167.110.200	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Peralatan & Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Peralatan & Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	17.997.339	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Gedung Kantor/ Bangunan	3 Unit	25,000,000	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Gedung Kantor/ Bangunan	5 Unit	773.273.004	
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Sarana dan Prasarana	3 Unit	25,000,000	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Sarana dan Prasarana	2 Unit	15.112.200	
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	10 Unit	25,000,000	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	3 Unit	5.342.482	

1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah laporan inventaris barang yang tersedia	7 Dokumen	48,774,687,362	Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah laporan inventaris barang yang tersedia	7 Dokumen	91.687.809.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Karimun	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	7 Faskes	48,774,687,362	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Karimun	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	7 Faskes	91.687.809.000	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Indeks Keluarga Sehat**	**0.20 Angka**	**95,431,859,134**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Indeks Keluarga Sehat**	**0.20 Angka**	**58.214.703.450**	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah unit pelayanan dengan kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	13 Unit	32.925.700.500	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah unit pelayanan dengan kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	13 Unit	20.468.296.147	

1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Kab. Karimun	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	9,000,000,000	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	-	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	-	0	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Kab. Karimun	Jumlah Puskesmas yang Dibangun	1 Unit	7,000,000,000	Pembangunan Puskesmas	Kab. Karimun	Jumlah Puskesmas yang Dibangun	-	0	
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Faskes Lainnya yang Dibangun	2 Unit	910,000,000	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	Jumlah Faskes Lainnya yang Dibangun	-	0	
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Karimun	Jumlah Rudin Nakes yang Dibangun	1 Unit	500,000,000	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	-	Jumlah Rudin Nakes yang Dibangun	-	0	
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Kab. Karimun	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan	2 Unit	75,000,000	Pengembangan Rumah Sakit	-	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan	-	0	
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Kab. Karimun	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan sarpras, alkes dan SDM agar sesuai standar	0	0	Pengembangan Puskesmas	-	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan sarpras, alkes dan SDM agar sesuai standar	-	0	
1.02.02.2.01.07	Pengembangan faskes lainnya	Kab. Karimun	Jumlah faskes lainnya yang Ditingkatkan sarpras, alkes dan SDM agar sesuai standar	0	0	Pengembangan faskes lainnya	-	Jumlah faskes lainnya yang Ditingkatkan sarpras, alkes dan SDM agar sesuai standar	-	0	
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Kab. Karimun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	1 Unit	650,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	-	0	

1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kab. Karimun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	2 Unit	500,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	-	0	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	7 Unit	1,950,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	-	0	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Karimun	Jumlah Sarana di Fasyankes yang Disediakan	3 Unit	600,000,000	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	Jumlah Sarana di Fasyankes yang Disediakan	-	0	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Karimun	Jumlah Prasarana Fasyankes yang Disediakan	7 Unit	1,905,700,500	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Karimun	Jumlah Prasarana Fasyankes yang Disediakan	1 Unit	301.699.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Karimun	Jumlah Alkes/ Alat Penunjang Medik Fasyankes yang Disediakan	120 Unit	2,010,000,000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Karimun	Jumlah Alkes/ Alat Penunjang Medik Fasyankes yang Disediakan	120 Unit	17.429.157.526	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kab. Karimun	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi	60 Unit	550,000,000	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi	9 Unit	10.000.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Kab. Karimun	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	116 Paket	2,500,000,000	Pengadaan Obat, Vaksin	Kab. Karimun	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	110 Paket	999.999.002	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kab. Karimun	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	50 Paket	3,500,000,000	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kab. Karimun	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	50 Paket	1.632.440.619	

1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Karimun	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	6 Unit	1,000,000,000	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	-	0	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Karimun	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	20 Unit	200,000,000	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	2 Unit	45.000.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Karimun	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0	0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		0	
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), yang Didistribusikan ke Puskesmas	15 Paket	75,000,000	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), yang Didistribusikan ke Puskesmas	15 Paket	50.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan UKM dan UKP	15 Unit	62,186,158,634	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan UKM dan UKP	15 Unit	37.460.612.803	

1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Karimun	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3545 Orang	475,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Karimun	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3545 Orang	645.453.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Karimun	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3552 Orang	605,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Karimun	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3552 Orang	48.621.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Karimun	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3526 Orang	150,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Karimun	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3526 Orang	1.600.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Karimun	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8683 Orang	150,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Karimun	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19.756 Orang	145.350.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Karimun	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17207 Orang	75,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Karimun	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42.559 Orang	587.177.000	

1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Karimun	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	156757 Orang	100,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Karimun	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	173.628 Orang	100.120.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Karimun	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10117 Orang	75,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Karimun	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25.334 Orang	352.047.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Karimun	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11393 Orang	75,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Karimun	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3158 Orang	75,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3158 Orang	226.055.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Karimun	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	218 Orang	75,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Karimun	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	241 Orang	128.600.000	

1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Karimun	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1731 Orang	250,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Karimun	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.082 Orang	849.891.134	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Karimun	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5613 Orang	200,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Karimun	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6.261 Orang	184.106.862	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	8.800.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kab. Karimun	Jumlah dokumen	1 Dokumen	500,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	300.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Karimun	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Dokumen	500,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	3.087.482.633	

1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Karimun	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Dokumen	75,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	138.229.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	500,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	488.037.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	250,000,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	461.707.500	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	1 Dokumen	525,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab. Karimun	Jumah Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	250,000,000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	356.938.432	

1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kab. Karimun	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	13504 Orang	30,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1487 Orang	27.884.500	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kab. Karimun	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	14 Orang	25,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kab. Karimun	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6 Orang	92.470.000	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dokumen	250,000,000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	200.000.100	
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	250,000,000	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	-	Jumlah Dokumen	-	0	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	100,000,000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	2.004.676.000	

1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Karimun	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	1 Dokumen	40,030,000,000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	20.479.999.648	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Kab. Karimun	Jumlah Spesimen yang Didistribusikan	25 Paket	25,000,000	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan /Nasional	Kab. Karimun	Jumlah Spesimen yang Didistribusikan	3 Paket	5.500.000	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	-	Jumlah Dokumen	-	0	
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Karimun	Jumlah Fasyankes	4 Unit	300,000,000	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Karimun	Jumlah Fasyankes	-	0	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1,250,000,000	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.560.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	13 Dokumen	8,892,654,634	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	13 Dokumen	5.145.964.994	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	287,124,000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen		0	

1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah Faskes yang Terakreditasi	13 Unit	1,266,380,000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	-	Jumlah Faskes yang Terakreditasi		0	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	1 Laporan	325,000,000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan	Kab. Karimun	Jumlah Laporan		32.600.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1,000,000,000	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen		2.100.000	
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Karimun	Jumlah PSC 119 Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan RS Dalam Satu SPGDT	55322 Keluarga	500,000,000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Karimun	Jumlah PSC 119 Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan RS Dalam Satu SPGDT		0	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kab. Karimun	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Nakes Puskesmas	942 Orang	250,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kab. Karimun	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Nakes Puskesmas		0	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab. Karimun	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	69 Orang	250,000,000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab. Karimun	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		66.700.000	

1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kab. Karimun	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13 Orang	250,000,000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kab. Karimun	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kab. Karimun	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	3 Tatanan	250,000,000	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kab. Karimun	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		17.200.000	
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Kab. Karimun	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	55322 Keluarga	500,000,000	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Kab. Karimun	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok		0	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Jumlah publikasi data dan infor masi kesehatan yang tersedia	1 Laporan	50,000,000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Jumlah publikasi data dan infor masi kesehatan yang tersedia		75.531.500	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen		29.305.500	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	Jumlah Dokumen		46.226.000	
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Kab. Karimun	Jumlah Alat/ Perangkat SIK dan Jaringan Internet yang Disediakan	1 Unit	25,000,000	Pengadaan Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Kab. Karimun	Jumlah Alat/ Perangkat SIK dan Jaringan Internet yang Disediakan		0	

1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rekomendasi izin rumah sakit kelas C, D, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah terbit	1 Rekomendasi	270,000,000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rekomendasi izin rumah sakit kelas C, D, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah terbit		210.263.000	
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	50,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya		11.178.000	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	40,000,000	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar		0	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab. Karimun	Jumlah Faskes yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	170,000,000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab. Karimun	Jumlah Faskes yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		199.085.000	

1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	10,000,000	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		0	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		**Persentase unit pelayanan dgn ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar**	**38.46 %**	**25,000,000**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		**Persentase unit pelayanan dgn ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar**		751.515.987	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah tenaga kesehatan yang dikeluarkan surat rekomendasi izin praktek	373 Tenaga Kesehatan	10,000,000	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah tenaga kesehatan yang dikeluarkan surat rekomendasi izin praktek		20.000.001	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen		20.000.001	
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen		0	

1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan bezetting yang tersedia	1 Laporan	10,000,000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan bezetting yang tersedia		73.344.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Karimun	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasyankes	1 Orang	10,000,000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Karimun	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasyankes		10.000.000	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Karimun	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan SDMK yang tersedia	0	0	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		63.344.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah tenaga kesehatan yang melakukan peningkatan kompetensi melalui pendidikan formal	10 Tenaga Kesehatan	5,000,000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah tenaga kesehatan yang melakukan peningkatan kompetensi melalui pendidikan formal		658.171.986	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1 Orang	5,000,000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		658.171.986	

1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		**% sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman memenuhi syarat**	**53.48 %**	**317,000,000**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		**% sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman memenuhi syarat**		374.498.000	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan usaha mikro obat tradisional yang diberikan rekomendasi izin	10 Sarana	42,000,000	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan usaha mikro obat tradisional yang diberikan rekomendasi izin		64.730.000	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Karimun	Jumlah dokumen	1 Dokumen	22,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Karimun	Jumlah dokumen		0	

1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Karimun	Jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi (UMOT)	10 Sarana	10,000,000	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Karimun	Jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi (UMOT)		64.730.000	
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Karimun	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	1 Sarana	10,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin		0	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah industri rumah tangga dan nomor P-IRT yang diberikan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	35 Sarana	50,000,000	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah industri rumah tangga dan nomor P-IRT yang diberikan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga		156.850.000	

1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen		156.850.000	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah TPM yang diberikan rekomendasi sertifikat laik higiene	30 TPM	150,000,000	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah TPM yang diberikan rekomendasi sertifikat laik higiene		0	

1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen		0	
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Jumlah tempat pengelolaan makanan yang diberikan stiker pembinaan	35 TPM	35,000,000	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Jumlah tempat pengelolaan makanan yang diberikan stiker pembinaan		0	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kab. Karimun	Jumlah dokumen	1 Dokumen	35,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Jumlah dokumen		0	

1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Jumlah sarana post market produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga yang dilakukan pengawasan	80 Sarana	40,000,000	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Jumlah sarana post market produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga yang dilakukan pengawasan		152.918.000	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Karimun	Jumlah produk dan sarana produksi makanan minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	6 Unit	20,000,000	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Jumlah produk dan sarana produksi makanan minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan		152.918.000	
1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	-	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 Dokumen	20,000,000	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga		Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		0	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		**% desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan Germas**	**50.70 %**	**5,395,000,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		**% desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan Germas**		**4.274.034.828**	

1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah posyandu aktif purnama dan mandiri	191 Posyandu	4,550,000,000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah posyandu aktif purnama dan mandiri		3.529.200.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Karimun	Jumlah dokumen	1 Dokumen	4,550,000,000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Karimun	Jumlah dokumen		3.529.200.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kelurahan /desa yang dilakukan advokasi penerapan kebijakan Germas	35 Kel./Desa	345,000,000	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kelurahan /desa yang dilakukan advokasi penerapan kebijakan Germas		94.928.546	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Karimun	Jumlah dokumen	1 Dokumen	345,000,000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Karimun	Jumlah dokumen		94.928.546	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah tenaga lintas sektor yang diberikan sertifikat bimbingan teknis	30 Orang	500,000,000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah tenaga lintas sektor yang diberikan sertifikat bimbingan teknis		649.906.282	

1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Karimun	Jumlah dokumen	1 Dokumen	500,000,000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Karimun	Jumlah dokumen		649.906.282	

Tabel 2.13
EVALUASI REALISASI RENJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2023

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		Keluaran (Output)	Hasil (outcome)	Per masalahan	Unit Kerja	Urusan
			(Rp.)	(%)					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
BIDANG KESEHATAN KABUPATEN KARIMUN (Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, BPFAK)		**287.236.152.873**	**264.610.215.987**	**92.12**					
I	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**55.803.202.718**	**47.304.997.661**	**84.77**					

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		Keluaran (Output)	Hasil (outcome)	Per masalahan	Unit Kerja	Urusan
			(Rp.)	(%)					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.418.564.205	19.967.846.528	97.79	15 unit pelayanan dengan kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar (>70%)	Meningkatnya ketersediaan fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat	-	Dinkes, RSUD M.Sani, RSUD Tg.Batu, BPFAK	Urusan Kesehatan
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.010.450.013	27.036.619.354	77.22	15 unit pelayanan yang melaksanakan UKM dan UKP	Meningkatnya layanan UKM dan UKP	-	Dinkes, RSUD Tg. Batu Kundur, BPFAK, Puskesmas	Urusan Kesehatan
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasI	70.045.500	64.709.445	92.38	1 publikasi data dan informasi kesehatan yang tersedia	Tersedianya dukungan pelayanan berasis teknologi informasi	-	Dinkes	Urusan Kesehatan
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	304.143.000	235.822.334	77.54	0 faskes dilakukan akreditasi	Terselenggaranya penerbitan izin RS kelas C dan D serta fasyankes tk. daerah	Tidak dilaksanakan karna Covid-19 sesuai Intruksi Kemenkes	Dinkes	Urusan Kesehatan

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		Keluaran (Output)	Hasil (outcome)	Per masalahan	Unit Kerja	Urusan
			(Rp.)	(%)					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
II	**Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan**	**751.515.887**	**547.188.200**	**72.81**					
1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	20.000.001	16.922.350	84.61	tenaga kesehatan yang dikeluarkan surat rekomendasi izin praktek	Terselenggaranya perlindungan praktik tenaga kesehatan	-	Dinkes (SDK)	Urusan Kesehatan
2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	73.343.900	44.350.000	60.47	1 laporan bezetting	Terselenggaranya rencana kebutuhan pemenuhan SDMK	-	- RSUD M.Sani - RSUD Tg. Batu Kundur - Puskesmas	Urusan Kesehatan
3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	658.171.986	485.915.850	73.83	10 nakes yang melakukan peningkatan kompetensi melalui pendidikan formal	Terwujudnya tenaga kesehatan yang bermutu	-	Dinkes (SDK)	Urusan Kesehatan

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		Keluaran (Output)	Hasil (outcome)	Per masalahan	Unit Kerja	Urusan
			(Rp.)	(%)					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
III	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**374.498.000**	**260.594.700**	**69.59**					
1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	64.730.000	12.319.000	19.03	-	Tersedianya penyelenggaraan perizinan	-	Dinkes (SDK)	Wajib Kesehatan
2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	156.850.000	117.866.800	75.15	95 sarana P-IRT	Terselenggaranya penerbitan sertifikat produksi pangan	-	Dinkes (SDK)	Wajib Kesehatan
3	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-	-	-	Terselenggaranya penerbitan sertifikat laik hygiene TPM	-	Dinkes (Kesmas)	Wajib Kesehatan

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		Keluaran (Output)	Hasil (outcome)	Per masalahan	Unit Kerja	Urusan
			(Rp.)	(%)					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	152.918.000	130.408.900	85,28	70 sarana	Terselenggaranya pengawasan post market	-	Dinkes (SDK)	Wajib Kesehatan
IV	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**5.016.700.428**	**3.506.020.296**	**69.89**					
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/KotaReguler Bidang Kesehatan)	4.208.700.000	3.338.663.600	79.33	205 Posyandu yang aktif purnama dan mandiri	Terselenggaranya advokasi kemi traan peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	-	Dinkes (Kesmas)	Wajib Kesehatan
2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	158.094.146	5.681.546	3.59	17 kelurahan /desa yang dilakukan advokasi penerapan kebijakan germas	Terlaksananya advokasi penerapan Germas	-	Dinkes (Kesmas)	Wajib Kesehatan

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		Keluaran (Output)	Hasil (outcome)	Per masalahan	Unit Kerja	Urusan
			(Rp.)	(%)					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	649.906.282	161.675.150	24.88	70 tenaga lintas sektor yang diberikan sertifikat bimtek	Terlaksananya pengembangan UKBM	-	Puskesmas	Wajib Kesehatan
V	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**225.290.235.840**	**212.991.415.130**	**94.54**					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	174.036.414	132.041.725	75.87	4 Dokumen perencanaan perangkat daerah	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	Dinkes (Sekretariat) RSUD M.Sani	Wajib Kesehatan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	92.504.997.551	85.966.498.908	92.93	1 Laporan keuangan	Terselenggaranya administrasi keuangan	-	Dinkes (Sekretariat)	Non Urusan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	29.458.000	98.19	1 Laporan	Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	Dinkes (Sekretariat)	Non Urusan

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		Keluaran (Output)	Hasil (outcome)	Per masalahan	Unit Kerja	Urusan
			(Rp.)	(%)					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.156.297.085	1.310.580.709	60.78	1 Laporan	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	-	Dinkes - RSUD M.Sani - RSUD Tg. Batu Kundur - Puskesmas	Non Urusan
5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	26.416.300	1.929.400	7.30	1 Laporan	Terselenggaranya pengadaan barak milik daerah	-	Dinkes - RSUD M.Sani - RSUD Tg. Batu Kundur - Puskesmas	Non Urusan
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.961.614.756	18.748.516.482	89.44	1 Laporan	Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	Dinkes - RSUD M.Sani - RSUD Tg. Batu Kundur - Puskesmas	Non Urusan

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		Keluaran (Output)	Hasil (outcome)	Per masalahan	Unit Kerja	Urusan
			(Rp.)	(%)					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.054.565.093	746.612.794	70.80	1 Laporan	Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah	-	Dinkes - RSUD Tg. Batu Kundur - Puskesmas	Non Urusan
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	108.387.309.000	106.063.078.112	97.86	7 Dokumen	Terselenggaranya pelayanan BLUD	-	- RSUD M.Sani - Puskesmas	Non Urusan

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat tahun 2023 berdasarkan hasil musrenbang mulai dari Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten diperoleh beberapa kegiatan Program yang memerlukan dukungan anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat yang harus diakomodir dan kemudian didiskusikan dalam Forum Perangkat Daerah. Berdasarkan analisis semua program dan kegiatan yang diusulkan dari hasil musrembang sudah tersedia dan diakomodir pada Rencana Kerja (Renja) tahunan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.

Dalam hal usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan berasal dari masyarakat melalui Musrenbang dan usulan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Hasil pokok-pokok pikiran DPRD dan masyarakat yang telah tertuang pada Renja dan dianggarkan pada tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.14
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023
KABUPATEN KARIMUN (T-C.32)

No	Pogram/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Indeks Keluarga Sehat		
1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah unit pelayanan dengan kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar		
1.1.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Desa Parit Kec. Selat Gelam		1 Unit Pustu	Musrenbang & Pokir
1.1.2	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tanjungberlian Kota, Kec. Kundur Utara	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Batu miring 600 meter	Pokir
		Kec. Tebing		14 Unit Kursi, 2 unit kipas	Pokir
1.1.3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tanjungberlian Kota, Kec. Kundur Utara	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 tabung Oksigen	Pokir
1.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan UKM dan UKP		

No	Pogram/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.2.1	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kec. Kundur Barat, Kundur, Moro	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	650 jiwa	Pokir
2	P**ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT**A		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 kegiatan	Pokir
2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan jasa penunjang yang tersedia		
2.1.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Desa Parit Kec. Selat Gelam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 orang nakes	Pokir

Tabel 2.15. Usulan Kegiatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan yang di Anggarkan pada APBD Tahun 2023

No	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Lokasi
1	DPRD	Masyarakat kurang mampu membutuhkan pelayanan kesehatan untuk dapat BPJS Kesehatan	Premi BPJS bagi masyarakat miskin	Kec. Kundur Kec. Kundur Barat

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Pada Tahun 2024 tema Pembangunan Nasional adalah

"**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,"**

Yang dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) yang dilaksanakan melalui sejumlah Major Project,myakni:

1. PN 1 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumabuhan berkualitas dan berkadilan.
2. PN 2 adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. PN 3 adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing.
4. PN 4 Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan.
5. PN 5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar.
6. PN 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. PN 7 adalah memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Arah kebijakan RPJMN 2020-2024 bidang kesehatan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Visi Kementerian Kesehatan 2020-2024 didalam Rancangan Rencana Strategis yaitu:

"Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan"

Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pilar layanan dasar dan perlindungan sosial mencakup tata kelola kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan,

peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Pilar peningkatan produktivitas mencakup pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, penguatan IPTEK-Inovasi, dan peningkatan prestasi olahraga. Pilar pembangunan karakter mencakup revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, penguatan moderasi beragama, peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

Upaya untuk mewujudkan visi dan misi Presiden Tahun 2020-2024 maka Kemenkes menjabarkan visi tersebut sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Menurunkan angka stunting pada balita
3. Memperbaiki pengelolaan jaminan kesehatan nasional
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Terdapat lima tujuan strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024, yaitu :

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Dari lima tujuan strategis yang ditetapkan, dijabarkan 8 (delapan) sasaran strategis dalam menjalankan pembangunan kesehatan 2020-2024. Delapan sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
5. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Pada dokumen RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan misi ketiga Bupati terpilih Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa. Untuk bisa berdaya saing maka Bupati Karimun menetapkan sasaran "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat" dan berdasarkan sasaran tersebut maka Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun telah merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Karimun sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

3.2.1. Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan sesuai visi dan misi yang ingin dicapai. Penetapan tujuan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka implementasi visi dan misi. Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pembangunan khususnya bidang kesehatan dan membantu Bupati Karimun dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
   Indikator kinerja meningkatnya kesehatan masyarakat yaitu Angka Harapan Hidup (AHH). Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat di Kabupaten Karimun dari 71.00 tahun diawal rentra (2021) menjadi 71.70 tahun diakhir renstra (2026)
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
   Indikator kinerja meningkatnya kesehatan masyarakat yaitu Indeks Pelayanan Publik. Indeks pelayanan publik di Kabupaten Karimun di tahun diakhir renstra (2026) bernilai 4.00.

Indikator tujuan Dinas Kesehatan dinilai pada akhir periode yaitu ditahun 2026.

3.2.2. Sasaran Strategi SKPD

Sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan sasaran yang akan di capai selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD

Indikator sasaran disajikan pada tabel 3.2.

Indikator program yang juga tercantum didalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Indeks Keluarga Sehat
2. Persentase unit pelayanan dengan ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar
3. Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman memenuhi syarat (Apotik, toko obat, toko alat kesehatan, optikal, UOMOT, P-IRT, TPM)
4. Persentase desa/kelurahan yang menerapkan kebijakan Germas
5. Indeks Kepuasan Masyarakat

Sinkronisasi prioritas Pembangunan Kabupaten Karimun dengan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun:

Tabel 3.1. Singkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran OPD

Prioritas Pembangunan Kab. Karimun	Sasaran Dinas Kesehatan
1. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan yang terstandarisasi dan terjangkau oleh masyarakat. 2. Peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. 3. Peningkatan penanggulangan narkoba, HIV/AIDS	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
4. Peningkatan cakupan kualitas dan standarisasi pelayanan publik. 5. Penerapan sistem perjanjian kinerja dan pakta integritas bagi seluruh pegawai.	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD

Tabel 3.2. Tujuan dan Indikator Tujuan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Tujuan Pada RPJMD	Target Indikator Kinerja Pada RPJMD					Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan Pada Renstra	Target Indikator Kinerja Pada Tujuan Perangkat Daerah (RENSTRA)				
	2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026
Indeks Pembangunan Manusia	Nilai 72.25	Nilai 72.66	Nilai 73.08	Nilai 73.49	Nilai 73.91	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	-	-	-	-	71.70 Tahun
Indeks Tata Kelola Pemerintahan	Nilai 65.00	Nilai 65.00	Nilai 66.21	Nilai 67.35	Nilai 69.00	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks pelayanan publik	-	-	-	-	Nilai 4.00

Tabel 3.3. Sasaran dan Indikator Sasaran Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Sasaran Pada RPJMD	Target Indikator Kinerja Pada RPJMD					Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Pada Renstra	Target Indikator Kinerja Pada Sasaran Perangkat Daerah (RENSTRA)				
	2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026
Angka Harapan Hidup (AHH)	71.20 Tahun	71.30 Tahun	71.40 Tahun	71.50 Tahun	71.70 Tahun	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu	110.68	100	92	83.01	80
							Angka Kematian Bayi	12.5	12.2	11.9	11.6	11.1
							% Balita Stunting	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8
							% Desa Stop BABS	35.2	39.4	43.7	46.5	50.7
Indeks Pelayanan Publik	Nilai 3.01	Nilai 3.50	Nilai 3.51	Nilai 3.55	Nilai 4.00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai 76.7	Nilai 77	Nilai 77.5	Nilai 78	Nilai 78.5

3.3. Program Dan Kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun tahun 2025 adalah merupakan bagian dari sistem manajemen perencanaan pembangunan partisipatif yaitu pendekatan yang lebih mengedepankan dan mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan perencanaan diawali dari tingkat Musrenbang Desa dan Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, Forum OPD hingga Musrenbang tingkat Kabupaten serta tingkat Provinsi dan rencana kerja SKPD yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Karimun 2021–2026 serta sinkronisasi dari berbagai usulan dengan memperhatikan agenda pembangunan di pusat, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Karimun dimana pembangunan sarana & prasarana pelayanan publik perlu menjadi prioritas.

Selain usulan-usulan dari kegiatan Musrenbang, faktor-faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan perumusan program dan kegiatan tahun 2025 adalah:

a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
b. Pencapaian SDGs
c. Pencapaian SPM bidang Kesehatan
d. Prioritas dan Arah Kebijakan Nasional
e. Usulan dari masyarakat dalam forum Musrenbang Kabupaten
f. Kebijakan Anggaran

Rencana pembangunan bidang kesehatan Tahun 2025 dilakukan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

I. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

A. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
2) Pengembangan Puskesmas
3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
5) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
7) Pengembangan Rumah Sakit

8) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga

B. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
17) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
18) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
19) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
20) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
21) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
22) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
23) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
24) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
25) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
26) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
27) Operasional Pelayanan Rumah Sakit
28) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
29) Operasional Pelayanan Puskesmas
30) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
31) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
32) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
33) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
34) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
35) Pengelolaan Kawasan tanpa rokok
36) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

37) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/ Kota
38) Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
39) Pengelolaan Layanan Imunisasi
40) Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik
41) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji

C. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

D. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

II. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

A. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

1) Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

B. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

C. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

III. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

A. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

B. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

C. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

IV. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

A. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

2) Teknologi Tepat Guna (TTG) Sesuai Lokal Spesifik Daerah Dalam Pengamanan Kualitas Air Minum dan Sanitasi Aman

B. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

C. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

SASARAN STRATEGIS 2:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

E. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1) Pengadaan Mebel
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

I. Peningkatan Pelayanan BLUD
1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Dalam menyusun rencana kegiatan tahun 2025, Dinas Kesehatan telah memasukan indikator SPM didalam kegiatannya. Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator SPM tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

KEGIATAN SPM DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

(Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020)

No	Indikator SPM	Nama Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	410.106.000
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	51.812.000
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	377.521.093
4	Pelayanan kesehatan balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	146.999.800

No	Indikator SPM	Nama Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	976.700.000
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	82.083.000
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	333.400.000
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	76.100.000
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	297.357.437
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	172.400.000
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.048.699.250
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	196.900.000
JUMLAH			**4.170.078.580**

Tabel 3.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT DAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN KARIMUN

No	Pogram/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Indeks Keluarga Sehat		
1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah unit pelayanan dengan kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar (lebih dari 70%) (Unit)		
1.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Desa Lebuh, Kec Belat	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	1 Unit Pustu	Usulan Aspirasi
		Desa Sungai Ungar, Kec. Kundur		1 Unit Pustu	Usulan Pokir
1.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan UKM dan UKP		
1.2.1	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kel. Sungai Pasir, Kec.Meral	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 promkes/ kampanye	Usulan Pokir

Tabel 3.6

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Dinas Kesehatan Kab. Karimun (T-C.33)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				325.812.482.153				225.935.000.000
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat		92 Angka	220.187.997.405			93 Angka	174.539.299.500
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia		5 Dokumen	189.228.500			4 Dokumen	195.000.000
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karimun, Kecamatan Tebing, Kundur & Meral	2 Dokumen	93.669.500	PAD		1 Dokumen	75.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kab. Karimun, Kecamatan Tebing, Kundur & Meral	1 Dokumen	15.000.000	PAD		1 Dokumen	10.000.000
1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Karimun, Kecamatan Tebing, Kundur & Meral	0	0	PAD		1 Dokumen	10.000.000
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karimun, Kecamatan Tebing, Kundur & Meral	2 Laporan	80.559.000	PAD		3 Laporan	85.000.000
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karimun, Kecamatan Tebing, Kundur & Meral	0 Laporan	0	PAD		2 Laporan	15.000.000
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan tersedia		1 Laporan	110.723.825.229			1 Laporan	90.920.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	610 Orang/ bulan	109.878.833.229	DAU		610 Orang/ bulan	90.000.000.000
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	1 Dokumen	844.992.000	DAU		1 Dokumen	900.000.000
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Kab. Karimun, Kecamatan Meral	0 Laporan	0			4 Laporan	20.000.000
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang tersedia		1 Dokumen	20.000.000			1 Dokumen	15.000.000
1	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Karimun, Kecamatan Meral	0 Dokumen	0			1 Dokumen	5.000.000
1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	1 Laporan	20.000.000	PAD		1 Laporan	10.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelayanan administrasi kepegawaian yang tersedia		1 Laporan	371.000.000			1 Laporan	160.000.000
1	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	Unit	0			0 Unit	0
1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Karimun, Kecamatan Meral	1 Paket	291.000.000	PAD		1 Paket	80.000.000
1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	Kab. Karimun, Kecamatan Meral	1 Dokumen	10.000.000	PAD		1 Dokumen	5.000.000
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Karimun, Kecamatan Meral	1 Dokumen	10.000.000	PAD		1 Dokumen	5.000.000
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Karimun, Kecamatan Meral	2 Orang	60.000.000	PAD		2 Orang	25.000.000
1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	Kab. Karimun, Kecamatan Meral	0 Orang	0			10 Orang	25.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Kab. Karimun, Kecamatan Meral	0 Orang	0			20 Orang	20.000.000
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat		1 Laporan	2.244.494.332			1 Laporan	1.505.000.000
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	10 Paket	890.672.152	PAD		6 Paket	35.000.000
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	15 Paket	277.921.100	PAD		16 Paket	300.000.000
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	8 Paket	39.782.600	PAD		1 Paket	20.000.000
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	8 Paket	222.824.100	PAD		16 Paket	320.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	12 Paket	124.082.180	PAD		15 Paket	125.000.000
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	36 Dokumen	5.000.000	PAD		5 Dokumen	10.000.000
1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	0 Paket	0	PAD		20 Paket	20.000.000
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	1 Laporan	11.973.200	PAD		1 Laporan	10.000.000
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	1 Laporan	672.239.000	PAD		1 Laporan	650.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	Dokumen	0	PAD		1 Dokumen	5.000.000
1	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	Dokumen	0	PAD		1 Dokumen	10.000.000
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan RKB/RKBU yang tersedia		1 Laporan	2.609.029.880			1 Laporan	125.000.000
1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	Unit	0	PAD		1 Unit	25.000.000
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	10 Unit	27.996.000	PAD		1 Unit	20.000.000
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	21 Unit	1.581.033.880	PAD		10 Unit	20.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	Unit	0	PAD		2 Unit	15.000.000
1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	4 Unit	1.000.000.000	PAD		1 Unit	20.000.000
1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	Unit	0	PAD		1 Unit	25.000.000
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang yang tersedia		1 Laporan	20.002.416.568			1 Laporan	13.216.000.000
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	1 Laporan	6.924.000	PAD		1 Laporan	6.000.000
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	1 Laporan	1.154.075.568	PAD		1 Laporan	1.200.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	1 Laporan	20.209.000	PAD		1 Laporan	10.000.000
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	1 Laporan	18.821.208.000	PAD		1 Laporan	12.000.000.000
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan inventaris barang yang tersedia		1 Laporan	333.844.000			1 Laporan	190.000.000
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	3 Unit	54.748.000	PAD		3 Unit	30.000.000
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	5 Unit	140.589.000	PAD		4 Unit	100.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	52 Unit	34.302.000	PAD		10 Unit	10.000.000
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	1 Unit	4.205.000	PAD		3 Unit	15.000.000
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	1 Unit	100.000.000	PAD		3 Unit	25.000.000
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	Unit	0	PAD		1 Unit	10.000.000
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah dokumen capaian kinerja BLUD yang tersedia		15 Dokumen	83.694.158.896			15 Dokumen	68.213.299.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUD M.Sani, Kec. Karimun, Meral, Tebing, Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat	15 Faskes	83.694.158.896	Pendapatan Lain Yang Sah		15 Faskes	68.213.299.500
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga Sehat**		**0.25 Angka**	**99.172.756.121**			**0.30 Angka**	**46.205.700.500**
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit pelayanan dengan kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar		14 Unit	52.647.283.541			15 Unit	13.975.700.500
1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kab. Karimun, Kec.Kundur	1 Unit	12.000.000.000	PAD		0	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kab. Karimun, Kecamatan Karimun, Moro, Sugie Besar	Unit	0			1 unit	2.000.000.000
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Kab. Karimun, Semua Kecamatan	Unit	0			0 Unit	0
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Kab. Karimun, Semua Kecamatan	Unit	0			1 Unit	300.000.000
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarpras, Alkes & SDM agar Setiap Standar (unit)	Kab. Karimun, Kecamatan Tebing, Kundur Barat, Belat, Meral	1 Unit	90.000.000	PAD		5 Unit	2.755.700.500
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan	0	0			1 Unit	75.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	2.402.800.000	DAK PAD		1 Unit	100.000.000
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit	0			1 Unit	500.000.000
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	1.065.000.000	PAD		Unit	1.500.000.000
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 Unit	12.689.169.271	DAK PAD		30 Unit	1.000.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit	0			0 Unit	-
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasyankes	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasyankes yang terpelihara sesuai standar (unit)	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	396 Unit	293.488.320	DAK PAD		20 Unit	100.000.000
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	Kecamatan Tebing. Kecamatan Kundur	2 RS	19.606.200.000	DAK PAD		2 RS	2.000.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	204 Paket	4.250.625.950	DAK DAU PAD		200 Paket	3.500.000.000
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	205.329 Keluarga	25.000.000			205.329 Keluarga	25.000.000
1	02	02	2.01	0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Pelayanan Kesehatan	0			1 Pelayanan Kesehatan	20.000.000
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Paket	225.000.000	PAD		15 Paket	100.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan UKM dan UKP		15 Unit	46.230.010.580			15 Unit	31.970.000.000
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3565 Orang	410.106.000	DAK NON FISIK DAU PAD		3573 Orang	300.000.000
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3571 Orang	51.812.000	DAK NON FISIK DAU PAD		3590 Orang	50.000.000
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3544 Orang	377.521.093	DAK NON FISIK DAU PAD		3.555 Orang	80.000.000
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9069 Orang	146.999.800	DAK NON FISIK DAU PAD		9648 Orang	80.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.811 Orang	976.700.000	DAK NON FISIK DAU PAD		30.113 Orang	300.000.000
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	158.443 Orang	82.083.000	DAK NON FISIK DAU PAD		159.285 Orang	50.000.000
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.037 Orang	333.400.000	DAK NON FISIK DAU PAD		11.497 Orang	100.000.000
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.724 Orang	76.100.000	DAK NON FISIK DAU PAD		11.889 Orang	75.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3191 Orang	297.357.437	DAK NON FISIK DAU PAD		3207 Orang	120.000.000
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	227 Orang	172.400.000	DAK NON FISIK DAU PAD		231 Orang	75.000.000
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.735 Orang	1.048.699.250	DAK NON FISIK DAU PAD		1.738 Orang	500.000.000
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.692 Orang	196.900.000	DAK NON FISIK DAU PAD		5.731 Orang	150.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.600.000	PAD		1 Dokumen	5.000.000
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen	200.000	PAD		1 Dokumen	5.000.000
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.855.934.200	DAK Non Fisik PAD		1 Dokumen	500.000.000
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	83.200.000	DAK Non Fisik PAD		1 Dokumen	60.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	546.085.000	DAK Non Fisik PAD		1 Dokumen	500.000.000
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	396.860.800	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	300.000.000
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	43.980.000	PAD		1 Dokumen	25.000.000
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	453.638.000	DAK Non Fisik PAD		1 Dokumen	300.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1487 Orang	22.500.000	DAK Non Fisik PAD		1487 Orang	20.000.000
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Orang	37.900.000	DAK Non Fisik PAD		14 Orang	20.000.000
1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen	0	-		1 Dokumen	5.000.000
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.700.650.800	DAK Non Fisik PAD		1 Dokumen	1.750.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	30.404.736.000	PAD, DAU, Pajak Rokok		1 Dokumen	23.000.000.000
1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalah gunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 orang	1.200.000	DAK Non Fisik, PAD		100 orang	10.000.000
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan /Nasional yang Didistribusikan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Paket	73.700.000	DAK Non Fisik PAD		25 Paket	30.000.000
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	50.000.000	DAU, PAD		1 Dokumen	175.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasyankes yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit	0	-		1 Unit	20.000.000
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	300.000.000	PAD, Pendapatan lainnya yg Sah		1 Dokumen	30.000.000
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	2.366.146.000	DAK Non Fisik PAD Pendapatan lainnya yg Sah		13 Dokumen	2.400.000.000
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	198.099.000	DAK Non Fisik PAD		1 Dokumen	150.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Unit	28.756.000	DAK Non Fisik		1 Unit	20.000.000
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	52.730.000	DAK Non Fisik PAD		1 Laporan	20.000.000
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen	0	-		1 Dokumen	20.000.000
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah PSC 119 Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam SPGDT	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit	0	-		0 Unit	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.012 Orang	80.000.000	DAK Non Fisik PAD		398 Orang	50.000.000
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	428 Orang	176.900.000	DAK Non Fisik PAD		69 Orang	25.000.000
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Orang	4.300.000	DAK Non Fisik		13 Orang	20.000.000
1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Tatanan	5.800.000	DAK Non Fisik		0 Tatanan	15.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	172.321.000	DAK Non Fisik		1 Dokumen	40.000.000
1	02	02	2.02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/ Kota	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	30.000.000	PAD		1 Dokumen	10.000.000
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	688.801.200	DAK Non Fisik		1 Dokumen	330.000.000
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	19,800,000	DAK Non Fisik PAD		1 Dokumen	20,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	180,500,000	DAK Non Fisik, PAD		1 Dokumen	100,000,000
1	02	02	2.02	0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	996,754,000	PAD		1 Dokumen	25,000,000
1	02	02	2.02	0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	85,840,000	DAK Non Fisik, PAD		1 Dokumen	90,000,000
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah publikasi data dan informasi kesehatan yang tersedia		1 Laporan	270.462.000			1 Laporan	200.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	270.462.000	PAD DAK Non Fisik		1 Dokumen	200.000.000
1	2	2	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin rumah sakit kelas C, D, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah terbit		1 Rekomendasi	25.000.000			1 Rekomendasi	60.000.000
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	25.000.000	DAU, PAD		1 Unit	20.000.000
1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit	0	-		1 Unit	10.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit	0	-		1 Unit	20.000.000
1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen	0	-		1 Dokumen	10.000.000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase unit pelayanan dengan ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar**		**53,84 %**	**742.326.000**			**61,53 %**	**120.000.000**
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang dikeluarkan surat rekomendasi izin praktek		373 Tenaga Kesehatan	25.000.000			373 Tenaga Kesehatan	10.000.000
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	Kab. Karimun, Semua Kecamatan	1 Dokumen	25.000.000	DAU. PAD		1 Dokumen	5.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	Kab. Karimun, Semua Kecamatan	Dokumen	0	DAU, PAD		1 Dokumen	5.000.000
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan bezzeting yang tersedia		1 Laporan	115.446.000			1 Laporan	10.000.000
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah SDMK yang Memenuhi Standar di Fasyankes	Kab. Karimun, Semua Kecamatan	Orang	0	PAD		1300 Orang	5.500.000
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	Kab. Karimun, Semua Kecamatan	1 Dokumen	115.446.000	DAU, PAD, DAK Non Fisik		1 Dokumen	4.500.000
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang melakukan peningkatan kompetensi melalui pendidikan formal		10 Tenaga Kesehatan	601.880.000			10 Tenaga Kesehatan	100.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDMK Tk. Daerah Kabupaten /Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kab. Karimun, Semua Kecamatan	1 Orang	601.880.000	PAD, DAK Non Fisik		1 Orang	100.000.000
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman memenuhi syarat**		**71,99 %**	**539.890.000**			**74,98 %**	**170.000.000**
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan usaha mikro obat tradisional yang diberikan rekomendasi izin		17 Sarana	41.097.627			10 Sarana	40.000.000
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, UMOT	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	41.097.627	DAK Non Fisik-POM		1 Dokumen	40.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertetu perusahanaan rumah tangga yang diberikan sertifikat		0 Sarana	0			0 Sarana	0
1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	DAK Non Fisik, PAD		0 Dokumen	0
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga dan nomor P-IRT yang diberikan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga		30 Sarana	210.930.000			20 Sarana	50.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	210.930.000	PAD, DAK Non Fisik		1 Dokumen	50.000.000
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM diberikan rekomendasi sertifikat laik higiene		0 TPM	0			30 TPM	15.000.000
1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPM antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan DAM	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen	0			1 Dokumen	15.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah tempat pengelolaan makanan yang diberikan stiker pembinaan		0 TPM	0			50 TPM	15.000.000
1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen	0			1 Dokumen	11.000.000
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah sarana post market produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga yang dilakukan pengawasan		80 Sarana	287.863.000			80 Sarana	50.000.000
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit	287.863.000	DAK Non Fisik-POM, PAD		6 Unit	50.000.000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase desa/kelurahan yang menerapkan kebijakan Germas**		**60,56 %**	**5.169.512.000**			**66,19 %**	**4.900.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah posyandu aktif purnama dan mandiri		195 Posyandu	4.866.400.000			197 Posyandu	4.550.000.000
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen	Kab. Karimun, Semua Kecamatan	1 Dokumen	4.766.400.000	DAK Non Fisik, PAD		1 Dokumen	4.500.000.000
1	02	05	2.01	0002	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	Jumlah Rumah Tangga	Kab. Karimun, Semua Kecamatan	10 Rumah Tangga	100.000.000	PAD		5 Rumah Tangga	50.000.000
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan/desa yang dilakukan advokasi penerapan kebijakan Germas		43 Kel./Desa	45.214.000			46 Kel./Desa	100.000.000
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen	Kab. Karimun, Semua Kecamatan	1 Dokumen	45.214.000	DAK Non Fisik, PAD		1 Dokumen	100.000.000
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah tenaga lintas sektor yang diberikan sertifikat bimbingan teknis		30 Orang	257.898.000			30 Orang	250.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis UKBM		458 orang				458 orang	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Kab. Karimun, Semua Kecamatan	1 Dokumen	257.898.000	DAK Non Fisik, PAD		1 Dokumen	250.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan bidang kesehatan.

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Karimun namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Prov, dan sumber sumber pendanaan lainnya).

Plafon anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan Dinas kesehatan Kabupaten Karimun untuk tahun 2025 sebesar Rp. 325.812.482.153,- (Tiga ratus dua puluh lima miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus delapan pilih dua ribu seratus lima puluh tiga rupiah) yang dilaksanakan dengan 5 (lima) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 96 (sembilan puluh enam) sub kegiatan dengan pembagian per unit sebagai berikut:

a.	Pagu Dinas Kesehatan	Rp. 117.050.963.777,-
b.	Pagu RSUD M.Sani	Rp. 123.366.901.398,-
c.	Pagu RSUD Tg. Batu Kundur	Rp. 33.180.057.583,-
d.	Pagu UPTD BPFAK	Rp. 498.072.520,-
e.	Pagu UPTD Puskesmas	Rp. 51.716.486.875,-

Sumber dana yang mendukung pelaksanaan kegiatan program pembangunan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun tahun 2025 berasal dari Pendapatan asli daerah (PAD),

Dana alokasi umum (DAU), Dana alokasi khusus (DAK), Pajak Rokok, Pendapatan dana kapitasi JKN, dan Pendapatan dari BLUD.

Dalam rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan tahun 2025, program dan kegiatan akan difokuskan pada pencapaian kinerja kepala perangkat daerah yang juga menunjang capaian kinerja kepala daerah dan program-program prioritas nasional. Semua program dan kegiatan didinas kesehatan menunjang pada indikator kinerja utama perangkat daerah. Prioritas kegiatan tahun 2025 Dinas Kesehatan yang disusun untuk mencapai indikator kinerja perangkat daerah sebagaimana capaian kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyrakat

Pada program ini pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota direncanakan akan dilakukan penyediaan sarana, prasarana dan obat-obatan dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan bayi yaitu melalui peningkatan pelayanan kesehatan. Penyediaan sarana dan prasarana seperti pengembangan puskesmas pembantu berupa pembangunan sumber air bersih di Puskesmas Pembantu dan rehabilitasi Puskesmas Pembantu di beberapa desa dan kelurahan yang bertujuan untuk menambah akses fasilititas kesehatan bagi ibu hamil dan ibu melahirkan. Di program ini juga direncanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan, pengembangan RSUD Tanjung Batu dan rehabilitasi, pemeliharaan, pengembangan RSUD Muhammad Sani. Di kegiatan ini juga direncanakan pengadaan prasarana yang menunjang pelayanan kesehatan seperti alat kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas dan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan. Ketersediaan obat-obat essensial juga direncanakan pada kegiatan ini di tahun 2025. Jumlah anggaran yang direncanakan untuk kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sebesar Rp.99.712.646.748,-

Pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi akan dilakukan peningkatan pelayanan promotif preventif, peningkatan pelayanan maternal dan neonatal yang berkesinambungan dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan, surveilans kesehatan ibu dan anak, pelaksanaan kelas ibu hamil, rapat koordinasi dengan perangkat desa dan masyarakat terkait perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Pada kegiatan ini juga dalam rangka menurunkan angka stunting dan gizi buruk pada balita akan dilakukan peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang balita, dan gizi. Kunjungan lapangan oleh tenaga Puskesmas pada ibu hamil KEK, anemia, ibu hamil resiko tinggi, bayi dan balita

dengan masalah gizi serta pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil. Peningkatan upaya promotif dan preventif serta edukasi kepada masyarakat terkait faktor resiko penyakit tidak menular dan peningkatan skrining dan deteksi dini penyakit tidak menular, pengembangan real time surveilans dan pengendalian vektor penyebab penyakit demam berdarah juga dilaksanakan pada kegiatan ini yang mana sangat berpengaruh kepada angka kesakitan dan angka kematian kabupaten karimun.

Pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di Desa/Kelurahan dan pemicuan untuk berperilaku hidup bersih sehat dan stop Buang Air Besar Sembarangan bagi Desa/ Kelurahan di subkegiatan pelayanan kesehatan lingkungan pada kegiatan ini sangat mempengaruhi persentase stop BABS kabupaten yang menjadi IKU kepala OPD.
Disamping pemenuhan IKU perangkat daerah, di program ini juga direncanakan kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan daerah seperti pemenuhan dua belas indikator SPM bidang kesehatan dan kegiatan percepatan penurunan stunting. Jumlah anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.29.822.097.141,-
Dalam memenuhi IKU perangkat daerah dan prioritas pembangunan diperlukan dukungan sistem informasi kesehatan yang baik. Pengelolaan sistem informasi kesehatan juga telah direncanakan untuk tahun 2025 baik di Dinkes, RSUD, BPFAK dan Puskesmas. Jumlah anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.29.822.097.141,-

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pada program ini akan dilakukan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP yang mana perencanaan tersebut merupakan upaya untuk memenuhi ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di fasilitas kesehatan. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar juga akan dilakukan seperti pemberian informasi terkait disiplin ilmu tenaga kesehatan dan pelaksanaan ujian kompetensi tenaga kesehatan. Diharapkan dengan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan maka pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat akan menjadi baik dan sesuai standar.
Jumlah anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.742.326.000,-

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT), pengendalian dan pengawasan untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga yang mana kegiatan ini bermaksud untuk memberikan jaminan agar produk sediaan farmasi, makanan dan minuman yang beredar di masyarakat sudah sesuai standar, telah mengantongi izin dan tidak kadaluarsa.
Jumlah anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.539.890.000,-

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pada program ini dilakukan promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan pemberdayaan masyarakat termasuk revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat lainnya serta penggerakan masyarakat untuk hidup sehat, melakukan pebinaan dan advokasi kepada kader Posyandu, Posbindu, Desa/ Kelurahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini khususnya *IVA Test* dan pemeriksaan payudara klinis (SADANIS), menggalakkan kegiatan Posyandu dan Posbindu yang melibatkan komitmen lintas sektor untuk bekerjasama, Memasyaratkan gerakan hidup sehat (Germas) dengan menitikberatkan pada upaya perubahan gaya hidup sehat di masyarakat untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan danperilaku masyarakat yang kurang sehat. Jumlah anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.5.169.512.000,-

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Mengoptimalkan pelaksanaan administrasi dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan dengan outcome meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang kegiatannya dianggarkan melalui Program Penunjang urusan pemerintah daerah.
Jumlah anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.220.187.997.405,-

Program dan kegiatan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun tahun 2025, sesuai dengan penetapan RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025 pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.14. Rencana Kerja dan Pendanaan Bidang Kesehatan Tahun 2025

No				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Pelaksana Kegiatan
					Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1				2	3	4	5
1				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			
1	**2**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			
DINAS KESEHATAN					**117.050.963.777**		
1	**2**	**1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**68.990.597.278**		
1	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154.355.500	PAD	Dinkes
1	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67.157.401.778	DAU, PAD	Dinkes
1	2	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000	PAD	Dinkes
1	2	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	371.000.000	PAD	Dinkes
1	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	425.398.000	PAD	Dinkes
1	2	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.278.000	PAD	Dinkes
1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	782.952.000	PAD	Dinkes
1	2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.212.000	PAD	Dinkes
1	**2**	**2**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**41.805.416.872**		
1	2	2	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.920.519.292	DAK, PAD, DAU	Dinkes

No				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Pelaksana Kegiatan
					Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1				2	3	4	5
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.784.889.580	DAK, DAU, PAD, Pajak Rokok	Dinkes
1	2	2	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	75.008.000	DAU, PAD	Dinkes
1	2	2	2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	DAU, PAD	Dinkes
1	**2**	**3**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**742.326.000**		
1	2	3	2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	25.000.000	DAU, PAD	Dinkes
1	2	3	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	115.446.000	DAU, PAD, DAK	Dinkes
1	2	3	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	601.880.000	DAU, PAD, DAK	Dinkes
1	**2**	**4**		**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**539.890.6270**		
1	2	4	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	41.097.627	PAD	Dinkes
1	2	4	2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	210.930.000	PAD, DAK	Dinkes
1	2	4	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0	-	Dinkes

No				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Pelaksana Kegiatan
					Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1				2	3	4	5
1	2	4	2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	0	-	Dinkes
1	2	4	2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	287.863.000	PAD, DAK	Dinkes
1	**2**	**5**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**4.972.733.000**		
1	2	5	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.866.400.000	PAD, DAK, DAU	Dinkes
1	2	5	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.814.000	PAD, DAK	Dinkes
1	2	5	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	63.519.000	PAD, DAK	Dinkes
RSUD M.SANI					**123.366.901.398**		
1	**2**	**1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**98.365.901.745**		
1	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.873.000	PAD	RSUD M.Sani
1	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.096.629.593	DAU, PAD	RSUD M.Sani
1	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	847.999.152	PAD	RSUD M.Sani
1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.386.400.000	PAD	RSUD M.Sani
1	2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.812.482.153	PAD	RSUD M.Sani

No				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Pelaksana Kegiatan
					Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1				2	3	4	5
1	2	1	2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	70.000.000.000	Pendapatan dari BLUD	RSUD M.Sani
1	**2**	**2**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**25.000.999.653**		
1	2	2	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.999.653	DAK, PAD	RSUD M.Sani
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-	
1	2	2	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0	-	
1	**2**	**3**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**0**		
1	2	3	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	-	
1	**2**	**5**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0**		
1	2	5	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-	
RSUD TG. BATU KUNDUR					**33.180.057.583**		
1	**2**	**1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.679.292.987**		
1	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	-	RSUD Tg. Batu Kundur

No				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Pelaksana Kegiatan
					Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1				2	3	4	5
1	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.407.734.028	DAU, PAD	RSUD Tg. Batu Kundur
1	2	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	-	-
1	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	357.169.400	PAD	RSUD Tg. Batu Kundur
1	2	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.519.751.880	PAD	RSUD Tg. Batu Kundur
1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.269.589.679	PAD	RSUD Tg. Batu Kundur
1	2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.048.000	PAD	RSUD Tg. Batu Kundur
1	**2**	**2**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**22.500.764.596**		
1	2	2	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	22.500.764.596	DAK, PAD	RSUD Tg. Batu Kundur
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-	-
1	2	2	2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-	-
1	**2**	**3**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**0**		
1	2	3	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	-	-

No				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Pelaksana Kegiatan
					Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1				2	3	4	5
1	2	3	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-	-
BPFAK					**498.072.520**		
1	**2**	**1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**243.072.520**		
1	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.848.000	DAU, PAD	BPFAK
1	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.649.000	PAD	BPFAK
1	2	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	PAD	BPFAK
1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.757.520	PAD	BPFAK
1	2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.818.000	PAD	BPFAK
1	**2**	**2**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**255.000.000**		
1	2	2	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	225.000.000	DAK, PAD	BPFAK
1	2	2	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	30.000.000	DAK, DAU,PAD	BPFAK
PUSKESMAS					**51.716.486.875**		

No				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Pelaksana Kegiatan
					Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1				2	3	4	5
1	**2**	**1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**41.909.132.875**		
1	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.042.211.830	DAU, PAD	Puskesmas
1	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	583.278.780	PAD	Puskesmas
1	2	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	-	-
1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.439.717.369	PAD	Puskesmas
1	2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.766.000	PAD	Puskesmas
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	11.694.158.896	Pendapatan dari BLUD	Puskesmas
1	**2**	**2**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**9.610.575.000**		
1	2	2	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	-	
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.445.1231.000	DAK, PAD, Pendapatan dana kapitasi JKN	Puskesmas
1	2	2	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	165.454.000	DAK, PAD	
1	**2**	**3**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**0**		
1	2	3	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	-	

No				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Pelaksana Kegiatan
					Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1				2	3	4	5
1	**2**	**5**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**196.779.000**		
1	2	5	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-	
1	2	5	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.400.000	DAK	Puskesmas
1	2	5	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	194.379.000	DAK	Puskesmas

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 yang memuat target kinerja Dinas Kesehatan yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan penganggaran yang telah disediakan.

Output Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun adalah program tahunan Dinas Kesehatan yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Dinas Kesehatan Kabupaten. Rencana Kerja (RENJA) ini selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kesehatan. Disamping itu juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kesehatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun tahun 2025 harus menerapkan prinsip efisien, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, perlu keterpaduan dan singkronisasi baik dalam kegiatan, program maupun antar instansi terkait dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antar pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Berdasarkan Permendagri 54 tahun 2010 yang sudah di gantikan dengan Permendagri 86 tahun 2017, maka di tetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun tahun 2025 dalam upaya singkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber APBD Kabupaten Karimun, APBD Provinsi Kepulauan Riau maupun yang bersumber APBN harus memperhatikan atau mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya

seperti RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi, visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Karimun, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA/DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.

Kaidah-kaidah lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan rencana kerja (Renja) tahun 2025 diantaranya :

1. Pemerintah bersama masyarakat, termasuk dunia usaha (swasta) berkewajiban untuk melaksanakan, mendukung program pembangunan kesehatan.
2. Adanya interkoneksitas instansi terkait dalam penyelenggaraan program dan kegiatan agar terjaga efisiensi, keterpaduan dan keberlangsungan program.
3. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh aparatur dari instansi Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas.
4. Selalu melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait penyelenggaraan program.
5. Melakukan konsultasi dan konsulidasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementrian Kesehatan RI.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan, terhadap penggunaan anggaran, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan program.

5.3. Rencana Tindak lanjut

1. Menjadikan Renja sebagai pedoman pelaksanaan kerja bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun pada tahun anggaran 2025.
2. Menjadikan acuan bagi Bidang dan UPT dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
3. Menyusun Program kegiatan dan anggaran dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2025
4. Menyusun jadwal pelaksanaan, memperkirakan penggunaan anggaran tiap triwulan serta penggunaan sarana, prasarana dan tenaga yang akan melaksanakan rencana kerja.
5. Mempersiapkan format-format laporan pelaksanaan yang didasarkan pada target pencapaian Renstra dan target pencapaian SPM.
6. Menyusun rencana monitoring dan evaluasi.
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembangunan kesejahteraan Kesehatan.

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARIMUN

LAMPIRAN

RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2024

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026			Unit Kerja Penanggung jawab
					Lokasi	Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARIMUN							**325,812,482,153**			**225,935,000,000**	
I. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat				**Angka Harapan Hidup (AHH)**		**72.10 Tahun**	**105,624,484,748**		**72.15 Tahun**	**51,395,700,500**	
	I.1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan			**1) Angka Kematian Ibu**		**123,53**	**per 100.000 KH**		**125.59**	**per 100.000 KH**	
				2) Angka Kematian Bayi		**10.60**	**per 1000 KH**		**10.00**	**per 1000 KH**	
				3) Persentase Balita Stunting		**6.85**	**%**		**6.80**	**%**	
				4) Persentase Desa Stop BABS		**46.50**	**%**		**50.70**	**%**	
		1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga Sehat**	**Kab Karimun**	**0.25 Angka**	**99,172,756,121**	**PAD, DAK, DAU, Pajak Rokok**	**0.30 Angka**	**46,205,700,500**	**Dinkes dan UPTD**
		1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit pelayanan dengan kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar		15 Unit	52,647,283,541		15 Unit	13,975,700,500	
		1 02 02 2.01 0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kab. Karimun, Kec.Kundur	1 Unit	12,000,000,000	PAD	0	0	RSUD Tg.Batu Kundur
		1 02 02 2.01 0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kab. Karimun, Kecamatan Selat Gelam	Unit	0		1 unit	2,000,000,000	Dinkes, Bidang Yankes
		1 02 02 2.01 0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	-	Unit	0		0 Unit	0	Dinkes, Bidang Yankes, Kesmas
		1 02 02 2.01 0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	-	Unit	0		1 Unit	300,000,000	Dinkes, RSUD
		1 02 02 2.01 0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarpras, Alkes & SDM agar Setiap Standar (unit)	Kab. Karimun, Kecamatan Kundur Barat	1 Unit	90,000,000	PAD	5 Unit	2,755,700,500	Dinkes, Bidang Yankes

Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026			Unit Kerja Penanggung jawab
									Lokasi	Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	
		1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	0	0		1 Unit	75,000,000	Dinkes, Bidang Yankes, Kesmas
		1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Kab. Karimun, Kecamatan Tebing, Kecamatan Kundur	2 Unit	2,402,800,000	DAK PAD	1 Unit	100,000,000	RSUD Tg. Batu Kundur, RSUD M.Sani
		1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-	Unit	0		1 Unit	500,000,000	Dinkes, Bidang Yankes
		1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Karimun, Kecamatan Kundur, Kundur Utara, Belat, Sugie besar	4 Unit	1,065,000,000	PAD	Unit	1,500,000,000	Dinkes, Bidang Yankes, Kesmas
		1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 Unit	12,689,169,271	DAK PAD	30 Unit	1,000,000,000	Dinkes, Bidang SDK
		1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	-	Unit	0		0 Unit	-	Dinkes, Bidang SDK
		1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasyankes	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasyankes yang terpelihara sesuai standar (unit)	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	396 Unit	293,488,320	DAK PAD	20 Unit	100,000,000	Dinkes, Bidang SDK

Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026			Unit Kerja Penanggung jawab
									Lokasi	Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	
		1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	Kab. Karimun. Kecamatan Tebing. Kecamatan Kundur	2 RS	19,606,200,000	DAK PAD	2 RS	2,000,000,000	RSUD Tg. Batu Kundur, RSUD M.Sani
		1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	204 Paket	4,250,625,950	DAK DAU PAD	200 Paket	3,500,000,000	Dinkes, Bidang SDK
		1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	205.329 Keluarga	25,000,000	PAD	205.329 Keluarga	25,000,000	Dinkes, Bidang Yankes, Kesmas, P2P
		1	02	02	2.01	0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	-	0 Pelayanan Kesehatan	0	-	1 Pelayanan Kesehatan	20,000,000	Dinkes, Bidang Yankes, Kesmas, P2P, SDK
		1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Paket	225,000,000	PAD	15 Paket	100,000,000	BPFAK

Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026			Unit Kerja Penanggung jawab
									Lokasi	Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	
		1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan UKM dan UKP		15 Unit	46,230,010,580		15 Unit	31,970,000,000	
		1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3565 Orang	410,106,000	DAK NON FISIK DAU PAD	3573 Orang	300,000,000	Bidang Kesmas, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3571 Orang	51,812,000	DAK NON FISIK DAU PAD	3590 Orang	50,000,000	Bidang Kesmas, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3544 Orang	377,521,093	DAK NON FISIK DAU PAD	3.555 Orang	80,000,000	Bidang Kesmas, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9069 Orang	146,999,800	DAK NON FISIK DAU PAD	9648 Orang	80,000,000	Bidang Kesmas, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.811 Orang	976,700,000	DAK NON FISIK DAU PAD	30.113 Orang	300,000,000	Bidang Kesmas, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	158.443 Orang	82,083,000	DAK NON FISIK DAU PAD	159.285 Orang	50,000,000	Bidang P2P, UPTD Puskesmas

Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026			Unit Kerja Penanggung jawab
									Lokasi	Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	
		1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.037 Orang	333,400,000	DAK NON FISIK DAU PAD	11.497 Orang	100,000,000	Bidang Kesmas, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.724 Orang	76,100,000	DAK NON FISIK DAU PAD	11.889 Orang	75,000,000	Bidang P2P, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3191 Orang	297,357,437	DAK NON FISIK DAU PAD	3207 Orang	120,000,000	Bidang P2P, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	227 Orang	172,400,000	DAK NON FISIK DAU PAD	231 Orang	75,000,000	Bidang P2P, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.735 Orang	1,048,699,250	DAK NON FISIK DAU PAD	1.738 Orang	500,000,000	Bidang P2P, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.692 Orang	196,900,000	DAK NON FISIK DAU PAD	5.731 Orang	150,000,000	Bidang P2P, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2,600,000	PAD	1 Dokumen	5,000,000	Bidang P2P, UPTD Puskesmas

Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026			Unit Kerja Penanggung jawab
									Lokasi	Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	
		1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen	200,000	PAD	1 Dokumen	5,000,000	Bidang P2P, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2,855,934,200	DAK Non Fisik PAD	1 Dokumen	500,000,000	Bidang Kesmas, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	83,200,000	DAK Non Fisik PAD	1 Dokumen	60,000,000	Bidang Kesmas, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	546,085,000	DAK Non Fisik PAD	1 Dokumen	500,000,000	Bidang Kesmas, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	396,860,800	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Dokumen	300,000,000	Bidang Kesmas, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	43,980,000	PAD	1 Dokumen	25,000,000	Bidang Yankes, UPTD Puskesmas

Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026			Unit Kerja Penanggung jawab
									Lokasi	Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	
		1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	453,638,000	DAK Non Fisik PAD	1 Dokumen	300,000,000	Bidang P2P, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1487 Orang	22,500,000	DAK Non Fisik PAD	1487 Orang	20,000,000	Bidang P2P, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Orang	37,900,000	DAK Non Fisik PAD	14 Orang	20,000,000	Bidang P2P, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen	0	-	1 Dokumen	5,000,000	Bidang P2P, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,700,650,800	DAK Non Fisik PAD	1 Dokumen	1,750,000,000	Bidang P2P, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	30,404,736,000	PAD, DAU, Pajak Rokok	1 Dokumen	23,000,000,000	Bidang Yankes, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 orang	1,200,000	DAK Non Fisik, PAD	100 orang	10,000,000	Bidang P2P, UPTD Puskesmas

Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026			Unit Kerja Penanggung jawab
									Lokasi	Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	
		1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan /Nasional yang Didistribusikan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Paket	73,700,000	DAK Non Fisik PAD	25 Paket	30,000,000	Bidang P2P, Kesmas, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	50,000,000	DAU, PAD	1 Dokumen	175,000,000	Bidang Kesmas, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasyankes yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit	0	-	1 Unit	20,000,000	Bidang Yankes, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	300,000,000	PAD, Pendapatan lainnya yg Sah	1 Dokumen	30,000,000	Bidang Yankes, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	2,366,146,000	DAK Non Fisik PAD Pendapatan lainnya yg Sah	13 Dokumen	2,400,000,000	Bidang Yankes, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	198,099,000	DAK Non Fisik PAD	1 Dokumen	150,000,000	Bidang Yankes, UPTD Puskesmas

Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026			Unit Kerja Penanggung jawab
									Lokasi	Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	
		1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Unit	28,756,000	DAK Non Fisik	1 Unit	20,000,000	Bidang Yankes, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	52,730,000	DAK Non Fisik PAD	1 Laporan	20,000,000	Bidang P2P, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen	0	-	1 Dokumen	20,000,000	Bidang P2P, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah PSC 119 Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam SPGDT	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit	0	-	0 Unit	0	Bidang Yankes, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.012 Orang	80,000,000	DAK Non Fisik PAD	398 Orang	50,000,000	Bidang P2P, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	428 Orang	176,900,000	DAK Non Fisik PAD	69 Orang	25,000,000	Bidang P2P, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Orang	4,300,000	DAK Non Fisik	13 Orang	20,000,000	Bidang P2P, UPTD Puskesmas

Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026			Unit Kerja Penanggung jawab
									Lokasi	Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	
		1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Tatanan	5,800,000	DAK Non Fisik	0 Tatanan	15,000,000	Bidang P2P, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	172,321,000	DAK Non Fisik	1 Dokumen	40,000,000	Bidang Kesmas, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/ Kota	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	30,000,000	PAD	1 Dokumen	10,000,000	Bidang Kesmas, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	688,801,200	DAK Non Fisik	1 Dokumen	330,000,000	Bidang Kesmas, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	19,800,000	DAK Non Fisik PAD	1 Dokumen	20,000,000	Bidang Kesmas, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	180,500,000	DAK Non Fisik, PAD	1 Dokumen	100,000,000	Bidang P2P, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.02	0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	996,754,000	PAD	1 Dokumen	25,000,000	Bidang Yankes Dinkes

Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026			Unit Kerja Penanggung jawab
									Lokasi	Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	
		1	02	02	2.02	0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	85,840,000	DAK Non Fisik, PAD	1 Dokumen	90,000,000	Bidang P2P, UPTD Puskesmas
		1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah publikasi data dan informasi kesehatan yang tersedia		1 Laporan	270,462,000		1 Laporan	200,000,000	
		1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	270,462,000	PAD DAK	1 Dokumen	200,000,000	Sekretariat Dinkes, UPTD Puskesmas
		1	2	2	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin rumah sakit kelas C, D, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah terbit		1 Rekomendasi	25,000,000		1 Rekomendasi	60,000,000	
		1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	25,000,000	PAD	1 Unit	20,000,000	Bidang Yankes Dinkes
		1	02	02	02.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit	-	-	1 Unit	10,000,000	Bidang Yankes Dinkes
		1	02	02	02.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit	-	-	1 Unit	20,000,000	Bidang Yankes Dinkes

Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026			Unit Kerja Penanggung jawab
									Lokasi	Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	
		1	02	02	02.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen	-	-	1 Dokumen	10,000,000	Bidang Yankes Dinkes
		1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase unit pelayanan dengan ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar**	**Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**53.84%**	**742,326,000**		**61.53%**	**120,000,000**	
		1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang dikeluarkan surat rekomendasi izin praktek		373 Tenaga Kesehatan	25,000,000		373 Tenaga Kesehatan	10,000,000	
		1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	Kab. Karimun, Semua Kecamatan	1 Dokumen	25,000,000	PAD	1 Dokumen	5,000,000	Bidang SDK Dinkes
		1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	Kab. Karimun, Semua Kecamatan	Dokumen	0	-	1 Dokumen	5,000,000	Bidang SDK Dinkes
		1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan bezzeting yang tersedia		1 Laporan	115,446,000		1 Laporan	10,000,000	
		1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah SDMK yang Memenuhi Standar di Fasyankes	Kab. Karimun, Semua Kecamatan	Orang	0	-	1300 Orang	5,500,000	Bidang SDK Dinkes
		1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	Kab. Karimun, Semua Kecamatan	1 Dokumen	115,446,000	PAD, DAK Non fISIK	1 Dokumen	4,500,000	Bidang SDK Dinkes

Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026			Unit Kerja Penanggung jawab
									Lokasi	Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	
		1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang melakukan peningkatan kompetensi melalui pendidikan formal		10 Tenaga Kesehatan	601,880,000		1 Tenaga Kesehatan	100,000,000	
		1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDMK Tk. Daerah Kabupaten /Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kab. Karimun, Semua Kecamatan	1 Orang	601,880,000	PAD, DAK Non Fisik	1 Orang	100,000,000	Bidang SDK Dinkes
		1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman memenuhi syarat**		**71.99%**	**539,890,627**		**74.98%**	**170,000,000**	
		1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan usaha mikro obat tradisional yang diberikan rekomendasi izin		17 Sarana	41,097,627		10 Sarana	40,000,000	
		1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, UMOT	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	41,097,627	DAK Non Fisik-POM, PAD	1 Dokumen	40,000,000	Bidang SDK Dinkes
		1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertetu perusahanaan rumah tangga yang diberikan sertifikat		0 Sarana	0 Sarana		10 Sarana	0	

Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026			Unit Kerja Penanggung jawab
									Lokasi	Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	
		1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen	0	-	Dokumen	0	Bidang SDK Dinkes
		1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga dan nomor P-IRT yang diberikan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga		30 Sarana	210,930,000		20 Sarana	50,000,000	
		1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	210,930,000	PAD, DAK Non Fisik	1 Dokumen	50,000,000	Bidang SDK Dinkes
		1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM diberikan rekomendasi sertifikat laik higiene		0 TPM	0		30 TPM	15,000,000	

Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026			Unit Kerja Penanggung jawab
									Lokasi	Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	
		1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPM antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan DAM	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen	0	-	1 Dokumen	15,000,000	Dinkes, Bidang Kesmas
		1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah tempat pengelolaan makanan yang diberikan stiker pembinaan		0 TPM	0		50 TPM	15,000,000	
		1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen	0	-	1 Dokumen	15,000,000	Dinkes, Bidang Kesmas, SDK
		1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah sarana post market produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga yang dilakukan pengawasan		80 Sarana	287,863,000		80 Sarana	50,000,000	
		1	02	04	02.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit	287,863,000	DAK Non Fisik-POM, PAD	6 Unit	50,000,000	Dinkes, Bidang SDK
		1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase desa/kelurahan yang menerapkan kebijakan Germas**		**60,56%**	**5,169,512,000**		**66,19 %**	**4,900,000,000**	

Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026			Unit Kerja Penanggung jawab
									Lokasi	Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	
		1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah posyandu aktif purnama dan mandiri		195 Posyandu	4,866,400,000		197 Posyandu	4,550,000,000	
		1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen	Kab. Karimun, Semua Kecamatan	1 Dokumen	4,766,400,000	DAK Non Fisik, PAD	1 Dokumen	4,500,000,000	Dinkes, Bidang Kesmas
					2.01	0002	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	Jumlah Rumah Tangga	Kab. Karimun, Semua Kecamatan	10 Rumah Tangga	100,000,000	PAD	5 Rumah Tangga	50,000,000	Dinkes, Bidang Kesmas
		1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan/desa yang dilakukan advokasi penerapan kebijakan Germas		43 Kel./Desa	45,214,000		46 Kel./Desa	100,000,000	
		1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen	Kab. Karimun, Semua Kecamatan	1 Dokumen	45,214,000	DAK Non Fisik, PAD	1 Dokumen	100,000,000	Dinkes, Bidang Kesmas
		1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga lintas sektor yang diberikan sertifikat bimbingan teknis		30 Orang	257,898,000		30 Orang	250,000,000	
								Jumlah Peserta Bimbingan Teknis UKBM		458 orang			458 orang		
		1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Kab. Karimun, Semua Kecamatan	1 Dokumen	257,898,000	DAK Non Fisik, PAD	1 Dokumen	250,000,000	Dinkes, Bidang Kesmas
Meningkatkan kualitas pelayanan publik								**Indeks Pelayanan Publik**		**3.51**	**220,187,997,405**		**3.55**	**174,539,299,500**	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD							**Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD**		**77.50**	**220,187,997,405**		**78.00**	**174,539,299,500**	

Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026			Unit Kerja Penanggung jawab
									Lokasi	Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	
		1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**92 Angka**	**220,187,997,405**		**93 Angka**	**174,539,299,500**	
		1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia		5 Dokumen	189,228,500		4 Dokumen	195,000,000	
		1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karimun, Kecamatan Tebing, Kundur & Meral	2 Dokumen	93,669,500	PAD	1 Dokumen	75,000,000	Dinkes (Sekretriat), RSUD
		1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kab. Karimun, Kecamatan Tebing, Kundur & Meral	1 Dokumen	15,000,000	PAD	1 Dokumen	10,000,000	Dinkes (Sekretriat), RSUD
		1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Karimun, Kecamatan Tebing, Kundur & Meral	0 Dokumen	0	PAD	1 Dokumen	10,000,000	Dinkes (Sekretriat), RSUD
		1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karimun, Kecamatan Tebing, Kundur & Meral	2 Laporan	80,559,000	PAD	3 Laporan	85,000,000	Dinkes (Sekretriat), RSUD
		1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karimun, Kecamatan Tebing, Kundur & Meral	-	-	-	2 Laporan	15,000,000	Dinkes (Sekretriat), RSUD
		1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan tersedia		1 Laporan	110,723,825,229		1 Laporan	90,920,000,000	
		1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	610 Orang/ bulan	109,878,833,229	DAU	610 Orang/ bulan	90,000,000,000	Dinkes (Sekretriat), RSUD

Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026			Unit Kerja Penanggung jawab
									Lokasi	Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	
		1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	1 Dokumen	844,992,000	DAU	1 Dokumen	900,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Kab. Karimun, Kecamatan Meral	0 Laporan	0	PAD	4 Laporan	20,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang tersedia		1 Dokumen	20,000,000		1 Dokumen	15,000,000	
		1	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Karimun, Kecamatan Meral	Dokumen	0	-	1 Dokumen	5,000,000	Dinkes (Sekretriat)
		1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	1 Laporan	20,000,000	PAD	1 Laporan	10,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelayanan administrasi kepegawaian yang tersedia		1 Laporan	371,000,000		1 Laporan	160,000,000	
		1	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	Unit	0	-	0 Unit	0	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Karimun, Kecamatan Meral	1 Paket	291,000,000	PAD	100 Paket	80,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	Kab. Karimun, Kecamatan Meral	1 Dokumen	10,000,000	PAD	0 Dokumen	5,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD

Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026			Unit Kerja Penanggung jawab
									Lokasi	Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	
		1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Karimun, Kecamatan Meral	1 Dokumen	10,000,000	PAD	1 Dokumen	5,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Karimun, Kecamatan Meral	2 Orang	60,000,000	PAD	2 Orang	25,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	Kab. Karimun, Kecamatan Meral	0 Orang	0	-	10 Orang	25,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Kab. Karimun, Kecamatan Meral	1 Orang	0	-	20 Orang	20,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat		1 Laporan	2,244,494,332		1 Laporan	1,505,000,000	
		1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	10 Paket	890,672,152	PAD	6 Paket	35,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	15 Paket	277,921,100	PAD	16 Paket	300,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	8Paket	39,782,600	PAD	1 Paket	20,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	8 Paket	222,824,100	PAD	1 6 Paket	320,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD

Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026			Unit Kerja Penanggung jawab
									Lokasi	Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	
		1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	12 Paket	124,082,180	PAD	15 Paket	125,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	36 Dokumen	5,000,000	PAD	50 Dokumen	10,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	Paket	0	-	20 Paket	20,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	1 Laporan	11,973,200	PAD	1 Laporan	10,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	1 Laporan	672,239,000	PAD	1 Laporan	650,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	Dokumen	0	-	1 Dokumen	5,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	Dokumen	0	-	1 Dokumen	10,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan RKB/RKBU yang tersedia		1 Laporan	2,609,029,880		1 Laporan	125,000,000	
		1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	Unit	0	-	1 Unit	25,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD

Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026			Unit Kerja Penanggung jawab
									Lokasi	Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	
		1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	10 Unit	27,996,000	PAD	1 Unit	20,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	21 Unit	1,581,033,880	PAD	10 Unit	20,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	Unit	0	-	2 Unit	15,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	4 Unit	1,000,000,000	PAD	1 Unit	20,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	Unit	0	-	1 Unit	25,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang yang tersedia		1 Laporan	20,002,416,568		1 Laporan	13,216,000,000	
		1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	1 Laporan	6,924,000	PAD	1 Laporan	6,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	1 Laporan	1,154,075,568	PAD	1 Laporan	1,200,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	1 Laporan	20,209,000	PAD	1 Laporan	10,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD

Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026			Unit Kerja Penanggung jawab
									Lokasi	Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	
		1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	1 Laporan	18,821,208,000	PAD	1 Laporan	12,000,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan inventaris barang yang tersedia		1 Laporan	333,844,000		1 Laporan	190,000,000	
		1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	3 Unit	54,748,000	PAD	3 Unit	30,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	5 Unit	140,589,000	PAD	4 Unit	100,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	52 Unit	34,302,000	PAD	10 Unit	10,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	1 Unit	4,205,000	PAD	3 Unit	15,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	1 Unit	100,000,000	PAD	3 Unit	25,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD
		1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kab. Karimun, Semua Kecamatan & Kelurahan	Unit	0	-	1 Unit	10,000,000	Dinkes (Sekretriat), Seluruh UPTD

Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Tahun 2026			Unit Kerja Penanggung jawab
									Lokasi	Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	
		1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah dokumen capaian kinerja BLUD yang tersedia		15 Dokumen	83,694,158,896		15 Dokumen	68,213,299,500	
		1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan	15 Faskes	83,694,158,896	Pendapatan Lain Yang Sah	15 Faskes	68,213,299,500	Seluruh UPTD Puskesmas dan RSUD

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

RENJA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, kami ucapkan puji dan syukur yang sebesar - besarnya atas tersusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun Tahun 2025 dengan baik dan lancar. Undang - Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah sebagai salah satu dasar dalam menyusun perencanaan tahunan, dan sistematika penyusunan dan penulisan mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dan RPJMD menjadi hal yang perlu dan selalu untuk diperhatikan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini. Sesunggunhnya RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten yang disusun ini masih perlu dilakukan penyempurnaan. Karena masih terdapat hambatan dan tantangan yang perlu dihadapi dan diselesaikan baik data atau pun sumber daya manusia sebagai pendukung.Oleh sebab itu,tanggapan, saran dan kritikan serta masukan yang bersifat membangun perlu untuk diberikan sebagai dasar untuk melakukan penyempurnaan pada waktu yang akan mendatang.Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu terhadap tersusunnya RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 ini.

Tanjung Balai Karimun, Mei 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KARIMUN

CAHYO PRAYITNO, S.T., M.M.
Pembina Tk. I
NIP 197606102006041021

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud Dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra OPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi OPD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja OPD
3.3 Program Dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP
4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan RENJA
4.2 Kaidah – kaidah pelaksanaan
4.3 Rencana Tindak Lanjut

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29
Tabel 2.1
Tabel 2.2
Tabel 2.3
Tabel 2.4
Tabel 2.5
Tabel 2.6
Tabel 2.7
Tabel 2.8
Tabel 2.9
Tabel 2.10
Tabel 2.11
Tabel 2.12
Tabel 2.13
Tabel 2.14
Tabel 2.15
Tabel 2.16
Tabel 2.17
Tabel 2.18
Tabel 2.19
Tabel T-C.32
Tabel T-C.33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aturan yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) memberikan amanat dalam penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Selain itu, dalam penyusunan sistematika penulisan berdasarkan atas Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Organiasasi Perangkat Daerah (RENJA Perangkat Daerah) dimana dokumen tersebut dilaksanakan oleh masing-masing OPD di Kabupaten Karimun.

Rencana Kerja *(RENJA)* Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun Tahun 2025 merupakan kelanjutan dari dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 yang telah disusun menjadi acuan OPD dalam melaksanakan program/kegiatan dan merupakan bagian dari evaluasi berdasarkan adanya Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026.

Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun pada tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 serta sebagai *tools* untuk menjaga koordinasi dan singkronisasi antara perencanan penganggaran, pelaksanaan dan juga pengawasan.

Rencana Kerja program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Karimun untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA). Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun tahun 2025 ini ditujukan untuk melaksanakan capaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih untuk periode 2021-2026. Adapun visi pembangunan daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 yaitu :

"Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa."

Dalam mewujudkan Visi tersebut maka dapat dicapai melalui 5 misi pembangunan Kabupaten Karimun, diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri berbasis sumber daya dan kearifan lokal (berkeadilan dalam bidang ekonomi)
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah (berkeadilan dalam infrastruktur)
3. Mengembangkan sumber daya mausia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa (berkeadilan dalam pembangunan sumber daya manusia)
4. Meningkatkan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup (berkeadilan dalam melestarikan lingkungan hidup)
5. Mewujudkan birokrasi yang profesional dan unggul (berkeadilan dalam pelayanan publik)

Rencana Kerja *(RENJA)* Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 berisi kebijakan Pembangunan Infrastruktur, yaitu bidang Pengembangan Sumber Daya Air, bidang Bina Marga, bidang Cipta Karya, Bidang Bina Konstruksi, bidang Tata Ruang, UPT Laboratorium dan Bagian Sekretariat dengan kegiatan - kegiatan pendukungnya, baik yang akan dibiayai melalui APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten.

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun Telah diselaraskan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 - 2026. Sebagai usaha dalam menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya, maka dilakukan pembahasan sebagai berikut :

1. Menyelaraskan program dan kegiatan yang masih bersesuaian dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun melalui usulan dari program dan kegiatan hasil dari kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).
2. Pemusatan dari indikator dan juga target kinerja program/kegiatan yang bersesuaian dengan Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun.
3. Melakukan koordinasi dan harmonisasi program dan kegiatan antar organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan tercapainya sasaran dan tujuan strategis.

Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan prioritas-prioritas Pembangunan Tahun 2024 dan sasaran Pembangunan yang akan dicapai dengan mengacu pada agenda pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun yang perlu diselesaikan pada tahun 2024. Prioritas pembangunan tahunan tersebut disusun dengan pertimbangan yakni :

1. Memiliki pengaruh yang bisa berdampak kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung
2. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
3. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama;
4. Realistis untuk dilaksanakan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai Fungsi Pokok sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi seluruh bidang Pekerjaan Umum baik pemerintah maupun swasta yang memiliki keterkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Dinas Pekerjaan Umum. Karena memuat seluruh kebijakan publik yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai instansi pemerintah.

   Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 berisikan uraian tentang Program dan Kegiatan beserta Pagu Indikatif untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum sebagai landasan penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 No. 2);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Kabupaten Karimun Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7)
21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98);
22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);
23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupten Karimun Tahun 2024 Nomor 33)

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun Tahun 2024 ini adalah agar tersedianya dokumen perencanaan daerah urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode 1 (satu) tahun yang selanjutnya, sehingga kemudian dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun Tahun 2024 dimaksudkan untuk:

1. Sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan bidang infrastruktur dalam jangka satu tahun ke depan.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 1 (satu) tahun yang akan datang.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan, antar wilayah, antar sektor Pembangunan dan antar tingkat pemerintah di Kabupaten Karimun.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan, serta Menjadi dasar untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.

1.3. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun ini dibuat dalam sistematika berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Sebagai gambaran isi dari Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun Tahun 2022 disusun sistematika penulisannya sebagai berikut

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja OPD, Proses Penyusunan Renja OPD, Keterkaitan antara Renja OPD dengan Dokumen RKPD, dan Renstra OPD, dengan RENJA Kementerian PUPR dan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau, serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Keputusan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK Kewenangan OPD, serta Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penyusunan OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja OPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja OPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing OPD, serta ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi uraian mengenai: 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD; 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi OPD; 3) Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Terhadap capaian Program Nasional; 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD; 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Melakukan proses pembandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan perubahan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, maupun seandainya ketersediaan Anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (RENJA) merupakan turunan atau penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA), hal ini dilakukan agar proses perencanaan tetap dalam koridor perencanaan yang telah ditetapkan aturan. Rencana Kerja (RENJA) OPD merupakan alat yang digunakan dalam menampilkan capaian – capaian pada pelaksanaan Program dan Kegiatan yang disusun pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian baik itu kegagalan maupun keberhasilan dalam pelaksanaan tujuan organisasi melalui capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh Karena terkait dengan hal itu, maka Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun juga menjadi salah satu dasar dalam pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran atas hasil dari capaian yang telah diraih dan dilaksanakan.

Infrastruktur yang baik dan terpelihara merupakan hal utama yang menjadi perhatian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun. Karena konektivitas yang selalu terpelihara dan terjaga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan Perekonomian Masyarakat,sehingga menjadi faktor daya saing bagi Kabupaten Karimun.

Berdasarkan kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur yang tepat, maka diharapkan dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi masalah disparitas antar-kawasan maupun antar-wilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi jumlah pengangguran dalam suatu daerah. Oleh karena itu, Infrastruktur mempunyai manfaat yang dapat dirasakan secara langsung bagi masyarakat. Sehingga berbagai *multiplier effect* ekonomi dapat

dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan 11 (Sepuluh) Program di Tahun 2023, yang terdiri dari 10 (Sepuluh) Program Utama dan 1 (satu) Program Pendukung terhadap program utama.

Adapun 10 (Sepuluh) Program Utama Dinas PUPR Kabupaten Karimun pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
2. Program Pengelolaaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
5. Program Pengembangan Permukiman
6. Program Penataan Bangunan Gedung
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
8. Program Penyelenggaraan Jalan
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sedangkan 1 (Satu) Program sebagai pendukung program utama adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rekapitulasi Hasil Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun Tahun 2023 dijabarkan, sebagai berikut :

No.	Sasaran	Kode					Uraian / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2021 s/d 2026)	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output) (Renstra 2021 s/d 2026) - Sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Anggaran 2023											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I			II			III			IV											
1	2	3					4	5	6	7		8		9	10			11			12			13			14 = 10+11+12+13		15 = 14 / 9 x 100%		16 = 8 + 14		17=16/7x100%		18
														APBD - Perubahan																					
										K	Rp	K	Rp	RP	K	F	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																														
		1	03				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																														
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	Rp 39.215.000.000	76	Rp 10.095.022.537	80	Rp 13.318.553.057,00	17	21%	Rp 2.756.269.232	20	25%	Rp 3.346.638.122	16	20%	Rp 2.662.598.299	14,33	18%	Rp 2.385.497.223	76	Rp 11.151.002.876	95,00	83,73	76	Rp 21.246.025.413	95,00	54,18	PUPR
		1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	37	Rp 855.000.000	7	Rp 128.135.700	7	Rp 223.413.457,00	1,148	16%	Rp 36.637.225	1,100	16%	Rp 35.106.023	1,094	16%	Rp 34.924.752	0,370	5%	Rp 11.820.000	4	Rp 118.488.000	53,04	53,04	11	Rp 246.623.700	28,95	28,84	PUPR
		1	03	01	1.01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	11	Rp 310.000.000	2	Rp 51.070.600	2	Rp 140.408.929,00	0,352	18%	Rp 24.715.000	0,333	17%	Rp 23.395.000	0,342	17%	Rp 24.000.000	0,168	8%	Rp 11.820.000	1	Rp 83.930.000	59,78	59,78	3	Rp 135.000.600	29,05	43,55	PUPR
		1	03	01	1.01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Dokumen	15	Rp 310.000.000	3	Rp 29.677.000	3	Rp 35.184.095,00	0,53	18%	Rp 6.235.125	0,53	18%	Rp 6.235.125	0,47	16%	Rp 5.505.750	0,00	0%	Rp -	2	Rp 17.976.000	51,09	51,09	5	Rp 47.653.000	30,22	15,37	PUPR
		1	03	01	1.01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Dokumen	11	Rp 235.000.000	2	Rp 47.388.100	2	Rp 47.820.433,00	0,238	12%	Rp 5.687.100	0,229	11%	Rp 5.475.898	0,227	11%	Rp 5.419.002	0,00	0%	Rp -	1	Rp 16.582.000	34,68	34,68	3	Rp 63.970.100	24,49	27,22	PUPR
		1	03	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	Laporan	5	Rp 28.165.000.000	1	Rp 6.236.142.658	1	Rp 8.509.844.385,00	0,204	20%	Rp 1.736.837.448	0,308	31%	Rp 2.622.565.140	0,231	23%	Rp 1.967.831.880	0,206	21%	Rp 1.756.278.612	1	Rp 8.083.513.080	94,99	94,99	2	Rp 14.319.655.738	39,00	50,84	PUPR
		1	03	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Orang/Bulan	3900	Rp 26.815.000.000	780	Rp 6.030.877.858	780	Rp 8.270.180.385,00	158	20%	Rp 1.676.921.448	242	31%	Rp 2.562.649.140	180	23%	Rp 1.907.915.880	166	21%	Rp 1.756.278.612	745	Rp 7.903.765.080	95,57	95,57	1525	Rp 13.934.642.938	34,82	51,97	PUPR
		1	03	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Dokumen	60	Rp 1.350.000.000	12	Rp 205.264.800	12	Rp 239.664.000,00	3	25%	Rp 59.916.000	3	25%	Rp 59.916.000	3	25%	Rp 59.916.000	0	0%	Rp -	9	Rp 179.748.000	75,00	75,00	21	Rp 385.012.800	35,00	28,52	PUPR
		1	03	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	laporan	5	Rp 850.000.000	1	Rp 72.904.000	1	Rp 380.821.275,00	0,019	2%	Rp 7.305.000	0,034	3%	Rp 12.805.000	0,049	5%	Rp 18.768.388	0,295	30%	Rp 112.446.612	0,397	Rp 151.325.000	39,74	39,74	1	Rp 224.229.000	27,95	26,38	PUPR
		1	03	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Lainya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Paket	150	Rp 150.000.000	0	Rp -	150	Rp 301.601.275,00	0	0%	Rp -			Rp -	2	1%	Rp 4.463.388	54	36%	Rp 108.796.612	56	Rp 113.260.000	37,55	37,55	56	Rp 113.260.000	37,55	75,51	PUPR
		1	03	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Orang	140	Rp 700.000.000	20	Rp 72.904.000	20	Rp 79.220.000,00	2	9%	Rp 7.305.000	3	16%	Rp 12.805.000	4	18%	Rp 14.305.000	1	5%	Rp 3.650.000	10	Rp 38.065.000	48,05	48,05	30	Rp 110.969.000	21,15	15,85	PUPR
		1	03	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	laporan	5	Rp 3.075.000.000	1	Rp 1.615.051.600	1	Rp 1.764.192.580,00	0,159	16%	Rp 280.972.673	0,079	8%	Rp 138.973.327	0,221	22%	Rp 390.070.200	0,191	19%	Rp 337.062.050	0,650	Rp 1.147.078.250	65,02	65,02	1,650	Rp 2.762.129.850	33,00	89,83	PUPR
		1	03	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	15	Rp 600.000.000	15	Rp 268.354.200	15	Rp 318.085.908,00	3	18%	Rp 56.156.750	2	16%	Rp 51.602.550	2	14%	Rp 45.691.900	5	31%	Rp 97.077.709	12	Rp 250.528.900	78,76	78,76	27	Rp 518.883.100	178,76	86,48	PUPR
		1	03	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	20	Rp 250.000.000	20	Rp 119.355.000	20	Rp 74.213.172,00	4	21%	Rp 15.290.523	4	21%	Rp 15.289.177	3	14%	Rp 10.471.700	5	23%	Rp 17.027.200	16	Rp 58.078.600	78,26	78,26	36	Rp 177.433.600	178,26	70,97	PUPR
		1	03	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	100.000	Rp 500.000.000	20000	Rp 217.808.500	20000	Rp 116.004.000,00	3330	17%	Rp 19.315.100	3559	18%	Rp 20.640.600	2396	12%	Rp 13.899.900	6393	32%	Rp 37.078.350	15678	Rp 90.933.950	78,39	78,39	35678	Rp 308.742.450	35,68	61,75	PUPR
		1	03	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Dokumen	5	Rp 250.000.000	1	Rp 197.966.000	1	Rp 170.500.000,00	0,226	23%	Rp 38.580.000	0,161	16%	Rp 27.450.000	0,182	18%	Rp 30.975.000	0,169	17%	Rp 28.800.000	1	Rp 125.805.000	73,79	73,79	2	Rp 323.771.000	34,76	129,51	PUPR
		1	03	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	1152	Rp 1.250.000.000	96	Rp 790.399.900	96	Rp 980.489.500,00	14	14%	Rp 137.905.300	1	1%	Rp 10.266.000	27	28%	Rp 276.281.700	15	16%	Rp 157.078.800	57	Rp 581.531.800	59,31	59,31	153	Rp 1.371.931.700	13,28	109,75	PUPR
		1	03	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Dokumen	5	Rp 225.000.000	1	Rp 21.168.000	1	Rp 104.900.000,00	0,131	13%	Rp 13.725.000	0,131	13%	Rp 13.725.000	0,122	12%	Rp 12.750.000	0,000	0%	Rp -	0,4	Rp 40.200.000	38,32	38,32	1	Rp 61.368.000	27,66	27,27	PUPR
		1	03	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	5	Rp 1.345.000.000	1	Rp 992.140.247	1	Rp 1.290.143.200,00	0,32	32%	Rp 417.037.000	0,20	20%	Rp 260.905.000	0,000	0%	Rp -	0,000	0%	Rp -	1	Rp 677.942.000	52,55	52,55	2	Rp 1.670.082.247	30,51	124,17	PUPR
		1	03	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Paket	90	Rp 675.000.000	20	Rp 336.209.247	15	Rp 251.002.200,00	0,36	2%	Rp 6.005.000	4	24%	Rp 59.205.000	0,000	0%	Rp -	0,000	0%	Rp -	4	Rp 65.210.000	25,98	25,98	24	Rp 401.419.247	26,55	59,47	PUPR
		1	03	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	65	Rp 670.000.000	10	Rp 655.931.000	10	Rp 1.039.141.000,00	4	40%	Rp 411.032.000	2	19%	Rp 201.700.000	0,000	0%	Rp -	0	0%	Rp -	6	Rp 612.732.000	58,97	58,97	16	Rp 1.268.663.000	24,46	189,35	PUPR
		1	03	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	5	Rp 4.100.000.000	1	Rp 733.576.032	1	Rp 852.556.000,00	0,263	26%	Rp 224.079.336	0,285	29%	Rp 243.147.334	0,263	26%	Rp 224.290.230	0,141	14%	Rp 120.073.846	1	Rp 811.590.546	95,19	95,19	2	Rp 1.545.166.578	39,04	37,69	PUPR
		1	03	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	300	Rp 500.000.000	60	Rp 87.001.032	60	Rp 90.156.000,00	14	23%	Rp 21.096.000	3	5%	Rp 4.164.000	14,180	24%	Rp 21.306.900	12	20%	Rp 17.598.646	43	Rp 64.165.546	71,17	71,17	103	Rp 151.166.578	34,23	30,23	PUPR
		1	03	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	60	Rp 3.600.000.000	12	Rp 646.575.000	12	Rp 762.400.000,00	3	27%	Rp 202.983.336	4	31%	Rp 238.983.334	3	27%	Rp 202.983.330	2	13%	Rp 101.475.000	12	Rp 747.425.000	98,04	98,04	24	Rp 1.394.000.000	38,33	38,72	PUPR
		1	03	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	5	Rp 825.000.000	1	Rp 317.072.300	1	Rp 297.582.160,00	0,179	18%	Rp 53.400.550	0,111	11%	Rp 33.136.298	0,090	9%	Rp 26.712.849	0,161	16%	Rp 47.816.303	1	Rp 161.066.000	54,12	54,12	2	Rp 478.138.300	30,82	57,96	PUPR
		1	03	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	10	Rp 550.000.000	2	Rp 317.072.300	2	Rp 274.826.160,00	0,353	18%	Rp 48.545.551	0,206	10%	Rp 28.281.299	0,159	8%	Rp 21.857.850	0,338	17%	Rp 46.391.309	1	Rp 145.076.000	52,79	52,79	3	Rp 462.148.300	30,56	84,03	PUPR
		1	03	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	55	Rp 275.000.000	5	Rp -	5	Rp 22.756.000,00	1	21%	Rp 4.854.999	1	21%	Rp 4.854.999	1	21%	Rp 4.854.999	0	6%	Rp 1.425.003	4	Rp 15.990.000	70,27	70,27	9	Rp 15.990.000	15,48	5,81	PUPR
																												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		64,95	64,95			32,75	59,39	
																												Predikat Kinerja		R	R			SR	SR	
	Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat dikawasan Permukiman	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persentase	70,60	Rp 43.200.000.000	60,80	Rp 92.698.400.020	63,07	Rp 61.455.448.566,00	22	34%	Rp 21.049.930.669	24	38%	Rp 23.467.677.206	5	8%	Rp 4.787.259.743	0	1%	Rp 106.776.208	50,72	Rp 49.414.643.826	80,41	80,41	111,52	Rp 142.113.043.846	157,95	328,97	PUPR
		1	03	02	2	01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pengelolaan SDA ditangani	Dokumen	7	Rp 43.200.000.000	5	Rp 92.698.400.020	5	Rp 61.455.448.566,00	2	34%	Rp 21.049.930.669	2	38%	Rp 23.467.677.206	0	8%	Rp 4.787.259.743	0	1%	Rp 106.776.208	4	Rp 49.414.643.826	80,41	80,41	9	Rp 142.113.043.846	128,86	328,97	PUPR
		1	03	02	2	01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	KM	41330	Rp 11.000.000.000	7696	Rp 29.796.085.900	7696	Rp 20.022.300.108,00	2615	34%	Rp 6.804.084.621	2709	35%	Rp 7.046.861.181	949	12%	Rp 2.468.233.400	0,00	0%	Rp -	6273	Rp 16.319.179.202	81,51	81,51	13969	Rp 46.115.265.102	33,00	419,23	PUPR
		1	03	02	2	01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun (KM)	KM	3637	Rp 10.000.000.000	727	Rp 1.664.940.700	727	Rp 4.112.715.191,00	136	19%	Rp 766.770.500	102	14%	Rp 578.389.900	2,16	0,30%	Rp 12.207.500	0,00	0%	Rp -	240	Rp 1.357.367.900	33,00	33,00	967	Rp 3.022.308.600	26,60	39,22	PUPR
		1	03	02	2	01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendungan pengendali banjir yang dibangun (Unit)	Unit	64	Rp 5.000.000.000	13	Rp 610.308.400	13	Rp 478.971.559,00	3	20%	Rp 97.024.500	3	21%	Rp 100.632.000	2,59	20%	Rp 97.031.000	2,72	21%	Rp 101.966.000	11	Rp 396.653.500	82,81	82,81	24	Rp 1.006.961.900	36,85	20,14	PUPR
		1	03	02	2	01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	KM	88681	Rp 17.200.000.000	20623	Rp 60.627.065.020	18561	Rp 36.841.461.708,00	6742	36%	Rp 13.382.051.048	7931	43%	Rp 15.741.794.125	1113	6%	Rp 2.209.787.843	4	0,02%	Rp 7.810.208	15790	Rp 31.341.443.224	85,07	85,07	36414	Rp 91.968.508.244	41,06	534,70	PUPR
																												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		80,41	80,41			157,95	328,97	
																												Predikat Kinerja		T	T			S	ST	

| | | |

		1	03	11				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisa/tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase	79,9	Rp	4.556.126.779	41,1	Rp	575.696.500	45,9	Rp	645.369.145,00	8,75	19%	Rp	122.965.396	10	22%	Rp	144.252.218	3,448	8%	Rp	48.483.237	2,035	4%	Rp	28.606.400	24,49	Rp	344.307.251	53,35	53,35	66	Rp	920.003.751	82,09	20,19	PUPR
		1	03	11	2	01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta tenaga terampil yang terlatih	Orang	408	Rp	2.981.126.779	20	Rp	196.720.900	48	Rp	228.900.799,00	8,62	18%	Rp	41.128.087	6	12%	Rp	28.337.880	3,391	7%	Rp	16.170.500	5,099	12%	Rp	28.606.400	24	Rp	114.243.767	49,01	49,01	44	Rp	310.964.667	10,77	10,43	PUPR
		1	03	11	2	01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	Orang	408	Rp	2.040.000.000	20	Rp	112.844.400	48	Rp	-	0,00	0%	Rp	-	0	0%	Rp	-	0,000	0%	Rp	-	0,000	0%	Rp	-	0	Rp	-	0,00	0,00	20	Rp	112.844.400	4,90	5,53	PUPR
		1	03	11	2	01	05	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi (Orang)	Orang	5	Rp	516.959.779	1	Rp	83.876.500	1	Rp	135.398.087,00	0,153	15%	Rp	20.684.987	0,058	6%	Rp	7.793.511	0,087	9%	Rp	11.815.000	0,187	19%	Rp	25.307.100	0,5	Rp	65.600.598	48,45	48,45	1	Rp	149.477.098	29,69	28,91	PUPR
		1	03	11	2	01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi (Dokumen)	Dokumen	5	Rp	424.167.000	1		-	1	Rp	93.502.712,00	0,219	22%	Rp	20.444.000	0,220	22%	Rp	20.544.369	0,047	5%	Rp	4.355.500	0,035	4%	Rp	3.299.300	1	Rp	48.643.169	52,02	52,02	2	Rp	48.643.169	30,40	11,47	PUPR
		1	03	11	2	02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan SIPJAKI	Dokumen	5	Rp	650.000.000	1	Rp	168.892.300	1	Rp	168.409.538,00	0	26%	Rp	34.451.000	0	19%	Rp	32.459.300	0,07	7%	Rp	11.174.837	0,00	0%	Rp	-	0,5	Rp	78.085.137	46,37	46,37	1	Rp	246.977.437	29,27	38,00	PUPR
		1	03	11	2	02	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha (Dokumen)	Dokumen	5	Rp	325.000.000	1	Rp	84.662.300	1	Rp	63.051.563,00	0,16	16%	Rp	10.101.000	0,25	25%	Rp	15.467.300	0,05	5%	Rp	3.133.452	0,00	0%	Rp	-	0,5	Rp	28.701.752	45,52	45,52	1	Rp	113.364.052	29,10	34,88	PUPR
		1	03	11	2	02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan (Dokumen)	Dokumen	5	Rp	325.000.000	1	Rp	84.230.000	1	Rp	105.357.975,00	0,23	23%	Rp	24.350.000	0,16	16%	Rp	16.992.000	0,08	8%	Rp	8.041.385	0,00	0%	Rp	-	0,5	Rp	49.383.385	46,87	46,87	1	Rp	131.613.385	29,37	41,11	PUPR
		1	03	11	3	03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah laporan	Laporan	5	Rp	325.000.000	1	Rp	115.142.800	1	Rp	176.044.217,00	0	10%	Rp	18.345.000	0	40%	Rp	71.282.043	0	10%	Rp	17.042.900	0	0%	Rp	-	1	Rp	106.669.943	60,59	60,59	3	Rp	221.812.743	32,12	68,25	PUPR
		1	03	11	2	03	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi (Orang)	Orang	65	Rp	325.000.000	10	Rp	115.142.800	10	Rp	176.044.217,00	1	10%	Rp	18.345.000	4	40%	Rp	71.282.043	1	10%	Rp	17.042.900	0	0%	Rp	-	6	Rp	106.669.943	60,59	60,59	16	Rp	221.812.743	24,71	68,25	PUPR
		1	03	11	2	04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah laporan	Laporan	5	Rp	600.000.000	1	Rp	94.940.500	1	Rp	72.014.591,00	0	40%	Rp	29.040.409	0	17%	Rp	12.172.995	0	6%	Rp	4.095.000	0	0%	Rp	-	1	Rp	45.308.404	62,92	62,92	2	Rp	140.248.904	32,58	23,37	PUPR
		1	03	11	2	04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa	Orang	120	Rp	600.000.000	20	Rp	94.940.500	20	Rp	72.014.591,00	8	40%	Rp	29.040.409	3	17%	Rp	12.172.995	1	6%	Rp	4.095.000	0	0%	Rp	-	13	Rp	45.308.404	62,92	62,92	33	Rp	140.248.904	27,15	23,37	PUPR
																																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)									54,95	54,95				26,19	35,01	
																																			Predikat Kinerja									R	R				SR	SR	
	Meningkatnya Kesesuaian Tata Ruang Wilayah	1	02	12				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Penyedia RTH di Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sebesar 20% Publik	Persentase	19,45	Rp	4.350.000.000	9,59	Rp	1.639.238.578	11,74	Rp	3.268.751.061,00	0	4%	Rp	115.143.896	3	24%	Rp	785.706.285	0,42	4%	Rp	116.484.296	0,24	2%	Rp	65.661.456	3,89	Rp	1.082.995.933	33,13	33,13	13	Rp	2.722.234.511	69,30	62,58	PUPR
		1	02	12	2	01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi yang ditetapkan terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	5	Rp	1.900.000.000	1	Rp	771.777.728	1	Rp	2.077.663.103,00	0	2%	Rp	39.705.200	0	28%	Rp	591.113.783	0,03	3%	Rp	60.357.050	0,01	1%	Rp	12.897.350	0,3	Rp	704.073.383	33,89	33,89	1	Rp	1.475.851.111	26,78	77,68	PUPR
		1	02	12	2	01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	Dokumen	5	Rp	1.900.000.000	1	Rp	771.777.728	1	Rp	2.077.663.103,00	0	2%	Rp	39.705.200	0	28%	Rp	591.113.783	0,03	3%	Rp	60.357.050	0,01	1%	Rp	12.897.350	0,3	Rp	704.073.383	33,89	33,89	1	Rp	1.475.851.111	26,78	77,68	PUPR
		1	03	12	2	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerima informasi dalam penanfaatan ruang	Dokumen	250	Rp	1.250.000.000	50	Rp	367.292.350	1	Rp	229.203.282,00	0	11%	Rp	26.152.071	0	16%	Rp	37.591.051	0,09	9%	Rp	21.573.878	0,04	4%	Rp	10.006.700	0,4	Rp	95.323.700	41,59	41,59	50	Rp	462.616.050	20,17	37,01	PUPR
		1	03	12	2	03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (Dokumen)	Dokumen	5	Rp	950.000.000	1	Rp	367.292.350	1	Rp	229.203.282,00	0	11%	Rp	26.152.071	0	16%	Rp	37.591.051	0,09	9%	Rp	21.573.878	0,04	4%	Rp	10.006.700	0	Rp	95.323.700	41,59	41,59	1	Rp	462.616.050	28,32	48,70	PUPR
		1	03	12	2	03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dikelola dan Sistem Informasi Penataan Ruang (Dokumen)	Dokumen	2	Rp	300.000.000	0	Rp	-	1	Rp	-	0	0%	Rp	-	0	0%		-	0,00	0%	Rp	-	0,00	0%	Rp	-	0	Rp	-	0,00	0,00	0			0,00	0,00	PUPR
		1	03	12	2	04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan kesesuaian tata ruang terhadap IMB yang diterbitkan	Dokumen	5	Rp	1.200.000.000	1	Rp	500.168.500	1	Rp	961.884.676,00	0	5%	Rp	49.286.625	0	16%	Rp	157.001.451	0,04	4%	Rp	34.553.368	0,04	4%	Rp	42.757.406	0,3	Rp	283.598.850	29,48	29,48	1	Rp	783.767.350	25,90	65,31	PUPR
		1	03	12	2	04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang (Dokumen)	Dokumen	5	Rp	700.000.000	1	Rp	311.886.550	1	Rp	604.958.006,00	0,06	6%	Rp	37.868.625	0,24	24%	Rp	146.236.451	0,05	5%	Rp	31.055.368	0,06	6%	Rp	33.759.406	0,4	Rp	248.919.850	41,15	41,15	1	Rp	566.806.900	28,23	80,12	PUPR
		1	03	12	2	04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	Dokumen	5	Rp	500.000.000	1	Rp	188.281.950	1	Rp	356.926.670,00	0,03	3%	Rp	11.418.000	0,03	3%	Rp	10.765.009	0,01	1%	Rp	3.498.000	0,03	3%	Rp	8.998.000	0,1	Rp	34.679.000	9,72	9,72	1	Rp	222.960.950	21,94	44,59	PUPR
																																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)									34,99	34,99				24,28	60,00	
																																			Predikat Kinerja									SR	SR				SR	R	
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				Rp	457.076.126.779		Rp	278.556.188.190		Rp	262.909.146.225,00			Rp	62.786.362.385			Rp	67.853.811.923			Rp	30.538.355.943			Rp	27.174.988.742		Rp	188.353.518.993								
								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																																						58,20	60,54						
								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																																						R	R						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:

Keterangan :

K	:	Capaian Kinerja Indikator Program dan Kegiatan
F	:	Progress Fisik Program dan Kegiatan (%)
Rp	:	Realisasi Keuangan (dalam rupiah)

Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan Menggunakan Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 1	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 2	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 3	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 4	Status
1	22,5 % ≤ 100 %	45 % ≤ 100 %	68 % ≤ 100%	91% ≤ 100%	Sangat tinggi (ST)
2	20 % ≤ 22,5 %	39 % ≤ 44 %	58 % ≤ 67%	76% ≤ 90%	Tinggi (T)
3	17 % ≤ 19 %	33 % ≤ 38 %	50 % ≤ 57%	66% ≤ 75%	Sedang (S)
4	13 % ≤ 16 %	26 % ≤ 32 %	39 % ≤ 49%	51% ≤ 65%	Rendah (R)
5	≤ 13 %	≤ 25 %	≤ 38%	≤ 50%	Sangat Rendah (SR)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan perangkat daerah

Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tugas Dinas Daerah menjelaskan kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tujuan dari ditetapkannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun mengacu sepenuhnya pada tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten yaitu membantu Bupati dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan meningkatkan kehandalan infrastruktur jalan dan jembatan.
2. Mewujudkan serta meningkatkan perlindungan kawasan permukiman dan pusat-pusat produksi dari bahaya banjir dan genangan air.
3. Mewujudkan dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas penyediaan air bersih yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia serta meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat di perkotaan dan perdesaan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjadi salah satu dasar dalam melaksanakan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Pada dasarnya Sistem Musrenbang telah dikembangkan dan di susun dengan lebih baik, namun dalam kenyataannya singkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi serta perencanaan pembangunan kabupaten/kota masih belum optimal dalam pelaksanaannya.

2.2.1. Pengukuran Kinerja

Kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur melalui pembandingan antara Target yang telah di

tetapkan dengan Capaian yang direalisasikan. pencapaian kinerja tersebut dikatakan semakin baik jika realisasi yang dihasilkan lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan dan sebaliknya jika realisasi lebih rendah dari target yang ditetapkan makan menunjukan pencapaian kinerja yang semakin buruk.

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya disajikan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 3.1
TARGET DAN REALISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Akses Infrastruktur masyarakat di kawasan permukiman	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Yang Terbangun	71,43%	96,46%	135,04%
		Persentase Penduduk berakses sanitasi yang layak	82,49%	89,21%	108,15%
		Persentase Penduduk Berakses Air Bersih	76,76%	90,29%	117,63%
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Fasilitas Umum	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	73,75%	78,39	106,29%
		Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	0,23%	0,24%	104,34%
		Rasio Bangunan gedung bersertifikat laik fungsi di kawasan perkotaan per Satuan bangunan kawasan perkotaan	53,63%	60,42%	112,66%
3	Meningkatnya Jaringan Jalan Penghubung	Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	636,77 KM	299,32 KM	47,01%
4.	Meningkatnya kesesuaian tata ruang wilayah	Ketaatan terhadap RTRW	2,31%	N/A	-
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai Akip Tahun 2022	75	N/A	70,25

3.2.1. Hasil Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititik beratkan pada sampai sejauh mana program dan kegiatan pembangunan tersebut dapat berdampak secara positif kepada masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya melalui indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan.

Pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum harus bersesesuaian dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Karimun dan Renstra Dinas PUPR Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 dimana memiliki tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan.

Dibawah ini adalah Tujuan dari OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dijabarkan ke dalam beberapa sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun, dengan penjabaran Sebagai Berikut :

1. **Meningkatnya akses kebutuhan Infrastruktur dasar masyarakat yang merata**

1.1. Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman

1.1.1. Persentase Sumber Daya Air yang terbangun

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, memberikan pengertian Sumber daya air adalah air, Sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya. sumber air tersebut adalah tempat ataupun wadah dari air alami atau buatan yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah.

Sedangkan, daya air adalah suatu potensi yang terkandung pada air tersebut dan/atau sumber air yang dapat memberikan manfaat atau bahkan kerugian bagi manusia dan lingkungannya. Ketersediaan sumber daya air baik dari segi kualitas maupun kualitas serta kontinuitasnya sudah langka dan memerlukan penanganan secara tepat.

Oleh karena itu, masih berdasarkan undang – undang tersebut diatas yang mengartikan pentingnya pengelolaan sumber daya air dimana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan suatu upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konversi Sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

Hal tersebut menjadi penting dikarenakan sumber daya air merupakan kebutuhan manusia yang sangat vital. Namun, pengelolaan Sumber daya air masih belum dilakukan secara optimal. Realisasi atas Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Yang Terbangun dijabarkan melalui tabel dibawah ini :

TABEL 3.2
PERSENTASE INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR YANG TERBANGUN TAHUN 2023

NO	JENIS INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	KONDISI AWAL TAHUN 2024	KONDISI AKHIR TAHUN 2024	(%)
1	2	3	4	6
1	Normalisasi Sungai	828.645	1.071.645	77,32
2	Tanggul Sungai	195.471	250.478	78,03
3	Bangunan Perkuatan Tebing	7.287	9.128	79,83
Persentase (Rata – Rata) Infrastruktur Sumber Daya Air yang Terbangun			78,39	

Oleh karena itu, diperlukan Pengembangan Sumber Daya Air yang baik dalam memanfaatkan potensi dari sumber daya air tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan air baku bagi seluruh komponen masyarakat. Tujuan tersebut hanya dapat terlaksana jika dapat memanfaatkan komponen – komponen sumber daya air secara baik.

GAMBAR 3.1
GAMBAR INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR YANG TERBANGUN
TAHUN 2023

Potensi banjir cukup tinggi di Kabupaten Karimun, hal ini di sebabkan oleh Curah hujan di Kabupaten Karimun dengan tingkat intensitas yang cukup tinggi dan hal ini juga dapat diperparah dengan meningkatnya debit air laut ataupun sungai, sehingga memerlukan penanganan yang tepat untuk mencegah daya rusak air dan memanfaatkan sumber air secara tepat.

Dalam mencapai target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka diperlukan dukungan keuangan yang dijabarkan melalui realisasi keuangan atas Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tahun 2023 melalui tabel sebagai berikut :

TABEL 3.3
PROGRAM DAN KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TAHUN 2023

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH DANA	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	7
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp.62.319.874.576**	**Rp.49.414.643.826**	**79,29**	
1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	Rp.20.022.300.108	Rp.16.319.179.202	79,29	
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Rp. 4.112.715.191	Rp.1.357.367.900	81,51	
1.03.02.2.01.11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rp. 478.971.559	Rp.396.653.500	33,00	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Rp..705.887.718	Rp.31.341.443.224	82,81	

1.1.2. Persentase Penduduk berakses sanitasi yang layak

Sanitasi merupakan suatu upaya pengendalian yang dilakukan sebagai di semua faktor lingkungan fisik manusia, baik itu air, kelembaban udara, suhu, dan faktor lainnya. Hal ini menjadi penting dikarenakan sanitasi dapat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan fisik manusia. Oleh karena itu, Sanitasi yang layak adalah hal mutlak yang harus terpenuhi dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat kabupaten Karimun. Akses sanitasi terbagi atas tiga (3) bagian, yakni akses sanitasi dasar, akses sanitasi layak dan akses sanitasi aman. Akses sanitasi layak merupakan perhatian utama bagi tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun.

Adapun data yang mendukung sanitasi yang layak di Kabupaten Karimun, sebagai berikut :

TABEL 3.4
PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES SANITASI YANG LAYAK TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) TAHUN 2023		KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) TAHUN 2022	
			JUMLAH KEPALA KELUARGA	%	JUMLAH KEPALA KELUARGA	%
1	Karimun	15.807	15.346	97,08%	11.056	74,0
2	Selat Gelam	1.405	1.396	99,36%	1.225	97,1
3	Meral	16.106	14.677	91,13%	8.512	87,7
4	Meral Barat	5.237	5.225	99,77%	4.390	89,9
5	Tebing	10.265	10,265	100%	5.686	100,0
6	Buru	3.535	3.096	87,58%	2.725	88,2
7	Kundur	10.255	10.235	99,80%	8.038	99,7
8	Kundur Barat	6.251	4.707	75,30%	5.281	91,5
9	Kundur Utara	4.178	3.556	85,11%	3.068	74,4
10	Ungar	2.068	1.641	79,35%	1.603	85,4
11	Belat	2.303	961	41,73%	1.467	65,1
12	Moro	3.701	2.484	67,12%	2.412	88,8
13	Sugie Besar	2.577	1068	41,44%	1.087	45,7
14	Durai	2.134	1.906	89,32	1.767	90,2
Total Penduduk dan rata – rata persentase yang berakses sanitasi layak		**85.822**	**76.563**	**89,21%**	**58.317**	**84,9%**

Target dari persentase penduduk berakses sanitasi yang layak tahun 2023 adalah sebesar 82,49%, dengan realisasi sebesar 89,21%. Sehingga, capaian dari Indikator di atas adalah sebesar 108,15%. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 4,31% dibanding Tahun 2022 yakni sebesar 84,9 %. Kegiatan Sanitasi ini diharapkan dapat terus meningkat dan dapat memberikan akses yang layak kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga kualitas kesehatan dan harapan hidup Masyarakat Kabupaten karimun dapat terus meningkat.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun yang telah dilaksanakan dijabarkan melalui tabel sebagai berikut :

TABEL 3.5
PROGRAM DAN KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH TAHUN 2023

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH DANA	REALISASI	%	KET
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Rp1.704.600.000**	**Rp1.671.803.000**	**98,08**	
1.03.05.2.01	***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota***	**Rp1.704.600.000**	**Rp1.671.803.000**	**98,08**	
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rp1.704.600.000	Rp1.671.803.000	98,08	

1.1.3. *Persentase penduduk berakses air bersih*

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, menjelaskan bahwa air minum adalah air yang melalui pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, dan pada Peraturan Menteri

Kesehatan tersebut di pasal 5 nomor (3) dan (4) juga menjelaskan bahwa persyaratan kesehatan pada air tersebut harus dalam keadaan terlindungi dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit dan tempat perkembangbiakan vektor serta aman dari kemungkinan terkontaminasi dan pengolahan, pewadahan, dan penyajian untuk air minum harus memenuhi prinsip higiene dan sanitasi.

Prinsip higiene dan sanitasi merupakan kegiatan untuk memastikan kualitas air minum tersebut tidak mengandung unsur mikrobiologi, fisika,kimia, dan radioaktif yang dapat membahayakan kesehatan. Berikut ini merupakan persentase atas capaian penduduk berakses air bersih yang dijelaskana melalui tabel sebagai berikut :

TABEL 3.6
PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR BERSIH

TAHUN	JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/KOTA	REALISASI		
			SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	*2*	3	*4*	5	*6*
2023	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	66.410	59.963	6.447	90,29
2022	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	63.364	59.219	4.415	93,46

Berdasarkan uraian dari tabel diatas, sudah terdapat realisasi sekitar 90,3% dari total Rumah di Kabupaten Karimun yang memperoleh akses air bersih. Namun, masih ada 9,7% rumah yang belum mendapat pelayanan akses air bersih. Sehingga, masih diperlukan langkah yang tepat agar seluruh warga dari Kabupaten Karimun memperoleh akses dari air bersih tersebut. Jadi, tingkat capaian tahun 2023 adalah sebesar 117,63% terhadap target yang telah di tetapkan sebesar 76,76%.

Seperti yang telah di jelaskan pada tabel di atas, terdapat penurunan capaian atas realisasi di Tahun 2023 berbanding dengan realisasi yang ada pada tahun 2022. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kenaikan target rumah yang akan diberikan pelayanan akses air bersih di tahun 2023, namun realisasi atas target rumah yang telah terlayani masih rendah.

Dalam mencapai realisasi rasio penduduk yang berakses air bersih maka berikut adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan tersebut yang di jabarkan melalui tabel sebagai berikut :

TABEL 3.7
PROGRAM DAN KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2023

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH DANA	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	7
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Rp3.561.273.411**	**Rp2.178.383.509**	**61,17**	
1.03.03.2.01	***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota***	**Rp3.561.273.411**	**Rp2.178.383.509**	**61,17**	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp2.033.547.427	Rp1.695.639.100	83,38	
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rp1.527.725.984	Rp482.744.409	31,60	

2.2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Fasilitas Umum

2.2.1. Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Drainase merupakan prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima. Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar

aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.

Pada umumnya, Penurunan kondisi drainase disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor alami dan buatan. Faktor alami yakni adanya sedimentasi pada drainase yang ada dan faktor buatan yang disebabkan oleh adanya oknum masyarakat di Kabupaten Karimun yang masih membuang sampah sembarangan, sehingga saat hujan yang tinggi dapat menimbulkan genangan air bahkan banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah – langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya hal – hal tersebut. Capaian sasaran Strategis ditentukan berdasarkan atas data Kondisi Drainase yang terbangun sampai dengan Tahun 2023 dengan uraian capaian sebagai berikut :

TABEL 3.8
PERSENTASE PANJANG DRAINASE DALAM KONDISI BAIK

NO	KECAMATAN	TOTAL TAHUN 2022 (KM)	PEMBANGUNAN TAHUN 2023	TOTAL TAHUN 2023 (KM)	PERSENTASE DRAINASE KONDISI BAIK TAHUN 2024
1	KARIMUN	11,94	3,462	15,40	77,52
2	TEBING	12,77	0,801	13,57	94,09
3	MERAL	16,71	1,384	18,09	92,35
4	MERAL BARAT	7,64	0,398	8,03	95,04
5	BURU	4,80	0,223	5,02	95,55
6	KUNDUR	10,36	0,559	10,92	94,88
7	KUNDUR BARAT	9,72	0,000	9,72	100,00
8	KUNDUR UTARA	11,28	0,335	11,61	97,11
9	MORO	4,50	0,342	4,84	92,93
10	UNGAR	2,96	0,000	2,96	100,00
11	DURAI	1,92	0,000	1,92	100,00
12	BELAT	94,57	7,506	102,08	92,65
13	SUGIE BESAR	11,94	3,462	15,40	77,52
14	SELAT GELAM	12,77	0,801	13,57	94,09
	JUMLAH	16,71	1,384	18,09	92,37

GAMBAR 3.2

GRAFIK FLUKTUASI PEMBANGUNAN DRAINASE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KARIMUN

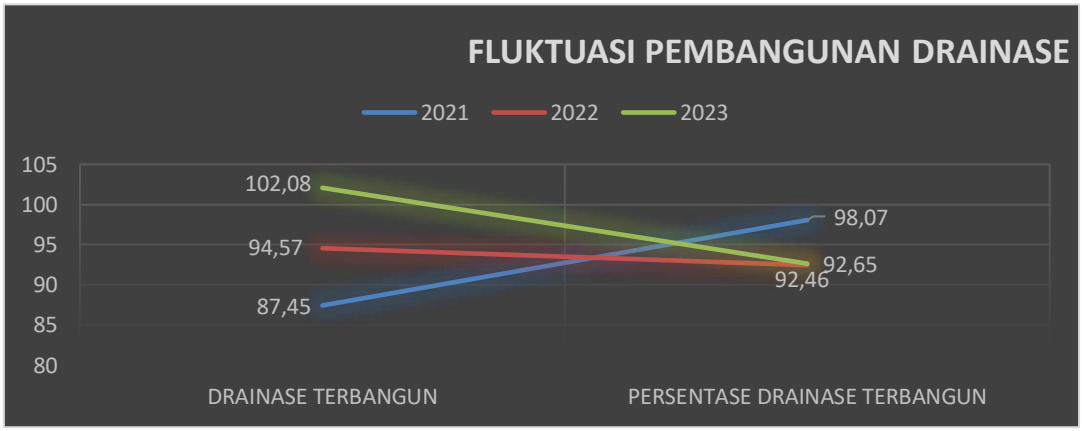

kondisi panjang drainase berkondisi baik di tahun 2023 dihitung berdasarkan akumulasi di tahun 2023 dibagi dengan akumulasi di tahun 2022, sehingga didapatkan besaran kondisi drainase yang berkondisi baik yang berdasarkan atas jumlah drainase yang telah terbangun pada tahun tersebut. Jumlah persentase Kondisi drainase yang berkondisi baik adalah sebesar 92,65% dari target sebesar 73,75%.

Kabupaten Karimun memiliki curah hujan yang cukup tinggi sehingga hal ini menjadi dasar dari pentingnya pembangunan drainase bagi daerah daerah – daerah yang berisiko banjir di kabupaten Karimun.

TABEL 3.9
PROGRAM DAN KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE TAHUN 2023

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH DANA	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	7
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Rp8.879.466.783**	**Rp5.743.567.940**	**64,68**	
1.03.06.2.01	***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota***	**Rp8.879.466.783**	**Rp5.743.567.940**	**64,68**	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	0	0	0	
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Rp8.879.466.783	Rp5.743.567.940	64,68	

2.2.2. Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk

Jumlah Rumah ibadah di Kabupaten Karimun dijabarkan sebagai berikut :

TABEL 3.10
JUMLAH RUMAH IBADAH DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	MASJID	MUSHOLA	SURAU	GEREJA PROTESTAN	GEREJA KATOLIK	VIHARA	CETIYA	KLENTENG	TOTAL RUMAH IBADAH
1	Kabupaten Karimun	245	94	180	44	8	19	49	1	640

Jumlah rumah ibadah di Kabupaten karimun sampai dengan Tahun 2023 adalah berjumlah 640 Rumah Ibadah. Namun, ini belum bisa dikatakan cukup jika di banding dengan bertambahnya jumlah dari penduduk kabupaten Karimun di tahun 2023 yakni sebesar 267.756 jiwa. Sehingga, bangunan rgedung rumah ibadah yang terbangun diharapkan bisa bertambah, baik melalui swadaya dari masyarakat maupun dari pemerintah Kabupaten Karimun. Berikut data Jumlah penduduk berdasarkan Agama di Kabupaten Karimun Tahun 2023 :

TABEL 3.11
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU	BUDHA	KONGHCU	KEPERCAYAAN	TOTAL PENDUDUK
1	**MORO**	10562	157	87	-	570	-	-	11376
2	**KUNDUR**	27368	835	242	-3	2629	146	-	31217
3	**KARIMUN**	38346	2780	758	5	6010	138	-	48037
4	**MERAL**	39093	2814	535	12	9601	462	3	52520
5	**TEBING**	29281	1635	886	-	1377	78	-	33257
6	**BURU**	9598	121	7	-	884	13	-	10623
7	**KUNDUR UTARA**	11438	309	26		1128	14	-	12915
8	**KUNDUR BARAT**	17887	291	8	-	1209	-	-	19395
9	**DURAI**	6275	37	8	-	64	-	-	6384
10	**MERAL BARAT**	15524	640	180	-	618	32	-	16994
11	**UNGAR**	5770	85	-	-	101	-	-	5956
12	**BELAT**	6241	288	11	-	320	-	-	6860
13	**SELAT GELAM**	4249	-	-	-	5	-		4254
14	**SUGIE BESAR**	7872	7	26	-	63	-	-	7968
	Kabupaten Karimun	**229.504**	**9.999**	**2.774**	**14**	**24.579**	**883**	**3**	**267.756**

Oleh karena itu, berdasarkan atas data di atas maka reliasasi persentase Tempat Ibadah per satuan penduduk adalah sebesar 0,24%, sehingga tingkat capaian dari realisasi tersebut adalah 104,34% dari target sebesar 0,23%. Data ini di dapatkan dengan formulasi dari Jumlah Rumah ibadah yang terbangun dibagi dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Karimun di kalikan dengan 100%, sehingga didapatkan angka realisasi tersebut.

Berdasarkan data tersebut diatas, jumlah penduduk yang terus bertambah sebanding dengan jumlah rumah ibadah yang ada di Kabupaten Karimun. Sehingga, target yang telah ditetapkan dapat dicapai.

2.2.3. Rasio Bangunan gedung bersertifikat laik fungsi di kawasan perkotaan per satuan bangunan kawasan perkotaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dijelaskan bahwa *"Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk Bangunan Gedung Fungsi Khusus oleh Pemerintah Pusat, untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan. Sedangkan, Laik fungsi diartikan sebagai kondisi bangunan yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.*

Dibawah ini merupakan jumlah rekomendasi atas Sertifikat Laik Fungsi Tahun 2023, dijabarkan sebagai berikut :

TABEL 3.12
JUMLAH REKOMENDASI SERTIFIKAT LAIK FUNGSI TAHUN 2023

No	Kecamatan	Jumlah rekomendasi Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Bangunan	Luas Bangunan (M2)	Rasio Bangunan bersertifikat Laik fungsi (%)
1	2	**3**	**4**	**5**	**6=(3/4)**
1	Karimun	6	9	1621,16	66,67
2	Meral	9	12	1567,78	75,00
3	Meral Barat	1	1	1577	100,00
4	Tebing	7	7	1497	100,00
5	Buru	0	0	0	0,00
6	Kundur	2	13	705,1	15,38
7	Kundur Utara	1	2	366,46	50,00
8	Kundur Barat	0	0	0	0,00
9	Ungar	0	0	0	0,00
10	Belat	0	0	0	0,00
11	Moro	0	0	0	0,00
12	Durai	0	0	0	0,00
13	Selat Gelam	0	0	0	0,00
14	Sugie besar	0	0	0	0,00
	Total Keseluruhan	**29**	**48**	**7339,5**	**60,42**

Berdasarkan atas tabel diatas, Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar 53,63% dan realisasi yang dicapai sebesar 60,42%, sehingga didapatkan tingkat capaian sebesar 112,66%.

TABEL 3.13
PROGRAM DAN KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2023

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH DANA	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	7
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Rp 38.300.801.813,00**	**Rp . 17.645.718.578,00**	**46,07**	
1.*03.08.2.01*	***Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung***	**Rp 38.300.801.813,00**	**Rp. 17.645.718.578,00**	**46,07**	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rp. 686.956.052,00	Rp. 510.665.180,00	74,34	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan,Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rp 37.613.845.761,00	Rp. 17.135.053.398,00	45,56	

2.2.1. Persentase Penyedia Jasa Yang Memiliki Tenaga Konstruksi yang Bersertifikasi

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, menjelaskan jasa konstruksi sebagai suatu layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Konsultansi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perangcangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, Hal ini menyatakan bahwa jasa konstrusi tersebut dimulai dari proses konsultansi konstruksi sampai dengan tahap akhir dari bangunan yang telah selesai di kerjakan. Pengguna jasa konstruksi adalah Pemilik atau Pemberi Pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi sedangkan penyedia jasa merupakan pemeberi layanan jasa konstruksi.

Jasa konstruksi akan menghasilkan bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik itu berupa sarana ataupun prasarana yang akan mendukung kemajuan dibidang ekonomi, sosial maupun budaya. Dibawah ini merupakan program dan Kegiatan dari pengembangan jasa konstruksi Tahun 2022 yang dijabarkan sebagai berikut :

TABEL 3.14
PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
TAHUN 2023

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH DANA	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	7
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rp.645.369.145,00**	**Rp.344.307.251,00**	**53,35**	
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Rp .228.900.799,00**	**Rp.114.243.767,00**	**49,91**	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp -	Rp -	0,00	
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Rp.135.398.087,00	Rp.65.600.598,00	48,45	

1.03.11.2.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp.93.502.712,00	Rp.48.643.169,00	52,02	
1.03.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp.168.409.538,00**	**Rp.78.085.137,00**	**46,37**	
1.03.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Rp. 63.051.563,00	Rp.28.701.752,00	45,52	
1.03.11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Rp.105.357.975,00	Rp.49.383.385,00	46,87	
1.03.11.2.03	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	**Rp.176.044.217,00**	**Rp.106.669.943,00**	**60,59**	
1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	. Rp176.044.217,00	Rp.106.669.943,00	60,59	
1.03.11.2.04	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Rp.72.014.591,00**	**Rp.45.308.404,00**	**62,92**	
1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp.72.014.591,00	Rp.45.308.404,00	62,92	

2. Terwujudnya Prasarana Penghubung yang optimal

2.1. Meningkatnya Jaringan Jalan Penghubung

Adapun panjang Jalan Menurut Jenis jalan yang berada di Kabupaten Karimun Sebagai Berikut :

TABEL 3.15
PANJANG JALAN MENURUT PIHAK BERWENANG YANG MENGELOLA JALAN DI KABUPATEN KARIMUN

KECAMATAN	WILAYAH PENANGANAN JALAN (DALAM KILOMETER)			
	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN	JUMLAH
1	2	3	4	5=(2+3+4)
Kecamatan Karimun	3,24	20,64	**40,17**	**64,05**
Kecamatan Meral	13,37	0,00	**59,50**	**72,87**
Kecamatan Tebing	0,00	3,99	**57,88**	**61,87**
Kecamatan Kundur	0,00	15,38	**89,40**	**104,78**
Kecamatan Moro	0,00	0,00	**28,86**	**28,86**
Kecamatan Durai	0,00	0,00	**29,17**	**29,17**
Kecamatan Buru	0,00	0,00	**64,94**	**64,94**
Kecamatan Kundur Utara	0,00	37,20	**85,75**	**122,95**
Kecamatan Kundur Barat	0,00	0,00	**84,67**	**84,67**
Kecamatan Meral Barat	9,26	0,00	**31,12**	**40,38**
Kecamatan Belat	0,00	0,00	**27,55**	**27,55**
Kecamatan Ungar	0,00	0,00	**21,15**	**21,15**
Kecamatan Sugie Besar	0,00	0,00	**49,47**	**49,47**
Kecamatan Selat Gelam	0,00	2,50	**15,81**	**18,31**
Jumlah/ Total	25,87	79,71	**685,44**	**791,02**

Persentase tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Karimun Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.16
PERSENTASE TINGKAT KEMANTAPAN JALAN KEWENANGAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023

No	PENYELENGGARA JALAN	PANJANG JALAN (KM)	BAIK	%	SEDANG	%	RUSAK RINGAN	%	RUSAK BERAT	%
1	**JALAN NASIONAL**	25,87	25,87	100%						
2	**JALAN PROVINSI**	79,71	61,26	76,85%	5,48	6,87%	4,45	5,58%	8,52	10,69%
3	**JALAN KABUPATEN**	**685,44**	**299,32**	**43,67%**	**135,43**	**19,76%**	**21,90**	**3,19%**	**228,79**	**33,38%**
TOTAL KESELURUHAN JALAN		791,02	386,45	48,85%	140,908	17,81%	26,349	3,33%	237,31	30,00%

Berdasarkan Keputusan Bupati Karimun nomor 410 Tahun 2023 tentang penetapan ruas – ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan kabupaten menyatakan bahwa **Jalan Kabupaten** adalah sepanjang 685,44 KM, dimana Jalan berkondisi baik sepanjang 299,32 KM, dengan persentase kondisi baik sebesar 43,67%, Kondisi sedang sebesar 19,76%, Kondisi rusak ringan 3,19%, dan kondisi rusak berat sebesar 33,38%.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun telah melakukan beberapa langkah sebagai upaya dalam mencapai sasaran tersebut antara lain :

1. Melakukan Pembangunan dan peningkatan Jaringan Jalan yang menjangkau ke seluruh wilayah dalam satu pulau secara berkelanjutan;
2. Melakukan usulan dan koordinasi baik melalui Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dalam Pemanfaatan Integrasi program provinsi dan pusat yang diperuntukkan bagi wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
3. Meningkatkan pelayanan transportasi perdesaan yang menghubungkan wilayah-wilayah perdesaan dengan pusat-pusat kegiatan lokal dan wilayah.

4. Meningkatkan Sarana dan prasarana umum penunjang kegiatan sosial masyarakat

Oleh karena itu, Peningkatan dan pemeliharaan jalan yang telah terbangun pada lingkungan pemukiman penduduk secara merata hingga ke pedesaan adalah suatu strategi yang perlu terus dilakukan untuk tercapainya sasaran ini secara berkelanjutan. Berikut ini adalah Realisasi keuangan dari Program dan kegiatan penyelenggaraan jalan yang telah dilaksanakan dimana dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 3.17
PROGRAM DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH DANA	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	7
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Rp.95.678.705.775**	**Rp. 84.262.558.681**	**88,07**	
1.03.10.2.01	***Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota***	**Rp.95.678.705.775**	**Rp. 84.262.558.681**	**88,07**	
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Rp.553.410.000	Rp. 270.737.800	48,92	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Rp.12.324.419.513	Rp. 9.472.029.959	76,86	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Rp.79.375.469.283	Rp. 72.308.582.255	91,10	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp.2.803.404.042	Rp. 1.860.513.730	66,37	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Rp. 622.002.937	Rp. 350.694.937	56,38	

3. Meningkatnya Pengelolaan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup

3.1. Meningkatnya Kesesuaian Tata Ruang Wilayah

3.1.1. *Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah*

1. Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun disusun sebagai amanat dari Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undag (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Peraturan Perundang - undangan tersebut memberikan amanat bahwa dalam hal Penyelenggaraan

Penataan Ruang yang meliputi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian pemanfaatan ruang harus melibatkan para pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan sebagai berikut :

- Untuk Memperoleh informasi dari pemangku Kepentingan dan menyediakan akses kepada masyarakat sebagai Bentuk dari Keterbukaan Informasi Publik;
- Untuk Memberikan sosialisasi kepada setiap pemangku kepentingan mengenai perencanaan tata ruang;
- Untuk Menerima masukan dari masyarakat terhadap kegiatan perencanaan tata ruang.

Oleh karena itu, Tujuan tersebut dilakukan dalam hal pemenuhan kewajiban pelayanan pemberian informasi bagi masyarakat tersebut, yang dilaksanakan melalui pelayanan secara Langsung maupun tidak langsung serta melalui surat maupun media elektronik. Pemanfaatan ruang merupakan Upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pola ruang dan struktur ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041. Aturan tersebut menetapkan sejumlah program pemanfaatan ruang yang dijabarkan dalam indikator program utama, sebagai berikut :

a. Program Perwujudan Struktur Ruang Kabupaten;
b. Program Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pada tahap pertama;
c. Program Perwujudan kawasan – kawasan strategis kabupaten;
d. Program Perwujudan Ruang melalui Investasi.

Program tersebut dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan investasi melalui Penataan Ruang. Oleh karna itu, Investasi yang berada di wilayah kabupaten Karimun harus bersesuaian dengan rencana peruntukan Tata ruang Wilayah agar Investasi tersebut tidak bertabrakan dengan Kegiatan penyelenggaran Penataan ruang. Perwujudan ruang bukan hanya bertujuan untuk merealisasikan lahan untuk fungsi investasi akan tetapi perwujudan ruang juga harus seimbang dengan ketersediaan infrastruktur internal maupun eksternal. Sehingga, perwujudan ruang infrastruktur perlu dilakukan melalui kolaborasi bersama antara, pemerintah daerah dan swasta. Realisasi dari Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang dijabarkan sebagai berikut :

TABEL 3.18
PROGRAM DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2023

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH DANA	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	7
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Rp 3.268.751.061**	**Rp1.082.995.933**	**33,13**	
1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Rp2.077.663.103**	**Rp704.073.383**	33,89	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Rp2.077.663.103	Rp 704.073.383	33,89	
1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp229.203.282**	**Rp 95.323.700**	**41,59**	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Rp229.203.282	Rp 95.323.700	41,59	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Rp -	Rp -	0,00	
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp961.884.676**	**Rp 283.598.850**	**29,48**	
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Rp604.958.006	Rp 248.919.850	41,15	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp356.926.670	Rp34.679.000	9,72	

4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD

1.1.1. Nilai AKIP OPD

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat daerah mendapatkan nilai 70,65 atau dengan predikat "**BB**" (Sangat Baik). Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini masih menggunakan nilai Tahun 2022 dan bukan tahun 2023, hal ini dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak melaksanakan evaluasi sakip di tahun ini sehingga tidak terdapat nilai pada tahun 2023.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Suatu kondisi ataupun hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan dimana memiliki dampak yang signifikan bagi entitas masyarakat di masa yang akan datang disebut sebagai Isu Strategis. Suatu Keadaan ataupun kondisi bisa dikatakan sebagai isu strategis jika apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang lebih masif, atau jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan kesempatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Karakteristik dari isu strategis adalah kondisi yang bersifat penting, Mendesak, mendasar, jangka panjang, mendesak, dan menentukan tujuan dimasa akan datang.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih perlu dilakukan evaluasi kembali. Ini dapat dilihat dari hasil capaian kinerja program dan kegiatan yang pada umumnya telah terlaksana. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan. Adapun permasalahan serta faktor-faktor

yang mempengaruhi pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain :

1. Kondisi beberapa daerah di kabupaten karimun yang masih memerlukan penanganan penataan ruang dan juga infrastruktur yang belum memadai akibat beberapa faktor yang menjadi penghambat;
2. Sulitnya pembebasan lahan sehingga menghambat pelaksanaan fisik di lapangan;
3. Tenaga Aparatur Sipil yang belum cukup memadai dan belum bersesuaian dengan kompetensi yang dibutuhkan;
4. Belum optimalnya *Establishment* dan *Controlling* Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun terhadap pihak ketiga yang melakukan kerja sama berkaitan dengan pekerjaan umum/jasa konstruksi.

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun

a. Permasalahan Bidang Sumber Daya Air

Terdapat beberapa permasalahan atas isu – isu yang dihadapi bidang sumber daya air, yaitu sebagai berikut :

1. Pentingnya optimalisasi waduk/kolong/kolam air dalam perlindungan dan konservasi,
2. perlunya suatu peningkatan jaringan irigasi, dimana belum ada penambahan luas jaringan irigasi dari sawah yang beririgasi seluas 278 ha.
3. masih tingginya perluasan dampak kerusakan sarana dan prasarana dasar permukiman sebagai dampak dari akibat tanah longsor dan banjir yang disebabkan air hujan dan luapan air laut.

b. Permasalahan Bidang Bina Marga

Isu permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya infrastruktur jalan dan jembatan, khususnya pada Kawasan Free Trade Zone (FTZ) yang dapat mendorong percepatan Pembangunan ekonomi,
2. Belum adanya jaringan jembatgan yang mendukung konektivitas antar pulau yang menunjang aktivitas ekonomi Masyarakat
3. Belum optimalnya jaringan jalan dan jembatan yang mengarusutamakan gender,
4. Kurangnya pemeliharaan infrastruktur jalan yang telah terbangun,
5. Lemahnya database infrastruktur jalan yang telah terbangun,
6. Lemahnya database infrastruktur jalan sebagai acuan informasi,
7. Keterbatasan tenaga pengawas kegiatan/lapangan,
8. Kurangnya peralatan dan perlengkapan pendukung (Alat berat).

c. Permasalahan Bidang Cipta Karya

Isu permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Kurangnya keterpaduan penangan saluran drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi,
2. Sarana dan prasaran perkantoran yang mengutamakan kesetaraan gender kurang begitu optimal dalam menunjang kinerja,

3. Belum optimalnya sarana dan prasarana fasilitas umum yang mendukung kegiatan pariwisata dan kebudayaan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan tentu saja pendapatan daerah,
4. Keterbatasan tenaga pengawas kegiatan/lapangan,
5. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan bangunan dan juga lingkungan.

d. Permasalahan Bidang Tata Ruang

Isu – isu permasalahan yang dihadapai adalah :

1. Belum optimalnya pelaksanaan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Tahun 2021 – 2041 Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021,
2. Sebagian Kawasan perkotaan dan Kawasan strategis belum memiliki Rencana Detail yang responsif gender yang disertai dengan peraturan zonasi,
3. Perlu dilakukan peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang untuk menjamin RTR yang semakin berkualitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan pemanfaat ruang yang efektif.

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Program kerja setiap memasuki tahun anggaran sudah harus memiliki jadwal kerja yang tersusun secara sistematik dengan koordinasi internal yang terpadu untuk mensinkronisasikan dengan OPD terkait lainnya sehingga capaian tujuan akhir dari setiap pelaksanaan program dapat terwujud secara sistematik, terarah dan tepat waktu.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pada pagu indikatif dan perencanaan yang disusun dimana merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan antara proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif atas aspirasi masyarakat melalui Musrenbang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai instansi daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan bagian integral dari pemerintah daerah. Karena itu, visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada sepenuhnya pada visi Pemerintah Kabupaten, dengan tetap memperhatikan lingkungan strategis yang dapat memenuhi eksistensi organisasi.

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun dinyatakan sebagai berikut :

Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Yang Andal Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Masyarakat

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

Makna dari Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Yang Andal adalah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Masyarakat yang penjabarannya meliputi:

1. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;

2. Pelayanan jalan yang mencakup aspek askesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan pengembangan kawasan Free Trade Zone (FTZ);
3. Pelayanan air bersih yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuinitas yaitu penyediaan air bersih yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai;
4. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang sesuai standar teknis;
5. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
6. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU yang andal berbasis penataan ruang

Sedangkan, Misi merupakan penjabaran lebih lanjut untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Misi memperjelas apa saja yang harus dilakukan (*what have to be done*) dalam rangka mewujudkan visi

Berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Karimun, maka untuk mencapai Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang **"Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Masyarakat"**, ditetapkan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021-2026, yaitu:

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan pembangunan kabupaten serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan;

2. Meningkatkan kualitas sumber daya air secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air;
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana fasilitas umum dan permukiman yang layak, nyaman, tertib dan terpelihara;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;

Hal-hal yang mendasar inilah yang berusaha untuk diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun melalui pernyataan misalnya yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun juga mempertimbangkan dan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020 - 2024 adalah

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya yang akan dilaksanakan selama periode

Renstra 2020– 2024 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pada tahun anggaran 2025. Tujuan merupakan target kualitatif yang dalam penetapannya mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Sebagai

penjabaran atas Misi Kabupaten Karimun. Tujuan RENJA ini adalah sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pada tahun anggaran 2023. Tujuan merupakan target kualitatif yang dalam penetapannya mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Sebagai penjabaran atas Misi Kabupaten Karimun, maka sasaran jangka menengah RPJMD yang kemudian menjadi tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akses Kebutuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat yang merata
2. Meningkatkan Prasarana Penghubung yang Optimal
3. Meningkatkan Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Maksud dari Tujuan yang tersebut diatas adalah :

1) Terwujudnya infrastruktur yang selalu mengedepankan keadilan dalam membangun agar pertumbuhan ekonomi juga bisa dirasakan oleh masyarakat secara komprehensif;
2) infrastruktur terwujud dengan tetap menjaga Kelestarian lingkungan hidup sehingga kedua hal tersebut bisa selaras dalam pembangunan ;
3) Birokrasi yang profesional bermaksud yaitu aparatur yang berintegritas, kompeten dan berkinerja tinggi sehingga akhirnya membentuk Organisasi Pemerintah Daerah pemerintah Kabupaten Karimun yang bisa mewujudkan visi

Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan berlandaskan iman dan taqwa, sedangkan birokrasi yang unggul bermakna Sumber daya aparatur yang memiliki keterampilan secara adaptif, dan selalu berinovasi dan kreaktif dalam pekerjaanya sehingga terwujudnya percepatan transformasi birokrasi yang modern.

3.2.2. Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran yang dimaksud di sini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu, yang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan. Penetapan sasaran didasari atas isu-isu strategis, analisis lingkungan internal dan eksternal, untuk menentukan faktor kunci keberhasilan, sejalan dengan proses perencanaan strategis. Berdasarkan misi dan tujuan yang ditetapkan tersebut, maka sasaran-sasaran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun untuk 1 (satu) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Misi 2 RPJMD	**:**	**Melanjutkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah (Berkeadilan dalam Infrastruktur)**
Tujuan 1	**:**	Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat yang merata

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman yang baik adalah kawasan yang terkelola secara komprehensif dalam memperbaiki serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maksud dari sasaran strategis ini adalah meningkatnya masyarakat yang madani, sehat dan berkualitas melalui peningkatan infrastruktur permukiman.

Indikator Kinerja :

1. Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang terbangun
2. Persentase Penduduk yang berakses air bersih
3. Persentase penduduk berakses sanitasi yang layak

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Fasilitas Umum

Sarana dan Prasarana fasilitas umum menjadi penting karena merupakan hal yang sangat di butuhkan masyarakat. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan kegiatan masyarakat. Sedangkan, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses Kegiatan Masyarakat.

Indikator Kinerja :

1. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik
2. Rasio Tempat Ibadah Per satuan Penduduk
3. Rasio Bangunan Gedung bersertifikat laik fungsi di kawasan perkotaan per satuan bangunan kawasan perkotaan

Tujuan 2 : Meningkatnya Prasarana Penghubung yang Optimal

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Jaringan Jalan Penghubung

infrastruktur jalan adalah alat yang sangat krusial dalam penghubung antar satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan jalan penghubung yang baik sebagai sarana distribusi dan transportasi masyarakat.

Indikator Kinerja :

1. Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Misi 4 RPJMD : **Meningkatkan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup (Berkeadilan dalam melestarikan lingkungan Hidup)**

Tujuan 1 : Meningkatnya pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup

Sasaran 1 : Meningkatnya Pola dan Struktur Ruang yang sesuai dengan Tata Ruang Wilayah

Tanah merupakan hal yang sifatnya terbatas . hal itu bermakna bahwa terbatasnya tanah atau wilayah di suatu daerah perlu dikelola atau ditata secara baik sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Perencanaan dan penataan harus seiring sejalan agar lingkungan dan manusia bisa hidup secara berdampingan.

Indikator Kinerja :

1. Persentase Pemanfaatn Ruang yang sesuai dengan Tata Ruang Wilayah
2. Jumlah Rekomendasi Pemanfaat Ruang yang dikeluarkan

Misi 5 RPJMD : **Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul**

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD

Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam peningkatan kinerja OPD. Akuntabilitas kinerja OPD ialah sebuah cerminan dari kewajiban dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakannya.

Indikator Kinerja :

1. Nilai AKIP

TABEL 3.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi	**Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman Dan Taqwa**		
Misi 2	Melanjutkan pembangunan infrastrukstur yang berkeadilan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah (**Berkeadilan Dalam Infrastrukstur Wilayah)**		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIAJAKN**
Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat yang Merata	Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman	Mewujudkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana di Kawasana permukiman	Penataan, Pengembangan, Pengendalian Fasilitas Permukiman sesuai dengan Penataan Ruang
		Pemerataan Penyediaan Infrastruktur dasar (Air Bersih, Sanitasi)	Membangunan Prasarana Air Baku (SPAM, Sumur, Tandon Air, Bak penampung air) untuk pemenuhan Kebutuhan Air Baku bagi masyarakat
			Membangun Sarana dan Prasarana penunjang Pemanfaatan air baku dengan prioritas pemenuhan air untuk kebutuhan pokok Rumah Tangga terutama di wilayah Defisit Air, Pulau – pulau kecil, dan Terdepan, kawasan terpencil serta daerah perbatasan
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Fasilitas Umum	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum yang berkualitas secara merata	Penataan, pengembangan pada penyelenggaraan infrastruktur fasilitas umum dilingkungan masyarakat
			Membentuk tim profesi ahli dalam penerbitan perizinan bangunan gedung Peningkatan kualitas tenaga kerja onstruksi
Terwujudnya Prasarana Penghubung Yang Optimal	Meningkatnya Jaringan jalan penghubung	Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Menjangkau ke Seluruh Wilayah	Penyediaan infrastruktur penyelenggaraan jalan ke seluruh wilayah
		Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung konektivitas antar pulau	Melakukan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Jalan yang Menjangkau ke Seluruh Wilayah dalam Satu Pulau Secara Berkelanjutan
		Pemanfaatan Integrasi Program Provinsi dan Pusat yang Diperuntukkan Bagi Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar	Memantapkan Rencana Jalan yang disertai Proyeksi Pemanfaatan Dana Bantuan Provinsi dan Pusat, Termasuk Subsidi Operasional Modal Transportasi
			Membangun Jaringan Jalan yang Menjangkau ke Seluruh Wilayah Terutama di Kawasan Perbatasan dan di Pulau-Pulau Terluar
			Memantapkan Sistem Jaringan Jalan Perdesaan dengan Meminimalisir Kerusakan Lingkungan dan Alih Fungsi Lahan

3.3. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

Program Prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan Prioritas adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan.

Berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah di tiap urusan maka dibuatlah program prioritas dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan. Rencana program dan indikatif yang akan dilaksanakan SKPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun pada tahun 2025 pada awalnya adalah sebanyak **11 program dan 24 kegiatan**.

Namun, terdapat perubahan pada Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, Sehingga nomenklatur program dan kegiatan menjadi berubah sebagian besar sehingga menjadi **11 Program dan 21 Kegiatan**. Adapun nama program yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis I :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.**

   Total Pagu Indikatif : Rp. **10.750.000.000,00**,-

   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

SASARAN STRATEGIS II:

Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat dikawasan Permukiman

1. **Program Pengelolaan Sumber Daya Air**

   Total Pagu Indikatif : Rp. 13.000.000.000,-

   Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

   1. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

2. **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

   Total Pagu Indikatif : Rp.3.000.000.000,-

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Total Pagu Indikatif : Rp.8.000.000.000,-

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota

SASARAN STRATEGIS III :

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Fasilitas Umum

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Total Pagu Indikatif : Rp.5.000.000.000,-

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pengembangan Permukiman

Total Pagu Indikatif : Rp. 3.200.000.000

1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah Kabupaten/Kota

3. Program Penataan Bangunan Gedung

Total Pagu Indikatif : Rp.5.500.000.000,-

1. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Total Pagu Indikatif : Rp. 5.500.000.000,-

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Total Pagu Indikatif : Rp.1.145.000.000,-

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

2. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non kecil dan Kecil)
4. Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.

SASARAN STRATEGIS IV :

Meningkatnya Jaringan jalan penghubung

1. **Program Penyelenggaraan Jalan**

   Total Pagu Indikatif : RP. 63.880.000.000,

   1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

SASARAN STRATEGIS V :

Meningkatnya Kesesuaian Tata Ruang Wilayah

1. **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

   Total Pagu Indikatif : Rp.1.725.000.000,-

   2. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
   3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
   4. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN KARIMUN

NAMA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**126.550.000.000,00**							**126.700.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**126.550.000.000,00**							**126.700.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**126.550.000.000,00**							**126.700.000.000,00**	
1,	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**79 Nilai**			**79 Nilai**	**10.750.000.000,00**						**79 Nilai**	**11.090.000.000,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan*	-			8 Dokumen	200.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kabupaten Karimun	-	230.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	60.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

																	RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan*	-			1 Laporan	6.560.000.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkata n Sumber Daya Manusia	ASN Kabupaten Karimun	-	7.020.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				780 Orang/bula n	6.200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkata n Sumber Daya Manusia	ASN Kabupaten Karimun		6.550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	60.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan*	-			1 Laporan	695.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kabupaten Karimun	-	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	175.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	175.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	125.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	220.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan*	-			1 Laporan	1.365.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kabupaten Karimun	-	1.045.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	85.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20000 Paket	100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan				10 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata	ASN Kabupaten Karimun		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
			Perundang-Undangan yang Disediakan						Semua Kel/Desa			Kelola Pemerintah an Inovatif				PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	900.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan*	-			1 Laporan	650.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kabupaten Karimun	-	775.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

																RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	500.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan*	-			1 Laporan	1.000.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kabupaten Karimun	-	1.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan	100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	900.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan*	-			1 Laporan	280.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kabupaten Karimun	-	270.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	85.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	95.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2,	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dila yani Oleh Jaringan Irigasi Rasio Luas Kawasan Per mukiman Rawan Banjir y ang Terlindungi Oleh Infra struktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota***	**70,60 Perse n 100,00 Persen 70,60 Perse n 100,00 Persen**			**90,31 Persen 67,63 Persen**	**13.000.000.000,00**						**70,60 Perse n 100,00 Persen 70,60 Perse n 100,00 Persen**	**9.000.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Jenis Pengelolaan SDA ditangani*	-			6 Jenis	13.000.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun	-	9.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstora si				15.468 KM	4.250.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				727 KM	3.250.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				7696 KM	3.250.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir														
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				13 Unit	2.250.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3,	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Rasio KK yang terlayani air bersih***	**68,28 Persen**			**68,28 Persen**	**8.000.000.000,00**						**68,28 Persen**	**5.250.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah KK yang Terlayani Air Bersih*	-			2931 KK	8.000.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun	-	5.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				400 Liter/Detik	4.500.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		3.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				400 SR	3.500.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4,	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Rasio KK yang Berakses Sanitasi yang Layak***	**72,16 Persen**			**72,16 Persen**	**3.000.000.000,00**						**72,16 Persen**	**4.010.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah KK yang Berakses Sanitasi yang Layak*	-			2313 KK	3.000.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun	-	4.010.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman														
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan				1250 M³/Hari	2.000.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)														
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun				0 M³/Hari	1.000.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		1.010.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5,	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***Persentase Panjang Drainase yang Terbangun/Terpelihara/ Direhab***	**13,12 Persen**			**13,12 Persen**	**5.000.000.000,00**						**13,12 Persen**	**4.500.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang DRainase yang Terb angun/Terpelihara/direh ab*	-			6753 M	5.000.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun	-	4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				2202 M	3.000.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan														

			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				1915 Sistem Drainase Lingkungan	1.500.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				881 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6,	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	***Rasio Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Terhadap Kawasan Permukiman***	**6,89 Persen**			**6,89 Persen**	**3.200.000.000,00**						**6,89 Persen**	**1.700.000.000,00**	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum yang Terbangun/Terpelihara*	-			73 Unit	3.200.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun	-	1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.2.01.0005	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota														
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan				0 M³/Hari	700.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.2.01.0006	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				0 Rumah Tangga	1.000.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.2.01.0010	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Disediakan				0 Unit	1.500.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kabupaten Karimun		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7,	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***Persentase Rekomendasi IMB yang Disetujui***	**96 Persen**			**96 Persen**	**16.350.000.000,00**						**96 Persen**	**9.800.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Jumlah IMB dan Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan*	-			217 IMB	16.350.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun	-	9.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				50 Bangunan Gedung	10.000.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				57 Bangunan Gedung	800.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		2.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung														
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	4.350.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														

			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				150 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8,	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	***Rasio Infrastruktur Bangunan Terhadap Kawasan Permukiman***	**2,11 Persen**			**2,11 Persen**	**500.000.000,00**						**2,11 Persen**	**700.000.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Bangunan yang Terbangun/Terpelihara*	-			62 Unit	500.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun	-	700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				3 Kawasan	500.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9,	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/Kota***	**74,55 Persen**			**74,55 Persen**	**63.880.000.000,00**						**74,55 Persen**	**77.350.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Panjang Jalan yang dibangu n/ditingkatkan/dipelihar a*	-			85161 KM	63.880.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun	-	77.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														

			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				6 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa														
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				6 KM	1.000.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				7 KM	6.700.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		9.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				14 KM	44.700.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		51.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				1 KM	1.000.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				0 Jembatan	1.000.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		1.980.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				260 Jembatan	6.900.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		6.420.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1 KM	580.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1,76 KM	1.000.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10,	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Rasio Tenaga Operator/Teknisi/ Analisis/Tenaga Kerja Konstruksi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi***	**65,90 Persen**			**65,90 Persen**	**1.145.000.000,00**						**65,90 Persen**	**1.630.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Jumlah Peserta Tenaga Terampil yang Terlatih*	-			120 Orang	770.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun	-	1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				1 Orang	75.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi														

			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Lembaga	75.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya				1 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan				0 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				120 Orang	450.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan SIPJAKI*	-			1 Dokumen	110.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun	-	175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														

			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	60.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	*Jumlah Laporan*	-			1 Laporan	65.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun	-	80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.03.0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun				0 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Jumlah Laporan*	-			1 Laporan	200.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun	-	275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				0 Paket Pekerjaan	55.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				20 Lembaga	85.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														
			Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun				0 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11,	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Ketaatan Penyedia RTH Di Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Sebesar 20% Publik***	**16,67 Persen**			**16,67 Persen**	**1.725.000.000,00**						**16,67 Persen**	**1.670.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Jumlah Regulasi yang ditetapkan Terkait dengan Penyelenggaraan Penataan Ruang*	-			1 Dokumen	750.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun	-	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														

			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				6 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota														
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi				6 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				6 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				60 Laporan	150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang*	-			1 Dokumen	250.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				0 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang														
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				16 Orang	50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang														
			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				30 Kegiatan	150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penerima Informasi dalam Pemanfaatan Ruang*	-			50 Orang	200.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun	-	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengawasan Kesesuaian Tata Ruang Terhadap IMB yang diterbitkan*	-			1 Dokumen	525.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun	-	670.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR														
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				1 Kasus	100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK														

			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				20 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat														
			Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	ASN Kabupaten Karimun		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	J U M L A H							**126.550.000.000,00**							**126.700.000.000,00**	

BAB IV
PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan RENJA

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun merupakan salah satu Dokumen Perencanaan yang menjabarkan permasalahan Pembangunan Kabupaten Karimun. Rencana Kerja ini memuat daftar Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang dimaksud melalui sistem secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN.

Penyusunan dan Penetapan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertujuan untuk mengukur kualitas dari produk perencanaan sehingga kualitas perencanaan dapat ditingkatkan dengan menerapkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun merupakan acuan yang terukur dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Perlu untuk selalu meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat secara jujur, transparan, adil, demokratis dan penuh tanggung jawab. Hal ini bermaksud agar hasil-hasil Pembangunan Daerah dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Karimun sebagai wujud untuk menuju Visi Kabupaten Karimun Tahun 2026.

4.2. Kaidah – kaidah pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen RENJA Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Kaidah penulisan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

2. Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada dokumen RENJA Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 berupaya untuk selalu melakukan Sinkronisasi dan Sinergitas dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Karimun dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).

4.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Kualitas, Kapasitas dan Kompetensi SDM aparatur dalam hal perencanaan perlu untuk selalu ditingkatkan dalam melaksanakan tugas dari perencanaan yang semakin kompleks;
2. Berupaya untuk selalu meningkatkan Kualitas dari Dokumen perencanaan dalam penyusunan perencanaan yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku agar selalu berkaitan antar dokumen perencanaan agar bisa dipertanggunjawabkan;

3. Selalu berupaya agar perencanaan program dan kegiatan dengan penganggaran selalu konsisten agar target dari indikator bisa tercapai sehingga kinerja bisa terus ditingkatkan;
4. Meningkatkan fungsi Ke-PU-an dalam penyusunan kebijakan daerah melalui implementasi yang berpedoman pada RENJA tahun 2024 ini. Sehingga pada akhirnya keberhasilan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bisa tercapai secara maksimal melalui peran aktif dari ASN yang terlibat dan berkomitmen dalam melakukan koordinasi dan sinergi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum.

TAHUN
2024

RENCANA KERJA

RENJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARIMUN

KATA PENGANTAR

Segenap Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena dengan rahmat dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun anggaran 2024.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun merupakan dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dibuat guna menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program dan kegiatan serta evaluasi kegiatan tahun sebelumnya yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun periode 2021 – 2026.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keterlibatan semua aparatur di lingkungan unit kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yang telah memberikan sumbangsih secara nyata dalam peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun. Semoga melalui Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten ini menjadi acuan bagi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun untuk terus meningkatkan kinerjanya di masa-masa yang akan datang agar menjadi lebih baik, terarah, transparan, dan akuntabel.

Tanjung Balai Karimun, Februari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARIMUN

MUHAMMAD ZULFAN, ST.M.M.
Pembina Utama Muda, IV-c
NIP.197005312000121003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 1
Latar Belakang 1
Gambaran Umum Perangkat Daerah 3
Maksud dan Tujuan 15
Struktur Organisasi 16
Sistematika Penulisan 17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 19
Rencana Strategis Organisasi 19
Rencana Kinerja Tahun 2024 22
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27
Pengukuran Kinerja 27
Sistem Pengumpulan Data Kinerja 32
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 33
Realisasi Anggaran 65
BAB IV PENUTUP 74
Kesimpulan 74
Saran 76

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun) yang dibuat oleh tiap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rangkaian penyusunan renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja OPD menguraikan program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai Dokumen Perencanaan yang memuat Program, Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran yang disertai dengan Indikator Kinerja dan Pendanaan yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah bertujuan Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Transparansi, Efektif, Efisien dan Partisipatif dan sesuai dengan tujuan dari rencana kerja itu sendiri seperti melakukan penyelarasan antara rencana pembangunan daerah dengan kebijakan strategis nasional, mendorong pengembangan pembangunan daerah yang terarah dan terintegrasi, memperkuat koordinasi dan sinergisitas antara SKPD atau unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 ini, merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021. Penyusunan Renja ini, pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan arahan dan perencanaan program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun pada tahun 2024.

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Keterkaitan Misi RPJMD Terhadap Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun 19
Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 21
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2024 24
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2024 30
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran OPD 33
Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 34
Tabel 3.3 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penanganan Rumah Hunian Yang Layak Huni dan Terjangkau Tahun 2024 38
Tabel 3.4 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan Kabupaten Karimun 44
Tabel 3.5 Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Karimun Tahun 2024 45
Tabel 3.6 Jumlah Titik Penerangan Jalan Umum yang Terpasang di Kabupaten Karimun Tahun 2024 47
Tabel 3.7 Jumlah Titik dan Lokasi Kegiatan Peningkatan Penerangan Lampu Jalan Pulau Karimun Tahun 2024 48
Tabel 3.8 Jumlah Titik dan Lokasi Kegiatan Peningkatan Penerangan Lampu Pulau Kundur dan Pulau Ungar Tahun 2024 52

Tabel 3.13 Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2024 39
Tabel 3.14 Rincian Realisasi Belanja Langsung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2024 . 40

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun 17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berdasarkan peraturan Bupati Karimun Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 telah mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja SKPD selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis (Renstra) SKPD lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing–

masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dalam hierarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas, yaitu : perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RKPD memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diperoleh dari Renja OPD sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RKPD sekurang–kurangnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik berasal dari APBD, APBN maupun sumber–sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam mekanismenya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa Baperlitbang menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah. Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dimana dalam Pasal 14 dijelaskan bahwa Baperlitbang menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, BAPERLITBANG melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan

Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud dilakukan berbasis pada e-planning.

Dalam prosesnya, penyusunan RKPD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 merujuk pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Baperlitbang bertugas mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dan selanjutnya disepakati menjadi dokumen rancangan akhir RKPD di dalam Musrenbang RKPD. Lebih lanjut RKPD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan daerah serta sebagai acuan dalam proses penyusunan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024. Selanjutnya, rancangan akhir RKPD tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Renja OPD tahun 2024 merupakan penjabaran dari RKPD tahun anggaran 2024. Penjabaran yang dimaksud, menitikberatkan pada penyelarasan prioritas, sasaran, program dan kegiatan prioritas lingkup

OPD yang menunjang pembangunan tahunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang selaras dengan Renstra OPD dan RPJMD, begitupun dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN. Prioritas pembangunan tahun anggaran 2024 yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan prioritas merupakan upaya pemenuhan pencapaian target tahun ketiga yang ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Tahun 2021–2026.

Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJMD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD dapat dijelaskan melalui gambar bagan alir sebagai berikut:

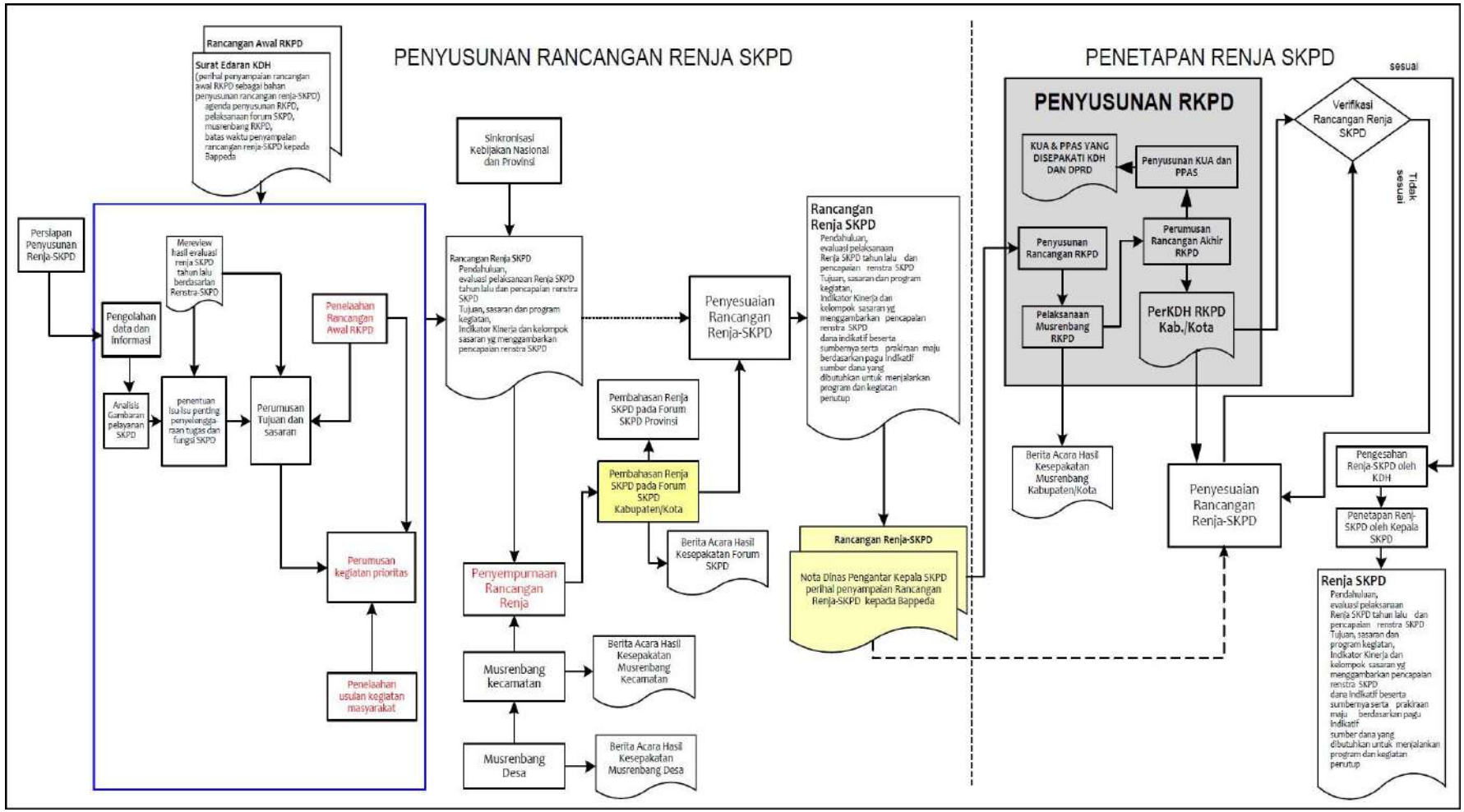

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Kabupaten/Kota

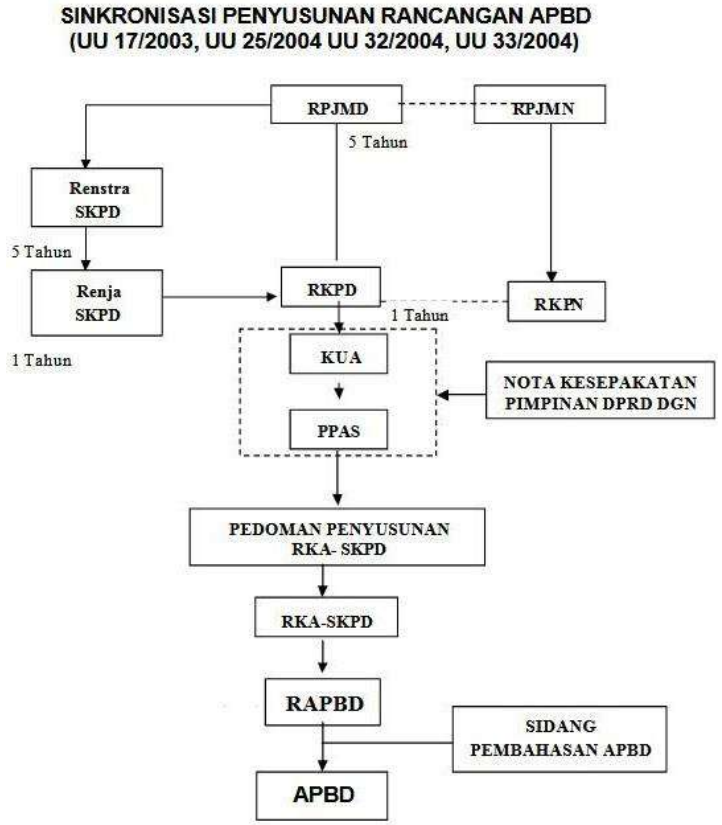

Gambar 1.2
Bagan Alir keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJMD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 sebagai bagian dari ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun 2006-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021;

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun;
12. Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Bupati Karimun Nomor 69 tahun 2017 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 70);
16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Karimun Tahun 2108;
17. Keputusan Bupati Karimun Nomor 123.b Tahun 2016 tentang Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah;
19. Peraturan Bupati Karimun Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024;
20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Karimun.

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum, maksud penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun untuk satu tahun mendatang. Secara khusus Rencana Kerja ini mempunyai tujuan:

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun.
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun serta indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang mencakup:

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Bagian ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD;
f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika OPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap OPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD yang bersangkutan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai :

a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD.
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD;
e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dlm perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulka para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan lainnya. Deskripsi yang disajikan dalam subbab ini, antara lain:

a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut di peroleh;

b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis rogram/ kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV : PENUTUP

Berikan uraian berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran
b. tidak sesuai dengan kebutuhan.
c. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
d. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2022 dan 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2022 dan 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Karimun mengalokasikan Anggaran sebesar Rp. **36.779.672.569,00** kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, anggaran ini dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Anggaran ini digunakan untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Belanja Pegawai Tidak Langsung adalah belanja untuk membiayai antar lain, gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp.2.701.321.716,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.2.507.363.036,- dengan persentase tingkat serapan adalah 92,81%, belanja hibah sebesar Rp.265.137.716,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.264.397.000 dengan persentase tingkat serapan adalah 99,72% dan belanja bantuan social dengan total anggaran sebesar Rp.261.785.740,- dengan realisasi sebesar Rp.221.146.000,- dengan capaian persentase sebesar 84,47%. Sedangkan Belanja Langsung adalah belanja untuk membiayai

antara lain belanja Barang dan jasa dengan anggaran sebesar Rp.15.817.294.299,- dengan realisasi sebesar Rp.15.502.396.819,- dengan persentase sebesar 98%, belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.310.732.000,- dengan realisasi sebesar Rp.293.577.885,- dengan persentase sebesar 94,47%, belanja modal gedung dan bangunan dengan anggaran sebesar Rp.332.660.802,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.332.433.000,- dengan persentase senilai 99,93% dan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp.17.090.740.296,- dengan realisasi sebesar Rp.16.861.709.192,- dengan persentase sebesar 98,65%. Untuk pembiayaan seluruh kegiatan yang di laksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, yang terdiri dari 6 (enam) Program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Secara keseluruhan total anggaran yang disediakan sebesar sebesar Rp.36.779.672.569,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.35.983.022.932,- dengan persentase sebesar 97,83%. Berikut adalah Rincian Anggaran dan dan realisasi anggaran belanja tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Tingkat Capaian
1.	**Belanja Tidak Langsung**	**3.228.245.172**	**2.992.906.036**	**92,70%**
	▪ Belanja Pegawai	2.701.321.716	2.507.363.036	92,81%
	▪ Belanja Hibah			
	▪ Belanja Bantuan Sosial	265.137.716	264.397.000	99,72%
		261.785.740	221.146.000	84,47%
2.	**Belanja Langsung**	**33.551.427.397**	**32.990.116.896**	**98,32%**
	▪ Belanja Barang dan Jasa	15.817.294.299	15.502.396.819	98%
	▪ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	310.732.000	293.577.885	94,47%
	▪ Belanja Modal Gedung dan Bangunan	332.660.802	332.433.000	99.93%
	▪ Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	17.090.740.296	16.861.709.192	98,65%
Total Belanja :		**36.779.672.569**	**35.983.022.932**	**97,83%**

Untuk mengetahui capaian kinerja dan realisasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2022 dapat dilihat dari tabel dibawah ini,

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA PROGRAM /KEGIATAN			REALISASI	KINERJA KEUANGAN			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	FISIK (%)	ANGGARAN	REALISASI	SILPA	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)	10 =8/7*100
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**4.620.613.288**	**4.353.318.842**	**267.794.446**	**94.21%**
1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**37.700.000**	**36.855.250**	**844.750**	**97.75%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2	2	100%	**21.512.000**	**21.502.650**	**9.350**	**99.95%**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	1	1	100%	**16.188.000**	**15.352.600**	**835.400**	**94.83**
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**2.493.061.716**	**2.301.131.036**	**191.930.680**	**92.30%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	14	14	100%	**2.399.650.116**	**2.208.247.745**	**191.402.371**	**92.02%**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan	12	12	100%	**93.411.600**	**93.411.600**	**0**	**100%**
3.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**142.038.400**	**140.382.500**	**1.655.900**	**98.83%**
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi	2	2	100%	**142.038.400**	**140.382.500**	**1.655.900**	**98.83%**
4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**797.351.800**	**794.204.560**	**3.147.240**	**99.60%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item	65	52	80%	**18.316.000**	**18.302.000**	**14.000**	**99.92%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Item	24	24	100%	**226.989.300**	**226.928.000**	**61.300**	**99.97%**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Item	15	15	100%	**47.098.000**	**47.095.500**	**2.500**	**99.99%**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Item	78.182	82.123	105,04%	**150.872.000**	**150.871.950**	**50**	**99.99%**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Item	6	6	100%	**10.000.000**	**7.090.000**	**2.910.000**	**70.90^**

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Item	34	28	82,35%	**344.076.500**	**343.917.110**	**159.390**	**99.95%**
5.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**579.334.372**	**560.428.548**	**18.905.824**	**96.73%**
	Pengadaan Mebel	Jumlah Item	1	1	100%	260.286.000	251.949.674	8.336.326	**96.79%**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Item	8	8	100%	152.082.000	142.716.211	9.365.789	**93.84%**
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Item	1	1	100%	10.000.000	9.166.663	833.337	**91.66%**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Item	1	1	100%	156.966.372	156.596.000	370.372	**99.76%**
6.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**447.770.000**	**413.853.448**	**33.916.552**	**92.42**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Item	12	12	100%	15.120.000	13.813.448	1.306.552	**91.35%**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Item	18	16	88,88	432.650.000	400.040.000	32.610.000	**92.46%**
7.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**123.357.000**	**106.463.500**	**16.893.500**	**86.30%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Item	2	2	100%	113.597.000	96.723.500	16.873.500	**85.14%**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Item	1	1	100%	9.760.000	9.740.000	20.000	**99.79%**
B.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**					**142.579.000**	**89.726.496**	**52.852.504**	**62.93%**
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					**90.904.000**	**89.726.496**	**52.852.504**	**62.93%**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					**90.904.000**	**89.726.496**	**1.177.504**	**98.70%**
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					**51.675.000**	**0**	**0**	**0%**
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Unit	2	0	0%	**51.675.000**	**0**	**0**	**0%**

C.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**					**379.556.000**	**375.982.500**	**3.573.500**	**99.05%**
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman					**80.000.000**	**77.236.500**	**2.763.500**	**96.54%**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan	32	28	87.50%	**80.000.000**	**77.236.500**	**2.763.500**	**96.54%**
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					**299.556.000**	**298.746.000**	**810.000**	**99.72%**
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah KK	3.000	84	2.80%	**299.556.000**	**298.746.000**	**810.000**	**99.72%**
D.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**					**31.614.133.381**	**31.143.876.394**	**470.256.987**	**98.51%**
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					**31.614.133.381**	**31.143.876.394**	**470.256.987**	**98.51%**
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		8.428	12.378	147%	**31.469.918.781**	**31.000.592.794**	**469.325.987**	**98.50%**
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Dokumen	15	2	13.33%	**144.214.600**	**143.283.600**	**931.000**	**99.35%**
E	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**					**22.790.900**	**20.118.700**	**2.672.200**	**88.27%**
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota					**22.790.900**	**20.118.700**	**2.672.200**	**88.27%**
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	2	2	100%	**22.790.900**	**20.118.700**	**2.672.200**	**88.27%**
					JUMLAH		**36.779.672.569**	**35.983.022.932**	**796.649.637**	**97,83%**

Realisasi anggaran untuk belanja langsung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun selama periode tahun 2022 adalah sebesar **Rp.35.983.022.932** atau persentase penyerapan dana sebesar **97,83%** dari anggaran senilai **Rp.36.779.672.569,-.**

Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun adalah sebesar **91,66%** dari 7 (tujuh) indikator Kinerja, dengan predikat capaian indikator sasaran tersebut adalah **Sangat Baik.**

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Karimun mengalokasikan Anggaran sebesar **Rp.34.636.296.164,- (Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah)**, kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dengan serapan anggaran sebesar **Rp.25.041.329.391,- (Dua Puluh Lima Miliar Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), kurang maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya tunda bayar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun senilai Rp.8.302.012.564,- (Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Juta Dua Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah),** alokasi anggaran dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Realisasi anggaran setiap program, kegiatan dan sub. kegiatan selama periode 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Rp 390.938.501**	**Rp 56.839.000**	**14,54**
	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	**Rp 299.982.207**	**Rp -**	**0,00**
	Rehabailitasi Rumah bagi korban bencana	Rp 99.998.168	Rp -	0,00
	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rp 99.998.573	Rp -	0,00
	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Rp 99.985.466	Rp -	0,00
	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Rp 90.956.294**	**Rp 56.839.000**	**62,49**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp 90.956.294	Rp 56.839.000	**62,49**
2	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Rp 1.781.900.391**	**Rp 1.557.431.296**	**87,40**
	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	**Rp 49.975.822**	**Rp 32.447.000**	**64,93**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Rp 49.975.822	Rp 32.447.000	**64,93**
	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 HEKTAR	**Rp 1.731.924.569**	**Rp 1.524.984.296**	**88,05**
	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Rp 1.731.924.569	Rp 1.524.984.296	**88,05**
3	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Rp 17.959.468.161**	**Rp 9.699.359.560**	**54,01**
	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	**Rp 17.959.468.161**	**Rp 9.699.359.560**	**54,01**
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp 17.829.255.553	Rp 9.594.469.910	53,81
	Verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang	Rp 130.212.608	Rp 104.889.650	80,55

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rp 14.503.989.111**	**Rp 13.727.699.535**	**94,65**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	**Rp 126.651.959**	**Rp 49.680.000**	**36,14**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 89.543.530	Rp 32.363.200	36,14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 37.108.429	Rp 17.316.800	46,67
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**Rp 3.321.847.094**	**Rp 2.999.345.526**	**90,29**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.228.895.094	Rp 2.931.856.326	90,80
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 92.952.000	Rp 67.489.200	72,61
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	**Rp 64.007.000**	**Rp 61.119.000**	**95,49**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 64.007.000	Rp 61.119.000	95,49
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**Rp 795.441.385**	**Rp 664.617.711**	**83,55**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 21.375.340	Rp 14.976.000	70,06
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 189.965.356	Rp 159.898.811	84,17
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 48.182.507	Rp 25.158.000	52,21
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 232.049.089	Rp 217.592.800	93,77
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 6.900.000	Rp 6.300.000	91,30
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 276.969.150	Rp 235.008.000	84,85
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 19.999.943	Rp 5.684.100	28,42

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Rp 202.834.469**	**Rp 142.811.000**	**70,41**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 47.346.000	Rp -	0,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 143.488.469	Rp 142.811.000	99,53
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 12.000.000	Rp -	0,00
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Rp 9.860.174.904**	**Rp 9.741.071.563**	**98,79**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp -	Rp -	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 9.404.324.904	Rp 9.291.856.563	98,80
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 455.850.000	Rp 449.215.000	98,54
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Rp 133.032.300**	**Rp 69.054.735**	**51,91**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 123.272.300	Rp 64.104.735	52,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 9.760.000	Rp 4.950.000	50,72

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indicator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023 ini, dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang mencakup tahap penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Oleh karena itu, pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023 mencakup 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) OPD yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.

   Dalam pengukuran kinerja kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023, perhitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) kegiatan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi "Semakin tinggi realisasi menunjuKKan pencapaian kinerja OPD yang semakin baik.

   Maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\textbf{\textit{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian}} = \frac{\textbf{\textit{Realisasi}}}{\textbf{\textit{Rencana}}} \textbf{ x 100}\%$$

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) OPD yang merupakan tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

   Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan, sedangkan untuk menghitung prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) sasaran dilakukan dengan memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi "Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian semakin membaik", maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\textbf{\textit{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian Sasaran}} = \frac{\textbf{\textit{Realisasi}}}{\textbf{\textit{Rencana}}} \textbf{ x 100}\%$$

Suatu lembaga dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun–tahun sebelumnya. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99, tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk membuat kesimpulan tentang hasil pengukuran digunakan skala pengukuran kinerja. Skala pengukuran dibuat berdasarkan pertimbangan masing – masing lembaga, antara lain dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1.

SKALA PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN OPD

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	86% s/d 100%	Sangat Baik
2.	70% s/d 85%	Baik
3.	55% s/d 69%	Sedang
4.	Kurang dari 55%	Kurang Baik

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karimun 2021-2026. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang

ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing- masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

   Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

   Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman	1.	Persentase Permukiman Yang Tertata	72%	91,66%	75%

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021 terlihat pada sasaran Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman pada indikator persentase rumah tidak layak huni yang tertangani dengan capaian 100%, indikator persentase kepala keluarga (KK) yang mendapat akses air minum dengan capaian 94,49%, indikator

persentase rumah tangga yang bersanitasi dengan capaian 200% dan indikator jumlah titik akses penghubung (jalan) dipermukiman dengan capaian 40,78%. Pada sasaran Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman dengan indikator jumlah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dengan capaian 100% dan indikator jumlah permasalahan tanah yang terfasilitasi dengan capaian 100%.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 terlihat pada sasaran Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman dengan indikator panjang jalan semenisasi yang dapat dilalui roda 4 didaerah permukiman dengan capaian 150.90%, indikator panjang drainase yang dibangun dengan capaian 99.97%, indikator jumlah titik lampu yang diadakan dengan capaian 187.97% dan indikator jumlah rumah ibadah yang dibangun dengan capaian 100%.

Pada sasaran Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman dengan indikator jumlah sengketa tanah yang dimediasi dengan capaian 100%. Pada sasaran meningkatnya kualitas kawasan permukiman dengan indikator luas kawasan permukiman yang tertata pada tahun 2022 tidak ada realisasi fisik, kegiatan berupa koordinasi pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh dengan target 32 laporan LPPD dengan realisasi sebanyak 28 laporan. Pada sasaran cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan indikator jumlah KK penerima bantuan (MBR) dengan capaian 2.8% sedangkan indikator Jumlah KK penerima bantuan (korban bencana) tidak ada realisasi fisik dikarenakan pada tahun 2022 Kabupaten Karimun tidak terindikasi adanya bencana.

Evaluasi Kinerja sasaran dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2021-2026, evaluasi kinerja tersebut juga digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan-perbaikan kinerja dimasa yang akan

datang.

Berikut dapat di sajikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dari tahun 2019 s.d tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.1
Hasil Evaluasi Capaian Laporan Kinerja Disperkim Kabupaten Karimun

NO.	ASPEK YANG DI EVALUASI	BOBOT	NILAI TAHUN 2019	NILAI TAHUN 2020	NILAI TAHUN 2021	NILAI TAHUN 2022
1.	Perencanaan Kinerja	40	30,21	34,38	30,21	18.09
2.	Pengukuran Kinerja	35	21,64	24,75	21,64	7.75
3.	Pelaporan Kinerja	25	11,32	11,32	11,32	6.53
Nilai Hasil Evaluasi		100	64,97	70,44	70	64,97
Predikat Penilaian			**Baik**	**BB**	**Baik**	**Cukup**

Dari hasil Evaluasi di atas di harapkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dapat lebih mengoptimalkan lagi tentang sistem pelaporan yang telah ditetapkan standar pelaporannya.

Pada tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis dan 9 (sembilan) Indikator Sasaran menunjang Misi ke 1 (satu) Pemerintah Kabupaten Karimun yang telah ditetapkan melalui dokumen perjanjian kinerja tahun 2023. Berikut adalah ringkasan capaian kinerja sasaran tahun 2023:

Tabel 3.4.2
Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman	1. Persentase Permukiman Yang Tertata	52,24%	75%	144%

Berdasarkan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Karimun yaitu meningkatnya akses infrastruktur masyarakat di kawasan permukiman selama tahun 2023 telah dilaksanakan program-program dengan indikator yang mendukung sasaran strategis yaitu program pengembangan perumahan dengan indikator Persentase Rumah Layak Huni Yang Dibangun Dikawasan Bencana tidak ada realisasi ditahun 2023 dikarenakan Kabupaten Karimun bukan merupakan daerah rawan bencana, pada Program Kawasan permukiman dengan indikator persentase kawasan kumuh ditarget 0.89 ha terealisasi 100%, pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator perentase rumah yang terfasilitasi PSU ditarget 2,57% terealisasi sebesar 100% dan pada program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator IKM terealisasi sebesar 100%, dari ke empat program penunjang sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun makan diperolehlah capaian sebesar 75% dari target sebesar 52.24% untuk indikator sasaran strategis yaitu persentase permukiman yang tertata.

3.5 ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Analisis Capaian Kinerja Sasaran menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu. Selanjutnya, dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat

kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023, menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dikukuhkan dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka gambaran hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023, dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatnya akses kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat yang merata dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman tersebut juga dilaksanakan dengan model pemberdayaan yang melibatkan masyarakat sejak perencanaan sampai pemeliharaan infrastruktur. Khusus Pembangunan kumuh akan diprioritaskan pada kawasan-kawasan permukiman kumuh di kawasan strategis kabupaten/kota dan kabupaten/kota yang akan ditangani secara terpadu sehingga dapat menjadi kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Rumah dengan lingkungan yang sehat merupakan kebutuhan pokok manusia. Sayangnya dengan harga tanah dan rumah yang terus meroket, masih banyak penduduk Indonesia yang belum memilikinya. Sementara itu, diberbagai wilayah penduduknya juga memiliki permasalahan tersendiri, yaitu hidup di lingkungan yang sanitasinya 8 tidak layak.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas agar dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

a. Sasaran : Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Sebagai hak dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi komitmen global sebagaimana dituangkan dalam Agenda Habitat (*The Habitat Agenda, Istanbul Declaration on Human Settlements*) dan *Millenium Development Goals* (MDGs). Untuk itu, Pemerintah bertanggungjawab untuk membantu masyarakat agar dapat bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungannya. Dengan memiliki tempat tinggal saja tidak cukup tetapi harus juga diimbangi dengan adanya sarana dan prasarana utilitas umum di permukiman seperti terbangunnya jalan, drainase, penerangan jalan umum dan rumah peribadatan di area permukiman.

Sejalan dengan sasaran strategis diatas, Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 telah menetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan perumahan di wilayah Kabupaten Karimun adalah **"*Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman*".** Maksud ditetapkan sasaran tersebut adalah untuk

mendukung rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah agar memiliki rumah yang aman dan terjangkau lewat proses perbaikan-perbaikan tertentu sehingga tersedianya prasarana dan sarana utilitas umum untuk menunjang fungsi hunian di area permukiman.

Untuk mewujudkan sasaran di atas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang merupakan tahun pertama Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 terkait sasaran Meningkatkan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum di Permukiman, dicapai melalui beberapa program yaitu :

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

- **KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA**

NO	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI YANG DIBANGUN DIKAWASAN BENCANA**	**0,05%**	**0%**	**0%**
	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	**JUMLAH RUMAH KORBAN BENCANA YANG DITANGANI**	**6 Unit Rumah**	**0**	**0**
	Rehabailitasi Rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi (unit rumah)	3 Unit Rumah	0	0
	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	luas lahan yang tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Ha)	1000 M2	0	0
	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota yang terbangun (unit rumah)	3 Unit Rumah	0	0
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**0%**
PREDIKAT KINERJA					**Kurang Baik**

- **CAPAIAN REALISASI KINERJA**

Pada Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sub. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Sub. Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana dan Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat masuk pada urusan wajib standar pelayanan minimal yang dibebankan langsung kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sebagai perangkat daerah pengampu. **Sub. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Sub. Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana dan Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana selama tahun 2023 tidak ada realisasi dikarenakan selama tahun 2023 tidak terjadi bencana skala kabupaten dan Kabupaten Karimun bukan termasuk daerah rawan bencana.**

Selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah mengalokasikan dana **senilai Rp.299.982.207,- untuk Sub. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Sub. Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana dan Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana dan tidak ada serapan anggaran dikarenakan selama tahun 2023 tidak ada realisasi dikarenakan selama tahun 2023 tidak terjadi bencana skala kabupaten dan Kabupaten Karimun bukan termasuk daerah rawan bencana,** hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

NO	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU	REALISASI
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI YANG DIBANGUN DIKAWASAN BENCANA**	**Rp 299.982.207**	**0%**
	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	**JUMLAH RUMAH KORBAN BENCANA YANG DITANGANI**	**Rp 299.982.207**	**0**
	Rehabailitasi Rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi (unit rumah)	Rp 99.998.168	0
	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	luas lahan yang tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Ha)	Rp 99.998.573	0
	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota yang terbangun (unit rumah)	Rp 99.985.466	0

- **KENDALA/HAMBATAN**

Pada Sub. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Sub. Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana dan Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana selama tahun 2023 seperti :

1. Sulitnya memperhitungkan risiko bencana dalam perencanaan, pemrograman, penganggaran, pembangunan infrastruktur dengan penekanan pada mitigasi dan adaptasi bencana agar resiko bencana mudah diantisipasi dikarenakan setiap wilayah atau daerah memiliki ancaman bencana yang berbeda-beda tergantung keberadaan wilayah tersebut terhadap parameter-parameter pembentuk bahaya, begitu juga dengan risiko yang dihasilkan oleh masing-masing ancaman juga berbeda-beda sehingga sulit menghitung risiko bencana dan tindakan antisipasinya.
2. Ketidakpastian akan terjadinya bencana dan ketidakakuratan tingkat kerusakan pasca bencana menyebabkan sulitnya melakukan pemantauan dan evaluasi terkait tindakan yang tepat (mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan realisasi) dikarenakan Tingkat kerusakan pasca bencana sulit diprediksi dikarenakan risiko bencana yang berbeda-beda setiap waktu dan kejadian.
3. Minimnya pagu yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun untuk menunjang masing-masing Sub. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Sub. Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana dan Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana sehingga berdampak pada kecilnya target pada masing-masing sub. kegiatan.

- **SOLUSI KEDEPAN**

Adapun solusi yang dapat diambil dalam mengakomodir hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Menguatkan riset terkait bencana potensial yang akan terjadi beserta dampak bencana, hal ini dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait mitigasi dan penanggulangan bencana;
2. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan tata ruang yang peta risiko bencana;

3. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana;
4. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan;
5. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.

- **KEGIATAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN**

NO	KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	**PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN**	**0**	**0**	**0**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	30 Laporan	25 Laporan	83%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**83%**
PREDIKAT KINERJA					**Baik**

- **CAPAIAN REALISASI KINERJA**

Pada Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan tahun 2023 dengan indikator jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan (laporan) dan target sebanyak 30 laporan terealisasi sebanyak 25 laporan sebagaimana yang tercantum dalam tabel dibawah ini.

NO	KEPERLUAN PERJALANAN DINAS	TUJUAN
1	Dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di lingkungan Balai Pelaksanan Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023 di Beverly Hotel Batam, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 14 s.d 15 Maret 2023	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kepulauan Riau
2	Dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Awal Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun Anggaran 2023 di Comforta Hotel Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau pada Tanggal 15 s.d 16 Maret 2023	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kepulauan Riau
3	Dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Pusat Daerah Tahun 2023 Tahap I di Asialink Hotel Batam, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau selama 3 hari pada tanggal 03 s.d 05 April 2023.	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kepulauan Riau

4	Dalam rangka menghadiri unddangan rapat no UM 0102-RU/254 Perihal Koordinasi Keterrpaduan Penyelenggaranaan Perumahan Wilayah Sumatra dan Kalimantan, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perrumahan padda tanggal 22 s.d 23 Juni 2023 di Four Points by Sheraton Batam	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kepulauan Riau
5	Dalam rangka menghadiri undangan rapat NO. UM 0102-CB5/265 Perihal Rekonsilasi dan Sosialisasi Rumah Negara, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, pada tanggal 02 s.d 04 oktober 2023 di Hotel Ck kota Tanjung PInang Provinsi Kepulauan Riau	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kepulauan Riau
6	Dalam rangka sosialisasi kepada penerima manfaat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang telah terverifikasi oleh tim Fasilitator Lapangan, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, pada tanggal 28 Februari 2023 di Kecamatan Buru	Kantor Camat Buru
7	Dalam rangka sosialisasi kepada penerima manfaat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang telah terverifikasi oleh tim Fasilitator Lapangan, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, pada tanggal 01 Maret 2023 di Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat	Kundur
8	Dalam rangka sosialisasi kepada penerima manfaat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang telah terverifikasi oleh tim Fasilitator Lapangan, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, pada tanggal 03 Maret 2023 di Desa Pongkar Kecamatan Tebing	Pongkar
9	Dalam rangka menghadiri undangan pertemuan I kegiatan pengembangan infrastruktu ekonomi wilayah (PISEW) tahun 2023 di desa Sungai Sebesi dan Desa Sungai Ungar, pada tanggal 24 Mart 2023 di ruang rapat kantor Camat Kundur	Sungai Ungar
10	Dalam rangka survei lokasi rehab rumah tidak layak huni Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukimnan Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha pada tanggal 25 Mei 2023 di Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat	Darusallam
11	Dalam rangka survei lokasi rehab rumah tidak layak huni Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukimnan Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha pada tanggal 13 April 2023 di Desa Parit Kecamatan Selat Gelam	Parit
12	Dalam rangka survei lokasi rehab rumah tidak layak huni Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukimnan Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha pada tanggal 13 April 2023 di Desa Selat Mendaun Kecamatan Selat Gelam	Selat mendaun
13	Monitoring Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan pada tanggal 29 Mei 2023 di Desa Pongkar Kecamatan Tebing	Pongkar

14	Dalam rangka Survei Lanjutan Lokasi Rumah penerima bantuan RTLH Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukimnan Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha di Desa Selat Mendaun Kecamatan Selat Gelam pada selama 1 (satu) hari pada tangal 15 Mei 2023	Selat mendaun
15	Dalam rangka Survei Lanjutan Lokasi Rumah penerima bantuan RTLH Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukimnan Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha di Desa Parit Kecamatan Selat Gelam pada selama 1 (satu) hari pada tangal 15 Mei 2023	Parit
16	Dalam rangka Kunjungan kerja ketua komisi III DPRD Kabupaten Karimun di Desa Selat Mendaun Kecamatan Selat Gelam, maka di pandang perlu untuk mendampingi pada kegiatan dimaksud yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perrumahan pada APBD TA 2023, selama 1 hari pada tanggal 12 Juli 2023	Selat Mendaun
17	Dalam rangka monitoring lokasi Rumah Penerima manfaat bantuan RTLH kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan di desa parit keccamatan selat glam selama 1 hari pada tanggal 08 Agustus 2023.	Parit
18	Dalam rangka monitoring lokasi Rumah Penerima manfaat bantuan RTLH kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan di desa selat mendaun kecamatan selat glam selama 1 hari pada tanggal 08 Agustus 2023.	Selat Mendaun
19	Dalam rangka monitoring akhir pekerjaan pembangunan rumah bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pad tanggal 1 september 2023 di kelurahan buru dan kelurahan lubuk puding kecamatan buru	Lubuk Puding
20	Dalam rangka monitoring akhir pekerjaan pembangunan rumah bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pad tanggal 4 september 2023 di kecamatan Kundur barat	Kundur Barat
21	Dalam rangka monitoring akhir pekerjaan pembangunan rumah bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pad tanggal 1 september 2023 di desa tanjung hutan dan desa tanjung batu kecil kecamatan buru	Tanjung Hutan dan Tanjung Batu Kecil
22	Dalam rangka survey lokasi pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengenddalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pada tanggal 11 oktober 2023 di kecamatan kundur	Kundur

23	Dalam rangka survey lokasi pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengenddalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pada tanggal 11 oktober 2023 di kecamatan kundur uatara 2023	Kundur Utara
24	Dalam rangka monitoring akhir pekerjaan pembangunan rumah bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pad tanggal 31 agustus 2023 di kelurahan darusalam kecamatan meral barat	Darussalam
25	Dalam rangka monitoring akhir pekerjaan pembangunan rumah bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pad tanggal 31 agustus 2023 di Pongkar Kecamatan Tebing	Pongkar

Selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah mengalokasikan dana **senilai Rp.90.956.294,-untuk Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.56.839.000** atau **62,49%** persentase serapan anggaran dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Rp 90.956.294**	**Rp 56.839.000**	**62,49**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp 90.956.294	Rp 56.839.000	**62,49**

- **KENDALA/HAMBATAN**

Dalam pelaksanaan realisasi Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan selama tahun 2023 terdapat kendala dan hambatan seperti :

1. Keterbatasan anggaran pelaksanaan Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yaitu senilai Rp. 90.956.294,- yang lebih kecil dari angka yang ditetapkan pada perencanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yaitu sebesar Rp.300.000.000,- yang berdampak pada tidak maksimalnya capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan.
2. Dalam pelaksanaan program kegiatan urusan perumahan yang kompleks melibatkan dan berkoordinasi dengan banyak pihak mulai dari instansi vertikal maupun instansi horizontal seperti dinas teknis yang

bertanggungjawab terhadap kegiatan, upaya koordinasi antar pemangku kepentingan bidang perumahan sangat penting guna memformulasikan kebijakan yang tepat. Kendala yang sering muncul di lapangan adalah kurangnya sinkronisasi program dan kegiatan bidang perumahan dimiliki oleh tiap organisasi perangkat daerah dan instansi terkait.

- **SOLUSI KEDEPAN**

Adapun solusi yang dapat diambil dalam mengakomodir hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait koordinasi dan sinkronisasi adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan yang matang

   Sebelum melakukan koordinasi perlu untuk membuat sebuah perencanaan atas pelaksanaan koordinasi yang akan dilakukan. Perencanaan ini dapat meliputi waktu, agenda, dan siapa atau pihak mana saja yang akan terlibat.
2. Pentingnya menyamakan persepsi

   Setiap pihak yang terlibat dalam koordinasi haruslah memiliki kesamaan persepsi mengenai tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, walaupun setiap instansi pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, setiap pihak menyadari bahwa semua itu adalah dalam rangka saling melengkapi dan mendukung untuk mencapai tujuan yang sama.
3. Membangun komunikasi informal

   Untuk meningkatkan efektivitas hasil koordinasi yang dilakukan, selain dilakukan monitoring dan evaluasi dalam rapat formal instansi pemerintah juga mulai membangun komunikasi informal, Membangun komunikasi informal antar pemangku kebijakan dapat menjalin kerjasama yang baik dan kontinyu.

2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

- **KEGIATAN KOORDINASI & SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN & PERMUKIMAN KUMUH**

NO.	KEGIATAN & SUB. KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	**PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN**	Jumlah Rekomendasi	**10**	**0**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Laporan	4	8

- **CAPAIAN REALISASI KINERJA**

Pada Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman, **Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh dengan indikator jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh (laporan) sebanyak target 4 (empat) laporan selama periode tahun 2023 terealisasi sebanyak 8 (delapan) laporan.** Sedangkan pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman dengan indikator kinerja jumlah rekomendasi yang diterbitkan tidak ada realisasi dikarenakan selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tidak ada menerbitkan rekomendasi terkait izin bidang perumahan, pelaksanaan kegiatan lebih pada koordinasi dan sinkronisasi terkait pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh pada instansi vertikal dan instansi-instansi terkait dalam pelaksanaan program kegiatan ini.

Selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah mengalokasikan dana **senilai Rp. 49.975.822,-** untuk pelaksanaan Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan dengan realisasi anggaran senilai **Rp.32.447.000,-** atau sebesar **64,93%** persentase capaian realisasi anggaran. Permukiman dan Permukiman Kumuh hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	**PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**Rp 49.975.822**	**Rp 32.447.000**	**64,93**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Rp 49.975.822	Rp 32.447.000	**64,93**

- **KENDALA/HAMBATAN**

Pada Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan terdapat kendala yaitu dalam pelaksanaan program kegiatan urusan perumahan dan permukiman yang kompleks melibatkan dan berkoordinasi dengan banyak pihak mulai dari instansi vertikal maupun instansi horizontal seperti dinas teknis yang bertanggungjawab terhadap kegiatan, upaya koordinasi antar pemangku kepentingan bidang perumahan sangat penting guna memformulasikan kebijakan yang tepat. Kendala yang sering muncul di lapangan adalah kurangnya sinkronisasi program dan kegiatan bidang perumahan dan permukiman dimiliki oleh tiap organisasi perangkat daerah dan instansi terkait.

- **SOLUSI KEDEPAN**

Adapun solusi yang dapat diambil dalam mengakomodir hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait koordinasi dan sinkronisasi adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan yang matang

   Sebelum melakukan koordinasi perlu untuk membuat sebuah perencanaan atas pelaksanaan koordinasi yang akan dilakukan. Perencanaan ini dapat meliputi waktu, agenda, dan siapa atau pihak mana saja yang akan terlibat.
2. Pentingnya menyamakan persepsi

   Setiap pihak yang terlibat dalam koordinasi haruslah memiliki kesamaan persepsi mengenai tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, walaupun setiap instansi pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, setiap pihak menyadari bahwa semua itu adalah dalam rangka saling melengkapi dan mendukung untuk mencapai tujuan yang sama.
3. Membangun komunikasi informal

Untuk meningkatkan efektivitas hasil koordinasi yang dilakukan, selain dilakukan monitoring dan evaluasi dalam rapat formal instansi pemerintah juga mulai membangun komunikasi informal, Membangun komunikasi informal antar pemangku kebijakan dapat menjalin kerjasama yang baik dan kontinyu.

- **PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 (SEPULUH) HEKTAR**

NO.	KEGIATAN & SUB. KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	**PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 HEKTAR**	Ha	**0.24%**	**0.5%**
	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Ha	0.13%	0.13%

- **CAPAIAN REALISASI KINERJA**

Pada Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 Hektar, luasan kawasan kumuh sendiri tertera pada **Keputusan Bupati Karimun Nomor : 616 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Dikabupaten Karimun**, Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan indikator luas kawasan kumuh yang diremajakan/dipugar (ha) terealisasikan 100% yaitu sebesar **0.1286%** atau **0,13%** dari target **0.1286%** atau **0,13%** capaian realisasi sebesar 0,1286% didapat dari **total panjang jalan semenisasi yaitu sepanjang 1285,8 m2 (dibagi) dengan 10.000 m2 (konversi dari hektare ke meter)**. **Capaian realisasi pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 Hektar dengan indikator "luas Kawasan kumuh yang ditingkatan (ha)" memiliki target sebesar 0,24% sesuai dengan target pada PK eselon 3 Bidang Kawasan Permukiman dengan realisasi sebesar 0,5%.** hal ini dapat dilihat pada tabel realisasi dibawah ini,

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	M2
1	Pekerjaan Semenisasi Belakang Pasar Teluk Uma RT 02 RW 01 Kec, Tebing	TEBING	78
2	Pekerjaan Semenisasi Gang manan Umar RT 03 RW 03 Kel Tebing Kec. Tebing	TEBING	118
3	Pekerjaan Semenisasi Gang Nati Sungai Ayam RT 03 RW 03 Kel Kapling Kec. Tebing	TEBING	162,8
4	Pekerjaan Semenisasi Jl. Kampung Lembah Harapan RT 03 RW 05 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun	KARIMUN	173
5	Pekerjaan Semenisasi Jl. Paya Manggis Gang Suryati RT 06 RW 01 Kel. Baran Kec. Meral	MERAL	78
6	Pekerjaan Semenisasi Jalan RT 001 RW 005 Sungai Lakam Timur Kec. Karimun	KARIMUN	144
7	Pekerjaan Semenisasi Kampung KB RT 01 RW 02 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing	TEBING	192
8	Pekerjaan Semenisasi Perkuburan RT 03 RW 03 Kel. Tebing Kec. Tebing	Tebing	152
9	Pekerjaan Semenisasi RT 04 RW 03 Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun	KARIMUN	100
10	Pekerjaan Semenisasi RT 07 RW 02 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun	KARIMUN	88
TOTAL			**1285,8**

Gambar 3.1
Pekerjaan Semenisasi Perkuburan RT.03 RW.03 Kel. Tebing Kec. Tebing

Selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah mengalokasikan dana senilai **Rp. 1.731.924.569,-**untuk Sub. Kegiatan Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.1.524.984.296** atau **88,05%** persentase serapan anggaran dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	**PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 HEKTAR**	**Rp 1.731.924.569**	**Rp 1.524.984.296**	**88,05**
	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Rp 1.731.924.569	Rp 1.524.984.296	**88,05**

● **KENDALA/HAMBATAN**

Dalam pelaksanaan realisasi Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh selama tahun 2023 terdapat kendala dan hambatan seperti :

1. Belum adanya Dokumen Program Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) dan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai road map dan panduan dalam pencegahan dan penanganan kawasan kumuh;
2. Status lahan di permukiman warga khususnya kawasan kumuh belum sepenuhnya memiliki sertifikat kepemilikan tanah yang sah dari instansi berwenang dan status kepemilikan tanahnya masih tumpang tindih.

● **SOLUSI KEDEPAN**

Adapun solusi yang dapat diambil dalam mengakomodir hambatan dan kendala dalam pelaksanaan sub. kegiatan sub. kegiatan pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

1. Dengan memulai perencanaan penyusunan dokumen RP2KPKPK dan RP3KP dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi pada instansi-intansi terkait yang terlebih dahulu memiliki dokumen perencanaan tersebut. Koordinasi dan sinkronisasi dapat dilakukan dengan mengundang perwakilan instansi terkait dan pihak yang terkait dengan penuntasan kawasan kumuh khususnya di Kabupaten Karimun untuk melakukan asistensi dalam penyusunan dokumen RP2KPKPK dan RP3KP.
2. Terselesaikannya status lahan masyarakat yang menghambat dalam proses penanganan kawasan kumuh sehingga peningkatan dan percepatan infrastruktur seperti akses jalan semenisasi, penerangan jalan umum dan peningkatan sarana, prasarana dan utilitas di kawasan kumuh dapat dilakukan. Setidaknya ada 4 (empat) cara yang dapat dilakukan dalam menangani kepemilikan tanah yang tumpang tindih yaitu :
   - Mengecek keabsahan sertifikat berdasarkan kepemilikan;

- Menyelesaikan sengketa melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Mengajukan upaya administratif;
- Mengajukan upaya hukum melalui pengadilan.

Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023 pada Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 Hektar, Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh juga terdapat kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD), untuk kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-117 fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dalam memberikan pendampingan kepada Kodim 0317/TBK untuk pembangunan rehabilitasi RTLH Kelurahan Lubuk Puding dan Kelurahan Buru, Kecamatan Buru Kabupaten Karimun. Realisasi kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

REKAP REALISASI BANTUAN STIMULTAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2023

TAHUN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	SK	TEREALSISASI	NILAI BANTUAN	KETERANGAN
2023	DARUSALLAM	PARIT BENUT	1	1	Rp 20,000,000	Terlaksana
	SELAT GELAM	SELAT MENDAUN	4	4	Rp 80,000,000	Terlaksana
	KUNDUR	SUNGAI UNGAR UTARA	1	1	Rp 20,000,000	Terlaksana
	KUNDUR UTARA	TANJUNG BERLIAN KOTA	1	1	Rp 20,000,000	Terlaksana
		TANJUNG BERLIAN BARAT	7	7	Rp 140,000,000	Terlaksana
		PARIT	5	5	Rp 100,000,000	Terlaksana
JUMLAH			19	19	**Rp 380,000,000**	

Realisasi Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya (BSPS) RTLH tahun 2023 dengan capaian **100%** dengan target sebanyak **19 unit rumah** dan terealisasi sebanyak **19 unit rumah** dengan nilai bantuan sebesar **Rp.380.000.000,-** yang menyebar pada Kecamatan Darussalam, Selat Gelam, Kundur dan Kundur Utara.

Gambar 4.1
Ilustrasi kegiatan Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya RTLH

REKAP REALISASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TMMD

TAHUN 2023

TAHUN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	SK	TEREALSISASI	NILAI BANTUAN	KETERANGAN
2023	BURU	LUBUK PUDING	2	2	Rp 68,720,000	Terlaksana 100%
		BURU	2	2	Rp 68,720,000	Terlaksana 100%
JUMLAH			4	4	Rp 137,440,000	

Realisasi Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) RTLH tahun 2023 yaitu dengan capaian **100%**, dengan target **4 unit rumah** dan terealisasi **4 unit rumah**, dengan nilai bantuan sebesar **Rp.137.440.000,-** titik realisasi hanya pada Kecamatan Buru.

Gambar 5.1
Ilustrasi kegiatan TMMD RTLH Kabupaten Karimun

3. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	**URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN**			
	Verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang	Dokumen	15	15

- **CAPAIAN REALISASI KINERJA**

Pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Sub. Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman Dari Pengembang dengan indikator Jumlah Dokumen kerja sama pemyediaan /pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen) selama tahun 2023 **terealisasi sebesar 100% yaitu sebanyak 15 dokumen dari target 15 dokumen.**

Dari target penyerahan PSU sebanyak 15 (lima belas) perumahan, terdapat 23 (dua puluh tiga) perumahan dari 7 (tujuh) Pengembang Perumahan yang melakukan permohonan penyerahan PSU dan 15 (lima belas) perumahan yang lulus verifikasi, yaitu sebagai berikut :

NO.	PENGEMBANG	NAMA PERUMAHAN		BAST & NPHD
1.	PT. Karimun Indah Sehati	1.	Bukit Griya Residence	BAST NO : 17/BASTH/DISPERKIM/IX/2023 NPHD NO : 01/NPHD/DISPERKIM/IX/2023
2.	PT. Limat Bahagia Bersama	2.	Dang Merdu Indah I	NOMOR : 4456/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 Nomor : 08/NPHD/DISPERKIM/XII/2023
		3.	Dang Merdu Indah	NOMOR : 4457/BASTH/DISPERKIM/XII/2023

			2	Nomor : 09/NPHD/DISPERKIM/XII/2023
		4.	Dang Merdu Indah 4	NOMOR : 4463/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 NOMOR : 15/NPHD/DISPERKIM/XII/2023
		5.	Harjosari Indah	NOMOR : 4460/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 Nomor : 12/NPHD/DISPERKIM/XII/2023
		6.	Bukit Carok Indah 2	NOMOR : 4459/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 Nomor : 11/NPHD/DISPERKIM/XII/2023
		7.	Pandan Wangi Indah I	NOMOR : 4458/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 Nomor : 10/NPHD/DISPERKIM/XII/2023
3.	PT. Karimun Graha Mandiri	8.	Perumahan Bukit Carok Indah	NOMOR : 4461/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 Nomor : 13/NPHD/DISPERKIM/XII/2023
4.	PT. Mega Sedayu Estate	9.	Gladiola 3	BAST NO : 19/BASTH/DISPERKIM/IX/2023 NPHD NO : 03/NPHD/DISPERKIM/IX/2023
5.	PT. Sinar Suman Pryanto	10.	Bukit Cincin Asri	BAST NO : 18/BASTH/DISPERKIM/IX/2023 NPHD NO : 02/NPHD/DISPERKIM/IX/2023
		11.	Green Land 1	NOMOR : 3921/BASTH/DISPERKIM/XI/2023 Nomor : 05/NPHD/DISPERKIM/XI/2023
		12.	Green Land 2	NOMOR : 3922/BASTH/DISPERKIM/XI/2023 Nomor : 06/NPHD/DISPERKIM/XI/2023
		13.	Green Land 3	NOMOR : 3923/BASTH/DISPERKIM/XI/2023 Nomor : 07/NPHD/DISPERKIM/XI/2023
6.	PT. Cipta Alam Property	14.	Harapan Baru 1	NOMOR : 20/BASTH/DISPERKIM/XI/2023 NOMOR : 04/NPHD/DISPERKIM/XI/2023
		15.	Poros Residence	NOMOR : 4462/BASTH/DISPERKIM/XII/2023 NOMOR : 14/NPHD/DISPERKIM/XII/2023

Gambar 6.1
Pemantauan Lokasi Sub. Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang

Selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah mengalokasikan dana **senilai Rp.130.212.608,- untuk Sub. Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman Dari Pengembang dengan serapan anggaran senilai Rp.104.889.650,- atau sebesar 80,55%,** hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	**URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN**			
	Verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang	Rp 130.212.608	Rp 104.889.650	80,55

- **KENDALA/HAMBATAN**

Pada Sub. Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman Dari Pengembang selama tahun 2023 terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatannya seperti :

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) teknis;
2. Sertifikat pengembangan perumahan belum sepenuhnya dilakukan pemisahan bidang, sehingga perlu dilakukan proses pemisahan hak terlebih dahulu yang mana perlu memerlukan waktu pelaksanaan yang lama;

3. Adanya sertifikat yang masih dalam hak tanggungan, ketika proses penyerahan PSU perumahan tanahnya masih dalam hak tanggungan di bank;
4. Site plan tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga pengembang perlu melakukan penyesuaian site plan sebelum penyerahan;
5. Adanya persyaratan terhadap PSU yaitu penerangan jalan umum yang harus memenuhi standar pemerintah., maka kebijakan yang dapat diberikan adalah dengan meminta kepada pengembang untuk melakukan penggantian PSU yang sesuai standar pemerintah;
6. Adanya pengembang perumahan yang kurang kooperatif;

- **SOLUSI KEDEPAN**

Adapun solusi yang dapat diambil dalam mengakomodir hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Pra Verifikasi sebelum Pengembang sebelum pengembang memasukan berkas permohonan penyerahan PSU;
2. Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten;
3. Pendampingan hukum atau legal assesment ke kejaksaan negeri karna terdapat beberapa pengembang yang masih enggan melakukan penyerahan PSU.

- **KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN**

Berdasarkan perjanjian kinerja (PK) Eselon III Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023 untuk Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian sebagaimana dirincikan pada tabel dibawah ini,

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Prasarana dan Prasarana Utilitas Umum di Permukiman bertambah	1.	Panjang jalan semenisasi yang dapat dilalui roda 4 didaerah permukiman	4.606 M
		2.	Panjang drainase yang dibangun	130 M
		3.	Jumlah titik lampu yang diadakan	130 Titik
		4.	Jumlah rumah ibadah yang direhab dan dibangun	5 Unit
		5.	Jumlah pagar kuburan yang dibangun	1 Unit
		6.	Panjang penataan saluran yang dikerjakan	1000 M

Berdasarkan perjanjian kinerja (PK) Eselon III Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023 untuk Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian telah direalisasikan sebagai berikut :

1. Panjang jalan semenisasi yang dapat dilalui roda 4 didaerah permukiman dengan target **4.606** meter persegi terealisasi sepanjang **10.919,35** meter persegi dengan persentase sebesar **237%** dan dapat dilihat pada rincian dibawah ini,

NO.	LOKASI	KEC.	M2
1	SEMENISASI KOMPLEK GRIYA PRAJA KARIMUN RW.06 KECAMATAN TEBING	Tebing	111
2	SEMENESASI RT 02 RW 04 GANG TAUFIQ KELURAHAN PARIT BENUT KECAMATAN MERAL	Meral	54,6
3	SEMENISASI BUKIT CENTAI RW. 03 KELURAHAN SUNGAI RAYA KEC. MERAL	Meral	97,6
4	SEMENISASI DAN BOX CULVERT JL PAYA RENGAS KEL. PARIT BENUT KEC. MERAL	Meral	148,7
5	SEMENISASI DAN DRAINESE JALAN RW.05 KELURAHAN SUNGAI LAKAM TIMUR KECAMATAN KARIMUN	Karimun	72,3
6	SEMENISASI DAN PEMASANGAN GORONG-GORONG RT.02 RW.03 PARIT LAPIS KELURAHAN PARIT BENUT KECAMATAN MERAL	Meral	97,5
7	SEMENISASI DAN PEMASANGAN GORONG-GORONG RT.04 RW.04 KELURAHAN SUNGAI RAYA KECAMATAN MERAL	Meral	115,5

8	SEMENISASI DI RT. 03 RW. 02 TELUK UMA KELURAHAN TELUK UMA KEC.TEBING	Tebing	160
9	SEMENISASI GANG ADENIUM RT.01 RW.07 WONOSARI KEL. BARAN BARAT KEC.MERAL	Meral	110
10	SEMENISASI GANG BUNTU SEMEMAL KEL. PASIR PANJANG KEC. MERAL BARAT	Meral Barat	195,2
11	SEMENISASI GANG ERIS RW.01 PAYA SUNAN KEL. DARUSSALAM KEC. MERAL BARAT	Meral Barat	153,5
12	SEMENISASI GANG H. YUSUF BASO SUNGAI RAYA KECIL RW 01 KEL. SUNGAI RAYAKEC. MERAL	Meral	129
13	SEMENISASI GANG KASAN RT.02 RW.03 PARIT LAPIS KECAMATAN MERAL	Meral	143,1
14	SEMENISASI GANG LAYANG-LAYANG RT.03 RW.03 BANGUN SARI KELURAHAN HARJOSARI KECAMATAN TEBING	Tebing	90,8
15	SEMENISASI GANG LORENG GUNTUNG PUNAK RT 01 RW 03 KEL. DARUSSALAMKEC. MERAL BARAT	Meral Barat	77,5
16	SEMENISASI GANG MANGGA RT.01 RW.03 BANGUN SARI KEL. HARJOSARI KEC.TEBING	Tebing	159,9
17	SEMENISASI GANG PAUD RT. 02 RW. 03 SUNGAI AYAM KEL. KAPLING KEC. TEBING	Tebing	182,5
18	SEMENISASI GANG RT.02/RW.04 KEL. SEI PASIR KEC. MERAL	Meral	96,7
19	SEMENISASI GANG RT.03/RW.05 KEL. SEI PASIR KEC. MERAL	Meral	76
20	SEMENISASI GANG SUKAMAJU RT.01 RW.03 BATI	Tebing	83
21	SEMENISASI GANG SURAU RT.05 RW.02 DESA PONGKAR	Tebing	210
22	SEMENISASI GG. AL HIDAYAH RT 02 RW 04 KEL. HARJOSARI KEC. TEBING	Tebing	68,5
23	SEMENISASI GG. MELUR RT. 04 RW. 04 TAMAN MUTIARA KARIMUN KEL. SUNGAI RAYA KEC. MERAL	Meral	0
24	SEMENISASI GG. SUKA MAJU IV RT.003 RW.003 KEL. SUNGAI PASIR KEC. MERAL	Meral	184,3
25	SEMENISASI JALAN DAN DRAINASE RT.005 RW.006 KELURAHAN MERAL KOTA KECAMATAN MERAL	Meral	66,2
26	SEMENISASI JALAN KAMPUNG PAYA PANJANG RT 001 RW 005 KEL. MORO TIMUR KEC. MORO KAB. KARIMUN	Karimun	85
27	SEMENISASI JALAN KAMPUNG SERLANG KEC. MERAL BARAT	Meral Barat	111,5
28	SEMENISASI JALAN KUBURAN PARIT GANTUNG DUSUN 2 DESA SUNGAI UNGAR KECAMATAN KUNDUR	Kundur	106,3
29	SEMENISASI JALAN PAYA MANGGIS RT 03 RW 01 KEL. BARAN TIMUR KEC. MERAL	Meral	89
30	SEMENISASI JALAN PAYA SUNAN RT 03 RW 01 KEL. DARUSSALAM KEC. MERALBARAT	Meral Barat	157
31	SEMENISASI JALAN PESANTREN DARUL QURAN BATI INDAH RT.03 RW.03 KEL.PAMAK KEC. TEBING	Tebing	128,1
32	SEMENISASI JALAN RT. 001 RW. 003 KEL. SUNGAI LAKAM TIMUR KEC. KARIMUN	Karimun	68
33	SEMENISASI JALAN RT.004 RW. 002 KELURAHAN SUNGAI PASIR KECAMATAN MERAL	Meral	82,1
34	SEMENISASI JALAN RT.01 RW.01 KELURAHAN HARJOSARI KECAMATAN TEBING	Tebing	86
35	SEMENISASI JALAN RT.01 RW,02 KELURAHAN BARAN TIMUR KECAMATAN MERAL	Meral	36,5
36	SEMENISASI JALAN RT. 01 RW. 03 KP. AMBAT JAYA DESA PANGKE BARAT KEC.MERAL BARAT	Meral Barat	87,65

37	SEMENISASI JALAN RT.01 RW.04 BATU LIPAI KEL. BARAN TIMUR KEC. MERAL	Meral	265,9
38	SEMENISASI JALAN RT. 02 RW. 01 SEMEMAL KEL. PASIR PANJANG KEC. MERALBARAT	Meral Barat	156
39	SEMENISASI JALAN RT 02 RW 02 PAYA RENGAS KEL. PARIT BENUT KEC. MERAL	Meral	127,2
40	SEMENISASI JALAN RT.03 RW.02 SUNGAI LAKAM TIMUR KECAMATAN KARIMUN	Karimun	160,4
41	SEMENISASI JALAN RT.03 RW.03 KP. BUKIT KEL. MERAL KOTA KEC. MERAL	Meral	135
42	SEMENISASI JALAN RT. 03 RW. 04 KAMPUNG BANJAR KEL. PARIT BENUT KEC.MERAL	Meral	68
43	SEMENISASI JALAN RT 03 RW 05 SUNGAI LAKAM TIMUR KEC. KARIMUN	Karimun	132
44	SEMENISASI JALAN RT.04 RW.01 KELURAHAN DARUSSALAM KECAMATAN MERALBARAT	Meral Barat	88,2
45	SEMENISASI JALAN RT 04 RW 02 PAYA RENGAS KEL. PARIT BENUT KEC. MERAL	Meral	151,4
46	SEMENISASI JALAN RW.03 KEL. PAMAK KEC. TEBING	Tebing	94,8
47	SEMENISASI JALAN RW 05 BUKIT TEMBAK KEL. SUNGAI PASIR KEC. MERAL	Meral	156,3
48	SEMENISASI JALAN RW.05 KEL. SUNGAI LAKAM TIMUR KECAMATAN KARIMUN	Karimun	73,7
49	SEMENISASI JALAN SAMPING MASJID AL-FURQON KEL. TEBING KEC. TEBING	Tebing	138,6
50	SEMENISASI JALAN WONOSARI RT.01 RW.07 GANG BONAD 1 KEL. BARAN BARATKEC. MERAL	Meral	76,6
51	SEMENISASI JL. CENDIKIA RT.002 RW.001 KP. HARAPAN KEL. HARJOSARI KEC.TEBING	Tebing	54
52	SEMENISASI JL. IVORA JAYA RT.01 RW.02 KEL. SUNGAI RAYA KEC. MERAL	Meral	195,3
53	SEMENISASI JL KP HARAPAN GG PELANGI JEPARA RT.01/RW.02 KEL. HARJOSARI KEC. TEBING	Tebing	123,5
54	SEMENISASI JLN. RAJA OESMAN RT.04 RW.01 GANG INDO BALI KEC. MERAL	Meral	75,5
55	SEMENISASI JL.PANTAI PAK IMAM RT.02.RW.01 KEL. BARAN BARAT KEC. MERAL	Meral	65
56	SEMENISASI JL.PERMUKIMAN RT.02 RW.02 KP.HARAPAN KEC. TEBING	Tebing	217,5
57	SEMENISASI JL. TELAGA BARU RT.04 RW.05 KEL. SUNGAI LAKAM TIMUR KEC.KARIMUN	Karimun	73
58	SEMENISASI KP. LEMBAH HARAPAN RT.02 RW.05 KEL. SUNGAI LAKAM TIMUR KEC.KARIMUN	Karimun	77,7
59	SEMENISASI PERKUBURAN CINA DI DAERAH BINA BANGSA KEC. MERAL	Meral	159,5
60	SEMENISASI PERUMAHAN PURI GRANITE INDAH GANG INDRA RT. 01 RW. 04 KEL.DARUSSALAM KEC. MERAL BARAT	Meral Barat	85,7
61	SEMENISASI RT.001 RW.003 KELURAHAN LUBUK PUDING KECAMATAN BURU	Buru	152,3
62	SEMENISASI RT. 001 RW.004 BUKIT SIDOMULYO 2 KEL. TG BALAI KEC. KARIMUN	Karimun	133,7
63	SEMENISASI RT. 002 RW. 07 WONOSARI KEL. BARAN BARAT KEC. MERAL	Meral	124,8
64	SEMENISASI RT.004 RW.001 KELURAHAN LUBUK SEMUT KECAMATAN KARIMUN	Karimun	234,6
65	SEMENISASI RT. 01 RW. 03 KEL. PAMAK KEC. TEBING	Tebing	126

66	SEMENISASI RT. 01 RW. 04 KAMPUNG SUKA DAMAI DESA PANGKE KEC. MERAL BARAT	Meral Barat	116,5
67	SEMENISASI RT. 01 RW. 05 SEPADINA KEL. TELUK UMA KEC. TEBING	Tebing	143,5
68	SEMENISASI RT. 01 RW.05 SEPEDAS LAUT KEL. PASIR PANJANG KEC. MERAL BARAT	Meral Barat	113,8
69	SEMENISASI RT.02 RW.01 JELUTUNG KEL. DARUSSALAM KEC. MERAL BARAT	Meral Barat	155,4
70	SEMENISASI RT. 02 RW. 01 KEL. BARAN BARAT KEC. MERAL	Meral	
71	SEMENISASI RT. 02 RW. 04 KEL. PARIT BENUT KEC. MERAL	Meral	48,6
72	SEMENISASI RT. 03 RW. 02 KEL. BARAN TIMUR KEC. MERAL	Meral	50
73	SEMENISASI RT. 03 RW. 04 KAMPUNG SUKA JAYA KEL. SUNGAI PASIR KEC. MERAL	Meral	85
74	SEMENISASI RT.03 RW.05 KEL. SUNGAI PASIR KEC. MERAL	Meral	58
75	SEMENISASI RT.04 RW.03 KELURAHAN PAMAK KECAMATAN TEBING	Tebing	145
76	SEMENISASI RT.04 RW.03 KELURAHAN TEBING (BELAKANG IKBI ANDALAS)	Tebing	82
77	SEMENISASI GANG ANGGREK JL. SUNARYO KM 04 RT.02 RW.03 DESA SAWANG SELATAN KEC. KUNDUR BARAT	Kudur Barat	57,6
78	SEMENISASI GANG MERAK JL. DWIKORA RT.003 RW.004 KEL. TG. BATU KOTA	Kundur	200,1
79	SEMENISASI GANG M. SARIF JALAN HANG JEBAT RT. 03 RW. 15 KEL. TG. BATUKOTA KEC. KUNDUR	Kundur	144,1
80	SEMENISASI GANG TASLIM DUSUN 3 RT.01 RW .01 PARIT BARU DESA SEI SEBESIKEC. KUNDUR	Kundur	152,4
81	SEMENISASI HALAMAN CITIYA ARIALOKA GG.POLIDES RT.007 RW.003 DUSUN II DESA KUNDUR KEC. KUNDUR BARAT	Kudur Barat	146,5
82	SEMENISASI JALAN FAMILI KEL. TG. BERLIAN KOTA KEC. KUNDUR UTARA	Kundur Utara	105
83	SEMENISASI JALAN KOLAM AIR GANG PAK ADE RT. 02 RW. 15 KEL. TG. BATU KOTA KEC. KUNDUR	Kundur	94
84	SEMENISASI JALAN MANDIRI KM 11 RT.17 RW.07 BATU TUMBANG DUSUN 3 DESASAWANG SELATAN KEC. KUNDUR BARAT	Kudur Barat	60,5
85	SEMENISASI JALAN PERKUBURAN TING HUA KEC. BURU	Buru	139,5
86	SEMENISASI JALAN PERKUBURAN TIOGHOA BURU DESA KANDIS KEC. BURU	Buru	156
87	SEMENISASI JALAN SULAWESI PERUMAHAN RT. 05 RW. 03 KEL. TG. BATU KOTA KEC. KUNDUR	Kundur	158,5
88	SEMENISASI JL. KAMPUNG KOLAM RT 003 RW 003 KEL. LUBUK PUDING KEC. BURU	Buru	61
89	SEMENISASI JLN H. NAWAWI GANG TANAH TINGGI RT 03 RW 09 KEL. TG. BATUKOTA KEC. KUNDUR	Kundur	125,6
90	SEMENISASI JL. NIRWANA LAUT JAMBU KEL. ALAI KEC. UNGAR	Ungar	77
91	SEMENISASI JL. RENA RT.02 RW.7 BATU 8 KEL. TANJUNG BATU KOTA KEC. KUNDUR	Kundur	98,9
92	SEMENISASI JL. SEBADANG RT.02 RW.10 KEL. BURU KEC. BURU	Buru	122
93	SEMENISASI MENUJU MASJID AL AMIN DUSUN 1 SAWANG LAUT KEC. KUNDUR BARAT	Kudur Barat	164
94	SEMENISASI RT.01 RW.02 DESA LUBUK KECAMATAN KUNDUR	Kundur	108,1

95	SEMENISASI RT.03 RW.01 KEL. GADING SARI KEC. KUNDUR	Kundur	108
TOTAL			**10919,35**

2. Panjang drainase yang dibangun dengan target **130** meter persegi terealisasi sepanjang **219,3** meter persegi dengan persentase sebesar **168%** dan dapat dilihat pada rincian dibawah ini,

NO.	LOKASI	KEC.	M2
1	PEMBANGUNAN DRAINASE DAN PENUTUP RT.02 RW.04 BATU LIPAI KEL. BARANTIMUR KEC. MERAL	Meral	94
2	PEMBANGUNAN DRAINASE RT. 03 RW. 07 WONOSARI KEL. BARAN BARAT KEC.MERAL	Meral	125,3

3. Jumlah titik lampu yang diadakan dengan target **130** titik lampu terealisasi sebanyak **289** titik lampu dengan persentase sebesar **222%** dan dapat dilihat pada rincian dibawah ini,

NO.	LOKASI	JUMLAH
1	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN BAITURAHMAN GUNTUNG PUNAK RT.02 RW.03 KEL. DARUSSALAM KEC. MERAL BARAT	2
2	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN GANG AL IMAN RT.03 RW.07 LEMBAH MURNI KEL. PASIR PANJANG KEC. MERAL BARAT	1
3	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. DARUSALAM KEC. MERAL BARAT	7
4	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. PASIR PANJANG KEC. MERAL BARAT	10
5	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN RT.01 RW.04 KAMPUNG SUKA DAMAI DESA PANGKE KEC. MERAL BARAT	2
6	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. BARAN BARAT KEC. MERAL	8
7	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. BARAN TIMUR KEC. MERAL	2
8	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. MERAL KOTA KEC. MERAL	6
9	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. SUNGAI PASIR KEC. MERAL	10
10	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. SUNGAI RAYA KEC. MERAL	3
11	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. TELUK UMA KEC. TEBING	5
12	PENGADAAN LAMPU LAMPION JALAN NUSANTARA SAMPING PELABUHAN KPK KEC. KARIMUN	0
13	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. SUNGAI LAKAM TIMUR KEC.KARIMUN	11
14	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. TANJUNG BALAI KEC. KARIMUN	21

15	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. TANJUNG BALAI KOTA KEC.KARIMUN	6
16	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KEL. TELUK AIR KEC. KARIMUN	14
17	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN DESA TANJUNG BATU KECIL KEC.BURU	8
18	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN BUDIHARJO RT.02 RW.01 DESA KUNDUR KEC KUNDUR BARAT	3
19	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN PRAMUKA RT.01 RW.09 DAN JL.HANG JEBAT RT.03 RW.15 KEL. TG. BATU KOTA KEC. KUNDUR	2
20	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN RT.03 RW.08 JALAN SIMPANG PANGLUNG KEL. TANJUNG BATU BARAT KEC. KUNDUR	2
21	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JLN. MUHARAL TG. SESUP LAUT RT.03 RW.03 KEL. GADING SARI KEC. KUNDUR	2
22	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN DESA SELAT MENDAUN KEC. SELAT GELAM	9
23	PEMASANGAN BARU JALAN BUKIT TEMBAK BELAKANG SAR	5
24	PEMASANGAN BARU JALAN DESA PANGKE BARAT	3
25	PEMASANGAN BARU JALAN KELURAHAN DARUSSALAM	12
26	PEMASANGAN BARU PENERANGAN HIGMAS TPUJALAN IVORA JAYA RT.001 RW.002 KELURAHAN SUNGAI RAYA KECAMATAN MERAL	1
27	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN DESA PANGKE	21
28	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN BARAN BARAT	11
30	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN BARAN TIMUR	9
31	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN PAMAK	8
32	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN SEI RAYA	6
33	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN SUNGAI LAKAM BARAT KECAMATAN KARIMUN	11
34	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN SUNGAI LAKAM TIMUR KECAMATAN KARIMUN	21
35	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN SUNGAI PASIR	18
36	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN TANJUNG BALAI KECAMATAN KARIMUN	9
37	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN KELURAHAN MERAL KOTA	10
38	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN RT 02 RW03 KAMPUNG BARU TEBING KEL TEBING	2
39	PEMASANGAN BARU PENERANGAN JALAN DESA GEMURUH	8

4. Jumlah rumah ibadah yang direhab dan dibangun dengan target **5 unit** terealisasi sebanyak **5 unit** dengan persentase sebesar **100%** dan dapat dilihat pada rincian dibawah ini,

NO.	LOKASI	KEC.
1	PEMBANGUNAN KANOPI MUSHOLA AT-TAUBAH PERUMAHAN BUKIT CINCINASRI RT.03 RW.02 KEL. PAMAK KEC. TEBING	Tebing
2	PEMBANGUNAN PAGAR VIHARA CETYA TRI DHARMA PARIT SUKUR RT 001 RW 008 DESA TANJUNG BERLIAN BARAT KEC. KUNDUR UTARA	Kundur Utara
3	PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN AL-KAUTSAR DESAGEMURUH KEC. KUNDUR BARAT	Kundur Barat
4	RENOVASI SURAU JABAL RAHMAH DESA TG. BATU KECIL KEC. BURU	Buru
5	PENIMBUNAN LAHAN SURAU BAITUSSALAM RW.06 KEL. TANJUNG BATU BARAT KECAMATAN KUNDUR	Kundur

5. Jumlah pagar kuburan yang dibangun dengan target **1 unit** terealisasi sebanyak **2 unit** dengan persentase sebesar **200%** dan dapat dilihat pada rincian dibawah ini,

NO.	LOKASI	KEC.
1	PAGAR KUBURAN DESA PARIT 2 PANGKALAN JERNIH RT.01 RW.05 DESA PARIT KEC. SELAT GELAM	Selat Gelam
2	PEMBANGUNAN PAGAR KUBUR RT.02 RW.04 PARIT 1 DESA PARIT KEC. SELAT GELAM	Selat Gelam

6. Panjang penataan saluran yang dikerjakan dengan target **1.000 meter** terealisasi sebanyak **691 meter** dengan persentase sebesar **69%** dan dapat dilihat pada rincian dibawah ini,

NO.	LOKASI	KEC.	METER
1	PENATAAN SALURAN SUNGAI TELUK SETIMBUL RT.03 RW.04 KEL. PASIR PANJANG KEC. MERAL BARAT	Meral Barat	691

Berdasarkan data capaian realisasi Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian maka diperoleh rata-rata capaian realisasi program sebesar **166%.**

Adapun capaian indikator Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase	**2,57**	**2,57**
	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	Jumlah Rumah	**2226**	**2226**
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	90	394

- **CAPAIAN REALISASI KINERJA**

Pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan, Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan indikator yaitu :

1. Indikator Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) berupa persentase rumah yang terfasilitasi PSU dengan target 2,57% terealisasi sebesar 2,57% atau capaian 100%, adapun perhitungannya yaitu jumlah rumah yang terfasilitasi PSU [dibagi] total unit rumah di Kabupaten Karimun sehingga dapat dihitung 2.226 (jumlah unit rumah yang terfasilitasi PSU) / 86739 (totak unit rumah se Kabupaten Karimun) [dikali] 100 yaitu 2,57%. Pada indikator Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan yaitu jumlah rumah yang terlayani PSU sebanyak 2.226 unit rumah sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

JUMLAH RUMAH TERFASILITASI PSU TAHUN 2023

NO.	PSU	RUMAH YANG TERLAYANI PSU
1	Semenisasi	1.344
2	Penerangan Jalan Umum	650
3	Drainase	37
4	Rumah Ibadah	145
5	Pagar Kuburan	40
6	Penataan Saluran	10
TOTAL		**2.226**

JUMLAH RUMAH SEKABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	PENDUDUK			KEPALA KELUARGA		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MORO	MORO	2.032	1.903	3.935	1.051	224	1.275
		MORO TIMUR	1.615	1.604	3.219	820	251	1.071
		PAUH	663	645	1.308	352	113	465
		JANG	1.085	927	2.012	522	99	621
		PULAU MORO	468	434	902	238	54	292
JUMLAH			**5.863**	**5.513**	**11.376**	**2.983**	**741**	**3.724**
2	KUNDUR	TANJUNG BATU BARAT	3.320	3.354	6.674	1.674	517	2.191
		TANJUNG BATU KOTA	6.097	6.184	12.281	3.153	954	4.107
		GADING SARI	1.342	1.287	2.629	684	168	852
		SUNGAI SEBESI	1.837	1.829	3.666	966	225	1.191
		SUNGAI UNGAR	1.627	1.596	3.223	885	213	1.098
		LUBUK	1.400	1.347	2.747	722	159	881
JUMLAH			**15.623**	**15.597**	**31.220**	**8.084**	**2.236**	**10.320**
3	KARIMUN	TANJUNG BALAI	3.805	3.720	7.525	1.907	588	2.495
		TELUK AIR	3.409	3.250	6.659	1.716	484	2.200
		SUNGAI LAKAM TIMUR	5.274	4.837	10.111	2.545	827	3.372
		LUBUK SEMUT	3.009	3.066	6.075	1.537	420	1.957
		TANJUNG BALAI KOTA	3.062	3.161	6.223	1.576	544	2.120
		SUNGAI LAKAM BARAT	5.959	5.483	11.442	2.909	837	3.746
JUMLAH			**24.518**	**23.517**	**48.035**	**12.190**	**3.700**	**15.890**
4	MERAL	MERAL KOTA	3.822	3.728	7.550	1.851	603	2.454
		BARAN BARAT	5.068	4.814	9.882	2.512	573	3.085
		SUNGAI RAYA	3.874	3.629	7.503	1.902	374	2.276
		BARAN TIMUR	4.765	4.537	9.302	2.288	643	2.931
		SUNGAI PASIR	6.139	5.745	11.884	2.974	689	3.663
		PARIT BENUT	3.324	3.068	6.392	1.650	309	1.959
JUMLAH			**26.992**	**25.521**	**52.513**	**13.177**	**3.191**	**16.368**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	PENDUDUK			KEPALA KELUARGA		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	TEBING	TEBING	3.883	3.714	7.597	1.913	439	2.352
		TELUK UMA	3.337	3.244	6.581	1.727	380	2.107
		KAPLING	2.669	2.726	5.395	1.368	439	1.807
		PAMAK	2.672	2.560	5.232	1.334	294	1.628
		HARJOSARI	2.562	2.502	5.064	1.313	235	1.548
		PONGKAR	1.774	1.626	3.400	856	192	1.048
JUMLAH			**16.897**	**16.372**	**33.269**	**8.511**	**1.979**	**10.490**
6	BURU	BURU	1.680	1.587	3.267	890	213	1.103
		LUBUK PUDING	1.847	1.740	3.587	976	224	1.200
		TANJUNG HUTAN	929	870	1.799	485	113	598
		TANJUNG BATU KECIL	994	976	1.970	530	120	650
JUMLAH			**5.450**	**5.173**	**10.623**	**2.881**	**670**	**3.551**
7	KUNDUR UTARA	TANJUNG BERLIAN KOTA	2.137	1.983	4.120	1.068	292	1.360
		SUNGAI UNGAR UTARA	1.181	1.154	2.335	596	196	792
		TELUK RADANG	999	984	1.983	522	115	637
		PERAYUN	957	901	1.858	512	81	593
		TANJUNG BERLIAN BARAT	1.368	1.251	2.619	689	153	842
JUMLAH			**6.642**	**6.273**	**12.915**	**3.387**	**837**	**4.224**
8	KUNDUR BARAT	SAWANG	2.794	2.674	5.468	1.448	356	1.804
		SAWANG SELATAN	1.923	1.859	3.782	999	210	1.209
		SAWANG LAUT	1.601	1.511	3.112	847	181	1.028
		KUNDUR	1.889	1.787	3.676	1.009	206	1.215
		GEMURUH	1.714	1.643	3.357	871	197	1.068
JUMLAH			**9.921**	**9.474**	**19.395**	**5.174**	**1.150**	**6.324**
9	DURAI	SANGLAR	828	754	1.582	419	90	509
		TANJUNG KILANG	805	770	1.575	424	119	543
		SEMEMBANG	666	626	1.292	337	98	435
		TELAGA TUJUH	985	950	1.935	515	146	661
JUMLAH			**3.284**	**3.100**	**6.384**	**1.695**	**453**	**2.148**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	PENDUDUK			KEPALA KELUARGA		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	MERAL BARAT	PASIR PANJANG	2.703	2.519	5.222	1.345	274	1.619
		DARUSSALAM	2.439	2.317	4.756	1.195	223	1.418
		PANGKE	2.048	1.874	3.922	1.046	237	1.283
		PANGKE BARAT	1.576	1.518	3.094	853	136	989
JUMLAH			**8.766**	**8.228**	**16.994**	**4.439**	**870**	**5.309**
11	UNGAR	ALAI	1.348	1.318	2.666	737	195	932
		BATU LIMAU	763	742	1.505	418	110	528
		NGAL	368	351	719	195	49	244
		SUNGAI BULUH	548	518	1.066	289	73	362
JUMLAH			**3.027**	**2.929**	**5.956**	**1.639**	**427**	**2.066**
12	BELAT	SEBELE	662	658	1.320	367	81	448
		LEBUH	673	589	1.262	334	94	428
		PENARAH	750	668	1.418	372	120	492
		SUNGAI ASAM	722	660	1.382	380	72	452
		TEBIAS	481	410	891	230	59	289
		DEGONG	308	279	587	165	34	199
JUMLAH			**3.596**	**3.264**	**6.860**	**1.848**	**460**	**2.308**
13	SELAT GELAM	PARIT	903	864	1.767	476	131	607
		TULANG	772	706	1.478	390	93	483
		SELAT MENDAUN	520	489	1.009	273	65	338
JUMLAH			**2.195**	**2.059**	**4.254**	**1.139**	**289**	**1.428**
14	SUGIE BESAR	SUGIE	861	767	1.628	441	92	533
		NIUR PERMAI	589	619	1.208	312	80	392
		KEBAN	658	639	1.297	348	70	418
		RAWA JAYA	458	443	901	229	68	297
		TANJUNG PELANDUK	407	369	776	198	41	239
		BULUH PATAH	373	356	729	190	31	221
		SELAT MIE	743	686	1.429	413	76	489
JUMLAH			**4.089**	**3.879**	**7.968**	**2.131**	**458**	**2.589**
JUMLAH KESELURUHAN			**136.863**	**130.899**	**267.762**	**69.278**	**17.461**	**86.739**

Pada Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumaha untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan indikato Jumlah Lokasi Perumahan ya disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunja Fungsi Hunian (lokasi) sebanyak 394 lokasi sebagaimana dapat dilihat pada tab dibawah ini,

NO.	PSU	JUMLAH LOKASI
1	Semenisasi	95

2	Penerangan Jalan Umum	289
3	Drainase	2
4	Rumah Ibadah	5
5	Pagar Kuburan	2
6	Penataan Saluran	1
TOTAL		**394**

Sumber : Website Disdukcapil Kabupaten Karimun

Berdasarkan data diatas diperoleh jumlah unit rumah Kab/Kota tahun 2023 sebanya **86.739** unit rumah dengan asumsi 1 rumah dihuni oleh 1 (satu) KK

Selama tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupate Karimun telah mengalokasikan dana senilai **Rp.17.829.255.553,-**untuk Sub. Kegiata Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan dengan realisasi anggara sebesar **Rp.9.594.469.910** atau **53.81%**.

- **KENDALA/HAMBATAN**

Dalam pelaksanaan realisasi Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilita Umum di Perumahan selama tahun 2023 terdapat kendala dan hambatan seperti :

1. Masalah pembebasan lahan yang di peruntukan untuk jalan umum dan lebar jala yang tidak sesuai dengan lebar lahan yang tersedia pada kegiatan semenisasi;
2. Faktor cuaca menjadi salah satu hambatan yang dapat mengakibatkan perubaha time schedule sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi tidak tepat waktu;
3. Pada beberapa lokasi tidak tersedianya jaringan listrik dari PLN, sehingga tida dapat dilakukan pemasangan PJU dilokasi-lokasi tertentu.

- **SOLUSI KEDEPAN**

Adapun solusi yang dapat diambil dalam mengakomodir hambatan dan kendala dala pelaksanaan Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan yang matang dalam memastikan jalan yang akan direncanaka adalah lahan yg diperuntukkan untuk jalan umum dan atau telah dihibahka sebagai jalanan umum;
2. Pada lokasi yang tidak terdapat jaringan listrik dapat dilakukan pemasangan PJ tenaga surya.

4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pada capaian program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Dinas Perumaha Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023 dapat dilihat pada tab dibawah ini,

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase	**85**	**85**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Dokumen	**7**	**7**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	3
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Laporan	**1**	**1**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pegawai	100	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pegawai	8	8
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Laporan	**1**	**1**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	155	155
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Laporan	**1**	**1**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	8	8
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	63	15
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	20	15
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	31	31
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Dokumen	4	4
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	110	110
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1

	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Laporan	**1**	**1**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	10	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	2
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	0
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Laporan	**1**	**1**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	272	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	13	13
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Laporan	**1**	**1**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	4	4
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	5	5

Dari paparan capaian realisasi program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasa Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023, pada sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat da Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2023 yaitu **Meningkatnya Akses Infrastruktu Masyarakat di Kawasan Permukiman** dengan target 52,24% sebagaimana yang tertera pad dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat da Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Periode 2021-2026, dari target tersebut tercapai capaia sebesar **75%** dengan predikat capaian indikator sasaran tersebut adalah **"BAIK".**

A. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Karimun mengalokasikan anggaran sebesa **Rp.34.636.296.164,- (Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Du Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah)** kepada Dina Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, anggaran ini dipergunaka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kiner tahun 2023. Anggaran ini digunakan untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsun Adapun pagu pada masing-masing program kegiatan adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	PAGU	
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Rp**	**390.938.501**
	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	**Rp**	**299.982.207**
	Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	Rp	99.998.168
	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rp	99.998.573
	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Rp	99.985.466
	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Rp**	**90.956.294**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp	90.956.294
2	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Rp**	**1.781.900.391**
	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	**Rp**	**49.975.822**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Rp	49.975.822
	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 HEKTAR	**Rp**	**1.731.924.569**
	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Rp	1.731.924.569
3	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Rp**	**17.959.468.161**
	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	**Rp**	**17.959.468.161**
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp	17.829.255.553
	Verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang	Rp	130.212.608

4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rp**	**14.503.989.111**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	**Rp**	**126.651.959**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	89.543.530
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	37.108.429
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**Rp**	**3.321.847.094**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	3.228.895.094
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	92.952.000
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	**Rp**	**64.007.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	64.007.000
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**Rp**	**795.441.385**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	21.375.340
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	189.965.356
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	48.182.507
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	232.049.089
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Rp	6.900.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	276.969.150
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp	19.999.943
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Rp**	**202.834.469**

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	47.346.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	143.488.469
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	12.000.000
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Rp**	**9.860.174.904**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	9.404.324.904
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	455.850.000
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Rp**	**133.032.300**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	123.272.300
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	9.760.000

Pagu anggaran program diatas merupakan pagu anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sampai dengan APBD Perubahan. Pagu murni APBD murni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun senilai **Rp.26.819.485.041,- (Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Satu Rupiah)** dan pada APBD Perubahan mendapat tambahan pagu senilai **Rp.7.816.811.123,- (Tujuh Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah)** sehingga total pagu yang diterima oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun selama periode tahun 2023 senilai **Rp.34.636.296.164,- (Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah).**

Tabel 3.14. RINCIAN REALISASI BELANJA TAHUN 2023

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN			REALISASI	KINERJA KEUANGAN			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	FISIK (%)	ANGGARAN	REALISASI	SILPA	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)	10 =8/7*100
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI YANG DIBANGUN DIKAWASAN**	**0,05**	**0**	**0,00**	**Rp 390.938.501**	**Rp 56.839.000**	**Rp 334.099.501**	**14,5**
	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI	**JUMLAH RUMAH KORBAN BENCANA YANG DITANGANI**	**30**	**0**	**0,00**	**Rp 299.982.207**	**Rp -**	**Rp 299.982.207**	**0,0**
	Rehabailitasi Rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi (unit rumah)	20	0	0,00	Rp 99.998.168	**Rp -**	**Rp 99.998.168**	**0,0**
	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	luas lahan yang tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Ha)	1	0	0,00	Rp 99.998.573	**Rp -**	**Rp 99.998.573**	**0,0**
	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota yang terbangun (unit rumah)	10	0	0,00	Rp 99.985.466	**Rp -**	**Rp 99.985.466**	**0,0**
	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN	**JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN**	**30**	0	0,00	**Rp 90.956.294**	**Rp 56.839.000**	**Rp 34.117.294**	**62,5**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	30	25	83,33	Rp 90.956.294	**Rp 56.839.000**	**Rp 34.117.294**	**62,5**
2	**PROGRAM KAWASAN**	**PERSENTASE KAWASAN KUMUH**	**0,24**	0,89305556	100	**Rp 1.781.900.391**	**Rp 1.557.431.296**	**Rp 224.469.095**	**87,4**
	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN	**JUMLAH REKOMENDASI YANG DITERBITKAN**	**10**	0	0	**Rp 49.975.822**	**Rp 32.447.000**	**Rp 17.528.822**	**64,9**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (laporan)	4	8	100	Rp 49.975.822	**Rp 32.447.000**	**Rp 17.528.822**	**64,9**
	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS	**Luas Kawasan kumuh yang ditingkatan (ha)**	**0.061**	0,89305556	100	**Rp 1.731.924.569**	**Rp 1.524.984.296**	**Rp 206.940.273**	**88,1**
	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Luas kawasan kumuh yang diremajakan /dipugar (ha)	0.061	0,8931	100	Rp 1.731.924.569	**Rp 1.524.984.296**	**Rp 206.940.273**	**88,1**
3	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN**	**PERSENTASE RUMAH YANG TERFASILITASI PSU**	**2,57**	2,57	100	**Rp 17.959.468.161**	**Rp 9.699.359.560**	**Rp8.260.108.601**	**54,0**
	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	**JUMLAH RUMAH YANG TERLAYANI**	**2226**	2226	100	**Rp 17.959.468.161**	**Rp 9.699.359.560**	**Rp8.260.108.601**	**54,0**
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (lokasi)	90	412	100	Rp 17.829.255.553	**Rp 9.594.469.910**	**Rp8.234.785.643**	**53,8**
	Verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang	Jumlah Dokumen kerja sama pemyediaan /pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen)	15	15	100	Rp 130.212.608	**Rp 104.889.650**	**Rp 25.322.958**	**80,6**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN			REALISASI	KINERJA KEUANGAN			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	FISIK (%)	ANGGARAN	REALISASI	SILPA	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)	10 =8/7*100
4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**IKM**	**85**	**85**	**100**	**Rp 14.503.989.111**	**Rp 13.727.699.535**	**Rp 776.289.576**	**94,6**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN	**JUMLAH DOKUMEN**	**7**	7	100	**Rp 126.651.959**	Rp 49.680.000	**Rp 76.971.959**	**39,2**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1	1	100	Rp 89.543.530	Rp 32.363.200	**Rp 57.180.330**	**36,1**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	3	3	100	Rp 37.108.429	Rp 17.316.800	**Rp 19.791.629**	**46,7**
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**JUMLAH LAPORAN**	**1**	1	100	**Rp 3.321.847.094**	Rp 2.999.345.526	**Rp 322.501.568**	**90,3**
	Penyediaan Gaji dan	Jumlah Pegawai	100	**100**	**100**	Rp 3.228.895.094	**Rp 2.931.856.326**	**Rp 297.038.768**	**90,8**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai	8	8	100	Rp 92.952.000	Rp 67.489.200	**Rp 25.462.800**	**72,6**
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	**JUMLAH LAPORAN**	**1**	1	100	**Rp 64.007.000**	Rp 61.119.000	**Rp 2.888.000**	**95,5**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Pakaian Dinas	155	**155**	**100**	Rp 64.007.000	**Rp 61.119.000**	**Rp 2.888.000**	**95,5**
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**JUMLAH LAPORAN**	**1**	1	100	**Rp 795.441.385**	Rp 664.617.711	**Rp 130.823.674**	**83,6**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	8	8	100	Rp 21.375.340	Rp 14.976.000	**Rp 6.399.340**	**70,1**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	63	15	24	Rp 189.965.356	**Rp 159.898.811**	**Rp 30.066.545**	**84,2**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20	15	75	Rp 48.182.507	**Rp 25.158.000**	**Rp 23.024.507**	**52,2**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	31	31	100	Rp 232.049.089	**Rp 217.592.800**	**Rp 14.456.289**	**93,8**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4	4	100	Rp 6.900.000	**Rp 6.300.000**	**Rp 600.000**	**91,3**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Jumlah SPPD	110	110	100	Rp 276.969.150	**Rp 235.008.000**	**Rp 41.961.150**	**84,8**
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi	1	**1**	**100**	Rp 19.999.943	**Rp 5.684.100**	**Rp 14.315.843**	**28,4**
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**JUMLAH LAPORAN**	**1**	**1**	**100**	**Rp 202.834.469**	**Rp 142.811.000**	**Rp 60.023.469**	**70,4**
	Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin	10	0	0	Rp 47.346.000	**Rp -**	**Rp 47.346.000**	**0,0**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana prasarana yang diadakan	2	**2**	**100**	Rp 143.488.469	**Rp 142.811.000**	**Rp 677.469**	**99,5**
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	0	0	Rp 12.000.000	**Rp -**	**Rp 12.000.000**	**0,0**
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**JUMLAH LAPORAN**	**1**	**1**	**100**	**Rp 9.860.174.904**	**Rp 9.741.071.563**	**Rp 119.103.341**	**98,8**
	Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Materai	272	**0**	**0**	Rp -	**Rp -**	**Rp -**	**#DIV/0!**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	Rp 9.404.324.904	**Rp 9.291.856.563**	**Rp 112.468.341**	**98,8**
	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Pegawai Non ASN	13	13	100	Rp 455.850.000	**Rp 449.215.000**	**Rp 6.635.000**	**98,5**
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**JUMLAH LAPORAN**	**1**	**1**	**100**	**Rp 133.032.300**	**Rp 69.054.735**	**Rp 63.977.565**	**51,9**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah kendaraan yang dipelihara	4	**4**	**100**	Rp 123.272.300	**Rp 64.104.735**	**Rp 59.167.565**	**52,0**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	5	100	Rp 9.760.000	**Rp 4.950.000**	**Rp 4.810.000**	**50,7**
						Rp 34.636.296.164	**Rp 25.041.329.391**	**Rp9.594.966.773**	

Berdasarkan tabel 3.14 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran untuk belanja langsung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun selama periode tahun 2023 adalah sebesar **Rp.25.041.329.391,-** atau persentase

penyerapan dana sebesar **97,83%** dari anggaran senilai **Rp.34.636.296.164,-.** Berikut adalah Tabel dan Realisasi Anggaran yang mendukung untuk Pencapaian Sasaran Strategis pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum di Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp17.959.468.161	Rp9.699.359.560	54,01
		Program Kawasan Permukiman	Rp1.781.900.391	Rp1.557.431.296	87,40
		Program Pengembangan Perumahan	Rp390.938.501	Rp56.839.000	14,54
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp14.503.989.111	Rp13.727.699.535	94,65

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa pada tahun 2023 dari 2 (dua) sasaran strategis yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dengan minimnya dana yang di anggarkan masih dapat melaksanakan tugas berdasarkan tupoksi dengan sangat baik. Hal ini membuat efisiensi pengunaan sumber daya juga dapat terealisasi, yaitu dengan cara sebagai berikut :

- ✓ **Pembinaan,** setiap pertiga bulan Dinas Perumahn Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karimun melakukan review dan evaluasi berkaitan dengan pekerjaan yang dilaksanakan dan pembinaan;
- ✓ **Recruitment,** dalam eksekusi pelaksanaan tugas dan pekerjaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan perecruitment petugas yang bersertifikasi dengan tujuan agar hasil pekerjaan memiliki kualitas yang baik;
- ✓ **Mengadakan Perubahan dan Perbaikan Sistem,** Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karimun melakukan perubahan sistem seperti pembayaran gaji berdasarkan orang/jam, tidak lagi berdasarkan orang/hari, sehingga pekerja (teknisi) dibayar berdasarkan lama waktu pekerjaannya.
- ✓ **Penghargaan,** Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memberikan penghargaan kepada aparatur sipil negara yang memenuhi dan atau melebihi target pekerjaan juga tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam bekerja. Selain itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga memberikan sanksi kepada ASN yang tidak disiplin berupa pemotongan uang pendapatan ASN setiap bulannya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk masing-masing indikator sasaran. Dengan analisis ini dapat dilakukan sasaran mana yang tidak dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harusdilakukan di masa mendatang.

Evaluasi Dan analisa capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategi 2021-2026 dapat diuraikan berdasarkan indikator sasaran pada masing tujuan sebagai berikut:

1. **Tujuan : Meningkatnya akses kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat yang merata dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.**

Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman tersebut juga dilaksanakan dengan model pemberdayaan yang melibatkan masyarakat sejak perencanaan sampai pemeliharaan infrastruktur. Khusus Pembangunan kumuh akan diprioritaskan pada kawasan-kawasan permukiman kumuh di kawasan strategis kabupaten/kota dan kabupaten/kota yang akan ditangani secara terpadu sehingga dapat menjadi kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Rumah dengan lingkungan yang sehat merupakan kebutuhan pokok manusia. Sayangnya dengan harga tanah dan rumah yang terus meroket, masih banyak penduduk Indonesia yang belum memilikinya. Sementara itu, diberbagai wilayah penduduknya juga memiliki permasalahan tersendiri, yaitu hidup di lingkungan yang sanitasinya tidak layak.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas agar dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

a. **Sasaran : Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman**

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

pasal 40 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Sebagai hak dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi komitmen global sebagaimana dituangkan dalam Agenda Habitat (*The Habitat Agenda, Istanbul Declaration on Human Settlements*) dan *Millenium Development Goals* (MDGs). Untuk itu, Pemerintah bertanggungjawab untuk membantu masyarakat agar dapat bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungannya. Dengan memiliki tempat tinggal saja tidak cukup tetapi harus juga diimbangi dengan adanya sarana dan prasarana utilitas umum di permukiman seperti terbangunnya jalan, drainase, penerangan jalan umum dan rumah peribadatan di area permukiman.

Sejalan dengan sasaran strategis diatas, Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 telah menetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan perumahan di wilayah Kabupaten Karimun adalah "*Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman*". Maksud ditetapkan sasaran tersebut adalah untuk mendukung rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah agar memiliki rumah yang aman dan terjangkau lewat proses perbaikan-perbaikan tertentu sehingga tersedianya prasarana dan sarana utilitas umum untuk menunjang fungsi hunian di area permukiman.

Untuk mewujudkan sasaran di atas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang merupakan tahun pertama Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 terkait sasaran

Meningkatkan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum di Permukiman, realisasi program, kegiatan dan sub. kegiatannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase	**0,05**	**0**
	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	Jumlah Rumah	**30**	**0**
	Rehabailitasi Rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	20	0
	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Ha	1	0
	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	10	0
	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Izin	**30**	**0**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan	30	25
2	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase	**0,24**	**0,89**
	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rekomendasi	**10**	**0**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Laporan	4	8
	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 HEKTAR	Ha	**0.061**	**1**
	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Ha	0.061	1
3	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase	**2,57**	**3**
	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	Jumlah Rumah	**2226**	**2226**
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	90	412
	Verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang	Dokumen	15	15

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase	**85**	**85**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Dokumen	**7**	**7**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	3
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Laporan	**1**	**1**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pegawai	100	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pegawai	8	8
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Laporan	**1**	**1**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	155	155
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Laporan	**1**	**1**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	8	8
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	63	15
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	20	15
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	31	31
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	4	4
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	110	110
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Laporan	**1**	**1**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	10	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	2
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	0
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Laporan	**1**	**1**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	272	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	13	13
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Laporan	**1**	**1**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	4	4
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	5	5

Pada program pengembangan perumahan, kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota, sub. kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana, sub. kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana dan sub. kegiatan pembangunan rumah bagi korban bencana selama periode tahun 2023 tidak ada realisasi dikarenakan Kabupaten Karimun bukan termasuk daerah rawan terjadinya bencana.

Pada evaluasi renja tahun 2023 yang dilakukan oleh Baperlitbang Kabupaten Karimun diperoleh data terkait rata-rata capaian realisasi kinerja dan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yaitu **rata-rata capaian realisasi kinerja sebesar 75% dengan predikat "sedang", dan rata-rata**

capaian realisasi anggaran sebesar 63% dengan predikat "rendah", hal ini disebabkan oleh adanya tunda bayar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun senilai Rp.8.302.012.564,- (Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Juta Dua Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karimun yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun, dengan nama Badan Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun mengubah nama Badan Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup menjadi Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun. Kemudian pada Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah yang mengukuhkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Karimun dengan tipe B.

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah dan diperbaharui dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun menyelenggarakan tugas pokok sebagai berikut :

" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan."

Dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah, dijelaskan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Perumahan;
d. Bidang Kawasan Permukiman;
e. Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok masing-masing unit kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

   Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta Pertanahan sesuai dengan kewenangannya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan pelayanan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas di setiap Bidang. Adapun uraian pengkoordinasian tugas-tugas sebagai berikut :

1. Mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
2. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
3. Mengkoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;

5. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
7. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
8. Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
9. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
10. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
11. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
12. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
13. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

14. Mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan platfon anggaran yang ditetapkan;
15. Mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16. Mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas yang diberikan;
18. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari terjadinya penyimpangan; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Masing-masing uraian tugas Sub Bagian tersebut adalah sebagai berikut :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang administrasi umum,

ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan, analisis jabatan dan budaya kerja, yang meliputi :

a) Menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b) Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
c) Membagi tugas bahwan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d) Melaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
e) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
f) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
g) Melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
h) Memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan

formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i) Merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k) Melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan secara optimal;
l) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawiaan seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
m) Menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
n) Melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;

o) Mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
p) Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
q) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
r) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
s) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparan pelaksanaan tugas;
t) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari terjadinya penyimpangan;
u) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, sistem informasi Dinas, dan administrasi keuangan, yang meliputi :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
g. Menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan dari masing-masing Seksi, Subbagian dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai dengan ketentuan guna menghindari terjadinya kesalahan;
h. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan platfon anggaran yang ditetapkan;
i. Menyiapkan bahan dan menyusun kosnep Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis

dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta menghimpun dan mendokumentasikan SOP yang disusun oleh masing-masing Subbagian, Seksi, dan UPTD;

k. Menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

l. Menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing-masing Subbagian, Seksi, dan UPTD sebagai bahan penyusunan Laporan Pengendalian Operasional Kegiatan;

m. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang sistem informasi Dinas;

o. Menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;

p. Menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran baik di lingkungan Sekretariat, Bidang, dan UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan;

q. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keungan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

r. Menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis di bidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan Dinas;
s. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;
t. Melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna menghindari terjadinya kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;
u. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas serta jenis pelaporan keuangan lainnya;
v. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
w. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
x. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
y. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari terjadinya penyimpangan; dan
z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

c. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan, yang meliputi tugas :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perumahan;
2. Merumuskan, penyusunan, dan pelaksanaan program kerja bidang perumahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Mendata dan perencanaan penyediaan, pembiayaan dan pembangunan di bidang perumahan;
4. Melaksanakan penyediaan, pembiayaan dan pembangunan di bidang perumahan;
5. Memantau dan evaluasi penyediaan, pembiayaan dan pembangunan di bidang perumahan; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bidang Perumahan membawahi 3 (tiga) Subkoordinator, yaitu Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Perumahan, Subkoordinator Penyediaan, Pembiayaan, dan Pembangunan Perumahan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing subkoordinator bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan. Adapun uraian tugas masing-masing subkoordinator tersebut adalah sebagai berikut:

1) Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Perumahan, mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Perumahan lingkup perencanaan, pemantauan, dan evaluasi perumahan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-perundangan, yang meliputi :
   a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Perumahan

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai dengan lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi perumahan;
g. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi perumahan;
h. Menyusun pelaporan program dan kegiatan bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Perumahan;
i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

2) Subkoordinator Penyediaan, Pembiayaan, dan Pembangunan Perumahan, mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Perumahan lingkup penyiapan bahan perumusan

kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penyediaan dan pembiayaan perumahan, yang meliputi :

a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Penyediaan, Pembiayaan, dan Pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai dengan lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyediaan, pembiayaan, dan pembangunan Perumahan;
g. Melaksanakan penyediaan, pembiayaan, dan pembangunan bidang perumahan;
h. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembangunan penyediaan kelengkapan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pada perumahan yang dibangun oleh pengembang; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

d. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman, yang meliputi tugas:

a. Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kawasan Permukiman;
b. Menyusun, perumusan dan pelaksanaan program kerja bidang Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
c. Melaksanakan pendataan dan perencanaan teknis Penyediaan, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
d. Melaksanakan pencegahan, Penyediaan, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
e. Memanfaatkan dan evaluasi pelaksanaan Penyediaan, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Kawasan Kumuh; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bidang Kawasan Permukiman, membawahi 3 (tiga) Subkoordinator, yaitu Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman, Subkoordinator Penyediaan, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing Subkoordinator bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman. Adapun uraian tugas masing-masing Subkoordinator tersebut adalah sebagai berikut:

1) Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Kawasan Permukiman lingkup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan permukiman, yang meliputi :
   a. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
   b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
   c. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   d. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
   e. Melaksanakan pendataan, perencanaan, dan inventarisasi kawasan permukiman dan Kawasan Kumuh;
   f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
   g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
   h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Kawasan Permukiman dengan cara

mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

2) Subkoordinator Penyediaan, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Kawasan Permukiman lingkup pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang meliputi:

a. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
c. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
e. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
f. Melaksanakan pembangunan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kawasan kumuh serta peningkatan kualitas kawasan permukiman;

g. Melakukan koordinasi penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

e. Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan
Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam menyelenggarakan penyusunan dan perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta bidang urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang meliputi:
1. Merumuskan kebijakan di bidang prasarana, sarana, utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pertanahan;
2. Menyusunan perencanaan teknis di bidang prasarana, sarana, utilitas umum dan pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kebijakan di bidang prasarana, sarana, utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pertanahan;
4. Melaksanakan penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Melaksanakan pengaturan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah, fasilitasi pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, permasalahan dan ganti rugi kerugian tanah daerah;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan

Kawasan Permukiman serta pengaturan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah, fasilitasi pengadaan tanah, penyelesaian permasalahan dan ganti rugi tanah; dan

7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan membawahi 3 (tiga) Subkoordinator yaitu Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum serta Pertanahan, Subkoordinator Penyediaan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing Subkoordinator bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan. Adapun uraian tugas masing-masing Subkoordinator tersebut adalah sebagai berikut:

1) Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum serta Pertanahan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan dalam melaksanakan pengaturan, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pertanahan, yang meliputi:
   a. Menghimpun, menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
   b. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

c. Menyusun rencana kerja dan program kegiatan penyediaan prasarana, sarana utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dan rencana kerja pengaturan, pemanfaatan dan penggunaan tanah daerah serta fasilitasi pengadaan tanah, sengketa tanah, santunan dang anti rugi tanah;
d. Melaksanakan teknis perencanaan, pemantauan dan evaluasi penyediaan prasarana, sarana utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
e. Melaksanakan teknis pengaturan, pemanfaatan dan penggunaan tanah daerah serta fasilitasi pengadaan tanah, sengketa, sengketa dang anti rugi tanah;
f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
g. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pengembangan bidang prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
h. Melaksanakan teknis serah terima prasarana, sarana dan utilitas umum dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah;
i. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai satandar yang ditetapkan; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

2) Subkoordinator Penyediaan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas

mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan dalam melaksanakan penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum, yang meliputi:

a. Menghimpun, menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
b. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
c. Menyiapkan bahan analisis teknis penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Melaksanakan kebijakan penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
e. Melaksanakan bantuan penyediaan dan pembangunan penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
g. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai satandar yang ditetapkan; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

B. Pelayanan Organisasi

Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mempunyai 3 urusan yaitu Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

- **Perumahan**

  Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakatnya. Hal ini berarti perumahan di suatu lokasi sedikit banyak mencerminkan karakteristik masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut.

- **Kawasan Permukiman**

  Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian masyarakat berada di wilayah perkotaan dan perdesaan.

- **Pertanahan**

  Melaksanakan teknis pengaturan, pemanfaatan dan penggunaan tanah daerah serta fasilitasi pengadaan tanah,

sengketa, sengketa dan ganti rugi tanah sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan rencana kerja Instansi Pemerintah (Renja OPD) Tahun 2024 ini, dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun periode Tahun Anggaran 2024, dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam penyusunan RENJA ini, menyajikan hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja, dan juga sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun terhadap tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan salah satunya membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Selain itu, penyusunan rencana kerja (Renja OPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja OPD periode Tahun Anggaran 2022 sebagai salah satu instansi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang akuntabel dan dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan asas ekonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain fungsi di atas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. Menyusun rumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta pertanahan;
b. Melaksanakan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta pertanahan;
c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam pelaksanaan pembangunan perumahan, kawasan permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta pertanahan;
d. Melaksanakan teknis operasional di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta pertanahan;
e. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi teknis penyuluhan operasional Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta pertanahan;
f. Melaksanakan dan mengendalikan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan dinas;

g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait tugas dan fungsinya;
h. Melaksanakan koordinasi, pengelolaan dan pembinaan UPTD;
i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai fungsinya; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan olehatasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sebagai berikut:

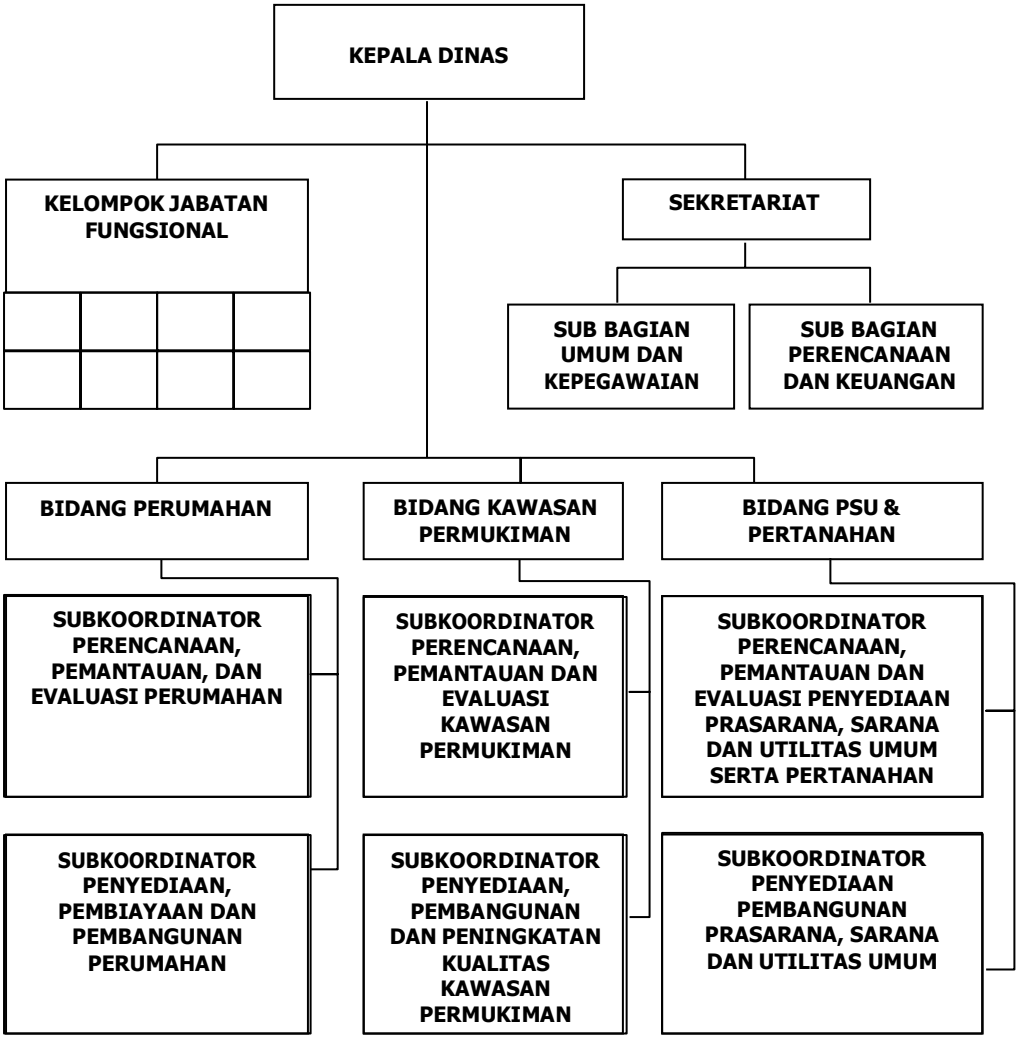

Gambar 1.1
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun2024.

1. Pembangunan infrastruktur yang merata dan adil antar wilayah

Saat ini kondisi jaringan jalan di empat pulau besar di Kabupaten Karimun, yaitu Pulau Karimun, Pulau Kundur dan Pulau Sugi bawah (Moro) masih belum memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Enam ruas jalan nasional dan sepuluh ruas jalan provinsi masih sangat kurang dalam mendukung pengembangan potensi wilayah, terutama sebagai kawasan FTZ. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah prasarana perumahan dan permukiman. Infrastruktur adalah salah satu hal yang paling mendasar yang dapat menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terlebih Kabupaten Karimun termasuk dalam Kawasan FTZ.

Hasil analisa situasi terkini dan situasi sebelumnya dari isu strategis Pembangunan infrastruktur yang merata dan adil antar wilayah di Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

a. Kondisi Jaringan jalan di empat pulau besar di Kabupaten Karimun, yaitu Pulau Karimun, Pulau Kundur dan pulau Sugi bawah (Moro) masih belum memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, terutama sebagai penunjang kawasan strategis.
b. Masih banyak infrasturktur yang belum memadai terutama pada pulau-pulau kecil dan terluar, terlebih pulau terpencil.

1.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas

pokok dan fungsi perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Karimun. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun.

1.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, diantaranya, yaitu pada tahun 2020, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun merencanakan 3 (tiga) program kegiatan yang utama yang berkaitan dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Adapun program utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun adalah program perumahan rakyat dan pemukiman. Dari program tersebut diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana terlampir dalam rencana kerja tahun 2024 ini.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini telah sampai pada tahap ketiga, diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Secara umum arah kabijakan dan strategi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 dalam rangka pencapaian kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, ketahanan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; serta keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah antar sektor dan antar tingkat pemerintahan adalah arah kebijakan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Untuk meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antarsektor dan antartingkat pemerintahan, arah kebijakan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah menterpadukan perencanaan, pemrograman dan penganggaran pembangunan infrastruktur wilayah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat baik antarsektor, antarwilayah, antartingkat pemerintahan, maupun fungsi, lokasi, waktu, besaran serta anggaran; menterpadukan pembangunan infrastruktur wilayah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan pengembangan berbagai kawasan strategis; serta menterpadukan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan berbagai kawasan di dalam perkotaan/metropolitan sehingga menjadi kawasan yang hijau, cerdas dan berkelanjutan, serta memiliki keterkaitan dengan pengembangan kawasan perdesaan seperti agropolitan.

Dari uraian di atas, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional

NO.	KEBIJAKAN NASIONAL	SUMBER	KETERANGAN
1.	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.	RPJMN TAHUN 2015 – 2019 / Perpres No. 02 Tahun 2015	Terkait pelayanan OPD pada : ▪ Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim.		
3.	Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan.	Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024	

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, maka arah Kebijakan Nasional dalam kaitannya dengan pelayanan OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan**.

   Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai kese-imbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruk-tur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

2. **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penannganan Perubahan Iklim.**

   Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kua-litas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan ling-kungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

3. **Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan**.

   Untuk dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan akan dilakukan melalui :

   a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat;

b. Peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak;
c. Peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat;
d. Penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*), baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan; serta
e. Peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak huni melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor Kabupaten Karimun Nomor 52 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun mengalami beberapa perubahan diantaranya adalah Bidang Kebersihan yang semula berada di Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun pindah ke Dinas Lingkungan Hidup dan diganti kan dengan Bidang pertanahan sehingga Sasaran Strategis dan Indikator Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun pada Tahun 2020 ini mengalami perubahan.

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2021 beserta indikator kinerjanya dan matrix Renstra yang berisi tentang tujuan, sasaran dan penjabaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pdapat dilihat pada tabel dibawah ini, adalah :

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KARIMUN

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	
1	2	3	
1	Meningkatnya akses kebutuhan infrastruktur dasarmasyarakat yang merata	1.1	Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat diKawasan Permukiman
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1.2	Meningkatnya AkuntabilitasKinerja OPD

Untuk itu, program kegiatan tahun 2024 mengikuti nomenklatur program kegiatan berdasarkan **Kepmendagri Nomor 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023** Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri menggantikan Kepmendagri Nomor 050 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI KEPMENDAGRI NO. 050 - 3708 TAHUN 2020			PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI KEPMENDAGRI KEPMENDAGRI N0.900.1.15.5-1317 TAHUN 2023		
Uraian		Pagu Anggaran	Uraian		Pagu Anggaran
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		**1.04**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
1.04.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**1.04.01.2.01**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
1.04.01.2.01.0006	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 10.000.000	1.04.01.2.01.0006	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 10.000.000
1.04.01.2.01.0007	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 15.000.000	1.04.01.2.01.0007	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 15.000.000
1.04.01.2.01.0001	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.04.01.2.01.0001	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
1.04.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**1.04.01.2.02**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
1.04.01.2.02.0007	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1.04.01.2.02.0007	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
1.04.01.2.02.0001	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.484.959.142	1.04.01.2.02.0001	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.484.959.142
1.04.01.2.02.0002	Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 92.952.000	1.04.01.2.02.0002	Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 92.952.000
1.04.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**1.04.01.2.03**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
1.04.01.2.03.0005	Sub. Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1.04.01.2.03.0005	Sub. Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
1.04.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**1.04.01.2.05**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
1.04.01.2.05.0002	Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1.04.01.2.05.0002	Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
1.04.01.2.05.0009	Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		1.04.01.2.05.0009	Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
1.04.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1.04.01.2.06**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
1.04.01.2.06.0001	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.04.01.2.06.0001	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
1.04.01.2.06.0002	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.04.01.2.06.0002	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
1.04.01.2.06.0003	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1.04.01.2.06.0003	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
1.04.01.2.06.0004	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1.04.01.2.06.0004	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
1.04.01.2.06.0005	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1.04.01.2.06.0005	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
1.04.01.2.06.0006	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.04.01.2.06.0006	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
1.04.01.2.06.0008	Sub. Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1.04.01.2.06.0008	Sub. Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
1.04.01.2.06.0009	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.04.01.2.06.0009	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1.04.01.2.06.0011	Sub. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1.04.01.2.06.0011	Sub. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI KEPMENDAGRI NO. 050 - 3708 TAHUN 2020			PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI KEPMENDAGRI KEPMENDAGRI N0.900.1.15.5-1317 TAHUN 2023		
Uraian		Pagu Anggaran	Uraian		Pagu Anggaran
1.04.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**1.04.01.2.07**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
1.04.01.2.07.0005	Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel		1.04.01.2.07.0005	Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel	
1.04.01.2.07.0006	Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1.04.01.2.07.0006	Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
1.04.01.2.07.0009	Sub. Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.04.01.2.07.0009	Sub. Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
1.04.01.2.07.0010	Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.04.01.2.07.0010	Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
1.04.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.04.01.2.08**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
1.04.01.2.08.0001	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.04.01.2.08.0001	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
1.04.01.2.08.0002	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 10.640.000	1.04.01.2.08.0002	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 10.640.000
1.04.01.2.08.0003	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.04.01.2.08.0003	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
1.04.01.2.08.0004	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 330.650.000	1.04.01.2.08.0004	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 330.650.000
1.04.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.04.01.2.09**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
1.04.01.2.09.0001	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1.04.01.2.09.0001	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
1.04.01.2.09.0005	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Mebel		1.04.01.2.09.0005	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Mebel	
1.04.01.2.09.0006	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1.04.01.2.09.0006	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**		**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	
1.04.02.2.03	**Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**1.04.02.2.03**	**Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	
1.04.02.2.03.0001	Sub. Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		1.04.02.2.03.0001	Sub. Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
1.04.02.2.03.0004	Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		1.04.02.2.03.0004	Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
1.04.02.2.03.0007	Sub. Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		1.04.02.2.03.0007	Sub. Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
1.04.02.2.06	**Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**		**1.04.02.2.06**	**Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	
1.04.02.2.06.0003	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		1.04.02.2.06.0003	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	

PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI KEPMENDAGRI NO. 050 - 3708 TAHUN 2020			PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI KEPMENDAGRI KEPMENDAGRI N0.900.1.15.5-1317 TAHUN 2023		
Uraian		Pagu Anggaran	Uraian		Pagu Anggaran
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**		**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	
1.04.03.2.01	**Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**		**1.04.03.2.01**	**Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	
1.04.03.2.01.0004	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		1.04.03.2.01.0004	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	
1.04.03.2.02	**Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**		**1.04.03.2.02**	**Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	
1.04.03.2.02.0008	Sub. Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		1.04.03.2.02.0008	Sub. Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
1.04.03.2.02.0014	Sub. Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		1.04.03.2.02.0014	Sub. Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	
1.04.03.2.03	**Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**		**1.04.03.2.03**	**Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	
1.04.03.2.03.0002	Sub. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		1.04.03.2.03.0002	Sub. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
1.04.03.2.03.0012	Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		1.04.03.2.03.0012	Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**		**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	
1.04.05.2.01	**Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**		**1.04.05.2.01**	**Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	
1.04.05.2.01.0002	Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp 32.587.012.550	1.04.05.2.01.0002	Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp 32.587.012.550
1.04.05.2.01.0010	Sub. Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Rp 105.001.014	1.04.05.2.01.0010	Sub. Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Rp 105.001.014
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**		**2.10**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**		**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	
2.10.04.2.01	**Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**2.10.04.2.01**	**Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
2.10.04.2.01.0002	Sub. Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2.10.04.2.01.0002	Sub. Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**		**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	
2.10.05.2.01	**Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**2.10.05.2.01**	**Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	
2.10.05.2.01.0002	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah		2.10.05.2.01.0002	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**		**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	
2.10.10.2.01	**Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**		**2.10.10.2.01**	**Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	
2.10.10.2.01.0003	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		2.10.10.2.01.0003	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

PROGRAM DAN KEGIATAN DISPERKIM TAHUN 2024 (SESUAI KEPMENDAGRI KEPMENDAGRI N0.900.1.15.5-1317 TAHUN 2023)			
Kode Rekening	**Uraian**	**Pagu Anggaran**	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
1.04.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
1.04.01.2.01.0006	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	52.733.500
1.04.01.2.01.0007	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	106.300.000
1.04.01.2.01.0001	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	82.963.784
1.04.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
1.04.01.2.02.0007	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
1.04.01.2.02.0001	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	3.170.681.201
1.04.01.2.02.0002	Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	46.476.000
1.04.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
1.04.01.2.05.0002	Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	47.450.000
1.04.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
1.04.01.2.06.0001	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	10.912.000
1.04.01.2.06.0002	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	74.778.000
1.04.01.2.06.0003	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	15.495.000
1.04.01.2.06.0005	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	76.042.250
1.04.01.2.06.0006	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	9.600.000
1.04.01.2.06.0009	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	262.586.500
1.04.01.2.06.0011	Sub. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp	30.000.800
1.04.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
1.04.01.2.07.0006	Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	92.500.000
1.04.01.2.07.0009	Sub. Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	27.000.000
1.04.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
1.04.01.2.08.0002	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	7.680.696.000
1.04.01.2.08.0004	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	298.050.000
1.04.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
1.04.01.2.09.0001	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	194.698.000
1.04.01.2.09.0006	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	34.420.000
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**		
1.04.02.2.06	**Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**		
1.04.02.2.06.0003	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp	100.000.000
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**		
1.04.03.2.01	**Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**		
1.04.03.2.01.0004	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Rp	70.000.000
1.04.03.2.03	**Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**		
1.04.03.2.03.0002	Sub. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp	2.128.948.559
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**		
1.04.05.2.01	**Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**		
1.04.05.2.01.0002	Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp	26.901.493.969
1.04.05.2.01.0010	Sub. Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Rp	235.000.000

BAB IV
PENUTUP

Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 di lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun anggaran 2024 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2024 sudah mengacu kepada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2021-2026, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Semoga Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karimun tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT &
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
KARIMUN

MUHAMMAD ZULFAN, ST.M.M.
Pembina Utama Muda, IV-c
NIP.197005312000121003

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KONDISI AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA DAN PENDANAAN											
												2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	
										2020	2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18
1	Meningkatnya akses kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat yang merata								Rasio Jumlah KK yang terlayani infrastruktur dasar	**35,37%**	**35,88%**	**35,98%**	**11.758.550.000**	**36,62%**	**11.963.950.000**	**37,28%**	**13.354.400.000**	**37,95%**	**11.634.550.000**	**38,63%**	**11.832.950.000**	**38,63%**	**60.544.400.000**
		Meningkatnya Akses Infrastruktur Masyarakat di Kawasan Permukiman							Persentase permukiman yang tertata	**52,18%**	**52,20%**	**52,22%**	11.758.550.000	**52,24%**	11.963.950.000	**52,26%**	13.354.400.000	**52,29%**	11.634.550.000	**52,31%**	11.832.950.000	**52,31%**	60.544.400.000
			1	04	2			**Program Pengembangan Perumahan**	**Persentase rumah layak huni yang dibangun dikawasan bencana**	**0**	**0**	**0,02%**	**1.090.000.000**	**0,05%**	**1.140.000.000**	**0,09%**	**1.414.000.000**	**0,12%**	**1.466.000.000**	**0,17%**	**1.528.000.000**	**0,17%**	**6.638.000.000**
			1	04	2	2.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**jumlah rumah korban bencana yang ditangani**	**0**	**0**	**20**	**890.000.000**	**30**	**940.000.000**	**34**	**1.114.000.000**	**34**	**1.146.000.000**	**34**	**1.178.000.000**	**152**	**5.268.000.000**
			1	04	2	2.03	1	Rehabailitasi Rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi (unit rumah)	0	0	20	300.000.000	20	340.000.000	22	374.000.000	22	396.000.000	22	418.000.000	106	1.828.000.000
			1	04	2	2.03	03	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	luas lahan yang tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Ha)	0	0	1.000	240.000.000	1.000	250.000.000	1.000	260.000.000	1.000	270.000.000	1.000	280.000.000	5.000	1.300.000.000
			1	04	2	2.03	04	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota yang terbangun (unit rumah)	**0**	**0**	10	350.000.000	10	350.000.000	12	480.000.000	12	480.000.000	12	480.000.000	56	2.140.000.000
			1	04	2	2.06		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan**	**Jumlah izin yang diterbitkan**	**0**	**20**	**30**	**200.000.000**	**30**	**200.000.000**	**40**	**300.000.000**	**40**	**320.000.000**	**40**	**350.000.000**	**180**	**1.370.000.000**
			1	04	2	2.06	03	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	0	20	30	200.000.000	30	200.000.000	40	300.000.000	40	320.000.000	40	350.000.000	180	1.370.000.000

		1	04	3			**Program Kawasan Permukiman**	**Persentase Kawasan kumuh**	**0,69%**	**0,46%**	**0,36%**	**3.819.000.000**	**0,22%**	**4.595.000.000**	**0,22%**	**2.550.000.000**	**0,22%**	**2.645.000.000**	**0,22%**	**2.815.000.000**	**0,22%**	**16.424.000.000**
		1	04	3	2.01		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan**	**Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan**	**0**	**0**	**10**	**194.000.000**	**10**	**250.000.000**	**10**	-	**15**	-	**15**	**300.000.000**	**60**	**1.344.000.000**
		1	04	3	2.01	02	Penyusunan dan / atau Review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	Jumlah dokumen rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang tersusun dan/atau tereview	0	0	1	94.000.000	1	100.000.000	-	-	-	-	1	100.000.000	2	294.000.000
		1	04	3	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (laporan)	0	20	30	100.000.000	30	150.000.000	35	300.000.000	35	300.000.000	35	200.000.000	165	1.050.000.000
		1	04	3	2.02		**Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Jumlah Dokumen penataan kawasan permukiman kumuh**	**0**	**0**	**1**	**200.000.000**	**1**	**700.000.000**	**1**	**400.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**1.300.000.000**
		1	04	3	2.02	08	penyusunan/review/ legalisasi kebijakan bidang PKP	Jumlah Dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/Tereview/T erlegalisasi (Dokumen)	0	0	1	200.000.000	1	700.000.000	1	400.000.000	-	-	-	-	3	1.300.000.000
		1	04	3	2.03		***Peningkatan kualitas kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha***	**Luas kawasan kumuh yang ditingkatkan (Ha)**	**49,76**	**33,19**	**16,12**	**3.425.000.000**	**17,07**	**3.645.000.000**	**-**	**2.150.000.000**	**-**	**2.645.000.000**	**-**	**2.515.000.000**	**33,19**	**14.380.000.000**
		1	04	3	2.03	01	*Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh*	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh (Dokumen)	2 Dokumen	0	-	-	1	100.000.000	-	-	1	120.000.000	-	-	2	220.000.000
		1	04	3	2.03	02	*Perbaikan Rumah tidak Layak huni*	Jumlah Rumah tidak Layak huni yang diperbaiki (unit	2350	441	60	1.600.000.000	62	1.620.000.000	80	2.150.000.000	90	2.525.000.000	100	2.515.000.000	392	10.410.000.000
		1	04	3	2.03	06	*Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh*	luas kawasan kumuh yang diremajakan /dipugar (ha)	49,76	33,19	16,12	1.825.000.000	17,07	1.925.000.000	-	-	-	-	-	-	33,19	3.750.000.000
		1	04	3	2.03	07	*Pembangunan Rumah baru Layak huni*	Jumlah rumah baru layak huni yang dibangun (Unit)	0	0	20	200.000.000	21	230.000.000	25	250.000.000	30	300.000.000	35	350.000.000	131	1.330.000.000

Page 2

			1	04	05			**Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**	**Persentase rumah yang terfasilitasi PSU (jalan)**	**2,73**	**3,32**	**4,02**	**6.849.550.000**	**4,73**	**6.228.950.000**	**5,43**	**9.390.400.000**	**6,13**	**7.523.550.000**	**6,84**	**7.489.950.000**	**6,84**	**37.482.400.000**
			1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah rumah yang terlayani PSU	1940	2361	2.861	6.849.550.000	3.361	6.228.950.000	3.861	9.390.400.000	4.361	7.523.550.000	4.861	7.489.950.000	4.861	37.482.400.000
			1	04	05	2.01	02	*Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian*	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (lokasi)	15.020,52	23.203,82	28.037	6.589.550.000	32.504	5.958.950.000	38.568	9.110.400.000	44.061	7.233.550.000	49.528	7.189.950.000	49.528	36.082.400.000
			1	04	05	2.01	04	*verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang*	jumlah Dokumen kerja sama penyediaan /pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen)	1	1	15	260.000.000	15	270.000.000	5	280.000.000	5	290.000.000	5	300.000.000	45	1.400.000.000
			2	10	04			**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**Persentase sengketa tanah yang dimediasi**	**25%**	**50%**	**20%**	**200.000.000**	**40%**	**210.000.000**	**60%**	**230.000.000**	**80%**	**250.000.000**	**100%**	**300.000.000**	**100%**	**1.190.000.000**
			2	10	04	2.01		***Penyelesaian sengeketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota***	Jumlah laporan sengketa yang dimediasi	1	2	2	200.000.000	2	210.000.000	2	230.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	10	1.190.000.000
			2	10	04	2.01	02	*Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota*	Jumlah Berita acara hasil Mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota (BA)	1	2	2	200.000.000	2	210.000.000	2	230.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	10	1.190.000.000
			1	10	05			**Program Penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan**	**Presentase tanah yang diberi ganti rugi dan diberi santunan untuk pembangunan**	**0**	**0**	**-**	**200.000.000**	**25%**	**250.000.000**	**50%**	**260.000.000**	**75%**	**270.000.000**	**100%**	**280.000.000**	**100%**	**1.260.000.000**
			1	10	05	2.01		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah**	**Luas lahan yang diganti rugikan**	**0**	**20 Ha**	**-**	**-**	**5 Ha**	**250.000.000**	**5 Ha**	**260.000.000**	**5 Ha**	**270.000.000**	**5 Ha**	**280.000.000**	**20 Ha**	**1.260.000.000**
			1	10	05	2.01	02	*Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	5	10	200.000.000	10	250.000.000	10	260.000.000	10	270.000.000	10	280.000.000	50	1.260.000.000

Page 3

			2	10	10			**Program Penatagunaan Tanah**	**Persentase Luas tanah yang dilakukan penataan**	**0**	**19,78%**	**0,357805526**	**100.000.000**	**0,51779817**	**150.000.000**	**0,67779081**	**160.000.000**	**0,837783458**	**170.000.000**	**0,997776102**	**180.000.000**	**0,99777610**	**760.000.000**
			2	10	10	2.01		Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten / Kota	Luas tanah yang tertata	0	24.727,747	44.783,347	100.000.000	64.838,947	150.000.000	84.894,547	160.000.000	104.950,147	170.000.000	125.005,747	180.000.000	125.005,747	760.000.000
			2	10	10	2.01	03	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten /Kota*	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah kewenangan Kabupaten /Kota (Dokumen)	0	0	8	100.000.000	10	150.000.000	10	160.000.000	10	170.000.000	10	180.000.000	48	760.000.000
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik								Indeks Pelayanan Publik	2,75	2,90	3,01		3,50		3,51		3,55		4,00		4,00	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD							Nilai AKIP	70,44	72,80	75,00	5.641.450.000	77,30	5.813.550.000	79,80	5.588.362.000	80,20	7.021.353.000	83,50	7.824.092.000	83,50	31.888.807.000
			01					**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM**	**-**	**80%**	**82%**	**5.641.450.000**	85,00%	**5.813.550.000**	87,00%	**5.588.362.000**	90,00%	**7.021.353.000**	92,00%	**7.824.092.000**	92,00%	**31.888.807.000**
			01	2.01				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**-**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**255.000.000**	**7 Dokumen**	**280.000.000**	**8 Dokumen**	**310.000.000**	**8 Dokumen**	**340.000.000**	**8 Dokumen**	**390.000.000**	**39 Dokumen**	**1.575.000.000**
			01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	-	2 Dokumen - Renja - Renja RB	2 Dokumen - Renja - Renja RB	100.000.000	2 Dokumen - Renja - Renja RB	110.000.000	2 Dokumen - Renja - Renja RB	120.000.000	3 Dokumen - Renja - Renja RB	130.000.000	3 Dokumen - Renja - Renstra - Renja RB	150.000.000	11 Dokumen	610.000.000
			1	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen	-	3 Dokumen - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi	3 Dokumen - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi	80.000.000	3 Dokumen - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi	90.000.000	3 Dokumen - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi	100.000.000	3 Dokumen - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi	110.000.000	3 Dokumen - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi	120.000.000	15 Dokumen	500.000.000
			1	2.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang diadakan	-	2 Dokumen - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	2 Dokumen - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	75.000.000	2 Dokumen - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	80.000.000	3 Dokumen - Evaluasi Renja - Evaluasi	90.000.000	2 Dokumen - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	100.000.000	2 Dokumen - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	120.000.000	11 Dokumen	465.000.000
			1	2.02				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**-**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**2.954.000.000**	**1 Laporan**	**3.040.000.000**	**1 Laporan**	**3.155.000.000**	**1 Laporan**	**3.513.000.000**	**1 Laporan**	**3.870.000.000**	**5 Laporan**	**16.532.000.000**
			1	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	-	312 orang bulan (24 orang x 13 bulan)	312 orang bulan (24 orang x 13 bulan)	2.600.000.000	312 orang bulan (24 orang x 13 bulan)	2.700.000.000	312 orang bulan (24 orang x 13 bulan)	2.865.000.000	312 orang bulan (24 orang x 13 bulan)	3.200.000.000	312 orang bulan (24 orang x 13 bulan)	3.500.000.000	1560 Orang Bulan	14.865.000.000
			1	2.02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai	-	168 orang bulan (14 orang x 12 bulan)	168 orang bulan (14 orang x 12 bulan)	200.000.000	168 orang bulan (14 orang x 12 bulan)	220.000.000	168 orang bulan (14 orang x 12 bulan)	240.000.000	168 orang bulan (14 orang x 12 bulan)	260.000.000	168 orang bulan (14 orang x 12 bulan)	300.000.000	840 orang bulan (14 orang x 12 bulan)	1.220.000.000
			1	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah dokumen	-	2 Dokumen - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan	2 Dokumen - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan	154.000.000	2 Dokumen - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan	120.000.000	2 Dokumen - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan	50.000.000	2 Dokumen - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan	53.000.000	2 Dokumen - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan	70.000.000	10 Dokumen	447.000.000

| | | |

			1	2.07				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Jumlah Laporan**	-	1 Laporan	1 Laporan	**480.000.000**	1 Laporan	**511.000.000**	1 Laporan	**520.000.000**	1 Laporan	**550.000.000**	1 Laporan	**700.000.000**	5 Laporan	**2.761.000.000**
			1	2.07	05			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	-	-	20 unit	200.000.000	20 unit	220.000.000	20 unit	220.000.000	20 unit	230.000.000	20 unit	240.000.000	100 unit	1.110.000.000
			1	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	10 unit	100.000.000	10 unit	110.000.000	10 unit	110.000.000	10 unit	110.000.000	10 unit	200.000.000	50 Unit	630.000.000
			1	2.07	09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang di Sewa	-	-	2 unit	100.000.000	2 unit	100.000.000	2 unit	100.000.000	2 unit	100.000.000	2 unit	110.000.000	10 unit	510.000.000
			1	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana prasarana yang diadakan	-	-	2 unit	80.000.000	2 unit	81.000.000	2 unit	90.000.000	3 unit	110.000.000	3 unit	150.000.000	12 unit	511.000.000
			1	2.08				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	jumlah laporan	-		1 laporan	**610.000.000**	1 laporan	**671.000.000**	1 laporan	**197.000.000**	1 laporan	**843.000.000**	1 laporan	**949.000.000**	5 laporan	**3.270.000.000**
			1	2.08	01			*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Jumlah Materai	-	272 Lembar	272 Lembar	10.000.000	272 Lembar	11.000.000	272 Lembar	12.000.000	272 Lembar	13.000.000	272 Lembar	14.000.000	1360 Lembar	60.000.000
			1	2.08	02			*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	Jumlah tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	36 bukti pembayaran (3 tagihan x 12 bulan)	36 bukti pembayaran (3 tagihan x 12 bulan)	15.000.000	36 bukti pembayaran (3 tagihan x 12 bulan)	20.000.000	36 bukti pembayaran (3 tagihan x 12 bulan)	25.000.000	36 bukti pembayaran (3 tagihan x 12 bulan)	30.000.000	36 bukti pembayaran (3 tagihan x 12 bulan)	35.000.000	180 Bukti Pembayaran	125.000.000
			1	2.08	03			*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan*	Jumlah penyediaan jasa	-	15 Jenis	15 Jenis	85.000.000	15 Jenis	90.000.000	15 Jenis	100.000.000	15 Jenis	150.000.000	15 Jenis	200.000.000	75 Jenis	625.000.000
			1	2.08	04			*Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor*	Jumlah Pegawai Non ASN	-	364 orang bulan (28 orang x 13 bulan)	364 orang bulan (28 orang x 13 bulan)	500.000.000	364 orang bulan (28 orang x 13 bulan)	550.000.000	364 orang bulan (28 orang x 13 bulan)	60.000.000	364 orang bulan (28 orang x 13 bulan)	650.000.000	364 orang bulan (28 orang x 13 bulan)	700.000.000	1820 orang bulan	2.460.000.000
			1	2.09				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	**155.000.000**	1 Laporan	**165.000.000**	1 Laporan	**175.000.000**	1 Laporan	**186.000.000**	1 Laporan	**195.000.000**	5 Laporan	**876.000.000**
			1	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	-	4 Unit	4 Unit	50.000.000	4 Unit	50.000.000	4 Unit	50.000.000	4 Unit	51.000.000	4 Unit	50.000.000	4 Unit	251.000.000
			1	2.09	05			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	-	-	5 Jenis	50.000.000	5 Jenis	55.000.000	5 Jenis	60.000.000	5 Jenis	65.000.000	5 Jenis	70.000.000	5 Jenis	300.000.000
			1	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	-	5 Jenis	55.000.000	5 Jenis	60.000.000	5 Jenis	65.000.000	5 Jenis	70.000.000	5 Jenis	75.000.000	5 Jenis	325.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KARIMUN 2024

KATA PENGANTAR

Atas karunia dan hidayahnya kami panjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun Tahun 2024 mempunyai arti strategis karena di dalamnya memuat uraian program dan kegiatan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2025 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (Renja) ini disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun Tahun 2022-2026 dan merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan, juga merupakan rangkaian kegiatan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, dan merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan pelayanan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun.

Rencana Kerja (Renja) yang tersusun ini masih jauh dari sempurna sehingga diperlukan ketelitian, kecermatan dan pengkajian yang lebih mendalam, karena adanya pengembangan kegiatan organisasi serta aspek-aspek yang belum tercakup.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun yang dapat kami sampaikan dengan harapan adanya saran, petunjuk dan usulan sehingga Rencana Kerja (Renja) ini representative dan lebih baik.

Tanjung Balai Karimun, Maret 2024

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KARIMUN,

H. SUWEDI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651129 198602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR TABEL v
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.3.1 Maksud 6
1.3.2 Tujuan 7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 8
BAB II 9
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 9
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 28
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 58
BAB III 59
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 59
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 59
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Damkar 59
3.2.1. Tujuan 60
3.2.2. Sasaran 60
3.3. Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 64
3.3.1 Program Kerja Tahun 2023 64
3.2.2. Perencanan Kegiatan Tahun 2023 65
BAB IV 83

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 83
PERANGKAT DAERAH 83
BAB V 100
P E N U T U P 100
5.1 Catatatan Penting Dalam Penyusunan Renja 100
5.2 Kaidah- kaidah Pelaksanaan 100
5.3 Rencana Tindak Lanjut 101

DAFTAR TABEL

Table 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA BPBD-Damkar Kabupaten Karimun Tahun 2022 17

Table 2.2. Evaluasi dan analisa capaian kinerja BPBD-Damkar Kabupaten Karimun 26

Table 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Karimun 36

Table 3.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun 61

Table 3.2 Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Desa Kabupaten Karimun 62

Table 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Karimun 66

Table 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun 85

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun merupakan satuan Perangkat Daerah Kabupaten Karimun yang masuk Urusan Wajib terkait dengan Pelayanan Dasar.

Daerah wajib mendukung upaya penanggulangan bencana dan **menjadikan wilayahnya menjadi tangguh bencana.**

Karena itu **mengintegrasikan PRB dalam Perencanaan Daerah** merupakan upaya sinergi antara kegiatan pembangunan dan penanggulangan bencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Unit Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran adalah lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penanggulangan bencana daerah, pemadam kebakaran dan penyelamatan, pencegahan dan penanggulangan bahaya bencana daerah, pemadam kebakaran dan penyelamatan, unsur pelaksana tugas tertentu di bidang Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran dan penyelamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran mempunyai Fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana daerah dan penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efektif dan efisien; dan

b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
c. Perumusan dan penetapan kebijakan pemadam kebakaran dan penyelamatan serta penanganan kebakaran secara cepat, tepat, efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat:
c. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik;
d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
f. Jabatan Fungsional.

KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah, pemadam kebakaran dan penyelamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah;

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah dan pemadam kebakaran serta penyelamatan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran serta penyelamatan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana daerah, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalakasanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanggulangan bencana daerah, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
c. Membina dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana daerah, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
d. Melaksanakan administrasi umum meliputi ketatalakasanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
e. Melakukan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah, pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 3902), yag telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Wantan Singingi dan

Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
15. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun 2006-2025;
22. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan RPJPD;
23. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Karimun Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022(Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 41);
26. Peraturan Bupati Karimun Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022

1.3 Maksud dan Tujuan

Seperti tercantum pada pasal 7 ayat (1) dan pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tupoksi SKPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, yang setiap tahunya sebagai pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan antar lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi maupun

Kabupaten/Kota serta bidang-bidang pada BPBD-Damkar Kabupaten Karimun sehingga dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya yang tersedia.

Renja BPBD-Damkar sebagai wujud dukungan kinerja untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun agar dalam pelaksanaannya dapat lebih terarah dan terukur.

Rencana Kerja (RENJA) ini juga merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode 1 (satu) tahun yang diambil dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun.

1.3.2 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Karimun secara keseluruhan. Dimana dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan proses jangka pendek yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang didalamnya memuat seluruh rencana atau target kinerja yang ingin dicapai yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis (Strategic Performance Indikators).

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatkan Pengelolaan dan Kelestarian Lingkumgan Hidup;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-Damkar) Kabupaten Karimun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud Dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Peranggkat Daerah
2.2 Analisa Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menguraikan catatan yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun 2021-2026 Tanggal 22 Desember 2021 menjadi pedoman bagi segenap jajaran lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun dalam menyusun Rencana Kerja pada setiap tahun.

Sebagaimana Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dalam implementasinya, regulasi yang ada menemui beberapa kendala baik dari sisi perencanaan dan pelaksanaannya. Sebagai contoh hasil pemutakhiran perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan dalam Permendagri No. 90/2019 Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 50/2020 belum mengakomodir program strategis daerah.

Setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan dengan mengukur realisasi capaian-capaian target perencanaan yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis (RENSTRA). Oleh karena itu Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun ini juga dievaluasi berdasarkan realisasi capaian-capaian target program/kegiatan dari tahun lalu.

Dalam pengelolaan belanja daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun mendapat alokasi

anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 5.867.697.844,- (lima milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri dari :

Belanja Pegawai	Rp. 3.727.304.937,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.855.395.772,-
Belanja Hibah	Rp. 0,-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 284.997.135,-

Adapun realisasi pada pos belanja tidak langsung dan belanja langsung belum terealisasi Karena OPD Baru :

a. Belanja Pegawai	Rp. 3.443.878.790,-
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.477.656.793,-
c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 182.987.390,-

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun tahun 2025 juga dipengaruhi oleh diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Dengan diberlakukannya Peraturan tersebut diatas Program dan kegiaatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran yang dilaksanakan mengalami beberapa perubahan nomenklatur yang dirampingkan menjadi 3 Program dengan 2 Program Utama dan 1 Program Penunjang

Adapun Program Utama yang telah dilakasanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun Adalah sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Sedangkan 1 (satu) Program sebagai pendukung program utama yang telah dijalankan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun Adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Berikut adalah analisis pada masing – masing program utama :

1. Program Penanggulangan Bencana

Pagu Anggaran Program ini sebesar (Rp). 529.079.535,- dengan Realisasi (Rp) 330.850.372,-. Indikator Outcome nya adalah Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana. Dengan persentase capaian pada program ini 62,53%. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

1. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/ kota. Indikator Output kegiatannya Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komonikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yg ada dikawasan tempat tinggal nya. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 99,17%.
2. Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota. Indikator Output kegiatannya Persentase tersusunnya kajian resiko terhadap bencana Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 52,53%.
3. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota. Indikator Output kegiatanya Persentase warga yang memperloleh layanan pencegahan/ kesiapsiagaan terhadap bencana Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 21,88%.
4. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit. Indikator Output kegiatannya Jumlah laporan koordinasi Respon Cepat Bencana

Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 90,84%.

5. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kab/ kota. Indikator Output kegiatannya Jumlah korban bencana yg mendapat distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 51,44%.

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Pagu Anggaran Program ini sebesar (Rp). 221.577.391,- dengan Realisasi (Rp). 187.351.440,-. Indikator Outcome nya adalah Tingkat waktu tanggap penanganan kebakaran (respon time). Dengan persentase capaian pada program ini berdasarkan realisasi program yang di bandingkan dengan target program adalah 84,55 % Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten. Indikator Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalan daerah Kab/Kota. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 39,69%.
2. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri. Output kegiatan ini adalah Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakarean dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 98.62%.
3. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota indikator Output ini adalah Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan

kesiapsiagaan terhadap bencana. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 88,06%.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu Anggaran Program ini sebesar (Rp).5.117.040.918,- dengan Realisasi (Rp). 4.584.262.461,- Indikator Outceme nya adalah SKM (Standar Pelayanan Masyarakat). Dengan persentase capaian pada program ini berdasarkan realisasi program yang di bandingkan dengan target program adalah 89.59%. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Indikator Output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 58.76%.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Indikator Output kegiatan ini adalah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 87,91%.
3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Indikator Output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 75%.
4. Penyediaan Gaji dan Tunjanagn ASN. Indikator Output kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang mnerima gaji dan tunjangan ASN. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 93.23%.
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator Output kegiatan ini adalah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah . Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 43,25%.

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Indikator Output kegiatan ini adalah Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 7.57%.
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Indikator Output kegiatan ini adalah Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 65.75%.
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Indikator Output kegiatan ini adalah Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 51.61%.
9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan . Indikator Output kegiatan ini adalah Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 23.84%.
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Indikator Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 72.73%.
11. Pengadaan Mebel. Indikator Output kegiatan ini adalah Jumlah paket mebel yang disediakan. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 0%.
12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Indikator Output kegiatan ini adalah Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 57.83%.
13. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Indikator Output kegiatan ini adalah Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya

yang disediakan. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 87.75%.

14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Indikator Output kegiatan ini adalah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 84.30%.
15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Indikator Output kegiatan ini adalah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 93.05%.
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan . Indikator Output kegiatan ini adalah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan ealisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 60.42%.
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Indikator Output kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 84.94%.
18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Indikator Output kegiatan ini adalah Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dalam pemeliharaan. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 0%.
19. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan. Indikator Output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Bahan Bacaan/ Peraturan Perundang-undangan. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 0%.

Adapun dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja ini memperhatikan beberapa unsur pokok lain, yaitu:

a. Masalah-masalah yang dihadapi;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran-sasaran prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya;
e. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai entri point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
f. Memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) dan capaian Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat dari berbagai indikator yang direkap melalui tabel 2.1 berikut:

Table 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA BPBD dan Damkar Kabupaten Karimun Tahun 2023

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN		KELUARAN (OUTPOT)	HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)	PERMASALAHAN	UNIT KERJA
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
I.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Tercapainya Waktu Tanggap (Response Time) Pemadaman Kebakaran	20 Menit	221.577.391,-	187.351.440,-	84.55 %		
	A	Pencegahan, Pengendalian, dan Penaganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabuparen/Kota	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	72.50					
	1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalan daerah Kab/Kota	1 Laporan	34.999.633,-	13.892.800,-	39.69 %	-	BPBD

	2	Pengadaaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penaggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakarean dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	10 Unit	86.746.890,-	85.550.870,-	98.62%		
	3	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kab/Kota	1 Dokumen	99.830.868,-	87.907.770,-	88.06%		
II.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	18%	529.079.535,-	330.850.372,-	62.53%		
	B	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	15%				-	BPBD

	1	Sosialisasi, Komonikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komonikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yg ada dikawasan tempat tinggal nya	50 Orang	4.771.757,-	4.732.000,-	99.17%		
	2	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	248.652.965,-	130.617.759,-	52.53%		
	C	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	40%					
	1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban bencana yg mendapat distribusi logistik penyelamatan dan	20 Orang	128.705.655,-	66.201.413,-	51.44 %		

			evakuasi korban bencana						
	2	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK penetapan status darurat bencana dan SKPOB yg ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan epidemiologi terpadu	1 Dokumen	140.870.358,-	127.969.200,-	90.84%		
	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	40 Orang	6.078.800,-	1.330.000,-	21,88%		
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		SKM	80%	5.117.040.918,-	4.584.262.461,-	89.59 %		
	D	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah Dokumen	4 Dokumen				-	BPBD
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	61.965.450,-	36.412.300,-	58.76%		

	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	20.056.393,-	17.631.458,-	87.91%		
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	16.727.849,-	7.235.368,-	43.25%		
	E	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumah Laporan	1 Laporan					
	1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil pentediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	84.168.000,-	63.126.000,-	75%		
	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang mnerima gaji dan tunjangan ASN	504 Orang	3.604.525.937,-	3.360.513.790,-	93.23%		
	F	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	1 Laporan					
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan	10 Paket	3.965.400,-	300.000,-	7.57%		

			bangunan kantor yang disediakan						
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Paket	24.986.667,-	16.428.918,-	65.75%		
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 Paket	6.999.253,-	3.612.000,-	51.61%		
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	6.999.306,-	1.668.450,-	23.84%	-	BPBD
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan/ Peraturan Perundang-undangan	5 Dokumen	,-	,-	0%	-	BPBD
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	75.788.000,-	55.118.657,-	72.73%		
	G	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	1 Laporan					
	1	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	3 Paket	52.512.500,-	0,-	0%		
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin	4 Unit	64.255.635,-	37.156.000,-	57.83%		

			Lainnya yang disediakan						
	3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	90.000.000,-	78.979.000,-	87.75%		
	H	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	1 Laporan					
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	19.999.128,-	16.859.050,-	84.30%		
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	803.100.000,-	747.320.000,-	93.05%		
	I	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan	1 Laporan				-	BPBD
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	30.985.000,-	18.720.470,-	60.42 %	-	BPBD
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan dinas operasional	4 Unit	145.016.400.-	123.181.000.-	84.94%		

		Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya						
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang termasuk dalam pemeliharaan	5 Unit	4.990.000.-	0.-	0%		
	J U M L A H				**5.867.697.844,-**	**5.102.464.273,-**	**86.96%**		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk masing-masing indikator sasaran. Dengan analisis ini dapat dilakukan sasaran mana yang tidak dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan di masa mendatang.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kelurahan/Desa. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksankan

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategi 2022-2026 dapat diuraikan berdasarkan indikator sasaran pada masing tujuan sebagai berikut:

Table 1.2. Evaluasi dan analisa capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun

Tabel 2.2.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun

No.	Sasaran		Indikator Kerja		Target Renstra BPBD-Damkar					Realisasi Capaian				Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	1	Peningkatan,Kesiapsiagaan, Penanganan Tanggap Darurat, Dengan Mengoptimalkan Tiga Pilar, yaitu Pemerintah,	1	Tingkat Waktu Tanggap Penanganan Kebakaran (Respon Time)	20 Menit	20 Menit	20 Menit	20 Menit	20 Menit					

		Masyarakat dan Dunia Usaha											
	2	Terwujudnya Wilayah Tangguh Bencana	2	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07					
	3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	1	Nilai AKIP .	70.00	70.00	70.30	70.40	**70.50**	-				
			2	Level Kematangan MR BPBD dan Damkar			**3**							

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Unit Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran adalah lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penanggulangan bencana daerah, pemadam kebakaran dan penyelamatan, pencegahan dan penanggulangan bahaya bencana daerah, pemadam kebakaran dan penyelamatan, unsur pelaksana tugas tertentu di bidang Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran dan penyelamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran mempunyai Fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana daerah dan penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
c. Perumusan dan penetapan kebijakan pemadam kebakaran dan penyelamatan serta penanganan kebakaran secara cepat, tepat, efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :

KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah, pemadam kebakaran dan penyelamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah;

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah dan pemadam kebakaran serta penyelamatan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran serta penyelamatan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana daerah, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalakasanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
c. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
d. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Sekretaris, membawahi :

a. *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan*
b. *Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.*

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

BIDANG PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN, KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan rencana kerja lingkup bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik;
b. Perumusan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik;
c. Penyelenggaraan dan pengkordinasian pencegahan dan mitigasi bencana;
d. Pelaksanaan analisis penyusunan, penetapan, dan penginformasian data potensi sumber bahaya atau ancaman dan resiko bencana;
e. Pengembangan dan mengkordinasikan upaya pengurangan resiko bencana;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik Membawahi :

a. Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagan
b. Seksi Kedaruratan dan Logistik an dan Logistik.

BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijaksanaan dan mengoordinasikan kegiatan penyusunan program kerja dan anggaran, menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka koordinasi bidang rehabilitasi dan rekontruksi;
b. Pelaksanaan penyusunan program fasilitasi kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi;
c. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitas dan rekontruksi;
d. Pelaksanaan upaya pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat bencana;
e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi , membawahi:

a. Seksi Rehabilitasi; dan
b. Seksi Rekonstruksi.

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin, membina dan mengendalikan tugas–tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pemadaman serta penyelamatan di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan, penentuan rencana operasi dan komunikasi pemadaman dan penyelamatan, serta penyelenggaraan command center;
b. Penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten, pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kabupaten, serta penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan kondisi membahayakan manusia/operasi darurat non kebakaran;
c. Penyelenggaraan evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran dan terdampak kebakaran dan operasi darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia, serta verifikasi factual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran dan kondisi membahayakan manusia; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahi:

a. Seksi Pencegahan, Investigasi dan Kerjasama; dan
b. Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok jabatan fungsional di lingkungan BPBD dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menunjang tugas pokok BPBD sesuai dengan kompetensi dan keahliannya masing-masing.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD dan Pemadam Kebakaran.

(3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang kompetensi dan keahliannya.

(4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;

(5) Pembinaan terhadap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi ada beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi yaitu:

Aspek permasalahan dan hambatan yang dihadapi dari dalam merupakan ***Faktor Internal*** yaitu:

1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) BPBD di Daerah belum menjadi tolak ukur
2. Program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar Penanggulangan Bencana belum menjadi prioritas (Permendagri Nomor 101 Tahun 2018

Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota)

3. Geografis Kabupaten Karimun yang terdiri dari 81% lautan dan hanya 19% daratan, sehingga Upaya dan Tindakan yang diambil saat terjadi bencana disesuaikan dengan Musim, Cuaca dan Tinggi Gelombang Laut.
4. Kejadian Bencana yang berbeda dengan daerah lainnya (Bahwa Bencana Alam di Kabupaten Karimun dikategorikan Sedang, namun jika dikaji secara mendalam Bencana Non Alam dan Sosial cukup Tinggi)
5. Keterbatasan SDM, Peralatan dan Logistik yang sesuai dengan Geografis Daerah.

Aspek permasalahan dan hambatan yang dihadapi dari luar merupakan ***Faktor Eksternal*** yaitu:

1. Koordinasi Antara Provinsi dan Daerah belum maksimal sehingga kerjasama antar BPBD Provinsi dan BPBD kab/kota belum optimal
2. Sulitnya Koordinasi dengan Instansi Terkait jika terjadi Bencana dikarenakan belum terbentuknya BPBD di beberapa Kabupaten/Kota
3. Belum terkoneksinya Jaringan Komunikasi Radio (HT dan SSB) sehingga Roll Call antara POSKO TRC Provinsi - Kabupaten/Kota belum dapat dilaksanakan dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang cepat dan akurat.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. RKPD merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). RKPD tersusun melalui beberapa mekanisme perencanaan yaitu melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota termasuk Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Forum SKPD). Dalam hal penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun Tahun 2024 mengacu pada RKPD Kabupaten Karimun prioritas pembangunan sebagai berikut:

Berikut rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal OPD yang lengkap dengan lokasi, Indikator Kinerja, Besaran Target/Tolak Ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Karimun

Table 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Karimun

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tercapainya Waktu Tanggap (Response Time) Pemadaman Kebakaran	Kabupaten Karimun	20 Menit	150.000.000	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap penanganan kebakaran (respon time)	Kabupaten Karimun	20 Menit	190.000.000	
A	Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan,dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Kabupaten Karimun	72.50	130.000.000	Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan,dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Kabupaten Karimun	72.50	170.000.000	

1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota setiap tahunnya	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	40.000.000	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota setiap tahunnya	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	40.000.000	
2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalan daerah Kab/Kota	Kabupaten Karimun	1 Laporan	30.000.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalan daerah Kab/Kota	Kabupaten Karimun	1 Laporan	50.000.000	
3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	30.000.000	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	30.000.000	

		Kesiapsiagaan Petugas Piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran					Kesiapsiagaan Petugas Piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran				
4	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakarean dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	Kabupaten Karimun	10 unit	30.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakarean dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	Kabupaten Karimun	10 unit	50.000.000	

5	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Kabupaten Karimun	20 Orang	-	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Kabupaten Karimun	20 Orang	0	
B	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase laporan kejadian kebakaran	Kabupaten Karimun	90%	20.000.000	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase laporan kejadian kebakaran	Kabupaten Karimun	90%	20.000.000	
1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	20.000.000	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan meliputi	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	20.000.000	

		meliputi penelitian dan pengujian dan penelitian					penelitian dan pengujian dan penelitian				
II	Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana		18%	200.000.000	Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana		18%	230.000.000	
C	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/ kota	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kabupaten Karimun	15%	50.000.000	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/ kota	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kabupaten Karimun	5%	55.000.000	
1	Penyusunan Kajian resiko bencana kabupaten/kota	Jumlah dokumen kajian resiko bencana yang	Kabuaten Karimun	1 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Kajian resiko bencana kabupaten/kota	Jumlah dokumen kajian resiko bencana yang	Kabuaten Karimun	1 Dokumen	25.000.000	

		dilegalisasi					dilegalisasi				
2	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/ kota (per jenis bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komonikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yg ada dikawasa	Kabupaten Karimun	50 Orang	25.000.000	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/ kota (per jenis bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komonikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yg ada dikawasan	Kabupaten Karimun	50 Orang	30.000.000	

		n tempat tinggal nya					tempat tinggal nya				
D	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga yang memperloleh layanan pencegahan/ kesiapsiagaan terhadap bencana	Kabupaten Karimun	18 %	40.000.000	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga yang memperloleh layanan pencegahan/ kesiapsiagaan terhadap bencana	Kabupaten Karimun	18 %	55.000.000	
1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kabupaten Karimun	50 Orang	20.000.000	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kabupaten Karimun	50 Orang	25.000.000	
2	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yg di tingkatkan kapasitasnya dalam	Kabupaten Karimun	3 Kawasan	20.000.000	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yg di tingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan	Kabupaten Karimun	3 Kawasan	30.000.000	

		pencegahan dan kesiapsiagaan bencana					kesiapsiagaan bencana				
E	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga yang memperloleh layanan evakuasi terhadap bencana	Kabupaten Karimun	40%	100.000.000	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga yang memperloleh layanan evakuasi terhadap bencana	Kabupaten Karimun	40%	110.000.000	
1	Respon cepat Kejadian Luar biasa Penyakit/ wabah Zonosis Prioritas	Jumlah Dokumen yang disusun dan dievaluasi		1 Laporan	20.000.000	Respon cepat Kejadian Luar biasa Penyakit/ wabah Zonosis Prioritas	Jumlah Dokumen yang disusun dan dievaluasi		1 Laporan	20.000.000	
2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	20.000.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	30.000.000	
3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Jumlah korban yg berhasil ditemukan, ditolong	Kabupaten Karimun	40 Orang	20.000.000	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Jumlah korban yg berhasil ditemukan, ditolong dan	Kabupaten Karimun	40 Orang	20.000.000	

		dan dievakuasi per jenis kejadian bencana					dievakuasi per jenis kejadian bencana				
4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kab/ kota	**Jumlah korban bencana yg mendapat distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	Kabupaten Karimun	20 Orang	20.000.000	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kab/ kota	**Jumlah korban bencana yg mendapat distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	Kabupaten Karimun	20 Orang	20.000.000	
5	Respon cepat bencana non alam epidemi / wabah penyakit	SK penetapan status darurat bencana dan SKPOB yg ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan investiga	Kabupaten Karimun	**1 Dokumen**	20.000.000	Respon cepat bencana non alam epidemi / wabah penyakit	SK penetapan status darurat bencana dan SKPOB yg ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan	Kabupaten Karimun	**1 Dokumen**	20.000.000	

		si KLB dan epidemiologi terpadu					epidemiologi terpadu				
F	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		Kabupaten Karimun		10.000.000	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		Kabupaten Karimun		10.000.000	
1	Penanganan pasca bencana kabupaten/ kota	**Tersedianya Dokumen Penaganan Pasca Bencana Kab/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan RekonstruksiPasca Bencana (R3P)**	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	10.000.000	Penanganan pasca bencana kabupaten/ kota	**Tersediannya Dokumen Penaganan Pasca Bencana Kab/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan RekonstruksiPasca Bencana (R3P)**	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	10.000.000	
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	SKM	Kabupaten Karimun	80%	7.152.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	SKM	Kabupaten Karimun	80%	6.844.500.000	

	PEMERINTAHAN DAERAH					PEMERINTAHAN DAERAH					
G	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Kabupaten Karimun	7 Dokumen	51.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Kabupaten Karimun	7 Dokumen	51.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Karimun	2 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Karimun	2 Dokumen	20.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDPenyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar**	Kabupaten Karimun	**3 Laporan**	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDPenyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	Kabupaten Karimun	**3 Laporan**	20.000.000	

		Realisasi Kinerja SKPD									
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kabupaten Karimun	**2 Laporan**	11.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kabupaten Karimun	**2 Laporan**	11.000.000	
H	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan**	Kabupaten Karimun	**1 Laporan**	3.614.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan**	Kabupaten Karimun	**1 Laporan**	3.594.000.000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Jumlah Orang yang mnerima gaji dan tunjangan ASN**	Kabupaten Karimun	**504 Orang**	3.414..000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Jumlah Orang yang mnerima gaji dan tunjangan ASN**	Kabupaten Karimun	**504 Orang**	3.414..000.000	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Jumlah dokumen hasil pentediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN**	Kabupaten Karimun	**1 Dokumen**	125.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Jumlah dokumen hasil pentediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN**	Kabupaten Karimun	**1 Dokumen**	125.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	**Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semestera**	Kabupaten Karimun	**1 Laporan**	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu	**Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran**	Kabupaten Karimun	**1 Laporan**	55.000.000	

	Semesteran SKPD	**n SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD**				lanan/ Semesteran SKPD	**SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD**				
I	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan**	Kabupaten Karimun	**1Laporan**	20.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan**	Kabupaten Karimun	**1Laporan**	33.000.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kabupaten Karimun	2 Paket	10.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kabupaten Karimun	2 Paket	15.000.000	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidika	Kabupaten Karimun	2 Orang	5.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kabupaten Karimun	2 Orang	10.000.000	

		n dan pelatihan									
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang ynag mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Karimun	2 Orang	5.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang ynag mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Karimun	2 Orang	8.000.000	
J	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	204.400.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	177.000.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang	Kabupaten Karimun	10 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kabupaten Karimun	10 Paket	5.000.000	

		disediakan									
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Karimun	20 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Karimun	20 Paket	50.000.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kabupten Karimun	10 Paket	7.200.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kabupten Karimun	10 Paket	7.500.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kabupaten Karimun	3 Paket	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kabupaten Karimun	3 Paket	25.000.000	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggan	Kabupaten Karimun	5 Paket	9.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggand	Kabupaten Karimun	5 Paket	9.000.000	

		daan yang disediakan					aan yang disediakan				
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan/ Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Karimun	5 Dokumen	31.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan/ Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Karimun	5 Dokumen	15.000.000	
7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kabupaten Karimun	5 Paket	3.100.000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kabupaten Karimun	5 Paket	3.000.000	
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kabupaten Karimun	1 Laporan	2.800.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kabupaten Karimun	1 Laporan	2.500.000	
9	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	70.000.000	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	60.000.000	

K	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan**	Kabupaten Karimun	1 Laporan	2.260.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan**	Kabupaten Karimun	1 Laporan	1.990.000.000	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan**	Kabupaten Karimun	1 unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan**	Kabupaten Karimun	I unit	0	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan**	Kabupaten Karimun	1 Unit	2.000.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan**	Kabupaten Karimun	1 Unit	1.750.000.000	
3	Pengadaan Mebel	**Jumlah paket mebel yang disediakan**	Kabupaten Karimun	7 Paket	100.000.000	Pengadaan Mebel	**Jumlah paket mebel yang disediakan**	Kabupaten Karimun	7 Paket	90.000.000	

4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan**	Kabupaten Karimun	4 unit	70.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan**	Kabupaten Karimun	4 unit	60.000.000	
5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Jumlah unit pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan**	Kabupaten Karimun	2 Unit	90.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Jumlah unit pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan**	Kabupaten Karimun	2 Unit	90.000.000	
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya yang disediakan**	Kabupaten Karimun	4 unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya yang disediakan**	Kabupaten Karimun	4 unit	0	
L	Penyedian Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	812.100.000	Penyedian Jasa Penunjang	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	811.500.000	

	Pemerintah Daerah					Urusan Pemerintah Daerah					
1	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Jumlah laporan penyadiaan jasa surat menyurat**		**1 Laporan**	**1.600.000**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Jumlah laporan penyadiaan jasa surat menyurat**		**1 Laporan**	**1.500.000**	
2	**Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan**	Kabupaten Karimun	**3 Laporan**	**50.000.000**	**Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan**	Kabupaten Karimun	**3 Laporan**	**50.000.000**	
3	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Jumlah laporan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan**	Kabupaten Karimun	**1 Laporan**	**8.500.000**	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Jumlah laporan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan**	Kabupaten Karimun	**1 Laporan**	**8.000.000**	
4	**Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan**	Kabupaten Karimun	**1 Laporan**	**752.000.000**	**Penyedian Jasa Pelayanan**	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan**	Kabupaten Karimun	**1 Laporan**	**752.000.000**	

		Umum Kantor yang disediakan				Umum Kantor	Umum Kantor yang disediakan				
M	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	190.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	188.000.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kabupaten Karimun	1 Unit	13.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kabupaten Karimun	1 Unit	13.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Kabupaten Karimun	4 Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Kabupaten Karimun	4 Unit	100.000.000	

	Dinas Operasional atau Lapangan	dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya				Dinas Operasional atau Lapangan	dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya				
3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kabupaten Karimun	2 unit	6.000.000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kabupaten Karimun	2 unit	6.000.000	
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kabupaten Karimun	5 Unit	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kabupaten Karimun	5 Unit	5.000.000	
5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kabupaten Karimun	1 Unit	47.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kabupaten Karimun	1 Unit	45.000.000	

6	**Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara / direhabilitasi**	**Kabupaten Karimun**	**1 Unit**	**9.500.000**	**Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara / direhabilitasi**	**Kabupaten Karimun**	**1 Unit**	**9.500.000**	
7	**Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Jumlah sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara / direhabilitasi**	**Kabupaten Karimun**	**1 unit**	**9.500.000**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Jumlah sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara / direhabilitasi**	**Kabupaten Karimun**	**1 unit**	**9.500.000**	

	JUMLAH				7.502.000.000					7.264.500.000	

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan. Dari hasil Forum SKPD dilakukan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format Rencana Kerja RKPD bagi setiap SKPD. Dalam keadaan terdapat usulan masyarakat yang mendesak dan belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap SKPD yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD. Sehingga rancangan RKPD merupakan integrasi dan harmonisasi antara rancangan awal RKPD dengan rancangan RENJA SKPD yang telah mendapatkan konfirmasi dan review dari setiap SKPD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan dalam melaksanakan tugas, kegiatan dan program di bidang pembangunan di Kabupaten Karimun selama ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun berpedoman dan mengacu kepada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

Berikut adalah arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun :

- Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
- Peningkatan Sapras Pemadam dan Proteksi Kebakaran yang berstandar

- Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran
- Peningkatan Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
- Peningkatan Upaya Penanganan Saat Bencana
- Peningkatan Upaya Penanganan Pasca Bencana

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Damkar

Sehubungan dengan susunan organisasi, tugas dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Karimun, maka rumusan tujuan dan sasaran yang terdapat pada RENSTRA Tahun 2022-2026. Perubahan tersebut mempengaruhi rumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Berikut merupakan rumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (RENJA) atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun:

3.2.1 Tujuan

1. Meningkatkan Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup;
2. Meningkatkan Kualitas Pelaynan Publik;

3.2.2. Sasaran

1. Peningkatan Kesiapsiagaan, Penanganan Tanggap Darurat, Dengan Mengoptimalkan Tiga Pilar yaitu Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha;
2. Terwujudnya Wilayah Tangguh Bencana;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-Damkar) Kabupaten Karimun

Table 3.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	Target 2024
1.	Meningkatkan Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Peningkatan Kesiapsiagaan, Penanganan Tanggap Darurat, Dengan Mengoptimalkan Tiga Pilar Yaitu Pemerintah, Masyarakat, Dan Dunia Usaha	Tingkat Waktu Tanggap Penanganan Kebakaran (Respon Time)	**20 Menit**
2	Penyelenggaraan Wilayah Tangguh Bencana	Terwujudnya Wilayah Tangguh Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	**0,05**
2.	Penyelenggaraan Kualitas Akuntabilitas Kinerjs OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD.	Nilai AKIP	**70.30**
			Level Kematangan MR BPBD dan Damkar	**3**

Tabel 3.2
MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BADAN PENANGGULANAGN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KARIMUN

Table 3.2 Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun

NO	VISI DAN MISI KABUPATEN KARIMUN	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Visi : Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman Dan Taqwa Misi 4 : Meningkatkan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Peningkatan Kesiapsiagaan, Penangan Tanggap Darurat, Dengan Mengoptimalkan Tiga Pilar Yaitu Pemerintah, Masyarakat, Dan Dunia Usaha	➢ Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran.	➢ Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran ➢ Peningkatan Sapras Pemadam dan Proteksi Kebakaran yang berstandar ➢ Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran
			Terwujudnya Wilayah Tangguh Bencana	➢ Pningkatkan Kualitas Penanganan Bencana	➢ Peningkatan Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana ➢ Peningkatan Upaya Penanganan

					Saat Bencana ➢ Peningkatan Upaya Penanganan Pasca Bencana
2	Misi 5 : Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	➢ Meningkatkan Kinerja Pelayanan BPBD-Damkar Kabupaten Karimun	➢ Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur BPBD-Damkar Kabupaten Karimun. ➢ Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur BPBD-Damkar Kabupaten Karimun. ➢ Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja BPBD-Damkar Kab.Karimun
					➢ Peningkatan SDM Aparatur BPBD-Damkar Kab.Karimun

3.3. Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025

Dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun menetapkan Program dan kegiatan sebagai berikut:

3.3.1 Program Kerja Tahun 2025

Program–program yang dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun Tahun 2025 merupakan program yang terkait dengan sasaran dalam dokumen RENSTRA dan usulan langsung dari masyarakat. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan program–program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun program-program yang telah ditetapkan untuk Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran ;
2. Program Penanggulangan Bencana ;

Selain program dan kegiatan prioritas diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun menyiapkan program-program penunjang sebagai upaya pemantapan dari program-program prioritas tersebut, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Secara lengkap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disajikan dalam tabel berikut:

3.2.2. Perencanan Kegiatan Tahun 2025

Berikut perincian Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun Tahun 2025 dan Prakiraan maju tahun 2026 pada Tabel 3.3 :

Table 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Karimun

Tabel 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN KARIMUN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
I	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tercapainya Waktu Tanggap (Response Time) Pemadaman Kebakaran	Kabupaten Karimun	20 Menit	1.180.000.000		20 Menit	1.180.000.000
A	Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan,dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Kabupaten Karimun	72.50	1.180.000.000		72.50	1.180.000.000

1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota setiap tahunnya	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	100.000.000		1 Dokumen	100.000.000
2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalan daerah Kab/Kota	Kabupaten Karimun	1 Laporan	80.000.000		1 Laporan	80.000.000
3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	150.000.000		1 Dokumen	150.000.000
4	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakarean dan alat	Kabupaten Karimun	10 unit	100.000.000		10 Unit	100.000.000

		pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait						
5	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Kabupaten Karimun	20 Orang	100.000.000		-	100.00.000
6	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota yg ditangani	Kabupaten Karimun	10 Bahan	100,000,000		10 Bahan	100.00.000
7	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah standarisasi sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakarean dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	Kabupaten Karimun	20 unit	150,000,000		20 unit	150.000.000

8	Pengelolaan sistem komonikasi dan informasi kebakaran dan peyelamatan (SKIK)	Jumlah sistem komonikasi dan informasi kebakaran dan peyelamatan (SKIK) yg dikelola	Kabupaten Karimun	2 sistem	150,000,000		2 sistem	150,000,000
9	Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan peyelamatan non kebakaran	Jumlah kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan peyelamatan non kebakaran yg diselenggarakan	Kabupaten Karimun	3 Kejsama	150,000,000		3 Kejsama	150,000,000
10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga yang ikut pelatihan	Kabupaten Karimun	50 org	100,000,000		50 org	100,000,000
II	Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana		18%	3.026.600.000		18%	3.026.600.000

B	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/ kota	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kabupaten Karimun	15%	500.000.000		15%	500.000.000
1	Penyusunan Kajian resiko bencana kabupaten/kota	Jumlah dokumen kajian resiko bencana yang dilegalisasi	Kabuaten Karimun	1 Dokumen	400.000.000		1 Dokumen	400.000.000
2	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/ kota (per jenis bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komonikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yg ada dikawasan tempat tinggal nya	Kabupaten Karimun	50 Orang	100.000.000		50 Orang	100..000.000
C	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga yang memperloleh layanan pencegahan/ kesiapsiagaan terhadap bencana	Kabupaten Karimun	18 %	940.000.000		18%	940.000.000

1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kabupaten Karimun	50 orang	70.000.000		50 orang	70.000.000
2	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yg di tingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kabupaten Karimun	4 Kawasan	130.000.000		4 Kawasan	130.000.000
3	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penanggulangan Bencana yg dilegalisasi	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50.000.000		1 Dokumen	50.000.000
4	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab/Kota	Jumlah Personil TRC yg dikembangkan kapasitas teknis dam manajerialnya	Kabupaten Karimun	15 Orang	150.000.000		15 Orang	150.000.000
5	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen rencana kontijensi yg dilegalisasi	Kabupaten Karimun	1 dokumen	70.000.000		1 dokumen	70.000.000
6	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yg nengikuti gladi kesiapsiagaan	Kabupaten Karimun	100 orang	50.000.000		100 orang	50.000.000
7	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops)	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	80,000,000		1 Dokumen	80,000,000

	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya						
8	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Kabupaten Karimun	20 Unit	80,000,000		20 Unit	80,000,000
9	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Kabupaten Karimun	Dokumen	60,000,000		Dokumen	60,000,000
10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kabupaten Karimun	40 Keluarga	150,000,000		40 Keluarga	150,000,000

11	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50,000,000		1 Dokumen	50,000,000
D	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga yang memperloleh layanan evakuasi terhadap bencana	Kabupaten Karimun	40%	796.600.000		40%	796.600.000
1	Respon cepat Kejadian Luar biasa Penyakit/ wabah Zonosis Prioritas	Jumlah Dokumen yang disusun dan dievaluasi		1 Laporan	10.000.000		1 Laporan	10.000.000
2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	200.000.000		1 Dokumen	200.000.000
3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Jumlah korban yg berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	Kabupaten Karimun	40 Orang	150.000.000		40 Orang	150.000.000
4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kab/ kota	Jumlah korban bencana yg mendapat distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kabupaten Karimun	50 Orang	80.000.000		50 Orang	80.000.000

5	Respon cepat bencana non alam epidemi / wabah penyakit	SK penetapan status darurat bencana dan SKPOB yg ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan epidemiologi terpadu	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	186.600.000		1 Dokumen	186.600.000
6	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	Kabupaten Karimun	1 Laporan	80,000,000		1 Laporan	80,000,000
E	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Kabupaten Karimun		790.000.000			790.000.000
1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumla Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	100,000,000		1 Dokumen	100,000,000
2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	100,000,000		1 Dokumen	100,000,000

3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	100,000,000		1 Dokumen	100,000,000
4	Pengelolaan dan Pemamfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	100,000,000		1 Dokumen	100,000,000
5	Pembinaan dan Pegawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Karimun	1 Laporan	100,000,000		1 Laporan	100,000,000
6	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kabupaten Karimun	1 Kegiatan	150,000,000		1 Kegiatan	150,000,000
7	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Kabupaten Karimun	50 Orang	30,000,000		50 Orang	30,000,000

8	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	110,000,000		1 Dokumen	110,000,000
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SKM	Kabupaten Karimun	80%	3.968.400.000		80%	4.663.400.000
F	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Kabupaten Karimun	8 Dokumen	76.000.000		8 Dokumen	76.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Karimun	2 Dokumen	35.000.000		2 Dokumen	35.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDPenyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Kabupaten Karimun	3 Laporan	25.000.000		3 Laporan	25.000.000

		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Karimun	3 Laporan	16.000.000		3 Laporan	16.000.000
G	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	1.534.900.000		1 Laporan	2.229.900.000
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang mnerima gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Karimun	504 Orang	1.401.400.000		504 Orang	2.096.400.000
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil pentediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	125.000.000		1 Dokumen	125.000.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	8.500.000		1 Laporan	8.500.000
H	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1Laporan	63.400.000	RUTIN	1 Laporan	63.400.000

1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kabupaten Karimun	2 Paket	25.000.000		2 Paket	25.000.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kabupaten Karimun	2 Orang	25.000.000		Orang	25.000.000
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang ynag mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Karimun	3 Orang	13.400.000		3 Orang	13.400.000
I	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	272.300.000		1 Laporan	205.900.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kabupaten Karimun	10 Paket	7.600.000		10 Paket	7.600.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Karimun	20 Paket	55.000.000		20 Paket	55.000.000
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kabupten Karimun	10 Paket	7.800.000		10 Paket	7.800.000

4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kabupaten Karimun	3 Paket	30.000.000		3 Paket	30.000.000
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kabupaten Karimun	5 Paket	10.500.000		5 Paket	10.500.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan/ Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Karimun	5 Dokumen	32.000.000		5 Dokumen	32.000.000
7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kabupaten Karimun	6 Paket	36.000.000		6 Paket	36.000.000
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kabupaten Karimun	1 Laporan	3.400.000		1 Laporan	3.400.000
9	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	90.000.000		1 Laporan	90.000.000
J	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	1.085.000.000		1 Laporan	1.085.000.000

1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kabupaten Karimun	1 Unit	700.000.000		1 Unit	700.000.000
2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kabupaten Karimun	5 Paket	35.000.000		5 Paket	35.000.000
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kabupaten Karimun	4 unit	50.000.000		4 unit	50.000.000
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kabupaten Karimun	2 Unit	300.000.000		2 Unit	300.000.000
K	Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	671.300.000	RUTIN	1 Laporan	671.300.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyadiaan jasa surat menyurat		1 Laporan	1.800.000		1 Laporan	1.700.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kabupaten Karimun	3 Laporan	60.000.000		3 Laporan	60.000.000
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan jasa Peralatan dan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	9.500.000		1 Laporan	9.500.000

		Perlengkapan Kantor yang di sediakan						
4	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	600.000.000		1 Laporan	600.000.000
L	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	249.000.000		1 Laporan	249.000.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kabupaten Karimun	1 Unit	15.000.000		1 Unit	15.000.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	Kabupaten Karimun	4 Unit	140.000.000		4 Unit	140.000.000
3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kabupaten Karimun	2 unit	8.000.000		2 unit	8.000.000
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kabupaten Karimun	5 Unit	6.000.000		5 Unit	6.000.000

5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kabupaten Karimun	1 Unit	60.000.000		1 Unit	60.000.000
6	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara / direhabilitasi	Kabupaten Karimun	1 Unit	10.000.000		1 Unit	10.000.000
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara / direhabilitasi	Kabupaten Karimun	1 unit	10.000.000		1 unit	10.000.000
M	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	16.500.000	RUTIN	1 Laporan	16.500.000
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Kabupaten Karimun	1 dokumen	5,000,000		1 dokumen	5,000,000
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Kabupaten Karimun	2 Laporan - Lap Rekonsiliasi	6,500,000		2 Laporan - Lap Rekonsiliasi	6,500,000

				- Lap Asset OPD			- Lap Asset OPD	
3	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahan barang milik daerah pada SKPD	Kabupaten Karimun	1 laporan	5,000,000		1 laporan	5,000,000
	JUMLAH				8.175.000.000			8.870.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Karimun namun juga oleh sumber pendanaan lainnya.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

Table 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD-DAMKAR Kabupaten Karimun

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Karimun Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tercapainya Waktu Tanggap (Response Time) Pemadaman Kebakaran	Kabupaten Karimun	20 Menit	1.180.000.000	
A	Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan,dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Kabupaten Karimun	72.50	1.180.000.000	

1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota setiap tahunnya	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	100.000.000	
2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalan daerah Kab/Kota	Kabupaten Karimun	1 Laporan	80.000.000	
3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	150.000.000	
4	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakarean dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	Kabupaten Karimun	10 unit	100.000.000	
5	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki	Kabupaten Karimun	20 Orang	100.000.000	

		sertifikasi keterampilan teknis dan analis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran				
6	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota yg ditangani	Kabupaten Karimun	10 Bahan	100,000,000	
7	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah standarisasi sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakarean dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	Kabupaten Karimun	20 unit	150,000,000	
8	Pengelolaan sistem komonikasi dan informasi kebakaran dan peyelamatan (SKIK)	Jumlah sistem komonikasi dan informasi kebakaran dan peyelamatan (SKIK) yg dikelola	Kabupaten Karimun	2 sistem	150,000,000	
9	Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan peyelamatan non kebakaran	Jumlah kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan peyelamatan non kebakaran yg diselenggarakan	Kabupaten Karimun	3 Kejsama	150,000,000	

10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga yang ikut pelatihan	Kabupaten Karimun	50 org	100,000,000	
II	Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana		18%	3.026.600.000	
B	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/ kota	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kabupaten Karimun	15%	500.000.000	
1	Penyusunan Kajian resiko bencana kabupaten/kota	Jumlah dokumen kajian resiko bencana yang dilegalisasi	Kabuaten Karimun	1 Dokumen	400.000.000	
2	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/ kota (per jenis bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komonikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yg ada dikawasan tempat tinggal nya	Kabupaten Karimun	50 Orang	100.000.000	

C	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga yang memperloleh layanan pencegahan/ kesiapsiagaan terhadap bencana	Kabupaten Karimun	18 %	940.000.000	
1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kabupaten Karimun	50 orang	70.000.000	
2	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yg di tingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kabupaten Karimun	4 Kawasan	130.000.000	
3	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penanggulangan Bencana yg dilegalisasi	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50.000.000	
4	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab/Kota	Jumlah Personil TRC yg dikembangkan kapasitas teknis dam manajerialnya	Kabupaten Karimun	15 Orang	150.000.000	
5	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen rencana kontijensi yg dilegalisasi	Kabupaten Karimun	1 dokumen	70.000.000	
6	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yg nengikuti gladi kesiapsiagaan	Kabupaten Karimun	100 orang	50.000.000	

7	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	80,000,000	
8	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Kabupaten Karimun	20 Unit	80,000,000	
9	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Kabupaten Karimun	Dokumen	60,000,000	
10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kabupaten Karimun	40 Keluarga	150,000,000	

11	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50,000,000	
D	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga yang memperloleh layanan evakuasi terhadap bencana	Kabupaten Karimun	40%	796.600.000	
1	Respon cepat Kejadian Luar biasa Penyakit/ wabah Zonosis Prioritas	Jumlah Dokumen yang disusun dan dievaluasi		1 Laporan	10.000.000	
2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	200.000.000	
3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Jumlah korban yg berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	Kabupaten Karimun	40 Orang	150.000.000	
4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kab/ kota	Jumlah korban bencana yg mendapat distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kabupaten Karimun	50 Orang	80.000.000	
5	Respon cepat bencana non alam epidemi / wabah penyakit	SK penetapan status darurat bencana dan SKPOB yg ditetapkan paling lama 1x24 jam	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	186.600.000	

		berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan epidemiologi terpadu				
6	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	Kabupaten Karimun	1 Laporan	80,000,000	
E	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Kabupaten Karimun		790.000.000	
1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumla Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	100,000,000	
2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	100,000,000	
3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	100,000,000	
4	Pengelolaan dan Pemamfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	100,000,000	

5	Pembinaan dan Pegawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Karimun	1 Laporan	100,000,000	
6	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kabupaten Karimun	1 Kegiatan	150,000,000	
7	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Kabupaten Karimun	50 Orang	30,000,000	
8	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	110,000,000	

III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SKM	Kabupaten Karimun	80%	3.968.400.000	
F	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Kabupaten Karimun	8 Dokumen	76.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Karimun	2 Dokumen	35.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDPenyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Karimun	3 Laporan	25.000.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Karimun	3 Laporan	16.000.000	
G	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	1.534.900.000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang mnerima gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Karimun	504 Orang	1.401.400.000	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil pentediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	125.000.000	

3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	8.500.000	
H	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1Laporan	63.400.000	RUTIN
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kabupaten Karimun	2 Paket	25.000.000	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kabupaten Karimun	2 Orang	25.000.000	
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang ynag mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Karimun	3 Orang	13.400.000	
I	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	272.300.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kabupaten Karimun	10 Paket	7.600.000	

2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Karimun	20 Paket	55.000.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kabupten Karimun	10 Paket	7.800.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kabupaten Karimun	3 Paket	30.000.000	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kabupaten Karimun	5 Paket	10.500.000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan/ Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Karimun	5 Dokumen	32.000.000	
7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kabupaten Karimun	6 Paket	36.000.000	
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kabupaten Karimun	1 Laporan	3.400.000	
9	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	90.000.000	
J	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	1.085.000.000	

1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kabupaten Karimun	1 Unit	700.000.000	
2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kabupaten Karimun	5 Paket	35.000.000	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kabupaten Karimun	4 unit	50.000.000	
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kabupaten Karimun	2 Unit	300.000.000	
K	Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	671.300.000	RUTIN
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyadiaan jasa surat menyurat		1 Laporan	1.800.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kabupaten Karimun	3 Laporan	60.000.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	9.500.000	

4	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	600.000.000	
L	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	249.000.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kabupaten Karimun	1 Unit	15.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	Kabupaten Karimun	4 Unit	140.000.000	
3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kabupaten Karimun	2 unit	8.000.000	
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kabupaten Karimun	5 Unit	6.000.000	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kabupaten Karimun	1 Unit	60.000.000	

6	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara / direhabilitasi	Kabupaten Karimun	1 Unit	10.000.000	
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara / direhabilitasi	Kabupaten Karimun	1 unit	10.000.000	
M	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	16.500.000	RUTIN
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Kabupaten Karimun	1 dokumen	5,000,000	
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Kabupaten Karimun	2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	6,500,000	
3	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahan barang milik daerah pada SKPD	Kabupaten Karimun	1 laporan	5,000,000	
	JUMLAH				8.175.000.000	

BAB V
P E N U T U P

5.1 Catatatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun berkewajiban untuk mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RPJMD, RKPD dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun Tahun 2022 -2026.

5.2 Kaidah- kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan di terbitkannya PERMENDAGRI nomor 86 tahun 2017 dan ditetapkannya REVISI RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2016- 2022, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen RENJA Tahun 2025 ini telah disusun berdasarkan sistematika penulisan sesuai dengan PERMENDAGRI sebagaimana tersebut.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun Tahun 2025 berkewajiban untuk mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran 2024 serta diselaraskan dengan RPJMD, RKPD dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun Tahun 2022 -2026.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun Tahun 2025 selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun Tahun 2025 juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Karimun serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan Pembangunan Masyarakat.

Tanjung Balai Karimun, Maret 2024

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KARIMUN,

H. SUWEDI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651129 198602 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

RENCANA KERJA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas Berkat dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena hingga pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2025 dengan baik dan lancar. Rencana kerja ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan organisasi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2025 yang menjadi pedoman dan arah pelaksanaan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program kegiatan dan sub kegiatan serta penyusunan anggaran pagu indikatif Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025.

Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun ini berisikan visi, dan misi, strategi serta kebijakan dan isu-isu strategis termasuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang diprioitaskan. Program kerja dimaksud merupakan program bidang ketenteraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang melekat pada tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk untuk menyelenggarakan penegakan perda dan perkada. Kesinambungan dan kunci keberhasilan pembangunan khususnya bidang penegakan perda/perkada, ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Karimun perlu ditetapkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan sampai dengan proses tindak lanjutnya. Maka untuk mencapai keberhasilan setiap proses memerlukan koordinasi dan sinergi terhadap kelembagaan terkait, elemen masyarakat dan pemerintah.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun dan Lembaga Legislatif / DPRD Karimun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau disebut juga sebagai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dilakukan diskusi melalui Forum Organisasi Perangkat

Daerah dan Musrenbang sehingga dapat dijadikan skala prioritas pada rencana kerja tahunan organisasi perangkat daerah.

Semoga Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Karimun tahun 2025 ini, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Demikianlah Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2025 ini disusun, atas dukungan semua pihak teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat.

Tanjung Balai Karimun, Juni 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARIMUN

Drs. TEJARIA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670110 198603 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar belakang..... 1
1.2 Landasan hukum..... 3
1.3 Maksud dan tujuan..... 5
1.4 Sistematika penulisan..... 7

Bab II Evaluasi Renja Satpol PP Kabupaten Karimun

2.1 Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu..... 8
2.2 Analisis kinerja pelayanan..... 11
2.3 Isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi 14
2.4 Review terhadap rancangan awal Renstra..... 17

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

3.1 Tujuan, sasaran Satpol PP..... 24
3.2 Strategi dan kebijakan Satpol PP..... 25

Bab IV Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.1 Program, kegiatan, sub kegiatan..... 28
4.2 Indikator Kinerja Sasaran..... 30

Bab V Penutup

Penutup..... 32

Lampiran matriks..... 33
Lampiran pohon kinerja..... 40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja OPD ini mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Renstra Sauan Polisi Pamong Praja.

Peraturan dan Perundang-undangan di-era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam

proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun serta mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang RKPD dan Renja OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Karimun.

Rencana yang penting sudah sepatutnya bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Rencana Kerja OPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review atas implementasinya. Karena penyusunan dokumen Renja OPD merupakan penjabaran Renstra OPD pada setiap tahun anggaran dan juga terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka kualitas penyusunan Rencana Kerja OPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan OPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi, dan agenda KDH, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan RKPD Pemerintah dan Renja OPD.

Kinerja penyelenggaraan urusan OPD akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah selama masa kepemimpinannya. Renstra OPD menjawab

3 pertanyaan dasar yaitu; (1) kemana pelayanan OPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi renja OPD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan RPJMD yang sudah dijabarkan dalam Renstra, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program prioritas OPD serta tolok ukur pencapaiannya. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dan bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renja OPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* (termasuk forum *multi stakeholder* OPD) untuk mencapai tujuan Renja OPD melalui proses yang transparansi, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipasif, dan politis. Ini bermakna bahwa proses penyusunan Renja Satpol PP perlu bersinergi dengan rencana strategis diatasnya dan komitmen pemerintahan yang berkaitan: (*i*) ada sinergi dan konsistensi dengan RPJMD dan RKPD, (*ii*) ada sinergi dan konsistensi dengan RTRW, (*iii*) ada sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penuyusunan Renja dengan dasar adalah, sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 3902);

2. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN;
3. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang OPD;
7. Peraturan Pemerintah nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol Pamong Praja;
9. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 38 Tahun 2010 tentang Pendidikan dan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan RPJP, RPJMD, dan RKPD;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum di Prop. dan Kabupaten;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM;
19. Keputusan Menterti Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
20. Surat Keputusan Kepala LAN nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 6 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertamanan dan Kebersihan dengan Pengawasan PK-5;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Perda nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda nomor 6 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun tahun 2006-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2025 adalah, sebagai berikut:

a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2025;
b. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja;
c. Tersedianya prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh bidang/ seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
d. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pada tahun sebelumnya;
e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
f. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar bidang/ seksi yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Karimun tahun 2025 adalah terjabarkannya rencana strategis Satpol PP melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun, yakni :

a. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun tahun 2025;
b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan, dan
d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2025 adalah, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar belakang

1.2. Landasan hukum

1.3. Maksud dan tujuan

1.4. Sistematika penulisan

Bab II. Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renja

2.2. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah

2.3. Isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Bab III. Tujuan, sasaran, startegi dan kebijakan perangkat daerah

3.1. Tujuan dan sasaran

3.2. Strategi dan kebijakan

Bab IV. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan

4.1. Rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan

4.2. Indikator kinerja sasaran

Bab V. Penutup

lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARIMUN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, dan hasil rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Pada tahun 2023, rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun mencakup 2 (dua) sasaran strategis, adalah berikut ini :

1) Terciptanya stabilitas sosial dan kantramtibmas yang kondusif, dengan indikator kinerjanya adalah :
   - Persentase penurunan kasus pelanggaran K3,
   - Persentase perda dan perkada yang ditegakkan.
2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD, dengan indikator kinerjanya :
   - Nilai Akip.
   - Kedua sasaran tersebut akan dicapai melalui 2 program dengan 7 kegiatan dan 19 sub kegiatan melalui pendanaan yang disediakan untuk pelaksanaannya berdasarkan dari APBD Kabupaten Karimun tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2025 juga memperhatikan hal-hal, sebagai berikut :

a) Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2025,
b) Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan,
c) Masalah-masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengakolasiannya.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 2.1, sebagai berikut :

Tabel 2.1
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Capaian Th 2023		Pagu dan Realisasi Anggaran APBD-P Th 2023			Realisasi
		Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Fisik Kegiatan
➢ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/**							
- Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen	20 dok	20 dok	102.931.074,-	70.415.011,-	68,40	100%
- Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan	1 lap	1 lap	6.731.364.953-	6.685.565.800,-	99,31	100%
- Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah laporan	1 lap	1 lap	330.643.033,-	125.624.100,-	37,99	100%
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan	1 lap	1 lap	3.672.913.053,-	3.585.198.892,-	97,61	100%
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan	1 lap	1 lap	151.597.300,-	48.424.200,-	31,94	100%
➢ **Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum/**							
- Penanganan gangguan ketentramanan dan ketertiban umum dalam satu daerah kabupaten/ kota	Persentase penurunan kasus pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)	5,00%	3,51%	373.455.740,-	208.251.442,-	55,76	100%
- Penegakan peraturan daerah kabupaten dan peraturan bupati	Persentase perda/ perkada yang ditegakan	100%	100%	387.431.376,-	376.552.050,-	97,19	100%

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dicapai melalui program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**, meliputi kegiatan :

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan					Lokasi
	Keluaran	Target 2022	Target 2023	Hasil	Capaian Target	
1	2	3	4	5	6	7
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya Renja, evaluasi kinerja dan lkip OPD	20 buku	24 buku	24 buku	100%	-

Kegiatan terlaksana penyusunan lakip satpol PP dan Renja Satpol PP.

.Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan					Lokasi
	Keluaran	Target 2022	Target 2023	Hasil	Capaian Target	
1	2	3	4	5	6	7
Administrasi keuangan perangkat daerah	Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	1 lap	1 lap	1 laporan	100%	-

Kegiatan ini mencakup gaji dan tunjangan PNS dapat terlaksana selama setahun

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan					Lokasi
	Keluaran	Target 2022	Target 2023	Hasil	Capaian Target	
1	2	3	4	5	6	7
Administrasi umum perangkat daerah	Terlaksananya adm. Umum perangkat daerah	1 lap	1 lap	1 laporan	100%	-

Kegiatan dapat terlaksana memenuhi kebutuhan operasional kantor

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan					Lokasi
	Keluaran	Target 2022	Target 2023	Hasil	Capaian Target	
1	2	3	4	5	6	7
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 lap	1 lap	1 laporan	100%	-

Kegiatan dapat terlaksana.

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan					Lokasi
	Keluaran	Target 2022	Target 2023	Hasil	Capaian Target	
1	2	3	4	5	6	7
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 lap	1 lap	1 laporan	100%	-

Kegiatan dapat terlaksana.

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi kegiatan :

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan					Lokasi
	Keluaran	Target 2022	Target 2023	Hasil	Capaian Target	
1	2	3	4	5	6	7
Penanganan gangguan ketentramanan dan ketertiban umum dalam satu daerah kabupaten	Jumlah penanganan gangguan trantibum yang dilaksanakan	60 lap	57 lap	55 lap	96,49%	-

Kegiatan dilaksanankan selama setahun.

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan					Lokasi
	Keluaran	Target 2022	Target 2023	Hasil	Capaian Target	
1	2	3	4	5	6	7
Penegakan peraturan daerah kabupaten dan peraturan bupati	Terlaksananya penegakan peraturan daerah kabupaten dan peraturan bupati	97%	100%	100%	100%	-

Kegiatan dilaksanankan selama setahun.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok, sebagaimana berikut :

a. Masalah-masalah yang dihadapi dan mengerahkan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
b. Tujuan yang dikehendaki.
c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.
d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun dengan tugas dan fungsi memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat telah melaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan selama periode rencana kerja tahun 2025. Gambaran pencapaian kinerja pada periode rencana kerja tahun 2025,sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun dalam

menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, berdasarkan skala prioritas pembangunan, dengan cara:

- Pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun melakukan pencegahan gangguan trantibum antara lain deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan serta patroli wilayah.
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- Sosialisasi produk hukum daerah kepada warga masyarakat dan badan hukum serta instansi terkait.
- Menertibkan bagi warga masyarakat atau badan hukum yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Analisis kinerja pelayanan OPD menggunakan indikator yang mengacu pada Indikator Kinerja Kunci berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2020, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra OPD dan/ atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Berikut dibawah ini tentang pencapaian kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel 2.2 adalah :

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARIMUN

No	Indikator *)	IKK	Target Renstra OPD (revisi)					Realisasi Capaian	Target Renja (Reviu)		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai Akip	-	70,35	73,00	76,00	79,00	81,00	-	76,10	79,00	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	72%	74%	76%	78%	80%	78,92	76%	78%	-
3	Jumlah warga negara yg memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada kabupaten	SPM (Permen dagri nomor 59 tahun 2021)	-	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	0 orang	5 orang	5 orang	-
4	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3	-	5,26%	5,00%	4,76%	4,55%	4,35%	3,51%	4,76%	4,55%	-
5	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	-	94,74%	95,00%	95,24%	95,45%	95,65%	80,00%	95,24%	95,45%	-
6	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	-

2.3 Isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (pasal 5). Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun mempunyai tugas menegakkan perda/ perkada dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya, pada (pasal 7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 disebutkan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu:

a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran perda/ perkada;
b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan perkada;
d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada.

Jika kita melihat pada tugas dan kewenangan Satpol PP maka kita akan mengetahui betapa berat tugas dan tanggung jawab ini apabila tidak didukung oleh segenap lapisan masyarakat dan aparatur pemerintah lainnya.

Adapun permasalahan dan isu-isu penting yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun adalah, sebagai berikut:

1. Masalah pengembangan SDM

Sumberdaya manusia merupakan unsur utama dalam suatu organisasi, sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya adalah suatu kebutuhan yang mendesak bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun. Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan

baik, maka kompetensi SDM harus dimaksimalkan. Saat ini Satpol PP memiliki satu orang menjabat PPNS, sehingga masih diperlukan kuantitas PPNS ke depannya. Selain hal tersebut diatas, jumlah personil Satpol PP masih belum memadai dan sebagian besar belum mendapatkan diklat dasar yang wajib diikuti oleh anggota Satpol PP.

2. Masalah penyelidikan pelanggaran perda/perkada

Salah satu masalah strategis dalam penegakan peraturan daerah adalah keberadaan pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tersedia. Dengan ketidak tersedianya personil PPNS, maka penegakan perda/ perkada berjalan tidak optimal, sehingga belum sepenuhnya efektif. Selama ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun hanya melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan karena keterbatasan personil PPNS yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan. Dengan demikian tidak ada penyelesaian pelanggaran perda yang dilakukan melalui pengadilan (*pro justitia)*.

3. Tertib izin bangunan

Perekonomian Kabupaten Karimun sebagai daerah yang berstatus FTZ (*free tread zone*) akan terus berkembang, sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi adalah bermunculannya bangunan-bangunan baru yang digunakan sebagai tempat usaha maupun sebagai tempat tinggal. Hal ini nantinya akan menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Satuan Polisi Pamong Praja yang akan melakukan penertiban, baik ditinjau dari segi perizinannya maupun dari segi penggunaannya. Pemberian izin mendirikan bangunan bukan merupakan wewenang Satpol PP dan bahkan hampir tidak pernah menerima tembusan dari instansi yang berwenang memberikan izin pendirian suatu bangunan, sehingga sulit untuk melakukan pengawasan dan penertibannya. Bangunan yang bermunculan tanpa terkendali

akan berdampak negatif apabila dibiarkan, selain dapat merusak tata ruang juga berdampak pada ketidaktaatan masyarakat pada peraturan yang berlaku.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati perda / perkada

Kabupaten Karimun merupakan kabupaten yang berkembang cukup pesat seiring dengan ditetapkannya sebagai *Special Economic Zone (SEZ).* Disisi lain perkembangan ini juga menimbulkan ekses negatif yang apabila tidak ditangani dengan baik akan merugikan masyarakat dan pemerintah kabupaten karimun.

Salah satu dampak negatifnya adalah makin maraknya pedagang kaki lima yang berjualan dipinggir jalan (diatas trotoar) akibat semakin bertambahnya jumlah penduduk. Kegiatan perekonomian tersebut timbul karena masyarakat menangkap peluang yang mereka lihat padahal sudah ada peraturan daerah tentang ketertiban umum yang melarang berjualan pada tempat-tempat tertentu.

Disamping itu, kabupaten karimun juga dikenal sebagai daerah industri maritim dan jalur akses menuju pulau batam dan negara tetangga. Dimana akan banyak masyarakat dari luar pulau karimun berdatangan untuk mencari peluang kerja maupun sebagai tempat transit menuju daerah batam, Tg. pinang dan daerah lainnya, hal ini akan mendorong meningkatnya permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat. Termasuk juga banyak dari masyarakat mancanegara maupun domestik berdatangan untuk menikmati tempat-tempat objek wisata yang ada.

Dalam hal tersebut, diperlukan peran serta dari pihak pengelola usaha pariwisata maupun masyarakat untuk mentaati peraturan daerah yakni tentang Perda nomor 5 tahun 2005 tentang Pengelolaan Usaha Kepariwisataan menjadi Perda nomor 14 tahun 2011 tentang Kepariwisataan, dimana pada Perda nomor 5 tahun 2005 terdapat pasal 6 huruf (e) tentang kegiatan yang dilarang bagi pimpinan penyelenggaraan usaha kepariwisataan, antara lain adalah menjalankan aktivitas usahanya sepanjang bulan Suci Ramadhan maupun hari besar keagamaan lainnya.

Perda nomor 2 tahun 2016 tentang Pengelola pertamanan dan dekorasi kawasan perkotaan. Perda nomor 2 tahun 20217 tentang Bangunan Gedung, Perda nomor 1 tahun 2019 tentang Ketertiban Umum serta Perda nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan, kenyamanan serta perlindungan masyarakat

Lemahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat, disebabkan antara lain :

a. Potensi petugas linmas yang kurang terlatih,
b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan.
c. Tidak menetapnya pekerjaan masyarakat di suatu tempat, sehingga mengakibatkan mencari pekerjaan di tempat lain.

2.4 Review terhadap rancangan awal Renstra

Review terhadap rancangan awal Renstra dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun berdasarkan Rancangan Awal Renstra. Review terhadap rancangan awal renstra dapat dijabarkan pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3

Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renstra Satpol PP Kabupaten Karimun
Mapping Ranwal Renja Tahun 2025, berdasarkan (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tahun 2023)
Satpol PP Kabupaten Karimun

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Rencana Tahun 2025			Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Rencana Tahun 2025		
					Target	Rp.	Sumber Dana				Target	Rp.	Sumber Dana
Meningkatnya investasi													
	Terciptanya Stabilitas Sosial dan Kantramtibmas yang Kondusif			**Persentase Penurunan pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan)**	**4,50 %**	**13.448.386.000**		**Terciptanya Stabilitas Sosial dan Kantramtibmas yang Kondusif**		**Persentase Penurunan pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan)**	**4,50 %**	**13.448.386.000**	
		1 5 2	**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3**	**95,45 %**	**912.941.528**		**1 05 02**	**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3**	**95,45 %**	**912.941.528**	
				Jumlah warga negara yg memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda & perkada	**5 Orang**	**2.500.000**				**Jumlah warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada**	**5 orang**	**2.500.000**	
		1 5 2 2.01	**Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 daerah kabupaten**	**Jumlah penanganan gangguan trantibum yang diselesaikan**	**21 laporan**	**585.000.000**		**1 05 02 2.01**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam satu daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah penanganan gangguan trantibum yang diselesaikan**	**21 laporan**	**585.000.000**	
		1 5 2 2.01 1	Pencegahan gangguan tramtibum melalui deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah kasus gangguan trantibum yang dicegah melalui deteksi dini, penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan	25 kasus	80.000.000	PAD	1 05 02 2.01 0015	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan	25 Laporan	80.000.000	PAD

		1	**5**	**2**	2.01	2	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah kasus gangguan trantibum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	8 kasus	70.000.000	**PAD**	1	05	02	2.01	0016	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	8 Laporan	70.000.000	**PAD**
		1	**5**	**2**	2.01	3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan, trantibumlinmas tingkat kabupaten	1 dokumen	70.000.000	**PAD**	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab/ Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 dokumen	70.000.000	**PAD**
		1	**5**	**2**	2.01	4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan linmas dalam rangka trantibum	0 dokumen	-	**PAD**	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman da ketertiban umum	0 dokumen	-	**PAD**
		1	**5**	**2**	2.01	5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	0 orang	-	**PAD**	1	05	02	2.02	0005	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	150 Orang	360.000.000	**PAD**
								Jumlah SDM Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	20 orang	350.000.000											
								Persentase aparatur yang dinilai kredit point jabatan fungsional	30 orang	10.000.000											
		1	**5**	**2**	2.01	7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah sarana dan prasarana trantibum yang tersedia	0 unit	-	**PAD**	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	0 Unit	-	**PAD**
		1	**5**	**2**	2.01	8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP tibumtranmas yang telah dibuat dan dimutakhirkan	0 dokumen	-	**PAD**	1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	0 dokumen	-	**PAD**
		1	**5**	**2**	2.01	9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada	Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan perda/ perkada yang terlayani	1 laporan	5.000.000	**PAD**	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada	Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan perda/ perkada yang terlayani jumlah laporan pemberian	1 laporan	5.000.000	**PAD**

																	pelayanan dasar kepada warga layanan yang terdampak penegakan perda dan perkada yang terlayani			
		1	**5**	**2**	**2.02**		**Penegakan peraturan kabupaten dan peraturan bupati**	**Cakupan penyelesaian penegakan perda/perkada**	**100%**	**330.441.528**		**1**	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota**	**Persentase penyelesaian penegakan perda / perkada**	**100%**	**330.441.528**	
		1	**5**	**2**	2.02	1	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/ perkada kepada masyarakat/pelaku usaha	1 laporan	145.441.528	**PAD**	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1 laporan	145.441.528	**PAD**
		1	**5**	**2**	2.02	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbup	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan perda /perkada	1 laporan	115.000.000	**PAD**	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepada daerah	1 laporan	115.000.000	**PAD**
		1	**5**	**2**	2.02	3	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penanganan atas pelanggaran perda /pergub yang dapat ditangani sesuai SOP	1 laporan	70.000.000	**PAD**	1	05	02	2.02	0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai SOP	1 laporan	70.000.000	**PAD**
		1	**5**	**2**	**2.03**		**Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil kabupaten**	**Persentase PPNS yang aktif**	**0,00%**	**-**	**PAD**	**1**	**05**	**02**	**2.03**		**Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kabupaten**	**Persentase PPNS yang aktif**	**0,00%**	**-**	**PAD**
		1	**5**	**2**	2.03	1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaran tibumt dan tranmas serta penegakan Perda/ Perkada	0 laporan	-	**PAD**	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas Pejabat PPNS penegak Perda	0 laporan	-	**PAD**
		1	**5**	**1**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100%**	**12.532.944.472**		**X**	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100%**	**12.532.944.472**	

		1	**5**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**25 dokumen**	**82.907.900**		**X**	**XX**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**25 dokumen**	**82.907.900**	
		1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen	27.498.000	**PAD**	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen	27.498.000	**PAD**
		1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	25.409.900	**PAD**	X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	25.409.900	**PAD**
		1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	30.000.000	**PAD**	X	XX	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	30.000.000	**PAD**
		1	**5**	**1**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**1 laporan**	**7.988.852.077**		**X**	**XX**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**1 laporan**	**7.988.852.077**	
		1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	86 org x 14 bulan	7.829.120.077	**PAD**	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	86 org x 14 bulan	7.829.120.077	**PAD**
		1	5	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas	12 dokumen	159.732.000	**PAD**	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	159.732.000	**PAD**
		1	**5**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**1 laporan**	**60.000.000**		**X**	**XX**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**1 laporan**	**60.000.000**	
		1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya	0 paket	-	**PAD**	X	XX	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0 paket	-	**PAD**
		1	5	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implemantasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	7 orang	60.000.000	**PAD**	X	XX	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	7 orang	60.000.000	**PAD**
		1	**5**	**1**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**1 laporan**	**273.686.900**		**X**	**XX**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**1 laporan**	**273.686.900**	

		1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	5.000.000	**PAD**	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	5.000.000	**PAD**
		1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 paket	49.823.400	**PAD**	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	49.823.400	**PAD**
		1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	6.363.500	**PAD**	X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	6.363.500	**PAD**
		1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	50.000.000	**PAD**	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	50.000.000	**PAD**
		1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	8.000.000	**PAD**	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	8.000.000	**PAD**
		1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	2 dokumen	4.500.000	**PAD**	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	4.500.000	**PAD**
		1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	25 laporan	150.000.000	**PAD**	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25 laporan	150.000.000	**PAD**
		1	**5**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan**	**1 laporan**	**864.874.000**		**X**	**XX**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan**	**1 laporan**	**864.874.000**	
		1	5	1	2.07	2	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	765.672.100	**PAD**	X	XX	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	765.672.100	**PAD**
		1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	7 unit	50.000.000	**PAD**	X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	7 paket	50.000.000	**PAD**
		1	5	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	-	**PAD**	X	XX	01	2.07	0009	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	-	**PAD**
		1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	49.201.900	**PAD**	X	XX	01	2.07	0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	49.201.900	**PAD**

		1	**5**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan penyedia jasa**	**1 laporan**	**3.164.127.595**		**X**	**XX**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan**	**1 laporan**	**3.164.127.595**	
		1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	400 laopran	5.500.000	**PAD**	X	XX	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	400 laporan	5.500.000	**PAD**
		1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	50 laporan	40.000.000	**PAD**	X	XX	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	50 laporan	40.000.000	**PAD**
		1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 laporan	5.500.000	**PAD**	X	XX	01	2,08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 laporan	5.500.000	**PAD**
		1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	3.113.127.595	**PAD**	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	3.113.127.595	**PAD**
		1	**5**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan pemeliharaan**	**1 laporan**	**98.496.000**		**X**	**XX**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan**	**1 laporan**	**98.496.000**	
		1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 unit	90.000.000	**PAD**	X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional/ lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 unit	90.000.000	**PAD**
		1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	8.496.000	**PAD**	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	8.496.000	**PAD**
		1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipeliohara/ direhabilitasi	0 unit	-	**PAD**	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	0 unit	-	**PAD**
TOTAL PAGU ANGGARAN																				**13.448.386.000**	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Kabupaten Karimun

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan *(critical success factor)* yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sementara sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan dan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2021-2026, seperti terlihat pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten KarimunTahun 2021-2026

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi	Terciptanya stabilitas sosial dan kantramtibmas yang kondusif	Persentase penurunan kasus pelanggaran K3
				Cakupan penyelesaian perda dan perkada yang ditegakan
				Persentase penanganan gangguan tranmastibum yang diselesaikan
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Akip

3.2 Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun merumuskan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu. Strategi merupakan langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berikut strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2025 adalah, sebagai berikut :

1. Memperkuat kapasitas pemeliharaan, trantibum dan perlindungan masyarakat dalam pola sinergi antara pemerintah dengan masyarakat melalui komunikasi dialogis dan penguatan kontrol sosial.
2. Mengembangkan kemampuan dan pengetahuan sumber daya aparatur Satpol.
3. Meningkatkan kerjasama dengan instansi/ dinas terkait serta stakeholder lainnya.
4. Penyelesaian pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
5. Pencegahan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan badan hukum terhadap peraturan daerah/ peraturan kepala daerah melalui pendekatan persuasif/ humanis.
7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam memelihara keamanan, ketentraman dan kenyamanan lingkungan.
8. Meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana dan kebakaran.
9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembagaan serta sarana dan prasarana aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Meningkatkan sistem layanan publik.

Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan organisasi agar terfokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Berikut dibawah ini, kebijakan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun, yaitu :

1. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan intelektual aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Peningkatan sarana/ prasarana fasilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenterman masyarakat;
4. Peningkatan penyelesaian penegakan peraturan daerah dan perkada;
5. Peningkatan pengembangan kapasitas PPNS;
6. Peningkatan patroli wilayah dan pengamanan secara intensif maupun deteksi dini pada daerah rawan pelanggaran trantibum;
7. Peningkatan koordinasi, kerjasama antar instansi/ lembaga terkait;
8. Penguatan kapasitas penanganan gangguan K3 dan konflik sosial;
9. Peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, koordinasi penanganan pasca bencana melalui tiga pilar yakni pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
10. Peningkatan kapasitas warga dalam memperoleh layanan pencegahan/ kesiapsiagaan terhadap bencana/ kebakaran dan non bencana.

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA INDIKATOR KINERJA SASARAN TAHUN 2025

Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional. Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan nyata sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun sebagai upaya untuk mewujudkan visi kabupaten dan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai bagian organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan dan membantu Kepala Daerah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam upaya ntuk mencapai tujuan dan sasaran ditahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun menetapkan 2 program, 10 kegiatan dan 37 sub kegiatan.

SASARAN 1 : Terciptanya Stabilitas Sosial dan Kantramtibmas yang Kondusif

Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upaya meningkatkan persentase penegakan perda dan perkada secara bertahap, yang mana didukung melalui 1 program, 3 kegiatan dan 12 sub kegiatan, yaitu :

1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM;
   1.1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
   - ✓ Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;
   - ✓ Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
   - ✓ Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten;
   - ✓ Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum;
   - ✓ Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
   - ✓ Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum;
   - ✓ Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
   - ✓ Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

1.2 Penegakan Peraturan Kabupaten dan Peraturan Bupati

- ✓ Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- ✓ Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbup
- ✓ Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati.

1.3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten

- ✓ Pengembangan kapasitas dan karier PPNS;

SASARAN 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD

Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upaya meningkatkan predikat nilai evaluasi Sakip serta kinerja operasional Satpol PP secara bertahap, yang mana didukung melalu 1 program, 7 kegiatan dan 25 sub kegiatan, yaitu :

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- ✓ Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- ✓ Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- ✓ Evaluasi kinerja perangkat daerah.

2.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- ✓ Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
- ✓ Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN.

2.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- ✓ Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
- ✓ Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;

2.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- ✓ Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
- ✓ Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- ✓ Penyediaan peralatan rumah tangga;
- ✓ Penyediaan bahan logistik kantor:
- ✓ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

- ✓ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- ✓ Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;

2.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- ✓ Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- ✓ Pengadaan meubeler;
- ✓ Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
- ✓ Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

2.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- ✓ Penyediaan jasa surat menyurat;
- ✓ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- ✓ Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
- ✓ Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;

2.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✓ Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- ✓ Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
- ✓ Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

4.2 Indikator Kinerja Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun

Indikator kinerja program prioritas yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang memiliki manfaat untuk dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dan kegiatan-kegiatan dalam suatu program, sehingga akan mencapai sasaran yang bermanfaat langsung oleh masyarakat.

Berikut tabel 4.1 dibawah ini yang menjadi Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA
1	*2*	*3*	*4*
1.	Terciptanya stabilitas sosial dan kantramtibmas yang kondusif	Persentase penurunan kasus pelanggaran K3	4,55%
		Persentase penanganan gangguan tranmastibum yang diselesaikan	95,45%
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	5 Orang
		Cakupan penyelesaian penegakan perda/ perkada	100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Akip	79,00
		Indeks kepuasan masyarakat	78%

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, diketahui bahwa tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun didalam melaksanakan tugas dan fungsi, memiliki 2 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja yang akan dicapai tahun 2025.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2025, menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan yang terkait dengan perencanaan pembangunan dibidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, CBD *(community base development)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku *(stakeholders)* dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun adalah Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Satpol PP. Rencana kerja ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun.

Rencana kerja juga memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja untuk penyusunan rencana kerja dimasa mendatang, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja yang lebih baik.

LAMPIRAN MATRIKS

MATRIKS PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATPOL PP KABUPATEN KARIMUN
PAGU RENSTRA TAHUN 2025 DAN PREDIKSI ANGGARAN TAHUN 2025

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	KONDISI AWAL PERENCANAAN		RENCANA TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF			
							PAGU RENSTRA TAHUN 2025		PREDIKSI PAGU RENJA TAHUN 2025	
					2021	2022	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkat-nya Investasi Daerah				**Nilai Investasi**	**10 T**	**11 T**	**16,4 T**	**13,448,386,000**	**16,4 T**	**14,776,452,077**
	Terciptanya stabilitas sosial dan kantram tibmas yang kondusif	**1.05**		**Persentase penurunan kasus pelanggaran K3**	**5,56%**	**5.26%**	**4.55%**	**915,441,528**	**4.55%**	**1,060,000,000**
		1.05.02	**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase penanganan gangguan tranmastibum yang diselesaikan**	**94.44%**	**94.74%**	**95.45%**	**912,941,528**	**95.45%**	**1,057,500,000**
				Jumlah warga yg memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda & perkada	**-**	**-**	**5 Orang**	**2,500,000**	**5 Orang**	**2,500,000**
		1.05.02.2.01	**Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 daerah kabupaten**	**Jumlah penanganan gangguan tranmastibum yang diselesaikan**	**18 laporan**	**17 Laporan**	**21 Laporan**	**585,000,000**	**21 Laporan**	**680,000,000**
		1.05.02.2.01.01	Pencegahan gangguan tramtibum melalui deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah kasus gangguan trantibum yang dicegah melalui deteksi dini, penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan	15 kasus	15 kasus	25 kasus	120,000,000	25 kasus	120,000,000

		1.05.02.2.01.02	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah kasus gangguan trantibum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	3 kasus	3 kasus	8 kasus	70,000,000	8 kasus	80,000,000
		1.05.02.2.01.03	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan, trantibumlinmas tingkat kabupaten	1 dok	1 dok	1 dok	70,000,000	1 dok	70,000,000
		1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan anggota linmas dalam rangka trantibum (*linmas*)	1 dok	1 dok	-	-	-	-
		1.05.02.2.01.05	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.	Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya, dan dinilai kredit point jabatan fungsional	-	-	34%	170,000,000	34%	175,000,000
		1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah sarana dan prasarana trantibum yang tersedia	-	1 paket	1 paket	120,000,000	3 paket	200,000,000
		1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP tibumtranmas yang telah dibuat dan dimutakhirkan	-	-	1 dok	20,000,000	1 dok	20,000,000
		1.05.02.2.01.09	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda/ perkada	Jumlah laporan layanan dalam rangka dampak penegakan perda	-	-	1 lap	15,000,000	1 lap	15,000,000

		1.05.02.2.02	**Penegakan peraturan kabupaten dan peraturan bupati**	**Cakupan penyelesaian penegakan perda/perkada**	**100%**	**100%**	**100%**	**290,441,528**	**100%**	**340,000,000**
		1.05.02.2.02.01	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/ perkada kepada masyarakat /pelaku usaha	1 Laporan	-	1 Laporan	145,000,000	1 Laporan	170,000,000
		1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbup	Jumlah laporan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan perda/ perkada di kec & desa/ kel	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	75,441,528	2 Laporan	100,000,000
		1.05.02.2.02.03	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan perbup	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penanganan atas pelanggaran perda /perbup yang dapat ditangani sesuai SOP	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	70,000,000	1 Laporan	70,000,000
		1.05.02.2.03	**Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil kabupaten**	**Persentase PPNS yang aktif**	**-**	**-**	**66,67%**	**40,000,000**	**66,67%**	**40,000,000**
		1.05.02.2.03.01	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaran tibum dan tranmas serta penegakan Perda/ Perkada	-	-	1 Laporan	40,000,000	1 Laporan	40,000,000
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				**Indeks Pelayanan Publik**	**90%**	**90%**	**94%**	**12,532,944,472**	**94%**	**13,716,452,077**
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja OPD			**Nilai Akip**	**69,00**	**70,10**	**79,00**	**12,532,944,472**	**79,00**	**13,716,452,077**
		XXX.01.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**98%**	**98%**	**78%**	**12,532,944,472**	**78%**	**13,716,452,077**
		XXX..01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**25 Dok**	**25 Dok**	**25 Dok**	**82,907,900**	**25 Dok**	**80,000,000**
		XXX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dok	10 dok	10 dok	27,498,000	10 dok	30,000,000

		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 dok	10 dok	10 dok	25,409,900	10 dok	25,000,000
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dok	5 dok	5 dok	30,000,000	5 dok	25,000,000
		X.XX.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**1 Lap**	**1 Lap**	**1 Lap**	**7.988,852,077**	**1 Lap**	**7.988,852,077**
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	86 Org x 14 bulan	86 Org x 14 bulan	80 Org x 14 bulan	7,829,120,077	80 Org x 14 bulan	7,829,120,077
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Adm. Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas	12 dok	12 dok	12 dok	159,732,000	12 dok	159,732,000
		X.XX.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**1 Lap**	**1 Lap**	**1 Lap**	**60,000,000**	**1 Lap**	**280,000,000**
		X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya	1 Paket	1 Paket	-	-	1 Paket	220,000,000
		X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implemantasi Peraturan Perundang – undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	-	-	7 Orang	60,000,000	7 orang	60,000,000
		X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**1 Lap**	**1 Lap**	**1 Lap**	**273,686,900**	**1 Lap**	**401,500,000**
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	5,000,000	5 paket	10,000,000
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	2 Paket	99,823,400	4 paket	120,000,000
		X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1 paket	1 Paket	6,363,500	1 paket	8,000,000
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	-

		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	8,000,000	2 paket	8,500,000
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	2 dok	2 dok	2 dok	4.500,000	2 dok	5.000,000
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	30 laporan	30 laporan	25 laporan	150,000,000	30 laporan	250,000,000
		X.XX.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**864,874,000**	**1 Laporan**	**1,460,000,000**
		X.XX.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	-	2 unit	765,672,100	2 unit	1,200,000,000
		X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebeler	Jumlah paket mebeler yang disediakan	-	2 paket	1 paket	50,000,000	2 paket	200,000,000
		X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-
		X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	1 unit	6 unit	49,201,900	6 unit	60,000,000
		X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan penyedia jasa**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**3,164,127,595**	**1 Laporan**	**3,256,100,000**
		X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	-	-	300 lap	5,500,000	300 lap	4,600,000
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	-	-	50 lap	40,000,000	70 lap	80,000,000
		X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 lap	6 lap	8 lap	5.500.000	10 lap	10.500.000

		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 lap	12 lap	12 lap	3,113,127,595	12 lap	3,161,000,000
		X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan pemeliharaan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**98,496,000**	**1 Laporan**	**250,000,000**
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 Unit	11 Unit	5 Unit	90,000,000	6 Unit	170,000,000
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	8,496,000	10 Unit	30,000,000
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipeliohara/ direhabilitasi	-	-	-	-	1 Unit	50.000.000

Lampiran
Pohon Kinerja

POHON KINERJA SATPOL PP

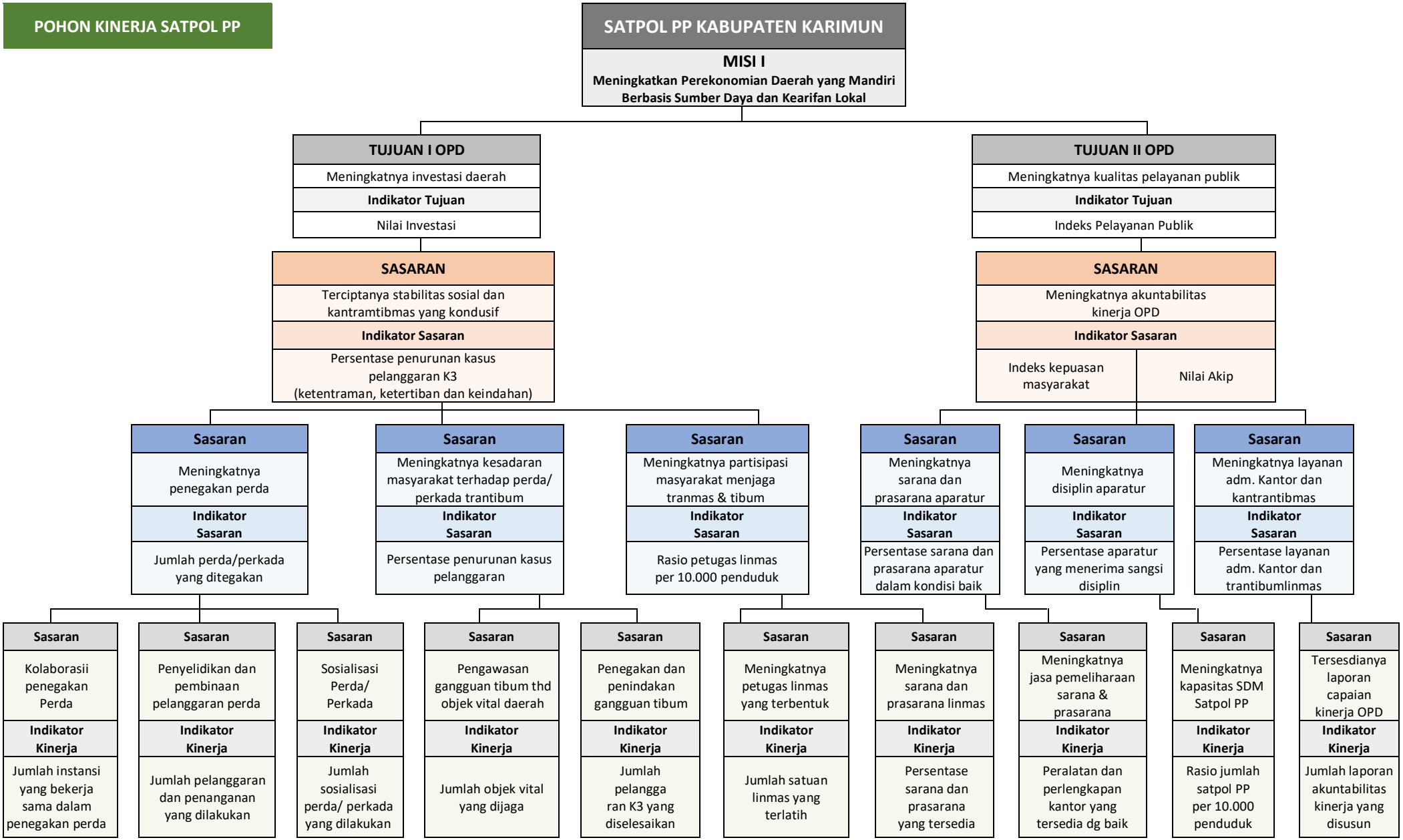

RENCANA
KERJA 2025

DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN

Komplek Perkantoran Bupati Karimun, Gedung Bukit Gading Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman – Poros, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau 29631
Website : https://dinsos.karimunkab.go.id / Email : dinsos_kab.karimun@yahoo.co.id
Telepon/Faksimile 0777-7360422 / 7360423

BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah (PD) melakukan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025;

b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan antar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klafisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);

20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 46);

21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);

22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 99 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 99);

23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 45);

24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
RENCANA KERJA (RENJA)

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :
   a. pendahuluan;
   b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
   c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
   d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
   e. penutup.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta harus berpedoman dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
(3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya.
(4) Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 8 Juli 2024

BUPATI KARIMUN,

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024 NOMOR 34

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini, merupakan panduan dan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Sosial dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk periode satu tahun kedepan

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, dan pendanaan untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karimun. Renja ini mengacu pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2021—2026 dan bersifat indikatif untuk menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Karimun dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025, dan untuk meninjau kembali hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian Renja tahun berjalan (2024).

Diharapkan semua bidang teknis di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Karimun dan *stakeholders* lainnya dengan adanya rencana kerja ini akan tercipta kesatuan gerak dan langkah dalam upaya penyelenggaraaran kesejahteraan sosial terutama dalam pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menciptakan peningkatan kinerja organisasi.

Tanjung Balai Karimun, 8 Juli 2024

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Karimun

Dr. Sulamo, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197010261992011001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 24
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun 25
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 26
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 27
3.1. Telahaan Kebijakan Nasional 27
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah . 28
3.3. Program dan Kegiatan 29
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 31
BAB 5 PENUTUP 38
LAMPIRAN 40

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2023	7
Tabel 2.2	Capaian kinerja Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2023.....	9
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024	13
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2021.....	21
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2023	22
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2023	22
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Strategis pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025	29
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026.....	32

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang menjadi dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RENJA PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

RENJA PD pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun ini mengacu pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Karimun, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026. Selain itu, Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Karimun mengacu pada Tema Pembangunan Kabupaten karimun Tahun 2025 "*Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien*" serta mengacu pada Prioritas Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2025 "*Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif*".

Penyusunan RENJA PD pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025 menjabarkan rencana kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Karimun yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah.

Penyusunan RENJA PD Dinas Sosial Kabupaten Karimun ini sebagai bahan acuan dalam pembangunan khususnya upaya penyelenggaraan sosial selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan memperhatikan dimensi waktu, sumberdaya dan potensi yang dimiliki, isu–isu strategis yang berkembang di masyarakat, serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat

memberikan dampak yang signifikan untuk terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan RENJA PD Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), telah diubah beberapa kali terakir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang - Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karimun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);

22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 50);
23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98);
24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 33);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENJA PD Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun kedepan beserta rencana kerja dan anggaran.

Tujuan penyusunan RENJA PD Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah :

1. Tersedianya gambaran yang jelas tentang program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025;
2. Tersedianya acuan dan arahan dalam pencapaian sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;
3. Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

RENJA PD Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025 disusun melalui sistematika sebagai berikut :

BAB 1 **Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB 2 **Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB 3 **Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah,** berisi tentang Telahaan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB 4 **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**, berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB 5 **Penutup**

BAB 2
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2023, Dinas Sosial Kabupaten Karimun melaksanakan 4 (empat) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan sebagaimana ditunjukan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Karimun
Tahun 2023

No.	Nama Program	No.	Nama Kegiatan	No.	Nama Sub Kegiatan
1.	Program Rehabilitasi Sosial	1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.	Penyediaan Permakanan
				2.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
				3.	Pemberian Layanan Rujukan
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	4.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				5.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
3.	Program Penanganan Bencana	3.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota	6.	Penyediaan Makanan
				7.	Penyediaan Sandang
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				10.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				12.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
				14.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No.	Nama Program	No.	Nama Kegiatan	No.	Nama Sub Kegiatan
				15.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				16.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				17.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan
				18.	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD
		7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				20.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				22.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				23.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				24.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Secara keseluruhan hasil pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2023 dicapai dengan berbagai upaya dan strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 4 (empat) program, 8 (delapan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dengan dukungan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.643.280.770,- (Empat milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.847.646.381,- (Tiga milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) atau 82,86%. Uraian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Capaian kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	4.64%	5.13%	149.999.681	68.232.116	45,49
	1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	165 Org	167 Org	149.999.681	68.232.116	45,49
	1. Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang menerima paket permakanan	80 Org	80 Org	39.988.858	25.973.822	64,95
	2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	80 Org	80 Org	60.011.029	30.284.900	50,47
	3. Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Org	7 Org	49.999.794	11.973.394	23,95
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	46.84%	44.55%	90.069.038	51.677.513	57,38
	2. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang masuk dalam DTKS	94.704 jiwa	93.209 jiwa	90.069.038	51.677.513	57,38

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
	4. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	1.000 Org	889 Org	19.999.038	2.015.513	10,08
	5. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6.913 KPM 9.269 KPM	6.077 KPM 8.704 KPM	70.070.000	49.662.000	70,87
3.	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	351.782.340	237.764.920	67,59
	3. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	800 Org	195 Org	351.782.340	237.764.920	67,59
	6. Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	800 Org	195 Org	245.634.854	178.164.920	72,53
	7. Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 Org	10 Org	106.147.486	59.600.000	56,15
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM	79,50	81,79	4.051.433.711	3.489.971.832	86,14
	4. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	5 Dok	5 Dok	89.849.601	51.495.500	57,31

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
	8. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	42.809.976	23.123.000	54,01
	9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lap	2 Lap	19.999.625	17.659.500	88,30
	10. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	1 Lap	27.040.000	10.713.000	39,62
	5. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	1 Lap	1 Lap	3.263.057.417	2.933.865.815	89,91
	11. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	328 Org Bln	328 Org Bln	3.186.449.417	2.872.125.815	90,14
	12. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1 Dok	1 Dok	76.608.000	61.740.000	80,59
	6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	1 Lap	1 Lap	196.541.250	107.114.282	54,50
	13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	548.783	200.000	36,44
	14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	15.661.417	9.096.000	58,08
	15. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.835.847	988.300	53,83
	16. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	11.385.526	7.123.000	62,56
	17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	1 Dok	9.725.000	6.330.000	65,09

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
	18. Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Lap	33 Lap	157.384.677	83.376.982	52,98
	7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan	1 Lap	1 Lap	448.021.000	391.742.235	87,44
	19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	87.696.000	48.692.235	55,52
	20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	360.325.000	343.050.000	95,21
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan	1 Lap	1 Lap	53.964.443	5.754.000	10,66
	21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	33.882.476	4.000.000	11,81
	22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	18.878.850	1.754.000	9,29
	23. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	593.117	0	0
	24. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	-	610.000	0	0
	J U M L A H				**4.643.284.770**	**3.847.646.381**	**82,86**

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 dan pencapaian Renstra 2021 – 2026 dapat terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program s.d. Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 9/6*100
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				**Indeks Pelayanan Publik**	**4,00**				
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial			**Nilai AKIP**	**76,50**				
		1.06.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM**	**83**	**81.79**	**82**	**82**	**98.80**
		1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**36 Dokumen**	**11 Dokumen**	**4 Dokumen**	**15 Dokumen**	**40.54**
		1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	4 Dokumen	1 dokumen	5 dokumen	45.45
		1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	8 Laporan	53.33
		1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	20
		1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**5 laporan**	**2 Laporan**	**1 Laporan**	**3 Laporan**	**60**

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program s.d. Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 9/6*100
		1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.750 orang bulan	594 orang bulan	336 orang bulan	930 orang bulan	53.14
		1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	2 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	60
		1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**5 laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**3 Laporan**	**60**
		1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	3 Paket	60
		1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	8 Paket	4 Paket	12 Paket	60
		1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	4 Paket	2 Paket	6 Paket	60
		1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	4 Paket	2 Paket	6 Paket	60
		1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	60
		1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135 Laporan	80 Laporan	25 Laporan	105 Laporan	77.78
		1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**	**5 laporan**	**2 Laporan**	**1 Laporan**	**3 Laporan**	**60**
		1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 paket	2 Paket	2 paket	4 paket	26.67
		1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 unit	4 Unit	1 Unit	5 unit	16.30
		1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	7 unit	7 unit	14 unit	100

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program s.d. Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 9/6*100
		1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**	**5 laporan**	**2 Laporan**	**1 Laporan**	**3 Laporan**	**60**
		1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	60
		1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	-	2 Laporan	40
		1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	60
		1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**5 laporan**	**2 Laporan**	**1 Laporan**	**3 Laporan**	**60**
		1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100
		1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100
		1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 unit	3 unit	7 unit	10 unit	38.85
		1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	12 unit	7 unit	19 unit	100
Meningkatkan kesejahteraan sosial				Persentase PPKS mandiri	3.03	1.72	1.93	1.93	
	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar PPKS			Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kessos	8.37 56.80	5.95 52.70	6.99 54	6.99 54	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program s.d. Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 9/6*100
		1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS Kelembagaan yang terakreditasi** **Persentase PSKS individu yang tersertifikasi**	**90 Persen** **41.14 Persen**	**60 Persen** **32.28 Persen**	**70 Persen** **34.81 Persen**	**70 Persen** **34.81 Persen**	**77.78** **84.61**
		1.06.02.2.02	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengumpulan sumbangan yang sesuai dengan ketentuan**	**70 izin**	**10 izin**	**-**	**10 izin**	**14.29**
		1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	20
		1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah PSKS Kelembagaan yang terakreditasi** **Jumlah PSKS individu yang tersertifikasi**	**9 Lembaga** **65 Orang**	**6 Lembaga** **51 Orang**	**7 Lembaga** **55 Orang**	**7 Lembaga** **55 Orang**	**77.78** **84.62**
		1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	200 orang	40 orang	-	40 orang	20
		1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	-	14 orang	14 orang	23.33
		1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	25 lembaga	7 lembaga	1 lembaga	8 lembaga	32
		1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Sertifikat	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program s.d. Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 9/6*100
		1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani**	**100 Persen**	-	-	-	-
		1.06.03.2.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke daerah asal**	**50 orang**	-	-	-	-
		1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	-	-	-	-
		1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**7.15 Persen**	**5.13 Persen**	**6.93 Persen**	**6.93 Persen**	**96,92**
		1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar**	**1.375 orang**	**332 orang**	**422 orang**	**754 orang**	**54.84**
		1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	435 orang	80 orang	-	80 orang	18.39
		1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	445 orang	50 orang	-	50 orang	11.24

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program s.d. Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 9/6*100
		1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	295 orang	50 orang	45 orang	95 orang	32.20
		1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 orang	12 orang	-	12 orang	24
		1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	25 orang	130 orang	135 orang	265 orang	100
		1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	10 orang	7 orang	17 orang	34
		1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar**	**275 orang**	-	**52 orang**	**52 orang**	**18.91**
		1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	25 orang	-	26 orang	26 orang	**100**
		1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	250 orang	-	26 orang	26 orang	10.4
		1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**	**50.68 Persen**	**44.55 Persen**	**49.97 Persen**	**49.97 Persen**	**98.60**
		1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Fakir Miskin yang masuk dalam DTKS**	**100.000 orang**	**89.904 orang**	**86.000 orang**	**86.000 orang**	**86**

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program s.d. Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 9/6*100
		1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	50.000 Orang	11.692 orang	1.000 orang	12.692 orang	25.39
		1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7.850 KPM	8.704 KPM	1.800 KPM	9.704 KPM	100
		1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar**	**4.000 Orang**	**936 Orang**	**300 Orang**	**1.236 Orang**	**30.90**
		1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	4.000 Orang	936 Orang	300 Orang	1.236 Orang	30.90
		1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	440 Orang	100 orang	-	100 orang	25

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Sosial berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial serta norma dan standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan terkait kinerja pelayanan urusan sosial.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2024 dilaksanakan berdasar indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial dengan memasukan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial (Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial menyelenggarakan Urusan Sosial yang merupakan urusan Wajib Pelayanan Dasar, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tahun 2023, Dinas Sosial melaksanakan 4 (empat) program, 8 (delapan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Karimun s.d. Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM /IKK	TARGET RENSTRA TAHUN KE					CAPAIAN KINERJA		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	
1	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		7,02	6,11	6,81	7,59	8,37	6,72	5,95	
2	Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kessos		50,52	52,50	54	55,50	56,80	51,11	52,70	
3	Nilai AKIP		76,30	76,30	76,40	76,40	76,50	76,21	76,44	
4	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		4,43	5,59	6,87	8,28	9,84	3,38	5,13	
5	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana		100	100	100	100	100	100	100	

2.2.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian target Tahun 2023 dengan capaian hingga Tahun 2023. Dimana semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2023 :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang Terpenuhi kebutuhan dasarnya	6,11 %
		Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kessos	52,50%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai AKIP	76,45

2.2.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang Terpenuhi kebutuhan dasarnya	6,11 %	5,95 %	97,38
		Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kessos	52,50%	52,70 %	100,38
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai AKIP	76,45	76,44	99,99

Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023 diukur melalui 2 (dua) Sasaran dan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Berdasarkan tabel diatas Rata-rata Capaian Sasaran Strategis Dinas Sosial adalah 99,25%. Capaian indikator kinerja pada setiap sasaran sudah sangat baik namun terdapat 2 (dua) indikator yang targetnya tidak tercapai. Dinas Sosial akan terus melakukan perbaikan kinerjanya dan melaksanakan evaluasi atas setiap capaian sasaran strategisnya sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan.

Capaian kinerja Tahun 2023 ini menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan perencanaan Dinas Sosial Tahun 2025. Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024, Dinas Sosial Kabupaten Karimun merencanakan program dan kegiatan Tahun 2025 yang lebih difokuskan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan.
2. Peningkatan dalam Pemenuhan kebutuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial serta perlindungan sosial bagi korban bencana sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Capaian kinerja Tahun sebelumnya yang berkaitan dengan Pemenuhan SPM bidang sosial belum optimal, sehingga perlu adanya peningkatan dengan merencanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan kegiatan perlindungan sosial korban bencana;
3. Mendukung Pemerintah daerah dalam program penghapusan kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting dengan Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan Kabupaten/Kota;
4. Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;

5. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan sosial untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

2.3. Isu – Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah dan masyarakat) di masa datang, suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berangkat dari permasalahan kesejahteraan sosial yang sangat kompleks dan dinamis. Kompleksitas persoalan sosial tidak hanya menyangkut variabel masalah sosial yang sangat luas (mulai dari kemiskinan, keterlantaran, kecatatan, keterasingan, ketunaan sosial, efek kebencanaan baik alam maupun bencana sosial, dan penyimpangan perilaku masyarakat), namun juga menyangkut optimalisasi integrasi dan sinergitas lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam pengembangan perencanaan dan pengendalian kebijakan, strategi dan program kesejahteraan sosial agar lebih menyentuh akar permasalahan mendasar yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kabupaten Karimun.

Dari sisi dinamisasi persoalan kesejahteraan sosial memiliki kecenderungan untuk meningkat, dengan faktor penyebab yang beragam dari tahun ke tahun sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif, terutama program prioritas OPD terkait yang dilaksanakan secara terprogram dan berkesinambungan tidak hanya penanganan masalahnya semata namun juga penanganan yang bersifat antisipatif atas potensi permasalahan sosial yang dapat muncul di kemudian hari.

Secara umum permasalahan pembangunan terkait persoalan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun dengan isu-isu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan;
2. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Permensos RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimum Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Masih terbatasnya ketersediaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang valid dan *up to date*, sehingga jumlah PPKS yang tertangani masih sangat terbatas;
4. Belum optimalnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sehingga masih rendahnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. Keterbatasan alokasi anggaran organisasi sehingga belum semua indikator kinerja didukung oleh kegiatan yang teranggarkan;
6. Dukungan sarana dan prasarana dinas yang masih belum mencukupi kebutuhan yang sesungguhnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diperoleh melalui musyawarah pembangunan daerah Kabupaten Karimun yang dihadiri oleh kelompok masyarakat, kepala desa, ormas dan LSM dan pembahasan di Forum OPD. Pada Renja Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2024 tidak terdapat usulan program/ kegiatan dari masyarakat.

BAB 3
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengusung tema "*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*", dengan pembangunan nasional yang diarahkan pada 8 (delapan) prioritas nasional yang meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. *Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas*;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Sosial Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Akreditasi lembaga kesejahteraan sosial;
2. Pembinaan lembaga dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial;
3. Pemenuhan kebutuhan dasar SPM bidang sosial;
4. Meningkatkan penanganan dan pelayanan pemerlu kesejahteraan sosial;

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada RENJA PD pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Sasaran pada RENJA PD pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan prioritas utama meningkatkan penanganan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial.

Strategi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan prioritas utama meningkatkan penanganan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, secara rinci sebagai berikut :

1. Meningkatkan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS
2. Meningkatkan pemberdayaan PSKS dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik kelembagaan maupun perseorangan.
3. Pemantapan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Arah kebijakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan prioritas utama meningkatkan penanganan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan, secara rinci:

1. Peningkatan kemandirian PPKS difokuskan pada Pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan berbasis masyarakat, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial serta reunifikasi.
2. Pemutakhiran dan Pengelolaan Data Fakir Miskin.
3. Kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektor dalam pelaksanaan program.
4. Peningkatan kapasitas PSKS dilakukan dengan Pembinaan dan pemberdayaan lembaga sosial, memberikan pelatihan teknis bagi TKSK, PSM, Tagana dalam penanganan masalah sosial.
5. Akreditasi dan sertifikasi penyelenggaraan Kessos.
6. Peningkatan kompetensi ASN sesuai dengan tugas dan fungsi.

7. Peningkatan koordinasi dan peran serta kelembagaan sosial lainnya.

Uraian tujuan dan sasaran strategis pada penyusunan perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Tahun 2025 yang akan datang dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Pada Renja Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
1.	Meningkatkan kesejahteraan sosial	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	7,82 %
			Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kessos	54,50 %
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Nilai AKIP	76,60
			Level Kematangan MR Dinas Sosial	3,06

Untuk mengoptimalkan pengukuran pencapaian sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial" pada Tahun 2024 dan 2025 Dinas Sosial menambah satu indikator yaitu "Level Kematangan MR Dinas Sosial" karena Kematangan Manajemen Risiko dapat menjadi tolok ukur dalam peningkatan akuntabilitas suatu perangkat daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Bedasarkan RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Karimun mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp. 8.159.147.827,-. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada rencana kerja tahun 2025 akan dilakukan intervensi melalui program dan kegiatan meliputi :

SASARAN STRATEGIS 1 :
"*Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)*"

1. Program Rehabilitasi Sosial

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial PPKS yang optimal.
Pagu Indikatif : Rp. 1.139.999.700,-

Indikasi kegiatan :

1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;

2. Program Penanganan Bencana

Sasaran : Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS yang optimal.

Pagu Indikatif : Rp. 811.000.800,-

Indikasi kegiatan :

1) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;

3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Sasaran : Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS yang optimal.

Pagu Indikatif : Rp. 725.000.000,-

Indikasi kegiatan :

1) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Pemberdayaan Sosial

Sasaran : Meningkatnya kualitas pemberdayaan sosial PSKS.

Pagu Indikatif : Rp. 200.000.000,-

Indikasi kegiatan :

1) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

SASARAN STRATEGIS 2 :

"*Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial*"

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja Dinas Sosial yang optimal.

Pagu Indikatif : Rp. 5.283.147.327,-

Indikasi kegiatan :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB 4
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Sosial merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Sosial. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Karimun namun juga melalui sumber pendanaan lainnya APBD Provinsi Kepulauan Riau dan APBN.

Uraian rumusan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun untuk tahun perencanaan 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Karimun
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan kesejahteraan sosial	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			Persentase PPKS mandiri		2,59			2,85	
				1. Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 2. Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kessos		7,82 54,50			8,37 55	
		1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**8.159.147.827**			**7.577.545.000**
		1.6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**8.159.147.827**			**7,519,256,000**
		1.6.4	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**		**7,85 Persen**	**1,139,999,700**		**8,02 Persen**	998,000,000
		1.6.4.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar**		**330 Orang**	**1,139,999,700**		**370 orang**	812,000,000
		1.6.4.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	100 Orang	160,000,000	PAD	90 orang	120,000,000
		1.6.4.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	100 Orang	160,000,000	PAD	90 orang g	143,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.6.4.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	65 orang	160,000,000	PAD	60 orang	164,000,000
		1.6.4.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	10 orang	120,000,000	PAD	5 orang	50,000,000
		1.6.4.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	50 orang	100,000,000	PAD	50 orang	70,000,000
		1.6.4.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	50 orang	100,000,000	PAD	20 orang	50,000,000
		1.6.4.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	5 orang	10,000,000	PAD	5 orang	10,000,000
		1.6.4.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	5 orang	10,000,000	PAD	5 orang	10,000,000
		1.6.4.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	20 orang	50,000,000	PAD	10 orang	10,000,000
		1.6.4.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	5 orang	50,000,000	PAD	5 orang	5,000,000
		1.6.4.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	5 orang	20,000,000	PAD	5 orang	35,000,000
		1.6.4.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	7 orang	199,999,700	PAD	5 orang	140,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.6.5	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**		**45,81 Persen**	**725.000.000**		**47,16 Persen**	**650,000,000**
		1.6.5.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Fakir Miskin yang masuk dalam DTKS**		**84.000 orang**	**725.000.000**		**86.000 orang**	**650,000,000**
		1.6.5.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	1.000 orang	210.000.000	PAD	1.000 orang	135,000,000
		1.6.5.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	15 keluarga	115.000.000	PAD	10 keluarga	115.000.000
		1.6.5.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	8.668 KPM	275.000.000	PAD	7.850 KPM	300,000,000
		1.6.5.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	30 orang	125.000.000	PAD	25 orang	100,000,000
		1.6.6	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**		**100 Persen**	**811.000.800**		**100 Persen**	**760,000,000**
		1.6.6.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar**		**400 orang**	**811.000.800**		**350 Orang**	**760,000,000**
		1.6.6.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Karimun,semua kecamatan, semua kelurahan	400 orang	492.461.000	PAD	350 orang	400,000,000
		1.6.6.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	90 orang	161.088.000	PAD	70 orang	120.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntanbilitas kinerja Dinas Sosial	1.6.6.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	1 unit	75.219.000	PAD	1 unit	25.000.000
		1.6.6.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	20 orang	16.878.000	PAD	80 orang	70.000.000
		1.6.6.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	40 orang	65.354.800	PAD	30 orang	35.000.000
		1.6.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS Kelembagaan yang terakreditasi**		**70 Persen**	**200.000.000**		**80 Persen**	**453.000.000**
				Persentase PSKS individu yang tersertifikasi		**36,08 Persen**			**36,61 Persen**	
		1.6.2.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah PSKS Kelembagaan yang terakreditasi**		**7 lembaga**	**200.000.000**		**8 lembaga**	**453.000.000**
				Jumlah PSKS individu yang tersertifikasi		**57 orang**			**61 orang**	
		1.6.2.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	5 lembaga	200.000.000	PAD	3 lembaga	115,000,000
				Indeks Pelayanan Publik		3,55			3,58	
				Nilai AKIP		76,60			76,50	
				Level Kematangan MR Dinas Sosial		3,09				
		1.6.1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM**		**82,50**	**5.283.147.327**		**83**	**4.681.545.000**
		1.6.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**		**5 dokumen**	**34.999.700**		**5 dokumen**	**140,000,000**
		1.6.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	1 dokumen	20,000,000	PAD	1 dokumen	60,000,000
		1.6.1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	2 laporan	9.999.700	PAD	2 laporan	50,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.6.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	1 laporan	5,000,000	PAD	1 laporan	50,000,000
		1.6.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**		**1 laporan**	**4.378.839.127**		**1 laporan**	**3.117.000.000**
		1.6.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	420 orang bulan	4.294.671.127	DAU	420 orang bulan	2.999.000.000
		1.6.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	1 dokumen	84.168.000	PAD	1 dokumen	118,000,000
		1.6.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**		**1 Laporan**	**257,200,500**		**1 Laporan**	**333,545,000**
		1.6.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	1 Paket	3.530,000	PAD	1 Paket	3,000,000
		1.6.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	4 Paket	14.570,500	PAD	4 Paket	23,000,000
		1.6.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	2 Paket	3,116,000	PAD	2 Paket	9,000,000
		1.6.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	2 Paket	14,454,000	PAD	2 Paket	23,000,000
		1.6.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	1 Dokumen	5,000,000	PAD	1 Dokumen	35,000,000
		1.6.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	25 Laporan	216,480,000	PAD	25 Laporan	190,545,000
		1.6.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**		**1 Laporan**	**48.624.000**		**1 Laporan**	**70,000,000**
		1.6.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	4 unit	48.624.000	PAD	5 unit	70,000,000
		1.6.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**		**1 Laporan**	**522,965,000**		**1 Laporan**	**550,000,000**
		1.6.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	1 Laporan	13.990.000	PAD	1 Laporan	85,000,000
		1.6.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	1 Laporan	508,975,000	PAD	1 Laporan	450,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.6.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan pemeliharaan**		**1 Laporan**	**40,519,000**		**1 Laporan**	**62,000,000**
		1.6.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	1 unit	22.069.000	PAD	1 unit	30,000,000
		1.6.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	3 unit	13.460.000	PAD	3 unit	22,000,000
		1.6.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	5 unit	4,990,000	PAD	3 unit	10,000,000

BAB 5
PENUTUP

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025 ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Karimun perlu keterpaduan dan sinkronisasi baik dalam kegiatan maupun antar instansi terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antar pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Renja Tahun 2025 ini disusun berdasarkan kaidah-kaidah sistematika penulisan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pemabngunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
2. Penyusunan Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada dokumen Renja Tahun 2025 ini disusun berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikai, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3. Renja Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Karimun dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karimun.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Menjadikan Renja sebagai pedoman pelaksanaan kerja bagi Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada tahun anggaran 2025.
2. Menjadikan acuan bagi Bidang dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Menyusun Program kegiatan dan anggaran dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2025.
4. Menyusun jadwal pelaksanaan, memperkirakan penggunaan anggaran tiap triwulan serta penggunaan sarana, prasarana dan tenaga yang akan melaksanakan rencana kerja.
5. Mempersiapkan format-format laporan pelaksanaan yang didasarkan pada target pencapaian Renstra dan target pencapaian SPM.
6. Menyusun rencana monitoring dan evaluasi.
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam penanganan masalah sosial.

Tanjung Balai Karimun, 8 Juli 2024

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Karimun

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN DINAS SOSIAL

Dr. Sularno, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197010261992011001

LAMPIRAN

Sasaran RPJMD / Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target 2025	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
									Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan kesejahteraan sosial				Persentase PPKS mandiri	2,59					**8,159,147,827**
	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			1. Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 2. Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kessos	7,82 54,50					**8,159,147,827**
		Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial PPKS yang optimal		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	**7,85 Persen**	**1.6.4**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**7,85 Persen**	**1,139,999,700**
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dasar PPKS yang sesuai standar	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	**330 Orang**	**1.6.4.2.01**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar**	**330 Orang**	**1,139,999,700**
						1.6.4.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	160,000,000
						1.6.4.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	160,000,000
						1.6.4.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	65 orang	160,000,000
						1.6.4.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 orang	120,000,000
						1.6.4.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 orang	100,000,000
						1.6.4.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 orang	100,000,000
						1.6.4.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	10,000,000

Sasaran RPJMD / Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target 2025	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
									Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						1.6.4.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 orang	10,000,000
						1.6.4.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	20 orang	50,000,000
						1.6.4.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	50,000,000
						1.6.4.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 orang	20,000,000
						1.6.4.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 orang	199,999,700
		Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS yang optimal		Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	45,81 Persen	**1.6.5**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**	**45,81 Persen**	**725.000.000**
			Meningkatnya Pengelolaan Data Fakir Miskin yang efektif	Jumlah Fakir Miskin yang masuk dalam DTKS	84.000 orang	**1.6.5.2.02**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Fakir Miskin yang masuk dalam DTKS**	**84.000 orang**	**725.000.000**
						1.6.5.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	1.000 orang	210.000.000
						1.6.5.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	15 keluarga	115.000.000
						1.6.5.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8.668 KPM	275.000.000
						1.6.5.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	125.000.000
		Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS yang optimal		Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 Persen	**1.6.6**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**	**100 Persen**	**811.000.800**
			Terlaksananya perlindungan sosial korban bencana yang optimal	Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	400 orang	**1.6.6.2.01**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar**	**400 orang**	**811.000.800**
						1.6.6.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	400 orang	492.461.000

Sasaran RPJMD / Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target 2025	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
									Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						1.6.6.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	90 orang	161.088.000
						1.6.6.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 unit	75.219.000
						1.6.6.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	16.878.000
						1.6.6.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	65.354.800
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan sosial PSKS		Persentase PSKS Kelembagaan yang terakreditasi Persentase PSKS individu yang tersertifikasi	70 Persen 36,08 Persen	**1.6.2**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS Kelembagaan yang terakreditasi** **Persentase PSKS individu yang tersertifikasi**	**70 Persen** **36,08 Persen**	**200.000.000**
			Meningkatnya Kompetensi PSKS sesuai standar	Jumlah PSKS Kelembagaan yang terakreditasi Jumlah PSKS individu yang tersertifikasi	7 lembaga 57 orang	**1.6.2.2.03**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah PSKS Kelembagaan yang terakreditasi** **Jumlah PSKS individu yang tersertifikasi**	**7 lembaga** **57 orang**	**200.000.000**
						1.6.2.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 lembaga	200.000.000
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Pelayanan Publik	3,55					
	Meningkatnya Akuntanbilitas kinerja Dinas Sosial			Nilai AKIP	76,60					
				Level Kematangan MR Dinas Sosial	3,06					
		Meningkatnya Capaian Kinerja Dinas Sosial yang optimal		IKM	82,50	**1.6.1**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM**	**82,50**	**5.283.147.327**
			Meningkatnya Kinerja Perencanaan Dinas Sosial yang optimal	Jumlah Dokumen	5 dokumen	**1.6.1.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**5 dokumen**	**34.999.700**
						1.6.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	20,000,000

Sasaran RPJMD / Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target 2025	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
									Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						1.6.1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	9.999.700
						1.6.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	5,000,000
			Meningkatnya Kinerja Keuangan Dinas Sosial yang optimal	Jumlah laporan	1 laporan	**1.6.1.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**1 laporan**	**4.378.839.127**
						1.6.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 orang bulan	4.294.671.127
						1.6.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	84.168.000
			Meningkatnya Pengelolaan Administrasi umum perkantoran yang efektif	Jumlah laporan	1 laporan	**1.6.1.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**1 Laporan**	**257,200,500**
						1.6.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.530,000
						1.6.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.570,500
						1.6.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3,116,000
						1.6.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14,454,000
						1.6.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5,000,000
						1.6.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	216,480,000
			Tersedianya Sarana prasana kerja yang memadai	Jumlah Laporan	1 laporan	**1.6.1.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**48.624.000**
						1.6.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	48.624.000
			Terimplementasinya SOP Dinas Sosial sesuai standar pelayanan	Jumlah laporan	1 laporan	**1.6.1.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**522,965,000**
						1.6.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	13.990.000
						1.6.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	508,975,000

Sasaran RPJMD / Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target 2025	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
									Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tersedianya Sarana prasana kerja yang memadai	Laporan pemeliharaan	1 laporan	**1.6.1.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan pemeliharaan**	**1 Laporan**	**40,519,000**
						1.6.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	22.069.000
						1.6.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	13.460.000
						1.6.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	4,990,000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dimana kami telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

Mengacu pada Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, khususnya pasal 126 s.d 129, yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Awal Renja Perangkat Daerah.

Menindaklanjuti peraturan tersebut maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun harus menyusun rancangan awal Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai perwujudan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daeah Kabupaten Karimun.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban formal atas semua pelaksanaan program ,kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Awal ini menyajikan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya (2023) yang berintikan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Furngi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta Rencana Kerja serta pendanaan Perangkat daerah pada tahun 2025 yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Rencana Kerja ini Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi-Nya, aamiin.

Tg. Balai Karimun, 7 Oktober 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN

Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App, Sc
Pembina Utama Muda
NIP.196710031992031010

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 21

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ... 23

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 24

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 39

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional 39

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 39

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas 41

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 43

BAB V PENUTUP 56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan tahun 2023 8

Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (Tahun Berjalan) 18

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2022 – 2023 22

Tabel 2.4. Permasalahan 23

Tabel 2.5 Isu Strategis..... 23

Tabel 2.6 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 25

Tabel 3.1 Program dan Kegiatan 41

Tabel 4.1 Rencana Progam dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026..... 44

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang sekaligus merupakan acuan bagi Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyusun dan menata perencanaan pembangunan yang disusun, baik pembangunan jangka menengah yang kemudian dituangkan dalam Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun pembangunan jangka pendek.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian di rinci atau di *breakdown* ke dalam Pembangunan Jangka Pendek atau Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam mencapai Visi dan Misi pemerintah daerah kemudian juga menyusun rencana kerja tahunan (Renja) dengan mempedomani program dan kegiatan-kegiatan yang tertuang didalam Renstra masing-masing OPD. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai salah satu bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang bertugas menjaga kestabilan dan Keharmonisan kehidupan ketenagakerjaan dan perindustrian di Kabupaten Karimun yang pada tahun 2024 ini telah melaksanakan serangkaian proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja pembangunan untuk tahun 2025 dengan membaurkan proses *Top Down Planning* dengan *Buttom Up Planning* yang diselanggarakan pada awal tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomr 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);
22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 10);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah :

Agar pelaksanaan pembangunan urusan ketenagakerjaan dan Perindustrian lebih terarah, efektif dan terkoordinasi antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik Pusat, Provinsi maupun dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah :

1. Menentukan prioritas pembangunan jangka menengah tahap awal (Renstra 2021-2026).
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan ketenagakerjaan dan perindustrian antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.
4. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal SKPD

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun s/d tahun 2023 sebagai berikut :

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustian Kabupaten Karimun untuk tahun anggaran 2023 telah mendapat alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Karimun sebesar Rp. 8,224,108,898,- dan terealisasi sebesar Rp. 6,876,154,931,- atau sebesar 83,61 Persen.

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan di atas dapat dilihat dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel. 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Karimun
Periode Pelaksanaan Tahun Anggaran 2023
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No.	Sasaran	Kode					Urusan / Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Ouput) (Renstra 2022-2026)	Satuan	Target Renstra Perangkat daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat daerah Penanggung Jawab
										7		8		9		10		11		12		
1	2	3					4	5	6	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
		2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	21,608,220,000	-	2,787,644,947	89.92	4,521,294,175	89.92	91.85	89.92	7,308,939,122	112.40	33.82	Disnakerin
		2	7	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	37	624,500,000	6	48,927,252	6	82,982,283	75.88	75.88	6	131,909,535	16.22	21.12	Disnakerin
		2	7	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	11	249,000,000	2	40,079,252	2	35,559,457	100.00	63.88	4	75,638,709	36.36	30.38	Disnakerin
		2	7	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	237,500,000	1	8,848,000	3	40,722,826	100.00	92.23	3	49,570,826	100.00	20.87	Disnakerin

		2	7	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	138,000,000	0	-	2	6,700,000	100.00	70.16	2	6,700,000	1.00	4.86	Disnakerin
		2	**7**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan**	**Dokumen**	**14**	**17,425,000,000**	**5**	**2,738,717,695**	**2**	**3,680,620,829**	**50.00**	**94.74**	**7**	**6,419,338,524**	**50.00**	**36.84**	**Disnakerin**
		2	7	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	1608	17,285,000,000	364	2,656,025,695	364	3,614,632,829	100.00	95.26	364	6,270,658,524	22.64	36.28	Disnakerin
		2	7	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Dokumen	1	140,000,000	1	82,692,000	1	65,988,000	100.00	72.91	1	148,680,000	100.00	106.20	Disnakerin
		2	**7**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Laporan**	**8**	**450,000,000**	**3**	**218,202,829**	**5**	**226,866,663**	**83.33**	**65.39**	**8**	**218,202,894**	**100.00**	**48.49**	**Disnakerin**
		2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	12,600,000	1	1,998,000	1	1,983,900	100.00	99.89	2	3,981,900	200.00	31.60	Disnakerin
		2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	69,000,000	1	25,262,000	1	71,777,000	100.00	59.49	2	97,039,000	200.00	140.64	Disnakerin
		2	7	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	34,000,000	1	5,705,000	1	7,226,000	100.00	99.40	2	12,931,000	200.00	38.03	Disnakerin
		2	7	1	2.06	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	38,800,000	1	5,090,000	1	5,137,000	100.00	100.00	2	10,227,000	200.00	26.36	Disnakerin
		2	7	1	2.06	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	77,100,000	1	13,960,000	1	9,835,000	100.00	98.35	2	23,795,000	200.00	30.86	Disnakerin
		2	7	1	2.06	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	218,500,000	1	166,187,829	1	130,907,763	100.00	64.84	**2**	297,095,592	200.00	135.97	Disnakerin
		2	**7**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Laporan**	**26**	**2,721,450,000**	**2**	**473,429,667**	**0**	**472,427,500**	**0.00**	**95.11**	**1**	**945,857,167**	**3.85**	**34.76**	**Disnakerin**

		2	7	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	92,000,000	1	77,834,667	1	23,577,500	100.00	87.91	2	101,412,167	13.33	110.23	Disnakerin
		2	7	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	15	2,629,450,000	1	395,595,000	1	448,850,000	100.00	95.52	2	844,445,000	0.13	32.11	Disnakerin
		2	**7**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Laporan**	**35**	**387,270,000**	**3**	**152,990,800**	**3**	**58,396,900**	**100.00**	**68.99**	**6**	**211,387,700.00**	**17.14**	**54.58**	**Disnakerin**
		2	7	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	140,660,000	1	36,375,000	1	40,575,900	100.00	74.91	2	76,950,900.00	100.00	54.71	Disnakerin
		2	7	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	63,610,000	1	105,765,800	1	5,901,000	100.00	31.89	2	111,666,800.00	100.00	175.55	Disnakerin
		2	7	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	42,000,000	4	10,850,000	4	11,920,000	100.00	99.58	4	22,770,000.00	80.00	54.21	Disnakerin
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**89.92**	**91.85**			**112.40**	**33.82**	
														Predikat Kinerja		**T**	**ST**			**ST**	**SR**	
2	**Meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja lokal yang kompetitif**	**2**	**7**	**3**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**	**Persen**	**58.00**	**24,610,087,000**	**23.87**	**4,370,290,516**	**53.57**	**1,308,552,032**	**94.90**	**79.70**	**53.57**	**5,678,842,548**	**92.36**	**23.08**	**Disnakerin**
		2	**7**	**3**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	**Persen**	**30**	**24,250,087,000**	**30**	**4,370,290,516**	**30**	**1,267,690,409**	**100.00**	**79.58**	**30**	**5,637,980,925**	**100.00**	**23.25**	**Disnakerin**
		2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	2810	23,730,087,000	480	4,370,290,516	100	1,267,690,409	94.34	87.72	580	5,637,980,925	20.64	23.76	Disnakerin

		2	7	3	2.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten / Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	5	520,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Disnakerin
		2	**7**	**3**	**2.05**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah**	**Dokumen**	**5**	**360,000,000**	**1**	**40,461,700**	**1**	**40,861,623**	**100.00**	**83.39**	**2**	**81,323,323**	**40.00**	**22.59**	**Disnakerin**
		2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	5	360,000,000	1	40,461,700	1	40,861,623	100.00	83.39	2	81,323,323	40.00	22.59	Disnakerin
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)														**94.90**	**79.70**			**92.36**	**23.08**	
		Predikat Kinerja														**ST**	**T**			**ST**	**SR**	
		2	**07**	**4**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan**	**Persen**	**47.25**	**2,550,000,000**	**91,22**	**85,360,500**	**52.96**	**323,244,412**	**113.89**	**94.02**	**52.96**	**408,604,912**	**112.08**	**16.02**	**Disnakerin**
								Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA)	**Rupiah (Milyar)**	**10,600,000,000**		**815,000,000**		**1,176,725,000**		**58.84**	**1,991,725,000**		**18.79**		
		2	**07**	**4**	**2.01**	**1**	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pelayanan Antar Kerja**	**Dokumen**	**5**	**1,420,000,000**	**0**	**0**	**2**	**241,267,090**	**100.00**	**99.95**	**2**	**241,267,090**	**30.00**	**19.08**	**Disnakerin**
		2	07	4	**2.01**	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	100	500,000,000	0	0	30	95,414,690	100.00	100.00	30	95,414,690	30.00	19.08	Disnakerin
		2	07	4	**2.01**	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	100	920,000,000	0	0	30	145,852,400	100.00	99.63	30	145,852,400	30.00	15.85	Disnakerin
		2	**7**	**4**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah perusahaan yang mempublikasikan kesempatan kerja**	**Perusahaan**	**35**	**590,000,000**	**30**	**35,776,500**	**5**	**40,260,139**	**100.00**	**78.63**	**35**	**76,036,639**	**100.00**	**12.89**	**Disnakerin**
		2	7	4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	5	590,000,000	1	35,776,500	1	40,260,139	100.00	78.63	2	76,036,639	40.00	12.89	Disnakerin
		2	**7**	**4**	**2.05**		**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perpanjangan IMTA**	**Orang**	**555**	**540,000,000**	0	**49,584,000**	**102**	**41,717,183**	**91.89**	**81.50**	**102**	**91,301,183**	**18.38**	**16.91**	**Disnakerin**

		2	7	4	2.05	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	Laporan	5	540,000,000	1	49,584,000	1	41,717,183	100.00	81.50	2	91,301,183	40.00	16.91	Disnakerin
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**86.36**	**99.95**			**65.44**	**16.02**	
															Predikat Kinerja	**T**	**ST**			**R**	**SR**	
		2	**7**	**5**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Penyelesaian kasus yang difasilitasi**	**Kasus**	**28**	**1,365,000,000**	**5**	**414,163,564**	**3**	**286,304,363**	**60.00**	**61.94**	**8**	**700,467,927**	**28.57**	**51.32**	**Disnakerin**
		2	**7**	**5**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perusahaan yang telah mimiliki PP**	**Perusahan**	**30**	**705,000,000**	**31**	**264,923,564**	**22**	**185,157,513**	**100.00**	**57.64**	**22**	**450,081,077**	**73.33**	**63.84**	**Disnakerin**
								Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB	**Perusahaan**	**4**		**4**		**4**		**100.00**		**4**		**100.00**		**Disnakerin**
		2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	5	705,000,000	1	264,923,564	1	185,157,513	100.00	57.64	2	450,081,077	40.00	63.84	Disnakerin
		2	**7**	**5**	**2,02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan**	**5**	**660,000,000**	**1**	**149,240,000**	**1**	**101,146,850**	**100.00**	**71.74**	**2**	**250,386,850**	**40.00**	**37.94**	**Disnakerin**
		2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	660,000,000	1	149,240,000	1	101,146,850	100.00	71.74	1	250,386,850	100.00	37.94	Disnakerin
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**60.00**	**61.94**			**28.57**	**51.32**	
															Predikat Kinerja	**R**	**R**			**SR**	**R**	

		3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
		3	**3 1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**														
3	**Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat**	**3**	**3 1**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Cakupan Bina Kelompok Pengrajin**	**Persen**	**88.90**	**5,315,000,000**		**669,922,635**	**21.54**	**201,657,850**	**30.93**	**25.10**	**34.79**	**871,580,485**	**39.13**	**16.40**	**Disnakerin**
		3	**3 1**	**2**	**2, 01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Industri**	**Dokumen**	**30**	**5,315,000,000**	**2**	**669,922,635**	**2**	**201,657,850**	**100.00**	**25.10**	**4**	**871,580,485**	**13.33**	**16.40**	**Disnakerin**
		3	3 1	2	2, 01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	5	270,000,000	1	54,000,000	1	84,271,200	100.00	60.19	2	138,271,200	40.00	51.21	Disnakerin
		3	3 1	2	2, 01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	5	5,045,000,000	1	669,922,635	1	117,386,650	100.00	17.69	2	787,309,285	40.00	15.61	Disnakerin
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**30.93**	**25.10**			**39.13**	**16.40**	
															Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
		3	**3 1**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Jumlah Dokumen Informasi industri secara lengkap dan terkini**	**Dokumen**	**5**	**300,000,000**	**0**	**-**	**1**	**49,944,586**	**100.00**	**99.89**	**1**	**49,944,586**	**20**	**16.65**	**Disnakerin**
		3	**3 1**	**4**	**2, 01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**5**	**300,000,000**	**0**	**-**	**1**	**49,944,586**	**100.00**	**99.89**	**1**	**49,944,586**	**20**	**16.65**	**Disnakerin**

		3	31	4	2,01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	5	300,000,000	0	-	1	49,944,586	100.00	99.89	1	49,944,586	20	16.65	Disnakerin
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															**100.00**	**99.89**			**20.00**	**16.65**	
Predikat Kinerja															**ST**	**ST**			**SR**	**SR**	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														**6,876,154,931**							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)															**77.02**	**76.40**					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)															**T**	**T**					

Tabel. 2.2
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progam dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Ouput) (Renstra 2022-2026)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**7**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**										
2	**7**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Nilai**	**80**	-	**75**	**89.92**	**112.40**	**80**	**80**	100%
2	**7**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**37**	**6**	**6**	**6**	**16.22**	4	4	100%
2	7	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	11	2	2	4	36.36	2	2	100%
2	7	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	1	3	3	100.00	1	1	100%
2	7	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	0	2	2	1.00	1	1	100%

2	**7**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan**	**Dokumen**	**14**	**5**	**2**	**7**	**50.00**	2	2	100%
2	7	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	1608	364	364	364	22.64	432	432	100%
2	7	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Dokumen	1	1	1	1	100.00	1	1	100%
2	**7**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							1	1	100%
2	7	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket						1	1	100%
2	**7**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Laporan**	**8**	**3**	**6**	**8**	**100.00**	6	6	100%
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	2	200.00	1	1	100%
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	2	200.00	1	1	100%
2	7	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	2	200.00	1	1	100%
2	7	1	2.06	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	2	200.00	1	1	100%
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1	2	200.00	1	1	100%
2	7	1	2.06	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	**2**	200.00	1	1	100%
2	**7**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Laporan**	**26**	**2**	**2**	**1**	**3.85**	2	2	100%
2	7	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	1	1	2	13.33	1	1	100%

2	7	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	15	1	1	2	0.13	1	1	100%
2	**7**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Laporan**	**35**	**3**	**3**	**6**	**17.14**	3	3	100%
2	7	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	1	1	2	100.00	1	1	100%
2	7	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	1	1	2	100.00	1	1	100%
2	7	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	4	4	4	80.00	1	1	100%
2	**7**	**3**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**	**Persen**	**58.00**	**23.87**	**56.45**	**53.57**	**92.36**	**53,57**	**53,57**	**100%**
2	**7**	**3**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	**Persen**	**30**	**30**	**30**	**30**	**100.00**	**30**	**30**	**100%**
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	2810	480	106	580	20.64	109	109	100%
2	7	3	2.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	5	0	7	0	0.00	5	5	100%
2	**7**	**3**	**2.05**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah**	**Dokumen**	**5**	**1**	**1**	**2**	**40.00**	**1**	**1**	**!00%**
2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	5	1	1	2	40.00	1	1	100%

2	**07**	**4**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan**	**Persen**	**47.25**	**91,22**	**46.5**	**52.96**	**112.08**	**46,75**	**46,75**	100%
						Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA)	**Rupiah (Milyar)**	**10,600,000,000**	**815,000,000**	**2,000,000,000**	**1,991,725,000**	**18.79**	1,300,000,000	1,300,000,000	100%
2	**07**	**4**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pelayanan Antar Kerja**	**Dokumen**	**5**	**0**	**2**	**2**	**30.00**	1	1	100%
2	07	4	2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	100	0	30	30	30.00	30	30	100%
2	07	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	100	0	30	30	30.00	30	30	100%
2	7	4	2.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah perusahaan yang mempublikasikan kesempatan kerja**	**Perusahaan**	**35**	**30**	**5**	**35**	**100.00**	30	30	100%
2	7	4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	5	1	1	2	40.00			
2	**7**	**4**	**2.04**		**Pelindungan PMI Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia	Orang	90	0	0	0	0.00	30	30	100%
2	7	4	2.04	1	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang	90	0	0	0	0.00	30	30	100%
2	**7**	**4**	**2.05**		**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perpanjangan IMTA**	**Orang**	**555**	0	**111**	**102**	**18.38**			
2	7	4	2.05	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	Laporan	5	1	1	2	40.00			

2	**7**	**5**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Penyelesaian kasus yang difasilitasi**	**Kasus**	**28**	**5**	**5**	**8**	**28.57**	**3**	**3**	**100%**
2	**7**	**5**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perusahaan yang telah mimiliki PP**	**Perusahan**	**30**	**31**	**22**	**22**	**73.33**	**25**	**25**	**100%**
						Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB	**Perusahaan**	**4**	**4**	**4**	**4**	**100.00**	**4**	**4**	**100%**
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	5	1	1	2	40.00	1	1	100%
2	**7**	**5**	**2,02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan**	**5**	**1**	**1**	**2**	**40.00**	**1**	**1**	**100%**
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	1	1	1	100.00	1	1	100%
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**										
3	**31**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Cakupan Bina Kelompok Pengrajin**	**Persen**	**88.90**		**69.65**	**34.79**	**39.13**	**100**	**100**	**100%**
3	**31**	**2**	**2,01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Industri**	**Dokumen**	**30**	**2**	**2**	**4**	**13.33**	2	2	100%
3	31	2	2,01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	5	1	1	2	40.00			

3	31	2	2,01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	5	1	1	2	40.00	1	1	100%
3	31	2	2,01	6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	5	0	0	0	0.00	1	1	100%
3	**31**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Jumlah Dokumen Informasi industri secara lengkap dan terkini**	**Dokumen**	**5**	**0**	**1**	**1**	**20**			
3	**31**	**4**	**2,01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**5**	**0**	**1**	**1**	**20**			
3	31	4	2,01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	5	0	1	1	20			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja merupakan dasar dalam mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2023 telah dapat terlaksana dengan baik dengan tingkat capaian dan berhasil hal ini ditandai dari 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan "berhasil" yaitu dengan capaian baik sementara itu dari 1 (satu) sasaran strategis dengan inikator 'Nilai Akip" untuk tahun 2023 belum diterbitkan inspektorat, selanjutnya untuk indikator "Level Kematangan Manajemen Resiko (MR) Disnakerin" baru akan dilaksanakan tahun 2024 dengan target "level 3".

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2022 – 2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi		Capaian		Target	Proyeksi Target
					2022	2023	2022	2023	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen			61,21	61,50	60,46	64,79	98,77	105,35	62	62
2	Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja	Persen			91,45	97,75	99,60	95,79	108,91	97,99	97,75	97,75
3	Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap jumlah penduduk	Persen			0,66	0,50	0,61	0,63	92,42	126	0,55	0,55
4	Nilai Akip	Nilai			73	73	50,08	*Belum terbit*	68,60		73	73
5	Level Kematangan Manajemen Resiko (MR) Disnakerin	Level			-	-	-	-	-	-	Level 3	Level 3
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai			75	80	0	90,06	0	112,58	80	80
7	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen			53,45	53,45	48,62	53,57	90,96	100,22	53,57	53,57
8	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Persen			80	53,50	74,43	52,96	93,04	98,99	46,75	46,75
9	Retribusi IMTA	Rupiah (Milyar)			2.000.000.000	1.500.000.000	454470400	1.176.725.500	22,72	78,45	1.500.000.000	1.500.000.000
10	Penyelesaian Kasus yang difasilitasi	Kasus			5	3	2	3	460	200	3	3
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen			-	75	-	72,06	72,06		80	80
11	Pertambahan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persen			3,6	4,5	3,4	4,08	94,44	90,67	4,5	4,5
12	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen			69,65	69,65	9,38	21,54	13,47	30,93	100	100
13	Dokumen Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	Dokumen			1	1	1	1	1	1	1	1

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi Permasalahan dan Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah selama Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4 Permasalahan

PERMASALAHAN	
Urusan Ketenagakerjaan	**Urusan Perindustrian**
1. Masih Relatif Rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan khusus pada bidang-bidang usaha. 2. Masih banyak perusahaan yang belum menerapkan struktur skala upah. 3. Masih terdapat perusahaan yang belum menerapkan norma ketenagakerjaan sesuai aturan. 4. Masih rendahnya komitmen perusahaan untuk merekrut dan melindung para tenaga kerja wanita dan penyandang disabilitas. 5. Masih banyaknya perusahaan yang tidak menginformasikan lowongan pekerjaan. 6. Kurangnya pengetahuan pencaker dalam penggunaan teknologi.	1. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi di bidang perindustrian Keterbatasan sarana dan prasarana produksi di bidang perindustrian terutama terjadi pada IKM sehingga tidak dapat memberikan output yang maksimal. 2. Belum optimalnya pemanfaatan skema permodalan yang tersedia Permasalahan permodalan juga terutama dialami oleh IKM dalam pengembangan usaha, terutama untuk pemenuhan alat produksi. 3. Rendahnya kerjasama (kemitraan) antara pelaku IKM dengan perusahaan- perusahaan berskala besar khususnya BUMN dan swasta nasional lainnya. 4. Ketersediaan daya listrik untuk industri, Jumlah ketersediaan daya listrik untuk kebutuhan industri belum memadai. disebabkan belum adanya penambahan daya PLN yang dikhususkan untuk industri, sedangkan pihak swasta (PT. SOMA) baru akan beroperasi pada tahun 2022 dengan total daya diperkirakan mencapai 100 MW.

Tabel 2.5 Isu Strategis

ISU STRATEGIS	
Urusan Ketenagakerjaan	**Urusan Perindustrian**
1. Tenaga Kerja yang belum optimal menjawab kebutuhan pasar. 2. Tingginya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. 3. Masih terbatasnya kompetensi calon tenaga kerja dalam menjawab	1. Belum optimalnya perkembangan IKM dan menjadi tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. 2. Masih banyak wirausaha IKM kekurangan modal, keterampilan belum optimal dan pemasaran yang belum maksimal serta belum

kebutuhan pasar kerja, sehingga masih perlu peningkatan kompetensi sumber daya manusia. 4. Output pendidikan belum sesuai kebutuhan pasar kerja (link and match).	mampu memberikan akses permodalan pada wirasusaha IKM. 3. Masih ada IKM yang tidak aktif dan tidak sehat yang akan menjadi target pembangunan kedepan. 4. Belum optimalnya pengembangan industri kecil dan sentra industri menjadi permasalahan tersendiri di Kabupaten Karimun. 5. Sentra-sentra industri yang dibentuk harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Karimun dan Kabupaten Kota sekitar.

1.4 Riviu Terhadap Rancangan Awal RPKD

Penyusunan Renja Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2025 sejalan dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025, yang telah dituangkan secara rinci dan jelas dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun. Bilamana dalam proses perkembangannya terjadi perubahan dalam RKPD baik berupa prioritas, isu strategis maupun kemampuan keuangan yang tidak sesuai lagi dengan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustriani Tahun 2025 maka RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025 tetap menjadi pedoman utama, seperti dapat dilihat pada table 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.6 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Rencana Tahun 2025			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Rencana Tahun 2025		
				Target	Rp.	Sumber Dana			Target	Rp.	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Pelayanan Publik**	**3,51 Nilai**				**Indeks Pelayanan Publik**	**3,51 Nilai**		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin		**Nilai Akip**	**73,00 Nilai**				**Nilai Akip**	**73,00 Nilai**		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**80 Nilai**	**6,129,810,000**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**80 Nilai**	**6,129,810,000**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen**	**8 Dokumen**	**170,000,000**		**Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**8 Dokumen**	**170,000,000**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	60,000,000	PAD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	60,000,000	PAD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	60,000,000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	60,000,000	PAD

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	50,000,000	PAD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	50,000,000	PAD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan**	**3 Dokumen**	**4,641,310,000**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan**	**3 Dokumen**	**4,641,310,000**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	4,566,310,000	PAD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	4,566,310,000	PAD
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	75,000,000	PAD	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	75,000,000	PAD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**3 Laporan**	**120,000,000**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**3 Laporan**	**120,000,000**	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	30,000,000	PAD	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	30,000,000	PAD
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	40,000,000	PAD	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	40,000,000	PAD
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	30,000,000	PAD	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	30,000,000	PAD
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	20,000,000	PAD	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	20,000,000	PAD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**8 Laporan**	**209,500,000**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**8 Laporan**	**209,500,000**	

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	PAD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	PAD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34,000,000	PAD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34,000,000	PAD
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	PAD	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	PAD
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	PAD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	PAD
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15,500,000	PAD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15,500,000	PAD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100,000,000	PAD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100,000,000	PAD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5 Laporan**	**247,000,000**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5 Laporan**	**247,000,000**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	100,000,000	PAD	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	100,000,000	PAD
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	127,000,000	PAD	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	127,000,000	PAD
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20,000,000	PAD	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20,000,000	PAD

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4 Laporan**	**637,000,000**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4 Laporan**	**637,000,000**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	25,000,000	PAD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	25,000,000	PAD
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	75,000,000	PAD	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	75,000,000	PAD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	537,000,000	PAD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	537,000,000	PAD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8 Laporan**	**105,000,000**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8 Laporan**	**105,000,000**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	60,000,000	PAD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	60,000,000	PAD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	30,000,000	PAD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	30,000,000	PAD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	15,000,000	PAD	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	15,000,000	PAD

Mendorong perluasan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja didaerah			**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**	**7,10%**				**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**	**7,10%**		
	Meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja lokal yang kompetitif		**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**	**63,71%**				**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**	**63,71%**		
			Rasio tenaga kerja lokal terhadap seluruh tenaga kerja	**91,55**				**Rasio tenaga kerja lokal terhadap seluruh tenaga kerja**	**91,55**		
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Tingkat Kesempatan Kerja**	**96,33%**	**200,000,000**		**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Tingkat Kesempatan Kerja**	**96,33%**	**85,000,000**	
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	**Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tenaga Kerja**	**-**	**200,000,000**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tenaga Kerja**	**-**	**85,000,000**	
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-	100,000,000	PAD	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-	85,000,000	PAD
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	-	100,000,000	PAD			-		
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**	**53,57%**	**4,345,190,000**		**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**	**57,23%**	**4,345,190,000**	
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi**	**30 %**	**4,100,190,000**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi**	**30 %**	**4,100,190,000**	
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	570 Orang	4,000,190,000	PAD	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	570 Orang	4,000,190,000	PAD

		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5 Unit	100,000,000	PAD	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5 Unit	100,000,000	PAD
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Yang Terakreditasi**	**1 Lembaga**	**100,000,000**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Yang Terakreditasi**	**1 Lembaga**	**100,000,000**	
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	1 Lembaga	100,000,000	PAD	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	1 Lembaga	100,000,000	PAD
		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**Jumlah Laporan Produktivitas Pada Perusahaan Kecil**	**1 Laporan**	**80,000,000**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Jumlah Laporan Produktivitas Pada Perusahaan Kecil**	**1 Laporan**	**80,000,000**	
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	80,000,000	PAD	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	80,000,000	PAD
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah**	**1 Dokumen**	**65,000,000**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah**	**1 Dokumen**	**65,000,000**	
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	65,000,000	PAD	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	65,000,000	PAD
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan**	**46,75 Persentase**	**725,000,000**		**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan**	**47,25 Persentase**	**825,000,000**	
			Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	**1.500.000.000 Rp**				**Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)**	**2.200.000.000 Rp**		
		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pelayanan Antar Kerja**	**1 Dokumen**	**425,000,000**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pelayanan Antar Kerja**	**1 Dokumen**	**425,000,000**	

		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan Lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	2 Orang	75,000,000	PAD	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan Lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	2 Orang	75,000,000	PAD
		Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	250 Orang	75,000,000	PAD	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	250 Orang	75,000,000	PAD
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20 Orang	125,000,000	PAD	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20 Orang	125,000,000	PAD
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	150,000,000	PAD	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	150,000,000	PAD
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Jumlah Perusahaan yang Mempublikasikan Kesempatan Kerja**	**5 Perusahaan**	**300,000,000**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah Perusahaan yang Mempublikasikan Kesempatan Kerja**	**5 Perusahaan**	**320,000,000**	
		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	100,000,000	PAD	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	120,000,000	PAD
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	250 Orang	100,000,000	PAD	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	250 Orang	100,000,000	PAD
		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	100,000,000	PAD	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	100,000,000	PAD
							Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia**	**30 Orang**	**80,000,000**	

					-		Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	30 Orang	80,000,000	PAD
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Penyelesaian Kasus yang Difasilitasi**	**3 Kasus**	**685,000,000**		**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Penyelesaian Kasus yang Difasilitasi**	**6 Kasus**	**685,000,000**	
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perusahaan yang Telah Memiliki PP**	**28 Perusahaan**	**265,000,000**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perusahaan yang Telah Memiliki PP**	**28 Perusahaan**	**265,000,000**	
			Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PKB	**4 Perusahaan**				**Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PKB**	**4 Perusahaan**		
		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	35 Perusahaan	60,000,000	PAD	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	35 Perusahaan	60,000,000	PAD
		Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	4 Perusahaan	60,000,000	PAD	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	4 Perusahaan	60,000,000	PAD
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	145,000,000	PAD	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	145,000,000	PAD

		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan**	**3 Laporan**	**420,000,000**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan**	**3 Laporan**	**420,000,000**	
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	7 Perkara	70,000,000	PAD	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	7 Perkara	70,000,000	PAD
		Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	7 Perkara	70,000,000	PAD	Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	7 Perkara	70,000,000	PAD
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	70,000,000	PAD	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	70,000,000	PAD
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	130,000,000	PAD	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	130,000,000	PAD

		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program JaminanSosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50 Orang	80,000,000	PAD	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50 Orang	80,000,000	PAD
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat			**PDRB Perkapita**	**69,32 Juta (Rp)**				**PDRB Perkapita**	**69,32 Juta (Rp)**		
	Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat		**Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap jumlah penduduk**	**0,66%**				**Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap jumlah penduduk**	**0,66%**		
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Cakupan Bina Kelompok Pengrajin**	**100 Persentase**	**1,045,000,000**		**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Cakupan Bina Kelompok Pengrajin**	**100 Persentase**	**1,085,000,000**	
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Industri**	**6 Dokumen**	**1,045,000,000**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Industri**	**6 Dokumen**	**1,085,000,000**	
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	75,000,000	PAD	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	75,000,000	PAD
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	50,000,000	PAD	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	50,000,000	PAD
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	50,000,000	PAD	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	50,000,000	PAD

		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	50,000,000	PAD	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	50,000,000	PAD
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	750,000,000	PAD	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	670,000,000	PAD
		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	70,000,000	PAD	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	70,000,000	PAD
					-		Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Rekomendasi	30,000,000	PAD
					-		Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat di awasi	1 Dokumen	30,000,000	PAD
								Jumlah Program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat di implemantasikan	1 Dokumen		
					-		Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan Informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Laporan	30,000,000	PAD
					-		Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Rekomendasi	30,000,000	PAD

		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	**Jumlah Dokumen Izin Usaha Industri**	**1 Dokumen**	**120,000,000**		**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Jumlah Dokumen Izin Usaha Industri**	**1 Dokumen**	**120,000,000**	
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)**	**1 Dokumen**	**120,000,000**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)**	**1 Dokumen**	**120,000,000**	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	60,000,000	PAD					

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan SinkronisasiPengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60,000,000	PAD					
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**Tersedianya informasi Industri secara lengkap dan terkini**	**100%**	**210,000,000**		**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Tersedianya informasi Industri secara lengkap dan terkini**	**100%**	**185,000,000**	
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**1 Dokumen**	**210,000,000**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**1 Dokumen**	**185,000,000**	
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	50,000,000	PAD	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	50,000,000	PAD
		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	60,000,000	PAD	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	60,000,000	PAD

		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	100,000,000	PAD	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	75,000,000	PAD
TOTAL PAGU ANGGARAN					**13.460.000.000**					**13.460.000.000**	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Prioritas pembangunan nasional tahun 2025 mengacu pada RPJMN 2025 – 2029 dengan Sasaran Utama Pembangunan :

1. Pendapatan Perkapita Setara dengan Negara maju.
2. Kemiskinan Menurun Ketimpangan Berkurang.
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.
4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia.
5. Intensitas Emisi GRK menurun menuju *Net Zero Emission*.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Seperti halnya tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026, maka penyusunan Dokumen Rencana Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun tetap mengacu kepada tujuan dan sasaran yang termuat di dalam dokumen Renstra dimaksud, sebagaimana dapat dijelaskan dibawah ini :

1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Strategis merupakan penjabaran implementasi dari misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. secara rinci tujuan yang ditetapkan selama kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Misi 3 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Kuat, Kompetiti dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa (Berkeadilan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia).			
No	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Target**
A.	**Urusan Ketenagakerjaan**		
1.	Mendorong perluasan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja didaerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	**5,32%**
B.	**Urusan Perindustrian**		
2.	**Meningkatnya Pendapatan Masyarakat**	**PDRB Perkapita**	**65,94 Juta (Rp)**

Misi 5 : Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional dan Unggul (Bekeadilan Dalam Pelayanan Publik)			
No	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Target**
1.	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**	**Indeks Pelayanan Publik**	**3.50**

2. Sasaran Perangkat Daerah

Selanjutnya tujuan strategis tersebut diuraikan menjadi beberapa sasaran dan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti yang diuaraikan pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target

A.	**Urusan Ketenagakerjaan**		
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal Yang Kompetitif	1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	**65 %**
		2) Rasio tenaga kerja lokal terhadap seluruh tenaga kerja	**98 %**
B.	**Urusan Perindustrian**		
2.	Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap jumlah penduduk	**0,66 %**
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	Nilai Akip	**74 Nilai**
		Level Kematangan Manajemen Resiko (MR) Disnakerin	**Level 3**

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2023 yang akan dicapai sesuai dengan target yakni :

Tabel 3.1 Program dan Kegiatan

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan
Urusan Ketenagakerjaan			
Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal Yang Kompetitif	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	1. Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
	2. Rasio tenaga kerja lokal terhadap seluruh tenaga kerja	2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

		3. Program Hubungan Industrial	1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan 3. Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
		4. Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 3. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Urusan Perindustrian			
Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap jumlah penduduk	1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan ndustri Kabupaten/Kota
		2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	1. Nilai Akip 2. Level Kematangan Manajemen Resiko (MR) Disnakerin	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun anggaran 2025 dan sekaligus merupakan referensi bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun ini berisikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaannya serta kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rancangan Awal Rencana Kerja tahun 2025 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun baik sekretariat maupun bidang – bidang, demi mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan rapat koordinasi dan observasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparasi dan akuntabilitas.

Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya.

Adapun Rancangan Awal Rencana Kerja berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan, output, outcome, pagu indikatif dan sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1 tentang Rencana Kerja Program, kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Karimun

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Indeks Pelayanan Publik		**3,51 Nilai**			**3,51 Nilai**	
		Nilai Akip		**73,00 Nilai**			**73,00 Nilai**	
2.7.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**80 Nilai**	**6,129,810,000**		**80 Nilai**	**6,129,810,000**
2.7.1.2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**		**8 Dokumen**	**170,000,000**		**8 Dokumen**	**170,000,000**
2.7.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Karimun	3 Dokumen	60,000,000	PAD	3 Dokumen	60,000,000
2.7.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Karimun	3 Laporan	60,000,000	PAD	3 Laporan	60,000,000

2.7.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Karimun	2 Laporan	50,000,000	PAD	2 Laporan	50,000,000
2.7.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan**		**3 Dokumen**	**4,641,310,000**		**3 Dokumen**	**4,641,310,000**
2.7.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Karimun	336 Orang/bulan	4,566,310,000	PAD	336 Orang/bulan	4,566,310,000
2.7.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Karimun	1 Dokumen	75,000,000	PAD	1 Dokumen	75,000,000
2.7.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**3 Laporan**	**120,000,000**		**3 Laporan**	**120,000,000**
2.7.1.2.05.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab Karimun	2 Unit	30,000,000	PAD	2 Unit	30,000,000
2.7.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab Karimun	1 Paket	40,000,000	PAD	1 Paket	40,000,000
2.7.1.2.05.5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab Karimun	1 Dokumen	30,000,000	PAD	1 Dokumen	30,000,000
2.7.1.2.05.10	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab Karimun	1 Dokumen	20,000,000	PAD	1 Dokumen	20,000,000
2.7.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**8 Laporan**	**209,500,000**		**8 Laporan**	**209,500,000**

2.7.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Karimun	1 Paket	20,000,000	PAD	1 Paket	20,000,000
2.7.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Karimun	1 Paket	34,000,000	PAD	1 Paket	34,000,000
2.7.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab Karimun	1 Paket	20,000,000	PAD	1 Paket	20,000,000
2.7.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Karimun	1 Paket	20,000,000	PAD	1 Paket	20,000,000
2.7.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab Karimun	1 Dokumen	15,500,000	PAD	1 Dokumen	15,500,000
2.7.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Karimun	1 Laporan	100,000,000	PAD	1 Laporan	100,000,000
2.7.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**5 Laporan**	**247,000,000**		**5 Laporan**	**247,000,000**
2.7.1.2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab Karimun	2 Unit	100,000,000	PAD	2 Unit	100,000,000
2.7.1.2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab Karimun	3 Unit	127,000,000	PAD	3 Unit	127,000,000
2.7.1.2.07 7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab Karimun	1 Unit	20,000,000	PAD	1 Unit	20,000,000

2.7.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**4 Laporan**	**637,000,000**		**4 Laporan**	**637,000,000**
2.7.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Karimun	3 Laporan	25,000,000	PAD	3 Laporan	25,000,000
2.7.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Karimun	2 Laporan	75,000,000	PAD	2 Laporan	75,000,000
2.7.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Karimun	3 Laporan	537,000,000	PAD	3 Laporan	537,000,000
2.7.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**8 Laporan**	**105,000,000**		**8 Laporan**	**105,000,000**
2.7.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Karimun	2 Unit	60,000,000	PAD	2 Unit	60,000,000
2.7.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Karimun	2 Unit	30,000,000	PAD	2 Unit	30,000,000
2.7.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab Karimun	5 Unit	15,000,000	PAD	5 Unit	15,000,000

		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		**7,10%**			**7,10%**	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		**62%**			**61%**	
		Rasio tenaga kerja lokal terhadap seluruh tenaga kerja		**0,55%**			**0,55%**	
2.7.2	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Tingkat Kesempatan Kerja**		**96,33%**	**85,000,000**		**96,33%**	**85,000,000**
2.7.2.2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tenaga Kerja**		**-**	**85,000,000**		**-**	**85,000,000**
2.7.2.2.01.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab Karimun	-	85,000,000	PAD	-	85,000,000
2.7.3	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**		**57,23%**	**4,345,190,000**		**57,23%**	**4,345,190,000**
2.7.3.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi**		**30%**	**4,100,190,000**		**30%**	**4,100,190,000**
2.7.3.2.01.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kab Karimun	570 Orang	4,000,190,000	PAD	570 Orang	4,000,190,000
2.7.3.2.01.2	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab Karimun	5 Unit	100,000,000	PAD	5 Unit	100,000,000
2.7.3.2.02	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Yang Terakreditasi**		**1 Lembaga**	**100,000,000**		**1 Lembaga**	**100,000,000**

2.7.3.2.02.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kab Karimun	1 Lembaga	100,000,000	PAD	1 Lembaga	100,000,000
2.7.3.2.04	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Jumlah Laporan Produktivitas Pada Perusahaan Kecil**		**1 Laporan**	**80,000,000**		**1 Laporan**	**80,000,000**
2.7.3.2.04.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Kab Karimun	10 Perusahaan	80,000,000	PAD	10 Perusahaan	80,000,000
2.7.3.2.05	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah**		**1 Dokumen**	**65,000,000**		**1 Dokumen**	**65,000,000**
2.7.3.2.05.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kab Karimun	1 Dokumen	65,000,000	PAD	1 Dokumen	65,000,000
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan**		**47,25 Persentase**	**825,000,000**		**47,25 Persentase**	**825,000,000**
		Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)		**2.000.000.000 Rp**			**2.200.000.000 Rp**	
2.07.04.2,01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pelayanan Antar Kerja**		**1 Dokumen**	**425,000,000**		**1 Dokumen**	**425,000,000**
2.07.04.2,01.1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan Lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Kab Karimun	2 Orang	75,000,000	PAD	2 Orang	75,000,000
2.07.04.2,01.2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kab Karimun	250 Orang	75,000,000	PAD	250 Orang	75,000,000

2.07.04.2,01.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kab Karimun	20 Orang	125,000,000	PAD	20 Orang	125,000,000
2.07.04.2,01.5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kab Karimun	20 Orang	150,000,000	PAD	20 Orang	150,000,000
2.7.4.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah Perusahaan yang Mempublikasikan Kesempatan Kerja**		**5 Perusahaan**	**320,000,000**		**5 Perusahaan**	**320,000,000**
2.7.4.2.03.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab Karimun	1 Dokumen	120,000,000	PAD	1 Dokumen	120,000,000
2.7.4.2.03.2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kab Karimun	250 Orang	100,000,000	PAD	250 Orang	100,000,000
2.7.4.2.03.3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kab Karimun	100 Orang	100,000,000	PAD	100 Orang	100,000,000
2.7.4 2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia**		**30 Orang**	**80,000,000**		**30 Orang**	**80,000,000**
2.7.4 2.04.2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	Kab Karimun	30 Orang	80,000,000	PAD	30 Orang	80,000,000
2.7.5	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Penyelesaian Kasus yang Difasilitasi**		**3 Kasus**	**685,000,000**		**6 Kasus**	**685,000,000**

2.7.5.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perusahaan yang Telah Memiliki PP**		**28 Perusahaan**	**265,000,000**		**28 Perusahaan**	**265,000,000**
		Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PKB		**4 Perusahaan**			**4 Perusahaan**	
2.7.5.2.01.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kab Karimun	35 Perusahaan	60,000,000	PAD	35 Perusahaan	60,000,000
2.7.5.2.01.2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kab Karimun	4 Perusahaan	60,000,000	PAD	4 Perusahaan	60,000,000
2.7.5.2.01.3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab Karimun	1 Laporan	145,000,000	PAD	1 Laporan	145,000,000
2.7.5.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan**		**3 Laporan**	**420,000,000**		**3 Laporan**	**420,000,000**
2.7.5.2.02.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kab Karimun	7 Perkara	70,000,000	PAD	7 Perkara	70,000,000

2.7.5.2.02.2	Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Kab Karimun	7 Perkara	70,000,000	PAD	7 Perkara	70,000,000
2.7.5.2.02.3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kab Karimun	2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	70,000,000	PAD	2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	70,000,000
2.7.5.2.02.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kab Karimun	1 Lembaga	130,000,000	PAD	1 Lembaga	130,000,000
2.7.5.2.02.5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab Karimun	50 Orang	80,000,000	PAD	50 Orang	80,000,000
		PDRB Perkapita		**69,32 Juta (Rp)**			**69,32 Juta (Rp)**	
		Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap jumlah penduduk		**0,66%**			**0,66%**	
3.31.2	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Cakupan Bina Kelompok Pengrajin**		**100 Persentase**	**1,085,000,000**		**100 Persentase**	**1,085,000,000**
3.31.2.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Industri**		**6 Dokumen**	**1,085,000,000**		**6 Dokumen**	**1,085,000,000**
3.31.2.2.01.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Kab Karimun	1 Dokumen	75,000,000	PAD	1 Dokumen	75,000,000

3.31.2.2.01.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab Karimun	1 Dokumen	50,000,000	PAD	1 Dokumen	50,000,000
3.31.2.2.01.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab Karimun	1 Dokumen	50,000,000	PAD	1 Dokumen	50,000,000
3.31.2.2.01.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab Karimun	1 Dokumen	50,000,000	PAD	1 Dokumen	50,000,000
3.31.2.2.01.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab Karimun	1 Dokumen	670,000,000	PAD	1 Dokumen	670,000,000
3.31.2.2.01.6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab Karimun	1 Dokumen	70,000,000	PAD	1 Dokumen	70,000,000
3.31.2.2.01.7	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Kab Karimun	1 Rekomendasi	30,000,000		1 Rekomendasi	30,000,000
3.31.2.2.01.8	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat di awasi	Kab Karimun	1 Dokumen	30,000,000		1 Dokumen	30,000,000
		Jumlah Program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat di implemantasikan	Kab Karimun	1 Dokumen			1 Dokumen	
3.31.2.2.01.9	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan Informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Kab Karimun	1 Laporan	30,000,000		1 Laporan	30,000,000

3.31.2.2.01.10	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Kab Karimun	1 Rekomendasi	30,000,000		1 Rekomendasi	30,000,000
3.31.3	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Jumlah Dokumen Izin Usaha Industri**		**1 Dokumen**	**120,000,000**		**1 Dokumen**	**120,000,000**
3.31.3.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)**		**1 Dokumen**	**120,000,000**		**1 Dokumen**	**120,000,000**
3.31.4	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Tersedianya informasi Industri secara lengkap dan terkini**		**100%**	**185,000,000**		**100%**	**185,000,000**
3.31.4.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**		**1 Dokumen**	**185,000,000**		**1 Dokumen**	**185,000,000**

3.31.4.2.01.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab Karimun	1 Dokumen	50,000,000	PAD	1 Dokumen	50,000,000
3.31.4.2.01.2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab Karimun	1 Dokumen	60,000,000	PAD	1 Dokumen	60,000,000
3.31.4.2.01.3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab Karimun	1 Dokumen	75,000,000	PAD	1 Dokumen	75,000,000
					13,460,000,000			**13,460,000,000**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2025, telah disusun berdasarkan acuan dan data-data konkrit dari dokumen-dokumen anggaran yang ada, serta hasil konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait.

Dengan adanya Dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ini diharapakan penerapan dan pelaksanaa Program serta kegiatan yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun betu-betul dapat menjawab tantangan Ketenagakerjaan dan Perindustrian yang ada di Kabupten Karimun,

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun ini disusun, dengan harapan semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dan pengarah pelaksanaan semua program dan kegiatan di tahun 2025 mendatang, terakhir kami menyadari bahwa dokumen ini masih ada beberapa kelemahan, untuk diharapkan dari semua unsur yang terlibat (*stakeholders)* dapat memberi masukan demi penyempurnaan dokumen ini, terima kasih.

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A) KABUPATEN KARIMUN

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Komplek Perkantoran Kab. Karimun, Jl. Jend.Sudirman Gedung Bukit Salembak Lt.2
Telp. 07777 – 366055 Tanjung Balai Karimun, Kode Pos 29631
Email : bkbdppa@yahoo.com, facebook Bkbd Ppa Karimun

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KARIMUN

NOMOR : 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KARIMUN

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan antara lain melalui kegiatan penyusunan dokumen perencanaan kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dimana seluruh sasaran strategis, program dan kegiatan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan;

b. bahwa sebagai rencana tahunan OPD, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Karimun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun tentang Penunjukan/Penetapan Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;

11 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun 2006-2025;

12 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6);

13 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);

15 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021–2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);

16 Peraturan Bupati Karimun Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembentukan,Kedudukan,Struktur Organisasi,Tugas Dan Fungsi,Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan Dan Anak (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 1);

17 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 10);

18 Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 33);

19 Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 64);

20 Peraturan Bupati Karimun Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas–tugasnya Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran Barang/Jasa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun serta mempedomani aturan yang berlaku.

KETIGA : Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026.

KEEMPAT : Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan OPD untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan Renstra.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun pada Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali serta untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 11 Januari 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARIMUN

Dra. ROSMAWATI, M.M.Pub.
NIP.196508141994032014

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TANGGAL 11 Januari 2024

PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN (RENJA) OPD DP2KBP3A KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

1. Ketua Tim : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun
3. Kelompok Kerja :

A. Koordinator Kelompok Kerja :

1 Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
2 Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
3 Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
4 Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

B. Anggota Kelompok Kerja :

1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3 Kepala Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
4 Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
5 Kepala Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
6 Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
7 Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan (PP).
8 Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak.
9 Kepala Seksi Perlindungan Anak.
10 Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARIMUN

Dra. ROSMAWATI, M.M.Pub.
NIP.196508141994032014

RENCANA KERJA (RENJA)
DP2KBP3A KAB. KARIMUN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya dan kesediaan para Tim pengelola perencanaan dan informasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Karimun, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan buku "Rencana Kerja (RENJA) DP2KBP3A Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025".

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2024 Tentang RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025, mengamanatkan Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagaimana RENJA tahun–tahun yang lalu, dokumen RENJA Tahun Anggaran 2025 ini juga masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu walaupun rencana yang disusun dalam buku ini belum seluruhnya memenuhi keinginan atau kebutuhan sebagaimana yang diharapkan, namun dapat menjadi panduan dan pedoman kerja serta bermanfaat khususnya bagi para pengelola dan pelaksana program dan kegiatan di lingkungan PD DP2KBP3A Kabupaten Karimun, mitra terkait dan siapa saja yang memiliki perhatian dan kepentingan terhadap program-program PD DP2KBP3A termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, kalangan swasta dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Karimun.

Akhirnya, terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi sejak awal proses penyusunan Buku RENJA OPD DP2KBP3A Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 ini hingga selesai.

Tanjung Balai Karimun, 8 Juli 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARIMUN

Dra. ROSMAWATI, M.M.Pub.
NIP.196508141994032014

DAFTAR ISI

Hal

SK PENETAPAN RENJA

KATA PENGANTAR ..... (i)

DAFTAR ISI ..... (ii)

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun Lalu 7

2.2 Matriks Evaluasi RENJA Tahun 2023 12

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Program Nasional 16

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA OPD 21

3.3 Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 24

3.4 Matriks RENJA OPD Tahun 2025 33

BAB IV : PENUTUP

4.1 Kesimpulan dan Saran 57

RENCANA KERJA (RENJA)
DP2KBP3A KAB. KARIMUN
TAHUN 2025

BAB : I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun, berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun RENJA OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, RENJA mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RENSTRA Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

RENJA Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RENJA Pemerintah Daerah.

RENJA OPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Karimun Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. RENJA Tahun 2025 OPD DP2KBP3A Kabupaten Karimun menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan RPJMD Kabupaten Karimun yang menjadi acuan pada RENSTRA OPD DP2KBP3A Kabupaten Karimun.

RENJA OPD DP2KBP3A Kabupaten Karimun ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, serta antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Hal tersebut merupakan pilihan

Dalam penyusunan RENJA tahunan OPD DP2KBP3A Kabupaten Karimun Tahun 2025 selain dimulai dari persiapan data pendukung perencanaan juga menampung dan mengakomodir segala keinginan, inspirasi, dan kebutuhan dari setiap bidang yang ada di lingkungan OPD, serta tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan melibatkan berbagai bidang dan program serta sektor terkait.

Dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrument pembangunan yang sangat penting karena di dalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar dalam mencapai "TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA".

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan RENJA OPD DP2KBP3A Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah (PEMDA), DPRD, Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan.

Sejak dibentuknya Kabupaten Karimun pada tahun 1999, Pemerintah Kabupaten Karimun dengan segala potensi dan kemandirian yang dimiliki berupaya terus untuk meningkatkan pembangunan diberbagai sektor, diantaranya pembangunan di sektor Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Penyelenggaraan upaya di sektor tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pokok diantaranya penyusunan perencanaan kinerja, dimana seluruh sasaran strategis, program dan kegiatan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan (Rencana Kerja Tahunan). Di dalam RENJA dijabarkan dan ditetapkan angka target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi OPD DP2KBP3A Kabupaten Karimun untuk mencapainya dalam satu periode tahunan dan merupakan benchmark bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dalam tahap awal penyusunan perencanaan tersebut harus dilandasi dengan keakuratan data dan informasi.

Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan Pemerintah Daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi dan program OPD yang ditetapkan dalam RENSTRA OPD sesuai arahan operasional dalam RENJA OPD.
2. RENJA merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RENJA dan RKA tahun 2025.
3. RENJA OPD merupakan salah satu instrument untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam RENJA tahunan sebagai wujud dari kinerja OPD pada tahun 2025 ini merupakan tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA OPD DP2KBP3A Kabupaten Karimun dan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keua ngan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun 2006-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021–2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 34);
18. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 64);
19. Peraturan Bupati Karimun Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 86).

1.3. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah sebagai acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

2. Tujuan

a. Menjelaskan gambaran latar belakang penyusunan RENJA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Karimun.

b. Memahami visi, misi, kebijakan dan strategi pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Karimun.
c. Mengetahui program-program yang menjadi Rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025.
d. Diketahuinya kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi Rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Karimun Tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Menyajikan secara ringkas tentang latar belakang, landasan Hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan serta susunan garis besar isi dokumen RENJA OPD Tahun 2025.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Menyajikan tentang evaluasi pelaksanaan RENJA OPD tahun 2023 dan capaian RENSTRA, analisis kinerja, isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi, revieu terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD, tujuan dan sasaran RENJA, serta program dan kegiatan yang direncanakan oleh OPD pada tahun 2025.

BAB IV. Penutup

Berisikan tentang catatan-catatan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

RENCANA KERJA (RENJA)
DP2KBP3A KAB. KARIMUN
TAHUN 2025

BAB : II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Hasil dari Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) OPD DP2KBP3A Kabupaten Karimun Tahun 2023 adalah gabungan dari hasil evaluasi semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DP2KBP3A Kabupaten Karimun selama tahun 2023.

Rencana kerja tahun 2023 tingkat pencapaian program disesuaikan dengan peluang dan kekuatan, sehingga target yang disusun atau yang ingin dicapai tidak mayoritas 100%. Secara umum dari 8 Program dan 22 Kegiatan serta 47 Subkegiatan, belanja langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan hingga tanggal 31 Desember 2023 dengan total pagu awal OPD pada APBD Murni Rp. 8.674.410.917,- serta pagu APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 9.186.908.933,-.serta realisasi keuangan sebesar Rp. 7.129.294.151,- dan sisa anggaran Rp. 2.014.379.639,-.

Tingkat pencapaiannya bila diukur dari realisasi keuangan sebesar 77,60% serta realisasi fisik selesai sebesar 94,04%. Ada 16 (enam belas) Subkegiatan realisasi keuangan di atas 75% hingga 100%, sedangkan 27 (sua puluh tujuh) Subkegiatan realisasi keuangan di bawah 75%, sedangkan 4 (Empat) Subkegiatan ditunda pembayarannya/Refocusing sehubungan Defisit anggaran Pemda Karimun pada APBD-P 2023 dan menjadi Tunda Bayar (TB) pada Tahun Anggaran 2024. Program-program kegiatan OPD DP2KBP3A Kabupaten Karimun selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.
3. Program Perlindungan Perempuan.
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
6. Program Perlindungan Khusus Anak.
7. Program Pengendalian Penduduk.
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
9. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja OPD sudah menggunakan dan penerapan sistem perencanaan berdasarkan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) RI Nomor : 050_5889 Tahun 2021 tentang Kewenangan Kabupaten/Kota.

Dibandingkan dengan RENJA OPD DP2KBP3A Kabupaten Karimun Tahun 2020 terdiri dari 15 program dan masih menggunakan sistem perencanaan berdasarkan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIMDA) dan belum terstruktur dengan baik seperti SIPD.

Analisis terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Subkegiatan OPD DP2KBP3A Kabupaten Karimun selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Selama tahun 2023 lalu, program ini terdiri dari 7 Kegiatan serta 23 Subkegiatan dengan total pagu program sebesar Rp.4.306.133.847,- dengan realisasi pagu hingga Rp.4.193.815.001,- atau 97,39%, sedikit meningkat dari pencapaian tahun 2023 lalu sebesar 94,94%. Pagu program tersebut penggunaannya untuk Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dalam rangka Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran OPD selama tahun 2023, Indikator kinerjanya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Target 2023 = 72,66%), Dari 23 Subkegiatan program, terdapat 12 Subkegiatan realisasi keuangan di atas 75% hingga 100%, sedangkan 11 subkegiatan lainnya realisasi keuangan di bawah 75% hingga tidak dilaksanakan dan direfocusing/efisiensi anggaran pada APBD-P Tahun 2023. Rincian kegiatan program ini antara lain :

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini bertujuan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Karimun, Indikator kinerjanya adalah Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan dimana Target 2023 = 56,77% dan realisasi sebesar 59,48% (Target Tercapai). Pagu anggaran program sebesar Rp.199.998.955,- namun hingga akhir tahun anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut terealisasi sebesar Rp.115.828.900 (66,02%). Rincian kegiatan program ini antara lain :

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten Kota
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten Kota

3. Program Perlindungan Perempuan

Program ini bertujuan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Indikator kinerjanya adalah Persentase Kasus Perlindungan Hak dan Tindak Kekerasan pada Perempuan yang Ditindaklanjuti (Target 2023 = 100%). Pagu anggaran program pada APBD Murni 2023 Rp.49.999.895,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.13.073.500,- dan persentase keuangan sebesar 26,16%. Pada program kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan (RKA) pendukung yang bersumber dana dari PAD/APBD. Rincian kegiatan berikut ini :

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini bertujuan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Karimun, Indikator kinerjanya adalah Fasilitas Taman Bermain Layak Anak di Kecamatan Yang Responsif Gender dimana Target 2023 = 50,0% namun realisasi hanya 7,14% (Target Tidak Tercapai). Pagu anggaran program ini pada APBD Murni sebesar Rp.120.000.000,- jumlah yang sama pada APBD-Perubahan sebesar Rp.120.000.000,- dan Realisasi keuangan sebesar Rp 60.521.600,- (50,43%). Pada program kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan (RKA) pendukung diantaranya 2 Sub kegiatan yang dilaksanakan dan direfocusing/efisiensi anggaran pada APBD-P Tahun 2023. Rincian kegiatan program ini antara lain :

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten Kota

5. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini bertujuan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Indikator kinerjanya adalah Kasus Anak Korban Kekerasan dan Anak Bermasalah Hukum (ABH) yang Ditindaklanjuti (Target 2023= 100%). Pagu anggaran program pada APBD Murni 2023 Rp.149.999.294,- diefisiensi anggaran menjadi Rp.124.719.294,- pada APBD Perubahan 2023, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.903.000,- dan persentase keuangan sebesar 10,35%. Pada program kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan (RKA) pendukung. Rincian kegiatan program ini antara lain :

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pengendalian Penduduk

Program ini bertujuan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Indikator kinerjanya adalah Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga), dengan Target 2023 = 59,05% serta realisasi sebesar 63,83 (Target Tercapai). Pagu anggaran program pada APBD Murni dan pagu pada APBD Perubahan 2023 Rp.232.199.199,- terdapat Subkegiatan yang direfocusing/efisiensi anggaran, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.93.127.750,- (40,11%). Pada program kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan (RKA) pendukung diantaranya 2 Sub kegiatan yang bersumber dana dari DAK Non Fisik KB (BKKBN) sebesar Rp.82.199.588,-. Rincian subkegiatan program ini antara lain :

1. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (BOKB)
2. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK (PAD)

7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini bertujuan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Indikator kinerjanya adalah Cakupan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dimana Target 2023 = 12,72% dengan realisasi sebesar 16,12% (Target Tercapai). Pagu anggaran program pada APBD Murni 2023 dan APBD Perubahan 2023 Rp.2.193.846.132,- terdapat 10 sub kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.372.817.500,- (62,58%). Serta bersumber dana dari DAK Non Fisik KB (BKKBN). Rincian kegiatan program ini antara lain :

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

8. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini bertujuan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Indikator kinerjanya adalah Persentase PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet need) dengan Target 2023= 8,66% serta realisasi sebesar 10,18% (Target Tidak Tercapai).

Pagu anggaran program pada APBD Murni 2023 Rp.1.373.898.913,- terdapat 1 Sub kegiatan diefisiensi anggaran menjadi Rp.1.363.610.913,- pada APBD Perubahan 2023, dengan realisasi anggaran kegiatan program Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebesar Rp.1.212.338.600,- (88,91%).

Pada program kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan (RKA) pendukung diantaranya 2 Sub kegiatan yang bersumber dana dari DAK Non Fisik KB (BKKBN). Rincian Sub kegiatan program ini antara lain :

1. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAKF Penugasan KB)
2. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
3. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pem berdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

CAPAIAN KINERJA DAN LAPORAN KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN OPD
DP2KBP3A KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	KINERJA KEUANGAN TA 2023						REALISASI FISIK (%)	KETERANGAN
				APBD MURNI	APBD - P	SELISIH	REALISASI	SILPA	% Keu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
A	**2.08.**	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**4.306.133.847**	**4.778.747.950**	**(472.614.103)**	**4.193.815.001**	**581.581.719**	**97,39**	**94,88**	
I	**2.08.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**4.306.133.847**	**4.778.747.950**	**(472.614.103)**	**4.193.815.001**	**581.581.719**	**97,39**	**94,88**	
1	**2.08.01.201**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**89.999.542**	**86.719.542**	**3.280.000**	**84.826.800**	**1.892.742**	**97,82**	**100,00**	
1.1	2.08.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	29.999.900	26.719.900	3.280.000	26.181.400	538.500	97,98	100,00	SELESAI (PAD)
1.2	2.08.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60 Dokumen	19.999.942	19.999.942	-	18.804.600	1.195.342	94,02	100,00	SELESAI (PAD)
1.3	2.08.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	24.999.700	24.999.700	-	24.849.300	150.400	99,40	100,00	SELESAI (PAD)
1.4	2.08.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	-	14.991.500	8.500	99,94	100,00	SELESAI (PAD)
2	**2.08.01.202**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**3.540.222.125**	**3.976.064.998**	**(435.842.873)**	**3.593.905.251**	**382.159.747**	**90,39**	**90,00**	
2.1	2.08.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan TPP ASN	35 Orang/Bulan	3.414.520.125	3.845.334.998	(430.814.873)	3.490.820.324	354.514.674	90,78	100,00	SELESAI (DAU)
2.2	2.08.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	70.140.000	84.168.000	(14.028.000)	63.360.000	20.808.000	75,28	85,00	SELESAI (PAD)
2.3	2.08.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	55.562.000	46.562.000	9.000.000	39.724.927	6.837.073	85,32	85,00	SELESAI (PAD)
3	**2.08.01.205**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**29.999.649**	**23.331.649**	**6.668.000**	**14.476.000**	**15.523.649**	**62,04**	**100,00**	
3.1	2.08.01.205. 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	29.999.649	23.331.649	6.668.000	14.476.000	15.523.649	62,04	100,00	SELESAI (PAD)
4	**2.08.01.206**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**212.926.681**	**221.180.711**	**(8.254.030)**	**139.647.400**	**73.279.281**	**63,14**	**90,83**	
4.1	2.08.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	1.027.470	1.027.470	-	-	1.027.470	0,00	90,00	SELESAI (PAD)
4.2	2.08.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Jenis	43.098.585	43.065.215	33.370	32.334.000	10.764.585	75,08	80,00	SELESAI (PAD)
4.3	2.08.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Paket	1.886.790	1.174.190	712.600	-	1.886.790	0,00	100,00	SELESAI (PAD)
4.4	2.08.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15 Paket	6.325.000	6.325.000	-	5.665.000	660.000	89,57	100,00	SELESAI (PAD)
4.5	2.08.01.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15 Paket	25.732.836	25.732.836	-	18.905.900	6.826.936	73,47	90,00	SELESAI (PAD)
4.6	2.08.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	134.856.000	143.856.000	(9.000.000)	82.742.500	52.113.500	57,52	85,00	SELESAI (PAD)
5	**2.08.01.207**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**91.661.700**	**91.661.700**	**-**	**38.284.000**	**53.377.700**	**41,77**	**90,00**	
5.1	2.08.01.207.05	Pengadaan Mebel	5 Unit	22.174.000	22.174.000	-	7.474.000	14.700.000	33,71	80,00	SELESAI (PAD)
5.2	2.08.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	39.487.700	39.487.700	-	4.560.000	34.927.700	11,55	90,00	SELESAI (PAD)
5.3	2.08.01.207.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit (6.Bulan)	30.000.000	30.000.000	-	26.250.000	3.750.000	87,50	100,00	SELESAI (PAD)
6	**2.08.01.208**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**284.660.000**	**323.860.000**	**(39.200.000)**	**292.184.600**	**29.175.400**	**90,22**	**96,67**	
6.1	2.08.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	16.410.000	18.910.000	(2.500.000)	8.149.600	8.260.400	43,10	90,00	SELESAI (PAD)
6.2	2.08.01.208.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	8.250.000	8.250.000	-	8.250.000	-	100,00	100,00	SELESAI (PAD)
6.3	2.08.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	260.000.000	296.700.000	(36.700.000)	275.785.000	20.915.000	92,95	100,00	SELESAI (PAD)
7	**2.08.01.209**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**56.664.150**	**55.929.350**	**734.800**	**30.490.950**	**26.173.200**	**54,52**	**96,67**	
7.1	2.08.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	34.484.150	33.749.350	734.800	15.810.950	18.673.200	46,85	90,00	SELESAI (PAD)
7.2	2.08.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	8.760.000	8.760.000	-	1.370.000	7.390.000	15,64	100,00	SELESAI (PAD)
7.3	2.08.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	13.420.000	13.420.000	-	13.310.000	110.000	99,18	100,00	SELESAI (PAD)
					-						

NO.	KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	KINERJA KEUANGAN TA 2023						REALISASI FISIK (%)	KETERANGAN
				APBD MURNI	APBD - P	SELISIH	REALISASI	SILPA	% Keu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
B	**2.08.**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		**668.332.826**	**618.504.739**	**49.828.087**	**257.195.300**	**411.137.526**	**41,58**	**89,75**	
I	**2.08.02.**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		**199.998.955**	**175.451.268**	**24.547.687**	**115.828.900**	**84.170.055**	**66,02**	**91,25**	
1	**2.08.02.201.**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten Kota**		**99.999.268**	**86.402.168**	**13.597.100**	**65.177.800**	**34.821.468**	**75,44**	**92,50**	
1.1	2.08.02.201.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	35 OPD/ Lembaga	49.999.657	42.222.557	7.777.100	28.803.800	21.195.857	68,22	90,00	SELESAI (PAD)
1.2	2.08.02.201.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	35 OPD/ Lembaga	49.999.611	44.179.611	5.820.000	36.374.000	13.625.611	82,33	95,00	SELESAI (PAD)
2	**2.08.02.202**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten Kota**		**99.999.687**	**89.049.100**	**10.950.587**	**50.651.100**	**49.348.587**	**56,88**	**90,00**	
2.1	2.08.02.202.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	30 Organisasi	99.999.687	89.049.100	10.950.587	50.651.100	49.348.587	56,88	90,00	SELESAI (PAD)
II	**2.08.03.**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**49.999.895**	**49.999.895**	**-**	**13.073.500**	**36.926.395**	**26,15**	**90,00**	
1	**2.08.03.201**	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota**		**49.999.895**	**49.999.895**	**-**	**13.073.500**	**36.926.395**	**26,15**	**90,00**	
1.1	2.08.03.201.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	49.999.895	49.999.895	-	13.073.500	36.926.395	26,15	90,00	
III	**2.08.04.**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**		**148.334.682**	**148.334.282**	**400**	**54.868.300**	**93.466.382**	**36,99**	**90,00**	
1	**2.08.04.201**	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**148.334.682**	**148.334.282**	**400**	**54.868.300**	**93.466.382**	**36,99**	**90,00**	
1.1	2.08.04.201.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	148.334.682	148.334.282	400	54.868.300	93.466.382	36,99	90,00	SELESAI (PAD)
IV	**2.08.06.**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		**120.000.000**	**120.000.000**	**-**	**60.521.600**	**59.478.400**	**50,43**	**87,50**	
1	**2.08.06.201**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten Kota**		**40.000.000**	**40.000.000**	**-**	**17.577.000**	**22.423.000**	**43,94**	**85,00**	
1.1	2.08.06.201.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten Kota	30 Organisasi	40.000.000	40.000.000	-	17.577.000	22.423.000	43,94	85,00	SELESAI (PAD)
2	**2.08.06.202**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten Kota**		**80.000.000**	**80.000.000**	**-**	**42.944.600**	**37.055.400**	**53,68**	**90,00**	
2.1	2.08.06.202.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	12 Dokumen	80.000.000	80.000.000	-	42.944.600	37.055.400	53,68	90,00	SELESAI (PAD)
V	**2.08.07.**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		**149.999.294**	**124.719.294**	**25.280.000**	**12.903.000**	**137.096.294**	**10,35**	**90,00**	
1	**2.08.07.201**	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**49.999.951**	**37.004.951**	**12.995.000**	**-**	**49.999.951**	**0,00**	**90,00**	
1.1	2.08.07.201.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 OPD/ Lembaga	49.999.951	37.004.951	12.995.000	-	49.999.951	0,00	90,00	SELESAI (PAD)
2	**2.08.07.202**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota**		**49.999.755**	**49.999.755**	**-**	**-**	**49.999.755**	**0,00**	**90,00**	
2.1	2.08.07.202.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	49.999.755	49.999.755	-	-	49.999.755	0,00	90,00	SELESAI (PAD)
3	**2.08.07.203**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**49.999.588**	**37.714.588**	**12.285.000**	**12.903.000**	**37.096.588**	**34,21**	**90,00**	
3.1	2.08.07.203.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	49.999.588	37.714.588	12.285.000	12.903.000	37.096.588	34,21	90,00	SELESAI (PAD)

NO.	KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	KINERJA KEUANGAN TA 2023						REALISASI FISIK (%)	KETERANGAN
				APBD MURNI	APBD - P	SELISIH	REALISASI	SILPA	% Keu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
C	**2.14.**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		**3.699.944.244**	**3.789.656.244**	**(89.712.000)**	**2.678.283.850**	**1.021.660.394**	**70,67**	**97,50**	
I	**2.14.02.**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**		**132.199.199**	**232.199.199**	**(100.000.000)**	**93.127.750**	**39.071.449**	**40,11**	**95,00**	
1	**2.14.02.202**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**132.199.199**	**232.199.199**	**(100.000.000)**	**93.127.750**	**39.071.449**	**70,45**	**95,00**	
1.1	2.14.02.202.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB **(BOKB)**	1 Dokumen	82.199.588	82.199.588	-	70.603.550	11.596.038	85,89	100,00	SELESAI (DAK NF KB)
1.2	2.14.02.202.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	1 Laporan	49.999.611	149.999.611	(100.000.000)	22.524.200	27.475.411	15,02	90,00	SELESAI (PAD)
II	**2.14.03.**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		**2.193.846.132**	**2.193.846.132**	**-**	**1.372.817.500**	**821.028.632**	**62,58**	**97,50**	
1	**2.14.03.201**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**		**460.440.000**	**460.440.000**	**-**	**247.991.000**	**212.449.000**	**53,86**	**100,00**	
1.1	2.14.03.201.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja **(BOKB)**		-	72.500.000	(72.500.000)	24.800.000	47.700.000	34,21	100,00	SELESAI (DAK NF KB)
1.2	2.14.03.201.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) **(BOKB)**	1 Laporan	156.000.000	156.000.000	-	72.600.000	83.400.000	46,54	100,00	SELESAI (DAK NF KB)
1.3	2.14.03.201.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK **(BOKB)**	1 Laporan	144.450.000	144.450.000	-	99.691.000	44.759.000	69,01	100,00	SELESAI (DAK NF KB)
1.4	2.14.03.201.08	Pengendalian Program KKBPK **(BOKB)**	1 Laporan	159.990.000	87.490.000	72.500.000	50.900.000	36.590.000	58,18	100,00	SELESAI (DAK NF KB)
2	**2.14.03.202**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		**450.600.000**	**450.600.000**	**-**	**242.602.000**	**207.998.000**	**53,84**	**90,00**	
2.1	2.14.03.202.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) **(BOKB)**	45 Orang	450.600.000	450.600.000	-	242.602.000	207.998.000	53,84	90,00	SELESAI (DAK NF KB)
3	**2.14.03.203**	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		**918.264.132**	**918.264.132**	**-**	**618.144.500**	**300.119.632**	**67,32**	**100,00**	
3.1	2.14.03.203.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontra sepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya **(BOKB)**	16 Laporan	15.293.132	15.293.132	-	11.756.500	3.536.632	76,87	100,00	SELESAI (DAK NF KB)
3.2	2.14.03.203.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) **(BOKB)**	50 Orang	872.071.000	872.071.000	-	575.488.000	296.583.000	65,99	100,00	SELESAI (DAK NF KB)
3.3	2.14.03.203.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya **(BOKB)**	16 Laporan	30.900.000	30.900.000	-	30.900.000	-	100,00	100,00	SELESAI (DAK NF KB)
4	**2.14.03.204**	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**		**364.542.000**	**364.542.000**	**-**	**264.080.000**	**100.462.000**	**72,44**	**100,00**	
4.1	2.14.03.204.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB **(BOKB)**	1 Dokumen	9.000.000	9.000.000	-	9.000.000	-	100,00	100,00	SELESAI (DAK NF KB)
4.2	2.14.03.204.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB **(BOKB)**	24 Kampung KB	355.542.000	355.542.000	-	255.080.000	100.462.000	71,74	100,00	SELESAI (DAK NF KB)
III	**2.14.04.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**		**1.373.898.913**	**1.363.610.913**	**10.288.000**	**1.212.338.600**	**161.560.313**	**88,91**	**100,00**	
1	**2.14.04.201**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**1.373.898.913**	**1.363.610.913**	**10.288.000**	**1.212.338.600**	**161.560.313**	**88,91**	**100,00**	
1.1	2.14.04.201.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) **(BOKB)**	6 Unit	360.000.000	360.000.000	-	234.960.000	125.040.000	65,27	100,00	SELESAI (DAK NF KB)
1.2	2.14.04.201.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30 Orang	49.998.913	39.710.913	10.288.000	13.478.600	36.520.313	33,94	100,00	SELESAI (PAD)

NO.	KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	KINERJA KEUANGAN TA 2023						REALISASI FISIK (%)	KETERANGAN
				APBD MURNI	APBD - P	SELISIH	REALISASI	SILPA	% Keu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3	2.14.04.201.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) **(BOKB)**	12 Bulan	963.900.000	963.900.000	-	963.900.000	-	100,00	100,00	SELESAI (DAK NF KB)
				8.674.410.917	**9.186.908.933**	**(512.498.016)**	**7.129.294.151**	**2.014.379.639**	**77,60**	**94,04**	

Tanjung Balai Karimun, 2 Januari 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARIMUN

Dra. ROSMAWATI, M.M.Pub
NIP.196508141994032014

CAPAIAN KINERJA DAN LAPORAN KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN OPD
KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		KINERJA KEUANGAN					FISIK (%)	KET
			INDIKATOR	TARGET	APBD MURNI	APBD - P	REALISASI	SILPA	% Keu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
A	**2.02.2.02.**	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**									
I	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.390.149.188**	**3.598.855.045**	**3.416.726.856**	**182.128.189**	**94,94**	**100,0**	
1	**2.14.01.2.01**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**75.000.000**	**74.250.000**	**74.103.100**	**146.900**	**98,80**	**100,0**	
1.1	2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	25.000.000	24.250.000	24.168.000	82.000	99,66	100,0	SELESAI (PAD/APBD)
1.2	2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60 Dokumen	20.000.000	20.000.000	19.989.000	11.000	99,95	100,0	SELESAI (PAD/APBD)
1.3	2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20.000.000	20.000.000	19.949.100	50.900	99,75	100,0	SELESAI (PAD/APBD)
1.4	2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	9.997.000	3.000	99,97	100,0	SELESAI (PAD/APBD)
2	**2.14.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2.828.921.188**	**2.982.059.945**	**2.817.640.965**	**164.418.980**	**99,60**	**100,0**	
1.1	2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan TPP ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Org/Bulan	2.768.615.188	2.883.875.945	2.720.656.965	163.218.980	94,34	100,0	SELESAI (PAD/APBD)
1.2	2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	41.634.000	79.512.000	78.312.000	1.200.000	98,49	100,0	SELESAI (PAD/APBD)
1.3	2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	18.672.000	18.672.000	18.672.000	-	100,00	100,0	SELESAI (PAD/APBD)
3	**2.14.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**89.160.000**	**118.020.000**	**117.483.500**	**536.500**	**131,77**	**100,0**	
1.1	2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	994.000	828.000	828.000	-	100,00	100,0	SELESAI (PAD/APBD)
1.2	2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	60 Paket	23.038.000	23.038.000	22.993.200	44.800	99,81	100,0	SELESAI (PAD/APBD)
1.3	2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	1.880.000	1.880.000	1.870.000	10.000	99,47	100,0	SELESAI (PAD/APBD)
1.4	2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	1.320.000	1.320.000	1.320.000	-	100,00	100,0	SELESAI (PAD/APBD)
1.5	2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	25.634.000	25.634.000	25.582.000	52.000	99,80	100,0	SELESAI (PAD/APBD)
1.6	2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	36.294.000	65.320.000	64.890.300	429.700	99,34	100,0	SELESAI (PAD/APBD)
4	**2.14.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**63.000.000**	**67.890.000**	**67.850.000**	**40.000**	**107,70**	**100,0**	
1.1	2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	8.000.000	8.050.000	8.010.000	40.000	99,50	100,0	SELESAI (PAD/APBD)
1.2	2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000	14.840.000	14.840.000	-	100,00	100,0	SELESAI (PAD/APBD)
1.3	2.14.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	100,00	100,0	SELESAI (PAD/APBD)
5	**2.14.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**293.160.000**	**312.810.000**	**297.087.200**	**15.722.800**	**101,34**	**100,0**	
1.1	2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.660.000	11.410.000	11.242.200	167.800	98,53	100,0	SELESAI (PAD/APBD)
1.2	2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	280.500.000	301.400.000	285.845.000	15.555.000	94,84	100,0	SELESAI (PAD/APBD)
6	**2.14.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**40.908.000**	**43.825.100**	**42.562.091**	**1.263.009**	**104,04**	**100,0**	
1.1	2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.908.000	33.825.100	32.562.091	1.263.009	96,27	100,0	SELESAI (PAD/APBD)

NO.	KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		KINERJA KEUANGAN					FISIK (%)	KET
			INDIKATOR	TARGET	APBD MURNI	APBD - P	REALISASI	SILPA	% Keu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.2	2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	1.460.000	1.460.000	1.460.000	-	100,00	100,0	SELESAI (PAD/APBD)
1.3	2.14.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.540.000	8.540.000	8.540.000	-	100,00	100,0	SELESAI (PAD/APBD)
II	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			**385.884.000**	**193.851.000**	**189.526.500**	**4.324.500**	**49,11**	**100,0**	
1	**2.08.02.2.01**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**			**40.000.000**	**40.000.000**	**39.334.700**	**665.300**	**98,34**	**100,0**	
1.1	2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijak an dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	32 OPD/ Lembaga	40.000.000	40.000.000	39.334.700	665.300	98,34	100,0	SELESAI (PAD/APBD)
2	**2.08.02.2.02**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**			**195.884.000**	**3.851.000**	**3.846.800**	**4.200**	**1,96**	**100,0**	
1.1	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1 Dokumen	147.096.000	3.851.000	3.846.800	4.200	99,89	100,0	REFOCUSING (POKIR/PAD)
1.2	2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	30 Organisasi	48.788.000	-	-	-	0,00	0,0	Di Drop
3	**2.08.02.2.03**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**			**150.000.000**	**150.000.000**	**146.345.000**	**3.655.000**	**97,56**	**100,0**	
1.1	2.08.02.2.03 .02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	150.000.000	150.000.000	146.345.000	3.655.000	97,56	100,0	SELESAI (PAD/APBD)
III	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**177.949.500**	**169.099.500**	**160.613.000**	**8.486.500**	**90,26**	**100,0**	
1	**2.08.03.2.01**	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**			**112.949.500**	**112.949.500**	**105.519.500**	**7.430.000**	**93,42**	**100,0**	
1.1	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (DAKNF PPA)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	1 Dokumen	112.949.500	112.949.500	105.519.500	7.430.000	93,42	100,0	SELESAI DAKNF PPA (Pencegahan)
2	**2.08.03.2.03**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**65.000.000**	**56.150.000**	**55.093.500**	**1.056.500**	**84,76**	**100,0**	
1.1	2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	65.000.000	56.150.000	55.093.500	1.056.500	98,12	100,0	SELESAI P2TP2A (Pajak Rokok)
IV	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**100.000.000**	**100.000.000**	**98.467.000**	**1.533.000**	**98,47**	**100,0**	
1	**2.08.06.2.01**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**			**60.000.000**	**60.000.000**	**59.889.500**	**110.500**	**99,82**	**100,0**	
	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi	60.000.000	60.000.000	59.889.500	110.500	99,82	100,0	SELESAI (Pajak Rokok)
2	**2.08.06.2.02**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**			**40.000.000**	**40.000.000**	**38.577.500**	**1.422.500**	**96,44**	**100,0**	
1.1	2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	40.000.000	40.000.000	38.577.500	1.422.500	96,44	100,0	SELESAI (Pajak Rokok)
V	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**338.839.000**	**393.839.000**	**254.457.500**	**139.381.500**	**75,10**	**56,7**	
1	**2.08.07.2.01**	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Tim/Satgas Terlibat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak**	30 Instansi/ Lembaga	-	**55.000.000**	**54.777.000**	**223.000**	**0,00**	**0,0**	

NO.	KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		KINERJA KEUANGAN					FISIK (%)	KET
			INDIKATOR	TARGET	APBD MURNI	APBD - P	REALISASI	SILPA	% Keu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 OPD/ Lembaga	-	55.000.000	54.777.000	223.000	99,59	100,0	SELESAI (Pajak Rokok)
2	**2.08.07.2.02**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**262.033.000**	**262.033.000**	**146.175.000**	**115.858.000**	**55,78**	**85,0**	
1.1	2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (DAKNF PPA)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	75 Layanan	262.033.000	262.033.000	146.175.000	115.858.000	55,78	85,0	SELESAI DAKNF PPA (Pelayanan)
3	**2.08.07.2.03**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**76.806.000**	**76.806.000**	**53.505.500**	**23.300.500**	**69,66**	**85,0**	
1.1	2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasi tas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (DAKNF PPA)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 Dokumen	76.806.000	76.806.000	53.505.500	23.300.500	69,66	85,0	SELESAI DAKNF PPA (Manajemen)
VI	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			**75.000.000**	**75.000.000**	**66.711.287**	**8.288.713**	**88,95**	**100,0**	
1	**2.14.02.2.02**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			**75.000.000**	**75.000.000**	**66.711.287**	**8.288.713**	**88,95**	**100,0**	
1.1	2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga (DAKNF KB)	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	5.400.000	5.400.000	5.159.000	241.000	95,54	100,0	SELESAI (DAKNF KB)
1.2	2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (DAKNF KB)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	69.600.000	69.600.000	61.552.287	8.047.713	88,44	100,0	DAKNF KB
VII	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**1.738.325.496**	**2.043.982.896**	**800.564.135**	**1.243.418.761**	**46,05**	**78,6**	
1	**2.14.03.2.01**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**			**80.837.696**	**308.037.696**	**76.700.000**	**231.337.696**	**94,88**	**78,3**	
1.1	2.14.03.201.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	-	187.200.000	31.200.000	156.000.000	16,67	80,0	DAKNF KB
1.2	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (DAKNF KB)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	1 Laporan	80.837.696	80.837.696	19.890.000	60.947.696	24,60	80,0	DAKNF KB
1.3	2.14.03.201.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	-	40.000.000	25.610.000	14.390.000	64,03	75,0	DAKNF KB
2	**2.14.03.2.02**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**			**440.811.000**	**440.785.400**	**153.177.629**	**287.607.771**	**34,75**	**75,0**	
1.1	2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAKNF KB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	45 Orang	440.811.000	440.785.400	153.177.629	287.607.771	34,75	75,0	DAKNF KB
3	**2.14.03.2.03**	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**			**819.926.800**	**898.409.800**	**445.136.506**	**453.273.294**	**54,29**	**86,0**	
1.1	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAKNF KB)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	16 Laporan	6.750.000	6.750.000	4.469.300	2.280.700	66,21	80,0	DAKNF KB
1.2	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (DAKNF KB)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	50 Orang	453.126.800	453.126.800	73.150.000	379.976.800	16,14	75,0	DAKNF KB
1.3	2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAKF KB)	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Unit	352.250.000	400.733.000	334.417.806	66.315.194	83,45	100,0	DAKNF KB
1.4	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAKNF KB)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	16 Laporan	7.800.000	7.800.000	3.439.000	4.361.000	44,09	75,0	DAKNF KB

NO.	KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		KINERJA KEUANGAN					FISIK (%)	KET
			INDIKATOR	TARGET	APBD MURNI	APBD - P	REALISASI	SILPA	% Keu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.5	2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	-	30.000.000	29.660.400	339.600	98,87	100,0	SELESAI PAD/APBD
4	**2.14.03.2.04**	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**			**396.750.000**	**396.750.000**	**125.550.000**	**271.200.000**	**31,64**	**75,0**	
1.1	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DAKNF KB)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	24 Kampung KB	396.750.000	396.750.000	125.550.000	271.200.000	31,64	75,0	DAKNF KB
VIII	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**1.286.240.000**	**1.059.040.000**	**86.932.500**	**873.107.500**	**6,76**	**87,5**	
1	**2.14.04.2.01**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**			**1.286.240.000**	**1.059.040.000**	**86.932.500**	**873.107.500**	**6,76**	**87,5**	
1.1	2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAKF KB)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6 Unit	99.000.000	99.000.000	`	-	0,00	0,0	DAKF KB Batal Di laksanakan
1.2	2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahan an dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKS)	30 Orang	45.000.000	45.000.000	33.452.500	11.547.500	74,34	100,0	SELESAI (Pajak Rokok)
1.3	2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pem berdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAKNF KB)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	60 Orang	1.142.240.000	915.040.000	53.480.000	861.560.000	5,84	75,0	DAKNF KB
					7.492.387.184	**7.633.667.441**	**5.073.998.778**	**2.460.668.663**	**66,47**	**90,34**	

RENCANA KERJA (RENJA)
DP2KBP3A KAB. KARIMUN
TAHUN 2025

BAB : III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Program Nasional

Misi Kementerian PPPA mengacu pada Misi Kabinet Kerja yang dijabarkan menjadi nilai-nilai instrumental dalam melaksanakan agenda pemerintahan negara di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Misi ini menjadi acuan utama untuk menggerakan segala potensi dan sumberdaya serta modalitas lainnya guna mencapai kinerja yang lebih optimal guna mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan, Untuk mewujudkan visi Presiden tersebut, ditempuh 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, Dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya Yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat, Dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Visi Kementerian PPPA harus memperhatikan visi dan misi Presiden. Memperhatikan visi Presiden terpilih tersebut, maka Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi Kemen PPPA tahun 2020-2024 yaitu :

“Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan lndonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Kemen PPPA dalam rangka mencapai visi, tujuan dan sasaran Renstra Kemen PPPA adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan,
2. Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya
3. Peningkatan sinergitas dan kerjasama antara Kemen PPPA dengan lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4. Peningkatan perlindungan hak perempuan
5. Peningkatan perlindungan khusus anak
6. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam mendukung Visi, Misi dan Janji Presiden RI 2020-2024 sebagaimana tertera di atas, maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkomitmen atas Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut :

“Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Terkait dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), secara umum BKKBN berkontribusi langsung terhadap upaya pencapaian Janji Presiden dalam hal :

1. Pembangunan Keluarga

BKKBN tetap dalam lingkup Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, mendukung sepenuhnya upaya pencapaian Janji Presiden terkait “Meningkatkan keterlibatan perempuan/ibu dalam menjaga tumbuh kembang anak serta pendidikan karakter dalam keluarga” dan “Revolusi Mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antar warga”. Terutama dalam pengembangan kegiatan prioritas dalam penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini, serta pengembangan kegiatan terkait Revolusi Mental dalam sistem sosial untuk penguatan ketahanan keluarga dan masyarakat.

2. Kependudukan

Pembangunan Kependudukan terkait langsung dengan Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia dan dalam lingkup Janji Presiden untuk “Memantapkan Reformasi Sistem Kependudukan Nasional”. Dalam hal ini BKKBN mendukung sepenuhnya Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2020-2024 dalam Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial, terutama dalam upaya “Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan”.

3. Keluarga Berencana (KB)

Program Keluarga Berencana (KB) terkait langsung dengan Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia dan dalam lingkup Janji Presiden untuk "Meningkatkan akses perempuan/ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesehatan reproduksi, terutama untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). BKKBN mendukung Arah Kebijakan dan Strategi pada Rancangan RPJMN 2020-2024 dalam upaya "Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi".

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk :

1. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
2. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

3.1.1. Hubungan Antara Renstra OPD Dengan RPJMD Provinsi Kepri

Berdasarkan cita-cita besar serta untuk menjawab tantangan yang saat ini dihadapi maka visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021–2026 yaitu :

"TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA"

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Makmur
2. Berdaya Saing
3. Berbudaya

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 memiliki peran dan berkontribusi dalam tercapainya Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 terutama pada misi :

Misi Ke 3 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa

Kesempatan dan perlakuan setara bagi perempuan sangat penting untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan SDM. Kemiskinan, isolasi geografis, status minoritas, kecacatan, pernikahan dini dan kehamilan, kekerasan berbasis gender, dan kepercayaan tradisional tentang status dan peran perempuan merupakan beberapa hambatan yang menghalangi hak perempuan dan anak perempuan untuk menjalankan hak mereka untuk berpartisipasi dan mendapatkan haknya dalam segala bidang.

Salah satu hal yang memengaruhi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan adalah pemberdayaan perempuan yang rendah. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Pemberdayaan gender di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Namun, data IDG tahun 2018 turun sebesar 0,78 poin dibanding tahun 2017. Bahkan data terbaru tahun 2019 IDG menunjukkan angka 62,03%atau turun dari 66,18% tahun 2018.

Permasalahan di lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu pemberdayaan perempuan di Provinsi Kepulauan Riau belum optimal yang dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angka Kerja (TPAK). TPAK perempuan hanya sebesar 48,93% pada tahun 2020. Selain itu, masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2020 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO mencapai angka 33,42%. Perlindungan terhadap anak tetap dilaksanakan karena kekerasan terhadap anak masih terjadi.

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut :

a. Belum optimalnya pembangunan dan pemberdayaan perempuan
b. Masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan
c. Perlindungan terhadap anak masih perlu ditingkatkan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai berikut :

a. Pemanfaatan bonus demografi yang belum optimal
b. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya merencanakan kelahiran
c. Meningkatnya kehamilan pada usia remaja

3.1.2. Hubungan Antara Renstra OPD Dengan RPJMD Kabupaten Karimun

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun terpilih periode 2021–2026 adalah :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA"

Makna dari visi RPJMD Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Pusat pertumbuhan ekonomi
2. Berkeadilan
3. Berlandaskan iman dan taqwa

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Karimun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal (BERKEADILAN DALAM BIDANG EKONOMI)
2. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan Dalam Rangka Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (BERKEADILAN DALAM INFRASTRUKTUR)
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa (BERKEADILAN DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA)
4. Meningkatkan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup (BERKEADILAN DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
5. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul (BERKEADILAN DALAM PELAYANAN PUBLIK)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 memiliki peran dan berkontribusi dalam tercapainya Misi Pembangunan Kabupaten Karimun terutama pada misi :

1. Misi Ke 3 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Kuat, Kompetitif Dan Berbudaya Berlandaskan Iman Dan Taqwa (BERKEADILAN DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA), serta
2. Misi Ke 5 : Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul (BERKEADILAN DALAM PELAYANAN PUBLIK)

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJPD Perubahan Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang daerah adalah *"Kabupaten Karimun yang maju, mandiri, adil dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa"*. Dimana dalam tahap ini, sasaran pokok perencanaan pembangunan untuk perencanaan Tahun 2021–2026 terutama memantapkan pencapaian prioritas pembangunan daerah yang disesuaikan dengan Misi RPJPD Kabupaten Karimun.

Fokus utama RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 adalah :

1. Mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan kelautan berbasis ekonomi kerakyatan;
2. Meningkatkan pertumbuhan industri kecil, menengah, dan besar serta koperasi dengan struktur yang kuat melalui keterkaitan antar sektor dan antar industri, serta mewujudkan pusat perdagangan dan jasa modern dengan dukungan agrobisnis dan agroindustri;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4. Mewujudkan *good governance* (ketatapemerintahan yang baik);
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perkotaan dan pedesaan serta kawasan pesisir dan perbatasan.

Untuk itu strategi yang digunakan adalah :

1. Menghimpun sumber daya dari kegiatan ekspor (terutama perikanan laut dan pertanian dengan didukung prasarana pelabuhan dan *Free Trade Zone* serta pengembangan pariwisata disertai dengan investasi pembangunan terutama peningkatan kemampuan SDM);
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat serta aktualisasi ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap menjaga eksistensi budaya sehingga dapat mewujudkan insan yang cerdas, sehat dan berakhlak yang dapat mendorong pembangunan di segala sektor;
3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan serta menciptakan iklim berusaha yang kondusif untuk investor;
4. Meningkatkan infrastruktur dan pelayanan pada sektor industri.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan pengertian sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Secara praktis, tujuan dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang harus dilakukan agar misi dapat terselesaikan (*mission accomplished*). Oleh karena itu, tujuan dibentuk dari kata kerja (verba) dan diturunkan dari setiap misi. Sasaran adalah hal-hal yang harus terpenuhi agar tujuan terlaksana. Pernyataan sasaran diberi imbuhannya dan diturunkan untuk setiap tujuan.

Tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kesetaraan Gender.
2. Terwujudnya Pengendalian Penduduk.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Renja OPD

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
2. Penguatan dan Pengembangan Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Meningkatnya Cakupan Kepesertaan Ber KB
4. Meningkatnya Peran Serta Keluarga Dalam Program Kependudukan
5. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dan Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan
6. Kinerja dan Kualitas Aparatur OPD

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain : memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu, membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan dan jejaring perempuan, anak dan lansia
2. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
3. Peningkatan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan Perempuan Peningkatan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan Perempuan
4. Advokasi dan sosialisasi bagi pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha serta media massa dalam mewujudkan pemenuhan hak anak
5. Penguatan sistem perlindungan perempuan mencakup pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban tindak kekerasan, eks ploitasi, penelantaran dan perlakuan salah
6. Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak
7. Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak
8. Menata, menguatkan serta meningkat kan kapasitas kelembagaan serta menyerasikan landasan hukum dan kebijakan kependudukan, KB dan pembangunan keluarga
9. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam kesehatan dan pembangunan
10. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan
11. Peningkatan kapasitas jejaring kemitraan bidang pengendalian penduduk
12. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas,
13. Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB, BKB,BKR, BKL dan Kesehatan Reproduksi
14. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik
15. Peningkatan manejemen kinerja OPD
16. Pemantapan sikronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian Pemantapan sikronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian
17. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
18. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan OPD
19. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur OPD yang profesional (kompetensi birokrasi)
20. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi OPD
21. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip OPD
22. Peningkatan peran dan kinerja pengelolaan keuangan OPD

3.2.2. Tugas dan Fungsi OPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Karimun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. DP2KBP3A Kabupaten Karimun mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

DP2KBP3A Kabupaten Karimun mempunyai Fungsi :

1. Merumus Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
2. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

Uraian tugas DP2KBP3A Kabupaten Karimun, sebagai berikut :

a. Menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis OPD.
b. Menyiapkan rencana kerja dan penetapan kebijakan teknis pengembangan.
c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian program/kegiatan.
d. Melaksanakan kegiatan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, masing-masing bagian, sub bagian, bidang dan seksi dalam struktur organisasi OPD DP2KBP3A Kabupaten Karimun seperti tercantum dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DP2KBP3A Kabupaten Karimun termasuk dalam kategori Tipe A, serta bagan dan struktur organisasi OPD terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
    a. Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB
    b. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
   a. Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
   b. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
5. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
   a. Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan (PP)
   b. Seksi Pemenuhan Hak Anak
6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
   a. Seksi Perlindungan Hak Perempuan
   b. Seksi Perlindungan Anak
7. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada OPD DP2KBP3A Kabupaten Karimun dengan klasifikasi Kelas A.

3.3. Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun tahun 2025 adalah merupakan bagian dari sistem manajemen perencanaan pembangunan partisipatif yaitu pendekatan yang lebih mengedepankan dan mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja (RENJA) OPD DP2KBP3A Kabupaten Karimun Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050_5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan perencanaan diawali dari tingkat Musrenbang Desa dan Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, Forum OPD hingga Musrenbang tingkat Kabupaten serta tingkat Provinsi dan rencana kerja OPD yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Karimun 2021 – 2026 serta sinkronisasi dari berbagai usulan dengan memperhatikan agenda pembangunan di pusat, Propinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Karimun dimana pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik perlu menjadi prioritas.

Rencana pembangunan OPD DP2KBP3A Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

1. Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan :

   -. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
   -. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
   -. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

2. Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan :

   -. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
   -. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

3. Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan :

   -. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Kewenangan Kabupaten/Kota
   -. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota

II. Program Perlindungan Perempuan

1. Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan :

   -. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
   -. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan :

   -. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
   -. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan :

   -. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
   -. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
   -. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
   -. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

III. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

1. Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan :

   -. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
   -. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
   -. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan :

   -. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   -. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   -. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan :

   -. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

IV. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

1. Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan :

   -. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
   -. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

V. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan :

   -. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
   -. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan
   Kabupaten/Kota

2. Sub Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan :

   -. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
   -. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas
   Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   -. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   -. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

VI. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan :

   -. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
   -. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan :

   -. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   -. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
   -. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
   -. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan :

   -. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   -. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   -. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. Program Pengendalian Penduduk

1. Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk. Sub Kegiatan :

   -. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan,
   Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
   -. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
   -, Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan
   -. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
   -. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota

-. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non formal
-. Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
-. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK

2. Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :

-. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
-. Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
-. Pemetaan Kependudukan
-. Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
-. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
-. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
-. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
-. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
-. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

II. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

1. Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal. Sub Kegiatan :

-. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
-. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
-. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
-. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
-. Pengendalian Program KKBPK

2. Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB). Sub Kegiatan :

-. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
-. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
-. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

3. Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan :

-. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
-. Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat

Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
-. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
-. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
-. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
-. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
-. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak

4. Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB. Sub Kegiatan :
   -. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
   -. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
   -. Pembinaan Terpadu Kampung KB

III. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

1. Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Sub Kegiatan :

-. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
-. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
-. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
-. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
-. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
-. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
-. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

-. Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK.

2. Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Sub Kegiatan :
   -. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
   -. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub Kegiatan :
   -. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   -. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
   -. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
   -. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
   -. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Sub Kegiatan :
   -. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
   -. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
   -. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
   -. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.
3. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Sub Kegiatan :
   -. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.
   -. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Sub Kegiatan :
   -. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
   -. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
   -. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
   -. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
   -. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

5. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah. Sub Kegiatan :

   -. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
   -. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   -. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
   -. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
   -. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
   -. Penyediaan Bahan/Material.
   -. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
   -. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

6. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sub Kegiatan :

   -. Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
   -. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
   -. Pengadaan Mebel.

   -. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
   -. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
   -. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
   -. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

7. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sub Kegiatan :

   -. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
   -. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
   -. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   -. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

8. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sub Kegiatan :

   -. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
   -. Pemeliharaan Mebel.
   -. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
   -. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
   -. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

RENCANA KERJA (RENJA)
DP2KBP3A KAB. KARIMUN
TAHUN 2025

BAB : IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan Dan Saran

Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Karimun tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan penganggaran yang telah disediakan.

Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang diinginkan akan tercapai demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan berpedoman pada kaidah-kaidah yang sudah ada yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi Kepulauan Riau, visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Karimun, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA/DPA DP2KBP3A Kabupaten Karimun.

Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya akan melengkapi dan menyusun dokumen perencanaan program kegiatan dan anggaran dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD DP2KBP3A Kabupaten Karimun, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

RENCANA KERJA (RENJA)
DP2KBP3A KAB. KARIMUN
TAHUN 2025

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. KARIMUN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**5.600.302.975,00**							**10.458.408.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.600.302.975,00**							**10.458.408.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**5.600.302.975,00**							**7.108.408.000,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**80 %**			**80 %**	**5.600.302.975,00**						**80 %**	**4.258.408.000,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja OPD*	-			1 Laporan	50.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun	-	250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				60 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				25 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Laporan	4.913.254.975,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun	-	2.050.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	4.809.094.975,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		1.700.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	84.168.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	19.992.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah*	-			1 Laporan	0,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun	-	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian*	-			1 Laporan	0,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun	-	250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				55 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum*	-			1 Laporan	191.185.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun	-	400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1.692.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Paket	52.258.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	2.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	4.230.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15.125.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				11 Paket	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	115.880.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah*	-			1 Laporan	48.203.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun	-	450.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5.877.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	42.326.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Penyediaan Jasa Penunjang*	-			1 Laporan	293.087.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun	-	458.408.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		58.408.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	26.687.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	266.400.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			1 Laporan	104.573.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun	-	300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	77.705.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	17.120.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9.748.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan***	**56,85 Persentase**			**56,85 Persentase**	**0,00**						**56,85 Persentase**	**600.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga PUG pada Lembaga Pemerintahan*	-			40 Lembaga	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun	-	250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG														
			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota														
			Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota				1 Kebijakan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota														
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				30 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG				1 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				30 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Laporan Upaya Pemberdayaan Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan*	-			1 Laporan	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun	-	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				1 Lembaga	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0004	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				30 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan*	-			1 Laporan	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun	-	200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi				1 Lembaga	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/ Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP tingkat kab/kota				30 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di kab/kota				1 Unit	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Persentase Kasus Perlindungan Hak Dan Tindak Kekerasan Pada Perempuan Yang Ditindaklanjuti***	**100 Persen**			**100 Persen**	**0,00**						**100 Persen**	**550.000.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang di Dampingi*	-			1 Laporan	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun	-	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Perangkat Daerah	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Laporan Layanan Rujukan Perempuan Korban Kekerasan (P2TP2A)*	-			1 Laporan	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun	-	200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				25 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Layanan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Pelaksanaan Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan*	-			1 Laporan	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun	-	250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				30 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik				45 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	***Prestasi Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kabupaten Karimun***	**Tingkat Mentor Nilai**			**Tingkat Mentor Nilai**	**0,00**						**Tingkat Mentor Nilai**	**550.000.000,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak Anak*	-			1 Laporan	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun	-	200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Perangkat Daerah	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Dokumen Penguatan dan Pengembangan Peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak Anak*	-			1 Dokumen	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun	-	250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				12 Lembaga	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				45 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Unit Penyedia Layanan bagi Keluarga dan Hak Anak (UPT P2TP2A)*	-			1 Unit	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun	-	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				25 Layanan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	***Prestasi Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Karimun***	**Strata Madya Nilai**			**Strata Madya Nilai**	**0,00**						**Strata Madya Nilai**	**100.000.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Dokumen Data Gender dan Anak yang tersedia*	-			1 Dokumen	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun	-	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak*	-			3 Lembaga	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun	-	450.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				45 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Kasus Anak Korban Kekerasan Dan Anak Bermasalah Hukum (ABH) Yang Ditindaklanjuti***	**100,0 Persen**			**100,0 Persen**	**0,00**						**100,0 Persen**	**400.000.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Tim/Satgas Terlibat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak*	-			30 Instansi/ Lembaga	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun	-	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA														
			Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu				1 Kegiatan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA														
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				0 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Unit Penyedia Layanan bagi Anak Korban Kekerasan (P2TP2A)*	-			1 Unit	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun	-	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				75 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK														
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				75 Layanan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak*	-			1 Dokumen	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun	-	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0004	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar				12 Lembaga	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota														
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK				1 Kegiatan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/														
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				30 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota														
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus				30 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**0,00**								**3.350.000.000,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***Rasio Akseptor KB***	**89,03 Persen**			**89,03 Persen**	**0,00**						**89,03 Persen**	**750.000.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota*	-			1 Dokumen	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun	-	350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan														
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				0 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				30 Organisasi	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				30 Organisasi	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan														
			Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				1 Kegiatan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga														
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				1 Kegiatan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal				1 Kegiatan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				1 Kegiatan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal														
			Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan				1 Kegiatan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0022	Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)														
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Kegiatan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk*	-			1 Dokumen	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun	-	400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan														
			Jumlah Kajian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0006	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga														
			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga														
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain														
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				2 Unit	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota														
			Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk				1 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB														
			Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				1 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														
			Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***Cakupan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)***	**13,56 Persen**			**13,56 Persen**	**0,00**						**13,56 Persen**	**2.150.000.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah Dokumen Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB*	-			1 Dokumen	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun	-	300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana														
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				4 Unit	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal														
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				30 Organisasi	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Jumlah Tenaga Penyuluh KB Kecamatan yang Dibina*	-			12 Orang	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun	-	250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB														
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				4 Unit	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				45 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				0 Organisasi	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				0 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana Kesehatan Sasaran Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi*	-			16 Unit Sarkes	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun	-	1.350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				16 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				50 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP														
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				1 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				4 Unit	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		700.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				30 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				16 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				30 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria														
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				30 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan														
			Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan				1 Kab/Kota	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				30 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				30 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan*	-			1 Dokumen	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun	-	250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				30 Organisasi	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB														
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				24 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				2 Unit	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				24 Kampung	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	***Persentase PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet need)*** ***Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)***	**8,62 Persen** **8,62 Persen** **8,62 Persen** **8,62 Persen**			**8,64 Persen** **59,15 Persen**	**0,00**						**8,62 Persen** **8,62 Persen** **8,62 Persen** **8,62 Persen**	**450.000.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Dokumen Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*	-			1 Dokumen	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun	-	350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				30 Keluarga	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia				1 Kegiatan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)														
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				0 Laporan / Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				6 Unit	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				30 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				30 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				1 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				30 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				30 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				1 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				14 Kelompok	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)															
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				0 Kelompok	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan*	-			1 Dokumen	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun	-	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)															
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				30 Organisasi	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)															
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				30 Organisasi	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1 laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				1 laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	J U M L A H							**5.600.302.975,00**							**10.458.408.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah*	-			1 Laporan	0,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun	-	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian*	-			1 Laporan	0,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun	-	250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kabupaten Karimun		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

RENCANA KERJA (RENJA)
DP2KBP3A KAB. KARIMUN
TAHUN 2025

RANCANGAN AWAL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARIMUN PERIODE 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**-**	**-**	**4.100.000.000**	**-**	**4.086.500.000**	**-**	**4.175.047.000**	**-**	**4.065.673.000**	**-**	**4.258.408.000**	**-**	**20.685.628.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja OPD**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**250.000.000**	**1 Laporan**	**250.000.000**	**1 Laporan**	**250.000.000**	**1 Laporan**	**250.000.000**	**1 Laporan**	**250.000.000**	**5 Laporan**	**1.250.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	60 Dokumen	50.000.000	60 Dokumen	50.000.000	60 Dokumen	50.000.000	60 Dokumen	50.000.000	60 Dokumen	50.000.000	300 Dokumen	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	25 Dokumen	50.000.000	25 Dokumen	50.000.000	25 Dokumen	50.000.000	25 Dokumen	50.000.000	25 Dokumen	50.000.000	125 Dokumen	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	5 Laporan	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	5 Laporan	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1.850.000.000**	**1 Laporan**	**1.850.000.000**	**1 Laporan**	**1.850.000.000**	**1 Laporan**	**1.900.000.000**	**1 Laporan**	**2.050.000.000**	**5 Laporan**	**9.500.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	35 Orang/bulan	1.500.000.000	35 Orang/bulan	1.500.000.000	35 Orang/bulan	1.500.000.000	35 Orang/bulan	1.550.000.000	36 Orang/bulan	1.650.000.000	176 Orang/bulan	7.700.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	300.000.000	5 Dokumen	1.300.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	5 Laporan	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100.000.000**	**1 Laporan**	**100.000.000**	**1 Laporan**	**100.000.000**	**1 Laporan**	**100.000.000**	**1 Laporan**	**100.000.000**	**5 Laporan**	**500.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	5 Laporan	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	5 Laporan	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian PD**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**250.000.000**	**1 Laporan**	**250.000.000**	**1 Laporan**	**250.000.000**	**1 Laporan**	**250.000.000**	**1 Laporan**	**250.000.000**	**5 Laporan**	**1.250.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	53 Paket	55 Paket	50.000.000	55 Paket	50.000.000	55 Paket	50.000.000	55 Paket	50.000.000	55 Paket	50.000.000	275 Paket	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	35 Orang	50.000.000	35 Orang	50.000.000	35 Orang	50.000.000	35 Orang	50.000.000	35 Orang	50.000.000	175 Orang	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	55 Orang	50.000.000	55 Orang	50.000.000	55 Orang	50.000.000	55 Orang	50.000.000	55 Orang	50.000.000	275 Orang	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum PD**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**400.000.000**	**1 Laporan**	**400.000.000**	**1 Laporan**	**400.000.000**	**1 Laporan**	**400.000.000**	**1 Laporan**	**400.000.000**	**5 Laporan**	**2.000.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	12 Paket	50.000.000	12 Paket	50.000.000	12 Paket	50.000.000	12 Paket	50.000.000	12 Paket	50.000.000	60 Paket	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	55 Paket	60 Paket	50.000.000	60 Paket	50.000.000	60 Paket	50.000.000	60 Paket	50.000.000	60 Paket	50.000.000	60 Paket	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	12 Paket	50.000.000	12 Paket	50.000.000	12 Paket	50.000.000	12 Paket	50.000.000	12 Paket	50.000.000	60 Paket	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	15 Paket	50.000.000	15 Paket	50.000.000	15 Paket	50.000.000	15 Paket	50.000.000	15 Paket	50.000.000	75 Paket	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	15 Paket	50.000.000	15 Paket	50.000.000	15 Paket	50.000.000	15 Paket	50.000.000	15 Paket	50.000.000	75 Paket	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	9 Paket	11 Paket	50.000.000	11 Paket	50.000.000	11 Paket	50.000.000	11 Paket	50.000.000	11 Paket	50.000.000	55 Paket	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	50 Laporan	50.000.000	50 Laporan	50.000.000	50 Laporan	50.000.000	50 Laporan	50.000.000	50 Laporan	50.000.000	250 Laporan	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**500.000.000**	**1 Laporan**	**500.000.000**	**1 Laporan**	**600.000.000**	**1 Laporan**	**550.000.000**	**1 Laporan**	**450.000.000**	**5 Laporan**	**2.600.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	-	1 Unit	1.000.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	150.000.000	6 Unit	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	25 Unit	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	10 Unit	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	5 Unit	300.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	100.000.000	5 Unit	300.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**450.000.000**	**1 Laporan**	**436.500.000**	**1 Laporan**	**425.047.000**	**1 Laporan**	**415.673.000**	**1 Laporan**	**458.408.000**	**5 Laporan**	**2.185.628.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	36.500.000	1 Laporan	25.047.000	1 Laporan	15.673.000	1 Laporan	58.408.000	5 Laporan	185.628.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	5 Laporan	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	5 Laporan	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	5 Laporan	1.500.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**300.000.000**	**1 Laporan**	**300.000.000**	**1 Laporan**	**300.000.000**	**1 Laporan**	**200.000.000**	**1 Laporan**	**300.000.000**	**5 Laporan**	**1.400.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	-	2 Unit	50.000.000	2 Unit	350.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	10 Unit	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Unit	100.000.000	15 Unit	300.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		**-**	**-**	**550.000.000**	**-**	**550.000.000**	**-**	**550.000.000**	**-**	**650.000.000**	**-**	**600.000.000**	**-**	**2.900.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga PUG pada Lembaga Pemerintahan**	**30 Lembaga**	**32 Lembaga**	**200.000.000**	**35 Lembaga**	**200.000.000**	**38 Lembaga**	**200.000.000**	**40 Lembaga**	**250.000.000**	**45 Lembaga**	**250.000.000**	**45 Lembaga**	**1.100.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	300.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	50.000.000	35 Perangkat Daerah	50.000.000	38 Perangkat Daerah	50.000.000	40 Perangkat Daerah	50.000.000	45 Perangkat Daerah	50.000.000	45 Perangkat Daerah	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	100.000.000	35 Perangkat Daerah	100.000.000	38 Perangkat Daerah	100.000.000	40 Perangkat Daerah	150.000.000	45 Perangkat Daerah	100.000.000	45 Perangkat Daerah	550.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Laporan Upaya Pemberdayaan Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**150.000.000**	**1 Laporan**	**150.000.000**	**1 Laporan**	**150.000.000**	**1 Laporan**	**200.000.000**	**1 Laporan**	**150.000.000**	**5 Laporan**	**800.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	550.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi	30 Organisasi	50.000.000	30 Organisasi	50.000.000	30 Organisasi	50.000.000	30 Organisasi	50.000.000	30 Organisasi	50.000.000	30 Organisasi	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**200.000.000**	**1 Laporan**	**200.000.000**	**1 Laporan**	**200.000.000**	**1 Laporan**	**200.000.000**	**1 Laporan**	**200.000.000**	**5 Laporan**	**1.000.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	30 Orang	100.000.000	30 Orang	100.000.000	30 Orang	100.000.000	30 Orang	100.000.000	30 Orang	100.000.000	150 Orang	500.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	500.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**-**	**-**	**500.000.000**	**-**	**500.000.000**	**-**	**500.000.000**	**-**	**600.000.000**	**-**	**550.000.000**	**-**	**2.650.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang di Dampingi**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100.000.000**	**1 Laporan**	**100.000.000**	**1 Laporan**	**100.000.000**	**1 Laporan**	**150.000.000**	**1 Laporan**	**100.000.000**	**5 Laporan**	**550.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	300.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	50.000.000	35 Perangkat Daerah	50.000.000	38 Perangkat Daerah	50.000.000	40 Perangkat Daerah	50.000.000	45 Perangkat Daerah	50.000.000	45 Perangkat Daerah	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Laporan Layanan Rujukan Perempuan Korban Kekerasan (P2TP2A)**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**150.000.000**	**1 Laporan**	**150.000.000**	**1 Laporan**	**150.000.000**	**1 Laporan**	**200.000.000**	**1 Laporan**	**200.000.000**	**5 Laporan**	**850.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	25 Orang	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	150.000.000	25 Orang	150.000.000	125 Orang	600.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Layanan	25 Layanan	50.000.000	25 Layanan	50.000.000	25 Layanan	50.000.000	25 Layanan	50.000.000	25 Layanan	50.000.000	125 Layanan	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan Pelaksanaan Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**250.000.000**	**1 Laporan**	**250.000.000**	**1 Laporan**	**250.000.000**	**1 Laporan**	**250.000.000**	**1 Laporan**	**250.000.000**	**5 Laporan**	**1.250.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Dokumen	25 Dokumen	50.000.000	25 Dokumen	50.000.000	25 Dokumen	50.000.000	25 Dokumen	50.000.000	25 Dokumen	50.000.000	125 Dokumen	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	30 Orang	50.000.000	30 Orang	50.000.000	30 Orang	50.000.000	30 Orang	50.000.000	30 Orang	50.000.000	150 Orang	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	75 Orang	45 Orang	50.000.000	45 Orang	50.000.000	45 Orang	50.000.000	45 Orang	50.000.000	45 Orang	50.000.000	225 Orang	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	500.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**		**-**	**-**	**465.000.000**	**-**	**500.000.000**	**-**	**500.000.000**	**-**	**550.000.000**	**-**	**550.000.000**	**-**	**2.565.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak Anak**	**-**	**1 Laporan**	**200.000.000**	**1 Laporan**	**200.000.000**	**1 Laporan**	**200.000.000**	**1 Laporan**	**200.000.000**	**1 Laporan**	**200.000.000**	**5 Laporan**	**1.000.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	30 Perangkat Daerah	50.000.000	30 Perangkat Daerah	50.000.000	30 Perangkat Daerah	50.000.000	30 Perangkat Daerah	50.000.000	30 Perangkat Daerah	50.000.000	30 Perangkat Daerah	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	500.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.04.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen Penguatan dan Pengembangan Peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak Anak**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**200.000.000**	**1 Laporan**	**200.000.000**	**1 Laporan**	**200.000.000**	**1 Laporan**	**250.000.000**	**1 Laporan**	**250.000.000**	**5 Laporan**	**1.100.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	-	12 Lembaga	50.000.000	12 Lembaga	50.000.000	12 Lembaga	50.000.000	12 Lembaga	50.000.000	12 Lembaga	50.000.000	12 Lembaga	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	45 Orang	100.000.000	45 Orang	100.000.000	45 Orang	100.000.000	45 Orang	100.000.000	45 Orang	100.000.000	225 Orang	500.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	350.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.04.2.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Unit Penyedia Layanan bagi Keluarga dan Hak Anak (UPT P2TP2A)**	**-**	**1 Unit**	**65.000.000**	**1 Unit**	**100.000.000**	**1 Unit**	**100.000.000**	**1 Unit**	**100.000.000**	**1 Unit**	**100.000.000**	**1 Unit**	**465.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	25 Layanan	65.000.000	25 Layanan	100.000.000	25 Layanan	100.000.000	25 Layanan	100.000.000	25 Layanan	100.000.000	125 Layanan	465.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		**-**	**-**	**100.000.000**	**-**	**100.000.000**	**-**	**100.000.000**	**-**	**100.000.000**	**-**	**100.000.000**	**-**	**500.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen Data Gender dan Anak yang tersedia**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100.000.000**	**1 Dokumen**	**100.000.000**	**1 Dokumen**	**100.000.000**	**1 Dokumen**	**100.000.000**	**1 Dokumen**	**100.000.000**	**5 Dokumen**	**500.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	10 Dokumen	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	-	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	10 Dokumen	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		**-**	**-**	**650.000.000**	**-**	**650.000.000**	**-**	**650.000.000**	**-**	**650.000.000**	**-**	**650.000.000**	**-**	**3.250.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintahan**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**200.000.000**	**1 Dokumen**	**200.000.000**	**1 Dokumen**	**200.000.000**	**1 Dokumen**	**200.000.000**	**1 Dokumen**	**200.000.000**	**5 Dokumen**	**1.000.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi	30 Organisasi	100.000.000	30 Organisasi	100.000.000	30 Organisasi	100.000.000	30 Organisasi	100.000.000	30 Organisasi	100.000.000	30 Organisasi	500.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	500.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak**	**3 Lembaga**	**3 Lembaga**	**450.000.000**	**3 Lembaga**	**450.000.000**	**3 Lembaga**	**450.000.000**	**3 Lembaga**	**450.000.000**	**3 Lembaga**	**450.000.000**	**3 Lembaga**	**2.250.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	45 Orang	100.000.000	45 Orang	100.000.000	45 Orang	100.000.000	45 Orang	100.000.000	45 Orang	100.000.000	225 Orang	500.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	100.000.000	60 Dokumen	500.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000	6 Dokumen	150.000.000	7 Dokumen	150.000.000	8 Dokumen	150.000.000	10 Dokumen	150.000.000	10 Dokumen	750.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	15 Dokumen	100.000.000	15 Dokumen	100.000.000	15 Dokumen	100.000.000	15 Dokumen	100.000.000	15 Dokumen	100.000.000	75 Dokumen	500.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		**-**	**-**	**600.000.000**	**-**	**600.000.000**	**-**	**600.000.000**	**-**	**600.000.000**	**-**	**600.000.000**	**-**	**3.000.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Tim/Satgas Terlibat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak**	**30 Lembaga**	**30 Lembaga**	**150.000.000**	**30 Lembaga**	**150.000.000**	**30 Lembaga**	**150.000.000**	**30 Lembaga**	**150.000.000**	**30 Lembaga**	**150.000.000**	**30 Lembaga**	**750.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	30 Perangkat Daerah	50.000.000	30 Perangkat Daerah	50.000.000	30 Perangkat Daerah	50.000.000	30 Perangkat Daerah	50.000.000	30 Perangkat Daerah	50.000.000	30 Perangkat Daerah	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	15 Dokumen	100.000.000	15 Dokumen	100.000.000	15 Dokumen	100.000.000	15 Dokumen	100.000.000	15 Dokumen	100.000.000	15 Dokumen	500.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Unit Penyedia Layanan bagi Anak Korban Kekerasan (P2TP2A)**	**1 Unit**	**1 Unit**	**300.000.000**	**1 Unit**	**300.000.000**	**1 Unit**	**300.000.000**	**1 Unit**	**300.000.000**	**1 Unit**	**300.000.000**	**1 Unit**	**1.500.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	100.000.000	75 Orang	100.000.000	75 Orang	100.000.000	75 Orang	100.000.000	75 Orang	100.000.000	375 Orang	500.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Layanan	75 Layanan	100.000.000	75 Layanan	100.000.000	75 Layanan	100.000.000	75 Layanan	100.000.000	75 Layanan	100.000.000	375 Layanan	500.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	15 Dokumen	50.000.000	15 Dokumen	50.000.000	15 Dokumen	50.000.000	15 Dokumen	50.000.000	15 Dokumen	50.000.000	15 Dokumen	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	15 Dokumen	50.000.000	15 Dokumen	50.000.000	15 Dokumen	50.000.000	15 Dokumen	50.000.000	15 Dokumen	50.000.000	15 Dokumen	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak**	**-**	**1 Dokumen**	**150.000.000**	**1 Dokumen**	**150.000.000**	**1 Dokumen**	**150.000.000**	**1 Dokumen**	**150.000.000**	**1 Dokumen**	**150.000.000**	**5 Dokumen**	**750.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	15 Dokumen	50.000.000	15 Dokumen	50.000.000	15 Dokumen	50.000.000	15 Dokumen	50.000.000	15 Dokumen	50.000.000	15 Dokumen	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**		**-**	**-**	**550.000.000**	**-**	**650.000.000**	**-**	**700.000.000**	**-**	**700.000.000**	**-**	**750.000.000**	**-**	**3.350.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**1 Dokumen**	**250.000.000**	**1 Dokumen**	**300.000.000**	**1 Dokumen**	**300.000.000**	**1 Dokumen**	**300.000.000**	**1 Dokumen**	**350.000.000**	**5 Dokumen**	**1.500.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	5 Dokumen	150.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.02.2.01.04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	150.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	150.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	-	-	-	-	-	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	3 Laporan	150.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.02.2.01.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	-	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	5 Laporan	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	-	-	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	4 Laporan	200.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk**	**-**	**1 Dokumen**	**300.000.000**	**1 Dokumen**	**350.000.000**	**1 Dokumen**	**400.000.000**	**1 Dokumen**	**400.000.000**	**1 Dokumen**	**400.000.000**	**5 Dokumen**	**1.850.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	5 Dokumen	100.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.02.2.02.04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.02.2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	-	1 Dokumen	50.000.000	-	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	-	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	10 Unit	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	1 Laporan	50.000.000	-	-	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	4 Laporan	200.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	-	-	-	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	4 Laporan	200.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		**-**	**-**	**2.100.000.000**	**-**	**2.100.000.000**	**-**	**2.100.000.000**	**-**	**2.100.000.000**	**-**	**2.150.000.000**	**-**	**10.550.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Dokumen Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**300.000.000**	**1 Dokumen**	**300.000.000**	**1 Dokumen**	**300.000.000**	**1 Dokumen**	**300.000.000**	**1 Dokumen**	**300.000.000**	**5 Dokumen**	**1.500.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	20 Organisasi	-	25 Organisasi	20.000.000	25 Organisasi	20.000.000	30 Organisasi	20.000.000	30 Organisasi	20.000.000	30 Organisasi	80.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 Unit	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	4 Unit	50.000.000	4 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	19 Unit	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	5 Laporan	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	5 Laporan	500.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	-	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	5 Laporan	170.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Tenaga Penyuluh KB Kecamatan yang Dibina**	**12 Orang**	**12 Orang**	**200.000.000**	**12 Orang**	**200.000.000**	**12 Orang**	**200.000.000**	**12 Orang**	**200.000.000**	**12 Orang**	**250.000.000**	**60 Orang**	**1.050.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	-	12 Organisasi	50.000.000	12 Organisasi	50.000.000	12 Organisasi	50.000.000	12 Organisasi	50.000.000	12 Organisasi	50.000.000	12 Organisasi	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	-	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	4 Unit	50.000.000	4 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	19 Unit	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	25 Orang	45 Orang	100.000.000	45 Orang	100.000.000	45 Orang	100.000.000	45 Orang	100.000.000	45 Orang	150.000.000	225 Orang	550.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sarana Kesehatan Sasaran Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi**	**16 Unit**	**16 Unit**	**1.350.000.000**	**16 Unit**	**1.350.000.000**	**16 Unit**	**1.350.000.000**	**16 Unit**	**1.350.000.000**	**16 Unit**	**1.350.000.000**	**16 Unit**	**6.750.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	16 Laporan	16 Laporan	50.000.000	16 Laporan	50.000.000	16 Laporan	50.000.000	16 Laporan	50.000.000	16 Laporan	50.000.000	80 Laporan	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	-	30 Orang	50.000.000	30 Orang	50.000.000	30 Orang	50.000.000	30 Orang	50.000.000	30 Orang	50.000.000	150 Orang	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	20 Orang	50 Orang	200.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	200.000.000	250 Orang	1.000.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Unit	3 Unit	800.000.000	3 Unit	800.000.000	4 Unit	800.000.000	4 Unit	800.000.000	5 Unit	800.000.000	19 Unit	4.000.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	16 Laporan	50.000.000	16 Laporan	50.000.000	16 Laporan	50.000.000	16 Laporan	50.000.000	16 Laporan	50.000.000	80 Laporan	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	-	30 Orang	100.000.000	30 Orang	100.000.000	30 Orang	100.000.000	30 Orang	100.000.000	30 Orang	100.000.000	150 Orang	500.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	5 Laporan	500.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**250.000.000**	**1 Dokumen**	**250.000.000**	**1 Dokumen**	**250.000.000**	**1 Dokumen**	**250.000.000**	**1 Dokumen**	**250.000.000**	**5 Dokumen**	**1.250.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	24 Kampung	24 Kampung	150.000.000	24 Kampung	150.000.000	24 Kampung	150.000.000	24 Kampung	150.000.000	24 Kampung	150.000.000	24 Kampung	750.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	-	24 Laporan	50.000.000	24 Laporan	50.000.000	24 Laporan	50.000.000	24 Laporan	50.000.000	24 Laporan	50.000.000	120 Laporan	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**		**-**	**-**	**485.000.000**	**-**	**500.000.000**	**-**	**500.000.000**	**-**	**500.000.000**	**-**	**450.000.000**	**-**	**2.435.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Dokumen Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**385.000.000**	**1 Dokumen**	**400.000.000**	**1 Dokumen**	**400.000.000**	**1 Dokumen**	**400.000.000**	**1 Dokumen**	**350.000.000**	**5 Dokumen**	**1.935.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	-	5 Kelompok	50.000.000	5 Kelompok	50.000.000	5 Kelompok	50.000.000	5 Kelompok	50.000.000	5 Kelompok	50.000.000	25 Kelompok	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Unit	6 Unit	50.000.000	6 Unit	50.000.000	6 Unit	50.000.000	6 Unit	50.000.000	6 Unit	50.000.000	30 Unit	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	30 Orang	50.000.000	30 Orang	50.000.000	30 Orang	50.000.000	30 Orang	50.000.000	30 Orang	50.000.000	150 Orang	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	60 Orang	50.000.000	60 Orang	50.000.000	60 Orang	50.000.000	60 Orang	50.000.000	60 Orang	50.000.000	300 Orang	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	5 Kelompok	50.000.000	5 Kelompok	50.000.000	5 Kelompok	50.000.000	5 Kelompok	50.000.000	5 Kelompok	50.000.000	25 Kelompok	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	5 Laporan	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	5 Laporan	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.14.04.2.01.09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	-	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	-	5 Dokumen	185.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100.000.000**	**1 Dokumen**	**100.000.000**	**1 Dokumen**	**100.000.000**	**1 Dokumen**	**100.000.000**	**1 Dokumen**	**100.000.000**	**5 Dokumen**	**500.000.000**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	30 Organisasi	50.000.000	30 Organisasi	50.000.000	30 Organisasi	50.000.000	30 Organisasi	50.000.000	30 Organisasi	50.000.000	30 Organisasi	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
		2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	-	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	5 Laporan	250.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KAB. KARIMUN
							10.100.000.000		**10.236.500.000**		**10.375.047.000**		**10.515.673.000**		**10.658.408.000**		**51.885.628.000**		

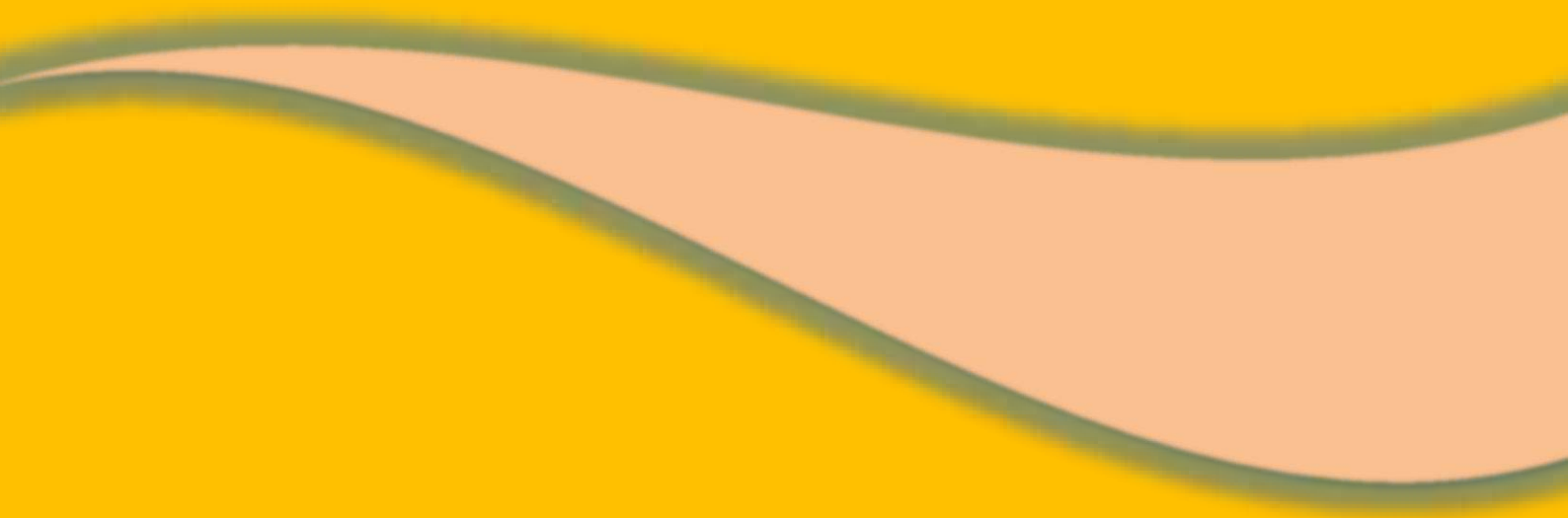

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RENCANA KERJA

(RENJA TAHUN 2025)

]

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN KARIMUN

BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah (PD) melakukan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025;

b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan antar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klafisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);

20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 46);

21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);

22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 99 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 99);

23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 45);

24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
RENCANA KERJA (RENJA)

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :
   a. pendahuluan;
   b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
   c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
   d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
   e. penutup.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta harus berpedoman dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
(3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya.
(4) Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 8 Juli 2024

BUPATI KARIMUN,

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024 NOMOR 34

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini, merupakan panduan dan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pangan dan Pertanian dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian untuk periode satu tahun kedepan

Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, dan pendanaan untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun. Renja ini mengacu pada Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2021—2026 dan bersifat indikatif untuk menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025, dan untuk meninjau kembali hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian Renja tahun berjalan (2024).

Diharapkan semua bidang teknis di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun dan *stakeholders* lainnya dengan adanya rencana kerja ini akan tercipta kesatuan gerak dan langkah dalam upaya penyelenggaraaran kesejahteraan sosial terutama dalam pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menciptakan peningkatan kinerja organisasi.

Tanjung Balai Karimun, 2024
KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN KARIMUN

SUKRANTO JAYA PUTRA, SP., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19730120200012100[illegible]

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **7**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 36

2.3. Isu- isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 39

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun 41

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 42

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **43**

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 43

3.2. Program dan Kegiatan 45

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAEARAH **47**

BAB 5 PENUTUP **55**

LAMPIRAN 57

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2023	7
Tabel 2.2	Capaian kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2023.....	10
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024	29
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2021.....	37
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2023	38
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2023	38
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Strategis pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2025	44
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026.....	48

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang menjadi dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RENJA PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

RENJA PD pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun ini mengacu pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Karimun, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026. Selain itu, Penyusunan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun mengacu pada Tema Pembangunan Kabupaten karimun Tahun 2025 "*Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien*" serta mengacu pada Prioritas Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2025 "*Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif*".

Penyusunan RENJA PD pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2025 menjabarkan rencana kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah.

Penyusunan RENJA PD Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun ini sebagai bahan acuan dalam pembangunan khususnya upaya penyelenggaraan sosial selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan memperhatikan dimensi waktu, sumberdaya dan potensi yang dimiliki, isu–isu strategis yang berkembang di masyarakat, serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat

memberikan dampak yang signifikan untuk terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan RENJA PD Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), telah diubah beberapa kali terakir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang - Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karimun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);
21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 50);

22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENJA PD Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah, sasaran- sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun kedepan beserta rencana kerja dan anggaran.

Tujuan penyusunan RENJA PD Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah :

1. Tersedianya gambaran yang jelas tentang program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025;
2. Tersedianya acuan dan arahan dalam pencapaian sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;
3. Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

RENJA PD Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2025 disusun melalui sistematika sebagai berikut :

BAB 1 **Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB 2 **Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB 3 **Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah,** berisi tentang Telahaan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB 4 **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**, berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB 5 **Penutup**

BAB 2
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2023, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun melaksanakan 4 (empat) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan sebagaimana ditunjukan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2023

No.	Nama Program	No.	Nama Kegiatan	No.	Nama Sub Kegiatan
1.	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan pangan	1.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan ssuai Kewenanan Daerah Kabupaten/Kota	1.	Penyediaan Infrastruktur Lumbung pangan
2.	program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	2.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4.	Pengawasan Penggunaan sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
		3.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	6.	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kaupaten/ Kota Lain
3.	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	4.	Pengembangan Prasarana Pertanian	7.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
4.	Program pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	5.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
5.	program penyuluhan pertanian		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	9.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
				10.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
				11.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di

					Kecamatan dan Desa
				12.	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				10.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				12.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
				14.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No.	Nama Program	No.	Nama Kegiatan	No.	Nama Sub Kegiatan
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN PANGAN			15.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				16.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				17.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan
				18.	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD
		7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				20.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				22.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				23.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				24.	Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Secara keseluruhan hasil pencapaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2023 dicapai dengan berbagai upaya dan strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 28 (dua selapan) sub kegiatan dengan dukungan anggaran yang tersedia sebesar Rp.14.569.951.370,- (Empat belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratts lima puluh satu ribu tiga ratsu tujuh puluh rupiah) dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 9.170.142.413,- (Sembilan milyar seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus tuga belas rupiah) atau 62,93 %. Uraian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Capaian kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian
Kabupaten Karimun Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7	3	98.293.500	57.412.485	58
	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	1	50.591.500	20.346.000	50
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3	1	16.903.000	7.650.000	45
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2	1	30.799.000	29.416.485	96
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1	1	7.708.451.052	7.279.569.294	94
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		99 Org	99 Org	7.600.151.052	7.171.269.294	94

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN		24 Org	24 Org	108.300.000	108.300.000	100
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1	1	678.991.999	666.682.541	98
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2	0	1,999.498	0	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		18	18	75.517.036	75.494.000	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		15	15	19.469.965	19.448.000	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		10	6	21.280.000	11.020.000	52
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		5	3	62.808.500	62.808.500	100

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		30	22	43.500.000	31.350.00	72
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		35	35	454.417.000	464.655.041	102
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1	1	30.000.000	22.500.000	75
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	1	30.000.000	22.500.000	75

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5	5	777.415.600	742.379.649	95
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1	1	42.303.800	24.818.649	59
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1	1	730.700.000	713.150.000	98
	Penyediaan Jasa surat menyurat		1	0	4.418.800	4.411.000	100
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1	1	38.914.900	35.536.860	91
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1	1	26.814.900	24.876.860	93
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		10	6	12.100.000	10.660.000	88

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
7.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1	0	97.378.813	0	0
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan		1	0	97.378.813	0	0
8.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		2	1	1.077.297.845	525.649.000	49
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		2	1	1.077.297.845	525.649.000	49
9.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		1	1	1.252.646.200	1.060.442.100	85
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		52	42	1.252.646.200	1.060.442.100	85
10.	Pengembangan Prasarana Pertanian		1	1	2.276.741.241		
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		1	-	2.276.741.241	89.676.000	4

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
11.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		1	1	150.574.120	115.244.000	77
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		1	1	150.574.120	115.244.000	77
12.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		1	1	383.246.100	159.101.020	42
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		8	6	66.147.000	54.000.000	82
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		434	434	194.586.500	173.097.000	89
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		32	32	122.512.600	72.537.100	59
	J U M L A H				**14.569.951.370**	**9.170.142.413**	**24,04**

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7	2	36.230.000	14.100.000	39
	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	1	22.750.000	10.050.000	44
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3	1	13.480.000	4.050.00	30
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2	-	-	-	-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1	1	7.649.699.284	7.329.193.246	96
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		80 Org	103 Org	7.556.747.284	7.282.717.246	96

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN		24 Org	19 Org	92.952.000	46.476.000	50
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		80	55	500.000.000	484.770.000	97
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		5	55	500.000.000	484.770.000	97
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1	-	479.327.000	227.824.050	48
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-	-	-	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	-	-	-	-

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		-	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		-	-	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		-	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		30	42	39.000.000	25.450.200	65
	Penyediaan Bahan/Material		-	-	-	-	-

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		45	33	388.177.000	202.373.850	52
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1	-	132.900.000	36.000.000	-
	Pengadaan Mebel		9	-	48.702.000	-	-
	Pengaaan Peralatan dan Mesin Lainya		8	3	84.198.000	36.000.00	43
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	-	-	-

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1	1	589.125.000	564.920.436	96
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		8	6	20.960.000	16.890.436	81
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		24	35	565.300.000	548.030.00	97
	Penyediaan Jasa surat menyurat		-	-	-	-	-
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1	-	20.510.000	7.530.590	37
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1	1	6.500.000	6.160.590	95
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		10	1	14.010.000	1.370.000	10

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
8.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1	-	135.000.000	-	-
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan		5	-	135.000.000	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik		-	-	-	-	-
9.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		-	-	-	-	-
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		-	-	-	-	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		-	-	-	-	-
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		-	-	-	-	-
10.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-
11.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		-	-	-	-	-
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun		-	-	-	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		-	-	-	-	-
12.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		-	-	-	-	-
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		-	-	-	-	-
13.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-
14.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-
15.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		2	1	781.858.844	165.659.500	21
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		2	1	781.858.844	165.659.500	21
16.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		-	-	-	-	-
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		-	-	-	-	-
17.	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		1	-	-	-	-
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		-	-	-	-	-
	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak		-	-	-	-	-
18.	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		-	-	-	-	-
	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan		-	-	-	-	-
`19.	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan		-	-	-	-	-

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
	Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan ternak		-	-	-	-	-
	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		-	-	-	-	-
	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		-	-	-	-	-
20`20.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		1	1	417.325.800	171.112.400	41
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		101.497	-	417.325.800	171.112.400	41
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		-	-	-	-	-
20`21.	Pengembangan Prasarana Pertanian		1	-	2.038.454.800	2.000.479.400	-
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		40	-	2.038.454.800	2.000.479.400	98
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana		-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		-	-	-	-	-
	Penyusun Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (lp2B)		-	-	-	-	-

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
20`22.	Pembangunan Prasarana Pertanian		-	-	-	-	-
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		-	-	-	-	-
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		-	-	-	-	-
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit		-	-	-	-	-
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage		-	-	-	-	-
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air		-	-	-	-	-
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya		-	-	-	-	-
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		-	-	-	-	-
20`23.	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-
	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		-	-	-	-	-
20`24.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		5	-	50.732.300	49.946.300	-
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosisi		80	-	50.732.300	49.946.300	-
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular		-	-	-	-	-

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
20`25.	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota						
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		-	-	-	-	-
20`26.	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		-	-	-	-	-
20`27.	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		-	-	-	-	-
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan		-	-	-	-	-
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		-	-	-	-	-
20`28.	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewaan		-	-	-	-	-
	Pendampingan Penerapan Unit Kesehatan Hewan		-	-	-	-	-
20`29.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		-	-	-	-	-
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		-	-	-	-	-

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		-	-	-	-	-
	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis		-	-	-	-	-
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan		-	-	-	-	-
30.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian		-	-	-	-	-
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		-	-	-	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		-	-	-	-	-
31.	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		-	-	-	-	-
	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		-	-	-	-	-
32.	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan		-	-	-	-	-
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan		-	-	-	-	-

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan		-	-	-	-	-
33.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		1	1	418.477.625	111.313.00	27
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		8	-	-	-	-
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		448	50	280.928.525	69.139.200	25
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		34	35	33.493.100	31.429.600	93
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani		-	-	-	-	-
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		40	10	104.056.000	10.924.200	10
	J U M L A H				**13.249.640.653**	**11.162.848.922**	**84,25**

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023 dan pencapaian Renstra 2021 – 2026 dapat terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program s.d. Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 9/6*100
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				**Indeks Pelayanan Publik**	**4,00**				
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial			**Nilai AKIP** **Level Kematangan MR Dinas Sosial**	**76,50** **3**				
		1.06.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM**	**83**	**81.79**	**82**	**82**	**98.80**
		1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**36 Dokumen**	**11 Dokumen**	**4 Dokumen**	**15 Dokumen**	**40.54**
		1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	4 Dokumen	1 dokumen	5 dokumen	45.45
		1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	8 Laporan	53.33
		1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	20
		1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**5 laporan**	**2 Laporan**	**1 Laporan**	**3 Laporan**	**60**

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program s.d. Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 9/6*100
		1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.750 orang bulan	594 orang bulan	336 orang bulan	930 orang bulan	53.14
		1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	2 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	60
		1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**5 laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**3 Laporan**	**60**
		1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	3 Paket	60
		1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	8 Paket	4 Paket	12 Paket	60
		1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	4 Paket	2 Paket	6 Paket	60
		1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	4 Paket	2 Paket	6 Paket	60
		1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	60
		1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135 Laporan	80 Laporan	25 Laporan	105 Laporan	77.78
		1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**	**5 laporan**	**2 Laporan**	**1 Laporan**	**3 Laporan**	**60**
		1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 paket	2 Paket	2 paket	4 paket	26.67
		1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 unit	4 Unit	1 Unit	5 unit	16.30
		1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	7 unit	7 unit	14 unit	100

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program s.d. Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 9/6*100
		1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**	**5 laporan**	**2 Laporan**	**1 Laporan**	**3 Laporan**	**60**
		1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	60
		1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	-	2 Laporan	40
		1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	60
		1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**5 laporan**	**2 Laporan**	**1 Laporan**	**3 Laporan**	**60**
		1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100
		1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100
		1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 unit	3 unit	7 unit	10 unit	38.85
		1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	12 unit	7 unit	19 unit	100
Meningkatkan kesejahteraan sosial				Persentase PPKS mandiri	3.03	1.72	1.93	1.93	
	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar PPKS			Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kessos	8.37 56.80	5.95 52.70	6.99 54	6.99 54	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program s.d. Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 9/6*100
		1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS Kelembagaan yang terakreditasi** **Persentase PSKS individu yang tersertifikasi**	**90 Persen** **41.14 Persen**	**60 Persen** **32.28 Persen**	**70 Persen** **34.81 Persen**	**70 Persen** **34.81 Persen**	**77.78** **84.61**
		1.06.02.2.02	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengumpulan sumbangan yang sesuai dengan ketentuan**	**70 izin**	**10 izin**	**-**	**10 izin**	**14.29**
		1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	20
		1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah PSKS Kelembagaan yang terakreditasi** **Jumlah PSKS individu yang tersertifikasi**	**9 Lembaga** **65 Orang**	**6 Lembaga** **51 Orang**	**7 Lembaga** **55 Orang**	**7 Lembaga** **55 Orang**	**77.78** **84.62**
		1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	200 orang	40 orang	-	40 orang	20
		1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	-	14 orang	14 orang	23.33
		1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	25 lembaga	7 lembaga	1 lembaga	8 lembaga	32
		1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Sertifikat	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program s.d. Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 9/6*100
		1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani**	**100 Persen**	**-**	**-**	**-**	**-**
		1.06.03.2.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke daerah asal**	**50 orang**	**-**	**-**	**-**	**-**
		1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	-	-	-	-
		1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**7.15 Persen**	**5.13 Persen**	**6.93 Persen**	**6.93 Persen**	**96,92**
		1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar**	**1.375 orang**	**332 orang**	**422 orang**	**754 orang**	**54.84**
		1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	435 orang	80 orang	-	80 orang	18.39
		1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	445 orang	50 orang	-	50 orang	11.24

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program s.d. Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 9/6*100
		1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	295 orang	50 orang	45 orang	95 orang	32.20
		1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 orang	12 orang	-	12 orang	24
		1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	25 orang	130 orang	135 orang	265 orang	100
		1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	10 orang	7 orang	17 orang	34
		1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar**	**275 orang**	-	**52 orang**	**52 orang**	**18.91**
		1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	25 orang	-	26 orang	26 orang	**100**
		1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	250 orang	-	26 orang	26 orang	10.4
		1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**	**50.68 Persen**	**44.55 Persen**	**49.97 Persen**	**49.97 Persen**	**98.60**
		1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Fakir Miskin yang masuk dalam DTKS**	**100.000 orang**	**89.904 orang**	**86.000 orang**	**86.000 orang**	**86**

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program s.d. Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 9/6*100
		1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	50.000 Orang	11.692 orang	1.000 orang	12.692 orang	25.39
		1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7.850 KPM	8.704 KPM	1.800 KPM	9.704 KPM	100
		1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar**	**4.000 Orang**	**936 Orang**	**300 Orang**	**1.236 Orang**	**30.90**
		1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	4.000 Orang	936 Orang	300 Orang	1.236 Orang	30.90
		1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	440 Orang	100 orang	-	100 orang	25

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan ditetapkan dalam Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2021-2026.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2024 dilaksanakan berdasar indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian dengan memasukan indikator produksi pertanian dan produktivitas pertanian, indikator ini merupakan satu kesatuan dari proses mengubah input (sumber daya) menjadi output (barang atau jasa) serta ukuran efisiensi dalam proses produksi, yaitu seberapa baik sumber daya digunakan untuk menghasilkan output. Singkatnya, produksi pertanian adalah kegiatannya, sementara produktivitas adalah ukuran keberhasilan kegiatan tersebut.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian menyelenggarakan Urusan Sosial yang merupakan urusan Wajib Pelayanan Dasar, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tahun 2023, Dinas Pangan dan Pertanian melaksanakan 4 (empat) program, 8 (delapan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun s.d. Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM /IKK	TARGET RENSTRA TAHUN KE					CAPAIAN KINERJA		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	
1	Produksi Pertanian		12110,33	12352,53	12537,82	12663,20	12853,15	11.643,50	21,395.98	
2	Produktivitas Pertanian		0,043	0,043	0,044	0,044	0,045	0,038	0,057	
3	Nilai AKIP		72	73	74	75	76	60,69	40,81	

2.2.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian target Tahun 2023 dengan capaian hingga Tahun 2022. Dimana semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2023 :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya nilai tambah produksi pertanian	Produksi Pertanian	12.352 Ton
		Produkstivitas Pertanian	0,043 Ton / Ha
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	73

2.2.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	**Meningkatnya nilai tambah produksi pertanian**)	Produksi Pertanian	12.352 Ton	21.338 Ton	164,56 %
		Produkstivitas Pertanian	0,043 Ton / Ha	0,057 Ton/Ha	116,27 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	73	40,81 %	58,30 %

Pencapaian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023 diukur melalui 2 (dua) Sasaran dan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Berdasarkan tabel diatas Rata-rata Capaian Sasaran Strategis Dinas Pangan dan Pertanian adalah 113,04%. Capaian indikator kinerja pada setiap sasaran sudah sangat baik namun terdapat 1 (satu) indikator yang targetnya tidak tercapai. Dinas Pangan dan Pertanian akan terus melakukan perbaikan kinerjanya dan melaksanakan evaluasi atas setiap capaian sasaran strategisnya sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan.

Capaian kinerja Tahun 2023 ini menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan perencanaan Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025. Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun merencanakan program dan kegiatan Tahun 2025 yang lebih difokuskan pada :

1. Peningkatan produksi pertanian dengan memberikan input sarana produksi pertanian berupa bibit tanaman, pupuk, obat-obatan tanaman.
2. Peningkatan produksi peternakan dengan memberikan input sarana produksi pertanian berupa bibit ternak, pupuk, obat-obatan ternak
3. Peningkatan produksi pertanian dengan memberikan input dukungan pelatihan serta adopsi inovasi teknologi pertanian dalam peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini kelompoktani dan keluarganya.
4. Penguatan ketahanan pangan masyarakat dengan pendekatan budidaya tanaman pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga.

2.3. Isu – Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura ditujukan untuk mempersiapkan kelompok tani yang mempunyai kemampuan untuk mengubah struktur kelembagaan. Pengubahan struktur kelembagaan petani dimulai dari pengelolaan kegiatan produksi sampai dengan kegiatan ekonomi yang produktif. Reformasi pembangunan pertanian dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi yang berkembang di masyarakat, karena sektor pertanian akan diarahkan menjadi sektor andalan dan sebagai mesin penggerak perekonomian nasional.

Dalam upaya kebijakan pembangunan pertanian semakin dipertajam dan difokuskan pada beberapa hal, yaitu :

1. Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan serta perternakan
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing tanaman pangan dan hortikultura,
3. Menjaga Keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya sarana pertanian dan

prasarana pertanian

4. Meningkatkan kualitas SDM pertanian
5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Pembangunan pertanian di Kabupaten Kabupaten Karimun meliputi pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan. Komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikembangkan saat ini, antara lain : jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, buah-buahan sayuran tahunan, sayuran buahan semusim, tanaman biofarmaka dan tanaman perkebunan. Dalam pengembangan sub sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta ketahanan pangan di Kabupaten Karimun, berdasarkan gambaran umum dimuka, ditemui permasalahan yang harus di atasi untuk dapat memberikan dayaguna yang lebih optimal bagi kesejahteraan petani dan keluarga, antara lain :

1. Luas lahan pertanian sub sektor tanaman pangan (luas lahan sawah tadah hujan) semakin menurun dari tahun ke tahun yang disebabkan berbagai faktor yaitu intrusi air laut yang memasuki lahan tanaman pangan yang merupakan lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) Kab. Karimun, dan kesesuaian lahan untuk berusaha tani tanaman pangan khususnya tanaman padi perlu banyak perlakuan sehingga petani beralih fungsi ketanaman hortikultura yang tidak begitu banyak perlu pemelihraan dan input sarana produksi lainnya.
2. Masih rendahnya produksi tanaman strategis seperti tanaman cabe untuk pemenuhan pasar lokal sehingga fluktuasi harga sangat signifikan dan berakibat pada komoditas yang berdampak pada inflasi kabupaten karimun serta masih belum optimalnya sarana produksi yag diberikan yang dapat membantu petani dalam melaksanakan usaha tani di Kabupaten Karimun.
3. Belum adanya kerjasama dari berbagai stockholder dalam upaya pemasaran produksi pertanian dalam hal ini tanaman hortikultura dan perkebunan, dalam hal ini kelompok tani dapat memenuhi permintaan pasar tapi belum adanya titik terang yang menjambatani hal tersebut sehingga petani memproduksi tanamannya hanya untuk pemenuhan kebutuhan pasar lokal.
4. Belum terpenuhi nya capaian berbagai urusan Ketahanan Pangan baik indikator Ketersediaan Pangan Pokok (Beras), Skor PPH Ketersediaan, Persentase Desa/Kelurahan Tahan Rawan Pangan, Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang di awasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diperoleh melalui musyawarah pembangunan daerah Kabupaten Karimun yang dihadiri oleh kelompok masyarakat, kepala desa, ormas dan LSM dan pembahasan di Forum OPD. Pada Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2024 terdapat satu usulan program/ kegiatan dari masyarakat.

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA
1	128097	18-01-2023	SAID FAISAL NUGRAHA, S.IP, MS.i	Kelurahan / Desa	BANTUAN DAN PENGADAAN HEWAN TERNAK	kurangnya Anggaran didalam Pembelian Hewan Ternak	RT.01 RW.01, Kab. Karimun	Kab. Karimun	Karimun	Lubuk Semut	Kabupaten / Kota	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Usulan Diterima dan Dapat Diteruskan

BAB 3
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada RENJA Perangkat Daerah pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatkan Meningkatnya nilai tambah produksi pertanian
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran pada Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun dalam upaya peningkatan produksi pertanian dan peningkatan produktivitas pertanian yang didukung oleh beberapa faktor penunjang :

- Penyediaan sarana produksi berupa benih unggul , pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian.
- Pendampingan dan penyuluhan berkelanjutan, berupa pendampingan dalam inovasi budidaya usaha tani, pengendalian hama/penyakit serta penerapan Good Agiculture Practices (GAP)
- Penguatan kelembagaan petani dapat berupa pembentukan dan pengauatan kelompok tani (poktan/Gapoktan).

Pentingnya penyediaan sarana produksi pertanian dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pada Dinas Pangan dan Pertanian antara lain :

- mejamin ketersediaan pangan bagi maysarakat
- Mengurangi pemasokan komoditas bahan pangan dari luar
- Mengurangi inflasi
- Meningkatkan kesejahteraan petani

Peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Karimun dalam peningkatan produksi pertanian merupakan tujuan startegis dalam pembangunan sektor pertanian, kesejahteraan petani tidak hanya dilihat dari aspek produksi semata tapi juga pada akses terhadap sarana produski, pasar, teknologi dan kebijakan pendukung lainya, peningkatan produksi yang berkelanjutan harus seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani tetapi dalam hal ini harus ada relevansi antara Pemerintah Daerah, Pelau Usaha, serta petani yang menjadi kunci utama dalam mewujudkannya

Uraian tujuan dan sasaran strategis pada penyusunan perencanaan peningkatan produksi dan produktivitas pada Tahun 2025 yang akan datang dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Pada Renja Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
1.	Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan	Meningkatnya nilai tambah produksi pertanian	Produksi Pertanian	12663,20 Ton
			Produktivitas Pertanian	0.044 Ton/Ha
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	75
			Level kematangan MR Dinas Sosial	3

3.2. Program dan Kegiatan

Bedasarkan RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025 Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp. 13.380.636.113 Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada rencana kerja tahun 2025 akan dilakukan intervensi melalui program dan kegiatan meliputi :

SASARAN STRATEGIS 1 :

"*Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Pertanian "*

1. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Sasaran : Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah, penanganan kerawanan pangan, kelancaran distribusi, kestabilan harga pangan dan keamanan pangan yang optimal.

Pagu Indikatif : Rp. 351.096.500,-

Indikasi kegiatan :

1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
2) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
3) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

2. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Sasaran : Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan yang optimal

Pagu Indikatif : Rp. 100.000.000,-

Indikasi kegiatan :

1) Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Sasaran : Meningkatnya penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang optimal

Pagu Indikatif : Rp. 675.940.625,-

Indikasi kegiatan :

1) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

2) Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

4. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Sasaran :Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Pagu Indikatif : Rp. 149.999.700,-

Indikasi kegiatan :

1) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

5. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Sasaran :Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Pagu Indikatif : Rp. 1.049.996.700

Indikasi kegiatan :

1) Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

SASARAN STRATEGIS 2 :

"*Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial"*

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian yang optimal.

Pagu Indikatif : Rp. 9.121.644.260,-

Indikasi kegiatan :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB 4
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pangan dan Pertanian merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Dinas Pangan dan Pertanian. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pangan dan Pertanian. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Karimun namun juga melalui sumber pendanaan lainnya APBD Provinsi Kepulauan Riau dan APBN.

Uraian rumusan program dan kegiatan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun untuk tahun perencanaan 2024 dan perkiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pangan dan Pertanian

Kabupaten Karimun Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Rencana Tahun 2025			Rencana Tahun 2026	
				Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.
Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Rancangan Awal Renja Tahun 2025 (Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Karimun)								
Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan			**Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB**	**16.25%**			**16,19%**	
	Meningkatnya nilai tambah produksi pertanian		**Produksi Pertanian**	**12663,20 Ton**	**12663,20 Ton**		**12853,15 Ton**	
			Produktivitas Pertanian	**0.044 Ton/Ha**	**0.044 Ton/Ha**		**0.045 Ton/Ha**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**IKM**	**80 Nilai**	**8,100,000,000**		**80**	**8,175,000,000**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen**	**7 Dokumen**	**60,000,000**		**7 Dokumen**	**60,000,000**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	2 Dokumen - Renja - Renja RB	25,000,000	Pendapatan Asli Daerah	2 Dokumen - Renja - Renja RB	25,000,000

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	3 Dokumen - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	25,000,000	Pendapatan Asli Daerah	3 Dokumen - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	25,000,000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	2 Dokumen - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	10,000,000	Pendapatan Asli Daerah	2 Dokumen - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	10,000,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**7,294,000,000**		**1 Laporan**	**7,322,000,000**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai	80 Orang/Bulan	7,144,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)	80 Orang/Bulan	7,172,000,000
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai	1 Dokumen	150,000,000	Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen	150,000,000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Pegawai**	**80 Orang**	**40,000,000**		**80 Orang**	**140,000,000**
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 Orang	20,000,000	Pendapatan Asli Daerah	5 Orang	120,000,000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan undang-undangan	5 Orang	20,000,000	Pendapatan Asli Daerah	5 Orang	20,000,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**360,000,000**		**5 laporan**	**310,000,000**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	5,000,000	Pendapatan Asli Daerah	2 Paket	**5,000,000**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18 Paket	80,000,000	Pendapatan Asli Daerah	18 Paket	**25,000,000**
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	15 Paket	15,000,000	Pendapatan Asli Daerah	15 Paket	15,000,000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 Paket	20,000,000	Pendapatan Asli Daerah	10 Paket	20,000,000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	10,000,000	Pendapatan Asli Daerah	5 Paket	10,000,000

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	30 Dokumen	20,000,000	Pendapatan Asli Daerah	30 Dokumen	20,000,000
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	30 paket	30,000,000	Pendapatan Asli Daerah	35 paket	35,000,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelengaraan rapat koordinasi dan konsultasi paket	50 Laporan	180,000,000	Pendapatan Asli Daerah	50 Laporan	180,000,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jasa Penunjang**	**1 Laporan**	**316,000,000**		**1 Laporan**	**313,000,000**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Penunjang	1 Laporan	3,000,000	Pendapatan Asli Daerah	1 Laporan	3,000,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	30,000,000	Pendapatan Asli Daerah	1 Laporan	30,000,000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	283,000,000	Pendapatan Asli Daerah	1 Laporan	280,000,000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan**	**1 Laporan**	**30,000,000**		**1 Laporan**	**30,000,000**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak	1 Unit	20,000,000	Pendapatan Asli Daerah	1 Unit	20,000,000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lain yang dipelihara	10 Unit	10,000,000	Pendapatan Asli Daerah	10 Unit	10,000,000
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	**Ketersediaan Pangan Pokok (Beras)**	**25382 Ton**	**250,000,000**		**26052 Ton**	**250,000,000**
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan**	**1 Laporan**	**250,000,000**		1 Laporan	250,000,000
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	7 Unit	200,000,000	Pendapatan Asli Daerah	7 unit	200,000,000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen	50,000,000

		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	**Skor PPH Ketersediaan**	**82**	**965,000,000**	**APBD**	82	965,000,000
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Jumlah Laporan**	**4 Laporan**	**135,000,000**	**APBD**	4 Laporan	135,000,000
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	85,000,000	Pendapatan Asli Daerah	1 Laporan	85,000,000
		Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	1 Dokumen	25,000,000	Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen	25,000,000
		Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen	25,000,000	Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen	25,000,000
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Pengelolaan Cadangan Pangan**	**1 Laporan**	**410,000,000**		1 Laporan	410,000,000
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	20 Ton	410,000,000	Pendapatan Asli Daerah	20 Ton	410,000,000
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Jumlah Laporan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**1 Laporan**	**420,000,000**		**1 Laporan**	**420,000,000**
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	70,000,000	Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen	70,000,000
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	350,000,000	Pendapatan Asli Daerah	1 Laporan	350,000,000
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	**Persentase Desa/Kelurahan Tahan Rawan Pangan**	**81,7 %**	**100,000,000**	**APBD**	84,5	100,000,000
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**Jumlah Laporan Kerentanan dan Ketahanan Pangan**	**1 Laporan**	**50,000,000**	**APBD**	1 Laporan	50,000,000
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen	50,000,000
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Desa/Kelurahan Melaksanakan Kegiatan PDRP (Pengentasan Daerah Rawan Pangan)**	**2 Desa /Kelurahan**	**50,000,000**		**2 Desa /Kelurahan**	**50,000,000**

		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah	1 Laporan	50,000,000
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	**Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang di awasi**	**20%**	**115,000,000**		20%	115,000,000
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Pengawasan Keamanan Pangan Segar**	**1 Laporan**	**115,000,000**		**1 Laporan**	115,000,000
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	115,000,000	Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen	115,000,000
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	**Produksi Pertanian**	**2389,90 Ton**	**3,015,000,000**	**APBD**	**2425,75 Ton**	3,015,000,000
			Produksi Perkebunan	**9423,52 Ton**			**9564,88 Ton**	
			Produksi Peternakan	**182,59 Ton**			**216,94 Ton**	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**2 Laporan**	**1,200,000,000**	**APBD**	2 Laporan	1,200,000,000
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	1,200,000,000	Pendapatan Asli Daerah	1 Laporan	1,200,000,000
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**2 Laporan**	**200,000,000**		2 Laporan	200,000,000
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	200,000,000	Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen	200,000,000
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Ketersediaan Bibit, Pakan Hijauan dan Mutu Pakan Olahan Non Ruminansia / Unggas**	**2 Laporan**	**140,000,000**		2 Laporan	140,000,000
		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	140,000,000	Pendapatan Asli Daerah	1 Laporan	140,000,000
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	**Jumlah Laporan Penyediaan Benih/bibit Ternak**	**1 Laporan**	**1,475,000,000**		1 Laporan	1,475,000,000

		Pengadaan BenihTernak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	322 Ekor	1,325,000,000	Pendapatan Asli Daerah	322 Ekor	1,325,000,000
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	17 Ton	150,000,000	Pendapatan Asli Daerah	17 Ton	150,000,000
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	**Produksi Pertanian**	**2389,90 Ton**	**2,300,000,000**	**APBD**	**2425,75 Ton**	1,370,000,000
			Produksi Perkebunan	**9423,52 Ton**			**9564,88 Ton**	
			Produksi Peternakan	**182,59 Ton**			**216,94 Ton**	
		Pengembangan Prasarana Pertanian	**Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**1 Laporan**	**1,600,000,000**	**APBD**	1 Laporan	1,200,000,000
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	1,600,000,000	Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen	1,200,000,000
		Pembangunan Prasarana Pertanian	**Jumlah Laporan Pembangunan Prasarana Pertanian**	**1 Laporan**	**700,000,000**			170,000,000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	700,000,000	Pendapatan Asli Daerah	1 Unit	170,000,000
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Persentase Kasus Penyakit Hewan Ternak Yang Tertangani**	**70%**	**315,000,000**		70%	509,787,000
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular**	**5 Kasus**	**314,785,000**		5 Kasus	244,787,000
		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 laporan	195,000,000	Pendapatan Asli Daerah	1 Laporan	125,000,000
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	119,785,000	Pendapatan Asli Daerah	1 Laporan	119,787,000
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**2 Laporan**	**215,000**		2 Laporan	265,000,000

		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan	215,000	Pendapatan Asli Daerah	1 Laporan	265,000,000
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	**Penanganan Kasus Bencana Pertanian**	**5 Kasus**	**290,000,000**		5 Kasus	475,000,000
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**1 Laporan**	**290,000,000**		1 Laporan	475,000,000
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	10 Ha	190,000,000	Pendapatan Asli Daerah	10 Ha	250,000,000
		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	20 Ha	100,000,000	Pendapatan Asli Daerah	20 Ha	225,000,000
		Program Penyuluhan Pertanian	**Penumbuhan Kelembagaan Tani**	**3.24%**	**725,000,000**		3,34 %	435,000,000
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**1 Laporan**	**725,000,000**		1 Laporan	435,000,000
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	355,000,000	Pendapatan Asli Daerah	11 Lembaga	215,000,000
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	463 Unit	210,000,000	Pendapatan Asli Daerah	479 Kelompok	60,000,000
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	36 unit	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah	40 unit	50,000,000
		Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	1 unit	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah	1 unit	50,000,000
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	50 Kelompok	60,000,000	Pendapatan Asli Daerah	60 Kelompok	60,000,000
TOTAL PAGU ANGGARAN					**16,175,000,000**			15,409,787,000

BAB 5
PENUTUP

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2025 ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun perlu keterpaduan dan sinkronisasi baik dalam kegiatan maupun antar instansi terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antar pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Renja Tahun 2025 ini disusun berdasarkan kaidah-kaidah sistematika penulisan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pemabngunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
2. Penyusunan Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada dokumen Renja Tahun 2025 ini disusun berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikai, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3. Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Karimun dan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Menjadikan Renja sebagai pedoman pelaksanaan kerja bagi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun pada tahun anggaran 2025.
2. Menjadikan acuan bagi Bidang dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025 dalam rangka peningkatan produksi dan produkstivtas pertanian.
3. Menyusun Program kegiatan dan anggaran dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2025.
4. Menyusun jadwal pelaksanaan, memperkirakan penggunaan anggaran tiap triwulan serta penggunaan sarana, prasarana dan tenaga yang akan melaksanakan rencana kerja.
5. Mempersiapkan format-format laporan pelaksanaan yang didasarkan pada target pencapaian Renstra.
6. Menyusun rencana monitoring dan evaluasi.
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pencapaian pencapaian kinerja kepala daerah.
8. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam peningkatan kebijakan dan isu isu strategis di Kabupaten Karimun.

Tanjung Balai Karimun, 2024
KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN KARIMUN

SUKRIANTO JAYA PUTRA, SP., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP197301202000121003

LAMPIRAN

RENCANA AWAL RKPD DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE PRJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATOR (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PERIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN														
	2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan Pangan Pokok (Beras)	26052 Ton		24095 Ton	24730 Ton	250,000,000	Kab. Karimun	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Masyarakat	25382 Ton	1,645,000,000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	1,645,000,000	
		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	7 Unit		4 Unit	5 Unit	200,000,000.00	Kab. Karimun	PAD				6 Unit	200,000,000	

		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah dokumen	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Karimun	PAD				1 Dokumen	50,000,000	
	2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Ketersediaan	81.5		965,000,000	81.9	965,000,000	Kab. Karimun	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Masyarakat	82	765,000,000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan	4 Laporan		135,000,000	4 Laporan	135,000,000	Kab. Karimun	PAD				4 Laporan	580,000,000	
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Dokumen		50,000,000	2 Dokumen	50,000,000	Kab. Karimun	PAD				2 Dokumen	50,000,000	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan		35,000,000	1 Laporan	35,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Dokumen	35,000,000	
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen		50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	50,000,000	
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Cadangan Pangan	5 Laporan		410,000,000	1 Laporan	410,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	410,000,000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen		35,000,000	1 Dokumen	35,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Dokumen	35,000,000	

		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Ton		250,000,000	20 Ton	250,000,000	Kab. Karimun	PAD				20 Ton	250,000,000	
		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Ton		125,000,000	10 Ton	125,000,000	Kab. Karimun	PAD				10 Ton	125,000,000	
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Laporan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	5 Laporan	1	420,000,000	1 Laporan	420,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	420,000,000	
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5 Dokumen		35,000,000	1 Dokumen	35,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Dokumen	35,000,000	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	44 Kelompok	5 klp	350,000,000	34 Kelompok	350,000,000	Kab. Karimun	PAD				39 Kelompok	350,000,000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	5 Dokumen		35,000,000	1 Dokumen	35,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Dokumen	35,000,000	
	2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa/Kelurahan Tahan Rawan Pangan	76%		100,000,000	78.9%	100,000,000	Kab. Karimun	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Masyarakat	81.7%	100,000,000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Laporan Kerentanan dan Ketahanan Pangan	5 Laporan		50,000,000	1 Laporan	50,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	50,000,000	

		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Peta FSVA	5 Dokumen		50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Dokumen	50,000,000	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan Melaksanakan Kegiatan PDRP (Pengentasan Daerah Rawan Pangan)	10 Desa /Kelurahan		50,000,000	2 Desa /Kelurahan	50,000,000	Kab. Karimun	PAD				2 Desa /Kelurahan	50,000,000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen		50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Dokumen	50,000,000	
	2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang di awasi	100		125,000,000	20%	125,000,000	Kab. Karimun	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Masyarakat	20%	115,000,000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	5 Laporan		125,000,000	1 Laporan	125,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	115,000,000	
		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1 lembaga 5 Org SDM Terlatih/Bersertifikasi		25,000,000	3 Org SDM Terlatih/Bersertifikasi	25,000,000	Kab. Karimun	PAD				4 Org SDM Terlatih/Bersertifikasi	15,000,000	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Paket		100,000,000	1 Paket	100,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Paket	100,000,000	
		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian								PAD						

	3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Pertanian	2425,75 Ton	2,286	2,975,000,000	2366,24 Ton	3,015,000,000	Kab. Karimun	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani	2389,90 Ton	3,115,000,000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Produksi Perkebunan	9564,88 Ton	9012,09		9330,22 Ton		Kab. Karimun	PAD				9423,52 Ton		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Produksi Peternakan	216,94 Ton	79,54		148,24 Ton		Kab. Karimun	PAD				182,59 Ton		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	10 Laporan	1	1,200,000,000	2 Laporan	1,200,000,000	Kab. Karimun	PAD				2 Laporan	1,200,000,000	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	7.000 Pack, 10.000 Batang, 3.000 Zak, 3.000 Botol	5.800 Batang, 1.430 Zak,	1,200,000,000	700 Pack, 1.000 Batang, 300 Zak, 300 Botol	1,200,000,000	Kab. Karimun	PAD				700 Pack, 1.000 Batang, 300 Zak, 300 Botol	1,200,000,000	
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan		200,000,000	1 Laporan	200,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	200,000,000	
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan / Tanaman	247 ekor		100,000,000	157 ekor	100,000,000	Kab. Karimun	PAD				202 ekor	100,000,000	
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	5 Paket		100,000,000	1 Paket	100,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Paket	100,000,000	

	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Ketersediaan Bibit, Pakan Hijauan dan Mutu Pakan Olahan Non Ruminansia / Unggas	10 Laporan		140,000,000	2 Laporan	140,000,000	Kab. Karimun	PAD				2 Laporan	140,000,000	
		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah pengawasan mutu benih /bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	5 Laporan		70,000,000	1 Laporan	70,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	70,000,000	
		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pengawasan bahan pakan/ pakan/benih hijauan pakan ternak yang beredar	5 Laporan		70,000,000	1 Laporan	70,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	70,000,000	
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Toko/Distributor yang diawasi	12 Toko/Distributor		25,000,000	8 Toko/Distributor	25,000,000	Kab. Karimun	PAD				10 Toko/Distributor	125,000,000	
		Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	jumlah penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan yang ditindak	5 Kasus		25,000,000	1 kasus	25,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	25,000,000	
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Laporan		100,000,000	3 Laporan	100,000,000	Kab. Karimun	PAD				3 Laporan	100,000,000	
		Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan ternak	Jumlah HPT , Bahan Pangan/ Pangan yang beredar	25 Ton		25,000,000	5 ton	25,000,000	Kab. Karimun	PAD				5 ton	25,000,000	
		Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	25 Ton		50,000,000	1 ton	50,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 ton	50,000,000	

		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah pengawasan, produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan / pakan	5 Laporan		25,000,000	1 Laporan	25,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	25,000,000	
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Laporan Penyediaan Benih/bibit Ternak	5 Laporan	1	1,450,000,000	1 Laporan	1,350,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	1,350,000,000	
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kab/kota lainnya	Sapi : 402, Kambing : 1745, Ayam/DOC : 131.000, Itik : 13.000 Ekor	Kambing : 373 ekor	1,300,000,000	Sapi : 262, Kambing : 1145, Ayam/DOC : 91.000, Itik : 9.000 Ekor	1,200,000,000	Kab. Karimun	PAD				Sapi : 332, Kambing : 3.445, Ayam/DOC : 111.000, Itik : 11.000 Ekor	1,200,000,000	
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kab/kota lainnya	5 Ton		150,000,000	1 ton	150,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 ton	150,000,000	
	3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produksi Pertanian	2425,75 Ton	2285,56	2,070,000,000	2366,24 Ton	4,145,000,000	Kab. Karimun	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani	2389,90 Ton	2,300,000,000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
			Produksi Peternakan	216,94 Ton	79,54		148,24 Ton							182,59 Ton		
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian	5 Laporan	1	1,300,000,000	1 Laporan	3,375,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	1,600,000,000	

		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan pertanian pangan berkelanjutan / pangan berkelanjutan /KP2B dan Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan / LCP2B yang dikelola	Hand Traktor 20 Unit, Cultivator 30 Unit, Alat-Alat Saprotan 150 Unit	Hand Traktor 8, Unit, Cultivator 15, mesin rumput 28 unit, mesin rumput 16 unit, choopper 1 unit, traktor roda 4 1 unit, mesin kompos 5 unit, chainsaw 11 unit	1,300,000,000	Hand Traktor 4 Unit, Cultivator 6 Unit, Alat-Alat Saprotan 30 Unit	3,300,000,000	Kab. Karimun	PAD				Hand Traktor 5 Unit, Cultivator 7 Unit, Alat-Alat Saprotan 35 Unit	1,600,000,000	
		Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B	3 Dokumen	1	-	1 Dokumen	25,000,000	Kab. Karimun	PAD				-		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasaranan pendukung pertanian lainnya	3 Laporan		-	1 Laporan	25,000,000	Kab. Karimun	PAD				-		
		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan pengembangan prasarana , sarana kawasan dan komoditas perkebunan	3 Dokumen		-	1 Dokumen	25,000,000	Kab. Karimun	PAD				-		
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Pembangunan Prasarana Pertanian	5 Laporan	1	700,000,000	1 Laporan	700,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	700,000,000	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah irigaasi usaha tani yang dibangun , direhabilitasi, dan dipelihara	1000 Meter		100,000,000	200 Meter	100,000,000	Kab. Karimun	PAD				200 Meter	100,000,000	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Jalan usaha tani yang dibangun , direhabilitasi dan	5000 Meter		100,000,000	1000 Meter	100,000,000	Kab. Karimun	PAD				1000 Meter	100,000,000	

		Usaha Tani	dipelihara													
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM parit yang dibangun , direhabilitasi dan dipelihara	10 Unit		100,000,000	2 Unit	100,000,000	Kab. Karimun	PAD				2 Unit	100,000,000	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah long storage yang dibangun , direhabilitasi dan dipelihara	5 Unit		100,000,000	1 Unit	100,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Unit	100,000,000	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air yang dibangun, direhabilitasi dan di dpelihara	10 Unit	2	100,000,000	2 Unit	100,000,000	Kab. Karimun	PAD				2 Unit	100,000,000	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukung nya yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara	9 Unit		100,000,000	7 Unit	100,000,000	Kab. Karimun	PAD				8 Unit	100,000,000	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara	5 Unit	1	100,000,000	1 Unit	100,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Unit	100,000,000	
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan		70,000,000	1 Laporan	70,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	70,000,000	
		Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun / galur ternak	5 laporan		70,000,000	1 Laporan	70,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	70,000,000	
	3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Kasus Penyakit Hewan Ternak Yang Tertangani	72%	50%	390,000,000	67%	390,000,000	Kab. Karimun	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani	70%	390,000,000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

											yang berkualitas dan berkeadilan					
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	25 Kasus		125,000,000	5 Kasus	125,000,000	Kab. Karimun	PAD				5 Kasus	125,000,000	
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	120 Jenis		100,000,000	80 Jenis	100,000,000	Kab. Karimun	PAD				100 Jenis	100,000,000	
		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang terkendali	17 wilayah		25,000,000	11 Wilayah	25,000,000	Kab. Karimun	PAD				14 Wilayah	25,000,000	
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	10 Laporan		50,000,000	2 Laporan	50,000,000	Kab. Karimun	PAD				2 Laporan	50,000,000	
		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	10 Laporan		50,000,000	2 Laporan	50,000,000	Kab. Karimun	PAD				2 Laporan	50,000,000	
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan		75,000,000	1 Laporan	75,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	75,000,000	
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	575 Ekor		75,000,000	375 Ekor	75,000,000	Kab. Karimun	PAD				475 Ekor	75,000,000	

	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laporan Pengawasaan Syarat Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	10 Laporan		115,000,000	2 Laporan	115,000,000	Kab. Karimun	PAD				2 Laporan	115,000,000	
		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	5 unit/produk		65,000,000	3 unit/produk	65,000,000	Kab. Karimun	PAD				4 unit/produk	65,000,000	
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	JumlahPengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	5 Laporan		50,000,000	1 Laporan	50,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	50,000,000	
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Laporan Pengawasan Kesejahteraan Hewan	5 Unit	1	25,000,000	1 unit	25,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	25,000,000	
		Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	5 Laporan		25,000,000	1 Laporan	25,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 unit	25,000,000	
	3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penanganan Kasus Bencana Pertanian	25 Kasus		475,000,000	5 Kasus	475,000,000	Kab. Karimun	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani	5 Kasus	475,000,000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	5 Laporan		475,000,000	1 Laporan	475,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	475,000,000	

		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Pestisida 1250 Botol, Insektisida 1250 Botol, Fungisida1 250 Botol		50,000,000	Pestisida 250 Botol, Insektisida 250 Botol, Fungisida 250 Botol	50,000,000	Kab. Karimun	PAD				Pestisida 250 Botol, Insektisida 250 Botol, Fungisida 250 Botol	50,000,000	
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Tanaman Pangan 25000 Bungkus, Hortikutura 25000 Batang, Perkebunan 5000 Batang		150,000,000	Tanaman Pangan 5000 Bungkus, Hortkiutura 5000 Batang, Perkebunan 1000 Batang	150,000,000	Kab. Karimun	PAD				Tanaman Pangan 5000 Bungkus, Hortkiutura 5000 Batang, Perkebunan 1000 Batang	150,000,000	
		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Mesin Pompa Air 50 Unit, Hand Sprayer 250 Unit		100,000,000	Mesin Pompa Air 10 Unit, Hand Sprayer 50 Unit	100,000,000	Kab. Karimun	PAD				Mesin Pompa Air 10 Unit, Hand Sprayer 50 Unit	100,000,000	
		Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	5		25,000,000	1	25,000,000	Kab. Karimun	PAD				1	25,000,000	
		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Tanaman Pangan 25000 Bungkus, Hortkiutura 25000 Batang, Perkebunan 5000 Batang, Pupuk 1500 zak, 500 Ekor Hewan Ternak, 75 Jenis Obat		150,000,000	Tanaman Pangan 5000 Bungkus, Hortkiutura 5000 Batang, Perkebunan 1000 Batang, Pupuk 300 zak, 100 Ekor Hewan Ternak, 15 Jenis Obat	150,000,000	Kab. Karimun	PAD				Tanaman Pangan 5000 Bungkus, Hortkiutura 5000 Batang, Perkebunan 1000 Batang, Pupuk 300 zak, 100 Ekor Hewan Ternak, 15 Jenis Obat	150,000,000	

	3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rekomendasi Usaha Pertanian yang diterbitkan	15 Rekomendasi		135,000,000	3 Rekomendasi	135,000,000	Kab. Karimun	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani	3 Rekomendasi	135,000,000	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan		45,000,000	1 Laporan	45,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Dokumen	45,000,000	
		Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	5 Dokumen		25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Dokumen	25,000,000	
		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	5 Laporan		10,000,000	1 Laporan	10,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	10,000,000	
		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Lain Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	5 Laporan		10,000,000	1 Laporan	10,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	10,000,000	
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	5 Laporan		30,000,000	1 Laporan	30,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	30,000,000	

		Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	10 Dokumen		30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	Kab. Karimun	PAD				2 Dokumen	30,000,000	
	3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Laporan pemberian Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	5 Laporan		60,000,000	1 Laporan	60,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	60,000,000	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	25 Dokumen		35,000,000	5 Dokumen	35,000,000	Kab. Karimun	PAD				5 Dokumen	35,000,000	
		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	5 Laporan		25,000,000	1 Laporan	25,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	25,000,000	
	3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Penumbuhan Kelembagaan Tani	3.34%	2, 37 %	300,000,000	3.13%	300,000,000	Kab. Karimun	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani	3.24%	300,000,000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	5 Laporan	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	300,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	300,000,000	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan	11 Lembaga	5 Lembaga	80,000,000	9 Lembaga	80,000,000	Kab. Karimun	PAD				10 Lembaga	80,000,000	

			Kapasitasnya													
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	479 Kelompok	20 kelompok	60,000,000	448 Kelompok	60,000,000	Kab. Karimun	PAD				463 Kelompok	60,000,000	
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan Pertanian	40 unit	5 unit	50,000,000	34 unit	50,000,000	Kab. Karimun	PAD				36 unit	50,000,000	
		Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	5 unit		50,000,000	1 unit	50,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 unit	50,000,000	
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	60 kelompok	10 kelompok	60,000,000	40 Kelompok	60,000,000	Kab. Karimun	PAD				50 Kelompok	60,000,000	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	80	70	7,952,250,000	80	7,952,250,000	Kab. Karimun	PAD			OPD	80	8,060,000,000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	35 Dokumen	4	60,000,000	7 Dokumen	60,000,000	Kab. Karimun	PAD				7 Dokumen	60,000,000	
	2.09.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	10	2	25,000,000	2 Laporan - Renja - Renja RB	25,000,000	Kab. Karimun	PAD				2 Laporan - Renja - Renja RB	25,000,000	

	2.09.01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil realisasi program laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinera SKPD	15	1	25,000,000	3 Dokumen - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	25,000,000	Kab. Karimun	PAD				3 Dokumen - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	25,000,000	
	2.09.01.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10	1	10,000,000	2 Dokumen - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	10,000,000	Kab. Karimun	PAD				2 Dokumen - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	10,000,000	
	X.XX.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	5 Laporan	1	7,239,250,000	1 Laporan	7,217,408,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	7,294,000,000	
	X.XX.01.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan PNS	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	104	7,089,250,000	80 org/bln	7,067,408,000	Kab. Karimun	PAD				80 org/bln	7,144,000,000	
	X.XX.01.2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan dalam penyediaan administrasi tugas ASN	24 Orang	59	150,000,000	24 Orang	150,000,000	Kab. Karimun	PAD				24 Orang	150,000,000	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	80 Orang		40,000,000	80 Orang	140,000,000	Kab. Karimun	PAD				80 Orang	40,000,000	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	240 stell		-	80 stell	100,000,000	Kab. Karimun	PAD				-	-	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	25 Orang		20,000,000	5 Orang	20,000,000	Kab. Karimun	PAD				5 Orang	20,000,000	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	25 Orang		20,000,000	5 Orang	20,000,000	Kab. Karimun	PAD				5 Orang	20,000,000	

	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	5 Laporan	1	235,000,000	1 Laporan	260,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	285,000,000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen intalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	1	5,000,000	2 paket	5,000,000	Kab. Karimun	PAD				2 paket	5,000,000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18 paket	18	25,000,000	18 paket	25,000,000	Kab. Karimun	PAD				18 paket	25,000,000	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	15 paket	15	15,000,000	15 paket	15,000,000	Kab. Karimun	PAD				15 paket	15,000,000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	18 paket		20,000,000	18 paket	20,000,000	Kab. Karimun	PAD				18 paket	20,000,000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 dokumen	5	10,000,000	5 dokumen	10,000,000	Kab. Karimun	PAD				5 dokumen	10,000,000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan pearturan perundang undangan yang disediakan	30 jenis		20,000,000	30 jenis	20,000,000	Kab. Karimun	PAD				30 jenis	20,000,000	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	125 jenis		20,000,000	25 jenis	25,000,000	Kab. Karimun	PAD				30 jenis	30,000,000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	55 SPPD	85	120,000,000	45 Laporan	140,000,000	Kab. Karimun	PAD				50 SPPD	160,000,000	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Rencana Pengadaan	5 Laporan		35,000,000	1 Laporan	195,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	35,000,000	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelair	26 unit		-	9 unit	80,000,000	Kab. Karimun	PAD					-	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	23 unit		-	8 unit	80,000,000	Kab. Karimun	PAD					-	

		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5 unit		35,000,000	1 unit	35,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 unit	35,000,000	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang	5 Laporan	1	313,000,000	1 Laporan	313,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	316,000,000	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	2000 Lembar		3,000,000	400 Lembar	3,000,000	Kab. Karimun	PAD				400 Lembar	3,000,000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan	40 Bukti Tagihan		30,000,000	8 Bukti Tagihan	30,000,000	Kab. Karimun	PAD				8 Bukti Tagihan	30,000,000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gaji non ASN yang dibayarkan	24 Orang	24	280,000,000	24 Orang	280,000,000	Kab. Karimun	PAD				24 Orang	283,000,000	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan	5 Laporan	1	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Laporan	30,000,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan	1 Unit	1	20,000,000	1 Unit	20,000,000	Kab. Karimun	PAD				1 Unit	20,000,000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	10 Unit	10	10,000,000	10 Unit	10,000,000	Kab. Karimun	PAD				10 Unit	10,000,000	

RENCANA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan ”Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024” dapat diselesaikan. Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan wujud penjabaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun 2021 - 2026, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Karimun serta Target dan Sasaran Pembangunan Lingkungan Hidup Nasional yang dilaksanakan melalui OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun, serta sebagai pedoman OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kaitan terselenggaranya *good environmental* dan *governance*.

Terwujudnya *good governence* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara dan pemerintahan, termasuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan petunjuk pelaksanaan kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 ini dapat disusun dan diterbitkan.

Tanjung Balai Karimun, Desember 2024

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARIMUN

H. RIYANTA, SS., MM. Pub

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …….. **i**
DAFTAR ISI …….. **ii**
DAFTAR GAMBAR …… **iv**

BAB I. PENDAHULUAN …… **1**
1.1 Latar Belakang …….. **1**
1.2 Landasan Hukum ……. **3**
1.3 Maksud dan Tujuan ……. **5**
1.4 Sistematika …… **6**

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 ... **8**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan dan Capaian Kinerja …….. **8**
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……. **27**
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah …… **30**
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 ……. **32**
2.5. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …… **48**

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ……... **49**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional …… **49**
3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Kepulauan Riau …… **51**
3.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Karimun …… **51**
3.4. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 …….. **53**
3.5. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah ……. **54**

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 **64**

BAB V. PENUTUP …….. **78**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Rencana Kerja 2023-2024 ……	10
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 ……	28
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2024…	34
Tabel 2.4	Usulan Program/Kegiatan Pemangku Kepentingan ……..	48
Tabel 3.1	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup pada Prioritas Pembangunan Daerah ……	51
Tabel 3.2	Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 …….	53
Tabel 4.1	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 …	64

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan menghubungkan dengan fakta, serta menggunakannya untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi di masa datang, untuk kemudian merumuskan program dan kegiatan yang akan diusulkan demi tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan. Amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diperkuat dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan, maka perlu disusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) yang akan dijadikan sebagai landasan dan kerangka acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan dan pelaksanaan program/kegiatan setiap pemerintahan dan pembangunan daerah merupakan integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan. Untuk itu perlu disusun sebuah pedoman dan kerangka acuan dalam menetapkan kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif.

Oleh karenanya, diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) OPD.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun dengan ruang lingkup

tugas pokok dan fungsi utamanya terdiri bidang penataan dan pemeliharaan lingkungan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, bidang konservasi dan kemitraan lingkungan dan bidang kebersihan dan pertamanan memerlukan kemampuan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang harmonis, baik secara struktural (vertikal dan horisontal) maupun hubungan kepada masyarakat. Itu semua dapat diwujudkan melalui sebuah perencanaan yang profesional dengan memanfaatkan peluang serta menghindari ancaman yang ada, menggunakan kekuatan yang dimiliki dan mengeliminasi kelemahan yang muncul.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* atau *outcome* yang ingin dicapai pada tahun 2024 yang mengacu kepada prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024, arah kebijakan dan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau, isu-isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun 2021-2026, Rencana Strategis (RENSTRA) OPD periode 2021-2026, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan isu-isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun 2021-2026. Berangkat dari pemikiran ini, secara substansial kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 tidak boleh lepas dari beberapa hal sebagaimana berikut :

1. Realisasi Capaian Kinerja pada tahun sebelumnya baik kekurangan maupun kelebihannya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Artinya, realisasi capaian pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan

sumberdaya yang dimiliki agar pelaksanaan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup dapat lebih optimal;

2. Mempertimbangkan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, masalah - masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Pernyataan tersebut dapat diartikan, bahwa pembangunan dilaksanakan untuk saling memperbaiki dan melengkapi berbagai kekurangan serta kelemahan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang Lingkungan Hidup. Pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya yang masih belum mampu diselesaikan, dan harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2025;
3. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun berikutnya sekaligus mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik;
4. Menjaga sinergitas antar sektor dan wilayah, serta mempertimbangkan azas koordinasi dengan seluruh SKPD serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup merupakan penjabaran dari isu-isu strategis RPJMD 2021 – 2026 dan sebagai tindak lanjut dari RKPD Tahun 2025 serta kelanjutan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2026. Kedudukan RENJA Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran dan menjadi landasan yang dipedomani dalam penyusunan RKA Dinas Lingkungan Hidup yang kemudian akan dituangkan dalam APBD Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor ; 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Nomor 53 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor; 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor : 7);
16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor; 98).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2025, dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam:

a) Menjadi acuan dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun.

b) Menyediakan dokumen resmi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun pada Tahun 2025 yang merupakan kebutuhan pembangunan dan diharapkan dapat diakomodir melalui pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun Tahun 2025;

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah :

a) Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota);
b) Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional di sektor lingkungan hidup sehingga pelaksanaan program/kegiatan menjadi tepat guna dan terukur;
c) Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Tahun2025disajikan dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat mengenai latar belakang penyusunan rencana kerja, landasan hukum yang mendasari penyusunan, maksud dan tujuan dari penyusunan rencana kerja, sertasi stematika penulisan.

BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun lalu yang memuat penjelasan dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah menguraikan telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, serta Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

BAB. IV. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah menguraikan telaahan terhadap Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan.

BAB. V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur dalam pencapaian tujuan dan sasaran, sedangkan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dilaksanakan dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi yang diimplementasikan melalui Rencana Kerja, dengan demikian penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dibuat untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran melalui tindakan yang terukur serta dapat dipertanggung-jawabkan

Proses penyusunan suatu perencanaan sangat terkait dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi proses perencanaan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan terkait dengan urusan lingkungan hidup, dan permasalahan yang menghambat pelaksanaan pencapaian kinerja sebagai dasar menentukan kebijakan kebijakan perencanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan pada tahun kedepannya sebagai upaya dalam tindak lanjut untuk pengendalian. Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan RENSTRA OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja (RENJA) menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Evaluasi pelaksanaan RENJA digunakan untuk melihat pencapaian sasaran dan target dari perjanjian kerja Dinas Lingkungan Hidup serta hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran, dengan maksud untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah

Tahun 2024 dan perkiraan capaian RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan yaitu Tahun 2025 yang mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dan berhubungan dengan pencapaian target Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun sebelumnya.

Gambaran rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini :

No	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78					
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Dinas Lingkungan Hidup	80					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	3					
	Administrasi Keuangsn Perangkat Daerah	Persentase Reali-sasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup	88					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tun-jangan ASN	50					
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Doku-men Hasil Penyediaan Ad-ministrasi Pelak-sanaan Tugas ASN	1					
	Administrasi Penda-patan Daerah Kewena-ngan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Pendapatan Dinas LH	100					
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jml Laporan Hasil Pengelolaan Retribusi Daerah	12					
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Penilaian dan Pengawasan						
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Layanan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	100					
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2					
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4					
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	sentase Dokumen yang Diarsipkan sesuia Aturan	100					

		Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti						
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1					
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urus-an Pemerintah Daerah		60					
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Meubeliur yang disediakan	2					
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Reali-sasi Capaian Ki-nerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas LH	87					
	Penyediaan Jasa Kominikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jml Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sum-ber Daya Air dan Listrik yang Dise-diakan	12					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Lingkungan Hidup	84					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12					
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	sentase Titik Sampling Badan Air, Udara dan Lahan/Tanah yang Memenuhi Baku Mutu Kualitas LH	69					
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/La-poran Pelaksanaan Pencegahan Pence-maran Kerusakan LH Hidup Kabupaten/ Kota	1					

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2					
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor LH yang Dilaksanakan	1					
	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah Dokumen Inventarisasi GRK Profil Emisi GRK	1					
	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	2					
	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Upaya Inventarisasi GRK, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1					
	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yang disusun	1					
	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah Paket Peralatan Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten/ Kota Dalam Rangka Pencegahan dan Sebagai Peringatan Dini Pencemaran Lingkungan	2					
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	1					
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2					
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan LH yang Dihentikan	1					
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1					
	Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas Area yang Dilakukan	0.5					

		Rehabilitasi di Kab/Kota yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Pelaksanaan Restorasi	Luas Area yang Dilakukan Restorasi di Kab/Kota yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0.2					
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti (Persentase)	100					
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)/Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	1					
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	1					
	Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Penetapan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	0					
	Penyusunan Dokumen Rencana Tematik Berbasis Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Dokumen Rencana Tematik Berbasis Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	0					
	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang disusun	0					
	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	3					
	Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/ RPJMD	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0					
	Pemantauan dan Evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	0					
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1					

	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1					
	Kegiatan Penyusunan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kot**a**	1					
	Analisis Biaya Jasa Lingkungan dari Eksploitasi Sumber Daya Alam	Jml Dokumen Perhitungan Analisis Biaya Jasa Lingk dari Eksploitasi SDA	0					
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayatil (KEHATI)	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)(Hektar)	36.75					
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	1					
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah yang Disusun dan ditetapkan	1					
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0					
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3					
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	2					
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang Terkelola	80					
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang Terkelola	1					
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1					
	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1					
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang	2					

	Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (Persentase)	78					
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jml Usaha dan/ atau Kegiatan taat dalam Izin Lingkungan dan Izin PPLH diter-bitkan Pemerin-tah Daerah Kabu-paten/ Kota yang dibina & diawasi	34					
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1					
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Lingkungan Hidup	2					
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Perusahaan/Badan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha yang Diawasi	60					
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0					
	Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang Diverifikasi	0					
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahua Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	0					
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0					
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	0					

	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	1					
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5					
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	50					
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	3.31					
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penghar-gaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota yang diterima dan diberikan	20					
	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyara-kat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidik/Filan-tropi yang dinilai terkait dengan PPLH	150					
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100					
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota	Jml Pengaduan Sengketa/Kasus Tin-dak Pidana Lingkungan Hi-dup yang Ditangani	20					
	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Ditangani	9					
	Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	54					
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Volume Pena-nganan Sampah	21					
		Persentase Volume Pengurangan Sampah	77					
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat/ POKMAS yang Berperan Aktif dalam Pengelolaan Persampahan	10					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarpras Pengelolaan Persampahan	1					
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota yang disediakan	5					
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan	Jumlah Dokumen JAKSTRADA Pe-	0					

	Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Tingkat Kab/Kota	ngelolaan Sam-pah Kab/Kota yang disusun dan ditetapkan						
	Penanganan Sampah Melalui Pengangkuan	Volume Pena-nganan Sampah yang Dilaksana-kan Melalui Pengangkutan	22400					
	Penyediaan dan Operasionalisasi Sarana Pemilahan Sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya	Jumlah Paket Penye-diaan dan Opera-sionalisasi Sa-rana Pemi-lahan Sampah ke Fasi-litas Pengelo-laan Sampah Spesifik dan/atau Fasi-litas Pengelolaan Sampah Lainnya	1					
	Penanganan Sampah Melalui Pengumpulan Sampah	Persentase Cakupan Luas Pelayananan Pengumpulan Sampah	72					
	Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah yang Beroperasi dan Terpelihara Dengan Baik	12					
	Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kab/Kota atau TPA/TPST Regional	Volume Penanganan Sampah yang Dilaksanakan Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kab/Kota atau TPA/TPST Regional	22140					
	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerjasama Penanganan sampah di TPA/TPST Kab/Kota Termasuk untuk Pengelolaan Sampah Kab/Kota yang Diterbitkan	1					

Review hasil evaluasi pelaksanaaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2023 sesuai dengan Tabel 2.1 yang disajikan diatas, dapat dijelaskan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

A. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Capaian realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2023 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi ketercapaian realisasi kinerja dapat dijelaskan dalam review berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Indikator Kinerja dari Program ini adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan benar dengan hitungan capaian realisasi berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian realisasi dari program ini adalah 100%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 12.849.881.769,- dari Rp 13.300.541.773.- setara dengan 96.61% dari anggarannya. Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi ketercapaian realisasi kinerja adalah sebagai berikut :

   - Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator kinerja jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya rutin/berkala. Capaian realisasi dari sub kegiatan ini adalah 94,84%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2,048,268,196,- dari Rp 2,159,648,100,- atau setara dengan 94.84%. Faktor penghambat dari ketercapaian sub kegiatan ini yang tidak memenuhi target adalah ketersediaan anggaran kurang optimal, sehingga perlu dilakukan optimalisasi peningkatan ketersediaan anggaran pada sub kegiatan ini agar layanan pengelolaan sampah semakin optimal.

2. **Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**

   Indikator Kinerja dari Program Penghargaan Lingkungan Hidup adalah meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan analisa capaian realisasi kinerja jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh dan diberikan Kepada Masyarakat. Capaian realisasi dari program ini adalah 90,91%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 98.201,- dari Rp Rp 122.425,- atau setara dengan 80,21% dari anggarannya. Kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi ketercapaian realisasi kinerja adalah sebagai berikut :

B. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang Direncanakan

Capaian realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2023 yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan faktor- faktor pendukung yang mempengaruhi ketercapaian realisasi kinerja dapat dijelaskan dalam review berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Indikator Kinerja dari Program ini adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan benar dengan hitungan capaian realisasi berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian realisasi dari program ini adalah 100%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 12.849.881.769,- dari Rp 13.300.541.773.- atau setara dengan 96.61% dari anggarannya. Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi ketercapaian realisasi kinerja adalah sebagai berikut :

   a) **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :**

      - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan yang disusun. Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 2 (dua) dokumen perencanaan yaitu dokumen RENJA dan dokumen RKPD. Capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini adalah 100%.
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator kinerja jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun. Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 2 (dua) dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yaitu dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) dan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini adalah 100%.
      - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun. Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 2 (dua) dokumen evaluasi kinerja yaitu dokumen Sistem Pengendalian Internal Instansi

Pemerintah (SPIP) dan dokumen Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini adalah 100%.

b) **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :**

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja jumlah dokumen administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan sebanyak 29 orang selama 14 bulan. Capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini adalah 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan indikator kinerja jumlah laporan hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN. Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen laporan hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN selama 12 bulan. Capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini adalah 100%.

c) **Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :**

Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan indikator kinerja jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah. Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan pengelolaan retribusi daerah. Capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini 100%.

d) **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :**

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas serta Atribut Kelengkapannya dengan indikator kinerja jumlah paket Pengadaan Pakaian Dinas serta Atribut Kelengkapannya. Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 1 (satu) paket Pengadaan Pakaian Dinas serta Atribut Kelengkapannya untuk 50 (lima puluh) orang ASN. Capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini adalah 100%.

e) **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :**

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator kinerja jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Realisasi capaian

kinerja dari sub kegiatan ini adalah 1 (satu) paket yang terdiri dari 14 jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini adalah 100%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan. Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 1 (satu) paket yang terdiri dari 10 jenis peralatan dan perlengkapan kantor. Capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini adalah 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indikator kinerja jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan. Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 1 (satu) paket yang terdiri dari 10 jenis peralatan rumah tangga. Capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini adalah 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator kinerja jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor. Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 1 (satu) paket yang terdiri dari 15 jenis bahan logistik kantor. Capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini adalah 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indikator kinerja jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 1 (satu) paket yang terdiri dari 15 eksemplar barang cetakan dan penggandaan. Capaian realisasi sub kegiatan ini adalah 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan indikator kinerja jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 12 (dua belas) buah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini adalah 100%.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator kinerja jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi. Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 12 (dua belas) laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi. Capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini adalah 100%.

f) **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :**

- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan indikator kinerja jumlah unit mebel yang disediakan. Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 10 (sepuluh) unit meubeleur. Capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini adalah 100%.
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator kinerja jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan. Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 3 (tiga) unit peralatan yang disediakan. Capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini adalah 100%.

g) **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :**

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 12 (dua belas) laporan yang terdiri dari 12 bukti setoran jasa penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik. Capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini adalah 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja jumlah tenaga/jasa pelayanan umum kantor. Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan administrasi pembayaran tenaga/jasa pelayanan umum kantor yang terdiri dari 24 tenaga/jasa pelayanan umum kantor yang disediakan selama 12 bulan ditambah dengan tunjangan lainnya. Capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini adalah 100%.

h) **Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:**

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan. Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan yang terdiri dari 1 unit kendaraan dinas jabatan yang disediakan. Capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini adalah 100%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar dengan indikator kinerja jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya rutin/berkala. Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 1 laporan yang terdiri dari 2 unit alat besar yang disediakan. Capaian realisasi sub kegiatan ini adalah 100%.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja dari Program ini adalah Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan hitungan capaian realisasi berupa capaian Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Capaian realisasi dari program ini adalah 96,45%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 175.557.000,- dari Rp 193.746.000.- atau setara dengan 90.61% dari anggarannya. Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi ketercapaian realisasi kinerja adalah sebagai berikut :

a) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kabupaten/Kota terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut. Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 5 (lima) laporan. Capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini adalah 100%.
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan indikator kinerja jumlah laporan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan dengan persentase capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini adalah 100%.

b) **Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :**

- Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat. Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan. Capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini adalah 100%.

3. **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**

Indikator Kinerja dari Program ini adalah luas lahan yang dikelola dengan hitungan capaian realisasi berupa capaian luas lahan yang terkelola (Ha). Capaian realisasi dari program ini adalah 100%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 4.277.342.354,- dari Rp 4.439.986.554,- atau setara dengan 96,34% dari anggarannya. Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi ketercapaian realisasi kinerja adalah sebagai berikut :

a) **Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :**

- Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan indikator kinerja luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota. Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah luas RTH yang dikelola mencapai 7,3 Hektar. Capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini adalah 100%.

4. **Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**

Indikator Kinerja dari Program ini adalah Jumlah Limbah B3 yang Terkelola dengan hitungan capaian realisasi berupa volume limbah B3 yang terkelola (ton). Capaian realisasi kinerja dari program ini adalah 97,07%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 49.528.500,- dari Rp 51.711.420,- atau setara dengan 95,78% dari anggarannya. Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi ketercapaian realisasi kinerja adalah sebagai berikut :

a) **Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :**

Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persayaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah

B3 dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang diverifikasi. Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah volume limbah B3 yang dikelola mencapai 5.387,5 Ton. Capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini adalah 100%.

b) **Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daeha Kab/Kota terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :**

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan/atau Penimbunan dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi. Capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini adalah 100%.

5. **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Indikator Kinerja dari Program ini adalah Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan hitungan capaian realisasi berupa persentase Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Capaian realisasi kinerja dari program ini adalah 80,00%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 46.015.584,- dari Rp 48.021.500,- atau setara dengan 95,82% dari anggarannya. Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi ketercapaian realisasi kinerja adalah sebagai berikut :

a) **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :**

Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 1 (satu) Laporan Pengawasan Usaha dengan capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini adalah 100%.

6. **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Indikator Kinerja dari Program ini adalah Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup dengan capaian realisasi kinerja dari program ini adalah 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp 24.242.500,- dari Rp 25.096.500,- atau setara dengan 96,60% dari anggarannya. Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi ketercapaian realisasi kinerja adalah sebagai berikut

a) **Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :**

Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah laporan pengaduan masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani. Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 1 (satu) Laporan pengaduan dengan capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini adalah 100%.

7. **Program Pengelolaan Persampahan**

Indikator Kinerja dari Program ini adalah Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dengan hitungan capaian realisasi berupa persentase penanganan sampah dan persentase pengurangan sampah. Capaian realisasi kinerja dari program ini adalah 90,25%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.140.522.500,- dari Rp 2.245.371.775,- atau setara dengan 95,33% dari anggarannya. Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi ketercapaian realisasi kinerja adalah sebagai berikut :

a) **Kegiatan Pengelolaan Sampah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :**

- Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang, dan Pemanfaatan Kembali dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pengurangan Sampah. Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 1 (satu) Laporan Pengurangan Sampah dengan capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini adalah 100%.
- Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penanganan Sampah. Realisasi

capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 1 (satu) Laporan Penanganan Sampah dengan capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan ini adalah 100%.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada review diatas, maka kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai sebagai berikut :

1. Optimalisasi pengelolaan sampah Rumah Tangga dengan melibatkan seluruh stakeholder;
2. Optimalisasi kebersihan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat secara komprehensif;
3. Optimalisasi regulasi pelayanan dan peran aktif masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
4. Optimalisasi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta kerjasama stakeholder dalam pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI);
5. Optimalisasi fungsi layanan penyusunan dokumen lingkungan, pembinaan dan pengawasan serta penanganan pengaduan terkait PPLH.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat pada sinergitas antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang diselenggarakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Meskipun jumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan melalui kebijakan rencana program yang disusun dalam tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dasar analisis terhadap kajian capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Kunci (IKK). Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk

mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Lingkungan Hidup dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar dan urusan penunjang administrasi pemerintahan, secara khusus melakukan analisis kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dilakukan perbaikan secara berkesinambungan agar lebih terukur dan berkinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026. Gambaran detail dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup selama 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2024		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kualitas air, udara, dan tanah	Indeks Kinerja Lingkungan Hidup	68,52	66,09	96,45
		- Indeks Kualitas Air	56,70	50,00	88,19
		- Indeks Kualitas Udara	90,30	92,43	102,36
		- Indeks Kualitas Lahan	48,55	45,01	92,71
2	Meningkatnya Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Luas Ruang Terbuka Hijau	22,95Ha	19,28Ha	84,01%
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	57,01	51,82	90,91%
		- Persentase Volume Penanganan Sampah	72,72%	75,05	103,20%
		- Persentase Pengurangan Sampah	27,23%	21,05%	77,30%
		Persentase Industri/Kegiatan yang Memenuhi Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup	80%	80%	100%
		Persentase Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%

Capaian kinerja pelayanan yang digambarkan melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2024 sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 2.2 diatas, dapat dijelaskan bahwa :

1. Layanan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup direalisasikan melalui capaian kinerja Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dianalisa melalui pencapaian Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Capaian kinerja ini berada pada tingkat Sasaran Strategis yaitu, “Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah dan Air” dengan capaian kinerja pelayanan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah 96,45%, Indeks Kualitas Air (IKA) adalah 88,19%, Indeks Kualitas Udara (IKU)

adalah 102,36% dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah 92,71%.

2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) direalisasikan melalui capaian kinerja Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dianalisa melalui pencapaian luas Hutan Kota, Taman KEHATI, Taman pada median jalan dan bahu jalan. Capaian kinerja ini berada pada tingkat Sasaran Strategis yaitu, "Meningkatnya Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup," dengan capaian kinerja pelayanan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah 84,01%.
3. Layanan Pengelolaan Persampahan direalisasikan melalui capaian kinerja Nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan (IKPS) yang dianalisa melalui pencapaian persentase volume penanganan sampah dan persentase volume pengurangan sampah. Capaian kinerja ini berada pada tingkat Sasaran Strategis yaitu, "Meningkatnya Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup," dengan capaian kinerja pelayanan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) adalah 90,91%, Persentase Volume Penanganan Sampah adalah 103,20%, Persentase Volume Pengurangan Sampah adalah 77,30%.
4. Layanan Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup direalisasikan melalui capaian kinerja Persentase Industri/Kegiatan yang Memenuhi Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dianalisa melalui pencapaian pelaksanaan pembinaan dan pengawsan Industri/Kegiatan yang Memenuhi Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Capaian kinerja ini berada pada tingkat Sasaran Strategis yaitu, "Meningkatnya Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup," dengan capaian kinerja pelayanan pembinaan dan pengawasan adalah 100%.
5. Layanan Penanganan Pengaduan direalisasikan melalui capaian kinerja Persentase Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat, dianalisa melalui pencapaian jumlah pengaduaan yang selesai ditangani. Capaian kinerja ini berada pada tingkat Sasaran Strategis yaitu, "Meningkatnya Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup," dengan capaian kinerja pelayanan adalah 100%.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup tersebut dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan karena didukung oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

a) Peningkatan rata rata kualitas air waduk yang dipengaruhi meningkatnya kualitas pengelolaan limbah aktivitas usaha/industri, pengelolaan limbah Rumah Tangga yang semakin membaik. Dan meningkatnya ketaatan usaha/industri dalam pengelolaan limbah. Selain itu juga didukung dengan optimalisasi konservasi lahan khususnya pada sempadan sungai/waduk serta

penguatan kerjasama dengan *stakeholder* terkait.

b) Aspek kualitas udara mencapai kategori baik yang dipengaruhi oleh semakin berkurangnya emisi gas buang kendaraan dan industri, peningkatan penghijauan sempadan dan lingkungan jalan, serta keterlibatan para pihak dan masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup yang semakin meningkat dan membaik.

c) Optimalisasi pengelolaan persampahan melalui pemenuhan sarana prasarana, penguatan regulasi/kebijakan, peningkatan kerjasama dan kemitraan pengelolaan persampahan dan pemberdayaan masyarakat.

2.3. Isu-Isu Peting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati, Dinas Lingkungan Hidup merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut ditemui beberapa permasalahan dan hambatan seperti kurangnya sumber pendanaan, keterbatasan sarana dan prasarana kerja, lemahnya kapasitas organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terbatasnya data informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta belum memadainya kompetensi tenaga fungsional bidang lingkungan hidup.

Permasalahan dan hambatan ini merupakan isu-isu strategis penting yang diusahakan untuk dapat diatasi dengan memafaatkan sumberdaya yang ada sehingga tidak berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap pencapaian program nasional. Gambaran permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Timbulan Sampah yang Semakin Meningkat

a) Peningkatan kelembagaan yang memungkinkan dilaksanakannya pengelolaan sampah secara lebih profesional dengan dukungan SDM yang memadai serta dimungkinkannya kerjasama dengan masyarakat dan swasta untuk melaksanakan penanganan sampah.

b) Penggalian sumber dana untuk investasi terutama dari pihak swasta yang harus sinergi dengan penerapan pola pemulihan biaya (*cost recovery*) secara bertahap.

c) Kondisi TPA yang dioperasikan secara *sanitary landfill* memerlukan upaya rehabilitasi agar pencemaran lingkungan dan sumber-sumber air dapat diminimalkan. Perlunya komitmen pihak eksekutif dan legislatif dalam alokasi biaya untuk rehabilitasi TPA dan penyiapan lokasi TPA baru.

d) Program 3R harus dilaksanakan melalui Pendidikan, Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

e) Sentuhan teknologi sangat diperlukan untuk peningkatan kualitas pengelolaan TPA terutama berkaitan dengan pemanfaatan gas *landfill*, insinerator ramah lingkungan dan teknologi pengolahan sampah lainnya.

f) *Social enforcement* sebagai solusi lemahnya penegakan perda atas pelanggaran pembuangan sampah.

2. **Berkurangnya Peranan PEMDA Akibat Penyederhanaan Izin Lingkungan**

a) Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karimun menghendaki penerapan perencanaan tata ruang (*spatial planning*) yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan adanya standar lingkungan seperti standar ambien untuk air permukaan, air bawah tanah, dan udara sebagai ambang batas baku mutu kegiatan industri sehingga kualitas lingkungan akan bisa lebih terjaga.

b) Penerapan ijin lingkungan dalam setiap usaha atau kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan agar setiap usaha atau kegiatan layak secara ekonomis, teknologi dan lingkungan.

c) Izin lingkungan dalam UU *Omnibus Law* Cipta Kerja disederhanakan sebagai bentuk penyederhanaan izin untuk memudahkan investasi. Izin lingkungan hanya berdasarkan komitmen dimana pelaku usaha dapat mendapatkan izin usaha dan izin lingkungan dengan komitmen akan melengkapi persyaratan lainnya kemudian.

d) Izin lingkungan berfungsi sebagai *instrument* pencegahan yang dapat membendung dampak negatif pembangunan ekonomi terhadap lingkungan hidup dan menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

e) Kemudahan berusaha dengan menyederhanakan izin lingkungan seperti dalam UU Cipta Kerja justru menempatkan pelaku usaha dalam kondisi ketidakpastian hukum dan menghilangkan peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan kegiatan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

f) Penyederhanaan izin lingkungan juga dilakukan oleh KLHK dengan Permen LHK nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun AMDAL untuk usaha dan atau kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

g) AMDAL dan RDTR tidak bisa untuk disetarakan. RDTR berorientasi pada sebuah kebijakan publik, sementara AMDAL berorientasi pada

proyek/kegiatan tertentu. AMDAL adalah instrumen pengendalian dampak lingkungan terhadap rencana kegiatan dalam skala tapak proyek, sementara RDTR adalah instrumen pengendalian ruang berdasarkan tata guna lahan peruntukan.

h) RDTR hanya mengatur soal zonasi atau peruntukan kawasan dan tidak spesifik mengatur mengenai detail suatu proyek dan tidak mengatur kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti dalam AMDAL. RDTR tidak bisa menggantikan fungsi AMDAL sebagai rangkaian dari izin lingkungan.

3. **Belum Ada Kebijakan Tentang Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

a) Pemerintah Kabupaten Karimun belum menata dan menyediakan berbagai bentuk RTH berdasarkan klasifikasinya dan berdasar pada peraturan.

b) Pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih ada ketidaksesuaian dengan ketentuan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

c) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Karimun belum mencapai ketentuan yaitu minimal 30% dari luas kawasan perkotaan.

d) Dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Karimun diperlukan masterplan untuk memberikan arah dan kepastian pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup adalah bahwa isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi padahal saat ini masalah lingkungan merupakan isu global sehingga mau tidak mau masalah lingkungan hidup akan menjadi salah satu pusat perhatian karena meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good environmental governance*).

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD disusun berdasarkan perencanaan dari bawah dengan berbagai pertimbangan diantaranya ketersediaan SDM, dana, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan faktor–faktor lain yang terkait, berdasarkan skala prioritas sehingga diharapkan perencanaan yang disusun akan mampu menjawab kebutuhan.

Selanjutnya untuk menjawab kebutuhan tersebut dituangkan dalam bentuk Program dan kegiatan yang tersedia dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup merupakan dan dianalisis sesuai kebutuhan serta menjadi skala prioritas

untuk dilaksanakan. Hal tersebut sebagai upaya mengakomodir rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup guna mendukung fungsi perlindungan dan pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Karimun.

Hasil analisis kebutuhan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui forum Musrenbang dengan mempertimbangkan berbagai masukan terhadap rencana program , Kegiatan dan Sub kegiatan dari sisi ketersediaan anggaran, lokasi sasaran, target indikator keluaran dan hasil maka sesuai kondisi pada tahun berjalan dan proyeksi tahun yang akan datang terdapat penyesuaian kegiatan.

Penjelasan temuan – temuan setelah proses pembandingan RKPD dengan hasil analisa kebutuhan, dilaksanakan dengan mengkaji terhadap perbedaan program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program , Kegiatan dan Sub kegiatan yang sama tetapi besaran biaya dan ruang lingkup kegiatannya berbeda

Perbandingan data antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan hasil analisis kebutuhan secara lengkap dapat dilihat dalam Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 yang dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025. Hasil review disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab Karimun	78	4.888.414.114	**Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/ Kota**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab Karimun	78	4.888.414.114
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Dinas Lingkungan Hidup	Kab Karimun	80	80.000	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Capaian Program Dinas Lingkungan Hidup	Kab Karimun	80	80.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Karimun	3	25.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Karimun	3	25.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Karimun	2	20.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Karimun	2	20.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Kab Karimun	3	25.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Kab Karimun	3	25.000
	Administrasi Keuangsn Perangkat Daerah	Persentase Reali-sasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup	Kab Karimun	88	4.050.414.114	**Administrasi Keuangsn Perangkat Daerah**	Persentase Reali-sasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup	Kab Karimun	88	4.050.414.114
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tun-jangan ASN	Kab Karimun	50	3.945.414.114	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tun-jangan ASN	Kab Karimun	50	3.945.414.114
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Doku-men Hasil Penyediaan Ad-ministrasi Pelak-sanaan Tugas ASN	Kab Karimun	1	50.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Doku-men Hasil Penyediaan Ad-ministrasi Pelak-sanaan Tugas ASN	Kab Karimun	1	50.000.000
	Administrasi Penda-patan Daerah Kewena-ngan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Pendapatan Dinas LH	Kab Karimun	100	55.000.000	**Administrasi Penda-patan Daerah Kewena-ngan Perangkat Daerah**	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Pendapatan Dinas LH	Kab Karimun	100	55.000.000
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jml Laporan Hasil Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab Karimun	12	15.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jml Laporan Hasil Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab Karimun	12	15.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Penilaian dan	Kab Karimun			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Penilaian	Kab Karimun		

		Pengawasan					dan Pengawasan			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Layanan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	Kab Karimun	100	99.000.000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Layanan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	Kab Karimun	100	99.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab Karimun	2	25.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab Karimun	2	25.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab Karimun	4	24.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab Karimun	4	24.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Karimun	6	30.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Karimun	6	30.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	sentase Dokumen yang Diarsipkan sesuia Aturan	Kab Karimun	100	224.000.000	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	sentase Dokumen yang Diarsipkan sesuia Aturan	Kab Karimun	100	224.000.000
		Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti	Kab Karimun				Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti	Kab Karimun		
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Karimun	1	7.000.000	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Karimun	1	7.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab Karimun			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab Karimun		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Karimun	12	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Karimun	12	10.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab Karimun	12	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab Karimun	12	15.000.000

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Karimun	12	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Karimun	12	150.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urus-an Pemerintah Daerah		Kab Karimun	60	185.000.000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urus-an Pemerintah Daerah**		Kab Karimun	60	185.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Meubeliur yang disediakan	Kab Karimun	2	30.000.00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Meubeliur yang disediakan	Kab Karimun	2	30.000.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab Karimun	5	30.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab Karimun	5	30.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Reali-sasi Capaian Ki-nerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas LH	Kab Karimun	87	30.000.000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Reali-sasi Capaian Ki-nerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas LH	Kab Karimun	87	30.000.000
	yediaan Jasa Kominikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jml Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sum-ber Daya Air dan Listrik yang Dise-diakan	Kab Karimun	12	10.000.000	yediaan Jasa Kominikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jml Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sum-ber Daya Air dan Listrik yang Dise-diakan	Kab Karimun	12	10.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab Karimun	12	50.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab Karimun	12	50.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Lingkungan Hidup	Kab Karimun	84	105.000.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Lingkungan Hidup	Kab Karimun	84	105.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Karimun	1	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Karimun	1	25.000.000
	Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan	Kab	12	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan	Kab	12	25.000.000

	dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara	Karimun			dan Mesin Lainnya	dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Karimun		
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	sentase Titik Sampling Badan Air, Udara dan Lahan/Tanah yang Memenuhi Baku Mutu Kualitas LH	Kab Karimun	69	270.000.000	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	sentase Titik Sampling Badan Air, Udara dan Lahan/Tanah yang Memenuhi Baku Mutu Kualitas LH	Kab Karimun	69	270.000.000
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/La-poran Pelaksanaan Pencegahan Pence-maran Kerusakan LH Hidup Kabupaten/ Kota	Kab Karimun	1	195.000.000	**Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen/La-poran Pelaksanaan Pencegahan Pence-maran Kerusakan LH Hidup Kabupaten/ Kota	Kab Karimun	1	195.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab Karimun	2	25.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab Karimun	2	25.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor LH yang Dilaksanakan	Kab Karimun	1	20.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor LH yang Dilaksanakan	Kab Karimun	1	20.000.000
	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah Dokumen Inventarisasi GRK Profil Emisi GRK	Kab Karimun	1	20.000.000	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah Dokumen Inventarisasi GRK Profil Emisi GRK	Kab Karimun	1	20.000.000
	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Kab Karimun	2	75.000.000	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Kab Karimun	2	75.000.000
	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab Karimun	1	10.000.000	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring,	Kab Karimun	1	10.000.000

		Pelaksanaan Upaya Inventarisasi GRK, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Upaya Inventarisasi GRK, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			
	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yang disusun	Kab Karimun	1	30.000.000	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yang disusun	Kab Karimun	1	30.000.000
	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah Paket Peralatan Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten/ Kota Dalam Rangka Pencegahan dan Sebagai Peringatan Dini Pencemaran Lingkungan	Kab Karimun	2	15.000.000	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah Paket Peralatan Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten/ Kota Dalam Rangka Pencegahan dan Sebagai Peringatan Dini Pencemaran Lingkungan	Kab Karimun	2	15.000.000
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Kab Karimun	1	35.000.000	**Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota**	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Kab Karimun	1	35.000.000
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kab Karimun	2	25.000.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kab Karimun	2	25.000.000
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan LH yang Dihentikan	Kab Karimun	1	10.000.000	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan LH yang Dihentikan	Kab Karimun	1	10.000.000

	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab Karimun	1	40.000.0000	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab Karimun	1	.000.0000	
	Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas Area yang Dilakukan Rehabilitasi di Kab/Kota yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Karimun	0.5	25.000.000	Luas Area yang Dilakukan Rehabilitasi di Kab/Kota yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Karimun	0.5	5.000.000	
	Pelaksanaan Restorasi	Luas Area yang Dilakukan Restorasi di Kab/Kota yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Karimun	0.2	15.000.000	Pelaksanaan Restorasi	Luas Area yang Dilakukan Restorasi di Kab/Kota yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Karimun	0.2	15.000.000
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti (Persentase)	Kab Karimun	100	250.000.000	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti (Persentase)	Kab Karimun	100	250.000.000
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)/Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab Karimun	1	80.000.000	**Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)/Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab Karimun	1	80.000.000
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	Kab Karimun	1	30.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	Kab Karimun	1	30.000.000
	Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Rekomendasi Penetapan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan	Kab Karimun	0	-	Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Rekomendasi Penetapan Dokumen Rencana	Kab Karimun	0	-

	Kabupaten/Kota	Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				Kabupaten/Kota	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			
	Penyusunan Dokumen Rencana Tematik Berbasis Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Dokumen Rencana Tematik Berbasis Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Kab Karimun	0	25.000.000	Penyusunan Dokumen Rencana Tematik Berbasis Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Dokumen Rencana Tematik Berbasis Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Kab Karimun	0	25.000.000
	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang disusun	Kab Karimun	0	25.000.000	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang disusun	Kab Karimun	0	25.000.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab Karimun	3	170.000.000	**Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab Karimun	3	170.000.000
	Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/ RPJMD	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab Karimun	0	-	Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/ RPJMD	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab Karimun	0	-
	Pemantauan dan Evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Kab Karimun	0	-	Pemantauan dan Evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Kab Karimun	0	-
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab Karimun	1	120.000.000	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab Karimun	1	120.000.000

	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Kab Karimun	1	50.000.000	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Kab Karimun	1	50.000.000
	Kegiatan Penyusunan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kot**a**	Kab Karimun	1	-	**Kegiatan Penyusunan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kot**a**	Kab Karimun	1	-
	Analisis Biaya Jasa Lingkungan dari Eksploitasi Sumber Daya Alam	Jml Dokumen Perhitungan Analisis Biaya Jasa Lingk dari Eksploitasi SDA	Kab Karimun	0	-	Analisis Biaya Jasa Lingkungan dari Eksploitasi Sumber Daya Alam	Jml Dokumen Perhitungan Analisis Biaya Jasa Lingk dari Eksploitasi SDA	Kab Karimun	0	-
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayatil (KEHATI)	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)(Hektar)	Kab Karimun	36.75	350.000.000	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayatil (KEHATI)**	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)(Hektar)	Kab Karimun	36.75	350.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	Kab Karimun	1	350.000.000	**Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	Kab Karimun	1	350.000.000
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah yang Disusun dan ditetapkan	Kab Karimun	1	50.000.000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah yang Disusun dan ditetapkan	Kab Karimun	1	50.000.000
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Karimun	0	-	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Karimun	0	-
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Karimun	3	200.000.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Karimun	3	200.000.000
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	Kab Karimun	2	100.000.000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	Kab Karimun	2	100.000.000

	Keanekaragaman Hayati	Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				Keanekaragaman Hayati	Keanekaragaman Hayati yang Dikelola			
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang Terkelola	Kab Karimun	80	70.000.000	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang Terkelola	Kab Karimun	80	70.000.000
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang Terkelola	Kab Karimun	1	40.000.000	**Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang Terkelola	Kab Karimun	1	40.000.000
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kab Karimun	1	40.000.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kab Karimun	1	40.000.000
	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Kab Karimun	1	30.000.000	**Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Laporan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Kab Karimun	1	30.000.000
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab Karimun	2	30.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab Karimun	2	30.000.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan,	Kab Karimun	78	200.000.00	**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan**	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap	Kab Karimun	78	200.000.00

	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Izin PPLH dan PUU LH (Persentase)				**Pengelolaan Lingkungan Hidup**	Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (Persentase)			
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jml Usaha dan/ atau Kegiatan taat dalam Izin Lingkungan dan Izin PPLH diter-bitkan Pemerin-tah Daerah Kabu-paten/ Kota yang dibina & diawasi	Kab Karimun	34	200.000.000	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jml Usaha dan/ atau Kegiatan taat dalam Izin Lingkungan dan Izin PPLH diter-bitkan Pemerin-tah Daerah Kabu-paten/ Kota yang dibina & diawasi	Kab Karimun	34	200.000.000
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kab Karimun	1	10.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kab Karimun	1	10.000.000
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Lingkungan Hidup	Kab Karimun	2	30.000.000	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Lingkungan Hidup	Kab Karimun	2	30.000.000
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Perusahaan/Badan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha yang Diawasi	Kab Karimun	60	160.000.000	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Perusahaan/Badan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha yang Diawasi	Kab Karimun	60	160.000.000
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab Karimun	0	-	**Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH**	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab Karimun	0	-
	Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang Diverifikasi	Kab Karimun	0	-	**Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang Diverifikasi	Kab Karimun	0	-
	Koordinasi, Sinkronisasi,	Jumlah Dokumen Hasil	Kab	0	-	Koordinasi, Sinkronisasi,	Jumlah Dokumen	Kab	0	-

	Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahua	Karimun			Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahua	Karimun		
		Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH					Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH			
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	Kab Karimun	0	35.000.000	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	Kab Karimun	0	35.000.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Kab Karimun	0	35.000.000	**Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Kab Karimun	0	35.000.000
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Kab Karimun	1	10.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Kab Karimun	1	10.000.000
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab Karimun	5	10.000.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Kab Karimun	5	10.000.000

							yang Dilaksanakan			
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kab Karimun	50	10.000.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kab Karimun	50	10.000.000
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlin-dungan & Penge-lolaan Ling-kungan Hidup (Persentase)	Kab Karimun	3.31	370.000.000	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlin-dungan & Penge- lolaan Ling-kungan Hidup (Persentase)	Kab Karimun	3.31	370.000.000
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penghar-gaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota yang diterima dan diberikan	Kab Karimun	20	370.000.000	**Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Penghar-gaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota yang diterima dan diberikan	Kab Karimun	20	370.000.000
	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyara-kat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidik/Filan-tropi yang dinilai terkait dengan PPLH	Kab Karimun	150	370.000.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyara-kat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidik/Filan-tropi yang dinilai terkait dengan PPLH	Kab Karimun	150	370.000.000
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Kab Karimun	100	60.000.000	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Kab Karimun	100	60.000.000
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota	Jml Pengaduan Sengketa/Kasus Tin-dak Pidana Lingkungan Hi-dup yang Ditangani	Kab Karimun	20	60.000.000	**Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota**	Jml Pengaduan Sengketa/Kasus Tin-dak Pidana Lingkungan Hi-dup yang Ditangani	Kab Karimun	20	60.000.000
	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Ditangani	Kab Karimun	9	40.000.000	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Ditangani	Kab Karimun	9	40.000.000
	Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab Karimun	54	13.080.000.000	**Program Pengelolaan Persampahan**	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab Karimun	54	13.080.000.000

	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Volume Pena-nganan Sampah	Kab Karimun	21	13.080.000.000	**Kegiatan Pengelolaan Sampah**	Persentase Volume Pena-nganan Sampah	Kab Karimun	21	13.080.000.000
		Persentase Volume Pengurangan Sampah	Kab Karimun	77			Persentase Volume Pengurangan Sampah	Kab Karimun	77	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat/ POKMAS yang Berperan Aktif dalam Pengelolaan Persampahan	Kab Karimun	10	40.000.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat/ POKMAS yang Berperan Aktif dalam Pengelolaan Persampahan	Kab Karimun	10	40.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarpras Pengelolaan Persampahan	Kab Karimun	1	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarpras Pengelolaan Persampahan	Kab Karimun	1	10.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota yang disediakan	Kab Karimun	5	1.570.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota yang disediakan	Kab Karimun	5	1.570.000.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen JAKSTRADA Pe-ngelolaan Sam-pah Kab/Kota yang disusun dan ditetapkan	Kab Karimun	0	-	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen JAKSTRADA Pe-ngelolaan Sam-pah Kab/Kota yang disusun dan ditetapkan	Kab Karimun	0	-
	Penanganan Sampah Melalui Pengangkuan	Volume Pena-nganan Sampah yang Dilaksana-kan Melalui Pengangkutan	Kab Karimun	22400	2.000.000.000	Penanganan Sampah Melalui Pengangkuan	Volume Pena-nganan Sampah yang Dilaksana-kan Melalui Pengangkutan	Kab Karimun	22400	2.000.000.000
	Penyediaan dan Operasionalisasi Sarana Pemilahan Sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya	Jumlah Paket Penye-diaan dan Opera-sionalisasi Sa-rana Pemi-lahan Sampah ke Fasi-litas Pengelo-laan Sampah Spesifik dan/atau Fasi-litas Pengelolaan Sampah Lainnya	Kab Karimun	1	150.000.000	Penyediaan dan Operasionalisasi Sarana Pemilahan Sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya	Jumlah Paket Penye-diaan dan Opera-sionalisasi Sa-rana Pemi-lahan Sampah ke Fasi-litas Pengelo-laan Sampah Spesifik dan/atau Fasi-litas	Kab Karimun	1	150.000.000

							Pengelolaan Sampah Lainnya			
	Penanganan Sampah Melalui Pengumpulan Sampah	Persentase Cakupan Luas Pelayananan Pengumpulan Sampah	Kab Karimun	72	5.500.000.000	Penanganan Sampah Melalui Pengumpulan Sampah	Persentase Cakupan Luas Pelayananan Pengumpulan Sampah	Kab Karimun	72	5.500.000.000
	Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah yang Beroperasi dan Terpelihara Dengan Baik	Kab Karimun	12	2.300.000.000	Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah yang Beroperasi dan Terpelihara Dengan Baik	Kab Karimun	12	2.300.000.000
	Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kab/Kota atau TPA/TPST Regional	Volume Penanganan Sampah yang Dilaksanakan Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kab/Kota atau TPA/TPST Regional	Kab Karimun	22140	1.500.000.000	Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kab/Kota atau TPA/TPST Regional	Volume Penanganan Sampah yang Dilaksanakan Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kab/Kota atau TPA/TPST Regional	Kab Karimun	22140	1.500.000.000
	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerjasama Penanganan sampah di TPA/TPST Kab/Kota Termasuk untuk Pengelolaan Sampah Kab/Kota yang Diterbitkan	0	1	10.000.000	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerjasama Penanganan sampah di TPA/TPST Kab/Kota Termasuk untuk Pengelolaan Sampah Kab/Kota yang Diterbitkan	0	1	10.000.000

2.5 Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2025. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Usulan Progam/Kegiatan Pemangku Kepentingan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume
1	**Program Pengelolaan Persampahan**			
	Kegiatan Pengelolaan Persampahan			
	a. Subkegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan			
	- Pengadaan sarana prasarana persampahan	Buru, Tanjung Balai Kota		4 unit
	b. Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah			
	- Pengadaan sarana prasarana persampahan	Baran Timur		1 unit
2	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**			
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			
	Subkegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
	- Pengadaan sarana prasarana pertamanan	Kel. Meral Kota		1 unit

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD

Arah kebijakan tahun 2024 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunal jangka menengah serta mengembalikan *trajectory* jangka panjang. Arah kebijalan tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2025 dilakuka dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, kebijakan pembangunan tahun 2025, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian, sebagai respons terhadap kondisi Indonesia dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19 yang berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional.

Pembangunan Tahun 2025 merupakan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia Tahun 2025 dan juga merupakan tahun ketiga lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kedua pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2025 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, masih diarahkan pada 7 Prioritas Nasional (PN) dengan 8 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; dilaksanakan untuk meningkatkan system jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan.

Peningkatan Kualitas SDM, Kesehatan dan Pendidikan

Peningkatan Kualitas SDM antara lain Kesehatan dan Pendidikan; dilaksanakan untuk meningkatkan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter).

Penanggulangan Penanganan disertai Peningkatan *Decent Job*

Penanggulangan Penanganan disertai dengan Peningkatan *Decent Job*; dilaksanakan untuk Penyediaan Lapangan Usaha.

Mendorong Pemulihan Dunia Usaha

Mendorong Pemulihan Dunia Usaha; dilaksanakan untuk Revitalisasi Pariwisata dan Pengembangan UMKM.

Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan

Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; dilaksanakan untuk Industrialisasi serta Riset dan Inovasi.

Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi

Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respon terhadap Perubahan Iklim); dilaksanakan untuk Ekonomi Rendah Karbon dan Transisi Energi.

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar, Air Bersih dan Sanitasi

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang terdiri dari Air Bersih dan Sanitasi; dilaksanakan untuk Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi, Infrastruktur Digital dan Infrastruktur Konektivitas.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025, Prioritas Pembangunan Daerah harus sinkron dan saling bersinergi dengan Prioritas Pembangunan Nasional. Prioritas Pembangunan Nasional (PN) Tahun 2025 terdiri dari 7 Prioritas Nasional (PN) yang terdiri dari :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
5. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
6. Memperkuat infrastruktur untuk pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
7. Memperkuat stabilitas POLHUKHANKAM dan transformasi pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta Prirotas

Pembangunan Nasional (*Major Project*) dalam RKP Tahun 2025 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan Ekosistem;
2. Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
3. Pengurangan dan Penanganan Sampah.

3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Merujuk pada dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang mana prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari tahun ke tahun dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Tema Pembangunan pada RKPD Provinsi Kepri Tahun 2025, adalah Peningkatan Investasi dan daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat melalui tata kelola Pemerintahan yang baik, dengan menjunjung nilai budaya melayu dan nasional. Dengan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah;
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah;
3. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya;
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih;
5. Pembinaan Keagamaan Pelestarian Budaya, Harmoni Masyarakat;
6. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Antar Pulau;
7. Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Pertambangan, Lingkungan.

3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Karimun

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari tahun ke tahun. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah tema pembangunan daerah Tahun 2025 adalah Pemerataan pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Melalui Peningkatan Investasi, Sumberdaya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif. Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup pada Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun yang dijabarkan dalam RKPD Tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 3.1
Sasaran, strategi, dan Arah Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup pada Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025

Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	2024	2025
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan Lahan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Rangka Mengurangi Pencemaran Air, Udara, dan Tanah	Melaksanakan Pengendalian, Pengawasan Terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	X	X
Meningkatnya Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	X	X
	Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingungan Hidup	Peningkatan Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	X	X
	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	Pengurangan dan Penanganan Sampah	X	X
Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Memperkuat Tata kelola Pemerintahan	Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintahan Daerah	X	X
		Peningkatan Peran Lembaga Keuangan	X	X
		Pemantapan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian	X	X
		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi)	X	X
		Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah	X	X
		Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan daerah	X	X
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik yang Lebih Baik	X	X
		Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	X	X
		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah dengan Digitalisasi Arsip, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Arsip Daerah, dan Pelayanan Kearsipan	X	X

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025, Tema Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2024 adalah **"Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan melalui Peningkatan Investasi, Pembangunan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif"** dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan melalui

pemberdayaan UMKM dan Penguatan Ketahan Pangan.

2. Meningkatkan Infrastruktur yang merata dan Berkeadilan untuk pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar.
3. Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui penguatan kesehatan pendidikan dan ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.4 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Dinas Lingkungan Hidup satu tahun ke depan. Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2025 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup serta tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026, maka rumusan tujuan, sasaran, indikator kinerja utama dan target dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,62
			Indeks Kualitas Air	56,90
			Indeks Kualitas Udara	90,51
			Indeks Kualitas Lahan	52,62
		Meningkatnya Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Luas Ruang Terbuka Hijau	29,90 Ha
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	63,00
			- Persentase Volume Penanganan Sampah	71,00%
			- Persentase Volume Pengurangan Sampah	28,00%
			Persentase Industi/ Kegiatan yang Memenuhi Ketentuan Lingkungan Hidup	85%
			Persentase Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100%
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	76

3.5 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Dengan mempertimbangkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun dan Program/Kegiatan Perangkat Daerah yang mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada perangkat daerah, maka ditetapkan Program/Kegiatan pada Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024. Review Program/Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2023 dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

A. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**;

Indikator Kinerja dari Program ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hitungan capaian realisasi sesuai dengan analisa berupa angka indeks. Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :
   a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan yang disusun.
   b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan yang disusun.
   c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator kinerja jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun.
   d) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :
   a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja jumlah dokumen administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 24 Orang.
   b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan indikator kinerja jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN.
   c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator kinerja jumlah dokumen hasil pelaksanaan penatausahaan dan pengujian serta verifikasi keuangan.
   d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan indikator kinerja jumlah dokumen hasil pelaksanaan penatausahaan dan pengujian serta verifikasi keuangan.

3. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :
   a) Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan indikator kinerja jumlah dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah.
   b) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah dengan indikator kinerja jumlah dokumen analisa pembangan retribusi daerah/dokumen kebijakan retribusi daerah.
   c) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah dengan indikator kinerja jumlah laporan penyuluhan terkait retribusi daerah.
   d) Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan indikator kinerja jumlah laporan triwulan pengelolaan retribusi daerah.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu :
   a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan indikator kinerja jumlah paket pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.
   b) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan indikator kinerja jumlah dokumen pengolahan administrasi kepegawaian.
   c) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan indikator kinerja jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai.
   d) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan indikator kinerja jumlah pegawai yang mengikuti DIKLAT sesuai dengan tugas dan fungsi.
   e) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan indikator kinerja jumlah pegawai yang mengikuti BIMTEK terkait implementasi peraturan dan perundang-undangan.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu :
   a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator kinerja jumlah paket komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator kinerja jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor.

d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indikator kinerja jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

e) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan indikator kinerja jumlah penyediaan dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

f) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan indikator kinerja jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu.

g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator kinerja jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi.

h) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan indikator kinerja jumlah dokumen pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 9 (sembilan) sub kegiatan, yaitu :

a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator kinerja jumlah unit kendaraan yang disediakan.

b) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar dengan indikator kinerja jumlah unit alat besar yang disediakan.

c) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor dengan indikator kinerja jumlah unit angkutan darat tak bermotor yang disediakan.

d) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan indikator kinerja jumlah unit mebel yang disediakan.

e) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya denga indikator kinerja jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan.

f) Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya dengan indikator kinerja jumlah paket asset tetap lainnya yang disediakan.

g) Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud dengan indikator kinerja jumlah

paket asset tak berwujud yang disediakan.

h) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja jumlah unit gedung/kantor yang dibangun.

i) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja jumlah unit sarana dan prasarana yang disediakan.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

d) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja jumlah laporan tenaga/jasa pelayanan umum kantor.

8. Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 10 (sepuluh) sub kegiatan, yaitu :

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator kinerja jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator kinerja jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar dengan indikator kinerja jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya rutin/berkala.

d) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor dengan indikator kinerja jumlah unit alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya rutin/berkala.

e) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel dengan indikator kinerja jumlah unit

mebel yang dipelihara.

f) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator kinerja jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.

g) Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud dengan indikator kinerja jumlah unit asset tak berwujud yang dipelihara.

h) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja jumlah unit gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi.

i) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja jumlah unit sarana dan prasarana yang dipelihara dan direhabilitasi.

j) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah dengan indikator kinerja luas tanah yang dipelihara dan direhabilitasi.

B. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :
   a) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen yang disusun..
   b) Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun.
2. Kegiatan Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :
   a) Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun.
   b) Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja jumlah dokumen KLHS untuk KRP yang disusun.

C. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kabupaten/Kota terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :
   a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut dengan indikator kinerja jumlah dokumen IKLH dan laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun.

b) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan indikator kinerja jumlah dokumen pelaksanaan pengendalian emisi GRK, Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang disusun.

2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kabupaten/ Kota terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :
   a) Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan indikator kinerja jumlah laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
   b) Sub Kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH dengan indikator kinerja jumlah lokasi pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
   c) Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH dengan indikator kinerja jumlah titik penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
3. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kabupaten/Kota terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :
   a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran dengan indikator kinerja jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemar.
   b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar dengan indikator kinerja jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar.
   c) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi dengan indikator kinerja jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rehabilitasi.

D. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Kabupaten Kota terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :
   a) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan indikator kinerja jumlah dokumen rencana pengelolaan keanekaragaman hayati yang disusun.
   b) Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan dengan indikator kinerja luas taman diluar kawasan

hutan yang dikelola.

c) Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan indikator kinerja luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola.

d) Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati dengan indikator kinerja jumlah unit sarana dan prasarana yang dikelola dan disediakan.

E. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

1. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
   a) Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 dengan indikator kinerja jumlah laporan penyimpanan sementara limbah B3 yang diverifikasi.
2. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :
   a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan indikator kinerja jumlah dokumen fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3.
   b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan dengan indikator kinerja jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi.

F. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :
   a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dengan indikator kinerja jumlah dokumen fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH.
   b) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas PPLH dengan indikator kinerja jumlah pejabat pengawas yang difasilitasi pengembangan kapasitas dan kompetensinya.

c) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah laporan pengawasan usaha dan/atau kegiatan.

d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan RPPLH dengan indikator kinerja jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan laporan penerapan sanksi.

G. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang Terkait dengan PPLH

1. Kegiatan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait dengan PPLH terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

   Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait dengan PPLH dengan indikator kinerja jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi terkait dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional.

H. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

   a) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan dengan indikator kinerja jumlah lembaga/institusi/organisasi masyarakat/kelompok masyarakat yang dilatih.

   b) Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (GPLH).

   c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja jumlah masyarakat atau kelompok masyarakat yang mengikuti penyuluhan terkait pengelolaan LH.

I. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
   a) Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja jumlah lembaga/institusi/organisasi masyarakat/kelompok masyarakat yang dinilai.

J. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :
   a) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah dokumen pengaduan yang ditangani.
   b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan dengan indikator kinerja jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

K. Program Pengelolaan Persampahan

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :
   a) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah dokumen pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah terkait pengelolaan sampah yang disusun.
   b) Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali dengan indikator kinerja jumlah laporan hasil pelaksanaan pengurangan sampah.
   c) Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Volume Penanganan Sampah yang dikelola(Volume Sampah yang Tertangani).
   d) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan indikator kinerja jumlah

masyarakat/kelompok masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan persampahan.

e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dengan indikator kinerja jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.

f) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan dengan indikator kinerja jumlah dokumen kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan yang disusun.

g) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah unit sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang disediakan.

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

a) Sub Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah dengan indikator kinerja jumlah unit usaha yang berperan dalam pengelolaan sampah yang dinilai.

b) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah dengan indikator kinerja jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta Prirotas Pembangunan Nasional (*Major Project*) dalam RKP Tahun 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan Ekosistem;
2. Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
3. Pengurangan dan Penanganan Sampah;

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2024, Tema Pembangunan adalah **"Pemerataan Pertumbuhan Ekonom Berkeadilan melalui Peningkatan Investasi, Pembangunan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif"** dengan Prioritas Pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2025, yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2025 menguraikan rumusan rencana program/kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan dan pagu indikatif serta prakiraan maju untuk proyeksi pendanaan Tahun 2025.

Rumusan Program/Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2023 direncanakan sebanyak 11 (sebelas) Program, 23 (dua puluh tiga) Kegiatan dan 87 (delapan puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan total kebutuhan dana atau pagu indikatif sebesar **Rp 16,047,587,000,- (Enam Belas Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**, yang dapat dilihat secara detail pada tabel berikut :

Kode	Urusan Program Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab Karimun	78	4.888.414.114	APBD Kab Karimun		80	4.936.564.993
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Dinas Lingkungan Hidup	Kab Karimun	80	80.000	APBD Kab Karimun		82	80.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Karimun	3	25.000	APBD Kab Karimun		4	25.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Karimun	2	20.000	APBD Kab Karimun		2	20.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Kab Karimun	3	25.000	APBD Kab Karimun		3	25.000
	Administrasi Keuangsn Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup	Kab Karimun	88	4.050.414.114	APBD Kab Karimun		90	4.274.564.993
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Karimun	50	3.945.414.114	APBD Kab Karimun		57	4.169.564.993
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Karimun	1	50.000.000	APBD Kab Karimun		1	50.000.000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup	Kab Karimun	100	55.000.000	APBD Kab Karimun		100	55.000.000
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab Karimun	12	15.000.000	APBD Kab Karimun		12	15.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Penilaian dan Pengawasan	Kab Karimun			APBD Kab Karimun			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Layanan Kepegawaian Dinas	Kab Karimun	100	99.000.000	APBD Kab Karimun		100	58.000.000

		Lingkungan Hidup							
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab Karimun	2	25.000.000	APBD Kab Karimun		0	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab Karimun	4	24.000.000	APBD Kab Karimun		3	18.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Karimun	6	30.000.000	APBD Kab Karimun		4	20.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen yang Diarsipkan sesuia Aturan	Kab Karimun	100	224.000.000	APBD Kab Karimun	100	100	234.000.000
		Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti	Kab Karimun			APBD Kab Karimun			
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Karimun	1	7.000.000	APBD Kab Karimun		1	7.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab Karimun			APBD Kab Karimun			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Karimun	12	10.000.000	APBD Kab Karimun		12	10.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab Karimun	12	15.000.000	APBD Kab Karimun		12	15.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Karimun	12	150.000.000	APBD Kab Karimun		12	150.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kab Karimun	60	185.000.000	APBD Kab Karimun		70	40.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Meubeliur yang	Kab Karimun	2	30.000.00	APBD Kab Karimun		1	15.000.00

		disediakan							
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab Karimun	5	30.000.000	APBD Kab Karimun		2	10.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas Lingkungan Hidup	Kab Karimun	87	30.000.000	APBD Kab Karimun		90	75.000.000
	Penyediaan Jasa Kominikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Karimun	12	10.000.000	APBD Kab Karimun		12	10.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab Karimun	12	50.000.000	APBD Kab Karimun		12	50.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Lingkungan Hidup	Kab Karimun	84	105.000.000	APBD Kab Karimun		88	120.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Karimun	1	25.000.000	APBD Kab Karimun		1	25.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab Karimun	12	25.000.000	APBD Kab Karimun		8	10.000.000
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Titik Sampling Badan Air, Udara dan Lahan/Tanah yang Memenuhi Baku Mutu Kualitas Lingkungan Hidup	Kab Karimun	69	270.000.000	APBD Kab Karimun		71	272.659.500

	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab Karimun	1	195.000.000	APBD Kab Karimun		1	202.659.500
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab Karimun	2	25.000.000	APBD Kab Karimun		2	30.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor LH yang Dilaksanakan	Kab Karimun	1	20.000.000	APBD Kab Karimun		1	25.000.000
	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah Dokumen Inventarisasi GRK Profil Emisi GRK	Kab Karimun	1	20.000.000	APBD Kab Karimun		0	-
	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Kab Karimun	2	75.000.000	APBD Kab Karimun		2	80.000.000
	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Upaya Inventarisasi GRK, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab Karimun	1	10.000.000	APBD Kab Karimun		1	15.000.000
	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah Dokumen Status Lingkungan	Kab Karimun	1	30.000.000	APBD Kab Karimun			20.000.000

		Hidup Daerah (SLHD) yang disusun							
	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah Paket Peralatan Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten/ Kota Dalam Rangka Pencegahan dan Sebagai Peringatan Dini Pencemaran Lingkungan	Kab Karimun	2	15.000.000	APBD Kab Karimun	2	2	32.659.5000
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Kab Karimun	1	35.000.000	APBD Kab Karimun		1	35.000.000
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kab Karimun	2	25.000.000	APBD Kab Karimun		2	25.000.000
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan LH yang Dihentikan	Kab Karimun	1	10.000.000	APBD Kab Karimun		1	10.000.000
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab Karimun	1	40.000.0000	APBD Kab Karimun		1	35.000.000
	Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas Area yang Dilakukan Rehabilitasi di Kab/Kota yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Karimun	0.5	25.000.000	APBD Kab Karimun		0.5	25.000.000
	Pelaksanaan Restorasi	Luas Area yang Dilakukan Restorasi di	Kab Karimun	0.2	15.000.000	APBD Kab Karimun		0.2	10.000.000

		Kab/Kota yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti (Persentase)	Kab Karimun	100	250.000.000	APBD Kab Karimun		100	252.462.500
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)/Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab Karimun	1	80.000.000	APBD Kab Karimun		1	150.000.000
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	Kab Karimun	1	30.000.000	APBD Kab Karimun		1	30.000.000
	Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Penetapan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab Karimun	0	-	APBD Kab Karimun		1	40.000.000
	Penyusunan Dokumen Rencana Tematik Berbasis Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Dokumen Rencana Tematik Berbasis Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Kab Karimun	0	25.000.000	APBD Kab Karimun		1	30.000.000
	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan	Kab Karimun	0	25.000.000	APBD Kab Karimun		1	50.000.000

		Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang disusun							
	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab Karimun	3	170.000.000	APBD Kab Karimun		1	50.000.000
	Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/ RPJMD	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab Karimun	0	-	APBD Kab Karimun		0	-
	Pemantauan dan Evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Kab Karimun	0	-	APBD Kab Karimun		1	50.000.000
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab Karimun	1	120.000.000	APBD Kab Karimun		0	-
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Kab Karimun	1	50.000.000	APBD Kab Karimun		0	-
	Kegiatan Penyusunan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kot**a**	Kab Karimun	1	-	APBD Kab Karimun		0	52.462.500
	Analisis Biaya Jasa Lingkungan	Jml Dokumen	Kab Karimun	0	-	APBD Kab		1	52.462.500

	dari Eksploitasi Sumber Daya Alam	Perhitungan Analisis Biaya Jasa Lingk dari Eksploitasi SDA				Karimun			
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayatil (KEHATI)	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)(Hektar)	Kab Karimun	36.75	350.000.000	APBD Kab Karimun		41.75	353.447.500
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	Kab Karimun	1	350.000.000	APBD Kab Karimun		1	353.447.500
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah yang Disusun dan ditetapkan	Kab Karimun	1	50.000.000	APBD Kab Karimun		0	-
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Karimun	0	-	APBD Kab Karimun		2	50.000.000
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Karimun	3	200.000.000	APBD Kab Karimun		3	200.000.000
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Kab Karimun	2	100.000.000	APBD Kab Karimun		2	103.447.500
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang Terkelola	Kab Karimun	80	70.000.000	APBD Kab Karimun		83	70.689.500
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang Terkelola	Kab Karimun	1	40.000.000	APBD Kab Karimun		1	40.689.500
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan	Kab Karimun	1	40.000.000	APBD Kab Karimun		0	40.689.500

	Limbah B3	Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3							
	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Kab Karimun	1	30.000.000	APBD Kab Karimun		1	30.000.000
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab Karimun	2	30.000.000	APBD Kab Karimun		2	30.000.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (Persentase)	Kab Karimun	78	200.000.00	APBD Kab Karimun		83	201.970.000
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jml Usaha dan/ atau Kegiatan taat dalam Izin Lingkungan dan Izin PPLH diter-bitkan Pemerin-tah Daerah Kabu-paten/ Kota yang dibina & diawasi	Kab Karimun	34	200.000.000	APBD Kab Karimun		36	201.970.000
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kab Karimun	1	10.000.000	APBD Kab Karimun		1	10.000.000
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Lingkungan Hidup	Kab Karimun	2	30.000.000	APBD Kab Karimun		2	30.000.000

	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Perusahaan/Badan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha yang Diawasi	Kab Karimun	60	160.000.000	APBD Kab Karimun		75	161.970.000
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab Karimun	0	-	APBD Kab Karimun		100	80.000.000
	Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang Diverifikasi	Kab Karimun	0	-	APBD Kab Karimun		1	80.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab Karimun	0	-	APBD Kab Karimun		1	80.000.000
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	Kab Karimun	0	35.000.000	APBD Kab Karimun		100	35.344.750
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Kab Karimun	0	35.000.000	APBD Kab Karimun		1	35.344.750
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Kab Karimun	1	10.000.000	APBD Kab Karimun		1	10.344.750
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya	Kab Karimun	5	10.000.000	APBD Kab Karimun		5	10.000.000

		Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan							
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kab Karimun	50	10.000.000	APBD Kab Karimun		50	10.000.000
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlin-dungan & Penge- lolaan Ling-kungan Hidup (Persentase)	Kab Karimun	3.31	370.000.000	APBD Kab Karimun		4.37	373.644.500
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penghar-gaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota yang diterima dan diberikan	Kab Karimun	20	370.000.000	APBD Kab Karimun		25	373.644.500
	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyara-kat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidik/Filan-tropi yang dinilai terkait dengan PPLH	Kab Karimun	150	370.000.000	APBD Kab Karimun		170	373.644.500
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Kab Karimun	100	60.000.000	APBD Kab Karimun		100	60.000.000
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota	Jml Pengaduan Sengketa/Kasus Tin-dak Pidana Lingkungan Hi-dup yang Ditangani	Kab Karimun	20	60.000.000	APBD Kab Karimun		25	60.000.000
	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Ditangani	Kab Karimun	9	40.000.000	APBD Kab Karimun		8	40.000.000
	Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab Karimun	54	13.080.000.000	APBD Kab Karimun		55	13.238.422.305
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Volume Pena-nganan Sampah	Kab Karimun	21	13.080.000.000	APBD Kab Karimun		23	13.238.422.305
		Persentase Volume Pengurangan	Kab Karimun	77		APBD Kab Karimun		75	

		Sampah							
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat/ POKMAS yang Berperan Aktif dalam Pengelolaan Persampahan	Kab Karimun	10	40.000.000	APBD Kab Karimun		10	40.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarpras Pengelolaan Persampahan	Kab Karimun	1	10.000.000	APBD Kab Karimun		1	10.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota yang disediakan	Kab Karimun	5	1.570.000.000	APBD Kab Karimun		5	1.208.422.305
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen JAKSTRADA Pe-ngelolaan Sam-pah Kab/Kota yang disusun dan ditetapkan	Kab Karimun	0	-	APBD Kab Karimun		0	-
	Penanganan Sampah Melalui Pengangkuan	Volume Pena-nganan Sampah yang Dilaksana-kan Melalui Pengangkutan	Kab Karimun	22400	2.000.000.000	APBD Kab Karimun		22800	2.200.000.000
	Penyediaan dan Operasionalisasi Sarana Pemilahan Sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya	Jumlah Paket Penye-diaan dan Opera-sionalisasi Sa-rana Pemi-lahan Sampah ke Fasi-litas Pengelo-laan Sampah Spesifik dan/atau Fasi-litas Pengelolaan Sampah Lainnya	Kab Karimun	1	150.000.000	APBD Kab Karimun		1	20.000.000
	Penanganan Sampah Melalui Pengumpulan Sampah	Persentase Cakupan Luas Pelayananan Pengumpulan Sampah	Kab Karimun	72	5.500.000.000	APBD Kab Karimun		74	5.850.000.000
	Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah yang Beroperasi dan Terpelihara Dengan Baik	Kab Karimun	12	2.300.000.000	APBD Kab Karimun		12	2.300.000.000

	Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kab/Kota atau TPA/TPST Regional	Volume Penanganan Sampah yang Dilaksanakan Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kab/Kota atau TPA/TPST Regional	Kab Karimun	22140	1.500.000.000	APBD Kab Karimun		22360	1.600.000.000
	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerjasama Penanganan sampah di TPA/TPST Kab/Kota Termasuk untuk Pengelolaan Sampah Kab/Kota yang Diterbitkan	0	1	10.000.000	APBD Kab Karimun		1	10.000.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun untuk pelaksanaan Tahun 2025, merupakan sebuah produk perencanaan melalui proses pembahasan yang melibatkan semua *stackholder* terkait pada Sekretariat dan unsur Bidang Teknis terutama pimpinan. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Rencana Kerja (RENJA) memiliki kedudukan yang sangat penting dan merupakan sebuah komitmen yang dijadikan pedoman unit penunjang teknis meliputi Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mewujudkan pencapaian visi dan misi organisasi secara konsisten dan berkesinambungan. Selanjutnya dapat juga dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 serta dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode tahun 2025.

Terima kasih atas upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya yang ada dan mengaktualisasikan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025, dengan harapan mampu mendorong perwujudan tercapainya peningkatan kinerja pelayanan ke arah yang lebih baik.

Tanjung Balai Karimun, Desember 2024

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARIMUN

H. RIYANTA, SS., MM. Pub

RENJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KARIMUN

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dindukcapil Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini, merupakan panduan dan acuan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas dalam upaya penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk periode satu tahun kedepan.

Rencana kerja (RENJA) Disdukcapail Kabupaten Karimun Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan yang memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Lokasi, Kelompok sasaran, Indikator Kinerja dan Pendanaan untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Karimun. Renja ini mengacu pada Renstra Disdukcapil Karimun Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif untuk menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di Lingkungan Disdukcapail dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2025, dan untuk menunjau Kembali hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2024) dan Perkiraaan Capaian Renja Tahun Berjalan (2025).

Diharapkan semua bidang teknis di Lingkungan Disdukcapil Kabupaten Karimun dan Stakeholders lainnya dengan adanya rencana kerja ini akan tercipta kesatuan gerak dan langkah dalam upaya penyelenggaraan pelayanan public terutama dalam pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menciptakan peningkatan Knerja Organisasi

Tanjung Balai Karimun, 15 September 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun

Drs, Muhd. Tahar, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19660530 199103 1 009

DAFTAR

Halaman

KATA PENGANTAR .....
DAFTAR ISI ..... **i**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU **8**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 35

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 39

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD 45

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 48

2.5. Penelaah Usulan Progaram dan Kegiatan Masyarakat .....

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN **52**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 52

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 53

3.3. Program, Kegiatan 57

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH……..**63**

BAB V PENUTUP **67**

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Pelaksanaan Program/ Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2024

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2024

Tabel2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2024

Tabel 2.5 Jumlah Produk Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karimun tahun 2024

Tabel 2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun

Tabel 2.7 Usulan Anggaran sesuai Renstra Tahun 2021-2026

Tabel 2.8 Tujuan dan Sasaran Strategis pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2024

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Strategi pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2024

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2024 dan Perkiraaan Maju Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan ,program,kegiatan dan Sub kegiatan OPD. Sebagai suatu dokumen resmi rencana kerja mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, dan lintas wilayah serta kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten diwajibkan menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten serta mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN. Berpedoman pada RPJMD kabupaten dimaksudkan untuk menjamin keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan serta program,kegiatan dan Sub kegiatan tahunan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN dimaksudkan untuk menjamin keselarasan program,kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan program,kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan daerah provinsi dan prioritas pembangunan nasional.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2025 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 agar terarah, efektif, efisiensi, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program,kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 untuk bahan penyusunan APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Hubungan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dapat dilihat pada Bagan Alur Tahap Penyusunan Renja SKPD Kabupaten /Kota dibawah ini:

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota

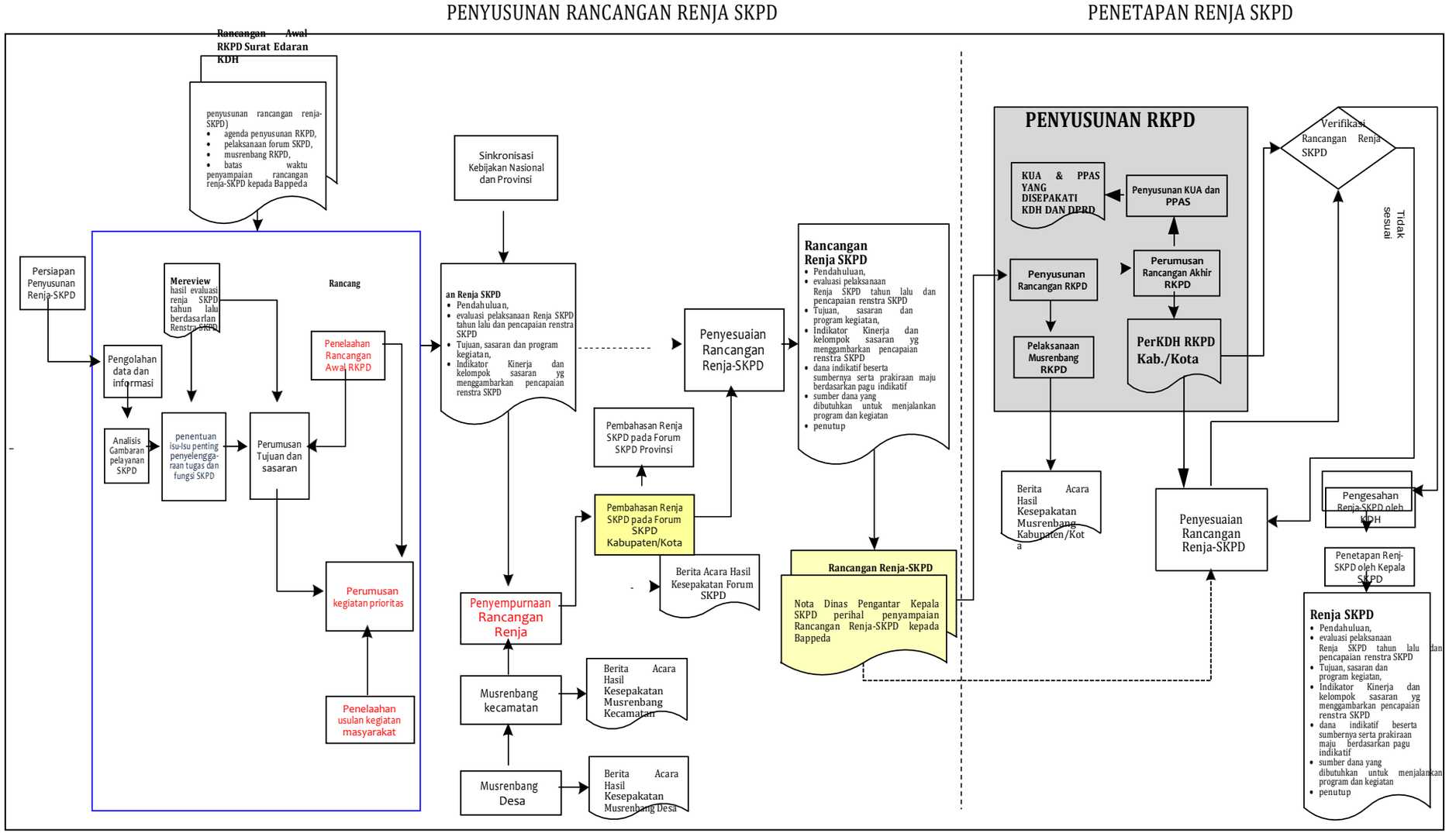

1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini mengacu pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten SIAK, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan KetigaAtas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan antara Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan antar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengemdalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 28);
23. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Nomor 78 Tahun 2025 tetang Penunjukan TIM Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Pembangunan Daerah menjadi tolak ukur penilaian keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun selama kurun waktu Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tahun 2025 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil l (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Terwujudnya kualitas pelayanan prima di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
3. Terwujudnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan melalui Teknologi informasi.
4. Tersedianya Data Kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh Pihak lain dan terciptanya Inovasi Pelayanan dalam Administrasi Kependudukan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan Renstra OPD dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Pelayanan ke Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Catatan penting baik pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARIMUN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pada Pelaksanaan Program kegiatan Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencataan sipil melaksanakan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangakt Daerah Kabupaten Karimun, Melaksanakan 4 Program dan 18 Kegiatan sebagaimana ditujukan pada table.2.1

Tabel.2.1
Pelaksanaan Program/ Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Karimun Tahun 2024

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN
1	Program Pendaftaran Penduduk	1	Pencatatan,Penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
2	Program Pencatatan Sipil	1	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil,
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan
		2	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar
		3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tugas ASN
		5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

		7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		11	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
		12	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber Daya Air dan Listrik
		13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Berdasarkan hasil capaian kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024, realisasi anggaran sebesar Rp. 5.546.417.932,- atau 91,12 % dari keseluruhan anggaran sebesar Rp. 6.086.776.602,- uraian realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada table 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
1	**Program :** **Program Pendaftaran Penduduk**						
		Presentase Penduduk yang ber- KTP	99 %	99,49	220.009.321	136.258.000	61,93
		Persentase Anak yang Memiliki KIA	55 %	54,03			
1	Kegiatan: Pencatatan,Penata usahaan dan penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan	3 Dokumen	73,26			

II	**Program Pencatatan Sipil**						
1	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	3 Dokumen	16,53	189.788.000	7.899.000	4,16
III	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**						
1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan yang dibukukan Kependudukan	1 Buku	59,28	99.541.000	10.947.000	96,26
2	Fasilitas terkait Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas terkait Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	1 Unit	26,37			
IV	**Program Penunjang Urusan Pemerintah**						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen – Renja – Renja RB	47,62	5.444.679.692	923.076.505	16,95
2	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	3 Lapiran – LAPKIN – Perjanjian Kinerja – Realisasi Perjanjian Kinerja	51,53			
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	50			
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tugas ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	360 org/bln (30 org x 12 bln)	95,40			

5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	168 org/bln (14 org x 12 bln)	50			
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Jenis	-			
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	117 Jenis	91,16			
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	25 Jenis	100			
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan	72.000 lembar	99,75			
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelennggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 kali rapat/ 30 kali SKPD	90,22			
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 unit	-			
12	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bukti Tagihan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	36 bukti pembayaran (3 tagihan x 12 bln)	75,46			
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	542 org/bln (46 org x 12 bln)	97,98			
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara	1 Unit	60,01			

Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2023 dan 2024, untuk tahun 2024 Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Karimun merencanakan Program dan Kegiatan yang lebih difokuskan pada Peningkatan Pelayanan Publik bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Peningkatan Pelayanan Identitas kependudukan, Akta Kelahitan dan Kematian dan Identitas Kependudukan Digitas yang merupakan Target Nasional.

Evaluasi Hasil pelaksana Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dan Pencapaian Rencana Startegis 2021-2026 dapat dilihat pada table 2.3 berikut Ini :

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Pelaksanaan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Karimun

Sasaran RKPD yang dicapai dalam Renja PO: Meningktkan Kualitas Pelayanan Publik

No.	Tujuan / Sasaran	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2021 s/d 2026)	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output) (Renstra 2021 s/d 2026)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)								Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan (2024)																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3						4	5	6	7		8		9								I				II				III				IV				14 = 10+11+12+13			15 = 14 / 9 x 100%		16 = 8 + 14		17 = 16 / 7 x 100%		18
															Renja		APBD Murni		APBD Pergeseran		APBD Perubahan		10				11				12				13														
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%	F	K	Rp	%	F	K	Rp	%	F	K	Rp	%	F	K	F	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2						URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																											

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

   Secara keseluruhan Rencana Kerja tahun 2024 tingkat pencapaian program memcapai 80% karena tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran

   Untuk semua program Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 telah memenuhitarget kinerja hasil/keluaran dimana semuanya sudah mencapai 100 % secara fisik.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	IKK	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi				Capaian Tahun 2024	Catatan Analisis
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		
1	Indeks Pelayanan Publik		2,75	2,90	3,01	3,50	3,51	3,40	3,25	3,59	3,36	3,70	
	Nilai Akuntanbilitas Kinerja (Nilai AKIP OPD)		70,02	71,20	72,05	72,50	72,65	70,02	71,20	-	72,50	58	
	Persentase IKU OPD yang tercapai target		85	85	100	100	80	-	-	-	92	115	
	Persentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)		100	100	100	100	3.51	81	-	-	- 48,02	164	
	Persentase Serapan Anggaran OPD		90	90	90	90	90	81,14	81,30	92,80	-	91	
	Survey Kepuasan Masyarakat		70	75	78	78,50	79	81	87,98	81,30	87,98	90,86	
2	Persentase OPD yang memanfaatkan Data Kependudukan		66,67	64,71	66,67	66,67	70,27	-	-	34,09	34,02	1	
	Persentase Perjanjian Kerjasama Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dihasilkan		100	100	100	100	100	100	100	100	250	208	
3	Persentase Penduduk yang memiliki Akte Kelahiran		92	93	94	93	94	94,08	96,64	94	99,63	107	
	Persentase Penduduk yang memiliki Akte Kematian		75	80	94	93	80	100	100	93	99,27	125	
	Persentase Penduduk yang memiliki Akte Perkawinan		56	95	75	75	75	63,30	106	80	76,84	133	
	Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai		-	95	75	75	75	-	-	80	79,3 9	133	
	Persentase Kepemilikan Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan		-	95	95	75	75	-	-	75	100	133	

4	Persentase Kepemilikan ktp-el		99	99	98	98	99	99	99,95	98,04	99,49	100	
	Persentase Anak yang memiliki KIA		24	34	55	50	55	40,67	53,35	56,13	54,03	102	
	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga		100	100	98	98	98	100	100	94,44	99,20	101	
	Persentase Penerbitan SKTT		-	-	90	90	98	-	-	92,05	98,07	100	
	Persentase Penerapan IKD (Indentitas Kependudukan Digital)		-	-	5	5	10	-	-	5	6,58	60	
	Persentase Pelayanan Pindah Datang antar Kab/Kota, Pindah Keluar antar Kab/Kota		-	-	98	98	98	-	-	98	98,15	100	
	Persentase Pelayanan Pindah Datang antar Kab/Kota		-	-	998	98	98	-	-	98	98,14	98	
5	Persentase Penyajian Data Kependudukan berskala Kab/.Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 2.5

Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Karimun
Tahun 2024

Kepala Dinas

N0	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang baik	1.- Indeks Pelayanan Publik	3,51	3,51	3,51	3,51	3,60	3,60	3,65	3,70
		- Level Kematangan MR	3	3	3	3	2,11	2,11	2,11	2,11
		2. Nilai Akuntanbilitas Kinerja	72,65	72,65	72,65	72,65	15,42	15,42	15,42	15,42

NO	SASARAN OPD	JADWAL PELAKSANAAN				INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	Rp.	REALISASI			
		I	II	III	IV				I	II	III	IV
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun	√	√	√	√	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 5,444,679,692	Rp. 715,027,659	Rp. 988,352,806	Rp. 1,452,511,700	Rp. 923,076,505
2							Program Pendaftaran penduduk	Rp. 220,009,321	Rp. 162,603,000	Rp. 0	Rp. 2,535,000	Rp. 136,258,000
							Program Pencatatan Sipil	Rp. 189,788.000	Rp. 152,100	Rp. 39,000	Rp. 7,899,000	Rp. 0
3							Program Pengelolaan Informasi Administrasi	Rp. 99,541,000	Rp. 11,372,000	Rp. 0	Rp. 10,947,000	Rp. 0

Sekretaris

N0	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP OPD	72,50	72,50	72,50	72,50	0	0	0	0
2	Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	1. Persentase IKU OPD yang Mencapai Target	80	80	80	80	92	92	92	92
		2. Persentase Temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100
		3. Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)	3,51	3,51	3,51	3,51	48,02	48,02	48,02	48,02

NO	SASARAN OPD	JADWAL PELAKSANAAN				INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	Rp.	REALISASI			
		I	II	III	IV				I	II	III	IV
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun	√	√	√	√	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 5,444,679,692	Rp. 715,027,659	Rp. 988,352,806	Rp. 1,452,511,700	Rp. 923,076,505

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

N0	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan beskala Kab/Kota yang berasal dari data Kependudukan yang telah dikosolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	SASARAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	Rp.	REALISASI			
		I	II	III	IV				I	II	III	IV
1	Melaksanakan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi	Rp. 99,541,000	Rp. 11,372,000	Rp. 0	Rp. 10,947,000	Rp. 0

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

N0	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. Persentase Kepemilikan ktp-El	99	99	99	99	99,49	99,49	99,49	99,49
		2. Persentase Anak yang memiliki KIA	55	55	55	55	54,03	54,03	54,03	54,03
		3. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	98	98	98	98	99,20	99,20	99,20	99,20
		4. Persentase Penerbitan SKTT	98	98	98	98	98,07	98,07	98,07	98,07
		5. Persentase Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	10	10	10	10	6,58	6,58	6,58	6,58
		6. Persentase Pelayanan Pindah Datang antar Kab/Kota, Pindah Keluar antar Kab/Kota	98	98	98	98	98,15	98,15	98,15	98,15
		7. Persentase Pelayanan Pindah	98	98	98	98	98,14	98,14	98,14	98,14

NO	KEGIATAN BIDANG	JADWAL PELAKSANAAN				INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	Rp.	REALISASI			
		I	II	III	IV				I	II	III	IV
1	Melaksanakan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	TW I	TW II	TW III	TW IV	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran penduduk	Rp. 220,009,321	Rp. 162,603,000	Rp. 0	Rp. 2,535,000	Rp. 136,258,000

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

N0	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Meningkatnya Pelayanan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan serta Survey Kepuasan Masyarakat	1. Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan	66,67	66,67	66,67	66,67	34,09	34,09	34,09	34,09
		2. Persentase perjanjian Kerjasama Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dihasilkan	100	100	100	100	67	100	150	208
		3. Jumlah Inovasi yang dihasilkan	4	4	4	4	5	5	5	5

NO	KEGIATAN BIDANG	JADWAL PELAKSANAAN				INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	Rp.	REALISASI			
		I	II	III	IV				I	II	III	IV
1	Melaksanakan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan di sajikan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi	Rp. 99,541,000	Rp. 11,372,000	Rp. 0	Rp. 10,947,000	Rp. 0

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

N0	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	1. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	93	93	93	93	99,63	99,63	99,63	99,63
		2. Persentase Kepemilikan Akta Kematian	80	80	80	80	99,27	99,27	99,27	99,27
		3. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	75	75	75	75	76,84	76,84	76,84	76,84
		4. Persentase Kepemilikan Akta Cerai	75	75	75	75	79,39	79,39	79,39	79,39
		5. Persentase Kepemilikan Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan	75	75	75	75	100	100	100	100

NO	KEGIATAN BIDANG	JADWAL PELAKSANAAN				INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	Rp.	REALISASI			
		I	II	III	IV				I	II	III	IV
1	Melaksanakan Pelayanan Pencatatan Sipil	TW I	TW II	TW III	TW IV	Jumlah Dokumen Layanan Pencatatan Sipil yang di tingkatkan	Program Pencatatan Sipil	Rp. 189,788.000	Rp. 1.521.000	Rp. 39,000	Rp. 7,899,000	Rp. 0

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD

1. Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi Pemerintah di bidang penyelenggaraan adminduk (UU Nomor 23 Th 2006, PP Nomor 37 Th 2007 dan Perpres Nomor 25 Th 2008 serta PP Nomor 41 Th 2007) harus dilaksanakan secara keseluruhan, berkesinambungan dan terus - menerus, antara lain melalui:

a. Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi ke dalam satu sistem, yaitu SIAK

b. Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem/online

2. Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi

3. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, murah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat

4. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (penanggulangan kemiskinan, dll)

6. Kajian, penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

7. Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib disiapkan: Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas danFungsi SKPD

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD adalah:

a. Realisasi capaian rasio Penduduk ber KTP belum maksimal dikarenakan keterbatasan Anggaran Belanja Bahan Cetak (Tinta Ribon Fargo, Ribon Evolis Film, Clening Kit, Tinta);
b. Realisasi Kartu Identitas Anak (KIA) yang belum maksimal dikarenakan Dokumen KIA dalam bentuk syarat wajib masuk Sekolah dan adanya Keterbatasan Anggaran Belanja Kertas dan Cover (Blanko KIA);
c. Kurangnya Sosialisasi Penerapan Aktivitasi pencapaian Indentitas Kependudukan Digital (IKD) belum mencapai target 5%;
d. Realisasi Capaian Persentase Pendataan Penduduk Non Permanen;
e. Kurangnya pemahaman dan kesadaran Masyarakat Karimun tentang pentingnya Akte Kematian anggota keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
f. Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam pelaporan Kewarganegaraan Ganda akan menyebabkan kesulitan dalam proses dokumen lainnya;
g. Realisasi capaian pemanfaatan Hak Akses dan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama belum maksimal di sebabkan kurangnya dukungan anggaran.

Untuk mengatasi segala permasalahan dan hambatan yang ditemui, Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengambil langkah-langkah sebagai alternatif solusi guna terus meningkatkan pelayanan, antara lain :

a. Mengadakan Anggaran Belanja Bahan Cetak (Tinta Ribon Fargo, Ribon Evolis Film, Clening Kit, Tinta)
b. Mengadakan Anggaran Belanja Kertas dan Cover (Blako KIA)
c. Mengadakan sosialisasi dan himbauan melalui media cetak maupun media elektronik kepada masyarakat
d. Meningkatkan Capaian dengan mengadakan jemput bola ke Kecamatan-Kecamatan di luar Pulau

2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah , Terhadap Capaian ProgramNasional/Internasional seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals)

Pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun sebagai penjabaran dari visi misi Kabupaten Karimun akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi nasional yaitu “Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

Tantangan dalam peningkatan pelayanan antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Keterbatasan jumlah smartcart atau Dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian yang mengembangkan Data warehouse berbasis data Kependudukan dengan NIK Nasional untuk meningkatkan Pelayanan Publik
3. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya memiliki Akta Catatan Sipil (mereka mengurus pembuatan Akta jika ada kebutuhan mendesak).

Peluang dalam peningkatan pelayanan antara lain :

1. Komitmen Kepala Daerah yang kuat yang dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan bertanggung jawab sukses program KTP Elektronik yang ditandatangani Bupati dan Ketua DPRD
2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana
3. Adanya dukungan Anggaran berupa Non fisik dari DAK untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan APBN mulai 2014 (UU No. 24 tahun 2013).

2.3.5. Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis Prioritas Tahun Yang Direncanakan.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah masyarakat) di masa mendatang, suatu kondisi ataukejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

2.3.6. Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis Prioritas Tahun Yang Direncanakan.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah masyarakat) di masa mendatang, suatu kondisi ataukejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang bersifatpenting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi – rekomendasi sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online merupakan reformasi mendasar pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan secara modern sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) harus disukseskan pelaksanaannya.
2. Guna meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kearsipan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa, agar diupayakan segera dibangun ruang kearsipan yang representative.
3. Dalam rangka mensukseskan program KTP Elektronik di Kabupaten Karimun diperlukan dukungan dan kerjasama semua pihak khususnya aparat tingkat Kecamatan dan Aparat Desa/Kelurahan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada tahun 2025. Analisa kebutuhan pada tahun 2024 disusun sesuai dengan kemampuan APBD yang dialokasikan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun pada tahun 2025 adalah seperti terlihat pada tabel berikut :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2025 Kabupaten Karimun

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	**Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab. Karimun**	**Survey Kepuasan Masyarakat**	**78,5%**	**5.014.500.000**	**Program :Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kab. Karimun**	**Survey Kepuasan Masyarakat**	**79%**	**5.060.617.000**	
1	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	5 Dok	76..500.000	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	5 Dok	80.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	4 Dok	3.151.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	4 Dok	3.286.000.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	-	-	-	Kab. Karimun	-	-	-	-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	65.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	75.000.000	-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	571.400.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	7 Dok	599.417.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokuemn	3 Dok	205.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokuemn	1 Dok	55.000.000	

7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	3 Dok	862.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	3 Dok	865.050.000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	3 Dok	83.100.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	3 Dok	100.150.000	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Kab. Karimun**	**Presentase OPD yang memanfaatkan Data Kependudukan**	**66,67%**	**650.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Kab. Karimun**	**Presentase OPD yang memanfaatkan Data Kependudukan**	**70,27%**	**614.800.000**	
1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	2 Dok	450..000.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	2 Dok	510.000.000	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Kab. Karimun**	**Jumlah Dokumen**	**2 Dok**	**70.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Kab. Karimun**	**Jumlah Dokumen**	**1 Dok**	**40.000.000**	

4	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Kab. Karimun**	**Presentase Penduduk yang ber-KTP**	**98%**	**400.000.000**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Kab. Karimun**	**Presentase Penduduk yang ber-KTP**	**99%**	**412.480.500**	
			Persentase anak yang memiliki KIA	55%				Persentase anak yang memiliki KIA	70%		
1	Pelayanan Pendaftaran penduduk	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	2 Dok	400.000.000	Pelayanan Pendaftaran penduduk	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	1 Dok	412.480.500	
5	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Kab. Karimun**	**Presentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran**	**94%**	**350.000.000**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Kab. Karimun**	**Presentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran**	**95%**	**137.474.650**	
1	Pelayanan Pendaftaran pencatatan SIpil	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	3 Dok	350.000.000	Pelayanan Pendaftaran pencatatan SIpil	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	3 Dok	137.474.650	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

1. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada hakekatnya bahwa upaya tertib Dokumen Kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis. Artinya mudah difahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa penting (vital event) yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki insentif/benefit bagi si pemegang dokumen atau penduduk. Upaya tersebut merupakan tugas Negara atau pemerintah sebagai pelayan public, dan menjadi urusan wajib. Untuk itu factor-faktor strategis yang harus ditata dan disiapkan agar tugas tersebut berfungsi dan efektif, adalah :
   a. Aspek Landasan Hukum.
   b. Aspek Kelembagaan dan SDM.
   c. Aspek Penerapan Teknologi dan Sistem pelayanan.
   d. Aspek Demografis atau Kesadaran Masyarakat.
   e. Aspek Pengelolaan Data Penduduk atau Pembangunan Bank Data Kependudukan.
2. Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependuduk) telah sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional Jo Perpres No.35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No.26 Tahun 2009 yang berbunyi :
   a. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.
   b. Rekaman Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan, dan rekaman retina mata.

c. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan.
d. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Instansi Pelaksana.
e. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;
f. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3.2.1. Tujuan Yang Akan Dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun

Sebagai satuan Kerja Perangkat Daerah, Visi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tetap mengacu sepenuhnya pada Visi pemerintah Kabupatan Karimun 2022-2026 yaitu : “Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim Yang Terdepan Berlandaskan Iman Dan Taqwa” dengan tetap memperhatikan lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi eksistensi organisasi.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Karimun dan merelisasikan Misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menetapkan tujuan di tahun 2021-2026 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pelayanan Publik

3.2.2. Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun

Sasaran dan indikator sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan merupakan kondisi yang diprediksikan untuk dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategis secara berkelanjutan.

MISI 5:

TUJUAN

MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG PROFESIONAL DAN UNGGUL (BERKEADILAN DALAM PELAYANAN PUBLIK) **SASARAN**

5.1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik **Indikato** Indeks Pelayanan Publik

SASARAN

Meningkatnya Akutabilitas Kinerja OPD yang lebih baik

Indikator Nilai AKIP OPD

Meningkatnya Capaian Kinerja OPDsesuai Tepat waktu

Indikator

1).Persentase IKU OPD yang Mencapai Target.
2).Persentase Temuan Inspektorat yang Ditindaklanjuti.
3).IndeksProfesionalitasPegawai(IPP)

Meningkatnya Kinerja Perencanaan OPD Yang tepat waktu

Indikator
1).Nilai Evaluasi Dokumen Perencanaan OPD
2).Persentase Capaian Program OPD
3).Persentase Kegiatan Renja yang diakomodir dalam APBD
4).Persentase Realisasi Fisik Kegiatan OPD

Koordinasi Perencanaan OPD

Indikator
1).Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun
2).JumlahUsulansubkegiatanBidang yang diakomodir Renja OPD

Dokumen Perencanaan OPD Tersedia

Indikator
1).Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang disusun

Dokumen Pengangaran OPD tersedia

Indikator
1).Jumlah RKA yang disusun
2).Jumlah DPA yang disusun

Data/Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di OPD Tersedia

Indikator
1).Jumlah Data yang dikelola
2).Jumlah Dokumen Perencanaan yang di pubish

Monev Dokumen Perencanaan OPD Secara Berkala

Indikator
1).JumlahLaporan Hasil EvaluasiRenja
2).JumlahLaporan Hasil ReviuRenstra

Laporan Kinerja Berbasis TIK (TEPRA)Sebagai Bahan Evaluasi

Indikator
1).Ketepan Waktu Pelaporan TEPRA
2).JumlahKegiatan yang Terlaksana

Laporan Kinerja OPD Sebagai Bahan Evaluasi

Indikator
1),JumlahLaporan Kinerja yang disusun

Kinerja Keuangan OPD yang lebih baik

Indikator
1).Persentase Kegiatan yang Anggarannya Terealilasi ≥ 95%
2).Persentase Serapan Anggaran OPD

Dokumen Pengelolaan Pencairan Anggaran Tersedia Lengkap

Indikator
1).Jumlah SPP yang Terbit
2).Jumlah SPM yang terbit

Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan diverifikasi

Indikator
1).Jumlah SPJ yang diverifikasi
2).JumlahLaporanVerifikasi

Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Tersedia

Indikator
1).Jumlah LaporanKeuangan yang disusun

Kinerja Pegawai OPD yang baik

Indikator
1).Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Kerja Efektif
2).Rata-rata Capaian Kinerja PegawaiBaperlitbang
3).Jumlah Rencana Kebutuhan Pengembangan SDM yg Terelialisasi

Dokumen Pengelolaan Pencairan Anggaran Tersedia Lengkap

Indikator
1).Jumlah SPP yang Terbit
2).Jumlah SPM yang terbit

Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan diverifikasi

Indikator
1).Jumlah SPJ yang diverifikasi
2).Jumlah LaporanVerifikasi

Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Tersedia

Indikator
1).Jumlah LaporanKeuangan yang disusun

SASARAN

TerwujudnyaPeningkatanPercepatanPelayananDokumenAdministrasiKependudukandanPencatatanSipilKepadaMasyarakat yang Efisien **Indikator** IndeksKepuasan Masyarakat

Meningkatnya Cakupan Kinerja Pelayanan PendaftaranPenduduk

Terlaksananya Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk **Indikator**

1. PresentaseKepemilikan KTP-El
2. Presentaseanak yang memiliki KIA
3. PresentaseKepemilikanKartuKeluarga
4. Presentasepenerbitan SKTT
5. Presentase Penerapan IKD (identitas Kependudukan Digital)
6. Presentase Pelayanan Pindah Datang antar Kab/Kota,Pindah Keluar antar Kab/Kota
7. PresentasePelayananPindahDatangantarKab/Kota,PindahKeluarantarProvinsi

Presentase Dispensasi Pindah Datang antar Kab/Kota,Pindah

Seksi Identitas Penduduk

Terlaksananya Pelayanan PenerbitanKK, KTP,KIA, dan Penerapan IKD,SKTT

Indikator

1. Jumlah KK ya diterbitkan
2. Jumlah SKTT yg diterbitkan
3. Jumlah KTP-E yg diterbitkan
4. JumlahKIA yg diterbitkan
5. Jumlah IKD

Seksi Pindah Datang dan

Terlaksananya Pelayanan Penerbitan Dan Penerapan IKD,SKTT

Indikator

1. Jumlah KK diterbitkan
2. Jumlah SKTT yg diterbitkan
3. Jumlah KTP-El yg diterbitkan
4. Jumlah

Meningkatnya Cakupan Kinerja Pelayanan Pencatatan

Terlaksananya Cakupan Pelayanan Pencatatan sipil **Indikator**

1. PresentaseKepemilikan Akta Kelahiran
2. Presentas e Kepemilikan Akta Kematian
3. Presentase Kepemilikan Akta Perkawinan
4. Presentase Kepemilikan AkteCerai
5. PresentaseKepemilikanPerubahan Status Anak dan Kewarganegaraan

Seksi Kelahiran

Terlaksana nya Pelayanan Penerbitan Surat Kelahiran, Kematian **Indikator**

1.Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan
2. Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan

Seksi Perkawin

TerlaksananyaPelayanan Penerbitan AktaPerkawinan Perceraian dan Perubahan Status Anak dar Kewarganegaraan Indikator

1. Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan
2.Jumlah Akta Perceraian diterbit
3. Jumlah surat Perubahan Status

Meningkatnya CakupanKinerjaPemanfaatan Data dan Inovasi

Terlaksananya Cakupan PelayananPemanfaatanDatadanInovasi PelayanansertaSurveyKepuasanMasyarakat **Indikator**

1. Presentase OPD yang memanfaatkan data Kependudukan
2. Presentase Perjanjian Kerjasama Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dihasilkan
3. Jumlahnovasi yang dihasilkan

Seksi Pemanfaatn Data & Dokumen Kependudukan

Terlaksananya Pelayanan Penerbitan Surat

Terlaksananya Pengolahan Data & Dokume Kependudukan

Indikator

1. Jumlah Data dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat
2. Jumlah Hasil Survey kepuasa

Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak Pewarganegaraan

Terlaksananya KinerjaPengelolaan Informasi

Terlaksananya PengelolaanInformasiAdministrasi Kependudukan yang akurat **Indikator**

1. Presentase Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian

Seksi Sistem Informasi

Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Indikator

1. Jumlah Pembaharuan (Update) pada Aplikasi SIAK
2. Jumlah Ganguan yang tertangani pada Server dan Proxy SIAK

Seksi Pemgolahn dan

Teerlaksananya Pengolaham dan Penyajian Data Kependudukan

Indikator

1. Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan yang dihasilkan

TUJUAN DAN SASARAN

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Indek Kepuasan Masyarakat.	79%
			1. Presentase Penduduk yang ber-KTP 2. Persentase Anak yang memilki KIA	99% 55 %
			1..Presentase penduduk yang memiliki akta Kelahiran	93%
			1..Persentase OPD yang memanfaatkan Data Kependudukan	66,67%

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kegiatan yang sistematis dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan organisasi kemudian dituangkan dalam bentuk program yng terangkum dalam uraian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.3.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.5.2 Pengadaan Mebel
1.5.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
1.5.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2.1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.1.1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
2.1.2 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.2 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
2.2.1 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
2.3 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
2.3.1 Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.3.2 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk
3 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
3.1 Pelayanan Pencatatan Sipil
3.1.1 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
3.2 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
3.2.1 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
3.3 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
3.3.1 Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil
4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
4.1 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4.1.1 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4.2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4.2.1 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
5.1 Penyusunan Profil Kependudukan
5.1.1 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
5.1.2 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tabel Rancangan Awal Renja Tahun 2026
DINAS KEPENDUDUKAN DAN KENCATATAN SIPIL

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Rencana Tahun 2026	
				Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Peningkatan Profesional SDM,Akuntabilitas dan transfaransi Pelayanan			**Indeks Pelayanan Publik**	**4 %**	**6.46.590.000**	**PAD**	**4,00 %**	**7.821.249.000**
	1.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja		**Nilai Akuntabilitas Kinerja**	**74,01 %**	**6.546.590.000**	**PAD**	**74,01**	**7.821.249.000**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Survey Kepuasan Masyarakat**	79,5 %	**5.153.590.000**	**PAD**	80 %	**6.288.949.000**
		Kegiatan : Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi yang disusun tepat waktu	6 Dokumen	110.000.000		5 Dokumen	121.000.000
		Sub. Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen - Renja - Renja RB - Rentra	45.000.000		2 Dokumen -Renja - Renja RB	49.500.000
		Sub. Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laportan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	45.000.000		3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	49.500.000
		Sub. Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan - Evaluasi Renja -Evaluasi RB	20.000.0000		2 Laporan - Evaluasi Renja -Evaluasi RB	22.000.000
		Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	3.431.500.000		4 Dokumen	3.774.650.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/Bulan (30 Orang x 12 Bulan)	3.276.500.000		360 Orang/Bulan (30 Orang x 12 Bulan)	3.604.150.000
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	155.000.000		12 Dokume	170.500.000

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Paket	30.000.000		1 Paket	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8 Orang	30.000.000		8 Orang	33.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	590.800.000		6 Dokumen	649.880.000
		Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	13.000.000		1 Paket	14..300.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	423.400.000		1 Paket	465.740.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	12.500.000		1 Paket	13.750.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan	1 Paket	41.500.000		1 Paket	45.650.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Dokumen	13.400.000		5 Dokumen	14.740.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	87.000.000		1 Laporan	95.700.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	868.700.000		3 Dokumen	855.570.000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	3.700.000		30 Laporan	4.070.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	37.000.000		36 Laporan	40.700.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	12 Laporan	828.000.000		12 Laporan	910.800.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	866.300.000		3 Dokumen	868.700.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	120.000.000		2 Dokumen	65.200.000

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaa dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dionas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di Pelihara dan dibayartkan Pajak	1 Unit	3.200.000		1 Unit	3.520.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di peliharaan	1 Unit	62.000.000		1 Unit	68.200.000
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pesentase OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan	73.68 %	486.500.000	**PAD**	73.68 %	535.150.000
		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	51.000.000		1 Dokumen	56.100.000
		Fasiliutas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Unit	435.500.00		2 Unit	479.050.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Dokumen	Dokumen	0	**PAD**	2 Dokumen	120.000.000
		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen	Dokumen	0		2 Dokumen	120.000.000
		Penyediaan Data Kependudukan / Kabupaten / Kota	Jumlah Data Kependudukan / Kabupaten / Kota	Dokumen	0		2 Dokumen	70.000.000
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain yang tersusun	Dokumen	0		2 Dokumen	50.000.000
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang ber KTP	99%	501.500.000	**PAD**	99%	551.650.000
			Persentase Anak yang memiliki KIA	92%			96%	
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	361.500.000		2 Dokumen	397.650.000
		Perencanaan, Pemantauan dan Penerbitan atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Pemantauan, dan Penerbitan	3 Dokumen	310.500.000		3 Dokumen	341.550.000
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	51.000.000		1 Laporan	56.100.000
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50.000.000		21Dokumen	55.000.000
		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	50.000.000	**PAD**	1 Laporan	55.000.000
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	90.000.000	**PAD**	2 Dokumen	99.000.000

		Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependududkan, Formulir dan Buku Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	40.000.000	**PAD**	2 Laporan	44.000.000
		Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	50.000.000	**PAD**	1 Laporan	55.000.000
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	99%	405.000.000		99%	4045.500.000
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	320.000.000		1 Dokumen	352.000.000
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	3 Layanan	320.000.000	**PAD**	3 Layanan	352.000.000
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50.000.000		1 Dokumen	55.000.000
		Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	50.000.000		1 Laporan	55.000.000
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil. .	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	35.000.000		1 Dokumen	35.500.000
		Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan Formulir dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokuman Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir dan Buku Pelayanan Pencatatan Sipil	2 Laporan	35.000.000	**PAD**	2 Laporan	38.500.000
		TOTAL PAGU ANGGARAN			**6.546.590.000**			**7.821.249.000**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARIMUN

4.1. RENCANA KERJA

Kedudukan Rencana Kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dapat mewujudkan kualitas pelayanan public.

Dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Karimun diperlukan sumber daya manusia,Asset /modal dan unit usaha yang masih operasional.berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unit Kerja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Adapun fungsinya adalah Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pendaftaran dan migrasi Penduduk,Bidang pencatatan Sipil serta Bidang Informasi dan Pengelolaan Data.

Pelaksanaan Program Kegiatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (GOOD GOVERNANCE). Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut:

1. Meningkatnya Birokrasi Pelayanan yang Profesional,Bersih dan Akuntabel
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD

4.2. PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pendanaan Program dan Kegiatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan cara penyusunan pendanaan perumusan prioritas serta perhitungan alokasi untuk masing-masing Program.setiap Program dan Kegiatan ditetapkan target Capaian pada setiap Tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana merupakan dua hal yang saling terkait satu sama lainnya.

Dalam menetapkan Program dan Kegiatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 harus menyiapkan Pendanaan Pendanaan Progaram Pembangunan lima tahun Kedepan.

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN
Per 31 Desember 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Dana(Rp.	SisaDana (Rp.)	% Penyerapan Dana
A.	**Belanja Tidak Langsung**	**-**	**-**	**-**	**-**
B.	**Belanja Langsung**	**6.086.776.602,-**	**5.546.417.932,-**	**540.348.670,-**	**91.12%**
C.	**Belanja Modal**	**0**	**0**	**0**	**0**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN**	**5.546.793.394**	**5.211.473.932**	**335.319.462,-**	**93,95%**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.874.000.	3.750.000	4.124.000	47,62%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	8.004.000	4.125.000	3.879.000	51,53%
3	Evalusasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	2.000.000	2.000.000	50%
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tugas ASN	4.448.941.144	4.243.880.132	205.061.012	95,40%
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.168.000	42.084.000	42.084.000	50%
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.016.000	0	2.016.000	0
7	Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	283.434.250	258.386.500	25.047.750	91,16%
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.004.000	2.004.000	0	100%

9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.080.000	30.006.500	73.500	99,75%
10	Penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0%
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.348.000	60.762.800	6.585.200	90,22%
12	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	3.027.000	0	3.027.000	0%
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.253,000	31.883.000	10.370.000	75,46%
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	511.900.000	501.540.000	10.360.000	97,98%
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	51.744.000	31.052.000	20.692.000	60,01%
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0	0%
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	0%
II	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**				
1	Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	411.750.208	301.666.000	110.084.208	73,26%

III	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**				
1	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	57.255.000	9.459.000	47.766.000	16,53%
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**				
1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	15.500.000	9.188.000	6.312.000	59.28%
2	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	55,478.000	14.631.000	40.847.000	26,37%
V	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**				
1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	0	0	0	0%
TOTAL KESELURUHAN (BTL DAN BL)		**6.086.776.602**	**5.546.417.932**	**540.348.670**	**91,12%**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2024 ini merupakan kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun 2021 – 2026. Pada dasarnya Rencana Kinerja Tahun 2024 mengurai target kinerja yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2025 mencakup 4 program untuk mencapai 2 sasaran dan 1 tujuan. Namun demikian kegiatan yang ada telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat, dan juga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Target Kinerja yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2024 mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada sasaran akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam upaya mencapai Visi, Misi serta Tujuannya.

Dengan Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung tercapainya masyarakat Karimun yang sejahtera, demokratis dan agamis.

Tanjung Balai Karimun, Maret 2025
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Karimun

Drs.MUHD.TAHAR,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19660530 199103 1 009

RENJA

RENCANA KERJA 2025

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Karimun

Jl. Jend Sudirman, Gedung Bukit Selabak, Lantai I Poros
dpmdkabkarimun@gmail.com

KATA PENGANTAR

Atas karunia dan hidayahnya kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun Tahun 2025 mempunyai arti strategis karena di dalamnya memuat uraian program dan kegiatan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2025 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (Renja) ini disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026 dan merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan, juga merupakan rangkaian kegiatan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, dan merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan pelayanan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun.

Rencana Kerja (Renja) yang tersusun ini masih jauh dari sempurna sehingga diperlukan ketelitian, kecermatan dan pengkajian yang lebih mendalam, karena adanya pengembangan kegiatan organisasi serta aspek-aspek yang belum tercakup.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun yang dapat kami sampaikan dengan

harapan adanya saran, petunjuk dan usulan sehingga Rencana Kerja (Renja) ini representative dan lebih baik.

Tanjung Balai Karimun, Juli 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KARIMUN,

JACKIE STEWART TOUW, S.STP.,M.IP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19820115 2001121003

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 43
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 43
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PMD 44
3.3. Program dan Kegiatan Dinas PMD Tahun 2023 48
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 63
BAB V PENUTUP 73
5.1 Catatatan Penting Dalam Penyusunan Renja 73
5.2 Kaidah- kaidah Pelaksanaan 73
5.3 Rencana Tindak Lanjut 74

DAFTAR TABEL

Table 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Dinas PMD Kabupaten Karimun Tahun 2022 15

Table 2.2. Evaluasi dan analisa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun 25

Table 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Karimun 33

Table 3.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 46

Table 3.2 Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun 47

Table 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Karimun 50

Table 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas PMD Kabupaten Karimun 64

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Pasal 37 ayat 4) menempatkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu urusan wajib yang tidak terkait langsung dengan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Beberapa ketentuan Peraturan perundang-undangan tersebut mengisyaratkan bahwa urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi urusan yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh setiap tingkatan pemerintahan, karena Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya semua pihak yang secara sistematis untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat yang merupakan salah satu syarat mutlak yang diperlukan bagi keberlanjutan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun mempunyai fungsi:

1. Membantu Bupati dalam hal perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

2. Mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Merumus rencana program kerja, sebagai pedoman kerja sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah;
4. Membagi tugas kepada sekretaris dan para kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya;
5. Memberi petunjuk dan arahan kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang- undangan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Melaksanakan pembinaan administrasi ketatausahaan dinas;
10. Menyelenggarakan pembinaan teknis administrasi terhadap UPTD dan UPT serta Kelompok Jabatan Fungsional;
11. Memberi informasi dan saran serta pertimbangan kepada Bupati dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan penerapan kebijakan daerah;
12. Menyusun, melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik secara operasional maupun administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
13. Menyelenggarakan penerapan disiplin aparatur lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat di lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Menyelenggakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 3902), yag telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Wantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau- Pulau Kecil Terluar;
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klafisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau 2005- 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun 2006-2025;
20. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan RPJPD;

21. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026
22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Seperti tercantum pada pasal 7 ayat (1) dan pasal 15 ayat (3) Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan racangan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tupoksi SKPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, yang setiap tahunnya sebagai pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan antar lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota serta bidang-bidang pada DPMD Kabupaten Karimun sehingga dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya yang tersedia.

Renja DPMD sebagai wujud dukungan kinerja untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat (DPMD) Kabupaten Karimun agar dalam pelaksanaannya dapat lebih terarah dan terukur.

Rencana Kerja (RENJA) ini juga merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode 1 (satu) tahun yang diambil dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun.

1.3.2 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Karimun secara keseluruhan. Dimana dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan proses jangka pendek yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang didalamnya memuat seluruh rencana atau target kinerja yang ingin dicapai yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis (*Strategic Performance Indikators*).

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatkan Pendapatan Mayarakat;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ;
3. Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Akuntabel;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisa Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menguraikan catatan yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman bagi segenap jajaran lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun dalam menyusun Rencana Kerja pada setiap tahun.

Sebagaimana Amanat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klafisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dalam implementasinya, regulasi yang ada menemui beberapa kendala baik dari sisi perencanaan dan pelaksanaannya. Sebagai contoh hasil pemutakhiran perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan dalam Permendagri No. 90/2019 Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 50/2021 belum mengakomodir program strategis daerah.

Setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan dengan mengukur realisasi capaian-capaian target perencanaan yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis (RENSTRA). Oleh karena itu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun ini juga dievaluasi berdasarkan realisasi capaian-capaian target program/kegiatan dari tahun lalu.

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun Tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) sampai dengan Bulan Desember 2023 dialokasikan sebesar Rp. 3.229.050.099,- dan terealisasi sebesar Rp.3.030.918.004 (93,86%).
B. Belanja Langsung Perangkat Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun menerima alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.3.787.627.452,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 3 Program dan 8 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 87% dan capaian kinerja keuangan sebesar Rp.2.665.241.489,- (81,18%),

Adapun Program Utama yang telah dilakasanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun Adalah sebagai berikut :

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa
2. Program Pemberdayaa Lembagaan Kemayarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Sedangkan 1 (satu) Program sebagai pendukung program utama yang telah dijalankan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun Adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Berikut adalah analisis pada masing – masing program utama :

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Pagu Anggaran Program ini sebesar (Rp). 1.994.878.871,- dengan Realisasi (Rp) 1.490.237.882,-. Indikator Outcome nya adalah Persentase Desa yang

mengelola Administrasi dengan baik. Dengan persentase capaian pada program ini berdasarkan realisasi program yang dibandingkan dengan target program adalah 80%. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan:

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Dasa. Indikator Output kegiatannya Jumlah dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 90%.
2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa. Indikator Output kegiatannya Jumlah dokumen hassil Penyusunan Produk Hukum Desa. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 78%.
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. Indikator Outout Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 75%
4. Fasilitasu Penyelenggaraan Musyawarah Desa. Indikator Outout Kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 58%.
5. Evaluasi dan Pengawasan Peratuan Desa. Indikator Output kegiatannya Jumlah dokumen hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 52%.
6. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa, Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 83%
7. Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Indikator Output kegiatannya Jumlah laporan hasil

Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 64%.

8. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa. Indikator Output kegiatannya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 58%.
9. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa. Indikator Output kegiatannya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 45%.
10. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan. Indikator Output kegiatannya Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 75%.

2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Pagu Anggaran Program ini sebesar (Rp).584.409.700,- dengan Realisasi (Rp). 324.542.779,-. Indikator Outcome nya adalah Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang di Bina. Dengan persentase capaian pada program ini berdasarkan realisasi program yang dibandingkan dengan target program adalah 55,53% Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah:

1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Indikator Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyaakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 80%.

2. Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfatan Teknologi Tepat Guna. Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.
3. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga. Dengan Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 50%.

Berikut pula analisis program pendukung yang telah dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun tahun 2023 dalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 4.387.814.545,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.852.139.832,- atau 87,79 %. Indikator programnya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat. Besaran capaian fisik program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 92%. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini 7 Kegiatan yang melaksanakan 18 sub kegiatan :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Indikator output kegiatannya Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Dengan Realisasi capaian Kegiatan dibandingkan dengan target kegiatan adalah 98%.

2. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator output adalah kegiatannya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Dengan Realisasi capaian Kegiatan di bandingkan dengan target kegiatan adalah 65%.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Indikator output kegiatannya adalah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Dengan Realisasi capaian Kegiatan di bandingkan dengan target kegiatan adalah 85%.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator output kegiatannya adalah Jumlah Dokumen Administrasi umum Perangkat Daerah yang tersedia. Dengan Realisasi capaian Kegiatan di bandingkan dengan target kegiatan adalah 60%.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator output kegiatannya adalah Jumlah pengadaan barang yang dilaksanakan. Dengan Realisasi capaian Kegiatan di bandingkan dengan target kegiatan adalah 95%.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator output kegiatannya adalah Jumlah Dokumen jasa penunjang yang tersedia. Dengan Realisasi capaian Kegiatan di bandingkan dengan target kegiatan adalah 100%.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator output kegiatannya adalah Jumlah Dokumen pemeliharaan yang tersedia. Dengan Realisasi capaian Kegiatan di bandingkan dengan target kegiatan adalah 60%.

Adapun dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja ini memperhatikan beberapa unsur pokok lain, yaitu:

a. Masalah-masalah yang dihadapi;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran-sasaran prioritas untuk mewujudkannya;

d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya;
e. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai entri point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
f. Memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) dan capaian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dari berbagai indikator yang direkap melalui tabel 2.1 berikut:

Table 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Dinas PMD Kabupaten Karimun T021

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Dinas PMD Kabupaten Karimun Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Dinas PMD s.d Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME /KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN REALISASI RENJA TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA s.d TAHUN BERJALAN	
			TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM	REALISASI KINERJA CAPAIAN PROGRAM	REALISASI CAPAIAN PROGRAM (%)		REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA s.d TAHUN BERJALAN	REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(5)*	*(6)*	*(7)*	
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN**	**IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**80**	80	**100**	**80**	**80**	**100**
1.	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**7**	7	**100**	7	**7**	**100**
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dearah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	2	2	100
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3	3	3	3	3	100

			SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	100	2	2	100
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan**	**2**	**2**	100	**2**	**2**	**100**
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300	300	100	300	300	100
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Tugas ASN	1	1	100	1	1	100
3.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1**	**1**	100	**1**	**1**	100
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	100	5	5	100
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	48	100	48	48	100

	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9	9	100	9	9	100
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	-	-	9	-	-
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	100	4	4	100
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	100	12	12	100
4.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1**	**1**	100	1	**1**	100
	1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	100	1	1	100
	2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	-	-	4	-	-
	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24	51	100	24	51	100

5.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1**	**1**	100	1	**1**	100
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	100	3	3	100
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	100	12	12	100
6.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1**	**1**	**100**	**1**	**1**	**100**
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	1	1	100	1	1	100
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainya yang dipelihara	30	27	90	30	30	100
B.		**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE DESA YANG MENGELOLA ADMINISTRASI DENGAN BAIK**	**90,48**	**90,48**	**100**	**92,86**	**92,86**	**100**
1.		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi**	**Jumlah Laporan Pengawasan**	**1**	**1**	**100**	**1**	**1**	**100**

	Pemerintahan Desa		**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**						
	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3	3	100	3	3	100
	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	3	3	100	3	3	100
	3	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	42	42	100	42	42	100
	4	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	16	16	100	10	10	100
	5	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	29	-	-	5	5	100
	6	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	84	-	-	84	84	100
C.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**		**PERSENTASE LEMBAGA**	**12,97**	**12,97**	**100**	**17,87**	**17,87**	**100**

	LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**KEMASYARAKATAN YANG DIBINA**						
1.	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina**	**111**	**111**	**100**	**153**	**153**	**100**
	1 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	30	30	100	30	30	100
	2 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	84	84	100	84	84	100

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk masing-masing indikator sasaran. Dengan analisis ini dapat dilakukan sasaran mana yang tidak dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan di masa mendatang.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD) Kabupaten Karimun sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Desa. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan masyarakat (DPMD) Kabupaten Karimun dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksankan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Unit Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karimun, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun Tipe B dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diantaranya:

1. **Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa**

   Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan Pemberdayaan Kelembagaan Desa yang meliputi Penguatan Kelembagaan Masyarakat, Pembangunan Partisipasi & Kawasan Perdesaan;

   Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa membawahi:

   a. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Penguatan Kelembagaan Masyarakat
   b. Penggerak Swadaya Masyarakat ahli Muda Fasilitas Kelembagaan Desa & Pembangunan Partisipasi & Kawasan Pendesaan.

2. **Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat & Sumber Daya Alam**

   Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat & Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat & Sumber Daya Alam yang meliputi pengembangan ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna;

   Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat & Sumber Daya Alam membawahi :

a. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Pengembangan Ekonomi
b. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sumber Daya Alam & Teknologi Tepat Guna.

3. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan Pemerintahan Desa meliputi Aparatur, Pemerintahan Desa, Penataan Sarana Prasarana dan Kekayaan Desa.

Bidang Pemerintahan Desa membawahi:

1. Analis Kebijakan Ahli Muda Aparatur & Pemerintahan Desa
2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sarana & Prasarana

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi ada beberapa aspek permasalahan dan hambatan yang dihadapi dari dalam merupakan ***Faktor Internal,*** antara lain yaitu:

1. Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia yang mendukung upaya pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun belum memadai;
2. Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Karimun menyediakan anggaran dalam mendukung program-program yang ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun;
3. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun.

4. Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah ditunjukkan dari kurangnya pemahaman dan ketrampilan pegawai dibidang–bidang tugas yang membutuhkan keahlian khusus, minimnya penguasaan teknologi juga menjadi satu keterbatasan, mengingat penguasaan teknologi informasi menjadi prasyarat dasar bagi peningkatan pengetahuan dan efektifitas serta efisiensi kerja;

Aspek permasalahan dan hambatan yang dihadapi dari luar merupakan ***Faktor Eksternal.*** Adapun aspek dan hambatan yang dihadapi yaitu:

1. Salah satu penyebab kegagalan kebijakan dan program dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah lemahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dimana:
   a. Kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa relatif masih rendah;
   b. Sering berubahnya regulasi yang berkaitan dengan Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
   c. Kemampuan dan keterampilan pengurus lembaga kemasyarakatan belum merata pada seluruh anggota pengurus;
   d. Rendahnya motivasi masyarakat untuk diperankan sebagai lembaga kemasyarakatan;
   e. Keberadaan lembaga perekonomian desa belum berfungsi secara maksimal;
   f. Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) perangkat desa;

g. Masih kurangnya aparatur desa yang ahli/kompeten bidangnya;

2. Basis data yang valid guna menunjang pengambilan keputusan dirasakan masih lemah. Selain basis data yang masih lemah, aksesibilitas terhadap data juga cukup sulit. Masyarakat masih sulit mengakses data dan informasi pembangunan yang pada akhirnya berdampak kepada distribusi pembangunan yang tidak tepat sasaran dan minimnya partisipasi masyarakat untuk mendukung dan terlibat dalam pembangunan daerah;

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis 2021-2026 dapat diuraikan berdasarkan indikator sasaran pada masing tujuan sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					Realisasi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat menuju Kemandirian	Indeks Desa Membangun	0,6849	0,6918	0,6987	0,7057	0,7127	0.7184	0.7470	Hasil Pengukuran Indeks Desa Membangun Tahun 2023 adalah 0,7470 berdasarkan hasil Permutakhiran data IDM tahun 2023 di Kabupaten Karimun terdapat 10 Desa yang mengalami peningkatan status dibandingkan dengan tahun 2022. Sehingga nilai IDM tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 50,98%. Dengan Rincian hasil : IKS : 0,8049 IKE : 0,6726 IKL : 0,7635 IDM : 0,8049 + 0,6726 + 0,7635 3 IDM : 0,7470 Hambatan dan Solusi terhadap Indikator Kinerja Indeks Desa

										Membangun Perlu ada sosialisasi yang lebih baik lagi dari Pemerintah Pusat khususnya dari Kementerian Desa PDTT kepada Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Aparat Pemerintah Desa agar pelaksanaan pemutakhiran tahun akan datang bisa terlaksana dengan lebih baik lagi. Perlu ditingkatkan sinergitas dari pemerintah Kabupaten untuk meningkaatkan target Desa Mandiri di Kabupaten Karimun dengan melakukan percepatan pembangunan khususnya di desa-desa yang masuk dalam status desa berkembang dan difokuskan terhadap sektor terlemah dari pembentuk komponen IDM
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	82.15	83	84	85	82.15	80.60	Tingkat Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil Survey Kepuasan Pelayanan Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun terhadap Pemerintahan Desa pada tahun 2023 ditargetkan 82,15 dan terealisasi dengan nilai sebesar 80,60 dengan capaian kinerja sebesar 98,11% dengan predikat "Baik". Adapunn untuk perhitungan IKM yaitu dengan rumus sebagai berikut: IKM= Hasil SKM / Jumlah Desa Ket: Jumlah Desa : 42

										Hambatan dan Solusi terhadap Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun dengan menggunakan Link Survey Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai rata-rata hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun Tahun 2023 mendapatkan nilai 80,6 dengan mutu pelayanan "B", sehingga dengan demikian dapat diartikan bahwa kinerja unit pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun adalah "Baik". Tidak tercapainya target capaian realiasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 ini diperkirakan karena adanya peralihan dari survey yang dilakukan secara manual ke digital (link survey).
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Dinas PMD	76.31	68.30	70.40	71.35	73.80	65.21	62.87	Nilai AKIP yang diperoleh Dinas PMD untuk Tahun 2023 terhadap kinerja Tahun 2022 berjumlah 62,87. Berdasarkan Nilai Hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun yang terdiri dari

										penilaian : 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Hambatan dan Solusi terhadap Indikator Kinerja berikut terdapat beberapa dokumen perencanaan kinerja yang belum selaras antar satu dengan lainnya. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan implementasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun, dengan Memenuhi standar dokumen perencanaan kinerja yang baik, Melakukan pengukuran kinerja dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

DPMD dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku menyelenggarakan beberapa fungsinya. Diantaranya yaitu pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan operasional, evaluasi dan laporan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan menjalankan tugas dan fungsinya tersebut DPMD menghadapi beberapa permasalahan yang dapat dikategorikan sebagai kelemahan (weakness) apabila tidak ditangani segera secara intensif. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPMD, adalah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya Regulasi Turunan dari Pemerintah Pusat terkait Teknis fasilitasi pembinaan Pemerintah Daerah
2. Masih kurangnya dukungan anggaran terkait Pembinaan, Monitoring Pembinaan Pemerintah Desa;
3. Belum terkelolanya aset-aset desa dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi masyarakat;
4. Kurang optimalnya peningkatan status desa;
5. Minimnya keberdayaan masayarakat pedesaan;
6. Tidak berfungsinya secara optimal unit usaha di wilayah pedesaan;
7. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa;

8. Kurang profesionalnya pengelolaan sistem pemerintahan desa;

a. Tantangan

Dalam melakukan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun akan menghadapi beberapa tantangan yang harus di atasi, adapun tantangan itu antara lain:

a. Masih rendahnya efektivitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa serta pelayanan masyarakat;
b. Rendahnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur pemerintahan desa, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
c. Kurangnya pemahaman atas pentingnya kerjasama desa;
d. Minimnya fasilitasi pemerintah pusat dan daerah dalam kerjasama desa;
e. Lembaga kerjasama desa dalam hal ini Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) belum optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
f. Kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem nilai budaya dalam kehidupan masyarakat lokal sebagai efek dari kuatnya dinamika pembangunan;
g. Peranan organisasi non pemerintah yang melakukan pembinaan selama ini tidak teridentifikasi, cenderung melakukan pembinaan tanpa melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota;
h. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum sepenuhnya di jalankan sesuai

i. arus kemajuan teknologi komunikasi dan dengan amanah peraturan tersebut;
j. Kuatnya informasi global yang mempengaruhi prilaku dan tatanan kehidupan sosial masyarakat;
k. Tuntutan pelayanan yang lebih transparan, Resfonsif,konsisten dan akuntabel;
l. Tuntutan ketersediaan Data yang terkait dengan informasi berbagai jenis pelayanan pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat.

b. Peluang

Selain tantangan, terdapat juga peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan pembangunan, peluang itu antara lain :

a. Pemberlakuan otonomi yang luas memungkinkan Pemerintah Daerah mengembangkan berbagai inovasi dan kreatifitas untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi masyarakat;
b. Kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PDT dan Transmigrasi serta Kementerian/Lembaga Non Kementerian lainnya sebagai tindak lanjut dari program NAWA CITA Presiden yang diarahkanpada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui pendanaan Dana Desa dari APBN;
c. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa;
d. Tersedianya tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa di desa;
e. Tersedianya tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa di desa, kecamatan dan kabupaten dalam rangka

peningkatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

c. Isu-isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

1. Kurang berfungsinya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan. Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan desa masih kurang bisa memotivasi dan mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, sehingga partisipasi aktif yang diharapkan melalui gotong royong maupun keswadayaan dalam masa pelaksanaan program proyek pembangunan danpaska pelaksanaannya (pemeliharaan hasil – hasil pembangunan) kurang dimiliki sebagian besar masyarakat perdesaan. Disisi lain kemampuan kepengurusan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam menjalankan roda organisasi masih lemah, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan manajemen dan tata administrasi organisasi.
2. Kurang memadainya Kondisi Infrastruktur Desa.
   Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik sangat diperlukan dalam pembangunan desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi kesejangan antar wilayah.
3. Belum Optimalnya Lembaga ekonomi Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan perekonomian desa melalui Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok – kelompok usaha masyarakat dan sejenisnya, merupakan indikator utama dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya perekonomian desa akan mendorong stabilitas perekonomian desa pada khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya. Ketidakstabilan perekonomian akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat, tantangan terbesar kedepan adalah bagaimana peningkatan pertumbuhan perekonomian yang tinggi, diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat.

4. Kurang optimalnya pengelolaan Sumberdaya Desa, Potensi Desa dan Teknologi Tepat Guna serta lingkungan hidup
   Sumber daya desa yang meliputi sumber daya alam dan sumberdaya manusia merupakan modal pembangunan yang harus dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya, sehingga memunculkan potensi desa yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakter lokal (local genius) dengan tidak meninggalkan kelestarian lingkungan sebagai penopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraan.Upaya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya desa, masih memiliki keterbatasan pengelolaannya, hal ini disebabkan sumber daya manusianya memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan dan tehnologi terapan. Karena itulah diperlukan, stimulasi dan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan, yang dapat memaksimalisasi pengelolaan sumber daya, potensi dan

lingkungan hidup desa, guna menopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraannya.

5. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik

   Pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance. Dalam membangun good governance bukan serta merta memperbaiki kondisi instansi pemerintah, akan tetapi lebih penting adalah persoalan etika, sikap dan perilaku. Dalam good governance tidak lagi pemerintah, tetapi juga citizen (warganegara), masyarakat dan terutama sector usaha/swasta yang berperan. Efektivitas dan efisiensi penerapan good governance dapat dilakukan melalui sinergi manajemen sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berinteraksi dan berkoordinasi. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. RKPD merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Peluang Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota termasuk Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD). Dalam hal penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun Tahun 2025 mengacu pada RKPD Kabupaten Karimun prioritas pembangunan.

Berikut merupakan rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal OPD yang lengkap dengan lokasi, Indikator Kinerja, Besaran Target/Tolak Ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Karimun

Table 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Karimun

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
I	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINAHAN DESA**	**PERSENTASE DESA YANG MENGELOLA ADMINISTRASI DENGAN BAIK**		95,24	**1.580.000.000**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINAHAN DESA**	**PERSENTASE DESA YANG MENGELOLA ADMINISTRASI DENGAN BAIK**		95,24	**1.738.000.000**
A	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**		1 Laporan	**1.580.000.000**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**		1 Laporan	**1.738.000.000**
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Karimun	3 Dokumen	550.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Karimun	3 Dokumen	605.000.000
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Kabupaten Karimun	3 Dokumen	95.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Kabupaten Karimun	3 Dokumen	104.500.000
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Karimun	42 Dokumen	55.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Karimun	42 Dokumen	60,500.000
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Karimun	42 Dokumen	55.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Karimun	42 Dokumen	60.500.000
5	Pembinaan	Jumlah Aparatur	Kabupaten	84	75.000.000	Pembinaan	Jumlah	Kabupaten	84	82.500.000

	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Karimun	Orang		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Karimun	Orang	
6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kabupaten Karimun	42 Laporan	60.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kabupaten Karimun	42 Laporan	66.000.000
7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kabupaten Karimun	42 Dokumen	170.000.000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kabupaten Karimun	42 Dokumen	187.000.000
8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kabupaten Karimun	42 Dokumen	85.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kabupaten Karimun	42 Dokumen	93.500.000
9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Karimun	-	-	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Karimun	-	-
10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kabupaten Karimun	25 Laporan	45.000.000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kabupaten Karimun	25 Laporan	49.500.000
11	Fasilitasi Penyusunan Profi Desa	Jumlah Dokumen Profi Desa	Kabupaten Karimun	42 Dokumen	65.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profi Desa	Jumlah Dokumen Profi Desa	Kabupaten Karimun	42 Dokumen	71.500.000
12	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Karimun	8 Dokumen	55.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Karimun	8 Dokumen	60.500.000
13	Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan	Kabupaten Karimun	84 Orang	80.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti	Kabupaten Karimun	84 Orang	88.000.000

	Anggota BPD	Kapasitas				Anggota BPD	Pembinaan Peningkatan Kapasitas			
14	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Karimun	9 Desa	55.000.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Karimun	9 Desa	60.500.000
15	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kabupaten Karimun	42 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kabupaten Karimun	42 Laporan	55.000.000
16	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Karimun	71 Dokumen	85.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Karimun	71 Dokumen	93.500.000
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG DI BINA**		**22,08**	**685.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG DI BINA**		**22,08**	**753.500.000**
A	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ysng bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Derah Adat Tingkat Derah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakart Pelakunya**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina**	**Kabupaten Karimun**	**189 Lembaga**	**685.000.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ysng bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Derah Adat Tingkat Derah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakart Pelakunya**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina**	**Kabupaten Karimun**	**189 Lembaga**	**753.500.000**

	Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota					**Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota**				
1	Fasilitasi Penataan,Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Karimun	12 Dokumen	85.000.000	Fasilitasi Penataan,Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan,Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Karimun	12 Dokumen	93.500.000
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT, RW, PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Karimun	166 Lembaga	85.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT, RW, PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Karimun	166 Lembaga	93.500.000
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Karimun	30 Dokumen	85.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Karimun	30 Dokumen	93.500.000
4	Fasilitasi	Jumlah Laporan Hasil	Kabupaten	24	75.000.000	Fasilitasi	Jumlah Peserta	Kabupaten	24	82.500.000

	Pemerintahan Desa dalam Pemanfatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Karimun	Laporan		Pemerintahan Desa dalam Pemanfatan Teknologi Tepat Guna	TTG	Karimun	Laporan	
5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Karimun	1 Laporan	85.000.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Karimun	1 Laporan	93.500.000
6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		84 Dokumen	270.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Karimun	84 Dokumen	297.000.000
III	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**		**80**	**3.561.366.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DESA**	**IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**		**80**	**3.917.502.600**
A	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Junlah Dokumen**		**7 Dokumen**	**215.000.000**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**		**7 Dokumen**	**236.500.000**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Karimun	2 Dokumen -Renja -Renja RB	75.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Karimun	2 Dokumen -Renja -Renja RB	82.500.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Karimun	3 Laporan -LAPKIN -Perjanjian Kinerja -Realisasi Perjanjian Kinerja	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	3 Laporan -LAPKIN -Perjanjian Kinerja -Realisasi Perjanjian Kinerja	82.500.000

3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Karimun	2 Laporan -Evaluasi Renja -Evaluasi RB	65.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	2 Laporan -Evaluasi Renja -Evaluasi RB	71.500.000
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**		**2 Laporan**	**2.380.000.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**		**2 Laporan**	**2.618.000.000**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Karimun	300 Org/Bln (25 org x 12 Bln)	2.200.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	Kabupaten Karimun	300 Org/Bln (25 org x 12 Bln)	2.420.000.000
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	180.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	198.000.000
C	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**		**1 Laporan**	**195.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**		**1 Laporan**	**214.500.000**
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Karimun	9 Paket	95.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Karimun	9 Paket	104.500.000
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Karimun	35 Orang	75.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Karimun	35 Orang	82.500.000
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Karimun	5 Orang	25.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Karimun	5 Orang	27.500.000
D	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**		**1 laporan**	**340.966.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**		**1 laporan**	**375.062.600**

1	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	5 Paket	6.500.000	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	5 Paket	7.150.000
2	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	48 Paket	39.466.000	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	48 Paket	43.412.600
3	Penyedian Peralaan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Karimun	9 Paket	60.000.000	Penyedian Peralaan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Karimun	9 Paket	66.000.000
4	Penyedian Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	9 Paket	37.000.000	Penyedian Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	9 Paket	40.700.000
5	Penyedian Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Karimun	5 Paket / 47.647 lbr	36.000.000	Penyedian Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang dicetak dan digandakan	Kabupaten Karimun	5 Paket / 47.647 lbr	39.600.000
6	Penyedian bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Karimun	4 Dokumen	45.000.000	Penyedian bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	Kabupaten Karimun	4 Dokumen	49.500.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Karimun	12 Laporan	117.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat / Jumlah SPPD	Kabupaten Karimun	12 Laporan	128.700.000
E	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**		**-**	**-**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**		**-**	**-**
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Karimun	-	-	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Kabupaten Karimun	-	-

2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Karimun	-	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Karimun	-	-
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Karimun	-	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Karimun	-	-
F	**Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**	Kabupaten Karimun	**1 Laporan**	**345.400.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**	Kabupaten Karimun	**1 Laporan**	**379.940.000**
1	Penyedian jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Karimun	2 Laporan	3.400.000	Penyedian jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Karimun	2 Laporan	3.740.000
2	Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Karimun	3 Laporan	42.000.000	Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Karimun	3 Laporan	46.200.000
3	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	12 Laporan	300.000.000	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	12 Laporan	330.000.000
G	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**	Kabupaten Karimun	**1 Laporan**	**85.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**	Kabupaten Karimun	**1 Laporan**	**93.500.000**
1	Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Karimun	1 Unit	60.000.000	Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	Kabupaten Karimun	1 Unit	66.000.000

							Pajaknya			
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Karimun	30 unit	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Karimun	30 unit	27.500.000
IV	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**PERSENTASE DESA YANG TERTATA DENGAN BAIK**		**47,62**	**74.000.000**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**PERSENTASE DESA YANG TERTATA DENGAN BAIK**		**47,62**	**81.400.000**
A	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah Laporan Penataan desa yang diselenggarakan**	Kabupaten Karimun	**1 Laporan**	**74.000.000**	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah Laporan Penataan desa yang diselenggarakan**	Kabupaten Karimun	**1 Laporan**	**81.400.000**
2	Pembentukan Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Karimun	1 Desa	37.000.000	Pembentukan Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Karimun	1 Desa	40.700.000
3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Kabupaten Karimun	1 Desa	37.000.000	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Kabupaten Karimun	1 Desa	40.700.000
TOTAL					**5.960.366.000**	**TOTAL**				**6.556.402.600**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan. Dari hasil Forum SKPD dilakukan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format Rencana Kerja RKPD bagi setiap SKPD. Dalam keadaan terdapat usulan masyarakat yang mendesak dan belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap SKPD yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD. Sehingga rancangan RKPD merupakan integrasi dan harmonisasi antara rancangan awal RKPD dengan rancangan RENJA SKPD yang telah mendapatkan konfirmasi dan review dari setiap SKPD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan dalam melaksanakan tugas, kegiatan dan program di bidang pembangunan di Kabupaten Karimun selama ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun berpedoman dan mengacu kepada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
3. Peraturan Bupati Karimun Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati KArimun Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memilih prioritas salah satunya adalah meningkatkan jumlah Desa Berkembang, Maju dan Mandiri di Indonesia sementara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun memprioritaskan peningkatan jumlah desa berkembang menjadi maju dan peningkatan jumlah desa maju menjadi desa mandiri. Dan disisi lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun

juga melaksanakan Program dan Kegiatan yang sama dalam rangka mendukung pembangunan nasional terkait Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Penataan dan Penyelenggaraan Administrasi Desa serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Dan disepakati bersama dalam Rapat Kordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PMD

Rendahnya pendapatan Masyarakat Desa di Kabupaten Karimun, menjadi isu strategis (Indikator Kinerja Utama) dalam penetapan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan Indeks Desa Membangun yang dalam hal ini dapat diasumsikan jika Indeks Desa Membangun Kabupaten Karimun meningkat maka Indeks Ketahan Ekonomi Kabupaten Karimun dapat meningkat yang dalam hal ini juga tentu dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Dengan susunan organisasi, tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun, maka rumusan tujuan dan sasaran yang terdapat pada RENSTRA Tahun 2021-2026. Perubahan tersebut mempengaruhi rumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Berikut merupakan rumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (RENJA) atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun:

3.2.1. Tujuan

1. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
3. Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, bersih dan Akuntabel

3.2.2. Sasaran

1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat menuju kemandirian;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PMD;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa;

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun

Table 3.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	Target 2025
1.	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	PDRB Perkapita	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian	Indeks Desa Membangun	0,7057
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indek Pelayanan Publik (IPP)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PMD	Nilai AKIP Dinas PMD	71,35
3.	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, bersih dan Akuntabel	Nilai LPPD Indek Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	84

Tabel 3.2
MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARIMUN

Table 3.2 Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Misi 3 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Kuat, Kompetitif Dan Berbudaya Berlandaskan Iman Dan Taqwa				
1	Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Meningkatkan Daya Saing Industri Kecil Dan Menengah	➢ Pelaksananan Pengelolaan Industri Kecil Melalui Pendataan, Pembinaan Dan Pelatihan
Misi 5 : Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional Dan Unggul				
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (GOOD GOVERNMENT)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	➢ Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	➢ Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Lebih Baik ➢ Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Desa

3.3. Program dan Kegiatan Dinas PMD Tahun 2025

Dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun menetapkan Program dan kegiatan sebagai berikut:

3.3.1. Program Kerja Tahun 2025

Program–program yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun Tahun 2025 merupakan program yang terkait dengan sasaran dalam dokumen RENSTRA dan usulan langsung dari masyarakat. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan program–program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun program-program yang telah ditetapkan untuk Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
2. Program Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat ;
3. Program Penataan Desa

Selain program dan kegiatan prioritas diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun menyiapkan program-program penunjang sebagai upaya pemantapan dari program- program prioritas tersebut, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Secara lengkap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disajikan dalam tabel berikut:

3.3.2. Perencanan Kegiatan Tahun 2025

Berikut perincian Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun Tahun 2025 dan Prakiraan maju tahun 2026 pada Tabel 3.3 :

Tabel 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN KARIMUN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
I	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINAHAN DESA**	**PERSENTASE DESA YANG MENGELOLA ADMINISTRASI DENGAN BAIK**		95,24	**1.580.000.000**		100	**1.630.000.000**
A	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**		1 Laporan	**1.580.000.000**		1 Laporan	1.630.000.000

1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Karimun	3 Dokumen	550.000.000		3 Dokumen	490.000.000
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Kabupaten Karimun	3 Dokumen	95.000.000		3 Dokumen	100.000.000
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Karimun	42 Dokumen	55.000.000		42 Dokumen	60.000.000
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Karimun	42 Dokumen	55.000.000		42 Dokumen	60.000.000
5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kabupaten Karimun	84 Orang	75.000.000		84 Orang	80.000.000
6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kabupaten Karimun	42 Laporan	60.000.000		42 Laporan	65.000.000

7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kabupaten Karimun	42 Dokumen	170.000.000		42 Dokumen	175.000.000
8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kabupaten Karimun	42 Dokumen	85.000.000		42 Dokumen	90.000.000
9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Karimun	-	-		-	-
10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kabupaten Karimun	25 Laporan	45.000.000		26 Laporan	55.000.000
11	Fasilitasi Penyusunan Profi Desa	Jumlah Dokumen Profi Desa	Kabupaten Karimun	42 Dokumen	65.000.000		42 Dokumen	75.000.000

12	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Karimun	8 Dokumen	55.000.000		10 Dokumen	65.000.000
13	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kabupaten Karimun	84 Orang	80.000.000		84 Orang	90.000.000
14	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Karimun	9 Desa	55.000.000		9 Desa	70.000.000
15	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kabupaten Karimun	42 Laporan	50.000.000		42 Laporan	60.000.000
16	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Karimun	71 Dokumen	85.000.000		71 Dokumen	95.000.000
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA**	**PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN**		**22,08**	**685.000.000**		**34,35**	**561.000.000**

	KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**YANG DI BINA**						
A	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ysng bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Derah Adat Tingkat Derah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakart Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina**	**Kabupaten Karimun**	**189 Lembaga**	**685.000.000**		295	561.000.000
1	Fasilitasi Penataan,Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	Kabupaten Karimun	12 Dokumen	85.000.000		-	-

	Masyarakat Hukum Adat	Taruna,Lembaga AdatDesa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT, RW, PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Karimun	166 Lembaga	85.000.000		284 Lembaga	90.000.000
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Karimun	30 Dokumen	85.000.000		30 Dokumen	90.000.000

4	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Karimun	24 Laporan	75.000.000		24 Laporan	80.000.000
5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Karimun	1 Laporan	85.000.000		1 Laporan	90.000.000
6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		84 Dokumen	270.000.000		84 Dokumen	211.000.000
III	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**		**80**	**3.561.366.000**		**80**	**3.703.772.000**

A	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Junlah Dokumen**		**7 Dokumen**	**215.000.000**		**7 Dokumen**	**230.000.000**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Karimun	2 Dokumen -Renja -Renja RB	75.000.000		2 Dokumen -Renja -Renja RB	80.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Karimun	3 Laporan -LAPKIN -Perjanjian Kinerja -Realisasi Perjanjian Kinerja	75.000.000		3 Laporan -LAPKIN -Perjanjian Kinerja -Realisasi Perjanjian Kinerja	80.000.000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Karimun	2 Laporan -Evaluasi Renja -Evaluasi RB	65.000.000		2 Laporan -Evaluasi Renja -Evaluasi RB	70.000.000
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**		**2 Laporan**	**2.380.000.000**		**2 Laporan**	**2.390.000.000**

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Karimun	300 Org/Bln (25 org x 12 Bln)	2.200.000.000		300 Org/Bln (25 org x 12 Bln)	2.200.000.000
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	180.000.000		1 Dokumen	190.000.000
C	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**		**1 Laporan**	**195.000.000**		**1 Laporan**	**210.000.000**
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Karimun	9 Paket	95.000.000		9 Paket	100.000.000
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Karimun	35 Orang	75.000.000		35 Orang	80.000.000
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Kabupaten Karimun	5 Orang	25.000.000		6 Orang	30.000.000

		Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
D	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**		**1 laporan**	**340.966.000**		**1 laporan**	**334.700.000**
1	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	5 Paket	6.500.000		5 Paket	6.700.000
2	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	48 Paket	39.466.000		48 Paket	42.000.000
3	Penyedian Peralaan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Karimun	9 Paket	60.000.000		9 Paket	62.000.000
4	Penyedian Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	9 Paket	37.000.000		9 Paket	40.000.000

5	Penyedian Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Karimun	5 Paket / 47.647 lbr	36.000.000		5 Paket / 47.647 lbr	38.000.000
6	Penyedian bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Karimun	4 Dokumen	45.000.000		4 Dokumen	46.000.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Karimun	12 Laporan	117.000.000		12 Laporan	100.000.000
E	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**		**-**	**-**		**1 Laporan**	**80.000.000**
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Karimun	-	-		4 Unit	80.000.000
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Karimun	-	-		-	-

3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Karimun	-	-		-	-
F	**Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**	Kabupaten Karimun	**1 Laporan**	**345.400.000**		**1 Laporan**	**369.072.000**
1	Penyedian jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Karimun	2 Laporan	3.400.000		2 Laporan	3.500.000
2	Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Karimun	3 Laporan	42.000.000		3 Laporan	45.572.000
3	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	12 Laporan	300.000.000		12 Laporan	320.000.000
G	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**	Kabupaten Karimun	**1 Laporan**	**85.000.000**		**1 Laporan**	**90.000.000**

1	Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Karimun	1 Unit	60.000.000		1 Unit	65.000.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Karimun	30 unit	25.000.000		30 unit	25.000.000
IV	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**PERSENTASE DESA YANG TERTATA DENGAN BAIK**		**47,62**	**74.000.000**		**59,52**	**90.000.000**
A	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah Laporan Penataan desa yang diselenggarakan**	**Kabupaten Karimun**	**1 Laporan**	**74.000.000**		**1 Laporan**	**90.000.000**
2	Pembentukan Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Karimun	1 Desa	37.000.000		1 Desa	45.000.000

3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Kabupaten Karimun	1 Desa	37.000.000		1 Desa	45.000.000
JUMLAH			**5.960.366.000**			**6.049.772.000**		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Karimun namun juga oleh sumber pendanaan lainnya.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

Table 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas PMD Kabupaten Karimun **Tabel 4.1**

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas PMD Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINAHAN DESA**	**PERSENTASE DESA YANG MENGELOLA ADMINISTRASI DENGAN BAIK**		95,24	**1.580.000.000**
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**		1 Laporan	**1.580.000.000**
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Karimun	3 Dokumen	550.000.000
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk	Kabupaten Karimun	3 Dokumen	95.000.000

			Hukum Desa			
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Karimun	42 Dokumen	55.000.000
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Karimun	42 Dokumen	55.000.000
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kabupaten Karimun	84 Orang	75.000.000
		Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kabupaten Karimun	42 Laporan	60.000.000
		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kabupaten Karimun	42 Dokumen	170.000.000
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kabupaten Karimun	42 Dokumen	85.000.000
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan	Kabupaten Karimun	-	-

		Pemberhentian Kepala Desa	Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kabupaten Karimun	25 Laporan	45.000.000
		Fasilitasi Penyusunan Profi Desa	Jumlah Dokumen Profi Desa	Kabupaten Karimun	42 Dokumen	65.000.000
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Karimun	8 Dokumen	55.000.000
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kabupaten Karimun	84 Orang	80.000.000
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Karimun	9 Desa	55.000.000
		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kabupaten Karimun	42 Laporan	50.000.000
		Fasilitasi Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil	Kabupaten	71 Dokumen	85.000.000

		Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Karimun		
		PROGRAM PENATAAN DESA	**PERSENTASE DESA YANG TERTATA DENGAN BAIK**		**47,62**	**74.000.000**
		Penyelenggaraan Penataan Desa	**Jumlah Laporan Penataan desa yang diselenggarakan**	**Kabupaten Karimun**	**1 Laporan**	**74.000.000**
		Pembentukan Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Karimun	1 Desa	37.000.000
		Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Kabupaten Karimun	1 Desa	37.000.000
2	**Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Indikator : Indeks Desa Membangun**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG DI BINA**		**22,08**	**685.000.000**

		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ysng bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Derah Adat Tingkat Derah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakart Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina**	**Kabupaten Karimun**	**189 Lembaga**	**685.000.000**
		Fasilitasi Penataan,Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Karimun	12 Dokumen	85.000.000
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT, RW, PKK,Posyandu, LPM, dan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	Kabupaten Karimun	166 Lembaga	85.000.000

		Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Karimun	30 Dokumen	85.000.000
		Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Karimun	24 Laporan	75.000.000
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Karimun	1 Laporan	85.000.000
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak		84 Dokumen	270.000.000

		Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			
3	**Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PMD**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**		**80**	**3.561.366.000**
	Indikator : Nilai AKIP Dinas PMD dan Level Kematangan Manajemen Resiko	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Junlah Dokumen**		**7 Dokumen**	**215.000.000**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Karimun	2 Dokumen -Renja -Renja RB	75.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Karimun	3 Laporan -LAPKIN -Perjanji an Kinerja -Realisasi Perjanjian Kinerja	75.000.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Karimun	2 Laporan -Evaluasi Renja	65.000.000

					-Evaluasi RB	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan**		**2 Laporan**	**2.380.000.000**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Karimun	300 Org/Bln (25 org x 12 Bln)	2.200.000.000
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	180.000.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan**		**1 Laporan**	**195.000.000**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Karimun	9 Paket	95.000.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Karimun	35 Orang	75.000.000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Karimun	5 Orang	25.000.000

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan**		**1 laporan**	**340.966.000**
		Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	5 Paket	6.500.000
		Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	48 Paket	39.466.000
		Penyedian Peralaan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Karimun	9 Paket	60.000.000
		Penyedian Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	9 Paket	37.000.000
		Penyedian Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Karimun	5 Paket / 47.647 lbr	36.000.000
		Penyedian bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Karimun	4 Dokumen	45.000.000

			yang Disediakan			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Karimun	12 Laporan	117.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan**		**-**	**-**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Karimun	-	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Karimun	-	-
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Karimun	-	-
		Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan**	Kabupaten Karimun	**1 Laporan**	**345.400.000**
		Penyedian jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Karimun	2 Laporan	3.400.000
		Penyediaan Jasa Komonikasi,	Jumlah Laporan	Kabupaten	3 Laporan	42.000.000

		Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Karimun		
		Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	12 Laporan	300.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan**	Kabupaten Karimun	**1 Laporan**	**85.000.000**
		Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Karimun	1 Unit	60.000.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Karimun	30 unit	25.000.000

BAB V
P E N U T U P

5.1 Catatatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun Tahun 2025 berkewajiban untuk mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RPJMD, RKPD dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun Tahun 2022 -2026.

5.2 Kaidah- kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan di terbitkannya PERMENDAGRI nomor 86 tahun 2017 dan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021 - 2026, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen RENJA Tahun 2025 ini telah disusun berdasarkan sistematika penulisan sesuai dengan PERMENDAGRI sebagaimana tersebut.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun Tahun 2025 berkewajiban untuk mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RPJMD, RKPD dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun Tahun 2025 selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimu. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun Tahun 2025 juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Karimun serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa khususnya.

Tanjung Balai Karimun, Juli 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KARIMUN

PEMERINTAH KABUPATEN

JACKIE STEWART TOUW,S.STP.,M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19820115 200112 1 003

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2024

RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2025

DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL..... iv

DAFTAR GAMBAR v

KATA PENGANTAR vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Landasan Hukum.....2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Tahun 2023 dan Capaian Renstra perangkat Daerah 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun 24

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun 31

2.4 Rancangan Awal RKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun 35

2.5 Penelahaan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat....48

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARIMUN 49

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 49

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun.....50

3.3 Program Dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun 53

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARIMUN 72

BAB V PENUTUP 85

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Program/Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupate karimun Sampai dengan Desember Tahun 2024 8

Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S.D Tahun 2024 13

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Tahun 2024 30

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Tahun 2025 37

Tabel 2.5 Usulan Program Dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Tahun 2025..... 48

Tabel 3.1 Tujuan Dan Sasaran Strategis Pada Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 53

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Tahun 2025 59

Tabel 4.1 Rencana Program Dan Kegiatan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Tahun 2025 73

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Tahun 2025..... 29

KATA PENGANTAR

Puji syukur ini kami panjatkan Kepada ALLAH Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dah hidayahnya serta inspirasi sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah untuk tahun 2025 telah selesai disusun sebagaimana yang telah diamanatkan pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2024 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap pemerintah daerah diwajibkan menyusun rencana kerja yang dihimpun dari masing – masing satuan kerja perangkat daerah yang ada dilingkungan pemerintah daerah kabupaten karimun.

Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun diberi tugas dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dan Darat, dengan merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya dan mempersiapkan program dan kegiatan– kegiatan serta melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing– masing yang ada pada Dinas Perhubungan.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun tahun 2025 ini dibuat Semoga dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun tepat sasaran dan dapat lebih meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dan Darat yang memadai yang akan memberikan dampak luas bagi masyarakat serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan memberi kenyamanan bagi masyarakat disektor perhubungan Laut dan Darat Kabupaten Karimun.

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARIMUN

SYAHIMI, S.Sos,M.Si
Pembina Tk.I /(IV.b)
NIP. 196904121989081003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rancangan Renja Perangkat Daerah dan dokumen Renja yang definitif.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 Tetang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara No. 4421);
2. UU Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara No.4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4849;
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
5. UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lallu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Negara Republik Indonesia 5070;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Sumber Daya

Manusia Bidang Transportasi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 No.82, Tambahan Lembaran Negara No. 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 2015 Tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Perhubungan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Cara Pengangkatan Kendaraan Diatas Kapal;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2017 Tentang Kewajiban Pelayanan Angkutan Penyeberangan Jarak Jauh;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negari No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2018 Tentang

Penyelenggaraan Perparkiran;

20. Peraturan Kabupaten Karimun Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Taun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karimun Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Taun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 64);

24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);

25. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Sub Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

26. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025;

27. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024;

28. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024;

29. Peraturan Bupati Karimun Nomor 78 Tahun 2020 Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja OPD untuk Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, adalah sebagaiberikut:

1. Menjabarkan Rencana Kerja Dinas Perhubungan jangka pendek 1 (Satu) Tahun untuk Tahun 2025.
2. Merumuskan tujuan, sararan, program dan kegiatan Dinas Perhubungan dengan mengacu pada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu – isu penting terkait penyelenggaraan tugas dalam pembangunan daerah.
3. Menyelaraskan rencana strategis kabupaten dengan pelayanan perangkat daerah, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis OPD.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan dalam jangka 1 (satu) tahun.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Perhubungan dalam jangka 1 (Satu) tahun.
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan

1.4 SISTEMATIK PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 disusun ke dalam bab – bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Rumusan tentang Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Maksud dan Tujuan, Proses dan Sistematika Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Tahun 2025.

1.1 Latar Belakang.

1.2 Landasan Hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan.

1.4 Sistematika Penyusunan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan.

1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu.
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun.
4. Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2025 dan memuat Program Utama dan Kegiatan Prioritas Dinas Perhubungan.

1.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun

1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Dokumen Perencanaan Tahunan yang Mmemuat Program, Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan .

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Tahun 2021 — 2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun melaksanakan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintah di Bidang Perhubungan, yang terdiri dari 3 (Tiga) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 28 (Dua Puluh Delapan) Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Tahun 2024, pelaksanaan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) sampai dengan Bulan Desember 2024 dialokasikan sebesar Rp7.322.173.613,00 dan terealisasi sebesar Rp6.937.182.555,00 (94,74%).

b. Belanja Langsung Perangkat Daerah

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun menerima alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp29.135.102.319,00 (81%) yang dialokasikan untuk pelaksanaan 3 Program dan 14 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100 % dan capaian kinerja keuangan sebesar Rp 4.304.200.631,00 (78,39 %), seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Program / Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun s.d Bulan Desember 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			13.367.263.755,01
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		39.301.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.635.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.666.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.434.085.613,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.322.173.613,00
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	111.912.000,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	120.000.000,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		156.731.971,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.999.200,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.199.187,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.989.584,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.284.000,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.910.000,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.800.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.550.000,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.415.543.000,00
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.415.543.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.334.792.330,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.192.330,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.271.600.000,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.866.809.841,01
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.585.200,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.855.284.641,01
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.940.000,00
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)			1.879.443.600,00
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		136.035.600,00
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	136.035.600,00
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		67.935.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	67.935.000,00
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		768.295.000,00
			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	768.295.000,00
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		907.178.000,00
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daera Kabupaten/Kota	907.178.000,00
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daera Kabupaten/Kota		0

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	0
3.	Program Pengelolaan Pelayaran			25.479.670.000,00
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota		88.717.000,00
			Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	88.717.000,00
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		25.390.953.000,00
			Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.354.760.100,00
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	22.977.992.900,00
			Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	58.200.000,00
JUMLAH				**40.726.377.355,01**

Dari Tabel diatas diketahui bahwa terdapat 3 (Tiga) Program 14 (Empat Belas) kegiatan dan 28 (Dua Puluh Delapan) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 40.726.377.355,01,-** dengan realisasi sebesar Rp. **36.072.284.874,00,-** yang memiliki penyerapan anggaran sekitar 88,94 %, mengingat kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lingkup urusan pemerintah bidang perhubungan sehingga dalam pelaksanaannya selalu menyesuaikan

dengan kebutuhan. Hal ini menunjukan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun pada Tahun Anggaran 2024 telah melakukan efisiensi terhadap anggaran dengan melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan. Uraian realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S.D Tahun 2024 Di Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD S/d Tahun Berjalan	
								Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s.d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=6+8	10=9/4
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**								
2	**15**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**
2	15	1	2.01		Perencanaa,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen*	9 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	66,67%	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
2	15	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2	15	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD S/d Tahun Berjalan	
								Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s.d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=6+8	10=9/4
2	**15**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**
2	**15**	**1**	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	49 Orang	49 Orang	49 Orang	100%	49 Orang	70 Orang	70 Orang
2	**15**	**1**	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2	**15**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**6 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**
2	**15**	**1**	**2.03**	**1**	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2	**22**	**3**	**2.06**		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Jumlah Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**
2	22	3	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	100 Paket	20 Paket	20 Paket	100%	20 Paket	20 Paket	20 Paket
2	22	3	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	100%	15 Paket	15 Paket	15 Paket
2	22	3	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100 Paket	20 Paket	20 Paket	100%	20 Paket	20 Paket	20 Paket
2	22	3	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	50 Paket	10 Paket	10 Paket	100%	10 Paket	10 Paket	10 Paket

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD S/d Tahun Berjalan	
								Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s.d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=6+8	10=9/4
2	22	3	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	100 Paket	20 Paket	20 Paket	100%	20 Paket	20 Paket	20 Paket
2	22	3	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang Disediakan	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	100%	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen
2	22	3	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2	**15**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2	**15**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaa, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD S/d Tahun Berjalan	
								Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s.d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=6+8	10=9/4
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaa, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas dan Operasional Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100%	13 Unit	13 Unit	13 Unit
2	15	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitas	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	10 Unit
2	**15**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten kota**	**100%**	**24,92%**	**24,92%**	**100**	**24,92%**	**0**	**0**
2	**15**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik**	**450 Unit**	**49 Unit**	**49 Unit**	**100%**	**46 Unit**	**0**	**0**
2	**15**	**2**	**2.02**	**2**	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	450 Unit	49 Unit	49 Unit	100%	46 Unit	0	0
2	**15**	**2**	**2.02**	**4**	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang Terehabiltasi dan Terpelihara (Unit)	65 Unit	13 Unit	13 Unit	100%	13 Unit	0	0
2	**15**	**2**	**2.03**		**Pengelola Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah Terminal Tipe C Terkelola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD S/d Tahun Berjalan	
								Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s.d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=6+8	10=9/4
2	**15**	**2**	**2.03**	**1**	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0
2	**15**	**2**	**2.03**	**2**	Pembangunan Gedung Terminal Jumlah gedung terminal yang terbangun	Jumlah gedung terminal yang terbangun	1 Unit	0	0	0	0	0	0
2	**15**	**2**	**2.03**	**3**	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dilakukan	1 Unit	0	0	0	0	0	0
2	**15**	**2**	**2.03**	**4**	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal (fasilitas utama dan pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara	1 Unit	0	0	0	0	0	0
2	**15**	**2**	**2.03**	**5**	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang ditingkatkan kapasitasnya	9 Orang	0	0	0	0	0	0
2	**15**	**2**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan singkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2	**15**	**2**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah Kendaraan Angkutan Laik Jalan**	**10.891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD S/d Tahun Berjalan	
								Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s.d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=6+8	10=9/4
2	**15**	**2**	**2.05**	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	3 Unit	2 Unit	0	0	0	0	0
2	**15**	**2**	**2.05**	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber daya manuasia pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya	8 Orang	2 Orang	0	0	0	0	0
2	**15**	**2**	**2.05**	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar (Unit)	1091	0	0	0	0	0	0
2	**15**	**2**	**2.05**	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor (Dokumen)	1091	0	0	0	0	0	0
2	**15**	**2**	**2.05**	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan/Sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor (Laporan)	1 Laporan	0	0	0	0	0	0
2	15	2	2.05	6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah laporan identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji (Laporan)	2 Laporan	0	0	0	0	0	0
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara (Unit)	3 Unit	0	0	0	0	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD S/d Tahun Berjalan	
								Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s.d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=6+8	10=9/4
2	**15**	**4**	**2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ**	**5 Laporan**	**1 Laporan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	15	2	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi penyelengaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	4 Laporan	1 Laporan	0	0	0	0	0
2	**15**	**4**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas**	**590 Unit**	**340 Unit**	**340 Unit**	**100**	**440 Unit**	**440 Unit**	**440 Unit**
2	15	4	2.06	2	Pengadaan,Pemasangan,Perbaikan, Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Alat Perlengkapan Keselamatan Jalan yang Terpasang	590 Unit	340 Unit	340 Unit	100	440 Unit	440 Unit	440 Unit
2	15	4	2.06	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	1 Laporan	0	0	0	0	0
2	**15**	**4**	**2.07**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas**	**5 Laporan**	**1 Laporan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	15	4	2.07	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang terawasi	5 Laporan	1 Laporan	0	0	0	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD S/d Tahun Berjalan	
								Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s.d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=6+8	10=9/4
2	15	4	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyeleggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	5 Laporan	1 Laporan	0	0	1 Laporan	0	0
2	**15**	**2**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Angkutan Umum**	**15 Unit**	**1 Unit**	**1 Unit**	**100%**	**1 Unit**	**1 Unit**	**100%**
2	15	2	2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	8 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	1 Unit	1 Unit
2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang antar Kota dalam 1 (satu)	5 Laporan	1 Laporan	0	0	1 Laporan	0	0
2	**15**	**2**	**2.11**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah trayek perkotaan yang diterbitkan**	**9 Trayek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**15**	**2**	**2.11**	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten (Dokumen)	Jumlah Dokumen Kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD S/d Tahun Berjalan	
								Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s.d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=6+8	10=9/4
2	**15**	**2**	**2.11**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah trayek perkotaan yang diterbitkan**	**9 Trayek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**15**	**2**	**2.11**	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten (Dokumen)	Jumlah Dokumen Kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0	0
2	**15**	**2**	**2.12**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten**	**Jumlah jaringan trayek perdesaan yang diterbitkan**	**7 Trayek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**15**	**2**	**2.12**	1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	0	0
2	**15**	**2**	**2.14**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Izin yang diterbitkan	13 Izin	1 Izin	0	0	1 Izin	0	0
2	**15**	**2**	**02.14**	**2**	**Kordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD S/d Tahun Berjalan	
								Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s.d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=6+8	10=9/4
2	**15**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Jumlah Orang melalui terminal / pelabuhan pertahun**	**1.371.212 Orang**	**646.436 Orang**	**670.276 Orang**	**104%**	**719.863 Orang**	**1.366.299**	**99,64%**
2	**15**	**3**	**2.06**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Trayek angkutan Laut**	**25 Trayek**	**20 Trayek**	**20 Trayek**	**100**	**20 Trayek**	**0**	**0**
2	15	3	2.06	1	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0	0
2	15	3	2.06	2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 laporan	0	0
2	**15**	**3**	**2.10**		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah dokumen penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD S/d Tahun Berjalan	
								Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s.d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=6+8	10=9/4
2	**15**	**3**	**2.16**		**Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Jumlah Laporan**	**5 Laporan**	**1 Laporan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	15	3	2.16	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan	5 Laporan	0	0	0	0	0	0

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARIMUN

Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun menjalankan tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang mencakup Bidang Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Prasarana Perhubungan dan Angkutan Laut. Seluruh program kerja yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Dinas Perhubungan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Program dan kegiatan dibuat dan dilaksanakan mengikuti prosedur dan petunjuk teknis dari Baperlitbang Kabupaten Karimun dan peraturan serta ketentuan lainnya yang mendukung.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun mempunyai fungsi, sebagai berikut :

a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
b) Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**

   Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perhubungan serta tugas pembantuan.

2. **Sekretariat**

   Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan

penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan Dinas. Sekretariat terdiri atas:

a. Sub Bagian Umum Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, memelihara barang – barang inventaris, serta laporan berkala.

b. Sub Bagian Perencana dan Evaluasi

membantu Sekretaris dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di subbagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

c. Sub Bagian Keuangan dan Asset

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi keuangan dan aset, meliputi penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan.

d. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Kepala Bidang mempunyai tugas pokok Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas, Penyelenggaraan Jaringan Transortasi Jalan, Perlengkapan Jalan, Fasilitas Lalu Lintas, Pengeluaran/Pengawasan Lalu Lintas serta menyelenggarakan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Bidang Lalu Lintas terdiri atas :

a. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Mempunyai tugas menyiapkan perencanaan

pengaturan lalu lintas, kebutuhan, pengadaan, penempatan, dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan alat pemberi isyarat lalu lintas dijalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional ibukota kabupaten.

b. Kepala Seksi Keselamatan, Pengendalian, dan Pengawasan Lalu Lintas Lintas Jalan

Kepala Seksi Keselamatan, Pengendalian, dan Pengawasan Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas penyusunan rencana dan program kerja, melaksanakan pengawasan pengendalian dan pengaturan lalu lintas serta melakukan inventarisasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas.

3. Bidang Angkutan Jalan

Kepala Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja, kebijakan teknis dibidang angkutan darat, sungai, danau dan penyeberangan, terminal transportasi serta memberikan bimbingan keselamatan lalu lintas. Bidang angkutan jalan terdiri atas :

a. Kepala Seksi Angkutan Orang dan Terminal

Kepala seksi angkutan orang dan terminal mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja, kebijakan teknis, angkutan oarang, sungai, danau dan penyeberangan, penetapan jaringan trayek angkutan orang dan penetapan tarif kelas ekonomi.

b. Kepala Seksi Angkutan Barang

Kepala seksi angkutan barang mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja, kebijakan teknis, angkutan barang, penetapan jaringan trayek angkutan barang dan penetapan tarif kelas ekonomi.

4. Kepala Bidang Angkutan Pelayaran

Bidang Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan kordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyiapan penetapan lokasi, pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan pengamanan lalu lintas angkutan laut wilayah kabupaten, pembinaan terhadap asosiasi sub sektor pelabuhan laut ditingkat kabupaten, dan penetapan lintas penyebrangan dalam kabupaten, serta pengendalian operasional lalu lintas angkutan laut, sungai, danau dan penyebrangan. Bidang angkutan pelayaran terdiri atas :

a. Kepala Seksi Badan Usaha Jasa Terkait Angkutan Pelayaran

   Kepala seksi badan usaha jasa terkait agkutan pelayaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksankan pengawasan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan angkutan laut dalam daerah, angkutan sungai, danau dan penyeberangan lintas kabupaten/kota dalam provinsi, angkutan pelayaran rakyat, usaha jasa terkait bongkar muat barang dari pelabuhan ke kapal, jasa pengurusan transportasi (Freight Forwarding)

b. Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut dan Penyeberangan

   Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut dan Penyeberangan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis unjuk kerja sarana dan pengawasan teknis sarana serta keselamatan lalu lintas laut.

5. Kepala Bidang Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan

Kepala Bidang Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan mempunyai tugas membantu bidang pembinaan dan pelayanan jasa perhubungan udara dan menyiapkan bahan penetapan rencana induk pelabuhan, penetapan lokasi, pemberian rekomendasi, penetapan rekomendasi dan penetapan keputusan pelaksanaan pengembangan dan pembangunan pelabuhan penyeberangan antar kabupaten/kota dan pelabuhan pengumpan regional.

a. Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan

Udara

Tugas Pokok Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Udara menetapkan DLKR/DLKP pelabuhan lokal dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

b. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pelabuhan Laut dan Udara

Tugas Pokok Kepala seksi pengendalian dan pengawasan pelabuhan laut dan udara mempunyai tugas melaksnakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhan.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun:

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun

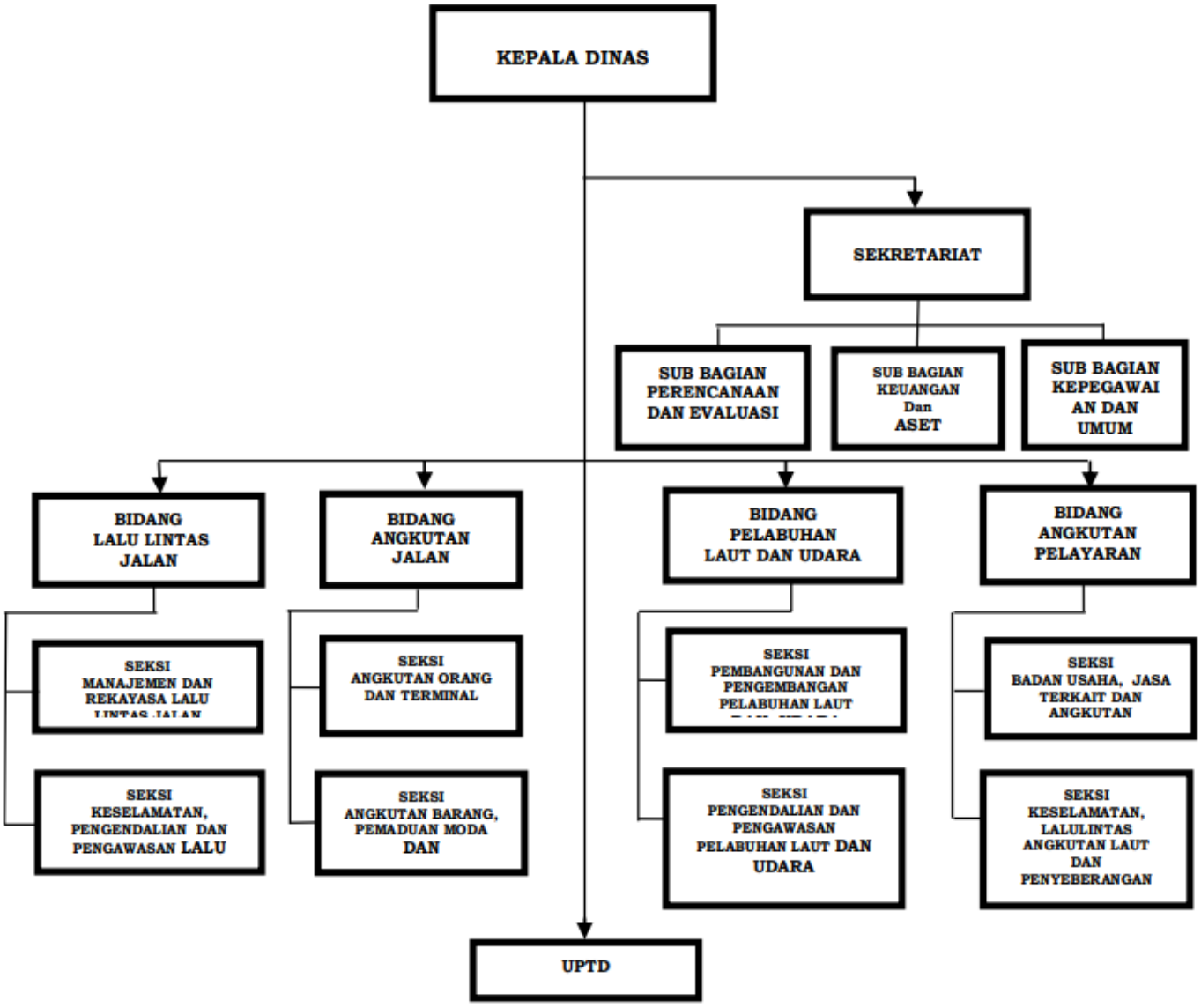

Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM/IKK	TARGET RENSTRA TAHUN KE					CAPAIAN TAHUN 2024	CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026		
1.	RASIO KONEKTIVITAS ANGKUTAN LAUT		0.60	0.63	0.66	0.69	0.71		
2.	RASIO KONEKTIVITAS ANGKUTAN JALAN		0.73	0.80	0.87	0.93	1.00		
3.	RASIO DERMAGA DALAM KONDISI MANTAP		0.87	0.89	0.92	0.94	0.97		
4.	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN DARAT YANG MEMADAI		57.63%	74.58%	83.05%	92%	100%		
5.	NILAI AKIP		80%	80.53%	81%	81.56%	81.56%		

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARIMUN

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan dan, maka dapat dirumuskan isu – isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Perumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Perhubungan.

Permasalahan yang muncul dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk Kabupaten Karimun yang cukup tinggi yaitu sekitar ± 272.391 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 180 Jiwa/Km, Persebaran penduduk di Kabupaten Karimun secara geografis dapat dikatakan belum merata sehingga mengakibatkan penumpukan konsentrasi penduduk pada beberapa wilayah tertentu. Ketidakmerataan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah potensi wilayah yang dimiliki, Pertumbuhan penduduk ini selain dikarenakan adanya fertilitas yang mengalami peningkatan (pertumbuhan penduduk alami), juga didorong oleh aktivitas sosial dan ekonomi yang semakin kompleks dan berkembang pesat di Kabupaten Karimun juga menjadikan salah satu daya tarik (pull factors) bagi sebagian orang untuk mencari penghidupan di Kabupaten Karimun;
2. Perlunya konektivitas antar pulau untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat Konektivitas antar wilayah menjadi konsekuensi wajib sebuah daerah kepulauan, demikian halnya dengan Kabupaten Karimun sebagai wilayah perbatasan dengan gugusan 245 pulau di dalamnya yang dimana terdapat 3 pulau besar yaitu pulau

Karimun,Pulau Kundur dan Pulau Sugi. Keterbatasan transportasi dan komunikasi berdampak pada terbatasnya mobilitas sertakelancaran arus barang dan jasa sehingga mempengaruhi percepatan pencapaian pembangunan dan pemerataan ekonomi masyarakat;

3. Status Kabupaten Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dapat mendorong akselerasi pembangunan ekonomi, Sampai saat ini kabupaten karimun belum memiliki pelabuhan bebas yang baik dan cukup untuk menampung kapal-kapal bertonase besar ;
4. Kecelakaan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhidiantaranya adalah faktor kedisipilinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan sebagainya;
5. Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Karimun seperti marka, rambu, RPPJ dan paku jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan maraknya aksi pencurian dan perusakan;
6. Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.
7. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan di Kabupaten Karimun, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kemudahan konsumen dalam memiliki kendaraan (fasilitas kredit) sementara Pemerintah Daerah kesulitan dalam pembebasan lahan untuk menambah ruas jalan yang baru.
8. Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi, faktor yang mempengaruhinya adalah banyaknya pengguna transoportasi umum yang beralih ke kendaraan pribadi sementara angkutan umum dinilaitidak cukup nyaman. Rendahnya penggunaan kendaraan angkutanumum yang berkapasitas besar, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kondisi angkutan umum massal yang belum memenuhi harapan masyarakat banyak pengguna jasa transportasi.

9. Jaringan jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuaidengan pola distribusi angkutan penumpang, faktor yang mempengaruhinya adalah belum optimalnya pengoperasian terminal penumpang yang ada dan masih kurangnya terminal penumpang yang tersedia yang akan menjadi sentra distribusi orang.
10. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top priority bagi pemangku kebijakan.
11. Masih belum tertatanya tempat parkir di Kabupaten Karimun, beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya menjadi tempat parkir saat ini , adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir.

Perubahan berbagai paradigma tersebut diatas sangatberpengaruh kepada kebijakan, strategi dan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun. Dalam skala regional isu demokratisasi, hak azasi manusia dan lingkungan hidup yang lahir dan tumbuh berkembang di era reformasi perlu diantisipasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun dalam pemberian pelayanan umum yang semakin mempertimbangkan azas keadilan, penyediaan fasilitas pelayanan umum yang memadai, penyediaan prasarana dan sarana transportasi serta penyusunan peraturan perundangan (Perda dan Perbup) yang berkaitan dengan kebijakan publik. Keberanian masyarakatuntuk melakukan protes terbuka terhadap kebijakan publik yang mereka anggap kurang memenuhi azas keadilan, menuntut adanya transparansidalam proses pelayanan dan sosialisasi produk kebijakan publik yang akan diterapkan dalam skala regional, sehingga kebijakan tersebut sesuaidengan aspirasi masyarakat, sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun perlu mengantisipasi berdasarkan pelaksanaan fungsihubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga. Namun demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun senantiasa menerima semua kritikan dan masukan yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan di bidang transportasi.

Demikian pula isu perdagangan bebas yang bercirikan efisiensi dan privatisasi perlu diantisipasi berkenan dengan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun sebagai pelaksana sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Karimun di Bidang transportasi.

Dengan melihat fenomena dan perubahan paradigma diatas, sangat disadari bahwa pengaruh global dan regional serta lokal merupakan landasan bagi terbentuknya lingkungan baru dimasa depan. Dalam kaitan ini profil masa depan yang merupakan refleksi dariberbagai tantangan dan perubahan sebagaimana yang dikemukakandiatas adalah :

1. Terjadinya keterkaitan, keterpaduan dan ketergantungan antara elemen pada semua bidang;
2. Kecenderungan terpolanya lingkungan kerja masa depan yang sekaligus menggambarkan pola antar kegiatan dengan layanan antar moda transportasi yang saling terintegrasi secara kesisteman. Lingkungan kerja masa depan yang terbentuk akibat kemajuan teknologi transportasi akan melahirkan realitas baru, yaitu adanya nuansa keterhubungan global dan mobilitas global antar sub sistem kegiatan;
3. Dalam persaingan global yang semakin tajam akan diwarnai oleh kecanggihan teknologi tranportasi sehingga sektor transportasi akan dihadapkan kepada tuntutan atas kecepatan, keandalan, efisiensi dan daya saing yang semakin tinggi;
4. Sektor transportasi dituntut semakin berperan dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang, barang dan jasa guna mendukung tumbuhnya ekonomi di Kabupaten Karimun serta sekaligus mempersempit kesenjangan antar daerah dengan senantiasa memperhatikan kesesuaian tata ruang dan kelestarian lingkungan;
5. Meningkatnya tuntutan konsumen atau pengguna jasa terhadap kualitas layanan jasa transportasi yang direfleksikan oleh terwujudnya :
    a. Kondisi Persaingan yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan jasa transportasi yang pada gilirannya dapat

memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

b. Pemerataan manfaat persaingan atau kompetensi bagi penggunajasa, penyelenggara serta pemerintah Kabupaten Karimun kepada seluruh lapisan masyarakat.
c. Perlindungan terhadap kepentingan pengguna jasa transportasi, dalam hal kualitas pelayanan, tarif dan variasi pilihan jasa sesuai preferensinya.
d. Peraturan Daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan transportasi secara efektif.

Dengan memperhatikan dalam menyikapi kecenderungan kedepan yang dihadapi, baik oleh jajaran operator maupun pengguna jasa tersebut, diperlukan peran aktif Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan transportasi dalam pengalokasian dan pendayagunaan secara efektif dan efisien.

2.4 RANCANGAN AWAL RKPD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARIMUN

Dalam upaya untuk mewujudkan Kabupaten Karimun sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa yang dilaksanakan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah, dimana Dinas Perhubungan mengemban misi ke 1 (satu) yaitu “Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal.” Misi pembangunan daerah Kabupaten Karimun sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal.
2. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dalam Rangka Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa.
4. Meningkatkan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup.

5. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul.

Dengan Skala Prioritas Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkeadilan Melalui Pemberdayaan UMKM dan Penguatan Ketahanan Pangan.
2. Meningkatkan Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Melalui Penguatan Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Dari hal tersebut diatas, Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Tahun 2024 dapat dilihat pada table 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN						**21.210.000.000,00**							**21.220.000.000,00**	
		2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						**21.210.000.000,00**							**21.220.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**21.210.000.000,00**							**21.220.000.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***1. Indeks Kepuasan Masyarakat*** ***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**80Nilai 80Nilai 80Nilai 80Nilai**			**80 Nilai** **80 Nilai**	**9.937.883.638,00**						**80Nilai 80Nilai 80Nilai 80Nilai**	**10.862.606.000,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen*	-			2 Dokumen	84.000.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kab. Karimun	-	84.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kab. Karimun		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kab. Karimun		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	24.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintah an Inovatif	ASN Kab. Karimun		24.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan*	-			1 Laporan	5.430.052.494,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun	-	5.797.357.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	5.251.252.494,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun		5.618.557.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	178.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun		178.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen*	-			1 Dokumen	150.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun	-	99.624.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun		99.624.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan*	-			1 Laporan	300.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun	-	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				109 Paket	150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen*	-			1 Dokumen	470.858.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun	-	355.646.500,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	7.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun		7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun		4.890.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun		19.898.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	47.100.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun		47.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				26 Dokumen	26.700.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun		26.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	200.058.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun		200.058.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan*	-			1 Laporan	350.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun	-	350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan*	-			1 Laporan	1.715.673.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun	-	1.815.673.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	33.829.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun		33.829.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	700.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	981.844.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun		981.844.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan*	-			1 Laporan	1.437.300.144,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun	-	2.060.304.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	30.464.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun		30.464.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	1.356.836.144,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun		2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kab. Karimun		29.840.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Persentase Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota***	**89,9 Persen**			**89,9 Persen**	**5.392.376.800,00**						**89,9 Persen**	**4.507.394.000,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik*	-			40 Titik	2.777.376.800,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun	-	2.432.394.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				40 Unit	2.377.376.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun		2.032.394.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				13 Unit	400.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Jumlah Terminal Tipe C Terkelola*	-			2 Terminal	1.125.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun, Perusahaan Angkutan Umum, dan SDM ASN	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)				1 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun, Perusahaan Angkutan Umum, dan SDM ASN		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C														
			Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.				2 Orang	25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun, Perusahaan Angkutan Umum, dan SDM ASN		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun, Perusahaan Angkutan Umum, dan SDM ASN		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Jumlah Fasilitas Parkir Tersedia*	-			35 Lahan Parkir	100.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah Pemerataa n Pembang unan Infrast ruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Kendaraan Angkutan Laik Jalan*	-			2559 Kendaraan	225.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun	-	350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Orang	0	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				0 Unit	0	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Manejemen dan Rekayasa Lalu Lintas*	-			540 Laporan	300.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun	-	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas														
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				1 Dokumen	280.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas*	-			1 Laporan	20.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun	-	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin														
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ*	-			1 Laporan	20.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun	-	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Angkutan Umum*	-			1 Unit	800.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun	-	1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun		0	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Unit	780.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA BAGI HASIL	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun		1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Izin yang diterbitkan*	-			1 Izin	25.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun	-	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA BAGI HASIL	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	***Jumlah Orang Melalui Terminal / Pelabuhan Pertahun***	**1.192.358 Orang**			**1.192.358 Orang**	**5.879.739.562,00**						**1.192.358 Orang**	**5.850.000.000,00**	
	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Trayek Angkutan Laut*	-			24 Trayek	75.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun dan Perusahaan Pelayaran Rakyat	-	75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.07.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA BAGI HASIL	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun dan Perusahaan Pelayaran Rakyat		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA BAGI HASIL	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun dan Perusahaan Pelayaran Rakyat		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Jumlah pelabuhan dalam kondisi mantap*	-			3 Unit	5.774.739.562,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun	-	5.745.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA BAGI HASIL	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				3 Unit	4.940.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pembangunan Infastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun		4.940.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				4 Unit	474.739.562,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pembangunan Infastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun		445.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				4 Laporan	20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pembangunan Infastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal														
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia				4 Unit	40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pembangunan Infastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.16	Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Jumlah Laporan*	-			1 Laporan	30.000.000,00			-	Pembangunan Infastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun	-	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.16.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi yang Dilakukan dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pembangunan Infastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infastruktur Wilayah	Masyarakat Kab. Karimun		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	JUMLAH							**21.210.000.000,00**							**21.220.000.000,00**	

2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Program dan kegiatan merupakan cara untuk mendukung arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun dalam menyusun program dan kegiatan hampir 80% berhubungan dengan kepentingan masyarakat, usulan dari masyarakat yang ditampung dalam kegiatan berasal dari musyawah pembangunan (MUSRENBANG) daerah dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota.

Berikut adalah Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat Tahun 2025 di Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan
Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun
Tahun 2025

NO	PPROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARIMUN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam tahun keempat dalam visi dan misi Kabupaten Karimun, Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun yang semulanya melaksanakan urusan pemerintah bidang perhubungan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Taun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2). Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun hanya melaksanakan program yang terkait dengan Urusan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dan Darat yang mana didalamnya melaksanakan pengembangan terhadap Transportasi daerah, yang dapat mendorong upaya meningkatkan kualitas Transportasi sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, kondisi ini sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah *“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”* dimana pembangunan nasional diarahkan pada 10 arah kebijakan, yang meliputi :

1. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Daerah;
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
3. Menjamin Stabilitas Ekonomi Makro;
4. Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
6. Meningkatkan Kualitas Pendidikan;
7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan;
8. Meningkatkan Perlindungan Sosial;
9. Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan;
10. Meningkatkan Kualitas Hukum.

Penjabaran arah kebijakan Pembangunan Nasional tersebut diatas diantaranya yakni:

1. Optimalisasi Pendapatan Negara dengan menjaga iklim Investasi dan Bisnis;
2. Penguatan Belanja negara untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi;
3. Penerapan Ekonomi Hijau;
4. Transformasi Digital;
5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global dan;
6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARIMUN

A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang dapat menggambarkan h asil akhir yang dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan target kualitatif yang dalam penetapannya mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki.

Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan kepemerintahan (performance indicator). Tujuan dapat menggambarkan arah strategi dan perbaikan – perbaikan yang ingin dicapai kedepan untuk lebih mempertajam focus pelaksana misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua program dan kegiatan.

Untuk mewujudkan mencapaian visi dan misi Kabupaten Karimun yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun menetapkan 2 (dua) tujuan untuk tahun 2021 – 2026, yaitu:

1. Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatknya Kualitas Pelayanan Publik

B. SASARAN

Sasaran yang dimaksud disini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik., terukur dalam kurun waktu tertentu, yang merupakan penjabaran dari tujuan. Penetapan sasaran didasari atas isu – isu strategis, analisis lingkungan internal dan eksternal, untuk menentukan faktor kunci keberhasilan sejalan dengan proses perencanaan strategis. Fokus utama dalam menentukan sasaran adalah tindakan, alokasi dana dan sumber daya ke dalam kegiatan, atau operasional untuk pencapaian kinerja yang diinginkan.

Dalam penetapan sasaran juga dirancang dan diidentifikasikan indikator pencapaiannya, yaitu suatu ukuran tingkat keberhasilan perwujudan pencapaiannya pada periode tahun tertentu. Setiap indikator pencapaian sasaran disertai dengan targetnya masing – masing.

Adapun sasaran yang dapat diidentifikasikan untuk diwujudkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun dalam kurun waktu 2021 – 2026 sebagaimana dinyatakan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun dan sasaran yang dapat diidentifikasikan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan dan Kabupaten Karimun Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dan Darat.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD.

C. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja yang dapat diidentifikasikan untuk diwujudkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun dalam kurun waktu 2021 – 2026 sebagaimana dinyatakan dalam Renstra dan sasaran yang dapat diidentifikasikan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan, adalah sebagai berikut:

1. Rasio Konektivitas Angkutan Laut.
2. Rasio Konektivitas Angkutan Darat.
3. Rasio Dermaga dalam Kondisi Mantap.
4. Persentase Sarana dan Prasaran Angkutan Darat yang Memadai.
5. Nilai Akip.

D. TARGET

Adapun target kinerja yang dapat diidentifikasikan untuk diwujudkan oleh Dinas Perhubungan dalam kurun waktu 2021 – 2026 sebagaimana dinyatakan dalam Renstra Dinas Perhubungan yang dapat diidentifikasikan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Rasio Konektivitas Angkutan Laut 0.69.
2. Rasio Konektivitas Angkutan Darat 0.93.
3. Rasio Dermaga dalam Kondisi Mantap 0.94.
4. Persentase Sarana dan Prasaran Angkutan Darat yang Memadai 92%.
5. Nilai Akip 81.56

Untuk lebih detailnya tentang target tujuan kinerja yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Strategis
Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas
Perhubungan Kabupaten Karimun Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Prasarana Penghubung yang Optimal	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dan Darat yang Memadai	1	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	0.69
			2	Rasio Konektivitas Angkutan Darat	0.93
			1	Rasio Dermaga dalam Kondisi Mantap	0.94
			2	Persentase Sarana dan Prasarana Angkutan Darat yang memadai	92%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	1	Nilai AKIP	81.56
			2	Level Kematangan MR Dinas Perhubungan	3

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARIMUN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Pada Tahun 2025 terdiri atas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki Indikator : Capaian SAKIP Perangkat Daerah dan Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  b) Penyediaan Administrasi Tugas ASN
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
  a) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  a) Pengadaan Mebel
  b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  c) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan

c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Program ini memiliki Indikator : Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, yaitu sebuah program dengan tujuan menjamin keamanan, keselamAtan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Perlengkapan Jalan dijalan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
  a) Penyediaan Perlengkapan Jalan diJalan Kabupaten/Kota
  b) Rehabilitasi Perlengkapan Jalan
- Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, dengan Sub Kegiatan:
  a) Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang tipe C
  b) Rehabilitasi Pemeliharaan Terminal
  c) Peningkata Kapasitas SDM Terminal
- Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggara dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan Sub Kegiatan :
  a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
- Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggara dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan Sub Kegiatan :
  a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
- Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor,dengan Sub Kegiatan :
  a) Penyediaan Sarana dan Prasaran Pengujian Berkala Kendaraan Bermtor.

b) Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji.

c) Moonitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

❖ Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

a) Pengadaan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

b) Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.

❖ Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampal Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

a) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin.

❖ Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

b) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota.

❖ Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :

a) Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan Kewenangan Kabupaten/Kota.

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini memiliki Indikator : Jumlah Orang yang melalui terminal dan pelabuhan, yaitu sebuah program dengan tujuan membangun dan memelihara fasilitas pelabuhan / dermaga serta terminal pelabuhan untuk menjamin keamanan, keselamtan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan laut dengan kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :
  a) Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
  b) Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan Sub Kegiatan :
  a) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan Sub Kegiatan :
  a) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.
  b) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal.
  c) Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal.
  d) Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- Kegiatan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk

Pelabuhan Pengumpan Lokaldengan Sub Kegiatan :

a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal.

Tabel 3.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun		SUMBER DANA	Prakiraan Maju Tahun	
					2025			2026	
					Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Prasarana Penghubung yang Optimal				Rasio Kontektivitas Angkutan Laut	0,69			0.71	
				Rasio konektifitas angkutan jalan	0.93			1.00	
	Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dan Darat yang Memadai			Rasio Dermaga dalam kondisi mantap	0.94			0.97	
				Persentase Sarana dan Prasarana Angkutan Darat yang memadai	92%			1.00	
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Orang melalui terminal / pelabuhan pertahun	1.192.358 Orang	5,879,739,562		1.371.212 orang	5,850,000,000
		2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek Angkutan Laut	24 Trayek	75,000,000		25 Trayek	75.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun		SUMBER DANA	Prakiraan Maju Tahun	
					2024			2025	
					Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.15.03.2.06.01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan Disetujuinya pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25,000,000		1 Dokumen	25,000,000
		2.15.03.2.06.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	50,000,000		1 Laporan	50,000,000
		2.15.03.2.10	**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**1 Dokumen**	**150,000,000**		**-**	-
		2.15.03.2.10.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-		-	-
		2.15.03.2.10.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan(DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dokumen)	1 Dokumen	150.000.000		-	-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun		SUMBER DANA	Prakiraan Maju Tahun	
					2025			2026	
					Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.15.03.2.12	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Jumlah pelabuhan dalam kondisi mantap**	**3 Unit**	**5,774,739,562**		**3 Unit**	**5,745,000,000**
		2.15.03.2.12.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2 Dokumen	300,000,000		2 Dokumen	300,000,000
		2.15.03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal (DINAS PERHUBUNGAN)	3 Unit	4,940,000,000		3 Unit	4,940,000,000
		2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	4 Unit	474,739,562		4 Unit	445,000,000
		2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	4 Laporan	20,000,000		4 Laporan	20.000.000
		2.15.03.2.12.05	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	4 Unit	40,000,000		4 Unit	40.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun		SUMBER DANA	Prakiraan Maju Tahun	
					2024			2025	
					Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.15.03.2.16	**Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**1 Laporan**	**30.000.000**		**1 Laporan**	**30.000.000**
		2.15.03.2.16.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal (DINAS PERHUBUNGAN)	1 Laporan	30.000.000		1 Laporan	30.000.000
		2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten kota**	**89.90%**	**5,392,376,800**		**100.00%**	**4,582,394,00**
		2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perlengkapan Jalan Dalam Kondisi Baik**	**40 Unit**	**2,777,376,800**		**34 Unit**	**2,432,394,000**
		2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	40 Unit	2,377,376,800		34 Unit	2,032,394,000
		2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah perlengkapan jalan yang Terehabiltasi dan Terpelihara (Unit)	13 Unit	400,000,000		13 Unit	400,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun		SUMBER DANA	Prakiraan Maju Tahun	
					2025			2026	
					Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah terminal tipe C terkelola**	**2 Bangunan**	**1,125,000,000**		**2 Bangunan**	**1,000,000,000**
		2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	-	-		-	-
		2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terrminal	Jumlah Gedung Terminal Yang Dibangun	-	-		-	-
		2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan	1 Unit	1.000.000.000		1	1,000,000,000
		2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah terminal (fasilitas utama dan pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara	1 Unit	1.00.000.000		1 Unit	100.000.000
		2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Orang	25.000.000		-	-
		2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	Jumlah fasilitas parkir tersedia	**35**	**100.000.000**		**38**	**100.000.000**
		2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	1 Laporan	100.000.000		1 Laporan	100.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025		SUMBER DANA	Prakiraan Maju Tahun 2026	
					Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah Angkutan Laik Jalan**	**2.559**	**225,000,000**		**2814**	**425,000,000**
		2.15.01.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Tersedia	-	-		-	-
		2.15.01.2.05.02	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan Kapasitasnya	-	-		2 Orang	50.000.000
		2.15.01.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)				2.814	50,000,000
		2.15.01.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)				2.814	50,000,000
		2.15.01.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan/Sosialisasi Standar Operasioanal Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	-	-		-	-
		2.15.01.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPengujian Berkala Kendaran Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1 Unit	200,000,000		1 Unit	200,000,000
		2.15.01.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Moonitoring dan Evaluasi Penyelenggraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	25,000,000		1 Laporan	50,000,000
		2.15.02.2.07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas**	**1 Laporan**	**20,000,000**		**-**	**-**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun		SUMBER DANA	Prakiraan Maju Tahun	
					2025			2026	
					Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	**1 Laporan**	**20,000,000**			
		2.15.02.2.08	**Audit dan Inspeksi dan Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ**	**-**	**-**		**1 Laporan**	**20,000,000**
		2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	20,000,000		-	-
		2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas**	**540**	**300,000,000**		**590**	**300,000,000**
		2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Unit)	540 Unit	280.000.000		590 Unit	300.000.000
		2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan Rapat Koordinasi	20.000.000		-	-
		2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Angkutan Umum**	**1 Unit**	**800,000,000**		**1 Unit**	**1.200.000.000**
		2.15.02.2.09.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	780.000.000		3 Unit	1.200.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun		SUMBER DANA	Prakiraan Maju Tahun	
					2025			2026	
					Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.15.02.2.09.2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	20.000.000		-	-
		2.15.02.2.12	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah jaringan trayek perdesaan yang diterbitkan**	**1 Trayek**	**-**		**-**	**-**
		2.15.02.2.12.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Trayek	-		-	-
		2.15.02.02.14	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah yang diterbitkan**	**1 Izin**	**25,000,000**		**1 Izin**	**25,000,000**
		2.15.02.02.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Izin Penyelenggraaan Angkutan orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota(Laporan)	1 Laporan	25,000,000		1 Laporan	25,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun		SUMBER DANA	Prakiraan Maju Tahun	
					2025			2026	
					Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**80%**	**9,937,883,638**		**80%**	**10,862,606,000**
		2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS PERHUBUNGAN)**	**3 Dokumen**	**84,000,000**		**3 Dokumen**	**84,000,000**
		2.15.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	35,000,000		1 Dokumen	35,000,000
		2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi	1 Laporan	25,000,000		1 Laporan	25,000,000
		2.15.01.2.01.03	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	24,000,000		1 Laporan	24,000,000
		2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**5,430,052,494**		**1 Laporan**	**5,797,357,700**
		2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	61 Orang	5,430,052,494		70 Orang	5,618,557,700
		2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	1 Laporan	178,800,000		1 Laporan	178,800,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun		SUMBER DANA	Prakiraan Maju Tahun	
					2025			2026	
					Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**300,000,000**		**1 Laporan**	**300,000,000**
		2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	109 Paket	150,000,000		109 Paket	150,000,000
		2.15.01.2.05.05	Moonitoring Evaluasi, dan Penilaianan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Moonitoring,Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50,000,000		1 Dokumen	50,000,000
		2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	70,000,000		5 Orang	70,000,000
		2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	30,000,000		5 Orang	30,000,000
		2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun**	**Jumlah Dokumen**	**1 Dokumen**	**470,858,000**		**1 Dokumen**	**355,646,500**
		2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pakket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 Paket	7,000,000		20 Paket	7,000,000
		2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	15 Paket	150,000,000		15 Paket	50,000,000
		2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 Paket	15,000,000		20 Paket	4,890,000
		2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 Paket	25.000.000		10 Paket	19,898,500

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun		SUMBER DANA	Prakiraan Maju Tahun	
					2025			2026	
					Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20 Paket	47,100,000		100 Paket	47,100,000
		2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	26 Dokumen	26,700,000		26 Dokumen	26,700,000
		2.15.01.2.06.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200,058,000		1 Laporan	200,058,000
		2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemenrintah Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**350,000,000**		**1 Laporan**	**350,000,000**
		2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	200,000,000		1 Unit	200,000,000
		2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10 Unit	100,000,000		10 Unit	100,000,000
		2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 Unit	50,000,000		10 Unit	50,000,000
		2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah (Daerah Dinas Perhubungan)**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**1,715,673,000**		**1 Laporan**	**1,815,673,000**
		2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	33,829,000		1 Laporan	33,829,000
		2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	700,000,000		1 Laporan	800,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun		SUMBER DANA	Prakiraan Maju Tahun	
					2025			2026	
					Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	981,844,000		1 Laporan	981,844,000
		2.15.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**1 Laporan**	**150,000,000**		**1 Laporan**	**99,624,800**
		2.15.01.2.03.03	Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	150,000,000		1 Laporan	99,624,800
		2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**1,437,300,144**		**1 Laporan**	**2,060,304,000**
		2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	1 Unit	30,464,000		1 Unit	30,464,000
		2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operaional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	1,356,836,144		13 Unit	2,000,000,000
		2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 Unit	50,000,000		10 Unit	29,840,000
				Jumlah Keseluruhan		**21,210,246,000**			**21,259,000,000**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERHUBUNGAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun		SUMBER DANA	Prakiraan Maju Tahun	
					2025			2026	
					Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Prasarana Penghubung yang Optimal				Rasio Kontektivitas Angkutan Laut	0,69		PAD	0.71	
				Rasio konektifitas angkutan jalan	0.93		PAD	1.00	
	Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dan Darat yang Memadai			Rasio Dermaga dalam kondisi mantap	0.94		PAD	0.97	
				Persentase Sarana dan Prasarana Angkutan Darat yang memadai	92%		PAD	1.00	
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Orang melalui terminal / pelabuhan pertahun	1.192.358 Orang	5,879,739,562	PAD, APBN	1.371.212 orang	5,850,000,000
		2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek Angkutan Laut	24 Trayek	75,000,000	PAD	25 Trayek	75.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun		SUMBER DANA	Prakiraan Maju Tahun	
					2024			2025	
					Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.15.03.2.06.01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan Disetujuinya pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25,000,000	**PAD**	1 Dokumen	25,000,000
		2.15.03.2.06.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	50,000,000	**PAD**	1 Laporan	50,000,000
		2.15.03.2.10	**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**1 Dokumen**	**150,000,000**	**PAD**	**-**	-
		2.15.03.2.10.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	**PAD**	-	-
		2.15.03.2.10.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan(DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dokumen)	1 Dokumen	150.000.000	**PAD**	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun		SUMBER DANA	Prakiraan Maju Tahun	
					2025			2026	
					Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.15.03.2.12	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Jumlah pelabuhan dalam kondisi mantap**	**3 Unit**	**5,774,739,562**	**PAD**	**3 Unit**	**5,745,000,000**
		2.15.03.2.12.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2 Dokumen	300,000,000	**PAD**	2 Dokumen	300,000,000
		2.15.03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal (DINAS PERHUBUNGAN)	3 Unit	4,940,000,000	**PAD**	3 Unit	4,940,000,000
		2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	4 Unit	474,739,562	**PAD**	4 Unit	445,000,000
		2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	4 Laporan	20,000,000	**PAD**	4 Laporan	20.000.000
		2.15.03.2.12.05	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	4 Unit	40,000,000	**PAD**	4 Unit	40.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun		SUMBER DANA	Prakiraan Maju Tahun	
					2024			2025	
					Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.15.03.2.16	**Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**1 Laporan**	**30.000.000**	**PAD**	**1 Laporan**	**30.000.000**
		2.15.03.2.16.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal (DINAS PERHUBUNGAN)	1 Laporan	30.000.000	**PAD**	1 Laporan	30.000.000
		2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten kota**	**89.90%**	**5,392,376,800**	**PAD**	**100.00%**	**4,582,394,00**
		2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perlengkapan Jalan Dalam Kondisi Baik**	**40 Unit**	**2,777,376,800**	**PAD**	**34 Unit**	**2,432,394,000**
		2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	40 Unit	2,377,376,800	**PAD**	34 Unit	2,032,394,000
		2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah perlengkapan jalan yang Terehabiltasi dan Terpelihara (Unit)	13 Unit	400,000,000	**PAD**	13 Unit	400,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun		SUMBER DANA	Prakiraan Maju Tahun	
					2025			2026	
					Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah terminal tipe C terkelola**	**2 Bangunan**	**1,125,000,000**	**PAD**	**2 Bangunan**	**1,000,000,000**
		2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	-	-	**PAD**	-	-
		2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terrminal	Jumlah Gedung Terminal Yang Dibangun	-	-	**PAD**	-	-
		2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan	1 Unit	1.000.000.000	**PAD**	1	1,000,000,000
		2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah terminal (fasilitas utama dan pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara	1 Unit	1.00.000.000	**PAD**	1 Unit	100.000.000
		2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Orang	25.000.000	**PAD**	-	-
		2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	Jumlah fasilitas parkir tersedia	**35**	**100.000.000**	**PAD**	**38**	**100.000.000**
		2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	1 Laporan	100.000.000	**PAD**	1 Laporan	100.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025		SUMBER DANA	Prakiraan Maju Tahun 2026	
					Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah Angkutan Laik Jalan**	**2.559**	**225,000,000**		**2814**	**425,000,000**
		2.15.01.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Tersedia	-	-	**PAD**	-	-
		2.15.01.2.05.02	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	**PAD**	2 Orang	50.000.000
		2.15.01.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)			**PAD**	2.814	50,000,000
		2.15.01.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)			**PAD**	2.814	50,000,000
		2.15.01.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan/Sosialisasi Standar Operasioanal Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	-	-	**PAD**	-	-
		2.15.01.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPengujian Berkala Kendaran Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1 Unit	200,000,000	**PAD**	1 Unit	200,000,000
		2.15.01.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Moonitoring dan Evaluasi Penyelenggraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	25,000,000	**PAD**	1 Laporan	50,000,000
		2.15.02.2.07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas**	**1 Laporan**	**20,000,000**	**PAD**	**-**	**-**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025		SUMBER DANA	Prakiraan Maju Tahun 2026	
					Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	**1 Laporan**	**20,000,000**	**PAD**		
		2.15.02.2.08	**Audit dan Inspeksi dan Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ**	**-**	**-**	**PAD**	**1 Laporan**	**20,000,000**
		2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	20,000,000	**PAD**	-	-
		2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas**	**540**	**300,000,000**	**PAD**	**590**	**300,000,000**
		2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Unit)	540 Unit	280.000.000	**PAD**	590 Unit	300.000.000
		2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan Rapat Koordinasi	20.000.000	**PAD**	-	-
		2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Angkutan Umum**	**1 Unit**	**800,000,000**	**PAD**	**1 Unit**	**1.200.000.000**
		2.15.02.2.09.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	780.000.000	**PAD**	3 Unit	1.200.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun		SUMBER DANA	Prakiraan Maju Tahun	
					2025			2026	
					Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.15.02.2.09.2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	20.000.000	**PAD**	-	-
		2.15.02.2.12	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah jaringan trayek perdesaan yang diterbitkan**	**1 Trayek**	**-**	**PAD**	**-**	**-**
		2.15.02.2.12.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Trayek	-	**PAD**	-	-
		2.15.02.02.14	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah yang diterbitkan**	**1 Izin**	**25,000,000**	**PAD**	**1 Izin**	**25,000,000**
		2.15.02.02.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Izin Penyelenggraaan Angkutan orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota(Laporan)	1 Laporan	25,000,000	**PAD**	1 Laporan	25,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun		SUMBER DANA	Prakiraan Maju Tahun	
					2025			2026	
					Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**80%**	**9,937,883,638**	**PAD, APBN**	**80%**	**10,862,606,000**
		2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS PERHUBUNGAN)**	**3 Dokumen**	**84,000,000**	**PAD**	**3 Dokumen**	**84,000,000**
		2.15.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	35,000,000	**PAD**	1 Dokumen	35,000,000
		2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi	1 Laporan	25,000,000	**PAD**	1 Laporan	25,000,000
		2.15.01.2.01.03	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	24,000,000	**PAD**	1 Laporan	24,000,000
		2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**5,430,052,494**	**PAD, DAU**	**1 Laporan**	**5,797,357,700**
		2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	61 Orang	5,430,052,494	DAU	70 Orang	5,618,557,700
		2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (DINAS PERHUBUNGAN)	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	1 Laporan	178,800,000	PAD	1 Laporan	178,800,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun		SUMBER DANA	Prakiraan Maju Tahun	
					2025			2026	
					Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**300,000,000**	**PAD**	**1 Laporan**	**300,000,000**
		2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	109 Paket	150,000,000	**PAD**	109 Paket	150,000,000
		2.15.01.2.05.05	Moonitoring Evaluasi, dan Penilaianan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Moonitoring,Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50,000,000	**PAD**	1 Dokumen	50,000,000
		2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	70,000,000	**PAD**	5 Orang	70,000,000
		2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	30,000,000	**PAD**	5 Orang	30,000,000
		2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun**	**Jumlah Dokumen**	**1 Dokumen**	**470,858,000**	**PAD**	**1 Dokumen**	**355,646,500**
		2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pakket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 Paket	7,000,000	**PAD**	20 Paket	7,000,000
		2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	15 Paket	150,000,000	**PAD**	15 Paket	50,000,000
		2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 Paket	15,000,000	**PAD**	20 Paket	4,890,000
		2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 Paket	25.000.000	**PAD**	10 Paket	19,898,500

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun		SUMBER DANA	Prakiraan Maju Tahun	
					2025			2026	
					Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20 Paket	47,100,000	**PAD**	100 Paket	47,100,000
		2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	26 Dokumen	26,700,000	**PAD**	26 Dokumen	26,700,000
		2.15.01.2.06.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200,058,000	**PAD**	1 Laporan	200,058,000
		2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemenrintah Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**350,000,000**	**PAD**	**1 Laporan**	**350,000,000**
		2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	200,000,000	**PAD**	1 Unit	200,000,000
		2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10 Unit	100,000,000	**PAD**	10 Unit	100,000,000
		2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 Unit	50,000,000	**PAD**	10 Unit	50,000,000
		2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah (Daerah Dinas Perhubungan)**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**1,715,673,000**	**PAD**	**1 Laporan**	**1,815,673,000**
		2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	33,829,000	**PAD**	1 Laporan	33,829,000
		2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	700,000,000	**PAD**	1 Laporan	800,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun		Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun	
					2025			2026	
					Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	981,844,000	**PAD**	1 Laporan	981,844,000
		2.15.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**1 Laporan**	**150,000,000**	**PAD**	**1 Laporan**	**99,624,800**
		2.15.01.2.03.03	Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	150,000,000	**PAD**	1 Laporan	99,624,800
		2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**1,437,300,144**	**PAD**	**1 Laporan**	**2,060,304,000**
		2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	1 Unit	30,464,000	**PAD**	1 Unit	30,464,000
		2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operaional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	1,356,836,144	**PAD**	13 Unit	2,000,000,000
		2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 Unit	50,000,000	**PAD**	10 Unit	29,840,000
				Jumlah Keseluruhan		**21,210,246,000**			**21,259,000,000**

BAB V
PENUTUP

Rencana kerja (Renja) awal Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Tahun 2021–2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karimun serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Rencana Kerja Awal Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Awal Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Karimun maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, untuk dapat dijadikan acuan dalam penetapan prioritas penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025. Sehingga dapat terwujudnya Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dan Darat yang memadai yang akan memberikan dampak luas bagi masyarakat serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan memberi kenyamanan bagi masyarakat disektor perhubungan Laut dan Darat Kabupaten Karimun.

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARIMUN

SYAHIMI, S.Sos,M.Si
Pembina Tk.I /(IV.b)
NIP. 196904121989081003

RENCANA KERJA (RENJA)

Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2025
Alamat : Jl.Jend. Sudirman Kawasan Perkantoran Gedung Gunung Sugie Lt. 1
Email : dishubkabkarimun@gmail.com
Website : https://dishub.karimunkab.go.id

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KARIMUN

TAHUN 2025

BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah (PD) melakukan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025;

b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan antar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klafisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);
21. Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 46);
23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);
24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 99 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 99);
25. Peraturan Bupati Karimun Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 45);
26. Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
RENCANA KERJA (RENJA)

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :
   a. pendahuluan;
   b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
   c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
   d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
   e. penutup.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta harus berpedoman dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
(3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya.
(4) Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 8 Juli 2024

BUPATI KARIMUN,

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024 NOMOR 34

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelengaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara terintegrasi dengan dokumen – dokumen perencanaan lainnya, mulai dari tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar terdapat koordinasi dan sinkronisasi berbagai program/kegiatan baik di pusat maupun di daerah dan pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat Kabupaten Karimun.

Selanjutnya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, program/kegiatan Pemerintah Daerah akan dijabarkan dalam RKPD, dan keberadaan RKPD tersebut akan dijadikan acuan bagi OPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003, maka penjabaran RPJMD dan RKPD untuk setiap tahunnya juga akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Karimun.

I.2 Landasan Hukum

Landasan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimanan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Aset Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);
24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 34).

I.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan OPD, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya pembangunan daerah.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, Kabupaten Karimun dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025.
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun.
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

I.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika Rancangan Awal Rencana Kerja DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang
I.2 Landasan Hukum
I.3 Maksud dan Tujuan
I.4 Sistematika Penyusunan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD

II.4 Review Terhadap Rancangan awal OPD

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KARIMUN

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

III.3. Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KARIMUN

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun pada tahun 2023, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Salah satunya Peningkatan Nilai Indeks SPBE yang merupakan Indikator Kinerja Utama di Dinas Komunikasi Infromatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun.

Jika dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026, berdasarkan realisasi program dan kegiatan, hanya sedikit target Renstra yang tidak tercapai. Dikarenakan beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Strategis OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis OPD digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada Tahun 2023 Diskominfo telah melaksanakan 5 (lima) Program yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terdiri dari 4 (empat) program utama dan 1 (satu) program penunjang.

Adapun 4 (empat) Program Utama Diskominfo pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Sedangkan 1 (satu) Program Penunjang adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Analisis terhadap masing-masing program utama tersebut adalah :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 4.517.559.477,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 3.106.589.537,- atau 68,77% dengan rincian Kegiatan yang dilaksanakan Program ini antara lain :

1) Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik dengan target capaian sebesar 2 Dokumen dan realisasi kinerja 2 Dokumen (capaian : 100%).
2) Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan target capaian sebesar 5 Dokumen dan realisasi kinerja 5 Dokumen (capaian: 100%)
3) Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Layanan Hubungan Media dengan target capaian sebesar 50 Layanan dan realisasi kinerja 60 Layanan (capaian : 120%).
4) Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan target capaian sebesar 8 Dokumen dan realisasi kinerja 8 Dokumen (capaian: 100%).

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 1.461.740.365,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 99.913.475,- atau 6,84% dengan rincian Kegiatan yang dilaksanakan Program ini antara lain :

1) Kegiatan : Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE dengan target capaian sebesar 1 Dokumen dan realisasi kinerja 1 Dokumen (capaian : 100%).
2) Kegiatan : Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah dengan target capaian sebesar 1 Unit dan realisasi kinerja 1 Unit (capaian : 100%).

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 143.399.072,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 26.920.200,- atau 18,77% dengan rincian Kegiatan yang dilaksanakan Program ini antara lain :

1) Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan target capaian sebesar 1 Dokumen dan realisasi kinerja 1 Dokumen (capaian : 100%).

4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 96.999.660,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 66.120.594,- atau 68,17% dengan rincian Kegiatan yang dilaksanakan Program ini antara lain :

1) Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan target capaian sebesar 1 Dokumen dan realisasi kinerja 1 Dokumen (capaian : 100%).

Selain didukung dengan 4 (empat) Program Utama, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Diskominfo juga didukung oleh Program Penunjang lainnya, antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 4.408.772.632,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 3.970.677.526,- atau 90,06%. Dengan rincian Kegiatan yang dilaksanakan program ini adalah :

1) Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target capaian sebesar 2 Dokumen dan realisasi kinerja 2 Dokumen (capaian : 100%).
2) Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target capaian sebesar 3 Laporan dan realisasi kinerja 3 Laporan (capaian : 100%).
3) Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target capaian sebesar 2 Laporan dan realisasi kinerja 2 Laporan (capaian : 100%).
4) Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target capaian sebesar 408 orang dan realisasi kinerja 308 orang (capaian : 75,49%).
5) Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Adminsitrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan target capaian sebesar 1 Dokumen dan realisasi kinerja 1 Dokumen (capaian : 100%).
6) Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan target capaian sebesar 1 Orang dan realisasi kinerja 1 orang (capaian : 100%). Namun anggarannya belum terealisasi dikarenakan keterbatasan anggaran dan akan diselesaikan pada tahun 2024.

7) Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 4 Sub Kegiatan antara lain Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator outputnya Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Capaian indikator kegiatanya 100%.
8) Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan antara lain Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator outputnya Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Capaian indikator kegiatanya 100%.
9) Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan antara lain Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator outputnya Jumlah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Capaian indikator kegiatanya 100%.

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023

No.	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2021 s/d 2026)	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output) (Renstra 2021 s/d 2026)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)								Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Anggaran 2023												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										9								I			II			III			IV										
										Renja		APBD Murni		APBD Pergeseran		APBD Perubahan		10			11			12			13										
1	2	3	4	5	6	7		8																						14 = 10+11+12+13		15 = 14/9x 100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18
						K	Rp	K	Rp	K	ol	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**				**52.833.131.320**		**7.904.754.342**		**10.439.226.264**		**10.208.038.317**		**10.366.518.837**		**10.628.471.206**			**893.844.942**			**2.354.338.581**			**2.360.495.029**			**1.661.542.780**		**7.270.221.332**		**68,40**	**0**	**15.174.975.674**		**28,72**	**Diskominfo**
		2 16	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika**				**49.583.131.320**		**7.770.405.728**		**9.739.226.264**		**9.958.038.516**		**10.116.519.036**		**10.388.072.474**			**878.855.014**			**2.295.717.355**			**2.355.794.029**			**1.646.814.140**		**7.177.180.538**		**69,09**	**0**	**14.947.586.266**		**30,15**	**Diskominfo**
1	**Meningkatnya Akuntabilitas**			**Nilai AKIP**		**76,50**	**27.735.131.320**		**3.116.636.595**	**76,30**	**5.571.226.264**	**76,30**	**4.318.721.413**	**76,30**	**4.318.721.413**	**76,30**	**4.408.772.632**			**816.471.817**			**1.208.707.801**			**1.043.490.621**			**902.007.287**	**0**	**3.970.677.526**	**99,85**	**90,06**	**0**	**7.087.314.121**	**0,00**	**25,55**	**Kadis**
		2 16 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**		**80**	**27.735.131.320**	**60**	**3.116.636.595**	**80**	**5.571.226.264**	**80**	**4.318.721.413**	**80**	**4.318.721.413**	**80**	**4.408.772.632**			**816.471.817**			**1.208.707.801**			**1.043.490.621**	**79,88**		**902.007.287**	**79,88**	**3.970.677.526**	**99,85**	**90,06**	**139,88**	**7.087.314.121**	**174,85**	**25,55**	**Sekretariat Diskominfo**
		2 16 01 2 01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**35**	**275.000.000**	**7**	**118.439.155**	**7**	**55.000.000**	**7**	**171.599.389**	**7**	**171.599.389**	**7**	**143.190.389**	**0**	**35**	**6.496.500**	**3**	**45**	**36.680.950**	**1**	**43**	**22.106.500**	**3**	**55**	**15.633.365**	**7**	**80.917.315**	**100,00**	**56,51**	**14**	**199.356.470**	**40,00**		
		2 16 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	100.000.000	2	15.268.040	2	20.000.000	2	41.837.268	2	41.837.268	2	49.317.268	0	0	-	1	35	12.462.000	1	41	7.855.000,00		47	2.356.000,00	2	22.673.000	100,00	45,97	2	37.941.040	20,00	37,94	
		2 16 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	100.000.000	3	83.373.615	3	20.000.000	3	95.311.534	3	95.311.534	3	68.525.534	0	0	-	1	35	19.023.000	0	37	10.500.000,00	2	55	12.051.365,00	3	41.574.365	100,00	60,67	6	124.947.980	40,00	124,95	
		2 16 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	10	75.000.000	2	19.797.500	2	15.000.000	2	34.450.587	2	34.450.587	2	25.347.587	0	38	6.496.500	1	35	5.195.950	0	62	3.751.500,00	1	69	1.226.000,00	2	16.669.950	100,00	65,77	4	36.467.450	40,00	48,62	
		2 16 01 2 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Laporan**	**6**	**16.166.131.320**	**1**	**2.143.144.002**	**1**	**3.233.226.264**	**1**	**3.293.576.373**	**1**	**3.293.576.373**	**1**	**3.348.367.970**	**0**	**30**	**654.713.420**	**0**	**50**	**921.641.015**		**56**	**860.723.571**	**1**	**80**	**703.473.479**	**1**	**3.140.551.485**	**100**	**93,79**	**2**	**5.283.695.487**	**33,33**	**32,68**	
		2 16 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	2040	15.541.131.320	308	2.072.980.002	408	3.108.226.264	408	3.224.136.373	408	3.224.136.373	408	3.263.503.970	77	30	654.713.420	77	50	880.817.015	77	55	840.911.571,00	77	63	703.473.479,00	308	3.079.915.485	75,49	94,37	616	5.152.895.487	30,20	33,16	
		2 16 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	625.000.000	1	70.164.000	1	125.000.000	1	69.440.000	1	69.440.000	1	84.864.000	0	0	-	0	60	40.824.000	1	80	19.812.000,00	0	0	-	1	60.636.000	100,00	71,45	2	130.800.000	40,00	20,93	
		2 16 01 2 05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Laporan**	**1**	**600.000.000**	**0**	**-**	**1**	**100.000.000**	**1**	**20.000.000**	**1**	**20.000.000**	**1**	**10.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**100,00**	**0,00**	**1**	**-**	**100,00**	**0,00**	
		2 16 01 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	Orang	50	600.000.000			10	100.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	1	10.000.000	0	0	-	0	10	-	0	0	-	0	0	-	1	-	100,00	0,00	1	-	2,00	0,00	

No.	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2021 s/d 2026)	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output) (Renstra 2021 s/d 2026)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)								Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Anggaran 2023												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										9								I			II			III			IV										
1	2	3	4	5	6	7		8		Renja		APBD Murni		APBD Pergeseran		APBD Perubahan		10			11			12			13			14 = 10+11+12+13		15 = 14/9x 100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18
						K	Rp	K	Rp	K	ol	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2 16 01 2 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Laporan**	**5**	**4.019.000.000**	**1**	**300.037.324**	**1**	**768.000.000**	**1**	**163.487.449**	**1**	**163.487.449**	**1**	**156.521.449**	**0**	**0**	**15.638.500**		**20**	**44.944.786**		**0**	**5.832.000**	**1**	**51**	**52.434.730**	**1**	**118.850.016**	**100,00**	**75,93**	**2**	**418.887.340**	**40,00**	**10,42**	
		2 16 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	50	250.000.000	9	15.973.000	10	50.000.000	10	9.991.973	10	9.991.973	10	6.655.973	1	20	496.000	2	25	1.663.000	0	26	666.000,00	0	30	666.000,00	3	3.491.000	30,00	52,45	12	19.464.000	24,00	7,79	
		2 16 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100	250.000.000	11	141.369.000	20	50.000.000	20	41.446.275	20	41.446.275	20	41.446.275	0	0	4.171.000	2	20	8.076.000	12	26	2.166.000,00	0	69	13.351.600,00	14	27.764.600	70,00	66,99	25	169.133.600	25,00	67,65	
		2 16 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	75	119.000.000	7	22.014.500	15	18.000.000	15	15.574.780	15	15.574.780	15	15.574.780	0	0	1.614.500	1	25	3.487.500	10	29	1.500.000,00	0	63	3.554.000,00	11	10.156.000	73,33	65,21	18	32.170.500	24,00	27,03	
		2 16 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	3.400.000.000	35	120.680.824	30	650.000.000	30	96.474.421	30	96.474.421	30	92.844.421	0	0	9.357.000	5	25	31.718.286	2	27	1.500.000,00	1	41	34.863.130,00	8	77.438.416	26,67	83,41	43	198.119.240	28,67	5,83	
		2 16 01 2 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Laporan**	**5**	**2.675.000.000**	**1**	**38.000.000**	**1**	**615.000.000**	**1**	**139.598.460**	**1**	**139.598.460**	**1**	**166.582.768**	**1**	**100**	**5.551.397**		**46**	**45.000.000**			**23.032.000**				**1**	**73.583.397**	**100,00**	**44,17**	**2**	**111.583.397**	**40,00**	**4,17**	
		2 16 01 2 07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	6	750.000.000			2	250.000.000	2	40.817.012	2	40.817.012	2	43.312.200	0	0	-	0	0	-	2	36	15.332.000	0	0	-	2	15.332.000	100	35,40					
		2 16 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50	1.600.000.000			10	300.000.000	10	53.781.448	10	53.781.448	10	78.270.568	0	0	5.551.397	1	15	-	5	21	7.700.000	0	0	-	6	13.251.397	60,00	16,93	6	13.251.397	12,00	0,83	
		2 16 01 2 07 09	pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	325.000.000	1	38.000.000	1	65.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	0	0	-	1	100	45.000.000	0	0	-	0	0	-	1	45.000.000	100,00	100,00	2	83.000.000	40,00	25,54	
		2 16 01 2 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Laporan**	**5**	**4.000.000.000**	**1**	**517.016.114**	**1**	**800.000.000**	**1**	**530.459.742**	**1**	**530.459.742**	**1**	**584.110.056**		**30**	**134.072.000**		**57**	**160.441.050**		**83**	**131.796.550**	**1**	**95**	**130.465.713**	**1**	**556.775.313**	**100,00**	**95,32**	**2**	**1.073.791.427**	**40,00**	**26,84**	
		2 16 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	900.000.000	12	29.116.114	12	180.000.000	12	30.299.742	12	30.299.742	12	38.350.056	0	0	3.672.000	6	20	5.601.050	3	35	3.296.550,00	3	51	9.745.713,00	12	22.315.313	100,00	58,19	24	51.431.427	40,00	5,71	
		2 16 01 2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	10	175.000.000			2	35.000.000	2	8.160.000	2	8.160.000	2	8.160.000	0	0	-	1	20	1.360.000		45	2.040.000,00	0	0	2.040.000,00	1	5.440.000	50,00	66,67	1	5.440.000	10,00	3,11	
		2 16 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	2.925.000.000	1	487.900.000	1	585.000.000	1	492.000.000	1	492.000.000	1	537.600.000	0	30	130.400.000		60	153.480.000	1	87	126.460.000,00	0	0	118.680.000,00	1	529.020.000	100,00	98,40	2	1.016.920.000	40,00	34,77	
																												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100,00**	**60,95**		**7.087.314.121**			
																												Predikat Kinerja			**S**					

No.	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2021 s/d 2026)	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output) (Renstra 2021 s/d 2026)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)								Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Anggaran 2023												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7		8		9								I			II			III			IV			14 = 10+11+12+13		15 = 14/9x 100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18
										Renja		APBD Murni		APBD Pergeseran		APBD Perubahan		10			11			12			13											
						K	Rp	K	Rp	K	ol	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			Indeks SPBE		3,4	18.650.000.000	1,58	3.958.074.684	2,5	3.520.000.000	2,5	4.000.320.925	2,5	4.166.301.445	2,5	4.517.559.477			39.091.700			1.057.054.077			1.304.566.408	2,01		705.877.352	2,01	3.106.589.537	80,40	68,77	3,59	7.064.664.221	105,59	37,88	Kadis
		2 16 02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengenai Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah		80%	18.650.000.000	72%	3.958.074.684	58%	3.520.000.000	58%	4.000.320.925	58%	4.166.301.445	58%	4.517.559.477			39.091.700			1.057.054.077		63	1.304.566.408	80%	71	705.877.352	80%	3.106.589.537	137,93	68,77	1,52	7.064.664.221	190,00	37,88	Bidang Pengelolaan Dan Layanan Informasi Publik Dan Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
		2 16 02 2 01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Website Pemerintah Kab. Karimun	Orang	85000	18.650.000.000	26162	3.958.074.684	85000	3.520.000.000	85000	4.000.320.925	85000	4.166.301.445	85000	4.517.559.477		0	39.091.700	2845	30	1.057.054.077		63	1.304.566.408	0	71	705.877.352	2845	3.106.589.537	3,35	68,77	2845	7.064.664.221	3,35	37,88	
		2 16 02 2 01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	14	1.500.000.000	2	188.283.870	2	200.000.000	2	49.999.979	2	49.999.979	2	35.369.979	0	0	6.328.000	1	20	7.251.500		0	-	1	45	10.568.700,00	2	24.148.200	100,00	68,27	4	212.432.070	28,57	14,16	Bidang Pengelolaan Dan Layanan Informasi
		2 16 02 2 01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	10	1.050.000.000	2	290.271.410	2	200.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	10.000.000	0	0	-	0	0	-		0	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00	2	290.271.410	20,00	27,64	Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
		2 16 02 2 01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	25	2.250.000.000	5	943.577.528	5	450.000.000	5	755.098.622	5	874.312.622	5	886.893.572	0	0	-	0	20	119.453.115	2	53	242.868.000,00	3	53	27.026.750,00	5	389.347.865	100,00	43,90	10	1.332.925.393	40,00	59,24	Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
		2 16 02 2 01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	0	-	5	112.118.051	8	-	8	89.933.806	8	89.933.806	8	74.413.106	2	0	8.173.700	1	15	8.813.000	5	9	2.166.000,00	0	19	5.676.500,00	8	24.829.200	100,00	33,37	13	136.947.251	0,00	0,00	Bidang Pengelolaan Dan Layanan Informasi
		2 16 02 2 01 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	50	13.850.000.000	69	2.423.823.825	50	2.670.000.000	50	3.085.288.518	50	3.132.055.038	50	3.510.882.820	0	0	24.590.000	30	35	921.536.462	20	75	1.059.532.408,00	10	90	662.605.402,00	60	2.668.264.272	120,00	76,00	129	5.092.088.097	258,00	36,77	Bidang Pengelolaan Komunikasi
																													Rata-rata Capaian Kinerja (%)		80,40	68,77		7.064.664.221			
																													Predikat Kinerja			S					
3		2 16 03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi		27%	3.198.000.000	21%	695.694.449	27%	648.000.000	27%	1.638.996.178	27%	1.631.496.178	27%	1.461.740.365			23.291.497			29.955.477		3	7.737.000	27%	7	38.929.501	27%	99.913.475	100,00	6,84	27%	795.607.924	1,00	24,88	Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Publik
		2 16 02 2 01	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD, Kelurahan dan Desa yang menggunakan Pusat Data Pemerintah	OPD	109	3.198.000.000	1	695.694.449	10	648.000.000	10	1.638.996.178	10	1.631.496.178	10	1.461.740.365		0	23.291.497		0	29.955.477		3	7.737.000	0	7	38.929.501	0	99.913.475	0,00	6,84	1	795.607.924	0,92	24,88	
		2 16 02 2 01 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	5	1.700.000.000	1	646.444.863	1	350.000.000	1	1.441.301.422	1	1.433.801.422	1	1.266.346.209	0	0	4.323.000	0	10	21.137.477		3	5.202.000,00	1	20	27.893.501,00	1	58.555.978	100,00	4,62	2	705.000.841	40,00	41,47	
		2 16 02 2 01 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	5	1.498.000.000	1	49.249.586	1	298.000.000	1	197.694.756	1	197.694.756	1	195.394.156	0	0	18.968.497	1	15	8.818.000		6	2.535.000,00	0	21	11.036.000,00	1	41.357.497	100,00	21,17	2	90.607.083	40,00	6,05	
																													Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00	6,84		795.607.924			
																													Predikat Kinerja			SR					

No.	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2021 s/d 2026)	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output) (Renstra 2021 s/d 2026)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)								Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Anggaran 2023												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										9								I			II			III			IV										
										Renja		APBD Murni		APBD Pergeseran		APBD Perubahan		10			11			12			13										
1	2	3	4	5	6	7		8																						14 = 10+11+12+13		15 = 14/9x 100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18
						K	Rp	K	Rp	K	ol	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2 20	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**				1.450.000.000		68.850.092		350.000.000		149.999.805		149.999.805		143.399.072			5.484.000			10.882.400		92	2.535.000			8.018.800	0	26.920.200		17,95	0	95.770.292		6,60	
4	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 20 02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.		100%	1.450.000.000	39,53%	68.850.092	70%		70%	149.999.805	70%	149.999.805	70%	143.399.072			5.484.000			10.882.400			2.535.000	70%		8.018.800	70%	26.920.200	100,00	18,77	40,23%	9.870.500	40,23%	0,68	Bidang Statistik Dan Persandian
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.		100%		39,53%		70%		70%		70%		70%										70%			70%		100,00		40,23%		40,23%		
		2 20 02 2 01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Dokumen	13	1.450.000.000	1	68.850.092	7	350.000.000	7	149.999.805	7	149.999.805	7	143.399.072		0	5.484.000		10	10.882.400		92	2.535.000	7	15	8.018.800	7	26.920.200	100,00	18,77	8	95.770.292	61,54	6,60	
		2 20 02 2 01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	5	1.450.000.000	1	68.850.092	1	350.000.000	1	149.999.805	1	149.999.805	1	143.399.072	0	0	5.484.000		10	10.882.400		92	2.535.000,00	1	15	8.018.800,00	1	26.920.200	100,00	18,77	2	95.770.292	40,00	6,60	
																													Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00	18,77		9.870.500			
																													Predikat Kinerja			SR					
		2 21	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**				1.800.000.000		65.498.522		350.000.000		99.999.996		99.999.996		96.999.660			9.505.928			47.738.826	1	44	2.166.000		51	6.709.840	1	66.120.594		66,12	1	131.619.116		7,31	
5	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 21 02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah		80%	1.800.000.000	21,00%	65.498.522	20%	350.000.000	20%	99.999.996	20%	99.999.996	20%	96.999.660			9.505.928			47.738.826		44	2.166.000	21%	51	6.709.840	21%	66.120.594	105,00	68,17	21%	131.619.116	0,26	7,31	Bidang Statistik Dan Persandian
		2 21 02 2 01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase informasi yang diamankan		38%	1.800.000.000	34,14%	65.498.522	25%	350.000.000	25%	99.999.996	25%	99.999.996	25%	96.999.660		0	9.505.928		50	47.738.826		44	2.166.000	50%	51	6.709.840	50%	66.120.594	200,00	68,17	50%	131.619.116	1,32	7,31	
		2 21 02 2 01 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	5	1.800.000.000	1	65.498.522	1	350.000.000	1	99.999.996	1	99.999.996	1	96.999.660	0	0	9.505.928		50	47.738.826	1	44	2.166.000,00	0	51	6.709.840,00	1	66.120.594	100,00	68,17	2	131.619.116	40,00	7,31	
																													Rata-rata Capaian Kinerja (%)		105,00	68,17		131.619.116			
																													Predikat Kinerja			S					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							52.833.131.320		7.904.754.342		10.439.226.264		10.208.038.317		10.366.518.837		10.628.471.206			893.844.942			2.354.338.581							7.270.221.332								
																													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		97,08	44,70					
																													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)			ST	SR				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil serta berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun kedepannya baik pengaruh dari luar maupun dari dalam Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun itu sendiri.

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun dapat dilihat dari indikator yang tercantum dalam tabel II.2 sebagai berikut :

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
2	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
3	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
4	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
5	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	5 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	
6	Jumlah Layanan Hubungan Media	50 Layanan	50 Layanan	50 Layanan	50 Layanan	69 Layanan	60 Layanan	50 Layanan	50 Layanan	
7	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
8	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit	3 Unit	5 Unit	7 Unit	0 Unit	0 Unit	5 Unit	7 Unit	
9	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	
10	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
11	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
12	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	0 Orang	0 Orang	0 Orang	15 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	15 Orang	
13	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
14	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	10 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	

II.2.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja Diskominfo dilakukan dengan mengukur dan membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu. Semakin tinggi capaian realisasi maka kinerja kan semakin baik dan sebaliknya jika capaian realisasi semakin rendah berarti kinerja suatu Organisasi Perangkat Daerah akan semakin buruk. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	1,58
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	76,30

II.2.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel II.4
Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	1,58	2,01	127
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	76,30	0	0

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi dari sasaran program meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik sebesar 2.01. Nilai ini makin meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, hal ini dikarenakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun baru mulai berusaha untuk lebih baik dari sebelumnya dengan segala upaya -upaya yang dilakukan demi mencapainya target yang diinginkan dan melaksanakan implementasi SPBE secara optimal, meskipun masih banyak kekurangan dalam penilaian indeks SPBE tersebut. Sedangkan nilai AKIP OPD belum terealisasi karena belum adanya penilaian kinerja untuk Tahun 2023.

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Analisis isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana lima tahun mendatang Dinas untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identitas isu penting dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu penting ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi.

II.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Tingkat kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun sampai tahun 2023, masih belum dikatakan dapat tercapai semua nya. Hal ini terjadi karena masih sedikitnya dukungan anggaran dari Pemerintah, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta kurangnya SDM yang berkemampuan dalam urusan komunikasi dan informasi, statistik dan persandian.

II.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, dapat dilihat berdasarkan masing-masing urusan yaitu :

a. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informasi

Dalam urusan ini terdiri dari 3 (tiga) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Adapun Permasalahan dan Hambatan yang terjadi pada ketiga Program ini antara lain :

1) Rendahnya SDM yang berkompeten dalam komunikasi dan informatika.
2) Pengelolaan E-Government yang belum optimal.
3) Banyaknya aplikasi pemerintah yang belum terintegrasi dan belum terkelola dengan baik.
4) Fungsi PPID pada setiap OPD yang belum optimal.
5) Rendahnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
6) Belum tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan layanan informasi dan komunikasi publik yang memadai.
7) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan informasi daerah dan komunikasi publik belum optimal.

8) Belum optimalnya pengelolaan layanan monitoring isu publik di media.

b. Urusan Statistik

1) Rendahnya SDM yang berkompeten di bidang Statistik.
2) Belum terbangunnya sistem big data.
3) Belum optimalnya koordinasi antara koordinator, Pembina data dan walidata dalam menjalankan fungsi forum satu data.

c. Urusan Persandian

1) Rendahnya SDM yang berkompeten di bidang Persandian.
2) Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam penyampaian informasi yang bersifat rahasia.
3) Kurangnya peralatan untuk melakukan Tata Kelola Pengamanan Informasi dan Persandian.
4) Belum optimalnya penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

II.3.3. Dampak Terhadap Capaian Pemerintah Pusat dan Daerah

Dampak dari hambatan yang ada pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah tidak tercapainya sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karimun. Sehingga membuat misi yang ditetapkan Kepala Daerah tidak akan tercapai. Selain itu hambatan juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian program Pemerintah Pusat. Hal ini terjadi karena capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian merupakan SPM dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang harus di dukung oleh Pemerintah Daerah.

II.3.4. Tantangan dan Peluang

Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun sebagai berikut:

1. Penggunaan sistem aplikasi dalam menerapkan E-Goverment.
2. Pengelolaan website Pemerintah Kota secara terintegrasi.
3. Penyebaran informasi kepada masyarakat yang transparan dan akuntabel.
4. Kesenjangan kemampuan TIK Masyarakat.
5. Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi.
6. Jaminan keamanan sistem TIK

Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Karimun sebagai berikut:

1. Tersedianya regulasi dari Kemenkominfo RI tentang TIK.
2. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK.
3. Partisispasi masyarakat pada pelatihan di bidang TIK untuk meningkatkan kemampuan SDM.
4. Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat.
5. Penyelenggaraan statistik sektoral.
6. Penerapan fungsi GPR (goverment public relations).

7. Edukasi internet sehat dan aman, kreatif dan produktif.
8. Sarana dan prasarana komunikasi penunjang operasional pemerintah.
9. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

II.3.5 Penentuan Isu-isu Penting

Isu penting merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu penting yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya aplikasi e-goverment yang belum terintegrasi dan belum terkelola dengan baik;
2. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
4. Belum optimalnya penyediaan statistik sektoral;
5. Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam penyampaian informasi yang bersifat rahasia.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintahan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja pendanaan dan perkiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai penyusunan KUA-PPAS Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun.

Rencana awal prioritas pembangunan di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2025 merupakan rumusan kebijakan pembangunan hasil kajian evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam

rentang waktu perencanaan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel II.5 berikut ini:

Tabel II.5
Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Karimun**	**IKM**	**80**	**6.557.000.000,00**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Karimun**	**IKM**	**80**	**4.720.027.880,00**	
1.1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Karimun**	**Jumlah Dokumen**	**7 Dokumen**	**250.000.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Karimun**	**Jumlah Dokumen**	**7 Dokumen**	**34.959.500,00**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Karimun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Karimun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.828.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Karimun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Karimun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	12.389.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Karimun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Karimun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	9.742.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Karimun**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**3.732.000.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Karimun**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**4.129.553.276**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Karimun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	408 Orang	3.462.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Karimun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	408 Orang	4.129.553.276	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Karimun	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	100.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Karimun	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	-	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Karimun	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	100.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Karimun	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	-	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Karimun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	70.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Karimun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	-	
1.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Karimun**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**30.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Karimun**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**-**	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Karimun	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Karimun	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Karimun	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Karimun	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Karimun	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Karimun	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Karimun**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**100.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Karimun**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**-**	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Karimun	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	100.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Karimun	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	-	
1.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Karimun**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**960.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Karimun**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**315.337.500**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Karimun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Karimun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4.077.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Karimun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Karimun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	29.797.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Karimun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Karimun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	15.045.000	
4	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Karimun	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	30.000.000	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Karimun	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	39.546.500	
6	Penyediaan Bahan/Material	Karimun	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	25.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Karimun	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	-	
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Karimun	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	125.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Karimun	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	-	
8	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Karimun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	650.000.000	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Karimun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	226.872.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Karimun**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**675.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Karimun**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**90.000.000**	
1	Pengadaan Mebel	Karimun	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	Pengadaan Mebel	Karimun	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	-	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Karimun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	300.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Karimun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	-	
3	Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Karimun	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	90.000.000	Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Karimun	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	90.000.000	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Karimun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	235.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Karimun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	-	
1.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Karimun**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**810.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Karimun**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**150.177.604**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Karimun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Karimun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	-	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Karimun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	180.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Karimun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	72.137.604	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Karimun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	35.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Karimun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2.040.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Karimun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	585.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Karimun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	76.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Karimun**	**Jumlah Unit**	**1 Unit**	-	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Karimun**	**Jumlah Unit**	**1 Unit**	-	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Karimun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Karimun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	-	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Karimun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Karimun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	-	
2	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Karimun**	**Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengenai Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah**	**58%**	**3.800.000.000**	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Karimun**	**Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengenai Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah**	**58%**	**2.902.223.000**	
2.1	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Karimun**	**Jumlah Pengunjung Website Pemerintah Kab. Karimun**	**85.000 Orang**	**3.800.000.000**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Karimun**	**Jumlah Pengunjung Website Pemerintah Kab. Karimun**	**85.000 Orang**	**2.902.223.000**	
1	Relasi Media	Karimun	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan	50 Laporan	2.300.000.000	Relasi Media	Karimun	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan	50 Laporan	1.192.000.000	
2	Pelayanan Informasi Publik	Karimun	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	8 Permohonan	200.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Karimun	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	8 Permohonan	46.663.000	
3	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Karimun	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah Aspirasi Publik	2 Rekomendasi	350.000.000	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Karimun	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah Aspirasi Publik	2 Rekomendasi	46.661.000	
4	Diseminasi Informasi	Karimun	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah Aspirasi Publik	60%	200.000.000	Diseminasi Informasi	Karimun	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah Aspirasi Publik	60%	459.685.000	
5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Karimun	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media	250.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Karimun	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media	1.157.214.000	
6	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Karimun	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	2 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Karimun	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	2 Dokumen	-	
7	Penyusunan Konten	Karimun	Jumlah Konten Informasi Publik	2 Konten	200.000.000	Penyusunan Konten	Karimun	Jumlah Konten Informasi Publik	2 Konten	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Karimun**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan**	**27%**	**1.700.000.000**	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Karimun**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan**	**27%**	**688.322.200**	
3.1	**Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Karimun**	**Jumlah OPD, Kelurahan dan Desa yang menggunakan Pusat Data Pemerintah**	**27 OPD, Kelurahan dan Desa**	**1.700.000.000**	**Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Karimun**	**Jumlah OPD, Kelurahan dan Desa yang menggunakan Pusat Data Pemerintah**	**27 OPD, Kelurahan dan Desa**	**688.322.200**	
1	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Karimun	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	350.000.000	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Karimun	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	3.000.000	
2	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Karimun	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	350.000.000	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Karimun	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	186.572.000	
3	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Karimun	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	45 Perangkat Daerah	1.000.000.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Karimun	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	45 Perangkat Daerah	498.750.200	
4	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Karimun**	**Persentase Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.**	**88%**	**400.000.000**	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Karimun**	**Persentase Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.**	**88%**	**46.663.825**	
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.	**88%**				**Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.**	**88%**		
4.1	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Karimun**	**Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan**	**11 Survey**	**400.000.000**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Karimun**	**Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan**	**11 Survey**	**46.663.825**	
1	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Karimun	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	58%	400.000.000	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Karimun	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	58%	46.663.825	
5	**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**	**Karimun**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)**	**60%**	**400.000.000**	**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**	**Karimun**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)**	**25%**	**46.664.000**	
5.1	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Karimun**	**Persentase informasi yang diamankan**	**38%**	**400.000.000**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Karimun**	**Persentase informasi yang diamankan**	**30%**	**46.664.000**	
1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Karimun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	400.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Karimun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	46.664.000	

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun menyelenggarakan rangkaian mekanisme perencanaan pembangunan, salah satunya pengembangan infrastruktur e-goverment, pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta memudahkan masyarakat dalam menerima informasi publik secara online.

Melalui forum konsultasi tersebut diharapkan mendapatkan masukan penting yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis, oleh karena itu forum konsultasi dilaksanakan secara terbuka dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademis/perguruan tinggi, LSM dan SKPD di Kota, dari hasil forum konsultasi tersebut, berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan lebih terkait pada pelayanan publik di sektor-sektor pembangunan. Dalam hal ini, usulan dari masyarakat yang melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun tidak ada.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KARIMUN

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional adalah penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun. Maka tujuan pembangunan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ingin dicapai yaitu : Menjadikan bidang Komunikasi dan Informatika sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sektor TIK Nasional beserta ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan tetap menjaga martabat, keamanan nasional, kedaulatan dan kemandirian bangsa.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam periode 2020-2024 yang berkaitan dengan tugas dan pokok fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.
2. Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Dari sasaran-sasaran tersebut maka arah kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penggunaan TIK sebagai pendukung utama sektor strategis nasional. Dalam hal ini kaitannya dengan penyediaan infrastruktur internet publik dan peningkatan sarana dan prasarana TIK untuk masyarakat.

2. Mendorong pemanfaatan TIK sebagai enabler pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan pemberdayaan TIK bagi UMKM, petani dan nelayan. Dalam hal ini memajukan perekonomian masyarakat yang lebih inovatif dan berteknologi tinggi melalui penggunaan sarana dan prasarana TIK.
3. Pengembangan dan pemberdayaan aplikasi e-pemerintahan, e-kesehatan, e-pariwisata, e-logistik, e-pendidikan, dan etransportasi. Hal ini kaitannya dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karimun yang ingin menjadikan Kabupaten Karimun menjadi ***Smart City***.
4. Menyebarluaskan pada publik narasi tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah. Dalam hal ini berkaitan dengan penyampaian berita atau informasi publik mengenai kegiatan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karimun melalui media dan website resmi pemerintah.
5. Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat. Dalam hal ini berkaitan dengan data-data sektoral Pemerintah Kabupaten Karimun yang disusun dalam sebuah dokumen.
6. Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karimun memanfaatkan wadah yang ada di masyarakat melalui pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.

III.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2025 dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Yang berdasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun sebagai berikut :

TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun adalah :

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Dengan indikator yang disusun adalah Penilaian Indeks Pelayanan Publik.

SASARAN

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah tercapai. Maka sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD

Sasaran tersebut diatas memiliki indikator yang digunakan mengukur keberhasilan kinerja OPD. Dan indikator dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Indeks SPBE – Dikeluarkan oleh Kemenpan RB dengan 47 Indikator Penilaian.
2. Nilai AKIP – Perencanaan yang dikeluarkan oleh Permenpan RB.
3. Level Kematangan MR

III.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2025
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE – Dikeluarkan oleh Kemenpan RB dengan 47 Indikator Penilaian	2,5
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP – Perencanaan yang dikeluarkan oleh Permenpan RB	76,30%
		Level Kematangan MR Diskominfo	3

III.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2025, berdasarkan pertimbangan pada pencapaian program nasional, pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun, pencapaian SPM bidang Komunikasi dan Informasi, peningkatan layanan informasi dan komunikasi publik dan pencapaian penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Program dan Kegiatan pada Renja Dinas Kominfo Tahun 2025 mengusulkan sebanyak 5 Program, 11 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1 Sub Kegiatan Relasi Media

1.1.2 Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

1.1.3 Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik

1.1.4 Sub Kegiatan Diseminasi Informasi

1.1.5 Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

1.1.6 Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik

1.1.7 Sub Kegiatan Penyusunan Konten

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

2.1 Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah

2.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE

2.1.3 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

3.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

5.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.1.3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

5.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

5.2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

5.2.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

5.2.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

5.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

5.3.1 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

5.3.2 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

5.3.3 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

5.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

5.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

5.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

5.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

5.5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

5.5.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material

5.5.6 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

5.5.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD

5.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5.6.1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

5.6.2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5.6.3 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

5.6.4 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

5.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

5.7.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.7.4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tabel III.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju		Unit Kerja Penanggungjawab
									Tahun 2025				Tahun 2026		
									Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3					4	5	7	8	9	10	11	12	13
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK								**Indeks Pelayanan Publik**	Karimun	**3.55%**	**12.857.000.000**	APBD	**4,00%**	**13.468.000.000**	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD							**Nilai AKIP**	Karimun	**76,30**	**6.557.000.000**	APBD	**76,30**	**6.557.000.000**	**Sekretariat**
		2	**16**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM**	Karimun	**80**	**6.557.000.000**	APBD	**80**	**6.557.000.000**	**Sekretariat**
		2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	Karimun	**7 Dokumen**	**250.000.000**	APBD	**7 Dokumen**	**250.000.000**	**Sekretariat**
		2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Karimun	2 Dokumen	100.000.000	APBD	2 Dokumen	100.000.000	
		2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Karimun	3 Laporan	100.000.000	APBD	3 Laporan	100.000.000	
		2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Karimun	2 Laporan	50.000.000	APBD	2 Laporan	50.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju		Unit Kerja Penanggungjawab
					Tahun 2025				Tahun 2026		
					Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
		2 16 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	Karimun	**1 laporan**	**3.732.000.000**	APBD	**1 laporan**	**3.732.000.000**	**Sekretariat**
		2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Karimun	408 orang	3.462.000.000	APBD	408 orang	3.462.000.000	
		2 16 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Karimun	1 Dokumen	100.000.000	APBD	1 Dokumen	100.000.000	
		2 16 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Karimun	300 Dokumen	100.000.000	APBD	300 Dokumen	100.000.000	
		2 16 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Karimun	2 laporan	70.000.000	APBD	2 laporan	70.000.000	
		2 16 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**Karimun**	**1 laporan**	**30.000.000**	**APBD**	**1 laporan**	**30.000.000**	**Sekretariat**
		2 16 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Karimun	1 dokumen	10.000.000	APBD	1 dokumen	10.000.000	
		2 16 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Karimun	2 Laporan	10.000.000	APBD	2 Laporan	10.000.000	
		2 16 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Karimun	1 laporan	10.000.000	APBD	1 laporan	10.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju		Unit Kerja Penanggungjawab
					Tahun 2025				Tahun 2026		
					Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
		2 16 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**Karimun**	**1 laporan**	**100.000.000**	**APBD**	**1 laporan**	**100.000.000**	**Sekretariat**
		2 16 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Karimun	65 Paket	100.000.000	APBD	65 Paket	100.000.000	
		2 16 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Karimun	10 Orang	0	APBD	10 Orang	0	
		2 16 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Karimun	2 orang	0	APBD	2 orang	0	
		2 16 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	Karimun	**1 laporan**	**960.000.000**	APBD	**1 laporan**	**960.000.000**	**Sekretariat**
		2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Karimun	10 Paket	50.000.000	APBD	10 Paket	50.000.000	
		2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Karimun	20 Paket	50.000.000	APBD	20 Paket	50.000.000	
		2 16 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Karimun	10 Paket	30.000.000	APBD	10 Paket	30.000.000	
		2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Karimun	15 Paket	30.000.000	APBD	15 Paket	30.000.000	
		2 16 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Karimun	5 Dokumen	0	APBD	5 Dokumen	0	
		2 16 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Karimun	5 Paket	25.000.000	APBD	5 Paket	25.000.000	
		2 16 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Karimun	5 Laporan	125.000.000	APBD	5 Laporan	125.000.000	
		2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Karimun	30 Laporan	650.000.000	APBD	30 Laporan	650.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju		Unit Kerja Penanggungjawab
					Tahun 2025				Tahun 2026		
					Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
		2 16 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**	Karimun	**1 laporan**	**675.000.000**	APBD	**1 laporan**	**675.000.000**	**Sekretariat**
		2 16 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Karimun	2 Uniit	50.000.000	APBD	10 Unit	50.000.000	
		2 16 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Karimun	10 Unit	300.000.000	APBD	10 Unit	300.000.000	
		2 16 01 2.07 09	pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Karimun	1 Unit	90.000.000	APBD	1 Unit	90.000.000	
		2 16 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Karimun	5 Unit	235.000.000	APBD	5 Unit	235.000.000	
		2 16 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan**	Karimun	**1 laporan**	**810.000.000**	APBD	**1 laporan**	**810.000.000**	**Sekretariat**
		2 16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Karimun	6 Laporan	10.000.000	APBD	6 Laporan	10.000.000	
		2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Karimun	12 Laporan	180.000.000	APBD	12 Laporan	180.000.000	
		2 16 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Karimun	2 laporan	35.000.000	APBD	2 laporan	35.000.000	
		2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Karimun	1 Laporan	585.000.000	APBD	1 Laporan	585.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju		Unit Kerja Penanggungjawab
									Tahun 2025				Tahun 2026		
									Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3					4	5	7	8	9	10	11	12	13
		2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit**	Karimun	**1 Unit**	**0**	APBD	**1 laporan**	**0**	**Sekretariat**
		2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Karimun	1 Unit	0	APBD	1 Unit	0	
		2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Karimun	5 Unit	0	APBD	5 Unit	0	
	Meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik							**Indeks SPBE**	Karimun	**3,1**	**6.300.000.000**	APBD	**3,1**	**6.911.000.000**	**Bidang**
		2	**16**	**02**			**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengenai Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah**	Karimun	**58,00%**	**3.800.000.000**	APBD	**58,00%**	**4.361.000.000**	
		2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengunjung Website Pemerintah Kab. Karimun**	Karimun	**85.000 Orang**	**3.800.000.000**	APBD	**85.000 Orang**	**4.361.000.000**	**Bidang Informasi dan Komunikasi**
		2	16	02	2.01	14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Karimun	50 Laporan	2.300.000.000	APBD	50 Laporan	2.611.000.000	
		2	16	02	2.01	17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Karimun	8 Permohonan	200.000.000	APBD	8 Permohonan	250.000.000	
		2	16	02	2.01	19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Karimun	2 Rekomendasi	350.000.000	APBD	2 Rekomendasi	350.000.000	
		2	16	02	2.01	20	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Karimun	60%	200.000.000	APBD	60%	200.000.000	
		2	16	02	2.01	21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Karimun	5 Media	250.000.000	APBD	5 Media	450.000.000	
		2	16	02	2.01	22	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Karimun	2 Dokumen	300.000.000	APBD	2 Dokumen	300.000.000	
		2	16	02	2.01	23	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Karimun	2 Konten	200.000.000	APBD	2 Konten	200.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju		Unit Kerja Penanggungjawab
									Tahun 2025				Tahun 2026		
									Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3					4	5	7	8	9	10	11	12	13
		2	**16**	**03**			**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi**	Karimun	**27,00%**	**1.700.000.000**	APBD	**27,00%**	**1.750.000.000**	
		2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah OPD, Kelurahan dan Desa yang menggunakan Pusat Data Pemerintah**	Karimun	**27 OPD, Kelurahan dan Desa**	**1.700.000.000**	APBD	**27 OPD, Kelurahan dan Desa**	**1.750.000.000**	**Bidang Teknologi**
		2	16	03	2.02	16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Karimun	1 Dokumen	350.000.000	APBD	1 Dokumen	350.000.000	
		2	16	03	2.02	19	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Karimun	1 Dokumen	350.000.000	APBD	1 Dokumen	400.000.000	
		2	16	03	2.02	24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Karimun	45 Perangkat Daerah	1.000.000.000	APBD	45 Perangkat Daerah	1.000.000.000	
		2	**20**	**02**			**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Persentase Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.**	Karimun	**88%**	**400.000.000**	APBD	**88%**	**400.000.000**	**Bidang Statistik**
								Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.	Karimun	**88%**		APBD	**88%**		**Bidang Statistik**
		2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan**	Karimun	**11**	**400.000.000**	APBD	**11**	**400.000.000**	**Bidang Statistik**
		2	20	02	2.01	09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Karimun	58%	400.000.000	APBD	58%	400.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju		Unit Kerja Penanggungjawab
									Tahun 2025				Tahun 2026		
									Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3					4	5	7	8	9	10	11	12	13
		2	**21**	**02**			**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)**	Karimun	**60%**	**400.000.000**	APBD	**60%**	**400.000.000**	**Bidang Persandian**
		2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase informasi yang diamankan**	Karimun	**38%**	**400.000.000**	APBD	**38%**	**400.000.000**	**Bidang Persandian**
		2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Karimun	NA	-	APBD	NA	APBD	
		2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Karimun	1 Laporan	400.000.000	APBD	1 Laporan	400.000.000	
							TOTAL				**12.857.000.000**			**13.468.000.000**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KARIMUN

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembengunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan adanya Rencana Kerja dan Pendanaan OPD. Maka dengan ini Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut ini:

Tabel IV.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Karimun Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator, Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Penanggung Jawab	Lokasi
		Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Program Informasi dan Komunikasi Publik			**2.902.223.000,00**		
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Website Pemerintah Kab. Karimun	85.000 Orang	2.902.223.000,00	Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik dan Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	Karimun
Program Aplikasi Informatika			**688.322.200,00**		
Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD, Kelurahan dan Desa yang menggunakan Pusat Data Pemerintah	27 OPD, Kelurahan dan Desa	688.322.200,00	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik	Karimun
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			**46.663.825,00**		
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	11	46.663.825,00	Bidang Statistik	Karimun

Program dan Kegiatan	Indikator, Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Penanggung Jawab	Lokasi
		Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah			**46.664.000,00**		
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi yang diamankan	30%	46.664.000,00	Bidang Persandian	Karimun
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			**4.720.027.880,00**		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	34.959.500,00	Sekretariat	Karimun
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	1 laporan	4.129.553.276,00	Sekretariat	Karimun
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 laporan	-	Sekretariat	Karimun
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 laporan	-	Sekretariat	Karimun
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi umum perangkat daerah	1 laporan	315.337.500,00	Sekretariat	Karimun
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 laporan	90.000.000,00	Sekretariat	Karimun
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 laporan	150.177.604,00	Sekretariat	Karimun
Total			**8.403.900.905,00**		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan melibatkan banyak para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menciptakan *Good Governance*.

Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun merupakan rencana kerja yang disusun berdasarkan Visi dan Misi dari Kabupaten Karimun yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 yang dalam penyusunannya terdapat usulan-usulan rencana kegiatan yang disesuaikan dengan tupoksi dan sasaran program Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun. Apabila anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk seluruh kegiatan yang tercantum dalam Renja, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk kegiatan-kegiatan yang dianggap penting dan mendesak.

Demikian Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini disusun. Diharapkan Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun dapat digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan dalam satu tahun dan sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun.

Karimun, Januari 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KAB. KARIMUN

Dr. HELMI, S.E, M.SI
NIP. 19720123 199703 1 006

RENJA 2025

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN KARIMUN

Jalan Jend. Sudirman, Komplek Perkantoran Gedung Bukit Gading Lt. II
Telp/Fa : (0777) 7366084 Email : dpkesdm_karimun@yahoo.com
Tanjung Balai Karimun-Kepulauan Riau

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas dan fungsi untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Rencana kerja (Renja) Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja tahun 2025 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2025

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN KARIMUN

BASORI, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19660604 199010 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN..... 4

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud Dan Tujuan..... 8

1.4 Sitematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU 13

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 13

2.1.1 Penetapan Indikator Kinerja..... 13

2.1.1 Capaian Analisis Kinerja..... 13

2.2 Analisis Kerja Pelayanan OPD, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi..... 25

2.2.1 Tugas..... 26

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD..... 42

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi..... 42

2.3.2 Dampaknya Terhadap Pencapaian Program Secara Nasional..... 42

2.3.3 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Organisasi..... 42

2.4 Review Terhadap Hasil Rencana Kerja RKPD..... 43

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 45

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH 46

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 46

3.1.1 Kebijakan Pembangunan Koperasi dan UMKM..... 46

3.1.2 Kebijakan Pembangunan Perdagangan Nasional..... 47

3.1.3 Kebijakan Energi Sumber Daya Mineral..... 49

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 50

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024..... 57

3.4 RENCANA KERJA PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KEGIATAN OPD TAHUN ANGGARAN 2025..... 64

BAB IV PENUTUP 75
4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja..... 75
4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan..... 75
4.3 Rencana Tindak Lanjut..... 76

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1(satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap OPD untuk menyusun RENJA OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun Tahun 2025 dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani / memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun Tahun 2025 dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Rancangan Awal (RANWAL) Rencana Kerja (RENJA) OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Rencana Kinerja OPD Tahun 2025 disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu,partisipatif dan demokratis. Dengan demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun Tahun 2025 mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Kabupaten Karimun, mengingat bahwa :

1. Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program OPD yang ditetapkan

dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
3. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan OPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahunan sebagai wujud dari kinerja OPD pada Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum.

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah:

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Lembaran Negara Reepublik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN - 2 - Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembar Daerah Kabupaten karimun Tahun 2015 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 70);
17. Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 33).

1.3. Maksud dan Tujuan.

Bahwa dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan terhadap Proses Penyelenggaraan Perencanaan di Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai Rencana Tahunan Daerah.

Penyusunan Naskah Renja OPD merupakan acuan dalam merencanakan dan merumuskan Program dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun serta sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu maksud disusunnya Renja Tahun 2025, adalah :

1. Renja merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi dan akan jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.
2. Menyediakan dokumen rencana teknis tahun 2025, sebagai dasar masukkan untuk penyusunan RKPD, KUA dan PPAS dengan menggunakan pendekatan kinerja yang terukur tahun 2025, serta menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja tahun 2025 Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun secara terukur.

Perumusan Renja merupakan jawaban akan perubahan lingkungan srtategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan Renja menjadi sangat penting. Adapun tujuan penyusunan Renja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks dan menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.
2. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik laporan realisasi anggaran triwulanan, tahunan, serta SAKIP dan masukan bagi penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Karimun.

3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertical maupun horizontal antara unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapian tujuan organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan.

Penyusunan Rencana Kerja sebagai gambaran isi dari Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun Tahun 2025 disusun sistematika dengan penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Rancangan Awal (RANWAL) Rencana Kerja (RENJA) OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antaraperencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Rencana Kerja OPD Tahun 2025 disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu,partisipatif dan demokratis.

1.2. Landasan Hukum.

Memuat Penjelasan tentang Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Keputusan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan OPD, serta Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penyusunan OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Naskah Renja OPD merupakan acuan dalam merencanakan dan merumuskan Program dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya

Mineral Kabupaten Karimun serta sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja OPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun. tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target

Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun- tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Subbab ini berisi uraian mengenai:

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;

3) Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian Program Nasional;
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD;
5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Hasil Rencana Kerja RKPD

Melakukan proses pembandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Karimun

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Menjelaskan perubahan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasionalyang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

3.4. RENCANA KERJA PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KEGIATAN OPD TAHUN ANGGARAN 2025

Perumusan program dan kegiatan untuk tahun 2025,

menyesuaikan antara indetifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun

BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun tahun 2021-2026.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rancangan Rencana Kerja tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan public dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif.

BAB II

• HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis dinas. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2024.

2.1.1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*Inputs*), keluaran (*Outputs*), hasil (*Outcomes*), manfaat (*Benefits*) dan dampak (*Impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2.1.2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA) di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun tahun 2024 dan Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja tersebut dibawah ini :

A. Evaluasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun tahun 2024, memperoleh Anggaran Belanja OPD sebesar Rp. **9.622.414.826**,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) yang terbagi atas :

Tabel 2.1

Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun TA. 2024

Kode Rekening	Uraian	Target Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	Persentase Penyerapan Realisasi Keuangan Tahun 2024
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**50.000.000,00**	**79.795.000,00**	**159,59**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**50.000.000,00**	**79.795.000,00**	**159,59**
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**50.000.000,00**	**79.795.000,00**	**159,59**
	JUMLAH PENDAPATAH	**50.000.000,00**	**79.795.000,00**	**159,59**
5	**BELANJA**	**9.622.414.826**	**6.885.588.648**	**71,56**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**9.595.029.826,00**	**6.873.862.648,00**	**71,64**
5.1.01	Belanja Pegawai	**5.569.070.816,00**	**4.342.296.579,00**	**77,97**
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	**3.840.959.010,00**	**2.494.220.378,00**	**64,94**
5.1.04	Belanja Subsidi	85.000.000,00	37.345.691,00	43,94
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	0,00	0,00
5.2	**BELANJA Modal**	**27.385.000,00**	**11.726.000,00**	**42,82**
5.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.385.000,00	11.726.000,00	42,82
	Jumlah Belanja	**9.622.414.826**	**6.885.588.648**	**71,56**

Keseluruhan dana tersebut digunakan untuk menjalankan 9 (Sembilan) Program dan 14 (Empat Belas) kegiatan, 30 (Tiga Puluh) Sub Kegiatan.

B. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau tidak terpenuhinya program / Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Melebihi Target dari Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2024.

Dari hasil Tabel 2.1 diatas, menggambarkan bahwa Target Anggaran Belanja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp.9.622.414.826,- dengan dengan penyerapan realisasi anggaran Per 31 Desember 2024, sebesar Rp.6.885.588.648,- dengan Silpa sebesar Rp.2.736.826.178,- atau persentase penyerapan keuangan 71,56% dengan Realisasi Fisik adalah sebesar 75%.

Hal tersebut dipengaruhi oleh recofusing atau pemangkasan kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dilaksanakan atau adanya kegiatan yang pembayarannya dilakukan penundaan, hal ini dikarenakan tidak tercapainya Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024, yang mana Penerimaan Daerah Kabupaten Karimun sumber Pendapatannya Dana Pemerintah Pusat baik dari Dana Bagi Hasil Pajak Minyak dan Gas Bumi, Pajak Mineral dan Batu Bara, dan lain sebagainya, serta penerimaan daerah yang bersumber dari Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau tidak dapat terealisasi semua, kemudian sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapainya Target Pendapatan Daerah yang bersumber Galian ‘C’ atau Pajak Batu Granite.

Sehubungan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024, melakukan recofusing atau pemangkasan kegiatan dan sub kegiatan yang ada Organisasi Perangkat Daerah, sehingga kegiatan dan sub kegiatan tidak bisa terlaksana dengan sepenuhnya.

TABEL 2.2

CAPAIAN PROGRES KEUANGAN DAN FISIK

LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

TAHUN ANGGARAN 2024 (B12)

Priode Tanggal 01 Januari 2024 s.d Tanggal 31 Desember 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI DESA/ KECAMATAN	VOLUME	TARGET / OUTPUT	JUMLAH DANA	PERKEMBANGAN/REALISASI			SILPA	KET
					RKA	KEUANGAN		FISIK KEGIATAN		
						(RP)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				49.284.000,-	21.542.700,-	43,71	75,00	27.741.300,-	Recofusing

	1	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**49.284.000,-**	**21.542.700,-**	**43,71**	**75,00**	**27.741.300,-**	**Recofusing**
		1	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kabupaten Karimun	64	Unit Usaha	49.284.000,-	21.542.700,-	43,71	75,00	27.741.300,-	Recofusing
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Recofusing**
	2	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Darah Kabupaten/Kota**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Recofusing**
		2	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Karimun	161	Unit Usaha	0	0	0	0	0	Recofusing
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**525.328.000,-**	**62.529.691,-**	**11,90**	**75.00**	**462.798.309,-**	**Recofusing**

	3	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**				**525.328.000,-**	**62.529.691,-**	**11,90**	**75,00**	**462.798.309,-**	**Recofusing**
		3	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kabupaten Karimun	15	Unit Usaha	295.908.000,-	3.616.000,-	1,22	75.00	292.292.000,-	Recofusing
		4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Karimun	10	Unit Usaha	130.000.000,-	43.843.691,-	33,73	75.00	86.156.309,-	Recofusing
		5	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kabupaten Karimun	1	Laporan	99.420.000,-	15.070.000,-	15,16	75,00	84.350.000,-	Recofusing
4		**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**					**232.928.000,-**	**8.014.000,-**	**3.44**	**75,00**	**224.914.000,-**	**Recofusing**

	4	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil```**				**232.928.000,-**	**8.014.000,-**	**3.44**	**75,00**	**224.914.000,-**	**Recofusing**
		6	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Karimun			232.928.000,-	8.014.000,-	3,44	75,00	224.914.000,-	**Recofusing**
5		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**6.974.972.824,-**	**5.516.973.018,-**	**79,10**	**90,00**	**1.457.999.806,-**	**Recofusing**
	5	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**77.414.660,-**	**20.751.200,-**	**26,81**	**75,00**	**56.663.460,-**	**Recofusing**
		7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karimun	1	Dokumen	47.813.660,-	14.363.200,-	30,04	75,00	33.450.460,-	**Recofusing**
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karimun	3	Laporan	11.106.000,-	3.638.000,-	32,76	75,00	7.468.000,-	**Recofusing**
		9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karimun	2	Laporan	18.495.000,-	2.750.000,-	14,87	75,00	15.745.000,-	**Recofusing**

	6	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**5.490.862.816,-**	**4.302.733.579,-**	**78,36**	**90,00**	**1.188.129.237,-**	**Recofusing**
		10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karimun	462	Orang	5.393.878.816,-	4.220.353.579,-	78,24	90,00	1.173.525.237,-	**Recofusing**
		11	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Karimun	1	Dokumen	96.984.000,-	82.380.000,-	84,94	95,00	14.604.000	
	7	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**334.321.348,-**	**226.939.469,-**	**67,88**	**75,00**	**107.381.879,-**	**Recofusing**
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Karimun	9	Paket	3.000.000,-	2.210.000,-	73,67	90,00	790.000,-	
		13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karimun	20	Paket	21.999.348,-	4.982.000,-	22,65	75,00	17.017.348,-	**Recofusing**
		14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Karimun	20	Paket	3.000.000,-	3.000.000,-	100	100	-	Selesai dengan baik
		15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Karimun	5	Paket	3.000.000,-	0	0	0	0	**Recofusing**
		16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kab. Karimun	20	Dokumen	27.900.000	11.050.000,-	39,61	75,00	16.850.000,-	

		17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karimun	10	Laporan	161.136.000,-	100.447.469,-	62,34	75,00	60.688.531,-	**Recofusing**
		18	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karimun	1	Dokumen	114.286.000,-	105.250.000,-	92,09	100	9.036.000,-	Telah selesai dengan baik
	8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**1.031.630.000,-**	**963.868.770,-**	**93,43**	**100**	**67.761.230,-**	
		19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karimun	3	Laporan	260.630.000,-	209.393.770,-	80,34	90,00	51.236.230,-	**Recofusing**
		20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Karimun	1	Laporan	771.000,000,-	754.475.000,-	97,86	100	16.525.000,-	Telah selesai dengan baik
	9	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**40.774,000**	**2.680.000,-**	**6.58**	**100**	**38.094.000,-**	
		21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karimun	10	Unit	3.000.000,-	2.680.000,-	89,33	100	320.000,-	Telah selesai dengan baik
		22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Karimun	11	Unit	37.744.000,-	0	0	0	0	**Recofusing**

6	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**78.331.002,-**	**19.766.788,-**	**25,23**	**75,00**	**58.564.214,-**	
	10	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**					**78.331.002,-**	**19.766.788,-**	**25,23**	**75,00**	**58.564.214,-**	
		23	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Karimun	3	Unit	78.331.002,-	19.766.788,-	25,23	75,00	58.564.214,-	**Recofusing**
7	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**						**228.233.000,-**	**95.248.000,-**	**41,73**	**75,00**	**132.985.000,-**	
	11	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**					**58.112.000,-**	**19.514.000,-**	**33,58**	**75,00**	**38.598.000,-**	
		24	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Karimun	1	Laporan	58.112.000,-	19.514.000,-	33,58	75,00	38.598.000,-	**Recofusing**
	12	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**					**170.121.000,-**	**75.734.000,-**	**44,52**	**75,00**	**94.387.000,-**	

		25	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	1	Laporan	33.501.000,-	4.444.000,-	13,27	75,00	29.057.000,-	**Recofusing**
		26	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	1	Laporan	136.620.000,-	71.290.000,-	52,18	75,00	65.330.000,-	**Recofusing**
8	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**231.738.000,-**	**158.187.048,-**	**68,26**	**75,00**	**73.550.952,-**	
	13	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**					**231.738.000,-**	**158.187.048,-**	**68,26**	**75,00**	**73.550.952,-**	
		27	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Karimun	1.000	Unit	112.926.000,-	58.033.348,-	51,39	75,00	54.892.652,-	**Recofusing**
		28	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Karimun	1.000	Orang	118.812.000,-	100.153.700,-	84,30	95,00	18.658.300,-	
9	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**						**1.301.600.000,-**	**1.003.327.403,-**	**77,08**	**95,00**	**298.272.597,-**	

	14	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**					**1.301.600.000,-**	**1.003.327.403,-**	**77,08**	**85,00**	**298.272.597,-**	
		29	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	35	UMKM	891.600.000,-	690.220.303,-	77,41	85,00	201.379.697,-	
		30	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	20	UMKM	410.000.000,-	313.107.100,-	76,37	90,00	96.892.900,-	
			T O T A L				**9.622.414.826,-**	**6.885.588.648,-**	**71,56**	**75,00**	**2.736.826.178,-**	

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun tahun 2024, berasal dari retribusi sektor perdagangan dan pelayanan kemetrologian. Realisasi PAD tersebut disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024

No	Sumber PAD	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hasil Retribusi Daerah - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Pengelolaan Komplek Costal Area) - Retribusi Pelayanan Kemetrologian	Rp.50.000.000,-	Rp. 79.795.000,-	159,59

Memperhatikan hasil capaian PAD diatas, nilai retribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Pengelolaan Komplek Pusat Jajan Tanjung Rambut) melebihi capaian target yang dianggarkan tahun 2024, Hal ini disebabkan oleh :

Tingginya kesadaran pelaku usaha untuk melaksanakan membayar retribusi Pemakaian Kekayaan Aset Daerah Pusat Jajan Hall A dan Hall B dan permainan di Hall B.

2.2. Analisis Kerja Pelayanan OPD, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Bupati dan Wakil Bupati Karimun dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral.

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun mempunyai fungsi :

a. Merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral;
b. Melaksanakan teknis operasional dibidang Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral;
c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;

d. Melaksanakan kegiatan lain di bidang Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral sesuai dengan kebijakan Bupati.

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
d. Bidang Perdagangan;
e. Bidang Pelayanan Kemetrologian;
f. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2.1. Tugas

Secara spesifik tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, , dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun, berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah, dengan ketentuan didalamnya sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Sekretariat

Sekretariat (Sekretaris) mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dilingkungan dinas.

Adapun uraian tugas Kepala Bagian Sekretariat sebagai berikut:

1. Merencanakan teknis pelayanan ketatausahaan dinas;
2. Melaksanakan pelayanan ketatausahaan surat menyurat kepada seluruh unit organisasi dilingkungan dan diluar dinas;
3. Mengelola urusan rumah tangga dinas;
4. Mengelola keuangan dinas;
5. Mengelola urusan kepegawaian dilingkungan dinas;
6. Merumuskan perencanaan dan pelaporan kegiatan dinas;
7. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh kepala dinas.

Sekretariat, membawahi :

(a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

(b). Subkoordinator, terdiri dari :

- Subkoordinator Keuangan dan Aset:
- Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi.

(c). Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas pengelolaan teknis administrasi umum Dinas dan melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian dilingkungan Dinas. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai berikut :

Menyusun rencana teknis ketatausahaan Dinas;

- Menyusun surat menyurat Dinas;
- Melayani surat menyurat Dinas;
- Menyusun kearsipan surat menyurat Dinas;
- Melayani kerumahtanggaan Dinas;
- Melayani perlengkapan Dinas;
- Menyusun rencana pengembangan karir pegawai di lingkungan Dinas;
- Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepegawaian Dinas;
- Memeriksa syarat-syarat kelayakan kenaikan pangkat pegawai Dinas;
- Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai Dinas kepada bagian kepegawaian Daerah;
- Mengusulkan tindakan pembinaan pegawai Dinas; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

b) Subkoordinator Keuangan dan Aset mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan dan Aset Dinas. Uraian tugas Subkoordinator Keuangan dan Aset, sebagai berikut :

- Menyusun rencana pengelolaan keuangan dan Aset Dinas;
- Melaksanakan pengelolaan keuangan dan Aset Dinas;

- Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dan Aset Dinas;
- Menghimpun dan memeriksa keseluruhan bukti pengeluaran keuangan Dinas;
- Menyusun laporan keuangan dan Aset Dinas; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

c) Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perencanaan dan evaluasi kegiatan dilingkungan Dinas.

Uraian tugas Subkoordinator Perencanaan Mempunyai Tugas Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas Perencanaan Kegiatan Dinas dan Pengelolaan Keuangan Dinas, sebagai berikut :

- enyusun bahan perumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta evaluasi pelaporan Dinas;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi serta pembinaan kelembagaan di bidang koperasi dan usaha mikro.

Uraian tugas sebagaimana Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, sebagai berikut :

- Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional, pengendalian pembinaan kelembagaan koperasi;
- Melaksanakan teknis operasional pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- Melaksanakan penataan koperasi, usaha mikro;
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi :

(a). Subkoordinator Kelembagaan, Pengembangan dan Pengawasan Koperasi;

(b). Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;

(c). Subkoordinator Permodalan, Sarana Prasarana, Jaringan Usaha dan Pemasaran, Koperasi dan Usaha Mikro; dan

(d). Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Subkoordinator bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(a). Subkoordinator Kelembagaan, Pengembangan, dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan penyusunan kebijakan teknis kelembagaan, pengembangan, dan pengawasan koperasi. Uraian tugas Subkoordinator Kelembagaan, Pengembangan, dan Pengawasan Koperasi, sebagai berikut :

- Menyiapkan program kelembagaan, pengembangan koperasi dan usaha mikro;
- Menyusun petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan pengendalian, pembinaan badan hukum koperasi;
- Melakukan fasilitasi penataan kelembagaan koperasi;
- Melaksanakan pemberian rekomendasi terhadap pengusaha di bidang koperasi;
- Melakukan pembina dan pengembangan kelembagaan di bidang koperasi;
- Melakukan pembinaan personel koperasi;
- Melakukan kordinasi dan kerja sama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan pengembangan usaha koperasi;
- Mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan program pengawasan kegiatan perkoperasian;
- Melaksanakan pengendalian terhadap pertumbuhan dan perkembangan perkoperasian;
- Melaksanankan pengawasan terhadap penyelenggaraan kehidupan perkoperasian;
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam;
- Melaksanakan pengawasan kerja sama antar koperasi serta badan usaha lainnya;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

(b). Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Uraian tugas Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, sebagai berikut :

- Menyusun program dan rencana kerja pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- Menyusun petunjuk teknis operasional Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
- Melaksanakan pengendalian Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
- Melaksanakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
- Mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro sektor non formal;
- Memfasilitasi kemitraan usaha mikro dengan usaha lainnya;
- Menyelenggarakan temu usaha dalam penciptaan jaringan usaha;
- Melakukan verifikasi dan pendataan usaha mikro;
- Melaksanakan pembinaan, fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro;
- Menginventarisasi dan menganalisis kebijakan serta penyiapan rencana pengembangan sistem pendukung usaha mikro;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan seksi Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

(c). Subkoordinator Permodalan, Sarana dan Prasarana, Jaringan Usaha dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan fasilitasi dan perkreditan pengembangan usaha dan pemasaran di bidang koperasi dan usaha mikro. Uraian tugas Subkoordinator Permodalan, Sarana dan Prasarana, Jaringan Usaha dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro, sebagai berikut :

- Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan fasilitasi, penataan perkreditan, pengendalian dan pemasaran;
- Melakukan fasilitasi dan pemberian kredit terhadap pengembangan usaha mikro;
- Meningkatkan pemasaran hasil-hasil usaha mikro melalui berbagai media promosi pameran dan prorgam peningkatan pemasaran lainnya;
- Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain untuk mendukung fasilitasi dan pemberian kredit pengembangan modal usaha;
- Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan permodalan yang dikucurkan melalui perkreditan;
- Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh kepala bidang;

- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

2) Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumus kebijakan teknis di bidang sarana dan distribusi, barang kebutuhan pokok dan barang penting, bina usaha, pelaku distribusi dan pemasaran produk pengembangan perdagangan luar negeri.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- Menyusun program kerja di bidang perdagangan;
- Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis sarana distribusi, barang kebutuhan pokok barang penting;
- Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengembangan perdagangan luar negeri;
- Melaksanakan pembinaan dan pengembangan dibidang perdagangan;
- Menyiapkan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perdagangan;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perdagangan;
- Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan ,pembinaan pengembangan perdagangan dan pengembangan perdagangan luar negeri; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bidang Perdagangan, membawahi :

(a). Subkoordinator Sarana Distribusi, Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
(b). Subkoordinator Bina Usaha, Pelaku Distribusi dan Pemasaran Produk;
(c). Subkoordinator Pengembangan Perdagangan Luar Negeri; dan
(d). Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Subkoordinator bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(a). Subkoordinator Sarana Distribusi, Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan petunjuk

teknik operasional pelaksanaan sarana distribusi dan logistik barang kebutuhan pokok dan barang penting. Uraian tugas Subkoordinator Sarana Distribusi, Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, sebagai berikut :

- Menyusun program kerja pada seksi sarana distribusi, barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- Mengumpulkan dan mengolah bahan bahan perumusan kebijakan teknis sarana distribusi, barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sarana distribusi, pengelolaan sarana distribusi, kerjasama kebutuhan pokok dan barang penting, perdagangan antar pulau dan perbatasan serta pengawasan sarana distribusi dan perdagangan antar pulau;
- Menyiapkan bahan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria dibidang pengembangan sarana distribusi, pengelolaan sarana distribusi, kerjasama kebutuhan pokok dan barang penting, perdagangan antar pulau dan perbatasan serta pengawasan sarana distribusi dan perdagangan antar pulau;
- Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dibidang pengembangan sarana distribusi, pengelolaan sarana distribusi, kerjasama kebutuhan pokok dan barang penting, perdagangan antar pulau dan perbatasan serta pengawasan sarana distribusi dan perdagangan antar pulau;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan sarana distribusi, pengelolaan sarana distribusi, kerjasama kebutuhan pokok dan barang penting, perdagangan antar pulau dan perbatasan serta pengawasan sarana distribusi dan perdagangan antar pulau; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

(b). Subkoordinator Bina Usaha, Pelaku Distribusi dan Pemasaran Produk mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan tugas lingkup bina usaha, pelaku distribusi dan pemasaran produk. Uraian tugas Subkoordinator Bina Usaha, Pelaku Distribusi dan Pemasaran Produk, sebagai berikut :

- Menyusun program kerja pada seksi bina usaha, pelaku distribusi dan pemasaran produk;
- Mengumpul dan mengolah bahan bahan perumusan kebijakan teknis bina usaha, pelaku distribusi dan pemasaran produk, pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah;

- Menyiapkan bahan perumusan bina usaha, distribusi langsung dan tidak langsung jasa perdagangan dan pemasaran produk, pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah;
- Menyiapkan bahan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria dibidang bina usaha, distribusi langsung dan tidak langsung jasa perdagangan dan pemasaran produk, pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dibidang bina usaha, distribusi langsung dan tidak langsung jasa perdagangan dan pemasaran produk, pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang bina usaha, distribusi langsung dan tidak langsung jasa perdagangan dan pemasaran produk, pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

(c). Subkoordinator Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan tugas lingkup perdagangan luar negeri. Uraian tugas Subkoordinator Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, sebagai berikut :

- Menyusun program kerja pada seksi pengembangan perdagangan luar negeri;
- Mengumpul dan mengolah bahan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan perdagangan luar negeri;
- Menyiapkan bahan perumusan pengembangan perdagangan luar negeri;
- Menyusun norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan perdagangan luar negeri;
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah dan penyelenggaran kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah Kabupaten/Kota);
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan perdagangan luar negeri; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

3) Bidang Pelayanan Kemetrologian

Bidang Pelayanan Kemetrologian mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan teknis operasional di bidang pelayanan kemetrologian.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- Menyusun rencana teknis operasional bidang pelayanan kemetrologian;
- Menyiapkan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pelayanan kemetrologian;
- Pemantauan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kemetrologian;
- Menyiapkan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan kemetrologian;
- Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan,pembinaan, pengembangan bidang pelayanan kemetrologian; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bidang Pelayanan Kemetrologian, membawahi :

(a). Subkoordinator Pelayanan Tera/Tera Ulang;

(b). Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian;

(c). Subkoordinator Pengawasan Kemetrologian; dan

(d). Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Subkoordinator bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(a). Subkoordinator Pelayanan Tera/Tera Ulang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan penyususunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan tugas lingkup pelayanan tera/tera Ulang. Uraian tugas Subkoordinator Pelayanan Tera/Tera Ulang, sebagai berikut :

- Menyusun program kerja pada seksi pelayanan tera/tera ulang;
- Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan perumusan kebijakan teknis seksi pelayanan tera/tera ulang;
- Menyiapkan bahan perumusan teknis pelayanan seksi pelayanan tera/tera ulang;
- Menyiapkan bahan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria seksi pelayanan tera/tera ulang;
- Melaksanakan pemberian bimbingan teknis seksi pelayanan tera/tera ulang;
- Menyelesaikan pengaduan/komplain yang diajukan wajib tera/pemilik UTTP dan berkoordinasi dengan yang terkait seksi pelayanan tera/tera ulang;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan seksi pelayanan tera/tera ulang;
- Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahankan kepala bidang pelayanan kemetrologian; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

(b). Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan tugas pengembangan sumber daya manusia kemetrologian. Uraian tugas Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian, sebagai berikut :

- Menyusun program kerja pada seksi pengembangan sumber daya manusia kemetrologian;
- Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan perumusan seksi pengembangan sumber daya manusia kemetrologian;
- Merencanakan dan menyiapkan peningkatan kemampuan SDM penera dan SDM penunjang lainnya pada seksi pengembangan sumber daya manusia kemetrologian;
- Menyiapkan bahan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria seksi pengembangan sumber daya manusia kemetrologian.
- Melaksanakan pemberian bimbingan teknis/penyuluhan seksi pengembangan sumber daya manusia kemetrologian;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan seksi pengembangan sumber daya manusia kemetrologian; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

(c). Subkoordinator Pengawasan Kemetrologian mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan tugas pengawasan kemetrologian. Uraian tugas Subkoordinator Pengawasan Kemetrologian, sebagai berikut :

- Menyusun program kerja pada seksi pengawasan kemetrologian;
- Mengumpul dan mengolah bahan-bahan perumusan seksi pengawasan kemetrologian;
- Penyiapan perumusan seksi pengawasan kemetrologian;
- Melakukan pengawasan terhadap UTTP, BDKT dan satuan ukuran pada seksi pengawasan kemetrologian;
- Penyiapan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria seksi pengawasan kemetrologian;
- Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis seksi pengawasan kemetrologian;
- Penyiapan evaluasi dan pelaporan seksi pengawasan kemetrologian; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

4) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan dan petunjuk teknis penataan, pengelolaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengembangan kegiatan/ urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan daerah.

Uraian tugas Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai berikut :

- Membina, mengatur, mengarah kan dan membagi tugas dan menilai kinerja bawahan;
- Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Menyusun konsep sasaran dan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian sektor pemanfaatan langsung Panas Bumi dan menyusun konsep, sasaran dan petunjuk pelaksanaan sektor Migas khususnya BBM Tertentu dan LPG serta kelistrikan daerah;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi, Hilir Migas, Energi dan Kelistrikan Daerah;
- Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi data pemanfaatan langsung panas bumi, pemanfaatan sumber daya mineral hilir migas, energi dan kelistrikan daerah;
- Melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan urusan energi dan sumber daya mineral;
- Membuat laporan pelaksanaan kerja tahunan pada kegiatan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahi :

(a). Subkoordinator Pengelolaan Panas Bumi Dan Sumber Daya Mineral;
(b). Subkoordinator Hilir Migas;
(c). Subkoordinator Energi Dan Kelistrikan; dan
(d). Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Subkoordinator bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(a). Subkoordinator Pengelolaan Panas Bumi dan Sumber Daya Mineral tugas mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, perencanaan, monitoring dan

evaluasi pelaksanaan pengelolaan panas bumi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah. Uraian Subkoordinator Pengelolaan Panas Bumi dan Sumber Daya Mineral, sebagai berikut :

- Menyusun rencana dan rumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan Pengelolaan Panas Bumi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengarahkan dan membagikan tugas kepada bawahan;
- Melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan panas bumi dan sumber daya mineral;
- Menyiapkan, menghimpun data/bahan dan melaksanakan koordinasi, konsultasi dan rekonsiliasi pada kegiatan pengelolaan panas bumi dan sumber daya mineral;
- Melakukan inventarisasi, penyelidikan, penelitian, dan evaluasi dalam rangka memperoleh data dan informasi pengembangan panas bumi serta melaksanakan pengelolaan data dan/atau informasi potensi panas bumi dan sumber daya mineral;
- Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pengelolaan panas bumi dan sumber daya mineral;
- Mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan urusan pengelolaan panas bumi dan sumber daya mineral;
- Membuat laporan pelaksanaan kerja tahunan pada kegiatan seksi Pengelolaan Panas Bumi dan Sumber Daya Mineral; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

(b). Subkoordinator Hilir Migas mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, evaluasi, pemantauan/monitoring pelaksanaan kegiatan hilir migas yang menjadi kewenangan daerah. Uraian tugas Subkoordinator Hilir Migas, sebagai berikut :

- Menyusun rencana dan rumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan kegiatan Hilir Migas;
- Mengarahkan dan membagikan tugas kepada bawahan;
- Melakukan inventarisasi penyediaan/kebutuhan dan penyaluran migas Kabupaten;
- Melakukan evaluasi, pemantauan/monitoring terhadap pendistribusian bahan bakar minyak dan gas di wilayah Kabupaten;

- Menyiapkan rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu kepada pengguna sesuai tugas yang diberikan Bupati;
- Melaporkan hasil – hasil kegiatan hilir migas kepada pimpinan
- Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan hilir migas;
- Mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah – langkah yang perlu diambil dalam urusan Hilir Migas;
- Membuat laporan pelaksanaan kerja tahunan pada kegiatan seksi Hilir Minyak dan Gas; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

(c). Subkoordinator Energi dan Kelistrikan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, inventarisasi, dan pengembangan energi dan kelistrikan yang menjadi kewenangan daerah. Uraian tugas Subkoordinator Energi dan Kelistrikan, sebagai berikut :

- Menyusun rencana dan rumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan Energi dan Kelistrikan;
- Mengarahkan dan membagikan tugas kepada bawahan;
- Melakukan pendataan dan inventarisasi kebutuhan penyediaan dan distribusi kelistrikan daerah;
- Mengelola perencanaan, pengendalian energi dan kelistrikan.
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan perencanaan pengendalian energi dan kelistrikan serta kerjasama pemanfaatan energi;
- Melaksanakan kerjasama pemanfaatan energi;
- Mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah – langkah yang perlu diambil dalam urusan Energi dan Kelistrikan;
- Membuat laporan pelaksanaan kerja tahunan pada kegiatan seksi Energi dan Kelistrikan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

5) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut:

a. Melaksanakan operasional pelayanan pengkreditan sarana dan prasarana pengelolaan program dana bergulir.
b. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran dibidang pengelolaan dana bergulir.
c. Melaksanakan pendataan UMKM yang layak diberikan peningkatan modal.
d. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana bergulir dari pemerintah.
e. Melaksanakan pengelolaan dana bergulir dan pengendalian kegiatan yang dikelola oleh UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.
f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, pengembangan kerjasama antar daerah kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan dana bergulir.
g. Pelaksanaan pemungutan setoran cicilan dana bergulir yang digunakan debitur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
h. Menetapkan kriteria KUKM penerima dana bergulir.
i. Menetapkan KUKM penerima dana bergulir.
j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari jumlah pegawai negeri sipil dalam jejang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas dinas daerah. Kelompok jabatan fungsional diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan pemegang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta kepangkatan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Adapun Pejabat atau Aparatus Sipil Negara (ASN) yang tunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas harus bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan dan selalu melaksanakan koordinasi dengan kepala dinas selaku pengguna anggaran melalui pejabat sekretaris selaku pejabat penatausahaan keuangan (PPK).

Sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan Pejabat atau Aparatus Sipil Negara (ASN) yang tunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hendaklah membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK)

LAMPIRAN VII :

LAMPIRAN XVII :

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL TIPE A

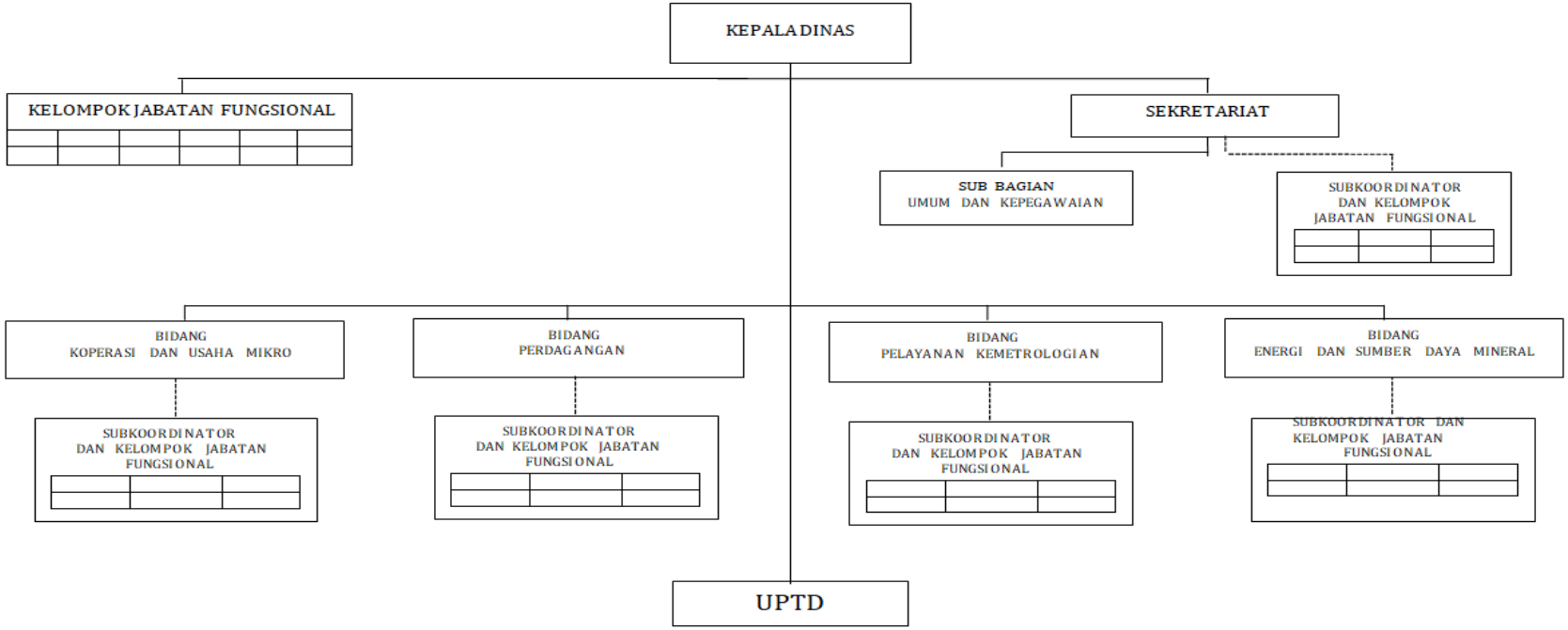

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD

2.3.1. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi tahun sebelumnya dan harus diselesaikan adalah :

1. Perlunya kepastian hukum seperti Peraturan Pemerintah terhadap Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Tidak adanya kejelasan hukum terhadap pelaksanaan program/ kegiatan pasca terbitkannya UU 23 tahun 2014.
3. Perlunya mengusulkan pelimpahan sebagaian kewenangan dari pemerintah Provinsi kepada pemerintah Kabupaten, dalam rangka mengoptimalkan kinerja organisasi.
4. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kemendagri 050.

2.3.2. Dampaknya Terhadap Pencapaian Program Secara Nasional

1. Lemahnya pengawasan dan pembinaan usaha/kegiatan energi, pertambangan dan perdagangan
2. Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan
3. Rendahnya persentase usulan program / kegiatan yang terealisasi.

2.3.3. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Organisasi :

1. Tantangan

a. Tersedianya banyak produk impor yang berkualitas harga kompetitif yang menurunkan daya saing produk lokal.
b. Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha perdagangan, koperasi dan UKM.
c. Lemahnya kemampuan permodalan pelaku usaha perdagangan, koperasi dan UKM;
d. Lemahnya pemasaran produk;
e. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha.;
f. Pemantauan para pelaku tambang terhadap pengendalian lingkungan pertambangan tidak terlaksana.
g. Pengawasan usaha pertambangan tidak dapat dilakukan, sehingga penilaian kegiatan sektor pertambangan yang sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan dan berwawasan lingkungan tidak bisa terlaksana.

h. Data informasi Sumber Daya Mineral dan Energi belum cukup lengkap dan belum termanfaatkan sebagai sumber pengembangan ekonomi daerah dan pasokan kebutuhan bagi masyarakat.
i. Masih rendahnya daya listrik yang dihasilkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan industri.

2. Peluang

a. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan semangat kerja aparatur yang cukup tinggi.
b. Sumber daya alam tersedia memadai dan dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan PAD dan mengembangkan potensi perdagangan, koperasi dan UKM .
c. Meningkatnya kebutuhan barang dan jasa.
d. Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam hal pembangunan sektor perdagangan, koperasi UKM, energi dan pertambangan.
e. Tersedianya volume tenaga kerjanya yang cukup banyak.
f. Tersedianya *Stakeholders* yang turut serta mendukung pembangunan sektor perdagangan, koperasi UKM, energi dan pertambangan.
g. Terbukanya peluang investasi untuk hasil-hasil sektor pertambangan dan energi.
h. Kebutuhan hasil pertambangan dan energi yang masih cukup tinggi.
i. Adanya pengaruh globalisasi.
j. Posisi wilayah yang strategis sehingga terbukanya jalur perdagangan bebas.

2.4. Review Terhadap Hasil Rencana Kerja RKPD

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan dan ESDM Kabupaten Karimun sebagai berikut :

1. Bidang Koperasi dan UKM
   a. Kurangnya promosi dan jaminan pemasaran bagi produk unggulan Koperasi dan UMKM;
   b. Lemahnya pemodalan Koperasi, UMKM dan terbatasnya jumlah lembaga keuangan yang bersedia bermitra dengan koperasi UMKM;

c. Belum adanya gedung yang menjadi pusat pelatihan (*Workshop)* bagi pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
d. Kurangnya perhatian pelaku usaha terhadap lingkungan hidup.

Secara garis besar, permasalahan diatas, dapat menghambat peran organisasi dalam hal pelaksanaan urusan pilihan.

2. Bidang Perdagangan dan Pelayanan Kemetrologian
   a. Hilangnya kewenangan pengawasan perdagangan;
   b. Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan Luar Negeri;
   c. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap barang beredar, kemetrologian dan perlindungan konsumen;
   d. Belum efisiennya jaringan distribusi barang sehingga berdampak pada harga barang;
   e. Belum meratanya sarana dan prasarana perdagangan. Perdagangan terlalu tersentral di jalur tertentu;
   f. UU nomor 23 tahun 2014 memberikan kewenangan penuh kepada Pelayanan Kemetrologian dalam meningkatkan perlindungan konsumen sekaligus mengejar retribusi dari tera/tera ulang sebagai sumber PAD. Namun demikian masih belum bisa dilaksanakan secara optimal akibat minimnya peralatan standar kemetrologian yang dimiliki.

3. Bidang ESDM

   Seiring terbitnya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah, terdapat beberapa kewenangan strategis yang menjadi urusan pilihan OPD, tidak dapat optimal dilaksanakan, yakni:

   a. Urusan ESDM yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, perizinan dan pengawasan telah menjadi urusan Pemerintah Provinsi dan Pusat;
   b. Urusan ESDM yang diberikan kewenangan penuh untuk Kabupaten hanya pemanfaatan langsung panas bumi. Namun demikian, potensi panas bumi dalam meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan belum terkelola dengan baik;
   c. Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan program pembinaan dan pengawasan sektor pertambangan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Terkait dengan masukan dari berbagai elemen tentang kegiatan yang diusulkan maka Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, maupun dari yang langsung ditujukan kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun berdasarkan pengumpulan data/informasi hasil dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan serta hasil reses DPRD Kabupaten Karimun.

BAB III

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran Pembangunan Nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangankemiskinan, ketahanan pangan, insfrastruktur, iklim investasi daniklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan serta provinsi untuk tahun rencana, yang terkait dengan pembangunan Kabupaten.

Pokok-pokok Kebijakan Nasional yang terkait dengan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun, meliputi :

3.1.1. Kebijakan Pembangunan Koperasi dan UMKM

Merujuk pada arah kebijakan nasional dan di bidang UMKM dan koperasi tahun 2020-2024, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh kementerian koperasi dan UKM pada tahun 2020-2024 diarahkan untuk : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian pada Tahun 2020-2024 yang mencakup, Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi yang dilaksanakan dengan strategi ***"Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian".***

Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui lima strategi sebagaimana dituangkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 yaitu :

1. Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha besar, mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kekembagaan dan perluasan kemitraan usaha.
2. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha dilakukan melalui penyediaan skema, pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM termasuk modal usaha dan *impact investment*, serta pendampingan mengakses kredit pembiayaan.
3. Meningkatkan kapasitas jangkauan dan inovasi koperasi mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, serta pendampingan kelompok untuk koperasi.
4. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start up dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha dan pengembangan sentra industri kecil dan menengah.
5. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, peningkatan kapasitas serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kelima strategi tersebut dilaksanakan melalui beberapa langkah strategis yang disusun berdasarkan Dimensi Pembangunan yang dituangkan di dalam RPJMN 2020-2024 yaitu:

1. Dimensi Pembangunan Manusia.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan.
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan.

3.1.2. Kebijakan Pembangunan Perdagangan Nasional

1. Perdagangan Dalam Negeri

Arah kebijakan perdagangan dalam negeri dalam lima tahun ke depan sesuai dengan RPJMN 2020-2024 adalah adalah "**Penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang domestik**melalui :

a. Stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
b. Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat.
c. Perlindungan konsumen dan tertib niaga.
d. Pemanfaatan SRG, PLK, PBK.

e. Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai suplai agar lebih efisien dan lebih andal serta pemberian insentif perdagangan domestik sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.
f. Pembenahan iklim usaha perdagangan yang lebih kondusif.
g. Penguatan perlindungan konsumen dan standarisasi produk lokal di pusat dan di daerah.

2. Perdagangan Luar Negeri

Arah kebijakan perdagangan Luar Negeri dalam lima tahun ke depan sesuai dengan yang tertuang RPJMN 2020-2024 adalah **"Meningkatkan daya saing produk ekspor non migas dan jasa"** melalui :

a. Peningkatkan nilai tambah yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas agar lebih kompetitif di pasar internasional.
b. Pengoptimalan upaya pengamanan perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan perdagangan nasional ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan perdagangan dijabarkan menjadi 12 (dua belas) pokok pikiran, yaitu:

1. Pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor.
2. Peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerjasama perdagangan internasional.
3. Penguatan jaringan distribusi barang kebutuhan pokok.
4. Pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok.
5. Peningkatan pemberdayaan konsumen.
6. Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan terbit ukur.
7. Pembinaan dan pengamanan pasar dalam negeri.
8. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), Pasar Lelang Komoditas (PLK).

9. Penguatan integritas dilingkungan kementerian perdagangan.
10. Penguatan pelayanan publik yang prima.
11. Peningkatan kualitas, kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian sera Pengembangan kapasitas SDM berbasis kompetensi.

3.1.3. Kebijakan Energi Sumber Daya Mineral

Arah kebijakan Kementerian ESDM, yaitu :

1. Optimalisasi produksi energi fosil.
2. Peningkatan alokasi energi domestic.
3. Peningkatan akses dan infrastruktur energi.
4. Diversifikasi energy.
5. Konservasi energi dan pengurangan emisi.
6. Peningkatan nilai tambah mineral dan pengawasan pertambangan.
7. Rasionalisasi subsidi dan harga energi yang lebih terarah.
8. Menciptakan iklim investasi yang kondusif.
9. Kebijakan lainnnya: Mengoptimalkan penerimaan negara, peningkatan litbang, peningkatan pelayanan kegeologian, dan peningkatan manajemen dan kompetensi SDM.

Pokok-pokok Kebijakan Kementerian ESDM, yaitu :

1. Arah Kebijakan Energi, Minyak dan Gas Bumi
   a. Perlu peningkatan kualitas informasi untuk wilayah kerja yang ditawarkan melalui perbaikan ketersediaan data antara lain data geofisika dan geologi.
   b. Perlu diperbaiki sistem birokrasi dan informasi serta kemitraan dilingkungan ESDM disamping koordinasi antar institusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan fiskal, perizinan, tanah, tumpang tindih lahan, lingkungan, permasalahan desentralisasi dan lain-lain.

2. Arah Kebijakan Energi Terbarukan
   a. Pengembangan energi terbarukan difokuskan pada energi biomassa, tenaga surya, tenaga arus laut, tenaga angin, tenaga panas bumi, air dan bahan bakar nabati.
   b. Pengaturan dan pemberlakuan harga khusus untuk energi terbarukan.

3. Arah Kebijakan Pertambangan

a. Pengawasan pertambangan dalam rangka mengurangi Penambangan Tanpa Izin (PeTI) dan mewujudkan *Good Mining Practices*.
b. Kegiatan pertambangan membutuhkan SDM yang berkualitas dan memiliki kemampuan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran Strategis merupakan proses penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu suatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu selama tahun 2023 sejalan dengan Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 yang meliputi indikator sasaran dan target dari sasaran itu sendiri yang bersifat mikro.

Mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi yang akan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan Sasaran dari Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun dirumuskan dengan mengacu pada Renstra OPD, RPJMD Kabupaten Karimun 2021-2026 selain juga menyerap aspirasi terkini dari masyarakat.

Selanjutnya dapat dilihat sasaran kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun tahun 2024 dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 pada tabel 3.2.1, dibawah ini :

Tabel 3.2.1

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

MISI I Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa
TUJUAN Meningkatnya Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Meningkatnya Koperasi	1	Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan	64 Koperasi
2	Berkembangnya Usaha Mikro	2	Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	1250 Usaha Mikro
3	Meningkatnya Pembinaan dan Promosi Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	3	Jumlah Produk Usaha Kecil/Usaha Mikro Unggulan yang terfasilitasi Promosi	Makanan : 95 Jenis Kerajinan : 5 Jenis
		4	Jumlah Sarana Promosi Usaha Mikro	3 Unit
		5	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Permodalan	100 Usaha Mikro

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	KETER ANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	49.284.000,-	21.542.700,-	27.741.300,-	Recofusing
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-	-	Recofusing
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	525.328.000,-	62.529.691,-	462.798.309,-	Recofusing
3	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	232.928.000,-	8.014.000,-	224.914.000,-	Recofusing
4	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**1.301.600.000,-**	**1.003.327.403,-**	**298.272.597,-**	Recofusing

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

MISI I

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa

TUJUAN

Meningkatnya Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target
Bidang Perdagangan

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Tercapainya Kestabilan dan Pemenuhan Bahan Kebutuhan Pokok	1	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar	6 Operasi Pasar
		2	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dipantau	12 Laporan
2	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3	Jumlah Verifikasi Dokumen yang terekomendasi dalam Pengurusan Izin pada Bidang Perdagangan	6 Dokumen
		4	Jumlah Verifikasi Dokumen Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) Pedagang di Pusat Jajanan Tanjung Rambut Costal Area	90 Dokumen

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	KETER ANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	78.331.002,-	19.766.788,-	58.564.214,-	Recofusing
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	228.233.000,-	95.248.000,-	132.985.000,-	Recofusing

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

MISI I

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa

TUJUAN

Meningkatnya Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target
Bidang Enegi dan Sumber Daya Mineral

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Yang Terpenuhi	1	Jumlah Pelanggan PLN/Rumah Tangga Berlistrik	61.749 pelanggan
		2	Kapasitas Pembangkit Listrik(PLTD/PLTU) yang Beroperasi Melayani Masyarakat	56.779 KW
		3	Kuota Kebutuhan Gas LPG 3 Kg Kabupaten Tahun 2024	7000.744 MT
		4	Jumlah Penyalur BBM/Gas Subsidi yang Aktif	15 Penyalur
		5	Jumlah Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	1 Laporan
		6	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Mineral	4 Tri Wulan

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

MISI I

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa

TUJUAN

Meningkatnya Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target
Bidang Metrologi

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan	1	Jumlah UTTP yang bertanda Tera Sah	1000 UTTP
		2	Jumlah Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) yang diterbitkan	30 Dokumen
		3	Jumlah Laporan UTTP yang diawasi	12 Laporan
		4	Jumlah BDKT yang diawasi	25 Pelaku Usaha

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	KETER ANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	231.738.000,-	158.187.048,-	73.550.952,-	Recofusing

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

MISI I Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa
TUJUAN Meningkatnya Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target
Sekretariat Dinas

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Terwujudnya Perencanaan Kinerja OPD yang tepat waktu	1	Persentase pelaporan dokumen keuangan dan aset yang tepat waktu	100 %
2	Tersedianya dokumen Pedoman Kerja	2	Jumlah Dokumen Keuangan dan Aset	5 dokumen
3	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan dan administrasi perkantoran	1	Laporan Realisasi Pemenuhan terhadap Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	12 Dokumen
4	Meningkatnya akuntabilitas pelaporan kinerja OPD	2	Laporan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur dan Aset	12 Dokumen
5	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan	3	Jumlah Pemenuhan Laporan Perencanaan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 Dokumen
6	Terlaksananya Dokumenn Perencanaan Kinerja OPD secara cepat dan	1	Jumlah dokumen perencanaan kinerja OPD	12 Dokumen
7	Terlaksananya Laporan Dokumen perencanaan Kinerja OPD secara Cepat dan Akurat serta Tepat Wakttu	2	Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan Kinerja OPD	12 Dokumen
8	Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Terlaksana dengan Lancar dan Sesuai SOP	1	Jumlah realisasi pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	12 Berkas

9	Tercapainya Peningkatan Komptensi Pegawai	2	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat, bimtek dan pengembangan diri, naik jabatan dan gaji berkala	33 PNS
10	Tercapainya Kedisiplinan Pegawai	3	Persentase kehadiran Pegawai	48 Berkas
11	Tercapainya Peningkatan Kinerja Pegawai	4	Jumlah Laporan Kinerja Pegawai	12 Berkas

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	KETER ANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.974.972.824,-**	**5.516.973.018,-**	**1.457.999.806,-**	Recofusing

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

MISI I

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa

TUJUAN

Meningkatnya Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target
UPT Dana Bergulir

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Meningkatkan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Terlaksana dengan Lancar dan Sesuai SOP	1	Jumlah Laporan Adminitsrasi Perkantoran	12 Laporan
2	Meningkatkan Monitoring dan Pembinaan Nasabah dalam Pengembalian Dana Bergulir	2	Jumlah Nasabah Dana Bergulir yang ditemui, ditagih dan dibina	100 Nasabah

3	Meningkatkan Pengembalian Dana Bergulir di Kabupaten Karimun	3	Jumlah Pengembalian Dana bergulir	100.000.000
4	Meningkatkan Pembinaaan Pengawasan dan Promosi Usaha Mikro	4	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Permodalan dan Pengawasan	60 Usaha Mikro

Untuk mengejar target indikator yang ingin dicapai, pada tahun 2024, Dinas Mineral Kabupaten Karimun merencanakan 9 (Sembilan Program) Program yang berisi 14 (Empat Belas) Kegiatan, dan 30 (Tiga Puluh) Sub Kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja organisasi.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program yang direncanakan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun tahun 2023 dan Tahun 2024 mengacu sepenuhnya pada program Pemerintah Kabupaten Karimun.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yang terangkum dalam suatu program untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Rincian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun tahun 2023 dan tahun 2024 yang telah dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Karimun secara keseluruhan dipaparkan,
pada table sebagai berikut :

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	RENCANA KERJA TAHUN 2023			RENCANA KERJA TAHUN 2024		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)	
1	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**				**50,000,000**			**49.284.000**	
1	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**50,000,000**			**49.284.000**	
1	**Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi**	Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan	Kabupaten Karimun	64	**50,000,000**	Pendapatan Asli Daerah	64	**49.284.000**	UPT Dana Bergulir
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**				**250,000,000**			**-**	Recofusing
2	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Darah Kabupaten/Kota**				**250,000,000**			**-**	Recofusing
2	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pembinaan Koperasi Melalui Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan , Penguatan Kelembagaan	Kabupaten Karimun	151	250,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	**-**	Recofusing

3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**				**400.000.000**			**525.328.000**	
3	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**				**400.000.000**			**525.328.000**	
3	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Kemitraan Usaha Mikro	Kabupaten Karimun	8 Unit Usaha	200,000,000	Pendapatan Asli Daerah	15 Unit Usaha	295.908.000	Bidang Koperasi dan UKM
4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Bantuan Peralatan	Kabupaten Karimun	32 Unit Usaha	200,000,000	Pendapatan Asli Daerah	10 Unit Usaha	130.000.000	Bidang Koperasi dan UKM
5	**Penyusunan Basis Data Usaha Mikro**	Jumlah Sosialisasi Pemberdayaan Usaha Mikro	Kabupaten Karimun	-	-	Pendapatan Asli Daerah	Laporan	99.420.000	UPT Dana Bergulir
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**							**232.928.000**	
4	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**							**232.928.000**	
6	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas yang Terfasilitasi Pengembangan Produksi Pengolahan, Pemasaran, SDM, Desain dan Teknologi	Kabupaten Karimun	-	-	Pendapatan Asli Daerah	Laporan	**232.928.000**	Bidang Koperasi dan UKM

5	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**6,018,128,509**			**6.974.972.824**	
5	**Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**200,000,000**			**77.414.660**	
7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	2	70,000,000	Pendapatan Asli Daerah	2	**47.813.660**	Bidang Sekretariat
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	3	80,000,000	Pendapatan Asli Daerah	3	**11.106.000**	Bidang Sekretariat
9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	2	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah	2	**18.495.000**	Bidang Sekretariat
6	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**4.437.878.509**			**5.490.862.816**	
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	Kabupaten Karimun	462	4,103,544,509	Pendapatan Asli Daerah	462	**5.393.878.816**	Bidang Sekretariat
11	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	1	334,334,000.	Pendapatan Asli Daerah	1	**96.984.000**	Bidang Sekretariat
7	**Administrasi Umum Perangkat Deaerah**				**605.000.000**			**334.321.348**	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	Kabupaten Karimun	5	7,000,000	Pendapatan Asli Daerah	9	3.000.000	Bidang Sekretariat

13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	Kabupaten Karimun	20	30,000,000	Pendapatan Asli Daerah	20	21.999.348	Bidang Sekretariat
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	Kabupaten Karimun	10	18,000,000	Pendapatan Asli Daerah	20	3.000.000	Bidang Sekretariat
15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dokumen	Kabupaten Karimun	5	10,000,000	Pendapatan Asli Daerah	5	3.000.000	Bidang Sekretariat
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Dokumen	Kabupaten Karimun	20	36,000,000.00	Pendapatan Asli Daerah	20	27.900.000	Bidang Sekretariat
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kabupaten Karimun	50	500,000,000	Pendapatan Asli Daerah	10	161.136.000	Bidang Sekretariat
18	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dokumen	Kabupaten Karimun	1	4,000,000.00	Pendapatan Asli Daerah	1	114.286.000	Bidang Sekretariat
8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**923.250.000**			**1.031.630.000**	
19	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Laporan	Kabupaten Karimun	3	150,000,000	Pendapatan Asli Daerah	3	260.630.000	Bidang Sekretariat
20	Penyediaan Jasa Dan Pelayanan Umum Kantor	Laporan	Kabupaten Karimun	1	773,250,000	Pendapatan Asli Daerah	1	771.000,000	Bidang Sekretariat
9	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**52.000.000**			**40.774,000**	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	Kabupaten Karimun	11	42,000,000	Pendapatan Asli Daerah	11	37.744.000	Bidang Sekretariat

22	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Unit	Kabupaten Karimun	10	10,000,000	Pendapatan Asli Daerah	10	3.000.000	Bidang Sekretariat
6	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**				**200,000,000**			78.331.002	
10	**Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**				**200,000,000**			78.331.002	
23	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	Kabupaten Karimun	25	**200,000,000**	Pendapatan Asli Daerah	3	78.331.002	Bidang Perdagangan
7	**PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**				**450.000.000**			**228.233.000**	
11	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**				150,000,000			**58.112.000**	
24	Koordinasi Dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Agen Dan Pasar Rakyat	Laporan	Kabupaten Karimun	1	150,000,000	Pendapatan Asli Daerah	1	**58.112.000**	Bidang Perdagangan
12	**Pengendalian Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota**				**300,000,000**			**170.121.000**	
25	Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Kabupaten Karimun	1	150,000,000	Pendapatan Asli Daerah	28	33.501.000	Bidang Perdagangan

26	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Laporan	Kabupaten Karimun	1	150,000,000	Pendapatan Asli Daerah	4	136.620.000	Bidang Perdagangan
8	**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**				**410,000,000**			**231.738.000**	
13	**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang Dan Pengawasan**				**410,000,000**			**231.738.000**	
27	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang	Unit	Kabupaten Karimun	1000	200,000,000	Pendapatan Asli Daerah	1000	112.926.000,-	Bidang Metrologi
28	Pengawasan Penyulusan Metrologi Legal	Orang	Kabupaten Karimun	1000	210,000,000	Pendapatan Asli Daerah	1000	118.812.000,-	Bidang Metrologi
9	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGRI**				**460,000,000**			**1.301.600.000**	
14	**Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam dalam Negri**				**460,000,000**			**1.301.600.000**	
29	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negri Di Tingkat Kabupaten/ Kota	UMKM	Kabupaten Karimun	25	255,000,000	Pendapatan Asli Daerah	35	891.600.000	Bidang Perdagangan
30	Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negri Di Tingkat Kabupaten/ Kota	UMKM	Kabupaten Karimun	10	205,000,000	Pendapatan Asli Daerah	20	410.000.000	Bidang Perdagangan

3.4. RENCANA KERJA PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KEGIATAN OPD TAHUN ANGGARAN 2025

Perumusan program dan kegiatan untuk tahun 2025, menyesuaikan antara indetifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Adapun Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun dalam Melaksanakan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (RAPBD) dan diteruskan pada Rencana Kegiatan Perangkat Daerah (RKPD) di Tahun Anggaran 2025, adalah 7 (tujuh) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan.

Atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (RAPBD) dan diteruskan pada Rencana Kegiatan Perangkat Daerah (RKPD) di Tahun Anggaran 2025 Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun di dalam melaksanakan kegiatan tersebut, membutuhkan sumber pendanaan indikatif, **sebesar Rp.7.673.596.044,15 (Tujuh Milyar Enam Ratus Tujuh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam ribu Empat puluh Empat Rupiah Koma Lima Belas),** dengan memasang Target Pendapatan Daerah yang berasal dari sektor Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Pengelolaan Sewa Kios Jualan dan Tempat Permainan Anak di Komplek Costal Area) dan Retribusi Pelayanan Kemetrologian, yaitu **sebesar Rp.57.740.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).**

Adapun Rencana Kegiatan Perangkat Daerah (RKPD) di Tahun Anggaran 2025, adalah 7 (tujuh) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4.1.
Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025
Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun

No.	RANCANGAN RKPD					HASIL ANALISAS KEBUTUHAN					CATATAN
	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**					**PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**					
1	**KEGIATAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN**					**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN**					
1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Karimun, Kecamatan Karimun, Semua Kelurahan	Persentase Umkm (Jumlah UMKM Dibagi Jumlah Penduduk)	4,66 Persen	Rp.338.456.000,00	Sub Kegiatna Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Karimun, Kecamatan Karimun, Semua Keluraan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan	38 Unit Usaha	Rp338.456.000,00	
2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Karimun, Kecamatan Karimun, Semua Kelurahan	Persentase Umkm (Jumlah UMKM Dibagi Jumlah Penduduk)	4,66 Persen	Rp.207.130.000,00	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Karimun, Kecamatan Karimun, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	16 Unit Usaha	Rp.207.130.000,00	

3	Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kab. Karimun,	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	54 Unit Usaha	Rp91.336.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kab. Karimun,	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	54 Unit Usaha	Rp91.336.000,00	
NO.	**PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN**			**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**
1	**2**			**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**										
2	**KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA**										
4	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kab. Karimun, Kecamatan Karimun, Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	1 Unit Usaha	Rp.101.360.000,00	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kab. Karimun, Kecamatan Karimun, Semua Kelurahan	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	66 Unit Usaha	Rp.101.360.000,00	
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
3	**KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**					**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**					

5	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Koperasi Usah Mikro, Perdagangan, Metrologi dan ESDM	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Rp.124.863.000,00	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karimun, Kecamatan Karimun, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Laporan	Rp.124.863.000,00	
6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi Usah Mikro, Perdagangan, Metrologi dan ESDM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Laporan	Rp.29.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Karimun, Kecamatan Karimun, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 Dokumen	Rp.29.000.000,00	
7	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Koperasi Usah Mikro, Perdagangan, Metrologi dan ESDM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Rp.3.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Koperasi Usah Mikro, Perdagangan, Metrologi dan ESDM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Laporan	Rp.3.000.000,00	
8	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi Usah Mikro, Perdagangan, Metrologi dan ESDM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Rp.36.711.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi Usah Mikro, Perdagangan, Metrologi dan ESDM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp.36.711.000,00	

9	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Koperasi Usah Mikro, Perdagangan, Metrologi dan ESDM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	Rp.8.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Koperasi Usah Mikro, Perdagangan, Metrologi dan ESDM	Jumlah Laporan	1 Laporan	Rp.8.000.000,00	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi Usah Mikro, Perdagangan, Metrologi dan ESDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Rp.125.892.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi Usah Mikro, Perdagangan, Metrologi dan ESDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Rp.125.892.000,00	
11	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Koperasi Usah Mikro, Perdagangan, Metrologi dan ESDM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	Rp.5.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Koperasi Usah Mikro, Perdagangan, Metrologi dan ESDM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Laporan	Rp.5.000.000,00	
4	**KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**										
12	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Dinas Koperasi Usah Mikro, Perdagangan, Metrologi dan ESDM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Rp5.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi Usah Mikro, Perdagangan, Metrologi dan ESDM

13	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Koperasi Usah Mikro, Perdagangan, Metrologi dan ESDM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Realisasi Kinerja	3 Laporan	Rp.32.203.182,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Koperasi Usah Mikro, Perdagangan, Metrologi dan ESDM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Realisasi Kinerja	3 Laporan	Rp.32.203.182,00	
14	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi Usah Mikro, Perdagangan, Metrologi dan ESDM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp.10.000.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi Usah Mikro, Perdagangan, Metrologi dan ESDM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp.10.000.000,00	
5	**KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										
15	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Dinas Koperasi Usah Mikro, Perdagangan, Metrologi dan ESDM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Rp.9.990.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi Usah Mikro, Perdagangan, Metrologi dan ESDM

16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi Usah Mikro, Perdagangan, Metrologi dan ESDM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 Unit	Rp.40.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi Usah Mikro, Perdagangan , Metrologi dan ESDM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Laporan	Rp.40.000.000,00	
6	**KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**										
17	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Dinas Koperasi Usah Mikro, Perdagangan, Metrologi dan ESDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/bulan	Rp.4.637.453 .587,03	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Koperasi Usah Mikro, Perdagangan, Metrologi dan ESDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/bulan
7	**KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										
18	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karimun, Kecamatan Karimun, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Rp.260.640.000,02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karimun, Kecamatan Karimun, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karimun, Kecamatan Karimun, Semua Kelurahan

19	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Dinas Koperasi Usah Mikro, Perdagangan, Metrologi dan ESDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	Rp.194.110.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Koperasi Usah Mikro, Perdagangan, Metrologi dan ESDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
4	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**								1 Laporan	Rp.194.110.000,00		
8	**KEGIATAN PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN**											
20	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			Kab. Karimun, Kecamatan Karimun, Semua Kelurahan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1.000 Unit	Rp.200.000.200,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Karimun, Kecamatan Karimun, Semua Kelurahan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		
21	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			Kab. Karimun, Kecamatan Karimun, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1.000 Orang	Rp.175.891.200,00	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Karimun, Kecamatan Karimun, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1000 Unit	
5	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**								1000 Orang	Rp.175.891.200,00		

9	**KEGIATAN PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI**											
22	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				Kab. Karimun, Kecamatan Karimun, Semua Kelurahan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	40 UMKM	Rp.355.386.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten /Kota	Kab. Karimun, Kecamatan Karimun, Semua Kelurahan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	
23	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			Kab. Karimun, Kecamatan Karimun, Semua Kelurahan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace	25 UMKM	Rp.116.920.000,00	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, Kecamatan Karimun, Semua Kelurahan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	40 UMKM	
6	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**								25 UMKM	Rp.116.920.000,00		
10	**KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**											

24	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan					Kab. Karimun, Kecamatan Karimun, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	Rp342.500.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Karimun, Kecamatan Karimun, Semua Kelurahan
7	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**										
11	**KEGIATAN MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA**										
25	Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				Kab. Karimun, Kecamatan Karimun, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	Rp.45.212.000,00	Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Karimun, Kecamatan Karimun, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

12	**KEGIATAN PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA**										
26	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, Kecamatan Karimun, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Rp114.860.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, Kecamatan Karimun, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
27	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							Kab. Karimun, Kecamatan Karimun, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kab/Kota	1 Laporan	Rp66.336.000,00
									1 Laporan	Rp66.336.000,00	

BAB IV

PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun tahun 2021-2026. Selain itu Rancangan Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Rancangan Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumberdaya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rancangan Rencana Kerja tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis, didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretaris dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Penyusunan rancangan Rencana Kerja masih belum sempurna dikarenakan pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepaham.
4. Renja adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.
5. Didalam proses penyusunan Rencana Kerja harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.
6. Rencana Kerja harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan public dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan system informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publikakan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigm pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakatakan hak dan kewajiban sebagai warganegara, terwujudnya mekanisme control dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggungjawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
5. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, halter sebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
6. Menerapkan system *Reward and Punishment* terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Rancangan Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dalam menciptakan *Good Government*.

Prestasi yang akan dicapai tak lepas dari komitmen yang kuat dari seluruh *Stakeholder* untuk menfokuskan sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis yang ditetapkan Rencana Kerja 2025.

Keberhasilan sasaran strategis tersebut ditunjukkan dengan tercapainya kondisi berikut :

1. Penatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kesadaran para pelaku usaha, pengurus dan pengelola terhadap kewajibannya melakukan pelaporan dalam kegiatan urusan perdagangan, koperasi UKM dan ESDM.
3. Pelayanan prima bagi dunia usaha atau masyarakat.

Untuk dapat lebih meningkatkan urusan Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun pada tahun-tahun mendatang, akan diusahakan menempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap capaian visi misi Kabupaten Karimun.

Adapun upaya strategis pemecahan masalah tersebut adalah :

1. Meningkatnya *Database*di setiap bidang untuk menunjang program dan kegiatan;
2. Meningkatnya sumberdaya manusia teknis terlatih sesuai kebutuhan;
3. Tersedianya peralatan teknis yang mendukung tugas setiap aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
4. Melakukan koordinasi kepemerintah pusat/provinsi maupun instansi terkait untuk mengantisipasi kendala dan hambatan yang dihadapi organisasi dalam meningkatkan kinerja.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu di upayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM sebagai salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dilingkup Pemerintah Kabupaten Karimun Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM.

Semoga Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait. Sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2025. Akhirnya ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2025

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN KARIMUN

BASORI, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19660604 199010 1 001

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025

PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNTUK
PERIODE SATU TAHUN

dpmptsp
Kabupaten Karimun

OSS SICANTIK

BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan terhadap Proses Penyelenggaraan Perencanaan di Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan daerah;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap *stakeholder* dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan antar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klafisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 46);
23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);
24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 99 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2025, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada Tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 3

(1) RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025 disusun berdasarkan atas hasil Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

(2) RKPD Tahun 2025 terdiri atas 7 (tujuh) BAB yang berisikan kebijakan dan program serta kegiatan Pembangunan Daerah.

(3) RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
   a. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2025; dan
   b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

(4) Uraian secara rinci RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 :
a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Tahun 2025 bersama DPRD; dan
b. Organisasi Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2025 dalam melakukan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) bersama DPRD.

Pasal 5

(1) Organisasi Perangkat Daerah membuat laporan kinerja bulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya bulan bersangkutan.

(3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Apabila terjadi perbedaan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan bersama dengan memperhatikan RKPD Tahun 2025 dan semua aspek yang mempengaruhi Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI KARIMUN,

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024 NOMOR 33

BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah (PD) melakukan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025;

b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan antar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klafisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 46);
21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);
22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 99 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 99);
23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 45);
24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

5

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
RENCANA KERJA (RENJA)

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :
   a. pendahuluan;
   b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
   c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
   d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
   e. penutup.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta harus berpedoman dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
(3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya.
(4) Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 8 Juli 2024

BUPATI KARIMUN,

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024 NOMOR 34

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wata'ala, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini, merupakan panduan dan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dalam upaya penyelenggaraan pelayanan untuk periode satu tahun kedepan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, dan pendanaan untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.

Dokumen Renja ini mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2021—2026 dan telah di sesuaikan dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Rencana Kerja ini bersifat indikatif untuk menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025, dan untuk meninjau kembali hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian Renja tahun berjalan (2024).

Diharapkan semua bidang teknis di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dengan adanya rencana kerja ini akan tercipta kesatuan gerak dan langkah dalam upaya penyelenggaraaran pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menciptakan peningkatan kinerja organisasi.

Tanjung Balai Karimun, Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun,

Muhammad Yosli, S.T., M.Si.
NIP. 197405122000031005

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..... I
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL..... iii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Landasan Hukum..... 2
1.3. Maksud dan Tujuan..... 7
1.4. Sistematika Penulisan..... 8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA..... 10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun lalu dan Capaian renstra SKPD..... 10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 38
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun..... 39
2.4. Review Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun..... 42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN..... 50
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... 50
3.2 Tujuan dan Sasaran..... 52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... 56
BAB V PENUTUP..... 74

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2023……..	16
Tabel 2.2	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2023	22
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024.....	34
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2023.....	39
Tabel 2.5	Pemetaan permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi……..	41
Tabel 2.6	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025……	43
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Strategis pada Rencana Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP Tahun 2025…….……	54
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2026.	63

BAB.I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENJA–PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun yang selanjutnya disebut RENJA–DPMPTSP mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan Tahunan Pemerintah Kabupaten Karimun mengingat beberapa hal berikut :

1. RENJA-PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD);
2. RENJA-PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN;
3. RENJA-PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun Tahun 2025 merupakan Penjabaran dari Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan evaluasi pada Renja Perangkat Daerah dengan menganalisa kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan. Menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan lebih efektif dalam penyerapan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
d. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan pertimbangan pagu indikatif Perangkat Daerah;
e. Program dan kegiatan yang direncananakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Karimun. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan dapat menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan, dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang handal, profesional, efisien, efektif, serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani (stakeholder) dan perkembangan isu-isu strategis.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2021 terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal ;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Paraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
21. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/1191/V/BANGDA tanggal 8 Juni 2009 tentang Penyempurnaan Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Karimun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
28. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);
29. Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 15);
30. Peraturan Bupati Karimun Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun, disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2025 bertujuan :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2025;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun disusun ke dalam bab-bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat rumusan tentang latar belakang, Tupoksi, maksud dan tujuan, proses dan sistematika penyusunan penulisan Renja DPMPTSP Kabupaten Karimun.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Rancangan Awal RKPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tentang Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN KARIMUN

Berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V. PENUTUP

Memuat kesimpulan, berbagai harapan dan tindak lanjut perumusan Renja DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2025.

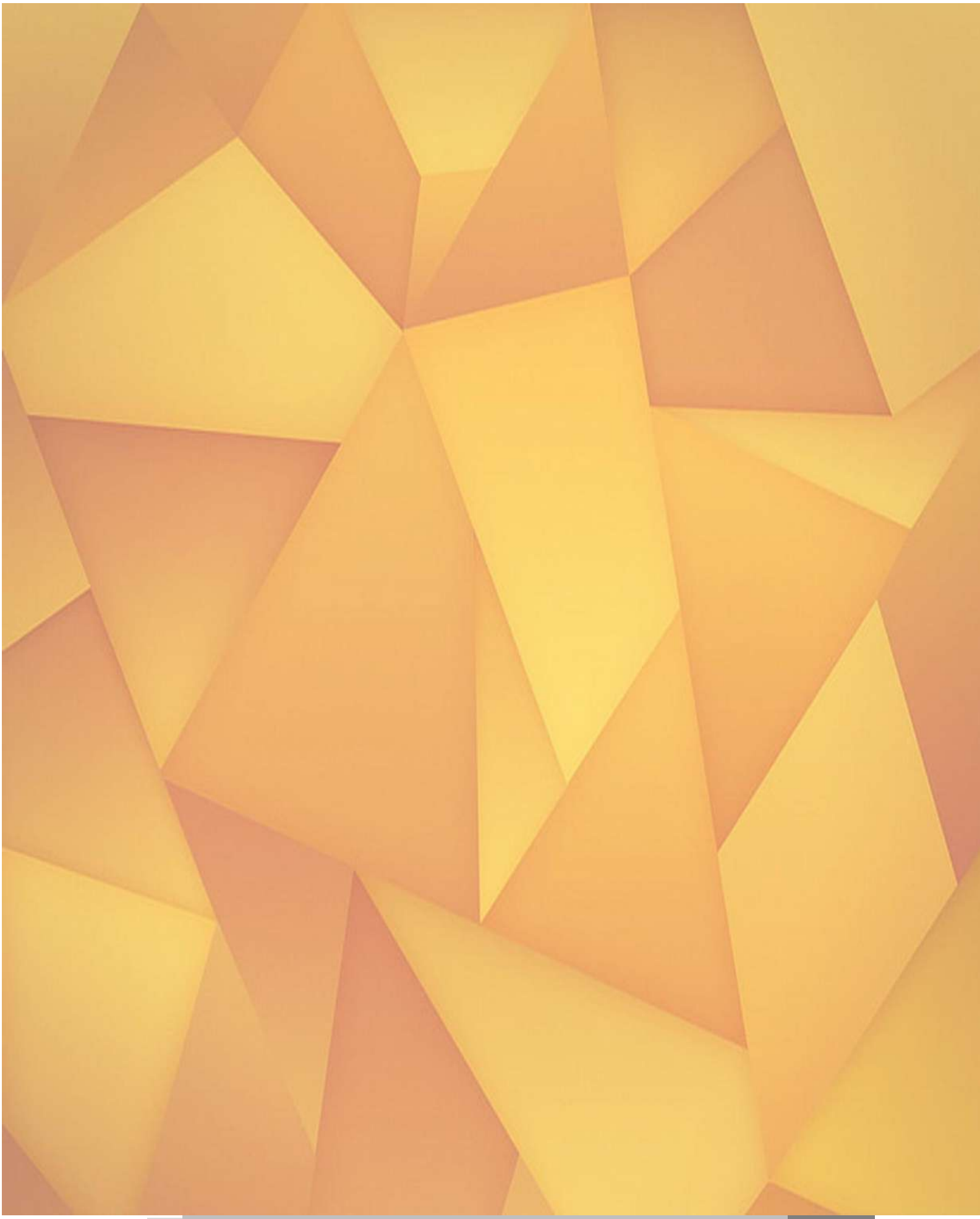

BAB.II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2023 dan Capaian renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2023 sejumlah **Rp. 9.307.724.045,-.** Terealisasi sebesar **Rp. 8.501.354.672,-** realiasasi keuangan sebesar **91,34 %** dan realisasi fisik sebesar **100 %.,** Dana tersebut diperuntukan untuk mendukung tercapainya kinerja dua sasaran OPD yakni :

1. Sasaran " ***Meningkatnya kualitas pelayananan dan Optimalisasi Investasi***" dengan 2 (dua) Indikator kinerja yang pertama Nilai IKM pelayanan Perizinan dengan Target 3,50 terealisasi 3,49 dengan capaian 99.71 %, sedangkan indikator kinerja yang kedua yakni Persentase

Kenaikan PMA PMDN, target kinerja 9%, realisasi 6,79% (capaian kinerja 75,41%), pencapaian target dua indikator kinerja tersebut di dapat dari pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

- **Program Pelayanan Penanaman Modal**

  Program Pelayanan Penanaman Modal dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu persentase kenaikan nilai realisasi investasi dengan target pada tahun 2023 sebesar 13,6 % , program ini merupakan program yang berfokus pada pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik khususnya di Bidang Perizinan dan. Dari Target program pada tahun 2023 sebesar 13,6 %, terealisasi sebesar 28,22%, capaian program sebesar 207,50 %. Anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp.145,984,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.94.522.150 (64,75%) sedangkan untuk realisasi fisiknya sebesar 100%, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

  1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 124.664.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 94.552.150,- (75,82 %),
  2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 21.320.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- (0 %).

  Faktor pendorong dari program ini adalah standar international yang digunakan untuk menetapkan kebijakan dan sasaran mutu (quality objective) serta pencapaian yang bisa diterapkan berdasarkan persyaratan 10 klausul ISO 9001:2015, sarana yang telah disediakan, adanya koordinasi antara internal bidang dan petugas pengampu, tersedianya loket pelayanan konsultasi izin dan non izin, adanya tenaga teknis pendamping di loket pelayanan yang membantu memfasilitasi pemohon, adanya penambahan jam layanan khususnya diwaktu istirahat (12.00-13.00) di loket PTSP untuk memfasilitasi jumlah pemohon yang ingin konsultasi.

- **Program Promosi Penanaman Modal**

  Program Promosi Penanaman Modal dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator yaitu jumlah investor berskala nasional dengan target pada tahun 2023 sebesar 550 pelaku usaha dengan realisasi sebesar 231 pelaku usaha maka capaian program ini sebesar 42 %. Program ini Merupakan program yang berfokus pada identifikasi sektor-sektor yang menarik bagi investor berdasarkan potensi, keunggulan komperatif, kebijakan daerah dan Merumuskan rencana strategis untuk mempromosikan potensi investasi, untuk hal tersebut pada Tahun 2023 program promosi penanaman modal di dukung dengan pagu dana sebesar Rp. 81.564.600,-, namun pada tahun berjalan adanya kebijakan penghematan anggaran yang di sebabkan respon atas kondisi keuangan daerah sehingga untuk realisasi penyerapan anggarannya tidak terealisasi.

- **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

  Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan target indikator sebesar 59.91% dan dan realisasi indikator sebesar 81 % (capaian realisasi 135 %). Anggaran untuk program ini sebesar Rp 414.605.000 bersumber dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), realisasi anggaran sebesar Rp 362.915.400 atau sebesar 87,53 persen, Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya koordinasi internal dan bidang tentang pelaporan LKPM, diselenggarakannya bimbingan teknis penyampaian LKPM dan adanya pendampingan, pengawasan dan pembinaan untuk investor : program pengendalian penanaman modal terdiri dari satu kegiatan yang menjabarkan 2 sub kegiatan sebagai berikut :

  1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan indicator kinerja yang akan di capai yakni Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan target indikator kinerja 221 pelaku usaha terealisasi 229 pelaku usaha

(capaian realisasi kinerja 103,62 %), untuk melaksanakan sub kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 325.155.000, realisasi anggaran sebesar 85.4 % atau Rp. 276.516.400

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023 yaitu Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dengan target 88 kegiatan usaha, terealisasi 60 kegiatan usaha (capaian realisasi kinerja 2023 sebesar 68,18%), untuk dukungan anggaran di peroleh sebesar Rp. 89.450.000, dengan realisasi angaran 86.339.000, atau 96,59%.

- **Program Pengelolaan Data data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten Kota** merupakan program yang berfokus pada pengumpulan, pembaharuan, pengelolaan dan analisa data dan informasi tentang investasi penanaman modal ditahun 2023 target kinerja yang di kejar yaitu jumlah dokumen pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal, (1 Dokumen) realisasi kinerja sebesar 100%, program ini mendapatkan pagu dana sebesar Rp. 15.000.000, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.440.000 (29,60%) dan realisasi fisik sebesar 100%, program ini terdiri dari satu sub kegiatan yakni :

  1. Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023 berupa 2 (dua) dokumen Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan, dengan realisasi kinerja sebesar 100%

2. Sasaran " ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD***" dengan Satu Indikator Kinerja yakni *Nilai AKIP* target yang ingin dicapai pada tahun 2023 sebesar 76,30, realisasi 60,35, capaian kinerja sebesar 79,09 %,

pencapaian target indicator kinerja tersebut di dapat dari pelaksanaan satu program rutin (Administrasi umum) yakni program:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan** Daerah Kabupaten program ini di arahkan pada kegiatan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 8.650.570.445, dengan realisasi keuangan sebesar 92,94% (Rp 8.040.254.690), program ini, terdiri dari 7 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan sebagai berikut :

  1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
     - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
     - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
     - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
     - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
     - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
     - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
     - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
     - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
     - Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
     - Pengadaan Mebel
     - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Karimun pada Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Karimun, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada beberapa tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karimun Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	capaian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional	550	231	42%	81.564.600	0	0%
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Pameran yang diikuti	2	0	0 %	81.564.600	0	0%
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	0	0 %	81.564.600	0	0%
2.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Nilai realisasi Investasi	13,6%	28,22 %	207,50%	145.984.000	94.522.150	64,75%
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	700	1205	172 %	145.984.000	94.522.150	64,75%
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non	600	483	80,50%	124.664.000	94.522.150	75,82%

	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	300	2	0,67%	21.320.000	0	0%
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang menyampaikan LKPM	59,91%	81 %	135 %	414.605.000	362.915.400	87,53%
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang menyampaikan LKPM	276	187	67,75%	414.605.000	362.915.400	87,53%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	88	60	68,18%	89.450.000	86.399.000	96,59%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	221	229	103,62%	325.155.000	276.516.400	85,04%

2.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	1	1	100,00%	15.000.000	4.440.000	29,60%
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perizinan dan Non perizinan	12	12	100,00%	15.000.000	4.440.000	29,60%
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2	2	100,00%	15.000.000	4.440.000	29,60%
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,5	3,48	99,43%	8.650.570.445	8.040.254.690	92,94%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	7	6	85,71%	86.260.000	39.919.881	46,28%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	1	50%	41.768.000	16.023.136	38,36%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	100%	15.580.000	5.805.000	37,26%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	100%	28.912.000	18.091.745	62,58%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	1	1	100%	5.172.097.157	4.939.505.897	95,50
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	490	455	92,86%	5.058.073.157	4.825.841.897	95,41%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	100%	114.024.000	113.664.000	99,68%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	1	1	100%	412.243.288	376.158.104	91,25%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100%	4.000.000	0	0%

	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	100%	20.829.500	7.980.500	38,31%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	100%	5.024.600	3.326.000	66,19%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100%	12.147.000	6.000.000	49,39%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	100%	4.800.000	3.600.000	75%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	20	100%	365.442.188	355.251.604	97,21 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan penyedia jasa	1	1	100%	2.824.300.000	2.666.990.808	94,43%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100%	23.100.000	20.610.808	89,22%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100%	2.801.200.000	2.646.380.000	94,47%

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	1	1	100%	23.670.000	17.680.000	74,69%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1		18.000.000	16.430.000	91,28%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	2	100%	5.670.000	1.250.000	22,05%
	TOTAL					**9.307.724.045**	**8.502.132.240**	**91,34%**

Tabel 2.2
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2023

Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2022 s/d 2026)	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output) (Renstra 2022 s/d 2026)	Satuan	APBDP 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA OPD	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
	Bidang Penanaman Modal				9.307.724.045		8.502.132.240		91,34				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Nilai IKM**	**Indeks**	**3,5**	**8.650.570.445**	**3,48**	**8.040.254.690**	**99,43**	**92,94**	**3,49**	**14.477.040.999**	**4,17**	**41,92**
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan**	**Dokumen**	**7**	**86.260.000**	**6**	**39.919.881**	**85,71**	**46,28**	**12**	**65.121.781**	**32,43**	**21,49**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	2	41.768.000	1	16.023.136	50,00	38,36	3	26.612.636	30,00	22,18

	Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah											
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	15.580.000	3	5.805.000	100,00	37,26	6	20.417.400	40,00	17,01
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	28.912.000	2	18.091.745	100,00	62,58	2	18.091.745	18,18	28,72
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan**	**laporan**	**1**	**5.172.097.157**	**1**	**4.939.505.897**	**100,00**	**95,50**	**2**	**8.596.325.131**	**33,33**	**35,62**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang bulan	490	5.058.073.157	455	4.825.841.897	92,86	95,41	945	8.380.109.131	38,57	35,73

	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	114.024.000	1	113.664.000	100	99,68	2	216.216.000	40,00	31,67
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah laporan**	**laporan**	**1**	**412.243.288**	**1**	**376.158.104**	**100,00**	**91,25**	**2**	**702.244.454**	**40,00**	**90,53**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	1	-	100	0,00	2	7.018.800	40,00	42,54
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	20.829.500	4	7.980.500	100	38,31	8	44.504.500	40,00	49,61
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5.024.600	2	3.326.000	100	66,19	4	20.302.000	40,00	37,60
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	12.147.000	1	6.000.000	100	49,39	2	31.993.000	40,00	29,08

	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	4.800.000	1	3.600.000	100	75,00	2	7.920.000	40,00	15,53
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	365.442.188	20	355.251.604	100	97,21	41	590.506.154	41,00	129,92
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Laporan rencana kebutuhan barang**	**Laporan**	**1**	**132.000.000**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**150.428.334**	**20,00**	**100,00**
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	100.000.000	0	-	0,00	0,00	1	98.480.334	11,11	0,98
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	32.000.000			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Laporan penyedia jasa**	**Laporan**	**1**	**2.824.300.000**	**1**	**2.666.990.808**	**100,00**	**94,43**	**2**	**4.860.296.799**	**40,00**	**54,74**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	23.100.000	12	20.610.808	100,00	89,22	24	36.816.799	40,00	28,76
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.801.200.000	1	2.646.380.000	100,00	94,47	2	4.823.480.000	40,00	55,12
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Laporan pemeliharaan**	**Laporan**	**1**	**23.670.000**	**1**	**17.680.000**	**100,00**	**74,69**	**2**	**49.814.500**	**40,00**	**30,19**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	unit	1	18.000.000	1	16.430.000	100,00	91,28	2	39.684.500	100,00	49,61

	atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya											
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	5.670.000	2	1.250.000	100,00	22,05	7	5.860.000	53,85	11,72
							Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**99,43**	**92,94**			**4,17**	**41,92**
							Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**S**	**T**
Meningkatnyakualitas pelayanan dan Optimalisasi Investasi	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Investor Berskala Nasional**	**Investor**	**550**	**81.564.600**	**231**	**-**	**42,00**	**0,00**	**735**	**266.062.500**	**105,00**	**54,86**
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kota	**Jumlah Event Pameran yang diikuti**	**Event**	**2**	**81.564.600**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**266.062.500**	**11,11**	**54,86**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten /Kota	Dokumen	2	81.564.600	0	-	0,00	**0,00**	1	266.062.500	11,11	54,86
							Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**42,00**	**0,00**			**105,00**	**54,86**
							Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**ST**	**ST**

	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Kenaikan Nilai realisasi Investasi**	**Persentase**	**13,6**	**145.984.000**	**28,22 %**	**94.522.150**	**207,50%**	**64,75**	**28,7622**	**254.784.850**	**100,00**	**44,23**
	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kota	**Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**	**Izin**	**700**	**145.984.000**	**1205**	**94.522.150**	**172,14**	**64,75**	**1876**	**254.784.850**	**53,40**	**44,23**
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan terpadu perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	600	124.664.000	483	94.522.150	80,50	**75,82**	1083	215.672.650	100,00	50,75
	Sub Kegiatan Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya	Orang	300	21.320.000	2	-	0,67	**0,00**	480	39.112.200	32,00	25,90

	terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan											
							Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**2,08**	**64,75**			**100,00**	**44,23**
							Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**ST**	**R**
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM**	**Persentase**	**59,91%**	**414.605.000**	**81,00 %**	**362.915.400**	**135,20**	**87,53**	**109,22%**	**738.290.400**	**1,09**	**7,35**
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perusahaan Yang menyampaikan LKPM**	**Perusahaan**	**276**	**414.605.000**	187	**362.915.400**	**67,75**	**87,53**	**289**	**738.290.400**	**41,82**	**73,46**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	221	325.155.000	229	276.516.400	103,62	85,04	319	537.794.900	144,34	160,54

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	88	89.450.000	60	86.399.000	68,18	96,59	60	86.399.000	68,18	25,79
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)								**135,20**	**87,53**			**1,09**	**7,35**
Predikat Kinerja								**T**	**S**			**SR**	**SR**
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	**Dokumen**	**1**	**15.000.000**	1	4.440.000	100,00	29,60	2	18.120.000	40,00	4,67
	Kegiatan Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten kota	Jumlah dokumen Perizinan dan Non perizinan	Dokumen	12	15.000.000	12	4.440.000	100,00	29,60	24	18.120.000	40,00	4,67
	Sub Kegiatan Pengelolaan penyazian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Dokumen	2	15.000.000	2	4.440.000	100,00	29,60	4	18.120.000	40,00	4,67

	perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)								**100,00**	**29,60**			**40,00**	**4,67**
Predikat Kinerja								**ST**	**R**			**R**	**SR**
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM			**9.307.724.045**		**8.502.132.240**							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)								**75,74**	**54,97**			**50,05**	**32,49**
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)								**S**	**SR**			**SR**	**SR**

Dari tabel diatas capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2023, di ketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pelaksanaan tupoksinya berdasarkan tujuan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dalam Renstra 2021-2026, pada Tahun 2023 ini menjalankan 5 Program, 11 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.307.724.045, dengan persentase serapan anggaran sebesar 91,34 % %, untuk capaian kinerja Program dapat di lihat bahwa dari 5 Program tersebut ada 2 program yang capaian indikatornya masih di bawah target, yaitu Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah (target Nilai IKM, 3,5, realisasi 3,48, (99,43% Capaian), dan Program Promosi Penanaman Modal dengan indicator Jumlah Investor berskala Nasional (target 550, terealisasi 231 Investor, capaian kinerja 42 %)

Sedangkan Capaian kinerja untuk Kegiatan dari 11 kegiatan hanya satu kegiatan yang indikator kinerjanya tidak mencapai target yakni Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indicator Jumlah Pelaku usaha yang menyampaikan LKPM (target perusahan yang menyampaikan LKPM sebanyak 276 namun terealisasi 187 perusahaan), hal ini di karenakan beberapa hal dan hal yang paling mendasar adalah kesadaran pelaku usaha yang sangat minim untuk melaksanakan kewajibanya dalam melaporkan laporan Penanaman modal, selain itu factor lainnya adalah kurangnya pengetahuan mengenai langkah langkah dan data data yang di perlukan pelaku usaha dalam melaporkan LKPM. Selain hal tersebut pada sub kegiatan Rencana Umum Penanaman Modal juga tidak terealisasi target yang ditetapkan hal ini karena ada pergeseran nomenklatur indicator yang semulanya indikatornya adalah naskah akademis RUPM menjadi Perda RUPM, Sedangkan untuk capaian indicator kinerja sub kegiatan secara keseluruhan mencapai target bahkan ada beberapa yang melebihi target indicator yang di tetapkan.

Sedangkan untuk Tahun berjalan 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 7.343.224.079, yang tersebar pada 6 Program, 10 Kegiatan dan 25 Sub

Kegiatan, hingga akhir Juni (31 Juni 2023) realisasi keuangan sebesar Rp Rp. 3.369.230.802 atau 45,88 %, Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP sampai dengan Tahun 2023 dan Perkiraan maju tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100 %	8	9 = 6+8	10 =9/4
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan Berusaha	100%	0	0	0	98,26	98,26	95,71
2.18.02.2-02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	7	0	0	0	1	1	42,86
2.18.02.2-02.02	Penyusunan Peta Potensi Kabupaten Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	5	0	0	0	1	1	20,00
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional	700	550	231	42%	600	450	140
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Pameran yang diikuti	9	2	0	0%	2	2	11,11
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	9	2	0	0%	2	2	11,11
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Nilai realisasi Investasi	15,24%	13,60%	28,22%	207,50%	14,4	200%	229,95

2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	3513	700	1205	172%	706	1400	57,42
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	675	600	483	80,50%	625	68	170,52
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan	1500	300	2	0,67%	300	1	32,07
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang menyampaikan LKPM	100%	59,91%	81%	135%	79,88%	27%	55,22
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang menyampaikan LKPM	691	276	187	67,75%	414	94	55
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	88	88	60	68,18%	88	88	41,82
2.18.05.2.01.01	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	0	0	0		190	190	118,95
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	221	221	229	103,62%	221	298	279,19
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	5	1	1	100,00%	1	1	40
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perizinan dan Non perizinan	60	12	12	100,00%	12	12	40

2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10	2	2	100,00%	2	2	40
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,52	3,5	3,48	99,43%	3,51	3,50	100
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	37	7	6	85,71%	8	7	43,24
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	10	2	1	50%	2	2	50,00
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	3	3	100%	3	2	53,33
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	2	2	100%	3	3	18,18
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	6	1	1	100%	1	1	33,33
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2450	490	455	92,86%	490	455	49,51
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	5	1	1	100%	1	1	60
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	5	1	1	100%	1	1	40
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	1	1	100%	1	1	40
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	4	4	100%	4	4	50
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	2	2	100%	2	2	60

2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	5	1	1	100%	1	1	40
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	1	1	100%	1	1	100
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	100	20	20	100%	20	20	61
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan penyedia jasa	5	1	1	100%	1	1	60
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	100%	12	12	40
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	1	1	100%	1	1	60
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	5	1	1	100%	1	1	40
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1	1	100%	1	1	100
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	2	2	100%	2	2	53,85

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun merupakan salah satu Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karimun yang mempunyai tugas membantu Bupati, dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan Terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun menyelenggarakan Fungsi :

a. Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
b. Pembinaan teknis atas penyelenggaraan fungsi penananam modal sesuai ketentuan perundang-undangan;
c. Pengendalian secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas; dan
d. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

Dalam rangka melaksanakan regulasi pemerintahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun berupaya memenuhi keinginan masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk peningkatan mutu pelayanan, baik dari segi prosedur pelayanan maupun kinerja personil pelayanan.

Oleh karena itu sangatlah strategis dilakukan kebijakan pemangkasan birokrasi pelayanan sehingga pelayanan perizinan dan non perizinan dapat menghemat waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat/pelaku usaha. Salah satu upaya peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat khususnya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Karimun

Dalam hal kinerja pelayanan jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Baik pelayanan perizinan bidang jasa usaha maupun pelayanan perizinan bidang tertentu.
2. Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Melaksanakan pelayanan pengaduan perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha.
4. Menyelenggarakan event promosi terkait peluang potensi unggulan daerah.
5. Melaksanakan peningkatan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei dalam rangka penerbitan izin.

Pada tabel berikut disajikan terkait analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.

Tabel 2.4

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DPMPTSP KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023

No	INDIKATOR KINERJA	SPM / IKK	TARGET RENSTRA TAHUN KE					Capaian Tahun 2023	Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal		3.49	3.50	3.51	3.51	3.52	3,49	
2.	Persentase kenaikan PMDN dan PMA		6	9	10	12	14	6,79	
3.	Nilai AKIP		76.30	76.30	76.40	76.40	76.50	60,35	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan /keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan masih mengalami beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus untuk segera diselesaikan secara bertahap. Isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun adalah :

1. Kurangnya data potensi dan informasi potensi dan peluang investasi yang komprehensif menyajikan data terkait investasi.
2. Kurangnya kemampuan pelaku usaha dalam mengisi data LKPM yang disampaikan sehingga laporan belum optimal.
3. Belum tersedianya sistem perencanaan Penanaman Modal yang *ready to offer.*
4. Adanya peralihan aplikasi Perizinan dari Online Single Submission (OSS) ke Sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA).
5. Terbatasnya SDM ASN yang memiliki kompetensi teknis dalam pengoperasian sistem aplikasi perizinan.
6. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan yang akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun maka perlu upaya tindak lanjut sebagai berikut : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, pengkajian dan Penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Isu-isu yang berkembang tersebut menuntut adanya action dan perubahan kearah yang lebih baik. Upaya yang harus diperhatikan oleh Pemerintah akan hal-hal tersebut sangat diperlukan untuk kenyamanan semua pihak baik itu calon investor Luar Negeri ataupun calon Investor Dalam Negeri. Juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.5

Pemetaan Permasalahan Sesuai dengan Tugas dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan Iklim Investasi	Kurangnya data potensi dan informasi potensi dan peluang investasi yang komprehensif menyajikan data terkait investasi.
		Promosi	Masih kurangnya kegiatan promosi.
			Belum lengkapnya informasi secara digital tentang peluang dan potensi investasi yang efektif dan efisien untuk menarik investor
			Data potensi investasi yang perlu di mutakhirkan sebagai bahan promosi
2.	Peningkatan Standar Pelayanan	Regulasi/aturan pelaksanaan	Peraturan perundang-undangan yang sering berubah
			Sering terjadi benturan antara peraturan perundang-undangan terkait perizinan
		Pelaku Usaha	Masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam sistem informasi dan pelayanan perizinan berbasis teknologi
		Sarana dan Prasarana	Belum terpenuhi semua sarana dan prasarana pelayanan.
			Jumlah sarana dan prasarana yang ada sudah melebihi masa manfaat sehingga dibutuhkan peremajaan
3.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Perusahaan	Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

2.4 Review Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun

Dalam upaya untuk mewujudkan Kabupaten Karimun sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa yang dilaksanakan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah, dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun akan mengemban misi ke 1 (satu). Misi pembangunan daerah Kabupaten Karimun sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal**.
2. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dalam rangka mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa.
4. Meningkatkan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup.
5. **Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul.**

Dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang berkeadilan Melalui Pemberdayaan UMKM dan Penguatan Ketahanan Pangan.
2. Meningkatkan Infrastruktur yang merata dan Berkeadilan untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Melalui Penguatan Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2024 dapat dilihat pada table 2.6 berikut:

Tabel 2.6

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun

Kode	Uraian	Indikator	Lokasi	Satuan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp.)	T+1	Prioritas Daerah
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					7.947.155.000,00	8.566.362.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					7.947.155.000,00	8.566.362.000,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					7.947.155.000,00	8.566.362.000,00	
2.18.01..	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat		Nilai	3,51 Nilai	6.902.155.000,00	7.164.352.079,00	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		Dokumen	8	120.000.000,00	150.000.000,00	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen	3	40.000.000,00	50.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan	3	40.000.000,00	50.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	2	40.000.000,00	50.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.353.802.079,00	5.353.802.079,00	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Orang/bulan	490	5.217.242.079,00	5.217.242.079,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1	136.560.000,00	136.560.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif

2.18.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100.000.000,00	280.000.000,00	
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Orang	3	100.000.000,00	280.000.000,00	Peningkatan Sumber Daya Manusia
2.18.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					373.802.921,00	391.000.000,00	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Paket	1	5.000.000,00	7.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Paket	4	50.000.000,00	50.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Paket	2	5.000.000,00	8.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Paket	1	50.000.000,00	60.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen	1	6.000.000,00	6.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan	20	257.802.921,00	260.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					245.000.000,00	250.000.000,00	
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Unit	4	150.000.000,00	100.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Unit	4	60.000.000,00	100.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif

2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Unit	1	35.000.000,00	50.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					654.550.000,00	659.550.000,00	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan	12	25.000.000,00	30.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan	1	629.550.000,00	629.550.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					55.000.000,00	80.000.000,00	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Unit	1	35.000.000,00	40.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Unit	2	10.000.000,00	20.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Unit	1	10.000.000,00	20.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.02..	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					200.000.000,00	150.000.000,00	
2.18.02.2.01.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000,00	0,00	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen	1	100.000.000,00	0,00	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.18.02.2.02.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					100.000.000,00	150.000.000,00	

2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Daerah	2	100.000.000,00	150.000.000,00	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.18.03..	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					250.000.000,00	350.000.000,00	
2.18.03.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					250.000.000,00	350.000.000,00	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen	2	150.000.000,00	200.000.000,00	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen	1	100.000.000,00	150.000.000,00	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.18.04..	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					220.000.000,00	352.009.921,00	
2.18.04.2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					220.000.000,00	352.009.921,00	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen	3	40.000.000,00	75.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelaku Usaha	650	100.000.000,00	127.009.921,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelaku Usaha	300	35.000.000,00	75.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif

2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kegiatan Usaha	1	45.000.000,00	75.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.05..	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					300.000.000,00	450.000.000,00	
2.18.05.2.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					300.000.000,00	450.000.000,00	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kegiatan Usaha.	180	100.000.000,00	150.000.000,00	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelaku Usaha	221	100.000.000,00	150.000.000,00	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kegiatan Usaha	88	100.000.000,00	150.000.000,00	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

2.18.06..	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					75.000.000,00	100.000.000,00	
2.18.06.2.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					75.000.000,00	100.000.000,00	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen	2	75.000.000,00	100.000.000,00	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
						7.947.155.000,00	**8.566.362.000,00**	

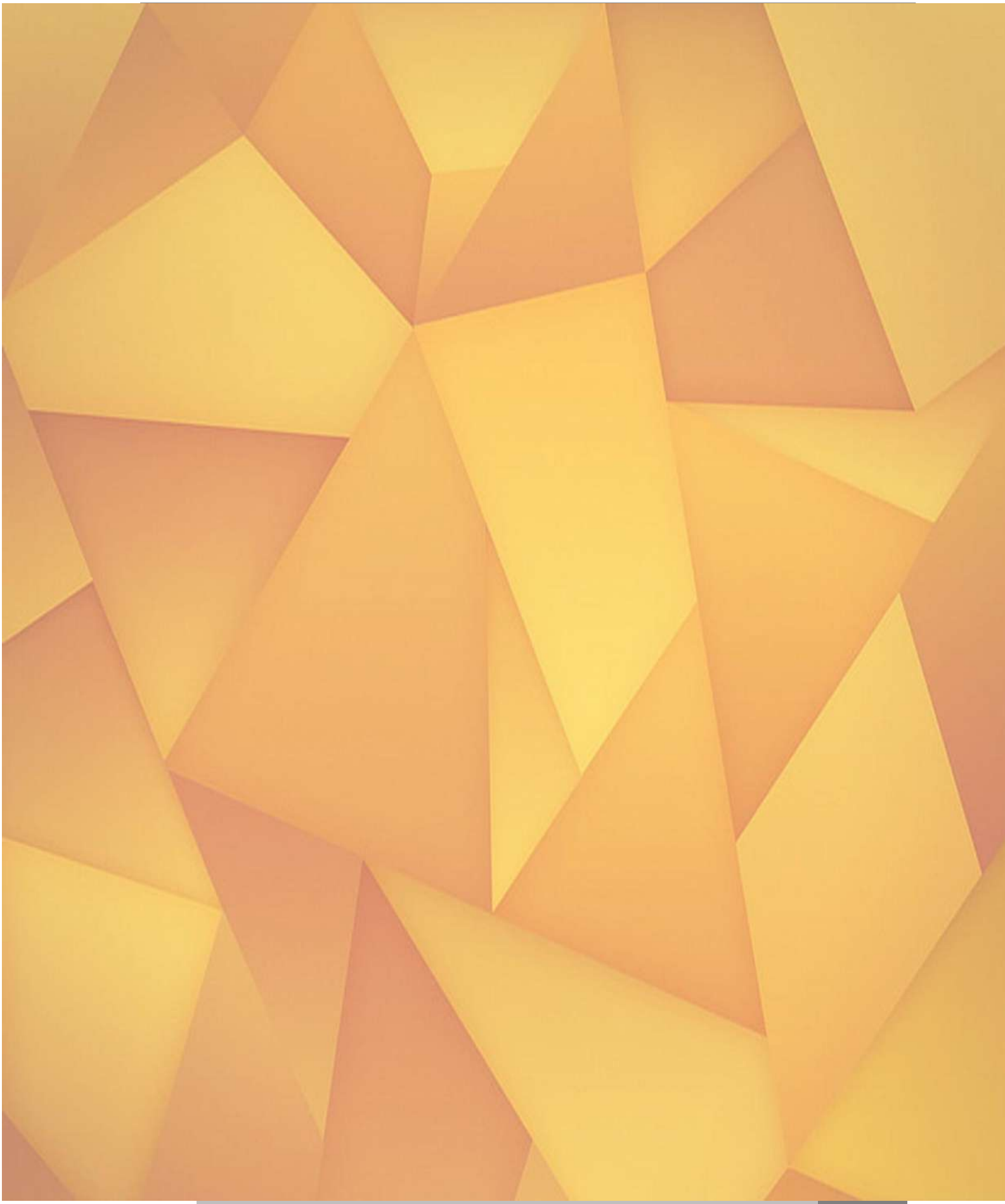

BAB. III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2020 – 2024 yang merupakan tema pembangunan tahun 2020 – 2024, yaitu *"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*. Visi Misi Presiden tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM telah menetapkan dua arah kebijakan dan startegi yang akan dilakukan pada masing-masing arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra BKPM Tahun 2020 – 2024 yaitu :

1. Arah kebijakan pertama : peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs).
b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
c. Meningkatkan efektivitas kerjasama penanaman modal
d. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal
e. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal
f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal
g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

3. Arah kebijakan kedua : peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan bekelanjutan. Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020 – 2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut:
   a. Meningkatkan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja
   b. Meningkatkan produktivitas penanaman modal
   c. Meningkatkan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi
   d. Meningkatkan daya saing dan akses pasar
   e. Meningkatkan penanaman modal pada industry yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor
   f. Meningkatkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar
   g. Meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber daya alam di dalam negeri.

Berdasarkan dokumen perencanaan nasional, Investasi menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional selain ekspor dikarenakan :

1) Investasi akan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas yang apabila dapat dipenuhi oleh ketersediaan tenaga kerja yang ada akan menurunkan angka pengangguran pasca pandemik.
2) Investasi akan meningkatkan perekonomian yang sempat turun karena dampak pandemi Covid–19 baik melalui pembangunan unit usaha baru, peningkatan kapasitas produksi maupun perluasan usaha.

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan merealisasikan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan tujuan untuk suatu periode sebagai suatu ukuran keadaan yang ingin diwujudkan dalam skala periode terbatas (sampai dengan lima tahun). Tujuan akan menentukan bagian-bagian tujuan yang lebih pendek atau sasaran yang akan diwujudkan sebagai indikator dapat tidaknya suatu tujuan terwujud.

Tujuan yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun mengacu sepenuhnya pada tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut :

" Meningkatnya Investasi Daerah "

3.2.2 Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun merupakan kondisi yang diprediksikan untuk dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategis secara berkelanjutan. Adapun sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun yaitu :

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi"

Strategi atau cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dan yang menjadi prioritas adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Promosi Investasi.
2. Implementasi Pelayanan Prima yang optimal.
3. Peningkatan fasilitas penunjang kualitas pelayanan publik.
4. Pengembangan Kompetensi SDM sesuai dasar konsep service excelent (kemampuan/ abilit, sikap/ Attitude, tanggung jawab/ Accountability, kerjasama) untuk terjapainya tujuan organisasi.
5. Peningkatan manajemen perencanaan penganggran dan administrasi keuangan OPD.

Arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dapat dijabarkan seperti berikut :

1. Menyediakan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat sehingga dapat memberi kejelasan kepada calon investor sekaligus membantu mereka dalam pengambilan keputusan investasi.
2. Menjalin kerjasama media-media promosi skala nasional dan internasional dalam menyebarkan Informasi tentang peluang da potnsi investasi daerah
3. Keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis vent-event antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah lain
4. Penyempurnaan regulasi dan kebijakan yang mendukung pelayanan untuk terciptanya kepastian dan kemudahan berusaha
5. Meningkatkan partisipasi publik dalam monitoring dan evaluasi pelayanan perijinan dan penanaman modal
6. Mewujudkan penanganan pengaduan yang lebih responsive
7. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk keudahan berusaha

8. Menjalin koordinasi dengan perangkat daerah untuk menunjang kelancaran dalam melaksananan tugas pelayanan
9. Melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika kondisi dan peraturan yang ada untk mendukung terciptanya pelayanan prima.
10. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal melalui pasilitasi penanaman modal dalam bentuk pembinanaan, pengawasan dan pengendalian.

Uraian tujuan dan sasaran strategis pada penyusunan perencanaan DPMPTSP Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Strategis
Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah
DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya kualitas pelayananan dan Optimalisasi Investasi	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3.51
			Persentase kenaikan PMDN dan PMA	12%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai AKIP	76.40

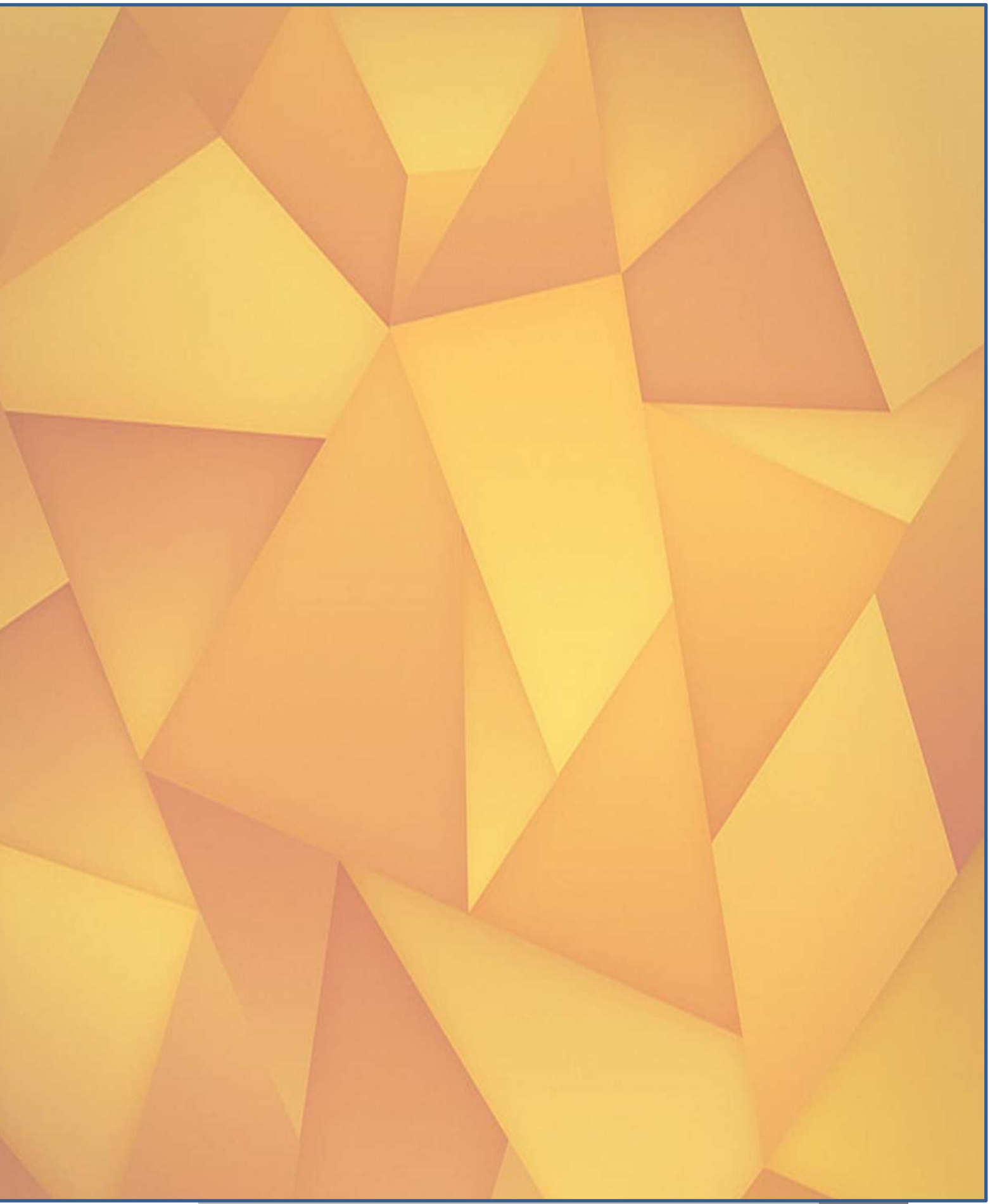

BAB.IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayananan dan Optimalisasi Investasi dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD telah ditetapkan sasaran melalui Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal, Persentase kenaikan PMDN dan PMA, dan Nilai AKIP. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Program

a. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang ruang lingkupnya Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pada program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Kenaikan Nilai realisasi Investasi sebesar 14,7 %.

b. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Program ini diarahkan pada kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator jumlah dokumen pengelolaan data dan informasi penanaman modal sebanyak 1 dokumen.

c. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah; dan pembuatan peta potensi investasi kabupaten. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan Berusaha dengan target sebesar 98.99 %.

d. Program Promosi Penanaman Modal.

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Jumlah Investor Berskala Nasional dengan target jumlah investor sebanyak 650 investor.

e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM dengan target sebesar 89,86 %.

f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program ini diarahkan pada kegiatan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target indeks sebesar 3.51.

2. Perencanaan Kegiatan

a. Program Pelayanan Penanaman Modal

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan

Pagu : Rp. 170.000.000

Indikasi kegiatan :

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

a. Sub Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
b. Sub Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

b. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Tujuan : Meningkatkan kualitas data dan informasi yang lengkap Akurat dan mutakhir.

Pagu : Rp. 15.000.000,-

Indikasi kegiatan :

Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

c. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Tujuan : Meningkatkan Iklim Investasi sehingga realisasi investasi turut meningkat.

Pagu : Rp. 0

Indikasi kegiatan :

1) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan
   b. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
2) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi dengan sub kegiatan:
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota; dan
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

d. Program Promosi Penanaman Modal

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi

Pagu : Rp. 50.000.000

Indikasi kegiatan :

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

a. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal; dan
b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tujuan : Meningkatkan Nilai Investasi

Pagu : Rp. 784.436.000

Indikasi kegiatan :

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

a. Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
c. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Pagu : Rp. 6.710.413.263

Indikasi kegiatan :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
   c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD; dan
   b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD.
4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
   b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; dan
   c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
   g. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material; dan
   h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD.
6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

c. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
e. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
f. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
   f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
   g. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Uraian rumusan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karimun untuk tahun perencanaan 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karimun Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE PRJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
										NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						8.806.822.608							8.566.362.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.806.822.608							8.566.362.000
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						8.806.822.608							8.566.362.000
2.18.01..	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,5	3,48	3,5	3,51	7.788.402.608	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	3,52	7.164.352.079
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	37	6	4	8	31.306.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	7	150.000.000
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	1	2	3	20.000.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	2	50.000.000

2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	3	2	3	6.306.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	3	50.000.000
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	2	0	2	5.000.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	2	50.000.000
2.18.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	6	1	1	1	6.365.546.608	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	5.353.802.079
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2450	455	490	490	6.275.042.608	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	490	5.217.242.079
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	1	1	1	90.504.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	136.560.000

2.18.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlahpegawai mendapat pelatihan bimteks	60	63	63	60	300.000.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	DPMPTSP Kab Karimun	60	280.000.000
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	16	16	3	300.000.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	DPMPTSP Kab Karimun	3	280.000.000
2.18.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	5	1	1	1	244.640.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	391.000.000
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	4.000.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	7.000.000
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	4	4	4	20.000.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	4	50.000.000
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	2	2	2	5.000.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	2	8.000.000

2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	1	1	1	10.506.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	60.000.000
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	1	1	1	4.800.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	6.000.000
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	20	20	20	200.334.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	20	260.000.000
2.18.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan rencana kebutuhan barang	5	1	1	1	-		PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	250.000.000
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9	0	0	4	-	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	4	100.000.000
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	0	0	4	-	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	4	100.000.000
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1	0	0	1	-	Kab. Karimun, Semua	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan	Tata Kelola Pemerinta	DPMPTSP Kab Karimun	1	50.000.000

	Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						Kecamatan, Semua Kel/Desa		transformasi pelayanan publik	han Inovatif			
2.18.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5	1	1	1	824.400.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	659.550.000
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	15.000.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	12	30.000.000
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	809.400.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	629.550.000
2.18.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	5	1	1		22.510.000		PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun		80.000.000
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1	1	18.010.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	40.000.000
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	2	2	2	4.500.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	2	20.000.000

2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	0	0	1	-	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	DPMPTSP Kab Karimun	1	20.000.000
2.18.02..	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan Berusaha	100 %	0	0	98,99	-		PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	100	150.000.000
2.18.02.2.01.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi perusahaan yang mendapatkan insentif dan kemudahan berusaha	5	0	0	3	-		PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	2	-
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	0	0	1	-	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	0	-
2.18.02.2.02.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	7	0	0	2	-		PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	1	150.000.000
2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	2	0	0	2		Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	1	150.000.000

2.18.03..	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional	700	231	245	650	50.000.000		PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	700	350.000.000
2.18.03.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Pameran yang diikuti	9	0	2	2	50.000.000		PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	2	350.000.000
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5	0	2	2	50.000.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	2	200.000.000
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	9	0	0	1	-	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	1	150.000.000
2.18.04..	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kenaikan Nilai realisasi Investasi	15,2	28,48	14,4	14,7	318.984.000		PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Pelaku Usaha	15,2	352.009.921
2.18.04.2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	3513	671	706	715	318.984.000		PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Pelaku Usaha	722	352.009.921

2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	6	0	0	3	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Pelaku Usaha	0	75.000.000
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	675	600	625	650	250.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Pelaku Usaha	675	127.009.921
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1500	478	300	300	68.984.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Pelaku Usaha	300	75.000.000

2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	4	0	0	1	-	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	Pelaku Usaha	1	75.000.000
2.18.05..	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	100	28,22		99,86	634.436.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	100	450.000.000
2.18.05.2.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang menyampaikan LKPM	691	187		552	634.436.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	691	450.000.000
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	190	0	170	180	95.165.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	190	150.000.000

2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	221	90	221	221	348.941.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	221	150.000.000
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	88	0	88	88	190.330.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	88	150.000.000
2.18.06..	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	5	1	1	1	15.000.000		PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	1	100.000.000
2.18.06.2.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perizinan dan Non perizinan	60	12	12	12	15.000.000		PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	12	100.000.000

2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10	2	2	2	15.000.000	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha	1	100.000.000
							8.806.822.608							

BAB. V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Dokumen ini telah mengakomodir tindak lanjut dari isu-isu strategis percepatan pemulihan ekonomi dengan mengoptimalkan keterbatasan anggaran yang ada. Oleh karena itu, komitmen dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh sumber daya manusia di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Karimun sangat diperlukan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan- kegiatan tersebut dan guna terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak. Rencana Kerja Tahun 2025 ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Karimun melalui perwujudan good govermance dan peningkatan realisasi investasi.

Tanjung Balai Karimun, 31 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun,

Muhammad Yosli, S.T., M.Si.
NIP. 19740512 200003 1 005

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARIMUN

Komplek Perkantoran Bupati Gedung Bukit Gading
Jl.Sudirman-Poros Tanjung Balai Karimun
Telp.(0777) 7366036, 7366037, Fax.(0777) 7366009
Email : bpmpt.kab.karimun@gmail.com
Website : https://dpmptsp.karimunkab.go.id/

RENJA 2025

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARIMUN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas rumah tangga daerah bidang kepemudaan dan keolahragaan sekaligus penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025.

Rencana kerja tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja tahun 2025 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun selama tahun 2025.

Dalam urusan kepemudaan dan keolahragaan Rencana Kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tanjung Balai Karimun, Juni 2024

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARIMUN

USMAN,S.Si, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19720709 200003 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI..... 3

BAB I PENDAHULUAN..... 4

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud Dan Tujuan..... 8

1.4 Sitematika Penulisan 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU . 11

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023 Lalu Dan Capaian Renstra OPD Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kab. Karimun 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kab Karimun 54

2.2.1 Tugas Pokok..... 54

2.2.2 Tugas Fungsi 54

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Funsi OPD 71

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 73

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 84

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 89

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 89

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dispora Kabupaten Karimun..... 93

3.3 Program Dan Kegiatan… 95

BAB IV PENUTUP..... 112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Untuk melaksanakan pembangunan daerah diperlukan berbagai dokumen perencanaan yang terkait, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun, Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk periode 5 (lima) tahun, serta Renja (Rencana Kerja) OPD yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode (1) satu tahun. Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karimun.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Penyusunan Renja OPD ini diperlukan keterkaitan dokumen perencanaan lainya, Renja OPD dibuat dengan mengacu pada Renstra OPD dan RKPD Pemerintan Kabupaten Karimun yang

secara keseluruhan harus sinkron dengan dokumen perencanaan RPJP Nasional, RPJMD Daerah, selanjutnya Renja OPD di implementasi kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD sebagai penjabaran APBD Kabupaten Karimun.

Penjabaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dituangkan dalam bentuk narasi dan tabel –tabel yang memuat hasil evaluasi, analisa dan perencanaan tahun lalu dan prakiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun tahun 2025 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Iventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daetah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Karimun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 46);
16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 75);

17. Peraturan Bupati Karimun Nomor 77 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 77);
18. Peraturan Bupati Karimun Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 86).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan naskah Renja OPD merupakan acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegaiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu maksud disusunnya Renja Tahun 2025 adalah :

1. Renja merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi dan akan jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.
2. Menyediakan dokumen rencana teknis tahun 2025, sebagai dasar masukkan untuk penyusunan RKPD, KUA dan PPAS dengan menggunakan pendekatan kinerja yang terukur tahun 2025,serta menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja tahun 2025 Dinas Kepemudaan dan Olahraga secara terukur.

Perumusan Renja merupakan jawaban akan perubahan lingkungan srtategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan Renja menjadi sangat penting.

Adapun tujuan penyusunan Renja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks dan menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;

2. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik laporan realisasi anggaran triwulanan, tahunan, serta SAKIP dan masukan bagi penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Karimun;
3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat;
4. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertical maupun horizontal antara unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapian tujuan organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.
1.2. Landasan Hukum.
1.3. Maksud dan Tujuan.
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Karimun.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Karimun.
2.2.1 Tugas Pokok
2.2.2 Fungsi
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
3.1. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Karimun.
3.2. Program dan Kegiatan.

IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2023

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Karimun

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun tahun 2023 dan realisasi Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun mengacu pada hasil laporan kinerja tahun 2023 dan/atau realisasi APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun.

Ada pun Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Tahun Anggaran 2023;

No.	Sasaran	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2022 s/d 2026)	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output) (Renstra 2022 s/d 2026)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)								Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Anggaran 2023												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
																				I			II			III			IV					
1	2	3						4	5	6	9									10			11			12			13			14 = 10+11+12+13		18
											Renja		APBD Murni		Pergeseran I		APBD Perubahan																	
											K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	F	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	Rp	
								PELAKSANAAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																												
								Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga																												
1	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD**	**2**	**19**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Persen**	**80**	**5.753.127.962**	**80**	**7.021.527.829**	**80**	**-**	**80**	**6.893.090.990**	**0**	**16,4**	**1.133.015.199**	**0**	**21,87**	**1.507.796.387**	**0**	**25,1**	**1.733.258.710**	**89,48**	**19,2**	**1.322.535.672**	**89,48**	**5.696.605.968**	
		2	**19**	**03**	**2**	**01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**Dokumen**	**5**	**144.200.000**	**4**	**120.084.839**	**0**	**-**	**4**	**104.644.839**	**2**	**38,2**	**39.980.600**	**2**	**44,59**	**46.659.384**	**2**	**9,1**	**9.471.700**	**0**	**0**	**-**	2	**96.111.684**	
		2	19	03	2	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	77.250.000	2	60.084.670	0	-	2	50.864.670	2	44,5	22.650.000	2	43,22	21.984.815	**2**	10,1	5.139.700	**0**	0	-	2	49.774.515	
		2	19	03	2	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	66.950.000	2	60.000.169	0	-	2	53.780.169	2	32,2	17.330.600	2	45,88	24.674.569	**2**	8,055	4.332.000	**0**	0	-	2	46.337.169	
		2	**19**	**03**	**2**	**01**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**Laporan**	**2**	**2.625.259.569**	**2**	**3.277.576.576**	**0**	**-**	**1**	**3.172.672.463**	**2**	**18,74**	**594.530.784**	**2**	**26,39**	**837.321.937**	**2**	**26,49**	**840.549.381**	**2**	**20,7**	**656.385.530**	**2**	**837.321.937**	

		2	1 9	0 3	2	0 1	0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang Bulan	24	2.500.151 .649	25	3.195.296 .576	0	-	25	###### ###	21	19, 4	594.530.7 84	21	26,39	809.802.9 37	**25**	26,4	809.257.3 81	**25**	20,9	640.739.5 30	25	2.854.330 .632	
		2	1 9	0 3	2	0 1	0 3	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Doku men	24	125.107.9 20	22	82.280.00 0	0	-	22	104.076.0 00	0	0	-	1	26,44	27.519.00 0	1	30,0 7	31.292.00 0	2	15,0	15.646.00 0	25	74.457.00 0	
		2	**1 9**	**0 1**	**2**	**0 6**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**Lapor an**	**9**	**176.030. 000**	**9**	**176.088. 996**	**0**	**-**	**9**	**361.100. 996**	**9**	**9,4 0**	**33.958.0 00**	**9**	**12,36**	**44.618.1 45**	**9**	**22, 3**	**80.534.2 84**	**9**	**36, 6**	**132.280. 983**	**9**	**291.391. 412**	
		2	1 9	0 1	2	0 6	0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15	1.030.000	15	5.999.208	0	-	15	5.999.208	0	0	-	0	0,00	-	0	0	-	8	100	5.994.700	8	5.994.700	
		2	1 9	0 1	2	0 6	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	35	30.900.00 0	35	28.558.94 3	0	-	35	28.558.94 3	0	0	-	4	28,65	8.181.255	4	22,5	6.421.557	4	17,4	4.957.679	4	19.560.49 1	
		2	1 9	0 1	2	0 6	0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20	5.050.000	20	9.024.729	0	-	20	9.024.729	0	0	-	6	16,62	1.500.000	6	18,2	1.646.727	0	0	-	12	3.146.727	
		2	1 9	0 1	2	0 6	0 5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Lemba r	# #	10.300.00 0	# # #	19.242.11 6	0	-	# # #	33.258.11 6	30	4,2 4	1.410.000	15 0	4,86	1.615.050	300 0	63,7	21.180.00 0	64	4,5	1.500.000	3244	25.705.05 0	
		2	1 9	0 1	2	0 6	0 6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Doku men	20	25.750.00 0	20	25.900.00 0	0	-	20	41.950.00 0	5	19, 9	8.360.000	0	0,00	-	10	29,9	12.540.00 0	0	0	-	15	20.900.00 0	
		2	1 9	0 1	2	0 6	0 9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor an	55	103.000.0 00	50	87.364.00 0	0	-	50	242.310.0 00	10	10, 0	24.188.00 0	12	13,75	33.321.84 0	14	16,0	38.746.00 0	16	49,5	119.828.6 04	52	216.084.4 44	
		2	**1 9**	**0 1**	**2**	**0 7**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan**	**Lapor an**	**1**	**411.000. 000**	**1**	**672.982. 753**	**0**	**-**	**1**	**204.456. 711**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**-**	**1**	**51, 2**	**104.686. 000**	**1**	**2,1**	**4.350.00 0**	**1**	**109.036. 000**	
		2	1 9	0 1	2	0 7	0 6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	50.500.00 0	3	59.983.22 3	0	-	3	85.189.32 3	0	0	-	0	0,00	-	0	0	-	1	5,1	4.350.000	1	4.350.000	
		2	1 9	0 1	2	0 7	0 9	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	103.000.0 00	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	0,00	-	0	0	-	0	0	-	0	**-**	
		2	1 9	0 1	2	0 7	1 0	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	257.500.0 00	4	612.999.5 30	0	-	1	119.267.3 88	0	0	-			-	1	87,8	104.686.0 00	0	0	-	1	**104.686. 000**	
		2	**1 9**	**0 1**	**2**	**0 8**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan**	**Lapor an**	**1**	**2.090.63 8.393**	**1**	**1.897.03 7.180**	**0**	**-**	**1**	**2.240.28 0.282**	**1**	**20, 7**	**463.714. 115**	**1**	**24,14**	**540.854. 321**	**1**	**21, 2**	**475.215. 829**	**1**	**22, 9**	**513.072. 259**	**1**	**1.992.85 6.524**	
		2	1 9	0 1	2	0 8	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapor an	12	160.000.0 00	12	148.227.1 80	0	-	12	166.170.2 82	3	21, 8	36.299.11 5	3	20,02	33.269.32 1	3	22,0	36.530.82 9	3	31,6	52.447.25 9	12	**158.546. 524**	

		2	19	01	2	08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	7	30.638.393	4	34.310.000	0	-	4	71.810.000	1	1,0	700.000	0	0,00	-	1	20,9	15.000.000	2	58,5	42.000.000	4	**57.700.000**	
		2	19	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	110	1.900.000.000	110	1.714.500.000	0	-	110	##########	97	21,3	426.715.000	97	25,35	507.585.000	95	21,2	423.685.000	95	20,9	418.625.000	95	**1.776.610.000**	
		2	**19**	**01**	**2**	**09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan**	**Laporan**	**1**	**306.000.000**	**1**	**877.757.485**	**1**	**-**	**1**	**809.935.699**	**1**	**0,1**	**831.700**	**1**	**4,73**	**38.342.600**	**1**	**27,5**	**222.801.516**	**1**	**2,0**	**16.446.900**	**1**	**278.422.716**	
		2	19	01	2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	0,00	-	0	0	-	0	0	-	0	**-**	
		2	19	01	2	09	07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	154.500.000	10	104.998.970	0	-	10	111.998.776	1	0,7	831.700	2	19,23	21.541.000	3	31,1	34.816.516	4	12,5	13.989.900	10	**71.179.116**	
		2	19	01	2	09	08	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	51.500.000	1	22.760.200	0	-	1	12.363.600	0	0		1	99,60	12.313.600	0	0	-	0	0	-	1	**12.313.600**	
		2	19	01	2	09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3	100.000.000	5	749.998.315	0	-	4	685.573.323	0	0	-	1	0,65	4.488.000	2	27,4	187.985.000	1	0,4	2.457.000	4	**194.930.000**	
																																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		
																																Predikat Kinerja		
2	**Meningkatnya sumber daya pemuda yang produktif dan berdaya saing**	**2**	**19**	**02**				**Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan**	**Persentase organisasi pemuda yang aktif**	**Persen**	**73**	**1.133.000.000**	**65**	**1.749.999.403**	**0**	**-**	**65**	**1.719.864.936**	**15**	**24,13**	**415.040.200**	**15**	**27,94**	**480.525.701**	**25**	**41,81**	**719.159.000**	**10**	**3,3**	**56.952.500**	**65**	**480.525.701**	
		2	**19**	**02**	**2**	01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**jumlah peserta**	**Orang**	**600**	**1.081.500.000**	**595**	**974.999.438**	**0**	**-**	**595**	**1.027.874.971**	**200**	**16,54**	**170.040.200**	**50**	**5,83**	**59.896.201**	**325**	**69,13**	**710.519.000**	**20**	**5,5**	**56.952.500**	**595**	**997.407.901**	
		2	19	**02**	2	01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan	Orang	65	103.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	0,00	-	0	0	-	0	0	-	0	**-**	

							Saing Wira Usaha Pemula	Kapasitas Daya Saingnya																												
		2	1 9	**0 2**	2	0 1	0 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	75	103.000.000	250	174.999.739	0	-	250	244.865.272	250	60,3	147.759.200	250	4,45	10.901.701	250	5,8	14.166.000	250	23,3	56.952.500	250	229.779.401	
		2	1 9	**0 2**	2	0 1	0 7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Orang	20	103.000.000	20	-	0	-	50	-	0	0	-	0	0,00	-	0	0	-	0	0	-	0	-	
		2	1 9	**0 2**	2	0 1	0 9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Orang	325	772.500.000	325	799.999.699	0	-	325	783.009.699	300	2,8	22.281.000	300	6,26	48.994.500	33	88,9	696.353.000	0	0	-	33	767.628.500	
		2	**1 9**	**0 2**	**2**	0 2		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah peserta**	**Orang**	**130**	**51.500.000**	**130**	**774.999.965**	**130**	**-**	**130**	**691.989.965**	**40**	**35,41**	**245.000.000**	**50**	**60,79**	**420.629.500**	**10**	**1,2**	**8.640.000**	**0**	**0**	**-**	**100**	**674.269.500**	
		2	1 9	**0 2**	2	0 2	0 2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	1	51.500.000	1	774.999.965	0	-	1	691.989.965	1	35,4	245.000.000	1	60,79	420.629.500	1	1,2	8.640.000	0	0	-	1	674.269.500	
																																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		
																																Predikat Kinerja		
3		**2**	**1 9**	**0 3**				**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**Cakupan Pembinaan Olahraga**	**Persen**	**11**	**1.387.500.000**	**14,2**	**7.254.498.434**	**0**	**-**	**14,2**	**7.956.258.153**	**14,2**	**6,3**	**500.000.000**	**14,2**	**17,44**	**1.387.824.000**	**14,2**	**14,45**	**1.149.585.000**	**14,2**	**33,1**	**2.635.143.469**	**14,2**	**5.672.552.469**	
		2	1 9	0 3	2	0 1		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Peserta**	**Peserta**	**75**	**154.500.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	
		2	1 9	0 3	2	0 1	0 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	5	154.500.000	6	-	0	-	6	-	0	0	-	0	0,00	-	0	0	-	0	0	-	0	-	
		2	1 9	0 3	2	0 2		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyelnggraan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Event**	**50**	**309.000.000**	**6**	**2.229.477.995**	**0**	**-**	**6**	**2.260.183.854**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0,00**		**2**	**4,4**	**100.373.500**	**4**	**80,1**	**1.809.659.819**	**6**	**1.910.033.319**	

		2	1 9	0 3	2	0 2	0 2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	6	206.000.000	6	2.079.477.995	0	-	6	#########	0	0	-	0	0,00	-	2	4,3	83.157.000	4	82,6	#########	6	1.663.427.400	
		2	1 9	0 3	2	0 2	0 3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	4	103.000.000	5	150.000.000	0	-	5	347.209.784	0	0	-	0	0,00	-	2	5,0	17.216.500	3	66,1	229.389.419	5	246.605.919	
		2	**1 9**	**0 3**	**2**	**0 3**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Cakupan Pembinaan olahraga daerah**	**Cakupan**	**15**	**515.000.000**	**4**	**1.123.259.690**	**0**	**-**	**4**	**1.073.675.050**			**-**	**4**	**76,08**	**816.856.000**	**7,00**	**4**	**75.114.000**	**4**	**12,7**	**136.580.250**	**4**	**1.028.550.250**	
		2	1 9	0 3	2	0 3	0 1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	40	154.500.000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	0,00	-	0	0	-	0	0	-	0	-	
		2	1 9	0 3	2	0 3	0 2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Platda	4	206.000.000	3	223.259.690	0	-	3	284.675.050	0	0	-	3	14,13	40.224.000	3	25,7	73.114.000	3	48,0	136.580.250	3	249.918.250	
		2	1 9	0 3	2	0 3	0 4	Pemberian Penghargaan Olahraga	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang	200	154.500.000	200	900.000.000	0	-	200	789.000.000	0	0	-	503	98,43	776.632.000	0	0,3	2.000.000	0	0	-	503	778.632.000	
		2	**1 9**	**0 3**	**2**	**0 4**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Jumlah cabor**	**Cabor**	**15**	**204.000.000**	**15**	**3.056.093.249**	**0**	**-**	**15**	**3.699.393.249**	**4**	**13,52**	**500.000.000**	**3**	**8,88**	**328.495.000**	**5**	**17,3**	**638.893.000**	**3**	**11,2**	**412.924.800**	**15**	**1.880.312.800**	
		2	1 9	0 3	2	0 4	0 2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen	8	204.000.000	14	3.056.093.249	0	-	14	#########	3	13,52	500.000.000	2	8,88	328.495.000	5	17,3	638.893.000	4	11,2	412.924.800	14	328.495.000	
		2	**1 9**	**0 3**	**2**	**0 5**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Jumlah peserta**	**Peserta**	**100**	**205.000.000**	**150**	**845.667.500**	**0**	**-**	**150**	**923.006.000**	**0**	**0**	**-**	**25**	**26,27**	**242.473.000**	**100**	**36,3**	**335.204.500**	**25**	**29,9**	**275.978.600**	**150**	**853.656.100**	
		2	1 9	0 3	2	0 5	0 1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan,Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	4	103.000.000	3	474.739.500	0	-	3	522.694.500	0	0	-	0	0,00	-	3	58,4	305.204.500	3	38,4	200.628.100	3	505.832.600	
		2	1 9	0 3	2	0 5	0 2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	4	102.000.000	10	370.928.000	0	-	10	400.311.500	0	0	-	5	60,57	242.473.000	3	7,5	30.000.000	2	18,8	75.350.500	10	347.823.500	
																															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		
																															Predikat Kinerja		
4		**2**	**1 9**	**0 4**				**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**Persentase Siswa aktif di pramuka**	**Persen**	**32**	**206.000.000**	**29**	**300.000.000**	**0**	**-**	**29**	**300.000.000**	**0**	**0**	**-**	**29**	**100**	**300.000.000**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**29**	**300.000.000**	
		2	**1 9**	**0 4**	**2**	**0 1**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah peserta**	**Orang**	**100**	**206.000.000**	**100**	**300.000.000**	**0**	**-**	**100**	**300.000.000**	**-**	**0**	**-**	**150**	**100**	**300.000.000**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**150**	**300.000.000**	

		2	1 9	0 4	2	0 1	0 2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organi sasi	2	51.500.00 0	1	300.000.0 00	0	-	1	300.000.0 00	-	0	-	1	100	300.000.0 00	**0**	0	-	**0**	**0**	-	1	300.000.0 00	
		2	1 9	0 4	2	0 1	0 7	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan,Pe meliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	3	77.250.00 0	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	0,00	-	0	0	-	0	0	-	0	-	
		2	1 9	0 4	2	0 1	0 8	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organi sasi	2	77.250.00 0	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00	-	0	0	-	0	0	-	-	-	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																	
Predikat Kinerja																																	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											8.479.627 .962		16.326.02 5.666		-		###### ###			2.048.055 .399			3.676.146 .088			3.602.002 .710			###### ###		13.340.83 5.838	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																																	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																																	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *time schedule*, mengoptimalkan koordinasi dan keikutsertaan pihak terkait																																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja: - Ada 2 sub kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan tidak sesuai dgn spesifikasi kebutuhan aparatur dan kurangnya koordinasi dengan beberapa pihak terkait																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya: mengoptimalkan koordinasi dan memaksimalkan SDM yang ada																																	

2. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Tahun Anggaran 2023;

No.	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2022 s/d 2026)	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output) (Renstra 2022 s/d 2026)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Anggaran 2023	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)

1	2	3						4	5	6	7		8		9								I			II			III			IV			14 = 10+11+12+13	
															Renja		APBD Murni		Perges eran I		APBD Perubahan		10			11			12			13				
											K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	F	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	Rp
								PELAKSANAAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																															
								Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga																															
1	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD**	**2**	**19**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Persen**	**-**	**30.325.498.317**	**-**	**5.347.224.200**	**-**	**5.753.127.962**	**-**	**7.021.527.829**	**-**	**-**	**-**	**6.893.090.990**	**-**	**-**	**1.133.015.199**	**-**	**-**	**1.507.796.387**	**-**	**-**	**1.733.258.710**	**-**	**-**	**1.322.535.672**	**-**	**5.696.605.968**
		2	**19**	**03**	**2**	**01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**Dokumen**	**-**	**743.279.013**	**-**	**51.398.400**	**-**	**144.200.000**	**-**	**120.084.839**	**-**	**-**	**-**	**104.644.839**	**-**	**-**	**39.980.600**	**-**	**-**	**46.659.384**	**-**	**-**	**9.471.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96.111.684**
		2	19	03	2	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	398.185.185	-	21.456.000	-	77.250.000	-	60.084.670	-	-	-	50.864.670	-	-	22.650.000	-	-	21.984.815	-	-	5.139.700	-	-	-	-	49.774.515

| | | |

| | | |

| | | |

		2	1 9	0 1	2	0 9	0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	-	-	-	11.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	1 9	0 1	2	0 9	0 7	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	814.544.050	-	143.738.272	-	154.500.000	-	104.998.970	-	-	-	111.998.776	-	-	831.700	-	-	21.541.000	-	-	34.816.516	-	-	13.989.900	-	**71.179.116**
		2	1 9	0 1	2	0 9	0 8	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	-	248.223.166	-	70.666.500	-	51.500.000	-	22.760.200	-	-	-	12.363.600	-	-		-	-	12.313.600	-	-	-	-	-	-	-	**12.313.600**
		2	1 9	0 1	2	0 9	1 1	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	-	-	-	187.203.991	-	100.000.000	-	749.998.315	-	-	-	685.573.323	-	-	-	-	-	4.488.000	-	-	187.985.000	-	-	2.457.000	-	**194.930.000**
																																							Rata-rata Capaian Kinerja (%)
																																							Predikat Kinerja
2	**Meningkatnya sumber daya pemuda yang produktif dan berdaya saing**	**2**	**1 9**	**0 2**				**Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan**	**Persentase organisasi pemuda yang aktif**	**Persen**	-	**5.840.496.365**	-	**1.228.482.600**	-	**1.133.000.000**	-	**1.749.999.403**	-	-	-	**1.719.864.936**	-	-	**415.040.200**	-	-	**480.525.701**	-	-	**719.159.000**	-	-	**56.952.500**	-	**480.525.701**

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
   a. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.

      Dari table tersebut diatas, ada 4 Program, 14 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target:

      1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
         1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.
            a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi tidak dilaksanakan pada tahun 2023 dikarenakan Recofusing.
      2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
         1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.
            a. SubKegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah tidak dilaksanakan pada tahun 2023 dikarenakan Recofusing.

Dari Pagu Anggaran Rp. 16.483.490.622,- yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar Rp. 14.960.253.881,- sehingga persentase daya serap anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 68.31%. Dengan Realisasi Fisik sebesar 80.35% dan capaian kinerja sebesar 80.00%.

Table 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)*
Kabupaten Karimun

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	2	19				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**									
						Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga									
2	**19**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	80	80	80	80	1	80	240	3

2	**19**	**03**	**2**	**01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**10**	**5**	**5**	**5**	**1,00**	**5**	**15**	**1,50**
2	19	03	2	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	2	2	2	1	2	6	1,50
2	19	03	2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	3	3	3	1	3	9	1,50
2	**19**	**01**	**2**	**02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**4**	**2**	**2**	**2**	**1**	**2**	**6**	**1,5**
2	19	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	22	24	24	1	25	71	1,34

2	19	01	2	02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53	22	24	24	1	25	71	1,34
2	**19**	**01**	**2**	**05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**1,5**
2	19	01	2	05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110	100	0	0	0	0	100	0,91
2	19	01	2	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	20	20	20	1	20	60	1,50
2	19	01	2	05	11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40	20	20	20	1	20	60	1,50
2	**19**	**01**	**2**	**06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**18**	**9**	**9**	**9**	**1**	**9**	**27**	**1,50**

2	19	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	15	15	15	1,00	15	45	1,50
2	19	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70	35	35	35	1,00	35	105	1,50
2	19	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40	20	20	20	1,00	20	60	1,50
2	19	01	2	06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	10	10	10	1,00	10	30	1,50
2	19	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	65000	15000	20000	20000	1,00	25000	60000	0,92
2	19	01	2	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	43	20	20	20	1,00	21	61	1,42
2	19	01	2	06	07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24	12	12	12	1,00	12	36	1,50

2	19	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Jumlah SPPD	135	50	53	53	1,00	60	163	1,21
2	19	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	1	1	1,00	1	2	0,00
2	**19**	**01**	**2**	**07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**1,50**
2	19	01	2	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55	20	20	20	1	25	65	1,18
2	19	01	2	07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29	5	7	7	1	10	22	0,76
2	19	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	2	2	2	1	2	6	1,50

2	19	01	2	07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	3	3	3	1	3	9	1,50
2	**19**	**01**	**2**	**08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**1,50**
2	19	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200	100	100	100	1,00	100	300	1,50
2	19	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	12	12	12	1,00	12	36	1,50
2	19	01	2	08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19	6	7	7	1,00	8	21	1,11

2	19	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	220	110	110	110	1,00	110	330	1,50
2	**19**	**01**	**2**	**09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**1,5**
2	19	01	2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	5	5	5	1	5	15	1,5
2	19	01	2	09	07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10	5	5	5	1	5	15	1,50
2	19	01	2	09	08	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2	1	2	2	1	1	4	2,00
2	19	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang di pelihara	6	3	3	3	1	3	9	1,50

2	**19**	**02**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase organisasi pemuda yang aktif**	85	70	73	73	1	77	220	2,59
2	**19**	**02**	**2**	**01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Kegiatan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**jumlah peserta**	**1523**	**545**	**600**	**600**	**1,00**	**659**	**1804**	**1,18**
2	19	02	2	01	01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	275	50	75	75	1	100	225	0,82

2	19	02	2	01	02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	185	50	65	65	1	75	190	1,03
2	19	02	2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	275	50	75	75	1	100	225	0,82
2	19	02	2	01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	40	20	20	20	1	20	60	1,50
2	19	02	2	01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan	275	75	85	85	1	100	260	0,95

2	**19**	**02**	**2**	**02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah peserta**	**370**	**100**	**130**	**130**	**1**	**150**	**380**	**1,03**
2	19	02	2	02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	185	50	65	65	1	75	190	1,03
2	19	02	2	02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	185	50	65	65	1	75	190	1,03
2	**19**	**04**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Siswa aktif di pramuka**	**45**	**27**	**32**	**32**	**1**	**36**	**95**	**2,11**
2	**19**	**04**	**2**	**01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah peserta**	**200**	**100**	**100**	**100**	**1**	**100**	**300**	**1,50**

2	19	04	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	4	2	2	2	1	2	6	1,50
2	19	04	2	01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	7	1	2	2	1	2	5	0,71
2	19	04	2	01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	185	50	65	65	1	75	190	1,03
2	19	04	2	01	04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	235	50	65	65	1	75	190	0,81
2	19	04	2	01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	4	2	2	2	1	2	6	1,50

2	19	04	2	01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	11	2	3	3	1	4	9	0,82
2	19	04	2	01	07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	11	2	3	3	1	4	9	0,82
2	19	04	2	01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	4	2	2	2	1	2	6	1,50
2	**19**	**03**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Cakupan Pembinaan Olahraga**	**21,5**	**7,1**	**10,7**	**10,7**	**1**	**14,3**	**32,1**	**1,49**

2	**19**	**03**	**2**	**01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Peserta**	**175**	**50**	**75**	**75**	**1**	**85**	**210**	**1,20**
2	19	03	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	10	5	5	5	1	5	15	1,50

2	19	03	2	01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	4	2	2	2	1	2	6	1,50
2	19	03	2	01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	40	5	5	5	1	10	20	0,50
2	**19**	**03**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyelnggraan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**38**	**10**	**12**	**12**	**1**	**15**	**37**	**0,97**
2	19	03	2	02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4	2	2	2	1	2	6	1,50

2	19	03	2	02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	20	6	6	6	1	8	20	1,00
2	19	03	2	02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	14	2	4	4	1	5	11	0,79
2	**19**	**03**	**2**	**03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Cakupan Pembinaan olahraga daerah**	**25**	**50**	**15**	**15**	**1**	**10**	**75**	**3,00**
2	19	03	2	03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	660	500	40	40	1	200	740	1,12
2	19	03	2	03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	10	3	4	4	1	4	11	1,10

2	19	03	2	03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	300	100	100	100	1	100	300	1,00
2	19	03	2	03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	75	5	200	200	1	25	230	3,07
2	19	03	2	03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	8	4	4	4	1	4	12	1,50
2	**19**	**03**	**2**	**04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Jumlah cabor	50	10	15	15	1	25	50	1,00
2	19	03	2	04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	4	2	2	2	1	2	6	1,50
2	19	03	2	04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil PengembanganOrganisasi Keolahragaan	20	7	8	8	1	10	25	1,25

2	19	03	2	04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten /Kota	8	4	4	4	1	4	12	1,50
2	19	03	2	04	04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	8	4	4	4	1	4	12	1,50
2	**19**	**03**	**2**	**05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Jumlah peserta**	200	100	100	100	1	100	300	1,5
2	19	03	2	05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	300	100	100	100	1	100	300	1,00
2	19	03	2	05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	18	4	4	4	1	6	14	0,78

2	19	03	2	05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	20	2	6	6	1	6	14	0,70
2	19	03	2	05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	10	2	2	2	1	2	6	0,60
2	19	03	2	05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	10	2	4	4	1	4	10	1,00

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Karimun

Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakkan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan diukur melalui pencapaian indikator kinerja, hasil dari pengembangan capaian kinerja program/kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Karimun

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Pelayanan Publik			80	80	80	80	-	-	80	80	

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu – isu strategis Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Karimun adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Rencana Strategis Dinas

Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Karimun memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.

Kondisi sarana dan prasarana pemuda dan olahraga pada umumnya masih dalam kondisi perkembangan serta belum dapat dikatagorikan mantap sehingga masih sangat memerlukan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan agar fungsi prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Karimun tersebut tetap pada tingkat keandalan yang diharapkan dan dapat mendukung aktifitas pemuda dan olahraga.

Faktor kunci keberhasilan adalah topik atau bidang yang berkaitan secara luas dengan misi, dalam hal ini kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi menerima sukses atau kegagalan dari suati misi organisasi. Faktor – factor kunci keberhasilan memungkinkan manajemen untuk mengembangkan suatu rencana strategi yang lebih mudah untuk mengkomunikasikan dan menerapkannya.

Dengan demikian faktor – faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Karimun dalam rangka pencapaian Misi dan Tujuannya secara efektif dan efisien. Faktor – faktor kunci tersebut dapat dirumuskan antara lain dengan memperhatikan dan melakukan analisi faktor lingkungan internal dan exsternal terhadap kekuatan (Strenght), kelemahan (Weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan / kendala (Threath) yang dihadapi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Karimun tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Kualitas Kondisi Sumber daya manusia dan sumber daya lain terutama bidang teknik sipil lingkungan internal Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Karimun, managemen keolahragaan dan perencanaan serta pengolan keuangan. Kemampuan sumber daya manusia yang tidak

merata disebabkan sebagian besar pegawai perlu diberikan bimbingan teknik dan diklat;

2. Terbatasnya jumlah produk dokumen yang baku tentang pemuda dan olahraga;
3. Koordinasi yang lemah dengan OPD lain, pemangku kepentingan instansi vertical seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, OKP atau Ormas;
4. Minimnya pembinaan organisasi kepemudaan (OKP) di Kabupaten Karimun;
5. Belum teratasinya permasalahan pemuda yang tersebar di Kabupaten Karimun;
6. Rendahnya kualitas penguasaan keterampilan dan kewirausahaan pemuda;
7. Pembinaan atlet yang belum maksimal
8. Minimnya pembinaan pelatih olahraga atau guru olahraga sebagai salah satu factor keberhasilan atlet pelajar;
9. Minimnya cabang olahraga yang di bina;
10. Rendahnya dukungan dana terhadap pembibitan atlet muda yang potensial;
11. Kondisi sarana dan prasarana pemuda dan olahraga pada umumnya masih dalam kondisi perkembangan serta belum dapat dikatagorikan mantap sehingga masih sangat memerlukan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan agar fungsi prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Karimun tersebut tetap pada tingkat keandalan yang diharapkan dan dapat mendukung aktifitas pemuda dan olahraga.

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe B mempunyai Fungsi :

a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam

lingkup tugasnya.

Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut :

a. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis dan pelaksanaan koordinasi, pengendalian dibidang Kepemudaan dan Olah Raga;
b. Melaksanakan teknis operasional di bidang Kepemudaan dan OlahRaga;
c. Melaksanakan Pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;
d. Melaksanakan pengelolaan UPTD;
e. Melaksanakan kegiatan lain dibidang Kepemudaan dan OlahRaga yang ditugaskan oleh Bupati.

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe B, terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat;
c. Bidang Olah Raga;
d. Bidang Pemuda;
e. Bidang Sarana dan Prasarana;
f. UPT; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan, mengoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknis administrasi umum, perencanaan, keuangan dan kepegawaian Dinas.

   Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut :

   a. Merencanakan teknis pelayanan ketatausahaan Dinas;
   b. Melaksanakan pelayanan ketatausahaan surat menyurat kepada seluruh unit organisasi dilingkungan dan diluar dinas;

c. Mengelola urusan rumah tangga Dinas;
d. Mengelola keuangan Dinas;
e. Mengelola urusan kepegawaian dilingkungan Dinas;
f. Merumuskan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;
g. Melaksanakan urusan lain dibidang ketatausahaan yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat, membawahi terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
c. Pelaksana.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas pengelolaan teknis administrasi umum Dinas dan melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian dilingkungan Dinas;

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut :

a. Menyusun rencana teknis ketatausahaan Dinas;
b. Menyusun surat menyurat Dinas;
c. Melayani surat menyurat Dinas;
d. Menyusun kearsipan surat menyurat Dinas;
e. Melayani kerumahtanggaan Dinas;
f. Melayani perlengkapan Dinas;
g. Menyusun rencana pengembangan karir pegawai dilingkungan Dinas;
h. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepegawaian Dinas;
i. Memeriksa syarat-syarat kelayakan kenaikan pangkat pegawai

Dinas;

j. Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai Dinas kepada bagian kepegawaian Daerah;
k. Mengusulkan tindakan pembinaan pegawai Dinas.
l. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi; dan
m. Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

2. Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan Mempunyai Tugas Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas Perencanaan Kegiatan Dinas dan Pengelolaan Keuangan Dinas.

Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut :

a. Menyusun rencana pengelolaan keuangan Dinas;
b. Melayani keuangan Dinas;
c. Mengkoordinasikan penyusunan keuangan Dinas dengan Bagian keuangan pada Sekretariat Daerah;
d. Menghimpun dan memeriksa keseluruhan bukti pengeluaran keuangan Dinas;
e. Menyusun laporan keuangan Dinas;
f. Menyusun perencanaan kegiatan Dinas;
g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas;
h. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan SAKIP; dan
i. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lainnya yang ditugaskan oleh Atasan.

3. Bidang Olahraga

Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan keolahragaan.

Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program,evaluasi dan pelaporan bidang keolahragaan;
b. Menyusun perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan kegiatan keolahragaan;
c. Melaksanakan bimbingan teknis kegiatan pelatihan dan pembinaan keolahragaan;
d. Melaksanakan penyiapan dan pemantauan perbantuan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana keolahragaan;
e. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam Menumbuhn Kembangkan Kegiatan Keolahragaan; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bidang Bidang Olah Raga terdiri dari :

a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
b. Pelaksana.

1. Tim Kerja Olahraga Pendidikan dan Rekreasi mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan mempersiapkan perumusan kebijakan pedoman dan bimbingan teknis kegiatan pelatihan pembinaan, pengembangan kegiatan cabang olahraga pendidikan dan rekreasi.

Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program, evaluasi dan pelaporan Tim Kerja Olahraga Pendidikan dan Rekreasi;
b. Menyusun agenda pembinaan dan pengembangana olahraga pendidikan dan rekreasi secara berkala dan berkelanjutan;

c. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan dan kerjasama dari perbantuan dalam rangka menyelenggarakan olahraga pendidikan dan rekreasi;
d. Meningkatkan peran serta pelajar dan perguruan tinggi dalam pengembangan dan pendidikan olahraga;
e. Menetapkan pedoman berekreasi yang tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan;
f. Menetapkan kebijakan dalam penentuan olahraga rekreasi yang diikutsertakan dalam kegiatan bertaraf nasional dan internasional;
g. Melaksanakan tugas Kedinasaan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

2. Tim Kerja Olahraga dan Prestasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan mempersiapkan perumusan kebijakan pedoman dan bimbingan teknis kegiatan pelatihan, pembinaan dan pengembangan kegiatan cabang olahraga prestasi.

Uraian tugas yang dimaksud sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan program, evaluasi dan pelaporan Tim Kerja Olahraga dan Prestasi;
b. Menyusun agenda pembinaan prestasi olahraga untuk mengikuti pertandingan/lomba/seleksi/kompetisi berbagai bidang secara berkala dan berkelanjutan;
c. Menetapkan pedoman atlet pendidikan pretasi;
d. Menetapkan kebijakan dalam penetuan atlet yang akan diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan olahraga bertaraf nasional dan internasional; dan
e. Melaksanakan tugas Kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh Atasan.

3. Bidang Pemuda

Bidang Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, pengembangan, kegiatan dan organisasi kepemudaan.

Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan bidang keolahragaan;
b. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan kegiatan organisasi kepemudaan;
c. Pelaksanaan bimbingan teknis kegiatan pelatihan dan pembinaan kepemudaan;
d. Penyiapan dan pemantauan perbantuan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kepemudaan;
e. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam menumbuh kembangkan kegiatan kepemudaan;
f. Melaksanakan tugas Kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh Atasan.

Bidang Pemuda, terdiri dari :

a. Kelompok Kerja Fungsional; dan
b. Pelaksana.

1. Tim Kerja Pengembangan Organisasi dan Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan pedoman dan bimbingan teknis kegiatan, pelatihan, pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan.

Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan program, evaluasi dan pelaporanseksi;

b. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pedoman dan bimbingan teknis kegiatan pengembangan organisasi dan pemberdayaan pemuda;
c. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan organisasi kepemudaan;
d. Melaksanakan kegiatan upacara tingkat kabupaten yang mengikutsertakan pemuda/siswa;
e. Mendukung dan memfasilitasi partisipasi aktif menyeluruh dan terbuka melalui penguatan peran serta semua aset dan stakeholder yang terlibat dalam pembangunan pengembangan organisasi dan pemberdayaan pemuda;
f. Rapat koordinasi dan evaluasi antar instansi yang terkait dengan pengembangan organisasi dan pemberdayaan pemuda;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;

2. Tim Kerja Kepemimpinan Pemuda mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan pedoman dan bimbingan teknis kegiatan, pelatihan, pembinaan dan pengembangan kapasitas kepemudaan.

Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan program, evaluasi dan pelaporan seksi;
b. Mewujudkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan pemuda;
c. Mempersiapkan pemuda pemimpin yang bertaqwa, mandiri, profesional, peduli dan berjiwa patriot;
d. Membangin landasan yang kokoh untuk terwujudnya kepemimpinan pemuda berbasis kompetensi;
e. Meningkatkan mutu kepemimpinan pemuda;
f. Mewujudkan kepemimpinan pemuda yang transparan, konsisten dan mengutamakan kebersamaan;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

4. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis teknis sarana dan prasarana dibidang kepemudaan dan olah raga yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;

Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut :

a. Menyusun rencana program kerja bidang sarana dan prasarana;
b. Menyusun perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan;
c. Menyusu perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
d. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian kegiatan dibidang sarana dan prasarana;
e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan;
f. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang sarana dan prasarana;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
b. Pelaksana.

1. Tim Kerja Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas

mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan sarana dan prasarana olahraga.

Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja seksi saranadan prasarana olahraga;
b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
c. Menyiapkan bahan fasilitas pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
d. Menyiapkan bahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi sarana dan prasarana olahraga;
e. Melaksanakan tugas Kedinasan lainnya yang di tugaskan oleh atasan;

2. Tim Kerja Sarana dan Prasarana Pemuda mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan.

Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan rencana dan program kerja seksi saranadan prasarana kepemudaan;
b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakanteknis pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan;
c. Menyiapkan bahan pendukung fasilitas Pelaksanaanpengembangan sarana dan prasarana kepemudaan;
d. Menyiapkan bahan kegiatan koordinasi dengan unit kerja dan isntansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
e. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi sarana dan prasarana kepemudaan;

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di tugaskan oleh atasan.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Gambar 2. : STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARIMUN

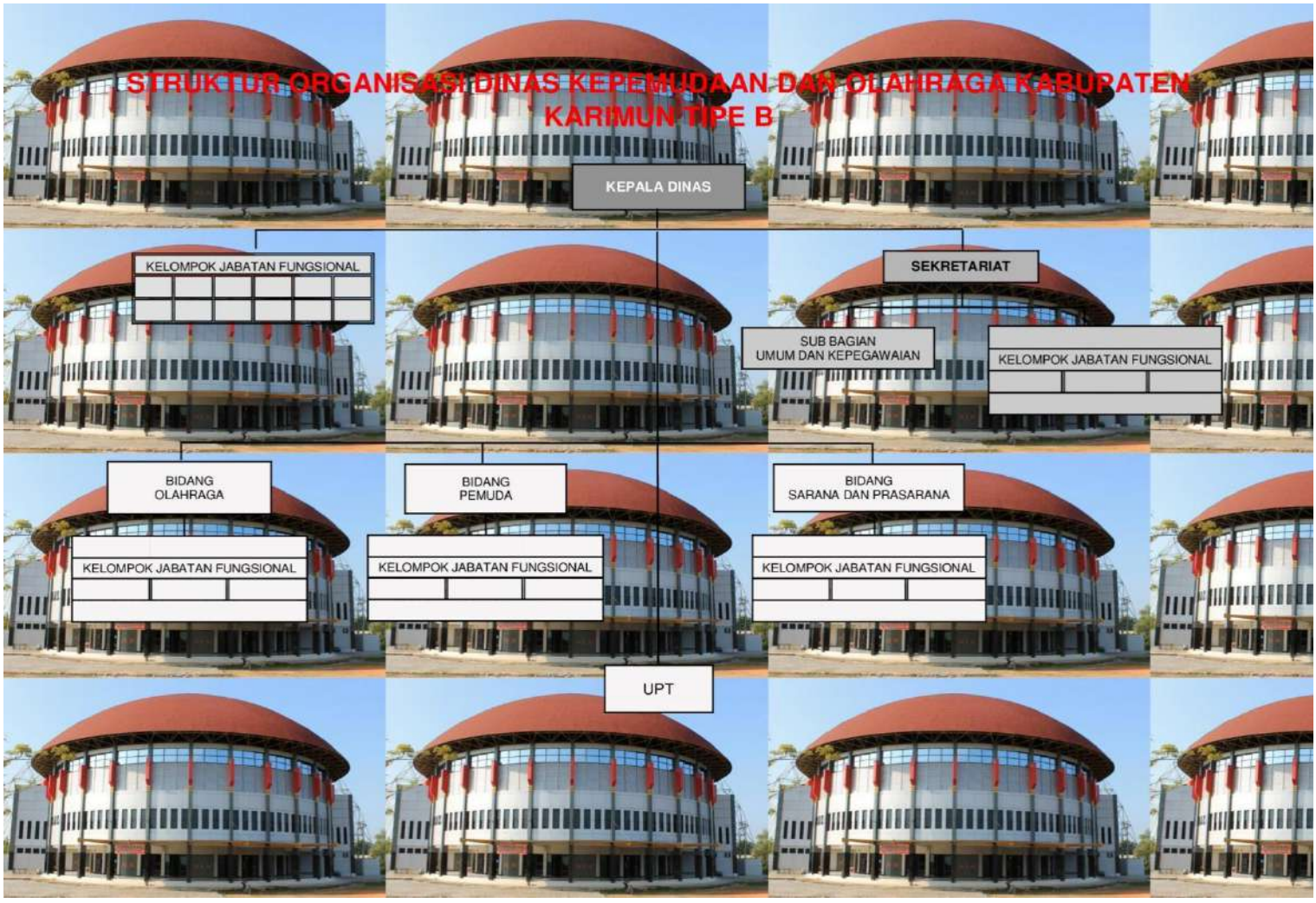

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun.Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun

NO	RANCANGAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	152.981.780	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispora	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pencapaian Kinerja	5 Dokumen	152.981.780	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	81.954.525	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispora	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	81.954.525	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karimun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	71.027.255	Sub Keogiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispora	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	71.027.255	

1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	2 Laporan	2.632.878.642	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	2 Laporan	2.632.878.642	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karimun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang	2.500.151.649	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karimun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang	2.500.151.649	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27 Orang	132.726.993	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27 Orang	132.726.993	
1,3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	1 Laporan	60.099.985	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	1 Laporan	60.099.985	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Karimun	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Stel	27.318.175	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Karimun	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Stel	27.318.175	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Karimun	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	32.781.810	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Karimun	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	32.781.810	
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	9 Laporan	379.452.673	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	9 Laporan	379.452.673	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Karimun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Jenis	1.092.727	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Karimun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Jenis	1.092.727	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karimun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	32.781.810	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karimun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	32.781.810	

	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Karimun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	5.463.635	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Karimun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	5.463.635	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Karimun	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	25000 Lembar	27.318.175	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Karimun	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	25000 Lembar	27.318.175	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Karimun	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	21 Eksemplar	27.318.175	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Karimun	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	21 Eksemplar	27.318.175	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karimun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Kali	123.478.151	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karimun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Kali	123.478.151	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	162.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	162.000.000	
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	1 Laporan	423.538.093	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	1 Laporan	423.538.093	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	150.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	150.500.000	

	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	273.038.093	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	273.038.093	
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	1 Laporan	2.091.731.120	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	1 Laporan	2.091.731.120	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karimun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	161.092.727	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karimun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	161.092.727	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karimun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Unit	30.638.393	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karimun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Unit	30.638.393	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Karimun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	110 Orang	1.900.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Karimun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	110 Orang	1.900.000.000	
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	1 Laporan	342.816.772	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Laporan	1 Laporan	342.816.772	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	30.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	163.909.050	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	163.909.050	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Karimun	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	48.907.722	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Karimun	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	48.907.722	

	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Karimun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	100.000.000	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**					**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**					
2.1	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	jumlah peserta	395 Orang	546.363.500	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	jumlah peserta	395 Orang	546.363.500	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kab. Karimun	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	125 Orang	109.272.700	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kab. Karimun	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	125 Orang	109.272.700	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kab. Karimun	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	85 Orang	109.272.700	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kab. Karimun	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	85 Orang	109.272.700	

	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	125 Orang	109.272.700	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	125 Orang	109.272.700	
	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Kab. Karimun	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	20 Orang	109.272.700	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Kab. Karimun	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	20 Orang	109.272.700	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kab. Karimun	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	125 Orang	109.272.700	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemudah	Kab. Karimun	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	125 Orang	109.272.700	
2.2	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah peserta	85 Orang	163.909.050	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah peserta	85 Orang	163.909.050	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	85 Orang	163.909.050	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	85 Orang	163.909.050	

3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
3.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah Peserta	50 Peserta	218.545.400	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah Peserta	50 Peserta	218.545.400	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	2 Dokumen	54.636.350	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	2 Dokumen	54.636.350	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	10 Cabor	163.909.050	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	10 Cabor	163.909.050	
3.2	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah Penyelnggraan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18 Event	895.954.150	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah Penyelnggraan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18 Event	895.954.150	

	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Event	227.818.400	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Event	227.818.400	
	Sub Kegiatan penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	10 Event	418.135.750	penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	10 Event	418.135.750	
	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kab. Karimun	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	6 Event	250.000.000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kab. Karimun	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	6 Event	250.000.000	
3.3	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Karimun	Cakupan Pembinaan olahraga daerah	15 Pembinaan	789.499.850	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Karimun	Cakupan Pembinaan olahraga daerah	15 Pembinaan	789.499.850	
	Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	60 Atlet	163.909.050	Seleksi Atlet Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	60 Atlet	163.909.050	
	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kab. Karimun	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	5 Cabor	407.045.400	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kab. Karimun	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	5 Cabor	407.045.400	

	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	50 Orang	163.909.050	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	50 Orang	163.909.050	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Kab. Karimun	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 Data	54.636.350	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Kab. Karimun	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 Data	54.636.350	
3.4	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kab. Karimun	Jumlah cabor	20 Cabor	210.246.000	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kab. Karimun	Jumlah cabor	20 Cabor	210.246.000	
	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	10 Organisasi	210.246.000	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kab. Karimun	Jumlah orgnasisasi olahraga yang mendapat hibah	10 Organisasi	210.246.000	
3.5	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kab. Karimun	Jumlah peserta	100 Peserta	349.481.860	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kab. Karimun	Jumlah peserta	100 Peserta	349.481.860	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan,Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	150 Peserta	109.272.700	Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan,Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	150 Peserta	109.272.700	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kab. Karimun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	8 Laporan	106.120.800	Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kab. Karimun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	8 Laporan	106.120.800	

	Sub Kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Kab. Karimun	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	8 Sarana Prasarana	87.418.160	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Kab. Karimun	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	8 Sarana Prasarana	87.418.160	
	Sub Kegiatan Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	4 Dokumen	21.854.540	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	4 Dokumen	21.854.540	
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	4 Dokumen	24.815.660	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	4 Dokumen	24.815.660	
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**					**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**					
4.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kab. Karimun	Jumlah peserta	100 Peserta	536.590.875	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kab. Karimun	Jumlah peserta	100 Peserta	536.590.875	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	3 Organisasi	250.000.000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	3 Organisasi	250.000.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	2 Laporan	154.636.350	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	2 Laporan	154.636.350	

	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Kab. Karimun	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	2 Organisasi	131.954.525	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Kab. Karimun	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	2 Organisasi	131.954.525	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Kegiatan prioritas tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel. 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2025

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**				
1.1	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah peserta	725 Orang	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Kab. Karimun	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	125 Orang	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Kab. Karimun	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	85 Orang	

	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Kab. Karimun	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20 Orang	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Kab. Karimun	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	125 Orang	
1.2	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah peserta	85 Orang	
	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	85 Orang	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**				
2.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah peserta	85 Peserta	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	2 Dokumen	

	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Kab. Karimun	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	10 Cabor	
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah Penyelnggraan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18 Event	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	10 Event	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Kab. Karimun	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	2 Event	
	Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Kab. Karimun	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	6 Event	
2.3	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Karimun	Cakupan Pembinaan olahraga daerah	15 Pembinaan	
	Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	60 Atlet	

	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kab. Karimun	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	5 Cabor	
	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/KotaPemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	50 Orang	
	Sub Kegiatan pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Kab. Karimun	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 Data	
2.4	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kab. Karimun	Jumlah cabor	25 Cabor	
	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	10 Organisasi	
2.5	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kab. Karimun	Jumlah peserta	100 Peserta	
	Sub Kegiatan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Kab. Karimun	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	150 Peserta	

	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kab. Karimun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	8 Laporan	
	Sub Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Kab. Karimun	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	8 Sarana Prasarana	
	Sub Kegiatan Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	4 Dokumen	
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	4 Dokumen	
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**				
3.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kab. Karimun	Jumlah peserta	100 Peserta	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	3 Organisasi	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Karimun	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	2 Laporan	

	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Kab. Karimun	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	2 Organisasi	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, insfrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hokum dan keamanan serta provinsi untuk tahun rencana, yang terkait dengan pembangunan kabupaten.

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024 yaitu Menjadi lembaga pelayanan kepemudaan dan pengelola sistem keolahragaan nasional yang mewujudkan pemuda indonesia berkualitas dan berdaya saing, prestasi olahraga Indonesia produktif dan berdaya saing, serta masyarakat berbudaya olahraga.

Ada pun makna dari Visi Kementrian Pemuda dan Olahraga mencakup sebagai berikut :

a. Pemuda Berkualitas yaitu pemuda yang berkarakter, bermoral, berperilaku baik, berpengetahuan dan trampil dalam bidang keahlian yang diukur melalui indeks pembangunan pemuda. Kualitas pemuda diwujudkan melalui domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi yang didukung oleh kemudahan akses terhadap fasilitas berupa sarana dan prasarana, penguatan kapasitas kelembagaan serta koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pelayanan kepemudaan.

b. Pemuda Indonesia Berdaya Saing yaitu pemuda yang mampu mengatasi tantangan hidup dan meningkatkan perannya di tingkat lokal sampai tingkat global secara mandiri dengan mengandalkan pengetahuan, ketrampilan dan keahliannya untuk kedaulatan, kemajuan, keadilan dan kemakmuran Indonesia dengan memegang teguh nilai-nilai kepribadian bangsa.
c. Prestasi olahraga Indonesia produktif dan berdaya saing yaitu menaikkan posisi dan prestasi Indonesia sebagai negara yang produktif dan kompetitif dalam bidang olahraga di mata dunia untuk menumbuhkan kebanggaan nasional, melalui penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga Olimpiade didukung penerapan sport science dan statistik keolahragaan, serta penataan sistem remunerasi dan penghargaan bertaraf internasional yang didukung oleh pengembangan peran swasta dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan.
d. Masyarakat berbudaya olahraga adalah masyarakat Indonesia yang tumbuh minatnya dalam bidang olahraga sehingga menjadi bagian dari budaya/kepribadian bangsa, melalui pemassalan olahraga yang mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial. Diantaranya melalui kampanye gerakan “ayo olahraga”, pelaksanaan hari krida olahraga di instansi pemerintah/swasta, ayo bergerak sebelum mulai pelajaran di satuan pendidikan/lingkungan kerja, pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat (germas) menuju Indonesia sehat dan bugar, serta penyediaan pemandu/penyuluh/instruktur/tutor olahraga dan ruang terbuka olahraga di perkotaan dan desa-desa se-Indonesia.

Misi Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 “ Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan “. Misi Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga tahun 2020- 2024 mengandung arti :

1. Mewujudkan penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat

dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan untuk peningkatan partisipasi aktif, kepeloporan, kepemimpinan, perlindungan dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko, berdaya saing global, serta pembinaan ideologi Pancasila, karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela negara melalui gerakan pramuka.

2. Mewujudkan pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan, dan masyarakat dalam rangka peningkatan minat masyarakat Indonesia dalam bidang olahraga sehingga menjadi bagian dari budaya dan kepribadian bangsa, serta peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional dalam rangka posisi dan prestasi olahraga Indonesia sebagai negara yang kompetitif dalam bidang olahraga di mata dunia untuk menumbuhkan kebanggaan nasional.
3. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif, serta penggunaan APBN yang fokus, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dalam rangka kecepatan melayani dan implementasi reformasi birokrasi.

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada era repormasi telah menghasilkan 2 (dua) produk undang – undang yang berkaitan dengan undang-undang kepemudaan dan keolahragaan yaitu :

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan

Tabel 3.1 dibawah ini menggambar kan tentang kebijakan nasional dan provinsi dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan berdasarkan hasil identifikasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

NO	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)	Kemenegpora	
2	Penyelenggaraan Diklat SMP/SMA Negeri Ragunan (khusus olahragawan) Jakarta	Kemenegpora	
3	Penyelenggaraan Upacara Kenegaraan (PASKIBRAKA nasional)	Kemenegpora	
4	Penyelenggaraan Pendidikan Ketahanan Nasional untuk Pemuda (TANNASDA)	Kemenegpora	
5	Program Pertukaran Pemudan Antar Negara	Kemenegpora	
6	program pendidikan kecakapan hidup kepemudaan. Tujuan program ini untuk mengatasi pengangguran pada usia produktif, khususnya pemuda.	Kemenegpora	
7	Program Kewirausahaan Pemuda	Kemenegpora	
8	Program-program subsidi untuk pemuda yang dikembangkan dalam hal ini meliputi program Kelompok Usaha Kemenegpora III-48 Pemuda Produktif (KUPP),	Kemenegpora	
9	Pemilihan Pemuda Pelopor tk. Nasional	Kemenegpora	
10	Seleksi Pengiriman Paskibraka Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
11	Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

12	Gebyar Pemuda.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

13	Dialog Kebangsaan Pemuda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
14	Kewirausahaan Bagi Pemuda.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
15	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
16	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
17	Penyuluhan Bahaya Narkoba/HIV/AIDS Bagi Pemuda.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
18	Pelatihan Jurnalistik Untuk Mahasiswa	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
19	Pemusatan Pendidikan dan Latihan Daerah (PPLD)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
20	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun.

Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini, mengacu pada alur pikir sebagai berikut :

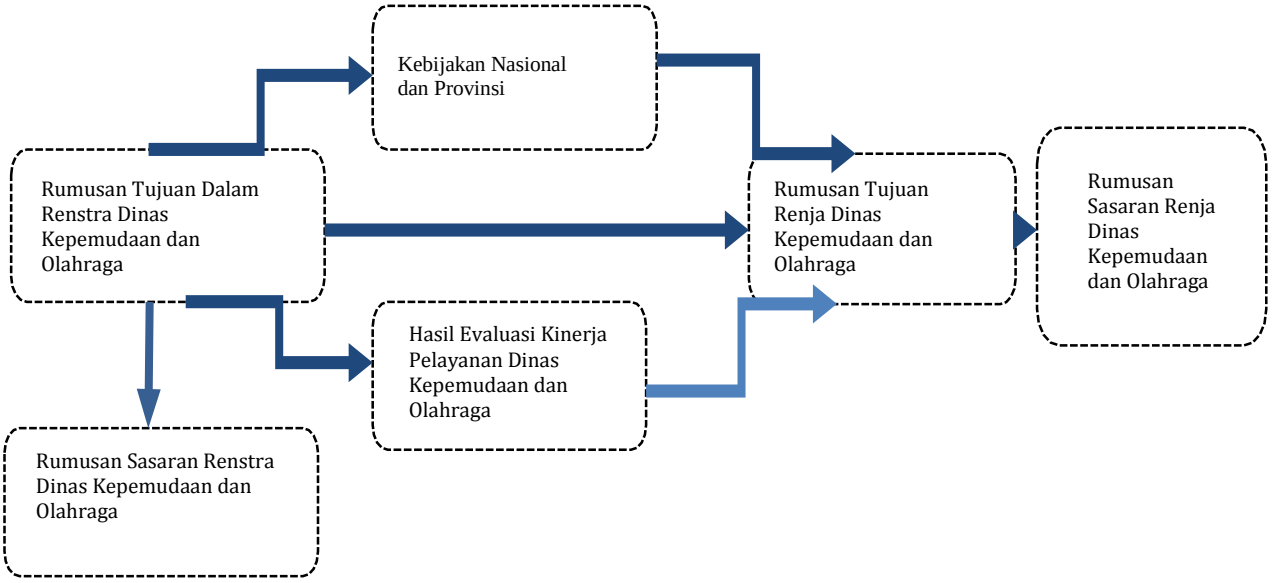

Gambar 3.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Karimun

Tujuan yang dirumuskan Dinas Kepemudaan dan OlahragaKabupaten Karimun memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Misi–misi yang sudah ditetapkan. Setiap misi memiliki minimal satu tujuan, sebagai suatu bentuk implementasi dari misi tersebut. Untuk dapat merumuskan tujuan yang tepat, maka perlu juga untuk mengacu pada Tujuan Pembangunan RPJMD Kabupaten Karimun.

Hal ini perlu dilakukan agar Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun sejalan dengan tujuan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Berikut sasaran dan indikator kinerja utama yang melekat pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun sesuai dengan tujuan RPJMD Kabupaten Karimun

Tahun 2021 -2026 :

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan OPD
Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	Terwujudnya Kesetaraan Gender	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan 2. Meningkatkan prestasi Olahraga 3. Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik

3.3 Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan untuk tahun 2025, menyesuaikan antara indetifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan OlahragaKab.Karimun menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

1. Rekapitulasi Program Dan Kegiatan
   a. Program dan kegiatan yang diusulkan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun Anggaran 2025 adalah 4 program, 15 kegiatan dan 64 Sub Kegiatan.
   b. Kebutuhan sumber pendanaan indikatif Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun sebesar Rp. 10.613.635.000 (Sepuluh Miliar Enam Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Karimun
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	13					**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**								
	2	13	1				**Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga**								
1.	**X**	**XX**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**SKM**	**Kab. Karimun**	**100%**	**6.062.391.421**	**APBD**		**100%**	**6.083.499.065**

	X	**XX**	**1**	**2,01**			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kab. Karimun	3 Dokumen	148.526.000	APBD		3 Dokumen	152.981.780
	X	XX	1	2.01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karimun	2 Dokumen	79.567.500	APBD		2 Dokumen	81.954.525
	X	XX	1	2.01	2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karimun	3 Laporan	68.958.500	APBD		3 Laporan	71.027.255
	X	XX	1	2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan	Kab. Karimun	2 Laporan	2.629.012.806	APBD		2 Laporan	2.632.878.642
	X	XX	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karimun	24 Orang	2.500.151.649	APBD		26 Orang	2.500.151.649

	X	XX	1	2.02	2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Karimun	24 Orang	128.861.157	APBD		26 Orang	132.726.993
	X	**XX**	**1**	**2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan	Kab. Karimun	1 Laporan	58.349.500	APBD		1 Laporan	60.099.985
	X	**XX**	**1**	**2.05**	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Karimun	0 Paket	0	APBD		100 Paket	27.318.175
	X	**XX**	**1**	**2.05**	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Karimun	20 Orang	31.827.000	APBD		20 Orang	32.781.810
	X	**XX**	**1**	**2.05**	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Karimun	20 Orang	26.522.500	APBD		20 Orang	0
	X	**XX**	**1**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan	Kab. Karimun	9 Laporan	273.119.100	APBD		9 Laporan	379.452.673

	X	**XX**	**1**	**2.06**	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun	15 Paket	1.060.900	APBD		15 Paket	1.092.727
	X	**XX**	**1**	**2.06**	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun	35 Jenis	31.827.000	APBD		35 Jenis	32.781.810
	X	**XX**	**1**	**2.06**	3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Karimun	20 Jenis	5.304.500	APBD		20 Jenis	5.463.635
	X	**XX**	**1**	**2.06**	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun	10 Paket	10.609.000	APBD		10 Paket	0
	X	**XX**	**1**	**2.06**	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Karimun	25000 Paket	26.522.500	APBD		25000 Paket	27.318.175
	X	**XX**	**1**	**2.06**	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Karimun	21 Dokumen	26.522.500	APBD		21 Dokumen	27.318.175
	X	**XX**	**1**	**2.06**	7		Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Karimun	12 Paket	3.182.700	APBD		12 Paket	0

	X	**XX**	**1**	**2.06**	8		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karimun	60 Laporan	106.090.000	APBD		60 Laporan	123.478.151
	X	**XX**	**1**	**2.06**	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karimun	0 Dokumen	62.000.000	APBD		1 Dokumen	162.000.000
	X	**XX**	**1**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Laporan	Kab. Karimun	1 Laporan	521.815.000	APBD		1 Laporan	423.538.093
	X	XX	1	2.07	5		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Karimun	25 Unit	100.000.000	APBD		25 Unit	0
	X	XX	1	2.07	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun	10 Unit	50.500.000	APBD		13 Unit	150.500.000
	X	XX	1	2.07	9		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun	2 Unit	106.090.000	APBD		2 Unit	0

	X	XX	1	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun	3 Unit	265.225.000	APBD		3 Unit	273.038.093
	X	**XX**	**1**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan	Kab. Karimun	1 Laporan	2.091.699.293	APBD		1 Laporan	2.091.731.120
	X	XX	1	2.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karimun	100 Laporan	1.060.900	APBD		100 Laporan	0
	X	XX	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Karimun	12 Laporan	160.000.000	APBD		12 Laporan	161.092.727
	X	XX	1	2.08	3		Penyedian Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun	8 Laporan	30.638.393	APBD		9 Laporan	30.638.393

	X	XX	1	2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun	110 Laporan	1.900.000.000	APBD		110 Laporan	1.900.000.000
	X	**XX**	**1**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan	Kab. Karimun	1 Laporan	339.869.722	APBD		1 Laporan	342.816.772
	X	XX	1	2.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Karimun	5 Unit	31.827.000	APBD		5 Unit	30.000.000
	X	XX	1	2.09	7		Pemelihraan aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kab. Karimun	5 Unit	159.135.000	APBD		5 Unit	163.909.050
	X	XX	1	2.09	8		Pemelihraan aset tak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kab. Karimun	2 Unit	48.907.722	APBD		1 Unit	48.907.722
	X	XX	1	2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Karimun	3 Unit	100.000.000	APBD		3 Unit	100.000.000
2.	**2**	**19**	**2**				**Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan**	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Kab. Karimun	100%	1.485.260.000	APBD		100%	710.272.550

	2	**19**	**2**	**2.01**			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	jumlah peserta	Kab. Karimun	659 Orang	1.326.125.000	APBD		725 Orang	546.363.500
	2	19	**2**	2.01	0015		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Kab. Karimun	100 Orang	106.090.000	APBD		125 Orang	218.545.400

	2	19	**2**	2.01	0011		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Kab. Karimun	75 Orang	106.090.000	APBD		85 Orang	109.272.700
	2	19	**2**	2.01	3		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kab. Karimun	100 Orang	106.090.000	APBD		125 Orang	0
	2	19	**2**	2.01	0012		Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Kab. Karimun	20 Orang	106.090.000	APBD		20 Orang	109.272.700
	2	19	**2**	2.01	0013		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kab. Karimun	100 Orang	106.090.000	APBD		125 Orang	109.272.700

	2	19	**2**	2.01	9		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Kab. Karimun	350 Orang	795.675.000	APBD		375 Orang	0
	2	19	**2**	2.02			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	Kab. Karimun	150 Orang	159.135.000	APBD		170 Orang	163.909.050
	2	19	**2**	2.02	1		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Kab. Karimun	75 Orang	106.090.000	APBD		85 Orang	0
	2	19	**2**	2.02	0003		Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Kab. Karimun	75 Dokumen	53.045.000	APBD		85 Dokumen	163.909.050

3.	**2**	**19**	**4**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Siswa aktif di pramuka**	Kab. Karimun	27 Nilai	583.495.000	APBD		32 Nilai	536.590.875
	2	19	4	2.01			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah peserta	Kab. Karimun	100 Orang	583.495.000	APBD		100 Orang	536.590.875
	2	19	4	2.01	1		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kab. Karimun	2 Dokumen	53.045.000	APBD		2 Dokumen	0
	2	19	4	2.01	2		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Kab. Karimun	2 Organisasi	53.045.000	APBD		3 Organisasi	250.000.000
	2	19	4	2.01	3		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Kab. Karimun	75 Orang	106.090.000	APBD		85 Orang	0
	2	19	4	2.01	4		Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di	Kab. Karimun	75 Unit	106.090.000	APBD		85 Unit	0

							Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas							
	2	19	4	2.01	5		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Karimun	2 Laporan	53.045.000	APBD		2 Laporan	154.636.350
	2	19	4	2.01	6		Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kab. Karimun	4 Unit	53.045.000	APBD		5 Unit	0
	2	19	4	2.01	7		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Kab. Karimun	4 Unit	79.567.500	APBD		5 Unit	0
	2	19	4	2.01	8		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Kab. Karimun	2 Organisasi	79.567.500	APBD		2 Organisasi	131.954.525

4.	2	19	3				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Cakupan Pembinaan Olahraga**	Kab. Karimun	7,1 Nilai	2.325.636.579	APBD		10,7 Nilai	2.463.727.260
	2	19	3	2.01			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	Kab. Karimun	50 Peserta	265.225.000	APBD		75 Peserta	218.545.400
	2	19	3	2.01	1		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Kab. Karimun	5 Unit	53.045.000	APBD		5 Unit	0
	2	19	3	2.01	2		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan	Kab. Karimun	2 Dokumen	53.045.000	APBD		2 Dokumen	54.636.350

							Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar							
	2	19	3	2.01	0005		Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Kab. Karimun	5 Unit	159.135.000	APBD		10 Unit	163.909.050
	2	19	3	2.02			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat	Jumlah Penyelnggraan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat	Kab. Karimun	10 Event	636.540.000	APBD		10 Event	895.954.150
							Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota							
	2	19	3	2.02	0004		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan	Kab. Karimun	2 Dokumen	318.270.000	APBD		10 Dokumen	227.818.400

							dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota							
	2	19	3	2.02	0005		Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Kab. Karimun	8 Dokumen	212.180.000	APBD		2 Dokumen	418.135.750
	2	19	3	2.02	0006		Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Kab. Karimun	5 Orang	106.090.000	APBD		6 Orang	250.000.000
	2	19	3	2.03			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pembinaan olahraga daerah	Kab. Karimun	50 Cakupan	663.062.500	APBD		15 Cakupan	789.499.850
	2	19	3	2.03	0006		Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Kab. Karimun	200 Orang	159.135.000	APBD		60 Orang	163.909.050

	2	19	3	2.03	0008		Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Kab. Karimun	4 Platda	212.180.000	APBD		5 Platda	407.045.400
	2	19	3	2.03	3		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Kab. Karimun	100 Orang	79.567.500	APBD		150 Orang	0
	2	19	3	2.03	0007		Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Kab. Karimun	25 Orang	159.135.000	APBD		50 Orang	163.909.050
	2	19	3	2.03	0010		pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Kab. Karimun	4 Dokumen	53.045.000	APBD		4 Dokumen	54.636.350
	2	19	3	2.04			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Jumlah cabor	Kab. Karimun	10 Cabor	420.260.000	APBD		15 Cabor	210.246.000

							Olahraga								
	2	19	3	2.04	1		Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Kab. Karimun	2 Dokumen	53.045.000	APBD		2 Dokumen	0
	2	19	3	2.04	0006		Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Pengembanga Organisasi Keolahragaan	Kab. Karimun	10 Organisasi	208.080.000	APBD		10 Organisasi	210.246.000
	2	19	3	2.04	3		Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten /Kota	Kab. Karimun	4 Dokumen	53.045.000	APBD		4 Dokumen	0
	2	19	3	2.04	4		Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	Kab. Karimun	4 Organisasi	106.090.000	APBD		4 Organisasi	0
	2	19	3	2.05			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pesrta	Kab. Karimun	100 Peserta	340.549.079	APBD		100 Peserta	349.481.860
	2	19	3	2.05	0010		Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan	Kab. Karimun	100 Dokumen	106.090.000	APBD		150 Dokumen	109.272.700

							berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Festival dan Olahraga Rekreasi							
	2	19	3	2.05	0006		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kab. Karimun	6 Laporan	104.040.000	APBD		8 Laporan	106.120.800
	2	19	3	2.05	0009		Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kab. Karimun	6 Unit	84.872.000	APBD		8 Unit	87.418.160
	2	19	3	2.05	0007		Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kab. Karimun	2 Dokumen	21.218.000	APBD		4 Dokumen	21.854.540

	2	19	3	2.05	0008		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Kab. Karimun	4 Dokumen	24.329.079	APBD		4 Dokumen	24.815.660
JUMLAH											**10.456.783.000**				**9.794.089.750**

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dilingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu di upayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan kepemudaan dan keolahragaan yang diemban oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun sebagai salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dilingkup Pemerintah Kabupaten KarimunOleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihakyang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Semoga Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait.Sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan Kabupaten Karimuntahun 2025. Akhirnya ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen.

Tanjung Balai Karimun, Juni 2024

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARIMUN

USMAN,S.Si, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19720709 200003 1 006

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN KARIMUN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Awal Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Dokumen Rancangan Awal Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah Penjabaran perumusan komponen yang terdapat di dalam Renstra yang memuat seluruh rencana atau target kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun yang ingin dicapai yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis (Strategic performance indicators) yang relevan. Melalui dokumen ini pula, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dan Sub. Kegiatan tahun 2025.

Dokumen Rencana Kerja ini disusun Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPMJD dan RKPD dan Peratauran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 Tanggal 15 November 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Karimun Tahun 2021-2026, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kemendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Awal Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun ini dapat bermanfaat dalam rangka mendukung Visi,Misi Kabupaten Karimun dan Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun serta menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan dan Sub.Kegiatan Tahun 2025.

Tanjung Balai Karimun, September 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN KARIMUN

CHAIRONI, S.Sos,M.Si

NIP. 19710510 199203 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA AWAL (RANWAL) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 iii

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU..... 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun Tahun Lalu dan Capaian Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun..... 25
2.4 Rancangan Awal RKPD kab. Karimun 28

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 29

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... 29

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun..... 32

3.3 Program dan Kegiatan 33

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KARIMUN..... 36

BAB V. PENUTUP..... 40

BAB I
PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Rencangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Tahunan pada Level Organisasi Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberi gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD melalui Tupoksinya.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Dalam prosesnya, penyusunan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal OPD. Oleh karena itu penyusunan Renja OPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Proses penyusunan Rencana kerja (Renja) didasarkan pada aspirasi yang diformulasikan melalui Teknokratik Program/ Kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, forum OPD dan Musrenbang kecamatan dan Kabupaten setiap tahunya dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun menyusun rencana kerja (Renja) berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Penyusunan rencana kerj juga didasari pada RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 yang memprioritaskan pembangunan dalam beberapa isu strategis. Mengacu pada prioritas pembangunan Daerah yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (GOOD GOVERNANCE) dengan Meningkatnya Kualitas Layanan Publik diselaraskan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Karimun dengan Meningkatnya Kualitas Layanan dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai Sarana Layanan Pengembangan Literasi dan Inklusi Sosial serta Meningkatnya Layanan Pengelolaan Kearsipan yang andal dan pemanfaatan arsip Menjadi prioritas utama dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

I.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja OPD adalah:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Wantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Wantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana KerjaPemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi,Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan IventarisasiPemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur PerencanaanPembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentangRancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daetah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Karimun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah KabupatenKarimun Tahun 2018 Nomor 46);

15. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 75);
16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 77 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 77);
17. Peraturan Bupati Karimun Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 86).

I.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dokumen ini adalah : untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ada, Sedangkan tujuan penyusunan dokumen ini adalah : untuk mensinkronkan kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Karimun , dokumen Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 dan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.

I.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja Awal (RENJA) disusun sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat Visi,Misi Tujuan Strategi ,Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sitematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian OPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024 dilakukan dengan mengukur realisasi capaian-capaian target perencanaan yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis. Oleh karena itu rencana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun ini juga dievaluasi berdasarkan realisasi capaian-capaian target program/kegiatan tahun 2024 yang telah dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun . Evaluasi terhadap Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan rencana program/kegiatan dan hasil rencana program/kegiatan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024 disajikan pada tabel 2.1.1 berikut :

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out put/outcome), Kegiatan (output/outcome)	Target/Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Target Renja Perakta Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
I.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN										
1.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
1.1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan setiap Tahun	7.520 Orang	7.695 Orang	100	8.159 Orang	6.805 Orang	68.12	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	100
1.2	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan	6 Perpustakann	6 Perpustakann	100	7 Perpustakann	7 Perpustakann	100	8 Perpustakaan	7 perpustakaan	100

	Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan	dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan									
1.3	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	1.000 eks	0	0	-	-	-	2.000 eks	2.472 eks	123.6
1.4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2.610 eks	2.610	100	2.610 eks	2.610	100	2.630 eks	3.632 eks	138.1
2.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
2.1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan Pendidikan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan	2 kali	2 kali	100	6 kali	6 kali	100	6 Lokus	4 Lokus	66.67

	Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Literasi pada Satuan Pendidikan									
2.2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan.	2 Keg	2 Keg	100	-	-	-	5 Perpustakaan	-	-
II.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP										
3.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota										
3.1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan digunakan	3 OPD	3 OPD	100	46 OPD	45 OPD	97.83	1.200 Berkas	952 Berkas	79.33
3.2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1.000 berkas arsip usul serah	-	-	1.000 berkas arsip usul serah	-	-	1.000 Berkas	-	-
3.3.	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewnangan	1.500 berkas	-	-	27 OPD	27 OPD	100	-	-	-

		Kabupaten/Kota									
4.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota										
4.1.	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Dok	1 Dok	100	2 Dok	2 Dok	100	1 Arsip	1	100
III.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA										
5.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
5.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	100	2 Dok	2 Dok	100	1 Dok	1 Dok	100
5.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok	2 Dok	100	2 dok	2 Dok	100	2 Lap	2 Lap	100

5.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	1 Lap	100
6.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
6.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Pegawai	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	1 Lap	100	280 Org/Bln	203 Org/Bln	73
6.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Pengelola Keuangan	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	100
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
7.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100	1 Paket	1 Paket	100
7.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis penyediaan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100	1 Paket	1 Paket	100
7.3	Penyediaan Peralatan	Jumlah peralatan rumah tangga	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100	1 Paket	1 Paket	100

	Rumah Tangga	yang disediakan									
7.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis barang yang dicetak dan digandakan	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100	1 Paket	1 Paket	100
7.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan dan Perundang-undangan	5 Dok	5 Dok	100	5 Dok	5 Dok	100	5 Dok	5 Dok	100
7.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Lap	10 Lap	100	10 Lap	10 Lap	100	17 Lap	17 Lap	100
8.	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
8.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening sumber dayaair dan listrik	12 Lap	12 Lap	100	12 Lap	12 Lap	100	12 Lap	12 Lap	100
8.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gaji pegawai non ASN yang dibayarkan	12 Lap	12 Lap	100	12 Lap	12 Lap	100	12 Lap	12 Lap	100
9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah										

9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangn	Jumlah Unit Kendaraan	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	1 Unit	50	2 Unit	2 Unit	100
9.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan	10 Unit	10 Unit	100	8 Unit	8 Unit	100	-	-	-

Berdasarkan telaah hasil Evaluasi Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan yang telah memenuhi target, disimpulkan bahwa pada tahun 2024 SKPD melaksanakan 3 (Tiga) Program Prioritas dengan 9 (sembilan) kegiatan.

Anggaran dan Realisasi Anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian
1.	**Belanja OPERASI**			
	- Belanja Pegawai	3.596.565.503,-	3.362.130.875,-	93,71
	- Belanja Barang dan Jasa	1.207.764.758,-	909.595.830,-	75.31
2.	**Belanja MODAL**			
	- Belanja Modal	93.080.100,-	38.456.300,-	41,32
TOTAL		**4.897.410.361,-**	**4.318.559.005,-**	**88,18**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD dilakukan untuk menilai capaian-capaian kinerja yang telah dicapai. Sehubungan dengan Perubahan yang terjadi pada struktur SKPD dilingkungan Kabupaten Karimun, Analisis Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun dinilai berdasarkan capaian kinerja SKPD Tahun Lalu. Pelayanan dibidang Perpustakaan diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43

Tahun 2007 Tentang Perpustakaan sedangkan pelayanan dibidang Arsip diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun sebagai Penyelenggara Perpustakaan berkewajiban memberikan layanan perpustakaan, meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan masyarakat Kabupaten Karimun dengan memanfaatkan fasilitas perpustakaan sedangkan sebagai Penyelenggara Kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun berkewajiban untuk menjamin terwujudnya pengelolaan arsip daerah yang baik, profesional dan modern dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel.2.2.1 Capaian indikator kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Stándar Untuk Memperkuat Literasi	Ratio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Dengan Penduduk	0.172%	0.173%	0.173%	0.179%	0.179%	
		Persentase Kemanfaatan Perpustakaan oleh masyarakat.	3.89%	2.65%	4.29%	3.02%	3.23%	
2.	Meningkatnya Pengolahan Kearsipan	Persentase Arsip Aktif Yang Telah Dibuatan Daftar Arsip	24%	29.48%	28%	67.8%	30%	

Adapun uraian dalam pencapaian Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Stándar Untuk Memperkuat Literasi

Hasil evaluasi capaian kinerja pada Sasaran Strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja dengan angka capaian sebesar 86.5%. Data evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.2.2

Capaian Sasaran Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Stándar Untuk Memperkuat Literasi

Indikator	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
a. Ratio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Dengan Penduduk	0.172%	0.173%	100	0.173%	0.179%	103
b. Persentase Kemanfaatan Perpustakaan oleh masyarakat	3.89%	2.65%	68.12	4.29%	3.02%	70
Capaian Rata-rata			**84.06**			**86.5**

Secara lengkap, berikut dijabarkan penjelasan tentang capaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran :

Penjelasan tentang Capaian Indikator Kinerja :

a. Ratio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Dengan Penduduk

Indikator Ratio ketercukupan koleksi perpustakaan koleksi perpustakaan dengan penduduk Pertahun diukur dengan membandingkan jumlah koleksi perpustakan yang tersedia dengan jumlah penduduk Kabupaten Karimun. Tahun 2024 target jumlah koleksi

yang ditetapkan adalah sebesar 44.255 atau 0.173% dari total jumlah penduduk Kabupaten Karimun (Data BPS: Jumlah Penduduk Tahun 2022 = 257.297 jiwa) diasumsikan sebanyak 44.255 orang .

Berdasarkan Hasil Evaluasi jumlah koleksi perpustakaan umum Daerah Kabupaten Karimun tahun 2024 Ratio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Dengan Penduduk adalah 0.180% yaitu 46.073 jumlah koleksi (0,180 = 46.073/257.297 jiwa) dengan Capaian 100 %.

Tabel 2.2.3
Jumlah Koleksi Bahan Pustaka dan E-Book

No	Golongan/Klas koleksi	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	KET
1.	000 – Umum	3.985	4.062	4.591	Eksamplar
2.	100 – Psikologi	1.813	1.826	1.899	Eksamplar
3.	200 – Agama	4.889	4.921	5.040	Eksamplar
4.	300 – Ilmu Sosial	10.394	10.558	10.853	Eksamplar
5.	400 – Bahasa	984	990	982	Eksamplar
6.	500 – Ilmu Murni	1.471	1.478	1.501	Eksamplar
7.	600 – Teknologi/Ilmu Terapan	7.508	7.551	7.692	Eksamplar
8.	700 – Kesenian & Olahraga	2.383	2.449	2.506	Eksamplar
9.	800 - Kesusasteraan	7.055	7.208	7.333	Eksamplar
10.	900 – Sejarah & Geografi	3.613	3.639	3.676	Eksamplar
11.	Referensi	-	-	-	Eksamplar
12.	Deposit	-	-	-	Eksamplar
	Jumlah	**44.095**	**44.682**	**46.073**	**Eksamplar**
13.	E – Book	939	939	939	

Koleksi Bahan Pustaka merupakan sumber informasi perpustakaan dalam bentuk karya cetak dan karya rekam. Pada umumnya koleksi perpustakaan di perpustakaan Daerah Kabupaten Karimun terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang disesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat. Komposisi dan jumlah masing-masing jenis koleksi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pembangunan daerah.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun setiap tahunnya merencanakan pengadaan bahan pustaka selain berusaha mendapatkan bantuan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Melalui Dana Alokasi Khusus dan sumbangan masyarakat. Komitmen daerah ini sebagai wujud usaha meningkatkan fungsi perpustakaan sebagai sarana Layanan pengembangan wawasan dan budaya baca untuk meningkatkan minat baca masyarakat Kabupaten Karimun.

b. Persentase Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat

Indikator Persentase Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat diukur dengan membandingkan Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun. Target yang ditetapkan adalah sebesar **4.29%** dari total jumlah penduduk Kabupaten Karimun (Data BPS: Jumlah Penduduk Tahun 2021 = 257.297 jiwa) yaitu : **7.782 Orang**.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Realisasi Persentase Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat pada Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Karimun adalah **3.02%** atau **7.782** orang yaitu 7.782 : 257.297 x 100=3.02 dengan Persentase capaian Kinerja tahun ini **70%**.

TabTabel 2.2.4
Data Pengunjung Perpustakaan Umum Kabupaten Karimun

NO	KLASIFIKASI PENGUNJUNG	JUMLAH PENGUNJUNG			KET.
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1.	Anak-anak	434	424	127	Orang
2.	Pelajar	6.316	4.840	4.708	Orang

3.	Mahasiswa	529	558	1.273	Orang
4.	Guru/PNS	247	418	699	Orang
5.	Swasta/Umum	433	565	975	Orang
TOTAL		**7.959**	**6.805**	**7.782**	**Orang**

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2024 diantaranya :

1. Melakukan promosi melalui, kunjungan edukatif pelajar, perpustakaan keliling dan media sosial.
2. Memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka.
3. Melengkapi sarana prasarana pelayanan.
4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong kesukaan anak dan Pemustaka pada buku.
5. Meningkatkan Publikasi dan Informasi Minat Baca melalui Media Elektronik dan media cetak seperti memanfaatkan spanduk dan brosur untuk mengajak masyarakat berkunjung ke perpustakaan.
6. Melakukan Tranformasi Perpustakan Berbasis Inklusi Sosial dengan Melakukan Kegiatan Belajar Bahasa Isyarat dan Bahasa Inggris untuk Komunitas dan Pengunjung Perpustakaan.
7. Meningkatkan fungsi perpustakaan Desa/Kel. Untuk mentransformasikan Perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Grafik 2.2.5
Pengunjung Perpustakaan Umum Kabupaten Karimun

Berdasarkan data diatas, sebagian besar pengunjung perpustakaan merupakan yang berasal dari Paud, SD, SLTP dan SLTA, Mahasiswa serta Masyarakat Umum.
Faktor - faktor yang mempengaruhi kunjungan ke perpustakaan umum daerah tahun 2024 diantaranya :

1. Lokasi gedung perpustakaan yang cukup strategis (ditengah kota).
2. Waktu layanan perpustakaan yang lebih lama 6 (enam) hari.
3. Tersedianya program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan perpustakaan melalui kegiatan Pelayanan Perpustakaan Umum Kabupaten Karimun dan Kerjasama dengan Dinas pendidikan, Kementerian Agama dan Instansi vertical serta komunitas yang bergerak dibidang Pengembangan Budaya baca di masyarakat.
4. Peningkatan kualitas layanan petugas perpustakaan dengan penyediaan seragam khusus petugas pelayanan .
5. Memperbaiki Kualitas Sumber Daya Manusia Perpustakaan melalui kegiatan rutin pengarahan singkat (*briefing*) untuk perbaikan *attitude* petugas pelayanan.
6. Menganggarkan dana pengadaan terbitan berkala seperti majalah mingguan, bulanan dan tabloid untuk menarik minat pengunjung.

7. Pembinaan dan supervisi yang dilakukan perpustakan ke sekolah, desa/ kelurahan dan Taman Bacaan Masyarakat guna mengembangkan minat baca masyarakat dan pengelolaan perpustakaan yang sesuai standar.
8. Adanya kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Tentang Perpustakaan untuk mengelola perpustakaan dengan baik dan sesuai standar melalui magang ke perpustakaan umum daerah dan penglibatan masyarakat / komunitas di perpustakaan seperti kegiatan bedah buku yang berkerjasama dengan PORKASI Kabupaten Karimun.
9. Pengunjung perpustakaan tidak hanya berasal dari individu tetapi dari kelompok pelajar maupun kelompok masyarakat.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengolahan Kearsipan

Dokumen Arsip Daerah yang dikelola terdiri dari Dokumen Arsip Statis dan Dinamis. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau Lembaga Kearsipan. Sedangkan arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Target Persentase Arsip Aktif Yang Telah Dibuatan Daftar Arsip tahun 2024 diasumsikan adalah 28% arsip aktif yang telah dibuat daftar arsip. Dari Hasil Evaluasi dan Data kearsipan yang dikelola dibidang Pengelolaan arsip Realisasi target pada indikator ini adalah : 28% arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arrsip dengan realisasi sebesar 28.24 % arsip yang telah dibuatkan daftar arsip yang terdiri dari surat-surat dinas, peraturan perundangan-undangan, laporan kegiatan organisasi perangkat daerah. Indikator Persentase Arsip Aktif Yang Telah Dibuatan Daftar Arsip diukur dengan perbandingan jumlah arsip tahun ini dengan jumlah arsip tahun lalu. Pengelolaan Arsip OPD dapat diselamatkan, dilestarikan dan dikelola sesuai standar.

Dari Hasil Evaluasi tingkat capaian sasaran ini mendapat predikat **"Berhasil"** hal ini dipengaruhi oleh :

1. Pengelolaan surat masuk dan surat keluar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun telah memiliki Pedoman yaitu SOP Surat Masuk dan SOP Surat Keluar.
2. Telah tersusunnya Peraturan Bupati Karimun No. 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, yang bertujuan mengatur arsip dinamis aktif supaya arsip tertata rapi dan teratur sesuai dengan sistem penyimpanan yang digunakan dengan klasifikasi yang baik dapat mempermudah penemuan Kembali arsip jika suatu saat dibutuhkan.
3. Dengan dilakukan Pembinaan dan Penataan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

Tabel. 2.2.6
Capaian Sasaran Meningkatnya Pengolahan Kearsipan

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Arsip Aktif Yang Telah Dibuatan Daftar Arsip	28 % daftar arsip	28.24% daftar arsip	100 %
Capaian Rata-rata			**100%**

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

Berpedoman pada tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun sesuai dengan Aturan penyelenggaraan Pelayanan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 43 Tentang Kearsipan dan identifikasi masalah yang ada maka ditetapkan isu – isu strategis tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. ISU INTERNAL.

Kendati telah ditetapkan berbagai kebijakan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan tetapi upaya pengembangan perpustakaan dan kearsipan sampai saat ini masih dihadapkan pada tantangan dan kendala antara lain :

- Belum tersedianya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

  Dalam Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan perlu adanya regulasi khusus dalam hal ini peraturan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan perpustakaan dan kearsipan di daerah.

- Keterbatasan Sumberdaya manusia .

  Ketersediaan Sumber daya manusia khusunya tenaga perpustakaan (pustakawan) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten saat ini hanya 3 0rang. Sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2017 standar Nasional Perpustakaan Kabupaten Kota menyebutkan bahwa Tenaga Perpustakaan yang memiliki kualifikasi dibidang perpustakaan sekurang-kurangnya adalah 1 orang per 25.000 penduduk, Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun adalah : 227.277 jiwa (Data BPS Kab.Karimun Tahun 2017) adalah 9 Orang Sedangkan tenaga bidang kearsipan (arsiparis) hanya ada 3 orang dengan perbangingan OPD di Kabupaten Karimun adalah 28 OPD,14 Kecamatan dan BUMD, organisasi kemasyarakatan dan instansi vertikal lainya dan Kurangnya SDM yang berkopenten dibidang IT.

- Kurangnya sarana/prasarana berupa peralatan dan perlengkapan pelayanan yang modern. Baik perpustakaan Umum Daerah maupun Perpustakaan Sekolah,Desa/Kel. Untuk Meningkatnya Kualitas Layanan dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai Sarana Layanan Pengembangan Literasi dan Inklusi Sosial di

  masyarakat diperlukan sarana / prasaran yang modern ruang baca yang nyaman dan indah, ketersedian wifi serta ketersediaan bahan pustaka yang sesuai dengan tuntutan zaman dan Ruang Penyimpanan Arsip dan pengelolaan arsip yang sesuai standar Nasional.

2. ISU EKSTERNAL.

Rendahnya minat baca dan minat untuk berkunjung ke perpustakaan menjadi kendala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun dalam mengembangkan pelayanan Perpustakaan dan Pelayanan dan pengelolaan Kearsipan saat ini. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain

- Rendahnya minat baca masyarakat saat ini dipengaruhi oleh belum adanya kebiasaan, lingkugan dikeluarga yang tidak mengisi waktu luang dengan kebiasaan membaca dan kecenderungan orang tua mengenalkan gadget kepada anak-anak mereka diusia dini.
- Keterbatasan Sumberdaya Manusia dalam mengelola Perpustakaan Desa/Kel dan Sekolah sehingga sampai saat ini masih banyak Perpustakaan desa/Kel. Serta sekolah masih belum dikelola sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Standar Nasional Perpustakaan sekolah mencakup : standar koleksi perpustakaan; standar sarana dan prasarana perpustakaan;
- Masih Rendahnya peran masyarakat dalam Pembangunan di bidang Kearsipan di Kabupaten Karimun. Pelaksanaan Kearsipan bukan hanya dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah saja tetapi peran serta masyarakat juga sangat diperlukan Sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam kearsipan yang meliputi peran serta perseorangan, organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan kearsipan dalam ruang lingkup pengelolaan, penyelamatan, pengguna arsip serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan.

Peluang Pengembangan Pelayanan.

Adapun peluang pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

- Letak Gedung Perpustakaan sangat strategis sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.

- Tersedianya Program-program pengembangan SDM bidang Perpustakaan dan Kearsipan di Tingkat Provinsi dan Pusat.
- Adanya Program bantuan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perpustakaan Melalui Dana APBD Propinsi dan Dana DAK.
- Perkembangan Teknologi dan Informasi memungkinkan perpustakaan dan arsip daerah dikelola berbasis teknologi informasi.
- Layanan Perpustakaan Berbasis inklusi sosial.

3.4 Rancangan Awal RKPD.

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan kerja awal perangkat daerah. Dalam Proses penyempurnaan dilakukan Penyesuaian terhadap Kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun. Disingkronkan dengan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 dengan Misi 7 Yaitu**.** Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. dan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun dengan Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan sebagai Sarana Layanan Pengembangan Literasi dan Inklusi Sosial serta Meningkatnya Layanan Pengelolaan Kearsipan yang andal dan pemanfaatan arsip.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN Tahun 2021-2026 merupakan tahap akhir dari RPJPN tahun 2005-2025. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembagunan dalam RPJPN dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah keatas (upper-midle income country/MIC) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sasaran Pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah wujud masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya infrastruktur perekonomian kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 pilar dari RPJMN ke 4 Tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir yang diterjemahkan dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas.

Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2021-2026.

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjada

TEMA DAN AGENDA PEMBANGUNAN

"***Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan*** "

Tahap Akhir dalam RPJPN ini akan mempengaruhi pencapaia terget pembangunan adapun 7 Agenda Prioritas pembangunan tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Insfrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Trasnformasi Pelayanan Publik

3.2. Arah Kebijakan dan strategi Perpustakaan Nasional RI Tahun 2021-2026

Meningkatkan Literasi,Inovasi dan Kreativitas melalui :

1. Meningkatkan Budaya Literasi
   - Pengembangan budaya kegemaran membaca
   - Pengembangan pembukuan dan penguatan konten literasi
   - Peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi
2. Pengembangan, pembinaan dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra
   - Penggunaan Bahasa Indonesia dalam forum-forum kenegaraan di tingkat Nasional dan internasional
   - Pengembangan pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas
   - Revitalisasi bahasa dan aksara daerah sebagai khazanah budaya bangsa
3. Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas dan daya cipta.
   - Peningkatan budaya riset dan model pembelajaran penjelajahan dan penyelidikan (discovery and inquirí leraning)
   - Pengembangan budaya produksi dan kreatifitas berbasis inovasi
4. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi
   - Pengembangan Mitra perpustakaan (library supporter)
   - Pengembangan inovasi sosial dan filantropi

Arah Kebijakan Aspek Manajemen Kearsipan RPJMN 2021-2025

1. Peningkatan ketersediaan informasi kearsipan yang autentik dan utuh guna mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara dan simpul pemersatu bangsa dengan agenda strategi :
   - Meningkatkan kualitas manajemen kearsipan, sarana dan prasarana serta fungsi kelembagaan kearsipan khususnya di daerah
2. Peningkatan keselamatan dan keterlindungan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dengan agenda strategi :
   - Meningkatkan implementasi sistem pengelolaan terintegrasi berbasis TIK dan kapasitas pemanfaatan arsip sebagai manajemen pengetahuan (knowledge management) dengan Big Data Kearsipan
3. Peningkatan ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah dengan agenda strategis :
   - Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kearsipan
4. Peningkatan kapasitas pemanfaatan arsip sebagai manajemen pengetahuan pemerintahan dengan agenda strategis :
   - Meningkatkan pemanfaatan dan pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa.

Terkait dengan tugas pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun, dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif , demokratis dan meningkatkan kualitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing

Melalui peningkatan kualitas pelayanan Perpustakaan, pengembangan perpustakaan, peningkatan Budaya Literasi , pengelolaan kearsipan yang baik sesuai standar dan berbasisi IT, pelestarian dan penyelamatan arsip daerah adalah Prioritas utama yang menjadi dasar penyusunan rancangan program dan kegiatan tahun 2025.

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.

Mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun tahun 2021-2026, berikut dirumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2025 dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun :

a. Tujuan

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Menjadikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun dalam meningkatkan kualitas pelayanan Perpustakaan dengan Menyediakan Sarana dan Prasaran Pelayanan Perpustakaan , SDM yang berkualitas agar meningkatnya kemanfaatan Perpustakaan bagi masyarakat untuk pengembangan literasi dan minat baca dan inklusi sosial serta Meningkatnya Pelayanan Kearsipan dalam penyelamatan dan Perlindunga Arsip Daerah dengan menyediakan sarana dan Prasarana yang sesuai ketentuan, Kualitas SDM Pengelola Arsip dan Pembinaan pengelolaan Kearsipan sesuai standart dan berbasis TIK. dan tersedianya Arsip yang Autentik, terpercaya sebagai alat bukti yang sah.

b. Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Perpustakaan sebagai Sarana Layanan Pengembangan Literasi dan Inklusi Sosial
2. Meningkatnya Layanan Pengelolaan Kearsipan yang andal dan pemanfaatan arsip

Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah OPD

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2025 (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Stándar Untuk Memperkuat Literasi	1. Ratio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Dengan Penduduk	0.179
				2. Persentase Kemanfaatan Perpustakaan oleh masyarakat.	3.23
		2	Meningkatnya Pengolahan Kearsipan	Persentase Arsip Aktif Yang Telah Dibuatan Daftar Arsip	30
		3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	70
				Level Kematangan Manajemen Resiko Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (MR)	3

3.4. Program dan Kegiatan

Dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun menetapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun Tahun 2025 merupakan program yang terkait dengan sasaran dalam dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun melaksanakan 3 (tiga) program , 11 (sebelas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub Kegiatan Prioritas. Adapun Program dan kegiatan tersebut seperti berikut :

1. **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**

Kegiatan.

1.1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

1.2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2. **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**

Kegiatan :

2.1. Pengelolaan Arsip dinamis daerah kabupaten/kota

2.2. Pengelolaan Arsip statis Daerah Kabupaten Kota

3. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Kegiatan :

3.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah

3.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

3.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3.6. Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah

3.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dari ketiga program yang akan dilaksanakan, terdapat 2 (dua) program prioritas yang telah disinkronkan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Karimun yaitu :

1. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Bertujuan untuk Peningkatkan Kualitas Pengelolaan arsip Daerah sesuai standard dan berbasis TIK , Penyediaan Sarana Prasarana , menyelamatkan dan melestarikan arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun melalui Pembinaan Kearsipan kepada Organisasi Perangkat Daerah dan Penyusunan JRA.

2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Bertujuan untuk meningkatkan kemanfaaatan Perpustakaan sebagai sarana Pengembangan literasi di masyarakat dan perpustakaan bertransformasi inklusi sosial melalui Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan sesuai standar dan Pembudayaan gemar membaca di Tingkat Kabupaten/Kota.

BAB. IV

RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAUPATEN KARIMUN

Sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2025

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (out Put) dan Kegiatan Out Come		RENCANA TAHUN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU	
					Lokasi	TAHUN 2025		SUMBER DANA		TAHUN 2026	
						Target	Rp.			Target	Rp.
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10
2.23.02.	**I**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Out Put**	**Persentase Perpustakaan yang dilakukan Pembinaan**	**KAB.KARIMUN**	**25.62%**	**721.715.719**	**APBD**		**30.58%**	**994.045.000**
		Kegiatan.									
2.23.02.2.01	1.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	Out Put	Jumlah Perpustakaan Daerah di Kabupaten Karimun	KAB.KARIMUN	1 Perpustakaan	410.705.800	APBD		1 Perpustakaan	829.045.000
		Sub.Kegiatan									
2.23.02.2.01.01	1.	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Out Put	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	KAB.KARIMUN	1 Layanan	140.000.000	APBD		-	-
2.23.02.2.01.02	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Out Put	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di	KAB.KARIMUN	1 Perpustakaan	185.705.800	APBD		1 Perpustakaan	197.045.000

				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya							
2.23.02.2.01.03	3.	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Out Put	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dikembangkan	KAB.KARIMUN	-	-	-		100 Eksemplar	147.000.000
2.23.02.2.01.04	4.	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan.	Out Put	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	KAB.KARIMUN	11 Perpustaka an	45.000.000,-	APBD		12 Perpustakaan	50.000.000
2.23.02.2.01.06	5	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Out Put	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KAB.KARIMUN	-	-	APBD		30 Orang	100.000.000
2.23.02.2.01.08	6	Pengembangan Bahan Pustaka	Out Put	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	KAB.KARIMUN	-	-	APBD		1.378 eksp	295.000.000
2.23.02.2.01.09	7	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Out Put	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan	KAB.KARIMUN	2640 Eksemplar	40.000.000	APBD		2650 exp	40.000.000

				Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan							
		Kegiatan									
2.23.02.2.02	2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Out Put	Jumlah Sosialisasi Pembudayaan Gemar Membaca yang dilakukan.	KAB.KARIMUN	5 Kali	311.009.919	APBD		5 Kali	165.000.000
		Sub.Kegiatan									
2.23.02.2.02.01	8.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Out Put	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	KAB.KARIMUN	7 Lokus	15.000.000	APBD		8 Lokus	40.000.000
2.23.02.2.02.03	9.	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Out Put	"Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota"	KAB.KARIMUN	11 Orang	20.000.000	APBD		12 Orang	25.000.000
2.23.02.2.02.04	10.	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Out Put	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	KAB.KARIMUN	30 Perpustaka an	206.009.919	APBD		25 Perpustakaan.	100.000.000
2.23.02.2.02.05	11.	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Out put	"Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya "	KAB.KARIMUN	2 Orang	70.000.000	APBD		-	-
2.24.02	**II**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Out Put**	**Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara**	**KAB.KARIMUN**	**31%**	**225.000.000**	**APBD**		**34%**	**180.000.000**

				Baku.							
		Kegiatan									
2.24.02.2.01	3	Pengelolaan Arsip dinamis daerah kabupaten/kota	Out Put`	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	KAB.KARIMUN`	2000 berkas arsip usul serah	125.000.000	APBD		1000 berkas arsip usul serah	70.000.000
		Sub Kegiatan									
2.24.02.2.01.01	12.	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Out Put	"Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan"	KAB.KARIMUN	1200 Berkas	55.000.000	APBD		-	-
2.24.02.2.01.02	13	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Out Put	"Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaa n dan Penyusutan"	KAB.KARIMUN	2000 berkas arsip usul serah	70.000.000	APBD		-	-
2.24.02.2.01.03	14	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	Out Put	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/K ota"	KAB.KARIMUN	-	-	-		1 Laporan	70.000.000
		Kegiatan									
2.24.02.2.02	4	Pengelolaan Arsip statis Daerah Kabupaten Kota	Out Put	Jumlah Arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	KAB.KARIMUN	1 Arsip	100.000.000	APBD		1 Arsip	110.000.000
		Sub.Kegiatan									
2.24.02.2.02.02	15.	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan akses Arsip Statis	Out Put	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	KAB.KARIMUN	1 Arsip	100.000.000	APBD		1 arsip	110.000.000
2.23.01.	**III**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.**	**Out Put**	**Jumlah IKU Yang Mencapai Target.**	**KAB.KARIMUN**	**79.5%**	**4.997.417.281**	**APBD**		**80%**	**4.836.750.000**
		Kegiatan									
2.23.01.2.01	5	Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Out Put	Jumlah Dokumen	KAB.KARIMUN	4 Dok	160.000.000	APBD		3 Dok	160.000.000
		Sub Kegiatan									
2.23.01.2.01.01	16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Out Put	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat	KAB.KARIMUN	2 Dok	60.000.000	APBD		1 Dok	60.000.000

				Daerah							
2.23.01.2.01.06	17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Out Put	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB.KARIMUN	2 Laporan	55.000.000	APBD		2 Laporan	55.000.000
2.23.01.2.01.07	18	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Out Put	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB.KARIMUN	1 Laporan	45.000.000	APBD		1 Laporan	45.000.000
		Kegiatan									
2.23.01.2.02	6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Out Put	Jumlah Laporan	KAB.KARIMUN	1 Lap.	3.069.360.831	APBD		1 Lap.	3.069.360.831
		Sub.Kegiatan									
	19	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Out Put	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KAB.KARIMUN	Org/bln	2.883.452.831	APBD		Org/bln	2.883.452.831
	20.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	Out Put	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KAB.KARIMUN	1 Dok	185.908.000	APBD		1 Dok	185.908.000
		Kegiatan									
2.23.01.2.05	7	Administrasi Kepegawaian Peraangkat Daerah	Out Put	Jumlah Laporan	KAB.KARIMUN	1 Laporan	72.000.000	APBD		1 Laporan	45.000.000
		Sub Kegiatan									
	21	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya.	Out Put	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya	KAB.KARIMUN	1 Paket	22.000.000	APBD		1 Paket	45.000.000
	22	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Out Put	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	KAB.KARIMUN	5 Orang	50.000.000	APBD		-	-

				Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							
		Kegiatan									
2.23.01.2.06	8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Out Put	Jumlah Laporan	KAB.KARIMUN	1 Lap	343.949.150	APBD		1 Laporan	352.948.950
		Sub Kegiatan									
2.23.01.2.06.01	23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Out Put	"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"	KAB.KARIMUN	1 Paket	21.566.000	APBD		1 Paket	21.566.000
2.23.01.2.06.02	24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Out Put	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan"	KAB.KARIMUN	1 Paket	27.584.200	APBD		1 Paket	27.584.200
2.23.01.2.06.03	25	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Out Put	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan"	KAB.KARIMUN	1 Paket	7.000.000	APBD		1 Paket	15.000.000
2.23.01.2.06.04	26	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Out Put	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"	KAB.KARIMUN	1 Paket	9.246.000	APBD		1 Paket	15.246.000
2.23.01.2.06.05	27	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Out Put	"Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan"	KAB.KARIMUN	1 Paket	13.500.000	APBD		1 Paket	20.000.000
2.23.01.2.06.06	28	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Out Put	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	KAB.KARIMUN	5 Dok	8.905.000	APBD		5 dok	9.905.000
2.23.01.2.06.09	29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Out Put	"Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi	KAB.KARIMUN	20 Laporan	256.147.950	APBD		25 Lap	243.647.750

				dan Konsultasi SKPD"							
		Kegiatan									
2.23.01.2.07	9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Out Put	Jumlah Laporan	KAB.KARIM UN	0	241.177.000	APBD		0	104.277.919
		Sub Kegiatan									
2.23.01.2.07.05	30	Pengadaan Mebel	Out Put	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KAB.KARIMUN	-	-	-		-	-
2.23.01.2.07.06	31	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Out Put	"Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan"	KAB.KARIMUN	2 Unit	40.000.000	APBD		-	-
2.23.01.2.07.11	32	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Out Put	"Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan"	KAB.KARIMUN	6 Unit	201.177.000	APBD		1 unit	104.277.919
2.23.01.2.07.08	33	Pengadaan asset tak berwujud	outp ut	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	KAB.KARIMUN	-	-	APBD		-	-
		Kegiatan									
2.23.01.2.08	10	Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah.	Out Put	Jumlah Laporan	KAB.KARIMUN	1 Laporan	931.800.000	APBD		1 Laporan	925.032.000
		Sub Kegiatan									
2.23.01.2.08.01	34	Penyediaan jasa surat menyurat	Out Put	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	KAB.KARIMUN	1 Lap.	9.000.000	APBD		1 Lap	2.232.000
2.23.01.2.08.02	35	Penyediaan jasa komunukasi, sumber daya air dan listrik	Out Put	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KAB.KARIMUN	12 Lap	65.000.000	APBD		12 Lap	65.000.000
2.23.01.2.08.04	36	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Out Put	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	KAB.KARIMUN	12 Lap	857.800.000	APBD		12 Lap	857.800.000

		Kegiatan									
2.23.01.2.09	11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Out Put	Jumlah Laporan	KAB.KARIMUN	4 Lap.	179.130.300	APBD		3 Lap.	180.130.300
		Sub Kegiatan									
2.23.01.2.09.01	37	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan.	Out Put	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KAB.KARIMUN	1 Unit	55.565.300	APBD		1 Unit	55.565.300
2.23.01.2.09.02	38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Out Put	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KAB.KARIMUN	2 Unit	54.565.000	APBD		2 Unit	54.565.000
2.23.01.2.09.06	39	Pemeliharaan Peraltan dan mesin lainnya	Out Put	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"	KAB.KARIMUN	6 Unit	55.000.000	APBD		6 Unit	55.000.000
2.23.01.2.09.08	40	Pemeliharaan asset tak berwujud	Out Put	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	KAB.KARIMUN	1 Unit	14.000.000	APBD		1 unit	15.000.000
		JUMLAH					**5.944.133.000**				**6.010.795.000**

BAB V

PENUTUP

Penyusunan rencana kerja Awal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun Tahun 2025 berdasarkan pada pelaksanaaan yang mengarah pada program dan kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang pada dokumen Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 yang mengacu pada dokumen Revisi RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan program , kegiatan dan Sub Kegiatan pada masing-masing Bidang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun untuk tahun 2025.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun maka rencana Tahun 2025 ini disusun dengan menetapkan 3 (Tiga) Program , 11 (Sebelas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub Kegiatan. Dana anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun, APBD Propinsi Kepulauan Riau dan DAU.

Pada akhirnya, dokumen Rencana awal (Renja) Kerja ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun periode Renstra 2021-2026

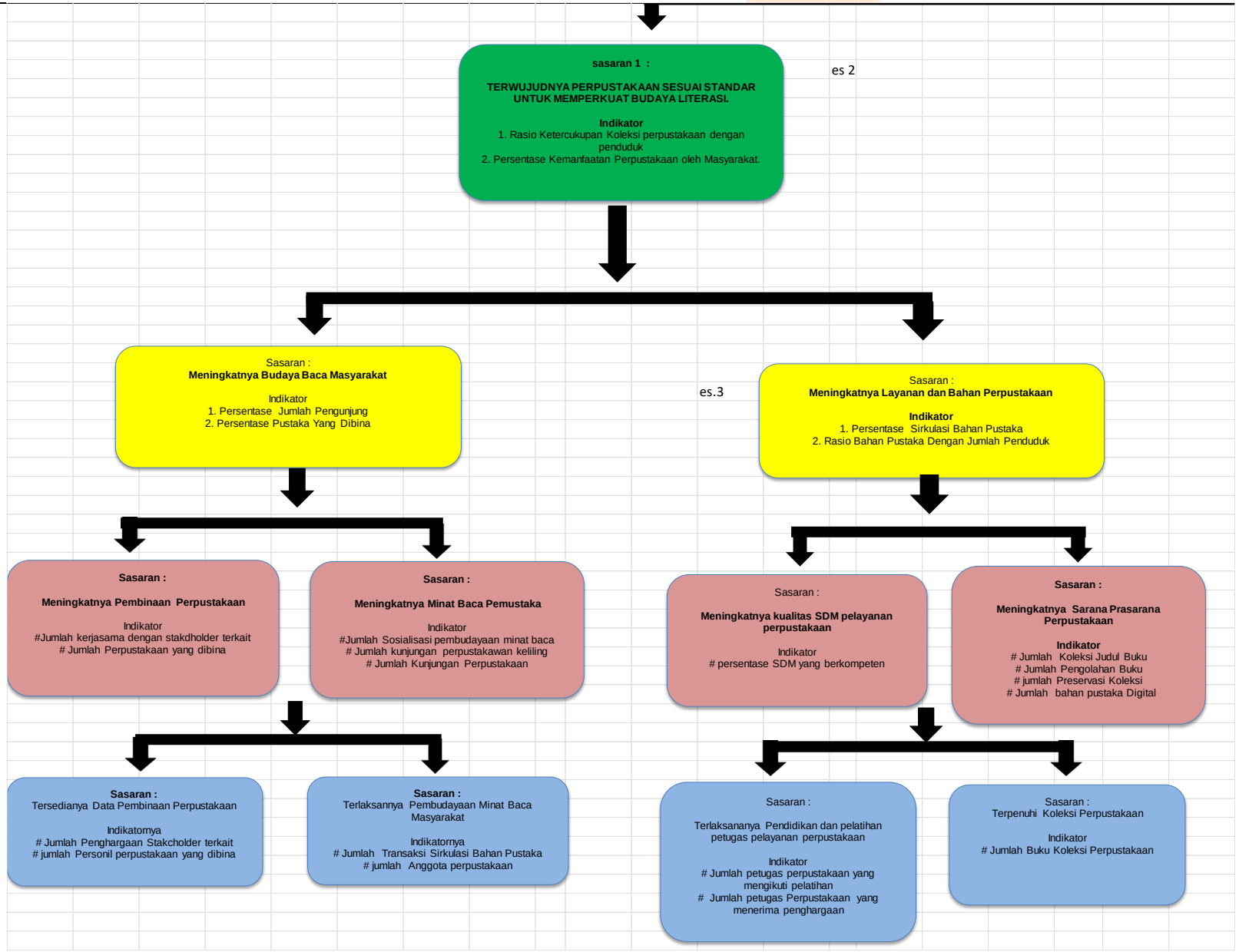
sasaran 1 :
TERWUJUDNYA PERPUSTAKAAN SESUAI STANDAR UNTUK MEMPERKUAT BUDAYA LITERASI.
Indikator
1. Rasio Ketercukupan Koleksi perpustakaan dengan penduduk
2. Persentase Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat.
es 2
Sasaran :
Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat
Indikator
1. Persentase Jumlah Pengunjung
2. Persentase Pustaka Yang Dibina
es.3
Sasaran :
Meningkatnya Layanan dan Bahan Perpustakaan
Indikator
1. Persentase Sirkulasi Bahan Pustaka
2. Rasio Bahan Pustaka Dengan Jumlah Penduduk
Sasaran :
Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan
Indikator
#Jumlah kerjasama dengan stakdholder terkait
Jumlah Perpustakaan yang dibina
Sasaran :
Meningkatnya Minat Baca Pemustaka
Indikator
#Jumlah Sosialisasi pembudayaan minat baca
Jumlah kunjungan perpustakawan keliling
Jumlah Kunjungan Perpustakaan
Sasaran :
Meningkatnya kualitas SDM pelayanan perpustakaan
Indikator
persentase SDM yang berkompeten
Sasaran :
Meningkatnya Sarana Prasarana Perpustakaan
Indikator
Jumlah Koleksi Judul Buku
Jumlah Pengolahan Buku
jumlah Preservasi Koleksi
Jumlah bahan pustaka Digital
Sasaran :
Tersedianya Data Pembinaan Perpustakaan
Indikatornya
Jumlah Penghargaan Stakcholder terkait
jumlah Personil perpustakaan yang dibina
Sasaran :
Terlaksannya Pembudayaan Minat Baca Masyarakat
Indikatornya
Jumlah Transaksi Sirkulasi Bahan Pustaka
jumlah Anggota perpustakaan
Sasaran :
Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan perpustakaan
Indikator
Jumlah petugas perpustakaan yang mengikuti pelatihan
Jumlah petugas Perpustakaan yang menerima penghargaan
Sasaran :
Terpenuhi Koleksi Perpustakaan
Indikator
Jumlah Buku Koleksi Perpustakaan

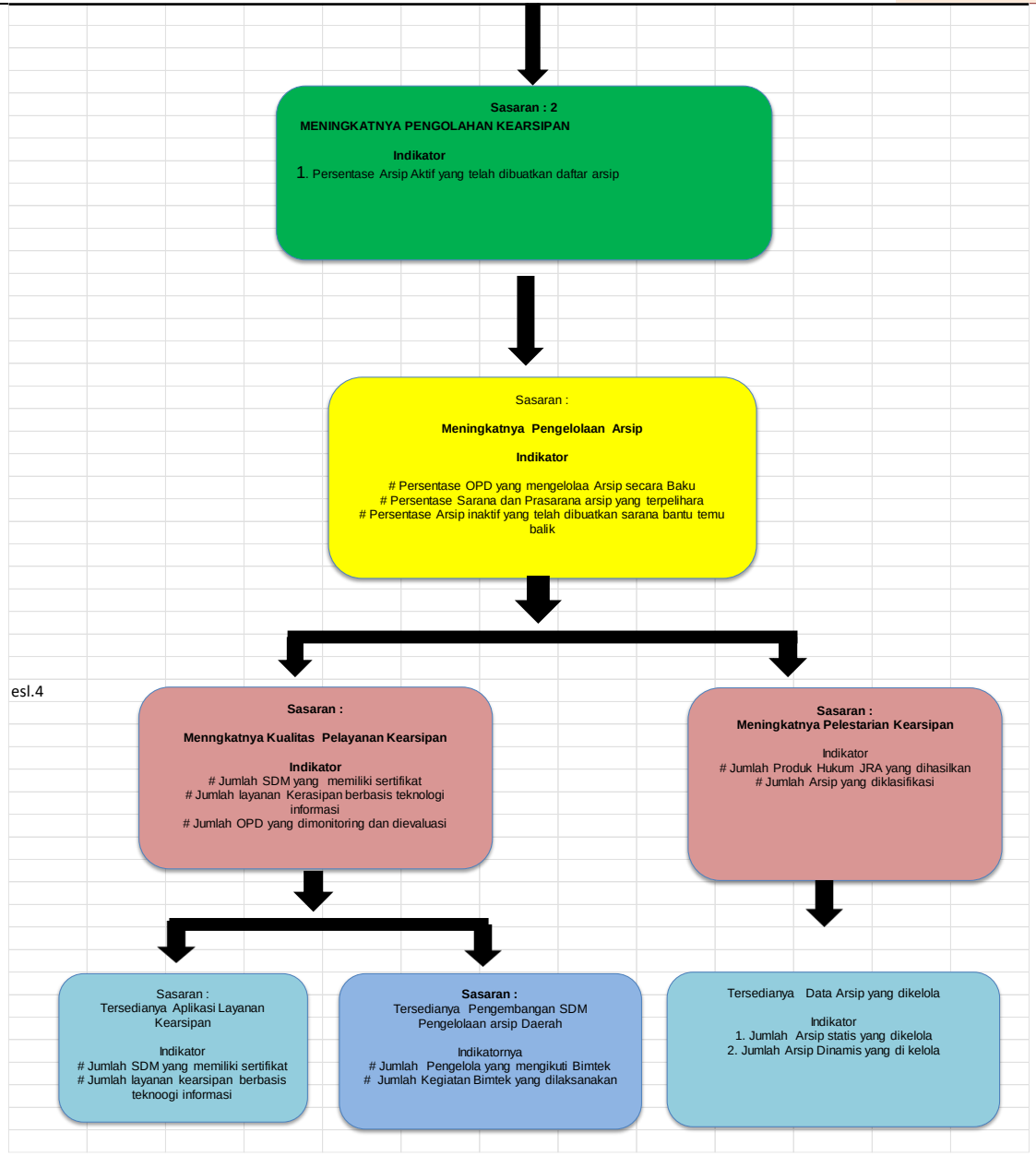
Sasaran : 2
MENINGKATNYA PENGOLAHAN KEARSIPAN
Indikator
1. Persentase Arsip Aktif yang telah dibuatkan daftar arsip
Sasaran :
Meningkatnya Pengelolaan Arsip
Indikator
Persentase OPD yang mengelolaa Arsip secara Baku
Persentase Sarana dan Prasarana arsip yang terpelihara
Persentase Arsip inaktif yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik
esl.4
Sasaran :
Menngkatnya Kualitas Pelayanan Kearsipan
Indikator
Jumlah SDM yang memiliki sertifikat
Jumlah layanan Kerasipan berbasis teknologi informasi
Jumlah OPD yang dimonitoring dan dievaluasi
Sasaran :
Meningkatnya Pelestarian Kearsipan
Indikator
Jumlah Produk Hukum JRA yang dihasilkan
Jumlah Arsip yang diklasifikasi
Sasaran :
Tersedianya Aplikasi Layanan Kearsipan
Indikator
Jumlah SDM yang memiliki sertifikat
Jumlah layanan kearsipan berbasis teknoogi informasi
Sasaran :
Tersedianya Pengembangan SDM Pengelolaan arsip Daerah
Indikatornya
Jumlah Pengelola yang mengikuti Bimtek
Jumlah Kegiatan Bimtek yang dilaksanakan
Tersedianya Data Arsip yang dikelola
Indikator
1. Jumlah Arsip statis yang dikelola
2. Jumlah Arsip Dinamis yang di kelola

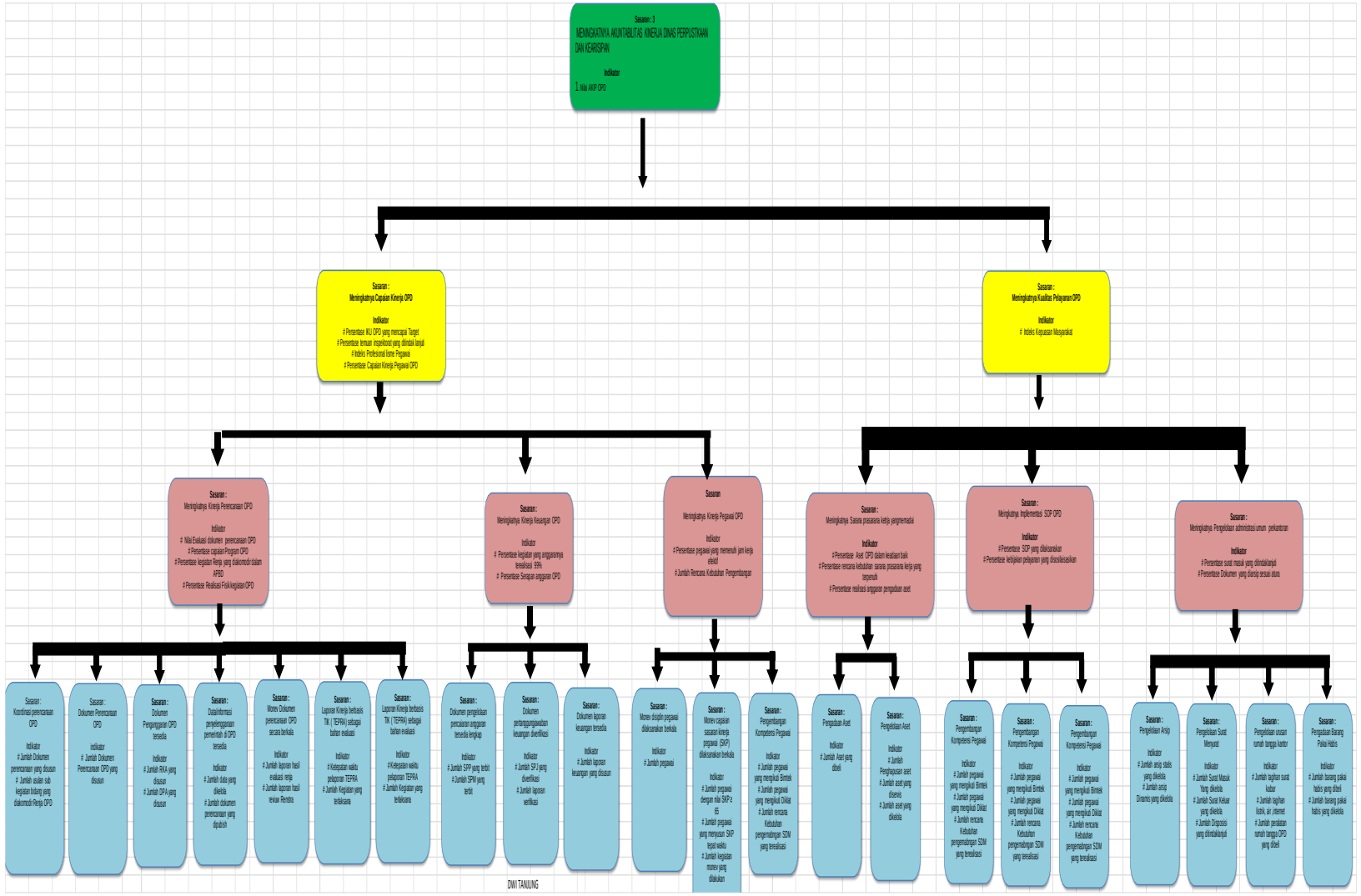
Sasaran : 1
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Indikator
1. Nilai AKIP OPD
Sasaran :
Meningkatnya Capaian Kinerja OPD
Indikator
Persentase IKU OPD yang mencapai Target
Persentase temuan inspektorat yang ditindak lanjuti
Indeks Perilesional Isme Pegawai
Persentase Capaian Kinerja Pegawai OPD
Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD
Indikator
Indeks Kepuasan Masyarakat
Sasaran :
Meningkatnya Kinerja Perencanaan OPD
Indikator
Nilai Evaluasi dokumen perencanaan OPD
Persentase capaian Program OPD
Persentase kegiatan Renja yang diakomodir dalam APBD
Persentase Realisasi Fisik kegiatan OPD
Sasaran :
Meningkatnya Kinerja Keuangan OPD
Indikator
Persentase kegiatan yang anggarannya terealisasi 99%
Persentase Serapan anggaran OPD
Sasaran
Meningkatnya Kinerja Pegawai OPD
Indikator
Persentase pegawai yang memenuhi jam kerja efektif
Jumlah Rencana Kebutuhan Pengembangan
Sasaran :
Meningkatnya Sarana prasarana kerja pengimemadai
Indikator
#Persentase Aset OPD dalam keadaan baik
Persentase rencana kebutuhan sarana prasarana kerja yang terpenuh
Persentase realisasi anggaran pengadaan aset
Sasaran :
Meningkatnya Implementasi SOP OPD
Indikator
#Persentase SOP yang diaksarakan
Persentase kesiapan pelayanan yang disosialisasikan
Sasaran :
Meningkatnya Pengelolaan administrasi umum perkantoran
Indikator
Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti
Persentase Dokumen yang diarsip sesuai aturu
Sasaran :
Koordinasi perencanaan OPD
Indikator
Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun
Jumlah usulan sub kegiatan bidang yang diakomodir Renja OPD
Sasaran :
Dokumen Perencanaan OPD
Indikator
Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang disusun
Sasaran :
Dokumen Pengelolaan OPD tersedia
Indikator
Jumlah IKA yang disusun
Jumlah DPA yang disusun
Sasaran :
Dokuinformasi penyelenggaraan pemerintah di OPD tersedia
Indikator
Jumlah data yang dikelola
Jumlah dokumen perencanaan yang dipubish
Sasaran :
Monev Dokumen perencanaan OPD secara berkala
Indikator
Jumlah laporan hasil evaluasi renja
Jumlah laporan hasil reviuw Renstra
Sasaran :
Laporan Kinerja berbasis TIK (TEPRA) sebagai bahan evaluasi
Indikator
Ketepatan waktu pelaporan TEPRA
Jumlah Kegiatan yang terlaksana
Sasaran :
Laporan Kinerja berbasis TIK (TEPRA) sebagai bahan evaluasi
Indikator
#Ketepatan waktu pelaporan TEPRA
Jumlah Kegiatan yang terlaksana
Sasaran :
Dokumen pengelolaan pencairan anggaran tersedia lengkap
Indikator
Jumlah SPP yang terbit
Jumlah SPM yang terbit
Sasaran :
Dokumen pertanggungjawaban keuangan diverifikasi
Indikator
Jumlah SPJ yang diverifikasi
Jumlah laporan verifikasi
Sasaran :
Dokumen laporan keuangan tersedia
Indikator
Jumlah laporan keuangan yang disusun
Sasaran :
Monev disiplin pegawai diaksanakan berkala
Indikator
Jumlah pegawai
Sasaran :
Monev capaian sasaran kinerja pegawai (SKP) diaksanakan berkala
Indikator
Jumlah pegawai dengan nilai SKP ≥ 65
Jumlah pegawai yang menyusun SKP tepat waktu
Jumlah kegiatan monev yang dilakukan
Sasaran :
Pengembangan Kompetensi Pegawai
Indikator
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek
Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat
Jumlah rencana Kebutuhan pengembangan SDM yang terealisasi
Sasaran :
Pengadaan Aset
Indikator
Jumlah Aset yang dibeli
Sasaran :
Pemeliharaan Aset
Indikator
Jumlah Penghapusan aset
Jumlah aset yang disewa
Jumlah aset yang dikelola
Sasaran :
Pengembangan Kompetensi Pegawai
Indikator
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek
Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat
Jumlah rencana Kebutuhan pengembangan SDM yang terealisasi
Sasaran :
Pengembangan Kompetensi Pegawai
Indikator
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek
Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat
Jumlah rencana Kebutuhan pengembangan SDM yang terealisasi
Sasaran :
Pengembangan Kompetensi Pegawai
Indikator
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek
Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat
Jumlah rencana Kebutuhan pengembangan SDM yang terealisasi
Sasaran :
Pengelolaan Arsip
Indikator
Jumlah arsip statis yang dikelola
Jumlah arsip Dinamis yang dikelola
Sasaran :
Pengelolaan Surat Menyurat
Indikator
Jumlah Surat Masuk Yang dikelola
Jumlah Surat Keluar yang dikelola
Jumlah Disposisi yang ditindaklanjuti
Sasaran :
Pengelolaan urusan rumah tangga kantor
Indikator
Jumlah tagihan surat kabar
Jumlah tagihan listrik, air ,internet
Jumlah perabotan rumah tangga OPD yang dibeli
Sasaran :
Pengadaan Barang Pakai Habis
Indikator
Jumlah barang pakai habis yang dibeli
Jumlah barang pakai habis yang dikelola
DWI TANJUNG

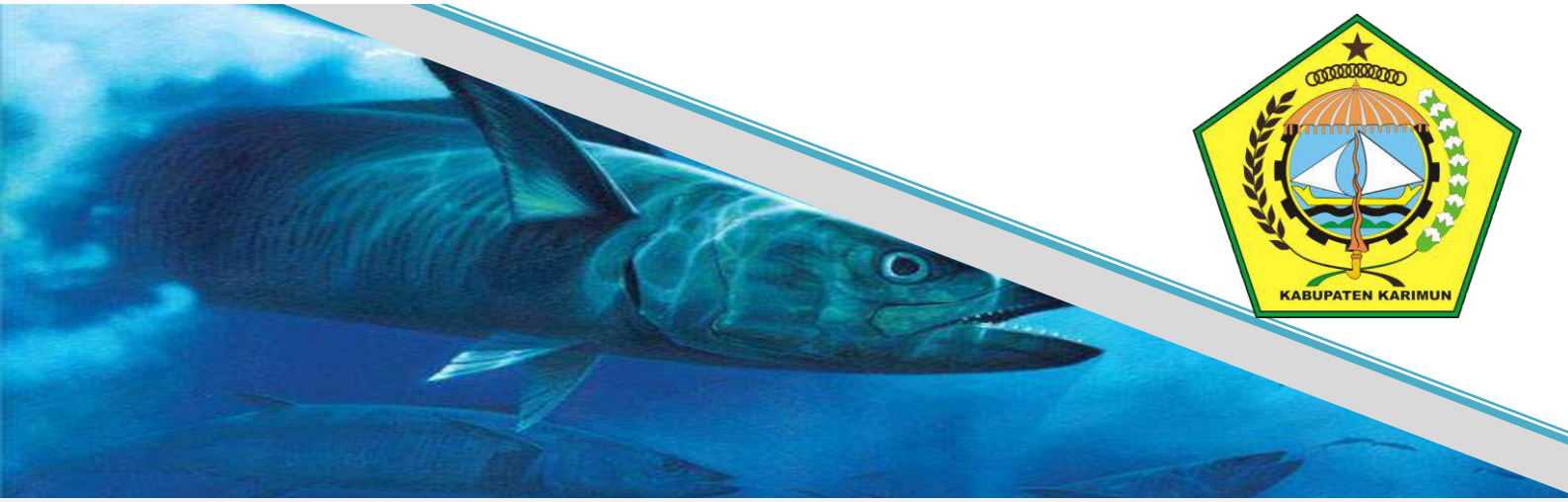

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2025

T.A. 2024

BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah (PD) melakukan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025;

b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan antar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klafisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);

20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 46);

21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);

22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 99 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 99);

23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 45);

24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
RENCANA KERJA (RENJA)

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :
   a. pendahuluan;
   b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
   c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
   d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
   e. penutup.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta harus berpedoman dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
(3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya.
(4) Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 8 Juli 2024

BUPATI KARIMUN,

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024 NOMOR 34

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini, merupakan panduan dan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perikanan dalam upaya meningkatnya produksi perikanan dan pendapatan nelayan perikanan untuk periode satu tahun kedepan.

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, sub. Kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja dan pendanaan untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Karimun. Renja ini mengacu pada Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif untuk menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Karimun dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025, dan untuk meninjau kembali hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian Renja tahun berjalan (2024).

Diharapkan semua bidang teknis di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Karimun dan *stakeholders* lainnya dengan adanya rencana kerja ini akan tercipta kesatuan gerak dan langkah dalam upaya meningkatnya produksi perikanan dan pendapatan nelayan perikanan terutama dalam pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menciptakan peningkatan kinerja organisasi.

Tanjung Balai Karimun, 8 Juli 2024
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Karimun

Ahmadi, S.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197405021998031007

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 26
2.2.1 Pengukuran Kinerja 27
2.2.2 Hasil Pengukuran Kinerja 28
2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 29
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun 31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 31
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 32
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 32
3.2 Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah 44
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 46
BAB 5 PENYUSUNAN RENJA 51
5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja 52
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 52
5.3 Rencana Tindak Lanjut 53
BAB 6 PENUTUP 54

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang menjadi dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 1 (satu) tahun. RENJA PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

RENJA PD pada Dinas Perikanan Kabupaten Karimun ini mengacu pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Karimun, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026. Selain itu, Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Karimun mengacu pada Tema Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2025 "*Meningkatnya perekonomian daerah yang berbasis sumberdaya dan kearifan lokal , Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif*".

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2025 menjabarkan rencana kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Karimun yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Karimun ini sebagai bahan acuan dalam pembangunan khususnya kebutuhan dan permasalahan selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan memperhatikan dimensi waktu, sumberdaya dan potensi yang dimiliki, isu–isu strategis yang berkembang di masyarakat, serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan untuk terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Karimun tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karimun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);

18. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);
19. Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 50);
20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENJA PD Dinas Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategis pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun kedepan beserta rencana kerja dan anggaran.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah :

a. Tersedianya gambaran yang jelas tentang program, kegiatan dan sub. kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025;
b. Tersedianya acuan dan arahan dalam pencapaian sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;

c. Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2025 disusun melalui sistematika sebagai berikut:

BAB 1 **Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB 2 **Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu,** berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB 3 **Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah,** berisi tentang Telahaan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB 4 **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah,** berisi tentang Program beserta indicator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB 5 **Penutup**

BAB 2
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2023, Dinas Perikanan Kabupaten Karimun melaksanakan 4 (empat) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan sebagaimana ditujukan pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel. 2.1

Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2023

NO	NAMA PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan
				2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

		2	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				2	Penyedianan Peralatan Rumah Tangga
				3	Penyedianan Bahan Cetak dan Penggadaan
				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Mebel
				2	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Secara keseluruhan hasil pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2023 dicapai dengan berbagai upaya dan strategi yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan dukungan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 25.690.481.857,- (Dua puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 22.803.600.816,- (Dua puluh dua milyar delapan ratus tiga juta enam ratus ribu delapan ratus enam belas rupiah), atau 88,76%. Uraian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2023

NO.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA			KINERJA KEUANGAN		
			INDIKATOR	TARGET	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	%
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**71,40**	**67**	**7.761.258.458**	**2.914.925.999**	**37,56**
	A.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**5 Dokumen**	**2 Dokumen**	**182.845.732**	**144.910.886**	**79,25**
	1.	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	98.031.947	75.441.000	76,96
	2.	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1 Laporan	84.813.785	69.469.886	81,91
	B.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**5.147.056.673**	**4.166.330.089**	**80,95**
	3.	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560 Orang Bulan	117 Orang Bulan	5.054.104.673	4.096.616.089	81,06
	4.	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	92.952.000	69.714.000	75,00
	C.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**8 Laporan**	**0 Laporan**	**44.822.000**	**44.661.748**	**99,64**
	5.	*Pengadaan Pakaian Dinas*	Jumlah Paket Pakaian	1 Paket	0 Paket	0	0	0

		Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas beserta Atribut Kelengkapan					
	6.	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	4 Orang	44.822.000	44.661.748	99,64
	D.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**473.718.713**	**331.439.598**	**69,97**
	7.	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	43.808.529	37.805.000	86,30
	8.	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1.608.354	1.596.000	99,23
	9.	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	14.380.830	7.681.500	53,41
	10.	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	21.600.000	17.950.000	83,10
	11.	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	392.321.000	266.407.098	67,91
	E.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**50.205.540**	**13.525.000**	**26,94**
	12.	*Pengadaan Mebel*	Jumlah Paket Pengadaan Mebel yang disediakan	1 Paket	1 Paket	14.392.500	13.525.000	93,97
	13.	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya*	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	10 Unit	0 Unit	35.813.040	0	0
	F.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1.275.509.000**	**1.200.597.559**	**94,13**
	14.	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	68.759.000	35.847.559	52,14

		Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan					
	15.	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.206.750.000	1.164.750.000	96,52
	G.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**587.100.800**	**333.490.700**	**56,80**
	16.	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	1 Unit	102.240.000	55.996.500	54,77
	17.	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	2 Unit	1 Unit	484.860.800	277.494.200	57,23
II.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)**	**37.370 Ton**	**38.524**	**16.089.295.697**	**14.230.148.326**	**88,44**
	H.	**Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan KUB dan Nelayan yang dibina**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**16.089.295.697**	**14.230.148.326**	**88,44**
	18.	*Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil*	Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat Kapasitasnya	4.409 Orang	831 Orang	15.997.617.912	14.219.673.326	88,89
	19.	*Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil*	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil Yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	302 Kelompok	31 Kelompok	91.677.785	10.475.000	11,43
III.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**499,89 Ton**	**677 Ton**	**1.710.799.964**	**1.606.295.252**	**93,89**

			(Ton)					
	I.	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah Pembudidaya yang dibina**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1.710.799.964**	**1.606.295.252**	**93,89**
	20.	*Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	154 Unit	162 Unit	1.710.799.964	1.606.295.252	93,89
IV.	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		**Jumlah produksi hasil olahan (Ton)**	**130 Ton**	**242,48 Ton**	**129.127.738**	**84.693.100**	**65,59**
	J.	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah Pengolahan Hasil Perikanan yang di bina**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**30.064.954**	**11.176.100**	**37,17**
	21.	*Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil*	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Resiko	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	30.064.954	11.176.100	37,17
	K.	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Poklahsar yang menerima bantuan pemerintah**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**99.062.784**	**73.517.000**	**74,21**
	22.	*Pemberian Fasilitas bagi Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	99.062.784	73.517.000	74,21
JUMLAH						**25.690.481.857**	**22.803.600.816**	**88,76**

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Dinas Perikanan Kabupaten Karimun

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program s.d. Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 9/6 *100
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik									
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD								
		3.25	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**						
		3.25.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**75,77**	**67**	**72,83**	**139,83**	**113,87**
		3.25.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**37 Dokumen**	**2 Dokumen**	**8 Dokumen**	**10 Dokumen**	**27,02**
		3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	27,27
		3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	15 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	36,36

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	0 Laporan	3 Laporan	0 Laporan	0,00
		3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**5 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**2 Laporan**	**40,00**
		3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.800 Orang/ bulan	117 Orang/ bulan	560 Orang/ bulan	677 Orang/ bulan	24,17
		3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	40,00
		3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0,00
		3.25.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**5 Laporan**	**0 Laporan**	**1 Laporan**	**0 Laporan**	**0,00**
		3.25.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00

				SKPD					
		3.25.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0,00
		3.25.01.2.05	**Admiistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**5 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**20,00**
		3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	0 Paket	1 Paket	0 Paket	0,00
		3.25.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		3.25.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	4 Orang	8 Orang	12 Orang	30,00
		3.25.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	0 Orang	4 Orang	0 Orang	0,00
		3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**5 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**2 Dokumen**	**40,00**
		3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang	5 Paket	0 Paket	1 Paket	0 Paket	0,00

				Disediakan					
		3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	2 Paket	40,00
		3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	0,00
		3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	0 Paket	1 Paket	0 Paket	0,00
		3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	2 Paket	40,00
		3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	40,00
		3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00
		3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	40,00
		3.25.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		3.25.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Jumlah Laporan**	**5 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**2 Laporan**	**40,00**

			Daerah						
		3.25.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00
		3.25.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90 Paket	1 Paket	1 Paket	2 Paket	2,22
		3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 Unit	0 Unit	10 Unit	10 Unit	12,50
		3.25.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00
		3.25.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0 Unit	2 Unit	0 Unit	0,00
		3.25.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00
		3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**5 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**2 Laporan**	**40,00**
		3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00
		3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang teisediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	40,00
		3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	40,00

				Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					
		3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**5 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**2 Laporan**	**40,00**
		3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	1 Unit	4 Unit	5 Unit	25,00
		3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	1 Unit	3 Unit	4 Unit	26,66
		3.25.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	0 Unit	5 Unit	0 Unit	0,00
		3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 Unit	0 Unit	5 Unit	0 Unit	0,00
		3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	9 Unit	0 Unit	2 Unit	0 Unit	0,00
Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan									
	Meningkatnya Produksi Perikanan dan Pendapatan Nelayan								

	Perikanan								
		3.25.03	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)**	**54.200 Ton**	**38.524 Ton**	**53.472,49 Ton**	**91.996,49 Ton**	**169,73**
		3.25.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sarana Prasarana Penangkapan Ikan yang tersedia**	**251 Unit**	**0 Unit**	**45 Unit**	**0 Unit**	**0,00**
		3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang tersedia	125 Unit	0 Unit	25 Unit	0 Unit	0,00
		3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	126 Unit	0 Unit	20 Unit	0 Unit	0,00
		3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan KUB dan Nelayan yang dibina**	**5 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**2 Dokumen**	**40,00**
		3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat Kapasitasnya	5.483 Orang	831 Orang	4.727 Orang	5.558 Orang	101,36
		3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayang Kecil Yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	338 Kelompok	31 Kelompok	314 Kelompok	345 Kelompok	102,07
		3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	30 Unit Usaha	0 Unit Usaha	12 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00

		3.25.03.2.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Jumlah Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI**	**2 Dokumen**	**0 Dokumen**	**0 Dokumen**	**0 Dokumen**	**0,00**
		3.25.03.2.03.01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	4 Layanan	0 Layanan	0 Layanan	0 Layanan	0,00
		3.25.04	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)**	**606,66 Ton**	**677,00 Ton**	**529,88 Ton**	**1206,88 Ton**	**198,93**
		3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah Pokdakan yang dibina**	**92 Kelompok**	**0 Kelompok**	**82 Kelompok**	**0 Kelompok**	**0,00**
		3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompak Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	360 Kelompok	0 Kelompok	275 Kelompok	0 Kelompok	0,00
		3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompak Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	49 Kelompok	0 Kelompok	33 Kelompok	0 Kelompok	0,00
		3.25.04.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan	20 Kelompok	0 Kelompok	4 Kelompok	0 Kelompok	0,00

				Pembiayaan, Kemitraan Usahanya					
		3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	49 Kelompok	0 Kelompok	33 Kelompok	0 Kelompok	0,00
		3.25.04.2.03	**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah TPUPI yang diterbitkan**	**92 Rekomendasi**	**0 Rekomendasi**	**82 Rekomendasi**	**0 Rekomendasi**	**0,00**
		3.25.04.2.03.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Rekomendasi	0 Rekomendasi	82 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0,00
		3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah Pembudidaya yang dibina**	**1.027 Kelompok**	**1 Kelompok**	**1 Kelompok**	**2 Kelompok**	**0,19**
		3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	169 Unit	0 Unit	109 Unit	0 Unit	0,00
		3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	191 Unit	162 Unit	166 Unit	328 Unit	171,72
		3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00

			Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan					
		3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	90 Orang	0 Orang	70 Orang	0 Orang	0,00
		3.25.04.2.04.06	Perencanaan Pengembangan Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	62,89 Hektar	0 Hektar	61,89 Hektar	0 Hektar	0,00
		3.25.06	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Jumlah produksi hasil olahan (Ton)**	**148 Ton**	**242 Ton**	**137 Ton**	**379 Ton**	**256,08**
		3.25.06.2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah Tanda Daftar yang diterbitkan**	**72 Buah**	**0 Buah**	**12 Buah**	**0 Buah**	**0,00**
		3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00
		3.25.06.2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha**	**Jumlah Pengolah Hasil Perikanan Yang Dibina**	**158 Orang**	**1 Orang**	**144 Orang**	**145 Orang**	**91,77**

			Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						
		3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	160 Unit Usaha	60 Unit Usaha	40 Unit Usaha	100 Unit Usaha	62,50
		3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Poklahsar yang menerima bantuan pemerintah**	**10 Kelompok**	**1 Kelompok**	**2 Kelompok**	**3 Kelompok**	**30,00**
		3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	38,6 Ton	0 Ton	31,9 Ton	31,9 Ton	82,64
		3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	40 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	16 Pelaku Usaha	40,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Perikanan Kabupaten Karimun dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang, 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Karimun mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
2. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

Sedangkan uraian tugas pada tugas pokok Dinas Perikanan Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah, pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang Perikanan;
2. Melaksanakan teknis operasional, pembinaan dan pengembangan di bidang Perikanan;
3. Melaksanakan pengelolaan UPTD;
4. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;
5. Melaksanakan kegiatan lain di bidang Perikanan yang ditugaskan oleh Bupati.

Tahun 2023, Dinas Perikanan melaksanakan 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Karimun s.d. Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun Ke-					Capaian Kinerja		Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Pertumbuhan Produksi Perikanan	0	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0%	0,44%	
	Nilai Tukar Nelayan	110,22	110,66	111,21	111,88	112,78	110,66	110,66	
	Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	104,62	105,25	106,09	107,15	108,22	105,25	105,50	
2.	Nilai AKIP	63,00	63,20	63,50	65,00	65,50	63,20	53,04	
	Level Kematangan	0	0	3	3	3,073	0	0	

2.2.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Karimun dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian target Tahun 2023 dengan capaian hingga Tahun 2022. Dimana semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2023 :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan dan Pendapatan Nelayan Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan	0,5%
		Nilai Tukar Nelayan	110,66
		Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	105,25
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	63,20

2.2.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan dan Pendapatan Nelayan Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan	0,5%	0,44%	88%
		Nilai Tukar Nelayan	110,66	110,66	100%
		Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	105,25	105,50	100,23%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	63,20	53.04	83,92%

Pencapaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2023 diukur melalui 2 (dua) Sasaran dan 4 (empat) Indikator Kinerja. Berdasarkan tabel diatas Rata-rata Capaian Sasaran Strategis Dinas Perikanan adalah 93,04%. Capaian indikator kinerja pada setiap sasaran sudah sangat baik namun terdapat 2 (dua) indikator yang targetnya tidak tercapai. Dinas Perikanan akan terus melakukan perbaikan kinerjanya dan melaksanakan evaluasi atas setiap capaian sasaran strategisnya sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan.

Capaian kinerja Tahun 2023 ini menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan perencanaan Dinas Perikanan Tahun 2025. Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Dinas Perikanan Kabupaten Karimun

merencanakan program dan kegiatan Tahun 2025 yang lebih difokuskan pada :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan perikanan tangkap, Budidaya dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kawasan perikanan;
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya pelaku usaha perikanan;
4. Mendukung Pemerintah daerah dalam program penghapusan kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting dengan bantuan sarana dan prasarana bagi nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolahan pemasaran hasil perikanan;

2.3. Isu – Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Karimun merupakan hal yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Renstra dan RPJMD Kabupaten Karimun. Dalam penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Karimun, perlu dilakukan analisa terhadap kondisi objektif Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah dan masyarakat) di masa datang, suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan kecil dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, identifikasi isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan menjadi langkah penting guna memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan nyata di

lapangan. Isu-isu tersebut mencakup tantangan dalam peningkatan produktivitas dan daya saing sektor perikanan, keterbatasan infrastruktur pendukung usaha nelayan kecil, rendahnya akses terhadap teknologi dan pasar, serta isu lingkungan seperti penangkapan ikan berlebih dan pencemaran laut. Selain itu, perubahan regulasi, dinamika sosial ekonomi, serta dampak perubahan iklim juga menjadi faktor yang harus diantisipasi secara terarah. Penanganan isu-isu ini akan menjadi landasan dalam merumuskan strategi, kebijakan, dan program yang tepat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Karimun dapat diidentifikasi melalui isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap dan budidaya, seperti pelabuhan perikanan, cold storage, dan fasilitas distribusi hasil tangkapan.
2. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia nelayan dan pembudidaya ikan, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun penguasaan teknologi tepat guna.
3. Kurangnya akses nelayan kecil terhadap permodalan dan pemasaran, yang menyebabkan margin keuntungan rendah dan ketergantungan pada tengkulak (penampung).
4. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan, ditandai dengan praktik penangkapan yang merusak (destructive fishing) dan degradasi lingkungan pesisir.
5. Minimnya data dan informasi perikanan yang akurat dan terkini, yang berdampak pada lemahnya perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis bukti.

6. Ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan daerah, dalam pengelolaan perairan laut, terutama pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalihkan sebagian kewenangan kelautan ke provinsi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diperoleh melalui musyawarah pembangunan daerah Kabupaten Karimun yang dihadiri oleh kelompok masyarakat, kepala desa, organisasi masyarakat, LSM dan pembahasan di Forum OPD. Pada Renja Dinas Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2024 tidak terdapat usulan program/kegiatan dari masyarakat.

BAB 3
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Salah satu Kebijakan yang berkaitan dengan misi nasional yang terkait dengan pembangunan perikanan adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan berbasis Kepentingan Nasional. Mandiri dimaksudkan untuk dapat menjadi andalan, berkemampuan dan kekuatan dalam mengelola sumber daya perikanan. Maju dimaksudkan untuk dapat mengelola sumber daya perikanan yang memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki ilmu pengetahuan serta teknologi yang inovatif, bernilai tambah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumber daya perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari.

Dalam enam tahun ke depan, arah kebijakan pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada penguatan sektor-sektor strategis yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Adapun prioritas arah kebijakan tersebut meliputi:

1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan, upaya ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan pendapatan petani dan peternak, serta mendorong pengembangan pertanian berbasis kawasan.

2. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Sektor Perikanan dan Kelautan**,** arah kebijakan ini mencakup optimalisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan, pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan, serta peningkatan nilai tambah produk hasil laut melalui industrialisasi dan pengolahan hasil perikanan.
3. Pengembangan Industri Manufaktur Unggulan Berorientasi Ekspor**,** Provinsi akan mendorong investasi pada sektor-sektor industri strategis yang memiliki daya saing tinggi di pasar global, serta membangun ekosistem industri yang terintegrasi dengan kawasan perdagangan bebas.
4. Pembangunan Akses Jalan Kawasan Industri ke Pusat Logistik dan Kegiatan Ekonomi, Arah ini mencakup pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang menghubungkan kawasan industri dengan pelabuhan, pusat distribusi logistik, dan pusat kegiatan ekonomi lainnya untuk mempercepat arus barang dan mobilitas.
5. Penyediaan Sarana dan Prasarana di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Fokus kebijakan diarahkan pada percepatan penyediaan infrastruktur dan regulasi pendukung untuk memaksimalkan potensi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Bebas, Pemerintah provinsi akan mengarahkan pengembangan sektor pariwisata melalui pemanfaatan fasilitas pelabuhan bebas sebagai simpul utama pergerakan wisatawan, termasuk pengembangan destinasi unggulan dan penguatan promosi pariwisata.

Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Kriteria penentuan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

1. Merupakan permasalahan utama yang sering dikemukakan dan menjadi prioritas bagi mayoritas pemangku kepentingan utama pembangunan di Kabupaten Karimun RPJMD Kabupaten Karimun 2021-2026 IV-22;
2. Merupakan permasalahan atau isu utama yang jika ditangani atau dipecahkan secara simultan hasilnya saling mempengaruhi untuk menyelesaikan permasalahan Kabupaten Karimun lainnya;
3. Merupakan permasalahan yang memiliki dampak luas pada pencapaian target-target pembangunan Kabupaten Karimun di berbagai bidang;
4. Merupakan pernyataan isu utama yang memiliki pengaruh besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan utama di Kabupaten Karimun;

5. Merupakan faktor utama yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap pencapaian bidang pembangunan lainnya di Kabupaten Karimun; dan
6. Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Pemerintah Kabupaten Karimun yang mana permasalahan utama memang memerlukan intervensi kewenangan, kebijakan dan implementasi.

Ada bebarapa isu strategis yang diperkirakan akan menjadi perhatian penting pada tahun 2021-2026 berdasarkan permasalahan pembangunan dan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah, yaitu :

1. Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dan Peningkatan Pelayanan Dasar (Terdepan yang berkeadilan dalam pembangunan sumberdaya manusia) Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia belum optimal hal ini dapat dilihat dari:

    a) Pendidikan yang belum optimal. Beberapa permasalahan di Kabupaten Karimun di bidang pendidikan adalah rata rata lama sekolah masih perlu ditingkatkan, angka putus sekolah yang masih cukup tinggi, angka melanjutkan yang masih kurang. Pendidikan vokasi yang belum terlaksana dalam rangka meningkatkan ketrampilan bagi anak sekolah. Pendidikan dasar sudah merata disemua wilayah, namun demikian kualitas pendidikan masih belum merata, kesenjangan masih terasa antara penduduk yang berada di perkotaan dengan pendudk yang berada di pulau pulau, kualitas guru masih menjadi permasalahan. RPJMD Kabupaten Karimun 2021-2026 IV - 23

    b) Derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal. Masih ditemukannya angka kematian pada ibu melahirkan, bayi dan

balita. Angka kesakitan masih cukup tinggi baik penyakit menular (DBD, TBC, HIV AIDS, Kusta, Filariasi) maupun penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Mellitus, Kanker, Jantung, gagal ginjal). Kondisi ini dikarenakan perilaku masyarakat yang kurang sehat, lingkungan yang tidak sehat dan pelayanan masih belum optimal. Pendekatan Keluarga Sehat merupakan salah satu solusi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat.

c) Tenaga Kerja yang belum mampu menjawab kebutuhan pasar. Kabupaten Karimun telah mengalami bonus demografi, dimana penduduk usia produktif memiliki jumlah yang lebih besar 2 kali lipat dibandingkan usia tidak produktif. Kondisi ini dapat menjadi potensi dan ancaman. Kualitas penduduk usia produktif yang baik akan meningkatkan kesejahteraan, namun apabila usia produktif tidak berkualitas banyak pengangguran maka ini akan menambah beban bagi Pemerintah Daerah. Pengangguran di Kabupaten Karimun masih tinggi, urusan tenaga kerja memiliki tugas untuk meningkatkan ketrampilan calon tenaga kerja sesuai dengan Kebutuhan pasar. Kabupaten Karimun, memiliki potensi kedepan untuk menjadikan calon tenaga kerja terserap dalam industri yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri Perdagangan Bebas.

d) Kualitas Pelayanan Dasar belum optimal. Masyarakat belum mendapat pelayanan dasar secara maksimal dalam bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, air minum, pengelolaan limbah, penyediaan rumah layak huni. Pelayanan

dasar lain adalah pada ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta sosial.

e) Kualitas Perempuan, anak dan pemuda yang masih belum optimal. Kesetaraan dan keadilan gender adalah isu dalam pembangunan kualitas perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih belum optimal, masih terjadi kesenjangan pada laki-laki dan perempuan pada pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kekerasan pada perempuan dan anak, sehingga peran pemuda dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Pemuda harus memiliki prestasi RPJMD Kabupaten Karimun 2021-2026 IV - 24 termasuk prestasi olahraga.

f) Pemajuan Budaya dan peningkatan Minat Baca. Menjadi SDM yang maju dan unggul harus memiliki karakter budaya dan pengetahuan yang baik. Minat baca menjadi alat ukur terkait dengan peningkatan kualitas SDM.

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Belum Optimal dan merata dalam Era Industri 4.0 (Terdepan dan Berkeadilan dalam Pengembangan Ekomomi Kerakyatan) Peningkatan pertumbuhan ekonomi menurut kajian teknokratik RPJMN, Kabupaten/Kota ditargetkan pada tahun 2025 adalah 6%, namun Peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas 6% dapat terwujud jika sektor yang akan ditingkatkan melalui bidang usaha industri pengolahan, pertanian kehutanan dan perikanan. Dijadikannya Kabupaten Karimun sebagai Kawasan Strategis Nasional (Batam, Bintan dan Karimun) Khusus merupakan peluang kabupaten Karimun untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas 6%, selain itu juga

didukung kondisi ekonomi negara Singapura dan Malaysia.

a. Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah, Industri pengolahan. Masih belum optimalnya perkembangan usaha mikro menjadi kecil tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Masih banyak wirausaha skala mikro kekurangan modal, ketrampilan belum optimal dan pemasaran yang belum dilakukan. Koperasi belum mampu memberikan akses permodalan pada wirasusaha mikro. Masih ada koperasi yang tidak aktif dan koperasi tidak sehat yang akan menjadi target pembangunan kedepan. Sentrasentra industri yang dibentuk harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Karimun dan Kabupaten Kota sekitar. Belum optimalnya pengembangan industri kecil dan sentra industri menjadi permasalahan tersendiri di Kabupaten Karimun.

b. Penamanan Modal. Belum optimalnya nilai investasi dan jumlah investasi yang ada di Kabupaten Karimun menjadi tantangan dalam pembangunan kedepan. Mempermudah RPJMD Kabupaten Karimun 2021-2026 IV - 25 perijianan untuk investor adalah langkah kedepan dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

c. Pertanian Perkebunan dan Perikanan. Masih luasnya lahan perkebunan dan pertanian menjadi tantangan bagi Kabupaten Karimun untuk meningkatkan produksinya. Peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan dan perikanan melalui peningkatan kualitas benih akan menjadi prioritas, pemanfaatan

teknologi, dan penciptaan inovasi bidang pertanian perkebunan dan perikanan.

d. Perdagangan, perhotelan, pariwisata. Potensi ekspor di Kabupaten Karimun masih belum optimal dalam pengembangannya, hal ini dapat dilihat dari nilai ekspor. Potensi lain yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah jasa perhotelan dan pariwisata. Pengembangan destinasi wisata merupakan pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan termasuk pengembangan ekonomi kreatif.

3. Konektifitas antar wilayah yang belum optimal dikarenakan kualitas Infrastruktur yang belum optimal, layanan perhubungan Antar Wilayah, Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Lingkungan yang belum optimal (Terdepan yang berkeadilan Pemerataan Bidang Infrastruktur) "Konektivitas" dimaksudkan sebagai segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memperlancar arus pergerakan orang dan distribusi barang, jasa dan informasi. Untuk itu, sarana dan prasarana yang utama dikembangkan adalah pada sektor perhubungan, transportasi, dan komunikasi. Konektivitas yang kuat adalah konektivitas tanpa kendala yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian wilayah. "Antar wilayah" yang dimaksudkan adalah mempercepat konektivitas antar pulau dalam satu kabupaten, antar wilayah dalam satu pulau, antar kabupaten dan antar negara. Khusus untuk konektivitas antar negara, yang diperkuat adalah Kabupaten Karimun sebagai pintu gerbang internasional. "Pemerataan pembangunan" yang dimaksudkan adalah penyediaan sarana dan prasarana pelayanan

publik dan bernilai ekonomi yang tersedia secara merata RPJMD Kabupaten Karimun 2021-2026 IV - 26 antar pulau dan antar wilayah dalam satu pulau sesuai dengan kebutuhannya.

Dengan pemerataan itu, maka dapat menghilangkan kesenjangan pemberian pelayanan publik karena faktor letak geografis. Selain itu, “pemerataan pembangunan” juga dimaksud untuk memperkuat Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di luar Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Tanjung Balai Karimun sehingga pertumbuhan dapat lebih tersebar dan merata. “Kualitas lingkungan” yang baik akan terlihat dari indeks kualitas lingkungan hidup. Pada kajian teknokratik indeks kualitas lingkungan hidup kab/kota minimal adalah 75, untuk mencapai disana pencemaran air dan udara menjadi unsur penting. Apa lagi Kabupaten Karimun telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, harus mampu menekan pencemaran udara akibat industri, pencemaran limbah industri. Pengelolaan sampah juga menjadi perhatian Kabupaten Karimun karena kesadaran masyarakat dalam mengolah dan mengelola sampah masih kurang.

4. Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi, Smartcity, dan Inovasi Daerah (Terdepan yang berkeadilan dalam Pelayanan Publik). Reformasi birokrasi masih menjadi isu nasional. Beberapa hal yang menjadi penyebab belum terlaksananya reformasi birokrasi secara optimal adalah Indeks Profesional Pegawai belum mencapai standar yang ditentukan, kompetensi ASN masih perlu ditingkatkan, Indeks Kematangan informasi masih belum dilaksanakan. Pengelolaan keuangan sudah mencapai WTP namun secara kualitas masih perlu

mendapat perhatian. Maturitas SPIP dan akuntabilitas APIL telah mencapai level 3 untuk itu juga perlu dilakukan peningkatan untuk mengurangi tingkat kesalahan dan korupsi di Kabupaten. Selain itu indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga belum maksimal. Pelayanan publik yang belum optimal juga menjadi terhambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Akuntabilitas dan trasparansi pelayanan publik masih menjadi pekerjaan rumah dalam mencapai reformasi birokrasi. Pelimpahan kewenangan Perangkat Daerah di Kecamatan bagian dari meningkat pelayanan publik yang lebih cepat. Belum semua Perangkat Daerah memberikan pelimpahan kewenangan di Kecamatan. RPJMD Kabupaten Karimun 2021-2026 IV - 27

5. Penanggulangan Kemiskinan. Kemiskinan masih menjadi permasalahan di Kabupaten Karimun, apalagi dampak melemahnya ekonomi global dan pandemi virus covid-19, berdampak pada lemahnya daya beli masyarakat, dan pemutusan hubungan kerja terjadi disektor industri. Penanggulangan kemiskinan ini harus diselesaikan oleh banyak Perangkat Daerah, sehingga dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan perlu menjadi pegangan bagi Perangkat Daerah dalam penanganan kemiskinan. Peran masyarakat dan CSR juga belum optimal dalam membantu penanggulangan kemiskinan.

6. Pemulihan sektor pembangunan yang berdampak covid-19. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Karimun masih cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material tidak sedikit, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan

rakyat, penundaan beberapa proyek fisik yang seharusnya dimulai di Triwulan II 2020 karena mewabahnya COVID-19. Sepanjang Triwulan II 2020 terjadi pembatasan aktivitas seperti: penerapan sistem kerja dan sekolah dari rumah, penutupan sementara hotel,tempat wisata dan hiburan, serta usaha jasa lainnya, pembatasan/pengurangan frekuensi penerbangan dan kapal ferry penyeberangan, dan penyesuaian jumlah tenaga kerja di berbagai jenis kegiatan usaha, terutama industri. Hal tersebut juga menyebabkan terjadi penurunan konsumsi rumah tangga sebagai akibat dari berkurangnya sumber pendapatan karena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkannya pegawai. Penurunan daya beli ini dikonfirmasi dengan hasil survei khusus konsumsi rumah tangga yang menunjukkan penurunan.

Tujuan dan sasaran Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perikanan dirancang secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan tujuan dan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya yang disejalankan dengan RPJMN, RPJMD, dan RENSTRA serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Karimun. Tujuan dan sasaran merupakan penjelasan dari program prioritas serta target indikator kinerja dari RPJMD Kabupaten Karimun dan RENSTRA Dinas Perikanan 2021–2026 yang merupakan tanggung jawab Dinas Perikanan.

Melalui perumusan tujuan dan sasaran akan diperoleh pedoman dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang terkandung di dalam RPJMD Kabupaten Karimun dan RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Karimun 2021–2026. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan

Perikanan mengacu pada arah kebijakan dan strategi yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan harus dijabarkan secara detail sehingga akan diperoleh rumusan program dan kegiatan yang terukur, spesifik, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Relevasi antara visi, misi, tujuan dan sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level sasaran beserta target yang ingin dicapai dalam Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2024 dapat digambarkan melalui uraian tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Dinas Perikanan
Kabupaten Karimun Tahun 2025

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2025
1	2	3	4	5	
1	**Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri berbasis sumber daya dan kearifan lokal**	**Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan**	**1. Meningkatnya Produksi Perikanan dan Pendapatan Nelayan Perikanan**	**1. Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**	
				1. Pertumbuhan Produksi Perikanan	0,5 %
				2. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	111,88
				3. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	107,15
			2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	1. Nilai AKIP 2. Level Kematangan MR	65 3

Dari gambaran tabel diatas, terlihat secara detail keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran RENJA Dinas Perikanan Tahun 2025.

3.2. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Bedasarkan RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Karimun mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp. 19.188.550.015,- Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada rencana kerja tahun 2025 akan dilakukan intervensi melalui program dan kegiatan meliputi :

SASARAN STRATEGIS 1 :

"*Meningkatnya Produksi Perikanan dan Pendapatan Nelayan Perikanan*"

Sasaran : Pertumbuhan Produksi Perikanan, Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan.

Pagu Indikatif : Rp. 19.188.550.015,-

Indikasi kegiatan :

1) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pembudidaya Ikan, Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap yang optimal.

Pagu Indikatif : Rp. 6.670.913.015,-

Indikasi kegiatan :

1) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Sasaran : Meningkatnya Produksi Pembudidayaan Ikan yang optimal.

Pagu Indikatif : Rp. 3.300.000.000,-

Indikasi kegiatan :

1) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Sasaran : Meningkatnya Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Optimal.

Pagu Indikatif : Rp. 470.000.000,-

Indikasi kegiatan :

1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

SASARAN STRATEGIS 2 :

"Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan"

Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja Dinas Perikanan yang optimal.

Pagu Indikatif : Rp. 8.747.637.000,-

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikasi kegiatan :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB 4
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Perikanan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perikanan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja

program sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Karimun namun juga melalui sumber pendanaan lainnya APBD Provinsi Kepulauan Riau dan APBN.

Uraian rumusan program dan kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Karimun untuk tahun perencanaan 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

DINAS PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan		Rencana Tahun 2025						Rencana Tahun 2026		
						Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolak Ukur	Target	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**											
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**18,185,000,000**				**18,205,000,000**
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**8,576,500,000**				**8,662,866,000**
3	**25**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**180,000,000**				**285,000,000**
3	25	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Kab.Karimun, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,28 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	PAD	Jumlah dokumen	1 Dokumen	145,000,000
3	25	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Kab.Karimun, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,28 Nilai	1 Laporan	1 Dokumen	80,000,000	PAD	Jumlah dokumen	1 Dokumen	140,000,000
3	**25**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5,421,000,000**				**5,420,000,000**
3	25	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan	Kab.Karimun, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,28 Nilai	560 orang bulan (40 orang x 14 bulan)	1 Laporan	5,220,000,000	DAU	Jumlah Laporan	1 Laporan	5,220,000,000
3	25	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan	Kab.Karimun, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,28 Nilai	1 Dokumen	1 Laporan	201,000,000	DAU	Jumlah Laporan	1 Laporan	200,000,000
3	**25**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**216,000,000**				**232,000,000**
3	25	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Laporan	Kab.Karimun, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,28 Nilai	1 Paket	1 Laporan	121,000,000	PAD	Jumlah Laporan	1 Laporan	120,000,000
3	25	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Laporan	Kab.Karimun, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,28 Nilai	8 Pegawai	1 Laporan	95,000,000	PAD	Jumlah Laporan	1 Laporan	112,000,000
3	**25**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**650,500,000**				**550,000,000**
3	25	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan	Kab.Karimun, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,28 Nilai	1 Paket	1 Laporan	150,000,000	PAD	Jumlah Laporan	1 Laporan	100,000,000
3	25	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Laporan	Kab.Karimun, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,28 Nilai	1 Paket	1 Laporan	75,000,000	PAD	Jumlah Laporan	1 Laporan	50,000,000
3	25	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan	Kab.Karimun, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,28 Nilai	1 Paket	1 Laporan	100,000,000	PAD	Jumlah Laporan	1 Laporan	100,000,000
3	25	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jumlah Laporan	Kab.Karimun, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,28 Nilai	1 Dokumen	1 Laporan	75,500,000	PAD	Jumlah Laporan	1 Laporan	50,000,000
3	25	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Kab.Karimun, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,28 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	250,000,000	PAD	Jumlah Laporan	1 Laporan	250,000,000

3	**25**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**			74,28 Nilai			**478,000,000**				**425,000,000**
3	25	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan	Kab.Karimun, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,28 Nilai	4 Kendaraan	1 Laporan	78,000,000	PAD	Jumlah Laporan	1 Laporan	75,000,000
3	25	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan	Kab.Karimun, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,28 Nilai	4 Kendaraan	1 Laporan	200,000,000	PAD	Jumlah Laporan	1 Laporan	200,000,000
3	25	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan	Kab.Karimun, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,28 Nilai	2 Gedung	1 Laporan	200,000,000	PAD	Jumlah Laporan	1 Laporan	150,000,000
3	**25**	**03**			**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**							**6,858,500,000**				**5,960,634,000**
3	**25**	**03**	**2,02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**6,858,500,000**				**5,960,634,000**
3	25	03	2,02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat Kapasitasnya	Cakupan KUB dan Nelayan yang dibina	Kab.Karimun, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.121 Ton	5077 Orang	1 Dokumen	6,683,500,000	PAD	Cakupan KUB dan Nelayan yang dibina	1 Dokumen	5,760,634,000
3	25	03	2,02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayang Kecil Yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Cakupan KUB dan Nelayan yang dibina	Kab.Karimun, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.121 Ton	326 Kelompok	1 Dokumen	100,000,000	PAD	Cakupan KUB dan Nelayan yang dibina	1 Dokumen	100,000,000
3	25	03	2,02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Cakupan KUB dan Nelayan yang dibina	Kab.Karimun, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.121 Ton	24 Unit Usaha	1 Dokumen	75,000,000	PAD	Cakupan KUB dan Nelayan yang dibina	1 Dokumen	100,000,000
3	**25**	**04**			**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**							**2,150,000,000**				**2,931,500,000**
3	**25**	**04**	**2,04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**							**2,150,000,000**				**2,931,500,000**
3	25	04	2,04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudidaya yang dibina	Kab.Karimun, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	566.97 Ton	178 Unit	1 Dokumen	2,000,000,000	PAD/DAK	Jumlah Pembudidaya yang dibina	1 Dokumen	2,691,500,000
3	25	04	2,04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Pembudidaya yang dibina	Kab.Karimun, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	566.97 Ton	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	PAD/DAK	Jumlah Pembudidaya yang dibina	1 Dokumen	140,000,000
3	25	03	2,04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang dibina	Kab.Karimun, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	566.97 Ton	80 Orang	1 Dokumen	50,000,000	PAD/DAK	Jumlah Pembudidaya yang dibina	1 Dokumen	100,000,000

3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**							**600,000,000**				**650,000,000**
3	**25**	**06**	**2,01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**							**300,000,000**				**300,000,000**
3	25	06	2,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Tanda Daftar yang diterbitkan	Kab.Karimun, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	141 Ton	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	PAD	Jumlah Tanda Daftar yang diterbitkan	1 Dokumen	300,000,000
3	**25**	**06**	**2,03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**							**300,000,000**				**350,000,000**
3	25	06	2,03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Poklahsar yang menerima bantuan pemerintah	Kab.Karimun, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	141 Ton	35.09 Ton	1 Dokumen	150,000,000	PAD	Jumlah Poklahsar yang menerima bantuan pemerintah	1 Dokumen	200,000,000
3	25	06	2,03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	Jumlah Poklahsar yang menerima bantuan pemerintah	Kab.Karimun, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	141 Ton	4 Pelaku Usaha	1 Dokumen	150,000,000	PAD	Jumlah Poklahsar yang menerima bantuan pemerintah	1 Dokumen	150,000,000
TOTAL PAGU ANGGARAN												**18,185,000,000**				**18,205,000,000**

BAB 5
PENYUSUNAN RENJA

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2025 ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renja Dinas Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perikanan Kabupaten Karimun perlu keterpaduan dan sinkronisasi baik dalam kegiatan maupun antar instansi terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antar pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagai berikut:

3.1.01 Penyusunan dokumen Renja Tahun 2025 ini disusun berdasarkan kaidah-kaidah sistematika penulisan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian

dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

3.1.02 Penyusunan Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada dokumen Renja Tahun 2025 ini disusun berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikai, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.03 Renja Dinas Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Karimun dan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Karimun.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Menjadikan Renja sebagai pedoman pelaksanaan kerja bagi Dinas Perikanan Kabupaten Karimun pada tahun anggaran 2025.
2. Menjadikan acuan bagi Bidang dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025 dalam rangka meningkatnya produksi perikanan dan pendapatan nelayan perikanan.
3. Menyusun Program kegiatan dan anggaran dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2025.

4. Menyusun jadwal pelaksanaan, memperkirakan penggunaan anggaran tiap triwulan serta penggunaan sarana, prasarana dan tenaga yang akan melaksanakan rencana kerja.
5. Mempersiapkan format-format laporan pelaksanaan yang didasarkan pada target pencapaian Renstra dan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
6. Menyusun rencana monitoring dan evaluasi.
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam meningkatnya produksi perikanan dan pendapatan nelayan perikanan.
8. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam penanganan bantuan hibah.

BAB 6
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini adalah usulan Rencana Kinerja dalam rangka Fasilitasi Pembangunan Perikanan Karimun pada Tahun 2024 dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Karimun 2021-2026, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Karimun serta Target dan Sasaran Pembangunan Perikanan Nasional yang ditetapkan melaui OPD Dinas Perikanan Kabupaten Karimun. Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Karimun merupakan dokumen perencanaan kinerja pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan Perikanan yang bersumber anggaran dari APBD II, APBD I, dan APBN Tahun Anggaran 2025

Dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) telah diselaraskan dengan Kegiatan Musrenbang dari tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi, koordinasi sinkronisasi perencanaan dengan Dinas Perikanan provinsi Kepulauan Riau, rancangan awal RKPD, usulan program dan kegiatan melalui Reses DPRD Kabupaten Karimun *(Jaring Aspirasi Masyarakat)* dan beberapa usulan dari masyarakat melalui proposal serta usulan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menjadi bahan penyusunan dalam penetapan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dan pagu indikasi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan Perikanan di Kabupaten Karimun.

Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang diinginkan akan tercapai demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Dengan adanya Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan Perikanan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Tanjung Balai Karimun, 8 Juli 2024
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Karimun

Ahmadi, S.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197405021998031007

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

No	Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Target Kinerja dan Pendanaan				
					2024		2025		
					Target	Satuan	Target	Satuan	Rp
1	2	3	5	6		12		14	15
1	**Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan**			**Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**	2.628,82		2.780,95		
		1 Meningkatnya Produksi Perikanan dan Pendapatan Nelayan Perikanan		**Nilai Tukar Nelayan (NTN)** **Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)**	**111,21** **106,09**		**111,88** **107,15**		
			URUSAN PEMERINTAH PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						**18.185.000.000**
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)**	**53.472**		**53.900**		**6.079.436.000**
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Sarana Prasarana Penangkapan Ikan yang tersedia**	**181**	**Unit**	**216**	**Unit**	**900.000.000**
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang tersedia	85	Unit	105	Unit	500.000.000
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang tersedia	96	Unit	111	Unit	400.000.000
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan KUB dan Nelayan yang dibina**	**1 Dok**	**1 Dok**	**1 Dok**	**1 Dok**	**4.979.436.000**
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat Kapasitasnya	4.727	Orang	5.077	Orang	4.804.436.000
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayang Kecil Yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	314	Kelompok	326	Kelompok	100.000.000
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	18	Unit Usaha	24	Unit Usaha	75.000.000

			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	**Jumlah Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI**	**-**	**-**	**1**	**Dokumen**	**200.000.000**
			Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-	2	Dokumen	100.000.000
			Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-	2	Layanan	100.000.000
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)**	**529,88**		**566,97**		**2.798.000.000**
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**Jumlah Pokdakan yang dibina**	**82**		**87**		**400.000.000**
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompak Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	275	Kelompok	317	Kelompok	100.000.000
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompak Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	33	Kelompok	41	Kelompok	100.000.000
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	4	Kelompok	4	Kelompok	100.000.000
			Pemberian Pendampingan Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	33	Kelompok	41	Kelompok	100.000.000
			Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah TPUPI yang diterbitkan**	82		87		100.000.000
			Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	82	Rekomendasi	87	Rekomendasi	100.000.000

			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Jumlah Pembudidaya yang dibina**	**1007**		**1017**		**2.298.000.000**
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	109	Unit	139	Unit	1.423.000.000
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	166	Unit	178	Unit	650.000.000
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1	Dokumen	1	Dokumen	100.000.000
			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	70	Orang	80	Orang	50.000.000
			Perencanaan Pengembangan Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	61,89	Ha	62,39	Ha	75.000.000
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Jumlah produksi hasil olahan (Ton)**	**137**		**141**		**270.000.000**
			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	**Jumlah Tanda Daftar yang diterbitkan**	**12**		**12**		**50.000.000**
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1	Dokumen	1	Dokumen	50.000.000
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Jumlah Pengolah Hasil Perikanan Yang Dibina**	**144**		**151**		**100.000.000**

			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	100	Unit Usaha	120	Unit Usaha	100.000.000
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Poklahsar yang menerima bantuan pemerintah**	**2**		**1**		**120.000.000**
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31,9	Ton	35,09	Ton	50.000.000
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	8	Pelaku Usaha	4	Pelaku Usaha	70.000.000
2	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**			**Indeks Pelayanan Publik**	3,51		3,55		
		1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD		**Nilai Akip**	63.50		65.00		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**72,83**		**74,28**		**9.037.564.000**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen**	**8**	**Dokumen**	**8**	**Dokumen**	**180.000.000**
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen - Renja - Renja RB	3	Dokumen - Renja - Renstra - Renja RB	100.000.000

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	3	Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	52.000.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi Renstra - Evaluasi RB	2	Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	28.000.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan**	**1**	**Laporan**	**1**	**Laporan**	**5.474.000.000**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560 orang bulan (40 orang x 14 bulan)	orang/bulan	560 orang bulan (40 orang x 14 bulan)	orang/bulan	5.220.000.000
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	1	Dokumen	201.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	- Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan Triwulanan	2	- Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan Triwulanan	53.000.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan**	**1**	**Laporan**	**1**	**Laporan**	**52.000.000**
			Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	Laporan	25.000.000

			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Lap Rekonsiliasi-Lap Asset OPD	2	Lap Rekonsiliasi-Lap Asset OPD	27.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan**	**1**	**Laporan**	**1**	**Laporan**	**203.000.000**
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1	Paket	121.000.000
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	1	Dokumen	10.000.000
			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Dokumen Monev Disiplin Pegawai - Dokumen Monev Kinerja Pegawai	2	Dokumen Monev Disiplin Pegawai - Dokumen Monev Kinerja Pegawai	10.000.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	Orang	8	Orang	42.000.000,00
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	4	Orang	4	Orang	20.000.000,00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan**	**1**	**Laporan**	**1**	**Laporan**	**750.500.000**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	1	Paket	50.500.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	1	Paket	150.000.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Paket	1	Paket	50.000.000

			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket	1	Paket	50.000.000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	Paket	1	Paket	100.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1	Dokumen	1	Dokumen	50.000.000
			Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan tamu	1	Laporan	1	Laporan	25.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	1	Laporan	250.000.000
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	25.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan**	**1**	**Laporan**	**1**	**Laporan**	**463.064.000**
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	-	-	-	-
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	15	Unit	20	Paket	120.000.000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10	Unit	10	Unit	110.000.000
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	2	Unit	2	Unit	100.000.000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	-	-	5	Unit	133.064.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan**	**1**	**Laporan**	**1**	**Laporan**	**1.411.000.000**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	Laporan	10.000.000

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	Laporan	1	Laporan	101.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	Laporan	1	Laporan	1.300.000.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Lapran**	**1**	**Laporan**	**1**	**Laporan**	**504.000.000**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	4	Unit	51.000.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	4	Unit	200.000.000
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	5	Unit	5	Unit	26.000.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	Unit	5	Unit	27.000.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	Unit	2	Unit	200.000.000

RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS PARIWISATA KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya serta inspirasi sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk Tahun 2025 telah selesai disusun sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah yang dihimpun dari masing – masing satuan kerja perangkat daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun diberi tugas dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan, dengan merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya dan mempersiapkan program dan kegiatan–kegiatan serta melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing–masing yang ada pada Dinas Pariwisata.

Semoga dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun tepat sasaran dan dapat lebih meningkatkan kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang akan menjadi sumber peningkatan Konstribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kepariwisataan untuk mendukung perekonomian masyarakat Kabupaten Karimun.

Tanjung Balai Karimun, 29 Juli 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KARIMUN

MUHAMMAD YUNUS, SKM, MMPub
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 196803221989121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penyusunan 4

BAB II EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD..... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 24

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 27

2.4 Reviu Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun 29

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... 48

3.2 Tujuan dan Sasaran..... 49

3.3 Program dan Kegiatan..... 51

3.4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 74

BAB IV P E N U T U P 84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 6
Tabel 2.2 9
Tabel 2.3 14
Tabel 2.4 25
Tabel 2.5 30
Tabel 3.1 53
Tabel 3.2 58
Tabel 3.3 65
Tabel 3.4 75

LAMPIRAN

1. Surat Usulan Penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
2. Kertas Kerja Reviu Rencana Strategis Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026
3. Berita Acara Penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mengembangkan potensi Pariwisata yang berkualitas, Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun selaku penaggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam Bidang Pariwisata berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan jangka pendek 1 (satu) tahun. Perencanaan jangka pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pembangunan Daerah memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diperoleh dari Renja OPD sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Dinas Pariwisata yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam mengembangkan kepariwisataan di Karimun yang lebih terarah untuk tercapainya tujuan dalam meningkatkan kunjungan wisata yang diharapkan, maka Dinas Pariwisata mempunyai tugas sebagai dinas yang memiliki tanggung jawab bagi pembangunan Pariwisata di Kabupaten Karimun. Hal ini disamping bertujuan membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pariwisata yang selanjutnya dapat menjadi dasar dalam menyusun rencana kerja yang akan dikerjakan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja OPD) berpedoman pada Rencana Strategis OPD (Renstra OPD), hasil evaluasil renja OPD tahun lalu, dan hasil evaluasi renja OPD tahun berjalan. Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dimaksud sebagai wadah bersama antara pelaku pembangunan untuk membahas program dan kegiatan yang diprioritaskan pada OPD untuk tahun berikutnya yang bertujuan mensinkronisasikan prioritas program dengan plafon/pagu dana opd yang termuat dalam skala prioritas pembangunan daerah serta upaya mewujudkan Visi Karimun yaitu “Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Rencana Kerja berpedoman pada Renstra OPD bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju. Selain itu juga memperhatikan ketentuan dokumen perencanaan RPJMD dengan berdasarkan kondisi dan potensi daerah yang

akurat, bermanfaat dan mengalokasikan dana dapat direncanakan secara efektif dan efisien, yang pada ahkirnya kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun, dapat menjalankan peran strategisnya sebagai dinas yang mengemban amanat untuk meningkatkan kunjungan wisata baik dari lokal, nusantara maupun mancanegara pada setiap tahunnya dapat terlaksana, serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya dari sektor Kepariwisataan di Kabupaten Karimun.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun, yaitu:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tetang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No.4966);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah No.02 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah No.05 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Taun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Taun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 64);
14. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Beruta Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98);

16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 33);
17. Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 34).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. MAKSUD

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja OPD untuk Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun, adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Rencana Kerja Dinas Pariwisata jangka pendek 1 (satu) tahun untuk Tahun 2025.
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pariwisata dengan mengacu pada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu – isu penting terkait penyelenggaraan tugas dalam pembangunan daerah.
3. Menyelaraskan rencana strategis kabupaten dengan pelayanan perangkat daerah, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis OPD.

2. TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2025 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata dalam jangka 1 (satu) tahun.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Pariwisata.
3. Meningkatkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 disusun ke dalam bab – bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat rumusan tentang Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Maksud dan Tujuan, Proses

dan Sistematika Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Bab II Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Memuat Kebijakan Dinas Pariwisata Tahun 2021 - 2026 dan memuat Program Utama dan Kegiatan Prioritas Dinas Pariwisata

Bab IV Penutup

Memuat kesimpulan, berbagai harapan dan tindak lanjut pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun Tahun 2025.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023, Dinas Pariwisata melaksanakan program/kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, yang terdiri dari 4 program, 12 kegiatan dan 29 sub kegiatan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun Tahun 2023

No	Nama Program	No	Nama Kegiatan	No	Nama Sub Kegiatan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Derah	1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

				5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
				6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.	Pengadaan Mebel
				2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
		2.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				2.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata
				3.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		3.	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	1	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata

3.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
				2.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
				3.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
				4.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
				2.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan hasil capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun Tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 13.128.552.910- dan realisasi sebesar Rp.8.568.036.185,- atau 62,60%, dengan sisa anggaran sebesar Rp.4.560.516.725,-. Uraian realisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.1.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Pariwisata Tahun 2023

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM**	**65,0 Persen**	**87,64 Persen**	**5.382.285.846**	**4.896.294.261**	**90,97**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen*	*5 Dok*	*3 Dok*	*114.220.000*	*64.823.273*	*56,75*
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaa perangkat daerah	2 Dok	1 Dok	67.000.000	31.795.102	47,46
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	1 Lap	14.220.000	7.402.300	37,01
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	1 Lap	33.000.000	25.625.871	77,65
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan*	*1 Lap*	*1 Lap*	*3.915.416.642*	*3.672.450.222*	*93,79*
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	378 Orang	330 Orang	3.827.336.642	3.584.370.222	93,65
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dok	3 Dok	88.080.000	88.080.000	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan*	*1 Lap*	*1 Lap*	*100.583.246*	*92.006.000*	*91,47*
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	3 Paket	100.583.246	92.006.000	91,47
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan*	*1 Lap*	*1 Lap*	*328.860.251*	*212.795.666*	*64,71*
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.994.106	3.517.500	70,43

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	30.000.316	22.279.900	74,27
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	9.989.583	7.073.800	70,81
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	23.874.250	14.542.500	60,91
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4 Dok	4 Dok	10.000.000	4.455.000	44,55
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	12 Lap	250.001.996	160.926.966	64,37
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan*	*2 Lap*	*2 Lap*	*326.697.007*	***2**78.330.000*	*85,20*
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	119.340.184	80.620.000	67,55
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	40 Unit	207.356.823	197.710.000	95,35
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan*	*1 Lap*	*1 Lap*	*539.960.000*	*529.929.850*	*98,14*
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	15.360.000	15.139.850	98,57
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	524.600.000	514.790.000	98,13
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan*	*1 Lap*	*1 Lap*	*56.548.700*	*45.959.250*	*81,27*

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	36.988.700	36.791.250	99,47
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	11 Unit	19.560.000	9.168.000	46,87
II	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Persentase Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan**	**7 Persen**	**9,09 Persen**	**375.000.000**	**234.924.700**	**62,65**
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	*Jumlah objek/ destinasi pariwisata yang dikelola*	*5 Objek Destinasi*	*5 Objek Destinasi*	*50.000.000*	*49.036.100*	*98,07*
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	5 Lokasi	5 Lokasi	50.000.000	49.036.100	98,07
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah objek / destinasi pariwisata yang dikelola*	*2 Objek Wisata*	*1 Objek Wisata*	*325.000.000*	*185.888.600*	*57,20*
	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara	33 Unit	33 Unit	125.000.000	123.061.500	98,45
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil dari monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi kabupaten/kota	4 Dok	4 Dok	100.000.000	62.827.100	62,83
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lap	0 Lap	100.000.000	-	0,00

	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha kab/kota*	*40 Jasa Usaha*	*0 Jasa Usaha*	**-**	**-**	*0,00*
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwista	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Lap	0 lap	-	-	0,00
III	**Program Pemasaran Pariwisata**	**Lama kunjungan wisatawan**	**1,5 Hari**	**1,5 Hari**	**7.321.267.064**	**3.411.731.224**	**46,60**
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	*Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri*	*19 Event*	*16 Event*	*7.321.267.064*	*3.411.731.224*	*46,60*
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dok	2 Dok	426.018.368	169.793.000	39,86
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	19 Lap	16 Lap	6.427.114.011	3.090.181.224	48,08
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Neger	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dok	1 Dok	414.934.092	107.215.000	25,84
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dok	1 Dok	53.200.593	44.542.000	83,72

IV	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Persentase peningkatan sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pemahaman yang baik (%)**	**21 Persen**	**23,23 Persen**	**50.000.000**	**25.086.000**	**50,17**
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisata*an	*25 Orang*	*25 Orang*	*50.000.000*	*25.086.000*	*50,17*
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0 Orang	0 Orang	-	-	0
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Dok	1 Dok	50.000.000	25.086.000	50,172
					13.128.552.910	**8.568.036.185**	**62,60**

Pada Bab II ini akan disajikan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan perkiraan maju Tahun berjalan yaitu Tahun 2024, dan dapat dilihat pada tabel 2.1.3 dibawah ini:

Tabel 2.3
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024
KABUPATEN KARIMUN

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata:

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Cpaian Terget Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**									
3 26 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**70,5**	**76,47**	**65,0**	**87,64**	**134,83%**	**70**	**234,11**	**332,07%**
3 26 01 2.01	**Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah**	**Jumlah Dokumen**	**25**	**2**	**5**	**3**	**60,00%**	**5**	**10,00**	**40,00%**
3 26 01 2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	1	2	1	50,00%	2	4,00	40,00%

3 26 01 2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	1	2	1	50,00%	2	4,00	40,00%
3 26 01 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	0	1	1	100,00%	1	2,00	40,00%
3 26 01 2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**5**	**1**	**1**	**1**	**100,00%**	**1**	**3,00**	**60,00%**
3 26 01 2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2030	390	406	330	81,28%	406	1126,00	55,47%
3 26 01 2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	1	1	3	300,00%	1	5,00	100,00%
3 26 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**5**	**0**	**1**	**1**	**100,00%**	**1**	**2,00**	**40,00%**
3 26 01 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	0	1	3	300,00%	1	4,00	133,33%
3 26 01 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32	0	0	0	0,00%	3	3,00	9,38%
3 26 01 2.06	**Admiistrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**5**	**1**	**1**	**1**	**100,00%**	**1**	**3,00**	**60,00%**

3 26 01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	5	5	4	80,00%	5	14,00	56,00%
3 26 01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	6	3	4	133,33%	3	13,00	86,67%
3 26 01 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40	5	8	4	50,00%	8	17,00	42,50%
3 26 01 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	31	0	0	0	#DIV/0!	5	5,00	16,13%
3 26 01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25	6	5	4	80,00%	5	15,00	60,00%
3 26 01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25	5	5	4	80,00%	5	14,00	56,00%
3 26 01 2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24	0	0	0	0!	6	6,00	25,00%
3 26 01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	0	0	0	0	1	1,00	25,00%

3 26 01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57	8	11	12	109,09%	12	32,00	56,14%
3 26 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**	**5**	**1**	**1**	**2**	**200,00%**	**1**	**4,00**	**80,00%**
3 26 01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	0	2	5	250,00%	5	10,00	66,67%
3 26 01 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	23	2	40	2000,00%	3	66,00	660,00%
3 26 01 2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0,00%	1	1,00	100,00%
3 26 01 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	0	0	0	0,00%	2	2,00	20,00%
3 26 01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	0	0	0	0,00%	2	2,00	20,00%
3 26 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**5**	**1**	**1**	**1**	**100,00%**	**1**	**3,00**	**60,00%**

3 26 01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	umlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	0	0	0	0,00%	1	1,00	20,00%
3 26 01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang teisediakan	5	1	1	1	100,00%	1	3,00	60,00%
3 26 01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100,00%	1	3,00	60,00%
3 26 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**5**	**1**	**1**	**1**	**100,00%**	**1**	**3,00**	**60,00%**
3 26 01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1	1	100,00%	1	3,00	300,00%
3 26 01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	0	0	0	0,00%	2	2,00	20,00%
3 26 01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8	8	5	11	220,00%	8	27,00	337,50%
3 26 01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	0	0	0	0,00%	1	1,00	100,00%
3 26 01 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3	0	0	0	0,00%	2	2,00	66,67%

		Dipelihara/ Direhabilitasi								
3 26 01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	0	0	0	0,00%	1	1,00	33,33%
3.26.02	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Persentase Destinasi Wisata Unggulan**	**14,63**	**4,87**	**7,31**	**9,09**	**124,35%**	**9,75**	**23,71**	**162,06%**
3.26.02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah entitas pengelolaan destinasi**	**6**	**0**	**3**	**5**	**166,67%**	**0**	**5,00**	**83,33%**
3.26.02.2.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kab/Kota	6	0	0	0	0,00%	0	0,00	0,00%
3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2	0	0	0	0,00%	0	0,00	0,00%
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	10	0	2	5	250,00%	0	5,00	50,00%
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah objek / destinasi pariwisata yang dikelola**	**25**	**3**	**4**	**1**	**25,00%**	**5**	**9,00**	**36,00%**
3.26.02.2.03.01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5	0	0	0	0,00%	0	0,00	0,00%

3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2	0	0	0	0,00%	0	0,00	0,00%
23.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi PariwisataKabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan,Berkembang, Pemantapan,Revitalisasi)	18	0	0	0	0,00%	4	4,00	22,22%
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	60	5	58	33	56,90%	5	43,00	71,67%
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4	1	1	0	0,00%	1	2,00	50,00%
3.26.02.2.03.10	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5	0	1	4	400,00%	1	5,00	100,00%
3.26.02.2.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha kab/kota**	**96**	**0**	**19**	**0**	**0,00%**	**19**	**19,00**	**19,79%**

3.26.02.2.04.11	Kesediaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	5	0	1	0	0,00%	1	1,00	20,00%
3.26.03	**Program Pemasaran Pariwisata**	**Lama Kunjungan Wisatawan**	**2,5**	**1,18**	**1,5**	**1,5**	**100,00%**	**2**	**4,68**	**187,20%**
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri**	**13**	**8**	**3**	**16**	533,33%	**2**	**26,00**	**200,00%**
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Neger	26	2	5	1	20,00%	5	8,00	30,77%
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	13	0	0	0	0,00%	3	3,00	23,08%
3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoringmdan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	5	0	1	1	100,00%	1	2,00	40,00%
3.26.03.2.01.06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	29	8	5	16	320,00%	6	30,00	103,45%

3.26.03.2.01.07	Penguatan Promosi Mealiui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	6	2	1	2	200,00%	1	5,00	83,33%
3.26.05	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Persentase peningkatan sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berkompetensi dan bersertifikasi**	**65**	**50,76**	**49,00**	**23,23**	**47,41%**	**55,60**	**129,59**	**199,37%**
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Kreatif**	**Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan**	**468**	**160**	**245**	**25**	**10,20%**	**278**	**463,00**	**98,93%**
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	230	160	0	0	0,00%	0	160,00	69,57%
3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisatawan bagi masyarakat, guru dan pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	240	0	0	0	0,00%	0	0,00	0,00%
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan	22	0	0	0	0,00%	5	5,00	22,73%

		Konservasi Ekonomi Kreatif								
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	138	0	25	0	0,00%	0	0,00	0,00%
3.26.05.2.01.08	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	430	0	0	0	0,00%	90	90,00	20,93%
3.26.05.2.01.10	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	330	0	0	0	0,00%	60	60,00	18,18%
3.26.05.2.01.11	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4	0	1	1	100,00%	1	2,00	50,00%
3.26.05.2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan bimbingan**	**360**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00**	**0,00%**

3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	360	0	0	0	0,00%	0	0,00	0,00%
3.26.05.2.02.02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	5	0	0	0	0,00%	0	0,00	0,00%
3.26.05.2.02.03	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	67	0	0	0	0,00%	0	0,00	0,00%

Tabel 2.1.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 yaitu berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terakomodir dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Tahun 2021 – 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026 ada beberapa indicator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata

Kabupaten Karimun

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022 (Thn n-2)	2023 (Thn n-1)	2024 (Thn n)	2025 (Thn n+1)	2022 (Thn n-2)	2023 (Thn n-1)	2024 (Thn n)	2025 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara			15.750	16.537	17.363	18.231	23.622	54.961	57.710	58.864	Target yang disajikan dalam tabel pencapaian kinerja diatas adalah target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026 yang diukur pada masa pandemi COVID-19. Realisasi yang terjadi pada tahun n-2 (2022) dan tahun n-1 (2023) melebihi dari target Renstra. Perlu dilakukan revisi atau reviu terhadap target dari pencapaian kinerja pada indikator ini.
2	Jumlah peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Karimun			45.150	47.407	49.777	52.265	48.788	684.282	718.496	732.866	Target yang disajikan dalam tabel pencapaian kinerja diatas adalah target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026 yang diukur pada masa pandemi COVID-19. Realisasi yang terjadi pada tahun n-2 (2022) dan tahun n-1 (2023) melebihi dari target Renstra. Perlu dilakukan revisi atau reviu terhadap target dari pencapaian kinerja pada indikator ini.

3	Nilai AKIP			72,68	72,73	72,80	73,01	73,31	61,64	72,80	73,01	Target yang disajikan dalam tabel pencapaian kinerja diatas merupakan target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026. Realisasi yang diperoleh sesuai hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas Pariwisata dan, maka dapat dirumuskan isu – isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata.

Perumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Pariwisata.

Permasalahan yang muncul dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait Kesekretariatan
   a. Tingkat validasi data yang masih belum optimal
   b. Kurangnya kompetensi SDM pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif yang sangat terbatas.
   c. Belum adanya reviu Peraturan Daerah tentang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
2. Permasalahan terkait Destinasi Pariwisata
   a. Pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyrakat.
   b. Kurangnya infrastruktur untuk menunjang kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Karimun karena kebutuhan dasar seperti jaringan air bersih, dan listrik yang belum memadai, maka akan sulit mendatangkan investasi di bidang pariwisata. Jaringan jalan umum dan drainase, dermaga juga akan menjadi halangan wisatawan dalam memutuskan untuk melakukan suatu perjalanan wisata. Permasalahan ini menjadi timbul karena untuk pembangunan berbagai infrastruktur dasar tersebut bukanlah menjadi kewenangan Dinas Pariwisata, tetapi instansi pemerintah lainnya termasuk didalamnya Dinas Pekerjaan Umum, sehingga sinkronisasi dan koordinasi dengan instansi terkait akan lebih ditekan lagi untuk keserasian kegiatan.

c. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang wisata seperti transportasi darat maupun transportasi laut masih belum memadai. Fasilitas keamanan seperti life jacket setiap speed boat masih kurang. Permasalahan ini akan mengurangi tingkat keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi para wisatawan yang berkunjung ke objek – objek wisata.

3. Permasalahan terkait Pemasaran Pariwisata
   a. Belum adanya Acuan Riset Pasar yang komprehensif dalam menetapkan target pasar wisatawan nusantara dan mancanegara. Hal ini dapat terlihat dari penetapan focus pasar yang belum mengacu terhadap analisa pasar yang dilakukan beberapa hal disebabkan belum adanya pembobotan terhadap variable yang menjadi penilaian dalam menentukan focus pasar baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.
   b. Sinergi Kemitraan Pemasaran Wisata masih belum optimal terlihat dari banyaknya Asosiasi dan Organisasi yang bergerak di bidang pariwisata antara lain: ASITA, GIPI, PHRI yang belum bersinergi dengan program kerja pemerintah sehingga menghambat pengembangan *public-private partnership*, hal ini dikarenkan perbedaan tujuan dan kepentingan yang justru menghambat usaha pemerintah dalam memasarkan pariwisata.
   c. Kegiatan promosi wisata masih berjalan parsial, event – event yang berskala nasional dan internasional masih terbatas serta kurangnya aksesibilitas maupun sarana dan prasaran penunjang yang memadai untuk layak dipromosikan baik secara nasional maupun internasional.
   d. Dalam mempromosikan pariwisata Kabupaten Karimun belum semua program – program yang dibuat secara terpadu sehingga diperlukan keterpaduan program antar pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat khusunya, dalam mengemas program belum kreatif dan inovatif, juga keterpaduan media promosi agar semakin luas. Jika memanfaatkan komunitas – komunitas untuk promosi serta sinergitas program/kegiatan yang sifatnya nasional maupun internasional dengan promosi pariwisata bersama secara *co-marketing*. Selain itu beberapa pusat informasi daerah atau destinasi masih belum mampu memberikan informasi menyeluruh kepada waisatawan yang berkunjung ke daerahnya. Belum optimalnya pemanfaatan TIK

(Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang mampu memberikan informasi yang menyeluruh baik online maupun offline kepada target pasar yang membutuhkan informasi kepariwisataan Kepulauan Riau.

2.4. Reviu Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun

Dalam upaya untuk mewujudkan Kabupaten Karimun sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa yang dilaksanakan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah, dimana Dinas Pariwisata mengemban misi ke 1 (satu) yaitu *"Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal."* Misi pembangunan daerah Kabupaten Karimun sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal.
2. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dalam Rangka Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa.
4. Meningkatkan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup.
5. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul.

Dengan Skala Prioritas Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkeadilan melalui Pemberdayaan UMKM dan Penguatan Ketahanan Pangan.
2. Meningkatkan Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing melalui Penguatan Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Dari hal tersebut diatas, Reviu Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1.5 berikut :

Tabel 2.5

REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023

KABUPATEN KARIMUN

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata Lembar 1 dari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**		**65,7**	**3.889.750.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indek Kepuasan Masyarakat**		**65,7**	**3.889.750.000**	
I	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen***		***5 Dokumen***	***50.000.000***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen***		***5 Dokumen***	**50.000.000**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karimun	2 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karimun	2 Dokumen	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karimun	2 Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karimun	2 Laporan	20.000.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karimun	1 Laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	10.000.000	
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**		**1 Laporan**	**3.107.750.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**		**1 Laporan**	**3.107.750.000**	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karimun	406 Orang/ Bulan	2.962.586.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karimun	406 Orang/ Bulan)	2.962.586.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Karimun	1 Dokumen	145.164.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Karimun	1 Dokumen	145.164.000	
III	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**		**1 Laporan**	**36.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**		**1 Laporan**	**36.000.000**	
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Karimun	1 Paket	10.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Karimun	1 Paket	10.000.000	
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Karimun	6 Orang	26.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Karimun	6 Orang	26.000.000	
IV	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**		**1 Laporan**	**74.500.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**		**1 Laporan**	**74.500.000**	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun	2 Paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun	2 Paket	2.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Karimun	3 Paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun	3 Paket	15.000.000	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Karimun	8 Paket	4.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Karimun	8 Paket	4.000.000	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun	5 Paket	8.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun	5 Paket	8.000.000	
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Karimun	5 Paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Karimun	5 Paket	15.000.000	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Karimun	5 Dokumen	7.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Karimun	5 Dokumen	7.000.000	
14	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Karimun	6 Paket	3.000.000	Penyediaan Bahan/Material -	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Karimun	6 Paket	3.000.000	
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Karimun	1 Laporan	2.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Karimun	1 Laporan	2.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karimun	11 Laporan	18.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karimun	11 Laporan	18.000.000	
V	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**		**1 Laporan**	**25.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laopran**		**1 Laporan**	**25.000.000**	
17	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Karimun	2 Unit	8.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Tersedia	Kab. Karimun	2 Unit	8.000.000	
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun	2 Unit	5.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun	2 Unit	5.000.000	
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun	2 Unit	7.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun	2 Unit	7.000.000	
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun	2 Unit	5.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun	2 Unit	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
VI	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**		**1 Laporan**	**544.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**		**1 Laporan**	**544.000.000**	
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karimun	1 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karimun	1 Laporan	3.000.000	
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Karimun	1 Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Karimun	1 Laporan	20.000.000	
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun	1 Laporan	521.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun	1 Laporan	521.000.000	
VII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**		**1 Laporan**	**52.500.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**		**1 Laporan**	**52.500.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Karimun	1 Unit	15.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Karimun	1 Unit	15.000.000	
25	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Karimun	2 Unit	2.000.000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Karimun	2 Unit	2.000.000	
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Karimun	8 Unit	5.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Karimun	8 Unit	5.500.000	
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Karimun	1 Unit	30.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Karimun	1 Unit	30.000.000	
28						Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Karimun	1 unit	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
B	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Pengembangan Distinasi Wisata Unggul**		**7,31 Persen**	**1.170.000.000**	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Persentase pengembangan destinasi wisata unggulan**		**7,31 Persen**	**1.170.000.000**	
VIII	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi**		**3 Destinasi**	**240.000.000**	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah entitas pengelolaan destinasi**		**3 Destinasi**	**240.000.000**	
29	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	3 Lokasi	100.000.000	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	3 Lokasi	100.000.000	
30	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	1 Dokumen	40.000.000	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab Karimun	1 Dokumen	40.000.000	
31	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kab. Karimun	2 Lokasi	100.000.000	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kab. Karimun	2 Lokasi	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
IX	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Objek/ Destinasi Pariwista yang dikelola**		**4 Objek wisata**	**880.000.000**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah objek / destinasi pariwisata yang dikelola**		**4 Objek wisata**	**880.000.000**	
32	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kab. Karimun	3 Lokasi	100.000.000	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kab. Karimun	3 Lokasi	100.000.000	
33	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	1 Dokumen	50.000.000	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Karimun	1 Dokumen	50.000.000	
34	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kab. Karimun	3 Lokasi	210.000.000	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kab. Karimun	3 Lokasi	210.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
35	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Kab. Karimun	58 Unit	410.000.000	Pengadaan/ Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Kab. Karimun	58 Unit	410.000.000	
36	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kab. Karimun	1 Dokumen	60.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil dari monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi kabupaten/ kota	Kab. Karimun	1 Dokumen	60.000.000	
37	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kab. Karimun	1 Laporan	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kab. Karimun	1 Laporan	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
X	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Persub Jenis Usaha Kabupaten/Kota**		**19 Jasa Usaha**	**50.000.000**	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha kab/kota**		**19 Jasa Usaha**	**50.000.000**	
38	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Kab. Karimun	1 Laporan	50.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Kab. Karimun	1 Laporan	50.000.000	
C	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Lama Kunjungan Wisata**		**1,5 Hari**	**1.360.000.000**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Lama kunjungan wisata**		**1,5 Hari**	**1.410.000.000**	
XI	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana di Dalam Negeri**		**3 Event**	**1.360.000.000**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri**		**3 Event**	**1.410.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
39	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Karimun	1 Dokumen	120.000.000	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Karimun	1 Dokumen	120.000.000	
40	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Karimun	5 Laporan	800.000.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Karimun	5 Laporan	850.000.000	Pelaksanaan atraksi promosi pariwisata daerah yang memerlukan anggaran yang besar yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sector pariwisata

41	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota , Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Karimun	5 Dokumen	180.000.000	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten / Kota,Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota , Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Karimun	5 Dokumen	180.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
42	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kab. Karimun	2 Dokumen	160.000.000	Peningkatan kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kab. Karimun	2 Dokumen	160.000.000	
43	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kab. Karimun	1 Dokumen	100.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kab. Karimun	1 Dokumen	100.000.000	
D	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase peningkatan sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pemahaman yang baik**		**49,00 persen**	**1.490.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase peningkatan sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pemahaman yang baik (%)**		**49,00 persen**	**1.490.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
XII	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan**		**245 Orang**	**1.330.000.000**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan**		**245 Orang**	**1.330.000.000**	
44	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Kab. Karimun	80 Orang	220.000.000	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Kab. Karimun	80 Orang	220.000.000	
45	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kab. Karimun	40 Orang	270.000.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kab. Karimun	40 Orang	270.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
46	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Kab. Karimun	40 Orang	170.000.000	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisatawan bagi masyarakat, guru dan pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Kab. Karimun	40 Orang	170.000.000	
47	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kab. Karimun	60 Orang	200.000.000	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kab. Karimun	60 Orang	200.000.000	
48	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kab. Karimun	4 Laporan	260.000.000	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kab. Karimun	4 Laporan	260.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
49	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab. Karimun	25 Orang	160.000.000	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab. Karimun	25 Orang	160.000.000	
50	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab. Karimun	1 Dokumen	50.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab. Karimun	1 Dokumen	50.000.000	
XIII	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Bimbingan**		**60 Orang**	**160.000.000**	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan bimbingan**		**60 Orang**	**160.000.000**	
51	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Karimun	60 Orang	78.000.000	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Karimun	60 Orang	78.000.000	

52	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Kab. Karimun	1 Laporan	50.000.000	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Kab. Karimun	1 Laporan	50.000.000	
53	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Kab. Karimun	15 Orang	32.000.000	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Kab. Karimun	15 Orang	32.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagai tahun ketiga dari pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Karimun, Dinas Pariwisata melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2). Tahun 2022 Dinas Pariwisata hanya melaksanakan program yang terkait dengan Urusan Bidang Pariwisata yang mana didalamnya melaksanakan pengembangan terhadap pariwisata daerah dan ekonomi kreatif, yang dapat mendorong upaya meningkatkan kualitas ekonomi daerah dan sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, kondisi ini sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi.

Tema Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah "*Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien*, dengan 4 (empat) prioritas pembangunan tahun 2025 Kabupaten Karimun sebagai berikut:

1. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah;
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
4. Tata Kelola Pemerintahan Inovatif.

Dari prioritas pembangunan tahun 2025 diatas, terdapat Program Unggulan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Pemberdayaan 6000 UMKN se Kabupaten Karimun;
2. Membangun Konektivitas di Wilayah Kabupaten Karimun;
3. Penyiapan 3000 Tenaga Kerja yang Berkompeten dan Memiliki Skill yang Dibutuhkan Pasar Industri;
4. Menjadikan Kabupaten Karimun (Bersih, Beriman, Sehat, Indah dan Harmonis);
5. Digitalisasi Pelayanan Publik dan Birokrasi.

Pelaksanaan pembangunan daerah harus diselaraskan dengan Arah dan Kebijkan pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2025, meliputi:

1. Pencapaian SDGs*;*
2. Pencapaian SPM;
3. Pengentasan Kemiskinan*;*

4. Pencegahan Stunting;
5. Peningkatan Ekonomi Masyarakat;
6. Pencegahan Penyakit Menular.

Adapun 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional yang perlu dilakukan :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi kesenjangan dan manajemen pemerintahan
3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
4. Membangunan lingkungan hidup, mengingatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
6. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang dapat menggambarkan hasil akhir yang dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan target kualitatif yang dalam penetapannya mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki.

Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan kepemerintahan *(performance indicator)*. Tujuan dapat menggambarkan arah strategi dan perbaikan – perbaikan yang ingin dicapai kedepan untuk lebih mempertajam fokus pelaksana misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua program dan kegiatan.

Untuk mewujudkan mencapaian visi dan misi Kabupaten Karimun yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun menetapkan 2 (dua) tujuan untuk tahun 2021 – 2026, yaitu:

1. Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

B. SASARAN

Sasaran yang dimaksud disini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik., terukur dalam kurun waktu tertentu, yang merupakan penjabaran dari tujuan. Penetapan sasaran didasari atas isu – isu strategis, analisis lingkungan internal dan eksternal, untuk menentukan faktor kunci keberhasilan sejalan dengan proses perencanaan strategis. Fokus utama dalam menentukan sasaran adalah tindakan, alokasi dana dan sumber daya ke dalam kegiatan, atau operasional untuk pencapaian kinerja yang diinginkan.

Dalam penetapan sasaran juga dirancang dan diidentifikasikan indikator pencapaiannya, yaitu suatu ukuran tingkat keberhasilan perwujudan pencapaiannya pada periode tahun tertentu. Setiap indikator pencapaian sasaran disertai dengan targetnya masing – masing.

Adapun sasaran yang dapat diidentifikasikan untuk diwujudkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun dalam kurun waktu 2021 – 2026 sebagaimana dinyatakan dalam Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun dan sasaran yang dapat diidentifikasikan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Karimun.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD.

C. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja yang dapat diidentifikasikan untuk diwujudkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun dalam kurun waktu 2021 – 2026 sebagaimana dinyatakan dalam Renstra dan sasaran yang dapat diidentifikasikan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan, adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pertumbuhan wisatawan mancanegara perkebangsaan.
2. Jumlah peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Karimun.
3. Nilai AKIP.

D. TARGET

Adapun target kinerja yang dapat diidentifikasikan untuk diwujudkan oleh Dinas Pariwisata dalam kurun waktu 2021 – 2026 sebagaimana dinyatakan dalam Renstra Dinas Pariwisata yang dapat diidentifikasikan dalam kurun waktu

1 (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Untuk lebih detailnya tentang target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pariwisata pada tahun 2025 yang sesuai dengan Renstra dapat terlihat pada tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran Strategis
Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun
Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Karimun	1. Jumlah pertumbuhan wisatawan mancanegara perkebangsaan	18.231 Orang
			2. Jumlah peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Karimun	52.265 Orang
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	3. Nilai AKIP	73.01

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM

Program merupakan kegiatan yang sistematis dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk program yang terangkum dalam uraian sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
   Program ini merupakan program penunjang dalam pelaksanaan kinerja Dinas Pariwisata.
2. **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**
   Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata dan pengelolaan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Karimun, yang mana akan membawa wisatawan berkunjung di Kabupaten Karimun.
3. **Program Pemasaran Pariwisata**

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemasaran dan kerjasama dengan mitra Dinas Pariwisata dalam mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah Kabupaten Karimun.

4. **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Inteketual**
   Program ini ditujukan mengembangkan dan meningkatkan ekonomi kreatif pada dunia usaha.
5. **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**
   Program ini ditujukan untuk mengembangkan produk pariwisata dan ekonomi kreatif, mengembangkan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif untuk lebih aktif dan produktif.

B. KEGIATAN dan SUB KEGIATAN

Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan Penjabaran dari Program Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun, adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja TA 2025 akan disajikan pada Tabel dibawah ini yang sesuai dengan Renstra 2021-2026 dan hasil mapping Renja sesuai dengan Kemendagri No: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Lampiran Tabel Renja sesuai Renstra dan Tabel sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 serta table hasil mapping.

Tabel 3.1

Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai Renstra Tahun 2021-2026

DINAS PARIWISATA

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025		
				Target	Rp.	Sumber Dana
Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah			**Persentase PAD terhadap pendapatan daerah**	**28,68**		
	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Karimun		**Jumlah pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan**	**18231 Orang**		
			jumlah peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab. Karimun	**52265 Orang**		
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	**Persentase pengembangan destinasi wisata unggulan**	**12,19%**	**1.410.000.000**	
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	**Jumlah entitas pengelolaan destinasi**	**5 Destinasi**	**300.000.000**	
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daya tarik wisata kab/kota sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan,Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	300.000.000	DAK Non Fisik / Pendapatan Asli Daerah
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah objek / destinasi pariwisata yang dikelola**	**6 objek wisata**	**1.060.000.000**	
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 Lokasi	350.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	60 Unit	540.000.000	Dana Alokasi Khusus/ Pendapatan Asli Daerah
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen hasil dari monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi kabupaten/kota	1 Dokumen	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah

		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	110.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha kab/kota**	**5 jasa akomodasi 12 usaha makan minum 12 perjalanan wisata**	**50.000.000**	
		Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	1 Laporan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Lama kunjungan wisata**	**2 Hari**	**1.605.000.000**	
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri**	**3 Event**	**1.605.000.000**	
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	130.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	6 Laporan	1.005.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten / Kota,Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Dokumen	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	170.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Persentase peningkatan sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pemahaman yang baik (%)**	**64,00%**	**1.470.000.000**	
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan**	**320 orang**	**1.305.000.000**	
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	90 Orang	240.000.000	DAK Non Fisik / Pendapatan Asli Daerah

		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	50 Orang	190.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisatawan bagi masyarakat, guru dan pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	50 orang	180.000.000	DAU Bid Pendidikan/ Pendapatan Asli Daerah
		Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	70 orang	230.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 Laporan	295.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	120.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	**Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan bimbingan**	**70 orang**	**165.000.000**	
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	80 Orang	80.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	1 Laporan	52.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	17 Orang	33.000.000	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**70,3**	**4.620.168.000**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen**	**5 Dokumen**	**50.000.000**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	20.000.000	Pendapatan Asli Daerah

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan**	**2 Laporan**	**3.528.979.000**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	406 Orang/Bulan	3.383.815.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	145.164.000	Pendapatan Asli Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah laporan**	**1 Laporan**	**42.000.000**	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	42.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**80.000.000**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	15.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	4.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	15.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	7.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	3.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	23.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laopran**	**1 Laporan**	**151.689.000**	

		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	41.689.000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**694.000.000**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	671.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**73.500.000**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	16.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 Unit	5.500.000	Pendapatan Asli Daerah
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3Unit	15.000.000	Pendapatan Asli Daerah
TOTAL PAGU ANGGARAN					**9.105.168.000**	

Dapat disampaikan tabel di bawah ini merupakan tabel Renja yang telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5.1317 Tahun 2023. Terget dan anggarannya tetap mengikuti pagu indikatif Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Pariwisata yang telah disusun. Berikut tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2
Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tabel Renja Tahun 2025 Sesuai Kepmendagri 900.1.15-5.1317 Tahun 2023
DINAS PARIWISATA

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Rencana Tahun 2025		
				Target	Rp.	Sumber Dana
Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah			**Persentase PAD terhadap pendapatan daerah**	**28,68**		
	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Karimun		**Jumlah pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan**	**18231 Orang**		
			jumlah peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab. Karimun	**52265 Orang**		
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	**Persentase pengembangan destinasi wisata unggulan**	**12,19%**	**1.410.000.000**	
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	**Jumlah entitas pengelolaan destinasi**	**5 Destinasi**	**50.000.000**	
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	30 Orang	50.000.000	DAK Non Fisik / Pendapatan Asli Daerah
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah objek / destinasi pariwisata yang dikelola**	**6 Objek Wisata**	**1.070.000.000**	
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 Lokasi	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah

		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	60 Unit	200.000.000	DAK / Pendapatan Asli Daerah
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen hasil dari monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi kabupaten/kota	1 Dokumen	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	110.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Lokasi	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	350.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha kab/kota**	**19 Jasa Usaha**	**290.000.000**	
		Pembinaan dan Pengawasan untuk Memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang Dibina dan Diawasi	20 Usaha	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021	10 Usaha	140.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Kesediaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang Bersedia Memenuhi Standar Usaha	1 Laporan	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Lama kunjungan wisata**	**2 Hari**	**1.605.000.000**	

		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri**	**3 Event**	**1.605.000.000**	
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	130.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Kegiatan	1.005.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Dokumen	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	170.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan EvaluasiPengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Persentase peningkatan sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pemahaman yang baik (%)**	**23,03**	**1.470.000.000**	
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan**	**320 Orang**	**1.200.000.000**	
		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	90 Orang	240.000.000	DAU Bid Pendidikan / Pendapatan Asli Daerah
		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	50 Orang	190.000.000	DAU Bid Pendidikan / Pendapatan Asli Daerah

		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	70 Orang	230.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 Laporan	295.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	170.000.000	DAK Non Fisik / Pendapatan Asli Daerah
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	**Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan bimbingan**	**35 Orang**	**270.000.000**	
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	80 Orang	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	IJumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	1 Laporan	52.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	17 Orang	68.000.000	Pendapatan Asli Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indek Pelayanan Publik**	**3,55**		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata			**Nilai AKIP**	**73,24**		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**70,3**	**4.620.168.000**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen**	**5 Dokumen**	**50.000.000**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.000.000	Pendapatan Asli Daerah

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	20.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan**	**2 Laporan**	**3.528.979.000**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	406 Orang / Bulan	3.383.815.000	Dana Alokasi Umum
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	145.164.000	Pendapatan Asli Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah laporan**	**1 Laporan**	**42.000.000**	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	Pendapatan Asli Daerah
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	42.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**80.000.000**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	15.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	4.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	15.000.000	Pendapatan Asli Daerah

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	5 Dokumen	7.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	3.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	23.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan**	**2 Laporan**	**151.689.000**	
		Pengadaan Mebel	IJumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	41.689.000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan**	**2 Laporan**	**694.000.000**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**1 Laporan**	3.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	671.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**73.500.000**	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	16.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.500.000	Pendapatan Asli Daerah
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35.000.000	Pendapatan Asli Daerah
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	15.000.000	Pendapatan Asli Daerah
TOTAL PAGU ANGGARAN		**TOTAL PAGU ANGGARAN**			**9.105.168.000**	

Dari dua tabel diatas yaitu tabel 3.1 dan tabel 3.2 dapat dilampirkan juga tabel Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang mana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata yang telah dimapping sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5.1317 Tahun 2023. Berikut hasil Mapping dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3
Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Table Mapping Renja Tahun 2025
DINAS PARIWISATA

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Rencana Tahun 2025			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Rencana Tahun 2025		
				Target	Rp.	Sumber Dana			Target	Rp.	Sumber Dana
Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah			**Persentase PAD terhadap pendapatan daerah**	**28.68**							
	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Karimun		**Jumlah pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan**	**18231 Orang**							
			jumlah peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab. Karimun	**52265 Orang**							
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pengembangan destinasi wisata unggulan	**12.19%**	**1,410,000,000**		**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	Persentase pengembangan destinasi wisata unggulan	**12.19%**	**1,410,000,000**	
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	**Jumlah entitas pengelolaan destinasi**	**5 Destinasi**	**300,000,000**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah entitas pengelolaan destinasi**	**5 Destinasi**	**50,000,000**	
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	300,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-	-
		-	-	0	-	0	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik	30 Orang	50,000,000	DAK Non Fisik /

							Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Wisata Unggulan yang Dikembangkan			Pendapatan Asli Daerah
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah objek / destinasi pariwisata yang dikelola**	**6 Objek Wisata**	**1,060,000,000**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah objek / destinasi pariwisata yang dikelola**	**6 Objek Wisata**	**1,070,000,000**	
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 Lokasi	350,000,000	DAK/Pendapatan Asli Daerah	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 Lokasi	300,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	60 Unit	540,000,000	DAK/ Pendapatan Asli Daerah	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	60 Unit	200,000,000	DAK / Pendapatan Asli Daerah
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen hasil dari monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi kabupaten/kota	1 Dokumen	60,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen hasil dari monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi kabupaten/kota	1 Dokumen	60,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	110,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	110,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		-	-	-	-	-	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Lokasi	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		-	-	-	-	-	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan	1 Dokumen	350,000,000	Pendapatan Asli Daerah

							Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota			
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha kab/kota**	**19 Jasa Usaha**	**50,000,000**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha kab/kota**	**19 Jasa Usaha**	**290,000,000**	
		Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Laporan	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Pembinaan dan Pengawasan untuk Memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang Dibina dan Diawasi	20 Usaha	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah
					-		Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021	10 Usaha	140,000,000	Pendapatan Asli Daerah
					-		Kesediaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang Bersedia Memenuhi Standar Usaha	1 Laporan	100,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Lama kunjungan wisata**	**2 Hari**	**1,605,000,000**		**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Lama kunjungan wisata**	**2 Hari**	**1,605,000,000**	
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri**	**3 Event**	**1,605,000,000**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri**	**3 Event**	**1,605,000,000**	
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	130,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	130,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Laporan	1,005,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Kegiatan	1,005,000,000	Pendapatan Asli Daerah

		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten / Kota,Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Dokumen	200,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Dokumen	200,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		Peningkatan kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	170,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	170,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	100,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan EvaluasiPengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	100,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Persentase peningkatan sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pemahaman yang baik (%)**	**64.0**	**1,470,000,000**		**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase peningkatan sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pemahaman yang baik (%)**	**23.03**	**1,470,000,000**	
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan**	**320 Orang**	**1,305,000,000**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan**	**320 Orang**	**1,200,000,000**	
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	90 Orang	240,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	90 Orang	240,000,000	-
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	50 Orang	190,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	50 Orang	190,000,000	DAU Bid Pendidikan / Pendapatan Asli Daerah

		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisatawan bagi masyarakat, guru dan pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	50 Orang	180,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-	-
		Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	70 orang	230,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	70 Orang	230,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 Laporan	295,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 Laporan	295,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	170,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	170,000,000	DAK Non Fisik / Pendapatan Asli Daerah
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	-	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	75,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	**Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan bimbingan**	**80 Orang**	**165,000,000**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan bimbingan**	**35 Orang**	**270,000,000**	
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	80 Orang	80,000,000		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	80 Orang	150,000,000	Pendapatan Asli Daerah

		Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	1 Laporan	52,000,000		Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	lJumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	1 Laporan	52,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	17 Orang	33,000,000		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	17 Orang	68,000,000	Pendapatan Asli Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indek Pelayanan Publik**	**3.55**							
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD			**Nilai AKIP**	**73.01**							
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**70.3**	**4,620,168,000**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**70.3**	**4,620,168,000**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen**	**5 Dokumen**	**50,000,000**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**5 Dokumen**	**50,000,000**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20,000,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan (Lakip dan Perjanjian Kinerja dan Relaisasi PK)	20,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	20,000,000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10,000,000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan**	**1 Laporan**	**3,528,979,000**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**2 Laporan**	**3,528,979,000**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	406 orang/ bulan (29 orang x 14 bulan)	3,383,815,000	Dana Alokasi Umum	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	406 Orang / Bulan	3,383,815,000	Dana Alokasi Umum

		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	145,164,000	Pendapatan Asli Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	145,164,000	Pendapatan Asli Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah laporan**	**1 Laporan**	**42,000,000**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**1 Laporan**	**42,000,000**	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	Pendapatan Asli Daerah
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	42,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	42,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**80,000,000**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**80,000,000**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	15,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	15,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	4,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	4,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	15,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	15,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	7,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	5 Dokumen	7,000,000	Pendapatan Asli Daerah

		Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	3,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	3,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	23,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	23,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**151,689,000**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**	**2 Laporan**	**151,689,000**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Pengadaan Mebel	IJumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	41,689,000	Pendapatan Asli Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	41,689,000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**694,000,000**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**2 Laporan**	**694,000,000**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**1 Laporan**	3,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**1 Laporan**	3,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**1 Laporan**	20,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20,000,000	Pendapatan Asli Daerah

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**1 Laporan**	671,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	671,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**73,500,000**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**73,500,000**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	16,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	16,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2,000,000	Pendapatan Asli Daerah
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 Unit	5,500,000	Pendapatan Asli Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5,500,000	Pendapatan Asli Daerah
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35,000,000	-
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	15,000,000	Pendapatan Asli Daerah	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	15,000,000	-
TOTAL PAGU ANGGARAN					**9,105,168,000**		**TOTAL PAGU ANGGARAN**			**9,105,168,000**	

3.4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dibawah ini, disajikan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung sasaran dan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun dengan target kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025. *Beberapa hal yang akan disampaiakn dalam dokumen renja ini bahwa sebelum tahapan Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 telah dilakukan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dikarenakan ada program, kegiatan dan sub kegiatan teknis yang belum diakomodir pada penyusunan Renstra Tahun 2021- 2026 serta mengusulkan beberapa sub kegiatan yang tidak terakomodir pada penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2025*. Berikut dapat disajikan tabel rumusan program, kegiatan, indikator kinerja tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 sesuai dengan Penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun Tahun 2025 dan telah diinput dalam Aplikasi SIPD-RI Kementrian Dalam Negeri.

Tabel 3.4

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

DINAS PARIWISATA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Rp.
Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah				**Persentase PAD terhadap pendapatan daerah**		**28,68**				**28,91**	
	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Karimun			**Jumlah pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan**		**18231 Orang**				**19142 Orang**	
				jumlah peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab. Karimun		**52265 Orang**				**54878 Orang**	
		3.26.02	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Persentase pengembangan destinasi wisata unggulan**		**12,19%**	**550.000.000**			**14,63%**	**1.267.000.000**
		3.26.02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah entitas pengelolaan destinasi**		**5 Destinasi**	**-**			**6 Destinasi**	**300.000.000**
		3.26.02.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan		30 Orang	-			30 Orang	300.000.000
		3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah objek / destinasi pariwisata yang dikelola**		**6 objek wisata**	**500.000.000**			**7 objek wisata**	**867.000.000**

		3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		0	-			5 Lokasi	370.000.000
		3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Kab Karimun	60 Unit	15.000.000	Pendapatan Asli Daerah		60 Unit	297.000.000
		3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab Karimun	1 Laporan	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	100.000.000
		3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Karimun	1 Dokumen	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah		-	-
		3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab Karimun	1 Laporan	35.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	100.000.000
		3.26.02.2.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha kab/kota**		**19 Jasa Usaha**	**50.000.000**			**19 Jasa Usaha**	**100.000.000**

		3.26.02.2.04.0011	Kesdiaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	Kab Karimun	1 Laporan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	100.000.000
		3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Lama kunjungan wisata**		**2 Hari**	**1.182.552.950**			**2 Hari**	**1.708.836.000**
		3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri**		**3 Event**	**1.182.552.950**			**3 Event**	**1.708.836.000**
		3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab Karimun	6 Dokumen	224.996.000	Pendapatan Asli Daerah		5 Dokumen	300.000.000
		3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisatai	Kab Karimun	1 Dokumen	-	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	100.000.000
		3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kotai	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab Karimun	6 Kegiatan	957.556.950	Pendapatan Asli Daerah		6 Kegiatan	1.108.836.000
		3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab Karimun	1 Promosi	-	Pendapatan Asli Daerah		1 Promosi	200.000.000

		3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase usaha ekonomi kreatif yang dikembangkan melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual**		**10%**	**150.000.000**		**Telah dilakukan reviu Renstra**	**10,76%**	**-**
		3.26.04.2.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Jumlah produk ekonomi kreatif yang berstandar/bersertifikat**		**13 Produk**	**150.000.000**			**14 Produk**	**-**
		3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Kab Karimun	1 Lembaga	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah		0	-
		3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Kab Karimun	1 Kegiatan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah		0	-
		3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab Karimun	1 Laporan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah		0	-
		3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase peningkatan sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pemahaman yang baik (%)**		**23,03%**	**125.000.000**			**64%**	**475.000.000**

		3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan**		**320 orang**	**125.000.000**			**320 orang**	**325.000.000**
		3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKN	Jumlah SDM Pariwisata yang dikembangkan kapasitasnya berdasarkan pada SKKNI	Kab Karimun	30 orang	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah		30 orang	100.000.000
		3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata		50 orang	-	DAU Bid Pendidikan/ Pendapatan Asli Daerah		50 orang	150.000.000
		3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab Karimun	1 Laporan	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	75.000.000
		3.26.05.2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan bimbingan**		**80 orang**	**-**			**80 orang**	**150.000.000**
		3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		35 Orang	-	Pendapatan Asli Daerah		35 Orang	150.000.000

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						**3,55**				**4,00**	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD					**73,01**				**73,24**	
		3.26.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indek Kepuasan Masyarakat**		**70,3**	**5.834.022.133**			**70,3**	**5.565.164.000**
		3.26.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**		**5 Dokumen**	**35.101.000**			**5 Dokumen**	**150.000.000**
		3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Karimun	2 Dokumen	20.000.000	Pendapatan Asli Daerah		2 Dokumen	50.000.000
		3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Karimun	5 Laporan	15.101.000	Pendapatan Asli Daerah		2 Laporan	100.000.000
		3.26.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**		**1 Laporan**	**4.657.135.133**			**1 Laporan**	**4.045.164.000**
		3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Karimun	434 orang/ bulan	4.569.055.133	Dana Alokasi Umum (DAU) dan PAD		406 Orang / Bulan	3.900.000.000
		3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Karimun	1 Dokumen	88.080.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	145.164.000
		3.26.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**		**1 Laporan**	**100.000.000**			**1 Laporan**	**-**

		3.26.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab Karimun	1 Laporan	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	-
		3.26.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**		**7 Laporan**	**30.006.000**			**1 Laporan**	**150.000.000**
		3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab Karimun	10 Orang	30.006.000	Pendapatan Asli Daerah		7 orang	150.000.000
		3.26.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**		**1 Laporan**	**283.790.000**			**1 Laporan**	**320.000.000**
		3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Karimun	5 Paket	5.014.000	Pendapatan Asli Daerah		5 Paket	20.000.000
		3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Karimun	5 Paket	29.134.000	Pendapatan Asli Daerah		5 Paket	50.000.000
		3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab Karimun	5 Paket	7.000.000	Pendapatan Asli Daerah		8 Paket	20.000.000
		3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Karimun	5 Paket	7.870.000	Pendapatan Asli Daerah		5 Paket	20.000.000
		3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab Karimun	60 Dokumen	9.900.000	Pendapatan Asli Daerah		5 Dokumen	10.000.000

		3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Karimun	36 Laporan	224.872.000	Pendapatan Asli Daerah		12 Laporan	200.000.000
		3.26.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laopran**		**1 Laporan**	**195.000.000**			**1 Laporan**	**150.000.000**
		3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab Karimun	1 Unit	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah		0	-
		3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab Karimun	16 Unit	120.000.000	Pendapatan Asli Daerah		10 Unit	150.000.000
		3.26.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**		**1 Laporan**	**488.004.000**			**1 Laporan**	**620.000.000**
		3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Karimun	1 Laporan	27.204.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	20.000.000
		3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab Karimun	1 Laporan	460.800.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	600.000.000
		3.26.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**		**1 Laporan**	**44.986.000**			**1 Laporan**	**130.000.000**
		3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Karimun	1 Unit	30.592.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Unit	100.000.000

		3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab Karimun	15 Unit	14.394.000	Pendapatan Asli Daerah		14 Unit	30.000.000
TOTAL PAGU ANGGARAN							**7.841.575.083**				**9.016.000.000**

BAB IV

P E N U T U P

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja (Renja) 2025 merupakan gabungan dari masing – masing bidang kerja yang ada pada Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun, yang dihimpun menjadi satu dan dituangkan dalam suatu Rencana Kerja. Semoga program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja Tahun 2025 dapat menjadi sumber dan pedoman kerja Dinas Pariwisata dalam menghadapi era globalisasi pada saat ini.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, untuk dapat dijadikan acuan dalam penetapan prioritas penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025. Untuk itu dapat membuka peluang bagi pelaku wisata dan pelaku ekonomi kreatif dalam meningkatkan kunjungan wisatawan serta meningkatkan kenyamanan bagi wisatawan, meningkatkan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Karimun.

Tanjung Balai Karimun, 29 Juli 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KARIMUN

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PARIWISATA
KARIMUN

MUHAMMAD YUNUS, SKM.,MM.Pub
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP 196803221989121001

L A M P I R A N

Pemerintah Kabupaten Karimun

RENCANA KERJA

2025

SEKRETARIAT DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Sasaran dan suatu program/kegiatan akan dapat dicapai secara efektif dan efisien bila telah dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. Rencana Kerja (Renja) merupakan rencana 1 (satu) tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai situai dan kondisi, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana.

Dengan tersusunnya Renja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam upaya mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 ini maka Sekeretariat Daerah Kabupaten Karimun mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan kedepan. Arah ini tentu saja merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra). Agar skala prioritas setiap program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun lebih jelas dan terukur.

Renja yang telah disusun ini tidak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami Renja ini dapat dijadikan skenario perencanaan pembangunan jangka menengah dan sekaligus sebagai acuan Rencana Kerja Tahunan bagi kita semua.

Tanjung Balai Karimun, 13 Januari 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
a.n. Bupati Karimun,
Pj. Sekretaris Daerah,

Djunaidy, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV-c
NIP 196606041990101001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 4
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 35
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 35
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 36
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 53
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 54
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 54
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 55
3.3. Penjabaran Program dan Kegiatan 73
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 75
BAB V PENUTUP 91

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan merupakan proses perumusan keputusan dari berbagai alternatif. Berasal dari data dan informasi faktual kemudian menjadi sumber untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Tujuan itu adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat; yang hanya dapat dicapai melalui tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang spesifik, terukur, dan tepat waktu.

Perencanaan merupakan tahapan yang penting untuk dilalui dalam sebuah proses pembangunan karena dalam praktiknya pembangunan yang akan dilakukan akan menemui berbagai hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat sebagai sasaran, maupun dari sisi di luar itu semua. Untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan oleh hambatan itulah maka perencanaan harus dilakukan sebagai sebuah tahap penting dalam proses pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 9 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B.

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasrakan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
d. Rumusan program/ kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah; dan
e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan perkeluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Tahun anggaran 2024 merupakan tahun evaluasi dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan RPJMD 2021-2026 serta digunakan sebagai dasar dalam rangka menyusun RKPD tahun 2025. Dalam dokumen Rencana Kerja memuat evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja serta pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur dalam waktu 1 (satu) tahun. Selain itu Rencana Kerja Sekretariat Daerah merupakan tanggung jawab Sekretaris Daerah dalam menyusun kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2022-2026 serta dokumen perencanaan lainnya.

Proses penyusunan Renja Perangkat daerah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja PD

   Persiapan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah dilakukan dengan :

   a. Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Nomor 57 Tahun 2024 Tanggal 8 Januari 2024 tentang pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun;
   b. Melaksanakan orientasi mengenai Renja untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renja Setda;
   c. Menyusun tata kala sebagai panduan kerja; dan
   d. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renja Setda.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD

   Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan Setda, Analisis Permasalahan, penelahaan dokumen Renstra Setda, Analisis Isu Strategis, dan Perumusan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja.

3. Penyusunan Rancangan Renja PD

   Rancangan Renja Setda adalah penyempurnaan Rancangan Awal Renstra Setda yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran Bupati Karimun Nomor 100/Baperlitbang/VI/1004/2021 Tanggal 4 Juni 2021 tentang Penyusunan RPJMD dan Renstra OPD Tahun 2022-2026.

4. Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD

   Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Setda dengan berpedoman pada Renstra Setda Tahun 2022-2026 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

5. Penetapan Renja PD

   Proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi dari masyarakat. Penyusunan RKPD disusun berdasarkan pada data statistik hasil pencapaian pembangunan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya yang nantinya akan dibawa dan dibahas dalam forum penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud dari pola perencanaan partisipasif. Dalam penyusunan RKPD prosesnya harus di integrasikan dengan prioritas pembangunan di provinsi maupun yang

ada di pusat, sehingga dalam pengembangan sistem demokrasi yang sehat serta peningkatan sistem pelayanan terhadap masyarakat maupun profesionalisme aparatur pemerintah akan terjalin dengan baik.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang. Sehingga dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun anggaran dalam mengoperasionalkan rencana kerja yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja dalam melaksanakan program kegiatan serta memfasilitasi dalam pemberian Hibah dan Bantuan Sosial lainnya, dan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan pegangan serta rujukan dalam menyusun program dan kegiatan di tahun anggaran 2025 yang akan datang dan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan dalam penyusunannya juga memperhatikan program maupun kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah. Rancangan akhir Renja Setda ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun setelah diverifikasi oleh Baperlitbang Kabupaten Karimun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun 2022–2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karimun tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nompr 10);
13. Peraturan Bupati Karimun Nomor 96 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 96);
14. Peraturan Bupati Karimun Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 86).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud ditetapkan Rencana Kerja agar Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur dari sejauh mana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sebagai upaya ke depan untuk :

1. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmionisasi antar perencanaan, penganggaran, serta harmonisasi antar perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dengan Dokumen Renstra Setda Tahun 2022-2026;
2. Terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung dengan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta menjamin adanya sustainability (kesinambungan) program yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra ke dalam Dokumen Renja.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan rencana kerja adalah agar dimilikinya dokumen perencanaan tahun anggaran 2025 yang akan menjadi arah dan pedoman atau acuan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karimun. Tujuan tersebut antara lain adalah:

1. Menjabarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022-2026 ke dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025, agar terwujud sinkronisasi perencanaan pembangunan yang berkesinambungan;
2. Menjabarkan Target Kinerja yang termuat dalam Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2022-2026 kedalam Target Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah;
3. Membangun komitmen, konsistensi dan kontinuitas perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan.

1.2. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja sebagai berikut :

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Penjabaran Program dan Kegiatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V

PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Rencana Strategis Sekretariat Daerah memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang dijadikan tolak ukur untuk menilai perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan. Renstra tersebut menjadi panduan Sekretariat Daerah selaku OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian di mutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dilakukan perubahan kembali dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Sekretariat Daerah melakukan Mapping dan pemetaan program kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renja mengacu pada aturan tersebut.

Sebelum penyusunan program dan kegiatan serta sub kegiatan Tahun 2025 terlebih dahulu dilakukan evaluasi Renja Tahun lalu untuk mengetahui sudah sejauh mana capaian keberhasilan sasaran, program dan kegiatan pada Perangkat Daerah, sehingga penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 sudah berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan tahun sebelumnya.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan renstra perangkat daerah, serta mengidentifikasi factor-faktor penghambat dan permasalahan yang dihadapi perangkat daerah serta factor-faktor keberhasilan atas capaian kinerja perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program,/ kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan.

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Bupati Karimun dalam penyusunan kebijakan daerah

dan pengkoordinasian administratip terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratip.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi setiap indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang relevan untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis instansi dan pada table 2.1.

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian target dan realisasi 2024 (%)	Target Renstra 2026	Capaian terhadap Target Rebstra 2026 (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda	Nilai AKIP Setda	76.25	73.71	97.00	76.50	87.30
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	Indek Akuntabilitas Kabupaten	73.50	75.98	103	74.00	92.70
		Pencapaian Nilai TEPRA Kabupaten	90 %	97.42	108	90%	98.10

Sumber : Data Perencanaan Sekretariat Daerah

Dari hasil pengukuran terhadap 3 indikator kinerja, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Target dengan capaian diatas 100 % sebanyak 2 indikator, yaitu:
   a. Indek Akuntabilitas Kabupaten.
   b. Pencapaian Nilai TEPRA Kabupaten.
2. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 1 indikator, yaitu:
   a. Nilai AKIP Setda.

Pada tahun 2024 Sekretariat Daerah telah melaksanakan 4 (Empat) program yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terdiri dari 3 (Tiga) Program Pendukung dan 1 (Satu) Program Penunjang.

Adapun 3 (Tiga) Program Pendukung Sekretariat Daerah pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program Perekonomian dan Pembangunan

3. Program Pengelolaan Perbatasan

Sedangkan 1 (Satu) Program Penunjang Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Analisis terhadap masing-masing program pendukung tersebut adalah:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Target pada program ini yaitu 3,825 Nilai dengan proporsi realisasi 3,237 Nilai Indikator programnya adalah Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan target 99,31% dengan proporsi realisasi 98.52% indikator Programnya Persentase Kelulusan Santri TPQ. Sehingga Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan kedua indikator target tersebut adalah sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah:

1) Administrasi Tata Pemerintahan indikator output kegiatannya Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.
2) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat indikator output kegiatannya Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.
3) Fasilitasi dan Koordinasi Hukum indikator output kegiatannya Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.
4) Fasilitasi Kerja Sama Daerah indikator output kegiatannya Jumlah Dokumen MoU. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

2. Program Perekonomian dan Pembangunan

Target pada program ini yaitu 100% dengan proporsi realisasi 100%. Indikator programnya adalah Persentase Rumusan Kebijakan yang diimplementasikan di Bidang Perekonomian dan target 82% dengan proporsi realisasi 82% dengan indikator Persentase Laporan Capaian Realisasi pada SISMONTEPRA. Sehingga Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan kedua indikator program tersebut sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah:

1) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian indikator output kegiatannya Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan di bidang Perekonomian. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

2) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan indikator output kegiatannya Jumlah Dokumen Capaian Realisasi pada SISMONTEPRA. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%
3) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa indikator output kegiatannya Jumlah dokumen Pengadaan OPD yang dilakukan dengan metode kompetitif
4) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam indikator output kegiatannya Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijana SDA. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%

3. Program Pengelolaan Perbatasan

Target pada program ini yaitu 7 Lokpri dengan proporsi realisasi target 7 Lokpri. Indikator Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah:

1) Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama indikator output kegiatannya Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%
2) Pelaksanaan Kewilayahan Perbatsan indikator output kegiatannya Jumlah Tanda Batas Wilayah negara yang dijaga dan dipelihara. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%
3) Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan indikator output kegiatannya Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%

Dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah juga didukung oleh program Penunjang lainnya yakni sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Target pada program ini yaitu 80 Nilai dengan proporsi realisasi 80 Nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah:

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah indikator output kegiatannya Jumlah Dokumen. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikator output kegiatannya Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah indikator output kegiatannya Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%
4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah indikator output kegiatannya Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 82%
5) Administrasi Umum Perangkat Daerah indikator output kegiatannya Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%
6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikator output kegiatannya Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 83%
7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikator output kegiatannya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%
8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikator output kegiatannya Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 85%
9) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah indikator output kegiatannya Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan operasional KDH dan WKDH. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%
10) Fasilitasi Keumahtanggan Sekretariat Daerah indikator output kegiatannya Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%
11) Penataan Organisasi indikator output kegiatannya Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%
12) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan indikator output kegiatannya Jumlah Laporan Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

Pada Tabel 2.1.1 digambarkan Evaluasi Pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2024 dan seterusnya. Tabel 2.1.1 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realiasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realiasasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*	*12*
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan										
4 01 01	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	100	80 Nilai	80 Nilai	100	
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	36 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100	7 Dokumen	21 Dokumen	58.33	
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangakat Daerah	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	50	PRK
4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	4 Dokumen	40	PRK

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realiasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realiasasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*	*12*
4 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dab Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	9 Laporan	60	PRK
4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	2 Laporan	34,51	PRK
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan PD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10200 Orang	1980 Orang	1980 Orang	1980 Orang	100	2040 Orang	5940 Orang	58,24	PRK
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	PRK
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	NA	NA	NA	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	25	PRK
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	PRK

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realiasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realiasasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*	*12*
	Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	40 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100	6 Laporan	22 Laporan	55	
4 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	NA	1 Dokumen	20	PRK
4 01 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	PRK
4 01 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	12 Laporan	60	PRK
4 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	PRK

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realiasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realiasasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*	*12*
4 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang pada SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	PRK
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian PD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	60	Umum
4 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	33,33	Umum
4 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	33,33	Umum
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	420 Orang	75 Orang	75 Orang	15 Orang	20	11 Orang	101 Orang	24,05	Umum
4 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan	375 Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Umum

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realiasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realiasasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*	*12*
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum PD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	100	10 Paket	10 Paket	100	Perlengkapan
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	106,6	15 Paket	30 Paket	100	Perlengkapan
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100	Umum
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	Umum
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	5 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100	0 Unit	1 Unit	20	Perlengkapan

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realiasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realiasasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*	*12*
	Operasional atau Lapangan	Lapangan yang disediakan									
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan	250 Unit	50 Unit	50 Unit	33 Unit	66	38 Unit	121 Unit	48,40	Perlengkapan
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	50 Unit	10 Unit	10 Unit	0 Unit	0	8 Unit	18 Unit	36	Perlengkapan
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	20	Umum
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	Umum
4 01 02 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8 Laporan	66,66	12 Laporan	32 Laporan	53,33	Perlengkapan

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realiasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realiasasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*	*12*
		Perlengkapan Kantor yang disediakan									
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36 Laporan	60	PRK
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100	6 Unit	7 Unit	85,71	Perlengkapan
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	38 Unit	38 Unit	38 Unit	38 Unit	100	24 Unit	38 Unit	63,16	Perlengkapan
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100	5 Unit	5 Unit	100	Perlengkapan

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realiasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realiasasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*	*12*
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	12 Unit	NA	0	3 Unit	12 Unit	25	Perlengkapan
4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100	2 Unit	4 Unit	50	Perlengkapan
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	120 Orang	24 Orang (2 x 12 Bulan)	24 Orang (2 x 12 Bulan)	24 Orang (2 x 12 Bulan)	100	24 Orang (2 x 12 Bulan)	72 Orang (2 x 12 Bulan)	60	PRK
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	60	Protokol

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realiasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realiasasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*	*12*
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Umum
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100	2 Orang	2 Orang	100	PRK
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang di sediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	60	Protokol
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang di sediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	60	Protokol
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang di sediakan	5 Paket	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Umum
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realiasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realiasasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*	*12*
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	25 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	15 Dokumen	60	Organisasi
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	8 Laporan	12 Laporan	60	Organisasi
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	60	Organisasi
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Organisasi
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Organisasi
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realiasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realiasasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*	*12*
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Fasilitasi Keprotokolan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100	Protokol
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100	Protokol
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	NA	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100	Protokol
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan										
5 06 02	Prog. Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan	7 Lokpri	7 Lokpri	7 Lokpri	7 Lokpri	100	7 Lokpri	7 Lokpri	100	
5 06 02 2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	33,33	
5 06 02 2.01 01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	1 Dokumen	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	Perbatasan KS

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realiasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realiasasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*	*12*
5 06 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Perbatasan KS
5 06 02 2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang dijaga dan dipelihara	2 Tanda Batas	2 Tanda Batas	2 Tanda Batas	2 Tanda Batas	100	2 Tanda Batas	2 Tanda Batas	100	
5 06 02 2.02 01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	112 Dokumen	17 Dokumen	20 Dokumen	14 Dokumen	100	20 Dokumen	51 Dokumen	45,54	Perbatasan KS
5 06 02 2.02 02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	29 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	120	5 Dokumen	16 Dokumen	55,17	Perbatasan KS
5 06 02 2.02 03	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang di jaga dan dipelihara	2 Dokumen	2 Dokumen	NA	NA	0	NA	2 Dokumen	100	Perbatasan KS
5 06 02 2.02 04	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang di jaga dan dipelihara	10 Dokumen	NA	NA	NA	NA	10	10	100	Perbatasan KS

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realiasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realiasasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*	*12*
5 06 02 2.02 05	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	60 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100	10 Laporan	30 Laporan	50	Perbatasan KS
5 06 02 2.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	40 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100	7 Dokumen	17 Dokumen	42,50	
5 06 02 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	35 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen	100	7 Dokumen	19 Dokumen	54,29	Perbatasan KS
5 06 02 2.03 02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	5 Laporan	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	Perbatasan KS
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan										
4 01 02	Prog. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	3,922	3,785	3,825	3,825	100	3,237	3,616	92,19	
		Persentase Kelulusan Santri TPQ	99,31%	99,31%	99,31%	99,31%	100	98,52%	99,04%	99,20	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realiasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realiasasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*	*12*
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	30 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100	6 Laporan	12 Laporan	40	
4 01 02 2.01 01	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Pemerintahan
4 01 02 2.01 02	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	30 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6 Dokumen	18 Dokumen	60	Pemerintahan
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Pemerintahan
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	180 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	100	36 Laporan	108 Laporan	72,99	
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	36 Dokumen	60	Kesra
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	36 Dokumen	60	Kesra

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realiasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realiasasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*	*12*
		Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas									
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB.	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	36 Dokumen	60	Kesra
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	9 Dokumen	60	
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang di susun	2400 Dokumen	440 Dokumen	460 Dokumen	460 Dokumen	100	561 Dokumen	1461 Dokumen	60,88	Hukum

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realiasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realiasasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*	*12*
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	14 Kasus	2 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	100	0 Kasus	5 Kasus	35,71	Hukum
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	300 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	100	14 Dokumen	134 Dokumen	44,67	Hukum
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen MoU	80 Dokumen	12 Dokumen	14 Dokumen	16 Dokumen	100	14 Dokumen	42 Dokumen	52,50	
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	80 Dokumen	12 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100	16 Dokumen	42 Dokumen	52,50	Perbatasan KS
4 01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	5 Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Perbatasan KS
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	5 Laporan	1 Laporan	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	20	Perbatasan KS
4 01 03	Prog. Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan yang diimplementasikan di Bidang Perekonomian	100%	100%	100%	98%	98	100%	100%	100	
		Persentase Laporan Capaian Realisasi pada SISMONTEPRA	85%	81%	82%	82%	100	77%	80%	90,59	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realiasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realiasasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*	*12*
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian	16 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	1 Dokumen	7 Dokumen	43,75	
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Perekonomian
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Perekonomian
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Perekonomian
4 01 03 2.01 05	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Jumlah analisa kelayakan investasi pembentukan BUMD.	1 Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perekonomian
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Capaian Realisasi pada SISMONTEPRA	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Adpem

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realiasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realiasasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*	*12*
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	Adpem
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	Adpem
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan OPD yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	500 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100	102 Dokumen	302 Dokumen	60,40	
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	170 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	100	30 Dokumen	110 Dokumen	64,71	PBJ
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	50 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100	10 Dokumen	30 Dokumen	60,00	PBJ
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	51 Orang	51 Orang	51 Orang	51 Orang	100	51 Orang	51 Orang	100	PBJ
4 01 03 2.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan SDA	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realiasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realiasasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*	*12*
04											
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Keautanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Adpem
4 01 03 2.04 aa	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Adpem

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realiasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realiasasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*	*12*
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Adpem

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil capaian kinerja dalam analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dan indikatornya. Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun pada Tabel 2.2.1 dipaparkan target Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022-2026. Uraian analisis kinerja pelayanan OPD dapat diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2. 1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2022 s/d 2026
Sekretariat daerah Kabupaten Karimun

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra OPD					Realisasi		Proyeksi	Catatan
			2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*			*9*	*10*
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda	Nilai Evaluasi AKIP Setda	76,00	76,15	76,25	76,35	76,50	65.19	73.71	76,35	Perencanaan Keuangan
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	Indeks Akuntabilitas Kabupaten	73	73,25	73,5	73,75	74	75,43	75.98	73,75	Organisasi
		Pencapaian Nilai TEPRA Kabupaten	81%	82%	90%	90%	90%	87%	97.42%	90%	Adpem

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/hal dikatakan termasuk isu penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Beberapa karakteristik lain suatu isu penting di Sekretariat Daerah adalah kondisi/hal tersebut bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil pembobotan terhadap isu-isu yang ditemui di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, disimpulkan Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pelaporan Tata Kelola Pemerintahan;
2. Akuntabilitas Kinerja;
3. Optimalisasi Kerjasama Daerah;
4. Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Optimalisasi Pelaporan Pembangunan;
6. Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
7. Optimalisasi Pelaporan Kinerja Setda;
8. Kebijakan Pengelolaan BUMD.

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas guna mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan sasaran misi RPJMD, Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu mengatasi dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan fasilitasi dan koordinasi dalam menghasilkan rumusan kebijakan umum yang berkualitas dan akuntabel. Sehingga diperlukan keterlibatan pelaku pembangunan secara partisipatif melalui peningkatan kualitas peningkatan kapasitas SDM seluruh Bagian lingkup Sekretariat Daerah, pemantapan kelembagaan bagian ditunjang oleh sarana dan prasarana kerja yang berkontribusi secara optimal dalam membangun etos kerja yang prima, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu Rancangan Awal RKPD adalah proses membandingkan Rancangan Awal RKPD Sekretariat Daerah Tahun 2024 dengan Hasil Analisis Kebutuhan Sekretariat Daerah Tahun 2024. Hasil Reviu dapat dilihat di Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
4 01 01	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Nilai	44.879	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Nilai	39.609
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	7 Dokumen	300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	7 Dokumen	226
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	93
4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	50	Koordinasi dan Penyusunan SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD n	2 Dokumen	20
4 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	93
4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	33.317	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	24.833

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2100 Orang/Bulan	32.704	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2100 Orang/Bulan	22.958
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	400	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	153	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.851
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	60	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	24
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	8 Laporan	225	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	8 Laporan	421
4 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	17	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0
4 01 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	31	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	104

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
4 01 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	95	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	126
4 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	42	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	134
4 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	40	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	56
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian PD	1 Laporan	320	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian PD	1 Laporan	0
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	50	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0
4 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengloahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	42	Pendataan dan Pengloahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0
4 01 01 2.05 05	Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	43	Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang	100	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang	0

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
4 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	85 Orang	85	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	0
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum PD	1 Laporan	955	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum PD	1 Laporan	0
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	85	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	0
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	182	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	0
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	198	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	490	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	919
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	815	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	0
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	41	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	311	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	0

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	463	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	1 Laporan	1.689	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	1 Laporan	6.269
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	300	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	100
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.811
4 01 02 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	208	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.694
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	681	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	664
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.629	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.585
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	159	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	359

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	231	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	684
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	113	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	540
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit	444	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit	0
4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	682	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	0
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH	1 Laporan	1.054	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH	1 Laporan	1.866
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang 12 Bulan	174	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang 12 Bulan	966
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	160	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	0

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	120	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	300
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang 12 Bulan	600	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang 12 Bulan	600
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda	1 Laporan	2.243	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda	1 Laporan	1.250
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.415	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	725
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	828	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	525
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	0	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	0
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	669	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	480
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	234	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	100

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	83	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	180
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	218	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	100
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	84	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	50
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	50	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	50
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1.663	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1.655
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	2 Laporan	700	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	2 Laporan	522
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3 Laporan	863	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3 Laporan	936
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	100	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	197
5 06 02	Prog. Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan	7 Lokpri	793	Prog. Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan	7 Lokpri	235

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5 06 02 2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	1 Dokumen	73	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	2 Dokumen	65
5 06 02 2.01 01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	0 Dokumen	0	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	1 Dokumen	0
5 06 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen	73	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen	0
5 06 02 2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang dijaga dan dipelihara	2 Tanda Batas	570	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang dijaga dan dipelihara	2 Tanda Batas	235
5 06 02 2.02 01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	25 Dokumen	170	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	20 Dokumen	140
5 06 02 2.02 02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	7 Dokumen	150	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	5 Dokumen	95
5 06 02 2.02 03	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	2 Dokumen	75	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	2 Dokumen	0
5 06 02 2.02 04	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	10 Dokumen	75	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	10 Dokumen	0

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5 06 02 2.02 05	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/ Kota	15 Laporan	100	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	15 Laporan	0
5 06 02 2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	8 Dokumen	150	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	8 Dokumen	0
5 06 02 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	7 Dokumen	100	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	7 Dokumen	0
5 06 02 2.03 02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Laporan	50	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Laporan	0
4 01 02	Prog. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	3.917 Nilai	1.751	Prog.Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	3.917 Nilai	3.353
		Persentase Kelulusan Santri TPQ	99,31%	26.337		Persentase Kelulusan Santri TPQ	99,31%	19.919
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	6 Laporan	764	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	6 Laporan	2.178
4 01 02 2.01 01	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	59	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1.730
4 01 02 2.01 02	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	6 Dokumen	395	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	6 Dokumen	50

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	310	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	398
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	36 Laporan	26.337	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	36 Laporan	19.919
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen	17.101	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen	11.695
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	12 Dokumen	6.597	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	12 Dokumen	5.055
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan	12 Dokumen	2.639	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata,	12 Dokumen	3.168

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3 Dokumen	777	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3 Dokumen	1.080
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	252	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	300
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	273	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	500
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen	252	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen	280
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen MoU	18 Dokumen	210	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen MoU	16 Dokumen	95
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	18 Dokumen	100	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	14 Dokumen	95
4 01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	50	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	0
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	60	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	0

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
4 01 03	Prog. Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan yang diimplementasikan di Bidang Perekonomian	100%	1.766	Prog. Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan yang diimplementasikan di Bidang Perekonomian	100%	5.084
		Persentase Laporan Capaian Realisasi pada SISMONTEPRA	100%	302		Persentase Laporan Capaian Realisasi pada SISMONTEPRA	100%	280
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian	3 Dokumen	588	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian	3 Dokumen	3.080
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	288	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	850
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	150	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	500
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	150	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1.730
4 01 03 2.01 05	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	0 Dokumen	0	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	0 Dokumen	0
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Capaian Realisasi pada SISMONTEPRA	1 Dokumen	302	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Capaian Realisasi pada SISMONTEPRA	1 Dokumen	280
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	137	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	105

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	70	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	100
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	95	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	75
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan OPD yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	100 Dokumen	1.029	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan OPD yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	100 Dokumen	1.779
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	30 Dokumen	802	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	30 Dokumen	1.141
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	10 Dokumen	173	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	10 Dokumen	250
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	51 Orang	54	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	51 Orang	378
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan SDA	1 Dokumen	149	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan SDA	1 Dokumen	225

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	50	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	125
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	50	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	50

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	49	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	50

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025, Program /Kegiatan /Sub Kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan terkait Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan oleh Bagian Perlengkapan. Usulan tersebut dapat dilihat dari Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Karimun

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kabupaten Karimun	Jumlah Laporan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	80 Paket Hibah	Paket Hibah berupa Hibah Uang dan Hibah Barang
2	Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Karimun	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket Hibah	Paket Hibah berupa Hibah Barang

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah (PD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah yaitu permasalahan pada kebijakan, program dan kebutuhan teknis operasional pada kegiatan.

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Agenda Reformasi Birokrasi yang mencakup 8 Area Perubahan yang meliputi Kelembagaan, Ketatalaksanaan, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-Undangan, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Public, "*Mind Set and Culture*" masih belum terlaksana. dengan baik.
2. Kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan

Dalam upaya pemenuhan kebijakan Nasional berikut ini adalah Tabel 3.1 Pengelompokan Sub Kegiatan berdasarkan Prioritas Nasional dan Daerah

.

Tabel 3.1

Pengelompokan Sub Kegiatan berdasarkan Prioritas Nasional dan Daerah

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Perioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4 01	SEKRETARIAT DAERAH								
4 01 01	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kabupaten Karimun	80 Nilai	44.879	PAD			
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	7 Dokumen	300	PAD			
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	100	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKASKPD	Kabupaten Karimun	2 Dokumen	50	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	Kabupaten Karimun	3 Laporan	100	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Perioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja SKPD							
4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Karimun	1 Laporan	50	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan PD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	33.317	PAD			
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Karimun	2040 Orang (170 x 12 Bulan)	22.704	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	400	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	153	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	60	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Perioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Kabupaten Karimun	8 Laporan	225	PAD			
4 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	17	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah danHasil Koordinasi PenilaianBarang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	31	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada	Kabupaten Karimun	4 Laporan	95	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	42	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang pada SKPD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	40	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian PD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	320	PAD			
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Karimun	1 Paket	50	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Perioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
								Berkualitas dan Berdaya Saing	
4 0 0 2 0 1 2.05	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	42	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 0 0 2 0 1 5.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	43	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PesertaJumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Karimun	85 Orang	100	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Karimun	75 Orang	85	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum PD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	955	PAD			
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Karimun	10 Paket	85	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Karimun	15 Paket	182	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Perioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Paket	198	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	490	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Karimun	1 Laporan	815	PAD			
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Unit	41	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Karimun	50 Unit	311	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Karimun	10 Unit	463	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	Kabupaten Karimun	1 Laporan	1.689	PAD			
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Karimun	1 Laporan	300	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Perioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	500	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 02 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	12 Laporan	208	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	12 Laporan	681	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Karimun	1 Laporan	1.629	PAD			
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Karimun	7 Unit	159	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Karimun	38 Unit	231	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Karimun	5 Unit	113	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Perioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Karimun	12 Unit	444	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Kabupaten Karimun	4 Unit	682	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH	Kabupaten Karimun	1 Laporan	1.054	PAD			
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Karimun	24 Orang (2 x 12 Bulan)	174	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Paket	160	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Karimun	2 Orang	120	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional	Kabupaten Karimun	2 Orang/ 12 Bulan	600	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Perioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						Berkualitas dan Berdaya Saing	
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda	Kabupaten Karimun	1 Laporan	2.243	PAD			
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Paket	1.415	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Paket	828	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Paket	0	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	669	PAD			
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kabupaten Karimun	5 Dokumen	234	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksanai	Kabupaten Karimun	4 Laporan	83	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Perioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karimun	2 Laporan	218	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	84	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	1.663	PAD			
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kabupaten Karimun	2 Laporan	700	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Karimun	3 Laporan	863	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kabupaten Karimun	4 Laporan	100	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Perioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5 06 02	Prog. Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan	Kabupaten Karimun	7 Lokpri	793	PAD			
5 06 02 2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	Kabupaten Karimun	2 Dokumen	73	PAD			
5 06 02 2.01 01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	-	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
5 06 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana AksiPembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	73	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
5 06 02 2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang dijaga dan dipelihara	Kabupaten Karimun	2 Tanda Batas	570	PAD			
5 06 02 2.02 01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Kabupaten Karimun	20 Dokumen	170	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
5 06 02 2.02 02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Kabupaten Karimun	5 Laporan	150	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
5 06 02 2.02 03	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijagadan Dipelihara	Kabupaten Karimun	2 Dokumen	75	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Perioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5 06 02 2.02 04	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	Kabupaten Karimun	10 Dokumen	75	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
5 06 02 2.02 05	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Kabupaten Karimun	10 Laporan	100	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
5 06 02 2.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	Kabupaten Karimun	8 Dokumen	150	PAD			
5 06 02 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Kabupaten Karimun	7 Dokumen	100	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
5 06 02 2.03 02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	50	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 02	Prog. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kabupaten Karimun	3,891	28.088	PAD			
		Persentase Kelulusan Santri TPQ	Kabupaten Karimun	99,31%					

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Perioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	Kabupaten Karimun	6 Laporan	764	PAD			
4 01 02 2.01 01	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	59	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 02 2.01 02	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kabupaten Karimun	6 Dokumen	395	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	310	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten Karimun	36 Laporan	26.337	PAD			
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kabupaten Karimun	12 Dokumen	17.101	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan	Kabupaten Karimun	12 Dokumen	6.597	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Perioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Sipil,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Pengendalian Penduduk dan KB							
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kabupaten Karimun	12 Dokumen	2.639.	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kabupaten Karimun	3 Dokumen	777	PAD			
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kabupaten Karimun	480 Dokumen	252	PAD/Pajak Rokok	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kabupaten Karimun	3 Kasus	273	PAD/Pajak Rokok	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kabupaten Karimun	60 Dokumen	252	PAD/Pajak Rokok	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen MoU	Kabupaten Karimun	16 Dokumen	210	PAD			

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Perioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kabupaten Karimun	16 Dokumen	100	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kabupaten Karimun	1 Laporan	60	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 03	Prog. Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan yang diimplementasikan di Bidang Perekonomian	Kabupaten Karimun	100%	2.068	PAD			
		Persentase Laporan Capaian Realisasi pada SISMONTEPRA	Kabupaten Karimun	83%		PAD			
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian	Kabupaten Karimun	4 Dokumen	588	PAD			
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	288	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kabupaten Karimun	1 Laporan	150	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Perioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	150	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 03 2.01 05	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	-	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Capaian Realisasi pada SISMONTEPRA	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	302	PAD			
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	137	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	70	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	95	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan OPD yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	Kabupaten Karimun	100 Dokumen	1.029	PAD			
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Karimun	30 Dokumen	802	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Perioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kabupaten Karimun	10 Dokumen	173	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Karimun	51 Orang	54	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan SDA	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	149	PAD			
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Perioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian							
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	49	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
				Total Pagu	75.828.6 76.694				

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan suatu target yang ditetapkan dan hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dalam hal ini tujuan Sekretariat Daerah adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
2. Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Akuntabel.

Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas melakukan Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tata Laksana serta memberikan Pelayanan Administratif kepada seluruh Perangkat Daerah, bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Baik (*Good Governance*) sehingga dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karimun sehingga perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah tidak boleh bertentangan dengan dan harus mendukung tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2022-2026.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Karimun yakni Misi ke-5 RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2022-2026 yaitu *Mewujudkan Birokrasi yang Professional dan Unggul atau Berkeadilan dalam Pelayanan Publik*.

Berdasarkan Misi Kabupaten Karimun yang didukung pencapaiannya oleh Sekretariat Daerah, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda;
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah.

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 dapat dilihat dari Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah sesuai dengan perubahan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah di dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2022-2026.

Tabel 3.2
Rumusan Tujuan dan Sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2024	Target 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	3,51	3,55
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda	Nilai AKIP Setda	73.71	76,35
2	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Akuntabel		Nilai LPPD Kabupaten	3.9613	4,100
			Nilai RB	77.85	64,00
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	Indeks Akuntabilitas Kabupaten	75.98	73,75
			Pencapaian Nilai TEPRA Kabupaten	97.42%	90%

3.3. Penjabaran Program dan Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2025 dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Sekretariat Daerah akan melaksanakan 4 Program dan 23 Kegiatan.

Program dan Kegiatan beserta Indikator Program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat melaksanakan 12 Kegiatan dengan Total Pagu Anggaran Rp. 44.879.000.000,- (*Empat Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah*).
2. Program Pengelolaan Perbatasan dengan Indikator Kinerja Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan melaksanakan 3 Kegiatan dengan Total Pagu Anggaran Rp. 793.000.000,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah*).
3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Indikator Kinerja Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Persentase Kelulusan Santri TPQ melaksanakan 4 Kegiatan dengan Total Pagu Anggaran Rp.28.088.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah*).
4. Program Perekonomian dan Pembangunan dengan Indikator Kinerja Persentase Rumusan Kebijakan yang diimplementasikan di Bidang Perekonomian dan Persentase Laporan Capaian Realisasi pada SISMONTEPRA melaksanakan 4 Kegiatan dengan Total Pagu Anggaran Rp. 2.068.676.694,- (*Dua Milyar Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah pada tahun rencana. Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah, dan Pendanaan Daerah merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan.

Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah. Program/Kegiatan baik Strategis maupun Operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

Penjabaran Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4 01	SEKRETARIAT DAERAH								
4 01 01	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kabupaten Karimun	80 Nilai	44.879	PAD		80 Nilai	44.968
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	7 Dokumen	300	PAD		8 Dokumen	310
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	100	PAD		2 Dokumen	110
4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKASKPD	Kabupaten Karimun	2 Dokumen	50	PAD		2 Dokumen	50
4 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kabupaten Karimun	3 Laporan	100	PAD		3 Laporan	100

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Realisasi Realisasi Kinerja SKPD							
4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Karimun	1 Laporan	50	PAD		1 Laporan	50
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan PD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	33.317	PAD		1 Laporan	33.354
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Karimun	2100 Orang (175 x 12 Bulan))	32.704	PAD		2160 Orang (180 x 12 Bulan)	32.741
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	400	PAD		1 Dokumen	400
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	153	PAD		1 Dokumen	153
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	60	PAD		1 Laporan	60
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Kabupaten Karimun	8 Laporan	225	PAD		8 Laporan	225

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	17	PAD		1 Dokumen	17
4 01 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah danHasil Koordinasi PenilaianBarang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	31	PAD		1 Laporan	31
4 01 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada	Kabupaten Karimun	4 Laporan	95	PAD		4 Laporan	95
4 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	42	PAD		1 Laporan	42
4 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang pada SKPD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	40	PAD		1 Laporan	40
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian PD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	320	PAD		1 Laporan	327
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Karimun	1 Paket	50	PAD		1 Paket	50
4 0 0 2 0 1 2.05	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	42	PAD		1 Dokumen	47

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4 0 0 2 0 1 5.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	43	PAD		1 Dokumen	45
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PesertaJumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Karimun	90 Orang	100	PAD		95 Orang	100
4 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Karimun	85 Orang	85	PAD		85 Orang	85
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum PD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	955	PAD		1 Laporan	958
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Karimun	10 Paket	85	PAD		10 Paket	85
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Karimun	15 Paket	182	PAD		15 Paket	182
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Paket	198	PAD		1 Paket	198
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	490	PAD		1 Laporan	493

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Karimun	1 Laporan	815	PAD		1 Laporan	819
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Unit	41	PAD		1 Unit	41
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Karimun	50 Unit	311	PAD		50 Unit	313
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Karimun	10 Unit	463	PAD		10 Unit	465
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	Kabupaten Karimun	1 Laporan	1.689	PAD		1 Laporan	1.690
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Karimun	1 Laporan	300	PAD		1 Laporan	300
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	500	PAD		1 Laporan	500
4 01 02 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	12 Laporan	208	PAD		12 Laporan	209

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	12 Laporan	681	PAD		12 Laporan	681
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Karimun	1 Laporan	1.629	PAD		1 Laporan	1.636
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Karimun	7 Unit	159	PAD		7 Unit	160
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Karimun	38 Unit	231	PAD		38 Unit	232
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Karimun	5 Unit	113	PAD		5 Unit	114
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Karimun	12 Unit	444	PAD		12 Unit	446
4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Kabupaten Karimun	4 Unit	682	PAD		4 Unit	684

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH	Kabupaten Karimun	1 Laporan	1.054	PAD		1 Laporan	1.054
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Karimun	24 Orang (2 x 12 Bulan)	174	PAD		24 Orang (2 x 12 Bulan)	174
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Paket	160	PAD		1 Paket	160
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Karimun	2 Orang	120	PAD		2 Orang	120
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Karimun	2 Orang/ 12 Bulan	600	PAD		2 Orang/ 12 Bulan	600
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda	Kabupaten Karimun	1 Laporan	2.243	PAD		1 Laporan	2.243
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Paket	1.415	PAD		1 Paket	1.415

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Paket	828	PAD		1 Paket	828
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kabupaten Karimun	-	0	PAD		-	0
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	669	PAD		1 Dokumen	672
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kabupaten Karimun	5 Dokumen	234	PAD		5 Dokumen	235
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksanai	Kabupaten Karimun	4 Laporan	83	PAD		4 Laporan	84
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karimun	2 Dokumen	218	PAD		2 Dokumen	219
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	84	PAD		1 Dokumen	84

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50	PAD		1 Dokumen	50
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	1.663	PAD		1 Laporan	1.680
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kabupaten Karimun	2 Laporan	700	PAD		2 Laporan	715
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Karimun	3 Laporan	863	PAD		3 Laporan	865
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kabupaten Karimun	4 Laporan	100	PAD		4 Laporan	100
5 06 02	Prog. Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan	Kabupaten Karimun	7 Lokpri	793	PAD		7 Lokpri	797
5 06 02 2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	73	PAD		1 Dokumen	75
5 06 02 2.01 01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Kabupaten Karimun	-	0	PAD		-	0
5 06 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana AksiPembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	73	PAD		1 Dokumen	75

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 06 02 2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang dijaga dan dipelihara	Kabupaten Karimun	2 Tanda Batas	570	PAD		2 Tanda Batas	570
5 06 02 2.02 01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Kabupaten Karimun	25 Dokumen	170	PAD		30 Dokumen	170
5 06 02 2.02 02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Kabupaten Karimun	7 Dokumen	150	PAD		7 Dokumen	150
5 06 02 2.02 03	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijagadan Dipelihara	Kabupaten Karimun	2 Dokumen	75	PAD		2 Dokumen	75
5 06 02 2.02 04	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	Kabupaten Karimun	10 Dokumen	75	PAD		10 Dokumen	75
5 06 02 2.02 05	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Kabupaten Karimun	15 Laporan	100	PAD		15 Laporan	100
5 06 02 2.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	Kabupaten Karimun	8 Dokumen	150	PAD		8 Dokumen	152

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 06 02 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Kabupaten Karimun	7 Dokumen	100	PAD		7 Dokumen	100
5 06 02 2.03 02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	50	PAD		1 Laporan	52
4 01 02	Prog. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kabupaten Karimun	3.917	28.088	PAD		3,922	28.093
		Persentase Kelulusan Santri TPQ	Kabupaten Karimun	99,31%				99,31%	
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	Kabupaten Karimun	6 Laporan	764	PAD		6 Laporan	767
4 01 02 2.01 01	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	59	PAD		1 Dokumen	60
4 01 02 2.01 02	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kabupaten Karimun	6 Dokumen	395	PAD		6 Dokumen	396
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	310	PAD		1 Dokumen	311
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten Karimun	36 Laporan	26.337	PAD		36 Laporan	26.336

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kabupaten Karimun	12 Dokumen	17.101	PAD		12 Dokumen	17.065
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Pengendalian Penduduk dan KB	Kabupaten Karimun	12 Dokumen	2.639	PAD		12 Dokumen	2.649
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,	Kabupaten Karimun	12 Dokumen	6.597	PAD		12 Dokumen	6.622

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kearsipan, Trantibum Linmas							
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kabupaten Karimun	3 Dokumen	777	PAD		3 Dokumen	780
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kabupaten Karimun	500 Dokumen	252	PAD/Pajak Rokok		500 Dokumen	253
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kabupaten Karimun	3 Kasus	273	PAD/Pajak Rokok		3 Kasus	274
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kabupaten Karimun	60 Dokumen	252	PAD/Pajak Rokok		60 Dokumen	253
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen MoU	Kabupaten Karimun	18 Dokumen	210	PAD		20 Dokumen	210
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kabupaten Karimun	18 Dokumen	100	PAD		20 Dokumen	100
4 01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50	PAD		1 Dokumen	50
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kabupaten Karimun	1 Laporan	60	PAD		1 Laporan	60
4 01 03	Prog. Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan yang diimplementasikan di Bidang Perekonomian	Kabupaten Karimun	100%	2.068	PAD		100%	2.076

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Laporan Capaian Realisasi pada SISMONTEPRA	Kabupaten Karimun	84%		PAD		85%	
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian	Kabupaten Karimun	3 Dokumen	588	PAD		3 Dokumen	590
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	288	PAD		1 Dokumen	290
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kabupaten Karimun	1 Laporan	150	PAD		1 Laporan	150
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	150	PAD		1 Dokumen	150
4 01 03 2.01 05	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kabupaten Karimun	-	0	PAD		-	0
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Capaian Realisasi pada SISMONTEPRA	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	302	PAD		1 Dokumen	302
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	137	PAD		1 Dokumen	137

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pembangunan Daerah							
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	70	PAD		1 Laporan	70
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	95	PAD		1 Laporan	95
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan OPD yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	Kabupaten Karimun	100 Dokumen	1.029	PAD		100 Dokumen	1.033
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Karimun	30 Dokumen	802	PAD		30 Dokumen	806
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kabupaten Karimun	10 Dokumen	173	PAD		10 Dokumen	173
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Karimun	51 Orang	54	PAD		51 Orang	54

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan SDA	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	149	PAD		1 Dokumen	151
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50	PAD		1 Dokumen	50
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50	PAD		1 Dokumen	50

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	49	PAD		1 Dokumen	51
				Total Pagu	75.828.676.694				75.934.000.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 dijabarkan ke dalam 4 Program dan 23 Kegiatan dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 75.828.676.694,- (*Tujuh Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*). Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

Agar pelaksanaan pembangunan bisa memperoleh hasil yang maksimal khususnya yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, maka tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang ada dan memperhatikan sinergitas antar dengan Perangkat Daerah lain. Oleh karena itu koordinasi dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan sistematik menjunjung tinggi produktivitas, disiplin, bekerja efisien dan efektif.

Dengan demikian, hasil-hasil data perencanaan kegiatan pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat menuju Karimun yang ber-Azam Dipasak ber-Amanah Ditegak

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
a.n. Bupati Karimun,
Pj. Sekretaris Daerah,

Djunaidy, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV-c
NIP 196606041990101001

KARIMUN

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

RENCANA KERJA TAHUN 2025

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARIMUN

Alamat : Jalan Canggai Puteri, Tebing - Karimun, Kepulauan Riau 29631
Telp/Faksimile (0777) 323837 / (0777) 328757 Pos-el : dprd_karimun@telkom.net

Dipindai dengan CamScanner

Rencana kerja tahun 2024 ini disusun berdasarkan dinamika perubahan lingkungan strategis, RKPD Kabupaten Karimun dan Provinsi Kepulauan Riau, maupun Rencana Kerja Pemerintah secara nasional serta rencana strategis Sekretariat DPRD serta Rencana Kerja atau Program Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Karimun, dan diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Karimun.

Disamping itu diharapkan semua bagian di lingkungan Sekretariat DPRD dan stackholders terkait lainnya akan tercipta kesatuan gerak dan langkah dalam upaya mendukung peningkatan kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan yang pada akhirnya menciptakan peningkatan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD.

Disadari sepenuhnya rencana kerja ini jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kelemahan serta kekurangan, saran dan pemikiran dari semua unsur yang kompeten sangat diharapkan untuk penyempurnaanya, atas partisipasi dan masukannnya diucapkan terima kasi

SEKRETARIAT DPRD KAB. KARIMUN
Sekretaris DPRD,

EDDIE MUAR, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.C
NIP. 196908092000031005

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR : 23.a TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan diperlukan perencanaan kinerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Sekretaris Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun tentang Rencan Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

4. Peraturan Bupati Karimun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun 2021-2026

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tebing
Pada tanggal : 13 Maret 2024

SEKRETARIAT DPRD KAB. KARIMUN
Sekretaris DPRD,

EDDIE MUAR, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.C
NIP. 196908092000031005

SALINAN Keputusan disampaikan kepada Yth :
Bupati Karimun
Pimpinan DPRD Karimun
Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun
Kepala BPPKAD Kabupaten Karimun
Kepala Bagian Ortal SETDA Kabupaten Karimun

DAFTAR ISI

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

			Hal
PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
SK PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH.....			iv
BAB I	**:**	**PENDAHULUAN .....**	**5**
		1.1. Latar Belakang.....	5
		1.2. Landasan Hukum.....	5
		1.3. Maksud danTujuan	
		1.4. Sistematika Penulisan	
BAB II	**:**	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....**	
		2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	
		2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	
		2.3. Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	
		2.4. Review Rancangan Awal RKPD.....	
		2.5. Review Usulan Program/Kegiatan Masyarakat	
BAB III	**:**	**TUJAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....**	
		3.1. Telaahan Kebijkan Nasional.....	
		3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	
		3.3. Program dan Kegiatan.....	
BAB IV	**:**	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....**	
		4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	
BAB V	**:**	**PENUTUP.....**	

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan sebuah proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh pemerlu layanan.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD adalah dokumen perencanaan untuk periode tahunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pendukung dalam upaya memfasilitasi pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Karimun yang disusun berdasarkan rencana strategis 2021-2026, program kerja atau agenda tahunan DPRD tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Karimun tahun 2025.

Disamping itu penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan periode sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan pelayanan yang dihadapi dan mengakomodasikan serta mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karimun serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan dewan.

Rencana kerja Sekretariat DPRD dilengkapi dan berisikan uraian program dan kegiatan serta kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2025, diharapkan akan dapat mewujudkan pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas dalam mendukung peningkatan kinerja dan pencapaian misi kelembagaan DPRD Kabupaten Karimun sebagai mitra pemerintah daerah yang terpercaya dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan pemerintah daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Rencana Kerja Sekretraiat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini secara spesifik terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten;

2. Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang TahapanTata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 30)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(Berita Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7),
22. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun dimaksudkan untuk memberikan landasan dan acuan bagi para penyelenggara pemerintahan dan para pelaksana pada Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar berjalan secara sistematik sehingga tercipta kinerja yang efektif dan efisien.

1.2.1. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun adalah menjabarkan secara lebih teknis tujuan dan sasaran program kegiatan serta sub kegiatan prioritas perangkat daerah yang mendukung visi pembangunan Kabupaten Karimun serta keterpaduan perencanaan secara kongkrit, meliputi:

1. Untuk menjabarkan rencana strategis Sekretariat DPRD Periode 2021-2026 ke dalam rencana operasional tahunan perangkat daerah.
2. Untuk menjaga adanya kesesuaian/keselarasan program/ kegiatan/ sub kegiatan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan RKPD.
3. Untuk dijadikan sebagai bahan dan tolak ukur dalam evaluasi kinerja dalam merealisasikan program, kegiatan, sub kegiatan prioritas sehingga diketahui hasil (output) dan manfaat (outcome) kegiatan prioritas dimaksud.
4. Sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk penetapan rencana kerja tahun anggaran berikutnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Sistematika penyajian rencana kerja Sekretariat DPRD Karimun tahun 2025 ini, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan memuat latar belakang penyusunan renja, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi rencana kerja, maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja serta sistematika penulisan

Bab II : Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun lalu yang memuat penjelasan dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan,Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,Review terhadap Rancangan Awal

RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III : Tujuan, sasaran program dan kegiatan menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja, serta Program dan Kegiatan.

Bab IV : Penutup yang memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, selain itu memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

2. HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2023

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sampai dengan Tahun 2023, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD, Penelaahan Usulan Program Kegiatan kemasyarakatan

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2024 mengacu pada APBD tahun 2024 yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Sekretariat DPRD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, Berikut ini realisasi belanja Sekretraiat DPRD selama periode tahun 2020–2021, disajikan dalam grafik berikut:

Grafik II.1
Realisasi Pertumbuhan Belanja OPD Tahun 2021-2023

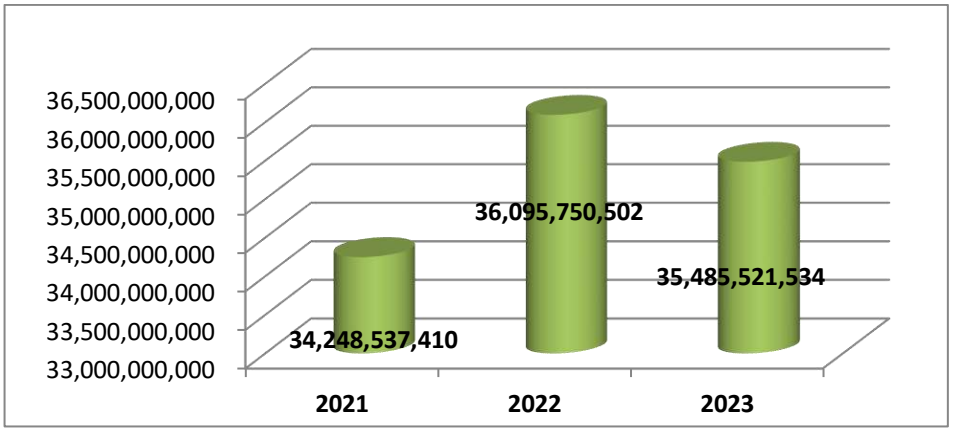

Review hasil evaluasi pelaksanaan rencna kerja Sekretariat DPRD tahun 2023 dan realisasi rencana strategis perangkat daerah yang mengacu pada laporan kinerja dan atau realisasi APBD pada Sekretariat DPRD disajikan sebagai berikut,

Untuk menggambarkan capaian hasil pelaksanaaan rencana kerja dan pencapaian renstra lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut,

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD (Sampai Dengan Tahun 2024)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan dan Keluaran s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun berjalan 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.02	**SEKRETRIAT DPRD**									
7.1.2.15	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.5	2.75	3.5	2.68	76.57	3.5	2.97	85.05
7.1.2.15.02	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesain Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	75
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	75

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3 Dokumen	75
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3 Dokumen	75
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3 Dokumen	75
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	3 Laporan	75
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	3 Laporan	75
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Keuangan Perangkat Daerah	3.5	2.75	3.5	2.68	76.57	3.5	-	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang	43 Orang	43 Orang	43 Orang	-	43 Orang	43 Orang	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3 Dokumen	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3 Dokumen	75
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	75
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Pelayanan Administarsi BMD Pada Perangkat Daerah	3.5	2.75	3.5	2.68	76.57	3.5	-	-
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.5	2.75	3.5	2.68	76.57	3.5	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	4 Paket	100
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-	-	-	-	-	-	-	-

	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100	20 Orang	20 Orang	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.5	2.75	3.5	2.68	76.57	3.5	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	100

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	100
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang efisien	3.5	2.75	3.5	2.68	76.57	3.5	-	-
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-

	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket -	3 Paket	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Paket	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.5	2.75	3.5	2.68	76.57	3.5	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan (50 Paket Pengiriman)	1 Laporan (50 Paket Pengiriman)	1 Laporan (50 Paket Pengiriman)	1 Laporan (50 Paket Pengiriman)	100	1 Laporan (50 Paket Pengiriman)	3 Laporan (50 Paket Pengiriman)	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan (4 Jenis Tagihan)	1 Laporan (4 Jenis Tagihan)	1 Laporan (4 Jenis Tagihan)	1 Laporan (4 Jenis Tagihan)	100	1 Laporan (4 Jenis Tagihan)	3 Laporan (4 Jenis Tagihan)	100

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.5	2.75	3.5	2.68	76.57	3.5	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Kendaraan	15 Kendaraan	15 Kendaraan	15 Kendaraan	100	15 Kendaraan	15 Kendaraan	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100	3 Unit	3 Unit	100
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit (1350 M2)	3 Unit (1350 M2)	3 Unit (1350 M2)	3 Unit (1350 M2)	100	3 Unit (1350 M2)	3 Unit (1350 M2)	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Indeks Kepuasan Layanan keuangan dan Kesejahteran DPRD	3.5	2.75	3.5	2.68	76.57	3.5	-	-
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30	30	30	30	100	30	30	100
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* DPRD	30 Laporan Hasil MCU / 30 Orang	30 Laporan Hasil MCU / 30 Orang	30 Laporan Hasil MCU / 30 Orang	30 Laporan Hasil MCU / 30 Orang	-	30 Laporan Hasil MCU / 30 Orang	30 Laporan Hasil MCU / 30 Orang	-

	Layanan Administrasi DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi DPRD	3.5	2.75	3.5	2.68	76.57	3.5	-	-
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	-	30 Laporan	30 Laporan	-
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Orang Unsur Pimpinan	3 Orang Unsur Pimpinan	3 Orang Unsur Pimpinan	3 Orang Unsur Pimpinan	-	3 Orang Unsur Pimpinan	3 Orang Unsur Pimpinan	-
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	3.5	2.75	3.5	2.68	76.57	3.5	-	-
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPR	Nilai Kepuasan terhadap Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPR	3.5	2.75	3.5	2.68	76.57	3.5	-	-
		Jumlah Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPR	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	3 Laporan	75
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3 Dokumen	75
	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-

	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Nilai Kepuasan Terhadap Pembahasan Kebijakan Anggaran	3.5	2.75	3.5	2.68	76.57	3.5	-	-
		Jumlah Laporan Pembahasan kebijakan anggaran	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	3 Laporan	75
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3 Dokumen	75
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3 Dokumen	75
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3 Dokumen	75
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3 Dokumen	75
	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3 Dokumen	75
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3 Dokumen	75
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Kepuasan Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3.5	2.75	3.5	2.68	76.57	3.5	-	-
		Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	3 Laporan	75

	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	-	3 Laporan	9 Laporan	-
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	-	3 Laporan	9 Laporan	-
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	-	3 Laporan	9 Laporan	-
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	-	3 Laporan	9 Laporan	-
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	-	3 Laporan	9 Laporan	-
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	-	3 Laporan	9 Laporan	-
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	-	3 Laporan	9Laporan	-
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	3 Laporan	-
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Nilai Kepuasan Terhadap Peningkatan Kapasitas DPRD	3.5	2.75	3.5	2.68	76.57	3.5	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	4	1	1	1	-	1	3	75
	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	-	-	-	-	1	1	100

	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	75
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3 Dokumen	-
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	-	8 Orang	8 Orang	-
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	-	20 D okumen	20 Dokumen	-
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3 Dokumen	-
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Nilai Kepuasan Terhadap Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.5	2.75	3.5	2.68	76.57	3.5	-	-
		Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	3 Laporan	75
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	-	3 Laporan	9 Laporan	-
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3 Dokumen	-
	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	90 Dokumen	90 Dokumen	90 Dokumen	90 Dokumen	-	90 Dokumen	180 Dokumen	-
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	3.5	2.75	3.5	2.68	76.57	3.5	-	-

		Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	75
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	-	3 Laporan	9 Laporan	-
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Pembahasan Kerja Sama Daerah	3.5	2.75	3.5	2.68	76.57	3.5	-	-
		Jumlah Laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	3 Laporan	75
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Tugas DPRD	Nilai Kepuasan Terhadap Fasilitasi Tugas DPRD	3.5	2.75	3.5	2.68	76.57	3.5	-	-
		Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	3 Laporan	75
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	3 Dokumen	9 Dokumen	100
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3 Dokumen	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3 Dokumen	100

	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	3 Dokumen	9 Dokumen	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3 Dokumen	100

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Dasar analisis terhadap kajian capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) atau indikator kinerja kunci (IKK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang administrasi pemerintahan, secara khusus melakukan analisis kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dilakukan perbaikan secara berkesinambungan agar lebih terukur dan berkinerja, Untuk lebih jelas capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun, dijabarkan pada tabel 2.2 berikut ini,

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kab.Karimun

NO	Indikator Kinerja Utama	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD 2021-2026				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analsis
				Tahun n-2 2022	Tahun n-1 2023	Tahun n 2024	Tahun n+1 2025	Tahun n-2 2022	Tahun n-1 2023	Tahun n 2024	Tahun n+1 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	-	-	74.00	74.50	75.00	75.50	68.73	67.02	75.00	75.50	Didasarkan pada nilai persepsi anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat Dewan (Likers 4)
2	Nilai Hasil Evaluasi AKIP (N-1)	-	-	63.00	64.00	65.00	66.00	61.77	41.56	65.00	66.00	Didasarkan hasil Evaluasi LKjIP oleh Inspektorat dana atau Kementerian PAN dan RB

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan dan hal kritis terkait dengan pelayanan Sekretariat Dewan berupa permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, catatan strategis berbentuk formulasi isu pelayanan yang harus ditindaklanjuti dalam perumusanan program dan kegiatan prioritas tahun 2025, dijabarkan sebagai berikut:

1. Permasalahan berkaitan rendahnya produktivitas aparatur walaupun secara kuantitas/jumlahnya sudah memadai, namun belum memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai yang diinginkan (belum tersedianya Tenaga Perancang UU, Perisalah legislative dan Asisten Perisalah legislative), hal ini menyebabkan kurang optimalnya kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan agenda kerja dewan secara tepat waktu, sehingga memerlukan peningkatan kapasitas baik melalui pendidikan formal maupun diklat-diklat teknis fungsional yang mendukung fasilitasi dewan.
2. Permasalahan berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang kurang memadai sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai hasil yang optimal, terutama kebutuhan ruangan kerja bagi anggota dewan dan SDM aparatur Sekretariat DPRD
3. Permasalahan berkaitan dengan keterlambatan bahan acara atau materi ranperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat berjalan sesuai agenda, sehingga perlu menjaga harmonisasi dan kelancaran hubungan koordinasi yang arah yang lebih baik lagi.
4. Permasalahan berkaitan optimalnisasi fasilitasi/dukungan penyelenggaraan fungsi alat kelengkapan dewan serta dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.
5. Permasalahan yang berkaitan dengan belum tersampaikannya informasi aktifitas DPRD dan hasil –hasil kerja DPRD terutama raperda inisiatif dan perda inisiatif di masyarakat sehingga menimbulkan kesan Sekretariat DPRD kurang optimal dalam pelaksanaan tugasnya dalam mendukung pemasyarakatan keputusan dan produk hasil kerja DPRD.
6. Permasalahan berkaitan dengan belum optimalnya implementasi perencanaan dan anggaran berbasis kinerja, menyebabkan kesulitan dalam evaluasi dan pengukuran kinerja yang kurang tepat serta kecenderungannya mengakibatkan tidak efisien dalam pelaksanaan anggaran sehingga membutuhkan perbaikan berkesinambungan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Review terhadap rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dapat diamati pada tabel 2.3 pada berikut ini.

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Nama OPD: Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Karimun	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	22.841.144.756.-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Karimun	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	22.841.144.756.-	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Persentase Penyelesain Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	3	85.000.000.-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Persentase Penyelesain Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	3	85.000.000.-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Layanan Keuangan Perangkat Daerah	3	3.802.477.017	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Layanan Keuangan Perangkat Daerah	3	3.802.477.017	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3	0.-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3	0.-	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	249.708.000.-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	249.708.000.-	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	869.234.200.-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	869.234.200.-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	0.-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	0.-	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	1.692.600.851.-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	1.692.600.851.-	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	729.000.000.-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	729.000.000.-	
9.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3	14.801.320.188.-	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3	14.801.320.188.-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10.	Layanan Administrasi DPRD	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi DPRD	3	611.304.500.-	Layanan Administrasi DPRD	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi DPRD	3	611.304.500.-	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DPRD	**Kab. Karimun**	**Indeks Kepuasan layanan Sekretariat DPRD**	**3**	**16.923.797.100.-**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DPRD**	**Kab. Karimun**	**Indeks Kepuasan layanan Sekretariat DPRD**	**3**	**16.923.797.100.-**	
11	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan terhadap Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3	2.300.000.000.-	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan terhadap Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3	2.300.000.000.-	
			Jumlah Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1				Jumlah Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1		
12	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Terhadap Pembahasan Kebijakan Anggaran	3	1.6478.200.900.-	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Terhadap Pembahasan Kebijakan Anggaran	3	1.6478.200.900.-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran	1				Jumlah Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran	1		
13	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Karimun	Nilai kepuasan Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3	3.392.188.200.-	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Karimun	Nilai kepuasan Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3	3.392.188.200.-	
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1				Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1		
14	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan terhadap Peningkatan Kapasitas DPRD	3	2.209.680.000.-	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan terhadap Peningkatan Kapasitas DPRD	3	2.209.680.000.-	
			Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	1				Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	1		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Terhadap Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3	4.404.100.000.-	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Terhadap Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3	4.404.100.000.-	
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1		
16	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	3	135.000.000.-	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	3	135.000.000.-	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1				Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1		
17	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Terhadap Pembahasan kerja sama Daerah	3		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Terhadap Pembahasan kerja sama Daerah	3		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah	1				Jumlah Laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah	1		
18	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Terhadap fasilitasi Tugas DPRD	3	2.804.627.200.	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Karimun	Nilai Kepuasan Terhadap fasilitasi Tugas DPRD	3	2.804.627.200.	
			Jumlah Laporan fasilitasi Tugas DPRD	1				Jumlah Laporan fasilitasi Tugas DPRD	1		
Jumlah					39.764.941.856.-	Jumlah				39.764.941.856.-	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM KEGIATAN KEMASYARAKATAN

Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung DPRD Karimun tidak mempunyai tugas untuk menerima usulan program dan kegiatan masyarakat, melainkan membantu DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan menyerap aspirasi masyarakat.

3. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.1. TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah, Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2025–2029, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, kebijakan pembangunan tahun 2025, serta berbagai isu strategis nasional, regional dan dunia yang menjadi perhatian, yang berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional.

Tema Pembangunan pada RKP Tahun 2025 yakni:

"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

RKP 2025 adalah awal dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 yang menjadi bagian dari awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 Indonesia Emas, dimana pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,3-5,6 persen, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6-7 persen serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,5-5 persen.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta konvergensi atau pertumbuhan yang makin merata antar daerah, dengan defisitnya anggaran antara 2,45 persen hingga 2,8 persen dari *gross domestic product*.

Sasaran pembangunan nasional pada RKP 2025

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Realiasasi 2023	Target 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	5,3 – 5,6
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	4,5 – 5,0
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,36	7,0 – 8,0
4.	Rasio Gini (Nilai)	0,388	0,379 – 0,382
5.	Indeks Modal Manusia (Nilai)	0,53	0,56
6.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	34,09	38,6

Dengan Prioritas RKP Tahun 2025 sebagai berikut:

1. SDM berkualitas/ SDM berdaya saing dan produktif
   - **Transformasi Sosial** : Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun, Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan, Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan

Stunting, Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif, Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas, Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan *dual-system*.

- **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**: Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)

2. Infrastruktur berkualitas / Infrastruktur untuk peningkatan produktifitas
   - **Transformasi Ekonomi:** Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi, Penguatan infrastruktur digital, Pengembangan infrastruktur transisi energy, Percepatan infrastruktur IKN
   - **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:** Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
3. Ekonomi Iklusif dan berkelanjutan/ Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan
   - **Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan :** Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pengembangan skema graduasi bansos, Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya, Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat, Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja, Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan, Peningkatan produksi industri pengolahan, Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif, Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi.

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Kepulauan Riau

RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran atas dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan-nya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun dengan partisipasi masyarakat.

Adapun Tema Pembangunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yaitu :

"Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dalam Akselerasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan"

Sasaran Pembangunan pada RKPD Provinsi Kepulaua Riau Tahun 2025

No	Sasaran Pembangunan Provinsi	Realiasasi 2023	Target 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50	5,6
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8.23	7,21
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	5.69	5,63
4.	Rasio Gini (Nilai)	0,340	0,321
5.	Indeks Pembangunan Manuasi	79.08	79,39
6.	Indeks Modal Manusia (Nilai)	-	-
7.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	-	-

Dengan Prioritas RKPD pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah
2. Pembangunan Manusia yang berkualitas dan berbudaya
3. Pembangunan Infrastruktur Wilayah

1.2. Telaahan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

Visi Pembangunan Kabupaten Karimun 2021-2026

Terwujudnya Kabupaten Karimun sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Takwa

Misi Pembangunan Kabupaten Karimun 2021-2026

1. Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri berbasis sumberdaya dan kearifan lokal.
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah
3. Mengembangkan sumberdaya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan takwa
4. Meningkatkan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup.
5. Mewujudkan birokrasi yang professional dan unggul.

Tujuan pembangunan Kabupaten Karimun sebagai berikut

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Daerah
2. Pemenuhan Infrastruktur dan konektivitas Daerah
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
4. Menurunkan Angka Kemiskinan
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik

Sasaran pembangunan Kabupaten Karimun 2021-2026

1. Meningkatnya Investasi Daerah
2. Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan
3. Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah
4. Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat yang Merata
5. Terwujudnya prasarana penghubung yang optimal
6. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
7. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
8. Terwujudnya Kesetaraan Gender
9. Terwujudnya Pengendalian Penduduk
10. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan
11. Meningkatkan peran serta masyarakata dalam pelestarian nilai budaya
12. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
13. Meningkatnya Kesejahteraaan Sosial
14. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja didaerah
15. Meningkatnya pengelolaan dan kelestarian Lingkungan Hidup
16. Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah dan Air
17. Terwujudnya birokrasi yang professional, bersih dan akuntabel
18. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Strategi pembangunan Kabupaten Karimun 2021-2026

1. Memperluas jaringan kerjasama investasi melalui promosi.
2. Memperkuat kapasitas pemeliharaan ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat dalam pola sinergi antara pemerintah dengan masyarakat melalui komunikasi dialogis dan penguatan kontrol sosial.
3. Memperkuat dukungan ketersediaan sarana produksi tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan dan perikanan
4. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah
5. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air
6. Mewujudkan ketersediaan Sarana dan Prasarana kawasan perumahan dan permukiman
7. Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana jalan dan jembatan serta sistem transportasi darat dan sungai
8. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan
9. Meningkatkan Pelayanan, Advokasi dan KIE Keluarga Berencana
10. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan
11. Meningkatkan peran pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan lansia

12. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana untuk mewujudkan ketahanan keluarga
13. Meningkatkan prestasi Pemuda dan olahraga melalui peningkatan kualitas pembinaannya
14. Meningkatkan Pengembangan Seni dan Budaya Dalam Rangka Pelestarian Budaya Daerah
15. Meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah
16. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan PPKS mandiri
17. Meningkatkan pelayanan bagi pencari kerja
18. Mengembangkan dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja
19. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
20. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
21. Meningkatkan pengelolaan persampahan
22. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam rangka menurunkan angka pencemaran air, udara dan tanah
23. Melaksanakan Reformasi birokrasi dan memperkuat tata kelola pemerintahan
24. Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik

Merujuk pada dokumen RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 yang mana prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari tahun ke tahun dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah dengan tema RKPD tahun 2025 sebagai berikut :

"Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien"

Sasaran Pembangunan pada RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Sasaran Pembangunan Provinsi	Realiasasi 2023	Target 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50	4,82
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.20	6.60
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	5.95	4.50
4.	Rasio Gini (Nilai)	0,288	0,321
5.	Indeks Pembangunan Manuasi	73.51	73.88
6.	Indeks Modal Manusia (Nilai)	-	-
7.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	-	-

Dengan Prioritas RKPD pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
3. Peningkatan Sumberdaya manusia (SDM)
4. Tata kelola pemerintahan Inovatif

3.2. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Secara umum tujuan adalah sesuatu atau yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka tertentu oleh Perangkat Daerah, sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya atau targetnya masing-masing, dan sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis Perangkat Daerah.

Atas dasar arti dan makna tujuan dan sasaran sasaran dimaksud, maka ditetapkan tujuan sasaran dan indikator indikator kinerja pada Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2025, sebagai berikut;

_____ "_____

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

_____"_____

Sasaran pada Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun untuk perencanaan tahun 2025, meliputi:

1. **Meningkatnya kualitas pelayanan dalam upaya memfasilitasi setiap agenda kegiatan pimpinan dan anggota dewan**
2. **Meningkatnya akuntabiltas kinerja perangkat daerah**

Untuk lebih jelas lagi tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama pada Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2025 yang akan datang, seperi terlihat pada tabel 3.1 berikut,

Tabel 3.1
Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD
Pada Rencana Kerja Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahunan	Penaggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan kualitas layanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3.06	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam upaya memfasilitasi setiap agenda kegiatan pimpinan dan anggota dewan	Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD (Likers 4)	75.50	1. Bagian Persidangan dan Prduk Hukum 2. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan pengawasan
				Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja Sekretriat DPRD	Nilai hasil evaluasi AKIP (N-1)	65.00	Bagian Umum dan Keuangan

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Faktor – Faktor Yang menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program, dan Kegiatan

Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Serta Peraturan Bupati Karimun No. 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, dimana berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dimana dari segi perencanaan kinerja terdapat dokumen perencanaan kinerja telah tersedia dan dinilai belum memenuhi standar dengan indikator yang SMART, tidak realistis dengan sasaran yang tidak berorientasi hasil, serta perencanaan kinerja belum dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan menurut tim penilai ditandai dengan anggaran yang ditetapkan belum mengacu kepada kinerja yang ingin dicapai.

B. Uraian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Dengan mempertimbangkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Karimun dan Program Kerja Tahunan DPRD yang ada pada semua AKD Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun yang telah disusun oleh Badan Musyawarah dan disetujui dalam rapat paripurna internal dewan serta untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah maka ditetapkan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 yang akan, dijelaskan sebagai berikut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota

1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan aktivitas atau sub kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan, Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan aktivitas atau sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi, Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran, Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3) Administrasi Umum, dengan aktivitas atau sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns, Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Pengadaan Mobil Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan Mebeleur, Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan, Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur, Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan, Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas, Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor, Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan, Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

4) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya dengan Aktivitas atau sub kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Pakaian Kerja Lapangan, Pengadaan Pakaian Korpri, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, Pemulangan Pegawai yang Pensiun, Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas, Pemindahan Tugas, Pendidikan dan Pelatihan Formal, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

5) **Layanan Administrasi DPRD**

   Kegiatan ini untuk aktivitas atau sub kegiatan penyelenggaraan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian DPRD, fasilitasi Rapat DPRD, Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD, Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD, Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

6) **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**

   Kegiatan ini dengan aktivitas atau sub kegiatan, Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, Pelaksanaan Medical Check -Up DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1) Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD

Kegiatan dengan aktivitas atau sub kegiatan penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, pembahasan Raperda, penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan, fasilitasi penyusunan Naskah Akademik, dan penyusunan Tata Tertib DPRD.

2) Pembahasan Kebijakan Anggaran

Kegiatan dengan aktivitas atau sub kegiatan pembahasan KUA dan PPAS, pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan, Pembahasan APBD, pembahasan APBD Perubahan, pembahasan Laporan Semester,dan pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan ini dengan aktivitas pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur, pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat, pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian, pengawasan urusan pemerintahan bidang Sumber Daya Alam, pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan pengawasan penggunaan anggaran.

4) Peningkatan Kapasitas DPRD

Kegiatan ini dengan aktivitas atau sub kegiatan Orientasi DPRD, Bimbingan Teknis DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Penyusunan Program Kerja DPRD

5) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Kegiatan ini dengan aktivitas atau sub kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah, Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Pelaksanaan Reses.

6) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Kegiatan ini dengan aktivitas atau sub kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD, Pengawasan Kode Etik DPRD

7) Pembahasan Kerja Sama Daerah

Kegiatan ini dengan aktivitas atau sub kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah, Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

8) Fasilitasi Tugas DPRD

Kegiatan ini dengan aktivitas atau sub kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD,

Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, Fasilitasi Tugas Pansus

Pada Tahun Anggaran Anggaran 2025 Kebutuhan Anggaran Sekretariat DPRD Kabuapten Karimun Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 yang telah di input ke Sistem Aplikasi SIPD RI sebesar Rp

4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025

Rincian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Anggaran Indikatif

4.1. RENCANA KERJA DA PENDANAAN

Pada Tahun Anggaran 2025 Kebutuhan Anggaran Sekretariat DPRD Kabuapten Karimun Dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 yang telah di input ke Sistem Aplikasi SIPD RI dengan Total pagu indikatif sebesar Rp 54.507.386.000,- yang dialokasikan pada 2 (dua) program dan 18 (delapan belas) kegiatan dan dijabarkan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.	**Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah**									
4.02.	**SEKRETARIAT DPRD**					**54.507.386.000**				**55.024.997.000**
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Kab. Karimun**	**74.50**		**27.517.156.700**			**74.50**	**27.516.156.700**
4.02.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu**	Kab. Karimun	**100**	**Persen**	**125.000.000**	**PAD**		**100**	**128.000.000**
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karimun	1	Dokumen	60.000.000	PAD		1	61.000.000
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Karimun	1	Dokumen	15.000.000	PAD		1	15.500.000
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Karimun	1	Dokumen	15.000.000	PAD		1	15.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Karimun	1	Dokumen	5.000.000	PAD		1	5.500.000
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Karimun	1	Dokumen	5.000.000	PAD		1	5.500.000
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karimun	1	Laporan	30.000.000	PAD		1	30.500.000
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karimun	1	Laporan	55.000.000	PAD		1	55.500.000
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Indeks Kepuasan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Karimun**	**4**	**Indeks**	**5.093.350.700**			**4**	**5.087.415.500**
		Jumlah Laporan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Karimun**	**1**	**Laporan**				**1**	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karimun	43 Orang x 14 Bulan (602)	Orang/ Bulan	4.850.000.000	DAU		43 Orang x 14 Bulan (602)	Orang/ Bulan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Karimun	1	Dokumen	150.000.000	PAD		1	150.000.000
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Karimun	1	Dokumen	63.350.700	PAD		1	31.915.500
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Karimun	-	Dokumen	-			1	10.000.000
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Karimun	-	Laporan	-			1	10.000.000
4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Karimun	-	Dokumen	-			1	10.000.000
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Karimun	1	Laporan	30.000.000			1	30.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Karimun	-	Dokumen	-			1	-
4.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Indeks Kepuasan Pelyanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Karimun**	**4**	**Indeks**	**78.350.700.**	**PAD**		**4**	**47.415.500**
		Jumlah Laporan Pelyanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Karimun**	**1**	**Laporan**	**-**	**-**	**-**	**1**	
4.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Karimun	-	Dokumen	-	PAD		1	5.000.000
4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Karimun	12	Laporan	15.000.000	PAD		1	15.500.000
4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Karimun	1	Laporan	63.350.700	PAD		1	31.915.500
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Karimun**	**Indeks**	**4**	**375.000.000**	**PAD**		**4**	**376.500.000**
		Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Karimun**	**1**	**Laporan**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Karimun	-	Unit	-	PAD		1	-
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Karimun	1	Paket	125.000.000	PAD		1	125.500.000
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Karimun	-	Orang	-	PAD		25	-
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Karimun	-	Orang	-	PAD		10	-
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Karimun	20	Orang	250.000.000	PAD		24	251.000.000
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Karimun**	**4**	**Indeks**	**1.020.000.000**	**PAD**		**4**	**1.026.000.000**
		Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Karimun**	**1**	**Laporan**				**1**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun	1	Paket	15.000.000	PAD		1	15.500.000
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun	1	Paket	134.000.000	PAD		1	134.500.000
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Karimun	1	Paket	57.000.000	PAD		1	57.500.000
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun	1	Paket	57.000.000	PAD		1	57.500.000
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Karimun	1	Paket	85.000.000	PAD		1	86.000.000
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Karimun	3	Dokumen	-	PAD		3	-
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Karimun	1	Laporan	12.000.000	PAD		1	13.000.000
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karimun	12	Laporan	560.000.000	PAD		12	561.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karimun	1	Dokumen	100.000.000	PAD		1	101.000.000
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Karimun**	**4**	**Indeks**	**375.000.000**	**PAD**		**4**	**379.000.000**
		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Karimun**	**1**	**Laporan**				**1**	
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Karimun	-	Unit	-	PAD	-	-	-
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Karimun	-	Unit	-	PAD		-	-
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Karimun	5	Paket	50.000.000	PAD		5	51.000.000
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun	10	Unit	125.000.000	PAD		6	127.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun	3	Unit	200.000.000	PAD		3	201.000.000
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Indeks Kepuasan terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Karimun**	**4**	**Indeks**	**1.926.900.000**			**4**	**1.929.500.000**
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Karimun**	**1**	**Laporan**	**-**			**1**	**-**
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karimun	1	Laporan	12.000.000	PAD		1	12.500.000
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Karimun	1	Laporan	390.000.000	PAD		1	391.500.000
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun	1	Laporan	25.000.000	PAD		1	25.500.000
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun	1	Laporan	1.499.900.000	PAD		1	1.500.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Karimun**	**4**	**Indeks**	**723.729.600**		**4**	**1 Laporan**	**733.500.000**
		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Karimun**	**1**	**Laporan**		**-**		**1**	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Karimun	4	Unit	230.000.000	PAD		4	231.500.000
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Karimun	4	Unit	150.000.000	PAD		4	152.500.000
4.02.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kab. Karimun	1	Unit	30.000.000	PAD		1	31.500.000
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Karimun	30	Unit	8.729.600	PAD		30	10.000.000
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Karimun	30	Unit	85.000.000	PAD		30	86.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Karimun	3	Unit	220.000.000	PAD		3	221.500.000
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Karimun	3	Unit	-	PAD		2	-
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Karimun	3	Unit	-	PAD		3	-
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Indeks kepuasan Layanan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Kab. Karimun**	**4**	**Indeks**	**17.014.825.700**	**DAU**		**4**	**17.018.825.700**
		Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Kab. Karimun**	**1**	**Laporan**	**-**			**1**	**-**
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kab. Karimun	30 Orang x 14 Bulan	Orang/ Bulan	16.574.825.700	DAU		30	16.574.825.700
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kab. Karimun	4	Paket	280.000.000	PAD		1	282.500.000
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* DPRD	Kab. Karimun	30	Orang	160.000.000	PAD		30	161.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**Indeks kepuasan Layanan Administrasi DPRD**	**Kab. Karimun**	**4**	**Indeks**	**785.000.000**	**PAD**		**4**	**790.000.000**
		Jumlah Laporan layanan Adminstrasi DPRD	**Kab. Karimun**	**1**	**Laporan**		**-**		**1**	**-**
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Karimun	1	Laporan	125.000.000	PAD		1	126.500.000
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Karimun	1	Laporan	300.000.000	PAD		1	301.500.000
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Kab. Karimun	1	Paket	360.000.000	PAD		1	362.000.000
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD**	**Kab. Karimun**	**4**		**26.930.229.300**	**PAD**	**-**	**4**	**27.447.840.300**
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Nilai Kepuasan Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Kab. Karimun**	**4**	**Nilai**	**4.795.000.000**	**PAD**	**-**	**4**	**5.105.000.000**
		Jumlah Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Kab. Karimun**	**1**	**Laporan**	**-**		**-**	**1**	**-**
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Karimun	2	Dokumen	95.000.000	PAD	-	2	105.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Karimun	9	Dokumen	3.700.000.000	PAD	-	5	3.920.000.000
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Kab. Karimun	3	Dokumen	150.000.000	PAD	-	3	155.000.000
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Kab. Karimun	3	Dokumen	600.000.000	PAD	-	3	650.000.000
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Kab. Karimun	-	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.01.06	Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan Bersama Oleh DPRD dan Pemda	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan Bersama Oleh DPRD dan Pemda	Kab. Karimun	100	Orang	250.000.000	PAD	-	100	275.000.000
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Terselenggaranya Pembahasan Kebijakan Anggaran Daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat**	**Kab. Karimun**	**4**	**Nilai**	**2.574.553.150**	**PAD**	**-**	**4**	**2.624.854.350**
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Kab. Karimun**	**1**	**Laporan**			**-**	**1**	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Karimun	1	Dokumen	382.300.200	PAD	-	1	400.000.000
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Karimun	1	Dokumen	381.100.900	PAD	-	1	389.854.350

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kab. Karimun	1	Dokumen	487.650.500	PAD	-	1	500.000.000
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Karimun	1	Dokumen	481.100.900	PAD	-	1	500.000.000
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Kab. Karimun	1	Dokumen	342.400.650	PAD	-	1	343.000.000
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Karimun	1	Dokumen	500.000.000	PAD	-	1	510.000.000
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Nilai Kepuasan Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Kab. Karimun**	**4**	**Nilai**	**5.831.301.200**	**PAD**	**-**	**4**	**5.848.000.000**
		Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Kab. Karimun**	**1**	**Laporan**	**-**		**-**	**1**	**-**
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Karimun	3	Laporan	925.000.000	PAD	-	3	926.000.000
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Karimun	3	Laporan	925.000.000	PAD	-	3	926.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Karimun	3	Laporan	925.000.000	PAD	-	3	926.000.000
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Karimun	3	Laporan	925.000.000	PAD	-	3	926.000.000
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Karimun	3	Laporan	925.000.000	PAD	-	3	926.000.000
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Karimun	3	Dokumen	328.150.600	PAD	-	3	329.000.000
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Karimun	1	Dokumen	328.150.600	PAD	-	1	329.000.000
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Karimun	1	Dokumen	550.000.000	PAD	-	1	560.000.000
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Nilai Kepuasan Terhadap Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Kab. Karimun**	**4**	**Nilai**	**2.724.000.000**	**PAD**		**4**	**2.779.000.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	**Kab. Karimun**	**1**	**Laporan**				**1**	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Karimun	1	Dokumen	750.000.000	PAD		1	800.000.000
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Karimun	5	Orang	250.000.000	PAD		5	255..000.000
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Karimun	8	Orang	549.000.000	PAD		8	549.000.000
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Karimun	1	Dokumen	950.000.000	PAD		1	200.000.000
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Kab. Karimun	1	Dokumen	75.000.000	PAD		1	76.000.000
4.02.02.2.04.08	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Karimun	1	Dokumen	150.000.000	PAD		1	899.000.000
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Nilai Kepuasan terhadap Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Kab. Karimun**	**4**	**Nilai**	**4.775.000.000**	**PAD**		**4**	**4.935.000.000**
		Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Kab. Karimun**	**1**	**Laporan**	**-**	**-**		**1**	**-**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kab. Karimun	3	Laporan	585.000.000	PAD		3	729.000.000
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Kab. Karimun	1	Dokumen	75.000.000	PAD		1	80.000.000
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kab. Karimun	90	Dokumen	3.950.000.000	PAD		90	3.951.000.000
4.02.02.2.05.04	Sosilaisai Rancangan Paeraturan Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi raperda	Kab. Karimun	100	Orang	165.000.000	PAD		100	175.000.000
4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Kab. Karimun**	**4**	**Nilai**	**270.000.000**	**PAD**		**4**	**275.000.000**
		Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Kab. Karimun**	**1**	**Laporan**	**270.000.000**	**PAD**		**1**	**275.000.000**
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Kab. Karimun	-	-	-			-	-
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Karimun	3	Laporan	270,000,000	PAD		3	275,000,000
4.02.02.2.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Nilai kepuasan Terhadap Fasilitasi Pembahsan Kerja Sama Daerah**	**Kab. Karimun**	**4**	**Nilai**	**350,000,000**	**PAD**		**4**	**350,000,000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pembahsan Kerja Sama Daerah	**Kab. Karimun**	**1**	**Laporan**		**-**		**1**	
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Kab. Karimun	1	Dokumen	250,000,000	PAD		1	250,000,000
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Kab. Karimun	1	Dokumen	100,000,000	PAD		1	100,000,000
4.02.02.208	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Nilai kepuasan Terhadap Fasilitasi Tugas DPRD**	**Kab. Karimun**	**4**	**Nilai**	**5.610.374.950**	**PAD**		**4**	**5.512.985.950**
		Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	**Kab. Karimun**	**1**	**Laporan**				**1**	
4.02.02.208.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Karimun	3	Dokumen	3.725.374.950	PAD		3	3.622.985.950
4.02.02.208.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Kab. Karimun	1	Laporan	90,000,000	PAD		1	91,000,000
4.02.02.208.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Karimun	1	Dokumen	275.000.000	PAD		1	276.000,000
4.02.02.208.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Karimun	1	Dokumen	1.270.000.000	PAD		1	1.272.000000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.02.208.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Kab. Karimun	1	Dokumen	250.000.000	PAD		2	251.000.000
Jumlah						**54.507.386.000**				**55.024.997.000**

5. PENUTUP

Kaidah – Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah

5.1. PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun untuk pelaksanaanya tahun 2025 merupakan sebuah produk perencanaan melalui proses pembahasan-pembahasan yang melibatkan semua stackholder pada Sekretariat DPRD dan unsur AKD terutama pimpinan dan badan musyawarah.

Rencana kerja memiliki kedudukan yang sangat penting dan merupakan sebuah komitmen yang dijadikan acuan unit penunjang teknis meliputi Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi lembaga secara konsisten dan berkesinambungan.

Dokumen Rancangan Akhir Rencana kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 sebagai pedoman kerja ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
2. Seluruh ASN di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun wajib melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan
3. Anggaran pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, dilakukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai ketententuan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.
5. Dokumen Rencana kerja ini akan dijabarkan juga ke dalam rencana aksi dan perjanjian kinerja bagi ASN struktural dan sasaran kinerja pegawai tahun 2025

Terima kasih atas upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya yang adadan mengaktualisasikan rencana kerja ini, dengan harapan mampu mendorong perwujudan tercapainya peningkatan kinerja pelayanan kearah yang lebih baik

Tebing, Juni 2024

SEKRETARIAT DPRD KAB. KARIMUN

Sekretaris DPRD,

EDDIE MUAR, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda/ IV.C

NIP. 196908092000031005

Dipindai dengan CamScanner

BAPERLITBANG
KABUPATEN KARIMUN

A Goal Without Planning Will Only be Hope

2025

RENCANA KINERJA
PERANGKAT DAERAH
(RENJA - PD)

BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah (PD) melakukan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025;

b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan antar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klafisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);

20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 46);

21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);

22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 99 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 99);

23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 45);

24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
RENCANA KERJA (RENJA)

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :
   a. pendahuluan;
   b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
   c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
   d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
   e. penutup.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta harus berpedoman dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
(3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya.
(4) Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 8 Juli 2024

BUPATI KARIMUN,

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024 NOMOR 34

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Perkenan dan Ridho Nya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun dapat menyusun dan menyelesaikan Dokumen Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2025 sebagaimana diwajibkan oleh amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kinerja (RENJA) BAPERLITBANG Kabupaten Karimun Tahun 2025 merupakan rencana kinerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BAPERLITBANG. Rencana Kinerja (RENJA) BAPERLITBANG Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen RKPD Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Dengan telah disusunnya RENJA BAPERLITBANG Kabupaten Karimun Tahun 2025, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat selama berlangsungnya penyusunan RENJA ini dengan harapan Dokumen RENJA BAPERLITBANG Tahun 2025 ini dapat menginterpretasikan atau mampu mencerminkan kinerja BAPERLITBANG dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPERLITBANG Karimun yang akan datang.

Tanjung Balai Karimun, 8 Juli 2024
KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN

Drs. H. FAJAR HARISON ABIDIN, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731024 199201 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar……...i
Daftar Isi……..ii
Daftar Tabel……...iii
Daftar Gambar…..……...iv

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.....1-1
1.2 Landasan Hukum.....1-2
1.3 Maksud dan Tujuan 1-5
1.4 Sistematika Penulisan.....1-6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2-18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....2-22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2-24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2-25

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....3-2
3.3 Program dan Kegiatan Baperlitbang Tahun 2022 3-12

BAB IV PENUTUP
4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja.....4-1
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....4-1
4.3 Rencana Tindak Lanjut 4-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Baperlitbang Kab. Karimun Tahun 2023……	2-6
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Baperlitbang Kab. Karimun Tahun 2023…….	2-19
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Baperlitbang Kabupaten Karimun Tahun 2023……..	2-20
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Baperlitbang Tahun 2025…….	3-8
Tabel 3.2	Strategi dan Kebijakan……	3-11
Tabel 3.3	Rumusan Rencanaan Program dan Kegiatan Baperlitbang Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kab. Karimun…..	3-15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Keterkaitan antara Isu Strategis dan Sasaran Strategis…..…….	3-9
Gambar 3.2	Keterkaitan antara Sasaran Strategis Baperlitbang dengan Sasaran Strategis RKPD…….	3-10

BAB 1 Pendahuluan

1.1. Latar Belakang.

Rencana Kinerja (RENJA) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun RENJA Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Badan Perencanan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi Baperlitbang dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, RENJA Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. RENJA Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis.

Dengan demikian RENJA Baperlitbang Kabupaten Karimun mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Kabupaten Karimun, mengingat bahwa :

- RENJA Baperlitbang Kabupaten Karimun merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Baperlitbang sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- RENJA Baperlitbang Kabupaten Karimun merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
- RENJA Baperlitbang Kabupaten Karimun merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum.

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RENJA Baperlitbang Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah:

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Reepublik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN - 2 - Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik iNdonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembar Daerah Kabupaten karimun Tahun 2015 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);
16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupten Karimun Tahun 2024 Nomor 33).

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah adalah:

- Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
- Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sebagai gambaran isi dari Rencana Kinerja Baperlitbang Kabupaten Karimun Tahun 2025 disusun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Baperlitbang, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang.

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah, dengan RENJA Bappenas dan RENJA Baperlitbang Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum.

Memuat Penjelasan tentang Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Keputusan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah, serta Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penyusunan Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Subbab ini berisi uraian mengenai:

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3) Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Terhadap capaian Program Nasional;
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Melakukan proses pembandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Menjelaskan perubahan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan.

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, maupun seandainya ketersediaan Anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Proses penyusunan suatu perencanaan sangat terkait erat dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu 1) Sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut; 2) Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Baperlitbang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan sehingga Renstra tersebut dijadikan panduan Baperlitbang selaku Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dalam melaksankan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2023 Baperlitbang telah melaksanakan 4 (Empat) program yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terdiri dari 3 (Tiga) program utama dan 1 (Satu) program yang sifatnya supporting terhadap program utama.

Adapun 3 (tiga) Program Utama BAPERLITBANG pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Sedangkan 1 (Satu) Program sebagai supporting program utama adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Analisis terhadap masing-masing program utama tersebut adalah :

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 1.875.133.803,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 1.353.752.026,- atau 72,19%. Indikator programnya adalah Persentase Capaian Kinerja Program. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah :

1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan. Indikator Output kegiatannya Jumlah dokumen Perencanaan dan Pendanaan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.
2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Indikator Output kegiatannya Jumlah dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.
3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Indikator Output kegiatannya Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.
4) Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah. Indikator Output kegiatannya Jumlah Laporan Implementasi SIPD. Proporsi Capaian

Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

2. **Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

   Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 841.417.090,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 636.132.241,- atau 75,60%. Indikator programnya adalah Persentase Keselarasan RKPD dengan RKP dan RKPD Provinsi. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah:

   1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Indikator output kegiatannya Jumlah dokumen hasil koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.
   2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam). Indikator output kegiatannya Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam). Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.
   3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Indikator output kegiatannya Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

3. **Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.**

   Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 321.458.621,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 182.675.914,- atau 56,83%. Indikator programnya adalah Persentase implementasi rencana kelitbangan dan Jumlah inovasi daerah. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah:

   1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan. Indikator output kegiatannya Jumlah kajian/penelitian bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.
   2) Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Indikator output kegiatannya Jumlah Laporan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

Selain Didukung dengan 3 (tiga) Program Utama sebagai Program teknis Baperlitbang, dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya Baperlitbang juga didukung oleh program pendukung lainnya , yakni sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.**

   Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 9.167.176.688,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 8.195.434.015,- atau 89,40%. Indikator programnya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100%. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator output kegiatannya Jumlah Dokumen. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Indikator output kegiatannya Jumlah Laporan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.
3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Indikator output kegiatannya Jumlah Laporan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator output kegiatannya Jumlah Laporan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.
5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator output kegiatannya Jumlah Laporan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator output kegiatannya Jumlah Laporan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.
7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator output kegiatannya Jumlah Laporan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA BAPERLITBANG Kabupaten Karimun tahun 2023

No.	Sasaran	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2022 s/d 2026)	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output) (Renstra 2022 s/d 2026)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)						Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Anggaran 2023										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3						4	5	6	7		8		9						10			11			12			13				14 =10+11+12+13		15 = 14/9 x 100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18
															Renja		APBD Murni		APBD - P		I			II			III			IV										
											K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	F	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5																																						
		5	**0 1**					**Bidang Urusan Perencanaan**				**61.121. 772.000**		**10.389. 641.200**		**12.490. 000.000**		**11.474. 641.411**		**11.883. 727.581**			**2.033.0 14.286**			**2.932.2 48.554**			**2.621.4 78.762**			**2.598.5 76.680**		**10.185. 318.282**				**10.185. 318.282**			
1	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah**	**5**	**1**	**2**				**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Capaian Kinerja Program**	**Persentase**	**75**	**8.272.0 35.000**	**7 5**	**1.871.8 37.090**	**6 7**	**1.487.5 00.000**	**7 8**	**1.890.2 11.378**	**7 8**	**1.875.1 33.803**	**-**	**20**	**294.37 7.636**	**1 0**	**40**	**413.41 3.290**	**3 0**	**7 0**	**312.48 9.650**	**3 8**	**1 0 0**	**333.47 1.450**	**92**	**1.353.7 52.026**	**117 ,99**	**72, 19**	**9 2**	**1.353.7 52.026**	**122 ,71**	**16 ,3 7**	
		5	**1**	**2**	**# # #**			**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah dokumen Perencanaan dan Pendanaan**	**Dokumen**	**7**	**5.014.5 35.000**	**1**	**1.183.7 86.197**	**1**	**844.000 .000**	**1**	**822.085 .259**	**1**	**1.095.0 74.662**	**-**	**25**	**254.82 0.901**	**-**	**45**	**95.726. 000**	**-**	**7 0**	**132.79 2.775**	**1**	**1 0 0**	**305.99 6.450**	**1**	**789.336 .126**	**100**	**72, 08**	**1**	**789.336 .126**	**14, 29**	**15 ,7 4**	
		5	1	2	2, 01	1		Analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	1	50.000.0 00			-	50.000.0 00,00																									
		5	1	2	2, 01	2		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	5	634.500. 000	1	88.396.1 60	1	125.000. 000	1	85.314.3 41	1	61.742.3 41					15	12.501.0 00		5 1	24.969.5 00	1	1 0 0	14.729.0 00	1	52.199.5 00	100 ,00	84,5 4	1	52.199.5 00	20, 00	8,2 3	
		5	1	2	2, 01	3		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara (BA - RKPD)	7	261.000. 000	1	-	1	50.000.0 00	1	22.573.5 27	1	73.831.5 27										1	1 0 0	21.558.4 00	1	21.558.4 00	100	29	1	21.558.4 00	14, 29	8,2 6	
		5	1	2	2, 01	4		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara (BA Forum OPD - RKPD)	7	214.000. 000	1	57.720.5 00	1	37.000.0 00	1	68.160.3 76	1	52.160.3 76		80 ,0 0	22.750.7 00	1	90	1.998.00 0		1 0 0	-		1 0 0	-	1	24.748.7 00	100 ,00	47,4 5	1	24.748.7 00	14, 29	11, 56	
		5	1	2	2, 01	5		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara (BA Musrenbang RKPD)	7	717.000. 000	1	269.734. 752	1	137.000. 000	1	235.334. 490	1	190.566. 390		80 ,0 0	163.219. 550	1	95	21.250.0 00		1 0 0			1 0 0	-	1	184.469. 550	100 ,00	96,8 0	1	184.469. 550	14, 29	25, 73	
		5	1	2	2, 01	6		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	84 0	750.000. 000	1 6 0	132.906. 000	1 6 0	145.000. 000	1 6 0	52.312.6 01	1 6 0	52.312.6 01		80	49.282.6 51	1 6 0	98	1.998.00 0		1 0 0			1 0 0		160	51.280.6 51	100 ,00	98,0 3	16 0	51.280.6 51	19, 05	6,8 4	
		5	1	2	2, 01	7		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen - RPKD	9	2.388.03 5.000	1	635.028. 785	1	300.000. 000	1	358.389. 924	1	664.461. 427		15	19.568.0 00		20	57.979.0 00		5 5	107.823. 275	1	1 0 0	269.709. 050	1	455.079. 325	100 ,00	68,4 9	1	455.079. 325	11, 11	19, 06	

No.	Sasaran	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2022 s/d 2026)	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output) (Renstra 2022 s/d 2026)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)						Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Anggaran 2023												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3						4	5	6	7		8		9						10			11			12			13						14 =10+11+12+13		15 = 14/9 x 100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18
		5	**1**	**2**	**###**			**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Dokumen**	**5**	**1.058.000.000**	**1**	**293.230.800**	**1**	**205.000.000**	**1**	**357.098.918**	**1**	**189.543.200**	**-**	**10**	**21.723.500**	**-**	**25**	**82.754.900**	**-**	**70**	**47.820.025**	**1**	**100**	**-**	**1**	**152.298.425**	**100,00**	**80,35**	**1**	**152.298.425**	**20,00**	**14,39**	
		5	1	2	2,02	1		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	5	571.000.000	1	154.447.300	1	105.000.000	1	72.150.459	1	31.709.359					10	8.108.000		19	4.270.500	1	100	-	1	12.378.500	100,00	39,04	1	12.378.500	20	2,17	
		5	1	2	2,02	2		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Infomasi	Orang	43	237.000.000	43	138.783.500	43	50.000.000	43	177.578.085	43	110.438.085		5	8.223.500		10	65.109.900		61	26.965.650	43	100	-	43	100.299.050	100,00	90,82	43	100.299.050	100	42,32	
		5	1	2	2,02	3		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	5	250.000.000		-	1	50.000.000	1	107.370.374	1	47.395.756		5	13.500.000		10	9.537.000		39	16.583.875	1	100	-	1	39.620.875	100,00	83,60	1	39.620.875	20	15,85	
		5	**1**	**2**	**###**			**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Dokumen**	**12**	**1.511.000.000**	**2**	**394.820.093**	**2**	**300.000.000**	**2**	**425.355.278**	**2**	**417.064.278**	**1**	**40**	**17.833.235**	**0**	**50**	**156.932.390**	**0**	**70**	**100.012.900**	**1**	**100**	**3.975.000**	**2**	**278.753.525**	**100,00**	**66,84**	**2**	**278.753.525**	**16,67**	**18,45**	
		5	1	2	2,03	3		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan-LKPJ-Ev. RKPD	12	1.511.000.000	2	394.820.093	2	300.000.000	2	425.355.278	2	417.064.278	1	40,00	17.833.235		50	156.932.390		67	100.012.900	1	100	3.975.000	2	278.753.525	100,00	66,84	2	278.753.525	16,67	18,45	
		5	**1**	**2**	**###**			**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan**	**Jumlah Laporan Implementasi SIPD**	**Laporan**	**4**	**688.500.000**		**-**	**-**	**138.500.000**	**1**	**285.671.923**	**1**	**173.451.663**			**0**		**40**	**78.000.000**		**60**	**31.863.950**	**1**	**100**	**23.500.000**	**1**	**133.363.950**	**100,00**	**76,89**	**1**	**133.363.950**	**25,00**	**19,37**	
		5	1	2	2,04	1		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	4	350.000.000		-	-	75.000.000,00																									
		5	1	2	2,04	2		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	4	338.500.000		-	-	63.500.000,00	1	285.671.923	1	173.451.663					40	78.000.000		45	31.863.950	1	100	23.500.000	1	133.363.950	100,00	76,89	1	133.363.950	25,00	39,40	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																**117,99**	**72,19**			**122,71**	**16,37**	
Predikat Kinerja																																**ST**	**S**					

No.	Sasaran	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2022 s/d 2026)	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output) (Renstra 2022 s/d 2026)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)						Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Anggaran 2023												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3						4	5	6	7		8		9						10			11			12			13			14 =10+11+12+13		15 = 14/9 x 100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	5	1	3				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan RKP dan RKPD Provinsi	Persentase	82	9.229.000.000	75	941.656.373	72	1.631.000.000	78	988.320.778	78	841.417.090	-	25	75.791.508	10	50	183.352.633	30		145.061.700	38		231.926.400	80	636.132.241	102,56	75,60	80	636.132.241	97,56	6,89	
		5	1	3	2,01			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	5	3.289.000.000	1	509.085.720	1	638.000.000	1	499.721.358	1	349.706.358	-	25	35.421.098	-	50	102.471.633	-	60	55.555.600	1	100	45.470.000	1	238.918.331	100	68,32	1	238.918.331	20,00	7,26	
		5	1	3	2,01	1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen - RKPD	7	562.000.000	1	92.642.000	1	105.000.000	1	121.044.283	1	86.244.283		25,00	8.828.598		50	25.763.000		60	15.066.600	1	100	4.968.000	1	54.626.198	100,00	63,34	1	54.626.198	14,29	9,72	
		5	1	3	2,01	2		Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	21	163.000.000		-	21	26.000.000																									
		5	1	3	2,01	3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	21	260.000.000		-	21	50.000.000	21	119.848.870	21	65.948.870		25	8.057.000		50	13.823.273		60	16.338.500	21	100	1.125.000	21	39.343.773	100,00	59,66	21	39.343.773	100,00	15,13	
		5	1	3	2,01	4		Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan - Sinkronisasi Renja	6	260.000.000		-	1	50.000.000																									
		5	1	3	2,01	5		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunanya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen - RKPD	7	547.000.000	1	153.558.570	1	105.000.000	1	223.374.822	1	165.374.322		25	18.535.500		50	52.521.000		60	22.318.500	1	100	38.152.000	1	131.527.000	100,00	79,53	1	131.527.000	14,29	24,05	
		5	1	3	2,01	6		Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	11	710.000.000	11	247.170.150	11	150.000.000																									

No.	Sasaran	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2022 s/d 2026)	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output) (Renstra 2022 s/d 2026)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)						Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Anggaran 2023												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3						4	5	6	7		8		9						10			11			12			13			14 =10+11+12+13		15 = 14/9 x 100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18
		5	1	3	2,01	7		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	11	537.000.000	11	15.715.000	11	102.000.000	11	35.453.383	11	32.138.883		25			50	10.364.360		60	1.832.000	11	100	1.225.000	11	13.421.360	100,00	41,76	11	13.421.360	100,00	2,50	
		5	1	3	2,01	8		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan - Sinkronisasi Renja	6	250.000.000		-	1	50.000.000																								
		5	**1**	**3**	**2,02**			**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Dokumen	**5**	**2.284.000.000**	**1**	**115.701.700**	**1**	**435.000.000**	**1**	**272.515.475**	**1**	**236.616.732**	**-**	**25**	**20.530.000**	**-**	**50**	**36.248.000**	**-**	**60**	**37.833.700**	**1**	**100**	**83.536.100**	**1**	**178.147.800**	**100,00**	**75,29**	**1**	**178.147.800**	**20,00**	**7,80**	
		5	1	3	2,02	1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen - RKPD	7	542.000.000	1	41.159.900	1	105.000.000	1	160.125.766	1	146.700.836		25	9.996.500		50	14.716.000		60	15.917.300	1	100	72.738.100	1	113.367.900	100,00	77,28	1	113.367.900	14,29	20,92	
		5	1	3	2,02	2		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	4	175.000.000	-	-	4	30.000.000																					-			
		5	1	3	2,02	3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	4	260.000.000		-	4	50.000.000	4	21.197.688	4	20.805.299		25			50	5.021.000		60	8.249.000	4	100	1.332.000	4	14.602.000	100,00	70,18	4	14.602.000	100,00	5,62	
		5	1	3	2,02	4		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan - Sinkronisasi Renja	6	500.000.000		-	1	95.000.000																					-			

No.	Sasaran	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2022 s/d 2026)	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output) (Renstra 2022 s/d 2026)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Anggaran 2023												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3						4	5	6	7		8		9				10			11			12			13				14 =10+11+12+13		15 = 14/9 x 100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18
		5	1	3	2,02	5		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen - RKPD	7	542.000.000	1	45.934.800	1	105.000.000	1	69.999.764	1	50.464.188		25	8.515.500		50	13.073.000		60	9.817.800	1	100	6.073.000	1	37.479.300	100,00	74,27	1	37.479.300	14,29	6,92	
		5	1	3	2,02	7		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	3	265.000.000	3	28.607.000	3	50.000.000	3	21.192.257	3	18.646.409		25	2.018.000		50	3.438.000		60	3.849.600	3	100	3.393.000	3	12.698.600	100,00	68,10	3	12.698.600	100,00	4,79	
		5	**1**	**3**	**2,03**			**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Dokumen	**5**	**3.656.000.000**	**1**	**316.868.953**	**1**	**558.000.000**	**1**	**216.083.945**	**1**	**255.094.000**	-	**25**	**19.840.410**	-	**50**	**44.633.000**	-	**60**	**51.672.400**	**1**	**100**	**102.920.300**	**1**	**219.066.110**	**100**	**85,88**	**1**	**219.066.110**	**20,00**	**5,99**	
		5	1	3	2,03	1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen - RKPD	7	542.000.000	1	71.070.785	1	105.000.000	1	191.690.710	1	172.715.631		25	18.970.410		50	39.461.000		60	44.040.400	1	100	50.699.300	1	153.171.110	100,00	88,68	1	153.171.110	14,29	28,26	
		5	1	3	2,03	2		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	4	1.030.000.000		-	4	70.000.000																				-				
		5	1	3	2,03	3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	4	547.000.000	4	34.597.000	4	100.000.000	4	24.393.235	4	82.378.369		25	870.000		50	5.172.000		60	7.632.000	4	100	52.221.000	4	65.895.000	100,00	79,99	4	65.895.000	100,00	12,05	
		5	1	3	2,03	4		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan - Sinkronisasi Renja	6	802.000.000	1	76.530.251	1	152.000.000																								
		5	1	3	2,03	5		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen - RKPD	7	572.000.000	1	39.249.925	1	105.000.000																								

No.	Sasaran	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2022 s/d 2026)	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output) (Renstra 2022 s/d 2026)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)						Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Anggaran 2023												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3						4	5	6	7		8		9						10			11			12			13			14 =10+11+12+13		15 = 14/9 x 100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18
		5	1	3	2, 03	6		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	4	163.000.000	4	95.420.992	4	26.000.000																										
																																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		102,56	75,60			97,56	6,89	
																																	Predikat Kinerja		ST	T					
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Baperitbang	5	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase	80	43.620.737.000	85	7.576.147.737	80	9.371.500.000	85	8.596.109.255	85	9.167.176.688	-	20	1.662.845.142	-	48	2.335.482.631	-	70	2.163.927.412	85	100	2.033.178.830	85	8.195.434.015	100,00	89,40	85	8.195.434.015	106,25	18,79	
		5	1	1	2, 01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	16	918.500.000	2	93.376.000	3	171.500.000	3	108.968.253	3	100.729.253	-	15	12.750.000		66	45.228.500	-	60	1.691.000	3	100	14.082.000	3	73.751.500	100	73,22	1,00	73.751.500	18,89	8,03	
		5	1	1	2, 01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen - Renja	6	430.000.000	1	23.877.000	1	80.000.000	1	31.088.500	1	42.674.500		40	12.750.000		80	15.750.000		94	1.025.000	1	100	12.750.000	1	42.275.000	100,00	99,06	1	42.275.000	16,67	9,83	
		5	1	1	2, 01	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	280.000.000	1	27.663.000	1	53.000.000	1	26.314.753	1	39.064.753				1	98	15.913.500		100			100	-	1	15.913.500	100,00	40,74	1	15.913.500	20,00	5,68	
		5	1	1	2, 01	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	208.500.000	1	41.836.000	1	38.500.000	1	51.565.000	1	18.990.000					20	13.565.000		30	666.000	1	100	1.332.000	1	15.563.000	100,00	81,95	1	15.563.000	20,00	7,46	
		5	1	1	2, 02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	5	25.628.000.000	1	4.905.144.988	1	5.086.000.000	1	5.940.999.313	1	6.380.126.315	-	15	1.314.799.627	-	30	1.673.328.988	-	60	1.617.562.307	1	100	1.373.001.000	1,00	5.978.691.922	100	93,71	1	5.978.691.922	20,00	23,33	
		5	1	1	2, 02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang Bulan (41 orang x 12 bulan)	2.460	24.215.000.000	861	3.833.470.988	492	4.815.000.000	492	5.040.379.857	492	5.294.789.962	123	25,00	1.054.107.627	123	50	1.403.370.988	123	76	1.370.604.307	123	100	1.112.452.000	492,00	4.940.534.922	100,00	93,31	492	4.940.534.922	20,00	20,40	
		5	1	1	2, 02	2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	1.116.000.000	1	1.071.674.000	1	216.000.000	1	875.640.000	1	1.050.768.000		25,00	260.692.000		50	255.792.000		81	244.792.000	1	100	245.792.000	1,00	1.007.068.000	100,00	95,84	1	1.007.068.000	20,00	90,24	

No.	Sasaran	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2022 s/d 2026)	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output) (Renstra 2022 s/d 2026)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Anggaran 2023												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3						4	5	6	7		8		9				10			11			12			13			14 =10+11+12+13		15 = 14/9 x 100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18
		5	1	1	2,02	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	297.000.000		-	1	55.000.000	1	24.979.456	1	34.568.353		25			50	14.166.000		67	2.166.000	1	100	14.757.000	1,00	31.089.000	100,00	89,93	1	31.089.000	20,00	10,47	
		5	**1**	**1**	**2,03**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Laporan**	**5**	**297.000.000**		-	**1**	**55.000.000**		**0**																		
		5	1	1	2,03	5		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	10	297.000.000		-	2	55.000.000																				
		5	**1**	**1**	**2,05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Laporan**	**5**	**2.120.000.000**	**1**	**157.113.000**	**1**	**670.000.000**	**1**	**182.717.564**	**1**	**146.639.564**	-	**20**	**5.200.000**	-	**50**	**79.756.400**	-	**60**	**8.896.500**	**1**	**100**	**-**	**1**	**93.852.900**	**100**	**64,00**	**1**	**93.852.900**	**20,00**	**4,43**	
		5	1	1	2,05	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	1.470.000.000	1	128.745.000	1	320.000.000	1	92.525.564	1	92.525.564		40,00	5.200.000	1	100	79.756.400		100			100	-	1	84.956.400	100,00	91,82	1	84.956.400	20,00	5,78	
		5	1	1	2,05	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	140	650.000.000	30	28.368.000	30	350.000.000	30	90.192.000	30	54.114.000								15	8.896.500	2	40	-	2	8.896.500	6,67	16,44	2	8.896.500	1,43	1,37	
		5	**1**	**1**	**2,06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Laporan**	**5**	**4.008.996.000**	**1**	**999.675.935**	**1**	**906.500.000**	**1**	**956.070.225**	**1**	**942.667.286**	-	**10**	**66.860.232**	-	**27**	**244.905.379**	-	**60**	**214.370.500**	**1**	**100**	**210.822.800**	**1**	**736.958.911**	**100,00**	**78,18**	**1**	**736.958.911**	**20,00**	**18,38**	
		5	1	1	2,06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	201.000.000	1	15.446.500	1	34.000.000	1	13.998.140	1	13.998.140					20	2.915.500		46	3.393.300	1	100	1.332.000	1	7.640.800	100,00	54,58	1	7.640.800	20,00	3,80	
		5	1	1	2,06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	774.000.000	1	133.491.800	1	152.000.000	1	138.919.939	1	138.919.173					20	24.755.579		55	47.436.700	1	100	7.771.500	1	79.963.779	100,00	57,56	1	79.963.779	20,00	10,33	
		5	1	1	2,06	3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	162.000.000	1	14.579.000	1	27.000.000	1	13.996.800	1	9.099.600					31	2.822.300		40	666.000	1	100	666.000	1	4.154.300	100,00	45,65	1	4.154.300	20,00	2,56	

No.	Sasaran	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2022 s/d 2026)	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output) (Renstra 2022 s/d 2026)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)						Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Anggaran 2023										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3						4	5	6	7		8		9						10			11			12			13			14 =10+11+12+13		15 = 14/9 x 100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18
		5	1	1	2,06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	162.000.000	-	-	1	27.000.000																						-				
		5	1	1	2,06	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	757.000.000	5	72.891.600	1	145.000.000	1	56.678.280	1	49.672.737					10	1.332.000		27	13.247.000	1	100	6.422.000	1	21.001.000	100,00	42,28	1	21.001.000	20,00	2,77	
		5	1	1	2,06	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	25	260.000.000	5	30.954.000	5	50.000.000	5	36.264.000	5	31.264.000			2.215.000		23	7.311.000		60	10.236.000	5	100	10.166.000	5	29.928.000	100,00	95,73	5	29.928.000	20,00	11,51	
		5	1	1	2,06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	1.375.496.000	12	682.681.035	12	271.500.000	12	667.149.066	12	656.449.636	3	20,00	64.645.232	3	35	200.003.000	**3**	60	132.925.500	3	100	162.999.300	12	560.573.032	100,00	85,39	12	560.573.032	20,00	40,75	
		5	1	1	2,06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	317.500.000	1	49.632.000	1	200.000.000	-	29.064.000	1	43.264.000					13	5.766.000		45	6.466.000	1	100	21.466.000	1	33.698.000	100,00	77,89	1	33.698.000	20,00	10,61	
		5	**1**	**1**	**2,07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Laporan**	**5**	**3.153.000.000**	**1**	**358.772.950**	**1**	**705.000.000**	**1**	**241.218.100**	**1**	**248.774.950**	**-**	**30**	**49.000.000**	**-**	**40**	**1.998.000**	**-**	**60**	**38.890.000**	**1**	**100**	**111.346.850**	**1**	**201.234.850**	**100,00**	**80,89**	**1**	**201.234.850**	**20,00**	**6,38**	
		5	1	1	2,07	2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	250.000.000	-	-	-	250.000.000,00																								
		5	1	1	2,07	5		Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Unit	105	1.130.000.000	24	132.872.750	15	150.000.000	1	19.617.000	1	62.474.000					10	1.332.000		99	18.062.000	1	100	42.054.000	1	61.448.000	100,00	98,36	1	61.448.000	0,95	5,44	
		5	1	1	2,07	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	80	1.225.000.000	19	176.900.200	10	200.000.000	17	171.935.100	17	136.634.950						-		20	20.828.000	16	90	69.292.850	16	90.120.850	94,12	65,96	16	90.120.850	20,00	7,36	
		5	1	1	2,07	9		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	548.000.000	2	49.000.000	2	105.000.000	1	49.666.000	2	49.666.000	2	100	49.000.000		100	666.000		100	-		100	-	2	49.666.000	100,00	100,00	2	49.666.000	20,00	9,06	
		5	**1**	**1**	**2,08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan**	**5**	**4.665.000.000**	**1**	**938.010.564**	**1**	**905.000.000**	**1**	**997.493.800**	**1**	**1.169.737.320**	**-**	**25**	**211.235.283**	**-**	**40**	**277.473.364**	**-**	**60**	**254.417.805**	**1**	**100**	**293.916.580**	**1**	**1.037.043.032**	**100,00**	**88,66**	**1**	**1.037.043.032**	**20,00**	**22,23**	
		5	1	1	2,08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	998.000.000	12	319.177.564	12	180.000.000	12	320.581.800	12	357.673.320	3	25	64.927.283	3	50	80.596.364	3	72	81.348.805	3	100	99.026.580	12	325.899.032	100,00	91,12	12	325.899.032	20,00	32,66	

No.	Sasaran	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2022 s/d 2026)	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output) (Renstra 2022 s/d 2026)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)						Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Anggaran 2023												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3						4	5	6	7		8		9						10			11			12			13				14 =10+11+12+13		15 = 14/9 x 100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18
		5	1	1	2,08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	3.667.000.000	12	618.833.000	12	725.000.000	12	676.912.000	12	812.064.000	3	25	146.308.000	3	45	196.877.000	3	79	173.069.000	3	100	194.890.000	12	711.144.000	100,00	87,57	12	711.144.000	20,00	19,39	
		5	**1**	**1**	**2,09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan**	**5**	**2.830.241.000**	**1**	**124.054.300**	**1**	**872.500.000**	**1**	**168.642.000**	**1**	**178.502.000**	-	5	**3.000.000**	-	**12**	**12.792.000**	-	**60**	**28.099.300**	**1**	**100**	**30.009.600**	**1**	**73.900.900**	**100**	**41,40**	**1**	**73.900.900**	**20,00**	**2,61**	
		5	1	1	2,09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	283.500.000	2	49.329.300	2	53.500.000	2	68.728.000	2	68.728.000		4,40	3.000.000		25	8.220.000		45	18.567.300	2	100	24.827.600	2	54.614.900	100,00	79,47	2	54.614.900	100,00	19,26	
		5	1	1	2,09	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	200.000.000	-	-	-	50.000.000,00																		-	-			
		5	1	1	2,09	5		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	25	153.000.000	5	14.139.000	5	25.500.000	7	9.664.000	7	0						-							-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	
		5	1	1	2,09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	234.500.000	5	37.372.000	5	43.500.000	5	26.484.000	5	28.008.000					20	4.572.000		56	9.532.000	5	100	5.182.000	5	19.286.000	100,00	68,86	5	19.286.000	20,00	8,22	
		5	1	1	2,09	9		Pemeliharaan /Rehablitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1.959.241.000	1	23.214.000	1	700.000.000	1	63.766.000	1	81.766.000						-				1	50	-	1	-	100,00	-	1	-	100,00	-	
																																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**100,00**	**89,40**			**106,25**	**18,79**	
																																Predikat Kinerja		ST	T					
		5	**05**					**Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan**				**4.961.000.000**		**484.207.431**		**1.400.000.000**		**705.490.028**		**321.458.621**			**12.112.000**			**62.712.714**			**55.405.500**			**52.445.700**		**182.675.914**				**182.675.914**			
4	**Meningkatnya Kualitas Kelitbangan Daerah**	**5**	**5**	**2**				**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**1). Persentase implementasi rencana kelitbangan**	**Persentase**	**35**	**3.044.000.000**	**15**	**239.023.365**	**20**	**1.000.000.000**	**20**	**324.000.846**	**20**	**107.954.329**	-	**5**	**9.111.000**		**10**	**10.665.414**		**60**	**26.033.900**	**20**	**100**	**16.002.700**	**20**	**61.813.014**	**100**	**57,26**	**20**	**61.813.014**	**57,14**	**2,03**	
									2). Jumlah inovasi daerah	**Inovasi**	**5**	**1.917.000.000**	**2**	**245.184.066**	**1**	**400.000.000**	**1**	**381.489.182**	**1**	**213.504.292**	-	**5**	**3.001.000**	-	**15**	**52.047.300**	-	**60**	**29.371.600**	**1**	**100**	**36.443.000**	**1**	**120.862.900**	**100**	**56,61**	**1**	**120.862.900**	**20,00**	**6,30**	
		5	**5**	**2**	**2,01**			**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Laporan**	**9**	**1.009.000.000**	**1**	**239.023.365**	**2**	**250.000.000**	**1**	**177.000.329**	**1**	**107.954.329**	-	**10**	**9.111.000**	-	**10**	**10.665.414**	-	**60**	**26.033.900**	**1**	**100**	**16.002.700**	**1**	**61.813.014**	**100**	**57,26**	**1**	**61.813.014**	**11,11**	**6,13**	

No.	Sasaran	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2022 s/d 2026)	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output) (Renstra 2022 s/d 2026)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Anggaran 2023												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3						4	5	6	7		8		9				10			11			12			13			14 =10+11+12+13		15 = 14/9 x 100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18
		5	5	2	2,01	5		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	1	150.000.000	-	-	-	150.000.000,00																				-	-	-	-	
		5	5	2	2,01	10		Fasilitasi , Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Laporan	1	100.000.000		-	-	-																		-	-	-	-	
		5	5	2	2,01	11		Fasilitasi dan Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Laporan	1	85.000.000		-	-	-																		-	-	-	-	
		5	5	2	2,01	12		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	5	674.000.000	1	239.023.365	1	100.000.000	1	177.000.329	1	107.954.329	-	10	9.111.000	-	10	10.665.414	-	30	26.033.900	1	100	16.002.700	1	61.813.014	100,00	57,26	2	61.813.014	40,00	9,17	
		5	**5**	**2**	**2,02**			**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Dokumen**	**2**	**250.000.000**	**-**	**-**	**1**	**0**																				**-**	**-**	**-**	**-**	
		5	5	2	2,02	5		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	150.000.000		-	0	0																		-	-	-	-	
		5	5	2	2,02	9		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	1	100.000.000		-	-	-																		-	-	-	-	
		5	**5**	**2**	**2,03**			**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Dokumen**	**11**	**1.785.000.000**	**-**	**-**	**3**	**750.000.000**	**1**	**147.000.517**	**1**	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-				**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	

No.	Sasaran	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2022 s/d 2026)	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output) (Renstra 2022 s/d 2026)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)						Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Anggaran 2023									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3						4	5	6	7		8		9						10			11			12			13			14 =10+11+12+13		15 = 14/9 x 100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18
		5	5	2	2,03	1		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	85.000.000	-	-	-	-																	-	-	-	-	
			5	2	2,03	2		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	150.000.000	-	-	-																	-	-	-	-	
		5	5	2	2,03	4		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	250.000.000	-	1	250.000.000	1	147.000.517	1	0										0	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	
		5	5	2	2,03	5		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	2	400.000.000	-	1	250.000.000																					
		5	5	2	2,03	7		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	150.000.000	-	0	0																	-	-	-	-	
		5	5	2	2,03	9		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	1	150.000.000	-	0	0																	-	-	-	-	
		5	5	2	2,03	10		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	1	250.000.000	-	1	250.000.000																	-	-	-	-	
		5	5	2	2,03	11		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	100.000.000	-	-	-																	-	-	-	-	
		5	5	2	2,03	12		Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	2	250.000.000	-	-	-																	-	-	-	-	
		5	**5**	**2**	**2,04**			**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Dokumen**	**24**	**1.917.000.000**	**1**	**4**	**400.000.000**	**1**	**381.489.182**	**1**	**213.504.292**	-	**5**	**3.001.000**	-	**15**	**52.047.300**		**55**	**29.371.600**	**1**	**100**	**36.443.000**	**1**	**120.862.900**	**100**	**56,61**	**1**	**120.862.900**	**4,17**	**6,30**	

No.	Sasaran	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2022 s/d 2026)	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output) (Renstra 2022 s/d 2026)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)						Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Anggaran 2023												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3						4	5	6	7		8		9						10			11			12			13			14 =10+11+12+13		15 = 14/9 x 100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18
		5	5	2	2,04	1		Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di BidangTeknologi dan Inovasi	Dokumen-Dok SIDA	5	750.000.000	1	97.270.900	1	150.000.000	1	78.164.211	1	56.664.211	-	-	-		25	16.693.000		35	9.294.600	1	100	7.907.000	1	33.894.600	100	59,82	1	33.894.600	20,00	4,52		
		5	5	2	2,04	3		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Dokumen -Lap IDSD -Lap IGA -Lap IPKD	15	767.000.000	2	147.913.166	3	150.000.000	2	183.580.081	2	156.840.081	-	10	3.001.000		20	35.354.300		33	20.077.000	2	100	28.536.000	2	86.968.300	100	55,45	2	86.968.300	13,33	11,34		
		5	5	2	2,04	4		Sosialisasi dan Diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelittangan	Laporan	4	400.000.000		-	1	100.000.000	1	119.744.890	1	0					#DIV/0!									-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																100,00	57,26			57,14	2,03	
Predikat Kinerja																																ST	R					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															13.890.000.000		12.180.131.439		12.205.186.202		2.045.126.286			2.994.961.268			2.676.884.262			2.651.022.380		10.367.994.196							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																																105,14	73,61			95,92	11,02	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																																ST	S					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:																																						

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari sinergitas antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dengan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota diantaranya melalui kebijakan perencanaan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka memadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota masih belum optimal.

2.2.1. Pengukuran Kinerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Baperlitbang Kabupaten Karimun dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian target tahun ini dengan capaian hingga tahun lalu. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin buruk.

Perjanjian Kinerja Badan Perencanan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023 adalah seperti berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Badan Perencanan Penelitian
dan Pengembangan Kabupaten Karimun Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN		TARGET
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1.	Nilai AKIP Kabupaten – Perencanaan Kinerja	24,50
		2.	Persentase kegiatan RKPD yang diakomodir dalam APBD	70%
		3.	Persentase keselarasan RKPD dengan RKP	75%
2.	Meningkatnya kulitas kelitbangan daerah	1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	29%
		2.	Indeks Inovasi Daerah	47,50
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Baperlitbang	1.	Nilai AKIP Baperlitbang	79,97

2.2.2 Hasil Pengukuran Kinerja.

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititik beratkan pada sejauhmana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Perencanan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada

perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1) Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing masing kelompok indikator kegiatan;
2) Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Badan Perencanan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun Tahun 2023, seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPERLITBANG Kabupaten Karimun Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN		2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1.	Nilai AKIP Kabupaten – Perencanaan Kinerja	24,50	24,60	100,40
		2.	Persentase kegiatan RKPD yang diakomodir dalam APBD	70%	70,2%	100,28

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN		2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
		3.	Persentase keselarasan RKPD dengan RKP	75%	75%	100
2.	Meningkatnya kulitas kelitbangan daerah	1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	29%	22%	75,86
		2.	Indeks Inovasi Daerah	47,50	46,76	98,44
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Baperlitbang	1.	Nilai AKIP Baperlitbang	79,95	65,25	81,61
	RATA – RATA CAPAIAN KINERJA					**92,77**

Pencapaian Kinerja Baperlitbang tahun 2023 diukur melalui 6 (enam) Indikator Kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis. Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian target indikator kinerja adalah sebesar 92,77%. Dari 6 (enam) indikator kinerja yang di perjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Baperlitbang tahun 2023, terdapat 3 (tiga) target kinerja yang tercapai dan 3 (tiga) target kinerja tidak tercapai.

Capaian kinerja tahun 2023 diatas menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan perencanaan Baperlitbang tahun 2025. Dari hasil capaian kinerja diatas, Baperlitbang merencanakan kembali sasaran, indikator kinerja dan target kinerja untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan, kinerja perencanaan dan kinerja kelitbangan daerah. Hal-hal yang akan menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan Baperlitbang tahun 2025 berdasarkan capaian kinerja tahun 2023 tersebut yaitu :

1. Penyusunan dokumen perencanaan berorientasi hasil untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perencanaan daerah. Perencanaan disusun dengan *logical frame* / kerangka berpikir untuk pencapaian tujuan dan sasaran daerah;

2. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Perencana sehingga mampu menyusun perencanaan yang baik;
3. Konsistensi perencanaan dan penganggaran agar rencana yang disusun dapat diimplementasi;
4. Peningkatan hasil-hasil kajian dan penelititan;
5. Mengoptimalkan inovasi daerah; dan
6. Mengotimalkan Akuntabilitas Kinerja baperlitbang.

Penyusunan Renja Baperlitbang Tahun 2025 juga memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi AKIP Baperlitbang Tahun 2022 yang disampaikan oleh Inspektorat Daerah yaitu :

1. Memperbaiki Standar pemenuhan Komponen Akuntabilitas Kinerja, seperti penjelasan pada Sasaran agar dapat menggambarkan kondisi hasil diselaraskan dengan Indikator Kinerja yang SMART, serta target setting yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menyelaraskan Kinerja disetiap jenjang jabatan secara logis;
3. Aktivitas yang dilaksanakan mendukung Kinerja yang ingin dicapai berupa keselarasan Perjanjian Kinerja dengan Rencana Aksi;
4. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja harus dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track;
5. Perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Badan Perencanan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui berbagai

pendekatan kebijakan dengan menentukan strategi operasional.

Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program dan kegiatan yang berkelanjutan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas sebagai suatu sistem operasional Badan Perencanan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun.

Adapun isu-isu strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan adalah :

1. **Peningkatan perencanaan berorientasi hasil;**

   Merupakan upaya penyempurnaan penjabaran kinerja sehingga terwujud keselarasan antara Rencana tingkat Pemda dan rencana tingkat Perangkat Daerah, penyelarasan juga dilakukan antara dokumen perencanaan tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat agar lebih berorientasi hasil sehingga tercipta keselarasan dan mendorong tercapainya kinerja organisasi.

2. **Peningkatan kompetensi SDM dibidang perencanaan;**

   Merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan perencana dibidang perencanaan melalui pelatihan, bimbingan teknis, asistensi, workshop.

3. **Peningkatan pengelolaan data informasi pembangunan;**

   Merupakan upaya untuk membangun basis data daerah yang akurat dan lengkap melalui kerjasama dengan instansi-instansi penyedia data/informasi serta membangunan sistem data yang berkesinambungan.

4. **Optimalisasi hasil penelitian/kajian/studi;**

   Merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang didasarkan pada hasil penelitian/kajian/studi/dll. Hasil penelitian tersebut juga diharapkan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki daerah.

5. **Pengembangan Inovasi Daerah;**

   Merupakan upaya untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi SDM Perangkat Daerah maupun masyarakat dalam menciptakan inovasi daerah.

6. **Peningkatan pengendalian pembangunan dan konsistensi kebijakan perencanaan;**

   Merupakan upaya untuk menyelaraskan perencanaan dengan panganggaran. Pengendalian dan evaluasi ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah.

7. **Peningkatan Akuntabilitas Baperlitbang.**

   Merupakan upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Baperlitbang dengan mengoptimalkan perjanjian kinerja, monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala untuk pencapaian sasaran perangkat daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan teradap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaringan aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Baperlitbang sebagai Perangkat Daerah penyusun perencanaan daerah tidak menyusun rencana kerja terkait usulan program dan kegiatan masyarakat pada dokumen perencanaannya. Setiap usulan dan kegiatan masyarakat melalui forum perencanaan dikoordinasikan kepada Perangkat Daerah teknis penanggungjawab.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan mengacu pada Undang-undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan Baperlitbang. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang

disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut sangat erat kaitannya dengan keberadaan dan ketersediaan Aparatur, sehingga kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan Misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis yang dihadapi. Untuk mengawal terwujudnya Misi Kabupaten Karimun, maka Tujuan yang ditetapkan oleh perangkat daerah merupakan perwujudan dari sasaran jangka menengah RPJMD Kabupaten Karimun. Baperlitbang merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berperan dalam mewujudkan sasaran RPJMD tersebut. Adapun sasaran jangka menengah RPJMD yang kemudian menjadi tujuan Baperlitbang tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih dan akuntabel**
2. **Meningkatkan kualitas pelayanan publik**

Perwujudkan kedua tujuan Baperlitbang tersebut memiliki makna: 1) terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif serta mampu melayani kebutuhan masyarakat secara optimal dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh birokrat sehingga dapat menciptakan inovasi-inovasi didalam pelayanan publik dan dapat menyampaikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat serta cepat; 2) penguatan peran birokrasi pemerintahan dalam perwujudan visi pemerintah Kabupaten Karimun adalah melalui pembenahan, perbaikan dan penguatan administrasi dan manajemen kepegawaian; 3) perubahan dan pembenahan tersebut diharapkan mampu membawa perubahan terhadap mindset dan culturset birokrasi pemerintah Kabupaten Karimun sehingga menghasilkan aparatur yang berintegritas, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera yang pada akhirnya membentuk profil birokrasi pemerintah Kabupaten Karimun yang profesional dalam rangka mendukung visi Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan berlandaskan iman dan taqwa. “birokrasi yang unggul” memiliki makna: adalah pengembangan sumber daya aparatur dengan melakukan peningkatan skill (keterampilan) yang adaptif dan memiliki kemampuan menguasai teknologi, kemampuan berpikir, beraktualisasi, memiliki kapasitas inovatif dan kreatif dengan melakukan pembenahan dalam sisi birokrasi yang bersifat melayani masyarakat sehingga terwujudnya percepatan transformasi birokrasi melalui pengembangan sistem kinerja pelayanan dan sistem organisasi yang modern serta

peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui peningkatan kompetensi secara agresif.

Sesuai dengan kewenangannya, Penetapan tujuan tersebut pada Baperlitbang berfokus pada terwujudnya professionalitas Baperlitbang di bidang perencanaan dan penelitian pengembangan daerah dalam rangka mewujudkan perencanaan daerah yang berkualitas berorientasi *outcome* atau hasil sehingga pembangunan dapat berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten karimun. Pengukuran ketercapaian tujuan **Mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih dan akuntabel** dilakukan dengan mengukur ketercapaian dua indikator kinerja yaitu "Nilai LPPD" dan "Nilai Reformasi Birokrasi". Penetapan target untuk kedua indikator tersebut ditetapkan sesuai dengan target yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Baperlitbang berperan dalam mencapai Nilai Akuntabilitas Perencanaan yang merupakan pembentuk Nilai LPPD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Karimun yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB.

Sedangkan untuk pengukuran ketercapaian tujuan **Meningkatkan kualitas pelayanan publik** dilakukan dengan mengukur ketercapaian satu indikator yaitu "Indeks Pelayanan Publik". Penetapan target untuk indikator tersebut ditetapkan sesuai dengan target yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Baperlitbang berperan dalam mencapai Indeks Pelayanan Publik dengan cara meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja Baperlitbang. Untuk mencapai target-target indikator tujuan sebagaimana dijabarkan diatas maka dirumuskan sasaran-sasaran Perangkat Daerah dengan target yang akan dimonitor tahunan.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Sasaran Kinerja Baperlitbang tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan 1 :

Sasaran Strategis 1 : **Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.**

Kualitas perencanaan pembangunan daerah dikatakan meningkat jika perencanaan daerah disusun berorientasi hasil dengan alat ukur dan target yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan daerah Kabupaten /Kota harus selaras dan bersinergi dengan Provinsi dan Pusat sehingga tercipta keterpaduan antara daerah dan pusat dalam pencapaian kinerja pembangunan secara makro. Sinkronisasi Perencanaan dengan penganggaran juga merupakan faktor penting dalam mewujudkan perencanaan dan pengendalian perencanaan yang berkualitas. Sinkronisasi tersebut bertujuan agar anggaran yang digunakan dapat diberdayakan efektif dan efisien dalam mewujudkan ketercapaiaan target-target tujuan dan sasaran daerah dengan kata lain disebut *money follow program*.

Indikator Kinerja Sasaran :

- Nilai AKIP Kabupaten – Perencanaan Kinerja, juga merupakan penilaian untuk mengukur kualitas perencanaan. Aspek pengukuran perencanaan kinerja yaitu perencanaan harus berorientasi *outcome*/hasil yang tergambar dalam pohon kinerja dan cascading dengan alat ukur dan target yang jelas dan saling selaras pada setiap

jenjang jabatan, terciptanya efisiensi anggaran dalam merealisasikan rencana yang telah disusun serta pengukuran ketercapaian target-target sasaran strategis daerah. Pengukuran Nilai AKIP dilakukan oleh Kementerian PAN RB terhadap dokumen perencanaan K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- Persentase keselarasan RKPD dengan RKP, merupakan pengukuran keselarasan target indikator makro dan program pusat dengan daerah sehingga dapat dilihat keterpaduan pada kedua dokumen tersebut.
- Persentase kegiatan RKPD yang diakomodir dalam APBD, merupakan pengukuran seberapa banyak kegiatan yang sudah direncanakan dapat direalisasikan/dilaksanakan.

Sasaran Strategis 2 : **Meningkatnya Kualitas Kelitbangan Daerah.**

Peningkatan kualitas kelitbangan daerah merupakan upaya daerah untuk meningkatkan kemanfaatan hasil-hasil kelitbangan sebagai rujukan utama dalam penataan dan perumusan kebijakan dilingkungan Kabupaten Karimun.

Indikator Kinerja Sasaran :

- Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, merupakan pengukuran terhadap hasil-hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- Indeks Inovasi Daerah, merupakan pengukuran terhadap pengembangan inovasi daerah mulai dari tersedianya kebijakan-kebijakan inovasi, penganggaran yang mendukung pengembangan inovasi daerah, jumlah inovasi yang diciptakan dan dimanfaatkan masyarakat, peran pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan inovasi, dll. Pengukuran Indeks inovasi daerah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Tujuan 2 :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Baperlitbang

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas Kinerja Baperlitbang sesuai dengan tugas fungsinya mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam urusan pemerintah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Pengukuran akuntabilitas kinerja baperlitbang dilakukan mulai dari tahapan perencanaan hingga pelaporan. Diharapkan dari peningkatan sasaran ini Baperlitbang dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kedepannya.

Indikator Kinerja Sasaran :

- Nilai AKIP Baperlitbang, merupakan pengukuran terhadap Akuntabilitas kinerja Baperlitbang mulai dari kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah, pengukuran capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah hingga pelaporan kinerja Perangkat Daerah. Pengukuran dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun rutin setiap tahunnya.
- Level kematangan MR Baperlitbang, merupakan pengukuran terhadap kondisi penerapan manajemen risiko perangkat daerah yang terbagi kedalam 5 level yaitu Belum Sadar Risiko, Sadar Risiko, Risiko Ditetapkan, Risiko Dikelola dan Dapat Menangani Risiko.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Baperlitbang Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2025
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Nilai AKIP Kabupaten – Perencanaan Kinerja	25
			2. Persentase keselarasan RKPD dengan RKP	89%
			3. Persentase kegiatan RKPD yang diakomodir dalam APBD	85%
		2. Meningkatnya kulitas kelitbangan daerah	1. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	28%
			2. Indeks Inovasi Daerah	47
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Baperlitbang	1. Nilai AKIP Baperlitbang	75
			2. Level Kematangan MR Baperlitbang	3

Penetapan target indikator kinerja sasaran sangat dipengaruhi pada hasil evaluasi Laporan kinerja Baperlitbang tahun 2023 sebagaimana telah di urai juga di Bab II dokumen Renja ini serta dengan mempertimbangkan target kinerja tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Baperlitbang tahun 2024.

Untuk mengoptimalkan pengukuran pencapaian sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Baperlitbang” pada tahun 2024 dan 2025 baperlitbang menambah satu indikator yaitu “Level Kematangan MR Baperlitbang” karna Kematangan Manajemen Risiko dapat menjadi tolok ukur dalam peningkatan akuntabilitas suatu perangkat daerah. Ditargetkan ditahun 2025 Level Kematangan MR Baperlitbang adalah di level 3 (*Risk Defined*). Sedangkan target kinerja untuk lima indikator lainnya ditetapkan diatas capaian kinerja 2023 dan atas target kinerja 2024.

Keterkaitan antara Isu Strategis dan Sasaran Strategis
Gambar 3.1

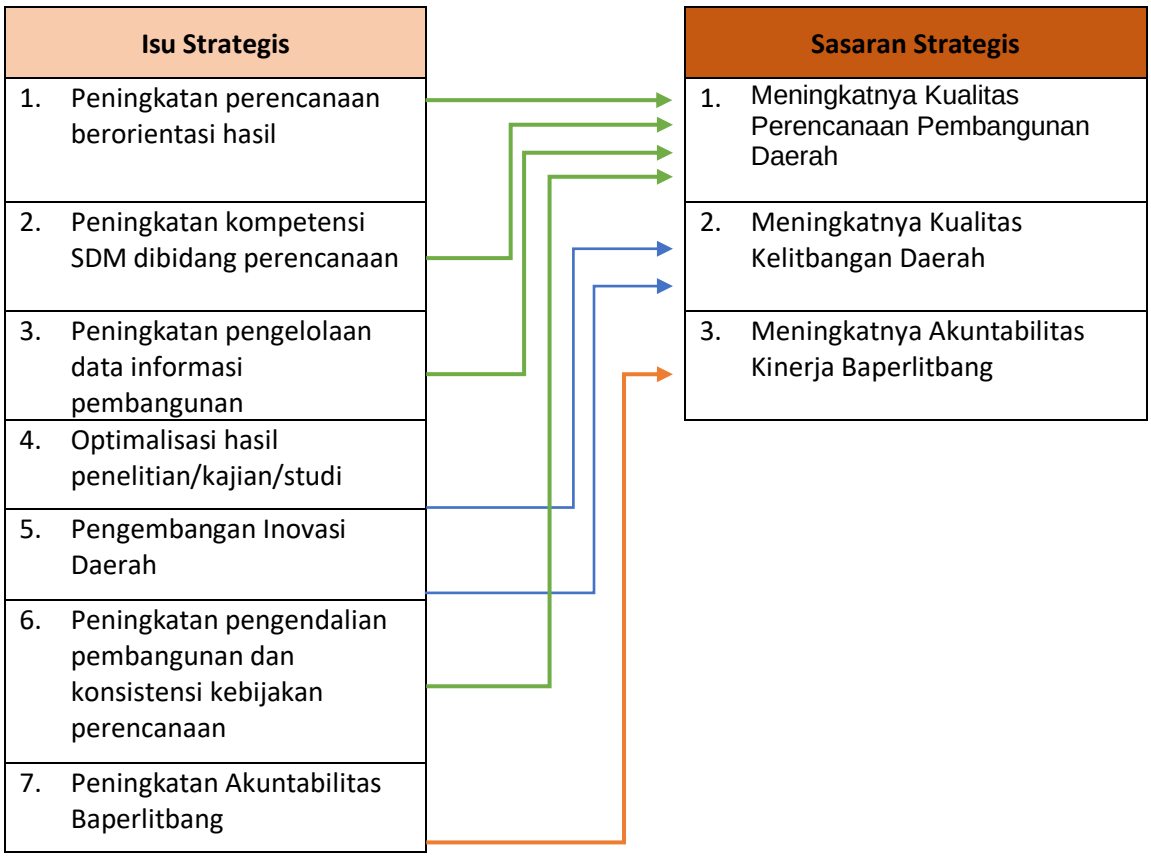

Keterkaitan antara Sasaran Strategis Baperlitbang dengan Sasaran Strategis RKPD
Gambar 3.2

Sasaran Strategis Baperlitbang	Sasaran Strategis RKPD
1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Meningkatnya Investasi Daerah
2 Meningkatnya Kualitas Kelitbangan Daerah	2. Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan
3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Baperlitbang	3. Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah
	4. Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat yang Merata
	5. Terwujudnya Prasarana Penghubung yang Optimal
	6. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
	7. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
	8. Terwujudnya Kesetaraan Gender
	9. Terwujudnya Pengendalian Penduduk
	10. Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan
	11. Meningkatnya Peran serta Masyarakat Dalam Pelestarian Nilai Budaya
	12. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
	13. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial
	14. Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah
	15. Meningkatnya pengelolaan dan kelestarian Lingkungan Hidup
	16. Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah dan Air
	17. Terwujudnya birokrasi yang profesional, bersih dan akuntabel
	18. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Secara umum upaya-upaya dilakukan agar setiap target dapat tercapai antara lain dengan menetapkan strategi dan kebijakan. Berikut strategi dan kebijakan yang ditetapkan agar pencapaian kinerja lebih maksimal :

Tabel 3.2
Strategi dan Kebijakan

Visi :	**TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA**		
Misi 5 :	**Mewujudkan birokrasi yang profesional dan unggul**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Mewujudkan Birokrasi yang profesional, bersih dan akuntabel	1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan perencanaan partisipatif, terarah, sinergis dan berorientasi hasil	Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan.
			Peningkatan pembangunan yang responsive gender.
			Peningkatan Koordinasi dan komunikasi perencanaan di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat.
			Penyelenggaraan Perencanaan daerah berbasis TIK.
		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan PD	Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM perencana.
			Peningkatan kualitas verifikasi dokumen perencanaan PD dengan dokumen perencanaan daerah.
		Meningkatkan kualitas dan pengelolaan layanan data/ informasi pembangunan daerah	Peningkatan ketersediaan data/informasi pembangunan daerah.
			Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan penyedia data/informasi pembangunan.
			Penyediaan sarana dan media layanan informasi pembangunan daerah.
		Meningkatnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas evaluasi dan pelaporan kinerja daerah secara berkala.
			Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi berbasis TIK.
		Meningkatkan fungsi penelitian	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kelitbangan.

Visi :	TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA		
Misi 5 :	Mewujudkan birokrasi yang profesional dan unggul		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
	2. Meningkatnya kualitas kelitbangan	dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan koordinasi dan penguatan kerjasama kelitbangan
			Peningkatan kualitas dokumen kajian, studi dan litbang
			Peningkatan pengembangan sistem inovasi daerah.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Baperlitbang	Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan PD	Peningkatan kualitas SDM PD
			Peningkatan sarana prasarana kerja yang memadai
			Penerapan SOP PD
			Peningkatan evaluasi kinerja pegawai PD secara berkala berdasarkan PK dan SKP

3.3. Program, Kegiatan dan Subkegiatan BAPERLITBANG Tahun 2025

Selanjutnya dalam rangka implementasi kebijakan dalam menunjang pencapaian visi Misi Kepala Daerah dan pencapaian tujuan serta sasaran Baperlitbang maka pada tahun 2024 dirumuskan 4 program, 19 kegiatan dan 52 Subkegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 20.260.070.089,- (Dua Puluh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah). Pendanaan program/kegiatan tersebut direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun tahun anggaran 2025.

Berikut diuraikan program, pagu indikatif dan indikasi kegiatan dan keterkaitannya dengan Sasaran Strategis Baperlitbang tahun 2025 sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1 :

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Program dan Kegiatan yang mendukung yaitu :

1) **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

   Total Pagu Indikatif : **Rp. 5.297.766.500,-**

   Indikasi Kegiatan :

   - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
   - Analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah
   - Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah
   - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

2) **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

   Total Pagu Indikatif : **Rp. 1.682.994.200,-**

   Indikasi Kegiatan :

   - Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
   - Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber daya alam)
   - Koordinasi perencanaan bidang infastruktur dan kewilayahan

SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya Kualitas Kelitbangan Daerah

Program dan Kegiatan yang mendukung yaitu :

1). **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

   Total Pagu Indikatif : **Rp. 1.291.900.900,-**

   Indikasi Kegiatan :

   - Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan

- Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan
- Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan
- Pengembangan inovasi dan teknologi

SASARAN STRATEGIS 3 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Baperlitbang

Program dan Kegiatan yang mendukung yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Total Pagu Indikatif : **Rp. 11.987.408.489,-**

Indikasi Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- Administrasi keuangan perangkat daerah
- Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
- Administrasi kepegawaian perangkat daerah
- Administrasi umum perangkat daerah
- Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Secara rinci program, kegiatan dan subkegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 disajikan pada **tabel 3.3** berikut ini:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Karimun

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah PJ
									Tahun 2025				Prakiraan Maju Tahun 2026		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mewujudkan Birokrasi yang profesional, bersih dan akuntabel								**Nilai LPPD** **Nilai RB**		**4.0750** **63**	**8.272.661.600**		**4.1000** **64**	**4.428.000.000**	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah							**1). Nilai AKIP Kabupaten-Perencanaan Kinerja** **2). Persentase Kegiatan RKPD yang diakomodir dalam APBD** **3). Persentase keselarasan RKPD dengan RKP**		**25** **85,00%** **89,00%**	**6.980.760.700**		**25,20** **87,00%** **92,00%**	**3.603.000.000**	
		5	**1**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Capaian Kinerja Program**	**Kabupaten Karimun**	**95%**	**5.297.766.500**	**PAD**	**97%**	**1.590.000.000**	**Bidang P2EDP**
		5	**1**	**2**	**2**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah**		**100%**	**2.395.736.000**		**100%**	**930.000.000**	
		5	1	2	2,01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		2 BA (BA - RKPD, RPJMD)	50.131.500		1 BA (BA - RKPD)	60.000.000	
		5	1	2	2,01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		2 BA (BA. Forum PD - RKPD, RPJMD)	67.686.000		1 BA (BA. Forum PD - RKPD)	60.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah PJ
									Tahun 2025				Prakiraan Maju Tahun 2026		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	1	2	2,01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		2 BA (BA Musrenbang RKPD, RPJMD)	358.477.500		1 BA (BA Musrenbang RKPD)	200.000.000	
		5	1	2	2,01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		170 Usulan	352.647.500		170 Usulan	160.000.000	
		5	1	2	2,01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		3 Dokumen (RKPD, RKPD Perubahan, RPJMD)	1.566.793.500		2 Dokumen (RKPD, RKPD Perubahan)	450.000.000	
		5	**1**	**2**	**2**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Data/Informasi pembangunan daerah yang dianalisis**		**100%**	**252.788.000**		**100%**	**100.000.000**	
		5	1	2	2,02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		1 Dokumen	252.788.000		1 Dokumen	100.000.000	
		5	**1**	**2**	**2**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Hasil Evaluasi Dokumen Perencanaan (Berkala) yang Di Tindaklanjuti**		**100%**	**918.674.000**		**100%**	**300.000.000**	
		5	1	2	2,03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		2 Laporan (LKPj dan Ev. RKPD)	918.674.000		2 Laporan (LKPj dan Ev. RKPD)	300.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah PJ
									Tahun 2025				Prakiraan Maju Tahun 2026		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	**1**	**2**	**2**		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan yang teraplikasi di SIPD**		**2 Dokumen**	**1.730.568.500**		**1 Dokumen**	**260.000.000**	
		5	1	2	2,04	2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		1 Dokumen	1.730.568.500		1 Dokumen	260.000.000	
		5	**1**	**3**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD**	**Kabupaten Karimun**	**100%**	**1.682.994.200**	**PAD**	**100%**	**2.013.000.000**	**Bidang P3M dan Bidang P2SDAIK**
		5	**1**	**3**	**2**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Renstranya selaras dengan RPJMD**		**100%**	**656.994.200**		**100%**	**720.000.000**	
		5	1	3	2,01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		2 Dokumen (RKPD, RPJMD)	149.999.000		1 Dokumen (RKPD)	170.000.000	
		5	1	3	2,01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		1 Lap (Ev RKPD)	169.999.200		1 Lap (Ev RKPD)	190.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah PJ
									Tahun 2025				Prakiraan Maju Tahun 2026		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	1	3	2,01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		2 Dokumen (RKPD, RPJMD)	205.548.000		1 Dokumen (RKPD)	240.000.000	
		5	1	3	2,01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		1 Lap (Ev RKPD)	131.448.000		1 Lap (Ev RKPD)	120.000.000	
		5	**1**	**3**	**2**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase perangkat daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang Renstranya selaras dengan RPJMD**		**100%**	**418.000.000**		**100%**	**516.000.000**	
		5	1	3	2,02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		2 Dokumen (RKPD, RPJMD)	137.000.000		1 Dokumen (RKPD)	155.000.000	
		5	1	3	2,02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		1 Laporan			1 Laporan	45.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah PJ
									Tahun 2025				Prakiraan Maju Tahun 2026		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	1	3	2,02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		1 Lap (Ev RKPD)	62.000.000		1 Lap (Ev RKPD)	68.000.000	
		5	1	3	2,02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		2 Dokumen (RKPD, RPJMD)	157.000.000		1 Dokumen (RKPD)	175.000.000	
		5	1	3	2,02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		1 Lap (Ev RKPD)	62.000.000		1 Lap (Ev RKPD)	73.000.000	
		5	**1**	**3**	**2**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Renstranya selaras dengan RPJMD**		**100%**	**608.000.000**		**100%**	**777.000.000**	
		5	1	3	2,03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		2 Dokumen(RKPD, RPJMD)	301.526.000		1 Dokumen(RKPD)	325.000.000	
		5	1	3	2,03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan		1 Laporan	149.474.000		1 Laporan	300.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah PJ
									Tahun 2025				Prakiraan Maju Tahun 2026		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur							
		5	1	3	2,03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		1 Lap (Ev RKPD)	157.000.000		1 Lap (Ev RKPD)	152.000.000	
	Meningkatnya Kualitas Kelitbangan Daerah							**1). Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan** **2). Indeks Inovasi Daerah**		**28,00%** **47,00**	**1.291.900.900**		**30%** **47,20**	**825.000.000**	
		5	**5**	**2**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**1). Persentase implementasi rencana kelitbangan**	**Kabupaten Karimun**	**22%**	**654.000.200**	**PAD**	**30%**	**200.000.000**	**Bidang Riset dan Inovasi**
								2). Capaian Satuan Inovasi Daerah		**75,2**	**637.900.700**		**75,5**	**625.000.000**	
		5	**5**	**2**	**2**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**		**2 Rekomendasi**	**300.000.100**		**2 Rekomendasi**	**200.000.000**	
		5	5	2	2,01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik		1 Laporan	150.000.200		1 Laporan	200.000.000	
		5	5	2	2,01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		1 Laporan	149.999.900				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah PJ
									Tahun 2025				Prakiraan Maju Tahun 2026		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	**5**	**2**	**2**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Sosial dan Kependudukan**		**2 Rekomendasi**	**204.000.100**		-	-	
		5	5	2	2,02	5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		1 Dokumen (Kajian Pariwisata)	204.000.100,00		-	-	
		5	**5**	**2**	**2**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**		**2 Rekomendasi**	**150.000.000**				
		5	5	2	2,03	9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		1 Dokumen (Kajian Studi Potensi Air Baku/Air Bawah Tanah di Kab.Karimun)	150.000.000		-	-	
		5	**5**	**2**	**2**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase Inovasi dengan kematangan ≥ 70**		**81%**	**637.900.700**		**82%**	**625.000.000**	
		5	5	2	2,04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		2 dokumen (Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah (RIPJ-PID), dan Dok Profil Inovasi Karimun)	200.000.000		2 dokumen (Dok Capaian RIPJ-PID dan Dok Profil Inovasi Karimun)	200.000.000	
		5	5	2	2,04	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		3 Laporan (Lap IDSD, Lap IGA, Lap IPKD)	262.900.200		3 Laporan (Lap IDSD, Lap IGA, Lap IPKD)	250.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah PJ
									Tahun 2025				Prakiraan Maju Tahun 2026		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	5	2	2,04	4	Sosialisasi dan Diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		1 Laporan	175.000.500		1 Laporan	175.000.000	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik								**Indeks Pelayanan Publik**		**3.51**	**11.987.408.489**		**3.55**	**8.302.966.000**	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Baperlitbang							**Nilai AKIP Baperlitbang**		**75,00**	**11.987.408.489**		**80,00**	**8.302.966.000**	
								Level Kematangan MR Baperlitbang		**3**			**4**		
		5	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Kabupaten Karimun**	**85**	**11.987.408.489**	**PAD**	**85**	**8.302.966.000**	**Sekretariat Daerah**
		5	**1**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Kegiatan Renja yang diakomodir dalam DPA PD**		**80%**	**203.000.000**		**85%**	**158.000.000**	
		5	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen - Renja - Renstra	100.000.000		2 Dokumen - Renja	100.000.000	
		5	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	40.000.000		1 Laporan	58.000.000	
		5	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	63.000.000		1 Laporan		
		5	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase serapan anggaran PD**		**95%**	**8.341.245.189**		**95%**	**5.110.000.000**	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah PJ
									Tahun 2025				Prakiraan Maju Tahun 2026		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		624 orang bulan (52 orang x 12 bulan)	7.377.146.189		624 orang bulan (52 orang x 12 bulan)	4.830.000.000	
		5	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	894.768.000		1 Dokumen	218.000.000	
		5	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	69.331.000		1 Laporan	62.000.000	
		5	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Barang milik daerah yang teregistrasi**		**100%**	**0**		**100%**	**62.000.000**	
		5	1	1	2,03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	0		2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	62.000.000	
		5	**1**	**1**	**2,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang mendapat Layanan Kepegawaian**		**100%**	**385.024.000**		**100%**	**290.000.000**	
		5	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	189.742.000		1 Paket	140.000.000	
		5	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		30 Orang	195.282.000		30 Orang	150.000.000,00	
		5	**1**	**1**	**2,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan ADM Perkantoran di Kelola**		**100%**	**1.451.961.100**		**100%**	**821.996.000**	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah PJ
									Tahun 2025				Prakiraan Maju Tahun 2026		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	50.000.000		1 Paket	41.000.000	
		5	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	190.001.100		1 Paket	160.000.000	
		5	1	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	31.000.000		1 Paket	50.000.000	
		5	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	190.000.000		1 Paket	170.000.000	
		5	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		5 Dokumen	50.000.000		5 Dokumen	60.000.000	
		5	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	745.000.000		12 Laporan	300.996.000	
		5	1	1	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Dokumen	195.960.000		1 Dokumen	40.000.000	
		5	**1**	**1**	**2,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Rencana kebutuhan sarana prasarana kerja yang terpenuhi**		**100%**	**371.155.000**		**100%**	**505.000.000**	
		5	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		15 unit	47.717.000		20 unit	160.000.000	
		5	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 unit	298.438.000		15 unit	225.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah PJ
									Tahun 2025				Prakiraan Maju Tahun 2026		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	1	1	2,07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	25.000.000		2 Unit	120.000.000	
		5	**1**	**1**	**2,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**893.181.200**		**100%**	**1.000.000.000**	
		5	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	369.981.200		1 Laporan	250.000.000	
		5	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	523.200.000		1 Laporan	750.000.000	
		5	**1**	**1**	**2,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Asset dalam kondisi baik**		**100%**	**341.842.000**		**100%**	**355.970.000**	
		5	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	79.892.000		1 Unit	70.000.000	
		5	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		5 Unit	50.000.000		5 Unit	50.000.000	
		5	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	106.600.000		10 Unit	65.000.000	
		5	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	105.350.000		1 unit	170.970.000	
							TOTAL				**20.260.070.089**			**12.730.966.000**	

BAB 4 Penutup

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan Baperlitbang tahun 2025 ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Baperlitbang Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam RENJA Baperlitbang Tahun 2025 ini pun harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Baperlitbang, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan tersebut, harus melalui proses koordinasi maupun musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Perangkat Daerah di bawah lingkup Baperlitbang, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kinerja Baperlitbang Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen RENJA Tahun 2025 ini disusun berdasarkan kaidah-kaidah sistematika penulisan sesuai dengan

PERMENDAGRI Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pemabngunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

2. Penyusunan Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada dokumen RENJA Tahun 2025 ini disusun berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikai, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. RENJA Baperlitbang Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Karimun dan Renstra Baperlitbang).

4.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kualitas perencanaan daerah dengan mengoptimalkan penjabaran kinerja sehingga berorientasi hasil serta perlunya peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek;
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan penyusunan dokumen perencanaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, agar keterkaitan antara satu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dipertanggung jawabkan;
3. Meningkatkan konsistensi kesesuaian antara perencanaan program/ kegiatan dengan penganggaran agar target-target dari setiap indikator kinerja sasaran dapat terealisasi;
4. Meningkatkan hasil-hasil kajian untuk menjadi rekomendasi penyusunan kebijakan daerah;

5. Meningkatkan kesadaran berinovasi bagi perangkat daerah dan Masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja Baperlitbang.

Demikian dokumen RENJA Baperlitbang Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini disusun untuk dipedomani pada tataran implementasi. Keberhasilan pelaksanaan RENJA Baperlitbang Kabupaten Karimun akan terlaksana secara maksimal apabila semua aparatur berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen bersama, dalam memantapkan koordinasi dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Baperlitbang Kabupaten Karimun.

L A M P I R A N 1

(REVIU CASCADING BAPERLITBANG TAHUN 2021-2026)

HASIL REVIU CASCADING BAPERLITBANG

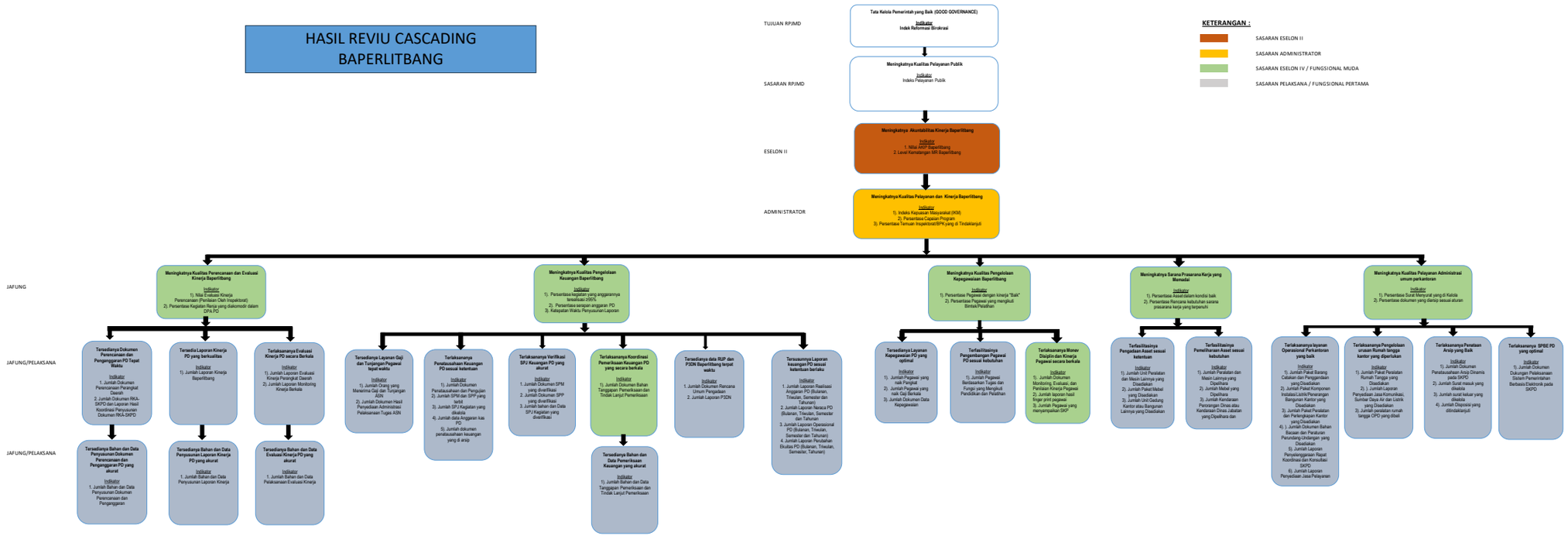

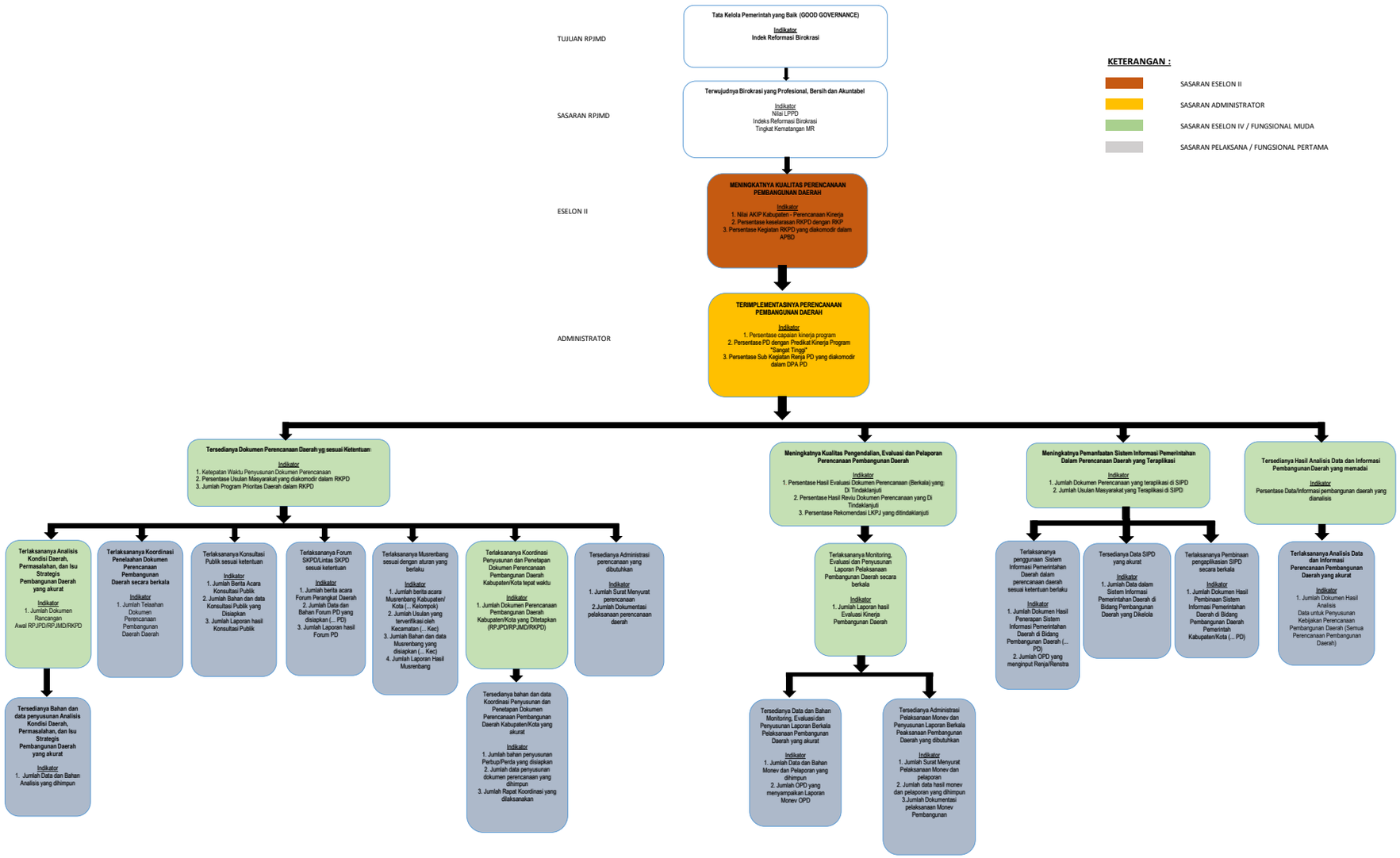
TUJUAN RPJMD
Tata Kelola Pemerintah yang Baik (GOOD GOVERNANCE)
Indikator
Indek Reformasi Birokrasi
SASARAN RPJMD
Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Akuntabel
Indikator
Nilai LPPD
Indeks Reformasi Birokrasi
Tingkat Kematangan MR
ESELON II
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Indikator
1. Nilai AKIP Kabupaten - Perencanaan Kinerja
2. Persentase keselarasan RKPD dengan RKP
3. Persentase Kegiatan RKPD yang diakomodir dalam APBD
ADMINISTRATOR
TERIMPLEMENTASINYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Indikator
1. Persentase capaian kinerja program
2. Persentase PD dengan Predikat Kinerja Program "Sangat Tinggi"
3. Persentase Sub Kegiatan Renja PD yang diakomodir dalam DPA PD
KETERANGAN :
SASARAN ESELON II
SASARAN ADMINISTRATOR
SASARAN ESELON IV / FUNGSIONAL MUDA
SASARAN PELAKSANA / FUNGSIONAL PERTAMA
Tersedianya Dokumen Perencanaan Daerah yg sesuai Ketentuan:
Indikator
1. Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan
2. Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD
3. Jumlah Program Prioritas Daerah dalam RKPD
Terlaksananya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah yang akurat
Indikator
1. Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJPD/RPJMD/RKPD
Tersedianya Bahan dan data penyusunan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah yang akurat
Indikator
1. Jumlah Data dan Bahan Analisis yang dihimpun
Terlaksananya Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah secara berkala
Indikator
1. Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah
Terlaksananya Konsultasi Publik sesuai ketentuan
Indikator
1. Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik
2. Jumlah Bahan dan data Konsultasi Publik yang Disiapkan
3. Jumlah Laporan hasil Konsultasi Publik
Terlaksananya Forum SKPD/Lintas SKPD sesuai ketentuan
Indikator
1. Jumlah berita acara Forum Perangkat Daerah
2. Jumlah Data dan Bahan Forum PD yang disiapkan (... PD)
3. Jumlah Laporan hasil Forum PD
Terlaksananya Musrenbang sesuai dengan aturan yang berlaku
Indikator
1. Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten/ Kota (... Kelompok)
2. Jumlah Usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan (... Kec)
3. Jumlah Bahan dan data Musrenbang yang disiapkan (... Kec)
4. Jumlah Laporan Hasil Musrenbang
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota tepat waktu
Indikator
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)
Tersedianya bahan dan data Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang akurat
Indikator
1. Jumlah bahan penyusunan Perbup/Perda yang disiapkan
2. Jumlah data penyusunan dokumen perencanaan yang dihimpun
3. Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan
Tersedianya Administrasi perencanaan yang dibutuhkan
Indikator
1. Jumlah Surat Menyurat perencanaan
2.Jumlah Dokumentasi pelaksanaan perencanaan daerah
Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator
1. Persentase Hasil Evaluasi Dokumen Perencanaan (Berkala) yang Di Tindaklanjuti
2. Persentase Hasil Reviu Dokumen Perencanaan yang Di Tindaklanjuti
3. Persentase Rekomendasi LKPJ yang ditindaklanjuti
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah secara berkala
Indikator
1. Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Tersedianya Data dan Bahan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang akurat
Indikator
1. Jumlah Data dan Bahan Monev dan Pelaporan yang dihimpun
2. Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Monev OPD
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Monev dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dibutuhkan
Indikator
1. Jumlah Surat Menyurat Pelaksanaan Monev dan pelaporan
2. Jumlah data hasil monev dan pelaporan yang dihimpun
3.Jumlah Dokumentasi pelaksanaan Monev Pembangunan
Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Dalam Perencanaan Daerah yang Teraplikasi
Indikator
1. Jumlah Dokumen Perencanaan yang teraplikasi di SIPD
2. Jumlah Usulan Masyarakat yang Teraplikasi di SIPD
Terlaksananya penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam perencanaan daerah sesuai ketentuan berlaku
Indikator
1. Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (... PD)
2. Jumlah OPD yang menginput Renja/Renstra
Tersedianya Data SIPD yang akurat
Indikator
1. Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola
Terlaksananya Pembinaan pengaplikasian SIPD secara berkala
Indikator
1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (... PD)
Tersedianya Hasil Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang memadai
Indikator
Persentase Data/Informasi pembangunan daerah yang dianalisis
Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang akurat
Indikator
1. Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)

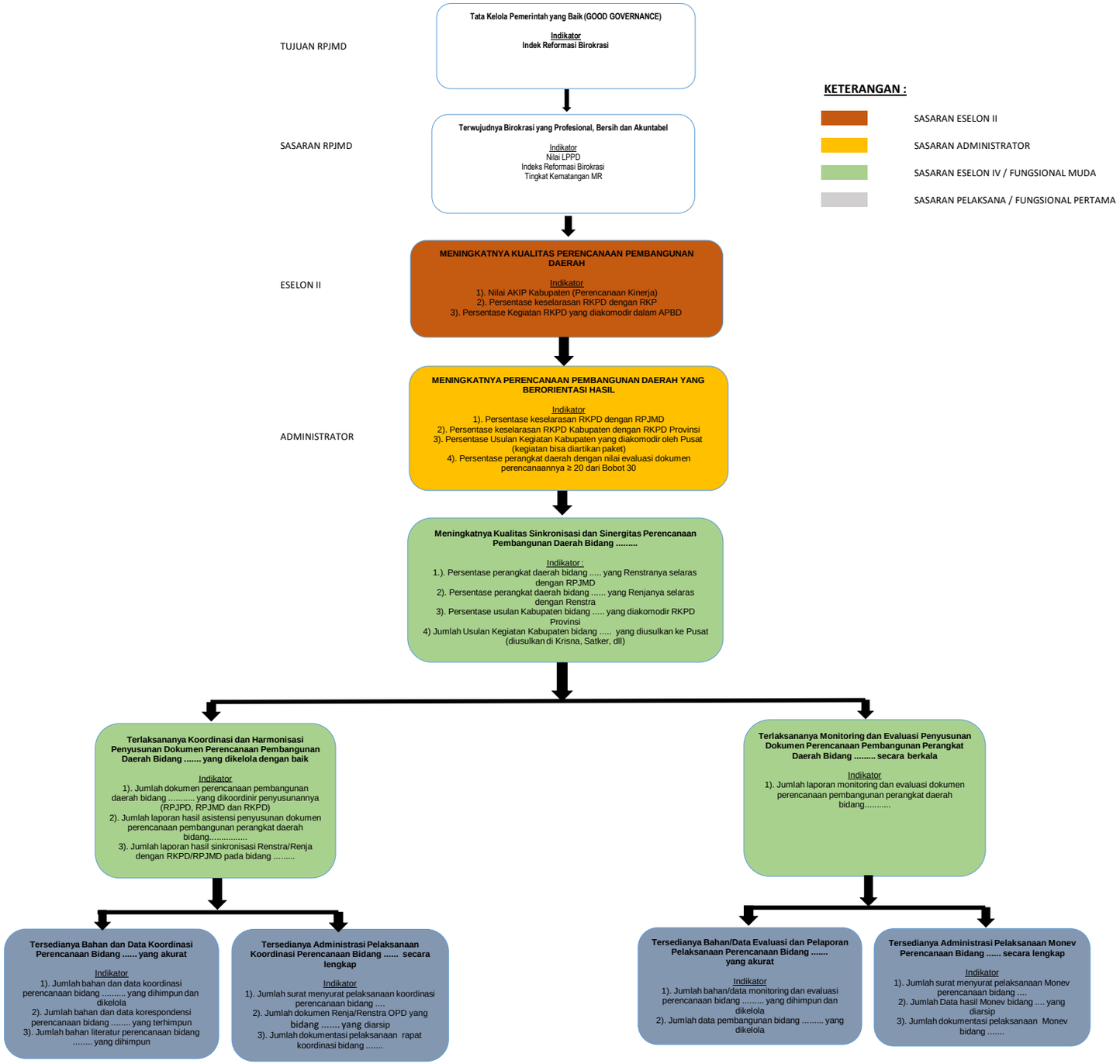
TUJUAN RPJMD
Tata Kelola Pemerintah yang Baik (GOOD GOVERNANCE)
Indikator
Indek Reformasi Birokrasi
SASARAN RPJMD
Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Akuntabel
Indikator
Nilai LPPD
Indeks Reformasi Birokrasi
Tingkat Kematangan MR
ESELON II
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Indikator
1). Nilai AKIP Kabupaten (Perencanaan Kinerja)
2). Persentase keselarasan RKPD dengan RKP
3). Persentase Kegiatan RKPD yang diakomodir dalam APBD
ADMINISTRATOR
MENINGKATNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERORIENTASI HASIL
Indikator
1). Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD
2). Persentase keselarasan RKPD Kabupaten dengan RKPD Provinsi
3). Persentase Usulan Kegiatan Kabupaten yang diakomodir oleh Pusat (kegiatan bisa diartikan paket)
4). Persentase perangkat daerah dengan nilai evaluasi dokumen perencanaannya ≥ 20 dari Bobot 30
Meningkatnya Kualitas Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang .....
Indikator :
1.). Persentase perangkat daerah bidang ..... yang Renstranya selaras dengan RPJMD
2). Persentase perangkat daerah bidang ..... yang Renjanya selaras dengan Renstra
3). Persentase usulan Kabupaten bidang ..... yang diakomodir RKPD Provinsi
4) Jumlah Usulan Kegiatan Kabupaten bidang ..... yang diusulkan ke Pusat (diusulkan di Krisna, Satker, dll)
Terlaksananya Koordinasi dan Harmonisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang ..... yang dikelola dengan baik
Indikator
1). Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ..... yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2). Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang.....
3). Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang .....
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang ..... secara berkala
Indikator
1). Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang.....
Tersedianya Bahan dan Data Koordinasi Perencanaan Bidang ..... yang akurat
Indikator
1). Jumlah bahan dan data koordinasi perencanaan bidang ..... yang dihimpun dan dikelola
2). Jumlah bahan dan data korespondensi perencanaan bidang ..... yang terhimpun
3). Jumlah bahan literatur perencanaan bidang ..... yang dihimpun
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang ..... secara lengkap
Indikator
1). Jumlah surat menyurat pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang ....
2). Jumlah dokumen Renja/Renstra OPD yang bidang ..... yang diarsip
3). Jumlah dokumentasi pelaksanaan rapat koordinasi bidang .....
Tersedianya Bahan/Data Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Bidang ..... yang akurat
Indikator
1). Jumlah bahan/data monitoring dan evaluasi perencanaan bidang ..... yang dihimpun dan dikelola
2). Jumlah data pembangunan bidang ..... yang dikelola
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Monev Perencanaan Bidang ..... secara lengkap
Indikator
1). Jumlah surat menyurat pelaksanaan Monev perencanaan bidang ....
2). Jumlah Data hasil Monev bidang .... yang diarsip
3). Jumlah dokumentasi pelaksanaan Monev bidang .....
KETERANGAN :
SASARAN ESELON II
SASARAN ADMINISTRATOR
SASARAN ESELON IV / FUNGSIONAL MUDA
SASARAN PELAKSANA / FUNGSIONAL PERTAMA

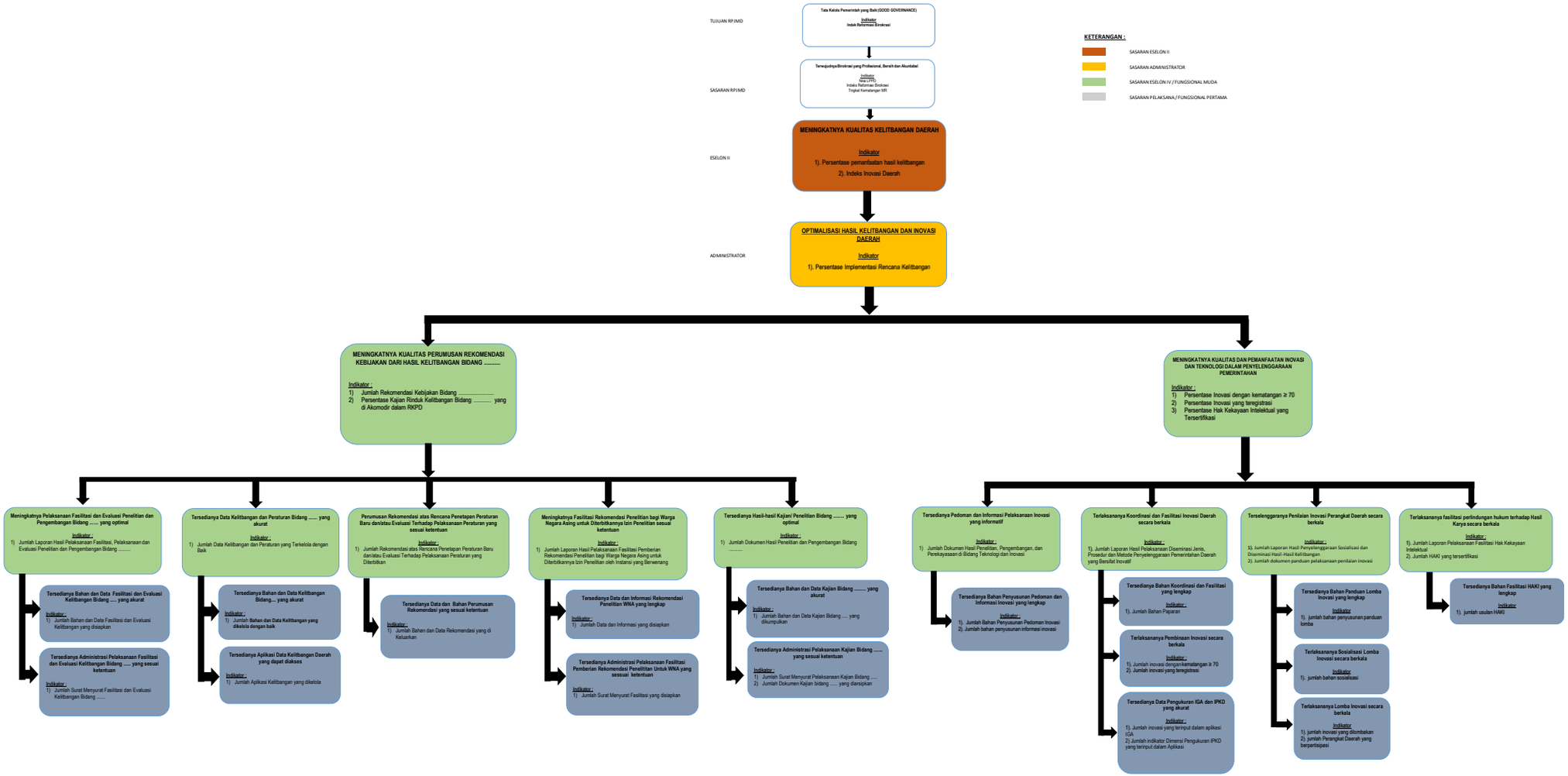
TUJUAN RPJMD
Tata Kelola Pemerintah yang Baik (GOOD GOVERNANCE)
Indikator
Indek Reformasi Birokrasi
SASARAN RPJMD
Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Berah dan Akuntabel
Indikator
Nilai LPPD
Indeks Reformasi Birokrasi
Tingkat Kematangan SPI
ESELON II
MENINGKATNYA KUALITAS KELITBANGAN DAERAH
Indikator
1). Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
2). Indeks Inovasi Daerah
ADMINISTRATOR
OPTIMALISASI HASIL KELITBANGAN DAN INOVASI DAERAH
Indikator
1). Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan
KETERANGAN :
SASARAN ESELON II
SASARAN ADMINISTRATOR
SASARAN ESELON IV / FUNGSIONAL MUDA
SASARAN PELAKSANA / FUNGSIONAL PERTAMA
MENINGKATNYA KUALITAS PERUMUSAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DARI HASIL KELITBANGAN BIDANG .....
Indikator :
1) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang .....
2) Persentase Kajian Rinduk Kelitbangan Bidang ..... yang di Akomodir dalam RKPD
MENINGKATNYA KUALITAS DAN PEMANFAATAN INOVASI DAN TEKNOLOGI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Indikator :
1) Persentase Inovasi dengan kematangan ≥ 70
2) Persentase Inovasi yang teregistrasi
3) Persentase Hak Kekayaan Intelektual yang Tersertifikasi
Meningkatnya Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang ..... yang optimal
Indikator :
1) Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang .....
Tersedianya Bahan dan Data Fasilitasi dan Evaluasi Kelitbangan Bidang ..... yang akurat
Indikator :
1) Jumlah Bahan dan Data Fasilitasi dan Evaluasi Kelitbangan yang disiapkan
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Kelitbangan Bidang ..... yang sesuai ketentuan
Indikator :
1) Jumlah Surat Menyurat Fasilitasi dan Evaluasi Kelitbangan Bidang .....
Tersedianya Data Kelitbangan dan Peraturan Bidang ..... yang akurat
Indikator :
1) Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik
Tersedianya Bahan dan Data Kelitbangan Bidang... yang akurat
Indikator :
1) Jumlah Bahan dan Data Kelitbangan yang dikelola dengan baik
Tersedianya Aplikasi Data Kelitbangan Daerah yang dapat diakses
Indikator :
1) Jumlah Aplikasi Kelitbangan yang dikelola
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang sesuai ketentuan
Indikator :
1) Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan
Tersedianya Data dan Bahan Perumusan Rekomendasi yang sesuai ketentuan
Indikator :
1) Jumlah Bahan dan Data Rekomendasi yang di Keluarkan
Meningkatnya Fasilitasi Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian sesuai ketentuan
Indikator :
1) Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang
Tersedianya Data dan Informasi Rekomendasi Penelitian WNA yang lengkap
Indikator :
1) Jumlah Data dan Informasi yang disiapkan
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian Untuk WNA yang sesuai ketentuan
Indikator :
1) Jumlah Surat Menyurat Fasilitasi yang disiapkan
Tersedianya Hasil-hasil Kajian/ Penelitian Bidang ..... yang optimal
Indikator :
1) Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang .....
Tersedianya Bahan dan Data Kajian Bidang ..... yang akurat
Indikator :
1) Jumlah Bahan dan Data Kajian Bidang .... yang dikumpulkan
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Kajian Bidang ..... yang sesuai ketentuan
Indikator :
1) Jumlah Surat Menyurat Pelaksanaan Kajian Bidang .....
2) Jumlah Dokumen Kajian bidang ..... yang diarsipkan
Tersedianya Pedoman dan Informasi Pelaksanaan Inovasi yang informatif
Indikator :
1) Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Tersedianya Bahan Penyusunan Pedoman dan Informasi Inovasi yang lengkap
Indikator :
1). Jumlah Bahan Penyusunan Pedoman Inovasi
2). Jumlah bahan penyusunan informasi inovasi
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Inovasi Daerah secara berkala
Indikator :
1). Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
Tersedianya Bahan Koordinasi dan Fasilitasi yang lengkap
Indikator :
1). Jumlah Bahan Paparan
Terlaksananya Pembinaan Inovasi secara berkala
Indikator :
1). Jumlah inovasi dengan kematangan ≥ 70
2). Jumlah inovasi yang teregistrasi
Tersedianya Data Pengukuran IGA dan IPKD yang akurat
Indikator :
1). Jumlah inovasi yang terinput dalam aplikasi IGA
2). Jumlah indikator Dimensi Pengukuran IPKD yang terinput dalam Aplikasi
Terselenggaranya Penilaian Inovasi Perangkat Daerah secara berkala
Indikator :
1). Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
2). Jumlah dokumen panduan pelaksanaan penilaian inovasi
Tersedianya Bahan Panduan Lomba Inovasi yang lengkap
Indikator
1). jumlah bahan penyusunan panduan lomba
Terlaksananya Sosialisasi Lomba Inovasi secara berkala
Indikator
1). jumlah bahan sosialisasi
Terlaksananya Lomba Inovasi secara berkala
Indikator
1). jumlah inovasi yang dilombakan
2). jumlah Perangkat Daerah yang berpartisipasi
Terlaksananya fasilitasi perlindungan hukum terhadap Hasil Karya secara berkala
Indikator :
1). Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
2). Jumlah HAKI yang tersertifikasi
Tersedianya Bahan Fasilitasi HAKI yang lengkap
Indikator
1). jumlah usulan HAKI

L A M P I R A N 2

(IKU BAPERLITBANG TAHUN 2021-2026)

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan Jendral Sudirman, Komplek Perkantoran, Gedung Madah Kencana,
Kode Pos 29631. Website : https://baperlitbang.karimunkab.go.id/
Email : karimun.baperlitbang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 03.c TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN

Menimbang :

a. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karimun (RPJMD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 telah ditetapkan.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);
9. Peraturan Bupati Karimun Nomor 99 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 99).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN.

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabuapten Karimun Nomor 08.a Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Balai Karimun
Pada Tanggal : 01 Maret 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Drs. H. FAJAR HARISON ABIDIN, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19731024 199201 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun
Nomor : 03.c Tahun 2024
Tanggal : 01 Maret 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	- Nilai AKIP Kabupaten - Perencanaan Kinerja	Nilai AKIP - Perencanaan dikeluarkan oleh KEMENPANRB
		- Persentase keselarasan RKPD dengan RKP	$(i)\ \frac{\text{Jumlah indikator Makro Daerah yang targetnya selaras dengan target Indikator Makro Nasional}}{\text{Jumlah indikator Makro Daerah}} \times 100$ $(ii)\ \frac{\text{Jumlah program prioritas kabupatenyang selaras dengan program prioritas Pusat}}{\text{Jumlah program prioritas Kabupaten}} \times 100$ $\text{Keselarasan} = \frac{\text{Indikator (i)} + \text{Indikator (ii)}}{2}$ Target Indikator Makro Nasional dan Program prioritas pusat dapat dilihat di dokumen Pedoman Penyusunan RKPD yang dikeluarkan oleh Kemendagri Range Keselarasan : 0-50 = Belum Selaras 51-80 = Cukup Selaras 81-100 = Sudah Selaras
		- Persentase Kegiatan RKPD yang diakomodir dalam APBD	$\frac{\text{Jumlah subkegiatan RKPD yang diakomodir dalam APBD}}{\text{Jumlah sub Kegiatan di RKPD}} \times 100$
2.	Meningkatnya Kualitas Kelitbangan Daerah	- Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	$\frac{\text{Jumlah hasil kelitbangan yang di ditindaklanjuti}}{\text{jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah}} \times 100$ Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan
		- Indeks Inovasi Daerah	Indeks inovasi daerah dikeluarkan oleh KEMENDAGRI
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Baperlitbang	- Nilai AKIP Baperlitbang - Nilai Kematangan MR Baperlitbang	Nilai AKIP dan Kematangan MR Baperlitbang dikeluarkan oleh Inspektorat

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Drs. H. FAJAR HARISON ABIDIN, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19731024 199201 1 001

L A M P I R A N 3

Keterkaitan IKU BAPERLITBANG

dengan IKU Eselon III, IV dan Pelaksana

SASARAN				INDIKATOR KINERJA UTAMA Eselon II/III/IV dan Pelaksana	
ESELON II	ESELON III	ESELON IV	PELAKSANA		
1). Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah				Nilai AKIP Kabupaten - Perencanaan Kinerja	**BAPERLITBANG**
				Persentase keselarasan RKPD dengan RKP	
				Persentase Kegiatan RKPD yang diakomodir dalam APBD	
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	**1). BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA** **2). BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**
				Persentase Keselarasan RKPD Kabupaten dengan RKP dan RKPD Prov	
				Persentase Keselarasan Renja OPD dengan RKPD	
				Persentase OPD dengan nilai evaluasi dokumen perencanaannya ≥ 30	
		Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Prov dan Pusat		Persentase program prioritas kabupaten yang selaras dengan Prov	
				Jumlah Usulan Kabupaten yang diakomodir Pusat	
				Persentase Usulan Kabupaten yang diakomodir Provinsi	
			Terlaksananya Rakor Perencanaan	Jumlah laporan Rakor perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	
				Jumlah laporan Rakor perencanaan bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan	

SASARAN				INDIKATOR KINERJA UTAMA Eselon II/III/IV dan Pelaksana	
ESELON II	ESELON III	ESELON IV	PELAKSANA		
			Tersedianya Bahan Koordinasi	Jumlah bahan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	
				Jumlah bahan koordinasi perencanaan bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan	
			Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan Sektoral	Jumlah laporan hasil evaluasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	
				Jumlah laporan hasil evaluasi perencanaan bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan	
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan OPD		Jumlah OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	
				Jumlah OPD yang Renjanya selaras dengan Renstra OPD	
				Persentase Indikator Kinerja OPD yang mencapai target	
			Terlaksananya Pelatihan/workshop perencanaan	Jumlah perencana OPD yang mengikuti pelatihan/workshop	
				Jumlah kegiatan workshop yang dilaksanakan	
			Terlaksananya Asistensi dan pembinaan teknis perencanaan OPD	Jumlah OPD yang mengikuti Asistensi	
				Jumlah OPD yang menyampaikan Ranwal Renstra/Renja	

SASARAN				INDIKATOR KINERJA UTAMA Eselon II/III/IV dan Pelaksana	
ESELON II	ESELON III	ESELON IV	PELAKSANA		
				Jumlah OPD yang menyampaikan Rancangan Renstra/Renja	
				Jumlah OPD yang menyampaikan Ranhir Renstra/Renja	
			Terlaksananya Verifikasi dokumen perencanaan OPD	Jumlah OPD yang Renjanya diverifikasi	
				Jumlah laporan hasil verifikasi yang ditindaklanjuti	
	Terimplementasinya perencanaan pembangunan daerah			Persentase Capaian Program	**BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMABNGUNAN DAERAH**
				Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam Renja OPD	
				Persentase Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah yang mencapai target	
		Tersedianya Informasi Pembangunan Daerah		Persentase Data/Informasi pembangunan daerah yang divalidasi	
			Terlaksananya Pengolahan Data/informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data/informasi yang diinput kedlalam SIPD	
				Jumlah Berita Acara Pemeriksaan data	
				Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	
			Tersedianya Analisis dan profil pembangunan daerah	Jumlah dokumen profil pembangunan yang disusun	
		Perumusan Kebijakan Perencanaan Daerah		Jumlah Program Prioritas Daerah Jangka Pendek	
				Jumlah Perda/Perbup tentang Perencanaan yang disusun	

SASARAN				INDIKATOR KINERJA UTAMA Eselon II/III/IV dan Pelaksana	
ESELON II	ESELON III	ESELON IV	PELAKSANA		
			Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Identifikasi permasalahan pembangunan daerah	Jumlah lapaoran hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah	
			Pelaksanaan Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten	Jumlah BA Forum OPD	
				Jumlah BA Musrenbang Kabupaten	
			Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD	Jumlah BA Kesepakatan dengan DPRD	
				Jumlah Pokok-pokok Pikiran DPRD	
		Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam perencanaan		Persentase Usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum OPD	
				Persentase kehadiran masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan	
				Persentase kehadiran perempuan dan anak dalam musrenbang Kecamatan	
			Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan muscam	Jumlah lapoaran hasil rakor dengan kecamatan	
				Jumlah usulan yang yang terverifikasi oleh Kecamatan	
			Terselenggaranya Sosialisasi dokumen RPJMD/RKPD	Jumlah kecamatan yang mendapat sosialisasi dokumen RPJMD/RKPD	
		Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan secara berkala		Persentase Rekomendasi hasil evaluasi dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti	
			Terlaksananya Koordinasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	Jumlah laporan hasil koordinasi pengendalian dan evaluasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	

SASARAN				INDIKATOR KINERJA UTAMA Eselon II/III/IV dan Pelaksana	
ESELON II	ESELON III	ESELON IV	PELAKSANA		
				Jumlah laporan hasil koordinasi pengendalian danevaluasi perencanaan bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan	
			Tersedianya laporan hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan secara berkala	Jumlah laporan evaluasi perencanaan (RPJMD/RKPD) yang disusun	
		Meningkatnya Evaluasi terhadap Hasil Pembangunan Daerah		Persentase program yang targetnya tercapai	
				Persentase realisasi Fisik kegiatan pembangunan daerah	
				Persentase realisasi fisik kegiatan yang bersumber dari dana pusat	
			Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pembangunan	Jumlah laporan evaluasi terhadap hasil pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	
				Jumlah laporan evaluasi terhadap hasil bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan	
			Tersedianya laporan hasil evaluasi terhadap hasil pembangunan	Jumlah laporan yang disusun	
2). Meningkatnya Kualitas Kelitbangan Daerah				Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	**BAPERLITBANG**
				Indeks Inovasi Daerah	

SASARAN				INDIKATOR KINERJA UTAMA Eselon II/III/IV dan Pelaksana	
ESELON II	ESELON III	ESELON IV	PELAKSANA		
	Terimplementasinya hasil Kajian /Penelitian			Persentase implementasi rencana kelitbangan	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Perumusan Kebijakan Kelitbangan		Jumlah dokumen perencanaan kelitbangan yang disusun	
				Persentase kegiatan kelitbangan yang selaras dengan RKPD	
			Tersedianya bahan penyusunan dokumen perencanaan kelitbangan	Jumlah bahan penyusunan dokumen	
			Terlaksananya Koordinasi perencanaan kelitbangan	Jumlah OPD yang dikoordinasikan	
				Jumlah laporan hasil koordinasi	
		Meningkatnya Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan secara berkala		Persentase rencana kajian/penelitian yang terealisasi	
				Jumlah hasil-hasil kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan yang ditindaklanjuti	
				Jumlah hasil-hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	
			Terlaksananya Koordinasi pengumpulan data kelitbangan	Jumlah data kelitbangan yang dikelola	
				Jumlah laporan hasil koordinasi	
			Terfasilitasinya pemberian rekomendasi penelitian	Jumlah laporan fasilitasi rekomendasi izin penelitian yang terbit	
				Jumlah laporan pelaksanaan Rinduk	

SASARAN				INDIKATOR KINERJA UTAMA Eselon II/III/IV dan Pelaksana	
ESELON II	ESELON III	ESELON IV	PELAKSANA		
			Tersedianya Laporan pelaksanaan perencanaan kelitbangan	Jumlah laporan pelaksanaan renja tahunan	
		Tersedianya hasil-hasil kajian/penelitian		Jumlah kajian/penelitian bidang sosial dan pemerintahan yang disusun	
				Jumlah kajian/penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	
			Menyiapkan bahan kajian	Jumlah bahan kajian bidang sosial pemerintahan	
				Jumlah bahan kajian bidang ekonomi dan pembangunan	
			Terjalinnya Kerjasama kelitbangan	Jumlah Kerjasama kelitbangan yang terjalin	
			Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan kajian	Jumlah laporan hasil koordinasi kajian bidang sosial pemerintahan	
				Jumlah bahan laporan hasil koordinasi kajian bidang ekonomi dan pembangunan	
	Menignkatnya Inovasi Daerah			Jumlah Inovasi Daerah yang dilaporkan	
		Tersedianya Kebijakan Inovasi Daerah		Jumlah dokumen roadmap SIDA	
				Capaian Roadmap SIDA	
			Terlaksananya Koordinasi perumusan kebijakan inovasi daerah	Jumlah lapaoran hasil koordinasi	
			Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan kebijakan	Jumlah lapaoran hasil koordinasi	

SASARAN				INDIKATOR KINERJA UTAMA Eselon II/III/IV dan Pelaksana	
ESELON II	ESELON III	ESELON IV	PELAKSANA		
		Meningktnya Diseminasi penyelenggaraan pemerintah bersifat inovatif		Persentase OPD yang melakukan Inovasi	
				Jumlah dokumen pengukuran inovasi	
			Menyiapkan bahan Diseminasi	Jumlah bahan diseminasi	
			Terfasilitasinya pelaksnaaan inovasi OPD	Jumlah OPD yang difasilitasi	
				Jumlah laporan hasil fasilitasi	
		Terselenggaranya Sosialisasi hasil-hasil kelitbangan		Persentase hasil kelitbangan yang disosialisasikan	
			Menyiapkan Bahan sosialisasi	Jumlah bahan sosialisasi	
			Tersedianya Laporan hasil sosialisasi	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi	
3). Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Baperlitbang				**Nilai AKIP Baperlitbang**	**BAPERLITBANG**
	Meningkatnya Capaian Kinerja OPD			Persentase IKU OPD yang mencapai target	**SEKRETARIAT**
				Persentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti	
				Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)	
		Meningkatnya Kinerja Perencanaan OPD		Nilai Evaluasi Dokumen Perencanaan OPD	
				Persentase capaian program OPD	
				Persentase kegiatan Renja yang diakomodir dalam APBD	
				Persentase Realisasi Fisik kegiatan OPD	

SASARAN				INDIKATOR KINERJA UTAMA Eselon II/III/IV dan Pelaksana	
ESELON II	ESELON III	ESELON IV	PELAKSANA		
			Terlaksananya Koordinasi Perencanaan OPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	
				Jumlah usulan subkegiatan bidang yang diakomodir Renja OPD	
			Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	
			Tersedianya Dokumen penganggaran OPD	Jumlah RKA yang disusun	
				Jumlah DPA yang disusun	
			Tersedia Data/Informasi penyelenggaran pemerintahan di OPD	Jumlah data yang dikelola	
				Jumlah dokumen perencanaan yang di pubish	
			Terlaksananya Monev Dokumen Perencanaan OPD secara berkala	Jumlah laporan hasil evaluasi Renja	
				Jumlah laporan hasil Reviu Renstra	
			Tersedianya laporan kinerja berbasis TIK (TEPRA)	Ketepatan waktu pelaporan TEPRA	
				Jumlah kegiatan yang terlaksana	
			Tersedianya Laporan Kinerja OPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	
		Meningkatnya Kinerja Keuangan OPD		Persentase kegiatan yang anggarannya terealisasi ≥95%	
				Persentase serapan anggaran OPD	
			Tersedianya dokumen Pengelolaan pencairan anggaran	Jumlah SPP yang terbit	
				Jumlah SPM yang terbit	
				Jumlah SPJ yang diverifikasi	

SASARAN				INDIKATOR KINERJA UTAMA Eselon II/III/IV dan Pelaksana	
ESELON II	ESELON III	ESELON IV	PELAKSANA		
			Terlaksananya verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan	Jumlah laporan verifikasi	
			Tersedianya dokumen laporan pengelolaan keuangan	Jumlah laporan keunagan yang disusun	
		Meningkatnya Kinerja Pegawai OPD		Persentase pegawai yang memenuhi jam kerja efektif	
				Rata-rata capaian kinerja Pegawai Baperlitbang	
				Jumlah Rencana kebutuhan pengembangan SDM yang terealisasi	
			Terlaksananya Monev Disiplin Pegawai	Jumlah laporan hasil finger print pegawai	
				Jumlah laporan hasil Monev yang dilakukan	
			Terlaksananya Monev Capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Jumlah pegawai dengan nilai SKP ≥ 95	
				Jumlah pegawai yang menyusun SKP tepat waktu	
				Jumlah pegawai yang naik pangkat	
				Jumlah laporan hasil monev yang dilakukan	
			Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	
				Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	
				Jumlah Rencana kebutuhan pengembangan SDM yang terealisasi	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	

SASARAN				INDIKATOR KINERJA UTAMA Eselon II/III/IV dan Pelaksana	
ESELON II	ESELON III	ESELON IV	PELAKSANA		
	Meningktanya Kualitas Pelayanan OPD	Tersedianya Sarana prasana kerja yang memadai		Persentase Asset OPD dalam kondisi baik	
				Persentase Rencana kebutuhan sarana prasarana kerja yang terpenuhi	
				Persentase realisasi anggaran pengadaan asset	
			Terlaksannya Pengadaan Asset	Jumlah Asset yang dibeli	
			Menigkatnya Pengelolaan Asset dan barang pakai habis	Jumlah penghapusan asset	
				Jumlah Asset yang di service	
				Jumlah Asset yang dikelola	
		Terimplementasinya SOP OPD		Persentase SOP yang dilaksanakan	
				Persentase kebijakan pelayanan yang disosialisasikan	
			Tersedianya SOP OPD	Jumlah SOP yang disusun	
			Terlaksananya Evaluasi SOP secara berkala	Jumlah SOP yang direvisi	
			Tersedianya Sarana pengaduan masyarakat	Jumlah media pengaduan	
				Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi umum perkantoran		Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti	
				Persentase dokumen yang diarsip sesuai aturan	
			Terlaksananya Pengelolaan Arsip	Jumlah arsip statis yang dikelola	
				Jumlah arsip dinamis yang dikelola	
				Jumlah Surat masuk yang dikelola	

SASARAN				INDIKATOR KINERJA UTAMA Eselon II/III/IV dan Pelaksana	
ESELON II	ESELON III	ESELON IV	PELAKSANA		
			Terlaksananya Pengelolaan Surat menyurat	Jumlah surat keluar yang dikelola	
				Jumlah Disposisi yang ditindaklanjuti	
			Terlaksananya Pengelolaan urusan Rumah tangga kantor	Jumlah tagihan surat kabar	
				Jumlah tagihan listrik, air, internet	
				Jumlah peralatan rumah tangga OPD yang dibeli	
			Terlaksananya pengadaan barang pakai habis	Jumlah barang pakai habis yang dibeli	
				Jumlah barang pakai habis yang dikelola	

BAPERLITBANG
KABUPATEN KARIMUN

2025

RENCANA KERJA (RENJA)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PERENCANAAN DAN EVALUASI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana kami telah dapat menyelesaikan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025. Rencana pembangunan tahunan pada Badan Pendapatan Daerah dibuat untuk menyesuaikan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masa satu tahun. Dalam pelaksanakan RENJA–OPD ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal. Dalam RENJA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun tergambarkan rencana kerja dan target capaian kinerja untuk Tahun 2025. Analisis tetap dilakukan secara mendalam pada setiap sasaran untuk memperlihatkan kinerja sesungguhnya, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi.

Akhirnya, kami berharap dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh *stakeholders* dan media untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Dr. KAMARULAZI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19690627 198909 1 001

DAFTRA ISI

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR TABEL			iii
DAFTAR GAMBAR			iv
BAB	**1**	**PENDAHULUAN**	**1**
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	5
	1.3	Sistematika Penulisan	7
	1.4	Hubungan Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..	8
BAB	**2**	**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BAPENDA TAHUN LALU**	**9**
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bapenda Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategi Bapenda Analisis Kinerja	9
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten	36
	2.3	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda Isu-isu Penting	38
	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	40
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	50
BAB	**3**	**TUJUAN DAN SASARAN BAPENDA**	51
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	51
	3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah	53
	3.3	Program dan Kegiatan	55
BAB	**4**	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA DAERAH**	64
BAB	**5**	**PENUTUP**	**71**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode Pelaksanaan Tahun 2024	10
Tabel 2.2	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Opd Sampai Dengan Tahun 2025 Pemerintahan Kabupaten Karimun	20
Tabel 2.3	Pencapaian Renstra Opd S/D Tahun 2024 Pemerintahan Kabupaten Karimun	29
Tabel 2.4	Capaian Target Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025	37
Tabel 2.5	Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Tahun 2025 Dan 2026	37
Tabel 2.6	Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2025 Pemerintahan Kabupaten Karimun	42
Tabel 3.1	Strategi Dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun	53
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025	55
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan OpdTahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Pemerintahan Kabupaten Karimun	56
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Kerja Dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025	65

DAFTAR GAMBAR

1.1 Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja OPD Kabupaten/Kota **8**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan didalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Kebijakan Nasional tentang pelaksanaan Otonomi Daerah dan mendukung keberhasilan pelaksanaan program- program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Karimun, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun telah dan terus berupaya semaksimal mungkin memberikan kontribusi yang nyata melalui penyusunan dan pelaksanaan program-program kerja yang dapat dilaksanakan, tepat guna dan tepat sasaran.

Setidak-tidaknya terdapat 2 (dua) tantangan besar yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalani roda pemerintahan ini, yaitu: tantangan pertama adalah pelaksanaan pembangunan harus lebih baik sebelum otonomi nyata diberikan; tantangan kedua adalah meneruskan dan

memantapkan kegiatan pembangunan untuk lebih fokus kepada kebutuhan masyarakat lokal dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Demi terwujudnya cita-cita yang diinginkan tersebut maka komitmen dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) mutlak menjadi suatu keharusan. Pengelolaan program kerja akan berhasil tepat guna dan tepat sasaran apabila adanya perencanaan dan pengevaluasian terhadap pengimplementasian kegiatan tersebut dengan baik.

Sebagai salah satu acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun untuk melaksanakan program-program kerja efektif dan efisien serta transparan, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang merupakan Kabupaten Karimun Tahun 2022-2026.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun adalah dokumen perencanaan pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yang memiliki arah dan tujuan yang ingin dicapai untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam bentuk Visi-Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan, Program-program serta Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah (Renja Bapenda) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (*satu*) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah (Bapenda) maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keberadaan dokumen Rencana Organisasi Perangkat Daerah (RENJA–OPD) ini sangat penting dalam menentukan arah kebijakan tahunan, yang menjadi prioritas kegiatan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, serta memiliki sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga dapat dirasakan manfaatnya. Dalam hal ini, termasuk juga kegiatan yang bersifat mendesak dan penting untuk dilaksanakan serta realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam

kurun waktu satu tahun anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. Penyusunan RENJA-OPD dilakukan melalui Forum Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan salah satu mekanisme perencanaan bersifat partisipatif.

Penyusunan Rancangan Renja Bapenda merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Bapenda yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Bapenda mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Renja Renja, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksistensi OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Renja Bapenda yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

A. Tahapan Rumusan Rancangan Renja Bapenda

Perumusan isi dan substansi rancangan Renja Bapenda sangat menentukan kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan. Adapun serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mendokumentasikan perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan, yaitu sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi, berupa bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan, mencakup Kondisi Pelayanan Bapenda, Organisasi dan Tatalaksana Bapenda, serta Hasil Evaluasi Pencapaian Target Program dan Kegiatan Renstra Bapenda;
2. Analisis gambaran pelayanan, berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bapenda dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi;
3. Mereview Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun Lalu, berupa telaahan terhadap kemampuan Bapenda dalam melaksanakan program dan kegiatannya dengan mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja

program dan kegiatan Bapenda serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

B. Tahapan Penyajian Rancangan Renja Bapenda

Penyajian rancangan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Bapenda agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Bapenda dan proses penyusunan Renja Bapenda.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, serta kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Bapenda.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulian Renja Bapenda.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN LALU

Analisis kinerja pelayanan Bapenda, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapenda, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPENDA

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja Bapenda, Program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA

Bab ini berisikan tentang rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Bapenda Tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaannya maupun penganggarannya

1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan perundang–undangan dan peraturan–peraturan Pemerintah yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Bapenda, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuanga Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi;Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah.

Eksistensi Badan Pendapatan Daerah Karimun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 15 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah khususnya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang
   pengelolaan pendapatan daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
d. Pengelolaan kesekretariatan dinas;
e. Pengelolaan UPTB;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
g. Melaksanakan kegiatan lain di bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan arahan Bupati.

Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah mempunyai tanggung jawab secara berjenjang. Adapun susunan kepegawaiannya sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
   c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Pajak Daerah, terdiri dari :
   a. Subbid Pendaftaran dan Pendataan
   b. Subbid Perhitungan dan Penetapan
   c. Subbid Pengolahan Data dan Arsip

Renja Bapenda merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi Badan dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah kebijakan, tujuan, strategi, dan kebutuhan dinas yang telah dijabarkan lebih lanjut dari Rencana sehingga perencanaan semakin terintegrasi dan komprehensif serta mampu mendorong komitmen dinas dalam mencapai target realisasi yang telah diprioritaskan. Selain itu,

Renja juga bermanfaat sebagai dasar masukan untuk penyusunan RKPD, KUA dan PPAS dengan menggunakan pendekatan kinerja yang terukur Tahun 2025 dan menjadi alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah secara terukur.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun mempunyai tujuan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan, memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, sebagai rambu-rambu dalam menentukan prioritas kegiatan dan menyalurkan aspirasi bidang dan bagian dalam pererencanaan OPD dalam rangka ikut memajukan pembangunan Kabupaten Karimun. Serta menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum dan memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja secara terukur.

Menyadari pentingnya Renja sebagai kesatuan rencana pembangunan daerah, maka diharapkan semua pemangku kepentingan yang terlibat baik pimpinan, staf, maupun mitra kerja secara bersama-sama membangun pemahaman tentang apa, mengapa, dan bagaimana rencana kerja tersebut diterjemahkan dari kebijakan umum daerah ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya.

1.3 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 :PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

BAB 2 : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN LALU

Bab ini menguraikan evaluasi hasil pelaksanaan renja Bapenda tahun lalu, Analisis kinerja pelayanan Bapenda, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapenda, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN BAPENDA

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja Bapenda, Prgram dan kegiatan.

BAB 4 :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA

Bab ini berisikan tentang rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Bapenda Tahun 2025.

BAB 5 :PENUTUP

1.4 Hubungan Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Gambar 1.1
Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja OPD Kabupaten/Kota

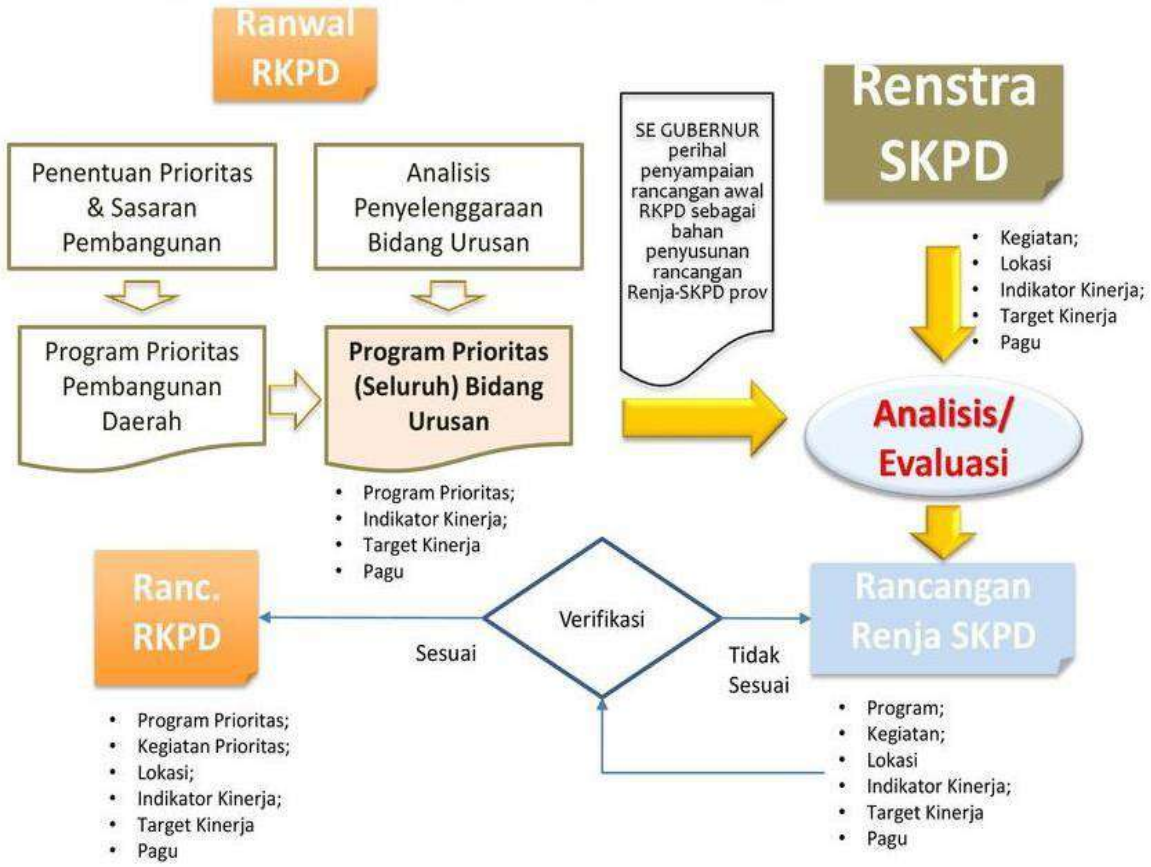

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BAPENDA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bapenda Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategi Bapenda

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu disesuaikan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Pelaksanaan rencana kerja tahun berjalan. Evaluasi yang dilaksanakan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan pencapaian target dan realisasi pendapatan, pelaksanaan program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan Penyusunan Renja Bapenda Tahun 2025 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

a. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan;
b. Tujuan yang dikehendaki;

Sasaran-sasaran dan indikator kinerja serta prioritas untuk mewujudkannya Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat dikatahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tahun berikutnya. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun pada Tahun 2025 telah melaksanakan 33 sub kegiatan dari 2 program, dengan capaian antara lain :

Tabel 2.1

Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah
Badan pendapatan Daerah Kabupaten Karimun
Periode pelaksanaan tahun 2024

No.	Tujuan / Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2021 s/d 2026)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)						Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan (2024)												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		
			9						I				II				III				IV				
				Murni					10				11				12				13				14 = 10+11+12+13		
1	2	4	K	Rp	K	Rp	%	F	K	Rp	%	F	K	Rp	%	F	K	Rp	%	F	K	F	Rp
	Tujuan OPD																						
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD																						913,813,569
		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																					16,763,600,155
		Keuangan		22,761,574,545.00		2,089,425,337.00	9.18	9.19		4,959,331,871.00	21.79	21.80		4,647,250,954.00	20.42	21.42		5,969,946,193.00	26.23	27.23	0.00	79.63	17,665,954,355.00
I		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		21,936,712,676.00	0.00	2,073,370,537.00	9.45	9.55	0.00	4,643,914,902.00	21.17	21.27	0	4,517,055,154.00	20.59	20.69	84.8	5,698,180,193.00	25.98	26.08	84.81	77.59	16,932,520,786.00

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**30,183,600.00**	**0**	**8,135,600.00**	**26.95**	**27.05**	**0**	-	-	**0.10**		**19,971,000.00**	**176.15**	**176.25**		-	-	**0.10**	**0**	**203.50**	**28,106,600.00**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12,144,000.00	0	1,332,000.00	10.97	**11.07**	0	-	-	**0.10**	1	8,875,000.00	73.08	**73.18**	0	-	-	**0.10**	1	84.45	10,207,000.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12,675,500.00	0	2,883,500.00	22.75	**22.85**	0	-	-	**0.10**	0	9,652,000.00	76.15	**76.25**	0	-	-	**0.10**	0	99.30	12,535,500.00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5,364,100.00	0	3,920,100.00	73.08	**73.18**	1	-	-	**0.10**	0	1,444,000.00	26.92	**27.02**	1	-	-	**0.10**	2	100.40	5,364,100.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**17,826,632,559.00**	**0**	**1,528,028,294.00**	**8.57**	**8.67**	**0**	**3,890,576,759.00**	**21.82**	**21.92**		**3,717,123,330.00**	**21.83**	**21.93**		**4,862,534,449.00**	**77.10**	**77.20**	**0**	**129.73**	**13,998,262,832.00**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		17,692,580,559.00	195	1,494,775,294.00	8.45	**8.55**	0	3,857,913,759.00	21.81	**21.91**	195	3,716,013,330.00	21.00	**21.10**	195	4,795,508,449.00	27.10	**27.20**	585	78.76	13,864,210,832.00
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		134,052,000.00	0	33,253,000.00	24.81	**24.91**	0	32,663,000.00	24.37	**24.47**	0	1,110,000.00	0.83	**0.93**	1	67,026,000.00	50.00	**50.10**	1	100.40	134,052,000.00

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	**0**	-	-	**0.10**	**0**	-	-	**0.10**		-		**0.10**		-		**0.10**	**0**	**0.40**	-
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						**0.10**				**0.10**				**0.10**				**0.10**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-	0	-	-	**0.10**	0	-	-	**0.10**	0	-	-	**0.10**	0	-	-	**0.10**	0	0.40	-
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	0	-	-	**0.10**	0	-	-	**0.10**	0	-	-	**0.10**	0	-	-	**0.10**	0	0.40	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**1,309,512,531.00**	**0**	**107,115,408.00**	**8.18**	**8.28**	**0**	**148,400,033.00**	**11.33**	**11.43**		**233,770,434.00**	**14.91**	**15.01**		**267,922,381.00**	**115.12**	**115.22**	**0**	**149.94**	**757,208,256.00**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor		19,558,000.00	0	1,646,000.00	8.42	**8.52**	0	3,995,500.00	**20.43**	**20.53**	0	3,450,000.00	17.64	**17.74**	1	2,727,000.00	13.94	**14.04**	1	60.83	11,818,500.00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		349,596,200.00	0	32,338,100.00	9.25	**9.35**	0	56,727,500.00	**16.23**	**16.33**	0	53,738,500.00	15.37	**15.47**	3	27,466,000.00	7.86	**7.96**	3	49.10	170,270,100.00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		30,555,331.00	1	2,352,000.00	7.70	**7.80**	0	5,298,600.00	**17.34**	**17.44**	1	4,263,100.00	13.95	**14.05**	1	3,562,400.00	11.66	**11.76**	3	51.05	15,476,100.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						**0.10**				**0.10**				**0.10**				**0.10**			

		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		286,977,000.00	0	7,243,350.00	2.52	**2.62**	0	12,288,900.00	**4.28**	**4.38**	0	12,292,700.00	4.28	**4.38**	1	183,309,000.00	63.88	**63.98**	1	75.37	215,133,950.00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		91,589,000.00	0	5,349,000.00	5.84	**5.94**	0	11,856,000.00	**12.94**	**13.04**	0	8,966,000.00	9.79	**9.89**	25	9,088,000.00	9.92	**10.02**	25	38.90	35,259,000.00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						**0.10**				**0.10**				**0.10**				**0.10**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		531,237,000.00	0	58,186,958.00	10.95	**11.05**	0	58,233,533.00	10.96	**11.06**	0	151,060,134.00	28.44	**28.54**	1	41,769,981.00	7.86	**7.96**	1	58.61	309,250,606.00
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						**0.10**				**0.10**				**0.10**				**0.10**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**61,518,000.00**	**0**	**23,222,000.00**	**37.75**	**37.85**		-	-	**0.10**		**28,302,000.00**	**60.50**	**60.60**		**444,000.00**	**0.83**	**0.93**	**0**	**99.47**	**51,968,000.00**
		Pengadaan Mebel						**0.10**				**0.10**				**0.10**				**0.10**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		7,752,000.00	0	-	-	**0.10**	0	-	-	**0.10**	2	6,192,000.00	79.88	**79.98**	0	-	-	**0.10**	2	80.28	6,192,000.00
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya						**0.10**				**0.10**				**0.10**				**0.10**			

		Pengadaan Aset Tak Berwujud					**0.10**				**0.10**				**0.10**				**0.10**			
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		53,766,000.00	0	23,222,000.00	43.19	**43.29**		-		**0.10**	1	22,110,000.00	41.12	**41.22**	0	444,000.00	0.83	**0.93**	1	85.54	45,776,000.00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					**0.10**				**0.10**				**0.10**				**0.10**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**2,474,048,745.00**	**0**	**363,391,235.00**	**14.69**	**14.79**	**0**	**575,111,110.00**	**23.25**	**23.35**		**482,050,390.00**	**19.48**	**19.58**		**543,436,694.00**	**21.97**	**22.07**	**0**	**79.78**	**1,963,989,429.00**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4,400,000.00	0	-	**-**	**0.10**	0	500,000.00	11.36	**11.46**	0	-	-	**0.10**	1	-	-	**0.10**	1	11.76	500,000.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		455,392,745.00	0	91,455,235.00	20.08	**20.18**	0	92,411,110.00	20.29	**20.39**	0	86,430,390.00	18.98	**19.08**	1	86,637,694.00	19.02	**19.12**	1	78.78	356,934,429.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2,014,256,000.00	0	271,936,000.00	13.50	**13.60**	0	482,200,000.00	23.94	**24.04**	0	395,620,000.00	19.64	**19.74**	1	456,799,000.00	22.68	**22.78**	1	80.16	1,606,555,000.00

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**234,817,241.00**	**0**	**43,478,000.00**	**18.52**	**18.62**	**0**	**29,827,000.00**	**12.70**	**12.80**		**35,838,000.00**	**15.26**	**15.36**		**23,842,669.00**	**10.1537**	**10.25**	**0**	**57.03**	**132,985,669.00**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		53,096,151.00	0	8,644,000.00	16.28	**16.38**	0	5,766,000.00	10.86	**10.96**	0	12,799,000.00	24.11	**24.21**	1	7,795,869.00	14.68	**14.78**	1	66.33	35,004,869.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		43,894,000.00	0	3,294,000.00	7.50	**7.60**	0	1,716,000.00	3.91	**4.01**	0	2,316,000.00	5.28	**5.38**	1	4,463,800.00	10.17	**10.27**	1	27.26	11,789,800.00
		Pemeliharaan Mebel		-	0	-	-	**0.10**	0	-	-	**0.10**				**0.10**				**0.10**	0	0.40	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		104,654,000.00	15	31,484,000.00	30.08	**30.18**	10	14,455,000.00	13.81	**13.91**	15	20,706,000.00	19.79	**19.89**	10	11,583,000.00	11.07	**11.17**	50	75.15	78,228,000.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						**0.10**				**0.10**				**0.10**				**0.10**			

		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					**0.10**				**0.10**				**0.10**				**0.10**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		33,173,090.00	0	56,000.00	0.17	**0.27**	1	7,890,000.00	23.78	**23.88**	0	17,000.00	0.05	**0.15**	1	-	-	**0.10**	2	24.40	7,963,000.00
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						
PREDIKAT KINERJA																						
II		**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**824,861,869.00**	**61,329**	**16,054,800.00**	**1.95**	**2.05**	**-**	**315,416,969.00**	**38.24**	**38.34**		**130,195,800.00**	**15.78**	**15.88**		**271,766,000.00**	**32.95**	**33.05**	**61,329**	**89.32**	**733,433,569.00**
		Pengelolaan Pendapatan Daerah		**824,861,869.00**		**16,054,800.00**	**1.95**	**2.05**		**315,416,969.00**	**38.24**	**38.34**		**130,195,800.00**	**15.78**	**15.88**		**271,766,000.00**	**32.95**	**33.05**	**0**	**89.32**	**733,433,569.00**
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		332,718,000.00	0	10,301,000.00	3.10	**3.20**	0	47,430,000.00	14.26	**14.36**	0	-	-	**0.10**		211,469,000.00	63.56	**63.66**	0	81.31	269,200,000.00
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						**0.10**				**0.10**				**0.10**				**0.10**			

		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		39,167,700.00	0	-	-	**0.10**	0	-	-	**0.10**		21,554,000.00	55.03	**55.13**		16,260,000.00	41.51	**41.61**	10	96.94	37,814,000.00
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		41,099,669.00	0	5,753,800.00	14.00	**14.10**	0	22,948,069.00	55.84	**55.94**				**0.10**				**0.10**	30	70.23	28,701,869.00
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						**0.10**				**0.10**				**0.10**				**0.10**			
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						**0.10**				**0.10**				**0.10**				**0.10**			
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB		83,175,300.00	0	-	-	**0.10**	337	46,647,200.00	56.08	**56.18**		36,528,100.00	43.92	**44.02**				**0.10**	337	100.40	83,175,300.00
		Penetapan Wajib Pajak Daerah						**0.10**				**0.10**				**0.10**				**0.10**			
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		134,214,200.00	0	-	-	**0.10**	0	103,116,700.00	76.83	**76.93**		21,017,500.00	15.66	**15.76**		10,080,000.00	7.51	**7.61**	0	100.40	134,214,200.00
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		25,544,200.00	0	-	-	**0.10**	0	-	-	**0.10**		24,544,200.00	96.09	**96.19**				**0.10**	0	96.49	24,544,200.00

		Penagihan Pajak Daerah		125,088,800.00	0	-	-	**0.10**	0	63,549,000.00	50.80	**50.90**		20,143,000.00	16.10	**16.20**		30,000,000.00	23.98	**24.08**	0	91.29	113,692,000.00
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		11,767,000.00	0	-	-	**0.10**	0	4,356,000.00	37.02	**37.12**		1,717,000.00	14.59	**14.69**		3,957,000.00	33.63	**33.73**	0	85.64	10,030,000.00
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		32,087,000.00	0	-	-	**0.10**	0	27,370,000.00	85.30	**85.40**		4,692,000.00	14.62	**14.72**				**0.10**	0	100.32	32,062,000.00
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah danRetribusi Daerah		-	0	-	-	-	0	-	-	**0.10**		-		**0.10**		-		**0.10**	0	0.30	-
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						-				**0.10**				**0.10**				**0.10**			
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							
PREDIKAT KINERJA																							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				**22,761,574,545**		**2,089,425,337**				**4,959,331,871**				-				-					**17,665,954,355**

Hasil analisis pencapaian kinerja 33 sub kegiatan dari 2 program yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun pada Tahun 2024 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kegiatan berdasarkan realisasi fisik kegiatan sebagian besar terpenuhi yaitu sebesar **104,85%**, sedangkan realisasi anggaran rata-rata untuk program dan kegiatan tersebut adalah sebesar **84,70%**. Pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun sampai dengan Tahun 2025 (tahun ke-1) Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini :

TABEL 2.2

REKAPITULASI HASIL EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2025

PEMERINTAHAN KABUPATEN KARIMUN

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*) dan Kegiatan (*outcame*) serta Sub Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra OPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Renja OPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
											Target Renja OPD Tahun (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	%	28,91					28,68	28,68	100,00
							Rasio PAD	%	31,28					30,97	30,97	100,00
5	02	04				Program pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah	Rupiah	309,296 M					305,140 M	305,140 M	100,00
5	02	04	2	01		Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Laporan	1					1	1	100,00
5	02	04	2	01	0001	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1	1				1	1	100,00
5	02	04	2	01	0002	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	2					2	2	100,00

5	02	04	2	01	0003	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2					2	2	100,00
5	02	04	2	01	0004	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	10					10	10	100,00
5	02	04	2	01	0005	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	3					3	3	100,00
5	02	04	2	01	0011	Penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	1					1	1	100,00
5	02	04	2	01	0013	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	3					3	3	100,00
5	02	04	2	01	0014	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	6					6	6	100,00
							Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai	3,50					3,01	3,01	100,00
							Nilai AKIP	Nilai	65,07					63,17	63,17	100,00
5	02	01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80,90					80,45	80,45	100,00
5	02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	7					7	7	100,00

5	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2					2	2	100,00
5	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3					3	3	100,00
5	02	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2					2	2	100,00
5	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	Laporan	1					1	1	100,00
5	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	2158					2058	2058	100,00
5	02	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0					0	0	#DIV/0!
5	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan	Laporan	1					1	1	0,00
5	02	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1					0	0	#DIV/0!
5	02	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0					0	0	#DIV/0!

5	02	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5					5	5	100,00
5	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	Laporan	1					1	1	100,00
5	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1					1	1	100,00
5	02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3					3	3	100,00
5	02	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4					4	4	100,00
5	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	0					0	0	#DIV/0!
5	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1					1	1	100,00
5	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	25					25	25	100,00
5	02	01	2	06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0					0	0	#DIV/0!
5	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2					2	2	100,00

5	02	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0					0	0	#DIV/0!
5	02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan	Laporan	1					1	1	0,00
5	02	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	0					0	0	#DIV/0!
5	02	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	10					10	10	100,00
5	02	01	2	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	Unit	0					0	0	0,00
5	02	01	2	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	Unit	0					0	0	#DIV/0!
5	02	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1					1	1	0,00
5	02	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0					0	0	#DIV/0!
5	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	1					1	1	100,00
5	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2					2	2	100,00
5	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	2					2	2	100,00

5	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1					1	1	100,00
5	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	1					1	1	100,00
5	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1					1	1	100,00
5	02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1					1	1	0,00
5	02	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipeliharan	Unit	3					-	-	#VALUE!
5	02	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	50					50	50	100,00
5	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0					0	0	0,00
5	02	01	2	09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0					0	0	0,00

A. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Capaian program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran untuk tahun 2024 ada 2 program terdiri dari program pengelolaan pendapatan daerah, dan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan kegiatan ada 8 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Realisasi capaian sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah sebagai berikut :

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang–Undangan, indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target 20 orang. Untuk pelaksanaan bimtek yang dibutuhkan tidak ada, sehingga sebagai bahan evaluasi bahwa tidak adanya rencana kebutuhan atau pengembangan sumberdaya apa yang paling di butuhkan saat ini sehingga dapat meningkatkan kompetensi pejabat atau pegawai tersebut;
- Pemeliharaan Meubel, indikator kinerja jumlah meubel yang dipelihara dengan target 3 unit meubel. Realisasi capaian kinerja sub kegiatan dimaksud tidak dapat terealisasikan dikarenakan spesifikasi meubel yang ingin di perbaiki tidak ada didalam SSH;
- **Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah,** indikator

  kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan target 2 laporan. Sub kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sampai dengan akhir Desember Perda Nomor 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru disahkan, sehingga sosialisasi tidak mempunyai waktu untuk melaksanakannya.

B. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Untuk tahun 2024 capaian program rata-rata telah hasil/keluaran dari 2 program yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dan program pengelolaan pendapatan daerah. Realisasi capaian kegiatan yang di tahun 2024, dari 33 kegiatan hanya 3 sub kegiatan yang tidak dapat memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (lihat point a).

C. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- Realisasi dari program, yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ada 2 program yaitu : (1). pengelolaan pendapatan daerah dan capaian rata-rata program tersebut berdasarkan realisasi.
- Target sebesar **78,95%** dengan total penyerapan anggaran sebesar **73,03%**; (2). Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar **100,00%** dengan total penyerapan anggaran sebesar **93,84%**.

D. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan**.**

Untuk program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2024 tidak terealisasinya sebagian subkegiatan kegiatan di karenakan defisitnya anggaran pada program penunjang indikator kinerja utama .

E. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah.

Dampak yang ditimbulkan dengan tereralisasinya capaian yang di target kan adalah :

- Menimbulkan rasa optimis yang besar untuk merealisasikan target kinerja di tahun berikutnya.

F. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yan perlu diambil ntuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**.** Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil :

- Khusus program pengelolaan pendapatan daerah akan diusahakan kedepannya dengan berorientasi pada outcome capaian kinerja sub kegiatan masing-masing penunjang sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini

TABEL 2.3
PENCAPAIAN RENSTRA OPD s/d TAHUN 2024
PEMERINTAHAN KABUPATEN KARIMUN

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*) dan Kegiatan (*outcame*) serta Sub Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra OPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Renja OPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
											Target Renja OPD Tahun (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	%	28,91					28,25	28,25	100,00
							Rasio PAD	%	31,28					2,80	2,80	100,00
5	02	04				Program pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah	Rupiah	309,296 M					36,18	36,18	100,00
5	02	04	2	01		Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Laporan	1					292.373 M	292.373 M	100,00
5	02	04	2	01	0001	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1					1	1	100,00
5	02	04	2	01	0002	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	2					2	2	100,00

5	02	04	2	01	0003	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2					500	500	100,00
5	02	04	2	01	0004	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	10					10	10	100,00
5	02	04	2	01	0005	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	3					91.000	91.000	100,00
5	02	04	2	01	0006	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	2					91.000	91.000	100,00
5	02	04	2	01	0007	Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek pajak	850					1	1	100,00
5	02	04	2	01	0008	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	1					5.000	5.000	100,00
5	02	04	2	01	0009	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	4					50	50	100,00
5	02	04	2	01	0010	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	2					91.000	91.000	100,00

5	02	04	2	01	0011	Penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	1					5 M	5 M	100,00
5	02	04	2	01	0012	Penyelesaian keberatan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	5					50	50	100,00
5	02	04	2	01	0013	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	3					50	50	100,00
5	02	04	2	01	0014	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	6					91.000	91.000	100,00
5	02	04	2	01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan ElektronifikasiTransaksi Pemerintah Daerah	Laporan	1					3,01	3,01	100,00
							Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai	3,50					77,00	77,00	100,00
							Nilai AKIP	Nilai	65,07					84,25	84,25	100,00
5	02	01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80,90					7	7	100,00
5	02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	7					2	2	100,00
5	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2					3	3	100,00

5	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3					2	2	100,00
5	02	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2					1	1	100,00
5	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	Laporan	1					780	780	100,00
5	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	2158					384	384	100,00
5	02	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0					1	1	100,00
5	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan	Laporan	1					0	0	0,00
5	02	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1					1	1	100,00
5	02	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0					20	20	100,00
5	02	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5					1	1	100,00

5	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	Laporan	1					180	180	100,00
5	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1					15	15	100,00
5	02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3					20	20	100,00
5	02	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4					5	5	100,00
5	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	0					15	15	100,00
5	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1					25	25	100,00
5	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	25					10	10	100,00
5	02	01	2	06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0					500	500	100,00
5	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2					1	1	100,00
5	02	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0					1	1	100,00

5	02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan	Laporan	1					0	0	0,00
5	02	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	0					10	10	100,00
5	02	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	10					600	600	100,00
5	02	01	2	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	Unit	0					0	0	0,00
5	02	01	2	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	Unit	0					1	1	100,00
5	02	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1					0	0	0,00
5	02	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0					1	1	100,00
5	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	1					1.500	1.500	100,00
5	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2					36	36	100,00
5	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	2					585	585	100,00
5	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1					1	1	100,00

5	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	1					1	1	100,00
5	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1					1	1	100,00
5	02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1					0	0	0,00
5	02	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipeliharan	Unit	3					50	50	100,00
5	02	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	50					2	2	100,00
5	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0					0	0	0,00
5	02	01	2	09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0					0	0	0,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Selain itu kewajiban instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal telah diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Kemudian diperkuat dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberatasan Korupsi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah. Berdasarkan amanat tersebut, seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, dari entitas tertinggi (instansi) hingga unit kerja setingkat eselon II, setiap tahun menyampaikan laporan informasi kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang.

Sesuai amanat dalam peraturan dimaksud, maka strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun memiliki rumusan fokus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan Renstra Bapenda Kabupaten Karimun sebagai pedoman dalam dokumen perencanaan, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun agar efektif, efesien dan akuntabel. Penetapan kinerja memuat sasaran strategis, IKU dan target yang diperjanjikan untuk diwujudkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun pada Tahun 2024, yaitu antara lain :

1. Sasaran optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan

indikator adalah *Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)* dengan target yang ditetapkan adalah **30,97%**.

2. Sasaran **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD**, dengan indikator adalah *Nilai AKIP* dengan target yang ditetapkan adalah **61,80**. Serta pencapaian Level Kematangan Manajemen Risiko (MR) yang ditetapkan adalah nilai **3.00.**

Berikut ini tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah dan Indikator Kinerja Kunci serta dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4
Capaian Target Indikator Kinerja Utama Badan
Pendapatan Daerah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Rumusan	Target
1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{Realisasi\ PAD\ tahun\ berjalan}{Realisasi\ penerimaan\ daerah\ non\ migas\ tahun\ berjalan} x\ 100$	30,97
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penyimpulan atas hasil reviu terhadap kinerja pelayanan yang diberikan/dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen.	61,80
	Level Kematangan Manajemen Risiko (MR)	Penyimpulan atas hasil reviu terhadap kinerja manajemen risiko yang diberikan/dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen.	3.00

TABEL 2.5
PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2025 DAN 2026

Kode Rekening	Uraian	Target Penerimaan Pendapatan	
		2025	2026
1	2	7	8
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	409,982,373,291,00	413,033,556,955,00
4 1 01	PAJAK DAERAH	305,140,824,291,00	310,837,524,291,00

4	1	02	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	23,480,376,713,00	23,480,376,713,00
4	1	03	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN KB)	13,442,947,578,00	13,442,947,578,00
4	1	04	RETRIBUSI DAERAH	99,851,049,000,00	99,295,532,664,00
4	1	05	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	3,090,000,000.00	2,400,000,000,00
4	1	06	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	1,900,500,000,00	500,500,000,00

2.3 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda Isu-isu Penting

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun adalah instansi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Karimun terutama dalam melaksanakan kewenangan di bidang pendapatan daerah. Kondisi pendapatan daerah sangat menentukan berbagai kemungkinan penyelenggaraan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah tersebut, sehingga permasalahan yang timbul perlu diambil langkah- langkah yang nyata dalam meningkatkan penerimaan daerah dari berbagai sektor penerimaan yang potensial namun belum optimal diupayakan. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah adalah mewujudkan penyelenggaraan pembangunan terutama dalam melaksanakan kewenangan di bidang pendapatan daerah. Untuk mencapai hal tersebut Bapenda berupaya meningkatkan kinerjanya berdasarkan rencana kinerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan sebagai realisasi dari Isu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, upaya tersebut yaitu:

a. Perencanaan Kinerja

Untuk perencanaan kinerja khusus pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan merupakan acuan Badan Pendapatan Daerah melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah berdasarkan target dan realisasi yang akan dicapai. Kegiatan ini dikoordinasikan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan, Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun secara berkesinambungan.

b. Sasaran Kinerja

Sasaran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 meliputi 2 (*dua*) tujuan OPD, 2 (*dua*) indikator tujuan, dan 2 (*dua*) sasaran strategis serta 3 (*tiga*) Indikator Kinerja Sasaran (IKS) yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yaitu :

- **Tujuan OPD** adalah (1). ***Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah***, dengan indikator tujuan adalah *Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah*;

  (2). ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik***, dengan indikatornya *Indeks Pelayanan Publik (IPP)*;
- **Sasaran strategis** meliputi (1). ***Meningkatnya Pengelolaan Penerimaan PAD,*** dengan indikatornya yaitu *Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)*; (2). ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD,*** dengan indikatornya adalah *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)* dan *Level Kematangan Manajemen Risiko (MR)*.

c. **Sasaran Kinerja**

Isu Pegawai yang Profesional dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Bab I butir 8 disebutkan secara jelas bahwa manajemen Aparatur Sipil Negara adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.

Pada intinya manajemen kepegawaian lebih berorientasi pada profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM)/Aparatur Sipil Negara (ASN), yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, tidak partisan dan netral, keluar dari semua pengaruh golongan dan partai politik dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk bisa melaksanakan tugas pelayanan dengan persyaratan yang demikian, SDM aparatur (ASN) dituntut memiliki profesionalisme dan wawasan global serta memiliki kompetensi yang tinggi.

Isu pegawai profesional sangat berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah. Ketersediaan sumber daya manusia khususnya di bidang tenaga pemeriksa yang terlatih dalam hal melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaporan penyetoran wajib pajak masih kurang dan menjadi faktor utama dalam pencapaian sumber daya manusia yang profesional.

Untuk mencapai hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah dituntut untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mampu mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat. Usaha-usaha yang dapat dilakukan antara lain dengan cara mengirimkan pegawai Bidang Penagihan dan Keberatan yang berkoordinasi dengan Bidang Pajak Daerah untuk mengikuti diklat-diklat tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta mengadakan koordinasi dengan daerah-daerah lain.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2025, merupakan dasar dalam menentukan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun untuk menunjang visi dan misi kepala daerah.

Dalam menentukan rencana program dan kegiatan, perlu dilakukan proses untuk membandingkan antara rancangan awal rencana kerja pembangunan daerah dengan hasil analisis kebutuhan yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah, guna menetapkan prioritas pembangunan yang akan dikerjakan oleh Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2025.

Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 menetapkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, dan dapat dilihat pada Tabel 2.6 di bawah ini.

TABEL 2.6
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

Kode											Hasil Analisis Kebutuhan					
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (outcame) serta Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (outcame) serta Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
										(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	%	28,68				Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	%	28,68	
								Rasio PAD	%	30,97	22.387.031.405,00			Rasio PAD	%	30,97	22.387.031.405,00
5	02	04				Program pengelolaan pendapatan daerah		Jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah	Rupiah	305,140 M	1.351.156.400,00	Program pengelolaan pendapatan daerah	Karimun	Jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah	Rupiah	305,140 M	1.351.156.400,00
5	02	04	2	01		Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Laporan	1	1.351.156.400,00	Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Karimun	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Laporan	1	1.351.156.400,00
5	02	04	2	01	0001	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1	310.185.600,00	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Karimun	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1	310.185.600,00

5	02	04	2	01	0002	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah.		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	0	-	**Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah.**	**Karimun**	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	0	-
5	02	04	2	01	0003	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	0	-	**Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah**	**Karimun**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	0	-
5	02	04	2	01	0004	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	10	226.986.000,00	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	**Karimun**	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	10	226.986.000,00
5	02	04	2	01	0005	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	3	311.334.000,00	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	**Karimun**	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	3	311.334.000,00
5	02	04	2	01	0006	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	0	-	**Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah**	**Karimun**	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	0	-
5	02	04	2	01	0007	Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek pajak	0	-	Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	**Karimun**	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek pajak	0	-
5	02	04	2	01	0008	Penetapan wajib pajak daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	0	-	Penetapan wajib pajak daerah	**Karimun**	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	0	-
5	02	04	2	01	0009	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	0	-	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	**Karimun**	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	0	-

5	02	04	2	01	0010	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	0	-	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	**Karimun**	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	0	-
5	02	04	2	01	0011	Penagihan pajak daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	1	165.649.800,00	**Penagihan pajak daerah**	**Karimun**	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	1	165.649.800,00
5	02	04	2	01	0012	Penyelesaian keberatan pajak daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	0	-	Penyelesaian keberatan pajak daerah	**Karimun**	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	0	-
5	02	04	2	01	0013	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	3	287.038.000,00	**Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah**	**Karimun**	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	3	287.038.000,00
5	02	04	2	01	0014	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah		Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	6	49.963.000,00	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	**Karimun**	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	6	49.963.000,00
5	02	04	2	01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengembangan ElektronifikasiTransaksi Pemerintah Daerah	Laporan	0	-			Jumlah Laporan Pengembangan ElektronifikasiTransaksi Pemerintah Daerah	Laporan	0	-
								Indeks Pelayanan Publik (IPP)	**Nilai**	**3,01**				**Indeks Pelayanan Publik (IPP)**	**Nilai**	**3,01**	
								Nilai AKIP	**Nilai**	**63,17**		**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Karimun**	**Nilai AKIP**	**Nilai**	**63,17**	

5	**02**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Nilai**	**80,45**	**21.035.875.005,00**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Karimun**	**Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Nilai**	**80,45**	**21.035.875.005,00**
5	**02**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen**	**Dokumen**	**7**	**57.802.500,00**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Karimun**	**Jumlah dokumen**	**Dokumen**	**7**	**57.802.500,00**
5	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	29.733.500,00	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**Karimun**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	29.733.500,00
5	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	23.069.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Karimun**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	23.069.000,00
5	02	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	5.000.000,00	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Karimun**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	5.000.000,00
5	**02**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan**	**Laporan**	**1**	**18.759.900.274,00**	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Karimun**	**Jumlah laporan**	**Laporan**	**1**	**18.759.900.274,00**
5	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	2058	18.759.900.274,00	**Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN**	**Karimun**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	2058	18.759.900.274,00
5	02	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0	-	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Karimun**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0	-

5	**02**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan**	**Laporan**	**1**	**30.000.000,00**	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	**Karimun**	**Jumlah laporan**	**Laporan**	**1**	**30.000.000,00**
5	02	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	-	**Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	**Karimun**	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	-
5	02	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	-	**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	**Karimun**	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	-
5	02	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	30.000.000,00	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Karimun**	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	30.000.000,00
5	**02**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan**	**Laporan**	**1**	**693.385.000,00**	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor**	**Karimun**	**Jumlah laporan**	**Laporan**	**1**	**693.385.000,00**
5	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	29.194.000,00	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Karimun**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	29.194.000,00
5	02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	222.173.000,00	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	**Karimun**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	222.173.000,00
5	02	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	22.415.000,00	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Karimun**	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	22.415.000,00
5	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	0	-	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Karimun**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	0	-

5	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	106.132.000,00	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**Karimun**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	106.132.000,00
5	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	25	36.900.000,00	Fasilitasi kunjungan tamu	**Karimun**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	25	36.900.000,00
5	02	01	2	06	08	Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	-	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Karimun**	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	-
5	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	276.571.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	**Karimun**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	276.571.000,00
5	02	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	-	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Karimun**	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	-
5	**02**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah laporan**	**Laporan**	**1**	**174.425.000,00**	Pengadaan Mebel	**Karimun**	**Jumlah laporan**	**Laporan**	**1**	**174.425.000,00**
5	02	01	2	07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	0	-	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Karimun**	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	0	-
5	02	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	10	102.425.000,00	**Pengadaan Aset Tetap Lainnya**	**Karimun**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	10	102.425.000,00
5	02	01	2	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	Unit	0	-	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	Unit	0	-
5	02	01	2	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	Unit	0	-	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Karimun**	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	Unit	0	-

5	02	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1	72.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Karimun**	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1	72.000.000,00
5	02	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Karimun**	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-
5	**02**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan**	**Laporan**	**1**	**1.146.957.745,00**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Karimun**	**Jumlah Laporan**	**Laporan**	**1**	**1.146.957.745,00**
5	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	1.300.000,00	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Karimun**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	1.300.000,00
5	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	2	496.140.745,00	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Karimun**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	2	496.140.745,00
5	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1	649.517.000,00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Karimun**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1	649.517.000,00
5	**02**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan**	**Laporan**	**1**	**173.404.486,00**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**Karimun**	**Jumlah Laporan**	**Laporan**	**1**	**173.404.486,00**

5	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	52.202.000,00	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Karimun**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	52.202.000,00
5	02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	44.263.986,00	Pemeliharaan Mebel	**Karimun**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	44.263.986,00
5	02	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipeliharan	Unit	-	-	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Karimun**	Jumlah mebel yang dipeliharan	Unit	-	-
5	02	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	50	76.938.500,00	**Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Karimun**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	50	76.938.500,00
5	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Karimun**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0	-
5	02	01	2	09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Karimun**	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0	-

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun tidak mempunyai kajian atau penelaahan terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari perangkat daerah pemerintah kabupaten karimun yang langsung ditujukan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun melalui penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan Pembangunan lainnya yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional maka setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah maupun Perencanaan tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 bahwa setiap SKPD diwajibkan membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam membuat dokumen perencanaan, Badan Pendapatan Daerah Kabupten Karimun mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif antar bidang dan Wajib Pajak. Perencanaan dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupten Karimun. Penyusunan perencanaan dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan pola Working Plan sesuai amanata undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistemperencanaan pembangunan Nasional (SPPN) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dalam menyusun perencanaan harus berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi dan jaminan bahwa paling sedikit 30,00% dari usulan musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja OPD aturan tersebut.

Dalam rangka menjaga sinergitas perencanaan perlu dicermati kebijakan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah

"MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN".

Upaya dalam mensinergitas perencanaan antara Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dengan perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dibuatlah strategi yang merupakan pernyataan-pernyataan untuk menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan adalah :

1. Menerjemahkan strategi kedalam bentuk yang operasional;
2. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah;
3. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi;
4. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan
5. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan dapat :

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;

3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi OPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor–faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi OPD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan dan melanggar kepentingan umum.

Berikut adalah arah kebijakan dan Strategi yang dicanangkan untuk setiap Sasaran yang ingin dicapai seperti pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kontribusi	Optimalisasi Pendapatan Asli	Meningkatkan penerimaan pajak	Meningkatkan intensifikasi pajak daerah melalui kajian potensi
	Pendapatan Asli Daerah	Daerah	daerah dan retribusi daerah	Menurunkan jumlah piutang pajak daerah dengan meningkatkan sistem pengawasan dan pembinaan serta penerapan sanksi
				Memperbaiki administrasi perpajakan
				Meningkatkan kepatuhan wajib pajak
				Penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah daerah (ETPD) khususnya Pajak Daerah
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Meningkatkan pelayanan birokrasi	Meningkatkan sarana dan prasarana
				Meningkatkan kualitas SDM pelayanan
				Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas	Meningkatkan sistem pelaporan keuangan dan asset
				Meningkatkan sistem perencanaan dan evaluasi
				Meningkatkan pengelolaan barang/asset daerah secara tertib administrasi

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi dan merealisasikan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan tujuan untuk suatu periode sebagai suatu ukuran keadaan yang ingin diwujudkan dalam skala periode

terbatas (*sampai dengan lima tahun*). Tujuan akan menentukan bagian-bagian tujuan Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang.

Berdasarkan visi dan misi kepala daerah sebelumnya, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun mengemban tanggungjawab pada misi

1. Ke 1 (*satu*) Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri berbasis sumber daya dan kearifan lokal (*berkeadilan dalam bidang ekonomi*). Dengan tujuan *Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah.* Sasarannya adalah Meningkatnya pengelolaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Ke 5 (lima) Mewujudkan birokrasi yang profesional dan unggul (berkeadilan dalam pelayanan publik) Dengan tujuan *Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*. Sasarannya adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD

Tabel 3.2
Indikator kinerja
Badan pendapatan daerah tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	30,97%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD	61,80
		Level Kematangan Manajemen Risiko (MR) Bapenda	3

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja yang yang disusun dan direncanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun adalah untuk merealisasikan misi yang telah disepakati guna dilaksanakan sebaik mungkin. Adapun Program dan Kegiatan yang telah disusun dan direncanakan untuk tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 melalui beberapa perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yang diusulkan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 adalah :

TABEL 3.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 PEMERINTAHAN KABUPATEN KARIMUN

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)
Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah									**Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah**	**%**		**28,68**	**23.506.382.974,55**	**APBD**		**28,91**	**24.681.702.124,01**
	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah								**Rasio PAD**	**%**		**31,28**	**23.506.382.974,55**	**APBD**		**31,59**	**24.681.702.124,01**
		5	**02**	**04**				**Program pengelolaan pendapatan daerah**	**Jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah**	**Rupiah**	**Karimun**	**309,296 M**	**1.418.714.220,00**	**APBD**		**306,953 M**	**1.588.649.931,00**
		5	**02**	**04**	**2**	**01**		**Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Laporan**	**Karimun**	**1**	**1.418.714.220,00**	**APBD**		**1**	**1.588.649.931,00**
		5	02	04	2	01	0001	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	Karimun	1	218.714.220,00	APBD		1	223.649.931,00
		5	02	04	2	01	0002	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	Karimun	2	60.000.000,00	APBD		2	80.000.000,00
		5	02	04	2	01	0003	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	Karimun	2	75.000.000,00	APBD		2	95.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)
		5	02	04	2	01	0004	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	Karimun	10	80.000.000,00	APBD		10	100.000.000,00
		5	02	04	2	01	0005	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	Karimun	3	150.000.000,00	APBD		3	160.000.000,00
		5	02	04	2	01	0006	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	Karimun	2	100.000.000,00	APBD		2	110.000.000,00
		5	02	04	2	01	0007	Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek pajak	Karimun	850	100.000.000,00	APBD		900	110.000.000,00
		5	02	04	2	01	0008	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	Karimun	1	20.000.000,00	APBD		1	30.000.000,00
		5	02	04	2	01	0009	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	Karimun	4	20.000.000,00	APBD		4	30.000.000,00
		5	02	04	2	01	0010	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	Karimun	2	150.000.000,00	APBD		2	170.000.000,00
		5	02	04	2	01	0011	Penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	Karimun	1	150.000.000,00	APBD		1	170.000.000,00
		5	02	04	2	01	0012	Penyelesaian keberatan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	Karimun	5	25.000.000,00	APBD		5	30.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)
		5	02	04	2	01	0013	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	Karimun	3	150.000.000,00	APBD		3	150.000.000,00
		5	02	04	2	01	0014	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	Karimun	6	70.000.000,00	APBD		6	80.000.000,00
		5	02	04	2	01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	Karimun	1	50.000.000,00			1	50.000.000,00
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik									**Indeks Pelayanan Publik (IPP)**	**Nilai**		**3,50**		**APBD**		**3,51**	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD								**Nilai AKIP**	**Nilai**		**65,07**		**APBD**		**67,02**	
		5	**02**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Nilai**	**Karimun**	**80,90**	**22.087.668.754,55**	**APBD**		**81,30**	**23.093.052.193,01**
		5	**02**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen**	**Dokumen**	**Karimun**	**7**	**85.000.000,00**	**APBD**		**9**	**150.000.000,00**
		5	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Karimun	2	40.000.000,00	APBD		4	70.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)
		5	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Karimun	3	40.000.000,00	APBD		3	70.000.000,00
		5	02	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Karimun	2	5.000.000,00	APBD		2	10.000.000,00
		5	**02**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**Laporan**	**Karimun**	**1**	**19.697.895.287,00**	**APBD**		**1**	**19.964.052.193,01**
		5	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Karimun	2158	19.697.895.287,00	APBD		2158	19.964.052.193,01
		5	02	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Karimun	0	-	APBD		0	-
		5	**02**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**Laporan**	**Karimun**	**1**	**195.000.000,00**	**APBD**		**1**	**205.000.000,00**
		5	02	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Karimun	1	165.000.000,00	-		1	165.000.000,00
		5	02	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Karimun	0	-	APBD		1	10.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)
		5	02	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Karimun	5	30.000.000,00	APBD		5	30.000.000,00
		5	**02**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**Laporan**	**Karimun**	**1**	**620.000.000,00**	**APBD**		**1**	**725.000.000,00**
		5	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	Karimun	1	20.000.000,00	APBD		1	30.000.000,00
		5	02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Karimun	3	150.000.000,00	APBD		3	170.000.000,00
		5	02	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	Karimun	4	23.000.000,00	APBD		4	25.000.000,00
		5	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	Karimun	0		APBD		0	-
		5	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	Karimun	1	110.000.000,00	APBD		1	110.000.000,00
		5	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Karimun	25	37.000.000,00	APBD		25	40.000.000,00
		5	02	01	2	06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Karimun	0		APBD		0	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)
		5	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Karimun	2	280.000.000,00	APBD		2	300.000.000,00
		5	02	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Karimun	0	-	APBD		1	50.000.000,00
		5	**02**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan**	**Laporan**	**Karimun**	**1**	**124.500.000,00**	**APBD**		**1**	**372.000.000,00**
		5	02	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	Karimun	0	-	-		3	100.000.000,00
		5	02	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	Karimun	10	52.500.000,00	APBD		10	100.000.000,00
		5	02	01	2	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	Unit	Karimun	0	-	APBD		0	-
		5	02	01	2	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	Unit	-	0	-	-		2	50.000.000,00
		5	02	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	Karimun	1	72.000.000,00	APBD		1	72.000.000,00
		5	02	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	- Karimun	0	-	-		1	50.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)
		5	**02**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**Laporan**	**Karimun**	**1**	**1.141.071.467,55**	**APBD**		**1**	**1.152.000.000,00**
		5	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Karimun	2	1.400.000,00	APBD		2	2.000.000,00
		5	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	Karimun	2	490.000.000,00	APBD		2	500.000.000,00
		5	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	Karimun	1	649.671.467,55	APBD		1	650.000.000,00
		5	**02**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**Laporan**	**Karimun**	**1**	**224.202.000,00**	**APBD**		**1**	**525.000.000,00**
		5	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Karimun	1	52.202.000,00	APBD		1	53.000.000,00
		5	02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Karimun	1	45.000.000,00	APBD		1	45.000.000,00
		5	02	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipeliharan	Unit	Karimun	3	50.000.000,00	-		3	50.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)	'(1)	'(2)
		5	02	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	Karimun	50	77.000.000,00	APBD		50	77.000.000,00
		5	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Karimun	0	-	APBD		2	100.000.000,00
		5	02	01	2	09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Karimun	0	-	-		2	100.000.000,00
		5	02	01	2	09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Karimun	0	-	-		2	100.000.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan program kerja, maka Badan Pendapatan Daerah menyusun rencana kerja dan pendanaan sesuai dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah, RKPD dan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Adapun rencana kerja dan pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (outcame) serta Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
							Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	**%**		**28,68**	**22.387.031.405,00**	**APBD**	
							Rasio PAD	**%**		**30,97**	**22.387.031.405,00**	**APBD**	
5	**02**	**04**				**Program pengelolaan pendapatan daerah**	**Jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah**	**Rupiah**	**Karimun**	**305,140 M**	**1.351.156.400,00**	**APBD**	
5	**02**	**04**	**2**	**01**		**Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Laporan**	**Karimun**	**1**	**1.351.156.400,00**	**APBD**	
5	02	04	2	01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	Karimun	1	310.185.600,00	APBD	
5	02	04	2	01	02	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	Karimun	0	-	APBD	
5	02	04	2	01	03	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	Karimun	0	-	APBD	

5	02	04	2	01	04	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	Karimun	10	226.986.000,00	APBD	
5	02	04	2	01	05	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	Karimun	3	311.334.000,00	APBD	
5	02	04	2	01	06	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	Karimun	0	-	APBD	
5	02	04	2	01	07	Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek pajak	Karimun	0	-	APBD	
5	02	04	2	01	08	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	Karimun	0	-	APBD	
5	02	04	2	01	09	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	Karimun	0	-	APBD	
5	02	04	2	01	10	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	Karimun	0	-	APBD	
5	02	04	2	01	11	Penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	Karimun	1	165.649.800,00	APBD	
5	02	04	2	01	12	Penyelesaian keberatan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	Karimun	0	-	APBD	
5	02	04	2	01	13	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	Karimun	3	287.038.000,00	APBD	

5	02	04	2	01	14	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	Karimun	6	49.963.000,00	APBD	
						Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan		0	-	**APBD**	
							Indeks Pelayanan Publik (IPP)	**Nilai**		**3,01**		**APBD**	
5	**01**	**02**					**Nilai AKIP**	**Nilai**	**Karimun**	**63,17**		**APBD**	
5	**01**	**02**	**2**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Nilai**	**Karimun**	**80,45**	**21.035.875.005,00**	**APBD**	
5	01	02	2	01	01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen**	**Dokumen**	Karimun	**7**	**57.802.500,00**	APBD	
5	01	02	2	01	06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Karimun	2	29.733.500,00	APBD	
5	01	02	2	01	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Karimun	3	23.069.000,00	APBD	
5	**02**	**01**	**2**	**02**		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	**Karimun**	2	5.000.000,00	**APBD**	
5	02	01	2	02	01	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**Laporan**	Karimun	**1**	**18.759.900.274,00**	APBD	
5	02	01	2	02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Karimun	2058	18.759.900.274,00	APBD	
5	**02**	**01**	**2**	**05**		Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	**Karimun**	0	-	**APBD**	

5	02	01	2	05	03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Karimun	0	-	APBD	
5	02	01	2	05	11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Karimun	0	-	APBD	
5	**02**	**01**	**2**	**06**		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	**Karimun**	5	30.000.000,00	**APBD**	
5	02	01	2	06	01	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan**	**Laporan**	Karimun	**1**	**693.385.000,00**	APBD	
5	02	01	2	06	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	Karimun	1	29.194.000,00	APBD	
5	02	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Karimun	3	222.173.000,00	APBD	
5	02	01	2	06	04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	Karimun	4	22.415.000,00	APBD	
5	02	01	2	06	05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	Karimun	0	-	APBD	
5	02	01	2	06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	Karimun	1	106.132.000,00	APBD	
5	02	01	2	06	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Karimun	25	36.900.000,00	APBD	
5	02	01	2	06	09	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Karimun	0	-	APBD	
5	02	01	2	06	11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Karimun	2	276.571.000,00	APBD	
5	**02**	**01**	**2**	**07**		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	**Karimun**	0	-	**APBD**	

5	02	01	2	07	05	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan**	**Laporan**	Karimun	**1**	**174.425.000,00**	-	
5	02	01	2	07	06	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	Karimun	0	-	APBD	
5	02	01	2	07	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	Karimun	10	102.425.000,00	APBD	
5	02	01	2	07	09	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	Unit	Karimun	0	-	APBD	
5	**02**	**01**	**2**	**08**		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	**Karimun**	1	72.000.000,00	**APBD**	
5	02	01	2	08	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Karimun	0	-	APBD	
5	02	01	2	08	02	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**Laporan**	Karimun	**1**	**1.146.957.745,00**	APBD	
5	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Karimun	2	1.300.000,00	APBD	
5	**02**	**01**	**2**	**09**		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	**Karimun**	2	496.140.745,00	**APBD**	
5	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	Karimun	1	649.517.000,00	APBD	
5	02	01	2	09	02	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**Laporan**	Karimun	**1**	**173.404.486,00**	APBD	

5	02	01	2	09	05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Karimun	1	52.202.000,00	-	
5	02	01	2	09	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Karimun	1	44.263.986,00	APBD	
5	02	01	2	09	09	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipeliharan	Unit	Karimun	-	-	APBD	
5	02	01	2	09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Karimun	2	25.000.000,00	APBD	
5	02	01	2	09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Karimun	2	25.000.000,00	APBD	

BAB IV

PENUTUP

Rencana pembangunan tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja (RENJA–OPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dibuat untuk periode 1 (*satu*) tahun, disusun sebagai indikator dalam menentukan arah kebijakan tahunan kinerja program dan kegiatan yang bersifat mendesak dan penting untuk dilaksanakan serta realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Diharapkan Rencana Kerja (RENJA–OPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini kiranya dapat direalisasikan, sehingga permasalahan operasional yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dapat teratasi.

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

RENJA 2025

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KARIMUN

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keauangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 akan menjadi bagian dari rancangan dokumen perencanaan tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada periode tersebut.

Penyusunan Renja ini merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 memuat usulan program, kegiatan beserta sub kegiatan dalam satu Tahun Anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025. Serta menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tanjung Balai Karimun, Maret 2024
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Karimun

DWIYANDRI KURNIAWAN, SE., MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 11

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu..... 11

2.2. Evaluasi Program Tahun 2023..... 12

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.. 44

2.3.1. Pengukuran Kinerja 44

2.3.2. Hasil Pengukuran Kinerja..... 46

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 49

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 52

2.5. Telaah Usulan Masyarakat 75

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD KABUPATEN KARIMUN 76

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 76

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 77

3.3. Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 79

BAB IV PENUTUP..... 97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Organisasi Perangkat Daerah menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD.

Dalam melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah,perencanaan strategis merupakan integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis, salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma kepemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan *Good Governance* yang memberikan nuansa, peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun tahun 2024 mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Karimun, Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun serta usulan dari masyarakat. Dalam tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 telah melalui proses evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Berdasarkan tugas tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah;
b. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

c. Penyusunan rencana anggaran dan mengkoordinasikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten penyusunan anggaran Pemerintah Daerah;
d. Pelaksanaaan tertib perbendaharaan dan manajemen kas daerah;
e. Pelaksanaaan tertib sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
f. Pelaksanaaan tertib pengelolaan barang milik daerah; dan
g. Pelaksanaan tugas keBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupatenan lain di bidang keuangan dan aset daerah yang diberikan oleh Pimpinan/Bupati.

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
3. Bidang Anggaran
4. Bidang Perbendaharaan
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
6. Bidang Pengelolaan Aset Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun mempunyai peran yang amatstrategis dalam menyiapkan bahan - bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan dibidang keuangan dan aset daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor 07);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011 - 2031 (Lembar Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 5);
29. Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 39);
30. Peraturan Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 70);

31. Peraturan Bupati Karimun Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 75);
32. Peraturan Bupati Karimun No. 45 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025, meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BPKAD agar substansi pada bagian bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1. Latar Belakang Masalah

Memuat tentang Renja BPKAD, Proses Penyusunan Renja BPKAD, Keterkaitan antara Renja BPKAD dengan dokumen RKPD dan Renstra

BPKAD, dengan Renja Kemenkeu, Renja BPKAD Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPB.

1.2. Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang Undang - Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Keputusan Peraturan Lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan OPD, serta Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penyusunan OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja BPKAD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja BPKAD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD TAHUN LALU

Mengambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja BPKAD Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKAD.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja BPKAD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja BPKAD sudah disahkan. dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BPKAD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja BPKAD tahun - tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD tahun lalau mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan BPKAD atau realisasi BPKAD yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

Pada bab ini berisi uraian mengenai:

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan BPKAD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan BPKAD;
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKAD;
c. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Terhadap capaian Program Nasional;
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BPKAD;
e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan perubahan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Menjelaskan perubahan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, maupun seandainya ketersediaan Anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKAD

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun adalah Penjabaran Perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

a) Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator - indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapanbesaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b) Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja :

2.2 Evaluasi Program Tahun 2023

Pada tahun 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun melaksanakan 3 (tiga) program yang tercantum dalam perjanjian kinerja terdiri dari 2 (dua) program utama dan 1 (satu) program penunjang.

Adapun 3 (tiga) Program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Pada tahun 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun memperoleh pagu kegiatan sebesar Rp. 118.479.081.727,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 76.493.864.942,- atau sebesar 67,93%.

Analisis terhadap masing-masing program teknis yang terdiri dari 2 (dua) program utama kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

   Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 99.921.175.422,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 58.885.824.218,- atau sebesar 63,01%. Indikator output Program ini adalah Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dokumen tentang Evaluasi pelaporan Pemerintah Kegiatan yang mendukung Program ini adalah:

   - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, terdiri dari :
     a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dengan pagu anggaran sebesar Rp. 165.595.087,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 128.803.790,- atau sebesar 98.66%
     b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan pagu anggaran sebesar Rp. 150.150.461,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 140.782.440,- atau sebesar 99.34%.
     c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan pagu anggaran

sebesar Rp 260.444.643,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 214.497.142,- atau sebesar 91.84%.

d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan pagu anggaran sebesar Rp. . 235.787.244,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 188.461.705,- atau sebesar 93.32%.

e) Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 245.859.294,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 194.389.282,- atau sebesar 73.49%.

- Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, terdiri dari:

a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 337.680.915,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 267.389.490,- atau sebesar 99.93%.

b) Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 119.074.925,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 110.392.800,- atau sebesar 99.68%.

c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga PFK dengan pagu anggaran sebesar Rp. 202.628.851,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 193.805.548,- atau sebesar 98.79%.

d) Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait dengan pagu anggaran sebesar Rp. 375.282.176,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 365.716.700,- atau sebesar 99.19%.

- Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari :

a) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan LO dan Beban dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 68.137.572,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.543.572,- atau sebesar 90.97%.

b) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 198.614.616,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 172.951.617,- atau sebesar 98.48%.

c) Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 192.921.608,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 192.784.107,- atau sebesar 96.58%.

d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 135.656.781,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 134.770.537,- atau sebesar 95.10%.

e) Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 288.794.687,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 286.209.590,- atau sebesar 77.98%.

f) Sub Kegiatan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.452.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.311.000,- atau sebesar 99,98%.

- Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari :

a) Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 93.893.023.096,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 54.139.827.585,- atau sebesar 62.70%.

b) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.275.092.032,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.717.108.370,- atau sebesar 71.19%.

- Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, terdiri dari :
  a) Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 518.325.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 128.688.800,- atau sebesar 79.47%.
  b) Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 212.653.634,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 203.661.705,- atau sebesar 99.11%.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Program ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 1.302.860.407,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.150.258.914,- atau sebesar 95.32% dari pagu anggaran. Indikator pada Program ini adalah adanya dokumen pengelolaan barang milik daerah. Adapun kegiatan yag mendukung pada Program ini adalah:
   - Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :
     a) Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 220.844.398,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 207.842.252,- atau sebesar 98.69%.
     b) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 269.878.379,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 226.693.086,- atau sebesar 88.17%.
     c) Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 129.335.446,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 122.762.863,- atau sebesar 97.58%.
     d) Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.321,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 90.399.440,- atau sebesar 97.58%.

e) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 238.423.701,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 208.868.693,- atau sebesar 94.77%.

f) Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 344.378.162 R,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 293.692.580,- atau sebesar 97.09%.

Selain Didukung dengan 2 (dua) Program Utama sebagai Program teknis dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan juga didukung oleh program pendukung lainnya, yakni sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 17.255.045.898,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.457.781.810,- atau sebesar 88.10%. Indikator programnya adalah indeks kepuasan masyarakat. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 75.38%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah :

   - Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari :

     a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 55.942.543,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.263.037,- atau 91.08%.

     b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 29.027.992,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 12.972.60,- atau 85.87%.

     c) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 93.360.081,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 78.663.200,- atau 85.87%

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari :
  a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.964.279.82,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.621.924.758,- atau 98.76%.
  b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.675.453.740,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.506.070.852,- atau 91.19%.
  c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 29.791.292,- dengan realiasi anggaran sebesar Rp 22.873.436,- atau 91.00%
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari :
  a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan pagu anggaran sebesar Rp 57.386.595,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 12.082.473,- atau 96.93%.
  b) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan pagu anggaran sebesar Rp 322.661.895,- dengan realiasi anggaran sebesar Rp 312.317.473,- atau 99,93%.
  c) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp 30.532.000,- dengan realiasi anggaran sebesar Rp 27.082.000,- atau 91.00%
- Kegiatan Umum Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari :
  a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.999.828,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.954.226,- atau 99.10%.
  b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 144.306.321,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 142.063.055,- atau 99.88%.
  c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 83.504.013,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 82.171.401 atau 99.74%.

d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 139.651.618,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 138.319.571,- atau 99.68%.

e) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 73.128.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.160.00,- atau 99.68%.

f) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan pagu anggaran sebesar Rp. Rp67.952.193,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. Rp66.985.516,- atau 99.97%.

g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 844.820.397,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 839.616.537,- atau 87.57%.

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari :

a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan pagu anggaran sebesar Rp. 313.490.421,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 311.191.839,- atau 99.00%.

b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 379.043.588,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 376.743.550,- atau 93.43%.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 177.240.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 173.001.282,- atau 99,93%.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 154.799.527,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 143.491.200,- atau 55.56%.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.326.741.680,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. Rp1.191.958.500,- atau 89.47%.

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :
  a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 85.112.680,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. Rp81.821.98,- atau 91.27%.
  b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 77.391.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. Rp75.655.000,- atau 99.96%.
  c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 79.428.670,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 79.398.324,- atau 98.98%.

1. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan Tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

a. Belum terwujudnya koordinasi dan integrasi yang baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan informasi strategis sebagai basis data perencanaan anggaran;
b. Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang kompeten dibidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan;
c. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan SDM yang kompeten dibidang teknologi informasi dan sarana serta prasarana untuk aplikasi;
d. Masih belum optimalnya tertib administrasi pengelolaan aset daerah.
e. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun, maka peningkatan kinerja organisasi melalui

kegiatan tahunan yang dilaksanakan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Tabel. 2.1.
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023

No		PRPGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	PERMASALAHAN	UNIT KERJA	URUSAN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	17.255.045.898 ,-	16.457.781.810 ,-	**89,00**	**Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Persentase Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**			-
	1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	178.330.616	140.898.837	88,10	Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi Kerja			
		1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	55.942.543,-	49.263.037,-	91,08	Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah		BPKAD	
		2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.027.992,-	Rp12.972.600,-	85,57	Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		BPKAD	
		3) valuasi Kinerja Perangkat Daerah	93.360.081	78.663.200,-	85.57	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		BPKAD	

	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12.669.524.856	12.150.869.046	93,16	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
		1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.964.279.824,-	5.621.924.758,-	94,76	Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		BPKAD	
		2)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.675.453.740,-	6.506.070.852,-	91,19	Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		BPKAD	
		3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.791.292,-	22.873.436	91,19	Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Dokumen		BPKAD	
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		410.580.490,-	351.481.946,-	96,93	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
		1)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	57.386.595,-	12.082.473,-	50,93	Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		BPKAD	
		2)	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	30.532.000	27.082.000	91,19	Dokumen Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen		BPKAD	

	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.403.362.370,-	1.381.270.306,-	91,90	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	49.999.828,-	48.954.226,-	99,10	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket PenyediaanKomponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor		BPKAD	
		2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.306.321,-	142.063.055,-	99,88	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah PaketPeralatan dan Perlengkapan Kantor		BPKAD	
		3)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	83.504.013,-	82.171.401,-	99,74	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		BPKAD	
		4)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	139.651.618,-	138.319.571,-	99,68	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dihasilkan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dihasilkan		BPKAD	
		5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	73.128.000,-	63.160.000,-	100	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		BPKAD	
		6)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	67.952.193,-	66.985.516,-	99,97	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu		BPKAD	

		7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	844.820.397,-	839.616.537,-	99,97	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		BPKAD	
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		692.534.009,-	687.935.389,-	96,23	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		1)	Pengadaan Mebel	313.490.421,-	311.191.839,-	99,00	Jumlah Paket Penyediaan Mebel	Jumlah Paket Penyediaan Mebel		BPKAD	
		2)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	379.043.588,-	376.743.550,-	91,66	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor		BPKAD	
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.658.781.207,-	1.508.450.982,-	86,92	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		1)	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	177.240.000,-	Rp143.491.200	99,93	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		BPKAD	
		2)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	154.799.527	143.491.200	55,56	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		BPKAD	
		3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.326.741.680,-	1.191.958.500	89,47	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		BPKAD	

	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		241.932.350,-	236.875.304,-	97,25	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.112.680,-	81.821.980,-	91,27	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat		BPKAD	
		2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.391.000,-	75.655.000,-	99,96	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		BPKAD	
		3)	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.428.670,-	79.398.324,-	98,98	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		BPKAD	
2		**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		99.921.175.422	58.885.824.218 ,-	**63,01**	**Opini Laporan Keuangan**	**WTP**			**-**
	8	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		1.057.836.729,-	876.662.797,-	88,94	Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			

		1)	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	165.595.087,-	138.532.228,-	98,66	DokumenKoordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		BPKAD	
		2)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	150.150.461,-	140.782.440,-	99,34	Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		BPKAD	
		3)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	260.444.643,-	214.497.142	91,84	Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		BPKAD	
		4)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	235.787.244	188.461.705	93,32	Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		BPKAD	

		5)	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	245.859.294,-	194.389.282,-	73,49	Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		BPKAD	
	9	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		1.034.666.867,-	937.304.538,-	95,29	Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
		1)	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	337.680.915,-	267.389.490,-	99,93	Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		BPKAD	
		2)	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	119.074.925	110.392.800,-	99,68	Dokumen Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		BPKAD	

		3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga PFK	202.628.851,-	193.805.548,-	98,79	Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga PFK	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga PFK		BPKAD	
		4)	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	375.282.176,-	365.716.700,-	99,19	Dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		BPKAD	
	10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		929.577.264,-	882.570.423	92,02	Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
		1)	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas	68.137.572,-	50.543.572	91,20	Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan		BPKAD	

			Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan LO dan Beban				Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan LO dan Beban	Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan LO dan Beban			
		2)	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	198.614.616,-	172.951.617,-	98,48	Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan LO dan Beban		BPKAD	
		3)	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	192.921.608,-	192.784.107,-	96,58	Dokumen Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		BPKAD	
		4)	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	135.656.781	134.770.537,-	95,10	Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan		BPKAD	

			Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota				Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota			
		5)	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	288.794.687,-	286.209.590,-	77.98	Dokumen Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		BPKAD	
		6)	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	45.452.000,-	45.311.000,-	77.98	Laporan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		BPKAD	
	11	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		96.168.115.128,-	55.856.935.955,-	63,01	Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
		1)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	93.893.023.096,-	54.139.827.585	62,70	Dokumen Analisis Perencanaan dan	Jumlah Dokumen Analisis		BPKAD	

							Penyaluran Bantuan Keuangan	Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			
		2)	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.275.092.032	1.717.108.370,-	71,19	Dokumen Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Dokumen Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		BPKAD	
	12	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		730.979.434	332.350.505,-	86,07	Dokumen Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			
		1)	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	518.325.800,-	128.688.800,-	79,47	Dokumen Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		BPKAD	
		2)	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kota	212.653.634,-	203.661.705,-	99,11	Dokumen Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kota		BPKAD	

3		**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	1.302.860.407**,-**	1.150.258.914	**95,32**	**Jumlah Laporan Aset**	**Jumlah Laporan Aset**	-		
	13	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.302.860.407	1.150.258.914,-	95,32	Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah			
		1) Penyusunan Standar Harga	220.844.398	207.842.252	98.69	Dokumen Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Penyusunan Standar Harga		BPKAD	
		2) Pengamanan Barang Milik Daerah	269.878.379,-	226.693.086,-	88,17	Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	-	BPKAD	
		3) Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100.000.321,-	90.399.440,-	97,58	Dokumen Perjanjian Kinerja semua Eselon	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon			
		4) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	238.423.701,-	208.868.693,-	94,77	Dokumen Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			
		5) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kota	344.378.162,-	293.692.580,-	97,09	Dokumen Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kota			
		6) Penilaian Barang Milik Daerah	129.335.446	122.762.863	94,77		Jumlah Dokumen			

							Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kota				

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Karimun

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4)
1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**75,38**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**100%**	**75,38**	**225,38**	**100%**
	1		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi Kerja	25	25	25	25	100%	25	75	100%
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	2	2	2	2	100%	2	6	100%
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	1	1	1	1	100%	1	3	100%

				Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	1	1	100%	1	3	100%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	78	78	78	78	100%	78	234	100%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46	46	46	46	100%	46	138	100%
	3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32	32	32	32	100%	32	96	100%
		1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	1	1	1	100%	1	3	100%
	4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1	1	1	100%	1	3	100%
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	1	1	1	1	100%	1	3	100%

		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78	78	78	78	100%	78	234	100%
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	78	78	78	78	100%	78	234	100%
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dihasilkan	10	10	10	10	100%	10	30	100%
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	5	5	5	5	100%	5	15	100%
		6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	10	10	10	100%	10	30	100%
		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	100%
	5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	7	7	7	100%	8	22	100%
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	74	67	67	67	100%	74	208	100%
	6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	16	16	16	16	100%	16	48	100%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	100%	12	36	100%

		2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	8	8	8	8	100%	8	24	100%
		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28	27	27	27	100%	28	82	100%
		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6	5	5	5	100%	6	16	100%
	7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	12	12	100%	12	36	100%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70	60	60	60	100%	70	190	100%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1	1	1	1	100%	1	3	100%
		3	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	5	5	5	100%	5	15	100%
2			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**WTP**	**3**	**3**	**3**	**3**	**100%**	**3**	**9**	**100%**

	8		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1	1	1	1	100%	1	3	100%
		1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2	2	2	2	100%	2	6	100%
		2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	2	2	2	100%	2	6	100%
		3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2	2	2	100%	2	6	100%
		4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2	2	2	100%	2	6	100%
		5	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan	10	10	10	10	100%	10	30	100%

				Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD								
	9		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**1**	**1**	**1**	**1**	100%	**1**	3	100%
		1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1	1	1	1	100%	1	3	100%
		2	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3077	3548	3548	3548	100%	3077	10179	100%
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga PFK	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga PFK	1	1	1	1	100%	1		100%
		4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan	1	1	1	1	100%	1		100%

			Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait								
		5	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	1	1	1	100%	1		100%
	10		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**1**	**1**	**1**	**1**	100%	**1**	3	100%
		1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan LO dan Beban	1	1	1	1	100%	1	3	100%
		2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja	1	1	1	1	100%	1	3	100%

				Pembiayaan Pendapatan LO dan Beban								
		3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	1	1	1	100%	1	3	100%
		4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota	1	1	1	1	100%	1	3	100%
		5	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2	Na	Na	Na	100%	2	2	100%
	11		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	1	1	1	100%	1	3	100%

		1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Dokumen Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	42	42	42	42	100%	42	126	100%
		2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dokumen Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	65	65	65	65	100%	65	195	100%
	12		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	40	40	40	40	100%	40	120	100%
		1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	39	Na	Na	Na	100%	39	39	100%
		2	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kota	39	Na	Na	Na	100%	39	39	100%
3			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Jumlah Laporan Aset**	**3**	**3**	**3**	**3**	**100%**	**3**	**9**	**100%**
	13		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Na	Na	Na	100%	1	1	100%

		1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Penyusunan Standar Harga	1	Na	Na	Na	100%	1	1	100%
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	100	20	20	20	100%	100	140	100%
		3	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon	1	1	1	1	100%	1	3	100%
		4	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	1	1	1	100%	1	3	100%
		5	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kota	40	40	40	40	100%	40	120	100%

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari sinergitas antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dengan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

2.3.1 Pengukuran Kinerja

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Tercapainya atau tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara priodik. Terkait dengan hal tersebut rencana kerja (RENJA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun ini menyajikan dasar pegukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran yang akan dilaksanakan tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2023

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN				TARGET KINERJA AKHIR TAHUN	TARGET KINERJA AKHIR TAHUN	TARGET KINERJA AKHIR TAHUN
		2016	2017	2020	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Opini BPK RI Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Penetapan Perda APBD Tepat Waktu	31 Des	28 Des	31 Des	31 Des	31 Des	31 Des	31 Des	31 Des
3	Persentase penyerapan Belanja Daerah	90%	90%	88.65%	12.09%	96.78%	88.65%	90	94.79
4.	Persentase Keakuratan Data Barang Milik Daerah	70%	70%	98.27	140.96%	140.39 %	98.27	70	99.87%
5.	Persentase Administrasi Penatausahaan Keuangan Yang Diselesaikan Tepat Waktu Sesuai SOP	100	100	100	100	100	100	100	100

Sedangkan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2023

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP
		2	Indek Pengelolaan Keuangan Daerah	77
		3	Indek Pengelolaan Aset	77
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja OPD	4	Indek Pelayanan Publik	3.04
		5	Indek Kepuasan Masyarakat	75.55
		6	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	75.66

2.3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Penetapan hasil pengukuran kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok inidkatror kinerja kegiatan yang berupa indikator masukkan,keluaran dan hasil.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1) Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing masing kelompok indikator kegiatan;
2) Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022, seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

No	Indikator	SPM/Standar Naional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi Tahun 2020 (Tahun n)	Proyeksi Tahun 2021 (Tahun-n)	Catatan Analisis
				Tahun 2016 (thn-2)	Tahun 2017 (thn-1)	Tahun 2018 (thn-N)	Tahun 2018 (thn-N+1)	Tahun 2016 (thn-2)	Tahun 2016 (thn-1)	Tahun 2018 (thn-N)	Tahun 2018 (Tahun-1)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Opini BPK RI Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-
2	Penetapan Perda APBD Tepat Waktu	-	-	31 Des	31 Des	31 Des	31 Des	28 Des 2012	6 Januari 2014	29 Des 2014	26 Jan 2016	31 Des 2016	31 Des 2017	-

Dari tabel tersebut diatas,jumlah keseluruhan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Karimun Tahun 2023 terdiri dari 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) Indikator Kinerja mencapai kategori “Sangat Berhasil”. Dalam perkembangan Badan Pengelolaan Keuangaan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan ditingkat basis, serta koordinasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten dan komunikasi antar pemangku kepentingan

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu-isu penting tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah:

a. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan barangdaerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik danbenar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaanpengelolaan keuangan danbarangdaerah di OPD. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahan/kekeliruan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan keuangan dan barang daerah, karena SDM memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan;

b. Aspek lain yang cukup penting dari tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Karimun dalam mengelola keuangan dan juga aset daerah adalah pentingnya menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan tepat waktu. Sehingga diharapkan Kabupaten Karimun tetap bisa mempertahankan Opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas LKPD pemerintah daerah. Hal kunci atau prioritas utama dalam aspek ini adalah pentingnya manajemen aset daerah/ barang milik daerah ditingkatkan kinerjanya dan harus menjadi hal yang sangat prioritas untuk dibenahi sebab bila laporan dari bidang aset lambat atau tidak valid datanya, ini sangat berpengaruh pada validitas LKPD sehingga ASET daerah merupakan hal penting yang melengkapi penyusunan LKPD;
c. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah diperlukan adanya penataan aset-aset daerah, yang mana saat ini masih banyak dijumpai aset milik Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Kepri yang berlokasi di Kabupaten Karimun sampai saat ini belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Karimun sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan aset dimaksud dan aset menjadi tidak terawat/rusak. Untuk itu diharapkan agar dapatnya dilakukan penataan, pendataan dan penilaian aset daerah sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara dengan baik dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah;
d. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan SDM yang kompeten dibidang teknologi informasi dan sarana serta prasarana untuk aplikasi.

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Kabupaten Karimun dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT :

1. Strength (Kekuatan)
   1) Meningkatnya komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
   2) Memiliki fungsi strategis dalam rangka fasilitasi OPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

3) Melaksanakan pembinaan kepada OPD melalui fungsi evaluasi perencanaan anggaran dan pengolaan keuangan serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran.

2. Weaknes (Kelemahan)
   1) Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur serta sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
   2) Belum optimalnya pemanfaatan kesempatan dalam rangka peningkatan pendidikan formal / informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi.
3. Opportunity (Peluang)
   1) Adanya pembangunan infrastruktur ibu kota Kabupaten Karimun di Kanigoro, pembangunan jaringan TIK terintegrasi (e-government) di OPD Kabupaten Karimun.
   2) Adanya diklat, seminar, bintek workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi dan konsultan / swasta.
   3) Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
   4) Kepercayaan pimpinan serta kemudahan berkoordinasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten dengan tingkat provinsi dan pusat.
4. Treath (Ancaman)
   1) Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah berkembang sangat cepat.
   2) Inkonsistensi dan tidak sinkronnya antara pelaksanaan program kegiatan dengan dokumen perencanaan dan dinamika yang berkembang.
   3) Masih kurangnya kompentensi dan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset daerah pada tiap OPD.
   4) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program- program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen- dokumen perencanaan.
   5) Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan pemeriksa fungsional.

6) Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan.

Perumusan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan oleh BPKAD Kabupaten Karimun diantaranya :

1. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
2. penerapan laporan keuangan daerah dengan sistem akuntasi berbasis akrual.
3. Pelayanan pengelolaan kas daerah dan gaji PNSD berbasis teknologi informasi.
4. Pengembangan sistem aplikasi pengelolaan barang milik daerah.
5. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima.
6. Peningkatan profesionalisme aparatur dan pemenuhan SDM yang handal sesual tuntutan kebutuhan

2.5. Review Terhapat Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra BPKAD dengan hasil pencapaian target tahunan.

Rancangan awal Renja yang telah disusun oleh BPKAD telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja BPKAD. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKAD yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta indikator kinerja dan rencana capaiannya. Usulan program dan kegiatan dalam Renja BPKAD senantiasa diselaraskan dengan Renstra BPKAD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 adalah tahapan pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karimun. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itulah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun telah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 2021-2026, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dari rancangan awal yang telah disusun pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang akan diimplementasikan ke dalam penetapan kinerja tahun berikutnya.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program,kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah KabupatenKarimun. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh Perangkat Daerah dengan prediksi PAGU Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). RKPD Tahun 2022

berpedoman pada RPJMD 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD Kabupaten Karimun tahun 2023 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan Perangkat Daerah yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tahun 2023.Berikut rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal OPD yang lengkap dengan lokasi. Indikator Kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program dan kegiatan seperti tabel dibawah ini

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRORGAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**PERSENTASE INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**	**75,38**	**22.849.478.643,-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**PERSENTASE INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**	**75,38**	**22.849.478.643,-**	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi Kerja	25	99.795.430,-	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi Kerja	25	99.795.430,-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	2	30.807.930,-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	2	30.807.930,-	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	68.987.500,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	68.987.500,-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	18.628.454.783,-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	18.628.454.783,-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	78	14.619.408.170,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	78	14.619.408.170,-	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46	68.987.500,-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46	68.987.500,-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	32	313.133.040,-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32	313.133.040,-	

			Perangkat Daerah								
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	14.619.408.170,-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	14.619.408.170,-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1.618.807.770,-	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1.618.807.770,-	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Kab Karimun	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	1	41.664.370,-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Kab Karimun	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	1	41.664.370,-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Karimun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78	251.174.000,-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Karimun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78	251.174.000,-	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	78	59.899.400,-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	78	59.899.400,-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Karimun	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dihasilkan	10	230.101.850,-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Karimun	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dihasilkan	10	230.101.850,-	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kab Karimun	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	5	60.000.000,-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kab Karimun	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	5	60.000.000,-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Karimun	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	127.641.150,-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Karimun	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	127.641.150,-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Karimun	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	848.327.000,-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Karimun	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	848.327.000,-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	245.769.450,-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	245.769.450,-	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Karimun	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	74	245.769.450,-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Karimun	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	74	245.769.450,-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	16	1.665.486.620,-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	16	1.665.486.620,-	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Karimun	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	7.000.000,-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Karimun	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	7.000.000,-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Karimun	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	8	146.715.000,-	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Karimun	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	8	146.715.000,-	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28	120.000.000,-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28	120.000.000,-	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Karimun	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6	1.391.771.620,-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Karimun	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6	1.391.771.620,-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	278.031.550,-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	278.031.550,-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Karimun	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70	48.163.950,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Karimun	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70	48.163.950,-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	1 5	39.039.000,- 190.828.600,-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	1 5	39.039.000,- 190.828.600,-	

			Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kantor atau Bangunan Lainnya			
2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**KAB KARIMUN**	**WTP**	**3**	**103.275.325.444,-**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**KAB KARIMUN**	**WTP**	**3**	**103.275.325.444,-**	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1	1.071.640.790,-	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1	1.071.640.790,-	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2	48.163.950,-	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2	48.163.950,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	185.705.490,-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	185.705.490,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan		Jumlah Dokumen	2	367.497.080,-	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan		Jumlah Dokumen Koordinasi dan	2	367.497.080,-	

	Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	268.958.830,-	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	268.958.830,-	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	10	62.002.000,-	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10	62.002.000,-	

			tentang Penjabaran APBD								
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1	851.886.530,-	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1	851.886.530,-	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1	238.124.100,-	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1	238.124.100,-	
	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Dokumen Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3077	27.000.100,-	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Dokumen Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3077	27.000.100,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan	1	132.360.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan	1	132.360.000,-	

	Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga PFK		Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga PFK			Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga PFK		Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga PFK			
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	1	100.768.380,-	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	1	100.768.380,-	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan	1	353.633.950,-	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	1	353.633.950,-	

	Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1	507.555.150,-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1	507.555.150,-	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan LO dan Beban	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan LO dan Beban	1	116.300.450,-	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan LO dan Beban	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan LO dan Beban	1	116.300.450,-	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas	1	104.042.950,-	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja	1	104.042.950,-	

	Bulanan Triwulanan dan Semesteran		Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan LO dan Beban			Bulanan Triwulanan dan Semesteran		Pembiayaan Pendapatan LO dan Beban			
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	154.924.900,-	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	154.924.900,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan	1	72.888.170,-	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	1	72.888.170,-	

			APBD Kabupaten Kota					Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota			
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2	59.398.680,-	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2	59.398.680,-	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	100.540.310.174,-	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	100.540.310.174,-	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	42	116.300.450,-	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	42	116.300.450,-	

	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	65	7.030.088.074,-	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	65	7.030.088.074,-	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	40	303.932.800,-	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	40	303.932.800,-	
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	39	179.584.200,-	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	39	179.584.200,-	
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Pembinaan	39	124.348.600,-	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Pembinaan Sistem Informasi	39	124.348.600,-	

	Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kota		Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kota			Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kota		Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kota			
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab Karimun	Jumlah Laporan Aset	3	1.289.388.820,-	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab Karimun	Jumlah Laporan Aset	3	1.289.388.820,-	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	1.289.388.820,-	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	1.289.388.820,-	
	Penyusunan Standar Harga		Jumlah Dokumen	1	148.860.000,-	Penyusunan Standar Harga		Jumlah Dokumen	1	148.860.000,-	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen	100	437.145.600,-	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen	100	437.145.600,-	
	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan	Kab Karimun	Jumlah Dokumen	1	283.526.400,-	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan	Kab Karimun	Jumlah Dokumen	1	283.526.400,-	

	Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah					Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah					
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen	1	177.055.320,-	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen	1	177.055.320,-	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kota	Kab Karimun	Jumlah Dokumen	40	283.526.400,-	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kota	Kab Karimun	Jumlah Dokumen	40	283.526.400,-	
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**KAB KARIMUN**	**JUMLAH DOKUMEN**	**75,38**	**22.849.478.643,-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**KAB KARIMUN**	**JUMLAH DOKUMEN**	**75,38**	**22.849.478.643,-**	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen	25	99.795.430,-	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen	25	99.795.430,-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Kab Karimun		2	30.807.930,-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Kab Karimun		2	30.807.930,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1	68.987.500,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1	68.987.500,-	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penatahusahaan Pengelolaan Keuangan OPD	1	18.628.454.783,-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penatahusahaan Pengelolaan Keuangan OPD	1	18.628.454.783,-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	78	14.619.408.170,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	78	14.619.408.170,-	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelola Barang Milik Daerah	46	68.987.500,-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelola Barang Milik Daerah	46	68.987.500,-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Karimun	Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi (RAD PPK)	32	313.133.040,-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Karimun	Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi (RAD PPK)	32	313.133.040,-	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			1	14.619.408.170,-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			1	14.619.408.170,-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Karimun	Jumlah Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah	1	1.618.807.770,-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Karimun	Jumlah Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah	1	1.618.807.770,-	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	41.664.370,-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Kab Karimun	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	41.664.370,-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			78	251.174.000,-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			78	251.174.000,-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Karimun	Jumlah Sistem	78	59.899.400,-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Karimun	Jumlah Sistem	78	59.899.400,-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Karimun	Jumlah Sistem	10	230.101.850,-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Karimun	Jumlah Sistem	10	230.101.850,-	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan			5	60.000.000,-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan			5	60.000.000,-	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Karimun	Jumlah Dokumen yang disusun	10	127.641.150,-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Karimun	Jumlah Dokumen yang disusun	10	127.641.150,-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Karimun	1 Dokumen	1	848.327.000,-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Karimun	1 Dokumen	1	848.327.000,-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Karimun	1 Dokumen	8	245.769.450,-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Karimun	1 Dokumen	8	245.769.450,-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Karimun	1 Dokumen	74	245.769.450,-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Karimun	1 Dokumen	74	245.769.450,-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Karimun	1 Dokumen	16	1.665.486.620,-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Karimun	1 Dokumen	16	1.665.486.620,-	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Karimun	1 Dokumen	12	7.000.000,-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Karimun	1 Dokumen	12	7.000.000,-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Karimun	1 Dokumen	8	146.715.000,-	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Karimun	1 Dokumen	8	146.715.000,-	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Karimun	1 Dokumen	28	120.000.000,-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Karimun	1 Dokumen	28	120.000.000,-	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Karimun	1 Dokumen	6	1.391.771.620,-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Karimun	1 Dokumen	6	1.391.771.620,-	

2.6. Telaahan Usulan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung BPKAD, LSM, asosiasi-asosiasi atau perguruan tinggi.

Mengingat BPKAD merupakan SKPD yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik, maka telaahan terhadap usulan masyarakat lebih diutamakan dalam upaya penyusunan dokumen perencanaan yang lebih baik dan akuntabel. Sehingga penyajian Tabel 2.4 tentang Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan tidak dapat tersaji BPKAD sebagai OPD penyusun perencanaan daerah tidak menyusun rencana kerja terkait usulan program dan kegiatan masyarakat pada dokumen perencanaannya. Setiap usulan dan kegiatan masyarakat melalui forum perencanaan dikoordinasikan kepada OPD teknis penanggungjawab.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BPKAD KABUPATEN KARIMUN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan mengacu pada Undang-undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan BPKAD Penyusunan Anggaran pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Beberapa kebijakan nasional dalam perencanaan pembangunan yang harus menjadi acuan pemerintah daerah termasuk SKPD di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021 – 2026.
2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
3. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut: ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Melalui Pemantapan Reformasi Birokrasi.***

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untu dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah;

   Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yaitu :

   - Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
   - Meningkatkan Ketersediaan Dana dan Terselenggarannya Belanja Daerah;
   - Meningkatnya Penatahusahaan Aset Yang Tertib;
   - Terwujudnya Penyusunan APBD Tepat Waktu.

2. Meningkatnya Pelayanan Tertib Administrasi Penatahusahaan Keuangan dan Aset Daerah

   - Persentase Administrasi Penatahusahaan Keuangan Yang diselesaukan Tepat Waktu Sesuai SOP.

Tebel 3.1

Tujuan dan Sasaran Strategis BPKAD Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemeritahan Yang Baik *(Good Governence)* Melalui Pemantapan Reformasi dan Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP
			Indek Pengelolaan Keuangan Daerah	77
			Indek Pengelolaan Aset	77
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Indek Pelayanan Publik	3.04
			Indek Kepuasan Masyarakat	75.55
			Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	75.66

Table 3.2
Tujuan, Sasaran, Startegi dan Kebijakan

Visi: Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi : :Berbasis Maritim yang Terdepan Berlandaskan Iman dan Taqwa			
Misi:Mewujudkan Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Melayani			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**KEBIJAKAN**
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Melalui Pemantapan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pemeritah	Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah
			Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
		Menjaga Konsistensi /Keselarasan Perencanaan Program, Kegiatan dan Kegiatan serta Anggaran antara (RPJMD, Renstra, Renja, KUA, PPAS, RKA, DPA) sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi OPD	Peningkatan Kualitas Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun
		Mengoptimalkan Fungsi Teknologi Informasi secara online	Peningkatan Pengelolaan dan Pengolahan Data Base Keuangan dan Barang Daerah
		Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana untuk mendukung Program Kegiatan dibidangn Pengelolaan Keuangan dan Barang daerah	Peningkatan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana yang ada guna Menunjang Program dan Kegiatan yang Telah ditetapkan
		Melakukan Update Aplikasi Sistim Informasi sesuai Kebutuhan dan Dinamika yang berkembang	Peningkatan Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah dengan melakukan Pemeliharaan secara berkala
		Melakukan Pembinaan/ Sosialisasi Bagi Pegawai diseluruh OPD dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah	Peningkatan Pengetahuan dan kemampuan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah dengan Melaksanakan Pembinaan/Sosialisasi Secara Berkala
	Meningkatnya Pelayanan dan tertib Administrasi Penathusahaan Keuangan dan Aset Daerah	Melakukan Pengelolaan Administrasi Kas Berupa Penyiapan Anggaran Kas dan Penyediaan Anggaran Kas dan Penyediaan dana Serta Penerbitan SP2D Bagi OPD Se Kabupaten Karimun	Peningkatan Pengelolaan Administrasi kas daerah Secara Tepat Waktu dan Tepat Sasaran
		Melakukan Rekonsiliasi Secara Langsung dan Monitoring/Evaluasi Baik secara langsung Maupun Tidak Langsung kepada OPD	Penyusunan Laporan Keuangan Barang Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang Berbasis Akrual
		Melakukan Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset Daerah	Peningkatan Validasi Pengelolaan data Aset
		Memaksimalkan Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD	Peningkatan Akuntansi Kinerja dan Mutu Pelayanan Keuangan

3.3. Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya dalam rangka implementasi kebijakan dalam menunjang pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan pencapaian tujuan dan sasaran OPD terkait peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah sebagai upaya percepatan pembangunan daerah maka pada tahun 2024 dirumuskan 3 program dan 13 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 118.479.081.727,- (Seratus Delapan Belas Milyar Empat Ratus

Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah). Pendanaan program / kegiatan tersebut direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun tahun anggaran 2024.

Adapun program BPKAD tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tabel 3.3
Rumusan Rencana dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025
Yang Mendukung Sasaran

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
Meningkatnya Akuntabiltas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Opini BPK RI Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Prognosis dan Sinkronisasi, Verifikasi Saldo Awal
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penatahusahaan Pengelolaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah
			Rekonsiliasi dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah
			Rekonsialiasi dan evaluasi Realisasi Belanja Daerah
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penetapan PERDA APBD Tepat Waktu		Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021
			Penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019
			Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2021
			Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021

			Penggandaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang APBD
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Peningkatan Koordinasi, Konsultasi dan kapasitas Penganggaran Keuangan Daerah
			Bimbingan Teknis Penyusunan RKA OPD Berdasarkan SIMDA Keuangan
			Fasilitasi Rencana Aksi daerah Pencegahan dan pemberantasan Korupsi
	Persentase Penyerapan Belanja Daerah		Konsolidasi dan Evaluasi Penerimaan Dana Perimbangan Pusat dan DBH Propinsi
			Input Penyusunan dan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD
			Peningkatan Penatausahaan Administrasi dan Pengoperasian Sistem Penggajian Kabupaten Karimun
			Pemuktahiran Pemugutan dan Pelaporan PFK Belanja langsung dan Tidak LangsungOPD Se-Kab Karimun
			Penyusunan dan Pengelolaan Manajemen Kas
			Penyelenggaraan Pelayanan SP2D
			Singkronisasi Pelaporan Keuangan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Se Kabupaten Karimun
			Evaluasi Pelaksanaan Transaksi Non Tunai
	Persentase Keakuratan Data Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah
			Penyusunan laporan barang milik Daerah

			Penyusunan Perda tentang penyerahan barang milik daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas Aparatur pengelolaan Keuangan Daerah
			Training Character Building (capacity Building) bagi Aparatur Pemerintah Daerah dilingkungan BPKAD Kabupaten Karimun
			Bimbingan teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pelayanan tertib Administrasi Pengelolaan Barang milik daerah
			Pemeliharaan Rutin /Berkala barang milik Daerah
			Rehabilitasi Toilet Kantor
Meningkatnya Pelayanan dan Tertib Administrasi Penatahusahaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Administrasi Penatahusahaan Keuangan Yang diselesaukan Tepat Waktu Sesuai SOP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan operasional Perkantoran
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Meubelair
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
			Pengadaan Partisi
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP)
			Penyusunan Laporan Keuangan OPD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

Tabel 3.4

Rumusan Perencanaan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

Tahun 2024 Kabupaten Karimun

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	TARGET TAHUN 2021	Program	Indikator Program	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN				Lokasi
								TAHUN 2022		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023		
								Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien, Efektif, Transparansi dan Akuntabel	1 Meningkatnya Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah	1.1 Meningkatnya Akuntabiltas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.1.1 Ketepatan Waktu Menyusun Dan Menyampaikan L/K Kabupaten Karimun Ke BPK RI	31 Maret	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Kinerja Keuangan	WTP	120.000	WTP	120.000	
							Persentase Dokumen Yang Disusun (%)	95	250	95	250	
				1.1.2 Persentase PPK OPD Yang Dapat Menyusun Dan Menyajikan L/K Sesuai SAP	95		Jumlah Produk Hukum Berhubungan Dengan Pengelolaan Keuangan	10	600	10	300	
							Rata Rata Capaian Kinerja ASN	90	1100	95	850	
							Opini BPK Terhadap Kinerja Keuangan	WTP	500	WTP	500	

			1.2 Tersedianya Dana Dan Terselenggaranya Belanja Daerah	1.2.1	Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	85	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Kinerja Keuangan	WTP	2950	WTP	2950	
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata Rata Capaian Kinerja ASN	90	250	95	250	
				1.2.2	Persentase Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Tepat Waktu	70	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta Jaminan Kecelakaan Dan Kematian	50	360	50	360	
			1.3 Meningkatnya Penatahusahaan Aset Daerah Yang Tertib	1.3.1	Persentase Penyajian Laporan BMD OPD Tepat Waktu	70	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Kinerja Keuangan	WTP	1300	WTP	1220	
							Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Produk Hukum Berhubungan Dengan Pengelolaan Keuangan	10	530	10	750	
				1.3.2	Persentase Tanah Milik Daerah Yang Bersertifikat	41	Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah	Persentase Dokumen Yang Disusun (%)	95	400	95	400	
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata Rata Capaian Kinerja ASN	90	580	95	280	
			1.4 Terwujudnya Penyusunan APBD Tepat Waktu	1.4.1	Ketepatan Waktu Persetujuan Bersama Tentang APBD	30 November	Program Peningkatan dan Pengembangan	Opini BPK Terhadap Kinerja Keuangan	WTP	2630	WTP	2650	

							Pengelolaan Keuangan Daerah					
							Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah	Persentase Dokumen Yang Disusun (%)	95	320	95	350
				1.4.2	Persentase OPD Yang Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tepat Waktu	100	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Capaian Kinerja OPD	B	0	B	0
								Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti				
							Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Produk Hukum Berhubungan Dengan Pengelolaan Keuangan	10	330	10	60
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata Rata Capaian Kinerja ASN	90	300	95	300
		2	Meningkatnya Pelayanan Dan Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan Dan Aset Daerah	2.1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BPKAD	2.1.1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	78.,15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Realisasi Pemenuhan Rencana Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	45	8840	45	8840
									Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai (%)	95	700	95	740
						2.1.2	Persentase Temuan BPK/Inspektorat Daerah	100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan (%)	90	1790	95	2300

				2.1.3	Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen BPKAD dengan Dokumen Perencanaan Daerah	95	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase OPD Dengan Dokumen Perencanaan Yang Berkualitas (%)	90	250	95	250	
							Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Peningkatan Pengelolaan Data Informasi OPD (%)	90	325	95	325	
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Capaian Kinerja OPD	B	570	B	570	
								Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti					
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata Rata Capaian Kinerja ASN	90	900	95	900	

TABEL 3.5

RUMUSAN PERENCANAAN PROGRAM BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN KARIMUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Rencana Tahun 2026	
					Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.
Meningkatnya Pelayanan Publik				**Indek Pelayanan Publik (IPP)**	**3,55**	**26.752.178.000**		**4,00**	**26.769.549.000**
	Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja OPD			**Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD**	**75,42**	**26.752.178.000**		**75,43**	**26.769.549.000**
		5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**75,49**	**26.752.178.000**		**75,50**	**26.769.549.000**
		5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**25**	**192.283.000**		**25**	**192.475.000**
		5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	70.841.000	PAD	2	70.912.000
		5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	70.841.000	PAD	1	70.912.000
		5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	50.601.000	PAD	1	50.651.000
		5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai**	**78**	**20.962.904.100**	**PAD**	**78**	**20.974.493.000**
		5.02.01.2.02.0001	Belanja Pegawai (Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	17.334.810.100	PAD	46	17.342.772.000
		5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32	3.440.871.000	PAD	32	3.444.312.000
		5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	50.601.000	PAD	1	50.651.000

5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	50.601.000	PAD	1	50.651.000
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	86.021.000	PAD	1	86.107.000
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai**	**78**	**232.764.000**	**PAD**	**78**	**232.997.000**
5.02.01.2.05,0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	78	131.562.000	PAD	78	131.694.000
5.02.01.2.05,0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	101.202.000	PAD	10	101.303.000
5.02.01.2.05,0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5	75.901.000	PAD	40	75.977.000
5.02.01.2.05,0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	101.202.000	PAD	10	101.303.000
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum**	**1**	**2.864.017.700**	**PAD**	**1**	**2.866.875.000**
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	151.803.000	PAD	8	151.954.000
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	74	151.803.000	PAD	74	151.954.000
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	151.803.000	PAD	16	151.954.000
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	151.803.000	PAD	15	151.954.000

5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	151.803.000	PAD	8	151.954.000
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	28	151.803.000	PAD	28	151.954.000
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6	151.803.000	PAD	6	151.954.000
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjangan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	182.163.700	PAD	12	182.345.000
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95	1.619.233.000	PAD	100	1.620.852.000
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Pengadaan Kebutuhan Barang**	**1**	**607.212.000**	**PAD**	**1**	**607.818.000**
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17	202.404.000	PAD	19	202.606.000
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21	202.404.000	PAD	23	202.606.000
5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	8	202.404.000	PAD	8	202.606.000
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kebutuhan Penyediaan Jasa**	**1**	**1.586.401.200**	**PAD**	**1**	**1.587.987.000**
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	830	123.049.100	PAD	840	123.172.000
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	123.049.100	PAD	5	123.172.000
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	102.336.000	PAD	8	102.438.000
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	32	1.237.967.000	PAD	32	1.239.205.000
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Baang**	**1**	**306.596.000**	**PAD**	**1**	**306.904.000**

		5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	51.770.000	PAD	1	51.822.000
		5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	51.770.000	PAD	2	51.822.000
		5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	101.528.000	PAD	15	101.630.000
		5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bengunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	101.528.000	PAD	1	101.630.000
Meningkatnya Tata pemerintah yang Baik (Good Goverment)				**Indek Reformasi Birokrasi**	**64**	**85.700.719.000**		**65**	**85.690.171.000**
	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			**Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)/ Kategori**	**Baik**	**85.700.719.000**		**Baik**	**85.690.171.000**
		5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Opini Laporan Keuangan**	**WTP**	**83.979.253.000**		**WTP**	**83.966.988.000**
		5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**1**	**1.923.238.000**		**1**	**1.925.154.000**
		5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	202.404.000	PAD	2	202.606.000
		5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	202.404.000	PAD	2	202.606.000
		5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	3171	151.803.000	PAD	3171	151.954.000
		5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	3171	151.803.000	PAD	3171	151.954.000
		5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	3171	151.803.000	PAD	3171	151.954.000
		5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	3171	151.803.000	PAD	3171	151.954.000

		5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	202.404.000	PAD	2	202.606.000
		5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	151.803.000	PAD	2	151.954.000
		5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	151.803.000	PAD	1	151.954.000
		5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	10	101.302.000	PAD	10	101.403.000
		5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	44	101.302.000	PAD	44	101.403.000
		5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	10	101.302.000	PAD	10	101.403.000
		5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	88	101.302.000	PAD	88	101.403.000
		5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1**	**921.036.000**		**1**	**921.954.000**
		5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1	101.302.000	PAD	1	101.403.000
		5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1500	121.442.000	PAD	1500	121.563.000
		5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1	121.442.000	PAD	1	121.563.000

		5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1	121.442.000	PAD	1	121.563.000
		5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1	121.442.000	PAD	1	121.563.000
		5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	151.803.000	PAD	1	151.954.000
		5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	43	182.163.000	PAD	43	182.345.000
		5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1**	**1.082.861.000**		**1**	**1.083.939.000**
		5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban	2	151.803.000	PAD	2	151.954.000
		5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban	12	202.404.000	PAD	12	202.606.000

			APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					
		5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1	151.803.000	PAD	1	151.954.000
		5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	151.803.000	PAD	2	151.954.000
		5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	151.803.000	PAD	1	151.954.000
		5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	121.442.000	PAD	1	121.563.000
		5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	43	151.803.000	PAD	43	151.954.000
		5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1**	**79.748.513.000**		**1**	**79.732.033.000**
		5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	42	77.320.630.000	PAD & APBN	42	77.304.033.000
		5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	65	2.427.883.000	PAD	65	2.428.000.000
		5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Jumlah Data**	**40**	**303.605.000**		**40**	**303.908.000**
		5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah	39	182.163.000	PAD	39	182.345.000

				Daerah Bidang Keuangan Daerah					
		5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	39	121.442.000	PAD	39	121.563.000
		5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Jumlah Laporan Aset**	**3**	**1.721.466.000**		**3**	**1.723.183.000**
		5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**1**	**1.721.466.000**		**1**	**1.723.183.000**
		5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	202.404.000	PAD	1	202.606.000
		5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	202.404.000	PAD	1	202.606.000
		5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	100	202.404.000	PAD	100	202.606.000
		5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	202.404.000	PAD	1	202.606.000
		5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	202.404.000	PAD	1	202.606.000
		5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1	202.404.000	PAD	1	202.606.000
		5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	203.436.000	PAD	1	203.639.000
		5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	151.803.000	PAD	1	151.954.000

		5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40	151.803.000	PAD	40	151.954.000
TOTAL PAGU ANGGARAN						**112.452.897.000**			**112.459.720.000**

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun untuk periode 1 (satu) tahun kedepan disusun berdasarkan efektifitas, efesiensi ketatalaksanaan dari program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mempersiapkan program-program perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Karimun.

Rencana kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karimun tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025. Penyusunan rencana kerja organisasi perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun tahun 2025 ini diharapkan dapat terimplementasi melalui realisasi program dan kegiatan sehingga tercapainya visi dan misi organisasi.

Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun ini merupakan salah satu bentuk implementasi RKPD dan sebagai alat pengendalian dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tentunya memerlukan kajian analisa secara menyeluruh antara kemampuan Sumber Daya Manusia dengan faktor-faktor sumber daya lainnya guna untuk tercapainya tujuan. Rencana Kerja (Renja) ini juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan.Fungsi lain dari disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini adalah untuk mengevaluasi kinerja dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sampai sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Selain itu juga sebagai bahan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pemerintah Kabupaten Karimun secara simultan harus segera memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana dalam mendukung terlaksananya peningkatan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah.

Beberapa langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penataan aset-aset daerah agar tercipta tertib administrasi barang daerah;
2. Melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang dan meningkatkan kinerja aparatur;
3. Mengembangkan potensi SDM secara berkesinambungan.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi yang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Penyusunan Renja ini diharapkan mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Karimun sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

RENCANA KERJA

(RENJA)

2025

2024

bkd_kabkarimun@yahoo.com

bkpsdm.karimunkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia dan ridhaNya, Rencana Kerja (RENJA) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2025 telah selesai disusun. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025. Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan terjemahan perencanaan tahunan di bidang kepegawaian, sehingga bersifat lebih operasional yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan manajemen kepegawaian.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RanwalRKPD) Tahun 2025.

Melalui Renja ini dapat konsisten menjalankan fungsinya sebagai pengelola kepegawaian yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreativitas guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik. Kebijakan perencanaan kepegawaian tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan percepatan perwujudan aparatur yang berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif).

Masukan mengenai penyempurnaan Rencana Kerja ini sangat diharapkan untuk memberikan kontribusi yang lebih baik bagi keberhasilan pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan bagi Pemerintah Kabupaten Karimun umumnya dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada khususnya.

Tanjung Balai Karimun, Oktober 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARIMUN,

Dr. H. M. S. SUDARMADI, S.Pd., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651009 199103 1 013

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i
Daftar isi ii
Daftar Tabel iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARIMUN TAHUN LALU 9
2.1 Evaluasi Pelaksaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten KarimunTahun Lalu 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun 33
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun 39
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 42
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 61

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BKPSDM KABUPATEN KARIMUN 62
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 62
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM 65
3.3 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan 70

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 86
4.1 Rencana Kerja 86
4.2 Pendanaan 87

BAB V P E N U T U P 91
5.1 Catatan Penting 93
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 94
5.3 Rencana Tindak Lanjut 94

DAFTAR TABEL dan GAMBAR

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023 Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau	13
Tabel 2.2	Aspek, Sub Aspek dan Bobot Penilaian Sistem Merit	34
Tabel 2.3	Pencapaian Indeks Sistem Kabupaten Karimun Tahun 2023	36
Tabel 2.4	Rekapitulasi Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Kabupaten Karimun....	37
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Karimun 2023.....	39
Tabel 2.6	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau	43
Tabel T.C. 32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	61
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Strategis BKPSDM Tahun 2025	67
Tabel 3.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	68
Tabel 3.3	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Program Pada BKPSDM Kabupaten Karimun	68
Tabel 3.4	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau	71
Tabel 3.5	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Tahun 2025 ..	83
Tabel 4.1.	Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM 2025	87

KABUPATEN KARIMUN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsur pelaksana tugas tertentu di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan tugas tersebut, perlu memperhatikan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) antara lain : menciptakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, professional, netral

dan bebas dari intervensipolitik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat; menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara mendasarkan kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan; serta mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, yaitu Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karimun sebagai unsur kepegawaian daerah yang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses kepegawaian di Kabupaten Karimun dapat berjalan dengan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, BKPSDM Kabupaten Karimun sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Penyusunan Renja BKPSDM sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun ke depan dan berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BKPSDM dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah dan pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra BKPSDM. Pelaksanaan rencana kerja dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Tahun 2025 yang

akan dijadikan landasan hukum. Proses penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Karimu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-13-17 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencana Pembangunan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renja dan pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Karimun mengacu pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tetang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klailsikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 Nomor 43);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 46);
25. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);
26. Peraturan Bupati Karimun Nomor 99 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 99);
27. Peraturan Bupati Karimun Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024;

28. Peraturan Bupati Karimun Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 86);
29. Peraturan Bupati Karimun Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Perubahan Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 48).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja BKPSDM Kabupaten Karimun Tahun 2025 yaitu sebagai pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026;
2. Sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Mewujudkan integritas, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintah;
4. Sebagai instrument dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Karimun Tahun 2025 disusun dengan sistematika seperti alur dalam Peraturan Menteri Dalam 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra. Analisis Kinerja Pelayanan. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun. Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Bab ini menjelasan telaahan terhadap kebijakan-kebijakan nasional, tujuan, sasaran, program dan kegiatan OPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah (berisi Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta pendanaannya), serta inovasi OPD.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari Rencana Kerja Tahun 2025.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mengetahui pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun berdasarkan hasil penetapan indikator kinerja utama atau indikator kinerja sasaran.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Hasil evaluasi memuat kajian terhadap realisasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan. Pada Tahun 2024 mengampu dua urusan yaitu: Urusan Kepegawaian dan Urusan Pendidikan dan Pelatihan yang terbagi dalam tiga Program yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

B. Program Kepegawaian Daerah

C. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Yang terbagi dalam 13 Kegiatan dan 36 sub kegiatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    a. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
    b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
    b. Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
    g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan.
    a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    b. Pengadaan Mebel
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan

Dinas Jabatan

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

c. Pemeliharaan Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Kepegawaian Daerah

1. Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
    a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan PNS
    b. Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK
    c. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
    d. Fasilitas Lembaga Profesi ASN
    e. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
    f. Pengelolan Data Kepegawaian
2. Mutasi dan Promosi ASN
    a. Pengelolaan Mutasi ASN
    b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
    c. Pengelolaan Promosi ASN
3. Pengembangan Kompetensi ASN
    a. Pengelolaan Assessment Center
    b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
    c. Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
    a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
    b. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
    c. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
    d. Pembinaan Disiplin ASN
    e. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

C. Program Pegembangan Sumber Daya Manusia

1. Pengembangan Kompetensi Teknis
    a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi

Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
    a. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
    b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Untuk mengetahui pelaksanaan atas Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2024, mengacu pada APBD tahun 2024 yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian dan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, berikut disajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator KInerja Program *(Outcomes)* / Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)/(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=(7/6)**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=(10/4)**
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
	Bidang Urusan Kepegawaian									
05.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	63,51%	72,82%	63,51%	68,83%	108,33%	63,14%		
		Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak Termasuk	22,70%	21,96%	22,70%	21,56%	94,98%	22,18%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator KInerja Program *(Outcomes)* / Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)/(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=(7/6)**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=(10/4)**
		Guru dan Tenaga Kesehatan)								
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
5.03.02.2.01 .02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	20 Dokumen - Bazzeting - Usulan CPNS - Usulan PPPK - Peta Jabatan	0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen - Bazzeting - Usulan CPNS - Usulan PPPK - Peta Jabatan		4 Dokumen - Bazzeting - Usulan CPNS - Usulan PPPK - Peta Jabatan	4 Dokumen - Bazzeting - Usulan CPNS - Usulan PPPK - Peta Jabatan	
5.03.02.2.01 .03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS	Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator KInerja Program *(Outcomes)* / Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)/(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=(7/6)**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=(10/4)**
	dan PPPK									
5.03.02.2.01 .06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	325 Dokumen	133 Dokumen	65 Dokumen	209 Dokumen	321,53%	65 Dokumen		
5.03.02.2.01 .08	'Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
5.03.02.2.01 .10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.03.02.2.01 .11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.03.02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1921 Dokumen	850 Dokumen	683 Dokumen	642 Dokumen	93,99%			
5.03.02.2.02 .01	Pengelolaan Mutasi ASN	Dokumen	150 Dokumen	104 Dokumen	30 Dokumen	203 Dokumen	676,6%	30 Dokumen		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator KInerja Program *(Outcomes)* / Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)/(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=(7/6)**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=(10/4)**
5.03.02.2.02 .02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	3.250 Dok	743 Dokumen	650 Dokumen	1283 Dokumen	197,38%	650 Dokumen		
5.03.02.2.02 .03	Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	200%	3 Dokumen		
5.03.02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	1.913 Orang	Orang	200 Orang	65 Orang		376 Orang		
5.03.02.2.03 .01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Orang	320 Orang	0	80 Orang	-	0	-		
5.03.02.2.03 .02	Pengelolaan Assessment Cente	Dokumen	5 Dokumen	1 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.03.02.2.03 .03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	-	-		-		
5.03.02.2.03 .04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Orang	187 Orang	5 Orang	38 Orang	70 Orang	184,21%	41 Orang	2 Orang	0,05%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator KInerja Program *(Outcomes)* / Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)/(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=(7/6)**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=(10/4)**
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Orang	65 Orang	0 Orang	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
5.03.02.2.03.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	30 Orang	0 Orang	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.03.09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen	4 Dokumen	0	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsioal ASN	Orang	80 Orang	0 Orang	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.03.11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi	Dokumen	4 Dokumen	0	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator KInerja Program *(Outcomes)* / Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)/(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=(7/6)**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=(10/4)**
	Pejabat Fungsional									
5.03.02.2.03 .12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.03 .13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Orang	70 Orang	0 Orang	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.03 .14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Orang	45 Orang	0 Orang	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.03 .15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-	-	-
5.03.02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator KInerja Program *(Outcomes)* / Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)/(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=(7/6)**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=(10/4)**
5.03.02.2.04 .01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.04 .02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.03.02.2.04 .03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.03.02.2.04 .04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Orang	50 Orang	0 Orang	-	-	-	-		
5.03.02.2.04 .05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Orang	1.600 Orang	380 Orang	320 Orang	518 Orang	161,87%	320 Orang	320 Orang	100%
5.03.02.2.04 .06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	-	-		-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator KInerja Program *(Outcomes)* / Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)/(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=(7/6)**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=(10/4)**
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Orang	46 Orang	10 Orang	10 Orang	9 Orang	90%	9 Orang	-	-
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	46 Laporan	0 Laporan	-	-	-	-		
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Dokumen	40 Dokumen	9 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 dokumen		
5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	5 Laporan	0 Laporan	-	-	-	-	-	-
05.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	99,77%	29,05%	99,05%	54,11%	54,63%	99,30		
		Persentase Pejabat PNS yang Telah	57,33%	14,99%	49,07%	29,98%	61,10%	51,73		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator KInerja Program *(Outcomes)* / Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)/(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=(7/6)**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=(10/4)**
		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural								
5.04.02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	160 Orang	Orang	1152 Orang	574 Orang	50 %	100 Orang	190 Orang	
5.04.02.2.01 .01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	-	-		-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator KInerja Program *(Outcomes)* / Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)/(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=(7/6)**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=(10/4)**
	Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
5.04.02.2.01 .03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Orang	160 Orang	318 Orang	1152 Orang	574 Orang	50%	100 Orang	190 Orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator KInerja Program *(Outcomes)* / Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)/(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=(7/6)**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=(10/4)**
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengkoordinasi Fasilitasi, Pemantauan, Evalusasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-	-	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan	Jumlah pegawai yang	398 Orang	213 Orang	15 Orang	0 Orang	-	165 Orang	Orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator KInerja Program *(Outcomes)* / Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)/(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=(7/6)**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=(10/4)**
	Kompetensi Manajerial dan Fungsional	mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional								
5.04.02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan	Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	-	0	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator KInerja Program *(Outcomes)* / Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)/(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=(7/6)**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=(10/4)**
	dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional									
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	360 Orang	213 Orang	15 Orang	-	0	165 Orang	175 Orang	106%
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator KInerja Program *(Outcomes)* / Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)/(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=(7/6)**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=(10/4)**
05.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,50	78,22	80,30	82,54	102,9%	80,7	83,56	103,54%
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	26 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	
5.03.01.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11 Dokumen - Renja - Renja RB - Renstra	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen - Renja	100%	2 Dokumen - Renja	2 Dokumen - Renja	100%
5.03.01.2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian	100%	3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian	3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator KInerja Program *(Outcomes)* / Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)/(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=(7/6)**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=(10/4)**
			Kinerja			Kinerja		Kinerja	Kinerja	
5.03.01.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10 Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	-	-	-	-	-	-	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
5.03.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	372 Orang/Bulan (31 Orang x 12 Bulan)	312 Orang/ Bulan	372 Orang/ Bulan	319 Orang/Bulan (26 Orang x 12 Bulan)	100%	372 Orang/Bulan (31 Orang x 12 Bulan)	564 (47 Orang/Bulan)	100%
5.03.01.2.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator KInerja Program *(Outcomes)* / Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)/(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=(7/6)**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=(10/4)**
5.03.01.2.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	2 Paket	100%	-	-	-
5.03.01.2.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	50 Orang	8 Orang	10 Orang	8 Orang	80%	-	-	-
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
5.03.01.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
5.03.01.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Paket	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator KInerja Program *(Outcomes)* / Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)/(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=(7/6)**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=(10/4)**
	Kantor									
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	5 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator KInerja Program *(Outcomes)* / Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)/(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=(7/6)**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=(10/4)**
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	5 Laporan	0 Paket	1 Paket	-	-	1 Laporan	-	-
5.03.01.2.07 .05	Pengadaan Mebel	Paket	20 Paket	0 Paket	4 Paket	-		1 Paket	-	
5.03.01.2.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	110 Unit	0 Paket	2 Paket	-		3 Unit	-	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%
5.03.01.2.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5 Laporan	0	1 Laporan	-		1 Laporan	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator KInerja Program *(Outcomes)* / Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)/(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=(7/6)**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=(10/4)**
5.03.01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Laporan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
5.03.01.2.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	5 Laporan	0 Laporan	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Laporan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
5.03.01.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator KInerja Program *(Outcomes)* / Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)/(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=(7/6)**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=(10/4)**
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
5.03.01.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	12 Unit	12 Unit	10 Unit	12 Unit	120%	12 Unit	5 Unit	41,67%
5.03.01.2.09 .10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	10 Unit	10 Unit	12 Unit	10 Unit	83%	10 Unit	10 Unit	100%
	Pemeliharaan Rehabilitas Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya			0	0	-	-	-	-	-

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun pada Tahun Anggaran 2023 menerima alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Karimun, dengan jumlah Anggaran Perubahan sebesar Rp. 9.664.083.720,- terdiri dari :

a. Belanja Operasional

   Anggaran dalam Belanja Operasional terdiri dari belanja pegawai, besaran anggaran Rp.4.027.870.396,- terealisasi Rp. 3.546.607.462,- (88,05%) dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.636.213.324,- terealisasi Rp. 3.418.303.565,- (60.65%)

b. Belanja Modal

   Pada tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun telah menganggarkan belanja modal, tetapi dikarenakan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Karimun yang tidak stabil, akhirnya belanja modal dilakukan rasionalisasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karimun dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perbup Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu di bidang manajemen Aparatur Sipil Negara yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BKPSDM juga merupakan *leader* untuk beberapa kegiatan penting yang melibatkan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, diantaranya kegiatan pengukuran kinerja pegawai yang kemudian diaplikasikan dalam suatu sistem sasaran kerja pegawai yang telah terintegrasi secara *online.* Dalam hal ini setiap pegawai bertanggung jawab untuk menginput realisasi dari target sasaran kerja yang telah ditetapkan pada awal tahun berjalan. Tahap akhir dari proses penilaian kinerja tersebut ada di BKPSDM selaku verifikator kinerja dari masing-masing pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Karimun. Dalam pelaksanaannya, masing-masing OPD memiliki

peranan penting untuk selalu mendorong para pegawainya menginput realisasi kinerja tepat waktu.

Berdasarkan hasil kinerja pelaksanaan program kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024, maka dapat kami uraikan secara singkat analisis kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun, dimana pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur/memperkirakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025.

Adapun capaian Indikator Utama pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Indeks Merit Sistem**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyebutkan bahwa manajemen karir PNS harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit. Agar penyelenggaraan manajemen dapat dilaksanakan berdasarkan sistem merit.

Pengukuran indeks sistem merit dinilai berdasarkan/mencakup 8 aspek yang terdiri atas 47 sub aspek, dengan cara mengkalikan bobot masing-masing sub aspek dengan skor. Bobot masing-masing sub aspek telah ditetapkan oleh KASN. Skor juga ditetapkan oleh KASN berdasarkan kondisi *riil* sub aspek pada tiap-tiap instansi.

Aspek, sub aspek dan bobot pada pengukuran indeks sistem merit dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.2

Aspek, Sub Aspek, dan Bobot Penilaian Sistem Merit

No	Aspek	Sub Aspek	Bobot
1	Perencanaan Kebutuhan	1. Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang sudah ditetapkan PPK	2,5
		2. Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan *up to date* yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi	2,5
		3. Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir	2,5
		4. Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah 5 (lima) tahun	2,5
2	Pengadaan	1. Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan	2
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/Perka	2

No	Aspek	Sub Aspek	Bobot
		Lembaga/Pergub/Perbup/Perwal) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif	2
		3. Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif	2
		4. Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS	2
		5. Persentase CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar	
3	Pengembangan Karier	1. Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis, dan sosial kultural) untuk setiap jabatan	5
		2. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi	5
		3. Ketersediaan *Talent Pool* yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja	5
		4. Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbang-kan pola karir instansi	2,5
		5. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai	2,5
		6. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja	2,5
		7. Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	2,5
		8. Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan	2,5
		9. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	2,5
		10. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui *coaching* dan *mentoring*	2,5
	Promosi dan Mutasi	1. Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/Perka Lembaga/Pergub/Perbup/Perwal) tentang pola karir	5
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/Perka Lembaga/Pergub/Perbup/Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada *talent pool* dan rencana suksesi	2,5
		3. Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) secara terbuka dan kompetitif	2,5
	Manajemen kinerja	1. Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi	5
		2. Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif	5
		3. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja	2,5
		4. Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi	5
		5. Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir	2,5
	Penggajian,	1. Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan	2,5

No	Aspek	Sub Aspek	Bobot
	Penghargaan dan Disiplin	kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja 2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/Pergub/ Perbup/Perwali) untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi 3. Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya 4. Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai	2,5 2,5 2,5
	Perlindungan dan Pelayanan	1. Kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional) 2. Penyediaan fasilitas untuk memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi	2 2
	Sistem Informasi	1. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis *online* yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai 2. Penerapan *e-performance* yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online 3. Penggunaan *e-office* yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian 4. Pembangunan dan penggunaan *asessment center* dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi	2 1 1 2

Penilaian Sistem Merit dilakukan setiap tahun, hasil penilaian Sistem Merit secara mandiri dan penilaian yang telah mendapatkan verifikasi dari KASN dari Tahun 2022 hingga 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Indeks Sistem Merit Kabupaten Karimun
Tahun 2023

No	Aspek	Bobot Nilai
1	Perencanaan Kebutuhan	**40**
2	Pengadaan	**36**
3	Pengembangan Karir	**42,5**
4	Promosi dan Mutasi	**20**
5	Manajemen Kinerja	**70**
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	**37,5**
7	Perlindungan Pelayanan	**10**
8	Sistem Informasi	**15**
Jumlah		**271**
Bobot Akhir (Nilai/400 x 100)		**0,6800 (68%)**

Sumber : Aplikasi sipinter KASN

- Indeks Profesionalitas ASN

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan di era globalisasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini diharapkan dapat bersikap lebih professional dalam menjalankan pekerjaannya. Untuk membangun sikap kerja profesional dalam diri ASN, Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan diantaranya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (PerBKN) nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Terkait dengan Pengukuran IP ASN Pemerintah Kabupaten Karimun, sesuai dengan arahan BKN maka pengukuran tidak dilakukan secara mandiri akan tetapi dilakukan dengan cara mengunduh data melalui laman IP-DJASN yang *update* datanya dilakukan melalui kegiatan *update* MySAPK secara nasional. Hasil pengunduhan untuk mengetahui capaian nilai indeks IP ASN kabupaten Kabupaten Karimun tahun 2023 belum optimal karena nilai dimensi kinerja maupun dimensi kompetensi belum ter*update* sampai dengan akhir tahun 2023. Pada awal tahun 2022, BKN telah meng*update* data IP ASN yang telah terkoneksi dengan MySAPK. Penilaian secara terperinci yang dilakukan oleh BKN dari tahun 2018 sampai dengan triwulan IV tahun 2023.

Tabel. 2.4
Rekapitulasi Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur (IPP)
Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2023

Jenis	Jumlah PNS	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
Keseluruhan	3513	20,88	8,36	22,76	5	**57,00**
	IPP KABUPATEN KARIMUN					**57,00**

Pada di tahun 2023 pada indikator Indeks Professional Pegawai Kabupaten Karimun melalui Aplikasi SIASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak memenuhi dari target yang diinginkan. Di tahun 2023 BKPSDM menetapkan target IPP dengan nilai **60.65** sedangkan realisasi menunjukkan pada nilai **57,00** dengan capaian sebesar **87,58%.**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun bertugas membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (Sekretaris Daerah) dalam melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
2. Penyiapan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
3. Penyiapan pengadaan dan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang- undangan;
4. Penyiapan pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja dan penghargaan serta pengembangan kompetensi;
5. Penyediaan data dan informasi kepegawaian sebagai bahan pengambilan keputusan;
6. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
7. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
8. Pelaksanaan fasilitas kelembagaan Profesi Aparatur Sipil Negara;
9. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
10. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya;
11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
12. Pelayanan data dan informasi lainnya terkait layanan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerahberdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undanganyang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi aspek tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuaitugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Karimun Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI					% CAPAIAN				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Merit Sistem	66,25	68,25	71,13	75,38	81,75	65,00	68,00				98,11 %	99,6 3%			
2	Indeks Profesionalitas Aparatur	57,15	60,65	64,15	67,65	71,35	49,92	57,00				87,35 %	87,5 8%			
3	Nilai AKIP	77,25	77,50	78,00	78,25	78,60	74,63	64,49				96,60 %	83,4 8%			

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Karimun

Identfikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2021-2026 adalah:

A. Program Kepegawaian

1. Masih rendahnya PNS, Fungsional, dan PPPK yang mengikuti kegiatan assessment;

2. Kurangnya alokasi formasi untuk pemenuhan kebutuhan pegawai;
3. Meningkatkan kinerja ASN melalui peningkatan kedisiplinan dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan peningkatan administrasi kepegawaian.

B. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Masih rendahnya peningkatan SDM PNS dan PPPK melalui pendidikan dan pelatihan.

Selain isu-isu penting di atas ada banyak hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tupoksi OPD dapat disebutkan sebagai berikut:

- Kendala-kendala :
  1. Belum Optimalnya dalam melaksanakan pelayanan dalam bidang kepegawaian;
  2. Masih rendahnya tingkat kemampuan SDM;
  3. Masih rendahnya tingkat kedisiplinan ASN;
  4. Belum Optimalnya dalam penataan dan penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang ada;
  5. Belum Optimalnya Fasilitasi Kesejahteraan ASN dan Data / Informasi serta pengembangan IT bidang Kepegawaian.
- Peluang :
  1. Sistem teknologi informasi komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat;
  2. Pengembangan kompetensi pegawai dalam bidang teknis, pemerintahan, kepemimpinan dan sosio kultural;
  3. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar pegawai berdisiplin dan professional;
  4. Aparatur Daerah mengikuti perkembangan aturan-autran kepegawaian;
  5. Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang baku dalam pengelolaan sumber daya aparatur;
  6. Pemberian Tunjangan Kinerja pegawai berbasis kinerja dan disertai penerapan sistem rewards and punishment yang lebih tegas;
  7. Adanya kemajuan teknologi informasi untuk menunjang kerja;
  8. Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf.

- Kekuatan :
  1. Mudahnya koordinasi dengan BKN, BKD Propinsi dan Badan Diklat;
  2. Loyalitas dan Dedikasi pegawai tinggi;
  3. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian sudah bagus;
  4. Pelaksanaan Sosialisasi Kepegawaian sudah bagus;
  5. Kemudahan (cepat dan Tepat) dalam mengakses Informasi dengan Sistem Teknologi Informasi dalam peningkatan pelayanan;
  6. Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf.
- Kelemahan :
  1. Sistem informasi kepegawaian belum terkelola dengan baik dan belum maksimalnya keterintegrasian dengan layanan kepegawaian;
  2. Upaya penurunan pelanggaran didiplin masih belum maksimal;
  3. Penilaian kinerja masih belum terukur dengan baik;
  4. Monev implementasi dan hasil diklat belum dilaksanakan dengan baik;
  5. Adanya kesenjangan kompetensi antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia;
  6. Dukungan alokasi ketersediaan dana yang kurang memadai.
- Tantangan
  1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima semakin besar;
  2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai untuk peningkatan pelayanan publik;
  3. Situasi dan kondisi politik nasional dan lokal dalam komitmen pengembangan SDM aparatur;
  4. Perubahan dan perkembangan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang harus disikapi secara cepat dan tepat;
  5. Belum optimalnya dalam penggunaan analisa jabatan sebagai dasar dalam perencanaan manajemen sumber daya manusia;
  6. Peningkatan dan pengendalian kinerja dan disiplin Pegawai ASN;
  7. Integrasi Sistem Informasi kepegawaian dengan Layanan Administrasi Kepegawaian.

Dengan adanya berbagai kendala dan permasalahan yang ada apabila tidak dapat diterselesaikan dengan baik maka akan memberikan dampak tidak tercapainya misi kepala Daerah yang diemban oleh BKPSDM.

Oleh sebab itu dari isu-isu penting, kendala, peluang, tantangan, kekuatan dan kelemahan yang dihadapi di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Karimun menentukan kebijakan umum sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin ASN di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun;
2. Pemberdayaan Sistem Informasi Manajeman Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi agar dapat diakses dengan mudah;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas Administrasi Perkantoran dan Sarana dan Prasarana;
4. Peningkatan Kualitas dokumen perencanaan dan Pelaporan serta kualitas pelayanan OPD;
5. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan organisasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahu 2025 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja-OPD) Tahun 2025. Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 digunakan sebagai kerangka awal dalam mengajukan Usulan Musrenbang Tahun 2025. Setelah Peraturan Bupati Karimun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka setiap OPD wajib menyesuaikan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dapat dilihat dalam Tabel 2.6, berdasarkan tabel tersebut, terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil kebutuhan BKPSDM Kabupaten Karimun mengenai pagu penggunaan anggaran namun program dan kegiatan sudah terakomodir dalam RKPD 2025.

Tabel. 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau
Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaianian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				8.006.045.000,-	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				9.792.781.641,-	
	KEPEGAWAIAN		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	63.35%	1.301.748.100	KEPEGAWAIAN		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	63.14%	2.734.744.300,-	
			Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	22,44%	598.150.000			Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	22,18%		
05.03.02	Program Kepegawaian Daerah				1.301.748.100	Program Kepegawaian Daerah					
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kabupaten Karimun	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1 Laporan	1.214.910.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Karimun	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1 Laporan	916.144.750,-	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	4 Dokumen - Bazzeting - Usulan CPNS - Usulan PPPK - Peta Jabatan	56.880.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	4 Dokumen - Bazzeting - Usulan CPNS - Usulan PPPK - Peta Jabatan	20.000.000	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	775.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	350.000.000	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	65 Dokumen	100.980.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	65 Dokumen	60.000.000	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	107.350.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	153.887.150	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	107.350.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	186.568.000	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	67.350.000	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	145.689.600	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.02 2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Kabupaten Karimun**	**Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah**	**1.921**	**432.310.000**	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Kab. Karimun**			**651.909.000,-**	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	30 Dokumen	165.190.000	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	30 Dokumen	52.000.000	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	650 Dokumen	138.870.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	650 Dokumen	50.000.000	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	128.250.000	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	549.909.000	
5.03.02 2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Kabupaten Karimun**	**Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi**	**371 Orang**	**152.490.000**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Kab. Karimun**	**Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi**	**623 Orang**	**502.531.000,-**	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	95 Orang	0	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	85 Orang	0	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	67.350.000	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	40.000.000,-	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.02.2.03.03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	-	0	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	0	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2 Orang	85.140.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	41 Orang	67.000.000,-	
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan KerjaSama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	395.531.000,-	
5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	-	0	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	15 Orang	0	
5.03.02.2.03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	-	0	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	0	
5.03.02.2.03.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	-	0	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	-	0	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.02.2.03.09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	-	0	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen	0	
5.03.02.2.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsioal ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	-	0	Fasilitasi Sertifikasi Fungsioal ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	20 Orang	0	
5.03.02.2.03.11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional		Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	-	0	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional		Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	1 Dokumen	0	
5.03.02.2.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	-	0	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	-	0	
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	-	0	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	20 Orang	0	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	-	0	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	15 Orang	0	
5.03.02.2.03.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	-	0	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Dokumen	0	
5.03.02 2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Kab.Karimun**	**Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**1 Laporan**	**451.040.000**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Kab. Karimun**	**Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**1 Laporan**	**664.159.550,-**	
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		0	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	0	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	0	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	152,565.000,-	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	67.460.000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	92.104.600,-	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		0	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 Orang		
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	320 Orang	112.760.000	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	320 Orang	68.590.500,-	
5.03.02.2.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen	0	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	6 Orang	68.450.000	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	9 Orang	185.558.450,-	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	9 Laporan	0	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	8 Dokumen	89.610.000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	8 Dokumen	160.341.000,-	
5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Dsiplin ASN	1 Laporan	112.760.000	Evaluasi Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Dsiplin ASN	1 Laporan	5.000.000	
05.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Kab. Karimun**	**Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)**	**99,54%**	**55.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Kab. Karimun**	**Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)**	**99,54%**	**49.837.000,-**	
			Persentase Pejabat PNS yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	**54.40%**	**508.300.000**			**Persentase Pejabat PNS yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural**	**54.40%**	**198.000.000,-**	
5.04.02 2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Kab. Karimun**	**Jumlah Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis**	**40 Orang**	**217.500.000,-**	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Kab. Karimun**	**Jumlah Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis**	**40 Orang**	**50.000.000,-**	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun		0	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	0	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	500 Orang	217.500.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	40 Orang	50.000.000,-	
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengkoordinasi Fasilitasi, Pemantauan, Evalusasi dan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan			Pembinaan, Pengkoordinasi Fasilitasi, Pemantauan, Evalusasi dan Pelaporan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen	0	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum		Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum		Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**		**Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional**	**22 Orang**	**345.800.000**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Kab. Karimun**	**Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional**	**172 Orang**	**197.837.000,-**	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04.02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	0	
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	105 Orang	55.000.000	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	165 Orang	49.837.000,-	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	290.800.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	148.000.000,-	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**80,70**	**4.259.225.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Karimun**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**80,70**	**6.810.200.347,-**	
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kabupaten Karimun	**Jumlah Dokumen**	**5 Dokumen**	**117.314.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Karimun**	**Jumlah Dokumen**	**5 Dokumen**	**101.912.636,-**	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen - Renja - Renja RB - Renstra	43.472.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen - Renja - Renja RB	48.775.336	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	73.842.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	53.137.300	
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	0	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Karimun**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**3.023.906.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Karimun**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**5.713.723.711,-**	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	564 Orang/Bulan (41 Orang x 12 Bulan)	2.893.906.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	576 Orang/Bulan (47 Orang x 12 Bulan)	5.629.555.711,-	
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	130.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.168.000,-	
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kabupaten Karimun**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**183.450.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Karimun**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**171.940.000,-**	
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan	1 Paket	116.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan	-	103.315.000,-	
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	67.450.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	66.150.000-	
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Karimun**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**344.850.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Karimun**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**449.644.000,-**	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.310.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.983.000,-	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.730.0000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.001.000,-	
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	11.570.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.897.000,-	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.570.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,-	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.400.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.040.000,-	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	23.150.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	40.200.000,-	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	11.600.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	224.520.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	341.523.000,-	
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab.Karimun**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**284.135.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Karimun**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**259.954.000,-**	
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	167.135.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	110.990.000,-	
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	117.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	148.964.000,-	
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Karimun**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**248.950.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Karimun**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**55.340.000,-**	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**1 Laporan**	**0**	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.730.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	37.88.6000,-	
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	17.320.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	196.900.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	44.700.000,-	
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab.Karimun**	**Laporan Pemeliharaan**	**1 Laporan**	**56.620.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Karimun**	**Laporan Pemeliharaan**	**1 Laporan**	**57.686.000,-**	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	34.730.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	37.886.000,-	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	13.890.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	19.800.000,-	
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	8.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	0	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari hasil Musrenbang Kabupaten Karimun Tahun 2024 secara spesifik, usulan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan tambahan oleh pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat terkait.

Tabel T.C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kabupaten Karimun

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Lokasi
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah bertujuan semakin meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah. Dengan sasarannya semakin kuatnya kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalampenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan indikator meningkatnya kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Karimun 2021 – 2026 adalah " **Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Akuntabel".** Beberapa unsur yang terkandung selaras dengan visi BKN yaitu **Mewujudkan Aparatur yang Profesional.**

Dalam perencanaan jangka menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2020 - 2024 yaitu "**Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong** ". Yang mana visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Kementerian PANRB untuk manjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki kepribadian yang bersih dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, kemeterian PANRB telah merumuskan dan menetapkan beberapa misi yang harus diembannya, yaitu :

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah dan Terintegrasi dan Berbasis Elektronik;
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional dan Kompetetif dan Berwawasan Global;
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel;
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas;
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, AKuntabel dan Melayani;
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Kementerian PANRB menetapkan nilai-nilai yang menjadi dasar dan pondasi bagi institusi Kementerian PANRB mewujudkan Kementerian PANRB sebagai institusi pemerintahan yang berkelas dunia, pimpinan dan seluruh pegawai dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap, yaitu:

1. **Integritas**

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam ASN Kementerian PANRB harus melaksanakan tugas dengan jujur serta konsisten antaraperkataan dengan perbuatan, berperilaku terpuji, disiplin dan penuhdedikasi berdasarkan norma dan etika.

2. **Profesional**

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, pimpinandan seluruh ASN di lingkungan Kementerian PANRB menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas, sesuai kompetensi (keahlian) dan inovatif untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama.

3. **Akuntabel**

Dalam akuntabel terkandung makna bahwa dalam bekerja, seluruh ASN di lingkungan Kementerian PANRB harus bertanggung jawab terhadapsetiap tindakan, perilaku dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil.

4. **Melayani**

Melayani terkandung makna bahwa dalam bekerja seluruh ASN di lingkunganKementerianPANRB harus menempatkan Kementerian/Lembaga/Pemda lain sebagai pihak yang harus didahulukan.

5. **Kolaboratif**

   Kolaboratif mengandung makna bahwa dalam bekerja, seluruh ASN di Kementerian PANRB saling membuka diri, menerima pendapat orang lain dan saling menghargai.

6. **Inovatif**

   Inovatif mengandung makna bahwa dalam bekerja, seluruh ASN di Kementerian PANRB melakukannya dengan cara yang baru, kreatif, inventif, dan imaginatif, mengikuti perkembangan terkini, tidak anti terhadap perubahan.

7. **Kesempurnaan (Komitmen pada Kualitas)**

   Dalam kesempurnaan mengandung makna bahwa dalam bekerja dibutuhkan ketekunan sekaligus ketepatan, agar menghasilkan keluaran yang maksimal, dengan tingkat kesalahan nol persen.

Dari hasil telaahan visi kemenpan dan reformasi birokrasi tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa tujuan BKPSDM Kabupaten Karimun telah sejalan dengan visi institusi pusat tersebut.

Terkait dengan reformasi birokrasi dan tata kelola, dalam RPJMN 2020- 2024 menetapkan 4 (empat) arah kebijakan dan strategi reformasi birokrasi dan tata kelola, yakni:

Penguatan implementasi Manajemen ASN, melalui:

1. Penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional; Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;
2. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja

organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran;

3. Transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan dalam rangkat pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 dengan tema ***" Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa "*** Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pada OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun mengemban misi ke 5 RPJMD ***" Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional dan Unggul "*** maka peningkatan kualitas tata kelola pemerintah yang baik dan professional harus didukung dengan sumber daya yang baik sehingga dapat memenuhi harapan publik sebagai pengguna layanan.

Tujuan dan sasaran rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun dimaksudkan untuk:

1. Menjabarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun dalam Rencana Program/Kegiatan Prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025;
3. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun;

4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun;
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumberdaya organisasi ke dalam stretegi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi ***spesifik kreteria, terukur (measurable), menantang tapi bisa dicapai (aggressive but attainable), berorientasi hasil (result oriented) dan Jangka waktu (time bond) serta terus menerus melakukan peningkatan (continuously improve)***.

Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam upaya pencapaian sasaran.

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur dan untuk mewujudkan SDM Aparatur yang kompeten dan professional sejalan dengan tujuan misi kelima RPJMD Kabupaten Karimun yaitu mewujudkan birokrasi yaitu mewujudkan birokrasi yang professional dan unggul (berkeadilan dalam pelayanan publik) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merumuskan 2 (dua) tujuan yaitu :

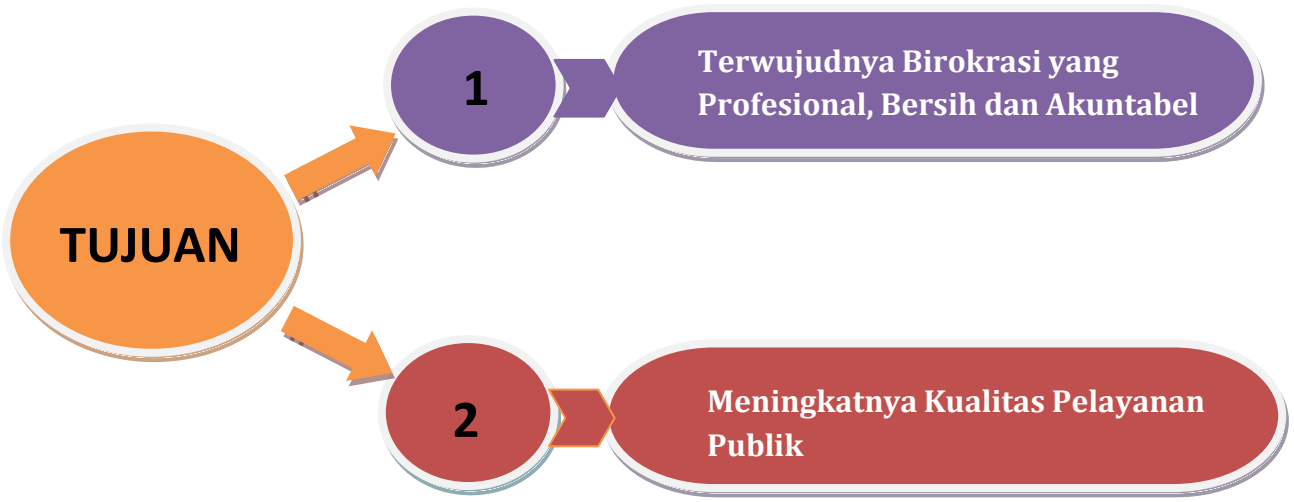

Adapun sasaran yang menunjang tujuan yaitu :

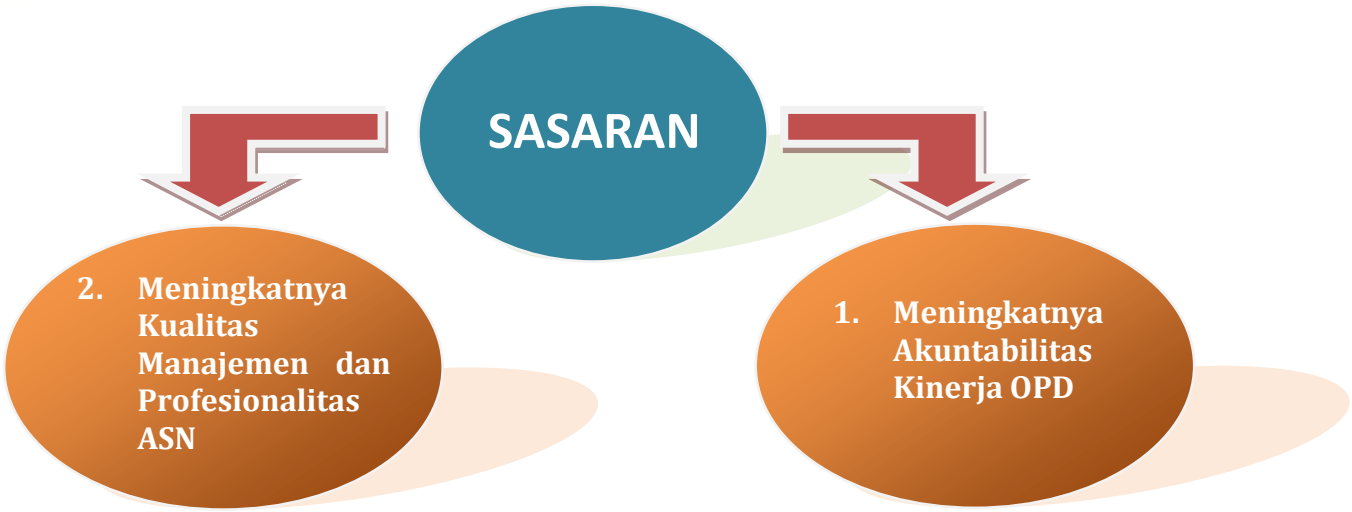

Terkait dengan penjabaran tujuan dan sasaran daerah, maka rumusan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah :

TABEL. 3.1

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BKPSDM TAHUN 2025

NO.	TUJUAN	SASRAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Profesionalitas ASN	Indeks Merit Sistem	70,50
			Indeks Profesionalitas Aparatur	67,65
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	NILAI AKIP	70,00

TABEL. 3.2

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Imam dan Taqwa			
MISI 5 : Mewujudkan Birokrasi yang professional dan unggul (Berkeadilan dalam Pelayanan Publik)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Profesionalitas	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintah Pusat
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Yang Professional (Kompetensi Birokrasi)
			Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik

Tabel 3.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Sasaran Dan Program
Pada BKPSDM Kabupaten Karimun

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2025	Program	Indikator Program
Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Profesionalitas	Indeks Merit Sistem	70,50	Kepegawaian Daerah	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)
					Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2025	Program	Indikator Program
		Indek Profesionalitas Pegawai	67,65	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)
					Persentase Pejabat PNS yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	NILAI AKIP	70,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat

3.3. Program Dan Kegiatan

Dalam rangka implementasi kebijakan dalam menunjang pencapaian visi, misi Kepala Daerah dan pencapaian tujuan dan sasaran OPD terkait peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah sebagai upaya percepatan pembangunan daerah maka pada tahun 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dirumuskan 2 (dua) Bidang Urusan yaitu Bidang Urusan Kepegawaian dan Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari 3 (tiga) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp.8.006.045.000,-** ***(Delapan milyar enam juta empat puluh lima ribu rupiah).***

Pendanaan program/kegiatan tersebut direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025. Secara rinci Rumusan Perencanaan Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun2026 disajikan pada Tabel 3.4 dan Rumusan Perencanaan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.5

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026	
			Lokasi	TargetCapaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SumberDana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH**				**9.792.781.641,-**				**7.278.410.000,-**
5.03	**KEPEGAWAIAN**								
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Kabupaten Karimun**		**6.810.200.347,-**	**APBD**			**3.502.610.500**
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**Kabupaten Karimun**	**5 Dokumen**	**101.912.636,-**	**APBD**		**5 Dokumen**	**123.164.700**
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Karimun	3 Dokumen - Renja - Renja RB - Renstra	48.775.336	APBD		3 Dokumen - Renja - Renja RB - Renstra	45.638.100
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kabupaten Karimun	3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	53.137.300	APBD		3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	77.526.600

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026	
			Lokasi	TargetCapaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SumberDana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Karimun	2 Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	0	APBD		2 Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	0
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**Kabupaten Karimun**	**1 Laporan**	**5.713.723.711,-**	**APBD**		**1 Laporan**	**2.464.665.800**
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Karimun	372 Orang/Bulan (31 Orang x 12 Bulan)	5.629.555.711,-	APBD		660 Orang/Bulan (55 Orang x 12 Bulan)	2.334.665.800
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	84.168.000,-	APBD		1 Dokumen	130.000.000
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**Kabupaten Karimun**	**1 Laporan**	**171.940.000,-**	**APBD**			**180.820.000**
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Kabupaten Karimun	1 Paket	103.315.000,-	APBD		1 Paket	110.000.000
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Karimun	10 Orang	66.150.000-	APBD		10 Orang	70.820.000
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**Kabupaten Karimun**	**1 Laporan**	449.644.000,-	**APBD**			**368.260.000**
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Paket	4.983.000,-	APBD		1 Paket	11.000.000
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Karimun	1 Paket	25.001.000,-	APBD		1 Paket	36.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026	
			Lokasi	TargetCapaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SumberDana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kantor yang Disediakan							
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Paket	12.897.000,-	APBD		1 Paket	13.000.000
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Paket	15.000.000,-	APBD		1 Paket	13.000.000
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Paket	10.040.000,-	APBD		1 Paket	18.270.000
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	40.200.000,-	APBD		1 Dokumen	24.310.000
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Karimun	1 Laporan	0	APBD		1 Laporan	12.180.000
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	341.523.000,-	APBD		1 Laporan	240.000.000
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**	**Kabupaten Karimun**	**1 Laporan**	259.954.000,-	**APBD**			**43.000.000**
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 unit	110.990.000,-	APBD		1 unit	25.000.000
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Unit	148.964.000,-	APBD		1 Unit	18.000.000
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**Kabupaten Karimun**	**1 Laporan**	55.340.000,-	**APBD**		**1 Laporan**	**282.720.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026	
			Lokasi	TargetCapaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SumberDana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Karimun	1 Laporan	0	APBD		1 Laporan	0
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	37.88.6000,-	APBD		1 Laporan	36.470.000
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	0	APBD		1 Laporan	19.000.000
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	44.700.000,-	APBD		1 Laporan	207.250.000
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan**	**Kabupaten Karimun**	**1 Laporan**	**56.620.000**	**APBD**		**1 Laporan**	**59.980.000**
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Karimun	1 Unit	37.886.000,-	APBD		1 Unit	36.500.000
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Karimun	12 Unit	19.800.000,-	APBD		12 Unit	15.000.000
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Karimun	20 Unit	0	APBD		20 Unit	8.480.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026	
			Lokasi	TargetCapaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SumberDana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)**	**Kabupaten Karimun**	**73.30**	**2.734.744.300,-**	**APBD**		**63,51%**	**3.542.800.000**
		Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	**Kabupaten Karimun**	**31.53**	**0**	**APBD**		**22,70%**	**325.000.000**
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Kabupaten Karimun**	**1 Laporan**	**916.144.750,-**	**APBD**		**1 Laporan**	**1.258.700.000**
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Kabupaten Karimun	4 Dokumen - Bazzeting - Usulan CPNS - Usulan PPPK - Peta Jabatan	20.000.000	APBD		4 Dokumen - Bazzeting - Usulan CPNS - Usulan PPPK - Peta Jabatan	58.000.000
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	350.000.000	APBD		1 Dokumen	800.000.000
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kabupaten Karimun	65 Dokumen	60.000.000	APBD		65 Dokumen	108.000.000
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kabupaten Karimun	1 Lembaga	153.887.150	APBD		1 Lembaga	112.000.000
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem	Jumlah Dokumen Hasil	Kabupaten	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	110.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026	
			Lokasi	TargetCapaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SumberDana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Karimun		186.568.000				
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	145.689.600	APBD		1 Dokumen	70.700.000
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah**	**Kabupaten Karimun**	**1.921**	651.909.000,-	**APBD**		**1921**	**445.800.000**
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kabupaten Karimun	30 Dokumen	52.000.000	APBD		30 Dokumen	170.000.000
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabupaten Karimun	650 Dokumen	50.000.000	APBD		650 Dokumen	140.800.000
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kabupaten Karimun	3 Dokumen	549.909.000	APBD		3 Dokumen	135.000.000
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi**	**Kabupaten Karimun**	**371 Orang**	**502.531.000,-**	**APBD**		**205 Orang**	**978.000.000**
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Kabupaten Karimun	95 Orang	0	APBD		Orang	0
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	40.000.000,-	APBD		1 Dokumen	70.000.000
5.03.02.2.03.03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	0	APBD		Dokumen	0
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan	Jumlah ASN yang	Kabupaten	2 Orang	67.000.000,-	APBD		40 Orang	88.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026	
			Lokasi	TargetCapaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SumberDana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Lanjutan ASN	Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Karimun						
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	395.531.000,-	APBD		1 Dokumen	820.000.000
5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Kabupaten Karimun	-	0	APBD			0
5.03.02.2.03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Kabupaten Karimun	1 Laporan	0	APBD			0
5.03.02.2.03.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Kabupaten Karimun	10 Orang	0	APBD			0
5.03.02.2.03.09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Kabupaten Karimun	-	0	APBD			0
5.03.02.2.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsioal ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Kabupaten Karimun	20 Orang	0	APBD			0
5.03.02.2.03.11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Kabupaten Karimun	-	0	APBD			0
5.03.02.2.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	0	APBD			0
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Kabupaten Karimun	30 Orang	0	APBD			0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026	
			Lokasi	TargetCapaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SumberDana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Kabupaten Karimun	-	0	APBD			0
5.03.02.2.03.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	0	APBD			0
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Kabupaten Karimun**	**1 Laporan**	**664.159.550,-**	**APBD**		**1 Laporan**	**835.630.000**
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	0	APBD			
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian danEvaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	152,565.000,-	APBD		1 Dokumen	115.000.000
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	92.104.600,-	APBD		1 Dokumen	70.830.000
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kabupaten Karimun	10 Orang	0	APBD			
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Kabupaten Karimun	320 Orang	68.590.500,-	APBD		320 Orang	115.000.000
5.03.02.2.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	0	APBD			
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kabupaten Karimun	9 Orang	185.558.450,-	APBD		8 Orang	70.870.000
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian	Jumlah Laporan Hasil	Kabupaten	9 Laporan	0	APBD			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026	
			Lokasi	TargetCapaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SumberDana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelanggaran Disiplin ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Karimun						
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kabupaten Karimun	8 Dokumen	160.341.000,-	APBD		8 Dokumen	92.000.000
5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Kabupaten Karimun	1 Laporan	5.000.000,-	APBD		1 Laporan	115.000.000
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**247.837.000,-**				**514.599.500**
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**	**Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)**	**Kabupaten Karimun**	**30.98%**	**49.837.000,-**	**APBD**		**99,77%**	**0**
		Persentase Pejabat PNS yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	**Kabupaten Karimun**	**19.51%**	**198.000.000,-**	**APBD**		**57,33%**	**314.599.500**
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah Pegawai yang mengikuti Pengembangan kompetensi teknis**	**Kabupaten Karimun**	**40 Orang**	**50.000.000,-**	**APBD**			**200.000.000**
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	0	APBD			0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026	
			Lokasi	TargetCapaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SumberDana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun							
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kabupaten Karimun	500 Orang	50.000.000,-	APBD		400 Orang	200.000.000
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum,Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	0	APBD			0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026	
			Lokasi	TargetCapaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SumberDana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional**	**Kabupaten Karimun**	**22 Orang**	**197.837.000,**	**APBD**			**314.599.500**
5.04.02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan,Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	0	APBD			0
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Kabupaten Karimun	15 Orang	49.837.000,-	APBD			55.000.000
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi	Kabupaten Karimun	1 Laporan	148.000.000,-	APBD			259.599.500

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026	
			Lokasi	TargetCapaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SumberDana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan							
T O T A L					**9.792.781.641**				**7.278.410.000**

Tabel 3.5

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM		KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	
Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Profesionalitas ASN	**Indeks Merit Sistem**	**Program KepegawaianDaerah**	1	Pengadaan, Pemberhentiandan Informasi Kepegawaian ASN	1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
					2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
					3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
					4	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
					5	Pengelolaan Sistem InformasiKepegawaian
					6	Pengelolaan Data Kepegawaian
			2	Mutasi dan Promosi ASN	7	Pengelolaan Mutasi ASN
					8	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
					9	Pengelolaan Promosi ASN
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial danFungsional	10	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
					11	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
			4	Pengembangan KompetensiTeknis	12	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
	Indeks Profesionalitas Aparatur	**Program Kepegawaian Daerah**	5	Pengembangan Kompetensi ASN	13	Pengelolaan Assessment Center
					14	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
					15	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
		Program Kepegawaian Daerah	6	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	16	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
					17	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
					18	Pengelolaan Tanda Jasa BagiPegawai
					19	Pembinaan Disiplin ASN
					20	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
					21	Evaluasi Disiplin ASN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM		KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	**Nilai AKIP**	**Program Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	7	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					22	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					24	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			9	Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah	25	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
					26	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					28	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					29	Penyediaan Peralatan RumahTangga
					30	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					31	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
					32	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					33	Fasilitasi Kunjungan Tamu
					34	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35	Pengadaan Mebel
					36	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					38	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					39	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			13	Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					41	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya
					42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Karimun yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 Kabupaten Karimun Tahun 2025, maka seluruh program dan kegiatan pada tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan pencapaian hal tersebut.

Penyajian Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan BKPSDM Kabupaten Karimun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Serta Program, Kegiatan dan Subkegiatan telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Karimun Tahun 2024 sudah sesuai dan selaras dengan program prioritas pembangunan dan arah kebijakan daerah dengan kebijakan Pusatdalam rangka mendukung program-program prioritas nasional di daerah. Program Pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2025 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 terdiri dari :

A. **Program Pada Semua Perangkat Daerah**
    1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
B. **Program Teknis Perangkat Daerah**
    1. Program Urusan Kepegawaian
        1) Program Kepegawaian
    2. Program Urusan Pendidikan dan Pelatihan

1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

4.2 Pendanaan

Secara detail mengenai uraian kerangka Pendanaan dan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Kabupaten Karimun Tahun 2025 disajikan dalam bentuk matriks (tabel dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah), terlampir.

Tabel 4.1
RINCIAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

KODE						RKPD TAHUN 2025							BIDNAG PELAKSANA/PENANGGUNG JAWAB
						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN/PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA			
										APBD KABUPATEN	APBD PROP	APBN	
1						2	3	4	5	6	7	8	9
						URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				**9.792.781.647,-**			
						KEPEGAWAIAN				**9.792.781.647,-**			
						PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				**2.734.744.300,-**			
						Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN	**Jumlah Laporan Pengadaan , Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN**			**916.144.750,-**			BIDANG PENGADAAN
							Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			20.000.000,-			
							Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			350.000.000,-			
							Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			60.000.000,-			
							Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			153.887.150,-			
							Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			186.568.000,-			
							Pengelolaan Data Kepegawaian			145.689.600,-			
						Mutasi dan Promosi ASN	**Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah**			**651.909.000,-**			BIDANG PENGEMBANGAN
							Pengelolaan Mutasi ASN			52.000.000,-			
							Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			50.000.000,-			
							Pengelolaan Promosi ASN			549.909.000,-			
						Pengembangan Kompetensi ASN	**Jumlah ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi**			**502.531.000,-**			**BIDANG PENGEMBANGAN**
							Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		85 Orang				
							Pengelolaan AssessmentCenter		1 Dokumen	40.000.000,-			
							Pengelolaan PendidikanLanjutan		41 Orang	67.000.000,-			

KODE						RKPD TAHUN 2025							BIDNAG PELAKSANA/PENANGGUNG JAWAB
						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN/PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA			
										APBD KABUPATEN	APBD PROP	APBN	
1						2	3	4	5	6	7	8	9
							ASN						
							Koordinasi dan KerjasamaPelaksanaan Diklat		1 Dokumen	395.531.000,-			
						Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**		**1 Laporan**	**664.159.550,-**			**BIDANG PENILAIAN**
							Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1 Dokumen	-			
							Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1 Dokumen	152.565.000,-			
							Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1 Dokumen	92.104.600,-			
							Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		10 Orang				
							Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		320 Orang	68.590.500,-			
							Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		1 Dokumen				
							Pembinaan Disiplin ASN		9 Orang	185.558.450,-			
							Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		9 Laporan				
							Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		8 Dokumen	160.341.000,-			
							Evaluasi Disiplin ASN		1 Laporan	5.000.000			
						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				**247.837.000,-**			**BIDANG PENGEMBANGAN**
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				**247.837.000,-**			
						Pengembangan Kompetensi Teknis	**Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis**		**40 Orang**	**50.000.000,-**			**BIDANG PENGEMBANGAN**
							Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		1 Dokumen				
							Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		500 Orang	50.000.000,-			
							Pembinaan, Pengkoordinasi Fasilitasi, Pemantauan, Evalusasi dan		1 Dokumen				

KODE						RKPD TAHUN 2025							BIDNAG PELAKSANA/PENANGGUNG JAWAB
						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN/PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA			
										APBD KABUPATEN	APBD PROP	APBN	
1						2	3	4	5	6	7	8	9
							Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum						
						Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional	**Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional**		**22 Orang**	**197.837.000,-**			**BIDANG PENGEMBANGAN**
							Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional		1 Dokumen	-			
							Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota		15 Orang	49.837.000,-			
							Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		1 Laporan	148.000.000,-			
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**6.810.200.347,-**			
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen**		**5 Dokumen**	**101.912.637,-**			**Subbidang Perencanaan dan Keuangan**
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen - Renja - Renja RB	48.775.336,-			
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	53.137.300,-			
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan - Evaluasi	0			

KODE						RKPD TAHUN 2025							BIDNAG PELAKSANA/PENANGGUNG JAWAB
						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN/PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA			
										APBD KABUPATEN	APBD PROP	APBN	
1						2	3	4	5	6	7	8	9
									Renja - Evaluasi RB				
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan**		**1 Laporan**	**5.713.723.711,-**			**Subbidang Perencanaan dan Keuangan**
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		372 Orang/Bulan (31 Orang x 12 Bulan)	5.629.555.711,-			
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	84.168.000,-			
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan**		**1 Laporan**	**171.940.000,-**			**Subbidang Umum dan Kepegawaian**
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	103.315.000,-			
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		10 Orang	68.625.000,-			
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan**		1 Paket	**449.644.000,-**			**Subbidang Umum dan Kepegawaian**
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	4.983.000,-			
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Paket	25.001.000,-			
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Paket	12.897.000,-			
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	15.000.000,-			
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Dokumen	10.040.000,-			
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Laporan	40.200.000,-			
							Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Paket				
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Laporan	341.523.000,-			
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan**		**1 Laporan**	**259.954.000,-**			**Subbidang Umum dan Kepegawaian**
							Pengadaan Mebel		5 Unit	110.990.000,-			
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3 Unit	148.964.000,-			
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan**		**1 Laporan**	**55.340.000,-**			**Subbidang Umum dan Kepegawaian**
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	0			
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Laporan	10640000			

KODE						RKPD TAHUN 2025						BIDNAG PELAKSANA/PENANGGUNG JAWAB
						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN/PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		
										APBD KABUPATEN	APBD PROP	APBN	
1						2	3	4	5	6	7	8	9
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Laporan				
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Laporan	44.700.000			
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pemeliharaan**		**1 Laporan**	**57.686.000,-**			**Subbidang Umum dan Kepegawaian**
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Unit	37.886.000,-			
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12 Unit	19.800.000,-			**Subbidang Umum dan Kepegawaian**
							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		10 Unit	0			

Selain itu pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun juga difokuskan untuk:

1. Mengatasi kekurangan pegawai melalui pengajuan usulan formasi pengadaan CPNS / PPPK prioritas sesuai kebutuhan;
2. Peningkatan layanan berbasis online system yang terintegrasi;
3. Pengukuran Indeks Profesionalisme Aparatur Negara secara berkelanjutan melalui MySAPK;
4. Pemetaan Potensi PNS;
5. Peningkatan kualitas kedisiplinan PNS dengan penyempurnaan regulasi kepegawaian yang dibutuhkan;
6. Pengelolaan kualitas pengelolaan aplikasi SIKDA Integrated yang dikembangkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun .

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA-OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karimun memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra BKPSDM dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024. Program dan kegiatan yang telah direncanakan agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah secara efektif dan efisien, dengan mempersiapkan program-program perencanaan pembangunan Kabupaten Karimun. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja dari BKPSDM Kabupaten Karimun selama periode waktu tersebut, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan secara *institution building*.

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini diharapkan dapat terimplementasi melalui realisasi program-program kegiatan, sehingga akan mampu meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi kinerja aparatur demi mewujudkan tujuan dan sasaran OPD.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun, sesuai dengan sifatnya adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun.

Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Kabupaten Karimun 2021-2026 serta Rancangan Awal Renstra BKPSDM tahun 2021-

2026. Dalam pelaksanaannya dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi *stakeholder* yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun tahun 2025 harus dapat berfungsi sebagai:

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2025 baik dalam lingkup program maupun kegiatan serta sub kegiatan;
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama;
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya untuk arah yang lebih baik lagi.

Peran serta maksimal dari seluruh bidang maupun sekretariat sebagai penunjang pelaksanaan bidang dalam memberikan pelayanan bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan sehingga peran dan tanggung jawab bidang dan sekretariat dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun kedepannya.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2024 ini berisikan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pengembangan urusan kepegawaian dan pendidikan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dan pegawai lainnya yang menginginkan pelayanan seperti pindah baik mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Karimun maupun sebaliknya mutasi keluar dari Pemerintah Kabupaten Karimun. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun tahun anggaran 2025 akan disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun tahun anggaran 2025 dengan memilih kegiatan tertentu sebagai kegiatan prioritas diantaranya dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
7. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN;
8. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis;
9. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;
10. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN;
11. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
12. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
13. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2025. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2025, memperhatikan kaidah- kaidah sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025;
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya;
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam menghadapi tugas perencanaan yang semakin kompleks, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian yang diimplemintasikan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung berbentuk aplikasi;
b. Dalam rangka sinergitas perencanaan untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, koordinasi dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna;
c. Meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses perencanaan, sehingga transparansi akan lebih terwujud;
d. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan dalam rangka melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana;
e. Dengan ditetapkannya Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman

pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

f. Melakukan kegiatan pengembangan sumber daya manusia, seperti rekrutmen CPNS, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan pengembangan karier, dan penilaian kinerja;

g. Memastikan proses kerja sesuai dengan standar kualitas, seperti prosedur, akurasi, ketepatan waktu dan biaya.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Tanjungbalai Karimun, ...Oktober 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN KARIMUN

Dr. H. M.S. SUDARMADI, S.Pd., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651009 199103 1 013

---?---

PEMERINTAH KABUPATEN
KARIMUN

RENCANA
KERJA
---- 2025 ----

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman Komplek Perkantoran Pemda Gedung C Lantai II
Tanjung Balai Karimun
website : http//www.kab-karimun.go.id

KEPUTUSAN
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 1294 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2025

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Inspektur Daerah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 maka Inspektorat telah memiliki perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan yang merupakan perwujudan aplikatif pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026;

b. bahwa untuk menyediakan dokumen rencana teknis lima tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Revisi Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025;

c. bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Karimun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 3902), yag telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4);

12. Peraturan Bupati Karimun Nomor 97 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian tugas Inspektorat Daerah Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 97);

13. Peraturan Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Tahunn 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 70);

14. Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 33);

15. Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 (Berita Negara Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 34).

17. Keputusan Inspektur Daerah Karimun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024.

18. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Karimun Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 -2021

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

Kesatu : Dalam Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Karimun ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karimun ;
2. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
3. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
4. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;

5. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;

6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran;

7. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupeten Karimun Tahun 2006-2025;

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026;

11. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun yang selanjutnya disingkat Renja Inspektorat adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun untuk periode 1 (satu) tahun;

12. Inspektur Daerah Kabupaten Karimun, yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Kabupaten Karimun.

Kedua : Renja Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Inspektur Daerah ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Renja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Inspektur Daerah ini menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan pengawasan di Daerah.

Keempat : Inspektur Daerah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah melalui monitoring dan evaluasi.

Kelima : Renja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Inspektur Daerah ini dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis.

Keenam : Pada saat Keputusan Inspektur Daerah ini mulai berlaku maka Renja Inspektorat Daerah menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah tahun 2025.

Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Inspektur Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Kedelapan : Keputusan Inspektur Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 10 Oktober 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,

ASEP ZAINAL ARIFIN, SE, CGCAE
Pembina Tk. I
NIP. 19661102 199303 1 001

BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah (PD) melakukan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025;

b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan antar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klafisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);

20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 46);

21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);

22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 99 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 99);

23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 45);

24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
RENCANA KERJA (RENJA)

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :
   a. pendahuluan;
   b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
   c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
   d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
   e. penutup.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta harus berpedoman dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
(3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya.
(4) Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 8 Juli 2024

BUPATI KARIMUN,

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024 NOMOR 34

DAFTAR ISI

			Halaman
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH			
DAFTAR ISI			**1**
BAB I	**PENDAHULUAN**		2
	1.1.	Latar Belakang	2
	1.2.	Landasan Hukum	3
	1.3.	Maksud dan Tujuan	4
	1.4.	Sistematika Penyajian	4
BAB II	**EVALUASI PELAKSAAN RENJA**		5
	2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
	2.2.	Analisis Kinerja	9
	2.3.	Isu – isu Tupoksi Inspektorat	9
BAB III	**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**		15
	3.1.	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	15
	3.2.	Visi, Misi, tujuan dan sasaran	15
	3.3.	Program dan Kegiatan	19
BAB IV	**PENUTUP**		28

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini kinerja Pemerintah Daerah semakin mendapat sorotan masyarakat. Pemerintah dituntut mampu untuk menunjukan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai *stakeholders*. Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis merupakan Integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan Yang Baik atau yang lebih dikenal dengan *Good Governance* yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik *(Good Governance)* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan serta cita-cita bangsa.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang - undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP no. 08 Tahun 2008;
5. Perda Provinsi Kepri No. 02 Tahun 2009 tentang RPJP Prov Kepri Tahun 2005 - 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 34);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 99);
11. Keputusan Inspektur Daerah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 disusun dengan berpedoman kepada Renstra Inspektorat dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun tahun 2025 disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2025. Renja juga merupakan acuan dalam penentuan pilihan - pilihan program kegiatan tahunan.

Dokumen Renja ini juga disusun dengan tujuan sebagai barometer untuk mengukur dan melakukan evaluasi terhadap kinerja tahunan. Selain itu juga bertujuan untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.

1.4. Sistematika Penyusunan Renja

Sistimatika penulisan Renja Tahun 2025 disusun ke dalam bab - bab sebagai berkut :

Bab I Pendahuluan

Memuat rumusan tentang latar belakang, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah, Maksud dan Tujuan, Proses dan Sistimatika Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Memuat Kebijakan Inspektorat Daerah Tahun 2021 - 2026 dan Memuat Program Utama dan Kegiatan Prioritas Inspektorat.

Bab IV Penutup

Memuat kesimpulan, berbagai harapan dan tindak lanjut pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun tahun 2025.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap jalannya RENSTRA 2021-2026 dapat dilihat melalui perkembangan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah selama satu tahun pada tahun keempat Renstra yaitu di tahun 2020 dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi Renja tahun lalu 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2024. Secara garis besar dapat dilihat dari table berikut ini :

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023
Kabupaten Karimun

Inspektorat Daerah

Lembar : .....

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026 (Akhir priode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					Urusan Wajib									
1	01				Bidang Urusan Pemerintahan									
6	01	02			**Program Penyelenggaran Pengawasan**	Tingkat Maturitas SPIP	**3+**	**3+**	nilai 3	**3+**	100	nilai 3+	nilai 3+	100
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Jumlah laporan Pengawasan Internal	**51**	**26**	51 lap	**26**	100	51 lap	51 lap	100
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1	100	1 laporan	1 laporan	100
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1	100	1 laporan	1 laporan	100
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1	100	1 laporan	1 laporan	100
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1	100	1 laporan	1 laporan	100
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	42 Laporan	17 Laporan	42 laporan	17	40.48	42 laporan	6 Laporan	20.20
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	3	100	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	100
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	Jumlah laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu	5 lap	5 lap	5 lap	5 lap	100	5 lap	5 lap	100

Inspektorat Daerah

Lembar : .....

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026 (Akhir priode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Lap	2 lap	2 lap	2 Lap	100	2 lap	2 lap	100
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3 Lap	3 Lap	3 lap	3 Lap	100	3 lap	3 lap	100
6	01	03			**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	Tingkat Kualitas APIP	nilai 3+	nilai 3+	nilai 3+	nilai 3+	100	nilai 3+	nilai 3+	100
6	**01**	**03**	**2.02**		**Asistensi dan Pendampingan**	jumlah laporan aisitensi dan pendampingan	8 lap	8 lap	8 lap	8 lap	100	8 lap	8 lap	100
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	20 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	20 Perangkaat Daerah	20 Perangkat Daerah	100	20 Perangkaat Daerah	20 Perangkaat Daerah	100
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	20 Perangkaat Daerah	20 Perangkat Daerah	100	20 Perangkaat Daerah	20 Perangkaat Daerah	100
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Keg	2 Keg	2 keg	2 Keg	100	2 keg	2 keg	100
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	7 Perangkaat Daerah	7 Perangkat Daerah	100	7 Perangkaat Daerah	7 Perangkaat Daerah	100
5	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**SKM**	**80**	**78.5**	**78.5**	**78.5**	**100**	**79**	**79**	**100**

Inspektorat Daerah

Lembar : .....

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026 (Akhir priode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	**1**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**100**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**100**
5	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	2 Dokumen - Renja - Renja RB	2 Dokumen - Renja - Renja RB	2 Dokumen - Renja - Renja RB	2 Dokumen - Renja - Renja RB	100	2 Dokumen - Renja - Renja RB	2 Dokumen - Renja - Renja RB	100
5	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	100	3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	100
5	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	100	**1 Laporan**	1 Laporan	100
5	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600 orang bulan (50 orang x 12 bulan)	600 orang bulan (50 orang x 12 bulan)	600 orang bulan (50 orang x 12 bulan)	600 orang bulan (50 orang x 12 bulan)	100	600 orang bulan (50 orang x 12 bulan)	600 orang bulan (50 orang x 12 bulan)	100
5	1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
5	1	1	2		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	100	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100**
5	1	1	2	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	0	0	2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	0	100
5	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	100	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100**
5	1	1	2.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	0	55 Paket	0	0	55 Paket	50 Paket	100
5	1	1	2.1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100

Inspektorat Daerah

Lembar : .....

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026 (Akhir priode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Kepegawaian	Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- DUK	- DUK	- DUK	- DUK		- DUK	- DUK	
5	1	1	2 1	5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen - Laporan Monev Disiplin Pegawai - Laporan Monev Kinerja Pegawai	2 Dokumen - Laporan Monev Disiplin Pegawai - Laporan Monev Kinerja Pegawai	2 Dokumen - Laporan Monev Disiplin Pegawai - Laporan Monev Kinerja Pegawai	2 Dokumen - Laporan Monev Disiplin Pegawai - Laporan Monev Kinerja Pegawai	100	2 Dokumen - Laporan Monev Disiplin Pegawai - Laporan Monev Kinerja Pegawai	2 Dokumen - Laporan Monev Disiplin Pegawai - Laporan Monev Kinerja Pegawai	100
5	1	1	2.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100	30 Orang	30 Orang	100
5	1	1	2.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	umlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	-	20 Orang	-	-	20 Orang	-	-
5	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	100	**1 Laporan**	**1 Laporan**	100
5	1	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	100	10 Paket	10 Paket	70
5	1	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	100	15 Paket	15 Paket	73.33
5	1	1	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	20 Paket	100	20 Paket	20 Paket	55.00
5	1	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	-	10 Paket	-	100	10 Paket	10 Paket	-
5	1	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20.000 Paket	10000	20.000 Paket	10000	100	20.000 Paket	20.000 Paket	103
5	1	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	10 Dokumen	10	10 Dokumen	10	100	10 Dokumen	10 Dokumen	100

Inspektorat Daerah

Lembar : .....

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026 (Akhir priode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Disediakan								
5	1	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan	33	36 laporan	33	91.67	36 laporan	30 laporan	83.33
5	**1**	**1**	**2.1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	1 Laporan	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100**
5	1	1	2.1	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan MebelJumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1	1	2.1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang isediakan	-	-	7 unit	-	-	10 unit	-	-
5	1	1	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	-	8 unit	-	-	10 unit	1 unit	10
5	1	1	2.1	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	1 unit	2 unit	1 unit	50	2 unit	1 unit	50
5	**1**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	1 Laporan	100	1 Laporan	**1 Laporan**	**100**
5	1	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	1 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100
5	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
5	1	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
5	**1**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	1 Laporan	**1 Laporan**	**1 Laporan**	100	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100**

Inspektorat Daerah

Lembar : .....

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026 (Akhir priode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	1	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100	4 Unit	4 Unit	100
5	1	1	2.1	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	-	-	5 Unit	-	-	5 Unit	-	-
5	1	1	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	5 Unit	-	-	5 Unit	-	-
5	1	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	-	-	1 unit	-	-	1 unit	-	-

2.2. Analisis Kinerja

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam menentukan tolok ukur dan indikator kinerja perlu dilakukan analisis pencapaian kinerja. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah di nilai berdasarkan Indikator Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Daerah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026. Analisis pencapaian kinerja tersebut disajikan dengan format sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Karimun

NO	Indikator	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis Tahun 2022
		Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan Internal	55%	58%	60%	60,71%	58%	60%	Tindaklanjut hasil pengawasan internal ini merupakan hasil audit yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun. Adapun target yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 55% dengan perhitungan kuantitas diasumsikan sebanyak 1.166 rekomendasi dari 2.120 rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindak lanjuti pada tahun 2022. Realisasi rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditidanklanjuti tahun 2022 mencapai 1.287 rekomendasi atau sebesar 60,71% dengan capaian realiasasi sebesar 110,38%.
2.	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan Eksternal	80%	82%	84%	84,13%	82%	84%	Tindaklanjut hasil pengawasan ekternal ini merupakan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Adapun target yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 80% dengan perhitungan kuantitas diasumsikan sebanyak 968 rekomendasi dari 1.210 rekomendasi hasil pemeriksaan eksteral oleh BPK yang harus ditindak lanjuti pada tahun 2022. Realisasi rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal oleh BPK yang ditidanklanjuti tahun 2022 mencapai 1.018 rekomendasi atau sebesar 84,13% dengan capaian realiasasi sebesar 105,16%.
3.	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja OPD Yang Ditindaklanjut	80%	85%	90%	60,18%	85%	90%	Tindaklanjut hasil evaluasi kinerja OPD ini merupakan hasil evaluasi SAKIP OPD yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun. Adapun target yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 80% dengan perhitungan kuantitas diasumsikan sebanyak 530 rekomendasi dari 663 rekomendasi hasil evaluasi Kinerja OPD yang harus ditindak lanjuti pada tahun 2022. Realisasi rekomendasi hasil evaluasi Kinerja OPD yang ditidanklanjuti tahun 2022 hanya mencapai 399 rekomendasi atau sebesar 60,18% dengan capaian realiasasi sebesar 75,22%
4.	Nilai AKIP	80	80,53%	81%	80,55	80,53%	81%	Tahun 2022 target yang ditetapkan dengan nilai AKIP sebesar 80. Relasiasi target yang dicapai sebesar 80,55 atau capaian sebesar 100,68%. Penilaian Akuntabilitas Kinerja Inspektorat dilakukan oleh APIP Inspektorat Propinsi Kepulauan Riau. Hasil penilaian SAKIP yag disajikan merupakan penilaian SAKIP Tahun 2021, dikarenakan penilain tahun 2022 akan dilakukan setelah ditetapkan Pedoman penilaian SAKIP OPD diformalkan yang selaraskan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Adapun dari hasil penilaian akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah telah mencapai target dengan tingkat capaian sasaran sebesar 100.68 %. Hasil evaluasi yang didapat dengan nilai 80,55 atau predikat "A" (Memuaskan).

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Inspektorat, maka dapat dirumuskan isu – isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat.

Perumusan isu – isu penting penyelengaraan tugas dan fungsi Inspektorat, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Inspektorat.

Isu – isu strategis Inspektorat Daerah dilihat dari dua sisi yang berbeda, sebagai berikut:

- **Internal**

  Inspektorat harus berbenah diri baik secara struktural fungsional organisatoris maupun secara kultural. Pengembangan SDM Aparat Pengawasan harus diproyeksikan dalam pengetahuan umum (*general knowledge*), teknis spesifik (*technical knowledge*), pengorganisasian tugas/pekerjaan (*Job Organizing*), wawasan administrasi (*administrative concept*), serta kemauan untuk selalu melakukan pengenalan diri (*self knowledge*). Dengan demikian diharapkan akan memperoleh SDM Aparat Pengawasan yang memiliki kualitas dan profesional. Berkaitan dengan teknis spesifik (*technical knowledge*), maka tenaga Fungsional Auditor memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan fungsi audit. Untuk itu Pengembangan Tenaga Fungsional Auditor baik dari segi kualitas maupun kuantitas perlu diprioritaskan sehingga pada waktunya nanti pengorganisasian tugas/pekerjaan (*Job Organizing*) menjadi lebih jelas dan terarah.

- **Eksternal**

  Kinerja Pemerintahan masih perlu ditingkatkan dan masih lemahnya pengendalian intern dari masing – masing unit kerja. Adapun hambatan (faktor eksternal) yang dihadapi yaitu, kelembagaan pelaksanaan urusan pemerintahan belum didukung Standar Pelayanan Minimal (SPM), kualitas dan kuantitas aparatur belum didasarkan pada muatan kompetensi yang memadai, Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan. Dalam upaya meningkatkan Kinerja Pemerintah bagi setiap unit kerja / organisasi pemerintah daerah secara efisien dan efektif, maka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun perlu diberlakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008. SPIP sejatinya adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam rangka itu Inspektorat Kabupaten Karimun sebagai aparat pengawasan internal berfungsi mendorong pelaksanaan SPIP pada setiap unit kerja melalui kegiatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagai tahun kelima dari pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Karimun periode 2021 - 2026, kebijakan yang diarahkan untuk mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, kondisi ini sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi.

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan oleh yeng berwenang untuk menjadi pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program atau kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai Misi, Visi, Tujuan dan sasaran organisasi dan terangkum dalam uraian sebagai berikut:

- Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan pada semua kegiatan;
- Peningkatan kinerja dan mutu layanan di semua aspek layanan *"public service"*;
- Tertib administrasi pemerintahan.

3.2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. VISI

Visi sebagai suatu keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dengan melalui suatu proses dan sistem yang terstandardisasi akan memacu suatu lembaga atau institusi untuk mencapai kondisi ideal yang diinginkan. Kondisi ideal yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Karimun telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2021. Untuk itu sebagai bagian integral dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun,

maka perwujudan Visi dan Misi Inspektorat diselaraskan dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah, di mana Visi tersebut adalah :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA"

B. MISI

Pernyataan Misi merupakan gambaran tentang kegiatan utama organisasi. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi guna mendukung visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Inspektorat Kabupaten Karimun yang diselaraskan dengan Misi Kabupupaten Karimun adalah Mewujudkan birokrasi yang professional, bersih dan melayani. (Terdepan dalam Pelayanan Birokrasi).

C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang dapat menggambarkan hasil akhir yang dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan target kualitatif yang dalam penetapannya mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki.

Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan kepemerintahan (*perfomance indicator*). Tujuan dapat menggambarkan arah strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan untuk lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua program dan kegiatan.

Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi, Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun menetapakan tujuan yaitu Mewujudkan Pelaksanaan Kepemerintahan Yang Bersih, Efesien, Efektif, Transparan, Profesional dan Akuntabel.

B. SASARAN

Sasaran yang dimaksud di sini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu, yang merupakan penjabaran dari tujuan. Penetapan sasaran didasari atas isu-isu strategis, analisis lingkungan internal dan eksternal, untuk menentukan faktor kunci keberhasilan, sejalan dengan proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi dana dan sumber daya ke dalam kegiatan atau operasional untuk pencapaian kinerja yang diinginkan.

Dalam penetapan sasaran juga dirancang dan diidentifikasikan indikator pencapaiannya, yaitu suatu ukuran tingkat keberhasilan perwujudan pencapaiannya pada priode tahun tertentu. Setiap indikator pencapaian sasaran disertai dengan targetnya masing-masing.

Adapun sasaran yang dapat diidentifikasikan untuk diwujudkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun dalam kurun waktu 2021–2026 sebagaimana dinyatakan dalam usulan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun dan sasaran yang dapat diidentifikasikan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

TABEL. 3.2

TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2025	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1.	Mewujudkan Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	64	Meningkatnya kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan Eksternal	65%
					- Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan Internal	88%
					- Persentase rekomendasi hasil Evaluasi Kinerja OPD yang ditindaklanjuti	95%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,55	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	- Nilai AKIP	81,23
					- Level Kematangan Manajeman Risiko	3,80

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan organisasi. kebijakan organisasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk program yang terangkum dalam uraian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Program ini ditujukan guna peningkatan kualitas pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional Internal Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

2. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah dan ditujukan untuk meningkatkan penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang berlaku.

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dispilin apartur, meningkatkan kualitas pelayanan kantor, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur di unit kerja.

B. KEGIATAN

Kegiatan merupakan tindakan nyata Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis organisasi dan tertuang dalam formulir. Adapun yang merupakan Kegiatan dan sub kegiatan Prioritas Tahun 2025 adalah sbb:

1. **Program Penyelenggaranan Pengawasan**
   a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
      - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
      - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
      - Reviu Laporan Kinerja;
      - Reviu Laporan Keuangan;
      - Pengawasan Desa;
      - Kerjasama Pengawasan Internal;
      - Monitoring Dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
   b. Penyelenggaran Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
      - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah
      - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
2. **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**

   Asistensi dan Pendampingan
      - Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
      - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
      - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
      - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

3. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;

- Pendidikan dan Pelathan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan Bangunan Kantor;
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan;
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
   - Rapat rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   - Pemeliharaan Mebel;
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Program – program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dijelaskan di atas diharapkan dapat menjawab tantangan dan tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Karimun dalam memberikan keyakinan yang memadai (assurance activities), memberikan peringatan dini (anti corruption activities), meningkatkan kualitas (consulting activities) penyelengaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

TABEL 3.4

RUMUSAN PERENCANAAN KEGIATAN DAN PENDAANAAN

TAHUN 2025

TUJUAN	SASARAN	KODEp					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF			
									2025		2026	
									Target	Rp	Target	Rp
Mewujudkan Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Akuntabel								Nilai LPPD	3,55		4.1	
								Indeks Reformasi Birokrasi	64		64	
	Meningkatnya kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah							Presentase penyelesaian tindak lanjut Hasil pengawasan Internal	65%		70%	
								Presentase penyelesaian tindak lanjut Hasil pengawasan Eksternal	88%		90%	
								Persentase rekomendasi hasil Evaluasi Kinerja OPD yang ditindaklanjuti	95%		100%	
		6	01	02			**Program Penyelenggaran Pengawasan**	Tingkat Maturitas SPIP	**nilai 3+**	**2,580,000,000**	**nilai 3+**	**12,680,000,000**
		6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Jumlah laporan Pengawasan Internal	**51 lap**	**2,230,000,000**	**51 lap**	**10,930,000,000**
		6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	1 laporan	450,000,000	1 lap	2,150,000,000
		6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan KeuanganPemerintah Daerah	1 laporan	800,000,000	1 lap	3,900,000,000

		6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 laporan	80,000,000	1 lap	380,000,000
		6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 laporan	100,000,000	1 lap	500,000,000
		6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	42 laporan	300,000,000	42 lap	1,500,000,000
		6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	300,000,000	3 Kesepakatan	1,500,000,000
		6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	1,000,000,000
		6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	Jumlah laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu	**5 lap**	**350,000,000**	**5 lap**	**1,750,000,000**
		6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 lap	50,000,000	2 lap	250,000,000
		6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3 lap	300,000,000	3 lap	1,500,000,000
		6	01	03			**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	Tingkat Kapabilitas APIP	**nilai 3+**	**900,000,000**	**nilai 3+**	**4,300,000,000**
		6	**01**	**03**	**2.02**		**Asistensi dan Pendampingan**	jumlah laporan asistensi dan pendampingan	**8 lap**	**900,000,000**	**8 lap**	**4,300,000,000**
		6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	20 Perangkaat Daerah	400,000,000	20 Perangkaat Daerah	2,000,000,000

		6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20 Perangkaat Daerah	150,000,000	20 Perangkaat Daerah	750,000,000
		6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 keg	100,000,000	2 keg	500,000,000
		6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	7 Perangkaat Daerah	250,000,000	7 Perangkaat Daerah	1,050,000,000
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik								**Indeks Pelayanan Publik**	**3,55**		**4.00**	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD							**Nilai AKIP**	**81,23**		**81,56**	
		5	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**79,5**	**7,813,326,000**	**80**	**7,775,000,000**
		5	**1**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**8 Dokumen**	**145,000,000**	**7 Dokumen**	**140,000,000**
		5	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen - Renja - Renstra - Renja RB	80,000,000	2 Dokumen-Renja- Renja RB	80,000,000
		5	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- LAPKIN - PK - Realisasi PK	65,000,000	3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	60,000,000

		5	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**6,433,940,000**	**1 Laporan**	**6,433,940,000**
		5	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600 orang bulan (50 orang x 12 bulan)	6,211,208,000	600 orang bulan (50 orang x 12 bulan)	6,211,208,000
		5	1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	222,732,000	168 orang bulan (14 orang x 12 bulan)	222,732,000
		5	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**17,000,000**	**1 Laporan**	**10,000,000**
		5	1	1	2	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	17,000,000	2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	10,000,000
		5	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**370,000,000**	**1 Laporan**	**320,000,000**
		5	1	1	2.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	30,000,000	60 Paket	30,000,000
		5	1	1	2.1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen - DUK	10,000,000	1 Dokumen - DUK	10,000,000
		5	1	1	2.1	5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen - Laporan Monev Disiplin Pegawai - Laporan Monev Kinerja Pegawai	10,000,000	2 Dokumen - Laporan Monev Disiplin Pegawai - Laporan Monev Kinerja Pegawai	10,000,000
		5	1	1	2.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	270,000,000	30 Orang	250,000,000

		5	1	1	2.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	50,000,000	20 Orang	20,000,000
		5	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**406,000,000**	**1 Laporan**	**405,910,000**
		5	1	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	6,000,000	10 Paket	5,910,000
		5	1	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	100,000,000	15 Paket	100,000,000
		5	1	1	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20,000,000	20 Paket	20,000,000
		5	1	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	20,000,000	10 Paket	20,000,000
		5	1	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20.000 Paket	40,000,000	20.000 Paket	40,000,000
		5	1	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	20,000,000	10 Dokumen	20,000,000
		5	1	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan	200,000,000	36 laporan	200,000,000
		5	**1**	**1**	**2.1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**246,236,000**	**1 Laporan**	**250,000,000**
		5	1	1	2.1	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Mebel Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				
		5	1	1	2.1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	70,000,000	10 unit	80,000,000
		5	1	1	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	106,236,000	8 unit	100,000,000

		5	1	1	2.1	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	70,000,000	2 unit	70,000,000
		5	**1**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**85,150,000**	**1 Laporan**	**85,150,000**
		5	1	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	
		5	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000
		5	1	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	65,150,000	1 Laporan	65,150,000
		5	**1**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**110,000,000**	**1 Laporan**	**130,000,000**
		5	1	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	50,000,000	4 Unit	50,000,000
		5	1	1	2.1	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	5 Unit	25,000,000	5 Unit	30,000,000
		5	1	1	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	25,000,000	5 Unit	30,000,000
		5	1	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	10,000,000	1 unit	20,000,000
							T O T A L				**11,293,326,000**	**11,305,000,000**

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Untuk menjamin agar kegiatan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka sebuah sistem perencanaan yang baik merupakan syarat mutlak untuk tercapainya tujuan. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah merupakan bagian dari rencana kerja tahunan yang menggambarkan prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Adapun prioritas pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah adalah berdasarkan kritieria sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran - sasaran pembangunan.
2. Memiliki sasaran - sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya.
3. Kegiatan tersebut sifatnya mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan.
4. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Renja Tahun 2024 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Beberapa harapan dengan adanya Renja 2024, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program dan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta terkordinasi sesuai dengan tujuan dan sasaran berikut berbagai indikator yang telah ditetapkan.
2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan Program dan Kegiatan di Inspektorat Daerah .
3. Mengakomodasikan berbagai aspirasi, perkembangan maupun perubahan yang terjadi, yang belum terprediksi dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun tahun 2021-2026.

Akhirnya, indikator keberhasilan pelaksanaan Renja akan sangat tergantung kepada komitmen dan konsistensi para pelaksana program dan kegiatan sehingga sasaran organisasi yang telah ditetapkan bersama dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

KECAMATAN KARIMUN

RENCANA KERJA TAHUN 2025

RENJA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Karimun tahun 2025 dapat terselesaikan. Dokumen Renja ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat tahun 2025 dapat dilaksanakan Implementasi dari Visi dan Misi Kabupaten Karimun, sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karna itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang, rencana kerja Kantor Camat Karimun Tahun 2025 diterbitkan sebagai normal, standar, prosedur, kreteria, dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Camat Karimun pada tahun 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Karimun tahun 2024 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Karimun untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat terutama masyarakat Kecamatan Karimun.

Dengan adanya Dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan beserta targetnya dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kinerja yang ada pada SKPD Kecamatan karimun, yang akhirnya mampu mewujudkan VISI dan MISI Kecamatan Karimun.

Kami menyadari Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karimun masih banyak kekurangannya oleh karena itu kami mohon masukan dari Stakeholder baik dari Pemerintah Kabupaten Karimun maupun Dinas Instansi lainnya serta pihak swasta dan masyarakat guna meningkatkan efektifitas Perencanaan kegiatan yang srategis Kecamatan Karimun dimasa yang akan datang.

Tanjung Balai Karimun, 31 Juli 2024

CAMAT KARIMUN

AGUNG JATI KUSUMA, SE
PEMBINA TK. I
NIP. 19721001 200502 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... 2
Daftar Isi..... 3
BAB I PENDAHULUAN..... 4
1.1 LATAR BELAKANG..... 4
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN..... 7
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 8
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAHUN LALU..... 11
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN..... 11
2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN KECAMATAN..... 17
2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN..... 18
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL OPD..... 24
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT..... 32
BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 33
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL..... 33
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN..... 34
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 39
BAB IV PENUTUP..... 43

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun selanjutnya disebut Renja Kecamatan Karimun pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Karimun, maka disusunlah Renja Kecamatan Karimun sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Renja Kecamatan Karimun memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang akan dijalankan Tahun 2024, serta program – program yang nantinya akan di laksanakan meliputi kegiatan ditingkat kecamatan yang mencakup seluruhnya.

Kecamatan Karimun berada diwilayah Kabupaten Karimun. Di Kecamatan Karimun terdapat 22 pulau besar dan kecil dengan luas area daratan 52,7 Km2 dan luas perairan 1352 Km2. Secara geografis, batas antara wilayah Kecamatan Karimun adalah terletak pada garis lintang antara 00º 35'25" LU - 01º02´30" LS dan pada garis bujur Utara 87º30'15" BT- 88º31'20" BT, serta berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura.Adapun batas–batas wilayah Kecamatan Karimun adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Berbatasan dengan Kecamatan Tebing dan Negara Singapura
Sebelah Selatan	:	Berbatasan dengan Kecamatan Buru
Sebelah Barat	:	Berbatasan dengan Kecamatan Meral dan kec. Kundur Utara
Sebelah Timur	:	Berbatasan dengan Negara Singapura dan Kec. Belakang Padang

Berdasarkan Peta topografi yang dikeluarkan oleh Bako Surtanal, keadaan Topografi Kecamatan Karimun bervariasi dari 0 meter sampai 478 meter diatas

permukaan air laut rata – rata (MSL). Keadaan topografi pada umunya rendah dan tidak memiliki gunung hanya beberapa bukit saja yang tidak begitu tinggi.

Pulau di Karimun Besar pada umunya landai kecuali di bagian utara. Disisi barat, selatan dan timur (bagian selatan) airnya relatif keruh dibandingkan dengan bagian utara. Tinggi air laut (pasang) berkisar antara 1,0 meter sampai dengan 1,5 meter dengan kondisi gelombang tidak begitu tinggi.

1. HUBUNGAN KERJA KECAMATAN

Dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan oraganiasi, Kecamatan yang dimanifestasikan oleh Camat melakukan hubungan kerja dengan berbagai instansi antara lain dengan :

1. Bupati melalui Sekretariat Daerah;
2. Dinas Daerah dan lembaga Teknis Daerah lainnya;
3. Pemerintah Desa;
4. Pemerintah Kelurahan;
5. Instansi vertical yang ada di Kecamatan;

Hubungan kerja Camat dengan Bupati sifatnya hierarkis, karena Camat bawahan dari Bupati. Di dalam pasal 66 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 1999 secara tegas disebutkan bahwa : “ Camat bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota”.

Hubungan Camat dengan Dinas Daerah atau Lembaga Teknis Daerah bersifat koordinatif dan teknis fungsional. Terlebih lagi apabila didalam organisasi Kecamatan terdapat seksi – seksi yang menjalankan fungsi dinas teknis dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hubungan Camat dengan Pemerintah Daerah bersifat koordinatif dan Fasilisatif, tidak lagi bersifat Hierarkis.Sedangkan Desa sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan mengatur dirinya sendiri (self governing society), secara organisator Desa dengan memiliki hubungan hierarkis dengan Kabupaten / Kota. Akan tetapi dilihat dari kepentingannya, terdapat hubungan yang bersifat hierarkis. Prinsip umum yang dipakai ialah bahwa kepentingan masyarakat yang lebih tunduk kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Unsur pimpinan Kecamatan (Uspika) Karimun yang diketuai oleh Camat Karimun telah dimanfaatkan sebaik – baiknya, terutama sekali dalam pengamanan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pertemuan–pertemuan Uspika dilaksanakan secara intensif bukan secara berkala atau isendentil dalam menangani permsalahan tertentu tetapi lebih dari itu forum –forum informal yang selalu dimanfaatkan untuk pertemuan Uspika ternyata sangat bermanfaat dan berdampak positif terhadap pengendalian wilayah serta penyelenggaraan Pemerintahan terutama Pemerintahan Umum.

Hubungan kerja Camat dengan Kepala Kelurahan (Lurah) sifatnya berbeda dengan hubungan Camat dengan Kepala Desa. Hubungan kerja Camat dengan lurah bersifat hierarkis, sebab Lurah adalah bawahan dari Camat, didalam pasal 67 ayat (5) disebutkan bahwa " Lurah bertanggung jawab kepada Camat ". Didalam hubungan kewenangan antara Camat dengan Lurah ada hal yang tidak lazim dilihat dari segi teoritis. Pada pasal 67 ayat (4) dikemukan bahwa :"Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari adr Camat". Prinsip utama dalam pendelegasian kewenagan yang dapat didelegasikan adalah kewenangan yang bersifat atributif, sedangkan kewenangan yang bersifat delegatif tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain, karena akan mempersulit dalam hal pembiayaan dan pertanggungjawabannya.

Hubungan kerja Camat dengan instansi vertikal dan Dinas Daerah yang ada di Kecamatan tidak otomatis bersifat koordinatif, karena Camat bukan lagi sebagai kepala wilayah sehingga PP Nomor: 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi vertical didaerah tidak berlaku bagi Camat. Koordinasi dapat dilakukan oleh Camat apabila ada delgasi kewenangan dari Bupati, tetapi hanya untuk Dinas Daerah saja, sedangkan terhadap instasni vertical yang ada di Kecamatan seperti Koramil, PLKB, Polsek dan lain sebagainya sifat hubungan kerja biasa.

2. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Para Lurah dan Kepala Desa secara berkala diwajibkan menyampaikan laporan Buku Harian setiap bulan kepada Bupati melalui Camat, Setelah diteliti dan dikoreksi jika dipandang perlu dengan petunjuk – petunjuk dan bimbingan seperlunya, selanjutnya buku harian dikembalikan kepada Kepala Desa / Lurah untuk dijadikan pedoman pelaksanaan tugas, dalam keadaan mendesak dan penting para kepala Desa/Lurah dipersilakan menyampaikan laporan isendentil baik dengan surat, lisan telepon atau komunikasi lainnya (Internet).

Rapat koordinasi rutin dengan para Kepala Desa/ Lurah dilakukan setiap 1 kali minimal dalam sebulan untuk membicarakan hal – hal yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Renja Kecamatan Karimun tahun 2024 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 107, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenTang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Karimun Nomor Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor : Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021- 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

➢ **Maksud**

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karimun Tahun 2025 adalah dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Karimun yang mendasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Karimun 2021 – 2026.

1. Menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit – unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Karimun untuk secara konsekwen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders)* tentang rencana pembangunan tahunan.
5. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Karimun dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

➢ **Tujuan**

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Karimun Tahun 2025, untuk memberikan arah, pedoman dan rujukan (referansi) bagi aparatur Kantor Kecamatan dalam melaksanakan rencana kegiatan jangka menengah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi yang mendasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Karimun 2021 - 2026.

1. Memantapkan terselenggaranya kegiatan yang mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Karimun dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran.
2. pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026.
3. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
4. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
5. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
6. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
7. Memudahkan para pemangku kepentingan *(stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
8. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
9. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan *(stakeholders)*.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Karimun di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renja Kecamatan Karimun dengan dokumen perencanaan lainnya, Kerangka penyempurnaan Renstra Kecamatan Karimun serta Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN LALU

Bab ini berisi kajian (review) terhadap hasil evaluasi, analisa kerja Pelayanan SKPD, isu-isu penting dan Review terhadap Rancangan Awal Renja Kecamatan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tugas pokok dan Renstra Kecamatan.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan atau catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya dari seluruh bab yang dimuat didalam Renja Kecamatan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, yang mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu Penyusunan Renja Kecamatan udah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rancangan Awal Renja Kecamatan tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Awal Renja Kecamatan tahun lalu, dan Realisasi Renstra Kecamatan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan.

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Berdasarkan Laporan Hasil Kinerja Kecamatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Terwujudnya Pelayanan Yang Baik	Indeks kepuasan Masyarakat	78 %	80 %
		Meningkatkanya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Karimun	Nilai AKIP Kecamatan Karimun	59,5 %	Sedang proses penilaian

Tabel Review Terhadap Renja Kecamatan Tahun lalu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Kecamatan Karimun**	**78**	**10.221.310.000**	**APBD**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**Kecamatan Karimun**	**5 Dokumen**	**14.564.000**	**APBD**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	Kecamatan Karimun	2 Dokumen	103.000.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan dan Dokumen yang disusun	Kecamatan Karimun	3 Laporan	102.000.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi	Kecamatan Karimun	3 Laporan	54.000.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**Kecamatan Karimun**	**2 Laporan**	**6.343.710.000**	**APBD**	

7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai di kecamatan Karimun	Kecamatan Karimun	700 orang bulan (50 orang x 14 bulan)	6.006.070.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Karimun	12 Dokumen	337.640.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**Kecamatan Karimun**	**10 Laporan**	**479.400.000**		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Karimun	1 Paket	16.400.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Karimun	1 Paket	281.000.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Karimun	1 Paket	21,000,000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan/Penggandaan yang disediakan	Kecamatan Karimun	1 Paket	40.000.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kecamatan Karimun	65 Laporan	121.000.000	APBD	RUTIN

7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**3 Laporan**	**401.200.000**		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang disediakan	Kecamatan Karimun	2 Unit	150.400.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang disediakan	Kecamatan Karimun	2 Unit	100.400.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung/Bangunan Lainnya	Kecamatan Karimun	2 Unit	150.400.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**2 Laporan**	**2.688.000.000**		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komuniasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kecamatan Karimun	12 Laporan	188.000.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kecamatan Karimun	13 Laporan	2.500,000,000	APBD	RUTIN

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**6 Laporan**	**177.000.000**		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala	Kecamatan Karimun	8 Unit	91.000.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang terpelihara secara rutin/berkala	Kecamatan Karimun	8 Unit	45.000.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara secara rutin/berkala	Kecamatan Karimun	10 Unit	41.000.000	APBD	RUTIN
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			3.01	**1.240.000.000**		
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			1 Laporan	**1.839.000.000**		

7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di Limpahkan	Kecamatan Karimun	1 Laporan	1.839.000.000	APBD	RUTIN
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**			67.000	**3.678.000**		
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**			2 Laporan	**3.678.000.000**		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kecamatan Karimun	18 Unit	1.839.000.000	APBD	RUTIN
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Karimun	2 Pokmas/Ormas	1.839.000.000	APBD	RUTIN
				TOTAL	**15.139.310.000**		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

Tugas Kantor Camat Karimun Kabupaten Karimun adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintah meliputi:

- Penyelenggarakan urusan Pemerintah Umum;
- Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- Membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- Melaksanakan Urusan Pemerintahan; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan.

Selain tugas tersebut diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

a. Rekomendasi
b. Koordinasi
c. Pembinaan
d. Pengawasan
e. Fasilitasi
f. Penetapan
g. Penyelenggaraan dan
h. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Tugas pokok Kantor Camat Karimun Kabupaten Karimun adalah melaksanakan kewenagan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menanggani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lainya yang dilimpahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kantor Kecamatan Karimun menyelenggarakan Fungsi:

a. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah;
b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seluruh Pegawai Kantor Camat Karimun diharapakan mengerti tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Karimun, untuk itu Peraturan daerah tentang Organisasi dan Tata kerja serta Peraturan Bupati tentang tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Karimun menjadi buku wajib bagi seluruh pegawai Kantor Camat Karimun, selain Perda dan Perbup tersebut diperbanyak, secara rutin pimpinan dalam berbagai kesempatan juga menekankan perlunya pemahaman akan tugas dan fungsi Kantor Camat Karimun kepada seluruh Pegawai.

Berkaitan dengan pelayanan, Kantor Camat Karimun telah membuat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang berfungsi sebagai sarana memudahkan proses pelayanan dan memangkas pelayanan birokrasi yang panjang. Dengan adanya PATEN, proses pelayanan lebih terarah dan dilaksanakan pada satu pintu sesuai dengan pelayanan administrasi pemerintahan yang ada.

- Indikator pelayanan tentang pertanahan ditandai dengan cepatnya proses registrasi surat- surat pertanahan dan minimnya sengketa tanah yang muncul.
- Indikator pelayanan umum ditandai dengan pelayanan surat menyurat yang cepat dan terukur serta tidak adanya komplain dari masyarakat atas keterlambatan proses pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Idealnya dalam dalam setiap pelayanan memiliki Standar Pelayanan Minimal serta Prosedur Operasional Standar yang bisa diukur dengan Indikator Kinerja Kunci. Kantor Camat Karimun sendiri saat ini telah menerapkan Standar Pelayanan Pemerintah (SPP) melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah minimnya aparatur khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dapat membantu serta menunjang tugas pelayanan yang ada pada Kantor Camat Karimun yakni pada masing-masing seksi serta subbag yang ada. Namun secara umum atau garis besarnya, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat saat ini dapat dikatakan baik dan memenuhi target kinerja yang diharapkan dan akan tetap menjadi prioritas untuk terus ditingkatkan semaksimal mungkin dimasa mendatang dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati / Wakil Bupati Bengkalis untuk mewujudkan Kabupaten Karimun yang Bermarwah Maju dan Sejahtera.

2.2.1. Penerapan Reward and Punishment

Untuk mencapai tujuan institusi (Kecamatan Karimun) perlu dilakukan Reward and Punishment hal ini bertujuan untuk memberi rangsangan motivasi bagi para pegawai yang memang melakukan fungsi dan tugasnya serta bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan diantaranya mengusulkan beberapa orang pegawai yang dianggap mampu dan layak untuk menduduki kapasitas jabatan yang dimiliki serta

mengusulkan untuk mendapat prediket pegawai teladan, disamping itu juga dilakukan pengusulan tanda jasa dalam masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.

2.2.2. Penerapan Punishment

Disisi lain disamping Reward juga dilakukan Punishment bagi Pegawai Negeri Sipil baik dari norma-norma agama, sosial dan yang paling penting adalah pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Punishment yang telah dilakukan yaitu pemberian teguran lisan terhadap pegawai yang melaksanakan tugas tidak tepat waktu dan pegawai yang tidak hadir tanpa izin. Adapun hasil pencapaian Kinerja pelayanan di Kantor Camat Karimun selama Tahun 2023 sesuai dengan table berikut:

Tabel 2.2.2

NO	INDIKATOR	SATUAN	SPM/ Standar nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					Realisasi capaian		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tingkat Kepuasan Masyaraat	%			78%	78.5%	79%	79.5%	80%	75%	78%	
2	Nilai AKIP Kecamatan Karimun	Nilai			59.50	59.65	59.75	59.85	60	38.7	Sdg dinilai	
3	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai			3.01	3.50	3.51	3.55	4.01	2.90	3.01	
4	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	%			63%	67%	71%	75%	79%	0	67%	

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karimun

2.3 . Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Secara umum penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD Kantor Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun berjalan dengan baik sesuai dengan uraian tugas dibagi habis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun terdapat beberapa hal yang kritis terhadap penyelenggaraan pelayanan ini adalah keterlambatan yang dirasakan masyarakat apabila ada permasalahan yang melibatkan beberapa pihak terkait.

Isu-isu penting adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010).

Adapun isu penting yang diperhatikan untuk Kecamatan Karimun adalah:

❖ **Rumusan Permasalahan Strategis yang Dihadapi Masa Kini**

A. Pelayanan Publik

Dalam bidang pelayanan publik ada beberapa isu strategis yang muncul di Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun diantaranya:

➢ Permasalahan strategi yang muncul adalah kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu ditingkatkan, hal ini dilakukan mengingat dengan kondisi masyarakat yang semakin kritis serta Cerda.Saat ini perlu dilakukannya transparansi, akurasi dalam pelayanan publik, ada beberapa permasalahan strategis yang dihadapi masa kini, yaitu :

a. Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan;
b. Pedoman pengelolaan daerah yang berubah-ubah aturan;
c. SDM Aparatur yang ada tidak sesuai kebutuhan.
d. Kecendrungan penurunan moralitas dan rendahnya keteladanan pimpinan di semua lapisan.
e. Dampak krisis finansial global.

➢ Harus adanya upaya peningkatan daya dukung infrastruktur pelayanan publik di Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun.

B. Kelembagaan Masyarakat

Dalam hal kelembagaan masyarakat saat ini di Kecamatan Karimun isu strategis yang timbul diantaranya adalah:

➢ Masih rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan, terutama dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif. Masyarakat masih berorientasi dengan Dana yang cukup banyak dimiliki oleh Pemda Kabupaten Karimun.

➢ Masih minimnya peran serta perusahaan swasta maupun daerah serta pelaku usaha lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam hal pembangunan terutama dari perusahaan/ pelaku usaha itu sendiri di Kecamatan Karimun.

- Sudah mulai pudarnya sifat kegotong-royongan ditengah-tengah masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik dalam hal pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan aset pemerintah.

C. Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam hal kualitas lingkungan hidup di Kecamatan Karimun ada beberapa isu strategis yang dapat ditangkap meliputi:

- Rendahnya kesadaran masyarakat atau perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini dapat terlihat dari seringnya terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Karimun.
- Masih belum optimalnya cakupan layanan dan pengelolaan persampahan di Kecamatan Karimun, hal ini dapat dilihat dengan masih minimnya operasional pelayanan persampahan, baru hanya sebatas wilayah perkotaan/ibu kota kecamatan dan itupun belum secara keseluruhan.
- Masih belum optimalnya pemeliharaan serta penggunaan sungai dan saluran drainase yang berada di Kecamatan Karimun. Hal ini dilihat dari seringnya terjadi banjir di wilayah Kecamatan Karimun ketika hujan dalam intensitas besar dan Air Pasang laut.
- Masih belum optimalnya perhatian terhadap pengembangan potensi di Kecamatan Karimun, khususnya pada Sektor Pariwisata Coastal Area dan Penginapan yang tersebar di wilayah Kecamatan Karimun.

D. Sektor sarana prasarana publik

Dalam sektor sarana prasarana pelayanan publik di Kecamatan Karimun ada beberapa isu strategis yang dapat muncul yakni:

- Kepadatan penduduk di beberapa wilayah Kecamatan Karimun yang menyebabkan perkembangan sarana dan prasarana di Kecamatan Karimun yang kurang memadai, serta lingkungan kumuh yang juga masih belum dapat diselesaikan permasalahannya.
- Masih minimnya sarana dan infrastruktur dasar seperti air bersih di beberapa titik daerah kumuh untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman dan sehat di Kecamatan Karimun sehingga masyarakat belum dapat merasakan pembangunan serta pelayanan secara maksimal dari pemerintah dan belum dapat mengembangkan roda perekonomian untuk berkembang lebih pesat lagi.

- **Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang Berpengaruh Pada Tupoksi Kecamatan**

Berdasarkan rumusan, permasalahan strategis yang dihadapi masa kini, diperlukan beberapa rumusan perubahan untuk mencapai tujuan pada lima tahun yang akan datang.

a. Tugas Pokok dan Fungsi kecamatan perlu penyesuaian karena merupakan SKPD sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004;
b. Perlu adanya beberapa perubahan berkaitan dengan kewenangan;
c. Perlu pemahaman bersama kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan khususnya oleh SKPD terkait;
d. Penyesuaian anggaran berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baru

❖ **Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang Perlu Dilakukan.**

a. Menambah jumlah pegawai yang berkualitas sesuai keahliannya;
b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya;
c. Menambah jumlah anggaran sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
d. Meningkatkan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat;
e. Peraturan Perundangan yang mendukung visi dan misi tidak berubah-ubah;
f. Menjadikan Kecamatan sebagai SKPD murni

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan yaitu sebagai berikut :

1. Terbatasnya Kapasitas Pemerintah Daerah

Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah ditunjukkan dari kurangnya pemahaman dan keterampilan pegawai di bidang-bidang tugas yang membutuhkan keahlian khusus, diantaranya adalah operator komputer, arsiparis, dan administrasi kependudukan. Sementara mutasi antar SKPD juga menjadi salah satu penyebab, karena kaderisasi menjadi terbatas dilakukan bagi pegawai di lingkungan Kantor Camat Karimun. Selain itu terdapat pula keterbatasan anggaran bagi pengembangan sumber daya manusia pegawai.

Keterbatasan kualitas adalah satu sisi, sedangkan keterbatasan kuantitas ada di sisi lainnya. Kurangnya jumlah aparatur yang mempunyai keadilan dibidangnya ini terutama dirasakan pada staf kantor camat umumnya dan kantor camat Karimun khususnya.

Minimnya penguasaan teknologi informasi juga menjadi satu keterbatasan mengingat penguasaan teknologi informasi menjadi prasyarat dasar bagi peningkatan pengetahuan dan efektivitas serta efisiensi kerja. Lemahnya penguasaan tentu diikuti dengan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan prinsip-prinsip serta teknologi e–

Government di kalangan aparatur pemerintahan. Perkembangan yang cepat dari teknologi informasi dan komunikasi belum ditangkap sebagai peluang dan kekuatan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, khususnya guna mengatasi sulitnya komunikasi daerah kepulauan.

Selain kapasitas sumber daya manusia, terdapat pula masalah terkait kelembagaan. Salah satu masalah kelembagaan yang terekam adalah masih dirasa belum jelasnya ketentuan-ketentuan daerah yang mengatur pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat. Camat dan Lurah bekerja melaksanakan tugas-tugas eksekutif, namun perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas-tugas itu dirasakan masih kurang, termasuk juga pelrindungan prosedural jika terdapat pemanggilan-pemanggilan Camat dan Lurah dari instansi-instansi lain.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Perkantoran

Masih dijumpai permasalahan mengenai sarana dan prasarana yang belum optimal, Fasilitas teknologi informasi juga belum optimal tersediakan padahal manfaatnya besar untuk menunjang kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Sejalan dengan usia alat/barang, maka kualitasnya pun semakin menurun sehingga banyak dibutuhkan penggantian atau pemeliharaan.

Belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belum banyak kerjasama antar daerah yang dilaksanakan dalam penyediaan pelayanan publik dan menangkap dampak *multiplier* positif (*spill over*) terutama di daerah perbatasan antar daerah, termasuk dengan kabupaten-kabupaten perbatasan di bagian selatan dan barat.

3. Kawasan Rawan Bencana

Pengertian kawasan rawan bencana adalah daerah yang pernah mengalami bencana atau daerah yang mempunyai potensi terjadinya bencana. Daerah rawan bencana di Kabupaten Karimun dapat diidentifikasi salah satunya dari kondisi morfologi wilayah, sifat fisik tanah dan batuan serta keadaan curah hujan terutama bencana banjir, Banjir terjadi disebabkan karena faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami dapat diidentifikasi dari keadaan morfologi wilayah yang berupa dataran, kerapatan dan jenis penggunaan lahan, curah hujan yang tinggi sehinggaketikaterjadinya hujan aliran sungai atau debit sungai akan meningkat/meluap. Faktor manusia ikut berpengaruh terhadap terjadinya banjir karena adanya penggundulan hutan di daerah hulu, sehingga aliran permukaan langsung menjadi aliran sungai. Banjir erat kaitannya dengan drainase permukaan tanah. Drainase di sini adalah drainase yang menunjukkan lamanya atau seringnya tanah tergenang air. Dengan demikian drainase ini sangat dipengaruhi oleh sifat sifat fisik tanah lainnya seperti lereng, tekstur tanah, konsistensi/porositas tanah. Daerah banjir dapat terjadi di dataran aluvial bekas rawa, daerah tersebut merupakan

tempat yang sering tergenang air. Tanggul sungai dan sempadan sungai yang sudah rusak dan tidak dapat berfungsi menahan luapan air, akan mempermudah aliran menyebar ke kiri kanan sungai.

Sebaran kawasan berpotensi banjir terdapat pada daerah yang mempunyai karakter pantai mangrove/rawa dan jenis tanahnya organosol/gambut. Kawasan tersebut di Pulau Karimun Besar yaitu di bagian Selatan Kecamatan Karimun dan Meral hampir tersebar di sepanjang pesisir pulau-pulau di Kabupaten Karimun.

Dalam Musrenbang yang diakan di Kecamatan Karimun beberapa Tahun terakhir ini banyak usulan dari masyarakat yang menjadi perioritas mengenai infrastruktur yang tujuan untuk menghindari Bencana Banjir (gorong-gorong, saluran Drainase dan semenisasi) yang sering terjadi di Kecamatan Karimun terutama daerah – daerah padat penduduknya, seperti di Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kelurahan Tanjung Balai, Kelurahan Sungai lakam Timur dan Kelurahan Sungai lakam barat hal ini haknya dapat lebih diperioritaskan Karena Kecamatan Karimun daerah untuk Karimun sebagai daerah Perdagangan dan Meral serta meral barat sebagai Daerah Industri.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Kecamatan Karimun yang tercantum pada RKPD 2024 menyesuaikan dengan regulasi terbaru terhadap program dan kegiatan untuk Tahun 2025;
2. Membuat perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dengan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Penyajian data dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Karimun yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Karimun yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah tertuang dalam RKPD tahun 2025;
5. Mengidentifikasi kesesuaian jenis program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Karimun antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Merumuskan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Karimun berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan.

Renja Kantor Camat Karimun Kabupaten Karimun Tahun 2025 telah sejalan dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025, adapun perubahan yang terjadi hanya pada besaran pagu anggaran dari masing-masing program dan kegiatan.

Adapun terjadinya perbedaan pagu anggaran tersebut terjadi disebabkan oleh perubahan standarisasi dari harga barang dan jasa serta honorarium kegiatan sehingga perlu dilakukan perubahan dari item masing-masing kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini mengisyaratkan perencanaan telah dilakukan dengan cukup baik dan sesuai kebutuhan yang diharapkan. Target kinerja tetap diharapkan 100% seperti halnya tahun sebelumnya.

Catatan penting yang perlu digaris bawahi adalah diharapkan berbagai program dan kegiatan dalam tahap selanjutnya hingga berbentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ini tetap sesuai dengan Renja SKPD. Adapun tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Reviu Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025
Kecamatan Karimun

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun rencana)				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	**Tingkat Kepuasan Masyarakat**		**79.5 %**	**9.254.253.000**	**PAD/DAU**	
	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Karimun	**Nilai AKIP Kecamatan Karimun**		**59.75**	**9.254.253.000**	**PAD/DAU**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kepuasan Masyarakat**		**79.5%**	**7.959.253.000**	**PAD**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**5 Dokumen**	**50.000.000**	**PAD**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Karimun	2 Dokumen - Renja - Renja RB	20.000.000	PAD	RUTIN
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Kecamatan Karimun	3 Laporan - Lapkin - Perjanjian Kinerja - Realisasi PK	20.000.000	PAD	RUTIN
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Karimun	2 Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	10.000.000	PAD	RUTIN

7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		2 Laporan	**6.207.533.000**		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Karimun	728 Orang (50 org x 14 bln)	6.087.533.000	DAU	RUTIN
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kecamatan Karimun	12 Dokumen	115.000.000	PAD	RUTIN
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Triwulanan/Semesteran/ SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Karimun	2 Laporan	5.000.000	PAD	RUTIN
7 01 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**		**2 Laporan**	**10.000.000**		
7 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Kecamatan Karimun	2 Laporan - Laporan Rekonsiliasi - Laporan Aset	10.000.000	PAD	RUTIN
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**		**3 Laporan**	**85.000.000**		
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Karimun	1 Paket	55.000.000	PAD	RUTIN

7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Karimun	1 Dokumen - DUK	10.000.000	PAD	RUTIN
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Karimun	50 Orang	20.000.000	PAD	RUTIN
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**		**10 Laporan**	**186.720.000**		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor dalam satu tahun	Kecamatan Karimun	1 Paket	17.400.000	PAD	RUTIN
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Karimun	1 Paket	50.000.000	PAD	RUTIN
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Karimun	1 Paket	22.000.000	PAD	RUTIN
7.01.01.2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Karimun	1 Paket	22.000.000	PAD	RUTIN
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pket barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Karimun	1 Paket	18.000.000	PAD	RUTIN
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah dokumen barang bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kecamatan Karimun	1 Dokumen	8.000.000	PAD	RUTIN
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket bahan/material yang disediakan	Kecamatan Karimun	1 Paket	10.000.000	PAD	RUTIN
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kecamatan Karimun	12 Laporan	14.320.000	PAD	RUTIN

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Karimun	75 Laporan	15.000.000	PAD	RUTIN
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kecamatan Karimun	12 Dokumen	10.000.000	PAD	RUTIN
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**		**3 Laporan**	**112.000.000**		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang disediakan	Kecamatan Karimun	20 Unit	25.000.000	PAD	RUTIN
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kecamatan Karimun	10 Unit	35.000.000	PAD	RUTIN
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kecamatan Karimun	2 Unit	32.000.000	PAD	RUTIN
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kecamatan Karimun	10 Unit	20.000.000	PAD	RUTIN
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang terpelihara**		**2 Laporan**	**1.225.000.000**		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dalam satu tahun	Kecamatan Karimun	12 Laporan	110.000.000	PAD	RUTIN
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan Umum dalam satu tahun	Kecamatan Karimun	13 Laporan	1.115.000.000	PAD	RUTIN

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terpelihara**		**6 Laporan**	**83.000.000**		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kecamatan Karimun	8 Unit	15.000.000	PAD	RUTIN
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	Kecamatan Karimun	8 Unit	10.000.000	PAD	RUTIN
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Kecamatan Karimun	10 Unit	15.000.000	PAD	RUTIN
7.01.01.2.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Kecamatan Karimun	5 Unit	20.000.000	PAD	RUTIN
7.01.01.2.09 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Kecamatan Karimun	10 Unit	15.000.000	PAD	RUTIN
7.01.01.2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranan dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kecamatan Karimun	10 Unit	8.000.000	PAD	RUTIN
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Mutu Pelayanan Publik**		**3.55**	**95.000.000**		

7.01.2 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan**		**1 Laporan**	**15.000.000**		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan	Kecamatan Karimun	1 Dokumen	15.000.000	PAD	RUTIN
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**		**1 Laporan**	**80.000.000**		
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkadengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Karimun	1 Laporan	80.000.000	PAD	RUTIN
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**		**75 %**	**1.200.000.000**		
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Laporan**		**2 Laporan**	**1.200.000.000**		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Kecamatan Karimun	16 Unit	720.000.000	DAU	RUTIN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan peberdayaan Masyarakat di kelurahan	Kecamatan Karimun	6 Pokmas/Ormas	480.000.000	DAU	RUTIN
				TOTAL	**9.393.067.000**		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sehubungan dengan kebijakan Kepala Daerah yang memberikan kesempatan kepada Kecamatan mengelola dana Infrastruktur dan kelembagaan memungkinkan diakomodirnya usulan kegiatan dari masyarakat.

Rancangan awal Renja Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun dibahas dalam pembahasan forum Perangkat Daerah. Renja Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Tahun 2025 tidak terdapat usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tugas utama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun dan arahan sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan.

Daftar rencana kegiatan prioritas Kecamatan Karimun tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran berikut:

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor Camat Karimun	Tingkat Kepuasan Masyarakat	7.959.253.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Karimun	Indeks Mutu Pelayanan Publik	95.000.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kantor Camat Karimun	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasaran dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	1.200.000.000	

BAB III
TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Tinjauan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

3.1.1. Visi Pembangunan

Kerangka **Visi Indonesia 2015** sebagaimana terdapat dalam RPJMN 2015-2019 adalah "**Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong**" dengan penjelasan sebagai berikut:

Kesejahteraan Rakyat, yakni terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Demokrasi, yakni terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

Keadilan, yakni terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia

3.1.2. Misi dan Agenda Pembangunan

Misi 1 : Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera

Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera mengandung pengertian yang dalam dan luas, mencakup keadaan yang mencukupi dan memiliki kemampuan bertahan dalam mengatasi gejolak yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam.

Misi 2 : Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi

Penguatan pilar-pilar demokrasi yang sehat, harus terus dibangun menuju demokrasi yang lebih matang dan dewasa. Perbedaan dan benturan kepentingan serta sikap kritis berbagai pihak terhadap pemerintah, merupakan realitas kehidupan demokrasi dan merupakan hak politik yang harus dihormati. Yang penting, semua itu harus tetap berada dalam bingkai konstitusi, aturan main dan etika yang harus sama-sama dijunjung tinggi sehingga stabilitas yang dinamis dan menampung berbaga perbedaan aspirasi, tetap dapat dijaga bersama. Karena itulah, mewujudkan

masyarakat yang demokratis dengan tetap berlandaskan pada aturan hukum terus dibangun melalui pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

Misi 3 : Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Keadilan dalam pembangunan, juga perlu ditunjukkan dengan pembangunan yang merata di semua bidang, baik pembangunan antara kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil yang diseimbangkan pertumbuhannya baik dengan mengacu pada system pembangunan perkotaan nasional maupun pembangunan di berbagai bidang yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keadilan dalam pemerataan pembangunan diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali serta untuk mengendalikan arus migrasi langsung dari desa ke kota-kota besar dan metropolitan, dengan cara menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha di kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, harus dilakukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi sejak tahap awal.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2015-2019, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2015-2019, yaitu:

Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi

Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi

Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan

Sebagaimana amanat dari Undang - Undang Nomor : 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah bahwa (RPJM Daerah) sebagai penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang Penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, program - program pembangunan dan kegiatan pokok.

Salah satu yang termuat didalam RPJMD tersebut adalah program Satuan Kerja Perangka Daerah (Renstra-SKPD) yang dalam penyusunannya mengacu kepada visi, misi dan program Kepala daerah. Sebagai salah satu SKPD yang ada di Kabupaten Karimun maka Kecamatan Karimun harus mempersiapkan Renja sebagai dokumen rencana Kerja Kecamatan 1 tahun akan datang.

Disini akan kami kemukakan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategi yang telah ditetapkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan di Kecamatan Karimun

3.2.1. Visi Kecamatan Karimun

- **"Terwujudnya Kecamatan Karimun Sebagai Pusat Perkembangan Ekonomi Kerakyatan Serta Peningkatan Iman dan Taqwa"**

Pernyataan Visi diatas dimaksudkan untuk menjadi Kecamatan Karimun Sebagai Pusat Ekonomi kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan praturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, Akuntabel dan partisifatif untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Karimun Kerja Amanah, Kerja Keras dan Kerja Cerdas disamping itu Kecamatan Karimun harus dapat menerapkan nilai-nilai Profesional yaitu :

1. Disiplin dan Bermoral tinggi
   Disiplin adalah bentuk kepatuhan dan ketaantan terhadap setiap peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan selalu berjalan lancar (tepat waktu, pengambilan keputusan, atribut dan lain-lain)
   Moral secara umum diartikan sifat atapun akhlak ahli tetapi tidak bermoral, berbahaya mementingkan diri sendiri.

2. Proaktif, Kreatif Dan Inovatif
   Proaktif dapat diartikan sikap tanggap, peduli dan cekatan
   Kreatif dapat di artikan kemampuan dalam menciptakan ide
   Inovatif keberadaan untuk melakukan perubahan atau pembaharuan

3. Berjiwa Wirausaha (Entreupreunership)
   Sikap untuk mendayagunakan potensi kemampuan yang dimiliki untuk mencapai hasil kerja yang optimal dengan dilandasi prinsif efisiensi dan efektifitas dalam

bekerja seorang yang berjiwa wirausaha selalu memegang prinsif termurah dari segi biaya, tercepat dari segi waktu, termudah dari segi metode, terbaik dari segi mekanisme dan terarah dari segi hasil.

4. Berorientasi Pada Prestasi

   Prestasi akan lahir dari kerja keras yang tak kenal lelah. Seorang yang berorientasi pada prestasi (achievement oriented) dalam bekerja berupayadengan segala daya agar hasil yang diperoleh meningkat bahkan prestisius (tidak asal-asalan).

5. Haus Akan Ilmu Pengetahuan

   Orang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan selalu berusaha menjadi sosok yang generalis (serba bisa) selalu memacu ilmu pengetahuan, mengasah keterampilan dan memperkuat keimanan, sehingga diperoleh kemampuan untuk memecahkan dan menanggulangi persoalan, baik sekarang maupun masa mendatang.

6. Berorientasi Ke Masa Depan

   Orang yang berfikir masa depan tidak bekerja spekulatif, bekerja dengan perencanaan yang matang, selalu menciptakan ide, gagasan, pemikiran dan hasil kerja yang bersifat kondisional, tidak situasional atau kebutuhan sesaat. Tidak hanya berpacu dengan waktu di masa depan, tetapi juga berlomba dengan kiat dan semangat.

7. Berdedikasi Dan Penuh Tanggung Jawab.

   Dedikasi adalah pengabdian tugas kewajiban yang dibebankan dan ukuran bagi seseorang yang mengabdikan dirinya demi keberhasilan tugas atau pekerjaan. Bagi seorang pegawai yang berdedikasi tinggi, keterbatasan sarana atau fasilitas kerja tidak dinilai sebagai hambatan yang menyebakan proses kegiatan kerja menjadi terhambat. Justru di tengah-tengah keterbatsan itu ia secara kreatif mampu mendayagunakannya untuk mencapai prodiktivitas kerja yang setinggi - tingginya. Seseorang yang berdedikasi, selalu mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi. Penuh tanggung jawab adalah sikap berani mengambil resiko atas pekerjaan yang dilaksanakannya serta konsekwen dalam mempertanggungjawabkannya.

3.2.2. Misi Kecamatan Karimun

Untuk mencapai Visi maka ada beberapa Misi yang harus dicapai dalam rangka terwujudnya Kecamatan karimun Sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi Kerakyatan serta Peningkatan Iman dan Taqwa yaitu :

1. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia Kecamatan Karimun;
2. Membudayakan " Kerja Amanah, Kerja Keras, Kerja Cerdas sebagai Penggerak Pembangunan;
3. Mengutamakan nilai-nilai agama sebagai Sumber Pembangunan.

3.3 Program dan Kegiatan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan Untuk mencapai visi, melaksakan misi memecahkan persoalan dan menangani isu Strategis daerah yang dihadapati.

Adapun bentuk **Program dan Kegiatan** dari Kecamatan Karimun untuk berjalannya misi guna mewujudkan visi, adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan;**
2. **Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;**
3. **Meningkatkan Kehidupan Beragama dan pemahaman Agama di tengah masyarakat;**
4. **Meningkatkan Kualitas hidup warga miskin;**
5. **Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban umum.**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang difermentasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun **Sasaran** yang akan dicapai Kantor Camat Karimun adalah :

Sasaran : Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator : - Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Karimun

Indikator : - Nilai AKIP Kecamatan Karimun

3.3.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitif, rasional dan komperensif, Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan guna mewujudkan tercapaianya tujuan dan sasaran Kantor Camat

Karimun. Adapun strategi yang di tetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah:

- Penyediaan fasilitas pelayanan perkantoran yang memadai dan kualitas;
- Menyempurnakan implentasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat;
- Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pengelola kegiatan agar capaian kinerja dapat ditingkatkan;
- Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kewilayahan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Karimun;
- Membangun iklim yang kondusif pada tataran pelaksanaan tugas bersama unit kerja lainya;
- Memperluas upaya cakupan pembinaan desa.

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi Program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Kantor Camat Karimun dalam rangka mendukung strategi tersebut maka kebijakan diarahkan pada:

- Peningkatan Kualitas pelayanan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM aparatur Kecamatan;
- Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan kewilayahan;
- Koordinasi dalam pelaksaan tugas dengan istansi terkait;
- Peningkatan ketersediaan data dan Informasi kewilayahan.

Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Rancangan Awal Renja Tahun 2025
KECAMATAN KARIMUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Rencana Tahun 2026	
					Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik									
	Sasaran : 1. Terwujudnya Pelayanan Yang Baik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.5	9,254,253,000	PAD	80.00	9,393,067,000
	Sasaran : 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kec.Karimun			Nilai AKIP Kec.Karimun	59.75	9,254,253,000	PAD	60.00%	9,393,067,000
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DOKUMEN	79.5	7,959,253,000	PAD	80	8,074,500,000
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	6 Dokumen	50,000,000	PAD	6 Dokumen	65,000,000
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen - Renja - Renja RB	20,000,000	PAD	2 Dokumen - Renja - Renja RB	25,000,000
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	20,000,000	PAD	3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	25,000,000
		7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	10,000,000	PAD	2 Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	15,000,000
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	2 Laporan	6,207,533,000	PAD	2 Laporan	6,236,000,000
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	728 orang bulan (50 orang x 14 bulan)	6,087,533,000	PAD	700 orang bulan (50 orang x 14 bulan)	6,110,000,000
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	115,000,000	PAD	12 Dokumen	120,000,000
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/Semesteran/ SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan Triwulanan	5,000,000	PAD	2 Laporan - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan Triwulanan	6,000,000
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	2 Laporan	10,000,000	PAD	2 Laporan	12,000,000
		7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan - Laporan Rekonsiliasi - Laporan Asset OPD	10,000,000	PAD	2 Laporan - Laporan Rekonsiliasi - Laporan Asset OPD	12,000,000
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	3 Laporan	85,000,000	PAD	3 Laporan	90,000,000
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	55,000,000	PAD	1 Paket	57,000,000
		7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen - DUK	10,000,000	PAD	1 Dokumen - DUK	12,000,000
		7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	20,000,000	PAD	55 Orang	21,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Rencana Tahun 2026	
					Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**10 Laporan**	**188,720,000**	**PAD**	**10 Laporan**	**201,000,000**
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17,400,000	PAD	1 Paket	19,000,000
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1 Paket	50,000,000	PAD	1 Paket	55,000,000
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	22,000,000	PAD	1 Paket	23,000,000
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	22,000,000	PAD	1 Paket	23,000,000
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18,000,000	PAD	1 Paket	18,500,000
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8,000,000	PAD	1 Dokumen	10,000,000
		7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	PAD	1 Paket	11,000,000
		7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	14,320,000	PAD	12 Laporan	15,000,000
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	15,000,000	PAD	75 Laporan	15,500,000
		7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	10,000,000	PAD	12 Dokumen	11,000,000
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan**	**3 Laporan**	**112,000,000**	**PAD**	**3 Laporan**	**131,000,000**
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	20 Unit	25,000,000	PAD	20 Unit	26,000,000
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 Unit	35,000,000	PAD	10 Unit	50,000,000
		7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	32,000,000	PAD	2 Unit	33,000,000
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	10 Unit	20,000,000	PAD	10 Unit	22,000,000
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan jasa**	**2 Laporan**	**1,225,000,000**	**PAD**	**2 Laporan**	**1,240,000,000**
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	110,000,000	PAD	12 Laporan	120,000,000
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1,115,000,000	PAD	13 Laporan	1,120,000,000
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terpelihara**	**6 Laporan**	**83,000,000**	**PAD**	**6 Laporan**	**99,500,000**
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	15,000,000	PAD	8 Unit	16,000,000
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	10,000,000	PAD	8 Unit	12,000,000
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	15,000,000	PAD	10 Unit	15,500,000
		7.01.01.2.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	20,000,000	PAD	5 Unit	21,000,000
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	15,000,000	PAD	10 Unit	20,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Rencana Tahun 2026	
					Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.
		7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	8,000,000	PAD	10 Unit	15,000,000
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Mutu Pelayanan Publik**	**3.55**	**95,000,000**	**PAD**	**4.01**	**118,567,000**
		7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan**	**1 Laporan**	**15,000,000**	**PAD**	**1 Laporan**	**20,000,000**
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	15,000,000	PAD	1 Dokumen	20,000,000
		7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	**1 Laporan**	**80,000,000**	**PAD**	**1 Laporan**	**98,567,000**
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	80,000,000	PAD	1 Laporan	98,567,000
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**	**75%**	**1,200,000,000**	**DAU**	**75%**	**1,200,000,000**
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Laporan**	**2 Laporan**	**1,200,000,000**	**DAU**	**2 Laporan**	**1,200,000,000**
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	720,000,000	DAU	16 Unit	720,000,000
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/Ormas	480,000,000	DAU	12 Pokmas/Ormas	480,000,000
TOTAL PAGU ANGGARAN						**9,254,253,000**			**9,393,067,000**

Tanjung Balai Karimun, 04 Januari 2024
Camat Karimun

AGUNG JATI KUSUMA, SE
NIP. 19721001 200502 1 004

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Karimun tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2025 sebagai acuan bagi Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun yang berisikan program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Mengingat keterbatasan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja tahun 2025 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang pada Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun baik sekretariat maupun seksi-seksi. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan rapat koordinasi dan observasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya.

Adapun Rencana Kerja berdasarkan program dan kegiatan, output, outcome, pagu indikatif dan sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun tahun 2025 sebagaimana terlampir.

BAB IV
P E N U T U P

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kantor Camat Karimun Tahun 2025 ini disusun berdasarkan visi misi Kecamatan Karimun yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati / Wakil Bupati Bengkalis yang tertuang dalam Renstra yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karimun. Rencana Kerja yang merupakan perencanaan satu tahun ke depan dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Karimun Untuk menjamin keberhasilan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan implementasi dari Rencana Startegis (Renstra) maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut ini:

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan direncana kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparatur dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi;
3. Rencana Kerja Kantor Camat Karimun selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun kedepan bagi seluruh jajaran Kantor Camat Karimun

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kantor Camat Karimun tahun anggaran 2025 ini disampaikan kepada Bupati Bengkalis sebagai wujud pertangungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Karimun dan sebagai bahan masukan guna menetapkan kebijakan pada masa yang akan datang.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini dibuat dalam rangka memenuhi amanat peraturan yang berlaku, renja SKPD ini juga harus didukung penganggaran dari Pemerintah daerah dan diharapkan sesuai dengan usulan program dan kegiatan yang diusulkan. Jika usulan ini disesuaikan atau dirasionalkan supaya tidak mengubah hal-hal yang menjadi substansi dari yang diusulkan. Jika terdapat perbedaan persepsi antara SKPD dengan TAPD diharapkan komunikasi yang intens sebagai jalan penyelesaian.

Apa yang diusulkan diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan. Kiranya Rencana Kerja Kantor Camat Karimun Tahun Anggaran 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan memberikan informasi secara transparan kepada stakeholder sehingga dapat memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kantor Kecamatan Karimun dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati / Wakil Bupati Bengkalis untuk mewujudkan Kabupaten Karimun yang Bermarwah Maju dan Sejahtera.

CAMAT KARIMUN

AGUNG JATI KUSUMA, SE
PEMBINA TK. I
NIP. 19721001 200502 1 004

RENCANA KERJA

TAHUN 2025

JALAN LETJEN SUPRAPTO SUNGAI RAYA
TELP. (0777) 361393 KECAMATAN MERAL
KABUPATEN KARIMUN

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim,

Alhamdulillah Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Tahun anggaran 2025. Sebagaimana dimaklumi, bahwa salah satu capaian Visi Kabupaten Karimun adalah terwujudnya Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan Ekonomi berbasis Maritim yang terdepan berlandaskan Imam dan taqwa. Visi tersebut perlu ditindak lanjuti dengan sungguh-sungguh oleh semua OPD sebagai kebijakan implementatif, termasuk di dalamnya Kecamatan Meral.

Rencana Kerja Kecamatan Meral merupakan komitmen pimpinan dan seluruh staff Kecamatan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Kami menyadari Dokumen Renja ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasa yang ada, kami berharap Renja ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan di Pelayanan Masyarakat Kabupaten Karimun. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat dan Negara, akhir kata kami ucapkan terima kasih.

Meral Karimun , 2025

CAMAT MERAL

R.NOVI YOHANDRI, S.STP, M.AP
NIP.19861103 200602 1 001

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN **4**

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI RFENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA **11**

2.1 Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan 16

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan 24

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal 25

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **30**

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 30

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 30

3.3 Program dan Kegiatan 31

BAB IV RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **32**

4.1 Table Renja Kecamatan Meral TA 2023 32

BAB V PENUTUP 39

5.1 Penutup 39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja, dalam hal ini Renja Kecamatan Meral, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Meral merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Meral, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembanguan Daerah Kabupaten Karimun.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan harus mencakup 5 pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, di mana dengan adanya pemilihan kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kandidat kepala derah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan;
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah;
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan Pembangunan harus melibatkan masyarkat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan;
4. Pendekatan Top-Down (atas-bawah) yaitu bahwa penyusunan perencaanaan pembangunan harus memperhatikan program-program jenjang pemerintahan diatasnya;
5. Pendekatan Bottom-Up (bawah-atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintahan dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Bottom Up diseleraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Kecamatan Meral tahun 2022 didasarkan pada ketentuaan ketentuan sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Natuna, Kabupaten Kuantan singingi dan Kota Batam (Lembar Negara tahun 1999,Nomor 181,tambahan lembaran Negara nomor 3902) yang telah diubah bebeerapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2008 tentang perubahan Ketiga atas Udnang-Undang 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan,Kabupaten rokan hulu,Kabupaten natuna,Kabupaten Kuantan singingi dan kota Batam (Lembaran Negara tahun 2008, nomor 107, Tambahan lembaran Negara nomor 4880);
2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);

4. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sisitem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104,tambahan lembaran Negara republikj Indonesia nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang system Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indoensia tahun 2006 nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tagun 2006 Nomor 97,Tambahan lembaran Negara Republik Indoensia nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentnang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah,Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah,Kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemrintahan Daerah kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daeah;
14. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 19 tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 nomor 19);
16. Peraturan daerah Kabupaten Karimun nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tahun 7 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) kabupaten karimun tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah kebuapten Karimun tahun 207 nomor & ,tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3)

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten karimun Tahun 2016-2021 (Lembaran daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 8,Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 9 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun tahun Anggaran 2018
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 70)
22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 69.A Tahun 2017 tentang Revisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 74)
23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Penetapan Revisi Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor 71.
24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

- **Maksud**

Adapun maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Meral adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Meral untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- **Tujuan**

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Meral Tahun 2024 adalah guna merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan serta tugas dan fungsinya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pada Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja perangkat daerah sudah disahkan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah Tahun lalu dan realisasi renstra perangkat daerah, Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan / realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
2. Realisasi program kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
3. Realisasi program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau tidak terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah tabel realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan disesuaikan dengan format halaman terlampir.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nopmor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja. Jika perangkat daerah bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang diuji, maka setiap perangkat daerah perlua terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standart pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan ;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam Penyelengggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program Nasional/Internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan perangkat daerah ;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancanan awal RKPD misalnya terhadap rumusan program dan

   kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan giatan cocok namun besarnya berbeda

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Deskripsi untuk mengisi sub-sub ini mengacu pada kertas kerja bagian telaah terhadap kebijakan nasional.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Bagian ini berisikan mengenai penjelasan :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya;
4. Tabel rencana program dan kegiatan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan atau catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya dari seluruh bab yang dimuat dalam Renja Kecamatan besisikan uraian penutup berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1.1 Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah

Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Renstra Kecamatan Meral (Renstra 2021-2026), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2024 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Meral sebesar **Rp. 8.467.031.177** ***(Delapan milliar Empat Ratus Enam puluh Tujuh Juta tiga Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh rupiah)*** yang terdiri atas belanja langsung sebesar **Rp. 4.998.002.836.** ***(Empat milyar Sembilan ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ribu Delapan Puluh Tiga Enam Rupiah)*** dan belanja tidak langsung sebesar **Rp. 3.469.028.341** ***(Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu rupiah)***. Dari plafon anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. **8.467.031.177** ***(Delapan milliar Empat Ratus Enam puluh Tujuh Juta tiga Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh rupiah)*** atau mencapai **92,67%** dengan rincian realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp**. 3.998.002.836.** ***(Empat milyar Sembilan ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ribu Delapan Puluh Tiga Enam Rupiah)*** dan realisasi belanja langsung sebesar Rp. **3.469.028.341** ***(Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu rupiah)***. terdiri dari 2 program dengan 6 kegiatan yang terbagi menjadi 14 sub kegiatan. Tidak terserapnya anggaran keseluruhan antara lain adanya selisih pembayaran gaji dan tunjangan ASN, belanja jasa tenaga administrasi, dan pelaksanaan adminisrasi umum perangkat daerah dengan pagu anggaran; pada jabatan eselon IV yang kosong, serta yang purna tugas.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Meral tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Meral, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Meral tahun berjalan (tahun 2024).

Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Meral sampai dengan tahun 2022, disajikan sebagaimana tabel 2.1 dihalaman terlampir:

Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

KECAMATAN MERAL KABUPATEN KARIMUN

Periode Pelaksanaan : Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2024

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Meral

No.	Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2021 s/d 2026) - Ambil di Aplikasi SIPD, hanya progam, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di DPA Tahun 2022	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output) (Renstra 2022 s/d 2026)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)						Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Anggaran 2022												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3					4	5	6	7		8		9						I			II			III			IV			14 = 10+11+12+13		15 = 14 / 9 (Pergeseran 1) x 100%		16 = 8 + 14		17=16/7x100%		17
														Renja		APBD Murni		APBD-P		10			11			12			13												
										K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	F	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec.Meral	7					Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				35,959,199,000.00			3.01	8,400,000,000.00		6,510,040,487.00		7,254,687,598.00	3.01		1,288,222,072.00			1,851,047,430.00			1,760,483,531.00			1,947,271,394.00	3.01	6,847,024,427	0.03	105.18	0	6,847,024,427.00	0	19.04	KECAMATAN MERAL
		7	01				Bidang Urusan Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan				35,959,199,000.00			57	8,400,000,000.00		6,510,040,487.00		7,254,687,598.00			1,288,222,072.00			1,851,047,430.00			1,760,483,531.00			1,947,271,394.00	0	6,847,024,427	0.00	105.18		6,847,024,427.00	0.00		

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:

Keterangan :

K	:	Capaian Kinerja Indikator Program dan Kegiatan
F	:	Progress Fisik Program dan Kegiatan (%)
Rp	:	Realisasi Keuangan (dalam rupiah)

Tanjung Balai Karimun,
Juli 2024
CAMAT MERAL

R. NOVI YOHANDRI,
S.STP.M.AP
NIP.19861103 200602 1 001

| | | |

1. **Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.**

   Kecamatan Meral tidak ada Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2024.

2. **Realisasi Program/Kegiatan yang Telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.**

   Pada Tahun 2024 Kecamatan Meral dapat merealisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

No.	Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun	Rencana Aksi	KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		
					TAREGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	78	Membuat Koesioner terhadap pelayanan masyarakat			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	Dokumen renja dan dokumen RB	100.00%	95.59%	95.59%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	2 Laporan	Pembayaran gaji ASN dan lainnya	100.00%	90.19%	90.19%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	5 Laporan	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	100.00%	99.92%	99.92%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan	2 Laporan	Pengadaan kebutuhan kantor dan gaji honorer	100.00%	94.24%	94.24%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah yang dipelihara	2 Laporan	Penyediaan akomodasi kendaraan dinas	100.00%	90.16%	90.16%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	3.01	Nilai			
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan	1Laporan	Melaksankan kegiatan urusan daerah bawahan seperti mtq, musrenbang dll	100.00%	99.58%	99.58%

3. **Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yangdirencanakan.**

Kecamatan Meral tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2024.

4. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan**

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja, penetapan anggaran kas sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan.

5. **Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra KecamatanTebing**

Dengan adanya capaian program Renstra Perangkat Daerah maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terencana dan teranggarkan, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik bisa tercapai.

6. **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam hal perencanaan, pengganggaran baik itu Kasubbag PRK dan staf yang menangani perencanaan dan penganggaran serta para pejabat eselon III, sehingga capaian target kinerja program/kegiatan lebih optimal.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode							Kondisi kinerja pada Akhir periode
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	70	75	78	78,5	79	79,5	80	80
AKIP Kecamatan Meral	Nilai	56,86	53	57	57,5	58	58.5	59	59
Indeks Pelayanan Publik	Nilai	2,75	2,90	3,01	3,50	3,51	3,55	4,00	4,00
Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Persen	42,86	41.67	92	92	92	92	92	92

1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

Pemerintah Kecamatan Meral merupakan pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman ketertiban, pelayanan umum dan pemberi pelayanan administrasi ditingkat Kecamatan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Meral menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pemerintahan, pembangunan dan masyarakat diperlukan beberapa upaya serta tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut ini digambarkan table analisis pencapaian kinerja Kecamatan Meral antara lain sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021	2022
1	AKIP Kecamatan Meral	56.86	53	57
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	75	78

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Presentase Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Meral, 78 dan realisasi sebesar 78,3 (B). Kategori Pelayanan **BAIK**, maka memerlukan peningkatan baik kuantitas dan kualitas SDM maupun sarana dan prasarana penunjang (peralatan kantor maupun kebijakan internal).

1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Meral melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai visi dan Misi melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan perlu dipahami terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut :

2.3.1. Reformasi Birokrasi atau Penataan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pelayanan yang prima langkah strategis yang ditetapkan SKPD Kecamatan Meral adalah :

a. Menyiapkan petugas pelayanan yang terampil
b. Memberikan kesempatan petugas pelayanan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
c. Mendorong untuk bekerja yang professional dengan memberikan penghargaan bagi petugas yang disiplin dan berprestasi serta memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan;
d. Memberikan insentif bagi petugas pelayanan.

2.3.2 Peningkatan sarana dan prasarana

Untuk menunjang pelayanan yang baik diperlukan sarana dan prasarana sebagai berikut :

a. Menyediakan tempat pelayanan yang mudah didapat oleh pelanggan;
b. Menyediakan papan informasi mengenai mekanisme atau tata cara dan prosedur pelayanan;
c. Melengkapi perangkat dan peralatan yang canggih untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan;
d. Menyediakan pengaduan masyarakat melalui media elektronik (email, teleprone, faximile)

2.3.3. Upaya-upaya lain yang perlu dilakukan

Langkah dan upaya sangat diperlukan demi kemajuan suatu organisasi. Berikut ini upaya yang harus dilakukan di Kecematan Tebing antara lain sebagai berikut :

a. Sosialisasi dan memberi informasi kepada masyarakat setiap ada kegiatan dan pertemuan warga mengenai sistem pelayanan di Kecamatan Meral;
b. Memberikan informasi dan penekanan kepada kepala desa/kelurahan melalui komperensi untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam pelayanan di tingkat Desa/Kelurahan;
c. Menyederhanakan prosedur pelayanan dengan tetap mengedepankan aturan yang telah ditetapkan;
d. Menanggapi setiap ada pengaduan masyarakat 1 kali 24 jam untuk segera diselesaikan.

1.4 Review Terhadap Rancangan Awal

Rancangan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2024 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana Kerja Kecamatan Meral Tahun 2024 yang memuat usulan program dan kegiatan Tahun 2024 yang terdiri dari tiga program dan 11 kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Meral Tahun 2024

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KECAMATAN MERAL

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
A	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tebing	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 35,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tebing	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 13,824,000	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tebing	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp 30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tebing	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp 16,554,500	
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										

1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tebing	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560 Orang (40 org x 14 bln)	Rp 3,600,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tebing	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560 Orang (40 org x 14 bln)	Rp 3,996,213,039	
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Tebing	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp 180,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Tebing	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp 122,058,000	
C	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tebing	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 6,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tebing	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 3,001,000	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tebing	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 195,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tebing	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 84,990,200	
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Tebing	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 8,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Tebing	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 11,803,000	

4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tebing	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 15,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tebing	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 9,157,000	
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tebing	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan Rapat 50 Laporan SPPD	Rp 60,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tebing	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan Rapat 50 Laporan SPPD	Rp 120,662,000	
D	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tebing	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 80,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tebing	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 84,859,754	
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tebing	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Rp 1,720,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tebing	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Rp 1,057,900,000	
E	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tebing	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Rp 5,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tebing	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Rp 6,994,000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tebing	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Rp 5,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tebing	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Rp 29,997,000	
F	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**										
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tebing	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	Rp 1,140,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tebing	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	Rp 981,314,600	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renja SKPD.

Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kabupaten/Kota

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien , sehingga misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi dapat terwujud dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan fungsi kecamatan dalam kurun waktu hingga tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan keputusan Bupati Karimun Nomor 123-B.b Tahun 2016;
b. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundangan serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang telah mengalami dua kali perubahan terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
d. Meningkatkan kualitas kinerja kepala seksi yang berhubungan secara langsung dalam pencapaian visi dan misi Kecamatan;
e. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan sesuai visi, misi kecamatan dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Meral melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
f. Meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pembangunan;
g. Meningkatkan potensi sumber daya manusia dan ekonomi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah bahwa RPJMD Daerah sebagai jabaran visi misi kepala daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional program-program pembangunan dan kegiatan pokok.

Salah satu yang termuat di dalam RPJMD tersebut adalah program satuan kerja perangkat daerah (Renstra-SKPD) yang dalam penyusunannya mengacu kepada visi misi dan program kepala daerah.

Sebagai salah satu SKPD yang ada di Kabupaten Karimun maka Kecamatan Meral harus mempersiapkan Renja sebagai Dokumen Rencana Kerja Kecamatan 1 tahun yang akan datang.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan organisasi. Kegiatan merupakan tindakan nyata Kecamatan Meral dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Program dan kegiatan Kecamatan Meral Tahun 2024 sebagai berikut :

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Koordinasi dan

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan/ Material

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Mebeleur

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Pengadaan Aset Tak Berwujud

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

b. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN ANGGARAN 2024

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHUN	
					2024	
					TARGET	RP (000)
1	2	3		5	10	11
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				**Indeks Pelayanan Publik (IPP)**	**3.55**	**8,783,698,000**
	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kec. Tebing			Nilai AKIP Kecamatan Meral	63	8,783,698,000
		7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	79.5	**6,890,500,000**
		7 01 01 2 01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen***	***8 Dokumen***	***110,000,000***
		7 01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen - Renja - Renstra - Renja RB	40,000,000

		7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	3 Laporan - Lapkin	35,000,000
									dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Perjanjian Kinerja (PK) - Realisasi PK 2 Laporan	35,000,000
		7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Evaluasi Renja - Evaluasi RB ***3 Laporan***	***3,836,500,000***
		7	***01***	***01***	***2***	***02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan***	560 Org Bln	3,629,000,000
		7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	(40 Org x 14 Bln) 12 Dokumen	190,000,000
		7	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Laporan	17,500,000
		7	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan Triwulanan ***1 Laporan***	***35,000,000***
		7	***01***	***01***	***2***	***03***		***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan***	2 Laporan	35,000,000
		7	01	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan	- Laporan Rekonsiliasi	

| | | |

		7	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	70 Laporan Rapat	75,000,000
`		7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan SPPD	
										1 Dokumen ***7 Laporan***	10,000,000 ***315,000,000***
		7	01	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40 Unit	60,000,000
		7	***01***	***01***	***2***	***07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Laporan rencana kebutuhan barang***	40 Unit	45,000,000
		7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	12 Unit	45,000,000
		7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	35,000,000
		7	01	01	2	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan lainnya yang disediakan	3 Unit	40,000,000
		7	01	01	2	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	6 Unit	55,000,000
		7	01	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	35,000,000
		7	01	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana yang disediakan	***4 Laporan***	***1,855,000,000***
		7	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Laporan	10,000,000
		7	***01***	***01***	***2***	***08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan jasa***	12 Laporan	85,000,000

		7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan		
		7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan 13 Laporan	35,000,000 1,725,000,000
		7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		
		7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	***6 Laporan*** 12 Unit	***127,000,000*** 8,000,000
		7	***01***	***01***	***2***	***09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terpelihara***	7 Unit	8,500,000
		7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	50,000,000
		7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	30,000,000
		7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	15,500,000
		7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	15,000,000

		7	01	01	2	09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.55	**1,203,198,000**
		7	01	01	2	09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	***1 Laporan***	***40,000,000***
										2 Dokumen	40,000,000
		7	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	***1 Laporan***	***1,163,198,000***
		7	***01***	***02***	***2***	***01***		***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Jumlah Laporan***	8 Laporan	1,163,198,000
		7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80.00%	**690,000,000**
		7	***01***	***02***	***2***	***04***		***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	***Jumlah Laporan***	***2 Laporan***	***690,000,000***
		7	01	02	2	04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Di limpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10 Unit	458,000,000
		7	01	03				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	5 Pokma	232,000,000
		7	***01***	***03***	***2***	***02***		***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***	***Jumlah Laporan***	**3.55**	**8,783,698,000**

		7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
		7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	63	8,783,698,000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Meral Kabupaten karimun Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Meral Tahun 2021-2026, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Karimun serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Meral Kabupaten karimun yang merupakan perencanaan program dan kegiatan satu tahun kedepan dibuat secara efektif dan partisipatif, dengan dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Meral untuk menjamin keberhasilan program/kegiatan Renja (program tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra SKPD (program 5 tahun), maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rencana Kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Meral selain menjadi program/kegiatan selama tahun 2025 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk perencanaa pada tahun berikutnya.

Rencana program di Kecamatan Meral tahun 2025 merupakan program Pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kerja aparatur Kecamatan Meral pada periode 2024. Dalam pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Meral yang pelaksanaannya bersifat efisien, tepat sasaran dan berdaya guna serta berhasil guna sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Karimun yang ditetapkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Meral selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Meral, Renja maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Tebing yang ditetapkan. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Meral sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja. Perangkat Daerah RENJA tahun 2025, dengan berdasarkan azaz perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan, pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi untuk melaksanakan kegiatan yang akan datang guna meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan.

Meral Karimun , 2025

CAMAT MERAL,

R.NOVI YOHANDRI, S.STP, M.AP
NIP.19861103 200602 1 001

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN MERAL BARAT

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

KECAMATAN MERAL BARAT

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua pada akhirnya penyusunan Buku Laporan Rencana Kerja Kecamatan Meral Barat Tahun 2023 ini dapat diselesaikan. Penyusunan buku laporan ini sebagai bahan laporan Camat kepada Bupati dalam hal pelaksanaan kebijakan program prioritas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan bidang Kemasyarakatan dalam mengukur rencana kinerja selama tahun 2023 pada Unit Kantor Camat Meral Barat. Pemanfaatan buku ini disamping sebagai bahan pelengkap kinerja Camat Meral Barat beserta seluruh staf, juga sebagai penyusunan data dasar, data prosesdan data dampak atau data hasil yang dikompilasi secara terstruktur berdasarkan seksi-seksi dan sub bagian di lingkungan Kecamatan Meral Barat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa, tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, penyusunan buku ini tidak dapat diselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan buku ini.

Kami juga menyadari, bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan yang harus disempurnakan, oleh sebab itu saran dan masukan selalu kami harapkan demi kesempurnaan di tahun-tahun mendatang. Sebagai akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Meral Barat, Januari 2025

CAMAT MERAL BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KEC.MERAL.BARAT

ISNAIDI,S.Pd,MMPd
NIP. 19760627 19980810808

DAFTAR ISI

BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.3.1 Maksud	6
	1.3.2 Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	**EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**	8
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu	8
	2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan	8
	2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu	14
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
	2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
	2.4 Review terhadap rancangan RKPD	20
	2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**	35
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
	3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	37
	3.3 Program Dan Kegiatan Prioritas	37
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	44
	4.1 Kebijakan Umum	44
	4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan	44
BAB V	**PENUTUP**	51
	LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Gambar 1.2 Tindak Lanjut Renja Dalam Penyususnan APBD

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Tahun Berjalan Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi hasil Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Tahun Berjalan Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun
Tabel 2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun
Tabel 2.4.1	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Karimun
Tabel 2.5.1	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan/ Masyarakat di Kecamatan Meral Barat tahun 2023
Tabel 3.1	Kode, Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kecamatan Meral Barat Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kecamatan Meral Barat Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif, yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu, dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa: *failing to plan is planning to fail*; gagal merencanakan samadengan merencanakan kegagalan.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasional, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah adalah rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk lebih jelasnya Keterkaitan Dokumen Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat pada gambar 1.1.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Gambar 1.1.
Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

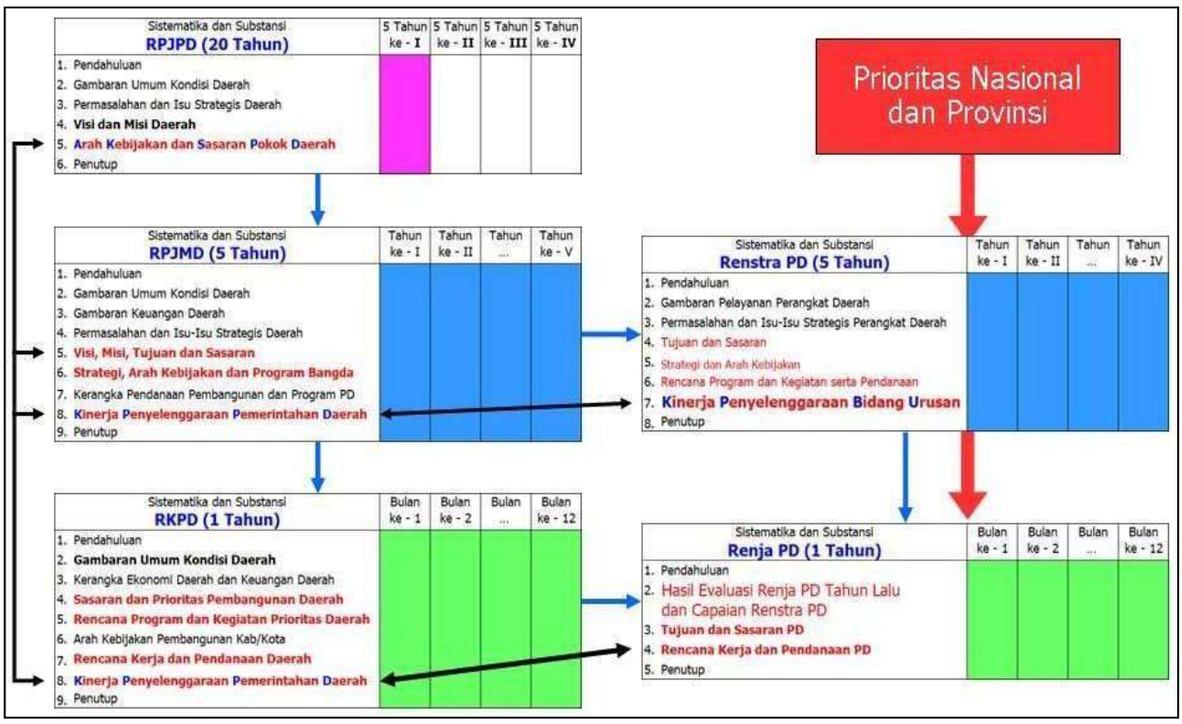

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah,
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan,
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD,
4. Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD,
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Keterkaitan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja Perangkat Daerah hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2.

Gambar 1.2.
Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD

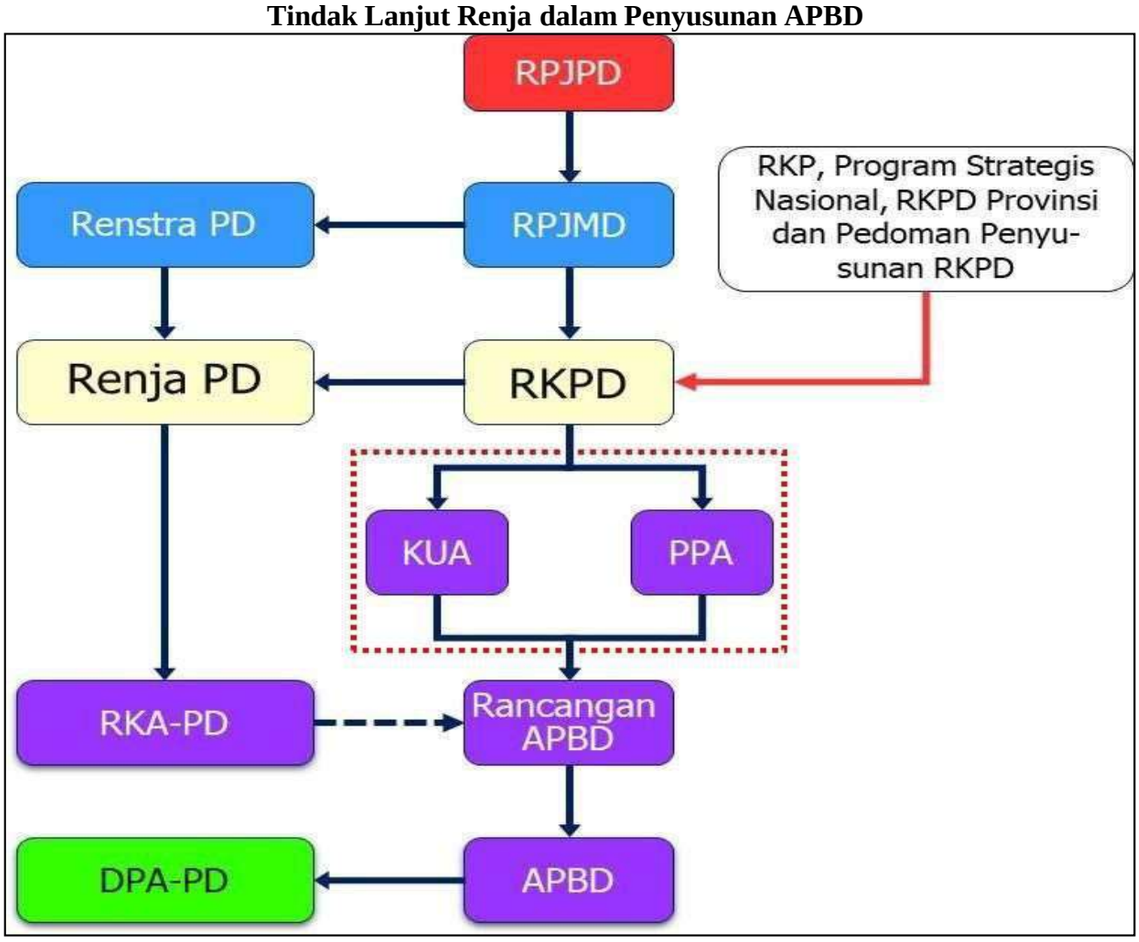

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Meral Barat berlandaskan pada dasar hukum sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kepulauan Riau (Berita Nomor 1999);
b. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287)
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;

l. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2025;

m. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Dokumen Perencanaan;

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

o. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

p. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 SeriE, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

q. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;

r. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2023;

s. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005-2025;

t. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun;

u. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Karimun;

v. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten KarimunTahun 2021-2026;

w. Peraturan Bupati Karimun Nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karimun.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Meral Barat Kabupaten KarimunTahun 2023ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Karimun di tahun 2023melalui perencanaan kinerja tahunan.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun tahun 2023 ini adalah:

1) Menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasionil;
2) Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Meral Barat dan RPJMD Kabupaten Karimun di tahun 2023;
3) Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2023 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Unsur Kewilayahan dan laporan kinerja perangkat daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISANAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penyajian Rencana Kerja Kecamatan Meral Barat ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran

Renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan bidang urusan Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Meral Barat Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendalayang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Meral Barat Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Meral Barat Tahun 2023 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Meral Barat Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2023. Anggaran ditujukan untuk bidangkesehatan, ekonomi dan bidang sosial.

2.1.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN PERKIRAAN CAPAIAN TAHUN BERJALAN

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja PD Kecamatan Meral Barat Tahun 2021 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Meral Barat Tahun 2021 dilakukan terhadap 3 (tiga) hal, yaitu :

a. Kebijakan Perencanaan Program & Kegiatan,

b. Pelaksanaan Rencana Program & Kegiatan Serta

c. Hasil Rencana Program & Kegiatan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Meral Barat Tahun2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Tahun Berjalan Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan **Program**/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target kinerja capaianProgram (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatans/d dengan tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (2022)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2021	RealisasiRenja Perangkat Daerah tahun2021	Tingkat .Realisasi(%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisai Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	8 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase dokumentasi Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	.Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kamtor	Jumlah jenis komponen instalasi dan alat-alat listrik	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Item peralatan rumah tangga	22 Jenis	22 Jenis	22 Jenis	22 Jenis	22 Jenis	22 Jenis	22 Jenis	22 Jenis
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah item bahan logistik kantor	31 Jenis	31 Jenis	31 Jenis	31 Jenis	31 Jenis	31 Jenis	31 Jenis	31 Jenis
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah item barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis makanan dan minuman	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis

		jamuan tamu								
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	250 buah	250 buah	250 buah	250 buah	250 buah	250 buah	250 buah	250 buah
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah rekening penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya dan Liatrik	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak yang mendapatkan honor	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaaran Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	7 Kendaraan	7 Kendaraan	7 Kendaraan	7 Kendaraan	7 Kendaraan	7 Kendaraan	7 Kendaraan	7 Kendaraan
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang direhabilitasi	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentasi Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Intansi Vertikal Terkait	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Efektifitas Pemerintahan di tingkat Kecamatan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Persentase Efektifitas Pelaksnaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %	100 %
7.01.03.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %	100 %

Keterangan: ***Untuk kolom 10 Indikator kinerja sub kegiatan Belum mengikuti Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 karena Renja 2022 disusun dan disahkan tahun 2021 sebelum Kepmendagri 050_5889 Keluar.***

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauhmana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Tahun 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Meral Barat Kabupaten memberikan hasil yang signifikan sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian dan realisasi penyerapan anggaran tahun 2021 sebesar 83,12%. Capaian hasil pelaksanaan Renstra Kecamatan Meral Barat hingga tahun lalu 2020adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1 di atas pada subbab 2.1.1.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Tahun Berjalan Kecamatan Meral BaratKabupaten Karimun

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan **Program**/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatans/d dengan tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (2022)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun2021	Tingkat .Realisasi(%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisai Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Tujuan 1** **Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan**	80,30	78,00	85,05	83,05	100%	85,10	89,10	100%
	Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	65,30	65,00	65,05	65,05	100%	65,10	65,10	100%
2	**Tujuan 2** **Terwujudnya tata Kelola kelembagaan pemerintah yang baik dan bersih di Kecamatan**	**Tingkat pemenuhan dukungan manajemen tata Kelola pemerintahan di Kecamatan**	65,30	65,00	65,05	65,05	100%	65,10	65,10	100%
	Sasaran 2.1 : Manajemen tata kelola pemerintahan di Kecamatan Meral Baratyang baik dan bersi h	Nilai SAKIP Kecamatan Meral Barat(Tingkat Kualitas tata kelola pemerintahan di Kec	53,30	54,00	55,05	55,05	100%	55,10	55,10	100%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun

Kedudukan Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

a. Camat ;
b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
    1) Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan;
    2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan;
f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
g. Seksi Lingkungan Hidup; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam Penyelenggaraan tugas pokok di atas, Kecamatan mempunyai fungsi yaitu:

a. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
b. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan instansi otonom dan vertikal yang ada diwilayah kerjanya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kecamatan sebagai PD tentunya diharuskan membuat Rencana Strategis dan Rencana Kerja PD yang mengacu kepada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana kerja tersebut dibuat pada T-1 atau satu tahun sebelumnya menyesuaikan dengan pembuatan RKPD sehingga tercipta harmonisasi antara RPJMD – Renstra SKPD serta Renja SKPD – RKPD.

Untuk Rencana Kerja Kecamatan Meral Barat tahun 2023 ini salah satunya berisi kajian review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu tahun 2021 dan perkiraan capaian berjalan tahun 2022, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja ini yang sudah ditentukan dalam Renstra, maupun terhadap Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Dokumen Perencanaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Analisis kinerja pelayanan SKPD Hal ini dapat terlihat dari pencapaian dan realisasi yang akan disajikan dalam capaian kinerja tahun 2021. Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Meral Barat dan Hasil capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Meral Barat tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Terget Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Meral Barat	-	-	79,05	79,10	79,15	79,20	79,05	79,10	79,15	79,20	
	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	-	-	78,00	78,05	79,00	80,00	78,00	78,05	79,00	80,00	
	Nilai SAKIP Kecamatan Meral Barat(Tingkat Kualitas)	-	-	53,05 (CC)	54,10 (CC)	55,15 (CC)	56,20 (C)	53,05(CC)	54,10 (CC)	55,15 (CC)	56,20 (C)	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan disusunnya Renja sebagai sebuah rangkaian cara untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Meral Baratbahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

a. Tingkat kinerja pelayanan SKPD

   Terkait dengan pelayanan SKPD Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Meral Bara tcukup baik terlihat dari 2 tahun capaian indikator terealisasi diatas 80%.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD. Permasalahan utama yang ditemui dalam pelaksanaan tugas kinerja SKPD adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, serta kurangnya Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan.

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional seperti SPM dan SDGs (Suistainable Development Goals)

   Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Meral Barat sebagai penjabaran visi misi Bupati Karimun akan memberikan kontribusi yang cukup positif terhadap pencapaian visi kabupaten dan visi nasional yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat, penyelenggaran fungsi pemerintahan secara optimal, dan perwujudan SDM aparatur yang handal

d. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

   1) Mewujudkan ketersediaan data/informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan;

2) Sinergitas antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indikator yang telah direncanakan;
3) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimunmerupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2020 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2021 yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Karimunnantinya.

Telaahan teradap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan Bupati Karimunterkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten KarimunTahun 2023 dilakukan dengan melakukan identifikasi prioritas program dan kegiatan,indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Kecamatan Cilamaya Wetan, sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan rancangan RKPD.

Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, program, kegiatan dan sub kegiatan

pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Meral Baratkarena hasil telaahan bersama dan efisiensi kegiatan serta jumlah anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023. Program kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Karimun Kecamatan Meral Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tujuan 1 **Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadappelayanan di Kecamatan**	Kec. Meral Barat	**Indeks Kepuasan Masyarakat diKecamatan** Meral Barat			**Tujuan 1** **Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanandi Kecamatan**	Kec. Meral Barat	**Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan** Meral Barat			
	Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas anan publik Kecamatan	Kec. Meral Barat	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)			Sasaran 1.1 : Meningkatnyakualitas pelayanan publik Kecamatan	Kec. Meral Barat	Nilai IKM Layanan Kecamatan(PATEN)			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Meral Barat	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	236.612.200	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan PelayananPublik	Kec. Meral Barat	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	62.718.300	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kec. Meral Barat	Persentase Dokumen dan KegiatanPerencanaan yang terelaisasi	100 %	173.893.900	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkankepada Camat	Kec. Meral Barat	Persentase Dokumen dan KegiatanPerencanaan yang terelaisasi	100%	173.893.900	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaitdengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Meral Barat	Jumlah Kegiatan	3 keg	173.893.900	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Kec. Meral Barat	Jumlah Kegiatan	3 keg	101.130.600,00	
	Sasaran 2.1 : Meningkatnya Nilai akip Kecamatan	Kec. Meral Barat	Nilai AKIP			Sasaran 2.1 : Meningkatnya Nilai akip Kecamatan	Kec. Meral Barat	Nilai AKIP			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Meral Barat	Jumlah Dokumen	12 Keg	509.696.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Meral Barat	Jumlah Dokumen	12 Keg	509.696.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meral Barat	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		19.255.100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meral Barat	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		19.255.100	
	Sasaran 1.2 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	Meral Barat	Nilai SAKIP Kecamatan Meral Barat(Tingkat Kualitas tata kelola pemerintahan di Kec.			**Sasaran 1.2 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan**	Meral Barat	Nilai SAKIP Kecamatan Meral Barat(Tingkat Kualitas tata kelola pemerintahan di Kec. Meral Barat)			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meral Barat	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	'100 %	19.255.100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meral Barat	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	19.255.100	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meral Barat	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	'100 %	19.255.100	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meral Barat	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	19.255.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meral Barat	Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.175.857.350	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meral Barat	Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.175.857.350	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meral Barat	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.508.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meral Barat	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.508.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meral Barat	Jumlah Dokumen	8 Dokumen	6.508.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meral Barat	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	6.508.000	
	Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meral Barat	Prosentase Admistrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.920.646.050	Admistrasi keuangan perangkat daerah	Meral Barat	Prosentase Admistrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.920.646.050	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Meral Barat	Prosentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	2.920.646.050	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Meral Barat	Prosentase Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 kali	2.920.646.050	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meral Barat	Prosentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	82.451.250	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Meral Barat	Prosentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	82.451.250	
	Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Meral Barat	Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	25 Jenis	5.797.300	Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Meral Barat	Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	25 Jenis	5.797.300	
	Penyediaan Peraralatan Rumah Tangga	Meral Barat	Penyediaan Peraralatan Rumah Tangga	22 Jenis	11.172.600	Penyediaan Peraralatan Rumah Tangga	Meral Barat	Penyediaan Peraralatan Rumah Tangga	22 Jenis	11.172.600	
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Meral Barat	Penyediaan bahan Logistik Kantor	31 Jenis	25.646.700	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Meral Barat	Penyediaan bahan Logistik Kantor	31 Jenis	25.646.700	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meral Barat	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	6.866.150	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meral Barat	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	6.866.150	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meral Barat	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Jenis	32.968.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meral Barat	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Jenis	32.968.500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemerintah daerah	Meral Barat	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemerintah daerah	100%	30.368.900	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemerintah daerah	Meral Barat	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemerintah daerah	100%	30.368.900	
	Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Meral Barat	Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	5 Jenis	30.368.900	Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Meral Barat	Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	5 Jenis	30.368.900	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Meral Barat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%	75.350.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Meral Barat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%	75.350.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meral Barat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 buah	2.750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meral Barat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 buah	2.750.000	
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Meral Barat	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	2 Jenis	24.600.000	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Meral Barat	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	2 Jenis	24.600.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meral Barat	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Orang	48.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meral Barat	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Orang	48.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meral Barat	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	90.902.050	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meral Barat	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	90.902.050	
	Penyediaaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pmemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Meral Barat n	Penyediaaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pmemeliharaan dan Pajak	7 Kendaraan	50.512.800	Penyediaaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pmemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Meral Barat	Penyediaaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pmemeliharaan dan Pajak	7 Kendaraan	50.512.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jabatan		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jabatan		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cilamaya Wetan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	8.650.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meral Barat	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	8.650.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Cilamaya Wetan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	31.739.250	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meral Barat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	31.739.250	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kecamatan Cilamaya Wetan	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	13 stell	2.600.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Meral Barat	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	13 stell	2.600.000	

2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Meral Barattentunya disandingkan dengan usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari Desa, Instansi, UPTD, Koorwil serta kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan yang kita kenal dengan nama Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari tingkat dusun sampai dengan tingkat nasional. Berdasarkan Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka peran serta masyarakat dalam pembangunan diaplikasikan dalam keikut ertaannya dalam musyawarah ini.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat**Musrenbang** adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang diatur dalam Undang-Undang no.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk tingkat nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Perkembangan perencanaan partisipatif bermula dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Semua pihak yang terkait selanjutnya dikenal dengan istilah pemangku kepentingan (stakeholders). Komitmen semua pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan program, dan diyakini bahwa besarnya komitmen ini tergantung kepada sejauhmana mereka terlibat dalam proses perencanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan partisipatif diwujudkan antara lain melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di mana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan berasal dari semua aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, kaum rohaniwan, pemilik usaha, kelompok profesional, organisasi non-pemerintah, dan lain-lain. (Penjelasan PP 40 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional).

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku

kepentingan di tingkat kelurahan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembanguna di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari desa/kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan dikecamatan yang bersangkutan. Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya. Musrenbang desa dilaksanakan setiap tahun pada bulan September tahun sebelumnya. Output Musrenbang berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Kegiatan perencanaan pembangunan ini terdiri dari tiga kategori, yaitu usulan dalam forum OPD, Musrenbang Perempuan dan anak serta Usulan kecamatan itu sendiri. Puncak Musrenbang tahun 2022 untuk kegiatan RKPD tahun 2023 diselenggarakan secara langsung (offline), sebelumnya telah dilaksanakan penjaringan daftar usulan dari pada kepala desa dengan menggunakan aplikasi e- musrenbang pada SIPD Kemendagri sebagaimana terlampir

Tabel 2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan / Masyarakat di Kecamatan Meral BaratTahun 2023

NO	KEGIATAN	LOKASI (DESA/KELURAHAN)	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PENGASPALAN JALAN BAITUL RAHMAN	Guntung Punak RT.02 RW.03 Kelurahan Darussalam	800 m2
2	PEMBUATAN DRAINASE	PAYA SUNAN RT 003 RW 001 Kelurahan Darussalam	1000 m
3	PEMBANGUNAN GEDUNG POSYANDU	Lembah Permai RT.003 RW.002 Kelurahan Darussalam	48 m2
4	REHAB TANGGUL TAMBATAN PERAHU	SEPEDAS LAUT RW.005 PASIR PANJANG	1 Kegiatan
5	PEMBANGUNAN JALAN DAN PENINGKATAN JALAN PEMUKIMAN	TL.SETIMBUL RW.004 DAN RW.008 KEL.PASIR PANJANG	1000 m
6	RENOVASI GEDUNG PERTEMUAN	SEMEMAL RT002 RW.001 Kelurahan Pasir Panjang	1 Kegiatan
7	PENGASPALAN DARI KP.SUKA MULYA S.D KP PANTAI INDAH	RT 003 RW 002 DAN RT 003 RW 004	1800 m
8	PEMBANGUNAN MUSHOLLA KP. SUKA MAJU	Kp. Suka Maju Desa Pangke	11 m x 9 m

9	PEMBANGUNAN GEDUNG BLK	Kp. Suka Mulya Desa Pangke	1 Kegiatan
10	SEMENISASI	RT.003 RW.002 DESA PANGKE BARAT	100 m x 5 m
11	RENOVASI MUSOLLAH	Kp.AMBAT JAYA RT.002 RW.003 Desa Pangke Barat	± 11 m x ± 9 m
12	SEMENISASI JALAN	Kp.Ambat Jaya RT.002 RW.003 sampai dengan RT.001 RW.004 Desa Pangke Barat	700 m x 3 m

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN MERAL BARAT
NOMOR :
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2025

DAFTAR KEGIATAN YANG TELAH DISEPAKATI
KECAMATAN : MERAL BARAT
TAHUN : 2025

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	STATUS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	KAMSIMAH	PENGASPALAN JALAN	JALAN RUSAK	KP.AMBAT JAYA RT.002/003 SAMPAI RT.001/004 DESA PANGKE BARAT, Kab. Karimun	Kab. Karimun	Meral Barat	Pangke Barat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Verifikasi Kecamatan
2	SANURI,SE	PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH	Banyaknye pertumbuhan penduduk dan rumah ibadah yang tidak memadai	Dusun I Desa Pangke, Kab. Karimun	Kab. Karimun	Meral Barat	Pangke	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Verifikasi Kecamatan
3	EKO IRWANTO, S.STP	TEMBOK PENAHAN TANAH/TANGGUL PEMECAH OMBAK	SUSAHNYA AKSES JALAN KE PERAHU PARA NELAYAN DI LINGKUNGAN RW.005 KARENA JEMBATAN YANG RUSAK PARAH	SEPEDAS LAUT RT.004 RW.005, Kab. Karimun	Kab. Karimun	Meral Barat	Pasir Panjang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Verifikasi Perangkat Daerah

4	SRY ANITA, S.Pd	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PEMERINTAH DAERAH	Pembangunan Pagar Gedung Kantor, Pemasangan Paving Block dan Pembangunan Gedung Serba Guna untuk memenuhi sarana dan prasarana pada kegiatan-kegiatan dan pelayanan untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	RT. 03 RW.03 Guntung Punak Kelurahan Darussalam Kec. Meral Barat, Kab. Karimun	Kab. Karimun	Meral Barat	Darussalam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Verifikasi Perangkat Daerah
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	SRY ANITA, S.Pd	Pembangunan Posyandu	Gedung Posyandu yang lama sudah rusak akibat kebakaran di tahun 2019. Bangunan gedung juga miring sehingga takut membahayakan anak-anak dan juga warga yang datang ke Posyandu. Diharapkan dapat segera dibangun gedung Posyandu yang baru.	RT. 03 RW. 02 Lembah Permai, Kab. Karimun	Kab. Karimun	Meral Barat	Darussalam	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Verifikasi Perangkat Daerah
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	SANURI,SE	PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN PERMUKIMAN	Masih Ada Jalan Desa yg Belum Di Aspal dan Dana Desa yang Tidak Mencukupi	Kp. Pantai Indah RT.03/RW.04 Desa Pangke dan Kp. Suka Mulya RT.03/RW02 Desa Pangke, Kab. Karimun	Kab. Karimun	Meral Barat	Pangke	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Verifikasi Kecamatan

2	SANURI,SE	PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN PERMUKIMAN	Pembangunan dan perbaikan jalan rusak di Dudun II Desa Pangke	Dusun II Desa Pangke, Kab. Karimun	Kab. Karimun	Meral Barat	Pangke	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
3	KAMSIMAH	Pengadaan lampu jalan	JALAN MASYARAKAT GELAP	KP.AMBAT JAYA RT.002/003 DAN KP.AMBAT JAYA RT.001/004 DESA PANGKE BARAT, Kab. Karimun	Kab. Karimun	Meral Barat	Pangke Barat	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DISEPAKATI

KECAMATAN : MERAL BARAT

TAHUN : 2025

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	STATUS
1	EKO IRWANTO, S.STP	TEMBOK PENAHAN TANAH/TANGGUL PEMECAH OMBAK	SUSAHNYA AKSES JALAN KE PERAHU PARA NELAYAN DI LINGKUNGAN RW.005 KARENA JEMBATAN YANG RUSAK PARAH	SEPEDAS LAUT RT.004 RW.005, Kab. Karimun	Kab. Karimun	Meral Barat	Pasir Panjang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
2	EKO IRWANTO, S.STP	PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN PERMUKIMAN	Masih Ada Jalan Desa yg Belum Di Aspal dan Dana Desa yang Tidak Mencukupi	Kp. Pantai Indah RT.03/RW.04 Desa Pangke dan Kp. Suka Mulya RT.03/RW02 Desa Pangke, Kab. Karimun	Kab. Karimun	Meral Barat	Pangke	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
3	SANURI,SE	PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH	Banyaknye pertumbuhan penduduk dan rumah ibadah yang tidak memadai	Dusun I Desa Pangke, Kab. Karimun	Kab. Karimun	Meral Barat	Pangke	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
4	KAMSIMAH	Pengadaan lampu jalan	JALAN MASYARAKAT GELAP	KP.AMBAT JAYA RT.002/003 DAN KP.AMBAT JAYA RT.001/004 DESA PANGKE BARAT, Kab. Karimun	Kab. Karimun	Meral Barat	Pangke Barat	DINAS PERHUBUNGAN	

5	KAMSIMAH	PENGASPALAN JALAN	JALAN RUSAK	KP.AMBAT JAYA RT.002/003 SAMPAI RT.001/004 DESA PANGKE BARAT, Kab. Karimun	Kab. Karimun	Meral Barat	Pangke Barat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	SRY ANITA, S.Pd	Pembangunan Posyandu	Gedung Posyandu yang lama sudah rusak akibat kebakaran di tahun 2019. Bangunan gedung juga miring sehingga takut membahayakan anak-anak dan juga warga yang datang ke Posyandu. Diharapkan dapat segera dibangun gedung Posyandu yang baru.	RT. 03 RW. 02 Lembah Permai, Kab. Karimun	Kab. Karimun	Meral Barat	Darussalam	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7	SRY ANITA, S.Pd	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PEMERINTAH DAERAH	Pembangunan Pagar Gedung Kantor, Pemasangan Paving Block dan Pembangunan Gedung Serba Guna untuk memenuhi sarana dan prasarana pada kegiatan-kegiatan dan pelayanan untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	RT. 03 RW.03 Guntung Punak Kelurahan Darussalam Kec. Meral Barat, Kab. Karimun	Kab. Karimun	Meral Barat	Darussalam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN KEBIJAKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Di Kabupaten jenjang perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja yang disusun berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh SKPD maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Dengan begitu maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah juga dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang partisipatif, yang dalam proses mendukung kondisi tersebut maka diperlukan kemampuan teknis perencanaan sehingga dapat mendorong berkembangnya perencanaan yang lebih baik dan memunculkan kegiatan-kegiatan yang membawa kearah yang lebih baik lagi dan dapat merubah pola perencanaan dari shopping list ke working plan.

Tema RKP Tahun 2023 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, dengan tujuh Prioritas Nasional. Menteri mengingatkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu Stakeholders pembangunan agar mensinergikan rencana kerja (baik renja K/L maupun RKPD) dengan RKP 2023; Pentingnya mensinergikan Rencana Pusat dan Daerah dengan memaksimalkan forum-forum rapat koordinasi dan musyawarah dalam menentukan proyek-proyek prioritas; RKP 2023 tidak saja menampilkan pendanaan yang bersumber dari APBN,

namun juga pendanaan dari sumber lainnya seperti BUMN dan Swasta; Untuk menjamin amanat presiden “making delivered”, penyusunan RKP 2023 diperkuat melalui mekanisme Clearing House pada proyek prioritas khususnya Major Projects; dan Prioritas kegiatan perlu diidentifikasi kerangka kebijakan dan regulasi serta kerangka pendanaannya.

Di bagian sebelumnya, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas RI Himawan Hariyoga dalam laporannya mengatakan sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perpres No.18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2025, pemerintah mengeluarkan rencana pembangunan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kick Off Meeting Penyusunan RKP 2023 ini dilaksanakan untuk menyampaikan tema, sasaran, arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta agenda RKP 2023 kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Merujuk kepada visi dan misi kabupaten Karimun 2021-2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun, dalam hal ini maka tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Meral Barat adalah :

Tujuan 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan yang meliputi sasaran :

Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Meral Barat

Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola kelembagaan pemerintah yang baik dan bersih di Kecamatan Meral Barat yang meliputi sasaran :

Sasaran 2.1 : Manajemen tata kelola pemerintahan di Kecamatan Meral Barat yang baik dan bersih

3.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

   Dengan kebijakan Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang serta mengoptimalkan potensi masyarakat dalam pembangunan

   Dengan kebijakan Meningkatkan partsipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan

3. Peningkatan koordinasi kebijakan antar bidang di Kecamatan

4. dengan kebijakan :

   a. Meningkatkan kualitas pelayanan public di wilayah kecamatan ;

   b. Meningkatkan parsitipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah kecamatan

   c. Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan

   d. Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan

   e. Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan aset dan database Kecamatan

3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, diterbitkan dalam rangka mencapai tujuan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagai penjabaran Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. SKPD Kecamatan

merupakan salah satu klasifikasi perencanaan pembangunan pada bagian *(h) mengenai unsur kewilayahan*, terdapat beberapa penyesuaian DPA dari tahun tahun sebelumnya yang menggunakan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Diantara perubahan tersebut terdapat hal yang mendasar, yaitu dalam jumlah program dan kegiatan prioritas Kecamatan Meral Baratterdiri dari **3 Program dan 11 Kegiatan, dan 22 sub kegiatan** sesuai dengan Permendagri Kemendagri 050_5889 tahun 2021.

Berikut kami sampaikan perubahan nomenklatur Program, kegiatan dan sub kegiatan

Tabel 3.1

Kode, Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
7.01.01.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.01.2.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.01.2.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.01.2.06.01	Penyediaa Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.01.01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemeintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

7.01.03.2.01	kegiatan Pemberdayaan Desa di kelurahan
7.01.03.2.01.02	Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.01.03	kegiatan Pemberdayaan Desa di kelurahan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Meral Barat pada Tahun 2023 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kecamatan Meral Barat dengan total kebutuhan dana sebesar **Rp 4,969,353,289 ,-** dengan seluruh program dan kegiatan Kecamatan Meral Barat Kabupaten KarimunTahun 2023 yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan serta didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) seperti disajikan pada Tabel 3.1**.**

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kecamatan Meral Barat Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	ebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Kinerja Penunjang Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Daerah**	Kecamatan Meral Barat	**100%**	**4,969,353,289**	**APBD**	Kecamatan Meral Barat	**100%**	**4,969,353,289**
7.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumentasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Meral Barat	100%	81,536,000	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	81,536,000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Meral Barat	100%	29.195,000	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	29.195,000
7.01.01.2.02	Administrasi Kuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumentasi Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kecamatan Meral Barat	100%	3,324,014,182	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	3,324,014,182
7.01.01.2.02.01	Penyedian Gaji dan Tunjangan PNS	.Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Kecamatan Meral Barat	100%	3,200,606,182	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	3,200,606,182
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Meral Barat	100%	101,447,987	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	101,447,987
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi dan alat-alat listrik	Kecamatan Meral Barat	100%	1,890,000	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	1,890,000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Item peralatan rumah tangga	Kecamatan Meral Barat	100%	3,768,776	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	3,768,776
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah item bahan logistik kantor	Kecamatan Meral Barat	100%	3,574,8211	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	3,574,8211
7.01.01.2.61.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah item barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Meral Barat	100%	6,100,000	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	6,100,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	Kecamatan Meral Barat	100%	5,394,1000	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	5,394,1000

7.01.04	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis makanan dan minuman jamuan tamu	Kecamatan Meral Barat	100%	0	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	0
7.01.04.2.01	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik	Kecamatan Meral Barat	100%	0	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	0

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Daerah					Kecamatan Meral Barat		
7.01.04.2.01.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan	Kecamatan Meral Barat	100%	0	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	0
7.01.01.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Daerah	Kecamatan Meral Barat	100%	658,760,000	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	658,760,000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	Kecamatan Meral Barat	100%	0	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya dan Liatrik	Kecamatan Meral Barat	100%	580,300,000	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	580,300,000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Kontrak yang mendapatkan honor	Kecamatan Meral Barat	100%	48,000,000	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	48,000,000
7.01.01.2.09	Pemeilharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Meral Barat	100%	26,608,000	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	26,608,000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kecamatan Meral Barat	100%	26,608,000	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	26,608,000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan dan peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kecamatan Meral Barat	100%	0	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang direhabilitasi	Kecamatan Meral Barat	100%	0	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	0
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah**	Kecamatan Meral Barat	**100%**	608,629,000	**APBD**		**100%**	608,629,000
7.01.02.2.01	Koordinasi/Sinergitas Perencanaan dan Pelaksnaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kecamatan Meral Barat	100%	0	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	0
7.01.02.2.01.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerinthan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Intansi Vertikal Terkait	Kecamatan Meral Barat	100%	0	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	0
7.01.01.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Kecamatan Meral Barat	100%	0	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	0

7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Meral Barat	100%	608,629,000	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	608,629,000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan pelaksanaan urusan	Kecamatan Meral Barat	100%	608,629,000	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	608,629,000

	terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan							
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam proses pembangunan	Kecamatan Meral Barat	100%	**236.612,200**	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	**236.612,200**
7.01.03.2.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Meral Barat	100%	131,685,000	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	131,685,000
7.01.03.2.01.01	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Meral Barat	100%	131,685,000	APBD	Kecamatan Meral Barat	100%	131,685,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 KEBIJAKAN UMUM

Kecamatan Meral Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Camat Meral Barat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketercapaian Visi dan Misi Bupati. Melalui telahaan terhadap hasil evaluasi dari program/kegiatan Kecamatan Meral Barat Tahun 2020 serta memperhatikan isu- isu global. Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Meral Barat Tahun 2022, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Laporan Renja Kecamatan , juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2023;
b. Memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

4.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, diterbitkan dalam rangka mencapai tujuan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagai penjabaran Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. SKPD Kecamatan

merupakan salah satu klasifikasi perencanaan pembangunan pada bagian *(h) mengenai unsur kewilayahan*, terdapat beberapa penyesuaian DPA dari tahun tahun sebelumnya yang menggunakan Permendagri nomor 13 tahun 2006, maka sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 menjadi 5 Program dan 11 kegiatan dan 22 sub kegiatan.

Suatu hal yang baru yang menjadikan kita agak susah untuk dapat menselaraskan DPA sebelumnya dengan DPA baru, dikarenakan terdapat beberapa yang sifatnya baru dan juga ditambah dengan adanya sub kegiatan yang merupakan turunan dari ***Kegiatan*** pada DPA sebelumnya yang menuntut kita untuk dapat mencermati keselarasan antara kedua peraturan tersebut agar nantinya dapat diinput dalam SIPD yang menjadi keharusan dari tiap SKPD ke aplikasi yang dibuat kemendagri serta keselarasan terhadap Renstra dan RPJMD pemerintah Kabupaten Karimun.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Meral Barat pada Tahun 2023 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kecamatan Meral Barat dengan total kebutuhan dana sebesar **Rp 4,969,353,289,00** dengan seluruh program dan kegiatan Kecamatan Meral BaratKabupaten KarimunTahun 2023 yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan serta didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti disajikan pada Tabel 4.1**.**

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kecamatan Meral Bara tTahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	2023		2025	
				TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)
1	*2*	*4*	*5*	*10*	*11*	*12*	*13*
1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Pelayanan Publik (IPP)**	**3.50**	**4.466.000.000**	**3,51**	**4.532.990.000**
	1. **Meningkatnya Akuntabilitas Kineja Kec. Meral Barat**		Nilai AKIP Kecamatan Meral Barat	**58**	**4.430.200.000**	**59**	**4.496.224.000**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	**78,5**	**3.273.727.500**	**79**	**3.307.854.000**

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen***	***5 dokumen***	***66.425.000***	***5 dokumen***	***71.756.484***
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen - Renja - Dokumen RB	25.500.000	2 dokumen - Renja - Dokumen RB	26.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2 Dokumen - Lakip - Perjanjian Kinerja (PK)	20.500.000	2 Dokumen - Lakip - Perjanjian Kinerja (PK)	21.000.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	2 Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	20.425.000	2 Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	24.756.484
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Jumlah Laporan***	***3 Laporan***	***1.638.563.432***	***3 Laporan***	***1.642.500.316***
		Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima	336 Org Bln (24 Org x 14 Bln)	1.515.068.432	350 Org Bln (25 Org x 14 Bln)	1.516.705.316

			Gaji dan Tunjangan ASN				
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	115.995.000	12 Dokumen	117.795.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan - Laporan Rekonsiliasi - Laporan Aset	7.500.000	2 Laporan - Laporan Rekonsiliasi - Laporan Aset	8.000.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Jumlah Laporan***	***1 Laporan***	***7.500.000***	***1 Laporan***	***7.555.000***
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan - Laporan Rekonsiliasi - Laporan Asset OPD	7.500.000	2 Laporan - Laporan Rekonsiliasi - Laporan Asset OPD	7.555.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Jumlah Laporan***	***3 Laporan***	***130.720.000***	***3 Laporan***	***132.550.000***

		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	54.800.000	1 Paket	55.650.000
		jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data kepegawaian yang diolah	1 Dokumen - DUK	20.500.000	1 Dokumen - DUK	20.800.000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Org	55.420.000	80 org	56.100.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Jumlah Laporan***	***9 Laporan***	***225.574.568***	***9 Laporan***	***232.792.200***
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.100.000	1 Paket	6.000.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.324.568	1 Paket	33.392.200
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	25.100.000	1 Paket	25.150.000

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	64.500.000	1 Paket	65.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	17.000.000	1 Paket	17.500.000
		Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	15.500.000	1 Paket	15.600.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 laporan	23.100.000	2 laporan	23.150.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140 laporan	41.950.000	140 laporan	42.000.000
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD	Jumlah aplikasi Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang tersedia	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah Laporan rencana kebutuhan barang***	***7 Laporan***	***184.800.000***	***7 Laporan***	***196.000.000***
		Pengadaan Meubeleur	Jumlah unit Mebel yang disediakan	10 Unit	25.500.000	10 Unit	30.000.000

		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 Unit	38.500.000	10 Unit	40.000.000
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	3 Unit	25.500.000	5 Unit	28.000.000
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	1 Unit	20.500.000	1 Unit	21.000.000
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	21.800.000	1 Unit	22.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	24.000.000	4 unit	25.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	29.000.000	4 unit	30.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan jasa***	***5 Laporan***	***892.000.000***	***5 Laporan***	***894.600.000***
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	7.900.000	1 laporan	8.000.000
			Jumlah Laporan	12 Laporan	59.000.000	12 Laporan	59.100.000

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	5.100.000	1 Laporan	5.850.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	820.000.000	12 Laporan	821.650.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terpelihara***	***6 Laporan***	***128.144.500***	***6 Laporan***	***130.100.000***
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	21.500.000	7 Unit	22.000.000

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	15.500.000	7 Unit	15.800.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	29.344.500	11 unit	29.500.000
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	36.500.000	5 unit	36.000.000
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	15.200.000	5 unit	15.800.000
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	10.100.000	5 unit	11.000.000

		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	**3,50**	**893.102.500**	**3,51**	**925.000.000**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	***Jumlah Laporan***	***1 Laporan***	***23.000.000***	***1 Laporan***	***25.000.000***
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di kecamatan	1 Dokumen	23.000.000	1 Dokumen	25.000.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	***Jumlah Laporan***	***9 Laporan***	***870.102.500***	***9 Laporan***	***900.000.000***
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Di limpahkan	jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	9 laporan	870.102.500	9 laporan	900.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**	**100%**	**263.370.000**	**100%**	**263.370.000**

		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	***Jumlah Laporan***	***1 Laporan***	***263.370.000***	***1 Laporan***	***263.370.000***
		Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	5 Pokmas	Rp 131.685.000	4 pokmas/ ormas	Rp 131.685.000
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	Rp 131.685.000	4 pokmas/ ormas	Rp 131.685.000

BAB V
PENUTUP

Mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Meral Barat 2021-2026 dimana disajikan pernyataan tujuan yang akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun kredible,namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Meral Barat 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan, yang meliputi sasaran :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Meral Barat

,Sasaran 2 : Meningkatnya Nilai AKIP Kecamatan Meral Barat

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Meral Barat pada Tahun 2023 dengan lokasi kegiatan berada di Kecamatan Meral Barat dengan total kebutuhan dana sebesar **Rp 4,969,353,289 ,-**dengan seluruh program dan kegiatan Kecamatan Meral Barat Kabupaten KarimunTahun 2023 yang tertuang dalam RencanaKerja Kecamatan Meral Barat Tahun 2023 didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Meral Barat Tahun 2023 kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi para pihak.

Meral Barat, Januari 2025

CAMAT MERAL BARAT

ISNAIDI,S.Pd,MMPd
NIP. 19760627 19980810808

RENJA (Rencana Kerja) TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN TEBING

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan ”Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tebing Tahun 2025” dapat diselesaikan. Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan wujud penjabaran dari Renstra Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun 2021 - 2026, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Karimun serta Target dan Sasaran Pembangunan Nasional yang dilaksanakan melalui OPD Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, serta sebagai pedoman OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kaitan terselenggaranya *good governance*.

Terwujudnya *good governence* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara dan pemerintahan, termasuk Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tebing Tahun 2025, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan petunjuk pelaksanaan kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tebing Tahun 2025 ini dapat disusun dan diterbitkan.

Tebing , 2025

CAMAT TEBING

KHAIDIR, S.Sos

NIP. NIP. 19780130 200003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 5

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 23

2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 25

2.3.1 Reformasi Birokrasi atau Penataan Sumber Daya Manusia 25

2.3.2 Peningkatan sarana dan prasarana 25

2.3.3 Upaya-upaya lain yang perlu dilakukan 26

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 26

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 35

3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional 35

3.2 Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah 36

3.3 Program dan kegiatan 36

3.3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 36

3.3.2 Program Penyelenggara Pemerintah dan Pelayanan Publik 38

3.3.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 38

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 39

BAB V. PENUTUP 53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Periode Pelaksanaan Tahun Anggaran 2022 10

Tabel 2.2 program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampaknya tahun 2023.....18

Tabel 2.3 Analisa Pencapaian Kinerja Kecamatan Tebing 24

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Kecamatan Tebing 24

Tabel 2.5 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Tebing 26

Tabel 2.6 Rekapitulasi Usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun tahun 2023 usulan anggaran tahun 2024 31

Tabel 4.1 rencana kerja dan pendanaan perangkat Daerah kecamatan tebing tahun anggaran 2023.....40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja, dalam hal ini Renja Kecamatan Tebing, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Tebing merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Tebing, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembanguan Daerah Kabupaten Karimun.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja

terhadap pencapaian Renstra, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan harus mencakup 5 pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, di mana dengan adanya pemilihan kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kandidat kepala derah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan;
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah;
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan Pembangunan harus melibatkan masyarkat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan;
4. Pendekatan Top-Down (atas-bawah) yaitu bahwa penyusunan perencaanaan pembangunan harus memperhatikan program-program jenjang pemerintahan diatasnya;
5. Pendekatan Bottom-Up (bawah-atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintahan dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Bottom Up diseleraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Kecamatan Tebing Tahun 2025 didasarkan pada ketentuaan ketentuan sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Natuna, Kabupaten Kuantan singingi dan Kota Batam (Lembar Negara tahun 1999,Nomor 181,tambahan lembaran Negara nomor 3902) yang telah diubah bebeerapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2008 tentang perubahan Ketiga atas Udnang-Undang 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan,Kabupaten rokan hulu,Kabupaten natuna,Kabupaten Kuantan singingi dan kota Batam (Lembaran Negara tahun 2008, nomor 107, Tambahan lembaran Negara nomor 4880);

2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
4. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sisitem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104,tambahan lembaran Negara republikj Indonesia nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang system Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indoensia tahun 2006 nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tagun 2006 Nomor 97,Tambahan lembaran Negara Republik Indoensia nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentnang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah,Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah,Kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemrintahan Daerah kepada Masyarakat;

13. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daeah;
14. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 19 tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 nomor 19);
16. Peraturan daerah Kabupaten Karimun nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tahun 7 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) kabupaten karimun tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah kebuapten Karimun tahun 207 nomor & ,tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten karimun Tahun 2016-2021 (Lembaran daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 8,Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 9 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun tahun Anggaran 2018
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 70)
22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 69.A Tahun 2017 tentang Revisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 74)
23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Penetapan Revisi Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor 71.
24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

- **Maksud**

Adapun maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tebing adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Tebing untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- **Tujuan**

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tebing Tahun 2025 adalah guna merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan serta tugas dan fungsinya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besarisi.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pada Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja perangkat daerah sudah disahkan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah Tahun lalu dan realisasi renstra perangkat daerah, Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan / realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
2. Realisasi program kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
3. Realisasi program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau tidak terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah tabel realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan disesuaikan dengan format halaman terlampir.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nopmor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja. Jika perangkat daerah bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang diuji, maka setiap perangkat daerah perlua terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standart pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan ;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam Penyelengggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program Nasional/Internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan perangkat daerah ;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancanan awal RKPD misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan giatan cocok namun besarnya berbeda

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Deskripsi untuk mengisi sub-sub ini mengacu pada kertas kerja bagian telaah terhadap kebijakan nasional.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Bagian ini berisikan mengenai penjelasan :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya;
4. Tabel rencana program dan kegiatan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan atau catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya dari seluruh bab yang dimuat dalam Renja Kecamatan besisikan uraian penutup berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah

Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Renstra Kecamatan Tebing (Renstra 2021-2026), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2024 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Tebing sebesar **Rp. 8.570.361.602,00** ***(Delapan milliar lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus dua rupiah)*** yang terdiri atas belanja operasi sebesar **Rp. 8.381.357.602,00** ***(Delapan milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah)*** dan belanja modal sebesar **Rp. 46.504.000,00** ***(Empat puluh enam juta lima seratus empat ribu rupiah)*** serta belanja transfer sebesar **Rp. 142.500.000** ***(Seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).***

Dari plafon anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. **7.421.909.037,00** ***(Tujuh miliyar empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah)*** atau mencapai **96,6 %** dengan rincian realisasi belanja operasi sebesar Rp**. 7.421.909.037,00** ***(Tujuh miliyar empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah)*** dan realisasi belanja modal sebesar Rp. **0,00** ***(Nol rupiah)*** terdiri dari 3 program dengan 9 kegiatan yang terbagi menjadi 14 sub kegiatan. Tidak terserapnya anggaran keseluruhan antara lain adanya selisih pembayaran gaji dan tunjangan ASN, belanja jasa tenaga administrasi, dan pelaksanaan adminisrasi umum perangkat daerah yang purna tugas serta masih sulitnya dalam proses pencairan anggaran kegiatan dan efesiensi anggaran.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tebing tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Tebing, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Tebing tahun berjalan (tahun 2024).

Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tebing pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yaitu, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

Periode Pelaksanaan : Tahun Anggaran 2024

No.	Tujuan / Sasaran	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2021 s/d 2026)	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output) (Renstra 2021 s/d 2026)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)							
1	2	3						4	5	6	7		8		9						
															Renja		APBD Murni		APBD Pergeseran		APBD Perubahan	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	**7**						**URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN**	**Indeks Pelayanan Publik**	**Nilai**	**4**	**43.085.041.000**	**2,27**	**21.081.192.205**	**3,51**	**8.618.890.000**	**3,51**	**8.162.671.714**	**3,51**	**8.262.420.314**	**3,51**	**8.427.861.602**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kec.Tebing	**7**	**01**					**BIDANG URUSAN KECAMATAN**	**Nilai AKIP Kecamatan Tebing**	**Nilai**	**64**	**43.085.041.000**	**0**	**21.081.192.205**	**62**	**8.618.890.000**	**62**	**8.162.671.714**	**62**	**8.262.420.314**	**62**	**8.427.861.602**
		7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Nilai**	**80**	**33.889.953.000**	**79**	**17.044.577.750**	**79**	**6.775.000.000**	**79**	**6.081.433.844**	**79**	**6.160.765.344**	**79**	**6.116.162.232**
		7	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**Dokumen**	**36**	**532.000.000**	**14**	**101.895.500**	**7**	**106.000.000**	**7**	**29.698.000**	**7**	**29.698.000**	**7**	**444.000**
		7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	193.000.000	4	49.671.500	2	38.000.000	2	11.400.000	2	11.400.000	2	-
		7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	15	171.000.000	6	32.652.500	3	34.000.000	3	18.298.000	3	18.298.000	3	444.000
		7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	10	168.000.000	4	19.571.500	2	34.000.000	2	-	2	-	2	-
		7	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**Laporan**	**15**	**19.028.453.000**	**6**	**12.292.816.635**	**3**	**3.816.000.000**	**3**	**4.366.958.155**	**3**	**4.336.628.155**	**3**	**4.748.260.243**
		7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / Bulan	2.450	18.091.453.000	1040	11.840.388.635	560	3.615.000.000	560	4.272.872.155	560	4.272.872.155	559	4.590.418.243
		7	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Dokumen	60	937.000.000	12	452.428.000	12	185.000.000	12	94.086.000	12	63.756.000	12	157.842.000
		7	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Laporan	10	69.000.000	4	69.000.000	2	16.000.000	2	-	2	-	2	
		7	**01**	**01**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**Laporan**	5	**157.000.000**	**2**	-	**1**	**30.000.000**		-		-		**-**
		7	01	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10	157.000.000	4	-	2	30.000.000		-		-		
		7	**01**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**Laporan**	**15**	**747.500.000**	**2**	**246.492.500**	**3**	**146.500.000**	**3**	**297.420.000**	**3**	**297.420.000**	**3**	**127.964.000**
		7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	320.000.000	2	246.492.500	1	65.000.000	1	247.368.000	1	247.368.000	1	83.780.000
		7	01	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5	142.500.000	2	-	1	26.500.000	1	-	1	-	1	
		7	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200	285.000.000	0	-	40	55.000.000	9	50.052.000	9	50.052.000	9	44.184.000
		7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**Laporan**	**50**	**2.496.000.000**	**9**	**626.998.315**	**10**	**425.500.000**	**10**	**283.787.200**	**10**	**299.859.700**	**10**	**4.726.500**

		7	**01**	**01**	**2**	**06**	**01**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	40.500.000	1	6.123.450	1	8.000.000	0	-	0	-	0	-
		7	**01**	**01**	**2**	**06**	**02**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1.428.000.000	1	261.652.350	1	205.000.000	1	67.124.200	1	70.338.200	0	0
		7	**01**	**01**	**2**	**06**	**03**	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	53.500.000	1	18.920.457	1	10.000.000	1	7.121.000	1	7.121.000	0	0
		7	**01**	**01**	**2**	**06**	**04**	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	231.000.000	1	16.025.000		45.000.000		-		-	0	-
		7	**01**	**01**	**2**	**06**	**05**	Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	87.500.000	1	26.044.500	1	17.500.000	1	17.419.000	1	30.277.500	1	579.500
		7	**01**	**01**	**2**	**06**	**06**	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	50	78.000.000	0	-	10	15.000.000	0	-	0	-	0	
		7	**01**	**01**	**2**	**06**	**07**	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5	107.500.000	0	-	1	20.000.000		-		-		
		7	**01**	**01**	**2**	**06**	**08**	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	300	112.000.000	12	-	60	22.000.000	60	-	60	-	12	
		7	**01**	**01**	**2**	**06**	**09**	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	358.000.000	12	298.232.558	12	73.000.000	12	192.123.000	12	192.123.000	12	4.147.000
		7	**01**	**01**	**2**	**06**	**11**	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	10.000.000	0	-	1	10.000.000	0	-	0	-	0	
		7	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan rencana kebutuhan barang**	**Laporan**	**35**	**213.000.000**	**14**	**134.190.000**	**7**	**287.000.000**	**1**	**86.069.000**	**1**	**179.658.000**		**76.473.000**
		7	**01**	**01**	**2**	**07**	**05**	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Unit	200	269000000	0	-	40	55.000.000	0	-	0	-	0	-
		7	**01**	**01**	**2**	**07**	**06**	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	200	213.000.000	15	134.190.000	40	43.000.000	18	86.069.000	18	179.658.000	18	76.473.000
		7	**01**	**01**	**2**	**07**	**07**	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	49	198.000.000	0	-	10	40.000.000	0	-	0	-	0	-
		7	**01**	**01**	**2**	**07**	**08**	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	5	146.000.000	0	-	3	30.000.000		-		-		
		7	**01**	**01**	**2**	**07**	**09**	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	161.500.000	0	-	3	37.000.000		-		-		
		7	**01**	**01**	**2**	**07**	**10**	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	31	252.000.000	0	-	6	50.000.000		-		-		
		7	**01**	**01**	**2**	**07**	**11**	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	160.000.000	0	-	5	32.000.000		-		-		
		7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan jasa**	**Laporan**	**20**	**9.197.000.000**	**4**	**3.523.651.958**	**4**	**1.848.500.000**	**4**	**929.051.489**	**4**	**929.051.489**	**4**	**1.136.351.489**
		7	**01**	**01**	**2**	**08**	**01**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	47.000.000			12	9.500.000		-		-		
		7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	417.000.000	12	250.071.958	12	83.000.000	12	106.251.489	12	106.251.489	12	106.251.489
		7	**01**	**01**	**2**	**08**	**03**	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	15	164.000.000		-	5	33.000.000		-		-		
		7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	8.616.000.000	13	3.273.580.000	13	1.723.000.000	13	822.800.000	13	822.800.000	13	1.030.100.000
		7	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terpelihara**	**Laporan**	**30**	**563.000.000**	**4**	**118.532.842,00**	**6**	**115.500.000**	**6**	**88.450.000**	**6**	**88.450.000**	**6**	**21.943.000**

		7	**01**	**01**	**2**	**09**	**06**	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	232.500.000	0	-	10	45.000.000	14	9.140.000	14	9.140.000		-
		09	**01**	**01**	**2**	**09**	**09**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	127.000.000		-	6	25.000.000		-		-		
		7	**01**	**01**	**2**	**09**	**10**	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	66.500.000	1	19.790.000,00	16	15.000.000	0	-	0	-		-
		7	**01**	**01**	**2**	**09**	**11**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	65.000.000		-	10	15.000.000		-		-		
2		**7**	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Mutu Pelayanan Publik**	**Nilai**	**4,01**	**5.776.088.000**	**0**	**3.095.803.355**	**3,51**	**1.158.890.000**	**3,51**	**1.080.149.650**	**3,51**	**1.094.406.750**	**3,51**	**1.306.016.150**
		7	**01**	**02**	**02**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan**	**Laporan**	**5**	**179.000.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	-	**0**	-	**0**	**-**
		7	**01**	**02**	**02**	**04**	**02**	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	179.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
		7	**01**	**02**	**02**	**04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Laporan**	**Laporan**	**5**	**5.776.088.000**	**2**	**3.095.803.355**	**1**	**1.158.890.000**	**1**	**1.080.149.650**	**1**	**1.094.406.750**	**1**	**1.306.016.150**
		7	01	02	02	04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	8	5.776.088.000	8	3.095.803.355	8	1.158.890.000	8	1.080.149.650	8	1.094.406.750	8	1.306.016.150
3		**7**	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**	**Persentase**	**86,67**	**3.419.000.000**	**86,67**	**940.811.100**	**73,33**	**685.000.000**	**73,33**	**1.001.088.220**	**73,33**	**1.007.248.220**	**100**	**1.005.683.220**
		7	**01**	**03**	**02**	**02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Laporan**	**Laporan**	**10**	**3.419.000.000**	**2**	**940.811.100**	**2**	**685.000.000**	**2**	**1.001.088.220**	**2**	**1.007.248.220**	**2**	**1.005.683.220**
		7	**01**	**03**	**02**	**02**	**02**	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	10	2.273.000.000	10	576.841.500	10	455.000.000	10	606.344.720	10	606.344.720	10	605.309.720
		7	**01**	**03**	**02**	**02**	**03**	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokma	5	1.146.000.000	5	363.969.600	5	230.000.000	5	394.743.500	5	400.903.500	5	400.373.500
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												**43.085.041.000**		**21.081.192.205**		**8.618.890.000**		**8.162.671.714**		**8.262.420.314**		**8.427.861.602**
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1 Tersedianya Anggaran Sesuai Kebutuhan Kecamatan																							
				2 Fasilitas yang memadai																			
				3 SDM yang berkompeten																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1 Keterbatasan Anggaran																							
				2 Fasilitas yang tidak memadai																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Melakukan Pemetaan Permasalahan dan melakukan penyesuaian kinerja yang sudah ditargetkan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya: Melakukan Perbaikan Target Kinerja yang lebih Realistis																							

Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan (2024)																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
I				II				III				IV				14 = 10+11+12+13			15 = 14 / 9 x 100%		16 = 8 + 14		17 = 16 / 7 x 100%		18
10				11				12				13													
K	Rp	%	F	K	Rp	%	F	K	Rp	%	F	K	Rp	%	F	K	F	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3,51	1.419.729.870	17,39	19	3,51	2.043.767.076	25,04	27	3,51	1.644.217.777	19,51	22,00	3,51	2.314.194.314	27,46	29	3,51	68	7.421.909.037	100	88,064	3,51	28.503.101.242	87,75	66,16	
	1.419.729.870	17,39	19		2.043.767.076	25,04	27		1.644.217.777	19,51	22,00		2.314.194.314	27,46	29	0	68	7.421.909.037	0	88,06	0	28.503.101.242	0	66,16	
	1.278.952.870	21,03	24	84,99	1.658.490.076	27,27	29		1.378.567.777	22,54	23		1.148.530.714	18,78	20	84,99	96	5.464.541.437	107,58	89,35	84,99	22.509.119.187	106,24	66,42	
2	-	-	63	2	444.000	100		2	-			1	-			7	63	444.000	100,00	100,00	21	102.339.500	58,33	19,24	
1		-	50		-	-			-			1	-			2	50	-	100,00	0,00	6	49.671.500	40,00	25,74	
1		-	75	1	444.000	100			-			1	-			3	75	444.000	100,00	100,00	9	33.096.500	60,00	19,35	
		-		1		-	50		-			1	-			2	50	-	100,00	0,00	6	19.571.500	60,00	11,65	
1	1.002.772.105	22,96	24	1	1.235.218.341	28,29	30	1	1.084.611.040	22,84	24		866.507.509			3	78	4.189.108.995	100,00	88,22	9	16.481.925.630	60,00	86,62	
112	1.002.772.105	23,47	25	224	1.230.088.341	28,79	30	112	1.057.863.040	23,05	24	111	866.507.509	18,88	20	559	99	4.157.230.995	100,00	90,56	1599	15.997.619.630	65,27	88,43	
0	-	-		3	5.130.000	5,45	34	3	26.748.000	16,95	17	0	-			6	51	31.878.000	50,00	20,20	18	484.306.000	30,00	51,69	
				1	-	-	50					1	-		50	2	100	-	100,00	0,00	6	69.000.000	60,00	100,00	
		-				-			-			1	-		100	1	100,00	-	0,00	0,00	3	-	60,00	0,00	
1			50									1			50				0,00	0,00	4	-	40,00	0,00	
1	-	-		1	98.356.500	76,86	90	1	4.536.000	3,54	10		-			3	100	102.892.500	100,00	80,41	5	349.385.000	33,33	46,74	
		-		1	67.080.000	80,07	81		-				-			1	81	67.080.000	100,00	80,07	3	313.572.500	60,00	97,99	
1			100													1	100	-	100,00	0,00	3	-	60,00	0,00	
		-		8	31.276.500	70,79	74	1	4.536.000	10,27	11		-			9	85	35.812.500	100,00	81,05	9	35.812.500	4,50	12,57	
2	-	-		2	-	-		3	579.500	12	13	1	3.211.500	68	69	8	82	3.791.000	80,00	80,21	17	630.789.315	34,00	25,27	
		-				-			-				-			0	-	-	0,00	0,00	1	6.123.450	20,00	15,12	
		-				-			-				-			0	-	-	0,00	0,00	1	261.652.350	20,00	18,32	
		-				-			-				-			0	-	-	0,00	0,00	1	18.920.457	20,00	35,37	
																0	-	-	0,00	0,00	1	16.025.000	20,00	6,94	
		-				-		1	579.500	100	100		-			1	100	579.500	100,00	100,00	2	26.624.000	40,00	30,43	

																			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
																			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
3			25	3			25	3			25	3			25	12	100	-	100,00	0,00	24	-	8,00	0,00	
3		-		3		-	10	3	-		12	3	3.211.500	**77**	78	12	100	3.211.500	100,00	77,44	12	301.444.058	100,00	84,20	
0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
	-	**-**			**-**	**-**			**-**				**-**			**0**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**14**	**134.190.000**	**40,00**	**63,00**	
0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
		-				-		0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0,00	0,00	15	134.190.000	7,50	63,00	
0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
																			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
																			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
																			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
																			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
1	**276.180.765**	**29,73**	**44**	**1**	**324.471.235**	**34,93**	**36**	**1**	**266.898.237,00**	**23,49**	**24**	**1**	**278.811.705**	**24,54**	**25**	**4**	**129**	**1.146.361.942**	**100,00**	**100,88**	**8**	**4.670.013.900**	**40,00**	**50,78**	
3			25	3			25	3			25	3			25	12	100		0,00	0,00			0,00	0,00	
3	22.830.765	21,49	23	3	22.831.235	21,49	23	3	23.863.237	22,46	24	3	29.986.705	28,22	30	12	100	99.511.942	100,00	93,66	12	349.583.900	100,00	83,83	
																			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
4	253.350.000	24,59	36	3	301.640.000	29,28	29	3	243.035.000	23,59	24	3	248.825.000	24,16	24	13	113	1.046.850.000	100,00	101,63	13	4.320.430.000	100,00	50,14	
	-	**-**			**-**	**-**		**2**	**21.943.000**	**100,00**	**100**		**-**			**2**	**100,00**	**21.943.000**	**33,33**	**100,00**	**6**	**140.475.842**	**20,00**	**24,95**	
		-				-			-				-			0	-	-	0,00	0,00	0	44.013.542	0,00	123,98	
		-				-		2	21.943.000	100,00	100		-			2	100,00	21.943.000	100,00	100,00	9	76.672.300	25,71	210,06	

		-				-			-				-			0	-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
																			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
		-				-			-				-			0	-	-	0,00	0,00	1	19.790.000	16,67	29,76	
																			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
														RATA - RATA CAPAIAN					107,58	89,35			106,24	66,42	
														PREDIKAT KINERJA					ST	T			ST	S	
	140.777.000	**10,78**	**11**		**385.277.000**	**29,50**	**37**		**265.650.000**	**20,34**	**21,00**		**270.381.000,00**	**20,70**	**21**	**0**	**90,00**	**1.062.085.000**	**0,00**	**81,32**	**0**	**4.157.888.355**	**0,00**	**71,98**	
		-				**-**			**-**				**-**			**0**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		-				-			-				-			0	-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
	140.777.000	**10,78**	**11**	**1**	**385.277.000**	**29,50**	**37**		**265.650.000**	**20,34**	**21**		**270.381.000**	**20,70**	**21**	**1**	**90,00**	**1.062.085.000**	**100,00**	**81,32**	**3**	**4.157.888.355**	**60,00**	**71,98**	
2	140.777.000	10,78	11	3	385.277.000	29,50	37	1	265.650.000	20,34	21	2	270.381.000	20,70	21	8	90,00	1.062.085.000	100,00	81,32	8	4.157.888.355	100,00	71,98	
														RATA - RATA CAPAIAN					**0,00**	**81,32**			**0,00**	**71,98**	
														PREDIKAT KINERJA					SR	T			SR	S	
	-	**-**			**-**	**-**			**-**			**100**	**895.282.600,00**	**89,02**	**90**	**100**	**90,00**	**895.282.600**	**100,00**	**89,02**	**100**	**1.836.093.700**	**115,38**	**53,70**	
	-	**-**			**-**	**-**			**-**			**2**	**895.282.600**	**89,02**	**90**	**2**	**90,00**	**895.282.600**	**100,00**	**89,02**	**4**	**1.836.093.700**	**40,00**	**53,70**	
		-				-			-			10	547.283.000	**90,41**	91	10	91,00	547.283.000	100,00	90,41	20	1.124.124.500	200,00	49,46	
		-				-			-			5	347.999.600	**86,92**	89	5	89,00	347.999.600	100,00	86,92	5	711.969.200	100,00	62,13	
														RATA - RATA CAPAIAN					**100,00**	**89,02**			**115,38**	**53,70**	
														PREDIKAT KINERJA					ST	T			ST	R	
	1.419.729.870				**2.043.767.076**				**1.644.217.777**				**2.314.194.314**					**7.421.909.037**							
																			69,19	**88,06**					
																			S	**T**					

1. **Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.**

   Kecamatan Tebing tidak ada Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2024.

2. **Realisasi Program/Kegiatan yang Telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.**

   Pada Tahun 2024 Kecamatan Tebing dapat merealisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

PROGRAM, KEGIATAN, PAGU, REALISASI ANGGARAN, OUTPUT SERTA DAMPAKNYA TAHUN 2024

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	INPUT		OUTPUT		OUTCOME		MENUNJANG/ KURANG	%	EFESIENSI
						Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
A	**KECAMATAN TEBING**													
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**6.761.361.372**	**6.006.136.615**	**6.761.361.372**	**6.006.136.615**	78,5		***Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat***				
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**41.792.937**	***35.847.500***	**41.792.937**	***35.847.500***	7 Dokumen	7 Dokumen	***Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD***	***7 dokumen***	***Sangat menunjang***	***85,77***	***Tersedianya dokumen renja dan renstra serta LKJip dan laporan keuangan***
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.792.937	*35.847.500*	41.792.937	*35.847.500*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	***Sangat menunjang***	***85,77***	***Tersedianya Dokumen Renja dan Renstra***
			2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	29.003.329	17.438.000	29.003.329	17.438.000	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	***Sangat menunjang***	60,12	**Tersedainya LKJiP dan laporan keuangan**

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.127.022	19.571.500	30.127.022	19.571.500	2 Laporan	2 Laporan	***Tersediany a Laporan***	***2 Laporan***	***Sangat menunjang***	***65***	***Tersedianya Laporan Evaluasi Renja***
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		***5.015.008.097***	***4.432.559.412***	***5.015.008.097***	***4.432.559.412***	2 Laporan	2 Laporan	***Tersediany a Laporan***	***2 Laporan***	***Sangat menunja ng***	***81,94***	***Tersedianya Laporan***
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.828.360.097	2.478.716.358	3.014.457.208	2.478.716.358	504 org/bln	504 org/bln	504 org/bln	504 org/bln	***Sangat menunja ng***	***82,23***	***Tersedianya Laporan gaji dan Tunjangan ASN***
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	186.648.000	139.986.000	186.648.000	139.986.000	12 Dokumen	12 Dokume n	12 Dokumen	12 Dokume n	***Sangat menunja ng***	***75***	***Tersedianya LaporanAdminis trasi Tugas ASN***
	3. Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah		***50.000.000***	***49.202.000***	***50.000.000***	***49.202.000***	***1 Laporan***	***1 Laporan***	***Tersediany a Laporan***	***1 Laporan***	***Sangat menunja ng***	***98,40***	***Tersedianya Laporan***
		1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapa nnya	50.000.000	49.202.000	50.000.000	49.202.000	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	***Sangat menunja ng***	***98,40***	***Tersedianya Laporan***
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		***155.167.840***	***106.546.365***	***155.167.840***	***106.546.365***	***5 Laporan***	***5 Laporan***	***Tersediany a Laporan***	***5 Laporan***	***Sangat menunja ng***	***68,67***	***Tersedianya Laporan***
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.546.591	1.773.450	6.546.591	1.773.450	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	***Kurang menunja ng***	***27.9***	***Tersedianya Laporan***

	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	57.351.351	36.971.300	57.351.351	36.971.300	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	***Sangat menunjang***	***64,46***	***Tersedianya Laporan***
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.203.898	2.926.457	7.203.898	2.926.457	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	***Kurang menunjang***	***40,62***	***Tersedianya Laporan***
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	19.056.000	13.207.500	19.056.000	13.207.500	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	***Sangat menunjang***	***69,30***	***Tersedianya Laporan***
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.010.000	51.667.658	65.010.000	51.667.658	120 Laporan	94 Laporan	120 Laporan	94 Laporan	***Sangat menunjang***	***79,48***	***Tersedianya Laporan rapat dan SPPD***
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		***140.120.789***	***134.190.000***	***140.120.789***	***134.190.000***	***1 Laporan***	***1 Laporan***	***Tersediany a Laporan***	***1 Laporan***	***Sangat menunjang***	***95,77***	***Tersedianya Laporan***
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.120.789	134.190.000	140.120.789	134.190.000	15 Unit	1 paket	1 paket	1 paket	***Sangat menunjang***	***95,77***	***Tersedianya Laporan Pengadaan barang mesin lainnya***
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		***1.206.160.050***	***1.164.081.838***	***1.206.160.050***	***1.164.081.838***	***2 laporan***	***2 laporan***	***Tersediany a Laporan Capaian Kinerja SKPD***		***Sangat menunjang***	***96,51***	***Tersedianya Laporan***
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.860.050	86.101.838	90.860.050	86.101.838	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	***Sangat menunjang***	***94,76***	***Tersedianya Laporan***
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.115.300.000	1.077.980.000	1.115.300.000	1.077.980.000	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	***Sangat menunjang***	***96,65***	***Tersedianya Laporan***

	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	***93.981.308***	***46.700.000***	***93.981.308***	***46.700.000***	***2 laporan***	***2 laporan***	***Tersediany a Laporan***		***Sangat menunja ng***	***49,69***	***Tersedianya Laporan***
	1. PenyediaanJasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaa n, Pajak, danPerizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	73.981.750	26.910.000	73.981.750	26.910.000	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	***Sangat menunja***	***36,37***	***Tersedianya Laporan Pajak dan pemeliharaan Kendaraan***
	2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	19.999.558	19.790.000	19.999.558	19.790.000	10 unit	1 unit	10 unit	1 unit	***Sangat menunja ng***	***98,95***	***Tersedianya Laporan***

2.	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**1.104.945.997**	**1.074.981.255**	**1.104.945.997**	**1.074.981.255**	**3,50**		***Indeks Mutu Pelayanan Publik***		***Sangat menunjang***	**97,29**	
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	**1.104.945.997**	**1.074.981.255**	**1.104.945.997**	**1.074.981.255**	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	***Sangat menunja ng***	**97,29**	***Tersedianya Laporan MTQ, Musrembang, PKK, LAM, Gaji bahu jalan, RT/RW, Kebersihan dan Kegiatan LH***
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.104.945.997	1.074.981.255	1.104.945.997	1.074.981.255	8 Laporan	8 laporan	8 Laporan	8 laporan	***Sangat menunja ng***	**97,29**	***Tersedianya Laporan MTQ, Musrembang, PKK, LAM, Gaji bahu jalan, RT/RW, Kebersihan dan Kegiatan LH***

3.	**Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan**			***999.945.215***	***940.811.100***	***999.945.215***	***940.811.100***	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				***Sangat menunjang***	***94,09***	***Tersedianya Laporan Usulan***
	1.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			**999.945.215**	**940.811.100**	**999.945.215**	**940.811.100**	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	***Sangat menunjang***	***94,09***	***Tersedianya Laporan***
		1.Pembangunan Sarana		599.145.015	576.841.500	599.145.015	576.841.500	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	***Sangat menunjang***	***96,28***	***Tersedianya Laporan***
		2.Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		400.800.200	363.969.600	400.800.200	363.969.600	5 pokmas	5 pokmas	5 pokmas	5 pokmas	***Sangat menunjang***	***90,81***	***Tersedianya Laporan***

3. **Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.**

   Kecamatan Tebing tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2024.

4. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan**

   Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja, penetapan anggaran kas sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan.

5. **Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra KecamatanTebing**

   Dengan adanya capaian program Renstra Perangkat Daerah maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terencana dan teranggarkan, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik bisa tercapai.

6. **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

   Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam hal perencanaan, pengganggaran baik itu Kasubbag PRK, PPTK serta staf yang menangani perencanaan dan penganggaran serta para pejabat eselon III, sehingga capaian target kinerja program/kegiatan lebih optimal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

Pemerintah Kecamatan Tebing merupakan pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman ketertiban, pelayanan umum dan pemberi pelayanan administrasi ditingkat Kecamatan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Tebing menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pemerintahan, pembangunan dan masyarakat diperlukan beberapa upaya serta tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dapat di lihat dari tabel analisis pencapaian kinerja Kecamatan Tebing antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.3

Analisa Pencapaian Kinerja Kecamatan Tebing

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode							Kondisi kinerja pada Akhir periode
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	70	75	78	78,5	79	79,5	80	80
AKIP Kecamatan Tebing	Nilai	53,45	54	60	61	62	63	64	64
Indeks Pelayanan Publik	Nilai	2,75	2,90	3,01	3,50	3,51	3,55	4,00	4,00
Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Persen	50	56	59	59	59	59	59	59

Dapat di lihat dari tabel dibawah ini berkaitan dengan capaian kinerja Kecamatan Tebing antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.4

Capaian Kinerja Kecamatan Tebing

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	AKIP Kecamatan Tebing	37.50	52,59	32.94	-	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	75	78,3	79	84,99

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh

dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Presentase Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tebing, memiliki target sebesar 79 dengan realisasi sebesar 84,99 (B), Kategori Pelayanan **BAIK**, pada penilaian AKIP Kecamatan Tebing memiliki target sebesar 62 dengan realisasi sebesar - Kategori **-**, terus meningkatan baik kuantitas dan kualitas SDM maupun sarana dan prasarana penunjang peralatan kantor serta kebijakan internal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Tebing melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai visi dan Misi melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan perlu dipahami terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut :

2.3.1 Reformasi Birokrasi atau Penataan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pelayanan yang prima langkah strategis yang ditetapkan Kecamatan Tebing adalah :

a. Menyiapkan petugas pelayanan yang terampil
b. Memberikan kesempatan petugas pelayanan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
c. Mendorong untuk bekerja yang professional dengan memberikan penghargaan bagi petugas yang disiplin dan berprestasi serta memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan;

2.3.2 Peningkatan sarana dan prasarana

Untuk menunjang pelayanan yang baik diperlukan sarana dan prasarana sebagai berikut :

a. Menyediakan tempat pelayanan yang mudah didapat oleh masyarakat;
b. Menyediakan papan informasi mengenai mekanisme atau tata cara dan prosedur pelayanan;

c. Melengkapi perangkat dan peralatan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan;
d. Menyediakan pengaduan masyarakat melalui media elektronik (telephone, whatsApp)

2.3.3 Upaya-upaya lain yang perlu dilakukan

Langkah dan upaya sangat diperlukan demi kemajuan suatu organisasi. Berikut ini upaya yang harus dilakukan di Kecematan Tebing antara lain sebagai berikut :

a. Sosialisasi dan memberi informasi kepada masyarakat setiap ada kegiatan dan pertemuan warga mengenai sistem pelayanan di Kecamatan Tebing;
b. Memberikan informasi dan penekanan kepada Kepala Desa/Lurah melalui komperensi untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam pelayanan di tingkat Desa/Kelurahan;
c. Menyederhanakan prosedur pelayanan dengan tetap mengedepankan aturan- aturan yang telah ditetapkan;
d. Menanggapi setiap ada pengaduan masyarakat 1 kali 24 jam untuk segera ditindaklanjuti.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal

Rancangan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja Tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Tebing Tahun 2025 yang memuat usulan program dan kegiatan Tahun 2024 yang terdiri dari 3 program dengan 11 kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Tebing Tahun 2025. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Karimun

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE PRJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATOR (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PERIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	**UNSUR WILAYAH**	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4		3,5	3,51							3,55		
7,01	**KECAMATAN**	Nilai AKIP Kecamatan Tebing	64		61	62							63		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	Rp 5.083.097.188	78,5	79	Rp6.775.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	79,5	Rp 6.890.500.000	Kecamatan Tebing
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	36 Dokumen	Rp 29.038.500	7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 106.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	8 Dokumen	Rp 110.000.000	Kecamatan Tebing
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	Rp 13.824.000	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 38.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	3 Dokumen	Rp 40.000.000	Kecamatan Tebing
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	Rp 15.214.500	3 Laporan	3 Laporan	Rp 34.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	3 Laporan	Rp 35.000.000	Kecamatan Tebing
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	Rp -	2 Laporan	2 Laporan	Rp 34.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	2 Laporan	Rp 35.000.000	Kecamatan Tebing
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	15 Laporan	Rp 3.714.377.596	3 Laporan	3 Laporan	Rp3.816.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	3 Laporan	Rp 3.836.500.000	Kecamatan Tebing
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.450 Org Bln (35 Org x 70 Bln)	Rp 3.592.319.596	560 Org Bln (40 Org x 14 Bln)	560 Org Bln (40 Org x 14 Bln)	Rp3.615.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	560 Org Bln (40 Org x 14 Bln)	Rp 3.629.000.000	Kecamatan Tebing
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp 122.058.000	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 185.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	12 Dokumen	Rp 190.000.000	Kecamatan Tebing
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	Rp -	2 Laporan	2 Laporan	Rp 16.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	2 Laporan	Rp 17.500.000	Kecamatan Tebing
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	5 Laporan	Rp 229.428.500	1 Laporan	1 Laporan	Rp 30.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	1 Laporan	Rp 35.000.000	Kecamatan Tebing

	7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	10 Laporan	Rp -	2 Laporan	2 Laporan	Rp 30.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	2 Laporan	Rp 35.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	15 Laporan	Rp -	3 Laporan	3 Laporan	Rp 146.500.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	3 Laporan	Rp 160.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	Rp -	1 Paket	1 Paket	Rp 65.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	1 Paket	Rp 70.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 26.500.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	1 Dokumen	Rp 30.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Org	Rp -	40 Org	40 Org	Rp 55.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	40 Org	Rp 60.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	50 Laporan	Rp 229.428.500	10 Laporan	10 Laporan	Rp 425.500.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	10 Laporan	Rp 452.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 3.000.000	1 Paket	1 Paket	Rp 8.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	1 Paket	Rp 8.500.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 84.855.600	1 Paket	1 Paket	Rp 205.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	1 Paket	Rp 213.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Rp 11.794.000	1 Paket	1 Paket	Rp 10.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	1 Paket	Rp 12.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket	Rp -	1 Paket	1 Paket	Rp 45.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	1 Paket	Rp 50.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Rp 9.117.000	1 Paket	1 Paket	Rp 17.500.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	1 Paket	Rp 18.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	50 Dokumen	Rp -	10 Dokumen	10 Dokumen	Rp 15.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	10 Dokumen	Rp 18.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	5 Paket	Rp -	1 Paket	1 Paket	Rp 20.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	1 Paket	Rp 22.500.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	300 Laporan	Rp -	60 Laporan	60 Laporan	Rp 22.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	60 Laporan	Rp 25.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan Rapat 250 Laporan SPPD	Rp 120.661.900	70 Laporan Rapat 50 Laporan SPPD	70 Laporan Rapat 50 Laporan SPPD	Rp 73.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	70 Laporan Rapat 50 Laporan SPPD	Rp 75.000.000	Kecamatan Tebing

	7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	1 Dokumen	Rp 10.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan rencana kebutuhan barang	35 Laporan	Rp -	7 Laporan	7 Laporan	Rp 287.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	7 Laporan	Rp 315.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	200 Unit	Rp -	12 unit	40 unit	Rp 55.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	40 unit	Rp 60.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	200 Unit	Rp -	15 unit	40 unit	Rp 43.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	40 unit	Rp 45.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan lainnya yang disediakan	49 Unit	Rp -	7 unit	10 unit	Rp 40.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	12 unit	Rp 45.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	5 Unit	Rp -	3 unit	3 unit	Rp 30.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	3 unit	Rp 35.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp -	3 unit	3 unit	Rp 37.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	1 unit	Rp 42.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana yang disediakan	31 Unit	Rp -	6 unit	6 unit	Rp 50.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	6 unit	Rp 55.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp -	5 Unit	5 Unit	Rp 32.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	5 Unit	Rp 38.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan jasa	20 Laporan	Rp 1.076.903.292	4 Laporan	4 Laporan	Rp1.848.500.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	7 Laporan	Rp 1.855.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	60 Laporan	Rp -	12 Laporan	12 Laporan	Rp 9.500.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	12 Laporan	Rp 10.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 82.223.292	12 Laporan	12 Laporan	Rp 83.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	12 Laporan	Rp 85.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 Laporan	Rp -	5 Laporan	5 Laporan	Rp 33.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	5 Laporan	Rp 35.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Rp 994.680.000	13 Laporan	13 Laporan	Rp1.723.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	13 Laporan	Rp 1.725.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terpelihara	30 Laporan	Rp 33.349.300	6 Laporan	6 Laporan	Rp 115.500.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	6 Laporan	Rp 127.000.000	Kecamatan Tebing

	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	Rp 6.980.000	12 Unit	12 Unit	Rp 7.500.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	12 Unit	Rp 8.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	Rp 26.369.300	7 Unit	7 Unit	Rp 8.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	7 Unit	Rp 8.500.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Rp -	10 Unit	10 Unit	Rp 45.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	10 Unit	Rp 50.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Rp -	6 Unit	6 Unit	Rp 25.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	6 Unit	Rp 30.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	Rp -	16 Unit	16 Unit	Rp 15.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	16 Unit	Rp 15.500.000	Kecamatan Tebing
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Rp -	10 Unit	10 Unit	Rp 15.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	10 Unit	Rp 15.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	4,01	Rp 977.216.500	3,5	3,51	Rp1.193.890.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	3,55	Rp 1.203.198.000	Kecamatan Tebing
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan	5 Laporan	Rp -	1 Laporan	1 Laporan	Rp 35.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	1 Laporan	Rp 40.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Rp -	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 35.000.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	2 Dokumen	Rp 40.000.000	Kecamatan Tebing
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan	5 Laporan	Rp 977.216.500	1 Laporan	1 Laporan	Rp1.158.890.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	1 Laporan	Rp 1.163.198.000	Kecamatan Tebing
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Di limpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	Rp 977.216.500	1 Laporan	1 Laporan	Rp1.158.890.000	Kecamatan Tebing	APBD	-	Ya	Kecamatan Tebing	1 Laporan	Rp 1.163.198.000	Kecamatan Tebing
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	86,67%	Rp -	66,67%	73,33%	Rp 685.000.000	Kelurahan	APBD	-	Ya	Kelurahan	80%	Rp 690.000.000	Kelurahan
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan	10 Laporan	Rp -	2 Laporan	2 Laporan	Rp 685.000.000	Kelurahan	APBD	-	Ya	Kelurahan	2 Laporan	Rp 690.000.000	Kelurahan
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	Rp -	10 Unit	10 Unit	Rp 455.000.000	Kelurahan	APBD	-	Ya	Kelurahan	10 Unit	Rp 458.000.000	Kelurahan
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokma	Rp -	5 Pokma	5 Pokma	Rp 230.000.000	Kelurahan	APBD	-	Ya	Kelurahan	5 Pokma	Rp 232.000.000	Kelurahan

Tabel 2.6
REKAPITULASI USULAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023
USULAN ANGGARAN TAHUN 2024

NO	LOKASI KEGIATAN KELURAHAN/DESA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	LOKASI	FHOTO LOKASI	UKURAN	STATUS LAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*			*6*
I. KELURAHAN PAMAK							
1	Normalisasi	Daerah yang letakknya dikaki bukit ini sering mengalami banjir di musim penghujan karena letaknya yang rendah dan dikelilingi bukit	agar daerah ini tidak banjir lagi disetiap musim penghujan	RT 001,RT 002,RT 003 ,RT 004 RW 002 Pamak		1 Km x 2 m	Jalan Umum
2	Batu Miring	Pembangunan batu miring bermanfaat untuk mencegah terajdinya longsor	Untuk Penahan Tanah agar tidak terjadi longsor	RW 003, dan RW 003 Pamak		5 x 50 Meter	Milik Umum
II. KELURAHAN TEBING							
1	Pengaspalan Jalan perbatasan RT 002 RT 005 RW 002						

2	Pengaspalan Jalan	Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan Ekonomi di wilayah Kampung Baru Kel. Tebing perlu adanya Insfrastruktur pendukung diantaranya adalah Pembangunan sarana Jalan sebagai media transportasi	untuk meningkatkan taraf perekonomian Masyarakat dalam mengatasi masalah kondisi Lingkungan serta sebagai sarana lalu lintas warga yang memadai	RT 001 RW 003 Kampung Baru Tebing		260 M x 400 M	Fasilitas Umum
III. KELURAHAN HARJOSARI							
1	Semenisais jalan	kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk pejalan kaki dan kendaraan, batu-batu koral dan besi sudah banyak yang timbul sehingga sangat berpengaruh terhadap aktifitas masyarakat di kelurahan Harjosari.	meningkatkan kualitas jalan supaya pengendara dan pejalan kaki lebih aman melewati tempat tersebut	RT 001 RW 001 Gg kampung Toga		4 m x1,5 Km	Jalan Umum
2	Pembangunan Drainase	Dalam rangka meningkat pertumuhan ekonomi khususnya diwilayah Kampung Harapan, maka perlu adanya sarana pendukung yang memadai salah satunya pembangunan drainase dan gorong-gorong	Tujuan kegiatan ini adalah supaya di wilayah Kampung Harapan RT.002 RW.002 tidak banjir pada musim hujan.	RT 002 RW 002 ((Belakang rmh Hj.Salmah)		300 M	Fasilitas Umum

IV. KELURAHAN KAPLING							
1	Pengaspalan Jalan	Adanyal keluhan masyarakat tentang jalan retak dan berlubang sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan rawan kecelakaan.	mencegah terjadinya kecelakaan, adanya genangan air serta memberikan solusi kenyamanan bagi pengendara.	Gg Melur RT 002 RW 001		4 x 160 m	Jalan Umum
2	Semenisasi Jalan	Adanya keluhan masyarakat adanya kerusakan jalan retak dan berlubang sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Jika tidak segera diatasi, sangat berpotensi menjadikan jalan rawan kecelakaan dan adanya genangan air.	untuk mencegah terjadinya kecelakaan, adanya genangan air serta memberikan solusi kenyamanan bagi pengendara	RT.001 RW.002 Bukit Balai Permai		140m x 0,6m x 0,6m	Fasilitas Umum

V. KELURAHAN TELUK UMA							
1	Pembangunan Balai pertemuan RW 002	Perlu kiranya membangun Balai Pertemuan. Untuk melakukan berbagai kegiatan, misalnya kegiatan sosial, penyuluhan, kesehatan dan pertemuan – pertemuan lainnya. Dengan adanya balai pertemuan tersebut dapat membantu masyarakat melakukan kegiatan – kegiatan seperti diatas.	Dapat membantu masyarakat khususnya RW.002 mengadakan pertemuan atau kegiatan sosial warga yang selama ini belum ada tempat.	RW 002 Teluk Uma		Panjang 10 m x Lebar 10 m	Milik KSM Indah Berseri
2	Batu Miring TPU Kamboja	pemasangan batu miring merupakan upaya pencegahan masyarakat untuk menjaga agar tanah atau bahu jalan yang tergerus air, tidak longsor atau curah air hujan yang mengakibatkan banjir.	Agar tanah disekitar lokasi TPU kamboja tidak mudah hancur atau rusak meski tergerus air selokan atau air hujan.	RT.001 RW.001 TPU KambojaTeluk Uma		Panjang 20 m x tinggi 4 m	Fasilitas Umum
VI. DESA PONGKAR							
1	Pembangunan Tembok Penahan tanah (Turap)	Kondisi tanah yang semakin hari semakin runtuh akibat(abrasi) aliran anak sungai sehingga makin lama kain lebar dan adanya pohon yang tumbang maka dipandang perlu untuk membuat turap tanah	Agar tanah dipinggiran anak sungai aman dan tidak roboh akibat air apalgi saat hujan	RT 002 RW 003 desa Pongkar		0,5 m x 2,5 m x 60 m	Milik warga
2	Pembangunan Gedung SMPn 4 Satap	Kondisi akses jalan menuju PAUD tidak baik	Meningkatkan mutu pendidikan serta menunjang kelancaran akses jalan menuju PAUD	RT 002 RW 003 Desa Pongkar			Dinas Pendidikan Karimun

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renja SKPD.

Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kabupaten/Kota

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien , sehingga misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi dapat terwujud dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan fungsi kecamatan dalam kurun waktu hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan keputusan Bupati Karimun Nomor 123-B.b Tahun 2016;
b. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundangan serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang telah mengalami dua kali perubahan terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
d. Meningkatkan kualitas kinerja kepala seksi yang berhubungan secara langsung dalam pencapaian visi dan misi Kecamatan;
e. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan sesuai visi, misi kecamatan dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Tebing melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);

f. Meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pembangunan;
g. Meningkatkan potensi sumber daya manusia dan ekonomi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah bahwa RPJMD Daerah sebagai jabaran visi misi kepala daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional program-program pembangunan dan kegiatan pokok.

Salah satu yang termuat di dalam RPJMD tersebut adalah program satuan kerja perangkat daerah (Renstra-SKPD) yang dalam penyusunannya mengacu kepada visi misi dan program kepala daerah. Sebagai salah satu SKPD yang ada di Kabupaten Karimun maka Kecamatan Tebing harus mempersiapkan Renja sebagai Dokumen Rencana Kerja Kecamatan 1 tahun yang akan datang.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan organisasi. Kegiatan merupakan tindakan nyata kecamatan tebing dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Program dan kegiatan Kecamatan Tebing Tahun 2023 sebagai berikut :

3.3.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan/ Material

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Mebeleur

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Pengadaan Aset Tak Berwujud

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

3.3.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3.3.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025, Tema Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah "Peningkatan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Sumber Daya Manusia yang Unggul" dan *Tagline* "Karimun Bangkit, Karimun Sehat, dan Bangkit Ekonomi, Bangkit Infrastruktur, SDM Unggul" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2025, maka prioritas Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Tahun 2025 menguraikan rumusan rencana program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan dan pagu indikatif untuk proyeksi pendanaan Tahun 2025.

Rumusan Program/Kegiatan Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Tahun 2025 direncanakan sebanyak 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 43 (empat puluh tiuga) Sub Kegiatan dengan total kebutuhan dana atau pagu indikatif sebesar **Rp 7.433.034.877,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)**, yang dapat dilihat secara detail pada tabel dibawah ini, yaitu sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF	
							2025	
							TARGET	RP (000)
1	2	3	4		5		6	7
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					**Indeks Pelayanan Publik (IPP)**	**Nilai**	**4,38**	**7.433.034.877**
	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Tebing				**Nilai AKIP Kecamatan Kec. Tebing**	**Nilai**	**50**	**7.433.034.877**
	2. Nilai Manajemen Resiko				**Nilai Management Resiko**	**Persen**	**2,8**	**7.433.034.877**
		7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**1.Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah**	Nilai	79,5	**5.648.310.877**
					2. Persentase Temuan Inspektorat/BPK yang di Tindaklanjuti	Persen	**57,0**	
					3. Persentase Rekomendasi Kinerja yang Ditindaklanjuti	Persen	**57,0**	
		7 01 01 2 01	***Perencanaan, Penganggaran, dan***	***Meningkatnya Kualitas***	***1. Nilai Evaluasi Kinerja Perencanaan***	***Nilai***	***50***	**-**

						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Perencanaan dan Evaluasi Kinerja***	***2. Persentase Kegiatan Renja yang diakomodir dalam DPA PD***	***Persen***	***70***	
		7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	**1 Dokumen** - Renja	-
		7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	**3 Dokumen** - Lapkin - Perjanjian Kinerja (PK) - Realisasi PK	-
		7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	**1 Laporan** - Evaluasi Renja	-
		7	***01***	***01***	***2***	***02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Meningkatnya Kualitas Pengelolaan***	***1. Persentase kegiatan yang anggarannya terealisasi ≥95%***	***Persen***	***65***	***4.731.032.888***

				Keuangan					
					2. Persentase serapan anggaran PD	***Persen***	***65***	
		7 01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	560 Org Bln (40 Org x 14 Bln)	4.731.032.888
		7 01 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Dokumen	-
		7 01 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2 Laporan	-
		7 01 01 2 03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Meningkatnya Efesiensi Pengelolaan***	***Persentase Barang milik daerah yang terkelola dengan baik***	***Persen***	***60***	***-***

				Barang				
		7 01 01 2 03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2 Laporan - Laporan Rekonsiliasi - Laporan Asset OPD	-
		7 01 01 2 05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepegawaiaan***	***1. Persentase Pegawai dengan kinerja "Baik"***	***Persen***	***60***	***75.000.000***
					2. Persentase Pegawai yang mengikuti Bimtek/Pelatihan	***Persen***	***70***	
		7 01 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1 Paket	75.000.000

		7	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang	40 Org	
		7	***01***	***01***	***2***	***06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi umum perkantoran***	***1. Persentase dokumen yang diarsip sesuai aturan***	***Persen***	***60***	***465.589.500***
										2. Persentase Surat Menyurat yang di Kelola	***Persen***	***60***	
		7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	8.958.000

		7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	196.188.500
		7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 Paket	3.890.000
		7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	-
		7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	133.531.000
		7	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/ Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1 Paket	-
		7	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12 Laporan	-
		7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 Laporan	123.022.000

		7	01	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD	Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen	-
		7	***01***	***01***	***2***	***07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Meningkatnya Sarana Prasarana Kerja yang Memadai***	***Persentase Pengadaan Aset***	***Persen***	***60***	***-***
		7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Unit	4	-
		7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	-
		7	01	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-
		7	01	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	-

		7	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-
		7	***01***	***01***	***2***	***08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang***	***Persentase Layanan Jasa Penunjang yang terpenuhi***	***Persen***	***60***	***307.001.489***
		7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	-
		7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	106.251.489
		7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5 Laporan	-
		7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13 Laporan	200.750.000

		7	***01***	***01***	***2***	***09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Meningkatnya Pemeliharaan Asset***	***Persentase Asset dalam kondisi baik***	***Persen***	***60***	***69.687.000***
		7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5 Unit	-
		7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5 Unit	58.097.000
		7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5 Unit	11.590.000,00

		7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5 Unit	-
		7	01	01	2	09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	-
		7	01	01	2	09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	-
		7	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik di Wilayah**	**Indeks Mutu Pelayanan Publik (kategori)**	**Nilai**	**B**	**785.291.000**

				Kecamatan				
		7 01 02 2 04	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	***Persentase kegiatan pelimpahan yang mengatasi permasalahan kecamatan***	***Persentase kegiatan pelimpahan yang mengatasi permasalahan kecamatan***	***Persen***	***65***	***785.291.000***
		7 01 02 2 04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Di limpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase kegiatan pelimpahan yang mengatasi permasalahan kecamatan	Laporan	8 Laporan	785.291.000
		7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN**	**Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan**	1. Persentase Desa/Kelurahan yang Program Kerjanya Terealisasi > 80%	Persentase	100%	**999.433.000**
		7 01 03 2 02	***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***	***Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***	***Jumlah Laporan***	***Laporan***	***2 Laporan***	***999.433.000***
		7 01 03 2 02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	Unit	5 Unit	595.235.000

				Kelurahan	Terbangun			
		7 01 03 2 02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5 Pokmas	404.198.000
		7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Meningkatnya koordinasi dan sinergitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Meral**	Persentase Laporan Kasus Ketentraman dan Ketertiban yang ditindak lanjuti	**Presentase**	0%	-
		7 01 04 02 01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Meningkatnya Koordinasi Berkala dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Laporan hasil koordinasi yang ditindak lanjuti	**Persentase**	0%	-

		7	01	04	02	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Meral	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1 Laporan	-
		7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Jenis Urusan Fasilitasi Administrasi Tata Pemeritahan Desa		3 Jenis Urusan	3 Jenis Urusan

Tebing, 2025

CAMAT TEBING

KHAIDIR, S.Sos

NIP. NIP. 19780130 200003 1 005

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tebing Kabupaten karimun Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Tebing Tahun 2021-2026, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Karimun serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Tebing Kabupaten karimun yang merupakan perencanaan program dan kegiatan satu tahun kedepan dibuat secara efektif dan partisipatif, dengan dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Tebing untuk menjamin keberhasilan program/kegiatan Renja (program tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra SKPD (program 5 tahun), maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rencana Kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Tebing selain menjadi program/kegiatan selama tahun 2025 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk perencanaa pada tahun berikutnya.

Rencana program di Kecamatan Tebing tahun 2025 merupakan program Pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kerja aparatur Kecamatan Tebing pada periode 2025. Dalam pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Tebing yang pelaksanaannya bersifat efisien, tepat sasaran dan berdaya guna serta berhasil guna sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Karimun yang ditetapkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tebing selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Tebing Renja maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Tebing yang ditetapkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tebing selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun 2025 **berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Tebing sehingga dianggap perlunya dilakukan peningkatan dibidang SDM nya dengan mengikuti pelatihan atau bimtek**. RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun oleh Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Tebing sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja. Perangkat Daerah RENJA tahun 2025, dengan berdasarkan azaz perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan, pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi untuk melaksanakan kegiatan yang akan datang guna meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan Kecamatan.

Tebing, 2025

CAMAT TEBING

KHAIDIR, S.Sos

NIP. NIP. 19780130 200003 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

KECAMATAN KUNDUR

RENCANA KERJA
(RENJA)

Disusun
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah merubah fungsi Kecamatan sebagai perangkat wilayah dalam asas Dekonsentrasi menjadi perangkat daerah dalam asas Desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankantugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ***"Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah".***

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU N0. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, harus disertai tanggung jawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen.Komitmen-komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Rencana Kerja SKPD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang dibuat setiap tahun melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam penyusunannya harus

memperhatikan berbagai sektor dan permasalahan yang ada. Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyatakan, Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Kecamatan Kundur Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke-5 dari Rencana Strategis Kecamatan Kundur, yang mengacu pada Keputusan Camat Kundur Nomor Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Kundur Tahun 2025 . Fungsi Renja Kecamatan Kundur adalah menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Kecamatan Kundur ke dalam program dan kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RENSTRA Kecamatan Kundur Tahun 2025 -2030.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun dalam bentuk dokumen rencana kerja SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dalam menunjang pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kundur Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah mengalami dua kali perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor 07);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2025 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016);

9. Keputusan Bupati Karimun Nomor 123-B.b Tahun 2025 tantang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 – 2026;

10. Keputusan Camat Kundur Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Tahun 2025 .

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Kundur Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA SKPD Kecamatan Kundur Tahun Anggaran 2023dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Kundur pada Tahun 2025 .

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Kundur Tahun 2025 adalah :

a. Untuk merumuskan program dan kegiatan SKPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kundur selama Tahun 2025 .
b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.
c. Menciptakan efisiensi alokasi sumberdaya dalam perencanaan pembangunan daerah
d. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan berikutnya.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi Kecamatan Kundur adalah salah satu Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Karimun yang mempunyai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Karimun. Struktur Organisasi Kecamatan Kundur terdiri dari :

a. Camat;
b. Sekretariat;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
f. Seksi Lingkungan Hidup;
g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
h. Sub Bagian Perencanaan Keuangan;
i. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur organisasi Kecamatan Kundur adalah sebagaimana gambar dibawah ini.

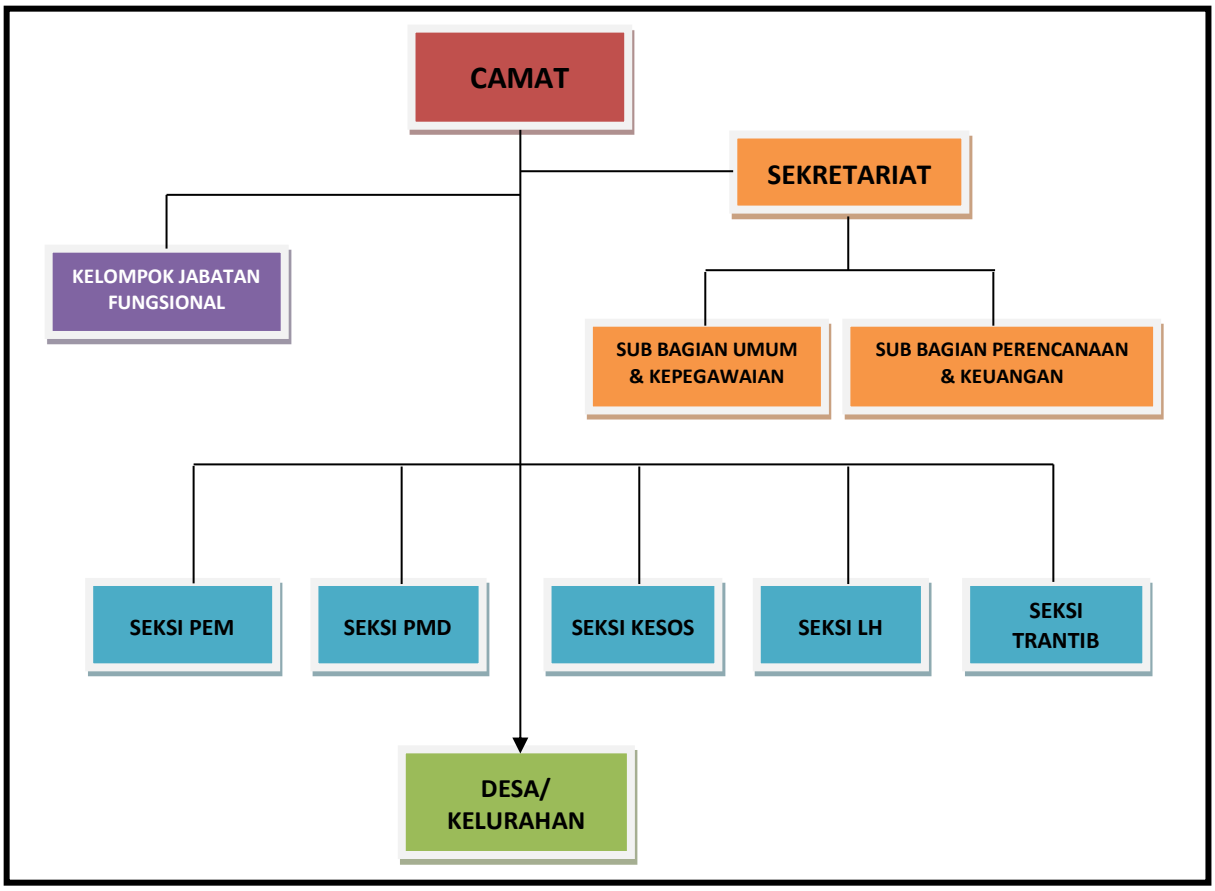

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Kundur Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan rencana kerja Kecamatan Kundur, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun Lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang terdiri dari Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Rencana Kerja Kecamatan Kundur Tahun 2025 .

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

Pada bab ini diuraikan tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUSI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 278 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD dan apabila hal hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. Hasil evaluasi Renja SKPD menjadi bahan bagi penyusunan Renja SKPD untuk tahun berikutnya.Evaluasi terhadap Renja Baperlitbang Kabupaten Karimun Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kundur sampai dengan tahun 2030 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Renja Kecamatan Kundur Tahun 2024 dan Perkiraan Realisasi Kinerja Program Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan Renja (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Tah5n 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=(7/6)**	**9**	**10**	**11**
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	**Panjang Jalan yang Terpelihara (km)**	**30 km**	**30 km**	**30 km**	**30 km**	**100%**	**30 km**	**30- km**	**100%**
	Kebersihan Jalan	Jumlah Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Bahu Jalan	Jumlah Jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100%
	Program Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan	**Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan**	**5 Kegiatan**	**5 Kegiatan**	**5 Kegiatan**	**5 Kegiatan**	**100%**	**5 Kegiatan**	**5 Kegiatan**	**100%**
	MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang	245 Orang	245 Orang	245 Orang	245 Orang	100%	245 Orang	245 Orang	100%
	Pelaksanaan Bazar MTQ Tingkat Kabupaten	Jumlah Stand	1 Stand	1 Stand	1 Stand	1 Stand	100%	1 Stand	1 Stand	100%
	Pengiriman Kafilah Kecamatan Pada MTQ Kabupaten Karimun	Jumlah Orang	-	60 Orang	60 Orang	60 Orang	100%	60 Orang	-	-
	Peringatan Hari Besar Islam	Jumlah Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Qori Qoriah Kecamatan	Jumlah Orang	-	24 Orang	24 Orang	24 Orang	100%	24 Orang	-	-
	Silahturahmi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Rangka Perayaan Hari Raya Aidil Fitri	Jumlah Jenis	-	-	13 Jenis	13 Jenis	100%	13 Jenis	-	-
	Silahturahmi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Rangka Perayaan Hari Raya Aidil Adha	Jumlah Jenis	-	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	100%	9 Jenis	9 Jenis	100%

Pengantaran dan Penjemputan Jemaah Calon Haji/Jemaah Haji Kecamatan	Jumlah Orang	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	**Luas Ruang Terbuka Hijau yang Terkelola**	**25 km**	**25 km**	**25 km**	**25 km**	**100%**	**25 km**	**25 km**	**100%**
Pemeliharaan Lampu Jalan, Hias dan Taman	Jumlah Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	4 Jenis	100%
Pengadaan Tong Sampah	Jumlah Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan Masyarakat Berperilaku Sehat	Jumlah Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	**Persentase Kader PKK yang aktif**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Keikutsertaan Kecamatan dalam Kegiatan Jambore Posyandu Tingkat Kabupaten Karimun	Jumlah Orang	-	-	-	-	-	-	-	-
Keikutseraan Kecamatan dalam Kegiatan Jambore Kader PKK Tingkat Kabupaten Karimun	Jumlah Orang	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan PKK dan Posyandu	Jumlah Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	**Jumlah Beras yang Tersalurkan (Ton)**	**-**	**154 Ton**	**154 Ton**	**154 Ton**	**100%**	**-**	**-**	**-**
Penyaluran Beras Sejahtera (RASTRA)	Jumlah Penerima	-	854 KPM	854 KPM	854 KPM	100%	-	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Realisasi Pemenuhan terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Jumlah Jenis	24 Jenis	24 Jenis	24 Jenis	24 Jenis	100%	24 Jenis	24 Jenis	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Realisasi terhadap Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Pengadaan Mebeleur	Jumlah Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Jumlah Unit	-	-	-	-	-	-	-	-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Pakaian Batik RT/RW	Jumlah Pakaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Pakaian Seragam Paskibraka dan Kelengkapannya	Jumlah Pakaian	30 Stel	30 Stel	30 Stel	30 Stel	100%	30 Stel	30 Stel	100%
Pengadaan Pengadaan Pakaian Batik dan Olahraga Kelurahan	Jumlah Pakaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Rata-rata Capaian Kinerja ASN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Bimbingan Teknis pemantapan Penyusunan SKP PNS Se-Kecamatan	Jumlah Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelatihan Komputer bagi Aparatur	Jumlah Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Nilai AKIP Kecamatan**	**58%**	**57%**	**57%**	**57%**	**100%**	**58%**	**58%**	**100%**
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintahan (LAKIP)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Program Pembinaan dan Fasilitasi Daerah Bawahan	**Persentase Daerah Bawahan yang terfasilitasi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pembinaan RT/RW Se-Kabupaten Karimun	Jumlah Aparatur	116 Aparatur	116 Aparatur	116 Aparatur	116 Aparatur	100%	116 Aparatur	116 Aparatur	100%
Sosialisasi dan Pembinaan TP-UKS Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Sekolah-sekolah Se-Kecamatan	Jumlah Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Pembinaan dan Operasional Kelurahan Tg. Batu Kota	Jumlah Jenis	28 Jenis	28 Jenis	28 Jenis	28 Jenis	100%	28 Jenis	28 Jenis	100%
Administrasi Pembinaan dan Operasional Kelurahan Tg. Batu Barat	Jumlah Jenis	28 Jenis	28 Jenis	28 Jenis	28 Jenis	100%	28 Jenis	28 Jenis	100%
Administrasi Pembinaan dan Operasional Kelurahan Gading Sari	Jumlah Jenis	28 Jenis	28 Jenis	28 Jenis	28 Jenis	100%	28 Jenis	28 Jenis	100%
Pembinaan Tugas Pokok dan Fungsi RT/RW Se-Kecamatan	Jumlah Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan Tertib Administrasi Desa/Kelurahan Se-Kecamatan	Jumlah Kegaiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tg. Batu Kota	Jumlah Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tg. Batu Barat	Jumlah Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gading Sari	Jumlah Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir dalam Dokumen Perencanaan**	**78%**	**77%**	**77%**	**77%**	**100%**	**77%**	**78%**	**100%**
Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Penyusunan Perjanjian Kinerja Semua Eselon dan Pengukuran Indikator Kinerja OPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Evaluasi Renstra OPD	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan OPD melalui Pameran dan Pawai Pembangunan	Jumlah Promosi	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum		**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**-**	**-**
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tg. Batu Kota		-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tg. Batu Barat		-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gading Sari		-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Kundur menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu adanya standar pelayanan minimal.Standar pelayanan minimal merupakan tolak ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut diatas, Maka dapat diidentifikasikan beberapa faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan visi/misi secara efektif dan efisien. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsiKecamatan Kundur dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1. Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya;
2. Mengadakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Meningkatkan system pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien;
4. Meningkatkan system informasi manajemen yang handal;
5. Mengoptimalkan aparatur yang profesional yang didukung oleh system pengembangan karier yang berbasis kompetensi dan presetasi.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tugas dan fungsi Kantor Camat Kundur yang merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan memiliki wilayah kerja tertentu, dengan demikian baik gambaran tentang kondisi umum daerah maupun kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan, akan difokuskan pada pelaksanaan teknis kewilayahan di Kecamatan Kundur.

Kecamatan Kundur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran proses dalam pencapaian tujuan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan, kelemahan yang merupakan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kundur antara lain :

a. Belum maksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap kepala seksi sebagai pelaksana teknis tugas Camat, disebabkan kode rekening untuk kecamatan hanya program rutin yang sama disetiap SKPD, sedangkan untuk menunjang tupoksi Kepala seksi tidak tercantum dalam Permendagri no.13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, dilihat dari komposisi latar belakang pendidikan dari seluruh personil yang terdapat di Kecamatan Kundur

c. Pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal, dan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki.

Disamping kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Kundur juga memiliki beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Kundurdalam mencapai Visi dan Misi antara lain :

a. Struktur organisasi Kecamatan Kundur berdasarkan pada peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Karimun, merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

b. Sarana informasi yang berbasis teknologi informasi memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak terkait meliputi: jaringan komputer, internet,faksimile dan telepon.

d. Sarana dan prasarana kerja di Kecamatan Kundur sekalipun dengan segala keterbatasan kualitas dan kuantitas, namun sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, meliputi, gedung, ruang kantor, ruang pertemuan, sarana transportasi dan peralatan perkantoran.

e. Kesempatan berkontribusi terhadap perumusan kebijakan daerah masih terbatas hanya sebagai pelaksana teknis kewilayahan, sehingga kebijakan dengan konsep pembangunan kurang maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

f. Adanya hubungan yang dinamis dengan masing-masing SKPD membantu pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati ke Kecamatan.

2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kundur pada tahun 2014 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Karimun dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FKPK), UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Kundur maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KUNDUR

3.1. PENELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien, sehingga misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan Visi dapat terwujud dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Kundur dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan Tahun 2025 , adalah sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Karimun Nomor. 38.B Tahun 2007,

b. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan

c. Menyusun usulan anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

d. Meningkatkan kualitas kinerja Kepala Seksi yang berhubungan secara langsung dalam pencapaian visi dan misi Kecamatan.

e. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan sesuai visi, misi dan kebutuhan masyarakat

Kecamatan Kundur melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

f. Meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pembangunan

g. Meningkatkan potensi sumber daya manusia dan ekonomi

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, Kecamatan Kundur Tahun 2025 -2026, adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Kantor Camat Kundur dalam Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya kualitas palayanan masyarakat di Kecamatan Kundur	Tingkat kepuasan masyarakat	85 %

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Berdasarkan Renstra Kecamatan Kundur Tahun 2017-2024 maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 yang menjadi tanggung jawab Pejabat Eselon III, sebagaimana table dibawah ini :

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET TAHUN 2025	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN 2024		CATATAN MONITORING
								Target	Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik (Good Governance)	1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kundur	1 Meningkatnya Capaian Kinerja Kecamatan Kundur	1 Nilai AKIP Kecamatan Kundur	CC (> 58)	1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP OPD	> 59 CC	15.000	
						2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam Dokumen Perencanaan	79%	95.000	

		2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Kundur	1	Meningkatnya Capaian Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Kundur	1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	84%	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Realisasi Pemenuhan Rencana Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.760.000	
									2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Realisasi Pemenuhan terhadap saran dan Prasarana Aparatur	100%	189.000	
									3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai	100%	90.000	
									4	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Jumlah Beras yang tersalurkan (Ton)	154 Ton	0	
									5	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan yang terpelihara (km)	30 km	92.504	
									6	Program Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	5 Kegiatan	2.500.000	
									7	Program Pembinaan dan Fasilitasi Daerah Bawahan	Persentase Daerah Bawahan yang terfasilitasi	100%	2.140.703	
									8	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah Cabang Olah Raga yang dilaksanakan	1 Kegiatan	10.000	
									9	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase Kader PKK yang aktif	94%	20.000	
									10	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau yang terkelola	25 km	90.000	
JUMLAH													**7.032.207**	

Sementara program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 yang menjadi tanggung jawab Pejabat Eselon IV, sebagaimana tabelberikut ini :

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET TAHUN 2025	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN 2024		CATATAN MONITORING
										Target	Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik (Good Government)	1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kec. Kundur	1 Meningkatnya Capaian Kinerja Kecamatan Kundur	1 Terwujudnya Perencanaan yang baik	1 Persentase Perjanjian Kinerja (PK) yang sesuai dengan RENJA	97%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon III, IV dan Pengukuran Indikator Kinerja OPD	Jumlah Dokumen	1 Dok	30,000	
					2 Persentase RENJA yang selaras dengan RENSTRA	97%						
					3 Ketepatan waktu penyampaian RENJA	7 hari						
					4 Ketepatan waktu penyampaian Perjanjian Kinerja (PK)	7 hari						

						5	Ketepanatn waktu penyampaian usulan data Musrenbang dari Desa/ Kelurahan	7 hari					
						6	Persentase kehadiran masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan	100%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen	1 Dok (5 Eks)	30,000
					2 Terwujudnya pelaporan kinerja yang baik	1	Ketepatan waktu penyelesaian dokumen RENJA	21 hari	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen	1 Dok (10 Eks)	15,000
						2	Ketepatan waktu penyelesaian dokumen LAKIP	30 hari	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	Jumlah Dokumen	1 Dok (10 Eks)	15,000
						3	Ketepatan waktu penyelesaian dokumen LPPD	12 hari					
						4	Persentase kesesuaian dokumen LAKIP dengan SAKIP	94%					
						5	Persentase kesesuaian dokumen RENJA dengan Permendagri No.54 Tahun 2010	94%					
		2 Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Kundur	1	Meningkatnya capaian kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Kundur	1 Meningkatnya Pengelolaan Adm. Kependudukan dan Adm. Non Kependudukan Kecamatan Kundur	1	Persentase Penduduk yang melakukan perekaman e-KTP	94%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelaayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Jumlah Jenis	24 Jenis	1,710,000
										Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Jumlah Jenis	13 Jenis	50,000
									Program Pembinaan dan Fasilitas Daerah Bawahan	Administrasi Pembinaan dan Operasional Kel. Tg. Batu Kota	Jumlah Jenis	28 Jenis	105,832
										Administrasi Pembinaan dan Operasional Kel. Tg. Batu Barat	Jumlah Jenis	28 Jenis	105,832
										Administrasi Pembinaan dan Operasional Kel. Gading Sari	Jumlah Jenis	28 Jenis	105,832
						2	Persentase Kepala Keluarga yang melakukan pengurusan Kartu Keluarga	98%					

						3	Jumlah Penduduk yang mengurus surat menyurat kategori surat keterangan tepat waktu	96%						
						4	Jumlah Penduduk yang mengurus surat menyurat kategori Legalisasi tepat waktu	94%						
						5	Jumlah penduduk yang mengurus surat menyurat kategori surat dokumen tepat waktu	94%						
						6	Tingkat Kesesuaian data kependudukan terhadap data Desa/ Kelurahan	94%						
						7	Tingkat kesesuaian data non kependudukan terhadap Desa/ Kelurahan	94%						
					2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan di Kecamatan Kundur	1	Jumlah LINMAS yang aktif di Lingkungan Kec. Kundur	79%						
							2	Jumlah Kasus Kamtibmas yang difasilitasi/ ditinjaklanjuti	95%						
							3	Jumlah Kasus Sosial yang difasilitasi/ ditinjaklanjuti	98%						
							4	Persentase forum keagamaan yang aktif dilaksanakan	95%	Program Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan	MTQ Tingkat Kecamatan Kundur	Jumlah Orang (Peserta, Panitia & Dewan Hakim)	245 Orang	56,000	
											Bazar MTQ Tingkat Kabupaten Karimun	Jumlah Stand Pameran	1 Stand	44,000	
											Pengiriman Kafilah Kecamatan Kundur ke MTQ Tingkat Kabupaten Karimun	Jumlah Orang	60 Orang	30,000	
											Silahturahmi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kecamatan Kundur dalam rangka Perayaan Hari Raya Idul Adha	Jumlah Jenis	13 Jenis	40,000	

								Peringatan Hari Besar Islam	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	10.000	
								Pengantaran dan Penjemputan Jemaah Calon Haji/Jemaah Haji Kecamatan	Jumlah Orang	80 Orang	10.000	
								Pembinaan Qori Qori'ah Kecamatan	Jumlah Orang	24 Orang	10.000	
								MTQ Tingkat Kabupaten	Jumlah Peserat	12 Kecamatan	2.300.000	
				3	Meningkatnya kebersihan lingkungan di Kecamatan Kundur	1	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki tempat/tong sampah	74%	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan Bahu Jalan	Jumlah Jenis	4 Jenis	82,504	
										Kebersihan Jalan	Jumlah Jenis	4 Jenis	10,000	
						2	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki sanitasi yang layak	79%						
									Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Sosialisasi dan publikasi kegiatan SKPD melalui pameran pembangunan	Jumlah Promosi	1 Promosi	5,000	
										Penyusunan Profile Kecamatan	Jumlah Dokumen	1 Dok (10 Eks)	5.000	
									Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	11 Jenis	60,000	
										Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit	1 Unit	20,000	-
										Pengadaan Maubelair Kantor	Jumlah Unit	200 Unit	55.000	
										Pengadaan Maubelair Gedung Pertemuan Kecamatan	Jumlah Unit	200 Unit	54.000	
										Pengadaan Partisi Kantor	Jumlah Jenis	0 Jenis	0	
									Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Batik RT/RW	Jumlah Pakaian	200 Stel	50,000	
										Pengadaan Pakaian Seragam Paskibra dan Kelengkapannya	Jumlah Pakaian	30 Stel	40,000	
									Proram Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) Kabupaten Karimun	Jumlah Penerima	854 KPM	0	
									Program Pembinaan dan Fasilitasi Daerah Bawahan	Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pembinaan RT/RW se-Kabupaten Karimun	Jumlah Aparatur	116 RT/RW	140,000	

										Sosialisasi dan Pembinaan TP-UKS Kecamatan, Desa/Kelurahan, Sekolah se-Kecamatan	Jumlah Peserta	200 Peserta	10,000	
										Pembinaan Tugas Pokok dan Fungsi RT/RW Se-Kecamatan	Jumlah Peserta	200 Peserta	10.000	
										Pembinaan Tertib Administrasi Desa/Kelurahan se-Kecamatan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	10.000	
									Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Keikutsertaan Kecamatan Kundur dalam Turnamen Bupati Cup	Jumlah Orang	50 Orang	10,000	
									Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Keikutsertaan Kecamatan dalam Kegiatan Jambore Kader PKK Tingkat Kabupaten Karimun	Jumlah Orang	15 Orang	7,500	
										Keikutsertaan Kecamatan dalam Jambore Posyandu Tingkat Kabupaten Karimun	Jumlah Orang	15 Orang	7,500	
										Pembinaan PKK dan Posyandu	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	5.000	
									Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Pemeliharaan Lampu Jalan, Hias dan Taman	Jumlah Jenis	4 Jenis	70,000	
										Pengadaan Tong Sampah	Jumlah Unit	50 Unit	10.000	
										Pembinaan Masyarakat Berprilaku Sehat	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	10,000	
									Program Pembinaan dan Fasilitas Daerah Bawahan	Peningkatan Sarana dan Prasana Kelurahan Tg. Batu Kota	Jumlah Persentase	Persentase	551,069	
										Peningkatan Sarana dan Prasana Kelurahan Tg. Batu Barat	Jumlah Persentase	Persentase	551,069	
										Peningkatan Sarana dan Prasana Kelurahan Gading Sari	Jumlah Persentase	Persentase	551,069	
Jumlah													**7,032,207**	

Sedangkan rumusan perencanaan Program dan Kegiatan serta perkiraan maju tahun 2022, sebagaimana tabel dibawah ini :

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN KUNDUR

2/14/2021

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Karimun

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN KUNDUR

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN KUNDUR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**8,460,000,000**					**9,683,000,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**6,969,000,000**					**8,133,000,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**145,000,000**					**175,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan		2 Dokumen		65,000,000	Dana Insentif Daerah				75,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan		2 Dokumen		60,000,000	Dana Insentif Daerah				70,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan		1 Dokumen		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN KUNDUR

7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,410,000,000**					**5,250,000,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Pegawai		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan		30 Orang		4,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Bulan		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan		12 Bulan		210,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**80,000,000**					**90,000,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan		130 Stel		80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				90,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**226,000,000**					**260,000,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Kegiatan		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		3,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Kegiatan		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				85,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Kegiatan		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Kegiatan		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60,000,000

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN KUNDUR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Kegiatan		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Kegiatan		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		15,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Kegiatan		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				85,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**95,000,000**					**110,000,000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Kegiatan		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				90,000,000
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Jenis		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan		1 Jenis		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,872,000,000**					**2,078,000,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Kegiatan		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8,000,000

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Kegiatan		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		64,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Pegawai		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan		70 Orang		1,800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,000,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**141,000,000**					**170,000,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kegiatan		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				80,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Kegiatan		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		31,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Kegiatan		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**1,361,000,000**					**1,400,000,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**1,361,000,000**					**1,400,000,000**

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN KUNDUR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Kegiatan		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan		7 Kegiatan		1,361,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,400,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**130,000,000**					**150,000,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**130,000,000**					**150,000,000**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Kegiatan		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan		3 Kegiatan		100,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				110,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan		Kab. Karimun, Kundur, Semua Kelurahan		3 Kegiatan		30,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				40,000,000
												TOTAL	**8,460,000,000**					**9,683,000,000**

BAB IV
PENUTUP

Renja Kecamatan Kundur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025 dilingkup Kecamatan Kundur. Renja Kecamatan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Kecamatan Kundur tahun 2021–2026 yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya dan memuat permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kundur dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan wajib yang diemban oleh Kecamatan Kundur sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Karimun. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Kecamatan Kundur.

Tanjung Batu, Pebruari 2024

CAMAT KUNDUR

[illegible], SE, MM
Pembina
NIP. 19670613 199303 1 011

https://karimunkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/plan/lampiran/2022/renja/1/522/2799?JUECMzcf14jkpNNJv03xPk5UzwVv876lzr4PQ1DWIvk=

RENCANA KERJA KECAMATAN UNGAR (RENJA)

TAHUN 2025

KABUPATEN KARIMUN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Ungar Tahun 2025. Rencana Kerja ini merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) yang tertuang dalam rencana kerja Kecamatan Ungar tahun 2025.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ungar ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang baik oleh kecamatan Ungar. Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana kerja ini bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sekian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya.

C A M A T

BOLKYA AYADI, S.IP
PEMBINA
NIP. 19880210 200701 1 003

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. Rencana Kerja SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Ungar dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD.

Kecamatan Ungar selaku perangkat daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ungar. Rencana kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategi dan dalam penyusunannya mengacu rencana kerja pemerintah daerah. Rencana kerja juga sebagai bahan masukan untuk rencana kerja anggaran perangkat daerah.

RENJA SKPD Kecamatan Ungar Tahun 2025 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Ungar untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dari 3 desa dan 1 kelurahan. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Ungar tahun 2025 didasarkan pada ketentuan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 107, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemrimbangan Keuangan agtara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
7. Keputusan menteri dalam negeri 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578:);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4817);;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peaturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Perartueran Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepualauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 53);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Karimun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2010 Nomor 18)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten KarimunTahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 Lembaran Daerah kabupaten Karimun;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Ungar tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam perangkat daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Adapun Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah:

1. Acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Ungar Tahun 2025;
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang akuntabel, partisipatif dan tepat sasaran;
4. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Ungar Tahun 2025 dengan target dan sasaran Pembangunan daerah.
5. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Ungar di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini berisi kajian (review) terhadap hasil evaluasi, analisa kerja Pelayanan SKPD, isu-isu penting dan Review terhadap Rancangan awal Kecamatan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tugas pokok dan Renstra Kecamatan.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan atau catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya dari seluruh bab yang dimuat didalam Renja Kecamatan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Ungar pada tahun 2024 dapat dilihat dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam renja tahun bersangkutan. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

Aggaran Belanja : 3.565.492.959

Realisasi : 3.077.671.999

Sisa : 487.820.960

Anggaran Belanja sebesar Rp. 3.565.492.959 dapat terserap sebesar Rp. 3.077.671.999 atau 86,31 %.

Berikut ini disampaikan pula rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Rencana kerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ungar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Ungar selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

2.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja inii diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2.1.2 Target Kinerja Pelayanan Kecamatan Ungar

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama.

Tabel 2.1.2

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET
01	Nilai AKIP Kecamatan Ungar	62,00
02	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,5
03	Persentase Temuan Inspektorat/BPK yang di Tindaklanjuti	72 %
04	Persentase Rekomendasi Kinerja yang ditindaklanjuti	72 %
05	Mutu Pelayanan Publik	3,01
06	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	60 %
07	Persentase Kelurahan yang program kerjanya terealisasi >80%	60 %
08	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	65 %
09	Persentase Laporan Kasus Ketentraman dan Ketertiban yang di Tindaklanjuti	80 %
10	Persentase Kasus Ketentraman dan Ketertiban yang di Fasilitasi Kecamatan	80 %

2.1.7 Kebijakan atau Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang diambil untuk mengatasi Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya dan Terpenuhinya Target Kinerja

Kebijakan atau tindakan Perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya target kinerja yaitu sebagai berikut :

- Peningkatan Kualitas pelayanan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM aparatur Kecamatan;
- Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan kewilayahan;
- Koordinasi dalam pelaksaan tugas dengan instansi terkait;
- Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Kewilayahan

2.3 . Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Isu-isu penting adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010).

Adapun isu penting yang diperhatikan untuk Kecamatan Ungar adalah :

❖ **Rumusan Permasalahan Strategis yang Dihadapi Masa Kini**

Berdasarkan analisa lingkungan yang berpengaruh terhadap pencapaian visi, misi, baik secara internal maupun eksternal, ada beberapa permasalahan strategis yang dihadapi masa kini, yaitu :

a. Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan;
b. Pedoman pengelolaan daerah yang berubah-ubah aturan;
c. SDM Aparatur yang ada tidak sesuai kebutuhan.
d. Kecendrungan penurunan moralitas dan rendahnya keteladanan pimpinan di semua lapisan.
e. Dampak krisis finansial global.
f. Menurunnya kwalitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akibat pemanasan global dan rendahnya pemeliharaan lingkungan.
g. Semakin tingginya ancaman penyakit.
h. Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan merata.
i. Tuntutan akan pendidikan yang berkualitas dan tejangkau di berbagai lapisan masyarakat.
j. Adanya tuntutan terhadap ketahanan pangan yang bermutu, sehat, merata dan terjangkau.
k. Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
l. Peningkatan pemerataan kondisi infrastruktur dan lingkungan bagi kehidupan masyarakat yang sehat dan nyaman.
m. Tingginya tuntutan profesionalisme kinerja aparat pemerintah dalam pelayanan mayarakat.

❖ **Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang Berpengaruh Pada Tupoksi Kecamatan**

Berdasarkan rumusan, permasalahan strategis yang dihadapi masa kini, diperlukan beberapa rumusan perubahan untuk mencapai tujuan pada lima tahun yang akan datang.

a. Tugas Pokok dan Fungsi kecamatan perlu penyesuaian karena merupakan SKPD sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004;
b. Perlu adanya beberapa perubahan berkaitan dengan kewenangan;
c. Perlu pemahaman bersama kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan khususnya oleh SKPD terkait;
d. Penyesuaian anggaran berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baru

❖ **Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang Perlu Dilakukan.**

a. Menambah jumlah pegawai yang berkualitas sesuai keahliannya;
b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya;
c. Menambah jumlah anggaran sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
d. Meningkatkan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat;
e. Peraturan Perundangan yang mendukung visi dan misi tidak berubah-ubah;
f. Menjadikan Kecamatan sebagai SKPD murni

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan yaitu sebagai berikut :

1. Terbatasnya Kapasitas Pemerintah Daerah

   Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah ditunjukkan dari kurangnya pemahaman dan keterampilan pegawai di bidang-bidang tugas yang membutuhkan keahlian khusus, diantaranya adalah operator komputer, arsiparis, dan administrasi kependudukan. Sementara mutasi antar SKPD juga menjadi salah satu penyebab, karena kaderisasi menjadi terbatas dilakukan bagi pegawai di lingkungan Kantor Camat Ungar. Selain itu terdapat pula keterbatasan anggaran bagi pengembangan sumber daya manusia pegawai.

   Keterbatasan kualitas adalah satu sisi, sedangkan keterbatasan kuantitas ada di sisi lainnya. Kurangnya jumlah aparatur yang mempunyai

keadilan dibidangnya ini terutama dirasakan pada staf kantor camat umumnya dan kantor camat Ungar khususnya.

Minimnya penguasaan teknologi informasi juga menjadi satu keterbatasan mengingat penguasaan teknologi informasi menjadi prasyarat dasar bagi peningkatan pengetahuan dan efektivitas serta efisiensi kerja. Lemahnya penguasaan tentu diikuti dengan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan prinsip-prinsip serta teknologi e–Government di kalangan aparatur pemerintahan. Perkembangan yang cepat dari teknologi informasi dan komunikasi belum ditangkap sebagai peluang dan kekuatan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, khususnya guna mengatasi sulitnya komunikasi daerah kepulauan.

Selain kapasitas sumber daya manusia, terdapat pula masalah terkait kelembagaan. Salah satu masalah kelembagaan yang terekam adalah masih dirasa belum jelasnya ketentuan-ketentuan daerah yang mengatur pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat. Camat dan Lurah bekerja melaksanakan tugas-tugas eksekutif, namun perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas-tugas itu dirasakan masih kurang, termasuk juga pelrindungan prosedural jika terdapat pemanggilan-pemanggilan Camat dan Lurah dari instansi-instansi lain.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Perkantoran

Masih dijumpai permasalahan mengenai sarana dan prasarana yang belum optimal, Fasilitas teknologi informasi juga belum optimal tersediakan padahal manfaatnya besar untuk menunjang kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Sejalan dengan usia alat/barang, maka kualitasnya pun semakin menurun sehingga banyak dibutuhkan penggantian atau pemeliharaan.

Belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belum banyak kerjasama antar daerah yang dilaksanakan dalam penyediaan pelayanan publik

dan menangkap dampak *multiplier* positif (*spill over*) terutama di daerah perbatasan antar daerah, termasuk dengan kabupaten-kabupaten perbatasan di bagian selatan dan barat.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan program dan kegiatan Masyarakat dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayananan atau dari LSM dan organisasi-organisasi. Penelaahan usulan program didapat dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan dari tingkat Kelurahan hingga ke tingkat Kecamatan yang selanjutnya akan disampaikan lagi ke tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Usulan atau isu-isu strategis penyelenggaraan kegiatan masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5

Usulan Prioritas Musrenbang Tahun 2025

KECAMATAN		
1	Pembangunan Gedung Serba Guna Kantor Camat Ungar	Jl. Abdul Manaf RT.002/RW.001 Sungai Buluh
2	Pembangunan Jalan Bunga Tanjung Gorap Kelurahan Alai Kecamatan Ungar	Jalan Bunga Tanjung Gorap RT.01, RT,02 , RW 02 Kelurahan Alai Kecamatan Ungar
3	Rehab Kantor Camat Ungar	Jl. Abdul Manaf RT.002/RW.001 Sungai Buluh
4	Partisi Ruang Kantor Camat Ungar	Jl. Abdul Manaf RT.002/RW.001 Sungai Buluh
KELURAHAN ALAI		
5	Jembatan Penyambung dari Pelabuhan Besar ke Pelabuhan Nelayan	Jl. Abdul Latif RT.001 / RW.003 Kelurahan Alai
6	Semenisasi jalan	Jl. A. Latif Kelurahan Alai RT.01/RW.08
DESA BATU LIMAU		
7	Pembangunan Dermaga Rakyat dan Ruang Tunggu Batu Limau	Jalan Laot Tanjung, RT.001/RW.04 Dusun 02 Batu Limau
8	Pengaspalan Jalan	Jl. Haji Ali, RT.002/RW.001 Dusun 01 Sekubang Desa Batu Limau
9	Batu Miring / Tembok Penahan Tanah (TPT) Parit dan Pintu Air	Jl. Tok Husin, RT.001/RW.05 dan RT.002/RW.05 Dusun 03 Telusin
DESA SUNGAI BULUH		
10	Pembangunan Pintu Air	Jl. Awang Tjik. RT. 02 / RW 02 Desa Sungai Buluh
11	Normalisasi Sungai	Jl. Abdul Manaf RT.02 / RW.01 Dusun I Desa Sungai Buluh
12	Pembangunan Pelabuhan Rakyat	Jl. Abdul Manaf RT.02 / RW.01 Dusun I Desa Sungai Buluh
DESA NGAL		
13	Pelabuhan Manda Desa Ngal	RT 001 RW 001 Dusun III Pulau Manda Desa Ngal
14	Pembangunan Semenisasi Rehab Jalan	Dusun I RT 001 Laut Kedai/ Dusun II RT 001 Kp.Tengah / RT 002 Telok Besar Desa Ngal
15	Pembangunan Penyambungan Jalan	Dusun I RT 002/ RW 001 Pl.Propos Desa Ngal
16	Pembanguan Semenisasi Jalan	RT.002/RW.001 Dusun III Pulau Manda Desa Ngal

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM

DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Tinjauan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu Indonesia bepenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Deaerah Terpilih

Berdasarkan pemahaman atas isu strategis pembangunan yang potensial dihadapi pada periode 2021-2026, arahan dari RPJPD Kabupaten Karimun 2021-2026, serta arahan dari visi dan misi RPJMN 2021-2026, maka kami merumuskan visi pembangunan daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa”

3.3 Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Karimun 2021-2026 tersebut, maka ditempuh melalui lima misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa
4. Meningkatkan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup
5. Mewujudkan birokrasi yang professional dan unggul

Dalam melaksanakan roda kepemerintahan, Kecamatan mengacu pada misi

Kabupaten yang ke- 5. Berdasarkan misi yang ditetapkan tersebut, maka tujuan, sasaran dan Indikator sasaran pembangunan Kabupaten Karimun untuk lima tahun ke depan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 5. Mewujudkan Birokrasi yang professional dan unggul		
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance)	1. Terwujudnya birokrasi yang professional, bersih dan akuntabel	-indeks akuntabilitas - opini BPK - indeks merit system -indeks kelembagaan
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik

3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan

Sebagaimana amanat dari Undang - Undang Nomor : 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah bahwa (RPJM Daerah) sebagai penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang Penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, program - program pembangunan dan kegiatan pokok.

Salah satu yang termuat didalam RPJMD tersebut adalah program Satuan Kerja Perangka Daerah (Renstra-SKPD) yang dalam penyusunannya mengacu kepada visi, misi dan program Kepala daerah. Sebagai salah satu SKPD yang ada di Kabupaten Karimun maka Kecamatan Ungar harus mempersiapkan Renja sebagai dokumen rencana Kerja Kecamatan 1 tahun akan datang.

Disini akan kami kemukakan mengenai Kebijakan dan Strategi yang telah ditetapkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan di Kecamatan Ungar.

3.5 Program dan Kegiatan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan Untuk mencapai visi, melaksakan misi memecahkan persoalan dan menangani isu Strategis daerah yang dihadapi.

Adapun bentuk **Program dan Kegiatan** dari Kecamatan Ungar untuk berjalannya misi guna mewujudkan visi, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan;
2. Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Meningkatkan Kehidupan Beragama dan pemahaman Agama di tengah masyarakat;
4. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban umum**;**
5. Meningkatkan Promosi wisata :

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diflementasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun **Sasaran Strategis** yang akan dicapai Kecamatan Ungar adalah :

Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Indikator : - Nilai AKIP kecamatan Ungar

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ungar Yaitu:

NO	SASARAN	INDIKATOR	
1	2	3	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ungar	1	Nilai AKIP Kecamatan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Kecamatan Ungar	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		2	Persentase Temuan Inspektorat/BPK yang di Tindaklanjuti
		3	Persentase Rekomendasi Kinerja yang ditindaklanjuti
3	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Wilayah Kecamatan Ungar	1	Mutu Pelayanan Publik
		2	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti
4	Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Ungar	1	Persentase Kelurahan yang program kerjanya terealisasi >80%
		2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif
5	Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Ungar	1	Persentase Laporan Kasus Ketentraman dan Ketertiban yang di Tindaklanjuti
		2	Persentase Kasus Ketentraman dan Ketertiban yang di Fasilitasi Kecamatan

3.5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitif, rasional dan komperensif, Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan guna mewujudkan tercapaianya tujuan dan sasaran Kantor camat Ungar.

Adapun strategi yang di tetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah :

- Penyediaan fasilitas pelayanan perkantoran yang memadai dan kualitas;
- Menyempurnakan implentasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat;
- Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pengelola kegiatan agar capaian kinerja dapat ditingkatkan;
- Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kewilayahan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Karimun;
- Membangun iklim yang kondusif pada tataran pelaksanaan tugas bersama unit kerja lainya;
- Memperluas upaya cakupan pembinaan desa.

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi pogram dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan kantor Kecamatan Ungar dalam rangka mendukung strategi tersebut maka kebijakan diarahkan pada :

- Peningkatan Kualitas pelayanan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM aparatur Kecamatan;
- Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan kewilayahan;
- Koordinasi dalam pelaksaan tugas dengan istansi terkait;
- Peningkatan ketersediaan data dan Informasi kewilayahan.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Ungar Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Startegi Kecamatan Ungar Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2025, Rencana Kerja Kecamatan Ungar ini terdapat tiga program dan delapan kegiatan. Rencana Kerja ini dipakai sebagai acauan dalam pelaksanaan tugas tahun 2025, khususnya dengan menyusun Rencana Kerja tahun anggaran 2025 dan untuk mengidentifkasi perkiraan sumber daya dan dana yang dibutuhkan.

Rencana Kerja Kecamatan Ungar tahun 2025 dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan.

C A M A T

BOLKYA AYADI, S.IP
PEMBINA
NIP. 19880210 200701 1 003

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Kecamatan

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Karimun

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Rencana Tahun 2025			Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Rencana Tahun 2025		
					Target	Rp.	Sumber Dana				Target	Rp.	Sumber Dana
Tujuan OPD		**7**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**'Indeks Pelayanan Publik (IPP)**	**3,55**	**5.027.598.375**	**PAD**	**7**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**'Indeks Pelayanan Publik (IPP)**	**3,55**	**5.027.598.375**	**PAD**
	Sasaran OPD	**7 01**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kec. Ungar**	**Nilai AKIP Kecamatan Ungar**	**61,50**	**5.027.598.375**	**PAD**	**7 01**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kec. Ungar**	**Nilai AKIP Kecamatan Ungar**	**61,50**	**5.027.598.375**	**PAD**
		7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**79,5**	**3.895.445.000**	**PAD**	**7 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**79,5**	**3.895.445.000**	**PAD**
		7 01 01 2,01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen***	***7 Dokumen***	**101.000.000**	**PAD**	***7 01 01 2,01***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen***	***7 Dokumen***	**101.000.000**	**PAD**
		7 01 01 2,01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	41.000.000	**PAD**	7 01 01 2,01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	41.000.000	**PAD**
		7 01 01 2,01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	41.000.000	**PAD**	7 01 01 2,01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	41.000.000	**PAD**
		7 01 01 2,01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	19.000.000	**PAD**	7 01 01 2,01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	19.000.000	**PAD**
		7 01 01 2,02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan***	***3 Laporan***	**2.611.616.275**	**PAD**	***7 01 01 2,02***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan***	***3 Laporan***	**2.611.616.275**	**PAD**
		7 01 01 2,02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	406 Org/Bln	2.471.947.428	**PAD**	7 01 01 2,02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224 Org/Bln	2.471.947.428	**PAD**
		7 01 01 2,02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	124.068.847	**PAD**	7 01 01 2,02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	124.068.847	**PAD**
		7 01 01 2,02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	15.600.000	**PAD**	7 01 01 2,02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	15.600.000	**PAD**
		7 01 01 2,03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan***	***1 Laporan***	**6.000.000**	**PAD**	***7 01 01 2,03***	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan***	***1 Laporan***	**6.000.000**	**PAD**
		7 01 01 2,03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	6.000.000	**PAD**	7 01 01 2,03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	6.000.000	**PAD**
		7 01 01 2,05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan***	***5 Laporan***	**133.300.000**	**PAD**	***7 01 01 2,05***	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan***	***5 Laporan***	**133.300.000**	**PAD**
		7 01 01 2,05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket/ 55 Stell	55.800.000	**PAD**	7 01 01 2,05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket/ 55 Stell	55.800.000	**PAD**
		7 01 01 2,05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.300.000	**PAD**	7 01 01 2,05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.300.000	**PAD**
		7 01 01 2,05 0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monev Disiplin dan Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.200.000	**PAD**	7 01 01 2.05 0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monev Disiplin dan Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.200.000	**PAD**
		7 01 01 2,05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tupoksi	28 orang	32.000.000	**PAD**	7 01 01 2,1 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tupoksi	28 Orang	32.000.000	**PAD**
		7 01 01 2,05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Org	32.000.000	**PAD**	7 01 01 2,05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Org	32.000.000	**PAD**

7	**01**	**01**	**2,06**		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan***	***10 Laporan***	**233.513.900**	**PAD**	**7**	**01**	**01**	**2,06**		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***10 Laporan***	**233.513.900**	**PAD**
7	01	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.200.000	**PAD**	7	01	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.200.000	**PAD**
7	01	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.415.000	**PAD**	7	01	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.415.000	**PAD**
7	01	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.950.000	**PAD**	7	01	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.950.000	**PAD**
7	01	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.198.900	**PAD**	7	01	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.198.900	**PAD**
7	01	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.150.000	**PAD**	7	01	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.150.000	**PAD**
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	600.000	**PAD**	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	600.000	**PAD**
7	01	01	2,06	0007	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.300.000	**PAD**	7	01	01	2,06	0007	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.300.000	**PAD**
7	01	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.500.000	**PAD**	7	01	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.500.000	**PAD**
7	01	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288 Laporan	132.200.000	**PAD**	7	01	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288 Laporan	132.200.000	**PAD**
7	01	01	2,06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	40.000.000	**PAD**	7	01	01	2,06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	40.000.000	**PAD**
7	**01**	**01**	**2,07**		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Laporan rencana kebutuhan barang***	***6 Laporan***	**255.000.000**	**PAD**	**7**	**01**	**01**	**2,07**		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Laporan rencana kebutuhan barang***	***6 Laporan***	**255.000.000**	**PAD**
7	01	01	2,07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	30.000.000	**PAD**	7	01	01	2,07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	30.000.000	**PAD**
7	01	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	50 Unit	99.000.000	**PAD**	7	01	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	50 Unit	99.000.000	**PAD**
7	01	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	80.000.000	**PAD**	7	01	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	80.000.000	**PAD**
7	01	01	2,07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	46.000.000	**PAD**	7	01	01	2,07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	46.000.000	**PAD**
7	**01**	**01**	**2,08**		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan jasa***	***4 Laporan***	**508.014.825**	**PAD**	**7**	**01**	**01**	**2,08**		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan jasa***	***4 Laporan***	**508.014.825**	**PAD**
7	01	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	1 Laporan	2.592.000	**PAD**	7	01	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	1 Laporan	2.592.000	**PAD**
7	01	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.205.549	**PAD**	7	01	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.205.549	**PAD**
7	01	01	2,08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.600.000	**PAD**	7	01	01	2,08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.600.000	**PAD**
7	01	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	459.617.276	**PAD**	7	01	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	459.617.276	**PAD**
7	**01**	**01**	**2,09**		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terpelihara***	***6 Laporan***	**47.000.000**	**PAD**	**7**	**01**	**01**	**2,09**		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terpelihara***	***6 Laporan***	**47.000.000**	**PAD**

| | | |

abel 3.1

Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun Tahun 2025

No.	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2021 s/d 2026) - Ambil di Aplikasi SIPD, hanya progam, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di DPA Tahun 2022	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output) (Renstra 2021 s/d 2026) - Sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) - Akhir Periode Renstra BUKAN Tahun 2026 (Lihat di Aplikasi SIPD untuk Target Kinerja dan Anggaran lihat di Tabel 6.1)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) - Ambil di Aplikasi SIPD						Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Anggaran 2025 - Perangkat Daerah dapat Menyesuaikan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di Evaluasi (2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7		8		9						I			II			III			IV			14 = 10+11+12+13		15 = 14 / 9 (Pergeseran 1) x 100%		16 = 8 + 14 (Penjumlahan Sesuaikan dengan maksud dan tujuan indikator)		17=16/7x100%		18
										RENJA		APBD MURNI		APBD PERGESERAN 1		10			11			12			13											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	F	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ungar			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	NILAI	4,01	25.093.839.000	3.01	3.076.455.999	3.50	5.078.144.999	3.50	3.774.365.638	3.50	3.394.830.501	80,50	14,11	478.909.227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	1.217.376.684	#VALUE!	35,860	#VALUE!	4.293.832.683	#VALUE!	17,11	
				Nilai AKIP Kecamatan Ungar	NILAI	62	25.093.839.000	59.03	3.076.455.999	60.50	5.078.144.999	60.50	3.774.365.638	60.50	3.394.830.501	80,50	14,11	478.909.227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,50	1.217.376.684	#VALUE!	35,860	#VALUE!	4.293.832.683	#VALUE!	17,11	
1		7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	NILAI	80	19.719.039.000	84	2.649.262.999	78,50	3.996.444.999	78,50	3.126.597.839	78,50	3.012.623.502	78,5	14,92	449.509.227	0	22,89	689.447.057	0	-	-	0	-	-	78,50	1.138.956.284	100	37,81	157,00	3.788.219.283	196,25	19,21	
1.1		7 01 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	36	490.500.000	4	5.250.000	7	101.000.000	7	25.000.000	7	12.750.000	0	0,00	-	4	95,69	12.200.000	0	-	-	0	-	-	4	12.200.000	57,14	95,69	8	17.450.000	22,22	3,56	

1.1.1		7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	200.000.000	2	4.694.000	2	41.000.000	2	10.000.000	2	1.550.000	0	0,00	-	2	67,74	1.050.000	0	-	-	0	-	-	2	1.050.000	100,00	67,74	4	5.744.000	36,36	2,87	KEC. UNGAR
1.1.2		7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	200.000.000	2	556.000	3	41.000.000	3	10.000.000	3	6.200.000	0	0,00	-	1	100,00	6.200.000	0	-	-	0	-	-	1	6.200.000	33,33	100,00	3	6.756.000	20,00	3,38	KEC. UNGAR
1.1.3		7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	90.500.000	0	-	2	19.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	0	0,00	-	1	99,00	4.950.000	0	-	-	0	-	-	1	4.950.000	50,00	99,00	1	4.950.000	10,00	5,47	KEC. UNGAR
1.2		**7**	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**Laporan**	**15**	**12.924.838.173**	**2**	**2.143.561.999**	**3**	**2.611.616.274**	**2**	**2.656.243.416**	**2**	**2.590.625.079**	**0**	**14,58**	**377.839.227**	**0**	**24,28**	**629.042.457**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,00**	**1.006.881.684**	**100,00**	**38,87**	**4**	**3.150.443.683**	**26,67**	**24,38**	
1.2.1		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	1.988	12.238.575.150	294	2.102.677.999	406	2.471.947.428	308	2.608.033.416	308	2.590.625.079	66	14,58	377.839.227	88	24,28	629.042.457	0	-	-	0	-	-	154	1.006.881.684	50,00	38,87	448	3.109.559.683	22,54	25,41	KEC. UNGAR
1.2.2		7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	614.263.023	12	40.884.000	12	124.068.846	12	48.210.000	12	-	0	#DIV/0!	-	4	#DIV/0!	-	0	-	-	0	-	-	4	-	33,33	#DIV/0!	16	40.884.000	26,67	6,66	KEC. UNGAR
1.2.3		7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen	60	72.000.000	0	-	12	15.600.000	0	-	0	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. UNGAR
1.3		**7**	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**	**Jumlah Laporan**	**Laporan**	**5**	**31.200.000**	**0**	**-**	**1**	**6.000.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

							Daerah																																				
1.3.1		7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10	31.200.000	0	-	2	6.000.000	0	-	0	-	0	-	-	0	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. UNGAR
1.4		**7**	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**Laporan**	**25**	**639.700.000**	**0**	**-**	**5**	**133.300.000**	**1**	**-**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**#DIV/0!**	**-**	**0**	**0**	**-**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.4.1		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Paket	7	273.700.000	0	-	1	55.800.000	1	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	#DIV/0!	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. UNGAR
1.4.2		7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5	16.000.000	0	-	1	3.300.000	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. UNGAR
1.4.3		7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	5	48.000.000	0	-	1	10.200.000	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. UNGAR
1.4.4		7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	140	151.000.000	0	-	27	32.000.000	0	-	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. UNGAR
1.4.5		7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	151.000.000	0	-	11	32.000.000	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. UNGAR
1.5		**7**	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**	**Laporan**	**50**	**1.137.522.900**	**3**	**42.558.000**	**10**	**233.513.900**	**6**	**251.502.575**	**7**	**251.246.575**	**0**	**6,5672537**	**16.500.000**	**0**	**8,2867199**	**20.820.100**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**-**	**37.320.100**	**-**	**14,85**	**3**	**79.878.100**	**6,00**	**7,02**	

1.5.1		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	20.666.400	1	1.500.000	1	4.200.000	1	4.200.000	1	4.200.000	0	392,85714	16.500.000	0	0	-	0	-	-	0	-	-	-	16.500.000	-	392,86	1	18.000.000	20,00	87,10	KEC. UNGAR
1.5.2		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	100.260.000	1	15.200.000	45	20.415.000	1	52.710.200	1	56.678.200	0	0	-	0	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	1	15.200.000	20,00	15,16	KEC. UNGAR
1.5.3		7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	9.593.000	1	500.000	6	1.950.000	1	21.976.575	1	21.976.575	0	0	-	0	0,00	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	1	500.000	20,00	5,21	KEC. UNGAR
1.5.4		7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan	Paket	5	84.703.500	0	1.250.000	1	18.198.900	0	2.500.000	1	2.500.000	0	0	-	0	60	1.500.000	0	-	-	0	-	-	-	1.500.000	-	60,00	-	2.750.000	-	3,25	KEC. UNGAR
1.5.5		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	Paket	10	35.500.000	2	2.500.000	1	7.150.000	2	11.409.000	2	11.409.000	0,00	0	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	2	2.500.000	20,00	7,04	KEC. UNGAR
1.5.6		7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	3.000.000	0	-	12	600.000	12	4.800.000	12	4.800.000	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. UNGAR
1.5.7		7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket	5	11.000.000	0	-	1	2.300.000	0	-	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. UNGAR
1.5.8		7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	30.000.000	0	-	12	6.500.000	0	-	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. UNGAR
1.5.9		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Laporan	1386	642.800.000	125	21.608.000	280	132.200.000	280	153.906.800	280	149.682.800	0	0	-	0	12,907361	19.320.100	0	-	-	0	-	-	-	19.320.100	-	12,91	125	40.928.100	9,02	6,37	KEC. UNGAR

| | | |

								yang Disediakan																																			
1.7		**7**	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**Laporan**	**20**	**2.515.487.927**	**2**	**450.980.000**	**4**	**508.014.825**	**2**	**180.380.848**	**2**	**144.530.848**	**0**	**37,45**	**54.130.000**	**0**	**16,61**	**24.000.000**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**2,00**	**78.130.000**	**100,00**	**54,6**	**4,00**	**529.110.000**	**20,00**	**21,03**	
1.7.1		7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	Laporan	5	12.240.000	0	-	1	2.592.000	0	-	0	-	0,00	0	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	KEC. UNGAR
1.7.2		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	195.489.592	1	41.850.000	12	39.205.549	12	60.780.848	12	60.780.848	0,00	-	-	0,00	22,21	13.500.000	0,00	-	-	0,00	-	-	-	13.500.000	-	22,21	1,00	55.350.000	1,67	28,31	KEC. UNGAR
1.7.3		7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	32.200.000	0	-	1	6.600.000	0	-	0	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. UNGAR
1.7.4		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	2.275.558.335	1	409.130.000	1	459.617.276	1	119.600.000	1	83.750.000	0,00	64,63	54.130.000	0,00	12,54	10.500.000	0,00	-	-	0,00	-	-	-	64.630.000	-	77,17	1,00	473.760.000	20,00	20,82	KEC. UNGAR
1.8		**7**	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan**	**Laporan**	**30**	**221.815.000**	**3**	**6.913.000**	**6**	**47.000.000**	**4**	**13.471.000**	**3**	**13.471.000**	**0**	**7,720288**	**1.040.000**	**0**	**25,12**	**3.384.500**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**-**	**4.424.500**	**-**	**32,84**	**3,00**	**11.337.500**	**10,00**	**5,11**	
1.8.1		7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	Unit	3	42.200.000	2	5.550.000	3	9.300.000	3	10.453.000	3	10.453.000	0,00	9,949 2969	1.040.000	0,00	32,37 8265	3.384.500	0,00	-	-	0,00	-	-	-	4.424.500	-	42,33	2,00	9.974.500	66,67	23,64	KEC. UNGAR

| | | |

| | | |

| | | |

PEMERINTAH KECAMATAN KUNDUR UTARA
KABUPATEN KARIMUN
RENJA
RENCANA KERJA
KECAMATAN KUNDUR UTARA
TAHUN 2025
KANTOR CAMAT KUNDUR UTARA
JALAN HANG TUAH NO. 110 TELP. 08117753454 TANJUNG BERLIAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan, maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan urusan Pemerintahan tersebut tentunya perlu melakukan kebijakan-kebijakan yang relevan serta tanggung jawab, sehingga mampu memberikan pengayoman dan kepercayaan yang dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen-komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Rencana Kerja Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini adalah dokumen perencanaan Kecamatan untuk periode Tahunan yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Karimun dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024. Menyadari pentingnya fungsi perencanaan yang merupakan tolak ukur dari pencapaian tujuan maka sangat diperlukan adanya Rencana Kerja (Renja) dari masing-masing OPD. Renja merupakan dokumen rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Adapun Renja SKPD tersebut memuat program dan kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Strategis yang dikenal dengan (Renstra) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan kepemerintahan yang baik *(good governance)*. Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi kepemerintahan Kecamatan untuk rentang waktu tahun 2021 sampai dengan 2026 sebagaimana yang dituangkan kedalam Renstra Kecamatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kundur Utara Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang Undang nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah mengalami dua kali perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);

14. Peraturan Bupati Karimun Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 45);

15. Peraturan Bupati Karimun Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 57);

16. Keputusan Camat Kundur Utara Nomor Tahun 2023 Tentang Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Kantor Camat Kundur Utara Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan. Kegiatan-kegiatan satu tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kantor Camat Kundur Utara merupakan implementasi dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Kundur Utara maupun semua lapisan masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan hasil-hasil pelayanan publik dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Kundur Utara 2025 adalah :

1. Untuk Memberikan arahan dan pedoman bagi Kantor Camat Kundur Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan
2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan satu tahun kedepan;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan; dan
4. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan berikutnya;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KUNDUR UTARA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Kundur Utara

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kantor Camat Kundur Utara

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.2 Sumber Pendanaan

V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PENILAIAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada SKPD Kantor Camat Kundur Utara Tahun Anggaran 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Karimun. Adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan Tahun 2024 yang telah di Realisasikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI FISIK
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	95%
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	2 Laporan	100%
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	5 Laporan	100%

		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	1 Laporan	100%
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	2 Laporan	100%
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	1 Laporan	100%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan	1 Laporan	96 %
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan	2 Laporan	100 %

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Kundur Utara menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu adanya standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal merupakan tolak ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut diatas, maka dapat diidentifikasikan beberapa faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan visi/misi secara efektif dan efisien.

Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kundur Utara dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1. Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya;
2. Mengadakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Meningkatkan sistem pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien;
4. Meningkatkan sistem informasi manajemen yang Transparans dan handal; dan
5. Mengoptimalkan aparatur yang professional yang didukung oleh sistem pengembangan karier yang berbasis kompetensi dan prestasi;

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tugas dan fungsi Kantor Camat Kundur Utara yang merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan memiliki wilayah kerja tertentu, dengan demikian baik gambaran tentang kondisi umum daerah maupun kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan, akan difokuskan pada pelaksanaan teknis kewilyahan di Kecamatan Kundur Utara.

Kecamatan Kundur Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran proses dalam pencapaian tujuan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan, kelemahan yang merupakan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kundur Utara antara lain :

a. Belum maksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap kepala seksi sebagai pelaksana teknis tugas Camat, disebabkan kode rekening untuk kecamatan hanya program rutin yang sama disetiap SKPD, sedangkan untuk menunjang tupoksi Kepala seksi tidak tercantum dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah;

b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, dilihat dari komposisi latar belakang pendidikan dari seluruh personil yang terdapat di Kecamatan Kundur Utara;

c. Pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal, dan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki;

Disamping kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan kundur Utara juga memiliki beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Kundur Utara dalam mencapai Visi dan Misi, antara lain :

a. Struktur organisasi Kecamatan Kundur Utara berdasarkan pada peraturan Daerah Kabupaten Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kecamatan Tife A dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Karimun, merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
b. Sarana informasi yang berbasis teknologi informasi memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak terkait meliputi : jaringan Komputer, internet, faximile dan telepon.
c. Sarana dan prasarana kerja di Kecamatan Kundur Utara sekalipun dengan segala keterbatasan kualitas dan kwantitas, namun sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, meliputi, gedung , ruang kantor, ruang pertemuan, sarana transportasi dan peralatan perkantoran.
d. Kesempatan berkontribusi terhadap perumusan kebijakan daerah masih terbatas hanya sebagai pelaksana teknis kewilayahan, sehingga kebijakan dengan konsep pembangunan kurang maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan.
e. Adanya hubungan yang dinamis dengan masing-masing SKPD membantu pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Kecamatan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Sehubungan dengan Review terhadap Rancangan-rancangan program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan tahun awal, tentunya banyak terdapat keterbatasan dan kekuranganya. Namun demikian, hal tersebutlah yang selanjutnya menjadi salah satu pertimbangan-pertimabangan khusus yang kedepan dijadikan sebagai pijakan dan koreksi untuk mencapai dan mewujudkan visi dan Misi semula yang telah di rencanakan. Sehingga dengan harapan kedepan akan mampu lebih baik lagi dari sebelumnya.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kundur Utara pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Karimun dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja oleh Pemerintahan Kecamatan dan Jajarannya, melalui manajemen yang berbasis Profesional dan Melayani;
3. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
4. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
5. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, Unit Pelayanan Teknis dan organisasi Pemerintahan lainnya yang menjadi unsur Pimpinan Daerah yang ada di Kecamatan;

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten, yang dilandasi dan didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Kundur Utara maka kelima hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. PENELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien, sehingga misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan Visi dapat terwujud dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas publik*. Kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Kundur Utara dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, adalah sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

b. Menyusun usulan anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendari nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan Kuangan Daerah;

c. Meningkatkan kualitas kinerja Kepala Seksi yang berhubungan secara langsung dalam pencapaian visi dan misi Kecamatan;

d. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan sesuai visi, misi dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Kundur Utara melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);

e. Meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan potensi sumber daya manusia dan ekonomi;

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau yang biasa disingkat dengan (RPJMD) kabupaten karimun Tahun 2021-2026, adapun Tujuan Kecamatan adalah diambil dari sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sedangkan Sasaran kecamatan yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan memiliki 3 (tiga) Program Unggulan, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayan Publik, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi prioritas pada Recana Kerja Kecamatan Kundur Utara tahun 2025 dapat dijabarkan dengan tabel 4.2 dan table. 4.3 dibawah ini. Sedangkan untuk rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan dapat dilihat dari Tabel. 4.1 sebagaimana terlmpir dibawah ini.

4.2 SUMBER PENDANAAN

Sumber biaya atau pendanaan dari Anggaran yang disusun pada Rencana Kerja kecamatan Kundur Utara tahun 2025 ini adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Dana Perimbangan dari Pusat melalui daerah dan Dana Alokasi Umum atau sebutan lainya. Sehingga dari anggaran sebagaimana dimaksud diataslah dapat terealisainya segala bentuk program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang direncanakan dalam dokumen yang disusun ini.

TABEL 4.1
RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
KECAMATAN KUNDUR UTARA KABUPATEN KARIMUN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan Kundur Utara	CC (59,50)	CC (59,65)	CC (59,75)	CC (59,85)	CC (60)

TABEL 4.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA DAN PAGU INDIKATIF
KECAMATAN KUNDUR UTARA KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2025

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KONDISI AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF		CATATAN MONITORING
							2025		
					2023	2024	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78.50	79,00	79.50	4.973.577.000	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan			Nilai AKIP Kecamatan Kundur Utara	59.65	59,75	59.85	4.973.577.000	
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survei Kepuasan Masayarakat	78.50	79.00	79.50	4.016.000.000	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Mutu Pelayanan Publik	3.48	3.49	3.50	717.577.000	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	63.64	72.73	75.00	240.000.000	
JUMLAH								4.973.577.000	

Sumber : Renstra Kec. Kuta Tahun 2021-2026

TABEL 4.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PAGU INDIKATIF
KECAMATAN KUNDUR UTARA KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2025

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KONDISI AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF 2025		CATATAN MONITORING
					2023	2024	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78.50	79,00	79.50	4.973.577.000	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan			Nilai AKIP Kecamatan Kundur Utara	59.65	59.75	59.85	4.973.577.000	
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survei Kepuasan Masayarakat	78.50	79.00	79.50	4.016.000.000	
		7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	130.000.000	
		7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	55.000.000	
		7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	55.000.000	

		7.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	20.000.000	
		7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2.392.000.000	
		7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308/22 Org X 14 Bln	308/22 Org X 14 Bln	308/22 Org X 14 Bln	2.210.000.000	
		7.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	170.000.000	
		7.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	12.000.000	
		7.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	
		7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000	
		7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	67.000.000	
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50.000.000	
		7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000	
		7.01.01.2.05.11	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Org	25 Org	30 Org	-	

		7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	321.000.000	
		7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	11.000.000	
		7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	38 Paket	55.000.000	
		7.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28 Paket	30 Paket	30 Paket	17.000.000	
		7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	50.000.000	
		7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	17.000.000	
		7.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	12.000.000	
		7.01.01.2.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	10 Paket	11.000.000	
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	13.000.000	
		7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	125.000.000	
		7.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	
		7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	171.000.000	
		7.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	5 Unit	2 Paket	35.000.000	
		7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2 Unit	3 Unit	41.000.000	
		7.01.01.2.07.07	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	1 Unit	15.000.000	

		7.01.01.2.07.08	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	15.000.000	
		7.01.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	30.000.000	
		7.01.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	25.000.000	
		7.01.01.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10.000.000	
		7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	719.000.000	
		7.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000	
		7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	75.000.000	
		7.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	12.000.000	
		7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	620.000.000	
		7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang terpelihara	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	206.000.000	
		7.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	15.000.000	

		7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	73.000.000	
		7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	6 Unit	26.000.000	
		7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	4 Unit	23.000.000	
		7.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	37.000.000	
		7.01.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	32.000.000	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Mutu Pelayanan Publik	3,48	3,49	3,50	717.577.000	
		7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	32.000.000	
		7.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	32.000.000	
		7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	685.577.000	

		7.01.02.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	685.577.000	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	63,64	72,73	75,00	240.000.000	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	35.000.000	
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	205.000.000	
		7.01.03.2.02.02	Sub Kegitan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	140.000.000	
		7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	65.000.000	
JUMLAH								4.973.577.000	

Sumber : Renstra Kec. Kuta Tahun 2021-2026

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Camat Kundur Utara Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Visi dan Misi Kecamatan Kundur Utara yang tertuang dalam Renstra yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karimun. Rencana Kerja yang merupakan Perencanaan 1 (satu) tahun ke depan dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Kundur Utara.

Rencana Kerja Kantor Camat Kundur Utara, selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun selanjutnya. Selain dari hal tersebut, Renja juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun kedepan bagi seluruh jajaran Kantor Camat Kundur Utara dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta penyusunan rencana di masa mendatang sehingga dapat diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan.

Tanjung Berlian, 30 Agustus 2024

CAMAT KUNDUR UTARA,

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN KECAMATAN KUNDUR UTARA

MURNIZAM, M.M
PEMBINA TK I
NIP. 19710505 199303 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN BELAT

RENCANA KERJA
KECAMATAN BELAT TAHUN 2025

KECAMATAN BELAT
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkah rahmat karunia-Nya Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah/OPD Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Belat pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi perangkat daerah melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan. Dengan demikian, semoga dokumen Renja yang telah disusun ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai dilingkungan Kecamatan Belat Kabupaten Karimun, didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Belat, Juli 2024

CAMAT BELAT

MUHD. FARIDASYAHDU, SP. MM
PEMBINA
NIP. 196606231995031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI …..... ii
DAFTAR TABEL …..... iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan Belat 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 10
2.4 Review Terhadap Rencangan Awal RKPD Tahun 2025 13

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……..…….. 15
3.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ……..…… 17
3.3 Program dan Kegiatan ……... 21

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan ……... 24

BAB V PENUTUP …….. 30

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar	1.1	Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya …..	2
Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2023 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun Anggaran 2024 …….……	7
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Belat Kabupaten Karimun ……..…	9
Tabel	2.3	Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2023 ..……...……	10
Tabel	2.4	Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2023 ..	11
Tabel	3.1	Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2025 ……..……	15
Tabel	3.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 ……	20
Tabel	3.3	Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Belat Tahun Anggaran 2025 ……..……..	21
Tabel	4.1	Rumusan Rencana Program/Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Tahun Anggaran 2025 ……	25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Belat Kabupaten Karimun menyusun Renja untuk Tahun Anggaran 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Belat. Renja Kecamatan Belat Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Belat Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan

sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1 Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

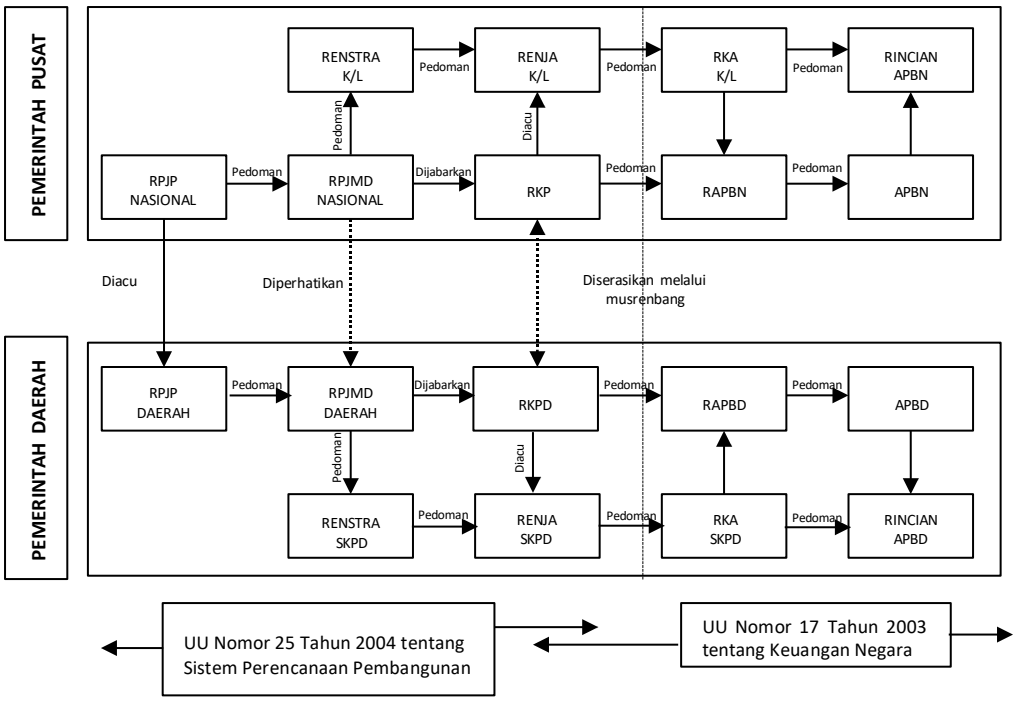

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Belat Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karimun sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karimun;

8. Peraturan Bupati Karimun Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se-Kabupaten Karimun;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Belat Kabupaten Karimun disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Belat dalam penyusunan RKA Kecamatan Belat Tahun Anggaran 2025. Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun Anggaran 2025 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Belat Tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Belat untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Belat Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Belat Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Belat Tahun Anggaran 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Belat Tahun Anggaran 2024 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Belat Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Belat Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2023 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun Anggaran 2024

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Belat

Kode				Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2023			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2024		
						Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
(1)				*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6) = (5)/(4)*	*(7)*	*(8)*	*(9) = (8)/(7)*
7				UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01			KECAMATAN							
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
7	01	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
7	01	01	2.06	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	10 Laporan	10 Laporan	86%	10 Laporan	10 Laporan	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2023			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2024		
						Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
(1)				*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6) = (5)/(4)*	*(7)*	*(8)*	*(9) = (8)/(7)*
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan	-	0%	7 Laporan	7 Laporan	100%
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	4 Laporan	3 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
7	01	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	6 Laporan	3 Laporan	50%	6 Laporan	6 Laporan	100%
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	1 Laporan	100%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Belat dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Belat Kabupaten Karimun disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Belat Kabupaten Karimun

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Catatan Analisis
1	Nilai AKIP Kecamatan	59	60	61	57	62	57,50	63	

Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Belat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1. Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya;

2. Mengadakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Meningkatkan sistem pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien;
4. Meningkatkan sistem informasi manajemen yang Transparans dan handal;
5. Mengoptimalkan aparatur yang professional yang didukung oleh sistem pengembangan karier yang berbasis kompetensi dan prestasi;

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati/Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, Kecamatan Belat merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Fungsi Lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Belat menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Permasalahan	Hambatan
Terbatasnya SDM/jumlah	Tidak ada penambahan ASN
Monitoring ke Desa masih insidentil	Kesibukan di masing-masing Kepala Seksi dengan tupoksi
Kesiapan Data Musrenbang harus menunggu input aplikasi	Tidak semua perangkat desa/kecamatan menguasai aplikasi

Selain itu, selama Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Belat juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu :

Tabel 2.4
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Peluang	Tantangan
Potensi Belat sebagai wilayah Petanian dan perkebunan	Akses transportasi dan sarana prasaran belum maksimal
Obyek wisata Hutan Mangrove desa cukup banyak	Belum semua potensi wisata di setiap desa di kelola dengan baik dan terpublikasikan
Jenis kuliner di Kecamatan Belat cukup banyak	Publikasi masih terbatas dan perlu intervensi bagi pelaku kuliner dan bersifat individualis

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2023, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Belat pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu penambahan personil/SDM untuk menguatkan kinerja yang maksimal;
2. Adanya monitoring yang terjadwal secara rutin;
3. Persiapan Musrenbang Kecamatan harus didukung data yang final dan akurat dari Desa.

Sedangkan isu-isu penting lainnya yang ada di Kecamatan Belat adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

   Kecamatan Belat tingkat kemiskinan masih tinggi di wilayah Pemerintah Kabupaten Karimun. Selama ini banyak intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta yang telah diterima oleh masyarakat tetapi pada kenyataannya belum bisa mengurangi/ menurunkan besaran angka kemiskinan di Kecamatan Belat. Mindset masyarakat sangatlah mendominasi sehingga perlu diberikan pemahaman dengan mengubah pola fikir masyarakat. Selain itu mengoptimalkan partisipasi masyarakat maupun pelaku usaha untuk menyumbangkan sebagian keuntungannya CSR yang merupakan kewajiban perusahaan swasta.

2. Bidang Pemerintahan

   Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menuntut aparat kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar Desa lebih optimal melaksanakan amanat Undang-Undang tentang Desa tersebut.

3. Bidang Pelayanan

   Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima menjadikan Kecamatan Belat untuk selalu berinovasi agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan.

4. Bidang Pertanian

   Alih fungsi lahan merupakan masalah yang mulai mencuat di wilayah Kecamatan Belati, para pengembang mulai melirik tanah pertanian untuk dijadikan perumahan.

2.4 REVIEW TERHADAP RENCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Belat Tahun 2025, sehubungan dengan Review terhadap Rancangan-rancangan program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan tahun awal, tentunya banyak terdapat keterbatasan dan kekuranganya, namun demikian hal tersebut yang menjadi salah satu pertimbangan-pertimbangan khusus yang kedepan dijadikan sebagai pijakan dan koreksi untuk mencapai dan mewujudkan Visi dan Misi yang telah di rencanakan sehingga kedepan akan lebih baik dari sebelumnya.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Belat pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Karimun dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja oleh Pemerintahan Kecamatan dan Jajarannya, melalui manajemen yang berbasis Profesional dan Melayani;
3. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
4. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;

5. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Uspika, Unit Pelayanan Teknis dan organisasi Pemerintahan lainnya yang menjadi unsur Pimpinan Daerah yang ada di Kecamatan.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten, yang dilandasi dan didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Belat maka kelima hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pada Tahun 2025, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan Prioritas Nasional (PN) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2025

No	Prioritas Nasional
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif;
4	Memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan;
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan;
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8	Memperkuat penjelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk menjadi pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program atau kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai Misi, Visi, Tujuan dan sasaran organisasi dan terangkum dalam uraian sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
2. Meningkatkan kualitas kinerja sehingga berdampak secara langsung dalam pencapaian visi dan misi Kecamatan;
3. Menyusun usulan anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendari nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan Kuangan Daerah;
4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan sesuai visi, misi dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Belat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
5. Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan.

3.2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. VISI

Penetapan visi merupakan suatu langkah penting dalam perkembangan kehidupan organisasi di masa depan. Dalam perkembangan selanjutnya kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh kegiatan yang terjadi dilingkungan internal dan eksternal organisasi itu sendiri, oleh karenanya visi organisasi harus dinamis dan jika perlu visi dapat diubah disesuaikan serta disempurnakan untuk keberhasilan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kecamatan Belat mempunyai visi **"**Terwujudnya pelayanan prima yang berbasis kerakyatan untuk mendukung tercapainya VISI Kabupaten Karimun "

Visi tersebut dapat dijelaskan bahwa tercapai dan terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan adalah merupakan tolak ukur capaian kinerja Pemerintah Kecamatan.

Sehingga diharapkan dapat dirumuskan dan dilaksanakan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintahan di tingkat Kecamatan, sehingga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkannya. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang juga dapat dipandang sebagai suatu kondisi dimana pemerintah Kecamatan mampu meningkatkan partisipasi aktif pelayanan kepada masyarakat serta memiliki aparat yang akuntabel serta berdedikasi dalam upaya penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Berdasarkan dua konsep tersebut diatas, untuk mencapai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi titik kritis adalah peningkatan pelayanan, peningkatan partisipasi dan peningkatan kinerja.

B. MISI

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan. Misi memperjelas apa saja yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan visi sebagai berikut :

1. MEMANTAPKAN PELAKSANAAN PENGKOORDINASIAN PEENYELENGGARAAN PEMERINTAH,KEGIATAN PEMBINAAN, IDEOLOGI NEGARA DAN KESATUAN BANGSA.
2. MENINGKATKAN PENYELANGGARAAN PELAYANAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KEAGRARIAN DAN KEPENDUDUKAN.
3. MEMANTAPKAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBINAAN PEMERINTAH DESA, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.
4. MEMANTAPKAN PELAKSANAAN KOORDINASI KEGIATAN PEMBINAAN ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN DAN RUMAH TANGGA PEMERINTAH KECAMATAN
5. MEMANTAPKAN PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT.
6. MEMPERMUDAH ALUR PELAYANAN BIROKRASI SERTA MEMPERPENDEK RENDANG KENDALI KEPEGURUSAN

C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan target kualitatif yang dalam penetapannya mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi,

Kecamatan Belat Kabupaten Karimun menetapkan tujuan untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Indikator
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)

D. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu, yang merupakan penjabaran dari tujuan. Dalam penetapan sasaran juga dirancang dan diidentifikasikan indikator pencapaiannya, yaitu suatu ukuran tingkat keberhasilan perwujudan pencapaiannya pada periode tahun tertentu. Setiap indikator pencapaian sasaran disertai dengan targetnya masing-masing.

Adapun dalam menentukan sasaran dan indikator sasaran, Kecamatan Belat tetap mengacu pada sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Karimun dengan beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan di Kecamatan Belat , sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Belat	Nilai AKIP Kecamatan Belat

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025, Tema Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah ” Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan melalui Peningkatan Investasi, Pembangunan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan Tata

Kelola Pemerintahan yang Inovatif", sesuai dengan tema maka Prioritas Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
2. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
4. Tata Kelola Pemerintahan Inovatif.

Sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 yang berhubungan langsung Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2025

No	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Target Tahun 2025
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (Good Government)		Indeks Tata Kelola Pemerintahan	68,52
1.1		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,55

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Belat serta tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Belat Tahun 2021-2026, maka rumusan

tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Belat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan
BelatTahun Anggaran 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,55
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Belat	Nilai AKIP	63

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan organisasi. kebijakan organisasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk program yang terangkum dalam uraian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH

   Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dispilin apartur, meningkatkan kualitas pelayanan kantor,meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur di unit kerja;

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

   Program ini merupakan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka pengkoordinasian kesejahteraan sisial pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

   Program ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat Kecamatan Belati melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.

B. KEGIATAN

Kegiatan merupakan tindakan nyata Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis organisasi dan tertuang dalam Renja OPD, adapun yang merupakan Kegiatan Prioritas Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
    d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
    a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
    b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
    a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Belat Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Belat Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan
Tahun Anggaran 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Belat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**4.398.454.000**					**4.449.431.000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3.793.305.000**					**3.821.530.000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**104.500.000**					**106.000.000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah		Jumlah Dokumen		Kab. Karimun, Kec. Belat		2 Dokumen		41.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	42.500.000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD		Jumlah Dokumen		Kab. Karimun, Kec. Belat		3 Dokumen		31.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Dokumen	32.000.0000
7	01	01	2.01	07	EvaluasiKinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan		Kab. Karimun, Kec. Belat		2 Laporan		31.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Laporan	32.0000.000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1.769.000.000**					**1.777.000.000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN		Jumlah Pegawai		Kab. Karimun, Kec. Belat		280 Orang		1.581.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			280 Orang	1.585.000.000

7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen		Kab. Karimun, Kec. Belat		12 Dokumen		171.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Dokumen	175.000.000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**40.805.000**					**41.055.000**
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan		Kab. Karimun, Kec. Belat		2 Laporan		40.805.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Laporan	41.055.000.
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**179.500.000**					**191.000.000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian DinasBeserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket		Kab. Karimun, Kec. Belat		1 Paket		92.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	94.000.000
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Laporan		Kab. Karimun, Kec. Belat		1 Dokumen		16.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	17.000.000
7	01	01	2.05	02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Peserta		Kab. Karimun, Kec. Belat		70 Orang		70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			70 Orang	80.000.000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**422.400.000**					**411.500.000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket		Kab. Karimun, Kec. Belat		1 Paket		5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	5.500.000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor		Jumlah Paket		Kab. Karimun, Kec. Belat		1 Paket		83.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	84.000.000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan PeralatanRumah Tangga		Jumlah Paket		Kab. Karimun, Kec. Belat		1 Paket		50.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	61.000.000

7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan LogistikKantor		Jumlah Paket		Kab. Karimun, Kec. Belat		1 Paket		50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	55.000.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket		Kab. Karimun, Kec. Belat		1 Paket		16.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	17.000.000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/ Material		Jumlah Paket		Kab. Karimun, Kec. Belat		1 Paket		11.5000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	12.000.000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan		Kab. Karimun, Kec. Belat		2 Laporan		21.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Laporan	22.000.000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD		Jumlah Laporan		Kab. Karimun, Kec. Belat		36 Laporan		117.000.0000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36 Laporan	121.0000.000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**467.600.000**					**479.800.000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mobiler		Jumlah Unit		Kab. Karimun, Kec. Belat		20 Unit		83.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20Unit	84.000.000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya		Jumlah Unit		Kab. Karimun, Kec. Belat		3 Unit		34.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Unit	35.000.000
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit		Kab. Karimun, Kec. Belat		1 Unit		80.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	80.800.000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**538.000.000**					**541.000.000**

7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa SuratMenyurat		Jumlah Laporan		Kab. Karimun, Kec. Belat		1 Laporan		11.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	12.000.000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik		Jumlah Laporan		Kab. Karimun, Kec. Belat		12 Laporan		41.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	42.000.000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor		Jumlah Laporan		Kab. Karimun, Kec. Belat		8 Laporan		48.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8 Laporan	49.000.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor		Jumlah Laporan		Kab. Karimun, Kec. Belat		13 Laporan		437.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13 Laporan	438.000.000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**271.400.000**					**274.175.000.**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan		Jumlah Unit		Kab. Karimun, Kec. Belat		1 Unit		41.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	42.000.000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan		Kab. Karimun, Kec. Belat		5 Unit		26.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 Unit	27.000.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Pemeliharaan		Kab. Karimun, Kec. Belat		3 Unit		21.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Unit	21.300.000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**597.649.000**					**619.901.000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**56.000.000**					**58.000.000**

7	01	02	2.01	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Jenis Kegiatan		Kab. Karimun, Kec. Belat		2 Jenis		56.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Jenis	58.000.000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**541.649.000**					**561.901.000**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Di limpahkan		Jumlah Jenis Urusan		Kab. Karimun, Kec. Belat		10 Jenis Urusan		541.649.000.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Jenis Urusan	561.901.000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**7.500.000**					**8.000.000**
7	**01**	**06**	**2.02**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**7.500.000**					**8.000.000**
7	01	06	2.02	03	Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta diwilayah kerja Kecamatan		Jumlah Kegiatan		Kab. Karimun, Kec. Belati		6 Kegiatan		7.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 Kegiatan	8.000.000

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember Tahun 2025. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Karimun dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berjalan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

CAMAT BELAT

MUHD. FARIDASYAHDU, SP. MM
PEMBINA
NIP. 196606231995031002

RENJA
TAHUN 2025

KEC. KUNDUR BARAT

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat karunia-Nya atas selesainya Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kundur Barat Tahun 2024.

Rencana kerja Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Penyusunan Renja Kecamatan Kundur Barat ini berpedoman kepada Surat Edaran Permen No. 54 Tahun 2010, Tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Kundur Barat pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari RENSTRA 2022-2026 Kecamatan Kundur Barat yang telah disusun dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkatkan dan terus menerus) dandilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan dimasa depan.

Rencana kerja Kecamatan Kundur Barat yang telah tersusun ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai Kecamatan Kundur Barat didalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada staf Pemerintahan Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun yang telah bekerjasama dan berperan secara aktif sehingga Renca Kerja (RENJA) ini akhirnya dapat terselesaikan dengan waktu yang di tentukan. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi kepada masyarakat dan Negara.

CAMAT KUNDUR BARAT,

YUSUFIAN,S.Sos,.M.M.P
PEMBINA
NIP. 196808031994011003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Landasan Hukum 2

C. Maksud dan Tujuan 4

D. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KUNDUR BARAT TAHUN 2023

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kec. Kundur Barat 6

B. Analisia Kinerja Pelayanan Kec.Kundur Barat 9

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 12

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 19

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 19

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 21

B. Tujuan dan Sasaran RENJA Kec. Kundur Barat 23

C. Program dan Kegiatan 23

BAB IV PENUTUP

A. Kaidah Pelaksanaan 24

B. Rencana Tindak Lanjut 24

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah fungsi Kecamatan sebagai perangkat wilayah dalam asas Dekonsentrasi menjadi perangkat daerah dalam asas Desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Renja OPD adalah perencanaan OPD untuk satu periode (1) tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai Dokumen Rencana Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Kundur Barat mempunyai arti yang strategis dalam mendukung dan melaksanakan pembangunan tahunan pemerintah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan Dokumen yang secara subtansi penerjemahan dari visi, misi, dan program satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam rencana kerja Kabupaten Karimun.
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam kinerja tahunan sebagai wujud dari kinerja satuan kerja perangkat daerah tahun 2024.

Mengingat Renja sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan program/pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan Dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagai tertuang dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan Dokumen Perencana resmi OPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pembangunan daerah untuk 1 (satu) tahun. Sebagai Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai arti strategis dalam bidang pembangunan daerah Renja OPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu:

1. Arah Pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai OPD dalam satu tahun ke depan;
2. Langkah-langkah strategis yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai;

Demikiaan pula Renja Kecamatan Kundur Barat merupakan salah satu perangkat dasar untuk ketercapaian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP).

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kundur Barat Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) ;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021.
11. Peraturan Bupati Karimun nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJPD;
12. Peraturan Bupati Karimun nomor 08 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD 2016-2021;

13. Peraturan Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2017 tentang penetapan revisi rencana strategis (renstra) organisasi perangkat daerah tahun 2018 (berita daerah Kabupaten Karimun tahun 2017 nomor 70);
14. Peraturan Bupati Karimun Nomor 69.A Tahun 2017 tentang penetapan renja (renja) organisasi perangkat daerah tahun 2018 (berita daerah Kabupaten Karimun tahun 2017 nomor 74);
15. Peraturan Bupati Karimun Nomor 70 Tahun 2017 tentang rencana kerja (renja) organisasi perangkat daerah tahun 2018 (berita daerah Kabupaten Karimun tahun 2017 nomor 71).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Renja OPD antara lain :

1. Maksud

a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kundur Barat Tahun 2025.
b. Sebagai acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Kundur Barat pada Tahun 2025.

2. Tujuan

a. Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Kundur Barat Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025;
b. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
c. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Dengan tersusunnya Rancangan Rencana Kerja (RENJA) ini kita bisa meningkatkan kinerja kegiatan maupun program yang ada di Kecamatan Kundur Barat.

D. SISTIMATIKA PENULISAN

Rencana kerja Kecamatan Kundur Barat tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KUNDUR BARAT TAHUN 2024

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Kundur Barat
B. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kundur Barat
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kundur Barat
D. Review Terhadap RKPD Kabupaten Karimun tahun 2023
E. Review Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaah Terhadap Kebijakan Daerah/Nasional
B. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Camat Kundur Barat
C. Program Dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KUNDUR BARAT TAHUN 2023

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN KUNDUR BARAT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan Renja Kecamatan Kundur Barat tahun 2022 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas pokok kecamatan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Desa di Lingkungan Kabupaten Karimun, merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Adapun fungsi dari Kecamatan Kundur Barat adalah :

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data *base* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
3. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
4. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
5. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
6. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

8. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasiltas pelayanan umum;
9. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan/atau Desa;
10. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Desa;
11. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
12. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan, pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan.

Renja Kecamatan Kundur Barat Tahun 2025 dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaraan RPJMD Kabupatan Karimun. Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kundur Barat antara lain :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang direncanakan sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang direncanakan sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang direncanakan sebagai berikut :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

D. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yang direncanakan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.

E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan yang direncanakan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan yang direncanakan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

A. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Kegiatan yang direncanakan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang di Limpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

A. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Kegiatan yang direncanakan sebagai berikut :

- Pembangunan Sarana dan Prasaranan Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Berikut evaluasi capaian rencana kerja (renja) tahun lalu 2023 dan capaian renstra Kecamatan Kundur Barat dapat terlihat dalam tabel **2.1** ***(tabel terlampir).***

B. ANALISA KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KUNDUR BARAT

Analisa Kinerja Kecamatan Kundur Barat meliputi urusan wajib yaitu Pelayanan Kepada Masyarakat. Kinerja Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kundur Barat dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Kundur Barat memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut.

- Kinerja Pelayanan pada bidang sekretariat :
  1. Pembenahan Administrasi kepegawaian
  2. Pembenahan Administrasi keuangan
  3. Pembinaan disiplin pegawai
  4. Pembenahan absensi kantor
  5. Pengarahan berkala Camat Kundur Barat
  6. Menyusun kebijakan Camat dibidang Tata usaha

- Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Pembinaan administrasi pelayanan baik di Kecamatan dan Desa Sekecamatan Kundur Barat;
2. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh Desa bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait;
3. Memberikan sosialisasi bagi perangkat Kecamatan dan Desa terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
4. Melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, HUT Kabupaten Karimun dan lain-lain;.
5. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas dan wajib pajak di Desa;
6. Pembinaan aparat Kecamatan dan perangkat Desa secara rutin;
7. Melaksanakan kebersihan dan keindahan disetiap Desa.

- Kinerja Pelayanan di bidang Ketertiban dan Keamanan :
  1. Pembinaan terhadap anggota Linmas yang berada Desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
  2. Pendataan Organisasi Masyarakat dan Sosial
  3. Pelaksanaan Apel Gabungan setiap awal bulan yang dihadiri oleh seluruh Apatarur Kecamatan dan Aparatur Desa Sekecamatan Kundur Barat;
  4. Mengadakan pengawasan melekat dan peningkatan kedisiplinan terhadap seluruh aparat Se-Kecamatan Kundur Barat;
  5. Pelayanan Izin Penelitian, izin Keramaian dan lainnya sesuai dengan bidang seksi Ketertiban dan Keamanan.

- Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan :
  1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat;
  2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;

3. Monitoring pelaksanaan musrenbang Desa dan melaksanakan musrenbang Kecamatan;
4. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Kundur Barat;
5. Pembinaan Desa dalam Rangka Lomba Desa;
6. Merekomendasikan surat pengantar warga untuk membuat HO dan IMB yang diterbitkanoleh Dinas/Instansi.

- Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan :

1. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
2. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu, P2WKSS serta GSI Tingkat Kecamatan;
3. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera;
4. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).
5. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
6. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah serta pendataan Imam, Khotib, Bilal dan Gharim;
7. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
8. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
9. Pelayanan Surat Keterangan Miskin, Surat Nikah serta lainnya.

- Kinerja Pelayanan di Bidang kependudukan :

1. Pembenahan Laporan Kependudukan;
2. Penerbitan / Pencetakan E-KTP dan KK;
3. Pembinaan dibidang kependudukan;
4. Sosialisasi program E-KTP kepada aparatur Desa dan masyarakat;
5. Pembinaan dan pengawasan kebersihan di Desa.

C. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Visi Kabupaten Karimun Adalah "Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman Dan Taqwa".

Maka Misi Kabupaten Karimun adalah :

1. Meningkatkan perekonomian Daerah yang Mandiri berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal (Berkeadilan Dalam Bidang Ekonomi);
2. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan Dalam Rangka Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (Berkeadilan Dalam Infrastruktur);
3. Mengembangan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa (Berkeadilan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia);
4. Meningkatkan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup (Berkeadilan Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup);
5. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul (Berkeadilan Dalam Pelayanan Publik).

Dari lima misi tersebut, salah satunya Misi adapun keberadaan Kecamatan Kundur Barat terkait visi misi RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026. RPJMD Kabupaten Karimun merupakan satu kesatuan Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk itu RPJMD Kabupaten Karimun juga berpedoman pada RPJMN Tahun 2021-2026 dan memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka RPJMD Kabupaten Karimun 2021-2026 I - 3 panjang daerah. Perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Karimun dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah juga untuk mendukung pada pencapaian target pembangunan nasional. RPJMD Tahun 2021-2026 yang disusun selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Maka misi-misi yang

Kecamatan Kundur Barat memiliki keterkaitan dengan misi RPJMD tersebut yaitu pada misi pertama sampai dengan kelima yaitu :

- *Misi Pertama : "Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal. (BERKEADILAN DALAM BIDANG EKONOMI)"*
  1. "Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri"

     Kebijakan pembangunan Kabupaten Karimun untuk masa depan diarahkan menjadi Kabupaten yang memiliki kemandirian dalam bidang perekonomian. Misi ini dimaksudkan bahwa perekonomian daerah terbentuk dengan landasan dan struktur yang kokoh berbasis pada sumber daya yang didukung dengan kearifan lokal. Kemandirian dengan melakukan kegiatan dibidang industri, kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif, perikanan dan kelautan, pertanian, pariwisata dan perdagangan maupun jasa, dengan memanfaatkan seluruh potensi lokal yang ada secara optimal. Perekonomian masyarakat yang mandiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis sumber daya dan kearifan lokal dengan memprioritaskan pembangunan berdasarkan potensi daerah melalui pemberdayaan masyarakat dengan mensinkronkan berbagai aspek pembangunan sehingga mampu mandiri dan menghasilkan produksi yang bernilai ekonomis dan mampu bersaing untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
  2. "Berbasis sumber daya dan kearifan lokal"

     Sebagai aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dengan menggunakan/memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia pada wilayah/pulau di Kabupaten Karimun, meliputi sumber daya pesisir, perikanan dan kelautan, pertanian, pariwisata, industri serta perdagangan dan jasa. Sumber daya yang dimanfaatkan dapat dalam bentuk barang (seperti ikan hasil tangkapan dan hasil pertanian), ataupun dalam bentuk jasa (seperti transportasi dan pariwisata). Mengembangkan dan menggerakkan industri, perdagangan dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan kondisi geografis Kabupaten Karimun yang berada di jalur perdagangan dunia.

- *Misi Kedua : "Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dalam Rangka Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah. (BERKEADILAN DALAM INFRASTRUKTUR)"*
    1. "Pembangunan infrastruktur yang berkeadilan"

       Kabupaten Karimun yang terdiri dari pulau dan memiliki laut yang cukup luas berdampak pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur diperlukan untuk membuka aksesibilitas suatu daerah menjadi lebih mudah dijangkau, sehingga dapat mengurangi disparitas harga barang/logistik, meningkatkan produktivitas daerah dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu penyediaan infrastruktur pelayanan publik dan bernilai ekonomi yang tersedia secara merata antar pulau dan antar wilayah dalam satu pulau sesuai dengan kebutuhannya perlu dilanjutkan. Dengan pemerataan itu, maka dapat menghilangkan kesenjangan pemberian pelayanan publik karena faktor letak geografis.
    2. "Pertumbuhan ekonomi wilayah"

       Pembangunan infrastruktur yang berkeadilan akan menumbuhkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru. Infrastruktur yang akan dibangun terintegrasi dengan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi daerah sehingga bisa 55 memberi nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan juga berdampak pada UMKM. Pembangunan infrastruktur bisa mendorong peningkatan konektivitas menjadi lebih maju. Konektivitas dimaksudkan sebagai segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memperlancar arus pergerakan orang dan distribusi barang, jasa dan informasi. Untuk itu, sarana dan prasarana yang utama dikembangkan adalah pada sektor perhubungan, transportasi, dan komunikasi. Konektivitas yang kuat adalah konektivitas tanpa kendala yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian wilayah.
- *Misi Ketiga : "Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa. (BERKEADILAN DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA)"*
    1. Sumber daya manusia yang "kuat"

Sumber daya manusia yang secara fisik jasmani sehat dan memiliki daya tahan tubuh yang kuat, serta memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Untuk mewujudkan itu perlu dijamin ketersediaan pelayanan dan sarana prasarana dibidang pendidikan dan bidang kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Karimun.

2. “Kompetitif”

   Dimaksudkan sebagai sumber daya manusia yang memiliki daya saing dari segi pengetahuan, keterampilan, serta dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini diperlukan dalam menghadapi persaingan dunia kerja yang lebih terbuka. Untuk itu dibutuhkan upaya peningkatan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pasar kerja.

3. “Berbudaya”

   Adalah masyarakat yang tidak meninggalkan identitas luhurnya sebagai warga dari kebudayaan setempat, senantiasa menjaga dan mengamalkan kearifan-kearifan tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi, mengekspresikan kekayaan budayanya melalui aktivitasaktivitas dan benda- benda budaya. Budaya setempat yang dimaksud adalah budaya Melayu yang menjadi karakter, namun dengan tetap menghargai keberadaan budayabudaya lain yang hadir, sebagai perwujudan akan pluralisme dan heterogenitas masyarakat Kabupaten Karimun.

4. “Berlandaskan iman dan taqwa”

   Sebagai upaya untuk meletakkan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam kehidupan masyarakat. Landasan iman dan taqwa ini tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia, suasana kehidupan yang agamis dan kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Masyarakat yang berbudaya berlandaskan iman dan taqwa ini diharapkan menjadi filter dan benteng terhadap arus masuk informasi dan budaya dari luar yang bersifat negatif, sehingga

masyarakat Kabupaten Karimun tetap teguh dan menjadi masyarakat yang berkarakter.

- *Misi ke Empat : "Meningkatkan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup. (BERKEADILAN DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP)"*
  1. Bahwa Kabupaten Karimun tidak melaksanakan upaya-upaya konservasi secara ekstrem, namun dalam melaksanakan pembangunan selalu diselaraskan dengan 57 upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, dalam upaya melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) maka fungsi lingkungan hidup harus terus dijaga dan ditingkatkan.
  2. Upaya tetap menjaga fungsi-fungsi dari lingkungan hidup :
     a. Menyediakan ruang-ruang terbuka hijau
     b. Melakukan ekploitasi sumber daya secara terukur dan berkelanjutan.
  3. Dalam upaya melestarikan fungsi ini, termasuk diantaranya adalah memastikan bahwa semua jenis aktivitas ekonomi pada sektor industri, perikanan dan kelautan, pertanian, pariwisata dan perdagangan maupun jasa adalah aktivitasaktivitas ekonomi yang ramah lingkungan dengan dampak yang terkelola.
  4. Pembangunan tidak akan bisa dilaksanakan secara berkelanjutan tanpa melestarikan fungsi-fungsi lingkungan hidup, ditambah lagi karakteristik Kabupaten Karimun yang terdiri dari pulau-pulau kecil memiliki kerentanan ekologis yang lebih dibandingkan pulau-pulau besar.
- *Misi ke Lima : "Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul. (BERKEADILAN DALAM PELAYANAN PUBLIK)"*
  1. "Birokrasi yang profesional"
     a. Terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif serta mampu melayani kebutuhan masyarakat secara optimal dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh birokrat sehingga dapat menciptakan inovasi-inovasi didalam pelayanan publik dan dapat menyampaikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat serta cepat.
     b. Penguatan peran birokrasi pemerintahan dalam perwujudan visi pemerintah Kabupaten Karimun adalah melalui pembenahan,

perbaikan dan penguatan administrasi dan manajemen kepegawaian.

c. Perubahan dan pembenahan tersebut diharapkan mampu membawa perubahan terhadap mindset dan culturset birokrasi pemerintah Kabupaten Karimun sehingga menghasilkan aparatur yang berintegritas, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera yang pada akhirnya membentuk profil birokrasi pemerintah Kabupaten Karimun yang profesional dalam rangka mendukung visi Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Terdepan yang Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa.

2. “Birokrasi yang unggul”

Adalah pengembangan sumber daya aparatur dengan melakukan peningkatan skill (keterampilan) yang adaptif dan memiliki kemampuan menguasai teknologi, kemampuan berpikir, beraktualisasi, memiliki kapasitas inovatif dan kreatif dengan melakukan pembenahan dalam sisi birokrasi yang bersifat melayani masyarakat sehingga terwujudnya percepatan transformasi birokrasi melalui pengembangan sistem kinerja pelayanan dan sistem organisasi yang modern serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui peningkatan kompetensi secara agresif.

Untuk melaksanakan slogan tersebut maka telah ditetapkan pula 4 (empat) azam sebagai motor penggerak pembangunan yaitu:

1. **Azam Peningkatan Iman dan Taqwa**; Dimaksudkan sebagai upaya untuk menanamkan sikap mental berbudi luhur dan berakhlak mulia serta memiliki sandaran vertikal yang kokoh sehinggga pelaksanaan pembangunan akan lebih terarah dan bertanggung jawab.
2. **Azam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;** Dimaksudkan sebagai upaya untuk menyiapkan SDM yang berkualitas, sehingga mampu menggali dan mengembangkan asset dan potensi yang ada.
3. **Azam Pembangunan Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan**; Dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui peningkatan sarana

dan prasarana produksi, sehingga pertumbuhan ekonomi berlangsung secara sinergis dengan pemerataan pendapatan.

4. **Azam Pengembangan Seni dan Budaya**; Dimaksudkan sebagai upaya menggali khazanah budaya Melayu yang merupakan ciri khas daerah sehingga mampu mempertahankan kepribadian dengan nilai luhur bangsa dari pengaruh dan tantangan yang datang dari luar.

Untuk mencapai Misi dan Visi tersebut salah satu sasaran yang mendukung adalah sasaran pada urusan pelayanan kepada Masyarakat yaitu : “Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat.”.

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian sesuai Visi dan Misi Bupati Karimun dan Wakil Bupati Karimun dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Adapun Visi Kecamatan Kundur Barat adalah sebagai berikut *“Terwujudnya Pelayanan Prima Yang Berbasis Kerakyatan Untuk Mendukung Tercapainya Visi Kabupaten Karimun”* **.**

Untuk memenuhi visi tersebut, Pemerintah Kecamatan Kundur Barat menjabarkannya ke dalam ***Misi Kecamatan Kundur Barat*** sebagai berikut ***:***

1. Memantapkan Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintah,Kegiatan Pembinaan, Ideologi Negara Dan Kesatuan Bangsa.
2. Memantapkan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pembinaan Administrasi, Ketatausahaan Dan Rumah Tangga Pemerintah Kecamatan.
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan, Pemberdayaan Masyarakat, Keagrarian Dan Kependudukan.
4. Memantapkan Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Pemerintah Desa, Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

5. Mempermudah Alur Pelayanan Birokrasi Serta Memperpendek Rentang Kendali Kepegurusan
6. Memantapkan Pelaksanaan Koordinasi Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat.

Kecamatan Kundur Barat sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Karimun. Kecamatan Kundur Barat masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Sistem kerja yang belum optimal dikarenakan kekurangan pegawai/staf (khususnya ASN);
2. Sarana dan Prasarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;
3. Keterbatasan keterampilan petugas karena rendahnya sumber daya pegawai/staf;
4. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana kearsipan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kundur Barat, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Memanfaatkan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Karimun yang menyelenggarakan pelayanan publik Berbasis Kerakyatan, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan

secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.
   Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

D. REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2023

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Kundur Barat dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Karimun adalah letak geografis Kecamatan Kundur Barat yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Karimun termasuk wilayah pengembangan perekonomian berbasi maritim, sehingga pertumbuhan Kabupaten Karimun mengarah ke Kecamatan Kundur Barat baik dari sisi ekonomi dan industri. Untuk lebih jelasnya mengenai review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 dapat dilihat **Tabel 2.2 (terlampir).**

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan, maka renja Kecamatan Kundur Barat juga mempertimbangkanusulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan

tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama	:	Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) bersifat lintas desa, (2) berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
Kedua	:	Memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dari musrenbang tahun lalu.
Ketiga	:	Memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kundur Barat pada tahun 2025 ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Kundur Barat, maka hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi, dapat dilihat **Tabel 2.3 (Tabel terlampir).**

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA KERJA KECAMATAN KUNDUR BARAT

A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN KUNDUR BARAT

a. Tujuan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

b. Sasaran

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Kundur Barat.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan Kecamatan Kundur Barat. Program/Kegiatan yang direncanakan dibiayai pada tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Kundur Barat Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun.

Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Kundur Barat Tahun 2025, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan tehnokratis

   Yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternalsesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Top Down

   Yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atas;
3. Pendekatan Politis

   Yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih;
4. Pendekatan Bottom Up

   Yaitu mempertimbangkan peta permasalahan pemerintah tingkat dibawahnya;
5. Pendekatan Partisipatif

   Yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kundur Barat maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2025 terlampir pada **tabel 3.1 (tabel terlampir)**, sedangkan rumusan perencanaan program dan kegiatan serta perkiraan maju tahun 2026 terlampir pada **tabel 3.2 (tabel terlampir).**

BAB IV
PENUTUP

Dengan disusunnya rencana kerja tahun 2025 diharapkan akan memberikan arahan atau “guidance” serta sebagai tolak ukur dalam menjalan kinerja Kantor Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun. Selain itu dukungan dari semua pihak terutama jajaran staf Kecamatan Kundur Barat. Tantangan dan problema yang ada dalam pelaksanaan tugas di berbagai bidang (pendayagunaan sumber daya aparatur) dapat dihadapi secara bersinergi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

A. KAIDAH PELAKSANAAN

Program-program yang dituang dalam RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 dilaksanakan secara operasional oleh SKPD dan didukung oleh instansi-instansi terkait yang ada di wilayah Kabupaten Karimun serta Partisipasi Masyarakat.

Rencana Kerja juga merupakan panduan bagi pemerintahan Kabupaten dalam menyusun Renstra bagi SKPD yang membawahi bidang yang sama serta perlu mengacu pada Peningkatan Mutu Pelayanan, Meningkatkan kinerja aparatur, Pemberdayaan Masyarakat serta Peningkatan Sarana dan Prasarana.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Koordinasi dengan berbagai pihak dan instansi sejenis serta kerjasama dengan instansi induk yang membawahi masalah Peningkatan Mutu Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran bagi masyarakat. Selain itu juga diperlukan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program yang sudah dilaksanakan tahun sebelumnya.

CAMAT KUNDUR BARAT

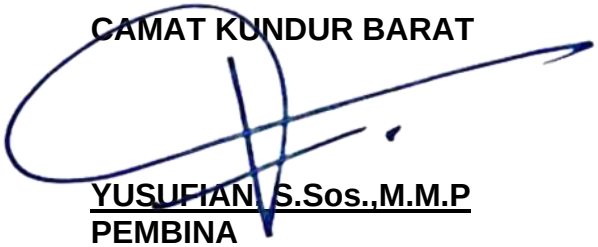

YUSUFIAN, S.Sos.,M.M.P
PEMBINA
NIP 196808031994011003

Tabel 2.1

EVALUASI CAPAIAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 DAN TARGET CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2023 KECAMATAN KUNDUR BARAT

1. Evaluasi Capaian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan Capaian Renstra Tahun 2023

SASARAN 1	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TAHUN
	Nilai AKIP Kecamatan Kundur Barat	58 (CC)	44,59	76,88 %	2022
		59 (CC)	-	-	2023

- Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

- Program Kegiatan Kecamatan Kundur Barat Tahun 2022-2023

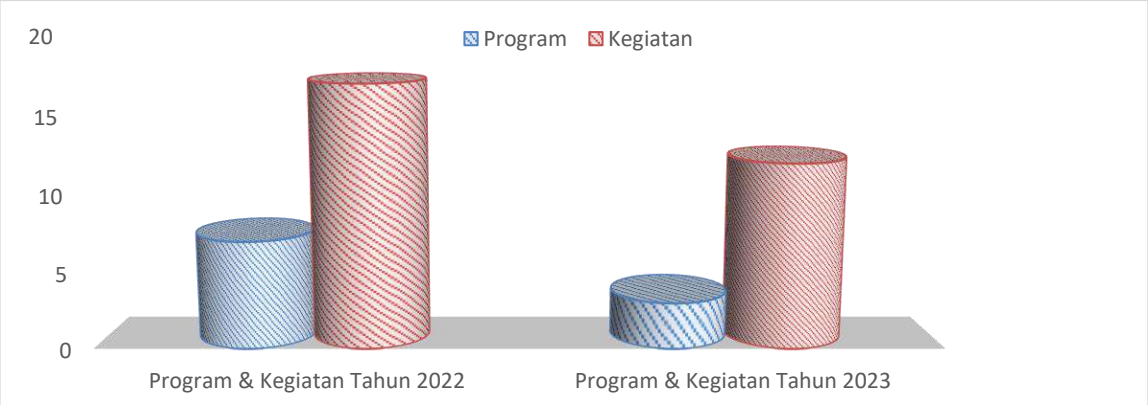

	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TAHUN
SASARAN 2	Tingkat Kepuasan Masyarakat	78 %	78,07 %	100,09 %	2022
		78,5 %	-	-	2023

- Tingkat Kepuasan Masyarakat

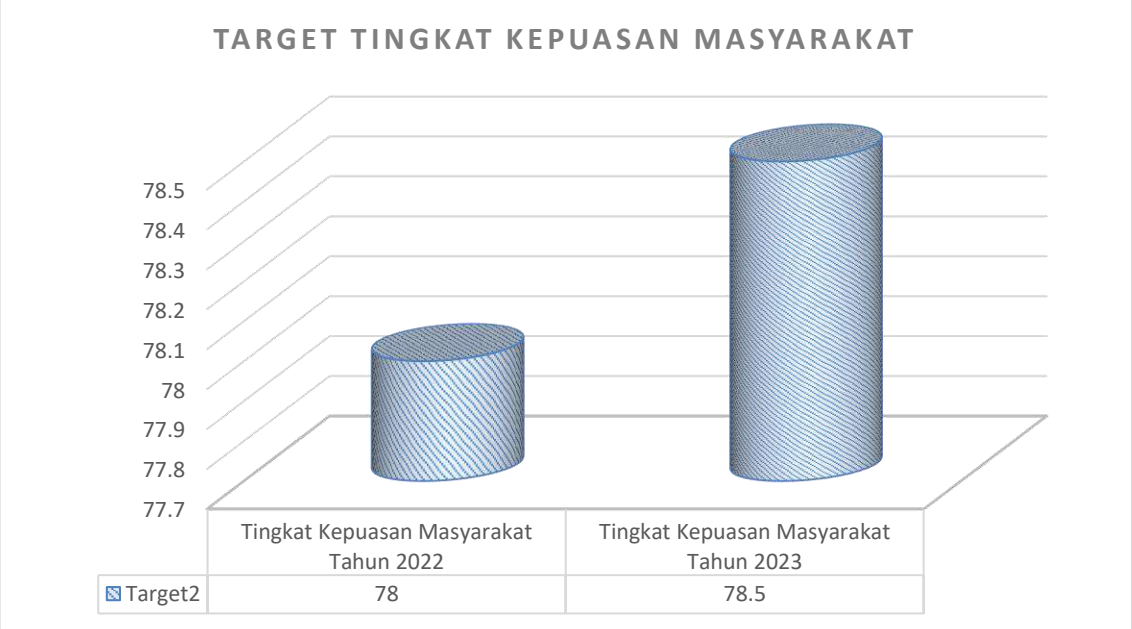

CAMAT KUNDUR BARAT,

YUSUFIAN,S.Sos,.M.M.P
PEMBINA
NIP. 196808031994011003

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Karimun
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 KECAMATAN KUNDUR BARAT
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 KECAMATAN KUNDUR BARAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**4,415,250,000**					**4,481,624,826**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,505,732,000**					**3,566,524,826**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**56,000,000**					**60,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78.5 Nilai	2 Dokumen	7 Dokumen	22,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78.5 Nilai	23,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78.5 Nilai	3 Laporan	7 Dokumen	22,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78.5 Nilai	23,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78.5 Nilai	2 Laporan	7 Dokumen	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78.5 Nilai	14,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,094,749,442**					**2,127,285,942**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78.5 Nilai	364 Orang/bulan	4 Laporan	1,971,949,442	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78.5 Nilai	2,003,385,942
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78.5 Nilai	12 Dokumen	4 Laporan	118,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78.5 Nilai	119,000,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78.5 Nilai	2 Laporan	4 Laporan	4,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78.5 Nilai	4,900,000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**4,500,000**					**5,000,000**
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	2 Laporan	2 Laporan	4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**91,200,000**					**93,400,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Karimun
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 KECAMATAN KUNDUR BARAT
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 KECAMATAN KUNDUR BARAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	1 Paket	3 Laporan	61,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	62,000,000
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	1 Dokumen	3 Laporan	8,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	8,400,000
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	40 Orang	3 Laporan	22,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	23,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**144,421,800**					**146,313,300**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	1 Paket	9 Laporan	14,935,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	15,100,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	1 Paket	9 Laporan	21,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	21,500,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	1 Paket	9 Laporan	8,236,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	8,436,700
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	1 Paket	9 Laporan	20,998,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	21,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	1 Paket	9 Laporan	15,276,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	15,576,600
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	10 Dokumen	9 Laporan	16,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	16,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Karimun
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 KECAMATAN KUNDUR BARAT
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 KECAMATAN KUNDUR BARAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	1 Paket	9 Laporan	5,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	5,300,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	2 Laporan	9 Laporan	5,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	5,200,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	36 Laporan	9 Laporan	37,575,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	37,700,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**467,400,000**					**485,218,000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	15 Unit	5 Laporan	50,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	50,200,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	10 Unit	5 Laporan	50,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	50,200,000
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	1 Unit	5 Laporan	220,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	220,118,000
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	5 Unit	5 Laporan	80,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	90,200,000
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	5 Unit	5 Laporan	67,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	74,500,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**551,560,758**					**552,507,584**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	1 Laporan	4 Laporan	12,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	12,200,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Karimun
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 KECAMATAN KUNDUR BARAT
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 KECAMATAN KUNDUR BARAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	12 Laporan	4 Laporan	28,360,758	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	28,607,584
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	3 Laporan	4 Laporan	10,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	10,200,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	12 Laporan	4 Laporan	501,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	501,500,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**95,900,000**					**96,800,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	5 Unit	6 Laporan	15,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	15,100,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	5 Unit	6 Laporan	5,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	5,100,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	5 Unit	6 Laporan	5,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	5,300,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	1 Unit	6 Laporan	30,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	30,400,000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	10 Unit	6 Laporan	20,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	20,400,000
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	78,5 Nilai	10 Unit	6 Laporan	20,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5 Nilai	20,500,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**597,118,000**					**600,600,000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**20,200,000**					**20,400,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Karimun
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 KECAMATAN KUNDUR BARAT
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 KECAMATAN KUNDUR BARAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	3,50 Nilai	2 Dokumen	1 Laporan	20,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Mutu Pelayanan Publik	3,50 Nilai	20,400,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**576,918,000**					**580,200,000**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	3,50 Nilai	10 Laporan	1 Laporan	576,918,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Mutu Pelayanan Publik	3,50 Nilai	580,200,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**312,400,000**					**314,500,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**7,000,000**					**8,000,000**
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	1 Laporan	7,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen	8,000,000
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**305,400,000**					**306,500,000**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Unit	2 Laporan	205,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen	206,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	2 Laporan	100,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen	100,500,000
												TOTAL	**4,415,250,000**					**4,481,624,826**

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025 Melalui Kegiatan Musrenbang Kecamatan Kundur Barat

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	CATATAN	REKOMENDASI MITRA
1	1206345	27-01-2024	JEFRIZAL, S.Sos	Kelurahan / Desa	REHABILITASI ASPAL	JALAN RUSAK BERAT DI PEMUKIMAN MASYARAKAT	JL. KOBEL LAUT RT.001 RW.001 DUSUN I DESA SAWANG LAUT, Kab. Karimun	Kab. Karimun	Kundur Barat	Sawang Laut	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Usulan di terima untuk di lanjutkan ke proses selanjutnya
2	1206377	27-01-2024	JEFRIZAL, S.Sos	Kelurahan / Desa	PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN PERMUKIMAN	JALAN BELUM MASUK SEMENISASI	JL. BESAR KOBEL DARAT RT.011 RW.005 DUSUN III DESA SAWANG LAUT, Kab. Karimun	Kab. Karimun	Kundur Barat	Sawang Laut	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	Usulan di terima untuk di lanjutkan ke proses selanjutnya
3	1223445	29-01-2024	AZMAN, S.A.P	Kelurahan / Desa	BANTUAN DAN PENGADAAN HEWAN TERNAK	A	A, Kab. Karimun	Kab. Karimun	Kundur Barat	Sawang	Kabupaten / Kota	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	-	-	-
4	1223571	29-01-2024	AZMAN, S.A.P	Kelurahan / Desa	PENGASPALAN JALAN	Kondisi jalan kurang memadai, becek di musim hujan dan berdebu di musim panas	Jl. Darat Mata Air RT.002/ RW.003 s/d Jl. Layang RT.003/ RW.001 Kelurahan Sawang, Kab. Karimun	Kab. Karimun	Kundur Barat	Sawang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Usulan di terima untuk di lanjutkan ke proses selanjutnya
5	1223729	29-01-2024	AZMAN, S.A.P	Kelurahan / Desa	Pembangunan Drainase	Apabila hujan deras, air menggenangi di ruas jalan dan halaman disekitaran perumahan masyarakat, karena tidak ada saluran air yang memadai	Jalan Besar Sawang RT.001/RW.007 Kelurahan Sawang, Kab. Karimun	Kab. Karimun	Kundur Barat	Sawang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Usulan di terima untuk di lanjutkan ke proses selanjutnya
6	1225288	29-01-2024	AZMAN, S.A.P	Kelurahan / Desa	Pengadaan lampu jalan	Jalan gelap sehingga rawan kecelakaan	Jl. Besar Kampung Tengah RT. 001/RW.010 Jl. Kampung Baru RT. 002/RW.011 Jalan Tongheng RT.003/RW.011 Kelurahan Sawang , Kab. Karimun	Kab. Karimun	Kundur Barat	Sawang	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-	Usulan di terima untuk di lanjutkan ke proses selanjutnya
7	1237034	29-01-2024	SUYATNO	Kelurahan / Desa	PEMBANGUNAN JEMBATAN	Kondisi Jembatan yang lama rusak sehingga membahayakan masyarakat yang melewati jembatan tersebut juga sulitnya kendaraan roda empat untuk melalui jembatan	RT.003/RW.002 Dusun I Mengkuse Desa Sawang Selatan , Kab. Karimun	Kab. Karimun	Kundur Barat	Sawang Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Usulan di terima untuk di lanjutkan ke proses selanjutnya
8	1238055	29-01-2024	AZMAN, S.A.P	Kelurahan / Desa	Pembangunan Drainase	Apabila hujan deras, air menggenangi di ruas jalan dan halaman Kantor Camat Kundur Barat, karena tidak ada saluran air yang memadai	Jalan Besar Depan Kantor Camat Kundur Barat RT.001/ RW.010 Kelurahan Sawang , Kab. Karimun	Kab. Karimun	Kundur Barat	Sawang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Usulan di terima untuk di lanjutkan ke proses selanjutnya
9	1238685	29-01-2024	AZMAN, S.A.P	Kelurahan / Desa	REHABILITASI GEDUNG KANTOR CAMAT	Gedung tampak sangat kotor dan jika musim hujan tiba atap genteng sering bocor karena kondisinya memang sudah perlu di perbaiki	Jl. Besar Sawang Nomor 007 A Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat , Kab. Karimun	Kab. Karimun	Kundur Barat	Sawang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	tidak ada proposal dalam usulan	Usulan di kembalikan karna kurangnya proposal dalam usulan
10	1239691	29-01-2024	SUYATNO	Kelurahan / Desa	PEMBANGUNAN TANGGUL	belum adanya TPT untuk menahan tanah longsor terkikis air hujan	RT.008/ RW.004 jalan besar Km 14, Kab. Karimun	Kab. Karimun	Kundur Barat	Sawang Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Usulan di terima untuk di lanjutkan ke proses selanjutnya
11	1239936	29-01-2024	SUYATNO	Kelurahan / Desa	BANTUAN DAN PENGADAAN HEWAN TERNAK	Kurangnya modal bagi kelompok tani, kesulitan dalam mendapatkan benih unggul serta kurang mampu untuk membeli pupuk dan obat-obatan	Desa Sawang Selatan , Kab. Karimun	Kab. Karimun	Kundur Barat	Sawang Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	-	usulan diterima dan diteruskan ke proses selanjutnya
12	1249503	30-01-2024	ARI SUPRIADI NURFAIZAL, SE	Kelurahan / Desa	PENGASPALAN JALAN	Kondisi Jalan yang kurang memadai, sementara jalan ini sangat efektif dan efesien sebagai jalan alternatif menuju ke Pelabuhan Tanjung Makom	Batu Kucing RT.011/RW.006 Dusun III Bukit Senang Desa Gemuruh , Kab. Karimun	Kab. Karimun	Kundur Barat	Gemuruh	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Usulan di terima untuk di lanjutkan ke proses selanjutnya
13	1249597	30-01-2024	ARI SUPRIADI NURFAIZAL, SE	Kelurahan / Desa	PENGASPALAN JALAN	Kondisi jalan yang rusak parah, apabila musim hujan jalanan menjadi becek hingga tergenang air dan berdebu dimusim panas	Teluk Salak RT.004/RW.002 Dusun I Selat Beliah Desa Gemuruh, Kab. Karimun	Kab. Karimun	Kundur Barat	Gemuruh	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Usukan di terima untuk di lanjutkan ke proses selanjutnya
14	1251054	30-01-2024	AZMAN, S.A.P	Kelurahan / Desa	PEMBANGUNAN RUANG PERTEMUAN/ AULA SEKOLAH	tidak ada gedung rapat sehingga apabila ada pertemuan harus meminjam ruang atau gedung lain	Kantor Camat jalan Besar Sawang Nomor: 007 A Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat , Kab. Karimun	Kab. Karimun	Kundur Barat	Sawang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Mohon dilengkapi sesuai rekomendasi	Mohon dilengkapi dengan proposal yang memuat volume, diperjelas yang diusulkan apakah pembangunan aula sekolah atau aula kantor camat. Jika untuk aula sekolah mohon disebutkan nama sekolah secara lengkap
15	1251738	30-01-2024	MARHALIM	Kelurahan / Desa	PEMBANGUNAN PINTU AIR (PEKERJAAN UMUM)	kondisi pintu air yang belum terselesaikan sehingga belum dapat digunakan oleh masyarakat dan menghambat pengaturan air masuk dan keluar	Dusun IV Desa Kundur , Kab. Karimun	Kab. Karimun	Kundur Barat	Kundur	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak ada proposal dalam usulan	Usulan di kembalikan karna tidak ada proposal dalam usulan
16	1251844	30-01-2024	MARHALIM	Kelurahan / Desa	PENGASPALAN JALAN	Kondisi jalan yang belum pernah diaspal sehingga menyebabkan jalan menjadi rusak parah untuk dilalui	DESA KUNDUR , Kab. Karimun	Kab. Karimun	Kundur Barat	Kundur	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	usulan diterima dan dapat diteruskan ke proses selanjutnya
17	1252337	30-01-2024	MARHALIM	Kelurahan / Desa	Pengadaan lampu jalan	Rawan kecelakaan lalu lintas akibat dari minimnya lampu penerangan jalan	Desa Kundur , Kab. Karimun	Kab. Karimun	Kundur Barat	Kundur	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	usulan diterima dan dilanjutkan ke proses selanjutnya
18	1254457	30-01-2024	ARI SUPRIADI NURFAIZAL, SE	Kelurahan / Desa	PENATAAN OBJEK WISATA PANTAI	kurangnya objek wisata sehingga apabila masyarakat ingin berwisata harus pergi ke daerah lain	Jl. Batu Kucing RT.011/ RW.006 Dusun III Desa Gemuruh , Kab. Karimun	Kab. Karimun	Kundur Barat	Gemuruh	Kabupaten / Kota	DINAS PARIWISATA	-	-	-

TABEL. 3.1
PROGRAM - PROGRAM YANG AKAN DILAKSANAKAN TAHUN ANGGARAN 2025

RENCANA PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
KANTOR CAMAT KUNDUR BARAT KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kecamatan : **KUNDUR BARAT**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KONDISI AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	
					2020	2021	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				**Indeks Pelayanan Publik**	**2,75**	**2,90**	**3.01**	**4,350,000,000**	**3,50**	**4,415,250,000**	**3,51**	**4,481,478,000**	**3,55**	**4,548,700,000**	**4,00**	**4,616,931,000**	**4,00**	**22,412,359,000**
	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kec. Kundur Barat			Nilai AKIP Kecamatan Kundur Barat	56, 74	57	58	4,350,000,000	59	4,415,250,000	60	4,481,478,000	61	4,548,700,000	62	4,616,931,000	62	22,412,359,000
		7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	75	78	**3,449,331,794**	78.5	**3,505,732,000**	79	**3,566,378,000**	79.5	**3,614,966,159**	80	**3,655,843,641**	80	**17,792,251,594**
		7 01 01 2 01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen***	***7 Dokumen***	***7 Dokumen***	***7 Dokumen***	***50,000,000***	***7 Dokumen***	***56,000,000***	***7 Dokumen***	***60,000,000***	***8 Dokumen***	***67,000,000***	***7 Dokumen***	***74,000,000***	***36 Dokumen***	***307,000,000***
		7 01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen - Renja - Renja RB	20,000,000	2 Dokumen - Renja - Renja RB	22,000,000	2 Dokumen - Renja - Renja RB	23,000,000	3 Dokumen - Renja - Renstra - Renja RB	25,000,000	2 Dokumen - Renja - Renja RB	28,000,000	11 Dokumen	118,000,000
		7 01 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan - Lapkin - Perjanjian Kinerja (PK) - Realisasi perjanjian Kinerja (PK)	20,000,000	3 Laporan - Lapkin - Perjanjian Kinerja (PK) - Realisasi perjanjian Kinerja (PK)	22,000,000	3 Laporan - Lapkin - Perjanjian Kinerja (PK) - Realisasi perjanjian Kinerja (PK)	23,000,000	3 Laporan - Lapkin - Perjanjian Kinerja (PK) - Realisasi perjanjian Kinerja (PK)	25,000,000	3 Laporan - Lapkin - Perjanjian Kinerja (PK) - Realisasi perjanjian Kinerja (PK)	28,000,000	15 Laporan	118,000,000
		7 01 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	10,000,000	2 Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	12,000,000	2 Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	14,000,000	2 Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	17,000,000	2 Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	18,000,000	10 Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	71,000,000
		7 01 01 2 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan***	***3 Laporan***	***3 Laporan***	***3 Laporan***	***2,091,514,429***	***3 Laporan***	***2,094,749,442***	***3 Laporan***	***2,127,285,942***	***3 Laporan***	***2,129,100,000***	***3 Laporan***	***2,132,293,712***	***15 Laporan***	***10,574,943,525***
		7 01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	406 Org Bln (29 Org x 14 Bln)	406 Org Bln (29 Org x 14 Bln)	406 Org Bln (29 Org x 14 Bln)	1,969,814,429	364 Org Bln (26 Org x 14 Bln)	1,971,949,442	406 Org Bln (29 Org x 14 Bln)	2,003,385,942	406 Org Bln (29 Org x 14 Bln)	2,004,000,000	406 Org Bln (29 Org x 14 Bln)	2,005,793,712	2.030 Org Bln (26 Org x 70 Bln)	9,954,943,525
		7 01 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	117,000,000	12 Dokumen	118,000,000	12 Dokumen	119,000,000	12 Dokumen	120,000,000	12 Dokumen	121,000,000	60 Dokumen	595,000,000
		7 01 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan Triwulanan	4,700,000	2 Laporan - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan Triwulanan	4,800,000	2 Laporan - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan Triwulanan	4,900,000	2 Laporan - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan Triwulanan	5,100,000	2 Laporan - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan Triwulanan	5,500,000	10 Laporan - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan Triwulanan	25,000,000

		7 01 01 2 03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan***	***1 Laporan***	***1 Laporan***	***1 Laporan***	***4,300,000***	***1 Laporan***	***4,500,000***	***1 Laporan***	***5,000,000***	***1 Laporan***	***5,500,000***	***1 Laporan***	***6,000,000***	***5 Laporan***	***25,300,000***
		7 01 01 2 03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan - Laporan Rekonsiliasi - Laporan Asset OPD	2 Laporan - Laporan Rekonsiliasi - Laporan Asset OPD	2 Laporan - Laporan Rekonsiliasi - Laporan Asset OPD	4,300,000	2 Laporan - Laporan Rekonsiliasi - Laporan Asset OPD	4,500,000	2 Laporan - Laporan Rekonsiliasi - Laporan Asset OPD	5,000,000	2 Laporan - Laporan Rekonsiliasi - Laporan Asset OPD	5,500,000	2 Laporan - Laporan Rekonsiliasi - Laporan Asset OPD	6,000,000	10 Laporan - Laporan Rekonsiliasi - Laporan Asset OPD	25,300,000
		7 01 01 2 05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan***	***3 Laporan***	***3 Laporan***	***3 Laporan***	***88,000,000***	***3 Laporan***	***91,200,000***	***3 Laporan***	***93,400,000***	***3 Laporan***	***95,600,000***	***3 Laporan***	***99,000,000***	***15 Laporan***	***467,200,000***
		7 01 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	60,000,000	1 Paket	61,000,000	1 Paket	62,000,000	1 Paket	63,000,000	1 Paket	64,000,000	1 Paket	310,000,000
		7 01 01 2 05 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen - DUK	1 Dokumen - DUK	1 Dokumen - DUK	8,000,000	1 Dokumen - DUK	8,200,000	1 Dokumen - DUK	8,400,000	1 Dokumen - DUK	8,600,000	1 Dokumen - DUK	10,000,000	5 Dokumen - DUK	43,200,000
		7 01 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Org	40 Org	40 Org	20,000,000	40 Org	22,000,000	40 Org	23,000,000	40 Org	24,000,000	40 Org	25,000,000	200 Org	114,000,000
		7 01 01 2 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan***	***9 Laporan***	***9 Laporan***	***9 Laporan***	***142,521,401***	***9 Laporan***	***144,421,800***	***9 Laporan***	***146,313,300***	***9 Laporan***	***152,072,200***	***9 Laporan***	***159,861,300***	***45 Laporan***	***745,190,001***
		7 01 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	14,835,500	1 Paket	14,935,500	1 Paket	15,100,000	1 Paket	16,235,500	1 Paket	16,800,000	1 Paket	77,906,500
		7 01 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	19,949,601	1 Paket	21,000,000	1 Paket	21,500,000	1 Paket	22,000,000	1 Paket	23,000,000	1 Paket	107,449,601
		7 01 01 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	8,136,700	1 Paket	8,236,700	1 Paket	8,436,700	1 Paket	8,636,700	1 Paket	8,936,700	1 Paket	42,383,500
		7 01 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20,898,000	1 Paket	20,998,000	1 Paket	21,000,000	1 Paket	22,000,000	1 Paket	23,998,000	1 Paket	108,894,000
		7 01 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15,076,600	1 Paket	15,276,600	1 Paket	15,576,600	1 Paket	16,000,000	1 Paket	16,976,600	1 Paket	78,906,400
		7 01 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan/ Peraturan Perundang-undangan	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	16,050,000	10 Dokumen	16,150,000	10 Dokumen	16,500,000	10 Dokumen	17,000,000	10 Dokumen	17,550,000	50 Dokumen	83,250,000
		7 01 01 2 06 07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Jenis Bahan/Material	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5,100,000	1 Paket	5,150,000	1 Paket	5,300,000	1 Paket	5,700,000	1 Paket	5,900,000	1 Paket	27,150,000
		7 01 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Tamu yang Berkunjung	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	2 Laporan	5,100,000	2 Laporan	5,200,000	2 Laporan	5,500,000	2 Laporan	5,700,000	10 Laporan	26,500,000
		7 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	37,475,000	36 Laporan	37,575,000	36 Laporan	37,700,000	36 Laporan	39,000,000	36 Laporan	41,000,000	180 Laporan	192,750,000
		7 01 01 2 07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Laporan rencana kebutuhan barang***	***5 Laporan***	***5 Laporan***	***5 Laporan***	***427,668,206***	***5 Laporan***	***467,400,000***	***5 Laporan***	***485,218,000***	***5 Laporan***	***505,155,330***	***5 Laporan***	***513,100,000***	***25 Laporan***	***2,398,541,536***
		7 01 01 2 07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	15 Unit	15 Unit	15 Unit	50,000,000	15 Unit	50,100,000	15 Unit	50,200,000	20 Unit	50,500,000	20 Unit	51,000,000	85 Unit	251,800,000
		7 01 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	50,000,000	10 Unit	50,100,000	10 Unit	50,200,000	10 Unit	50,500,000	10 Unit	51,000,000	50 Unit	251,800,000

		7 01 01 2 07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	200,000,000	1 Unit	220,100,000	1 Unit	220,118,000	1 Unit	223,555,330	1 Unit	225,000,000	5 Unit	1,088,773,330
		7 01 01 2 07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5 unit	5 unit	70,000,000	5 unit	80,100,000	5 unit	90,200,000	5 unit	100,500,000	5 unit	100,700,000	25 unit	441,500,000
		7 01 01 2 07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5 unit	5 unit	57,668,206	5 unit	67,000,000	5 unit	74,500,000	5 unit	80,100,000	5 unit	85,400,000	25 unit	364,668,206
		7 01 01 2 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan jasa***	***5 Laporan***	***5 Laporan***	***5 Laporan***	***550,327,758***	***5 Laporan***	***551,560,758***	***5 Laporan***	***552,360,758***	***5 Laporan***	***560,038,629***	***5 Laporan***	***567,088,629***	***25 Laporan***	***2,781,376,532***
		7 01 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12,067,000	1 Laporan	12,100,000	1 Laporan	12,200,000	1 Laporan	14,300,000	1 Laporan	14,850,000	5 Laporan	65,517,000
		7 01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	28,260,758	12 Laporan	28,360,758	12 Laporan	28,460,758	12 Laporan	29,288,629	12 Laporan	30,488,629	60 Laporan	144,859,532
		7 01 01 2 08 03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	10,000,000	3 Laporan	10,100,000	3 Laporan	10,200,000	3 Laporan	10,600,000	3 Laporan	10,900,000	15 Laporan	51,800,000
		7 01 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	500,000,000	12 Laporan	501,000,000	12 Laporan	501,500,000	12 Laporan	505,850,000	12 Laporan	510,850,000	60 Laporan	2,519,200,000
		7 01 01 2 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terpelihara***	***5Laporan***	***5 Laporan***	***5 Laporan***	***95,000,000***	***5 Laporan***	***95,900,000***	***5 Laporan***	***96,800,000***	***5 Laporan***	***100,500,000***	***5 Laporan***	***104,500,000***	***25 Laporan***	***492,700,000***
		7 01 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	15,000,000	5 Unit	15,050,000	5 Unit	15,100,000	5 Unit	15,200,000	5 Unit	15,500,000	25 Unit	75,850,000
		7 01 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5,000,000	5 Unit	5,050,000	5 Unit	5,100,000	5 Unit	5,200,000	5 Unit	5,500,000	25 Unit	25,850,000
		7 01 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5,000,000	5 Unit	5,200,000	5 unit	5,300,000	5 Unit	5,500,000	5 unit	6,000,000	5 Unit	27,000,000
		7 01 01 2 09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,200,000	1 Unit	30,400,000	1 Unit	31,000,000	1 Unit	31,500,000	5 Unit	153,100,000
		7 01 01 2 09 10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	20,000,000	10 Unit	20,200,000	10 Unit	20,400,000	10 Unit	20,600,000	10 Unit	21,000,000	10 Unit	102,200,000
		7 01 01 2 09 11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	20,000,000	10 Unit	20,200,000	10 Unit	20,500,000	10 Unit	23,000,000	10 Unit	25,000,000	10 Unit	108,700,000

		7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	2.75	2.90	3.01	**589,668,206**	3.50	**597,118,000**	3.51	**600,600,000**	3.55	**612,733,841**	4.01	**630,711,258**	4.01	**3,030,831,305**
		7 01 02 2 01	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Jumlah Laporan***	***1 Laporan***	***1 Laporan***	***1 Laporan***	***20,000,000***	***1 Laporan***	***20,200,000***	***1 Laporan***	***20,400,000***	***1 Laporan***	***21,000,000***	***1 Laporan***	***21,500,000***	***5 Laporan***	***103,100,000***
		7 01 02 2 01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	20,200,000	2 Dokumen	20,400,000	2 Dokumen	21,000,000	2 Dokumen	21,500,000	10 Dokumen	103,100,000
		7 01 02 2 04	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	***Jumlah Laporan***	***1 Laporan***	***1 Laporan***	***1 Laporan***	***569,668,206***	***1 Laporan***	***576,918,000***	***1 Laporan***	***580,200,000***	***1 Laporan***	***591,733,841***	***1 Laporan***	***609,211,258***	***5 Laporan***	***2,927,731,305***
		7 01 02 2 04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Di limpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Laporan Urusan	6 Laporan Urusan	10 Laporan Urusan	569,668,206	10 Laporan Urusan	576,918,000	10 Laporan Urusan	580,200,000	10 Laporan Urusan	591,733,841	10 Laporan Urusan	609,211,258	10 Laporan Urusan	2,927,731,305
		7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	50.00%	50.00%	100%	**311,000,000**	100%	**312,400,000**	100%	**314,500,000**	100%	**321,000,000**	100%	**330,376,101**	100%	**1,589,276,101**
		7 01 03 2 01	**Kordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	**6,000,000**	1 laporan	**7,000,000**	1 laporan	**8,000,000**	1 laporan	**9,000,000**	1 laporan	**10,000,000**	5 laporan	**40,000,000**
		7 01 03 2 01 02	Singkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarkat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**6,000,000**	1 Dokumen	**7,000,000**	1 Dokumen	**8,000,000**	1 Dokumen	**9,000,000**	1 Dokumen	**10,000,000**	5 Dokumen	40,000,000
		7 01 03 2 02	***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***	***Jumlah Laporan***	***2 Laporan***	***2 Laporan***	***2 Laporan***	***305,000,000***	***2 Laporan***	***305,400,000***	***2 Laporan***	***306,500,000***	***2 Laporan***	***312,000,000***	***2 Laporan***	***320,376,101***	***10 Laporan***	***1,549,276,101***
		7 01 03 2 02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	205,000,000	5 Unit	205,300,000	5 Unit	206,000,000	5 Unit	210,000,000	5 Unit	211,000,000	25 Unit	1,037,300,000
		7 01 03 2 02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	100,000,000	1 Pokmas/Ormas	100,100,000	1 Pokmas/Ormas	100,500,000	1 Pokmas/Ormas	102,000,000	1 Pokmas/Ormas	109,376,101	5 Pokmas/Ormas	511,976,101

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN KUNDUR BARAT KAB. KARIMUN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN KUNDUR BARAT						**5.404.267.297,00**							**4.616.931.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.404.267.297,00**							**4.616.931.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.404.267.297,00**							**4.616.931.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**79,5 Nilai**			**79,5 Nilai**	**4.728.934.617,00**						**79,5 Nilai**	**3.655.843.641,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen*	-			8 Dokumen	35.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat	-	74.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		28.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	10.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		28.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		18.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan*	-			3 Laporan	3.462.762.709,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat	-	2.132.293.712,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				364 Orang/bulan	3.366.342.709,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		2.005.793.712,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	96.420.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		121.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		5.500.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan*	-			1 Laporan	0,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat	-	6.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		6.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan*	-			3 Laporan	0,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat	-	99.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		64.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		10.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		25.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan*	-			9 Laporan	265.161.500,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat	-	159.861.300,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.429.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		16.800.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	34.581.500,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		23.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.136.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		8.936.700,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		23.998.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.553.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		16.976.600,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		17.550.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		5.900.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		5.700.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	217.462.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		41.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang*	-			5 Laporan	0,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat	-	513.100.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		51.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		51.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		225.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		100.700.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		85.400.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa*	-			5 Laporan	891.342.408,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN DAN MASYARAKAT KECAMATAN KUNDUR BARAT	-	567.088.629,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN DAN MASYARAKAT KECAMATAN KUNDUR BARAT		14.850.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	105.342.408,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN DAN MASYARAKAT KECAMATAN KUNDUR BARAT		30.488.629,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN DAN MASYARAKAT KECAMATAN KUNDUR BARAT		10.900.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	786.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN DAN MASYARAKAT KECAMATAN KUNDUR BARAT		510.850.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terpelihara*	-			5 Laporan	74.668.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat	-	104.500.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	74.668.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		15.500.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		5.500.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		6.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		31.500.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		21.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		25.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Mutu Pelayanan Publik***	**3,55 Nilai**			**3,55 Nilai**	**675.332.680,00**						**3,55 Nilai**	**630.711.258,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan*	-			1 Laporan	0,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat	-	21.500.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN Kantor Camat Kundur Barat		21.500.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan*	-			1 Laporan	675.332.680,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN DAN MASYARAKAT KECAMATAN KUNDUR BARAT	-	609.211.258,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	675.332.680,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN DAN MASYARAKAT KECAMATAN KUNDUR BARAT		609.211.258,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui***	**100 Persen**			**100 Persen**	**0,00**						**100 Persen**	**330.376.101,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan*	-			1 Laporan	0,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN DAN MASYARAKAT KECAMATAN KUNDUR BARAT	-	10.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN DAN MASYARAKAT KECAMATAN KUNDUR BARAT		10.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Laporan*	-			2 Laporan	0,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN DAN MASYARAKAT KECAMATAN KUNDUR BARAT	-	320.376.101,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN DAN MASYARAKAT KECAMATAN KUNDUR BARAT		211.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	ASN DAN MASYARAKAT KECAMATAN KUNDUR BARAT		109.376.101,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
		KELURAHAN SAWANG						**199.923.500,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**199.923.500,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**199.923.500,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**199.923.500,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	199.923.500,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-	-	0,00	KELURAHAN SAWANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	119.245.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Sawang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		0,00	KELURAHAN SAWANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	80.678.500,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Sawang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	KELURAHAN SAWANG
	J U M L A H							**5.604.190.797,00**							**4.616.931.000,00**	

RENJA

RENCANA KERJA
TAHUN 2025

KECAMATAN MORO KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkah rahmat karunia-Nya Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah/OPD Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja (Renja)Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Moro pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi perangkat daerah melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan. Dengan demikian, semoga dokumen Renja yang telah disusun ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai dilingkungan Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Moro, 15 Maret 2024

CAMAT MORO

ANDRI WINARTA, S.I.P,.M.A.P

NIP. 19880619 200701 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 2
1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan Moro 4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 11
2.4 Review Terhadap Rencangan Awal RKPD Tahun 2024 12

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 13
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 14

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana Kerja dan Pendanaan 16

BAB V PENUTUP 22

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar	1.1	Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya …….….....	1
Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenjaTahun Anggaran 2023 dan Perkiraan Capaian RenjaTahun Anggaran 2023 ……..	5
Tabel	2.2	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang direncanakan dan Faktor-faktor Penghambat…….…..…	9
Tabel	2.3	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang direncanakan dan Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan……..….....	9
Tabel	2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Moro Kabupaten Karimun ……..	10
Tabel	2.5	Permasalahandan Hambatan yang dihadapi SelamaTahun 2023……..	10
Tabel	2.6	Peluang dan Tantangan yang dihadapi Selama Tahun 20203…….…...	11
Gambar	3.1	Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2023….....	13
Tabel	3.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024…	15
Tabel	3.3	Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Moro Tahun Anggaran 2024 ……..	15
Tabel	4.1	Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 …….	17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Moro Kabupaten Karimun menyusun Renja untuk Tahun Anggaran 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Moro. Renja Kecamatan Moro Tahun Anggaran2024 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Moro Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1 Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

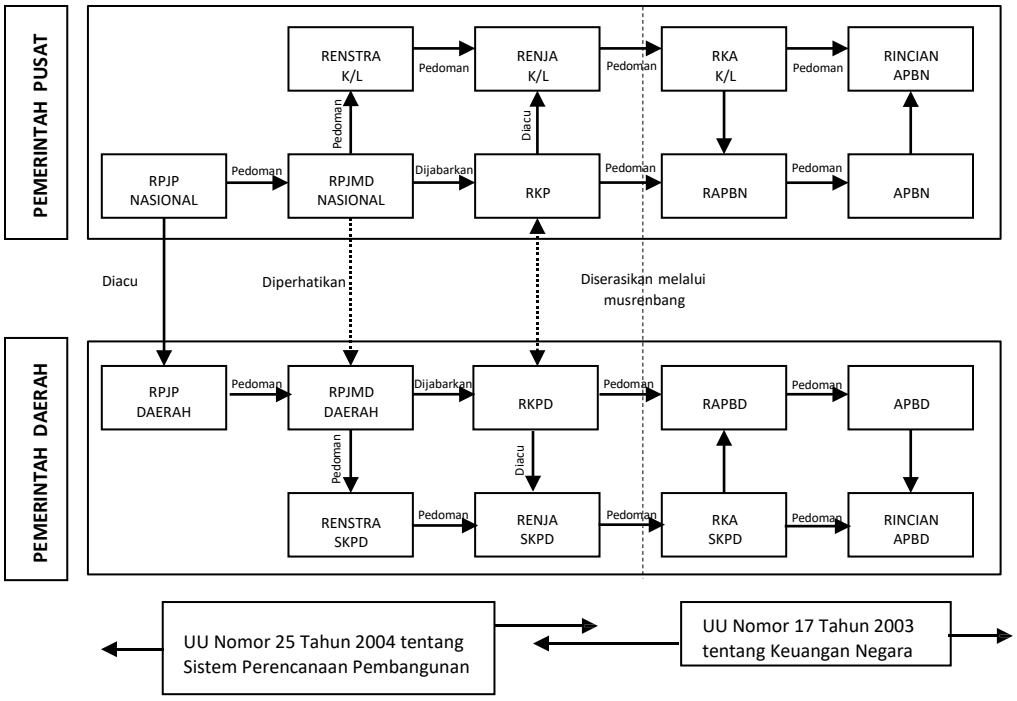

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Moro Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karimun sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karimun;
8. Peraturan Bupati Karimun Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se-Kabupaten Karimun;
9. Peraturan Bupati Karimun Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021- 2026;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Moro Kabupaten Karimn disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Moro dalam penyusunan RKA Kecamatan Moro Tahun Anggaran 2025. Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun Anggaran 2025 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan

tahunan Kecamatan Moro Tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Moro untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Moro Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

BAB IPENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Moro Tahun Anggaran 2025 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Moro Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Moro Tahun Anggaran 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Moro Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Moro Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bedasarkan Laporan Hasil Kinerja Kecamatan

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.	- Prosentase Jumlah Penduduk yang telah memiliki e – KTP	Kecamatan Moro menargetkan 97 %
		- Rata – rata Waktu yang dibutuhkan dalam proses pelayanan	Kecamatan Moro menargetkan 1 Hari
		- Jumlah Organisasi Keagamaan yang Aktif.	Kecamatan Moro menargetkan 100 %
2.	Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat.	- Jumlah Kelurahan / Desa yang mendapatkan penghargaan mengenai Lingkungan Hidup	Kecamatan Moro menargetkan 3 buah
		- Jumlah Kelurahan / Desa yang mempunyai Tempat Pembuangan Sampah	Kecamatan Moro menargetkan 5 bh per Kel / Desa
		- Prosentase Rumah Tangga yang mempunyai bak sampah	
3.	Meningkatkan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama di Masyarakat.	- Jumlah Mesjid yang Hidup Sholat Limea Waktu Berjamaah.	Kecamatan Moro menargetkan 100 %
		- Prosentasi Santri TPQ yang Lulus Ujian (Munakosah)	Kecamatan Moro menargetkan 95 %
		Jumlah Qori dan Qoriah yang Ikut Pembinaan.	
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga	- Jumlah Mubaligh (imam) yang Aktif mengisi Pengajian.	Kecamatan Moro menargetkan 98 %
		- ProsentaseKepala Keluarga yang memiliki Rumah Sendiri.	Kecamatan Moro menargetkan 90%
		- Prosentase Kepala Keluarga yang memiliki Rumah Layak Huni	Kecamatan Moro menargetkan 90%
		- Prosentase Jumlah Penduduk Miskin .	Kecamatan Moro menargetkan 20 %
5.	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.	Jumlah Pengaduan Masyarakat tentang gangguan Sosial.	
		- Jumlah Kasus Pencurian tanpa kekerasan.	Kecamatan Moro menargetkan 75 %
		- Jumlah Pengaduan tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Kecamatan Moro menargetkan 2 %
		-	Kecamatan Moro menargetkan 0 kasus / tidak ada masalah
			Kecamatan Moro menargetkan 2 kasus / tidak ada masalah

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Refocusing anggaran
	Kegiatan Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Refocusing anggaran

1. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan yangMemenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perencanaan dan pengelolaan target kinerja secara lebih tepat
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Fungsimonevterhadapproses perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik
3	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Optimalisasi kinerja SDM serta dukungan dari Dinas Dukcapil Kabupaten Karimun
4	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa dan Muspika
5	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakat Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, PKH dan institusi lainnya
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Dukungan yang optimal dari Pelaku Ekonomi Lokal

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 makakebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun Anggaran 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi koordinasi dan upaya pengurangan kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.Sehubungan dengan hal tersebut,analisis kinerja Kecamatan Moro dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Moro Kabupaten Karimun disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Moro Kabupaten Karimun

No	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Realisasi Capaian Kinerja	Target Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Tahun 2023	Target Kinerja	Catatan Analisis
		Tahun 2022			Tahun 2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	78.5	78	79	
2	Nilai AKIP	50	51	51	52	

Tabel. 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Capaian Kegiatan	Besaran Volume	Kebutuhan Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
	Lori Sampah	Kecamatan Moro		1 Unit		Musrenbang
	Pavin Blok	Kecamatan Moro		30 m x 20 m		Musrenbang
	Tempat Parkir	Kecamatan Moro		12 Km x 4 m		Musrenbang
	Pembangunan Pintu Air Dam Kelurahan Moro Timur	Kelurahan Moro Timur		350 m^2		Musrenbang
	Rehab dan Pembangunan Jalan Kantor Camat Moro	Kelurahan Moro Timur		967 m		Musrenbang
	Perbaikan dan semenisasi Jalan	Kelurahan Moro		250 m^2		Musrenbang
	Pembuatan Parit dan gorong-gorong	Kelurahan Moro		Panjang = 200 cm Lebar Atas=150 cm Lebar Bawah= 100 cm Panjang = 8 M Lebar Atas = 3 M L Bawah = 2 M		Musrenbang
	Perbaikan dan semenisasi Jalan	Desa Jang		3 m x 200 m		Musrenbang
	Pembangunan Septi tank	Desa Jang		2 m x 3 m		Musrenbang
	Rehab Pelabuhan	Desa Pauh		4 m x 476 m		Musrenbang
	Bus Anak Sekolah	Desa Pauh		1 Unit		Musrenbang
	Simenisasi Jalan Lingkar	Desa Pulau Moro		280 X 3 M^2 Batas Tinggi Air 1,8 M		Musrenbang
	Tembok Penahan Tanah Lapangan Bola	Desa Pulau Moro				Musrenbang

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati/Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, Kecamatan Moro merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Fungsi Lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun Anggaran 2024, Kecamatan Moro menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi SelamaTahun 2024

Permasalahan	Hambatan
Terbatasnya SDM/jumlah	Tidak ada penambahan ASN
Monitoring ke Desa masih insidentil	Kesibukan di masing-masing Kepala Seksidengan tupoksi
Kesiapan Data Musrenbang harus menunggu input sepakat	Tidak semua perangkat kecamatan menguasai aplikasi

Selain itu, selama Tahun Anggaran 2024, Kecamatan Moro juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Peluang	Tantangan
Potensi Moro sebagai wilayah pariwisata pantai dan keagamaan	Akses transportasi dan dana belum maksimal
Obyek wisata di setiap desa cukup banyak	Belum semua potensi wisata di setiap desa terpublikasikan
Jenis kuliner di Kecamatan Moro cukup banyak	Publikasi masih terbatas dan perlu intervensi bagi pelaku kuliner dan bersifat individualis

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2023, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Moro pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perlu penambahan personil/SDM untuk menguatkan kinerja yang maksimal
2. Adanya monitoring yang terjadwal secara rutin
3. Persiapan Musrenbang Kecamatan harus didukung data yang final dan akurat dari Desa

Sedangkan isu-isu penting lainnya yang adadi Kecamatan Moro adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kesejahteraan Masyarakat
   Kecamatan Moro menduduki ranking 8 tingkat kemiskinan diwilayah Pemerintah Kabupaten Karimun. Selama ini banyak intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta yang telah diterima oleh masyarakat tetapi pada kenyataannya belum bisa mengurangi/menurunkan besaran angka kemiskinan di Kecamatan Moro. Mindset masyarakat sangatlah mendominasi sehingga perlu diberikan pemahaman dengan mengubah pola fikir masyarakat. Selain itu mengoptimalkan partisipasi masyarakat maupun pelaku usaha untuk menyumbangkan sebagian keuntungannya CSR yang merupakan kewajiban perusahaan swasta. Hal ini merupakan peluang bagi kecamatan agar mereka ikut berperan dalam Pronangkis.
2. Bidang Pemerintahan
   Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menuntut aparat kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar Desa lebih optimal melaksanakan amanat Undang-Undang tentang Desa tersebut.
3. Bidang Pelayanan
   Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima menjadikan Kecamatan Moro untuk selalu berinovasi agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan.
4. Bidang Pertanian
   Alih fungsi lahan merupakan masalah yang mulai mencuat di wilayah Kecamatan Moro, para pengembang mulai melirik tanah pertanian untuk dijadikan perumahan.

2.4 REVIEW TERHADAP RENCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten KarimunTahun Anggaran 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten KarimunTahun Anggaran 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Moro Tahun 2025, sehubungan dengan Review terhadap Rancangan-rancangan program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan tahun awal, tentunya banyak terdapat keterbatasan dan kekuranganya, namun demikian hal tersebut yang menjadi salah satu pertimbangan-pertimbangan khusus yang kedepan dijadikan sebagai pijakan dan koreksi untuk mencapai dan mewujudkan Visi dan Misi yang telah di rencanakan sehingga kedepan akan lebih baik darisebelumnya.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Moro pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Karimun dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja oleh Pemerintahan Kecamatan dan Jajarannya, melalui manajemen yang berbasis Profesional dan Melayani;
3. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
4. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
5. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, Unit Pelayanan Teknis dan organisasi Pemerintahan lainnya yang menjadi unsur Pimpinan Daerah yang ada di Kecamatan.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten, yang dilandasi dan didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Moro maka kelima hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pada Tahun 2025, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2025 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2025

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP 1: Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru dan terbarukan.
	PP 2 : Peningkatan kuantitas ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
	PP 3 : Peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan.
	PP 4 : Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan.
	PP 5 : Penguatan kewirausahaan Usaha Makro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi.
	PP 6 : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor rill dan industrialisasi.
	PP 7 : Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri
PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PP 1: Pembangunan wilayah Sumatra.
	PP 2 : Pembangunan wilayah Jawa Bali
	PP 3 : PembangunanwilayahNusa Tenggara
	PP 4 : Pembangunan wilayah Kalimantan
	PP 5 : Pembangunan wilayah Sulawesi
	PP 6 : Pembangunan wilayah Maluku
	PP 7 : Pembangunan wilayah Papua
PN 3 : Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	PP 1: Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
	PP 2 : Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
	PP 3 : Peningkatanakses dan mutu pelayanan kesehatan
	PP 4 : Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
	PP 5 : Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
	PP 6 : Pengentasan kemiskinan
	PP 7 : Peningkatan produktivitas dan daya saing

PN4 :	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP 1:	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter
		PP 2 :	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Moro
		PP 3 :	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial
		PP 4 :	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
PN 5 :	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP 1:	Infrastruktur pelayanan dasar
		PP 2 :	Infrastruktur ekonomi
		PP 3:	Infrastruktur perkotaan
		PP 4 :	Energi dan ketenagalistrikan
		PP 5 :	Transformasi digital
PN 6 :	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP 1:	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
		PP 2 :	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
		PP 3 :	Pembangunan Rendah Karbon
PN 7 :	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PP 1:	Konsolidasi Demokrasi
		PP 2 :	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
		PP 3 :	Penegakan Hukum Nasional
		PP 4 :	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
		PP 5 :	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025, Tema Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah "Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.
2. Pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis.
4. Pemantapan *smartservices*

Sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 yang berhubungan langsung Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Target Tahun 2024
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (Good Government)		Indeks Tata Kelola Pemerintahan	79
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,51

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Moro serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Moro Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Moro Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Moro
Tahun Anggaran 2025

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya kualitaspelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,51
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Moro		Nilai AKIP	52
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	3,51
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Moro Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Moro Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Moro

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegi				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**5,999.164.288**					**5,999.164.288**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5,599.164.288**					**5,499.164.288**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**38.,328,000**					**38.,328,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen		Kab. Karimun, Kec. Moro		2 Dokumen		22.576.000	Dana Insentif Daerah			2 Dokumen	22.576.000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi danPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen		Kab. Karimun, Kec. Moro		3 Dokumen		10.052.000	Dana Insentif Daerah			3 Dokumen	10.052.000
7	01	01	2.01	06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen		Kab. Karimun, Kec. Moro		3 Dokumen		5.700.000	Dana Insentif Daerah			3 Dokumen	5.700.0
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3.519.542.022**					**3.519.542.022**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Pegawai		Kab. Karimun, Kec. Moro		14 Bulan		3.393.110.022	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14 Bulan	3.393.110.022
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Pegawai		Kab. Karimun, Kec. Moro		12 Bulan		126.432.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Bulan	126.432.000

7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**233.070.700**						**233.070.700**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponenen Instalasi Listrik/Penerangan		Jumlah Jenis Komponen		Kab. Karimun, Kec. Moro		8 Jenis		1.487.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8 Jenis		1.487.000
7	01	01	2.06	02	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan		Kab. Karimun, Kec. Moro		30 Jenis		119.473.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD			30 Jenis		119.473.000
7	01	01	2.06	03	Penyedian Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Ruma Tangga		Kab. Karimun, Kec. Moro		25 Jenis		20.462.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD			25 Jenis		20.462.700
7	01	01	2.06	05	Penyedian Barang Cetakan dan Pengadaan		Jumlah Laporan		Kab. Karimun, Kec. Moro		8 Exsamplar		770.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD			8 Exsamplar		770.000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komnsultasi SKPD		Jumlah Rapat dan SKPD		Kab. Karimun, Kec. Moro		12 Buah		90.878.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD			12 Buah		90.878.000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**861.990.738**						**861.990.738**
7	01	01	2.08	02	Penyedian Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik		Jumlah Tagihan		Kab. Karimun, Kec. Moro		36 Bukti		48.790.738	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36 Bukti		48.790.738
7	01	01	2.08	04	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Non ASN yang dibayar		Kab. Karimun, Kec. Moro		13 Bulan		813.200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13 Bulan		813.200,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**67.654.000**						**67.654.000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		Jumlah Liter		Kab. Karimun, Kec. Moro		Liter		65.624.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Liter		65.624.000
7	01	01	2.09	01	Pemeliharaan Peralatan Mesin		Jumlah Unit		Kab. Karimun, Kec. Moro		Unit		2.030.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Unit		2.030.000

7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**872.013.828**					**872.013.828**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**872.013.828**					**872.013.828**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilipahkan Kepada camat		Jumlah Urusan Pemerintah		Kab. Karimun, Kec. Moro		11 jenis Urusan		872.013.828	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11 Jenis Urusan	872.013.828

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Karimun dan berpedoman pada Peraturan Bupati Karimun Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016-2022 serta mengacu pada Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten KarimunTahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

CAMAT MORO

ANDRI WINARTA, S.I.P,. M.A.P
NIP. 19880619 200701 1 003

RENCANA KERJA KECAMATAN BURU (RENJA)

Tahun 2025

KABUPATEN KARIMUN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Buru Tahun 2025. Rencana Kerja ini merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) yang tertuang dalam rencana kerja Kecamatan Buru tahun 2025.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Buru ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang baik oleh kecamatan Buru. Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana kerja ini bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sekian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya.

C A M A T

MUHAMMAD RAHENDRA, S.Sos,MM
PEMBINA
NIP. 19840620 200312 1 009

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. Rencana Kerja SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Buru dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD.

Kecamatan Buru selaku perangkat daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buru. Rencana kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategi dan dalam penyusunannya mengacu rencana kerja pemerintah daerah. Rencana kerja juga sebagai bahan masukan untuk rencana kerja anggaran perangkat daerah.

RENJA SKPD Kecamatan Buru Tahun 2025 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Buru untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dari 2 desa dan 2 kelurahan. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Buru tahun 2025 didasarkan pada ketentuan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 107, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemrimbangan Keuangan agtara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
7. Keputusan menteri dalam negeri 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578:);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4817);;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-20190 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peaturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Perartueran Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah);
16. Pearturan Daerah Provinsi Kepualauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 53);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Karimun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2010 Nomor 18)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten KarimunTahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 Lembaran Daerah kabupaten Karimun;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Buru tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam perangkat daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakanpada tahun berikutnya.

Adapun Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah:

1. Acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Buru Tahun 2025;
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang akuntabel, partisipatif dan tepat sasaran;
4. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Buru tahun 2025 dengan target dan sasaran Pembangunan daerah.
5. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Buru di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini berisi kajian (review) terhadap hasil evaluasi, analisa kerja Pelayanan SKPD, isu-isu penting dan Review terhadap Rancangan awal Kecamatan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tugas pokok dan Renstra Kecamatan.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan atau catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya dari seluruh bab yang dimuat didalam Renja Kecamatan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Buru pada tahun 2024 dapat dilihat dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam renja tahun bersangkutan. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

Aggaran Belanja : 5.049.835.035

Realisasi : 4.371.703.815

Sisa : 583.631.220

Anggaran Belanja sebesar Rp. 5.049.835.035 dapat terserap sebesar Rp. 4.371.703.815 atau 86 %.

Berikut ini disampaikan pula rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Rencana kerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Buru ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Buru selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

2.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja inii diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2.1.2 Target Kinerja Pelayanan Kecamatan Buru

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama.

Tabel 2.1.2

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET
01	Nilai AKIP Kecamatan Buru	59
02	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79
03	Persentase Temuan Inspektorat/BPK yang di Tindaklanjuti	70 %
04	Persentase Rekomendasi Kinerja yang ditindaklanjuti	70 %
05	Mutu Pelayanan Publik	3,51
06	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	60 %
07	Persentase Kelurahan yang program kerjanya terealisasi >80%	80 %
08	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	65 %
09	Persentase Laporan Kasus Ketentraman dan Ketertiban yang di Tindaklanjuti	65 %

10	Persentase Kasus Ketentraman dan Ketertiban yang di Fasilitasi Kecamatan	60 %

2.1.7 Kebijakan atau Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang diambil untuk mengatasi Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya dan Terpenuhinya Target Kinerja

Kebijakan atau tindakan Perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya target kinerja yaitu sebagai berikut :

- Peningkatan Kualitas pelayanan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM aparatur Kecamatan;
- Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan kewilayahan;
- Koordinasi dalam pelaksaan tugas dengan instansi terkait;
- Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Kewilayahan

2.3 . Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Isu-isu penting adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010).

Adapun isu penting yang diperhatikan untuk Kecamatan Buru adalah :

❖ **Rumusan Permasalahan Strategis yang Dihadapi Masa Kini**

Berdasarkan analisa lingkungan yang berpengaruh terhadap pencapaian visi, misi, baik secara internal maupun eksternal, ada beberapa permasalahan strategis yang dihadapi masa kini, yaitu :

a. Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan;
b. Pedoman pengelolaan daerah yang berubah-ubah aturan;
c. SDM Aparatur yang ada tidak sesuai kebutuhan.
d. Kecendrungan penurunan moralitas dan rendahnya keteladanan pimpinan di semua lapisan.
e. Dampak krisis finansial global.
f. Menurunnya kwalitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akibat pemanasan global dan rendahnya pemeliharaan lingkungan.
g. Semakin tingginya ancaman penyakit.
h. Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan merata.
i. Tuntutan akan pendidikan yang berkualitas dan tejangkau di berbagai lapisan masyarakat.
j. Adanya tuntutan terhadap ketahanan pangan yang bermutu, sehat, merata dan terjangkau.
k. Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
l. Peningkatan pemerataan kondisi infrastruktur dan lingkungan bagi kehidupan masyarakat yang sehat dan nyaman.
m. Tingginya tuntutan profesionalisme kinerja aparat pemerintah dalam pelayanan mayarakat.

❖ **Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang Berpengaruh Pada Tupoksi Kecamatan**

Berdasarkan rumusan, permasalahan strategis yang dihadapi masa kini, diperlukan beberapa rumusan perubahan untuk mencapai tujuan pada lima tahun yang akan datang.

a. Tugas Pokok dan Fungsi kecamatan perlu penyesuaian karena merupakan SKPD sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004;
b. Perlu adanya beberapa perubahan berkaitan dengan kewenangan;
c. Perlu pemahaman bersama kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan khususnya oleh SKPD terkait;
d. Penyesuaian anggaran berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baru

❖ **Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang Perlu Dilakukan.**

a. Menambah jumlah pegawai yang berkualitas sesuai keahliannya;
b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya;
c. Menambah jumlah anggaran sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
d. Meningkatkan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat;
e. Peraturan Perundangan yang mendukung visi dan misi tidak berubah-ubah;
f. Menjadikan Kecamatan sebagai SKPD murni

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan yaitu sebagai berikut :

1. Terbatasnya Kapasitas Pemerintah Daerah

   Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah ditunjukkan dari kurangnya pemahaman dan keterampilan pegawai di bidang-bidang tugas yang membutuhkan keahlian khusus, diantaranya adalah operator komputer, arsiparis, dan administrasi kependudukan. Sementara mutasi antar SKPD juga menjadi salah satu penyebab, karena kaderisasi menjadi terbatas dilakukan bagi pegawai di lingkungan Kantor Camat Buru. Selain itu terdapat pula keterbatasan anggaran bagi pengembangan sumber daya manusia pegawai.

   Keterbatasan kualitas adalah satu sisi, sedangkan keterbatasan kuantitas ada di sisi lainnya. Kurangnya jumlah aparatur yang mempunyai

keadilan dibidangnya ini terutama dirasakan pada staf kantor camat umumnya dan kantor camat Buru khususnya.

Minimnya penguasaan teknologi informasi juga menjadi satu keterbatasan mengingat penguasaan teknologi informasi menjadi prasyarat dasar bagi peningkatan pengetahuan dan efektivitas serta efisiensi kerja. Lemahnya penguasaan tentu diikuti dengan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan prinsip-prinsip serta teknologi e–Government di kalangan aparatur pemerintahan. Perkembangan yang cepat dari teknologi informasi dan komunikasi belum ditangkap sebagai peluang dan kekuatan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, khususnya guna mengatasi sulitnya komunikasi daerah kepulauan.

Selain kapasitas sumber daya manusia, terdapat pula masalah terkait kelembagaan. Salah satu masalah kelembagaan yang terekam adalah masih dirasa belum jelasnya ketentuan-ketentuan daerah yang mengatur pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat. Camat dan Lurah bekerja melaksanakan tugas-tugas eksekutif, namun perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas-tugas itu dirasakan masih kurang, termasuk juga pelrindungan prosedural jika terdapat pemanggilan-pemanggilan Camat dan Lurah dari instansi-instansi lain.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Perkantoran

Masih dijumpai permasalahan mengenai sarana dan prasarana yang belum optimal, Fasilitas teknologi informasi juga belum optimal tersediakan padahal manfaatnya besar untuk menunjang kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Sejalan dengan usia alat/barang, maka kualitasnya pun semakin menurun sehingga banyak dibutuhkan penggantian atau pemeliharaan.

Belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belum banyak kerjasama antar daerah yang dilaksanakan dalam penyediaan pelayanan publik

dan menangkap dampak *multiplier* positif (*spill over*) terutama di daerah perbatasan antar daerah, termasuk dengan kabupaten-kabupaten perbatasan di bagian selatan dan barat.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan program dan kegiatan Masyarakat dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayananan atau dari LSM dan organisasi-organisasi. Penelaahan usulan program didapat dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan dari tingkat Kelurahan hingga ke tingkat Kecamatan yang selanjutnya akan disampaikan lagi ke tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Usulan atau isu-isu strategis penyelenggaraan kegiatan masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5

Usulan Prioritas Musrenbang Tahun 2025

No Urut Prioritas	Permasalahan	Usulan	Lokasi (Jalan, Gang, RT, RW dan Dusun, Titik Koordinat)	SKPD Tujuan
01	Jalan saat ini rusak berat akibat dari kendaraan berat yang melintasi jalan tersebut, karna Jalan tersebut merupakan Jalan Umum yang dilewati Jalan tersebut merupakan Jalan penghubung anatara Kelurahan dan Kecamatan	Pengaspalan Jalan	RW. 004 s/ d RW. 009 Kel. Buru	Dinas Pekerjaan Umum
02	Kondisi bibir pantai saat ini mengalami abrasi yg sangat berat akibatnya diaaat air laut pasang tinggi pemukiman perumahan warga hingga meakibatkan banjir rob	Dinding Penahan Gelombang dan Penimbunan	RT. 001 RW. 003 dan RT. 001 RW. 001 Kel. Buru	Dinas Pekerjaan Umum
03	Terdapat Kerusakan pada Parit yang berfungsi sebagai Tembok Penahan Tanah sepanjang jalan utama Kelurahan Buru,kerusakan ini berdampak pada keruskaan jalan, saat pasang laut dan hujan dengan insentas tinggi terjadi longsor pada bahu jalan	Dinding Penahan Tanah	RW. 006 RW. 009 Ling. Garuda	Dinas Pekerjaan Umum
04	Kondisi jalan saat ini rusak berat serta berlubang-lubang	Lanjutan Peningkatan Jalan Umum (Beton/Aspal Hotmix)	Kelurahan Lubuk Puding	Dinas Pekerjaan Umum

05	Gelomang laut Yang menyebatkan Abrasi Pantai	Pembangunan Pelabuhan Lingkar dan Pemasangan Batu Pemecah Gelombang Pulau Tanjung Ambat	Pantai Tanjung Ambat Kelurahan Lubuk Puding RT.001 RW.001	Dinas Pekerjaan Umum
06	Meluapnya air laut	Pembangunan pintu air	RT.002 RW.001 (TELUK DALAM), RT.001 RW.002 (TELUK DALAM), RT.003 RW.003 (LUBUK PUDING)	Dinas Pekerjaan Umum
07	Meluapnya air pasang Laut	Lanjutan Pembangunan Dinding Penahan Gelombang Pantai Wisata Tanjung Ambat	Pantai Tanjung Ambat Kelurahan Lubuk Puding, RT.001 RW.001	Dinas Pekerjaan Umum
08	Meluapnya air pasang Laut	Penimbunan Dan Pembangunan Jalan Pesisir Pantai Wisata Tanjung Ambat	Pantai Tanjung Ambat Kelurahan Lubuk Puding, RT.001 RW.001	Dinas Pekerjaan Umum

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM

DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Tinjauan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu Indonesia bepenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Deaerah Terpilih

Berdasarkan pemahaman atas isu strategis pembangunan yang potensial dihadapi pada periode 2021-2026, arahan dari RPJPD Kabupaten Karimun 2021-2026, serta arahan dari visi dan misi RPJMN 2021-2026, maka kami merumuskan visi pembangunan daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa”

3.3 Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Karimun 2021-2026 tersebut, maka ditempuh melalui lima misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa
4. Meningkatkan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup
5. Mewujudkan birokrasi yang professional dan unggul

Dalam melaksanakan roda kepemerintahan, Kecamatan mengacu pada misi

Kabupaten yang ke- 5. Berdasarkan misi yang ditetapkan tersebut, maka tujuan, sasaran dan Indikator sasaran pembangunan Kabupaten Karimun untuk lima tahun ke depan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 5. Mewujudkan Birokrasi yang professional dan unggul		
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance)	1. Terwujudnya birokrasi yang professional, bersih dan akuntabel	-indeks akuntabilitas - opini BPK - indeks merit system -indeks kelembagaan
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik

3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan

Sebagaimana amanat dari Undang - Undang Nomor : 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah bahwa (RPJM Daerah) sebagai penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang Penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, program - program pembangunan dan kegiatan pokok.

Salah satu yang termuat didalam RPJMD tersebut adalah program Satuan Kerja Perangka Daerah (Renstra-SKPD) yang dalam penyusunannya mengacu kepada visi, misi dan program Kepala daerah. Sebagai salah satu SKPD yang ada di Kabupaten Karimun maka Kecamatan Buru harus mempersiapkan Renja sebagai dokumen rencana Kerja Kecamatan 1 tahun akan datang.

Disini akan kami kemukakan mengenai Kebijakan dan Strategi yang telah ditetapkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan di Kecamatan Buru.

3.5 Program dan Kegiatan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan Untuk mencapai visi, melaksakan misi memecahkan persoalan dan menangani isu Strategis daerah yang dihadapi.

Adapun bentuk **Program dan Kegiatan** dari Kecamatan Buru untuk berjalannya misi guna mewujudkan visi, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan;
2. Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Meningkatkan Kehidupan Beragama dan pemahaman Agama di tengah masyarakat;
4. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban umum**;**
5. Meningkatkan Promosi wisata :

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diflementasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun **Sasaran Strategis** yang akan dicapai Kecamatan Buru adalah :

Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Indikator : - Nilai AKIP kecamatan Buru

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Buru Yaitu:

NO	SASARAN	INDIKATOR	
1	2	3	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Buru	1	Nilai AKIP Kecamatan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Kecamatan Buru	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		2	Persentase Temuan Inspektorat/BPK yang di Tindaklanjuti
		3	Persentase Rekomendasi Kinerja yang ditindaklanjuti
3	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Wilayah Kecamatan Buru	1	Mutu Pelayanan Publik
		2	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti
4	Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Buru	1	Persentase Kelurahan yang program kerjanya terealisasi >80%
		2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif
5	Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Buru	1	Persentase Laporan Kasus Ketentraman dan Ketertiban yang di Tindaklanjuti
		2	Persentase Kasus Ketentraman dan Ketertiban yang di Fasilitasi Kecamatan

3.5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitif, rasional dan komperensif, Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan guna mewujudkan tercapaianya tujuan dan sasaran Kantor camat Buru.

Adapun strategi yang di tetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah :

- Penyediaan fasilitas pelayanan perkantoran yang memadai dan kualitas;
- Menyempurnakan implentasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat;
- Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pengelola kegiatan agar capaian kinerja dapat ditingkatkan;
- Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kewilayahan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Karimun;
- Membangun iklim yang kondusif pada tataran pelaksanaan tugas bersama unit kerja lainya;
- Memperluas upaya cakupan pembinaan desa.

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi pogram dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan kantor Kecamtan Buru dalam rangka mendukung strategi tersebut maka kebijakan diarahkan pada :

- Peningkatan Kualitas pelayanan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM aparatur Kecamatan;
- Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan kewilayahan;
- Koordinasi dalam pelaksaan tugas dengan istansi terkait;
- Peningkatan ketersediaan data dan Informasi kewilayahan.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Buru Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Startegi Kecamatan Buru Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2025, Rencana Kerja Kecamatan Buru ini terdapat tiga program dan delapan kegiatan. Rencana Kerja ini dipakai sebagai acauan dalam pelaksanaan tugas tahun 2025, khususnya dengan menyusun Rencana Kerja tahun anggaran 2025 dan untuk mengidentifkasi perkiraan sumber daya dan dana yang dibutuhkan.

Rencana Kerja Kecamatan Buru tahun 2025 dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan.

C A M A T

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN BURU

MUHAMMAD RAHENDRA S.Sos,MM
NIP. 19840620 200312 1 009

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Kecamatan

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Karimun

kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Rencana Tahun 2025		
							Target	Rp.	Sumber Dana
					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**79,5**	**4.444.133.000**	
					Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kec. Buru		**60**	**4.444.133.000**	
7	01	01			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**3.795.133.000**	
7	01	01	2,01		**Perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen**		**81.000.000**	**PAD**
7	01	01	2,01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	35.000.000,00	PAD
7	01	01	2,01	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2 Laporan	26.000.000,00	PAD
7	01	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	2 Laporan	20.000.000,00	PAD
7	01	01	2,02		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Jumlah Laporan**		**2.734.380.000**	**PAD & DANA ALOKASI UMUM**
7	01	01	2,02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	392 Org/Bln (28 Orang x 14 Bln)	2.544.380.000,00	DANA ALOKASI UMUM

7	01	01	2,02	0002	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	180.000.000,00	PAD
7	01	01	2,02	0007	Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	PAD
7	01				**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**		**10.500.000**	**PAD**
7	01				Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.500.000,00	PAD
7	01	01	2,05		**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Jumlah Laporan**		**62.000.000**	**PAD**
7	01	01	2,05	0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 paket	34.000.000,00	PAD
7	01	01	2,05	0003	Pendataan dan Pengolahan Adminstrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	13.000.000,00	PAD
7	01	01	2,05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	15.000.000,00	PAD
7	01	01	2,06		**Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**		**221.353.000**	**PAD**
7	01	01	2,06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	14.300.000,00	PAD

7	01	01	2,06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	62.953.000,00	PAD
7	01	01	2,06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	13.400.000,00	PAD
7	01	01	2,06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	23.000.000,00	PAD
7	01	01	2,06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	1 paket	16.000.000,00	PAD
7	01	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.700.000,00	PAD
7	01	01	2,06	0007	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	12.000.000,00	PAD
7	01	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 laporan	12.000.000,00	PAD
7	01	01	2,06	0009	Peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	65.000.000,00	PAD
7	01	01	2,07		**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah Laporan**	4 Laporan	**42.500.000**	**PAD**
7	01	01	2,07	0005	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	10.000.000,00	PAD
7	01	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	11.000.000,00	PAD

7	01	01	2,07	0009	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	12.500.000,00	PAD
7	01	01	2,07	0010	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	9.000.000,00	PAD
7	01	01	2,07	0011	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa**	3 Laporan	**566.400.000**	**PAD**
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.600.000,00	PAD
7	01	01	2,08	0001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12.800.000,00	PAD
7	01	01	2,08	0002	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	12.000.000,00	PAD
7	01	01	2,08	0003	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 2 laporan	531.000.000,00	PAD
7	01	01	2,08	0004	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terpelihara**	6 Laporan	**77.000.000**	**PAD**
7	01	01	2,09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	13.000.000,00	PAD

7	01	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	13.000.000,00	PAD
7	01	01	2,09	0002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	15.200.000,00	PAD
7	01	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	11.300.000,00	PAD
7	01	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasara gedung kentor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	12.500.000,00	PAD
7	01	01	2,09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	12.000.000,00	PAD
7	01	02			**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Mutu Pelayanan Publik**		**605.000.000**	
7	01	02	2,01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan**		**30.000.000**	**PAD**
7	01	02	2,01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	1 Dokumen	30.000.000,00	PAD
7	01	02	2,04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Jumlah Laporan**		**575.000.000**	

7	01	02	2,04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan kewenangan lain yang di limpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9 Laporan	575.000.000,00	PAD
7	01	03			**PEMBERDAYAAN MASYARKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**		**44.000.000**	**DANA ALOKASI UMUM-TAMBAHAN DANA BAGI KELURAHAN**
7	01	03	2,02		**Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Laporan**	2 Laporan	**44.000.000**	**DANA ALOKASI UMUM-TAMBAHAN DANA BAGI KELURAHAN**
7	01	03	2,02	0001	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 unit	27.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM-TAMBAHAN DANA BAGI KELURAHAN
7	01	03	2,02	0002	Pemberdayaan Masyarkat Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 pokmas/ormas	17.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM-TAMBAHAN DANA BAGI KELURAHAN

Tabel 3.1

Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Rencana Tahun 2026	
									Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik								**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**79,5**	**4.444.133.000**		80	**4.510.795.000**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kec. Buru							**Nilai AKIP Kecamatan Buru**	**60**	**4.444.133.000**		61	**4.510.795.000**
		7	01	01			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**3.795.133.000**		80	**3.851.995.000**
		7	01	01	2,01		**Perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen**		**81.000.000**	**PAD**	6 Dokumen	**84.000.000**
		7	01	01	2,01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	35.000.000,00	PAD	2 Dokumen	36.000.000,00
		7	01	01	2,01	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2 Laporan	26.000.000,00	PAD	2 Laporan	27.000.000,00
		7	01	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	2 Laporan	20.000.000,00	PAD	2 Laporan	21.000.000,00
		7	01	01	2,02		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Jumlah Laporan**		**2.734.380.000**	**PAD & DANA ALOKASI UMUM**		**2.744.680.000**
		7	01	01	2,02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	392 Org/Bln (28 Orang x 14 Bln)	2.544.380.000,00	DANA ALOKASI UMUM	406 Org/Bln (29 Orang x 14 Bln)	2.548.680.000,00

7	01	01	2,02	0002	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	180.000.000,00	PAD	12 Dokumen	185.000.000,00
7	01	01	2,02	0007	Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	PAD	2 Laporan	11.000.000,00
7	01				**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**		**10.500.000**	**PAD**		**11.000.000**
7	01				Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.500.000,00	PAD	2 Laporan	11.000.000,00
7	01	01	2,05		**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Jumlah Laporan**		**62.000.000**	**PAD**		**65.000.000**
7	01	01	2,05	0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 paket	34.000.000,00	PAD	6 paket	35.000.000,00
7	01	01	2,05	0003	Pendataan dan Pengolahan Adminstrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	13.000.000,00	PAD	1 Dokumen	14.000.000,00
7	01	01	2,05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	15.000.000,00	PAD	30 Orang	16.000.000,00
7	01	01	2,06		**Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan**		**221.353.000**	**PAD**		**235.415.000**
7	01	01	2,06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	14.300.000,00	PAD	1 paket	15.600.000,00

7	01	01	2,06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	62.953.000,00	PAD	1 paket	63.215.000,00
7	01	01	2,06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	13.400.000,00	PAD	1 paket	14.400.000,00
7	01	01	2,06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	23.000.000,00	PAD	1 paket	23.400.000,00
7	01	01	2,06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	16.000.000,00	PAD	1 paket	16.500.000,00
7	01	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.700.000,00	PAD	1 dokumen	2.800.000,00
7	01	01	2,06	0007	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	12.000.000,00	PAD	1 paket	13.000.000,00
7	01	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 laporan	12.000.000,00	PAD	2 laporan	12.500.000,00
7	01	01	2,06	0009	Peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	65.000.000,00	PAD	150 laporan	74.000.000,00
7	01	01	2,07		**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah Laporan**	4 Laporan	**42.500.000**	**PAD**		**46.000.000**
7	01	01	2,07	0005	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	10.000.000,00	PAD	8 Unit	11.000.000,00
7	01	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	11.000.000,00	PAD	2 Unit	12.000.000,00

		7	01	01	2,07	0009	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	12.500.000,00	PAD	4 unit	13.000.000,00
		7	01	01	2,07	0010	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	9.000.000,00	PAD	4 unit	10.000.000,00
		7	01	01	2,07	0011	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa**	3 Laporan	**566.400.000**	**PAD**		**584.000.000**
		7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.600.000,00	PAD	1 laporan	10.700.000,00
		7	01	01	2,08	0001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12.800.000,00	PAD	12 laporan	13.300.000,00
		7	01	01	2,08	0002	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	12.000.000,00	PAD	1 laporan	13.000.000,00
		7	01	01	2,08	0003	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 2 laporan	531.000.000,00	PAD	1 2 laporan	547.000.000,00
		7	01	01	2,08	0004	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terpelihara**	6 Laporan	**77.000.000**	**PAD**	6 Laporan	**81.900.000**
		7	01	01	2,09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	13.000.000,00	PAD	2 Unit	14.000.000,00

7	01	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	13.000.000,00	PAD	2 Unit	14.000.000,00
7	01	01	2,09	0002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	15.200.000,00	PAD	11 unit	16.400.000,00
7	01	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	11.300.000,00	PAD	4 Unit	12.000.000,00
7	01	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasara gedung kentor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	4 unit	12.500.000,00	PAD	4 unit	13.000.000,00
7	01	01	2,09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	12.000.000,00	PAD	4 unit	12.500.000,00
7	01	02			**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Mutu Pelayanan Publik**		**605.000.000**			**610.800.000**
7	01	02	2,01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan**		**30.000.000**	**PAD**	1 Laporan	**31.000.000**
7	01	02	2,01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	1 Dokumen	30.000.000,00	PAD	1 Dokumen	31.000.000,00
7	01	02	2,04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang**	**Jumlah Laporan**		**575.000.000**		9 Laporan	**579.800.000**

							Dilimpahkan Kepada Camat						
		7	01	02	2,04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan kewenangan lain yang di limpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9 Laporan	575.000.000,00	PAD	9 Laporan	579.800.000,00
		7	01	03			**PEMBERDAYAAN MASYARKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**		**44.000.000**	**DANA ALOKASI UMUM-TAMBAHAN DANA BAGI KELURAHAN**	59%	**48.000.000**
		7	01	03	2,02		**Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Laporan**	2 Laporan	**44.000.000**	**DANA ALOKASI UMUM-TAMBAHAN DANA BAGI KELURAHAN**	2 Laporan	**48.000.000**
		7	01	03	2,02	0001	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 unit	27.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM-TAMBAHAN DANA BAGI KELURAHAN	16 unit	30.000.000,00
		7	01	03	2,02	0002	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 pokmas/ormas	17.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM-TAMBAHAN DANA BAGI KELURAHAN	8 pokmas/ormas	18.000.000,00
TOTAL PAGU ANGGARAN										**4.444.133.000**			**4.510.795.000**

Tabel 2.1
Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kec. Buru

No.	Tujuan / Sasaran	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2021 s/d 2026)	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output) (Renstra 2021 s/d 2026)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)						Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan (2024)												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I			II			III			IV															
1	2	3						4	5	6	7		8 = (2022 ÷ 2023)		9						10			11			12			13			14 = 10+11+12+13			15 = 14 / 9 x 100%		16 = 8 + 14		17 = 16 / 7 x 100%		18
											K	Rp	K	Rp	Kinerja K	Kinerja Rp	APBD Murni K	APBD Murni Rp	APBD Perubahan K	APBD Perubahan Rp	K	Rp	%	F	K	Rp	%	F	K	Rp	%	F	K	F	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tujuan :Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik								Indeks Pelayanan Publik	nilai	4,01	20.763.644.000	-	4.460.348.583	3,51	4.151.796.000	3,51	4.675.847.860	3,51	5.049.835.035	0	896.803.932	17,76	-	0	1.266.781.525	25,09	0	0	1.029.562.661	20,39	0	3,51	1.178.555.697	23,34	100	3,51	100	4.371.703.815,00	100,00	86,57	3,51	100	8.832.052.398,00	87,53	42,54	KEC BURU
	Sasaran:Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kec. Buru								Nilai AKIP Kecamatan Buru	nilai	61	20.763.644.000,00	29,06	4.460.348.583,00	59	4.151.796.000,00	59	4.675.847.860,00	59	5.049.835.035,00	0	896.803.932,00	17,76	-	0	1.266.781.525,00	25,09	0	0	1.029.562.661,00	20,39	0	0	1.178.555.697,00	23,34	0	0	-	4.371.703.815,00	-	86,57	0	-	8.832.052.398	-	42,54	KEC BURU
		7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	80	17.765.644.000	76	3.430.569.858	79	3.551.696.000	79	3.546.885.285	79	3.659.964.160	0	759.435.932	21	-	75	1.012.561.525	28	94,937	0	859.012.661	23,47	0	0	683.608.197	18,68	0	75	95	3.314.618.315,00	94,94	90,56	151	6.745.188.173	188,75	37,97	KEC BURU
		7	01	01	2.01			Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	dokumen	30	390.000.000	12	19.129.500	6	78.000.000	6	24.999.000	6	7.000.000,00	3	3.722.000	53	50	1	1.278.000	18	16,7	1	1.000.000	14,29	16,7	1	-	-	16,7	6	100	6.000.000,00	100,00	85,71	18	25.129.500	60,00	6,44	KEC BURU
		7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	10	170.000.000	4	14.223.500,00	2	34.000.000,00	2	9.999.900,00	2	4.000.000,00	1	2.000.000,00	50	50	0	500.000,00	13	0	1	500.000,00	12,50	50,00		-	-		2	100	3.000.000,00	100,00	75,00	6	17.223.500	60,00	10,13	KEC BURU
		7	01	01	2.01	06		Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	10	125.000.000	4	3.604.000,00	2	25.000.000,00	2	9.999.300,00	2	2.500.000,00	2	1.222.000,00	49	100		778.000,00	31			500.000,00	20,00			-	-		2	100	2.500.000,00	100,00	100,00	6	6.104.000	60,00	4,88	KEC BURU
		7	01	01	2.01	06		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	10	95.000.000	4	1.302.000,00	2	19.000.000,00	2	4.999.800,00	2	500.000,00	0	500.000,00	100	0	1		-	50	0				1		-	50,00	2	100	500.000,00	100,00	100,00	6	1.802.000	60,00	1,90	KEC BURU
		7	01	01	2,02			Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan	Laporan	15	13.581.583.000	4	2.567.730.358	3	2.718.096.000	3	2.610.774.877	3	2.655.145.752	0	588.725.932	22	-	0	723.045.525	27	-	0	630.027.661	23,73	0,00	2	508.581.197	19,15	66,67	2	67	2.450.380.315,00	66,67	92,29	6	5.018.110.673	40,00	36,95	KEC BURU
		7	01	01	2,02	01		Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	2070	12.707.583.000	334	2.478.716.358,00	378	2.543.096.000,00	378	2.551.098.877,00	378	2.535.793.752	69	575.977.932,00	23	18,25	92	711.297.525,00	28	24,34	92	617.779.661,00	24,36	24,34	69	508.581.197,00	20,06	18,25	322	85	2.413.636.315,00	85,19	95,18	656	4.892.352.673	31,69	38,50	KEC BURU
		7	01	01	2,02	02		Sub Kegiatan Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	874.000.000	14	89.014.000,00	12	175.000.000,00	12	59.676.000,00	12	119.352.000,00	2	12.748.000,00	11	16,67	2	11.748.000,00	10	16,67	2	12.248.000,00	**10,26**	16,67		-	-	-	6	50	36.744.000,00	50,00	30,79	20	125.758.000	33,33	14,39	KEC BURU
		7	01	01	2,06			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	9	821.286.000	10	95.057.000	9	162.000.000	9	219.956.854	5	195.390.554		-	-	-	0	85.245.000	44	-	0	44.483.000	22,77	0,00	5	-	-	100,00	5	100	129.728.000,00	100,00	66,39	15	224.785.000	166,67	27,37	KEC BURU
		7	01	01	2,06	01		Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	67.450.000	2	1.472.000,00	1	13.500.000,00	1	14.290.000,00	1	7.886.000,00			-	-		4.658.000,00	59	-	0	-	-	0,00	1	-	-	100,00	1	100	4.658.000,00	100,00	59,07	3	6.130.000	60,00	9,09	KEC BURU
		7	01	01	2,06	02		Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	301.986.000	2	73.156.000,00	1	60.300.000,00	1	96.091.422,00	1	97.482.322	0	-	-	-	0	56.546.000,00	58	-	0	13.100.000,00	**13,44**	0,00	1	-	-	100,00	1	100	69.646.000,00	100,00	71,44	3	142.802.000	60,00	47,29	KEC BURU
		7	01	01	2,06	03		Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	62.820.000	2	1.484.000,00	1	12.700.000,00	1	8.196.532,00	1	7.726.532	0		-	-	0	1.699.000,00	**22**	-	0	1.793.000,00	23,21	0,00	1	-	-	100,00	1	100	3.492.000,00	100,00	45,19	3	4.976.000	60,00	7,92	KEC BURU
		7	01	01	2,06	05		Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	76.580.000	2	3.304.000,00	1	15.500.000,00	1	26.291.900,00	1	22.857.700	0		-	-	0	7.977.000,00	35	-	0	9.549.000,00	41,78	0,00	1	-	-	100,00	1	100	17.526.000,00	100,00	76,67	3	20.830.000	60,00	27,20	KEC BURU
		7	01	01	2,06	09		Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	750	312.450.000	126	15.641.000,00	150	60.000.000,00	150	75.087.000,00	48	59.438.000,00	0		-	-	18	14.365.000,00	24	37,50	30	20.041.000,00	**33,72**	62,50	**0**		-	-	48	100	34.406.000,00	100,00	57,89	174	50.047.000	23,20	16,02	KEC BURU
		7	01	01	2,08			Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan	Laporan	15	2.678.175.000	4	746.190.000	3	534.800.000	3	646.695.554	3	781.573.854	0	166.988.000	21	-	0	202.993.000	26	-	0	176.688.000	22,61	0,00	2	175.000.000	22,39	66,67	2	67	721.669.000,00	66,67	92,34	6	1.467.859.000	40,00	54,81	KEC BURU
		7	01	01	2,08	1		Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	59.075.000	24	10.935.000,00	12	11.300.000,00	12	27.595.554,00	12	20.473.854,00	3	538.000,00	3	25,00	3	2.203.000,00	11	25,00	3	10.428.000,00	50,93	25,00	3	-	-	25,00	12	100	13.169.000,00	100,00	64,32	36	24.104.000	60,00	40,80	KEC BURU
		7	01	01	2,08	2		Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	2.619.100.000	24	735.255.000,00	12	523.500.000,00	12	619.100.000,00	12	761.100.000,00	3	166.450.000,00	22	25,00	3	200.790.000,00	26	25,00	3	166.260.000,00	**21,84**	25,00	**3**	175.000.000,00	**22,99**	25,00	**12**	**100**	**708.500.000,00**	**100,00**	**93,09**	**36**	**1.443.755.000**	**60,00**	**55,12**	KEC BURU
		7	01	01	2,09			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	6	243.100.000	4	2.463.000	6	48.800.000	6	24.543.000	3	11.964.000	0	-	-	-	0	-	-	-	0	6.814.000,00	56,95	0,00	2	27.000,00	0,23	66,67	2	67	6.841.000,00	66,67	57,18	6	9.304.000	100,00	3,83	KEC BURU
		7	01	01	2,09	01		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	2	60.000.000	1	602.000,00	2	12.000.000,00	2	8.084.000,00	1	4.174.000,00	0		-	-	0	-	-	-	1	3.284.000,00	78,68	100,00	0	27.000,00	0,65	-	1	100	3.311.000,00	100,00	79,32	2	3.913.000	100,00	6,52	KEC BURU
		7	01	01	2,09	02		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	2	60.000.000	2	441.000,00	2	12.000.000,00	2	3.533.000,00	2	-	**0**	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0,00		-	-	-	**0**	-	-	-	-	**2**	441.000	100,00	**0,74**	KEC BURU
		7	01	01	2,09	06		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	11	72.800.000	4	1.420.000,00	11	14.800.000,00	11	7.790.000,00	0	7.790.000,00	0		-	-	0	-	-	-	3	3.530.000,00	45,31	0,00	0	-	-	-	3	-	**3.530.000,00**		45,31	7	4.950.000	63,64	6,80	KEC BURU
		7	01	01	2,09	09		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	4	50.300.000	0	-	4	10.000.000,00	4	5.136.000,00	0	-	0		-	-	0	-	-	-		-	-	0,00	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	KEC BURU
		7	01	01	2,07			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	6	51.500.000	**0**	-	**4**	10.000.000	**4**	10.916.000	**1**	8.890.000	0		-	-	0	-	-	-	0	-	-	0,00	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	KEC BURU
		7	01	01	2,09	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	10	51.500.000	0	-	2	10.000.000,00	2	19.916.000,00	1	8.890.000,00	0		-	-	0	-	-	-	0	-	-	0,00	0	-	-	-	0	-	-	-	0	0	-	-	-	KEC BURU
																																		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)			94,94	90,56			188,75	37,97	
																																		PREDIKAT KINERJA			ST	T			ST	S	
		7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	4,01	2.789.000.000	2,8	640.913.500,00	3,51	558.100.000,00	3,51	729.407.825,00	3,51	895.816.125,00	0	137.368.000,00	15,33	-	2,8	254.220.000,00	28,38	79,77		170.550.000,00	19,04	0,00	0	175.329.000,00	19,57	-	2,8	80	737.467.000,00	79,77	82,32	2,8	1.378.380.500	69,83	49,42	KEC BURU
		7	01	02	2,04			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kewade Camat	Jumlah Laporan	Laporan	45	2.789.000.000	13	640.913.500	9	558.100.000,00	9	729.407.825,00	9	895.816.125,00	3	137.368.000,00	15,33	33,33	2	254.220.000,00	28,38	22,22	2	170.550.000,00	19,04	22,22	0	175.329.000,00	19,57	-	7	78	737.467.000,00	77,78	82,32	20	1.378.380.500	44,44	49,42	KEC BURU
		7	01	02	2,04	03		Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan kewenangan lain yang di limpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	45	2.789.000.000	13	640.913.500,00	9	558.100.000,00	9	729.407.825,00	9	895.816.125,00	3	137.368.000,00	**15,33**	33,33	**2**	254.220.000,00	28,38	22,22	2	170.550.000,00	19,04	22,22	0	175.329.000,00	19,57	-	7	**78**	**737.467.000,00**	77,78	82,32	20	1.378.380.500	44,44	49,42	KEC BURU
																																		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)			**79,77**	**82,32**			**69,83**	**49,42**	
																																		PREDIKAT KINERJA			T	T			S	SR	

| | | |

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

KECAMATAN DURAI

RENCANA KERJA

KECAMATAN DURAI TAHUN 2025

KECAMATAN DURAI

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkah rahmat karunia-Nya Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah/OPD Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Durai pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi perangkat daerah melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan. Dengan demikian, semoga dokumen Renja yang telah disusun ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai dilingkungan Kecamatan Durai Kabupaten Karimun, didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Durai, Agustus 2024

CAMAT DURAI

AL MIZAN, S.IP
PENATA TINGKAT I
NIP. 19831008 200801 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan Durai 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 10
2.4 Review Terhadap Rencangan Awal RKPD Tahun 2025 13

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 15
3.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 17
3.3 Program dan Kegiatan 21

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan 24

BAB V PENUTUP 30

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar	1.1	Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya …..	2
Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2023 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun Anggaran 2024 …….……	7
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Durai Kabupaten Karimun ……..…	9
Tabel	2.3	Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2023 ..……...……	10
Tabel	2.4	Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2023 ..	11
Tabel	3.1	Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2025 ……..……	15
Tabel	3.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 ……	20
Tabel	3.3	Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Durai Tahun Anggaran 2025 ……..……..	21
Tabel	4.1	Rumusan Rencana Program/Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Tahun Anggaran 2025 ……	25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Durai Kabupaten Karimun menyusun Renja untuk Tahun Anggaran 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Durai. Renja Kecamatan Durai Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Durai Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan

sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1 Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

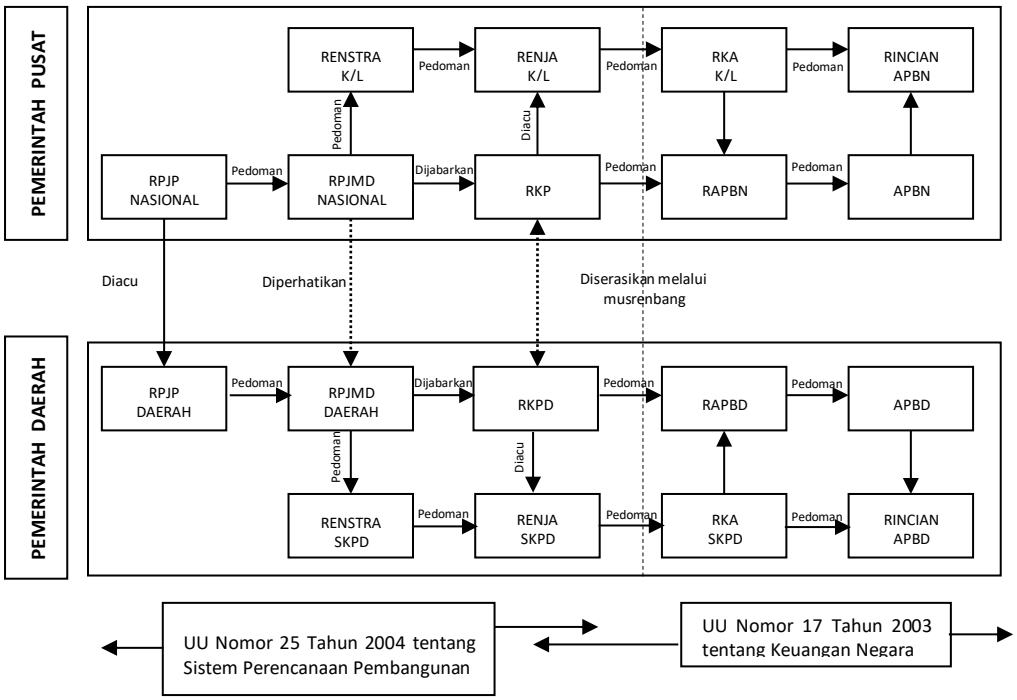

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Durai Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karimun sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karimun;

8. Peraturan Bupati Karimun Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se-Kabupaten Karimun;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Durai Kabupaten Karimn disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Durai dalam penyusunan RKA Kecamatan Durai Tahun Anggaran 2025. Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun Anggaran 2025 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Durai Tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Durai untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Durai Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Durai Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Durai Tahun Anggaran 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Durai Tahun Anggaran 2024 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Durai Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Durai Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2023 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun Anggaran 2024

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Durai

Kode				Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2023			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2024		
						Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
(1)				*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6) = (5)/(4)*	*(7)*	*(8)*	*(9) = (8)/(7)*
7				UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01			KECAMATAN							
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
7	01	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	01	2.06	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan	6 Laporan	86%	7 Laporan	7 Laporan	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2023			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2024		
						Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
(1)				*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6) = (5)/(4)*	*(7)*	*(8)*	*(9) = (8)/(7)*
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	2 Laporan	-	0%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
7	01	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Durai dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Durai Kabupaten Karimun disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Durai Kabupaten Karimun

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Catatan Analisis
1	Nilai AKIP Kecamatan	50,49	45,21	61	57	62	57,50	63	

Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Durai dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1. Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya;

2. Mengadakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Meningkatkan sistem pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien;
4. Meningkatkan sistem informasi manajemen yang Transparans dan handal;
5. Mengoptimalkan aparatur yang professional yang didukung oleh sistem pengembangan karier yang berbasis kompetensi dan prestasi;

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati/Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, Kecamatan Durai merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Fungsi Lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Durai menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Permasalahan	Hambatan
Terbatasnya SDM/jumlah	Tidak ada penambahan ASN
Monitoring ke Desa masih insidentil	Kesibukan di masing-masing Kepala Seksi dengan tupoksi
Kesiapan Data Musrenbang harus menunggu input aplikasi	Tidak semua perangkat desa/kecamatan menguasai aplikasi

Selain itu, selama Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Durai juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu :

Tabel 2.4
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Peluang	Tantangan
Potensi Durai sebagai wilayah pariwisata pantai dan keagamaan	Akses transportasi dan sarana prasaran belum maksimal
Obyek wisata di setiap desa cukup banyak	Belum semua potensi wisata di setiap desa di kelola dengan baik dan terpublikasikan
Jenis kuliner di Kecamatan Durai cukup banyak	Publikasi masih terbatas dan perlu intervensi bagi pelaku kuliner dan bersifat individualis

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2023, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Durai pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu penambahan personil/SDM untuk menguatkan kinerja yang maksimal;
2. Adanya monitoring yang terjadwal secara rutin;
3. Persiapan Musrenbang Kecamatan harus didukung data yang final dan akurat dari Desa.

Sedangkan isu-isu penting lainnya yang ada di Kecamatan Durai adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

   Kecamatan Durai menduduki ranking 8 tingkat kemiskinan di wilayah Pemerintah Kabupaten Karimun. Selama ini banyak intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta yang telah diterima oleh masyarakat tetapi pada kenyataannya belum bisa mengurangi/ menurunkan besaran angka kemiskinan di Kecamatan Durai. Mindset masyarakat sangatlah mendominasi sehingga perlu diberikan pemahaman dengan mengubah pola fikir masyarakat. Selain itu mengoptimalkan partisipasi masyarakat maupun pelaku usaha untuk menyumbangkan sebagian keuntungannya CSR yang merupakan kewajiban perusahaan swasta.

2. Bidang Pemerintahan

   Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menuntut aparat kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar Desa lebih optimal melaksanakan amanat Undang-Undang tentang Desa tersebut.

3. Bidang Pelayanan

   Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima menjadikan Kecamatan Durai untuk selalu berinovasi agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan.

4. Bidang Pertanian

   Alih fungsi lahan merupakan masalah yang mulai mencuat di wilayah Kecamatan Durai, para pengembang mulai melirik tanah pertanian untuk dijadikan perumahan.

2.4 REVIEW TERHADAP RENCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Durai Tahun 2025, sehubungan dengan Review terhadap Rancangan-rancangan program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan tahun awal, tentunya banyak terdapat keterbatasan dan kekuranganya, namun demikian hal tersebut yang menjadi salah satu pertimbangan-pertimbangan khusus yang kedepan dijadikan sebagai pijakan dan koreksi untuk mencapai dan mewujudkan Visi dan Misi yang telah di rencanakan sehingga kedepan akan lebih baik dari sebelumnya.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Durai pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Karimun dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja oleh Pemerintahan Kecamatan dan Jajarannya, melalui manajemen yang berbasis Profesional dan Melayani;
3. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
4. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;

5. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Uspika, Unit Pelayanan Teknis dan organisasi Pemerintahan lainnya yang menjadi unsur Pimpinan Daerah yang ada di Kecamatan.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten, yang dilandasi dan didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Durai maka kelima hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pada Tahun 2025, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan Prioritas Nasional (PN) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2025

No	Prioritas Nasional
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif;
4	Memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan;
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan;
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8	Memperkuat penjelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk menjadi pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program atau kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai Misi, Visi, Tujuan dan sasaran organisasi dan terangkum dalam uraian sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
2. Meningkatkan kualitas kinerja sehingga berdampak secara langsung dalam pencapaian visi dan misi Kecamatan;
3. Menyusun usulan anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendari nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan Kuangan Daerah;
4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan sesuai visi, misi dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Durai melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
5. Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan.

3.2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. VISI

Penetapan visi merupakan suatu langkah penting dalam perkembangan kehidupan organisasi di masa depan. Dalam perkembangan selanjutnya kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh kegiatan yang terjadi dilingkungan internal dan eksternal organisasi itu sendiri, oleh karenanya visi organisasi harus dinamis dan jika perlu visi dapat diubah disesuaikan serta disempurnakan untuk keberhasilan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kecamatan Durai mempunyai visi ***"Terwujudnya Kecamatan Durai yang Tertib, Mandiri dan Sejahtera"***. Visi tersebut dapat dicapai dengan terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan public, peningkatan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagai tolok ukur capaian kinerja Pemerintah Kecamatan.

Sehingga diharapkan dapat dirumuskan dan dilaksanakan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan, sehingga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkannya. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang juga dapat dipandang sebagai suatu kondisi dimana pemerintah kecamatan mampu meningkatkan partisipasi aktif pelayanan kepada masyarakat serta memiliki aparat yang akuntabel serta berdedikasi dalam upaya penyelenggaraan kegiatan tersebut.

B. MISI

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan. Misi memperjelas apa saja yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Camat Durai menetapkan 6 (enam) misi yang harus diembannya sebagai berikut :

1. Menjadikan Agama dan Budaya sebagai Pilar Pembangunan;
2. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Perikanan dan Pertanian;
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Kawasan Pesisir;
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Menciptakan Generasi Muda yang Berpengetahuan dan Berwawasan;
5. Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Profesional dan Berwibawa;
6. Mewujudkan Birokrasi yang Bersih, Profesional dan Unggul.

C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan target kualitatif yang dalam penetapannya mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi, Kecamatan Durai Kabupaten Karimun menetapkan tujuan untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Indikator
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)

D. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu, yang merupakan penjabaran dari tujuan. Dalam penetapan sasaran juga dirancang dan diidentifikasikan indikator pencapaiannya, yaitu suatu ukuran tingkat keberhasilan perwujudan pencapaiannya pada periode tahun tertentu. Setiap indikator pencapaian sasaran disertai dengan targetnya masing-masing.

Adapun dalam menentukan sasaran dan indikator sasaran, Kecamatan Durai tetap mengacu pada sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Karimun dengan beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan di Kecamatan Durai, sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Durai	Nilai AKIP Kecamatan Durai

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025, Tema Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah ” Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan melalui Peningkatan Investasi, Pembangunan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan Tata

Kelola Pemerintahan yang Inovatif", sesuai dengan tema maka Prioritas Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
2. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
4. Tata Kelola Pemerintahan Inovatif.

Sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 yang berhubungan langsung Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2025

No	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Target Tahun 2025
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (Good Government)		Indeks Tata Kelola Pemerintahan	68,52
1.1		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,55

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Durai serta tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Durai Tahun 2021-2026, maka rumusan

tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Durai Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Durai
Tahun Anggaran 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,55
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Durai	Nilai AKIP	63

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan organisasi. kebijakan organisasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk program yang terangkum dalam uraian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH

   Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dispilin apartur, meningkatkan kualitas pelayanan kantor,meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur di unit kerja;

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program ini merupakan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka pengkoordinasian kesejahteraan sisial pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat Kecamatan Durai melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.

B. KEGIATAN

Kegiatan merupakan tindakan nyata Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis organisasi dan tertuang dalam Renja OPD, adapun yang merupakan Kegiatan Prioritas Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
    d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
    a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
    b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
    a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Durai Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Durai Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan
Tahun Anggaran 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Durai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**4.427.899.000**					**4.471.817.000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3.380.044.489**					**3.417.844.671**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**56.487.567**					**57.184.881**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah		Jumlah Dokumen		Kab. Karimun, Kec. Durai		2 Dokumen		25.600.765	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	25.884.079
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD		Jumlah Dokumen		Kab. Karimun, Kec. Durai		2 Dokumen		20.657.802	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	20.800.802
7	01	01	2.01	07	EvaluasiKinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan		Kab. Karimun, Kec. Durai		1 Laporan		10.229.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	10.500.000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1.858.724.638**					**1.883.905.509**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN		Jumlah Pegawai		Kab. Karimun, Kec. Durai		16 Orang		1.743.971.776	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16 Orang	1.767.431.354

7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen		Kab. Karimun, Kec. Durai		12 Dokumen		114.752.862	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Dokumen	116.474.155
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**30.604.500**					**31.226.814**
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan		Kab. Karimun, Kec. Durai		2 Laporan		30.913.117	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Laporan	31.226.814
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**425.938..189**					**427.976.776**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian DinasBeserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket		Kab. Karimun, Kec. Durai		2 Paket		73.197.486	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Paket	74.294.964
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Laporan		Kab. Karimun, Kec. Durai		1 Dokumen		30.913.568	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	31.227.270
7	01	01	2.05	02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Peserta		Kab. Karimun, Kec. Durai		200 Orang		321.827.135	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200 Orang	322.454.542
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**433.705.756**					**437.728.197**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket		Kab. Karimun, Kec. Durai		1 Paket		26.057.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	26.298.829
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor		Jumlah Paket		Kab. Karimun, Kec. Durai		1 Paket		51.406.725	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	51.802.826
7	01	01	2.06	03	Penyediaan PeralatanRumah Tangga		Jumlah Paket		Kab. Karimun, Kec. Durai		1 Paket		35.601.417	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	35.835.438

7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan LogistikKantor		Jumlah Paket		Kab. Karimun, Kec. Durai		1 Paket		31.320.879	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	31.535.692
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket		Kab. Karimun, Kec. Durai		1 Paket		31.314.972	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	31.484.697
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/ Material		Jumlah Paket		Kab. Karimun, Kec. Durai		1 Paket		20.030.011	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	20.040.316
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan		Kab. Karimun, Kec. Durai		12 Laporan		30.400.317	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	30.556.322
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD		Jumlah Laporan		Kab. Karimun, Kec. Durai		75 Laporan		207.573.475	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75 Laporan	210.174.077
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**201.600.202**					**203.124.206**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mobiler		Jumlah Unit		Kab. Karimun, Kec. Durai		10 Unit		102.740.703	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Unit	103.681.813
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya		Jumlah Unit		Kab. Karimun, Kec. Durai		10 Unit		46.141.959	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Unit	46.534.089
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit		Kab. Karimun, Kec. Durai		10 Unit		52.717.540	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Unit	52.908.304
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**278.100.137**					**281.514.783**

7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa SuratMenyurat		Jumlah Laporan		Kab. Karimun, Kec. Durai		12 Laporan		2.517.450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	2.548.357
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik		Jumlah Laporan		Kab. Karimun, Kec. Durai		12 Laporan		45.453.375	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	45.685.176
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor		Jumlah Laporan		Kab. Karimun, Kec. Durai		10 Laporan		25.356.140	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Laporan	25.436.482
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor		Jumlah Laporan		Kab. Karimun, Kec. Durai		13 Laporan		201.408.988	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13 Laporan	204.430.122
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**94.574.883**					**95.183.506**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan		Jumlah Unit		Kab. Karimun, Kec. Durai		4 Unit		5.228.392	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Unit	5.306.818
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan		Kab. Karimun, Kec. Durai		8 Unit		24.913.568	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8 Unit	25.227.271
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Pemeliharaan		Kab. Karimun, Kec. Durai		5 Unit		64.432.923	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 Unit	64.649.417
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**997.169.335**					**1.003.051.876**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**31.141.959**					**31.534.089**

7	01	02	2.01	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Jenis Kegiatan		Kab. Karimun, Kec. Durai		2 Jenis		31.141.959	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Jenis	31.534.089
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**966.027.376**					**971.517.787**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Di limpahkan		Jumlah Jenis Urusan		Kab. Karimun, Kec. Durai		9 Jenis Urusan		966.027.376	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9 Jenis Urusan	971.517.787
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**50.685.176**					**50.920.453**
7	**01**	**06**	**2.02**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**50.685.176**					**50.920.453**
7	01	06	2.02	03	Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta diwilayah kerja Kecamatan		Jumlah Kegiatan		Kab. Karimun, Kec. Durai		4 Kegiatan		50.685.176	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Kegiatan	50.920.453

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember Tahun 2025. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Karimun dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berjalan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

CAMAT DURAI

AL MIZAN, S,IP
PENATA TINGKAT I
NIP. 19801008 200801 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN SELAT GELAM

RENCANA KERJA
TAHUN 2025

RENJA

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap Lembaga Pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah Yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan juga menyatukan visi,misi,persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Selat Gelam dalam membina , melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bias memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada SKPD.

Rencana Kerja Kecamatan Selat Gelam tahun 2025 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Selat Gelam untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat terutama masyarakat Kecamatan Selat Gelam.

Dengan adanya Dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan beserta targetnya dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kinerja yang ada pada SKPD Kecamatan Selat Gelam, yang akhirnya mampu mewujudkan VISI dan MISI Kecamatan Selat Gelam Kami menyadari Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Selat Gelam masih banyak kekurangannya oleh karena itu kami mohon masukan dari Stakeholder baikdari Pemerintah Kabupaten Karimun maupun Dinas Instansi lainnya serta pihak swasta dan masyarakat guna meningkatkan efektifitas Perencanaan kegiatan yang srategis Kecamatan Selat Gelam dimasa yang akan datang.

Selat Gelam, 31 Januari 2025
CAMAT SELAT GELAM

INDRA, S.Sos, M.M.Pub
NIP. 197907172010011006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar……..... 2

Daftar Isi……..... 3

BAB I PENDAHULUAN……..... 4

1.1 LATAR BELAKANG……..... 4

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN……..... 7

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ……..... 8

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ……..……..... 10

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN

TAHUN LALU…….....…….... 11

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN

CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN…… 11

2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN KECAMATAN…..... 17

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN

TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN……..... 18

BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ......… 23

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL…..... 23

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN..... 24

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 29

BAB IV PENUTUP……..... 37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun selanjutnya disebut Renja Kecamatan Selat Gelam pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Selat Gelam, maka disusunlah Renja Kecamatan Selat Gelam sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Renja Kecamatan Selat Gelam memuat gambaran keadaan yang ingindicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang akan dijalankan Tahun 2025, serta program – program yang nantinya akan di laksanakan meliputi kegiatan ditingkat kecamatan yang mencakup seluruhnya.

Kecamatan Selat Gelam berada diwilayah Kabupaten Karimun. Di Kecamatan Selat Gelam terdapat 22 pulau besar dan kecil dengan luas area daratan 52,7 Km2 dan luas perairan 1352 Km2. Secara geografis, batas antara wilayah Kecamatan Selat Gelam adalah terletak pada garis lintang antara 00º 35'25" LU - 01º02´30" LS dan pada garis bujur Utara 87º30'15" BT- 88º31'20" BT, serta berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura.Adapun batas–batas wilayah Kecamatan Selat Gelam adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Selat Singapura Dan Semenanjung Malaysia atau Selat Melaka

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kec. Kateman Kabupaten Indragiri Hilir

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kota Batam, dan

Sebelag Barat : Berbatasan dengan Kec. Rangsang Kabupaten Bengkalis serta Kec. Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Peta topografi yang dikeluarkan oleh Bako Surtanal, keadaanTopografi Kecamatan Selat Gelam bervariasi dari 0 meter sampai 478 meter diatas

permukaan air laut rata – rata (MSL). Keadaan topografi pada umunya rendah dan tidak memiliki gunung hanya beberapa bukit saja yang tidak begitu tinggi.

Pulau di Karimun Besar pada umunya landai kecuali di bagian utara. Disisi barat, selatan dan timur (bagian selatan) airnya relatif keruh dibandingkan dengan bagian utara. Tinggi air laut (pasang) berkisar antara 1,0 meter sampai dengan 1,5 meter dengan kondisi gelombang tidak begitu tinggi.

1. HUBUNGAN KERJA KECAMATAN

Dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan oraganiasi, Kecamatan yang dimanifestasikan oleh Camat melakukan hubungan kerja dengan berbagai instansi antara lain dengan :

1. Bupati melalui Sekretariat Daerah;
2. Dinas Daerah dan lembaga Teknis Daerah lainnya;
3. Pemerintah Desa;
4. Instansi vertical yang ada di Kecamatan;

Hubungan kerja Camat dengan Bupati sifatnya hierarkis, karena Camat bawahan dari Bupati. Di dalam pasal 66 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 1999 secara tegas disebutkan bahwa : “ Camat bertanggung jawab kepada Bupati

Hubungan Camat dengan Dinas Daerah atau Lembaga Teknis Daerah bersifat koordinatif dan teknis fungsional. Terlebih lagi apabila didalam organisasi Kecamatan terdapat seksi – seksi yang menjalankan fungsi dinas teknis dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hubungan Camat dengan Pemerintah Daerah bersifat koordinatif dan Fasilisatif, tidak lagi bersifat Hierarkis.Sedangkan Desa sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan mengatur dirinya sendiri (self governing society), secara organisator Desa dengan memiliki hubungan hierarkis dengan Kabupaten / Kota. Akan tetapi dilihat dari kepentingannya, terdapat hubungan yang bersifat hierarkis. Prinsip umum yang dipakai ialah bahwa kepentingan masyarakat yang lebih tunduk kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Unsur pimpinan Kecamatan (Uspika) Selat Gelam yang diketuai oleh Camat Selat Gelam telah dimanfaatkan sebaik – baiknya, terutama sekali dalam pengamanan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pertemuan–pertemuan Uspika dilaksanakan secara intensif bukan secara berkala atau isendentil dalam menangani permsalahan tertentu tetapi lebih dari itu forum –forum informal yang selalu dimanfaatkan untuk pertemuan Uspika ternyata sangat bermanfaat dan berdampak positif terhadap pengendalian wilayah serta penyelenggaraan Pemerintahan terutama Pemerintahan Umum.

Hubungan kerja Camat dengan Kadesbersifat hierarkis, sebab Kades adalah bawahan dari Camat, didalam pasal 67 ayat
(5) disebutkan bahwa " Kades bertanggung jawab kepada Camat ". Didalam hubungankewenangan antara Camat dengan Kades ada hal yang tidak lazim dilihat dari segi teoritis. Pada pasal 67 ayat (4) dikemukan bahwa :"Kades menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari adr Camat". Prinsip utama dalam pendelegasian kewenagan yang dapat didelegasikan adalah kewenangan yang bersifat atributif, sedangkan kewenangan yang bersifat delegatif tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain, karena akan mempersulit dalam hal pembiayaan dan pertanggungjawabannya.

Hubungan kerja Camat dengan instansi vertikal dan Dinas Daerah yang ada di Kecamatan tidak otomatis bersifat koordinatif, karena Camat bukan lagi sebagai kepala wilayah sehingga PP Nomor: 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi vertical didaerah tidak berlaku bagi Camat. Koordinasi dapat dilakukan oleh Camat apabila ada delgasi kewenangan dari Bupati, tetapi hanya untuk Dinas Daerah saja, sedangkan terhadap instasni vertical yang ada di Kecamatan seperti Koramil, PLKB, Polsek dan lain sebagainya sifat hubungan kerja biasa.

2. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Para Kades dan Kepala Desa secara berkala diwajibkan menyampaikan laporan Buku Harian setiap bulan kepada Bupati melalui Camat, Setelah diteliti dan dikoreksi jika dipandang perlu dengan petunjuk – petunjuk dan bimbingan seperlunya, selanjutnya buku harian dikembalikan kepada Kepala Desa / Kades untuk dijadikan pedoman pelaksanaan tugas, dalam keadaan mendesak dan penting para kepala Desa/Kades dipersilakan menyampaikan laporan isendentil baik dengan surat, lisan telepon atau komunikasi lainnya (Internet).

Rapat koordinasi rutin dengan para Kepala Desa/ Kades dilakukan setiap 1 kali minimal dalam sebulan untuk membicarakan hal – hal yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Renja Kecamatan Selat Gelam 2025 didasarkan pada ketentuanketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 107, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenTang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Karimun Nomor Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor : Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021- 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

- **Maksud**

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) KECAMATAN SELAT GELAM Tahun 2025 adalah dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Selat Gelam yang mendasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Karimun 2021 – 2026.

1. Menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit – unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Selat Gelam untuk secara konsekwen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders)* tentang rencana pembangunan tahunan.
5. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Selat Gelam dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

- **Tujuan**

  Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Selat Gelam Tahun 2025, untuk memberikan arah, pedoman dan rujukan (referansi) bagi aparatur Kantor Kecamatan dalam melaksanakan rencana kegiatan jangka menengah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi yang mendasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Karimun2021 - 2026.

  1. Memantapkan terselenggaranya kegiatan yang mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Selat Gelam dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran.
  2. pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026.
  3. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
  4. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
  5. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
  6. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
  7. Memudahkan para pemangku kepentingan *(stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
  8. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
  9. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan *(stakeholders).*

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Selat Gelam di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renja Kecamatan Selat Gelam dengan dokumen perencanaan lainnya, Kerangka penyempurnaanRenstra Kecamatan Selat Gelam serta Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN LALU

Bab ini berisi kajian (review) terhadap hasil evaluasi, analisa kerja Pelayanan SKPD, isu-isu penting dan Review terhadap Rancangan Awal Renja Kecamatan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tugas pokok dan Renstra Kecamatan.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan atau catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya dari seluruh bab yang dimuat didalam Renja Kecamatan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, yang mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu Penyusunan Renja Kecamatan udah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rancangan Awal Renja Kecamatan tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Awal Renja Kecamatan tahun lalu, dan Realisasi Renstra Kecamatan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan.

Tabel.
2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bedasarkan Laporan Hasil Kinerja Kecamatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Meningkatkanya Akuntabilitas Kinerja KECAMATAN SELAT GELAM	Indeks kepuasan Masyarakat	78 %	80 %
			Nilai AKIP KECAMATAN SELAT GELAM	70 %	72 %

Tabel Review Terhadap Renja Kecamatan Tahun lalu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023-2026 (Tahun rencana)				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2.153.739.918**	u	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**7.267.000**		
7.01.01.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yangdisusun	KECAMATA N SELAT GELAM	100 %	5.610.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan dan Dokumen yang disusun	KECAMATA N SELAT GELAM				
7.01.01.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi	KECAMATA N SELAT GELAM	100 %	1.657.000	APBD	RUTIN
	Penyusunan Perubahan Renstra OPD Tahun 2021-2026		KECAMATAN SELAT GELAM	100 %		APBD	RUTIN
	Penyusunan RB OPD		KECAMATAN SELAT GELAM	100 %		APBD	RUTIN

	Penyusunan RKA & DPA OPD TA 2025 serta RKAP & DPPA TA 2024		KECAMATAN SELAT GELAM	100 %		APBD	RUTIN
	Penyelenggaraan SPIP OPD		KECAMATAN SELAT GELAM	100 %		APBD	RUTIN
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.318.743.518**		

7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai di KECAMATAN SELAT GELAM	KECAMATAN SELAT GELAM	100 %	1.286.838.518.00	APBD	RUTIN
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		KECAMATAN SELAT GELAM	100 %	31.905.000	APBD	RUTIN
7.01.012.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**						
7.01.01.2.05	**Administsi Kepegawaian Perangkat Daerah**		KECAMATAN SELAT GELAM		**101.438.000**		
	Pengadaan Pakaian Dinas berserta atribut kelengkapannya		KECAMATAN SELAT GELAM		101.438.000		
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**89.491.400**		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalamSatu Tahun	KECAMATAN SELAT GELAM	100 %		APBD	RUTIN
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatandan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN SELAT GELAM	100 %	17.239.900	APBD	RUTIN
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatanrumah tangga	KECAMATAN SELAT GELAM	100 %	1.650.000	APBD	RUTIN

7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan LogistikKantor	KECAMATAN SELAT GELAM	100 %		APBD	RUTIN
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen/ Laporan Yang dicetak Jumlah Dokumen/Laporan yangdigandakan	KECAMATAN SELAT GELAM	100 %	18.890.500	APBD	RUTIN

7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		KECAMATAN SELAT GELAM	100 %		APBD	RUTIN
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		KECAMATAN SELAT GELAM	100 %		APBD	RUTIN
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		KECAMATAN SELAT GELAM	100 %		APBD	RUTIN
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		KECAMATAN SELAT GELAM	100 %	51.711.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**140.810.000**		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	KECAMATAN SELAT GELAM	100 %		APBD	RUTIN
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		KECAMATAN SELAT GELAM	100 %	50.810.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		KECAMATAN SELAT GELAM	100 %	40.000.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**595.800.000**		

7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik (WIFI)	Tersedianya jasa surat menyurat dalam satu Tahun	KECAMATAN SELAT GELAM	100 %	13.200.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor		KECAMATAN SELAT GELAM	100 %	582.600.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala	KECAMATAN SELAT GELAM	100 %		APBD	RUTIN
7.01.01.2.09.02	pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang terpelihara secara rutin/berkala	KECAMATAN SELAT GELAM	100 %		APBD	RUTIN

7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**408.962.000**		
7.01.02.2.04	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan						
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentasi Urusan yang dilimpahkan	KECAMATAN SELAT GELAM	100 %	408.962.000	APBD	RUTIN
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
				TOTAL	**2.562.701.918**		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

Pemerintah Kecamatan Selat Gelam merupakan Pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Administrasi Pemerintah, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban, Pelayanan Umum, dan Pemberi Pelayanan Administrasi ditingkat Kecamatan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Selat Gelam menuju pelaksanaan tata Pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pemerintahan, pembangunan dan masyarakat perlu adanya Standar Pelayanan Minimal.yang tak lain adalah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pelayanan ini menjadikan Sistem Pelayanan Kecamatan lebih efisien serta lebih baik dari yang kemarin, serta pelayan di sektor apapun sudah di lakukan secara satu pintu dan terkoneksi satu dengan yang lainnya.disamping itu untuk memudahkan pemberian data atau informasi kepada masyarakat bisa di akses di kantor Pelayanan Kecamatan dan nantinya akan di berdayakan system online dalam Percetakan KTP maupun KK sehingga bisa mempermudah untuk mengurus suatu hak kewajiban masyarakat melalui Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Tabel .2.2
Kinerja Pelayanan Masa Kini
Pada KECAMATAN SELAT GELAM

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Waktu Penyelesaian	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**Administrasi Kependudukan :**			
	• Kepengurusan e -KTP	Verifikasi administrasi KTP	1 Hari	
	• Kepengurusan KK	Verifikasi administrasi KK	1 Hari	
	• Kepengurusan Surat Keterangan Pindah WNI dan WNA	Terbitnya Surat Keterangan Pindah	1 Hari	
	• Kepengurusan Surat Keterangan Identitas Diri	Terbitnya Surat Keterangan Identitas Diri	1 Hari	
Perizinan				
• Pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal 1 Lantai		Terbitnya Surat Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal 1 Lantai	2 Hari	

• Pengurusan Surat Izin Rekomendasi Mendirikan Bangunan diatas 1 Lantai	Terbitnya Surat Izin Rekomendasi Mendirikan Bangunan diatas 1 Lantai	2 Hari	
• Pengurusan surat izin Rekomendasi Mendirikan Tower	Terbitnya surat izin Rekomendasi Mendirikan Tower	3 hari	
• Pengurusan surat izin usaha Mikro Kecil (UMK)	Terbitnya surat izin usaha Mkro Kecil (UMK)	1 Hari	
• Pengurusan Surat Izin Keramaian	Terselenggaranya keamanan dan ketertiban.	1 Hari	
Pertanahan			
• Kepengurusan Surat Sporadik	Sporadik di Kantor CAMAT SELAT GELAM	6 Hari	
• Kepengurusan Surat Keterangan Ahli waris	Terbitnya keterangan Ahli Waris	2 Hari	
• Kepengurusan surat Keterangan Hibah	Terbitnya keterangan Hibah	1 Hari	
• Kepengurusan Surat Keterangan Register tanah	Terbitnya Surat Keterangan Register tanah	1 hari	
Kesejahteraan Sosial			
• Pengurusan SKTM	Terbitnya SKTM bagi Masyarakat Kurang Mampu	1 hari	
• Pengurusan surat Keterangan Kematian	Terbitnya surat Keterangan Kamatian	1 hari	
• Pengurusan Surat Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah	Terbitnya Surat	1 hari	
• Rekomendasi Pendirian Sanggar seni dan Budaya	Rekomendasi Pendirian Sanggar seni dan Budaya	1 hari	

	• Pengurusan Surat Rekomendasi Pendiri POS PAUD dan PAUD	Terbitnya Surat Rekomendasi Pendiri POS PAUD dan PAUD	1 hari	
	• Pengurusan surat Rekomendasi Permohonan Bantuan Dana APBD (Kabupaten,Provinsi) dan APBN	Terbitnya surat Rekomendasi Permohonan Bantuan Dana APBD (Kabupaten,Provinsi) dan APBN	1 hari	

2.3 . Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Isu-isu penting adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010).

Adapun isu penting yang diperhatikan untuk Kecamatan Selat Gelam adalah:

❖ **Rumusan Permasalahan Strategis yang Dihadapi Masa Kini**

Berdasarkan analisa lingkungan yang berpengaruh terhadap pencapaian visi, misi, baik secara internal maupun eksternal, ada beberapa permasalahan strategis yang dihadapi masa kini, yaitu:

a. Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan;
b. Pedoman pengelolaan daerah yang berubah-ubah aturan;
c. SDM Aparatur yang ada tidak sesuai kebutuhan.
d. Kecendrungan penurunan moralitas dan rendahnya keteladanan pimpinan di semua lapisan.
e. Dampak krisis finansial global.
f. Menurunnya kwalitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akibat pemanasan global dan rendahnya pemeliharaan lingkungan.
g. Semakin tingginya ancaman penyakit.
h. Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan merata.
i. Tuntutan akan pendidikan yang berkualitas dan tejangkau di berbagai lapisan masyarakat.
j. Adanya tuntutan terhadap ketahanan pangan yang bermutu, sehat, merata dan terjangkau.
k. Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
l. Peningkatan pemerataan kondisi infrastruktur dan lingkungan bagi kehidupan masyarakat yang sehat dan nyaman.
m. Tingginya tuntutan profesionalisme kinerja aparat pemerintah dalam pelayanan mayarakat.

❖ **Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang Berpengaruh Pada Tupoksi Kecamatan**

Berdasarkan rumusan, permasalahan strategis yang dihadapi masa kini, diperlukan beberapa rumusan perubahan untuk mencapai tujuan pada lima tahun yang akan datang.

a. Tugas Pokok dan Fungsi kecamatan perlu penyesuaian karena merupakan SKPD

sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004;

b. Perlu adanya beberapa perubahan berkaitan dengan kewenangan;
c. Perlu pemahaman bersama kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan khususnya oleh SKPD terkait;
d. Penyesuaian anggaran berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baru

❖ **Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang Perlu Dilakukan.**

a. Menambah jumlah pegawai yang berkualitas sesuai keahliannya;
b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya;
c. Menambah jumlah anggaran sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
d. Meningkatkan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat;
e. Peraturan Perundangan yang mendukung visi dan misi tidak berubah-ubah;
f. Menjadikan Kecamatan sebagai SKPD murni

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan yaitu sebagai berikut :

1. Terbatasnya Kapasitas Pemerintah Daerah

Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah ditunjukkan dari kurangnya pemahaman dan keterampilan pegawai di bidang-bidang tugas yang membutuhkan keahlian khusus, diantaranya adalah operator komputer, arsiparis, dan administrasi kependudukan. Sementara mutasi antar SKPD juga menjadi salah satu penyebab, karena kaderisasi menjadi terbatas dilakukan bagi pegawai di lingkungan Kantor Kecamatan Selat Gelam. Selain itu terdapat pula keterbatasan anggaran bagi pengembangan sumber daya manusia pegawai.

Keterbatasan kualitas adalah satu sisi, sedangkan keterbatasan kuantitas ada di sisi lainnya. Kurangnya jumlah aparatur yang mempunyai keadilan dibidangnya ini terutama dirasakan pada staf kantor camat umumnya dan kantor Kecamatan Selat Gelam khususnya.

Minimnya penguasaan teknologi informasi juga menjadi satu keterbatasan mengingat penguasaan teknologi informasi menjadi prasyarat dasar bagi peningkatan pengetahuan dan efektivitas serta efisiensi kerja. Lemahnya penguasaan tentu diikuti dengan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan prinsip-prinsip serta teknologi e–Government di kalangan aparatur pemerintahan. Perkembangan yang cepat dari teknologi informasi dan komunikasi belum ditangkap sebagai peluang dan kekuatan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, khususnya guna mengatasi sulitnya komunikasi daerah kepulauan.

Selain kapasitas sumber daya manusia, terdapat pula masalah terkait kelembagaan. Salah satu masalah kelembagaan yang terekam adalah masih dirasa belum jelasnya ketentuan-ketentuan daerah yang mengatur pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat. Camat dan Kades bekerja melaksanakan tugas-tugas eksekutif, namun perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas-tugas itu dirasakan masih kurang, termasuk juga pelrindungan prosedural jika terdapat pemanggilan-pemanggilan Camat dan Kades dari instansi-instansi lain.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Perkantoran

Masih dijumpai permasalahan mengenai sarana dan prasarana yang belum optimal, Fasilitas teknologi informasi juga belum optimal tersediakan padahal manfaatnya besar untuk menunjang kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Sejalan dengan usia alat/barang, maka kualitasnya pun semakin menurun sehingga banyak dibutuhkan penggantian atau pemeliharaan.

Belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belum banyak kerjasama antar daerah yang dilaksanakan dalam penyediaan pelayanan publik dan menangkap dampak *multiplier* positif (*spill over*) terutama di daerah perbatasan antar daerah, termasuk dengan kabupaten-kabupaten perbatasan di bagian selatan dan barat.

3. Kawasan Rawan Bencana

Pengertian kawasan rawan bencana adalah daerah yang pernah mengalami bencana atau daerah yang mempunyai potensi terjadinya bencana. Daerah rawan bencana di Kabupaten Karimun dapat diidentifikasi salah satunya dari kondisi morfologi wilayah, sifat fisik tanah dan batuan serta keadaan curah hujan terutama bencana banjir, Banjir terjadi disebabkan karena faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami dapat diidentifikasi dari keadaan morfologi wilayah yang berupa dataran, kerapatan dan jenis penggunaan lahan, curah hujan yang tinggi sehinggaketikaterjadinya hujan aliran sungai atau debit sungai akan meningkat/meluap. Faktor manusia ikut berpengaruh terhadap terjadinya banjir karena adanya penggundulan hutan di daerah hulu, sehingga aliran permukaan langsung menjadi aliran sungai. Banjir erat kaitannya dengan drainase permukaan tanah. Drainase di sini adalah drainase yang menunjukkan lamanya atau seringnya tanah tergenang air. Dengan demikian drainase ini sangat dipengaruhi oleh sifat sifat fisik tanah lainnya seperti lereng, tekstur tanah, konsistensi/porositas tanah. Daerah banjir dapat terjadi di dataran aluvial bekas rawa, daerah tersebut merupakan tempat yang sering tergenang air. Tanggul sungai dan sempadan sungai yang sudah rusak dan tidak dapat berfungsi menahan luapan air, akan mempermudah aliran menyebar ke kiri kanan sungai.

Sebaran kawasan berpotensi banjir terdapat pada daerah yang mempunyai karakter pantai mangrove/rawa dan jenis tanahnya organosol/gambut. Kawasan tersebut di Pulau Karimun Besar yaitu di bagian Selatan Karimun dan Meral hampir tersebar di sepanjang pesisir pulau-pulau di Kabupaten Karimun.

Dalam Musrenbang yang diakan di Kecamatan Selat Gelam beberapa Tahun terakhir ini banyak usulan dari masyarakat yang menjadi perioritas mengenai infrastruktur yang tujuan untuk menghindari Bencana Banjir (gorong-gorong, saluran Drainase dan semenisasi) yang sering terjadi di Kecamatan Selat Gelam terutama daerah – daerah padat penduduknya, seperti di Desa Selat Mendaun, Desa Parit, dan Desa Tulang hal ini haknya dapat lebih diperioritaskan Karena Kecamatan Selat Gelam daerah untuk Karimun sebagai daerah Perdagangan sebagai Daerah Industri.

BAB III
TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Tinjauan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

3.1.1. Visi Pembangunan

Kerangka **Visi Indonesia 2025** sebagaimana terdapat dalam RPJMN 2025-2029 adalah "**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**" dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Misi dan Agenda Pembangunan

Misi 1: Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan:

Membangun infrastruktur yang terencana dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan konektivitas.

Misi 2: Peningkatan Kualitas SDM

Mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan untuk meningkatkan daya saing.

Misi 3: Penguatan Ekonomi Hijau

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan konservasi sumber daya alam.

Misi 4 : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif

Memperkuat reformasi birokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif

Misi 5 : Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, termasuk perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan

Sebagaimana amanat dari Undang - Undang Nomor : 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah bahwa (RPJM Daerah) sebagai penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang Penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, program - program pembangunan dan kegiatan pokok.

Salah satu yang termuat didalam RPJMD tersebut adalah program Satuan Kerja Perangka Daerah (Renstra-SKPD) yang dalam penyusunannya mengacu kepada visi, misi dan program Kepala daerah. Sebagai salah satu SKPD yang ada di Kabupaten Karimun maka Kecamatan Selat Gelam harus mempersiapkan Renja sebagai dokumen rencana Kerja Kecamatan 1 tahun akan datang.

Disini akan kami kemukakan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategi yang telah ditetapkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan di Kecamatan Selat Gelam

3.2.1. Visi KECAMATAN SELAT GELAM

- **"Terwujudnya** Kecamatan Selat Gelam **Sebagai Pusat Perkembangan Ekonomi Kerakyatan Serta Peningkatan Iman dan Taqwa"**

  Pernyataan Visi diatas dimaksudkan untuk menjadi Kecamatan Selat Gelam Sebagai Pusat Ekonomi kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan praturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, Akuntabel dan partisifatif untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Karimun Kerja Amanah, Kerja Keras dan Kerja Cerdas disamping itu Kecamatan Selat Gelam harus dapat menerapkan nilai-nilai Profesional yaitu :

  1. Disiplin dan Bermoral tinggi

     Disiplin adalah bentuk kepatuhan dan ketaantan terhadap setiap peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan selalu berjalan lancar (tepat waktu, pengambilan keputusan, atribut dan lain-lain)

     Moral secara umum diartikan sifat atapun akhlak ahli tetapi tidak bermoral, berbahaya mementingkan diri sendiri.

  2. Proaktif, Kreatif Dan Inovatif

     Proaktif dapat diartikan sikap tanggap, peduli dan cekatan

     Kreatif dapat di artikan kemampuan dalam menciptakan ide

     Inovatif keberadaan untuk melakukan perubahan atau pembaharuan

  3. Berjiwa Wirausaha (Entreupreunership)

     Sikap untuk mendayagunakan potensi kemampuan yang dimiliki untuk mencapai hasil kerja yang optimal dengan dilandasi prinsif efisiensi dan efektifitas dalam

bekerja seorang yang berjiwa wirausaha selalu memegang prinsif termurah dari segi biaya, tercepat dari segi waktu, termudah dari segi metode, terbaik dari segi mekanisme dan terarah dari segi hasil.

4. Berorientasi Pada Prestasi

   Prestasi akan lahir dari kerja keras yang tak kenal lelah. Seorang yang berorientasi pada prestasi (achievement oriented) dalam bekerja berupayadengan segala daya agar hasil yang diperoleh meningkat bahkan prestisius (tidak asal-asalan).

5. Haus Akan Ilmu Pengetahuan

   Orang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan selalu berusaha menjadi sosok yang generalis (serba bisa) selalu memacu ilmu pengetahuan, mengasah keterampilan dan memperkuat keimanan, sehingga diperoleh kemampuan untuk memecahkan dan menanggulangi persoalan, baik sekarang maupun masa mendatang.

6. Berorientasi Ke Masa Depan

   Orang yang berfikir masa depan tidak bekerja spekulatif, bekerja dengan perencanaan yang matang, selalu menciptakan ide, gagasan, pemikiran dan hasil kerja yang bersifat kondisional, tidak situasional atau kebutuhan sesaat. Tidak hanya berpacu dengan waktu di masa depan, tetapi juga berlomba dengan kiat dan semangat.

7. Berdedikasi Dan Penuh Tanggung Jawab.

   Dedikasi adalah pengabdian tugas kewajiban yang dibebankan dan ukuran bagi seseorang yang mengabdikan dirinya demi keberhasilan tugas atau pekerjaan. Bagi seorang pegawai yang berdedikasi tinggi, keterbatasan sarana atau fasilitas kerja tidak dinilai sebagai hambatan yang menyebakan proses kegiatan kerja menjadi terhambat. Justru di tengah-tengah keterbatsan itu ia secara kreatif mampu mendayagunakannya untuk mencapai prodiktivitas kerja yang setinggi - tingginya. Seseorang yang berdedikasi, selalu mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi. Penuh tanggung jawab adalah sikap berani mengambil resiko atas pekerjaan yang dilaksanakannya serta konsekwen dalam mempertanggungjawabkannya.

3.2.2. Misi KECAMATAN SELAT GELAM

Untuk mencapai Visi maka ada beberapa Misi yang harus dicapai dalam rangka terwujudnya Kecamatan Selat Gelam Sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi Kerakyatan serta Peningkatan Iman dan Taqwa yaitu :

1. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia Kecamatan Selat Gelam;
2. Membudayakan " Kerja Amanah, Kerja Keras, Kerja Cerdas sebagai Penggerak Pembangunan;
3. Mengutamakan nilai-nilai agama sebagai Sumber Pembangunan.

3.3 Program dan Kegiatan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan Untuk mencapai visi, melaksakan misi memecahkan persoalan dan menangani isu Strategis daerah yang dihadapati.

Adapun bentuk **Program dan Kegiatan** dari Kecamatan Selat Gelam untuk berjalannyamisi guna mewujudkan visi, adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan;**
2. **Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;**
3. **Meningkatkan Kehidupan Beragama dan pemahaman Agama di tengah masyarakat;**
4. **Meningkatkan Kualitas hidup warga miskin;**
5. **Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban umum.**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang difermentasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun **Sasaran** yang akan dicapai Kantor Camat Selat Gelam adalah :

Sasaran	:	**Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Publik**
Indikator	:	- Indeks Kepuasan Masyarakat
Sasaran	:	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja** Kecamatan Selat Gelam
Indikator	:	- Nilai AKIP Kecamatan Selat Gelam

3.3.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitif, rasional dan komperensif, Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan guna mewujudkan tercapaianya tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Selat Gelam. Adapaun strategi yang di tetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah

:

- Penyediaan fasilitas pelayanan perkantoran yang memadai dan kualitas;
- Menyempurnakan implentasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat;
- Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pengelola kegiatan agar capaian kinerja dapat ditingkatkan;
- Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kewilayahan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Karimun;
- Membangun iklim yang kondusif pada tataran pelaksanaan tugas bersama unit kerja lainya;
- Memperluas upaya cakupan pembinaan desa.

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi Program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Kantor Kecamatan Selat Gelam dalam rangka mendukung strategi tersebut maka kebijakan diarahkan pada:

- Peningkatan Kualitas pelayanan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM aparatur Kecamatan;
- Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan kewilayahan;
- Koordinasi dalam pelaksaan tugas dengan istansi terkait;
- Peningkatan ketersediaan data dan Informasi kewilayahan.

Tabel 3.1

Rencana Program dan Kegiatan KECAMATAN SELAT GELAM Tahun 2025

KECAMATAN
SELAT GELAM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023-2026 (Tahun rencana)				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.468.956.800**		
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**14.683.000**		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	KECAMATAN SELAT GELAM	100 %	10.000.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan dan Dokumen yang disusun	KECAMATAN SELAT GELAM	100 %	10.000.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi	KECAMATAN SELAT GELAM	100 %	5.000.000	APBD	RUTIN
	Penyusunan Perubahan Renstra OPD Tahun 2021-2026		KECAMATAN SELAT GELAM	100 %		APBD	RUTIN

	Penyusunan RB OPD		KECAMATA N SELAT GELAM	100 %		APBD	RUTIN
	Penyusunan RKA & DPA OPD TA 2025 serta RKAP & DPPA TA 2024		KECAMATA N SELAT GELAM	100 %		APBD	RUTIN
	Penyelenggaraan SPIP OPD		KECAMATA N SELAT GELAM	100 %		APBD	RUTIN
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.530.426.629**		

7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai di KECAMATAN SELAT GELAM	KECAMATAN SELAT GELAM	100 %	1.530.426.629	APBD	RUTIN
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		KECAMATAN SELAT GELAM	100 %	135.056.000	APBD	RUTIN
7.01.012.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**						
7.01.01.2.05	**Administsi Kepegawaian Perangkat Daerah**		KECAMATAN SELAT GELAM				
	Pengadaan Pakaian Dinas berserta atribut kelengkapannya		KECAMATAN SELAT GELAM				
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**236.919.500**		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam Satu Tahun	KECAMATAN SELAT GELAM	100 %	2.987.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN SELAT GELAM	100 %	56.521.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	KECAMATAN SELAT GELAM	100 %	2.326.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN SELAT GELAM	100 %		APBD	RUTIN

7.01.01.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen/ Laporan Yang dicetak Jumlah Dokumen/Laporan yang digandakan	KECAMATAN SELAT GELAM	100 %	22.723.500	APBD	RUTIN

7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		KECAMATAN SELAT GELAM			APBD	RUTIN
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		KECAMATAN SELAT GELAM			APBD	RUTIN
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		KECAMATAN SELAT GELAM			APBD	RUTIN
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		KECAMATAN SELAT GELAM	100 %	152.362.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0.000.000**		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	KECAMATAN SELAT GELAM			APBD	RUTIN
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		KECAMATAN SELAT GELAM			APBD	RUTIN
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		KECAMATAN SELAT GELAM	100 %	40.000.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**147.713.500**		

7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik (WIFI)	Tersedianya jasa surat menyurat dalam satu Tahun	KECAMATAN SELAT GELAM	100 %	26.463.500	APBD	RUTIN
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor		KECAMATAN SELAT GELAM	100 %	121.250.000	APBD	RUTIN
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala	KECAMATAN SELAT GELAM			APBD	RUTIN
7.01.01.2.09.02	pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang terpelihara secara rutin/berkala	KECAMATAN SELAT GELAM			APBD	RUTIN

7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**342.033.000**		
7.01.02.2.04	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan						
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentasi Urusan yang dilimpahkan	KECAMATAN SELAT GELAM	100 %	342.033.000	APBD	RUTIN
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
				TOTAL	**2.322.092.629**		

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Kerja Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana srategis Kecamatan Selat Gelam Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang berdasar dan orentasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 tahun.

Rencana Kerja ini mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplemntasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selat Gelam.

Rencana Kerja Kecamatan Selat Gelam Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan Kecamatan pada Pada Awal Triwulan tahun 2025. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapakan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungansrategis khususnya di Kecamatan Selat Gelam

Demikian pula dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Selat Gelam ini juga masih terdapat kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Selat Gelam tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Karimun.

Selat Gelam, 31 Januari 2025
CAMAT SELAT GELAM

INDRA, S.Sos, M.M.Pub
NIP. 197907172010011006

RENJA

RENCANA KERJA
TAHUN 2025

KECAMATAN SUGIE BESAR KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkah rahmat karunia-Nya Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah/OPD Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja (Renja)Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sugie Besar pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi perangkat daerah melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan. Dengan demikian, semoga dokumen Renja yang telah disusun ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai dilingkungan Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun, didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sugie , Maret 2025

CAMAT SUGIE BESAR

SAMAT, S.Sos. M.Si
NIP. 19710418 200801 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 2
1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan Sugie Besar 4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 11
2.4 Review Terhadap Rencangan Awal RKPD Tahun 2025 12

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 13
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 14

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana Kerja dan Pendanaan 16

BAB V PENUTUP 22

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar	1.1	Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya …….….....	1
Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenjaTahun Anggaran 2024 dan Perkiraan Capaian RenjaTahun Anggaran 2024 ……..	5
Tabel	2.2	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang direncanakan dan Faktor-faktor Penghambat……	9
Tabel	2.3	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang direncanakan dan Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan…….……....	9
Tabel	2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun	10
Tabel	2.5	Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi SelamaTahun 2024……	10
Tabel	2.6	Peluang dan Tantangan yang dihadapi Selama Tahun 2024…….....	11
Gambar	3.1	Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2025.....	13
Tabel	3.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025…	15
Tabel	3.3	Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sugie Besar Tahun Anggaran 2025	15
Tabel	4.1	Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 ……	17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun menyusun Renja untuk Tahun Anggaran 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sugie Besar. Renja Kecamatan Sugie Besar Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Sugie Besar Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1 Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

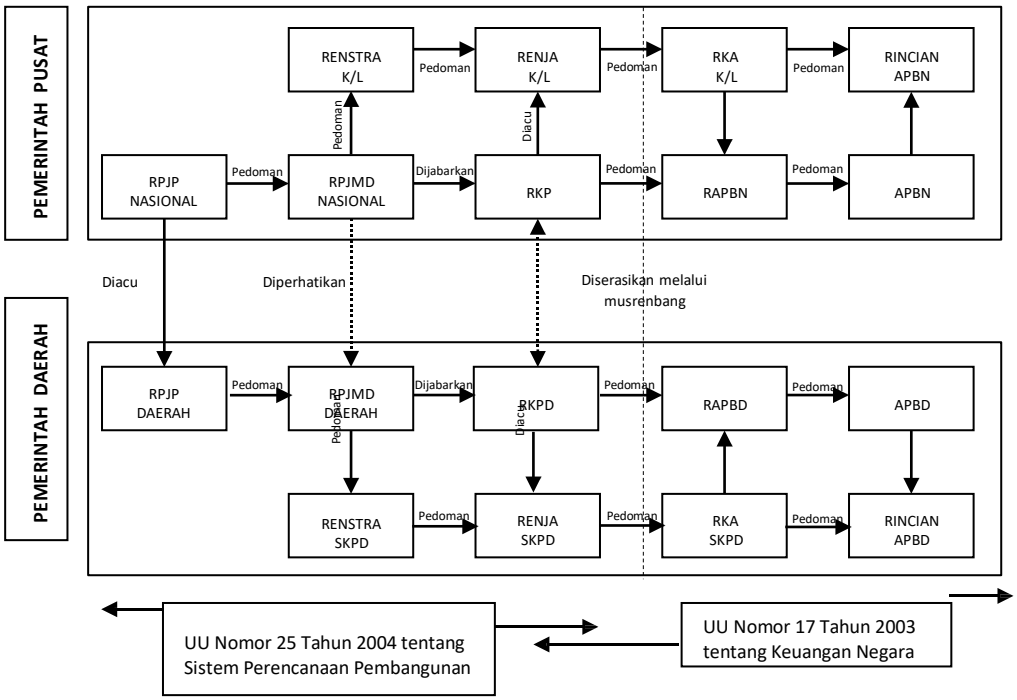

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Sugie Besar Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karimun sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karimun;
8. Peraturan Bupati Karimun Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se-Kabupaten Karimun;
9. Peraturan Bupati Karimun Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021- 2026;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Sugie Besar dalam penyusunan RKA Kecamatan Sugie Besar Tahun Anggaran 2025. Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun Anggaran 2025 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan

tahunan Kecamatan Sugie Besar Tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sugie Besar untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Sugie Besar Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

BAB IPENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2029 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Sugie Besar Tahun Anggaran 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Moro Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Sugie Besar Tahun Anggaran 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Sugie Besar Tahun 2024-2029 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2025.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Sugie Besar Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bedasarkan Laporan Hasil Kinerja Kecamatan

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.	- Prosentase Jumlah Penduduk yang telah memiliki e – KTP	Kecamatan Sugie Besar menargetkan 97 %
		- Rata – rata Waktu yang dibutuhkan dalam proses pelayanan	Kecamatan Sugie Besar menargetkan 1 Hari
		- Jumlah Organisasi Keagamaan yang Aktif.	Kecamatan Sugie Besar menargetkan 100 %
2.	Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat.	- Jumlah Kelurahan / Desa yang mendapatkan penghargaan mengenai Lingkungan Hidup	Kecamatan Sugie Besar menargetkan 3 buah
		- Jumlah Kelurahan / Desa yang mempunyai Tempat Pembuangan Sampah	Kecamatan Sugie Besar menargetkan 5 bh per Kel / Desa
		- Prosentase Rumah Tangga yang mempunyai bak sampah	
3.	Meningkatkan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama di Masyarakat.	- Jumlah Mesjid yang Hidup Sholat Limea Waktu Berjamaah.	Kecamatan Sugie Besar menargetkan 100 %
		- Prosentasi Santri TPQ yang Lulus Ujian (Munakosah)	Kecamatan Sugie Besar menargetkan 95 %
		- Jumlah Qori dan Qoriah yang Ikut Pembinaan.	
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga	- Jumlah Mubaligh (imam) yang Aktif mengisi Pengajian.	Kecamatan Sugie Besar menargetkan 98 %
		- ProsentaseKepala Keluarga yang memiliki Rumah Sendiri.	Kecamatan Sugie Besar menargetkan 90%
		- Prosentase Kepala Keluarga yang memiliki Rumah Layak Huni	Kecamatan Sugie Besar menargetkan 90%
		- Prosentase Jumlah Penduduk Miskin .	Kecamatan Sugie Besar menargetkan 20 %
5.	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.	- Jumlah Pengaduan Masyarakat tentang gangguan Sosial.	Kecamatan Sugie Besar menargetkan 75 %
		- Jumlah Kasus Pencurian tanpa kekerasan.	Kecamatan Sugie Besar menargetkan 2 %
		- Jumlah Pengaduan tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Kecamatan Sugie Besar menargetkan 0 kasus / tidak ada masalah
		-	Kecamatan Sugie Besar menargetkan 2 kasus / tidak ada masalah

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Refocusing anggaran
	Kegiatan Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Refocusing anggaran

1. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan yangMemenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perencanaan dan pengelolaan target kinerja secara lebih tepat
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Fungsimonevterhadapproses perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik
3	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Optimalisasi kinerja SDM serta dukungan dari Dinas Dukcapil Kabupaten Karimun
4	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa dan Muspika
5	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakat Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, PKH dan institusi lainnya
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Dukungan yang optimal dari Pelaku Ekonomi Lokal

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 makakebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun Anggaran 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi koordinasi dan upaya pengurangan kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.Sehubungan dengan hal tersebut,analisis kinerja Kecamatan Sugie Besar dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Moro Kabupaten Karimun

No	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Realisasi Capaian Kinerja	Target Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Tahun 2023	Target Kinerja	Catatan Analisis
		Tahun 2022			Tahun 2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	78.5	78	79	
2	Nilai AKIP	50	51	51	52	

Tabel. 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Capaian Kegiatan	Besaran Volume	Kebutuhan Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
	Lori Sampah	Kecamatan Moro		1 Unit		Musrenbang
	Pavin Blok	Kecamatan Moro		30 m x 20 m		Musrenbang
	Tempat Parkir	Kecamatan Moro		12 Km x 4 m		Musrenbang
	Pembangunan Pintu Air Dam Kelurahan Moro Timur	Kelurahan Moro Timur		350 m^2		Musrenbang
	Rehab dan Pembangunan Jalan Kantor Camat Moro	Kelurahan Moro Timur		967 m		Musrenbang
	Perbaikan dan semenisasi Jalan	Kelurahan Moro		250 m^2		Musrenbang
	Pembuatan Parit dan gorong-gorong	Kelurahan Moro		Panjang = 200 cm Lebar Atas=150 cm Lebar Bawah= 100 cm Panjang = 8 M Lebar Atas = 3 M L Bawah = 2 M		Musrenbang
	Perbaikan dan semenisasi Jalan	Desa Jang		3 m x 200 m		Musrenbang
	Pembangunan Septi tank	Desa Jang		2 m x 3 m		Musrenbang
	Rehab Pelabuhan	Desa Pauh		4 m x 476 m		Musrenbang
	Bus Anak Sekolah	Desa Pauh		1 Unit		Musrenbang
	Simenisasi Jalan Lingkar	Desa Pulau Moro		280 X 3 M^2 Batas Tinggi Air 1,8 M		Musrenbang
	Tembok Penahan Tanah Lapangan Bola	Desa Pulau Moro				Musrenbang

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati/Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, Kecamatan Moro merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Fungsi Lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun Anggaran 2024, Kecamatan Moro menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi SelamaTahun 2023

Permasalahan	Hambatan
Terbatasnya SDM/jumlah	Tidak ada penambahan ASN
Monitoring ke Desa masih insidentil	Kesibukan di masing-masing Kepala Seksidengan tupoksi
Kesiapan Data Musrenbang harus menunggu input sepakat	Tidak semua perangkat kecamatan menguasai aplikasi

Selain itu, selama Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Moro juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Peluang	Tantangan
Potensi Moro sebagai wilayah pariwisata pantai dan keagamaan	Akses transportasi dan dana belum maksimal
Obyek wisata di setiap desa cukup banyak	Belum semua potensi wisata di setiap desa terpublikasikan
Jenis kuliner di Kecamatan Moro cukup banyak	Publikasi masih terbatas dan perlu intervensi bagi pelaku kuliner dan bersifat individualis

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2023, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Moro pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perlu penambahan personil/SDM untuk menguatkan kinerja yang maksimal
2. Adanya monitoring yang terjadwal secara rutin
3. Persiapan Musrenbang Kecamatan harus didukung data yang final dan akurat dari Desa

Sedangkan isu-isu penting lainnya yang adadi Kecamatan Moro adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kesejahteraan Masyarakat
   Kecamatan Moro menduduki ranking 8 tingkat kemiskinan diwilayah Pemerintah Kabupaten Karimun. Selama ini banyak intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta yang telah diterima oleh masyarakat tetapi pada kenyataannya belum bisa mengurangi/menurunkan besaran angka kemiskinan di Kecamatan Moro. Mindset masyarakat sangatlah mendominasi sehingga perlu diberikan pemahaman dengan mengubah pola fikir masyarakat. Selain itu mengoptimalkan partisipasi masyarakat maupun pelaku usaha untuk menyumbangkan sebagian keuntungannya CSR yang merupakan kewajiban perusahaan swasta. Hal ini merupakan peluang bagi kecamatan agar mereka ikut berperan dalam Pronangkis.

2. Bidang Pemerintahan
   Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menuntut aparat kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar Desa lebih optimal melaksanakan amanat Undang-Undang tentang Desa tersebut.

3. Bidang Pelayanan
   Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima menjadikan Kecamatan Moro untuk selalu berinovasi agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan.

4. Bidang Pertanian
   Alih fungsi lahan merupakan masalah yang mulai mencuat di wilayah Kecamatan Moro, para pengembang mulai melirik tanah pertanian untuk dijadikan perumahan.

2.4 REVIEW TERHADAP RENCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten KarimunTahun Anggaran 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten KarimunTahun Anggaran 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Moro Tahun 2024, sehubungan dengan Review terhadap Rancangan-rancangan program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan tahun awal, tentunya banyak terdapat keterbatasan dan kekuranganya, namun demikian hal tersebut yang menjadi salah satu pertimbangan-pertimbangan khusus yang kedepan dijadikan sebagai pijakan dan koreksi untuk mencapai dan mewujudkan Visi dan Misi yang telah di rencanakan sehingga kedepan akan lebih baik darisebelumnya.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Moro pada tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Karimun dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja oleh Pemerintahan Kecamatan dan Jajarannya, melalui manajemen yang berbasis Profesional dan Melayani;
3. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
4. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
5. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, Unit Pelayanan Teknis dan organisasi Pemerintahan lainnya yang menjadi unsur Pimpinan Daerah yang ada di Kecamatan.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten, yang dilandasi dan didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Moro maka kelima hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2024

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP 1: Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru dan terbarukan.
	PP 2 : Peningkatan kuantitas ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
	PP 3 : Peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan.
	PP 4 : Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan.
	PP 5 : Penguatan kewirausahaan Usaha Makro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi.
	PP 6 : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor rill dan industrialisasi.
	PP 7 : Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri
PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PP 1: Pembangunan wilayah Sumatra.
	PP 2 : Pembangunan wilayah Jawa Bali
	PP 3 : PembangunanwilayahNusa Tenggara
	PP 4 : Pembangunan wilayah Kalimantan
	PP 5 : Pembangunan wilayah Sulawesi
	PP 6 : Pembangunan wilayah Maluku
	PP 7 : Pembangunan wilayah Papua
PN 3 : Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	PP 1: Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
	PP 2 : Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
	PP 3 : Peningkatanakses dan mutu pelayanan kesehatan
	PP 4 : Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
	PP 5 : Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
	PP 6 : Pengentasan kemiskinan
	PP 7 : Peningkatan produktivitas dan daya saing

PN4 :	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP 1:	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter
		PP 2 :	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Moro
		PP 3 :	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial
		PP 4 :	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
PN 5 :	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP 1:	Infrastruktur pelayanan dasar
		PP 2 :	Infrastruktur ekonomi
		PP 3:	Infrastruktur perkotaan
		PP 4 :	Energi dan ketenagalistrikan
		PP 5 :	Transformasi digital
PN 6 :	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP 1:	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
		PP 2 :	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
		PP 3 :	Pembangunan Rendah Karbon
PN 7 :	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PP 1:	Konsolidasi Demokrasi
		PP 2 :	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
		PP 3 :	Penegakan Hukum Nasional
		PP 4 :	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
		PP 5 :	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2024, Tema Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2024 adalah ”Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.
2. Pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis.
4. Pemantapan *smartservices*

Sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 yang berhubungan langsung Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024

No	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Target Tahun 2024
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (Good Government)		Indeks Tata Kelola Pemerintahan	79
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,51

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Moro serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Moro Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Moro Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Moro
Tahun Anggaran 2024

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya kualitaspelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,51
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Moro		Nilai AKIP	52
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	3,51
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Moro Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Moro Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2024

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Moro

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegi				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**5,999.164.288**					**5,999.164.288**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5,599.164.288**					**5,499.164.288**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**38.,328,000**					**38.,328,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen		Kab. Karimun, Kec. Moro		2 Dokumen		22.576.000	Dana Insentif Daerah			2 Dokumen	22.576.000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi danPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen		Kab. Karimun, Kec. Moro		3 Dokumen		10.052.000	Dana Insentif Daerah			3 Dokumen	10.052.000
7	01	01	2.01	06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen		Kab. Karimun, Kec. Moro		3 Dokumen		5.700.000	Dana Insentif Daerah			3 Dokumen	5.700.0
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3.519.542.022**					**3.519.542.022**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Pegawai		Kab. Karimun, Kec. Moro		14 Bulan		3.393.110.022	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14 Bulan	3.393.110.022

7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Pegawai		Kab. Karimun, Kec. Moro		12 Bulan		126.432.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Bulan	126.432.000

7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**233.070.700**						**233.070.700**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Jenis Komponen Instalasi		Kab. Karimun, Kec. Moro		8 Jenis		1.487.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8 Jenis		1.487.000
7	01	01	2.06	02	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan		Kab. Karimun, Kec. Moro		30 Jenis		119.473.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD			30 Jenis		119.473.000
7	01	01	2.06	03	Penyedian Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Ruma Tangga		Kab. Karimun, Kec. Moro		25 Jenis		20.462.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD			25 Jenis		20.462.700
7	01	01	2.06	05	Penyedian Barang Cetakan dan Pengadaan		Jumlah Laporan		Kab. Karimun, Kec. Moro		8 Exsamplar		770.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD			8 Exsamplar		770.000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komnsultasi SKPD		Jumlah Rapat dan SKPD		Kab. Karimun, Kec. Moro		12 Buah		90.878.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD			12 Buah		90.878.000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**861.990.738**						**861.990.738**
7	01	01	2.08	02	Penyedian Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik		Jumlah Tagihan		Kab. Karimun, Kec. Moro		36 Bukti		48.790.738	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36 Bukti		48.790.738
7	01	01	2.08	04	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Non ASN yang dibayar		Kab. Karimun, Kec. Moro		13 Bulan		813.200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13 Bulan		813.200,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**67.654.000**						**67.654.000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		Jumlah Liter		Kab. Karimun, Kec. Moro		Liter		65.624.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Liter		65.624.000

7	01	01	2.09	01	Pemeliharaan Peralatan Mesin		Jumlah Unit		Kab. Karimun, Kec. Moro		Unit		2.030.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Unit	2.030.000

7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**872.013.828**						**872.013.828**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**872.013.828**						**872.013.828**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilipahkan Kepada camat		Jumlah Urusan Pemerintah		Kab. Karimun, Kec. Moro		11 jenis Urusan		872.013.828	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11 Jenis Urusan		872.013.828

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Karimun dan berpedoman pada Peraturan Bupati Karimun Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016-2022 serta mengacu pada Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten KarimunTahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

CAMAT MORO

ANDRI WINARTA, S.I.P,. M.A.P
NIP. 19880619 200701 1 003

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Karimun

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARIMUN
TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kerja OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun Tahun 2025 dapat tersusun.

Melalui Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun Tahun 2025 agar dapat menentukan capaian-capaian yang diinginkan dalam menentukan visi, misi, tujuan, sasaran dan program organisasi selama kurun waktu satu tahun dan diharapkan dapat menyelaraskan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi guna mencapai hasil-hasil yang akan dicapai secara efektif dan efisien.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, serta mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun membuat Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang akan menuntun seluruh pegawai pada capaian yang diinginkan. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun Tahun 2025 belum sempurna, oleh karena itu mohon kiranya saran dan masukan guna perbaikan penyusunan Rencana Kerja untuk di tahun yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi segenap pihak untuk terselenggaranya perbaikan kinerja manajemen (Performance Planning) pemerintahan.

Tanjung Balai Karimun, Maret 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARIMUN

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs.ZIFRIDIN, M.Si
Pembinan Utama Muda
NIP. 196809011988101001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 2

Daftar Isi 3

BAB I PENDAHULUAN..... 4

1.1 Latar Belakang 6

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan tujuan 10

1.3.1 Maksud 10

1.3.2 Tujuan 10

1.4 Sistematika Penulisan 12

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 14

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD 14

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 23

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 35

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 38

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 39

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN OPD..... 41

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 43

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) OPD 44

3.2.1 Tujuan 44

3.2.2 Sasaran 44

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024 46

3.3.1 Program Kerja Tahun 2024 46

3.3.2 Kegiatan Prioritas Tahun 2024 47

BAB IV PENUTUP 65

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Karimun adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun merupakan dokumen Rencana Kerja yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun sesuai dengan tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk tahun rencana yang dimaksud. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun juga merupakan sebuah dokumen resmi daerah yang di persyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Proses peyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi diformulasikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan yang memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan Renja OPD juga diitegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan pasal 2 (dua) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang,keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Rancangan RKPD dan Renja OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Karimun.

Prinsip-prinsip didalam penyusunan Revisi Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun mengacu pada rancangan awal RKPD.
2. Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyususnan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD
3. Substansi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimunmemuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan OPD terhadap Renstra OPD; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Rumusan program dan kegiatan didalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun didasarakan pada urutan urusan–urusan wajib pelayanan wajib dan ataupun pilihan pemerintah daerah yang memerlukan perioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah.
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran biaya, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana.

Keterkaitan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun dengan dokumen RKPD dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimunmerupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun merupakan penjabaran dengan dokumen daerah yang ada diatasnya seperti RPJM.

Dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renstra OPD yang dilanjutkan dengan Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan straegis jangka panjang menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan

kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafond Anggaran Sementara dan APBD.

Bagan alur penyusunan Renja OPD adalah sebagai berikut:

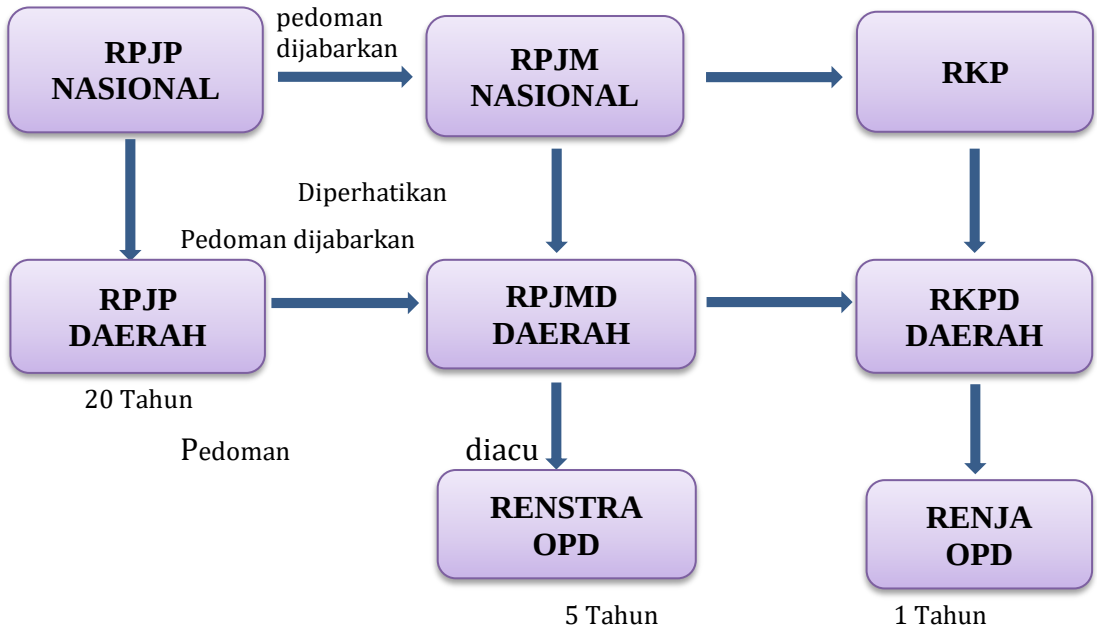

Berdasarkan bagan alur diatas Dokumen RKPD memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun dan menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun Tahu 2025 dengan RKPD Kabupaten Karimun adalah tertera dalam BAB III Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam tabel matrik rencana program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun yang memuat perkiraan maju rencana tahun 2025 yang terdiri dari target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif.

I.2 Landasan Hukum

Sejalan dengan Reformasi disegala bidang yang telah membuahkan dasar–dasar perubahan dibidang manajemen pemerintahan, hal tersebut antara lain dilandasi oleh :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia npmor 5587) sebagimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi Laporan Penyelenggaraan

9. Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

10. Peraturan Pemerintahn Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lebaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintahn Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengedalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lebaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangann Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan antar Peraturan Presiden 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangakat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
16. dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Karimun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7); Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 36).

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana tercantum pada pasal 7 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi OPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, yang setiap tahunnya sebagai pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja (RENJA) OPD.

I.3.I Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun adalah sebagai acuan dalam mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan antar lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi maupun Kabupaten/ Kotaserta bidang-bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimunsehingga dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya yang tersedia.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimunsebagai wujud dukungan kinerja untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun agar dalam pelaksanaannya dapat lebih terarah dan terukur. Rencana Kerja (RENJA) ini juga merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode satu (1) tahun yang diambil dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun.

I.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimunadalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu

Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Angaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun.

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 dengan arah dan acuan sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
2. Menyusun Penilaian Kinerja tahunan (LAKIN)
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efesien, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun.

Dalam Pelaksanaan tugas sehari-hari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun,**mempunyai tugas :**

"Membantu Pemerintah Daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah."

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2) Penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3) Pengkoordinasian dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4) Pengkoordinasian dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
5) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
6) Pemberian fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang kesatuan bangsa dan politik;

7) Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
8) Penyusunan Program kerja dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menunjang Visi dan Misi Bupati;
9) Pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi program kerja dan anggaran badan kesatuan bangsa dan politik;
10) Penyusunan laporan pertanggung jawaban Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik;
11) Pelaksanaan pembinaan staf;
12) Pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
13) Pelaksanaan tugas lain dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan arahan Bupati.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Badan Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN OPD
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) OPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra OPD

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun. Evaluasi terhadap RENJA OPD akan memberikan penilaian atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan suatu bentuk perwujudan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan dengan mengukur realisasi capaian-capaian target perencanaan yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis. Oleh karena itu Rencana Kinerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimunini juga dievaluasi berdasarkan realisasi capaian-capaian target program/kegiatan dari tahun 2024 dan perkiraaan realisasi capaian target program/kegiatan sampai dengan tahun 2024. Evaluasi terhadap Rencana Kinerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal yaitu;

1. kebijakan perencanaan program/kegiatan,
2. pelaksanaan rencana program/kegiatan dan
3. hasil rencana program/kegiatan.

2.1.1. Program dan Kegiatan

Secara keseluruhan Rencana Kerja Tahun 2024 Tingkat Target **Pencapaian Program dan Kegiatan Mayoritas Mencapai 94,73% dari 6 (enam) Program, 12 (dua Belas) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan, untuk Realisasi Fisik Mencapai 99,83% dan Realisasi Keuangan mencapai 94,86%**. Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, meliputi Kegiatan ;
   A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
      I. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      II. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
      I. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
      II. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
      I. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
      II. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
   D. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
      I. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
      II. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      III. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      IV. Penyediaan Bahn Logistik Kantor
      V. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      VI. Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
   E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
      I. Pengadaan Mebel
      II. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      III. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
      IV. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;

I. Penyediaan Surat Menyurat

II. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

III. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

I. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

II. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

A. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

I. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

II. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaa

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik, Etika Politik melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

A. Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembangan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik , Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik

I. Pelaksanaan diBidang Politik, Etika Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembangan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik , Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

II. Pelaksananaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi , Fasilitasi Kelembangaan

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
   A. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
      I. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
      II. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah.
5. Program Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
   A. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
      I. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah
      II. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pengayat Kepercayaan
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik
   A. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
      I. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan, Fasilitasi Kelembagaan serta Penanganan Konflik di Daerah.
      II. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelporan di Bidang Kewaspadaan Dini , Kerja sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Fasilitasi Kelembagaan bidang Penanganan Konflik di Daerah
      III. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota

2.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 Evaluasi Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun tahun 2024.

Evaluasi Rencana Kinerja (Renja) dan capaian Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimunsampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dari berbagai indikator yang di rekap melalui table 2.1.1 berikut:

2.1.2. Tabel Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	FISIK (%)	KINERJA KEUANGAN		
				ANGGARAN	REALISASI	KEU (%)
1	2	3	4	5	6	7
	UNSUR URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**99,83%**	**40.746.290.759,02**	**38.651.238.946,00**	**94,86%**
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		**99,83%**	**40.746.290.759,02**	**38.651.238.946,00**	**94,86%**
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		98,67%	4.824.325.152,00	4.129.885.613,00	**85,61%**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43 Dokumen	100,00%	223.053.500,00	61.381.800,00	27,52%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen - Renja	100,00%	50.479.000,00	28.782.000,00	57,02%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	40 RKA-SKPD	100,00 %	34.896.000,00	8.579.000,00	25,10%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	100,00%	66.555.000,00	10.864.500,00	16,32%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	100,00%	71.123.500,00	12.976.300,00	18,24%
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	24 Dokumen	99,59%	3.950.809.762,00	3.570.378.432,00	90,37%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(25 orang x 14 Bulan)	100,00%	3.749.838.262,02	3.476.538.132,00	92,71%

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	90,00%	160.200.000,00	62.030.000,00	38,72%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	5 Laporan	100,00%	40.771.500,00	31.810.300,00	78,02%
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	2 Dokumen	-	-	-	-
	Pengadaaan Pakaian dan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	-	-	-	-
4	**Administrasi Umum Perangakat Daerah**	6 Dokumen	88,61%	171.430.890,00	122.613.800,00	71,52%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7 Paket	100,00%	5.026.000,00	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19 Paket	100,00%	61.099.000,00	57.305.000,00	93,79%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17 Paket	100,00%	9.528.990,00	1.500.000,00	15,74%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Paket	100,00%	30.128.900,00	20.128.600,00	66,81%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21 Dokumen	66,67%	18.250.000,00	12.040.000,00	65,97%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	71,64%	47.398.000,00	31.640.200,00	66,75%
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	2 Dokumen	82%	160.570.000,00	96.150.000,00	59,88%
	Pengadaan Mebel	3 unit	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	100%	131.956.000,00	67.750.000,00	51,34%
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	3 unit	-	-	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	100%	28.641.000,00	28.400.000,00	100%
6	**Penyediaa Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		100,00%	279.500.000,00	268.375.581,00	**96,02%**
	Penyedian Jasa Surat Menyurat	2560 surat	100,00%	4.005.000,00	2.024.000,00	50,54%

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	100,00%	18.295.000,00	16.541.581,00	90,42%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13 Laporan	100,00%	257.200.000,00	249.810.000,00	97,13%
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	5 Laporan	100,00%	38.961.000,00	10.986.000,00	**28,20%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	100,00%	30.441.000,00	5.250.000,00	17,25%
	Pemeliharaan Peralatan dam Mesin Lainnya	4 Unit	100,00%	8.520.000,00	5.736.000,00	67,32%
B	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		**100%**	**2.088.443.100,00**	**1.574.453.050,00**	**75,39%**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**17 D okumen**	**100%**	**2.088.443.100,00**	**1.574.453.050,00**	**75,39%**
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Instansi Vertikal	100,00%	600.000.000,00	414.600.000,00	69,10%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	413 Orang	100,00%	268.082.000,00	201.471.000,00	75.15%
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6 Laporan	100,00%	120.275.000,00	81.223.250,00	67.53%
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		100,00%	499.414.900,00	48.7803.000,00	97,67%
	Pembentukan Paskibraka		100,00%	341.931.200,00	187.940.800,00	54,96%
	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka		100,00%	258.740.000,00	201.415.000,00	77,84%

C	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**		**100,00%**	**33.549.397.055,00**	**32.746.367.783,00**	**97,61%**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	**20 Dokumen**	**100,00%**	**33.549.397.055,00**	**32.746.367.783,00**	**97,61%**
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	9 Parpol	100,00%	32.533.492.055,00	32.227.016.933,00	99,06%
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	60 Peserta	15,00%	819.558.500,00	437.084.350,00	53,33%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9 Lapoaran	80,00%	196.346.500,00	82.266.500,00	41,90%
D	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**		**100,00%**	**10.100.000,00**	**3.400.000,00**	**33,66%**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**30 Dokumen**	**100.00%**	**10.100.000,00**	**3.400.000,00**	**33,66%**
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	17 Ormas	-	-	-	-

	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	23 Laporan	100,00%	10.100.000,00	3.400.000,00	33,66%
E	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**		**75,08%**	**27.048.852,00**	**18.956.300 ,00**	**70.08%**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Dokumen**	**75,08%**	**27.048.852,00**	**18.956.300,00**	**70.08%**
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	252 orang	75,08%	27.048.852,00	18.956.300,00	70.08%
F	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**		**100,00%**	**246.976.000,00**	**178.176.200,00**	**72.14%**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**13 Dokumen**	**100,00%**	**246.976.000,00**	**178.176.200,00**	**72.14%**
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	25 Orang x 2 Kali Pertemuan	100,00%	220.984.600,00	171.240.200,00	77,49%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	7 Laporan	100,00%	25.992.000,00	6.936.000,00	26,69%

Pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun Masih terdapat Kekurangan dan belum maksimalnya proses Pelaksanaan Kegiatan namun untuk Program dan Kegiatan untuk Tahun 2024 hasil dari evaluasi secara keselurahun kegiatan yang terlaksana baik walaupun ada kegiatan yang tidak bisa terlaksana karna efesiensi Anggaran dan Dana Hibah yang nominalnya cukup Besar tidak teralisasi sehingga mempengaruhi Persentase Fisil dan Realisasi Keuangan secara Keseluruhan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimunadalah perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimunmenyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun selama tahun 2024. Pengukuran Kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Indikator kinerja

   Penetapan Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan Indikator Kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing masing jenis indikator

b. Capaian Analisis Kinerja

   Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memnafaatkan data kinerja

   Capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Karimun sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Capaian 2O24
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemahaman Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Persentase Pertemuan silaturahmi dan interaksi dialog dikalangan pelajar, generasi muda dan semua elemen masyarakat	88,50%
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, Pileg dan Pilkada	1. Persentase partisipasi Masyarakat dalam pemilu, pileg dan pilkada	75,77 %
3.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pelayanan Organisasi Kemasyarakatan serta akuratnya data ormas yang berdomisili di Kabupaten Karimun	1. Persentase terdatanya Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dan berdayaguna di Kabupaten Karimun	73,79%
4.	Meningkatnya sinergitas dan Kewaspadaan Dini Masyarakat terhadap Konflik Sosial berbasis ekonomi, agama, sosial dan budaya	1. Persentase Pencegahan Dini Potensi konflik ekonomi, agama, sosial dan budaya	100%

Berikut adalah uraian dalam pencapaian Sasaran Strategi adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pemahaman Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Tabel 2.2.7
Realisasi Capaian Persentase suku, etnis dan Tokoh Agama yang aktif

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Pencapaian %
1	Persentase suku dan etnis yang aktif di Kabupaten Karimun	100%	100%	100%
2	Persentase Tokoh Agama yang aktif	100%	100%	100%

a. Persentase suku dan etnis yang aktif di Kabupaten Karimun

Persentase suku dan etnis yang aktif di Kabupaten Karimun merupakan salah satu Indikator capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun, pada tahun 2024 indikator ini ditetapkan target sebesar 80 % dengan perbandingan jumlah suku dan etnis yang aktif dengan jumlah suku dan etnis yang tergabung dalam forum. dari 23 jumlah suku dan etnis yang terdaftar di Kabupaten Karimun tergolong aktif seluruhnya, ini berarti realisasi telah mencapai 100% dari target kinerja yang diinginkan sehingga persentase capaian juga sebesar 100%. Hal ini dinilai dari tingkat kehadiran FPK dalam memenuhi undangan rapat, dan tingkat kepedulian FPK dalam mennyelesaikan berbagai konflik. dan melalui Forum Pembauran Kebangsaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang merupakan Forum Pembauran Kebangsaan(FPK) adalah wadah informasi , komunikasi, konsultasi dan kerja sama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dibentuk dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di daerah, penyelenggaraan pembauran

kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi social dalam bidng bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis, masing-masing dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a. Pelaksanaan Paskibraka

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Perpres No. 51/2022 telah mengamanatkan kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai Koordinator Penyelenggaraan program Paskibraka secara Nasional. Program Paskibraka merupakan program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila yang dilaksanakan melalui pembinaan Kepemimpinan, keterampilan, dan kedisiplinan yang menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air , persatuan dan kesatuan dan peningkatan wawasan kebangsaan kepada putra putri terbaik bangsa yang dilaksanakan pada Peringatan hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia pada setiap tanggal 17 Agustus tiap tahunnya. Paskibraka adalah pasukan pengibar bendera yang dilaksanakan oleh generasi muda yakni siswa-siswi yang ada di Sekolah Menengah Atas, kegiatan tersebut meliputi berbagai jenis kegiatan antara lain Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera (paskibraka), Peraturan baris berbaris (PBB), Tata Upacara Bendera (TUB) serta Latihan Kepemimpinan Siswa Tingkat Perintis dan Pemula. Pelaksanaan Paskibraka ini didasari atas Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten/ Kota dan Provinsi Tahun 2024 serta berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024.

Sasaran 2 : Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Tabel 2.2.5

Realisasi Capaian Persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Pencapaian
1	**Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu**	**75,77%**	**74,41%**	**98,49%**
2.	**Persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada**	**75,77%**	**55,90%**	**70.50%**

Pada tahun 2024 sebagaimana kita ketahui, telah dilaksanakan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak seluruh Indonesia dan khususnya diwilayah Provinsi Kepri dan Kabupaten Karimun. Pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun, selayaknya atensi masyarakat tinggi, namun yang terjadi adalah kebalikannya. Masih banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilih mereka. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak **191.416 orang, namun yang warga yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 140.195 orang**. Jadi untuk indikator persentase partisipasi politik masyarakat yang diukur dengan membandingkan jumlah masyarakat yang memilih dan jumlah daftar pemilih, realisasi hanya mencapai 74.41% dari target yang ditetapkan sebesar 75,77 % yang diasumsikan 180.208 orang. sehingga persentase capaian indikator ini hanya sebesar 87 %. Hal ini sangat disayangkan, karena tujuan dari Pilkada ini adalah untuk mencari dan menentukan pemimpin Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Karimun dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam menentukan suara pada umumnya dan Partai Politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran.

Salah satu proses demokrasi yang membutuhkan partisipasi masyarakat adalah pemilihan umum, ini sangat menitik beratkan peran seluruh masyarakat agar

partisipasi politik sempurna, dalam artian kesempurnaan partisipasi politik baru dapat terlihat ketika menghadirkan rakyat untuk memberikan pilihan seluruh rakyat sebagai bagian demokrasi harus sedapat mungkin memberikan pilihan tanpa adanya hambatan dalam aspek apapun. Agar dapat mendukung proses politik yang tepat diperlukan proses pendidikan politik, sebagai proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi – orientasi politik pada individu.

Seiring dengan proses demokrasi yang terus berlangsung, Indonesia turut menunjukkan kemampuan dalam proses demokrasi, seluruh pemilihan umum yang dilaksanakan melalui serangkaian sistem pemerintahan dan politik, secara langsung meminta partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, beberapa hambatan tetap terjadi yang merupakan penghalang dalam proses partisipasi politik.

Tabel 2.2.6
REKAPITULASI JUMLAH DPT DAN JUMLAH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH SETIAP KECAMATAN TINGKAT KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

No	Kecamatan	Jumlah	
		Daftar pemilih	Yang menggunakan hak pilih
1	2	3	4
1.	Belat	5.038	3.723
2.	Buru	7.766	6.121
3.	Durai	4.795	3.621
4.	Karimun	34.553	23.291
5.	Kundur	23.333	16.342
6.	Kundur Utara	9.648	6.872
7.	Kundur Barat	13.996	10.656
8.	Meral	36.515	25.982
9.	Meral Barat	11.475	9.174
10.	Moro	8.141	6.144
11.	Tebing	22.645	17.525
12.	Ungar	4.475	3.302
13.	Selat Gelam	3.111	2.631
14.	Sugie Besar	5.925	4.811
	JUMLAH	**191.416**	**140.195**

Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Masih kurangnya upaya sosialisasi pelaksanaan Pemilu dari pihak penyelenggara pemilu maupun dari pemerintah daerah kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara pencoblosan pada hari pemungutan suara;
2. Masih rendahnya tingkat pemahaman di masyarakat bahwa memilih bukan merupakan suatu hak, sehingga hak tersebut bisa digunakan atau tidak digunakan, karena tidak ada konsekwensi hukum dan moral politik bagi mereka yang tidak memilih;
3. Masyarakat terjebak pada rutinitas ekonomi yang berakibat pada membuat pilihan politik bukan merupakan suatu hal yang prioritas sehingga sedikit banyak hal ini mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap politik;
4. Selain itu faktor lain yang turut memberi andil dalam rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat adalah persepsi seseorang terhadap obyek yakni figur, program dan kepentingan, jika obyek tersebut dipersepsikan secara negatif maka secara otomatis masyarakat pemilih tidak akan menggunakan hak politiknya namun jika persepsi seorang figur dan juga program itu positif, pasti orang pasti akan memilih figur tersebut;
5. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dipengaruhi juga oleh besamya jumlah pemilih yang terdaftar dan tidak menggunakan hak pilihnya atau lebih umum dikenal dengan istilah golput;
6. Masih rendahnya tingkat kesadaran/wawasan politik masyarakat, dimana partisipasi politik merupakan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta ambil bagian dalam sikap pertanggungjawaban bersama baik dalam situasi politik yang melibatkan dukungan; dan
7. Selain itu masih kurangnya sosialisasi pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh mesin politik (partai politik) juga turut mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat.

Selain dari beberapa hal diatas yang penyebabkan rendahnya partisifasi masyarakat adalah terbatasnya pilihan pasangan calon dari yang diajukan

partai politik, mayoritas daerah Pilkada yang hanya diikuti oleh 2-3 pasangan calon tidak secara maksimal mengakomodasi aspirasi pemilih. Arah partai politik mendukung pasangan calon yang populer dan bermodal besar akhirnya berujung pada jumlah pasangan calon yang terbatas sehingga mengurangi jumlah perbincangan antara kandidat dan masyarakat, perbedaan antara janji kampanye dengan realitas politik.

Mayoritas materi kampanye pasangan calon adalah pemberantasan korupsi, pengelolaan pemerintahan transparan dan pengalokasian anggaran memihak rakyat. Akan tetapi, janji kampanye ini tidak sebangun dengan apa yang terjadi di tingkat nasional. Praktik-praktik korupsi yang terjadi terus-menerus sepanjang tahun memberikan keraguan kepada masyarakat terjadinya pemerintahan yang benar-benar bersih. turunnya aktifitas sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh penyelenggara Pilkada. Jumlah kegiatan sosialisasi tatap muka oleh penyelenggara Pilkada berkurang. Aktifitas sosialisasi dari KPU yang berkurang berdampak kepada turunnya jumlah aktor, tokoh dan pegiat pendidikan pemilih di masyarakat sehingga ajakan untuk datang ke TPS menggunakan hak suaranya menjadi berkurang.

Selanjutnya, ada beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat, antara lain:

1. Melakukan pendekatan yang lebih itensif lagi kepada masyarakat baik oleh pemerintah, instansi penyelenggara pemilu, maupun pasangan calon;
2. Meningkatkan fungsi sosialisasi mengenai pemilihan umum dan pentingnya menggunakan hak pilih;
3. Meningkatkan fungsi koordinasi dan konsolidasi kepada Kepala Desa, Lurah dan perangkat desa dibawahnya yang pada dasarnya lebih memahami karakteristik warganya agar mereka dapat memberikan penyuluhan mengenai pemilihan umum.

Sasaran 3 : Meningkatnya pemberdayaan dan Pelayanan organisasi Kemasyarakatan

Tabel 2.2.2
Realisasi Capaian Persentase Ormas yang aktif

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Pencapaian %
1	Jumlah Ormas yang telah di verifikasi	23 Ormas	15 Ormas	65,22%
2	Persentase Ormas yang aktif	85%	100 %	100 %

Indikator Persentase Ormas yang aktif diukur dengan perbandingan jumlah Ormas yang aktif dengan jumlah seluruh Ormas yang berada di Kabupaten Karimun. Tahun 2024 indikator ini telah ditetapkan target sebesar 85% dari total seluruh ormas yang berjumlah 165 Organisasi, atau diasumsikan sebanyak 98 Ormas yang aktif. Berdasarkan data organisasi kemasyarakatan yang aktif masa berlakunya jumlah ormas yang tidak aktif sebanyak 67 ormas atau realisasi mencapai 100% sehingga persentase capaian untuk indikator ini 100%.

Tabel 2.2.3
DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERDAFTAR DAN AKTIF MASA BERLAKU SURAT KETERANGAN ADMINISTRASI WILAYAH KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARIMUN PADA TAHUN 2024*

NO	ORGANISASI KEMASYARAKATAN	AKTIF	TIDAK AKTIF	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT	4	21	24
2.	ORGANISASI KEPEMUDAAN	8	8	13
3.	ORGANISASI PROFESI	12	15	22
4.	PERKUMPULAN	56	11	35
5.	YAYASAN	18	12	14
	JUMLAH	**98**	**67**	**165**

Data sampai bulan Desember 2024

Terjadinya peningkatan Pendaftran Ormas di Tahun 2024 , ini sebagai bentuk kepedulian Masyarakat terhadap kepentingan kesejahteraan dan kesetaraan hidup untuk seluruh Masyarakat . diharapkan pencapaian ini dapat menjadi penunjang untuk lebih melaksanakan kerja sama yang baik bagi setiap stakeholder . Agar ormas tetap bisa melaksanakan setiap program kegiatan yang telah direncanakan di harapkan melakukan sebagai berikut:

- Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang telah habis masa berlaku Surat Keterangan Administrasi Wilayah Kerja (SKAWK) -nya, diharapkan dapat memperpanjang maupun mendaftarkan ulang kembali organisasinya. Sehingga fungsi pembinaan yang diberikan oleh pemerintah daerah belum bisa maksimal;
- Pembinaan terhadap keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Karimun harus bersifat menyeluruh, yaitu pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) belum turut serta dilakukan oleh badan/dinas/kantor/instansi lain. Karena sebenarnya tugas pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah tugas bersama, terutama untuk membantu mengarahkan program dan kegiatan organisasi;
- Memaksimalnya penerapan database pendataan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sehingga mengalami kesulitan dalam penyeragaman data organisasi;
- OPD akan tetap melaksankan fungsi monitoring terhadap keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Karimun, terutama saat organisasi tesebut melaksanakan kegiatan;
- Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang sudah terdaftar agar lebih aktif dalam melaksanakan program/kegiatannya dan tidak selalu berorientasi dengan keuntungan semata, padahal sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bersifat nirlaba atau nonprofit;
- Sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang ada, agar meningkatkan Kemampuan dalam menjalankan fungsinya secara maksimal. Dimana Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dapat mengakomodir semua tuntutan dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat, sebagai akibat dari masih lemahnya fungsi pengorganisasian dan pendayagunaan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi;

- Organisasi diharapkan mandiri dalam pendanaan kegiatannya, sehingga tidak hanya mengandalkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah, sementara itu, bantuan dari pemerintah daerah sifatnya hanya insidentil dan sebagai dana pendamping kegiatan saja, yang pemberiannya disesuaikan dengan kas daerah;
- Wilayah sebaran organisasi dapat di pulau karimun dan sekitarnya , sehingga partisipasi dan kepedulian dari masyarakat terhadap jalannya pembangunan dan panyerapan aspirasi dari masyarakat lebih merata.

Selanjutnya Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun berupaya untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut dengan melakukan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan terhadap keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang telah dilakukan mulai Tahun 2006, diantaranya Sosialisasi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Pertemuan Bulanan Ormas & LSM, Pelatihan Pengelolaan Manajemen Lembaga Swadaya Masyaralat (LSM), dan Organisasi Kekaryaan Pemuda (OKP) serta Pemutakhiran Data Lembaga Swadaya Masyaralat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kekaryaan Pemuda (OKP) di Kabupaten Karimun. Selain itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga melakukan pembinaan yang bersifat langsung kepada Lembaga Swadaya Masyaralat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kekaryaan Pemuda (OKP) yang bersangkutan dengan melakukan pengujian dokumen kelengkapan dengan data, informasi, dan fakta lapangan dalam penelitian lapangan yang akan dipergunakan sebagai bahan rekomendasi dalam penerbitan Surat Keterangan Administrasi Wilayah Kerja (SKAWK) oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 2.2.4

DATA PERKEMBANGAN JUMLAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TERDAFTAR PADA BAKESBANGPOL KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2020 – 2024*

NO	TAHUN	ORGANISASI KEMASYARAKATAN						JUMLAH
		LSM	ORMAS	OKP	ORG. PROFESI	YAYA SAN	PERKUM PULAN	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**9**	**10**
1.	2020	23	40	10	18	4	13	**108**
2.	2021	23	40	10	20	7	17	**117**
3.	2021	23	40	10	20	7	17	**117**
4.	2023	24	39	13	22	14	35	147
5.	2024	4	0	8	12	18	56	98

*Data sampai bulan Desember 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) terdaftar di Kabupaten Karimun, cenderung bertambah dan meningkat setiap tahunnya, dengan bidang/program kerja dan jenis kegiatan yang beragam. Namun, sebagian dari organisasi tersebut telah habis masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar-nya, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah pemutihan dan pendataan ulang menyikapi semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui wadah Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS).

Sasaran 4 : Meningkatnya sinergitas dan Kewaspadaan Dini Masyarakat terhadap Konflik Sosial berbasis ekonomi, agama, sosial dan budaya
Persentase Kerukunan Umat beragama

Dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Karimun, Tokoh Agama di Kabupaten Karimun berperan penting dalam membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan umat. Persentase Tokoh Agama yang aktif untuk Indikator ini dapat diukur dengan perbandingan jumlah tokoh agama yang aktif dengan jumlah tokoh agama yang ada diKabupaten Karimun. Pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%, Jumlah Tokoh

Agama di Kabupaten Karimun 42 Tokoh agama dan semuanya dinyatakan aktif ini telah berarti realisasi capaian target telah mencapai 100%. Tokoh Agama di Kabupaten Karimun berperan penting dalam membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan umat dan semua steak holder sangat berperan aktif, berpartisipasi dalam mendukung kegiatan pemerintahan, salah satu Forum yang dibentuk oleh masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan umat adalah Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Karimun (FKUB).

Kerukunan hidup beragama merupakan salah satu pilar utama dalam memelihara persatuan bangsa dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kerukunan hidup beragama adalah kondisi bagi semua golongan agama bisa hidup bersama-sama secara damai tanpa mengurangi hak dan kebebasan masingmasing untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya. Kerukunan akan bisa dicapai apabila setiap golongan agama memiliki prinsip setuju dalam perbedaan. Setuju dalam perbedaan berarti setiap individu maupun kelompok mau menerima dan menghormati individu ataupun kelompok lainnya dengan seluruh aspirasi, keyakinan, kebiasaan dan pola hidupnya, menerima dan menghormati orang lain dengan kebebasan untuk menganut keyakinan agamanya sendiri.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang multikultural dan menjungjung tinggi pluralisme, kaya akan perbedaan yang bermacam-macam yang terdiri dari suku, ras, bahasa, agama dan budaya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralis yang tercermin dalam dasar ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila, sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila tersebut memerintahkan kepada kita segenap bangsa Indonesia untuk memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan utama menjalani kehidupan. Hal inilah yang mencerminkan bahwa bangsa Indonesia bukan negara agama maupun negara sekuler namun bangsa yang mengakui keberadaan agama.

2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3.1. Permasalahan dan hambatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Karimun tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, pernasalahan antara lain:

- Masih kurangnya rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat
- Belum optimalnya pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga masih ada pergesekan/ konflik antar suku dan agama di masyarakat.
- Fasilitasi bagi parpol, LSM, Ormas dan Nirlaba yang merupakan bagian dari infrastruktur Politik masih minim, yang mengakibatkan proses pendewasaan politik masyarakat relatif lambat.
- Wilayah Kabupaten Karimun terdiri dari masyarakat yang heterogen, baik agama, pekerjaan maupun tingkat pendidikan ditambah situasi sosial dan politik yang terjadi sehingga masih ada gangguan kemanan, kenyamanan, ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Karimun.

i. Tantangan Pelayanan

Selain aspek permasalah tersebut diatas terdapat berbagai aspek tantangan yang dihadapi dalam mengokohkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa yang akan memperkuat ketahanan nasional antara lain adalah:

a. Tantangan ideologi yakni kurangnya penghayatan dan pengalaman ideologi Pancasila mengakibatkan terjadi kerisis moral bangsa yang berkepanjangan sehingga terjadi pola piker, pola sikap dan tindak warga Negara yang menyimpang dari ideologi Pancasila sebagai dasar Negara, falsafah dan pandangan hidup bangsa serta pemersatu bangsa. Serta pemersatu bangsa. Kondisi yang demikian akan terjadi kerawanan social yang mengarah kepada disintegrasi bangsa;

b. Tantangan politik seperti perseteruan antar elite politik yang berkepanjangan, mengakibatkan terjadinya krisis kebijakan politik dalam kebijakan nasional karena tidak adanya etika, budaya dan komunikasi politik serta kompromi politik dalam menentukan kebijakan politik

nasional, sehingga berpengaruh terhadap kebijakan dibidang ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan. Kondisi yang demikian akan terjadi kerawanan sosial mengedepankan kepentingan politik, pribadi atau golongan, bukan untuk kepentingan Bangsa dan negara. Apabila kondisi tersebut berkepanjangan mengakibatkan perpecahan dalam persatuan dan kesatuan bangsa;

c. Tantangan Ekonomi yakni terpuruknya perekonomian di Indonesia akibat kerisis kebijakan politik yang tidak jelas dan perseteruan elte politik yang berkepanjangan. Hal ini mengakibatkan krisis ekonomi yang menyengsarakan rakyat banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi yang demikian akan terjadi kerawanan sosial karena banyaknya pengangguran, lapangan kerja sangat terbatas khususnya kegiatan padat karya yang belum memungkinkan karena tidak ada dana, sehingga mendorong terjadinya kerawanan gangguan keamanan yang semakin tinggi;
d. Tantangan Sosial dan Budaya yakni konflik antar suku bangsa dan etnis yang memiliki ciri budaya masing-masing, dan selanjutnya berkembang menjadi permusuhan antar agama yang terjadi didaerah rawan konflik dewasa ini mengakibatkan timbulnya kerisis sosial budaya. Kondisi yang demikian akan mendorong kerawanan sosial dan selanjutnya terus terjadi gejolak sosial yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;
e. Tantangan Hukum yakni kurangnya rasa aman yang dirasakan masyarakat, karena belum tertatanya perangkat kewenangan antar pihak kemanan dan aparat terkait, sehingga mengakibatkan masih terjadi tumpang tindih dalam mengambil keputusan dalam pengamanan. Kondisi yang demikian apabila berkelanjutan akan menyebabkan terjadinya kelambatan dalam penanganan kerusuhan khususnya didaerah rawan konflik;
f. Tantangan krisis moral bangsa, bahwa kondisi saat ini adalah perseteruan antar elite politik, sehingga terjadi krisis multidimensi yang sudah diambang membahayakan keselamatan bangsa, kondisi tersebut karena rasa kebangsaan masyarakat mulai luntur yang ditandai dengan mementingkan kepentingan pribadi dan golongan diatas kepentingan

bangsa dan negara, sehingga membawa dampak yang negatif penyimpangan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Kondisi yang demikian perlu diwaspadai karena merupakan permasalahan yang mendasar pada kondisi saat ini, sehingga perlu segera dikembangkan peningkatan kualitas warga negara untuk kembali kepada jati diri bangsa yang memiliki semangat kebangsaan, rasa cinta tanah air melalui pemantapan kesatuan bangsa yang tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang memiliki nilai kejuangan, nilai-nilai pancasila dan wawaasan kebangsaan;

g. Tantangan Demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup akibat globalisasi telah merambah dalam berbagai forum internasional yang banyak dipengaruhi oleh pandangan Barat untuk memaksakan kehendaknya, sedangkan hak asasi manusia adalah hak individu secara mutlak dan universal. Hal tersebut terlihat dari:
   - Munculnya berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
   - Tuntutan perkembangan kualitas produksi yang berwawasan global;
   - Tekanan daan tuntutan negara-negara maju terhadap Negara-negara berkembang.

h. Tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi komunikasi dan transportasi, menyebabkan isu-isu global tersebut menjadi semakin cepat menyebar dan menerpa pada berbagai tatanan, baik tatanan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Dengan kata lain globalisasi yang ditunjang dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan tekhnologi telah mejadikan dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas-batas Negara;

i. Kegiatan yang tumpang tindih dengan instansi lain serta terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Karimun menyediakan anggaran dalam mendukung program-program yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun merupakan suatu tantangan dimasa mendatang untuk mencapai tujuan sasaran yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun tetap konsisten menganalisa secara objektif terhadap fenomena-fenomena yang terjadi ditengah masyarakat

yang berhubungan keterbelakangan bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

2.3.3 Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun meliputi:

1. Adanya kebijakan otonomi yang seluas luasnya yang diterapkan sehingga makin leluasa untuk meningkatkan pembangunan daerah.
2. Adanya dukungan dari lembaga masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ormas dan LSM baik itu bersifat kritik, masukan bahkan pengawasan untuk kemajuan pelaksanaan kegiatan.
3. Kondisi stabilitas keamanan yang kondusif di Kabupaten Karimun sehingga membantu percepatan pembangunan serta dapat menarik minat investor untuk menanamkan modal.
4. Sudah terbinanya kerjasama yang baik dengan aparat keamanan (Intelijen Daerah) dalam memantu pelaksanaan tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun.

2.3.4 Isu-isu penting

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya seringkali menghadapi beberapa isu dan permasalahan yang mengurangi optimalisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Isu penting tersebut yakni salah satunya dalam mencapai prioritas presiden yang tertuang dalam 9 agenda prioritas (nawacita). Dalam agenda prioritas nawacita tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun terdapat 4 prioritas yang harus dipenuhi yakni:

1. Prioritas 1, Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara.
2. Prioritas 2, membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, **demokratis** dan terpecaya.
3. Priortitas 3, Melakukan revolusi karakter bangsa.
4. Prioritas 4, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasisosial

Dalam menghadapi isu tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun memperhatikan:

1. Dalam meningkatkan wawasan kebangsaan, perlu ditingkatkan pemahaman masyarakat tentang kehidupan bernegara serta dapat mendukung rasa cinta tanah air. Masyarakat yang sadar akan wawasan kebangsaan akan peduli terhadap negara sehingga turut andil dalam pemilihan Kepala Daerah.
2. Dalam pelaksanaannya masyarakat harus dibekali tentang arti makna dan kegiatan politik sehingga berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlu dilakukan tindakan untuk mencegah agar tidak terjadi gejolak dimasyarakat. Kegiatan pencegahan dapat dilakukan yakni dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat maupun partai politik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan Daerah Nasional maupun Global. Perbandingan dilakukan berorientasi padahasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluangdan kendala yang timbul agar capaian kinerja sampai dengan 5 (lima) tahun dapat tercapai.

Perbandingan antara rancanagan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan program realitas dengan mengantisipasi perkembangan / dinamika masa depan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan usulan dari

kegiatan Musrenbang yang terkait dengan usulan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Karimun ke dalam rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Karimun.

Dari hasil Forum OPD dilakukan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format Rencana Kinerja RKPD bagi setiap OPD. Dalam keadaan terdapat usulan masyarakat yang mendesak dan belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap OPD yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD. Sehingga rancangan RKPD merupakan integrasi dan harmonisasi antara rancangan awal RKPD dengan rancangan RENJA OPD yang telah mendapatkan konfirmasi dan review dari setiap OPD.

Musrenbang tahunan atau Musrenbang RKPD dan Forum OPD berfungsi menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat, serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan Rencana Kinerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke tiga (2021-2026) disusun sebagai penjabaran dari Visi Misi dan Agenda prioritas Presiden/wakil Presiden.

Adapun Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam 9 (Sembilan) agenda pembangunan yang disebut NAWACITA yang di jabarkan adalah sebagai berikut:

1. Meghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemeritahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dan pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehinggan bangsa Indonesia bias maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat retorasi sosial Indonesia.

Sejalan dengan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam NAWACITA tersebut, Stabilitas Politik dan Keamanan merupakan tantangan utama dalam pembangunan. Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinekaan indonesia, agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan menguatkan indonesia dalam mencapai visi pembangunan nasional. Tantangan lainnya adalah meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya terorisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan meningkatkan kesiapsiagaan baik diantara lembaga pemerintahan maupun di tingkat masyarakat.

Terkait dengan Tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun telah menetapkan beberapa program prioritas untuk tahun 2024 agar bersinergi dengan Program Pembangunan Nasional tersebut.

Adapun Program Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
3. Program Optimlisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
4. Program Penghayan dan Pengamalan Pancasila;
5. Program Peningkatan Layanan Izin Penelitian Bagi Masyarakat;
6. Program Fasilatasi Ketahanan Idiologi Negara;
7. Program Pelaksaan Bela Negara;
8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
9. Program Pembinaan Pembauran Kebangsaan;
10. Program Pendidikan Politik bagi Masyarakat;
11. Program Budaya dan Etika Politik;
12. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan;
13. Program Fasilitasi Ketahanna Ekonomi, Sosial dan Budaya;
14. Program Penghayatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan, Keagamaan dan Kepercayaan;
15. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;

16. Program Pemeliharaan Kamtranstibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Sehubungan dengan baru dibentuknya Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Karimun menjadi OPD yang berdiri sendiri,maka rumusan tujuan dan sasaran yang terdapat pada Revisi Renstra tahun 2021-2026 juga terjadi perubahan. Perubahan tersebut mempengaruhi rumusan tujuan dan sasaran Rencana Kinerja (Renja) Badan Kesatuan dan politik Kabupaten Karimun Tahun 2024.

Berikut merupakan rumusan tujuan dan sasaran Rencana Kinerja (Renja) atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Karimun:

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif tetapi harud dapat menunjuknan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk mewujudakan Visi misi Kabupaten Karimun, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketahanan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya

   Dimaksudkan dengan berbagai aspek yaitu:

   - Aspek Ketahanan Idiologi adalah kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan dan keteguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman,hambatan dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar;
   - Aspek Ketahanan Politik adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum, mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat, Kepemimpinan nasional yang mengakomodasi aspirasi hidup dalam masyarakat;
   - Aspek Ketahanan Ekonomi adalah segala sesuatu yang yang berkaitan dengan upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya;

- Aspek Ketahanan Sosial Budaya adalah Aspek yang tercermin dalam kehidupan sosial budaya masyarakat yang mampu membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dalam masyarakat yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Ormas dan Partai Politik
   Dimaksudkan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan pemahaman lembaga atau organisasi (Parpol) dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan.
3. Membangun generasi muda yang bermoral dan berketeladanan
   Dimaksudkan Perlunya kesepahaman bagi pemuda dalam melaksanakan agenda pembangunan yang mana energi pemuda yang bersatu cukup untuk mendorong terwujudnya perubahan, sesuai karakter pemuda yang memiliki kekuatan (fisik), kecerdasan (fikir) dan ketinggian moral, serta kecepatan belajar atas berbagai peristiwa yang dapat mendukung akselerasi perubahan.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat
   Dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi umat beragama untuk melaksanakan ajaran agama dan mendorong meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan beragama.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan tujuan diatasBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun menetapkan sasarannya sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepedulian Dan Peran Aktif Masyarakat dan Pemerintah dengan Semangat Kebersamaan;
2. Menigkatnya Peran
3. Lembaga-lembaga Sosial, Keagamaan dalam Pembangunan;
4. Meningkatnya Demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat;

5. Meningkatnya Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
6. MeningkatnyaSumber Daya Politik;
7. Terciptanya lingkungan yang berketaladanan;
8. Meningkatnya toleransi umat antar umat beragama;
9. Terciptanya kerukunan antar elemen masyarakat.

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Stretegis Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun
				2024
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	1. Indek Proposional ASN 2. Nilai Akip	**75,30%** **68,70%**
2	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Pemahaman Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemahaman Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**88,50%**
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, Pileg dan Pilkada	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, Pileg dan Pilkada	**75,77%**
3	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Meningkatnya Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dan berdayaguna di Kabupaten Karimun	Persentase Terdatanya Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif dan berdayaguna di Kabupaten Karimun	**73,79 %**
		Meningkatnya Penangganan antisipasi Konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya	Persentase Penangganan Antisipasi Konflik berbasis Ekonmi Sosial dan Budaya	**100 %**
5	Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Sinergitas Kewaspadaan Dini Masyarakat terhadap Konflik Sosial	Persentase Pencegahan Dini Potensi Konflik	**100%**

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun menetapkan Program dan kegiatan sebagai berikut:

3.3.1 Program Kerja Tahun 2026

Program–program yang dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun Tahun 2026 merupakan program yang terkait dengan sasaran dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra)2021-2026. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan program–program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun akan melaksanakan 6 (enam) Program 12 (dua belas) Kegiatan dan 42 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan.

Adapun program-program yang telah ditetapkan untuk Rencana Kerja tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik

i. Kegiatan tahun 2024

Berdasarkan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Budaya dan Etika Politik;

kegiatan-kegiatan berdasarkan skala prioritas sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ;
4. Administrasi Umum Perangakat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaa Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
9. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokras, Fasilitasi kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi Politik di Daerah
10. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
11. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
12. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik SosialLebih rinci, rumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun dijabarkan melalui target dan capaian tahun 2026-2027 pada tabel berikut:

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2026 DAN PERKIRAAN MAJU 2027

Nama OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARIMUN

TUJUAN	SASARAN	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Rencana Tahun 2027	
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan			Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10
		8					UNSUR URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
		8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			8.485.948.607,00			8.809.761.037,35
										8.485.948.607,00			8.809.761.037
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik								Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,80 %	-		75,80 %	

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja bakesbangpol							Nilai akip bakesbangpol	69,40%			69,40%	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	**8**	**01**	**01**			**8607**	**Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**	75,80%	**4.182.784.039**	**PAD**	80,00%	**4.391.923.241**
		8	**01**	**01**	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**7 Dokumen**	**218.000.000**		**7 Dokumen**	**228.900.000**
		8	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen - Renja - Renja RB	65.000.000		2 Dokumen - Renja - Renja RB	68.250.000
		8	01	01	201	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	40.000.000		1 Dokumen	42.000.000

		8	01	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	70.000.000		3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	73.500.000
		8	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	43.000.000		1 Laporan	45.150.000
		8	**01**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**8 Dokumen**	**3.136.982.116**	**PAD DAN DAU**	**8 Dokumen**	**3.293.831.222**
		8	01	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504 orang bulan (36 orang x 14 bulan)	3.101.982.116		504 orang bulan (24 orang x 14 bulan)	3.101.982.116
		8	01	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	1 Dokumen	12.000.000		1 Dokumen	12.600.000

								Tugas ASN					
		8	01	01	202	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	23.000.000		6 Laporan	24.150.000
		8	**01**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**2 Dokumen**	**180.500.000**		**2 Dokumen**	**180.500.000**
		8	01	01	205	0002	Pengadaaan Pakaian dan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	155.500.000		2 Paket	163.275.000

		8	01	01	205	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	25.000.000		4 Orang	26.250.000
		8	**01**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangakat Daerah**		**8 Dokumen**	**308.801.923**		**8 Dokumen**	**324.242.019**
		8	01	01	206	00001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.500.000		1 Paket	16.275.000
		8	01	01	206	00002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	42.801.923		1 Paket	44.942.019

		8	01	01	206	00003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	15.500.000		1 Paket	16.275.000
		8	01	01	206	00004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	17.500.000		3 Paket	18.375.000
		8	01	01	206	00005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	26.500.000		5 Paket	27.825.000
		8	01	01	206	00006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	26.000.000		1 Dokumen	27.300.000
		8	01	01	206	00009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	120.000.000		1 Laporan	126.000.000

		8	01	01	206	00111	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	45.000.000		1 Dokumen	47.250.000
		8	**01**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**5 Dokumen**	**262.500.000**		**5 Dokumen**	**275.625.000**
		8	01	01	207	00005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	87.500.000		3 unit	91.875.000
		8	01	01	207	00006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	95.000.000		5 unit	99.750.000

		8	01	01	207	00008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3 Unit	45.000.000		3 Unit	47.250.000
		8	01	01	207	00009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-		1 unit	-
		8	01	01	207	00010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	35.000.000		2 unit	36.750.000
		8	**01**	**01**	**208**		**Penyediaa Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**3 Dokumen**	**30.000.000**		**3 Dokumen**	**31.500.000**
		8	01	01	208	00001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	-		1 Laporan	-

		8	01	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000		1 Laporan	31.500.000
	Tidak ada lagi/ harus dipindahkan dananya	8	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-		-	-
		8	**01**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**5 Laporan**	**46.000.000**		**5 Laporan**	**48.300.000**

		8	01	01	209	00001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	34.000.000		1 Unit	35.700.000
		8	01	01	209	00006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	12.000.000		4 Unit	12.600.000
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat								**Lama Harapan Sekolah**	13,50			14,00%	
								Rata-rata Lama Sekolah	9,00%			9,00%	
	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan serta Partisipasi							**Tingkat pemahaman Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan**	90,00%			90,00%	

	Masyarakat dalam Pemilu						**Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu**	75,77%			75,77%	
Meningkatnya Kesadaran Cinta Tanah Air dan Bela Negara	**Meningkatnya Pemahaman Pelaksanaan Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	8	01	02			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase Pemahaman Pelaksanaan Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	88,50%	**1.389.131.607**	**PAD**	88,50%	**1.458.588.187**
	Terciptanya Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8	01	02	201		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Jumlah Dokumen Pelaksanaan kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4 Dokumen	**1.389.131.607**		4 Dokumen	**1.458.588.187**

		8	01	02	201	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 (Dua) Instansi vertikal	290.000.000		2 (Dua) Instansi vertikal	304.500.000
		8	01	02	201	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	267.000.000		445 Orang	280.350.000

		8	01	02	201	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	75.500.000		1 Laporan	79.275.000

		8	01	02	201	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	5 Keluarga	32.500.000		5 Keluarga	34.125.000

		8	01	02	201	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	80.000.000		1 Dokumen	84.000.000
		8	01	02	201	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	70 Orang	519.000.000		70 Orang	544.950.000
		8	01	02	201	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan Kepada Purapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	50.131.607		1 Dokumen	52.638.187
		8	01	02	201	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	40.000.000		1 Dokumen	42.000.000
		8	01	02	201	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	70 Orang	35.000.000		70 Orang	36.750.000

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, Pileg dan Pilkada	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, Pileg dan Pilkada	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Pileg dan Pilkada	75,77%	1.468.975.364	PAD	75,77%	1.542.424.132

	Terciptanya kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	**8**	**0 1**	**0 3**	**2 0 1**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**10 Dokumen**	**1.468.975.364**		**10 Dokumen**	**1.542.424.132**

		8	1	03	201	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	129.844 Orang	919.425.364		129.844 Orang	965.396.632

		8	01	03	201	0004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	125 Orang	284.350.000		125 Orang	298.567.500

		8	01	03	201	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9 Laporan	145.200.000		9 Laporan	152.460.000
		8	01	03	201	0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Dokumen	120.000.000		1 Dokumen	126.000.000

Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan							**Indek Pembangunan Pemuda**	85%			87%	
	Meningkatkan Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dan berdaya guna serta Pembinaan Ketahanan Sosial dan Budaya						**Tingkat Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan**	50,95%			60,00%	
							Indek Kurukunan Umat beragama	100			100	
Meningkatnya Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dan berdaya guna di Kabupaten Karimun	Meningkatnya Peran dan Fungsi Keberadaan Ormas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat	**8**	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Terdatanya Organisasi Kemasyarakatn yang aktif dan berdayaguna di Kabupaten Karimun**	**75,76%**	**630.276.000**	**PAD**	**75,76%**	**661.789.800**

	Terciptanya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**8**	**01**	**04**	**201**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Jumlah dokumen Pembinaan Kepada Ormas, LSM dan OKP**	**3 Dokumen**	**630.276.000**		**3 Dokumen**	**661.789.800**
		8	01	04	201	0003	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5 Ormas	330.000.000		5 Ormas	346.500.000

		8	01	04	201	0004	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	65 Orang	200.000.000		70 Orang	210.000.000
		8	01	04	201	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	100.276.000		1 Laporan	105.289.800

Meningkatnya Penanganan antisipasi konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya		**8**	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Penanganan antisipasi konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya**	**100,00 %**	**269.281.597**	**PAD**	**100,00 %**	**282.745.677**
	Terciptanya Kebijakan Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya	**8**	**01**	**05**	**201**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Jumlah Dokumen siltaturahmi dan interaksi dialog antisipasi konflik**	**6 Dokumen**	**269.281.597**		**6 Dokumen**	**282.745.677**

		8	0 1	0 5	2 0 1	0 0 0 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	181.281.597		100 Orang	190.345.677

		8	0 1	0 5	2 0 1	0 0 0 6	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	88.000.000		1 Laporan	92.400.000	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemandirian Daerah								**Meningkatnya Investasi Daerah**	15,20%			16,00%	
	Meningkatkan Sinergitas dan Kewaspadaan Dini Masyarakat Terhadap Konflik Sosial							**Persentase Penanganan Konflik Sosial**	100%			100%	

Meningkatkan Sinergisitas Kewaspadaan Dini Masyarakat Terhadap Konflik Sosial	Meningkatnya Sinergisitas Kewaspadaan Dini Masyarkat Terhadap Konflik Sosial	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Pencegahan Dini Potensi Konflik	100%	545.500.000	PAD	100%	472.290.000
	Terlaksananya Koordinasi Kewaspadaan Dini Masyarakat Terhadap Konflik Sosial di Daerah	8	01	06	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Antispasi Potensi Konflik	4 Dokumen	545.500.000		4 Dokumen	472.290.000

		8	01	06	201	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 orang	50.000.000		3 Orang	52.500.000

		8	01	06	201	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	290.300.000		200 Orang	304.815.000

		8	01	06	201	00005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	109.500.000		1 Laporan	114.975.000

		8	01	06	201	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	95.700.000		1 Dokumen	-
							JUMLAH PAGU ANGGARAN			**8.485.948.607**			**8.809.761.037**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARIMUN

Drs. ZIFRIDIN, M.Si
Pembinan Utama Muda
NIP, 196809011988101001

BAB IV
PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun tahun 2025 yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintergrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja(RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun tahun 2025 merupakan dokumen perencanan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan daerah tahun 2025

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun tahun 2025 sudah mengacu kepada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun tahun 2021-2026, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun dalam pelaksanaan program dan kegiatan , serta belum seluruhnya dapat mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenanganBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun tahun yang merupakan salah satu OPD yang baru berdiri sendiri di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karimun. Oleh karena itu sangat diharapkan adanya dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun tahun 2025 ini dibuat kiranya dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun.

Tanjung Balai Karimun, Maret 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARIMUN

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs.ZIFRIDIN, M.Si
Pembinan Utama Muda
NIP. 196809011988101001